BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Rencana Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022.

Pasal 3

Sistematika Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2022

DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

1. Dinas Pendidikan

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan untuk periode satu tahun, yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis periode 2016–2021 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada Rencana Kerja tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja periode 2022 juga direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai dengan yang dirumuskan pada Renstra 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan untuk periode kurun waktu selama 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya yang mengatur lebih lanjut bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui proses dan tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;

4) Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
6) Penetapan.

Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas. Proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Pendidikan 2021–2026 yang merupakan tahun awal pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dalam mendukung visi misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan hasil musrenbang Kabupaten yang telah dilaksanakan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi tersebut didalam rencana strategis kurun waktu tahun 2021–2026 yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis" dengan definisi sebagai berikut:

1	**Maju**	o Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
		o Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
2	**Mandiri**	o Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
		o Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
3	**Agamis**	Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten BanjarTahun Anggaran 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 adalah:

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan untuk tahun 2022;
b. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

BAB III. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021, Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang mendukung visi Pemerintah Daerah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah yaitu:

1. **Sejahtera;** Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
2. **Barokah;** Barokah yang dimaksud adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Sesuai dengan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 misi selama periode 5 tahun adalah:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan amanah**.**

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar pada Tahun 2020 melaksanakan 1 urusan, 9 program, dan 78 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rurin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.1.5. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Pembangunan Gedung Sekolah
- Penambahn Ruang Guru Seokolah
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Pengadaan Meubeler Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SKB)

- Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK Reguler SKB)
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK regular SKB)
- Penunjang Lainnya (DAK Reguler SKB)

2.1.6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Pembangunan Gedung Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- Penambahan Ruang Guru Sekolah
- Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir
- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
- Pengadaan Meubeler Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
- Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/SDLB dan SMP/MTs
- Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
- Penyelenggaraan Dana BOS SD dan SMP
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Pembangunan Ruang Ibadah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SMP)
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SMP)
- Penunjang Lainnnya (DAK Reguler)
- Penunjang Lainnya (Luncuran DAK)
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Luncuran DAK)
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler SD)

- Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK Reguler SMP)
- Penunjang Lannya (DAK Reguler SMP)
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK)
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Luncuran DAK)
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SD)
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SD)
- Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SD)
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Luncuran DAK)
- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler SMP)

2.1.7. Program Pendidikan Non Formal

- Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
- Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal.
- Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (DAK Non Fisik)

2.1.8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.1.9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
- Pembinaan Komite Sekolah
- Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Pengukuran Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
Tahun 2020 berdasarkan revisi perubahan Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Pengetahuan Baca Tulis Al-Qu'an peserta didik sejak dini	Persentase Peserta Didik yang lulus Baca Tulis Al-Qur'an	98,00	99,75
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	57.89	59.06
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,90	12.44
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,68	7,35
	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,24	0,46
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,30	1.72
	Angka Kelulusan Siswa SD/MI	99.92	99,26
	Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs	99,84	99.77
	Rata-rata UN SD/MI	60,50	UN ditiadakan
	Rata-rata UN SMP/MTs	54,30	
	Angka Melek Huruf	100	98.38

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020: Rp. 144.670.268.602,-, sementara untuk Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 sebesar: Rp. 119.526.645.643. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terselenggaranya pelayanan administrasi/teknis perkantoran (Bulan)	60	12		12	100	12	36	85
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah instansi/sekolah terlayani	99	99		99	100	99	99	100
			06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kend yg terbayar pajak	126	126		126	100	126	126	100
			07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah instansi/sekolah yg terlayani	99	99		99	100	99	99	100
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terlayaninya jasa kebersihan kantor	60	12		12	100	12	36	100
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	12		12	100	12	36	100
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	12		12	100	12	36	100
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	12		12	100	12	36	85
			17	Penyediaan Makanan dan	Tersedianya								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
				Minuman	makanan dan minuman	55	11		11	100	11	33	85
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	12	12	12	100	12	36	85
			19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	65	13	13	13	100	13	39	65
01	01	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya sarana dan prasarana kondisi baik	60	12	12	12	100	12	36	100
			09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	60	12	12	12	100	12	36	80
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	12	12	12	100	12	36	80
			23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan mobil jabatan	60	12	12	12	100	12	36	60
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaa kendaraan dinas	60	12	12	12	100	12	36	60
			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	12	12	12	100	12	36	75
01	01	05		**Program Peningkatan**	Persentase								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
				Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
			03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	57	100	14	14	100	13	27	47,37
01	01	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Ketepatan waktu laporan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	50	10	10	10	100	10	30	80
			04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	5	1	1	1	100	1	3	80
01	01	15		**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Persentase anak 4-6 tahun yang trlayani Pendidikan Anak Usia Dini	80	65	70	70	100	75	71,95	89.94
			01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah kebutuhan gedung yang terpenuhi	16	3	10	10	100	13	12	75
			18	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa	Jlh pengadaan alat peraga	35	33	1	1	100	1	34	97.14
			19	Pengadaan Meubeler Sekolah	Jlh pengadaan meubeler sekolah	50	10	10	10	100	10	30	60
			45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah rehabilitasi ruang kelas sekolah	25	5	5	5	100	5	10	40
			67	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	Jumlah PAUD Negeri yang mendapat BOP	24	3	3	3	100	1	6	75

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
01	01	16		**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang terlayani pendidikan dasar**	59,976	51,810	54,400	54.400	100	57.120	54.400	90.70
			02	Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	15	4	2	2	100	3	9	60
			03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah penambahan ruang kelas sekolah	70	26	17	17	100	17	50	71.43
			04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Jumlah sekolah yang dilengkapi dengan ruang guru	20	4	4	4	100	4	12	60
			05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Terealisasinya pembangunan Laboratorium dan ruang keterampilan	0	0	2	2	100	4	2	100
			09	Pembangunan Taman, Lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	74	19	12	12	100	12	33	50
			14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sanitary yang dibangun	10	1	1	1	100	6	2	20
			19	Pengadaan Meubeler sekolah	Jumlah pengadaan meubeler sekolah	1836	540	540	540	100	252	1332	72.55
			20	Pengadaan perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan	0	0	1	1	100	0	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
					sekolah								
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, penjaga	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik	230 **(35 bh)**	9	7	7	100	7	23	65.71
			41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	362	149	71	71	100	71	220	60.77
			66	Penyediaan dana pengembangan sekolah utk SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah sekolah yang memperoleh dana pengembangan sekolah	85 sekolah	85	85	85	100	85	85	100
			70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pengembangan diri	4.860	3.500	3312	3312	1000	3.996	3.312	20
			76	Penyelenggaraan Akreditasi sekolah dasar	Jumlah sekolah dasar yang terakreditasi	60	100	40	0	0	50	200	200
			82	Pengadaan Alat Praktik dan praga siswa (DAK Reguler SMP)	Jumlah pengadaan alat praktik siswa	0	0	1	1	100	0	1	100
			93	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SD)	Jumlah Penambahan Ruang Kelas	0	0	11	11	100	0	11	100
			94	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK Reguler SD)	Jumlah sekolah yang direhabilitasi	0	0	34	34	100	0	34	100
			97	Pengadaan perlengkapan sekolah (DAK Reguler SMP)	Jumlah perlengkapan sekolah	0	0	1	1	100	0	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
			98	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SD)	Jumlah pengadaan buku koleksi perpustakaan	0	0	39	39	100	0	62	100
			99	Pembangunan Air bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)	Jumlah Pembangunan Jamban/WC beserta sanitasinya untuk siswa dan guru SD beserta Perabotannya	0	0	3	3	100	0	3	100
			100	Pembangunan Gedung Sekolah (DAK Reguler SMP)	Jumlah kebutuhan gedung yang terpenuhi	0	0	2	2	100	0	3	100
			103	Rehabilitasi Sedang/berat sarana air bersih dan sanitary (DAK Reguler SD)	Jumlah Rehabilitasi Jamban/WC beserta Sanitasinya untuk siswa dan Guru SD	0	0	25	25	100	0	25	100
			104	Rehabilitasi Sedang/berat sarana air bersih dan sanitary (DAK Reguler SMP)	Jumlah Sanitari yang direhabilitasi	0	0	1	1	100	0	1	100
			105	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK Reguler SMP)	Jumlah sekolah yang direhabilitasi	0	0	10	10	100	0	10	100
			106	Pembangunan Air bersih dan Sanitary (DAK Reguler SMP)	Jumlah Penambahan Sarna Jamban dan Sanitasi	0	0	1	1	100	0	1	100
			107	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SKB)	Jumlah Penambahan	0	0	4	4	100	0	4	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
					Ruang Kelas								
			108	Penunjang Lainnya (DAK Reguler)	Jumlah Data yang Tersedia	0	0	16	16	100	0	16	100
			102	Penyelenggaraan Dana BOS SD dan SMP	Jumlah sekolah yang memperoleh BOS	0	0	420	420	100	420	420	100
01	01	18		**Program Pendidikan Non Formal**	Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan kecakapan hidup	90	20	80	30	37.50	80	70	77.77
			02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga yang mendapat bantuan	100	75	80.2	80	99.75	82.78	80	80
			04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan keaksaraan	70	60	65	65	100	68	65	92.86
			09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Persentase kelompok belajar yg aktif	95	90	93	90	96.77	94	90	94.74
			14	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SKB)	Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan	0	0	1	1	100	0	1	100
01	01	20		**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga**	Prosentase guru yang memenuhi	60	60	60	58	96.67	60	60	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)
				Kependidikan	persyaratan kompetensi								
			02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik yang mengikuti uji kompetensi	1.346	1.330	846	1.380	174.94	1.046	1.380	102.53
			07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah guru yang mengikuti perkuliahan	0	71	11	11	100	0	93	100
			08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Sekolah yang mengikuti pelatihan	0	0	4	4	100	0	5	100
01	01	22		**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	Jumlah kegiatan penunjang manajemen layanan pendidikan	25	5	5	5	100	5	15	60
			02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah pelaksanaan event pameran pembangunan	5	1	1	1	100	1	3	60
			06	Pembinaan Komite sekolah	Jumlah komite sekolah yang dibina	125	125	125	0	0	125	125	100
			07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jenis data pendidikan yang tersedia	15	3	3	3	100	3	9	60
			09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah data	15	3	3	3	100	3	9	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tahun terakhir periode Renstra tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dari parameter, yakni (1) berdasarkan tingkat Standar Pelayanan Minimal (SPM), (2) berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Namun dalam perjalanan pada kurun waktu tahun 2019 hingga 2021 kinerja pelayanan SKPD terdampak akibat adanya wabah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua pelaksanaan kegiatan termasuk pada kegiatan pendidikan yang diatur dengan penerapan protokol kesehatan dan adanya refocusing pendanaan yang disesuaikan dalam rangka menanggulangi wabah Covid-19, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat mencapai target yang diharapkan.

Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Misi 1 "Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama"**

Untuk Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an peserta didik.

Sasaran di atas dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan pengetahuan baca tulis Al Qur'an peserta didik.

Indikator kinerja keberhasilan sasaran di atas ada 1 program dan 1 kegiatan. Capaian kinerja sasaran ini adalah 101,78 %. (kategori Berhasil).

Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan:

- ✓ *Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs.*

Pada kegiatan ini rencana target kinerjanya adalah Jumlah sekolah yang memperoleh dana pengembangan sekolah sebanyak 464. Di dalamnya terdapat sub kegiatan Pengembangan kurikulum muatan lokal. Untuk target kinerja 464 sekolah tercapai 359 Sekolah Dasar (SD) dan 66 Sekolah Menengah Pertama (SMP) jadi total sekolah yang memperoleh dana pengembangan sekolah ada sebanyak 425 sekolah.

- **Misi 2 "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial"**

Untuk Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan.

Indikator kinerja keberhasilan sasaran di atas ada 5 program dan sebanyak 43 kegiatan. Capaian kinerja sasaran ini adalah:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 93,47% (kategori Cukup Berhasil).
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 96.94% (kategori Cukup Berhasil)
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPBL 99,34% (kategori Cukup Berhasil)
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB 99,89% (kategori Cukup Berhasil)
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB 96,04% (kategori Cukup Berhasil)
6. Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI/SDLB 91,66% (kategori Cukup Berhasil)
7. Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB 57,33% (kategori Kurang Berhasil)
8. Angka rata-rata lama sekolah 95,70% (kategori Cukup Berhasil)

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2016-2021 Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran di atas adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non-Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa
3. Pengadaan Meubeler Sekolah
4. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
5. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

3. Penambahan Ruang Guru Sekolah
4. Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah
5. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Dan Fasilitas Parkir
6. Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary
7. Pengadaan Meubeler Sekolah
8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
11. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/SDLB dan SMP/MTs
12. Pembinaan MInat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa
13. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
14. Penyelenggaraan Dana Bos
15. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
16. Pembangunan Ruang Ibadah
17. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary (DAK Reguler SD)
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary (DAK Reguler SMP)
20. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SMP)
21. Penunjang Lainnya (DAK reguler)
22. Penunjang Lainnya (Luncuran DAK)
23. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Luncuran DAK)
24. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler SD)
25. Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK Reguler SMP)
26. Penunjang Lainnya (DAK Reguler SMP)
27. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK)
28. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Luncuran DAK)
29. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SD)
30. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SD)
31. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SD)
32. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Luncuran DAK)
33. Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary (DAK Reguler SD)
34. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler SMP)

Program Pendidikan Non-Formal dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non-Formal
2. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
3. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non-Formal
4. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non-Formal (DAK Non-Formal)

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
2. Pembinaan Komite Sekolah
3. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Secara keseluruhan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya indikator yang tercapai, walaupun ada beberapa yang belum tercapai.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
	Indikator Kinerja SKPD											
1	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an			94.98	96,00	98,00	98,00	103,19	99.75	104,00	-	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB			90.20	92,00	93,00	94,00	98,24	90.15	99,00	98,82	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB			100.00	101,50	101,00	100,00	104,20	99.89	100,00	100,00	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB			59.75	67,86	69,00	70,06	96,89	68.55	97,50	75,31	
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB			80.64	92,15	92,00	92,90	97,25	88.94	98,00	87,09	
6	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI/SDLB			0.25	0,25	0,24	0,23	105,00	0.46	100,00	0,25	
7	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs/SMPLB			0.84	0,32	0,30	0,28	91,38	1.72	100,00	0,32	
8	Angka rata-rata lama sekolah			7.07	7,58	7,68	7,78	96,17	7.35	97,50	7,35	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD			68.12	69,00	70,00	71,00	95,41	65.43	97,00	65,43	

Tataran Pelaksana Kebijakan - Urusan Pemerintahan				Tahun			Ket
Indikator Kinerja Kunci (IKK)			satuan	2019	2020	2021	
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	67,86	53.95		indikator berubah dari 4-6 menjadi 5-6 utk tahun 2020.
2		Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	%	0	37,50		
3		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	0	27.67		
4		Penduduk yang berusia> 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,57	98.58		
5		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,26	90.15		
6		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	64,74	68.55		
7		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,17	0.05		
8		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0,34	0.13		
9		Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	83,82	90.29		
10		Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%		99.70		
11		Persentase SD dan SMP Terakreditasi	%	0	97.57 /98.61		
12		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,72	97.41		
13		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	96,59	70.69		
14		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,64	n/a		
15		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0	1,21		

2.2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pendidikan memiliki lingkup pelayanan yang luas. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pendidikan mengemban fungsi sebagai perumus kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati, pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dasar, menengah, pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Permasalahan yang masih ada di masyarakat sebagai isu penting yang perlu diperhatikan adalah:

- Belum meratanya akses karena keterbatasan jumlah dan kualitas sarana prasarana sekolah, serta SDM PTK yang belum merata.
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menyekolahkan putra dan putrinya sampai jenjang pendidikan menengah akibat dampak sosial ekonomi yakni masih tingginya angka kemiskinan.
- Adanya kearifan lokal yang berbasis religi, sehingga banyak masyarakat yang lebih dominan untuk menempuh pendidikan agama daripada menempuh pendidikan formal.
- Pemulihan ekonomi nasional yang melambat dan dampak krisis ekonomi global, berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dan sebagian orang tua dalam membiayai pendidikan.
- Munculnya bencana/wabah secara global berupa penyebaran virus yang mematikan (Corona Disease Virus 2019) Covid-19 yang juga menyebar ke negara Indonesia, menyebabkan terganggunya sendi-sendi kehidupan normal masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran, was-was dan takut akan terpapar virus ini yang pada akhirnya turut membatasi dinamika penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan pendidikan adalah:

- Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah;
- Menguatnya komitmen pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD;

- Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang muncul seiring dengan percepatan revolusi industri 4.0 (four point zero) dan dampak positif pengaruh dari reaksi atas pandemi Covid-19.

2.3 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Pendidikan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021–2026 serta urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, maka fungsi dan tugas Dinas Pendidikan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu "Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia" pada sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Daya Saing Masyarakat melalui Pengembangan Sistem Pendidikan, Pelayanan Pendidikan, dan ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan.

Rancangan awal rencana kerja 2022 ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar
SKPD: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

No.	Rancangan Awal					Hasil Analisa					
	Prioritas Daerah	Fokus	Program Prioritas	Kebijakan	Lokasi	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja Program /Kegiatan	Target (%)	Kebutuhan Dana (000)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya RRLS dan HLS	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum	▪ Adanya regulasi pendidikan 1 Tahun pra SD ▪ Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, C, kejasama dg Ponpes, PKBM dan Sekolah Terbuka (SMP Terbuka)	Disdik	**Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota**		Terpenuhi Penunjang Urusan Pemda	100	315.219.107.168	
						Program Pengelolaan Pendidikan **Pengelolaan Pendidikan SD:**		□ APS SD/MI	99,64	13.480.357.000	
								□ APK SD/MI	100		
								□ APK SD/MI	99,82		
						1 Penambahan Ruang Kelas Baru	Kec. Gambu, Kec. Sambung Makmur, Kec. Pengaron, Kec. Astambul, Kec. S. Tabuk, Kec. Aluh-Aluh, Kec. Tatah Makmur, Kec. Simp. Empat, Kec. K. Hanyar, Kec. S. Pinang, Kec. Cintapuri	□			
						2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
						3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
						4 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					
						5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					
						6 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
						7 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					

						8	Pengadaan Mebel Sekolah				
						9	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				
					Disdik	10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Disdik			
						Pengelolaan Pendidikan SMP:			□ APS SMP/MTs	87,13	11.319.148.000
									□ APK SMP/MTs	87,09	
									□ APM SMP/MTs	75,31	
					Kec. Martapura, Kec. Gambut, Kec. K. Hanyar, Kec. S. Tabuk, Kec. Mataraman	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kec. Martapura, Kec. Gambut, Kec. K. Hanyar, Kec. S. Tabuk, Kec. Mataraman	□		
						2	Pembangunan Laboratorium				
						3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
						4	Pembangunan Fasilitas Parkir				
						5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
						6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
						7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
						8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
						9	Pengadaan Mebel Sekolah				
						10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				

						11	Pengadaan Perlengkapan Siswa				
						12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				
						13	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				
					Disdik	14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Disdik			
						Pengelolaan PAUD:			Persentase Anak Usia 4-6 Thn yang terlayani PAUD	65	3.194.245.500
									APK PAUD		
					Kec. S. Tabuk, Kec. K. Hanyar, Kec. Mataraman, Kec. Aranio	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kec. S. Tabuk, Kec. K. Hanyar, Kec. Mataraman, Kec. Aranio			
						2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
						3	Pengadaan Mebel PAUD				
						4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				
						5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				
						6	Pengelolaan Dana BOP PAUD				
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Persentase kelompok belajar yang aktif		4.593.049.800
					Kab. Banjar, SKB	1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Banjar, SKB			
						3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
						PROGRAM PENDIDIK DAN			Rasio Guru -	12,89	

						TENAGA KEPENDIDIKAN			Siswa SD		3.253.418.400	
									Rasio Guru - Siswa SMP	10,48		
					Kab. Banjar		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Banjar				

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Pendidikan didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada forum SKPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan selaku SKPD pemangku pelaksana pembangunan bidang pendidikan baik dari kelompok masyarakat, maupun melalui lembaga perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Banjar. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu direncanakan.

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
SKPD: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

A. Musrenbang Tahun 2021

Nama Pengusul	Usulan	Permasalahan	Kecamatan	Status
Helmiyadi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Perlunya Rehab Atap SDN Kalaan karena bocor.	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Najmianor	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Ruang Kelas SD kurang.	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD
M. Rofiq	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Kurangnya Alat Peraga Edukasi Luar PAUD yang dibutuhkan.	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Drs. Sahar	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Diperlukannya Sarana APE Luar PAUD	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Asmadi	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rumah Layak Huni bagi Tenaga Guru SD di Desa	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Alfahmi	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Perlunya pembangunan pagar SD dan Pengadaan Tandon air.	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD
Mustafa, S.AP	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Perlunya Alat Permainan Edukatif Luar dilengkapi.	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Mustafa, S.AP	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rumah Dinas tidak layak huni/mengalami kerusakan.	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD
Hasan Basri	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Perlunya Pagar Sekolah dan WC pada SDN Benua Riam.	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Alpiansyah, SHI	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Perlunya APE Luar PAUD untuk dilengkapi dan ditingkatkan.	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Subliansyah	Pembangunan Laboratorium SMP	Perlunya Laboratorium di SMP Rantau Bujur.	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Subliansyah	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Perlunya APE Luar PAUD	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Subliansyah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Perlunya APE Dalam PAUD.	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Subliansyah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah PAUD	Perlunya Pagar Sekolah PAUD	Aranio	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Muhtar	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Halaman masih berupa pasir dan dataran rendah jika cuaca hujan terendam air	Kertak Hanyar	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
M. Syairazi	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	(Pengurukan Halaman SDN 1 Tambak SIrang Baru) terbatas nya Penggunaan prioritas Dana Desa untuk Kegiatan pembangunan Sekolah Negeri maupun Swasta	Gambut	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
H. Hamidan Noor	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Halaman Banjir	Gambut	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
Ahmad, SE	Pengadaan Mebeulair SD	Penambahan meja kursi (200 unit)	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Yuda Riswanor	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Peningkatan halaman SDN	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Sahrani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	perbaikan halaman SD Sungai Alat 1	Astambul	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Zainal Abidin	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	pemasangan vaving blok halaman SDN Kaliukan 2 (43x 8 m)	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Jasmani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	sering banjir, Volume 1500 M2, 1.6 Milliar	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Yuda Riswanor	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Ruangan Mengalami kerusakan, Ruangan Kelas, Kantor, Velafon dna fentilasi, anggaran 400 Juta	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Suli	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rusak berat 3 ruang kelas	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Murjani	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab berat SDN Banua Anyar Ds 1 /Rt.01/500 juta	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Murjani	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SD	Pembangunan gedung perpustakaan SDN Banua Anyar Ds 1/Rt.01/300 juta	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Ihsan	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rehab atap rumah guru SD sebanyak 3 unit (2 Unit di RT. 02, 1 Unit di RT. 03). Perkiraan anggaran 60 juta	Paramasan	Diteruskan ke Forum SKPD

Ihsan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Paving blok halaman SD, P = 15 m, L = 20 m. Perkiraan anggaran 200 juta	Paramasan	Diteruskan ke Forum SKPD
Jamhur	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Volume 244 M2, anggaran 60.000.000	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Jamhur	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung Paud yang ada sudah Rusak, 8x6 M2. anggaran 200.000.000	Astambul	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Nur Rasyid, S.Ag, MM	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Halaman SD yang rusak akibat terendam banjir dan perlu perbaikan (Rp.200.000.000,-)	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Mukti Ali	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Halaman SD yang rendah dari jalan raya rentan tergenang air pada saat musim hujan sehingga berpengaruh pada KBM khususnya kegiatan yang memerlukan sarana halaman sekolah untuk kegiatan pembelajaran (Rp.150.000.000,-)	Astambul	Diteruskan ke Forum SKPD
Salamat	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (WC)	Rehab Sarana Air Bersih dan Sanitasi Volumie 4x3 m Pago Rp.50.000.000,-	Beruntung Baru	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
ABD. Rasyid	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Halaman SDN Tambak Sirang Darat, sangat sempit, oleh karena itu perlu perlebaran Halaman Sekolah tersebut, agar memudahkan guru dan siswa.	Gambut	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
Jailani	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Kekuranga Kelas Untuk Siswa dan Siswi 5 x 30 meter 3 Volume 3 kelas pagu Rp. 250 Juta	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
Murhan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	karena halaman sekolah mengalami penurunan fungsi/ halaman sering terendan air. 2 Sekolahan butuh perbaikan halaman	Kertak Hanyar	Diteruskan ke Forum SKPD
Ajidin Nor, M.MP.d	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan pagar sekolah SDN Tambak Padi 1 volume 130 m pagu Rp 130 000 000,-	Beruntung Baru	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Ajidin Nor, M.MP.d	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan pagar sekolah SDN Tambak Padi II Volume 300 m Pagu Rp.300.000.000,-	Beruntung Baru	Diteruskan ke Forum SKPD

Nurbayati, S.Pd	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	seringkali jika intensitas hujan yang cukup tinggi maka akan terjadi genangan dihalaman sekolah dikarenakan halaman sekolah tersebut lebih rendah dari bahu jalan, sehingga menghambat proses belajar mengajar.	Kertak Hanyar	Diteruskan ke Forum SKPD
Mas'''''''ud	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Karena keadaan sekolah didaerah pesisir maka sering kena banjir air pasang dan sebagian sekolah sudah tidak layak/perlu perawatan sebanyak 3 buah, pagu anggaran 250.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
Mas'''''''ud	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Paud anggrek telah berjalan beberapa tahun, tapi sarana prasarana bermain belum ada dan sangat dibutuhkan untuk anak-anak, sebanyak 3 buah pagu Rp. 60.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Sarbani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pamasangan bata dan uruqan SDN Handil Purai 1 volume 15 x 15 m pagu Rp 400 000 000,-	Beruntung Baru	Diteruskan ke Forum SKPD
Sarbani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pemasangan bata dan uruqan SDN Handil Purai 2 volume 15 x 15 m pagu Rp 400 000 000,-	Beruntung Baru	Diteruskan ke Forum SKPD
Ahmad Husin	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	tidak mempunyai halaman,selalu tergenang air sehingga aktivitas murid dan guru tidak efektif	Gambut	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
Syahwani	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab ruang kelas Volume 8 x7 (4 ruang) Pagu Rp. 200.000.000,-	Beruntung Baru	Diteruskan ke Forum SKPD
Hasan Basri	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Perlunya Rumah Dinas Guru SD yang layak huni	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD
Subliansyah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SMP	Perlunya rumah dinas Guru SMP yang layah huni.	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD
Subliansyah	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Perlunya pembangunan Paving halaman sekolah.	Aranio	Diteruskan ke Forum SKPD

Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	sering terjadi banjir di halaman Sekolah	Kertak Hanyar	Diteruskan ke Forum SKPD
Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	belum mempunyai taman bermain	Kertak Hanyar	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	sering terjadi banjir di halaman sekolah	Kertak Hanyar	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembuatan Pagar SMPN Simpang Empat 1 Unit Pagu Rp.50.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembuatan Pagar SDN Rantau Bujur 1 Unit Pagu Rp. 80.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Asbullah	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Karena Guru PAUD didaerah kami tidak mempunyai ruang guru	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Asbullah	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU SMP	Karena Ruang Kepala Sekolah SMPN 2 Aluh-Aluh sudah lapuk dan sering kebanjiran kena air pasang	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Mas''udi	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	(PRORITAS 14 KECAMATAN) pengurukan SDN Dalam Pagar Ulu 2 Volume 20 x 20 meter Pagu Rp. 100.000.000,-	Martapura Timur	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Mas''udi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab Ruang kelas yang bangunannya sudah lama SDN dalam Pagar Ulu 1 dan 2. Volume 6 ruangan Pagu Rp. 150.000.000,-	Martapura Timur	Diteruskan ke Forum SKPD
Andani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan pagar SDN Kupang Rejo RT.04 panjang 100m	Sungai Pinang	Diteruskan ke Forum SKPD
Andani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Pembangunan pagar SMPN 1 Sungai Pinang Kupang Rejo RT.03 (400m)	Sungai Pinang	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Muhammad Usman	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab gedung SDN Rantau Bakula (3 bilik) Rp 100.000.000,-	Sungai Pinang	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Yamani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembuatan Pagar & Paving Blok SD 1 Paket Pagu. Rp.250.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Yamani	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab Gedung SD 1 Paket Rp.	Telaga	Diteruskan ke Forum SKPD

		250.000.000	Bauntung	
Drs. Edy Rifani	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab ringan SDN Rampah 7x8 m Pagu Rp. 20.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Drs. Edy Rifani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pemasangan Paving blok halaman SDN 1600 m Pagu Rp. 160.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Drs. Edy Rifani	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SMP	Rehap total rumah dinas sekolah 7x9 m Pagu Rp. 200.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Bahrudin, S.Pd	Pengadaan Perlengkapan Sekolah PAUD	Pembuatan pagar sekolah PAUD volume 7x8, pagu 50 juta	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
A. Basuki, S.AP	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tidak adanya kantor/ruang guru PAUD Volume: P: 3M L:3M Pagu: Rp. 70.000.000	Martapura	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
A. Basuki, S.AP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Tidak tersedianya taman bermain PAUD Volume: 1 Paket Pagu: Rp. 20.000.000	Martapura	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Fathurrahman, S.AP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pemasangan paving blok halaman SDN Akar Baru untuk meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar. Volume 1 paket Pagu Rp. 150.000.000,-	Martapura Timur	Diteruskan ke Forum SKPD
Drs. Edy Rifani	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembuatan Pagar PAUD Beton 132 m Pagu Rp. 66.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Jailani	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Belum Memiliki Bangunan PAUD 5 x 10 m (1 Unit) Pagu 200.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Jailani	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Belum Memiliki Bangunan perpustakaan dengan adanya Perpustakaan Memperluas Wawasan Ilmu Pengetahuan Bagi anak didik & Masyarakat 5 x 6 m (1 Unit)	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD

		Pagu 100.000.000		
Jailani	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (PAUD)	Pengadaan Jamban Sehat (150 buah untuk 150 KK)Untuk menjaga kesehatan masyarakatRT 01-02 & 032 x 3 meter 750,000,000 Pengadaan Sarana Air bersih (150 Buah tong air untuk 150 KK)Untuk menjaga kesehatan masyarakatRT 01-02 & 03isi 2.000 liter 375,000,000 Pengadaan Sumur Bor (3 Unit)Untuk menjaga kesehatan masyarakatRT 01-02 & 033 Unit 75,000,000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Muhammad	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Halaman Sekolah terlalu sempit untuk aktivitas Siswa dan siswi sehingga memerlukan perluasan dengan urugan rawa di sisa tanah sekitar sekolah.	Gambut	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
Jailani	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Menambahan Ruang Kelas SD Memberikan Kelayakan Pendidikan anak-anakRT 025 x 30 m (3 buah/ruang) 250,000,000 Rehab SDMemberikan Kelayakan Pendidikan anak-anakRT 025 x 30 m (1 Unit) 300,000,000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Jailani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembuatan Siring Halaman SD dan Pengisian 15 x 30 m2 Pagu 400 Juta	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
Jailani	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Sarana Prasaran Bermain PAUD dan Permainan Posyandu 5 Unit pagu 100 Juta	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Said Syeh	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	(PRIORITAS 17 (TUJUH BELAS) KECAMATAN) Rehabilitasi halaman sekolah SD (paving blok) , Volume 1 paket, Pagu Rp. 100.000.000,-	Martapura Timur	Diteruskan ke Forum SKPD
Zamrut, S.Pi	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (WC)	Lantai Teras Sekolah Rusak Parah Akibat Banjir	Mataraman	Diteruskan ke Forum SKPD

Syaifullah Effendi, S.AP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Pembuatan halaman paud,volume 5x7m,pagu 50 Juta	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Syaifullah Effendi, S.AP	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Untuk bermainnya murid-murid diluar ruangan,volume 3 buah.pagu Rp.22.950.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
H. A. Basuki, SE	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (PAUD)	Pembangunan Toilet Rp 100.000.000	Martapura	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Mas'''''''ud	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bertambahnya peserta didik, sehingga ruang kelas yang ada tidak dapat sepenuhnya dapat menampung anak-anak dan sarana prasarana bermain anak-anak belum memiliki, 4x6 m pagu Rp. 70.800.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Mas'''''''ud	Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa PAUD	masih minimnya buku dan alat tulis siswa bagi pendidikan paud, 300 eksampler, Rp. 7.500.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Mansur	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Kekurangan alat bermain bagi murid-murid karena PAUD masih baru, volume seluncuran,ayunan,kursi putar.dll pagu 20 Juta	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
H. Bajuri, SE	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	halaman sekolah SDN Bunipah 1, SDN Bunipah 2, dan SDN Bunipah 3 yang sering tenggelam karena air pasang surut. usulan SDN Bunipah 1 (Volume 31x13,5 M) dan Pagu Rp200.000.000,00. SDN Bunipah 2 (Volume 25x13,5 M dan Pagu Rp200.000.000,00). SDN Bunipah 3 (Volume 40x40 M dan Pagu Rp200.000.000,00).	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
Suroso	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan pagar SDN Pakutik RT.03 (panjang 100m) dan penataan paving blok (luas 2500m2)	Sungai Pinang	Diteruskan ke Forum SKPD
Suroso	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Pakutik RT.03 (3 unit)	Sungai Pinang	Diteruskan ke Forum SKPD

M. Lamri	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Perlunya Penambahan 1 Unit Gedung PAUD Baru di Lingkungan RT.02 Ukuran 6 x 8 M dengan Pagu Rp. 150.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
M. Lamri	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (WC)	Perlunya Rehab WC SDN Sungai Musang Volume 1 unit Ukuran 2 x 3 M Pagu Rp. 8.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
H. Muhammad Thoha	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	PEmbuatan Sarana dan prasarana Bermain Paud dan TK Volume :1 PAket Pagu : 1.000.000.000	Martapura	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Mas'''''''ud	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	belum memiliki pagar sekolah, dan belum memiliki mck, pagar panjang 80, tinggi 1,5 m. mck 2 buah, anggaran Rp. 120.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
Bahrudin, S.Pd	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Untuk pembangunan rumah guru PNS,volume 3 buah,pagu Rp.200.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Ahmadi	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Penambahan Ruang kelas Paud.Volume 6Mx3M..pagu Rp.250.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Ahmadi	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Penambahan ruang kelas SDN kuin besar 1.Volume 8Mx7M pagu Rp.300.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Ahmad Jazoli, S.Pd	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (WC)	Peninggian halam sekolah,volume 30m x 20m,pagu Rp.100.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
YUNIARTI, SE	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tambahan Bangunan TK/PAUD/TK AL-Qur`an Permasalahan : Kekurangan Ruang Belajar Pagu : Rp.50.000.000.- Volume : 4 Kelas Ukuran : Panjang 20 Lebar 20 m	Martapura	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Zamrut, S.Pi	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rusak Parah Akibat Banjar	Mataraman	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Arbain	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurukan halaman SDN Pematang Baru Volume panjang 18 m, Lebar 15 meter, Tinggi 1,5 meter Pagu Rp.500.000.000,-	Martapura Timur	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
M. Lamri	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan wc untuk sekolah madrasah,volume 2x4m,pagu Rp.10.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
Ahmadi	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengrapian lapangan sekolah untuk tercapainya lapangan yang relavan,volume 25 x 30 meter,pagu Rp.400.000.000	Aluh Aluh	Diteruskan ke Forum SKPD
Johansyah	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pagar Lanjutan dan Cat 60m x 1m Pagu Rp. 65.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Johansyah	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pagar SDN Lok Tanah 1 40m x 80m Pagu Rp. 90.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Johansyah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Paving SDN Lok Tanah 1 24m x 38m Pagu Rp. 1.300.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Johansyah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rumah Dinas SDN Lok Tanah 1 3m x 5m Pagu Rp. 75.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Johansyah	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	WC Murid SDN Lok Tanah 1 2m x 4m (2 Ruangan) Pagu Rp. 15.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Johansyah	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pagar SDN Lok Tanah 2 60m x 40m Pagu Rp. 70.0000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Johansyah	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab Bangunan SDN Lok Tanah 2 (3) Kelas Pagu Rp. 150.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Johansyah	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Plafon TPA Istiqomah 7m x 8m Pagu Rp. 150.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Drs. Edy Rifani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	pembuatan pagar paud beton 132 m Pagu Rp. 66.000.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD

Suwardi, S.Pd	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Penambahan ruang kelas baru di SDN Paramasan Bawah 1, 2 , 3 dan 4. Total 4 ruangan, Perkiraan anggaran 800 juta	Paramasan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Suwardi, S.Pd	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Pembangunan rumah dinas Guru SD, sebanyak 4 buah, perkiraan anggaran 400 juta	Paramasan	Diteruskan ke Forum SKPD
Suwardi, S.Pd	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan ruang guru PAUD, sebanyak 2 buah, perkiraan anggaran 200 juta	Paramasan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Ihsan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Pemasangan paving blok dihalaman PAUD, P = 4 m, L = 15 m. Perkiraan anggaran 70 juta	Paramasan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Ihsan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Pembangunan rumah dinas guru SD sebanyak 1 unit. Perkiraan anggaran 150 juta	Paramasan	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Sumur Bor	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Pagar Sekolah	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Musholla SMPN 1 Telaga Bauntung	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Urug Halaman Sekolah	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Kendaraan Dinas Kepala Sekolah 1 Unit	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP	Peralatan Olahraga	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP	Jaringan Internet	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD

Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Laboratorium SMP	Laboratorium Komputer	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	Ruang Multimedia	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	Ruang Keterampilan	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP	Ruang UKS	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	Ruang BK	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	Ruang OSIS	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Lapangan Bola Voli	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Lapangan Basket	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Ideham Khalik, SP, MP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Lapangan Atletik	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Siswaji	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Jarak rumah guru yang jauh	Pengarom	Diteruskan ke Forum SKPD
Bambang Jekti R, S.sos	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Pembangunan rumah guru SD, 2 unit. Perkiraan anggaran 300 juta	Paramasan	Diteruskan ke Forum SKPD
Hj. Erliana, S.AP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pemasangan paving blok untuk halaman sekolah SDN Pemangkih darat karena pada saat musim hujan halaman becek dan mengganggu aktivitas anak-anak belajar	Tatah Makmur	Diteruskan ke Forum SKPD

Iswan, SE. Sy	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SD	Rusaknya Ruang Guru SDN Tatah Layap 3 yang merupakan keperluan utama Sekolah, yang harus direhab berat dengan ukuran 10x10 meter. Diharapkan bisa diperbaiki.	Tatah Makmur	Diteruskan ke Forum SKPD
Akhmad Pauji, S.AP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Perbaikan pagar sekolah SDN Sungai Alang 2	Karang Intan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Akhmad Pauji, S.AP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengadaan pagar sekolah SDN Sungai Alang 1	Karang Intan	Diteruskan ke Forum SKPD
Akhmad Pauji, S.AP	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar (APE Outdoor) PAUD	Alat peraga outdoor yang ada kebanyakan sudah rusak	Karang Intan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Akhmad Pauji, S.AP	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	bangunan paud	Karang Intan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Selamat Udin	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU SMP	Karena SMP yang ada masih satu atap dengan SDN ABIRAU	Karang Intan	Diteruskan ke Forum SKPD
H.M. Arsyad, S.Pd, SH, MM	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Ada beberapa kelas ditingkat SD yang perlu direhap atau diperbaiki Dengan ukuran P 7 x L 7 sebanyak 4 Buah Biaya yang diperlukan -+ Rp. 300.000.000,-	Tatah Makmur	Diteruskan ke Forum SKPD
M. Syarwani, S.AP	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Rehab WC SDN Penyambaran II (Terdampak Banjir)	Karang Intan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
H. Adim Mansur	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Pengadaan Alat bermain TK/ PAUD	Sambung Makmur	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Marsuli	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Pembangunan Taman SLTPN 2 Sambung Makmur	Sambung Makmur	Diteruskan ke Forum SKPD
Marsuli	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	pembangunan gedung PAUD	Sambung Makmur	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Abd. Gani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	pembuatan pagar SDN Baliangin	Sambung Makmur	Diteruskan ke Forum SKPD
Amrullah, SE	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	pembangunan sekolah SD	Sambung Makmur	Diteruskan ke Forum SKPD
Amrullah, SE	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	pembangunan gedung paud desa Batu Tanam kecamatan Sambung	Sambung Makmur	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

		Makmur		
Zulkurnain	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Sarana Rusak	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
DJAMALUDIN, S.Sos MA	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Belum Lengkap Sarana dan Prasarana Bermain	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Masran	Pengadaan Mebeulair SD	Kekurangan Mebeulair	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Drs. Edy Rifani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pemavingan Halaman SDN Rampah P 40 M x L 40 M Pagu Rp. 337.600.000	Telaga Bauntung	Diteruskan ke Forum SKPD
Jamhur	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Rehab Pagar Sekolah	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Jaleha, SE	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurugan halaman Sekolah	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Suriadi,S.Pd	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Bangunan rusak	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Suriadi,S.Pd	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Bangunan Rusak	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Suriadi,S.Pd	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurugan Halaman Sekolah	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Apriani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurugan halaman untuk lapangan upacara, taman dan parkir	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Padeli	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Perlu pengurugan untuk lapangan	Sungai Tabuk	Diteruskan ke Forum SKPD
Nurul Aida	Pengadaan Mebeulair SD	Pengdaan Meubelair. Volume : 1 Paket. Pagu : Rp 100.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Nurul Aida	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan WC Guru dan Siswa(i). Volume : 4 Unit. Pagu : Rp 100.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD

Nurul Aida	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurukan Halaman Sekolah. Volume : 1 Paket. Pagu : Rp 150.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Zainal Aqli	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab Ruang Belajar. Volume : 1 Paket. Pagu : Rp 50.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Zainal Aqli	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Ruang Perpustakaan dan UKS. Volume : 1 Paket. Pagu : Rp 250.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Zainal Aqli	Pengadaan Mebeulair SD	Pengadaan Meubel Tahan Air. Volume : 75 Buah. Pagu : Rp 30.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Zainal Aqli	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembuatan Pagar Sekolah dan Pintu Gerbang. Volume : 50 Meter. Pagu : Rp. 75.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Zainal Aqli	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurukan Halaman Sekolah dengan Tanah dan Bata Pres. Volume : 200 Meter. Pagu : Rp 75.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Maliani	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehab Ruang Kelas. Volume : 1 Paket. Pagu : Rp 250.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Jalan Infeksi Irigasi. Volume : 3 Km. Pagu : Rp 7.500.000.000 Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Maliani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurukan Halaman Sekolah. Volume : 200 Meter. Pagu : Rp 150.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Maliani	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung Tk Negeri. Volume : 14 x 5. Pagu : Rp 200.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pendidikan.	Martapura Barat	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Sumardi, S.Sos	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	SIRING DAN URUG HALAMAN SDN KBU 1. VOLUME : 17 X 25 PAGU : 500.000.000. PENANGGUNG JAWAB : DINAS PENDIDIKAN	Martapura Barat	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumardi, S.Sos	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	SIRING DAN URUG HALAMAN SDN KBU 2. VOLUME : 500M2 PAGU : 500.000.000 PENANGGUNG JAWAB : DINAS PENDIDIKAN	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Kati	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehabilitasi SDN Galam Rabah 1	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Masrani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	PENGURUKAN HALAMAN SEKOLAH. VOLUME ; 1 PAKET. PAGU : 100.000.000.	Martapura Barat	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Afdul Wahab Sakra	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Pembangunan Perpustakaan SDN Galam Rabah 3	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Afdul Wahab Sakra	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah SDN Galam Rabah 3	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Afdul Wahab Sakra	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SD	Rehab ruangan kantor dan ruangan guru SDN Galam Rabah 3	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Afdul Wahab Sakra	Pengadaan Mebeulair SD	Pengadaan Meubelair SDN Galam Rabah 3	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehabilitasi ruang kelas SDN Cintapuri 1 (5 lokal)	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rehabilitasi rumah dinas guru	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehabilitasi ruangan kelas SDN Cintapuri 3 (5 lokal)	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurukan Halaman SDN Cintapuri 3 (100 meter persegi), Pagar 30 m dan WC 2 buah	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD

H. Suyitno, S.sos	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Pembangunan rumah guru dan kepala sekolah (3 lokal)	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Pembangunan kelas baru (1 lokal)	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Pengadaan Mebeulair SD	Pengadaan Mebeulair 1 set	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan pagar SDN Cintapuri 2 (30 m)	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Pembangunan rumah guru (2 lokal)	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurukan Halaman SDN Garis	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Suyitno, S.sos	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Pengadaan 5 buah Laptop dan 1 buah Genset	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Arsyad	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rehabilitasi Perumahan Guru 2 lokal	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Arsyad	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rehabilitasi SDN Simpang Lima 1 lokal	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Arsyad	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pengurukan jalan menuju ke SDN Simpang Lima (500 m)	Cintapuri Darussalam	Diteruskan ke Forum SKPD
Masrani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	PENGURUKAN BATU KORAL. VOLUME : 1 PAKET. PAGU : Rp 50.000.000. PENANGGUNG JAWAB : DINAS PENDIDIKAN	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD

Masrani	Pengadaan Mebeulair SMP	PENGADAAN MEJA DAN KURSI SISWA. VOLUME : 1 PAKET. PAGU : 43.750.000. PENANGGUNG JAWAB : DINAS PENDIDIKAN	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
Masrani	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	PEMBUATAN PAGAR SEKOLAH. VOLUME : 84 M. PAGU : Rp 84.000.000 PENANGGUNG JAWAB : DINAS PENDIDIKAN	Martapura Barat	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Salman	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sebagian Rusak Volume 3 Ruang Kelas Dana	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Salman	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Minimnya Ruang Kelas Volume 1 Ruang Kelas Dana	Simpang Empat	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
H. Salman	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Belum ada ruang Kantor Volume 1 Buah	Simpang Empat	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Supronie, SE	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	diperlukan Penambahan Ruang Kelas Volume 2 Buah	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Makmur	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Belimbing Lama (Volume 6x6 m2)	Sungai Pinang	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Hariyadi, s. sos	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rehab Perumahan Guru SDN Lok cantung 1 Unit	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
H. Hariyadi, s. sos	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Paving blok Halaman SDN Lok cantung 1 Paket	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Alipudin, S.sos	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Bata Press Halaman Sekolah Volume 48m x 18m = 768m²	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Alipudin, S.sos	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	arana Olah Raga (Lapangan Basket) Tempat Kegiatan Upacara volume 16m x 30m = 480M²	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Pahrul Hidayat, SE	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	pembuatan Pembuatan Pagar volume P;87 M t: 1.5 M , 1 Buah	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Thoha	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	pembuatan Paving blok Halaman SDN Paring Tali volume	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Rida Kaswanda	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Pembangunan Penambahan LOKAL SDN Tanah Intan 4 Ruangan Kelas volume 290 M3 , 4 Ruangan Kelas	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD

Hadariah, SP	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Penambahan Ruang KelasBaru Bertingkat volume 3 Ruang Kelas	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Artani, S.Pd	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru.Penjaga Sekolah SD	Rehab Perumahan Guru vokume 1 buah	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Artani, S.Pd	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Ruang kelas volume 3 Ruang Kelas	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
Muhammad Artani, S.Pd	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Pembangunan Musholla volume 1 buah	Simpang Empat	Diteruskan ke Forum SKPD
BAPPEDA Kab. Banjar	Beasiswa Pendidikan	Beasiswa peserta didik SMA dan SMA 60 Siswa	Seluruh Kecamatan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
PGRI KABUPATEN BANJAR	Hibah Organisasi Profesi Guru Kab. Banjar	Organisasi Profesi Guru PGRI Kabupaten Banjar sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya peningkatan Kompetensi guru banyak menemukan kendala dalam memfasilitasi anggota (guru) guna meningkatkan kompetensi keprofesian. Terkendala minimnya anggaran/dana yang hanya bersumber dari Iuaran anggota. Banyak program kegiatan yang disusun tidak dapat terealisasi dalam upaya peningkatan keprofesiaan.	Martapura	Diterima

B. Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Kecamatan	Koefisien	Rekomendasi SKPD	Status
1	MULKAN, S.Sos.I, MH.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah PAUD	Saat ini sertifikasi Guru Paud masih belum di realisasikan oleh pemerintah untuk itu salah satu harapan dari Guru-Guru Paud juga bisa di sertifikasi dan juga bantuan kesejahteraan dari Pemda bisa ditingkatkan melalui insentif daerah.	Seluruh Kecamatan	1 paket		Validasi Mitra Bappeda

2	MULKAN, S.Sos.I, MH.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah PAUD	Di wilayah RT 3 Desa Abirau tepatnya di Dusun Guntung Buluh terdapat 1 buah TK Al-Qur'an dengan nama TK AR Raudah keberadaannya sangat vital dalam hal pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Untuk wilayah tersebut tenaga pengajarnya saat ini berjumlah 2 orang, harapannya saat ini : Perlu penambahan guru pengajar sebanyak 1 orang Insentif dari Pemda dengan jumlah Rp 600.000 persemester hanya di dapat 1 orang aja. Harapannya agar bisa diberikan ke semua guru yang mengajar.	Karang Intan	1 paket		Validasi Mitra Bappeda
3	MUHAMMAD ZAINI	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	pembentukan kelompok pengajian, Pemberian Insentif Guru Taman Pendidikan Alquran (TPA).	Mataraman	1 paket		Validasi Mitra Bappeda
4	MUHAMMAD ZAINI	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Pembangunan Sarana Olahraga Sekolah, pembangunan PAUD,	Mataraman	1 pkt		Validasi Mitra Bappeda
5	H. AGUS MAULANA	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	Bantuan Insentif tenaga Honor di Sekolah Madrasah	Cintapuri Darussalam	1 paket		Validasi Mitra Bappeda
6	HERMANI, S.Pd.I	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	PEMBUATAN TOILET SMP 6 KARANG INTAN	Karang Intan	1 paket	Rekomendasi : Usulan akan ditundaklanjuti berdasarkan hasil survey ke Sekolah Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

7	HERMANI, S.Pd.I	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	PEMBUATAN PAGAR DAN URUK SMP 1 ASTAMBUL	Astambul	1 paket	Rekomendasi : Usulan akan ditindaklanjuti setelah survey ke sekolah Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
8	HERMANI, S.Pd.I	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PEMBANGUNAN RKB PAUD	Astambul	1 paket	Rekomendasi : Usulan bisa diterima dengan mekanisme Pemberian Bantuan berupa Hibah dalam bentuk Bangunan Terima Jadi Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
9	M. ZAINI, M.Pd	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	PEMBUATAN PAGAR SMPN 2 SUNGAI TABUK	Sungai Tabuk	1 paket	Rekomendasi : usulan diterima dan akan disurvey ke sekolah Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
10	M. ZAINI, M.Pd	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SD GUDANG HIRANG 1 RKB	Sungai Tabuk	1 paket	Rekomendasi : Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Guding Hirang 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 20000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

11	M. ZAINI, M.Pd	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	REHABLITASI KELAS SDN GUDANG HIRANG 2	Sungai Tabuk	1 paket	Rekomendasi : Rehabilitasi Sekolah SDN Gudang Hirang 2 Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
12	H. WAHYUDIN, SH	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD (Pagar, Urugan, WC)	PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DAN PENGURUKAN HALAMAN SDN BUNIPAH 2	Aluh Aluh	1 paket	Rekomendasi : Pemagaran/penggurugan/paving halaman SDN Bunipah 2 Kec. Aluh Aluh Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
13	MARDANI	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	pengurukan halaman sekolah SMP 3 pematang panjang km 5 kelurahan gambut	Gambut	1 paket	Rekomendasi : usulan diterima dan ditindaklanjuti dengan survey ke sekolah Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
14	MARDANI	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP	perbaikan ruang kantor sekolah SMP 3 pematang panjang km 5 kecamatan gambut	Gambut	1 paket	Rekomendasi : usulan diterima dan akan disurvey ke sekolah Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Dari beberapa kegiatan yang telah dimusyawarahkan dan disampaikan oleh berbagai pihak, baik melalui musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbang) maupun dari penyampaian aspirasi pokok pikiran masyarakat melalui anggota dewan, dan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia akhirnya dapat dialokasikan beberapa kegiatan dimaksud seperti tabel bawah ini:

Tabel 2. 6
Program Kegiatan dan Sumber Pendanaan

1. Kegiatan sumber dana APBD

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				
1	**Penambahan Ruang Kelas**	Kecamatan	Jumlah Ruang Kelas (RKB) yang dibangun	Paket	
	SD Gudang Hirang 1	Sungai Tabuk		185.000.000	POKIR (SIPD 2022)
	SDN Paau	Aranio		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN terapu	Aluh Aluh		185.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
	SDN kuin besar 1	Aluh Aluh		185.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
	SDN Paramasan Bawah 1, 2 , 3 dan 4. (SD Terangkin)	Paramasan		185.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
	pembangunan sekolah SD Batu Tanam	Sambung Makmur		-	Musrembang (belum ada studi kelayakan)
2	**Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD**	Kecamatan	Jumlah sekolah yang memiliki rumah dinas dalam kondisi baik	Paket	
	SDN Pakutik	Sungai Pinang		-	
	SDN Artain	Aranio		175.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
	SDN Benua Riam	Aranio		175.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
	SDN Pakutik	Sungai Pinang		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Bakambat	Aluh Aluh		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Lok tanah 1	Telaga bauntung		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Paramasan Bawah 1, 2, 3, 4	Paramasan		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Paramasan Atas	Paramasan		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Remo	Paramasan		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
3	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas**	Kecamatan	Jumlah (Paket) Ruang Kelas yang direhabilitasi	Paket	

	SDN Gudang Hirang 2	Sungai Tabuk		200.000.000	POKIR (SIPD 2022)
	SDN Kalaan	Aranio		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Astambul Kota	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Kelampaian Ilir	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	Astambul		-	Musrembang (dilaksanakan APBD 2021)
	SDN Astambul Seberang	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Terapu	Aluh Aluh		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Aluh Aluh Kecil Muara	Aluh Aluh		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Muara Halayung	Beruntung Baru		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Dalam Pagar Ulu	Martapura Timur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN rantau Bakula	Sungai Pinang		200.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
	SDN Telaga Baru	Telaga bauntung		561.876.000	Musrembang (APBN/DAK 2022)
	SDN Rampah	Telaga bauntung		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Tatah Bangkal	Tatah Makmur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
4	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	Kecamatan	Jumlah (paket) Pagar/Paving/Pengurugan yang dibangun	Paket	
	Pagar SDN Belangian	Aranio		-	Musrembang (Refocusing 2022)
	Pagar dan WC SDN Benua Riam	Aranio		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran Manarap Tengah 1 dan 2	Kertak hanyar		-	Musrembang (Refocusing 2022)
	Pengurugan SDN Tambak Sirang Baru 1	Gambut		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Malintang 2	Gambut		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Pasar jati	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Sungai Alat 1	Astambul		-	Musrembang (Refocusing 2022)
	Pengurugan SDN Kaliukan 2	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Munggu Raya	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Paving SDN Paramasan Atas	Paramasan		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Lok gabang	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Limamar	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	pelebaran Halaman SDN Tambak Sirang Darat	Gambut		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Pasar Kamis 1	Kertak hanyar		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Tambak Padi 1	Beruntung baru		-	Musrembang (Refocusing 2022)
	Pemagaran SDN Tambak Padi 2	Beruntung baru		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Sungai Lakum 1 dan 2	Kertak hanyar		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Handil Purai 1	Beruntung baru		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN	Beruntun			Musrembang (Anggaran tidak

	Handil Purai 2	g baru		-	mencukupi)
	Pengurugan SDN Sungai Kupang	Gambut		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Tatah Belayung Baru	Kertak hanyar		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Rantau Bujur 1	Aranio		-	Musrembang (Refocusing 2022)
	Pengurugan SDN Dalam Pagar Ulu 2	Martapur a Timur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Kupang Rejo	Sungai Pinang		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Telaga Baru	Telaga Bauntung		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Paving SDN Rampah	Telaga Bauntung		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Paving SDN Akar Baru	Martapur a Timur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Banyu Hirang	Gambut		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Terapu	Aluh Aluh		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Paving SDN Keramat	Martapur a Timur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Bunipah 1, 2 dan 3	Aluh Aluh		-	POKIR (Refocusing 2022)
	Pemagaran SDN Pakutik	Sungai Pinang		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Aluh Aluh Kecil Muara	Aluh Aluh		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN pematang Baru	Martapur a Timur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pengurugan SDN Kuin Besar	Aluh Aluh		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Lok Tanah 1	Telaga Bauntung		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pembangunan WC SDN Lok Tanah 1	Telaga Bauntung		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Lok Tanah 2	Telaga Bauntung		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Paving SDN Pemangkih Darat	Tatah Makmur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Sungai Alang 2	Karang Intan		-	Musrembang (Refocusing 2022)
	Pemagaran SDN Sungai Alang 1	Karang Intan		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	Pemagaran SDN Baliangin	Sambung Makmur		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
5	**Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	Kecamata n	Jumlah (paket) WC/Toilet yang direhabilitasi	Paket	
	SDN Jambu Burung	Beruntun g baru		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Surian	Astambul		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Sungai Musang	Aluh Aluh		50.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
	SDN Podok	Aluh Aluh		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Panyambaran 2	Karang Intan		50.000.000	Musrembang (SIPD 2022)
6	**Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah**	Kecamata n	Jumlah sekolah yang memiliki rumah dinas dalam kondisi baik	Paket	
	SDN Bunglai	Aranio		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
	SDN Paramasan Atas	Paramasa n		-	Musrembang (Anggaran tidak mencukupi)
II	**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**				

1	Penambahan Ruang Kelas	Martapura Barat	Jumlah Ruang Kelas (RKB) yang dibangun	1 Paket	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Martapura Barat
				400.000.000	
2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SMP	Sambung Makmur	Jumlah sekolah yang memiliki rumah dinas dalam kondisi baik	1 Paket	Pembangunan Rumah Dinas SMPN 1 Sambung Makmur
				149.850.000	
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Karang Intan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	1 Paket	Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Karang Intan
				200.000.000	
4	Pembangunan Ruang UKS	Sungai Tabuk	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	1 Paket	Pembangunan Ruang UKS MPN 4 Sungai Tabuk
				110.000.000	
5	Pemagaran /Pengurugan/Paving SMP	Martapura Timur	Jumlah (paket)pemagaran/ Penguragan/paving SMP	1 Paket	Pemagaran/Pengurugan/Paving SMPN 2 Martapura Timur
				90.000.000	
		Gambut		1 Paket	Pemagaran/Pengurugan/Paving SMPN 3 Gambut
				90.000.000	
		Astambul		1 Paket	Pemagaran/Pengurugan/Paving SMPN 1 Astambul
				90.000.000	
		Kertak Hanyar		1 Paket	Pemagaran/Pengurugan/Paving SMPN 2 Kertak Hanyar
				90.000.000	
		Sungai Tabuk		1 Paket	Pemagaran/Pengurugan/Paving SMPN 2 Sungai Tabuk
				90.000.000	
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Martapura	Jumlah (paket) lapangan olahraga SMP	1 Paket	Tersedianya lapangan olahraga SMPN 6 Martapura
				88.000.000	
		Martapura Timur		1 Paket	Tersedianya lapangan olahraga SMPN 2 Martapura Timur
				88.000.000	
		Telaga Bauntung		1 Paket	Tersedianya lapangan olahraga SMPN 1 Telaga Bauntung
				88.000.000	
		Karang Intan	Jumlah Toilet yang dibangun	1 Paket	Pembangunan Toilet SMPN 6 Karang Intan
				100.000.000	
		Martapura		1 Paket	Pembangunan Toilet SMPN 6 Martapura
				100.000.000	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Karang Intan	Jumlah (Paket) Ruang Kelas yang direhabilitasi	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Karang Intan
				100.000.000	

				1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Karang Intan
				100.000.000	
		Simpang Empat		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Simpang Empat
				100.000.000	
8	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kepala Sekolah/Guru	Gambut	Jumlah sekolah yang memiliki ruang Kepala Sekolah/Guru dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah/Guru SMPN 3 Gambut
				200000000	
9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Perpustakaan	Sungai Tabuk	Jumlah sekolah yang memiliki ruang perpustakaan dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi ruang Perpustakaan SMPN 1 Sungai Tabuk
				140.000.000	
10	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Simpang Empat	Jumlah sekolah yang memiliki Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Simpang Empat
				100.000.000	
11	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Aranio	Jumlah SMP yang memiliki Toilet dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Toilet SMPN 1 Aranio
				50.000.000	
		Simpang Empat		1 Paket	Rehabilitasi Toilet SMPN 1 Simpang Empat
				50.000.000	
12	Pengadaan Meubelair Sekolah	SMP Kab.Banjar	Memenuhi meja kursi siswa SMP	1 Paket	Terpenuhinya meubelair siswa SMP
				498.100.000	
13	Pengadaan Kelengkapan Siswa	SMP Kab.Banjar	Untuk SMP yang APK dan APM rendah	1 Paket	Meningkatkan APK dan APM SMP
				148.200.000	
14	Pebgadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	SMP Kab.Banjar	Meubel Guru/TU terdampak banjir	1 Paket	Memenuhi meubel Guru/TU yang terdampak banjir
				148.100.000	
15	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Aranio	Terpenuhinya tranportasi air(Kapal)	1 Paket	Terpenuhinya tranportasi air(Kapal) SMPN 3 Aranio
				77.280.000	
16	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	SMP Kab.Banjar	Memenuhi alat praktik siswa SMP	1 Paket	Terpenuhinya alat praktik siswa SMP
				436.400.000	

17	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		Memenuhi penunjang kegiatan fisik		Terpenuhi penunjang kegiatan fisik
				84.000.000	
III	**Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**				
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Astambul	Jumlah Ruang Kelas (RKB) yang dibangun	1 Paket	Pembangunan RKB PAUD Sinar Pelangi Kec. Astambul
				100.000.000	
		Beruntung Baru		1 Paket	Pembangunan RKB TK Plus Al Karimah Kec. Beruntung Baru
				100.000.000	

2. Kegiatan sumber dana APBN (DAK)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**Pengelolaan Pendidikan SD**				
I	**Rehabilitasi ruang kelas**		Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik		
1	SD NEGERI SUNGAI LAKUM 2			2 ruang	
				140.469.000	
2	SD NEGERI ABUMBUN JAYA			2 ruang	
				140.469.000	
3	SD NEGERI PEMURUS 2			3 ruang	
				140.469.000	
4	SD NEGERI TAMBAK RAYA			1 ruang	
				140.469.000	
5	SD NEGERI SUNGKAI 1			5 ruang	
				140.469.000	
6	SD NEGERI SURIAN MATARAMAN			3 ruang	
				140.469.000	
7	SD NEGERI TELAGA BARU			4 ruang	
				140.469.000	
8	SD NEGERI TATAH BELAYUNG BARU			2 ruang	
				140.469.000	
9	SD NEGERI DESA LIMA			3 ruang	
				140.469.000	
10	SD NEGERI GAMBUT 1			4 ruang	
				140.469.000	
11	SD NEGERI CINTAPURI 2			3 ruang	
				140.469.000	
12	SD NEGERI DALAM PAGAR			4 ruang	
				140.469.000	
13	SD NEGERI DALAM PAGAR ULU 1			2 ruang	
				140.469.000	
II	**Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya**		Jumlah Toilet yang terbangun		
1	SD NEGERI SUNGAI			1 Paket	

	TABUK KERAMAT 2				
				136.235.000	
2	SD NEGERI SUMBER BARU 1			1 Paket	
				136.235.000	
3	SD NEGERI SUNGAI PULANTAN			1 Paket	
				136.235.000	
4	SD NEGERI PEMATANG BARU			1 Paket	
				136.235.000	
5	SD NEGERI PEMURUS 2			1 Paket	
				136.235.000	
6	SD NEGERI RANTAU BUJUR			1 Paket	
				136.235.000	
7	SD NEGERI DESA BARU 1			1 Paket	
				136.235.000	
8	SD NEGERI DALAM PAGAR ULU 1			1 Paket	
				136.235.000	
III	**Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya**		Jumlah Ruang Perpustakaan yang terbangun		
1	SD NEGERI SUNGAI PULANTAN			1 Ruang	
				213.909.000	
2	SD NEGERI SUNGAI LULUT 2			1 Ruang	
				213.909.000	
3	SD NEGERI PEMURUS 2			1 Ruang	
				213.909.000	
4	SD NEGERI TANAH HABANG			1 Ruang	
				213.909.000	
5	SD NEGERI GALAM RABAH 1			1 Ruang	
				213.909.000	
IV	**Pembangunan ruang guru beserta perabotnya**		Jumlah Ruang Guru yang terbangun		
1	SD NEGERI SUNGAI TABUK KERAMAT 2			1 Ruang	
				224.115.000	
2	SD NEGERI PASAYANGAN 2			1 Ruang	
				224.115.000	
3	SD NEGERI TAMBAK SIRANG BARU			1 Ruang	
				224.115.000	
4	SD NEGERI TANAH HABANG			1 Ruang	
				224.115.000	
5	SD NEGERI TATAH PEMANGKIH LAUT 1			1 Ruang	
				224.115.000	

6	SD NEGERI DESA LIMA			1 Ruang	
				224.115.000	
7	SD NEGERI GALAM RABAH 1			1 Ruang	
				224.115.000	
V	**Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya**		Jumlah ruang Laboratorium yang terbangun		
1	SD NEGERI SUMBER HARAPAN 1			1 Ruang	
				234.115.000	
2	SD NEGERI SIMPANG EMPAT 4			1 Ruang	
				234.115.000	
3	SD NEGERI SUNGAI BATANG ILIR 1			1 Ruang	
				234.115.000	
4	SD NEGERI SUNGAI BATANG ILIR 2			1 Ruang	
				234.115.000	
5	SD NEGERI PEMATANG BARU			1 Ruang	
				234.115.000	
6	SD NEGERI PULAU NYIUR 1			1 Ruang	
				234.115.000	
7	SD NEGERI SUNGAI TABUK KERAMAT 1			1 Ruang	
				234.115.000	
8	SD NEGERI SUNGKAI 1			1 Ruang	
				234.115.000	
9	SD NEGERI TATAH BANGKAL			1 Ruang	
				234.115.000	
10	SD NEGERI TELAGA BARU			1 Ruang	
				234.115.000	
11	SD NEGERI TATAH JARUJU			1 Ruang	
				234.115.000	
VI	**Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)**		Jumlah Peralatan TIK yang tersedia		
1	SD NEGERI SUNGAI TABUK KERAMAT 2			1 Paket	
				125.000.000	
2	SD NEGERI SIMPANG WARGA 1			1 Paket	
				125.000.000	
3	SD NEGERI SUNGAI PARING 2			1 Paket	
				125.000.000	
4	SD NEGERI SUNGAI BATANG BANYU			1 Paket	
				125.000.000	
5	SD NEGERI SUNGAI PARING 1			1 Paket	

				125.000.000	
6	SD NEGERI PENGARON 2			1 Paket	
				125.000.000	
7	SD NEGERI SUNGKAI BARU			1 Paket	
				125.000.000	
8	SD NEGERI TUNGKARAN			1 Paket	
				125.000.000	
9	SD NEGERI TANJUNG REMA DARAT			1 Paket	
				125.000.000	
10	SD NEGERI TANJUNG REMA			1 Paket	
				125.000.000	
11	SD NEGERI GAMBUT 11			1 Paket	
				125.000.000	
12	SD NEGERI GAMBUT 1			1 Paket	
				125.000.000	
13	SDN CINDAI ALUS 1			1 Paket	
				125.000.000	
14	SD NEGERI LIMAMAR			1 Paket	
				125.000.000	
15	SD NEGERI MANDIANGIN TIMUR 2			1 Paket	
				125.000.000	
16	SD NEGERI MEKAR			1 Paket	
				125.000.000	
17	SD NEGERI JAWA 2			1 Paket	
				125.000.000	
18	SD NEGERI JAWA LAUT 2			1 Paket	
				125.000.000	
19	SD NEGERI KERATON 1			1 Paket	
				125.000.000	
VII	**Pengadaan media pendidikan**		Jumlah Media Pendidikan yang tersedia		
1	SD NEGERI SUNGAI PINANG			1 Paket	
				45.000.000	
2	SD NEGERI SUNGAI TABUK KOTA 1			1 Paket	
				45.000.000	
3	SD NEGERI SUNGAI LULUT 2			1 Paket	
				45.000.000	
4	SD NEGERI PASAR JATI 3			1 Paket	
				45.000.000	
5	SD NEGERI SUNGAI RANGAS HAMBUKU			1 Paket	
				45.000.000	
6	SD NEGERI PULAU NYIUR 1			1 Paket	

				45.000.000	
7	SD NEGERI DESA BARU 1			1 Paket	
				45.000.000	
8	SD NEGERI CINTAPURI 1			1 Paket	
				45.000.000	
9	SD NEGERI DANAU SALAK 1			1 Paket	
				45.000.000	
10	SD NEGERI AWANG BANGKAL TIMUR			1 Paket	
				45.000.000	
11	SD NEGERI ABIRAU			1 Paket	
				45.000.000	
12	SD NEGERI ALALAK PADANG			1 Paket	
				45.000.000	
13	SD NEGERI ALUH-ALUH BESAR 2			1 Paket	
				45.000.000	
14	SD NEGERI ALUH-ALUH KECIL MUARA			1 Paket	
				45.000.000	
15	SD NEGERI BATU BALIAN 2			1 Paket	
				45.000.000	
16	SD NEGERI BAWAHAN PASAR			1 Paket	
				45.000.000	
17	SD NEGERI MANDIKAPAU BARAT 1			1 Paket	
				45.000.000	
18	SD NEGERI LOK TUNGGUL			1 Paket	
				45.000.000	
19	SD NEGERI MANDIANGIN TIMUR 1			1 Paket	
				45.000.000	
20	SD NEGERI MUARA HALAYUNG			1 Paket	
				45.000.000	
21	SD NEGERI MANGKAUK 1			1 Paket	
				45.000.000	
22	SD NEGERI MANGKAUK 3			1 Paket	
				45.000.000	
23	SD NEGERI KARANG INTAN 1			1 Paket	
				45.000.000	
24	SD NEGERI KAYU BAWANG 2			1 Paket	
				45.000.000	
II	**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				

1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Pengaron	Jumlah (Paket) Ruang Kelas yang direhabilitasi	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Pengaronn
				880.100.000	
		Martapura		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Martapura
				880.100.000	
2	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Pengaron	Jumlah sekolah yang memiliki ruang perpustakaan dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi ruang Perpustakaan SMPN 1 Pengaron
				293.381.000	
		Mataraman		1 Paket	Rehabilitasi ruang Perpustakaan SMPN 2 Mataraman
				293.381.000	
		Aluh-Aluh		1 Paket	Rehabilitasi ruang Perpustakaan SMPN 2 Aluh-Aluh
				293.381.000	
		Astambul		1 Paket	Rehabilitasi ruang Perpustakaan SMPN 3 Astambul
				293.381.000	
3	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Pengaron	Jumlah sekolah yang memiliki ruang LAB IPA dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Lab IPA SMPN 1 Pengaron
				330.048.000	
		Martapura		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Lab IPA SMPN 4 Martapura
				330.048.000	
		Mataraman		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Lab IPA SMPN 2 Mataraman
				330.048.000	
		Tatah Makmur		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Lab IPA SMPN 1 Tatah Makmur
				330.048.000	
4	Rehabilitasi ruang Kepela Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Mataraman	Jumlah sekolah yang memiliki ruang Kepala Sekolah dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Mataraman
				41.912.000	
		Astambul		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMPN 3 Astambul
				41.912.000	

5	Rehabilitasi ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Mataraman	Jumlah sekolah yang memiliki ruang Guru dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 1 Mataraman
				293.381.000	
		Aluh-Aluh		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 2 Aluh-Aluh
				293.381.000	
		Astambul		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 3 Astambul
				293.381.000	
6	Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Gambut	Jumlah sekolah yang memiliki ruang Tata Usaha dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Gambut
				302.400.000	
		Mataraman		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 1 Mataraman
				302.400.000	
		Aluh-Aluh		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 2 Aluh-Aluh
				302.400.000	
		Astambul		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 3 Astambul
				302.400.000	
7	Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	Mataraman	Jumlah sekolah yang memiliki ruang ibadah dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Ibadah SMPN 1 Mataraman
				23.944.000	
		Pengaron		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Ibadah SMPN 1 Pengaron
				23.944.000	
8	Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Aluh-Aluh	Jumlah sekolah yang memiliki ruang UKS dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang UKS SMPN 2 Aluh-Aluh
				41.912.000	
9	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	Mataraman	Jumlah sekolah yang memiliki toilet (jamban) dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Mataraman
				95.009.000	
		Pengaron		1 Paket	Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Pengaron
				95.009.000	

		Martapura		1 Paket	Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 4 Martapura
				95.009.000	
		Tatah Makmur		1 Paket	Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Tatah Makmur
				95.009.000	
10	Rehabilitasi ruang laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Mataraman	Jumlah sekolah yang memiliki ruang Lab.Komputer dalam kondisi baik	1 Paket	Rehabilitasi Ruang Lab.Komputer SMPN 1 Mataraman
				330.048.000	
		Kertak Hanyar		1 Paket	Rehabilitasi Ruang Lab.Komputer SMPN 2 Kertak Hanyar
				330.048.000	
11	Pembangunan ruang laboratorium Komputer beserta perabotnya	Pengaron	Jumlah Ruang Lab.Komputer yang dibangun	1 Paket	Pembangunan Ruang Lab.Komputer SMPN 1 Pengaron
				550.083.000	
		Martapura		1 Paket	Pembangunan Ruang Lab.Komputer SMPN 4 Martapura
				550.083.000	
		Tatah Makmur		1 Paket	Pembangunan Ruang Lab.Komputer SMPN 1 Tatah Makmur
				550.083.000	
		Aluh-Aluh		1 Paket	Pembangunan Ruang Lab.Komputer SMPN 2 Aluh-Aluh
				550.083.000	
12	Pembangunan ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Pengaron	Jumlah Ruang tata usaha yang dibangun	1 Paket	Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 1 Pengaron
				504.000.000	
		Kertak Hanyar		1 Paket	Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 2 Kertak Hanyar
				504.000.000	
13	Pembangunan ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Gambut	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	1 Paket	Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 1 Gambut
				234.635.000	
14	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) fisika	Mataraman	Memenuhi peralatan Lab.IPA Fisika SMP	1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 1 Mataraman
				26.540.000	

				1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 2 Mataraman
				26.540.000	
		Pengaron		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 1 Pengaron
				26.540.000	
		Martapura		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 4 Martapura
				26.540.000	
				1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMP Darussalam Martapura
				26.540.000	
		Kertak Hanyar		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 2 Kertak Hanyar
				26.540.000	
		Aluh-Aluh		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 2 Aluh-Aluh
				26.540.000	
		Astambul		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 3 Astambul
				26.540.000	
		Karang Intan		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Fisika SMPN 6 Karang Intan
				26.540.000	
15	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi	Mataraman	Memenuhi peralatan Lab.IPA Biologi SMP	1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 1 Mataraman
				24.770.000	
				1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 2 Mataraman
				24.770.000	
		Pengaron		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 1 Pengaron
				24.770.000	
		Martapura		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 4 Martapura
				24.770.000	
				1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMP Darussalam Martapura
				24.770.000	
		Kertak Hanyar		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 2 Kertak Hanyar

				24.770.000	
		Aluh-Aluh		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 2 Aluh-Aluh
				24.770.000	
		Astambul		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 3 Astambul
				24.770.000	
		Karang Intan		1 Paket	Terpenuhinya peralatan Lab.IPA Biologi SMPN 6 Karang Intan
				24.770.000	
16	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)	Martapura	Memenuhi peralatan TIK SMP	1 Paket	Terpenuhinya peralatan TIK SMP Darussalam Martapura
				125.000.000	
III	**Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**				
	0	0	0	0	0

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Berbagai arah kebijakan pembangunan Nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022
   - Meningkatkan nilai tambah sektor industri;
   - Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
   - Meningkatkan pemerataan infrastruktur;
   - Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
   - Menigkatkan kualitas SDM dan Inovasi;
   - Penanganan Covid-19 dengan vasinasi massal dan peningkatan prevalensi stunting.
2. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
   - Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi;
   - Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional;
   - Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
   - Mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian utara.
3. Isu Strategis Daerah

   Isu strategis daerah merupakan hasil penelaahan dari permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan isu daerah yang sedang berkembang yang mendesak serta berpengaruh besar pada perencanaan tahun 2022. Adapun isu strategis Kapubaten Banjar sebagai berikut:
   - Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, responsif gender dan anak;
   - Peningkatan ekonomi yang berkualitas untuk pembangunan daerah yang berkeadilan;
   - Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;
   - Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel;
   - Perwujudan Masyarakat yang Agamis untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan aman;
4. Arah Kebijakan Kabupaten Banjar Tahun 2022

   Pemerintah Kabupaten Banjar menerapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

   1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
   2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
   3. Pengelolaan Likungan Hidup yang berkelanjutan;
   4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;

5. Perwujudan masyarakat yang Agamis untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan aman.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan secara kuantitatif yang merupakan jabaran dari tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berjangka waktu.

Adapun tujuan yang berhubungan dengan bidang pendidikan yang ingin dicapai selama (1) satu tahun kedepan (2022) yang selaras dengan RPJMD pada misi 1 (satu) yang terdapat di RPJMD adalah Peningkatan Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia, dengan tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta dengan sasaran meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem Pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar periode 2021-2026 berdasarkan isu-isu strategis di bidang pendidikan, maka untuk itu ditetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026.

3.2 .1 Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2021-2022

Tujuan:

1. Meningkatnya Pemerataan pendidikan bermutu

Sasaran:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan

Hubungan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, pada Renstra 2021–2026 adalah sebagaimana yang ditunjukan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pendidikan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian (Tahun)					Kondisi Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Bermutu		Indeks Pendidikan (%)	60,39	60,79	61,24	61,74	62,29	62,29
			Persentase Sekolah Ber-Akreditasi B (%)	60.00	62.50	65.00	67.50	70.00	70.00
		Meningkatnya Akses dan Mutu pendidikan	Rata rata lama sekolah (tahun)	12,89	13,34	13,79	14,24	14,69	14,69
			Harapan Lama sekolah (tahun)	7,41	7,47	7,53	7,59	7,65	7,65

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator-indikator lainnya yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagaimana berikut:

Tabel 3 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pencapaian Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian (Tahun)					Kondisi Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pemerataan pendidikan bermutu	Meningkatnya Akses dan Mutu pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.89	13.34	13.79	14.24	14.69	14.69
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.41	7.47	7.53	7.59	7.65	7.65
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0.38	0.32	0.26	0.20	0.14	0.14
			Angka kelulusan siswa SD/MI	100	100	100	100	100	100
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1.50	1.30	1.10	0.90	0.70	0.70
			Angka kelulusan siswa SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
			APS SD	99.64	99.84	99.88	99.92	99.96	99.96
			APK SD	100	100	100	100	100	100
			APM SD	98.82	99.12	99.32	99.52	99.82	99.82
			APS SMP	87.13	88.93	89.00	89.15	89.30	89.30
			APK SMP	87.09	88.44	89.80	91.16	92.51	92.51
			APM SMP	75.31	77.61	80.10	83.15	85.51	85.51
			APK PAUD	65.50	67.00	69.00	71.00	73.00	73.00
			% Usia 5-6 thn yang terlayani PAUD	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00
			5Pesantren Menyelenggarakan PNF/Kesetaraan	87.50	90.00	92.50	95.00	97.50	97.50
			% Masyarakat yang terlayani PNF/Kesetaraan	57.50	60.00	62.50	65.00	67.50	67.50
			Rasio Guru – Siswa SD	12.89	12.87	12.84	12.81	12.79	12.79
			Rasio Guru – Siswa SMP	10.48	10.41	10.33	10.25	10.17	10.17

			Rasio Guru – Siswa PAUD	18.20	18.10	18.00	17.90	17.80	17.80
			% Sekolah yang memenuhi standar	53	56	59	62	65	65
			5 Sekolah yang menerapkan Kurikulum Nasional & Mulok	77	79	81	83	85	85
			5 Lembaga yangmemiliki Ijin Operasional	75	80	85	90	95	95
			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar	85	88	91	95	98	98

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
c. Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
d. Pencapaian fasilitasi dan administrasi urusan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan. Uraian rekapitulasi program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022, antara lain meliputi:

1). Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah 3 Program dengan 12 kegiatan dan total sebanyak 72 sub-kegiatan;
2). Penyebaran lokasi kegiatan program dan kegiatan adalah di Kabupaten Banjar mencakup Kecamatan dan Kelurahan serta Dinas Pendidikan dan UPTD/SKB.
3). Total kebutuhan dana/pagu indikatif berdasarkan RKPD adalah sebesar Rp. 399.745.733.505,- terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Pendidikan, dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2022 yang sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tergambar seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1
Rancangan Program 2022 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
					PENDIDIKAN				**399.745.733.505**				
1	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab Banjar**	**100%**	**315.313.331.168**	**APBD**			
1	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**117.000.600**				
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Banjar	10 laporan	6.000.600	APBD		10 laporan	6.000.600
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen RKA SKPD	Kab Banjar	2 Dokumen	8.500.000	APBD		2 Dokumen	8.500.000
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Kab Banjar	2 Kali	7.500.000	APBD		2 Kali	7.500.000
1	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA SKPD	Kab Banjar	2 Kali	7.500.000	APBD		2 Kali	7.500.000
1	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen DPA Perubahan SKPD	Kab Banjar	2 Kali	7.500.000	APBD		2 Kali	7.500.000
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Banjar	5 laporan	25.000.000	APBD		5 laporan	25.000.000
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banjar	1 Kali	55.000.000	APBD		1 Kali	55.000.000

1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Terpenuhinya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab Banjar**	**100%**	**312.939.666.723**	**APBD**			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Kab Banjar	12 Bulan	302.358.365.723	APBD		12 Bulan	
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Banjar	12 Bulan	10.510.301.000	APBD		12 Bulan	
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Banjar	1 Tahun	20.000.000	APBD		1 Tahun	
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunya Laporan Keuangan SKPD	Kab Banjar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Banjar	12 Bulan	26.000.000	APBD		12 Bulan	
1	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab Banjar**	**100%**	**400.000.000**	**APBD**			
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian		Kab Banjar	100%	150.000.000	APBD		100%	
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Kab Banjar	100%	250.000.000	APBD		100%	
1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab Banjar**	**100%**	**1.103.137.200**	**APBD**			
1	**1**	**1**	**2.06**	**2**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Banjar	12 Bulan	64.684.000	APBD			
1	**1**	**1**	**2.06**	**4**	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Kab Banjar	12 Bulan	106.620.000	APBD			
1	**1**	**1**	**2.06**	**5**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	Kab. Banjar	1 Tahun	150.109.200	APBD			
1	**1**	**1**	**2.06**	**8**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Kab. Banjar	12 Bulan	20.000.000	APBD			
1	**1**	**1**	**2.06**	**9**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	12 Bulan	761.724.000	APBD			

1	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah yang diperlukan**	Kab. Banjar	100%	**29.540.000**	**APBD**			
1	**1**	**1**	**2.07**	**6**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Banjar		29.540.000	APBD			
1	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**349.999.645**	**APBD**			
1	**1**	**1**	**2.08**	**2**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	12 Bulan	309.999.645	APBD			
1	**1**	**1**	**2.08**	**4**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	12 Bulan	40.000.000	APBD			
1	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**373.987.000**	**APBD**			
1	**1**	**1**	**2.09**	**1**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	12 Bulan	38.990.000	APBD			
1	**1**	**1**	**2.09**	**2**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	12 Bulan	84.997.000	APBD			
1	**1**	**1**	**2.09**	**9**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	12 Bulan	250.000.000	APBD			
1	1	2			**Program Pengelolaan Pendidikan**				**84.372.402.337**				
1	1	2	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**1. Angka Partisipasi Kasar 2. Angka Partisipasi Murni**		**100% 94%**	**48.345.837.400**				
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terpenuhinya penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Banjar	1 Paket	1.067.050.000	APBD			
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Terpenuhinya Penambahan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Kab. Banjar	5 Sekolah	1.057.025.000	APBD			
1	1	2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terpenuhinya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Banjar	3 Paket	845.800.000	APBD			
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Banjar	24 Paket	1.827.269.000	APBD			

1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TerpenuhinyaRehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Banjar	28 Paket	297.250.000	APBD			
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Terpenuhinya Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Banjar	1 Paket	203.250.000	APBD			
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Banjar	845 Sekolah	1.097.757.500	APBD			
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Banjar	73 Sekolah	376.375.900	APBD			
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD	Kab. Banjar	1 Tahun	919.670.600	APBD			
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Banjar	3 Laporan	610.513.500	APBD			
				29	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				38.142.900.000				
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	Kab. Banjar	4 Kali	1.900.975.900	APBD			
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**1. Angka Partisipasi Kasar 2. Angka Partisipasi Murni**		**92,90% 70,06%**	**20.357.517.037**	**APBD**			
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terpenuhinya Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Banjar	4 Paket	538.025.000	APBD			
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Kab. Banjar		241.475.000				
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Kab. Banjar		158.575.000				
1	1	2	2.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terpenuhinya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Banjar	3 Paket	182.375.000	APBD			
1	1	2	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Banjar	9 Paket	575.450.000	APBD			
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Banjar	8 Paket	478.575.000	APBD			

1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Banjar	6 Paket	379.925.000	APBD			
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Kab. Banjar		241.325.000				
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Kab. Banjar		220.675.000				
1	1	2	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Banjar	3 Paket	123.625.000	APBD			
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Banjar	5 Paket	125.650.000	APBD			
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Terpenuhinya Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Banjar	9 Paket	499.825.000	APBD			
1	1	2	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Kab Banjar		149.800.000				
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Banjar	2 Paket	78.330.000	APBD			
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Banjar	1 Paket	149.925.000	APBD			
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terpenuhinya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Banjar	4 Paket	439.600.000	APBD			
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Banjar	9692 Siswa	817.517.300	APBD			
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Banjar	250 Siswa	642.533.900	APBD			
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP	Terpenuhinya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Penddidikan SMP	Kab. Banjar	3 Kegiatan	620.000.000	APBD			
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Banjar	100 Persen	83.999.800	APBD			
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Banjar	9692 Siswa	13.340.311.037	APBD			

1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Banjar	4 Triwulan	270.000.000	APBD			
1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**1. Persentase PAUD yang terbina 2. Angka Partisipasi Kasar**		**65% 71,00%**	**1.959.531.000**	**APBD**			
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terpenuhinya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Banjar	13 gedung 15 paket 5 sekolah	564.700.000	APBD			
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpenuhinya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Banjar	20 paket	643.350.000	APBD			
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Terpenuhinya Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Banjar	1 paket	101.300.000	APBD			
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terpenuhinya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Banjar	2 paket	102.200.000	APBD			
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Banjar	8 persen 50 persen	258.000.000	APBD			
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatnya Kompetensi dan Karir Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan PAUD	kab.banjar		115.000.000				
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Banjar	100 Persen	30.181.000	APBD			
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Kab. Banjar		144.800.000				
1	**1**	**2**	**2.04**		**Program Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**1. Persentase Ponpes Menyelenggarakan Kejar Paket 2. Persentase Masyarakat Terlayani Pendidikan Kesetaraan**		**90% 90%**	**13.709.516.900**	**APBD**			
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Kab.banjar		199.900.000				
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab.banjar		75.000.000				
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Banjar	98 persen	4.500.064.900	APBD			

1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Banjar	98 Persen	8.934.552.000	APBD			
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik**		**90%**	**60.000.000**				
1	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**60.000.000**				
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab. Banjar		30.000.000				
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Banjar	500 Orang	30.000.000	APBD			

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis tahun awal masa periode Renstra Tahun 2021-2026. Dimana Program dan Kegiatan yang telah direncanakan tersebut merupakan bagian dari salah satu program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh personil karyawan-karyawati Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar serta peran aktif stake-holder yang bersangkutan.

2. Dinas Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenc anaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini selaras dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyinkronkan kebijakan sesuai arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk memfokuskan kebijakan belanja pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanganan COVID-19, termasuk pada tahun 2022 mendatang. Sesuai informasi Pemerintah Provinsi bahwa kebijakan pendapatan daerah pada APBD 2022 cukup variatif jika dibandingkan dengan APBD 2021, disebabkan adanya sejumlah komponen pendapatan daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan target. Ketidaksesuaian perkembangan keadaan ini mempengaruhi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2022 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar meliputi;

1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila

1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

1.2.3. Landasan Operasional :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
17) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 05);

18) Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Indikator Kesehatan daerah.
19) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
20) Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara sasaran, penganggaran, indikator dan target kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum Rencana Strategis (renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun terakhir.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2020
Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat uraian pada program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah

BAB V. PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dari Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tahun 2022

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyajikan pengukuran terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar selama tahun 2021.

Dinas Kesehatan perlu mengkaji terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II mengacu pada APBD tahun 2021 dengan pokok-pokok kajian :

2.1.1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

a. Program dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kelompok yang tidak memenuhi target kinerja, hal ini dikarenakan telah memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan;

a. Pandemi Covid 19 mengakibatkan pada tahun 2021 mengalami perubahan anggaran untuk kegiatan, serta adanya protokol kesehatan yang harus dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terutama yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Hal ini juga akan berpengaruh pada rencana program dan kegiatan serta anggaran pada tahun 2022

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

a. Akan memperberat dalam upaya pencapaian target, akan tetapi hal ini disikapi pada saat adanya anggaran perubahan dengan menyesuaikan target yang akan dicapai

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a. Penyesuaian target program/kegiatan terhadap kemampuan maksimal yang akan dicapai dengan memperhatikan kemampuan sumber daya, keuangan serta kondisi lingkungan yang ada saat ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Pemerintahan Daerah													
Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan													
1	1	37		Program Kesehatan Keluarga	Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator Kesehatan	-	0,11	62,5	96,17	0,2	65	161,28	
1	1	37	01	Pelayanan Kesehatan ibu hamil dan bersalin	Persentase kunjungan ibu hamil minimal 4 kali (K4)	-	78,43	86	77,7	90	87	243,13	
					Persentase puskesmas yang melaksanakan P4K	-	100	100	100	100	100		
1	1	37	02	Pelayanan Kesehatan bayi dan anak balita	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1)	-	91,74	100	93,26	93	100	285	
					Cakupan pelayanan balita	-	70,25	95	64,35	67	100		

1	1	37	03	Pelayanan Kesehatan Anak Usia sekolah	Persentase sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10	-	80	75	64	85	80	224	
				Pelayanan Kesehatan usia produktif	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	-	100	70	40	57	75		
1	1	37	05	Pelayanan Kesehatan usia lanjut	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Santun Lansia	-	40	50	40	80	60	140	
1	1	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas/ Pusksesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik	-	100	90,22	100	110	90,22	290,22	
1	1	25	01	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas baru	-	1	2	1	50	2	-	
1	1	25	02	Pembangunan Puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan Puskesmas pembantu baru	-	0	2	1	50	2	-	
1	1	25	04	Pengadaan Puskesmas keliling	Jumlah pengadaan Puskesmas keliling di Puskesmas	-	9	15	20	133	15	-	

				Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas	Jumlah Puskesmas mendapat pengadaan sarana dan prasarana	-	24	24	18	75	24	-	
				Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas pembantu mendapat pengadaan sarana dan prasarana	-	70	70	-		70	-	
1	1	25	21	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di rehab sedang/berat	-	4	8	8	100	8	-	
1	1	25		Rehab sedang/berat Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab sedang/berat	-	2	1	0	0	1	-	
				Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Persentase Pencapaian indikator SPM di Puskesmas	-	-	100		-	100	-	
				Penunjang Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang	-	-	100		-	100	-	
				Upaya Kesehatan masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	100		-	100		
					Persentase tingkat kepuasan stake holder di Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	80		-	80	-	
					Persentase obat dan vaksin tersimpan di	-	-	100		-	100	-	

					Instalasi Farmasi sesuai standar								
					Persentase distribusi obat dan vaksin dari Instalasi Farmasi tepat waktu	-	-	90		-	90	-	
				Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	-	-	100		-	100	-	
				Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN	Persentase Penggunaan dana kapitasi untuk kegiatan penunjang pelayanan kesehatan JKN	-	-	40		-	40	-	
				Jasa Pelayanan JKN	Persentase Jasa Pelayanan Program JKN	-	-	60		-	60	-	
1	1	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan Vaksin	-	97,63	95	95,74	100,7	95	288,37	
					Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Perbekalan dan alat kesehatan sesuai standar	-	-	55		-	55	-	
1	1	15	01	Pengadaan obat dan perbekalan	Persentase Ketersediaan obat,	-	97,63	95			95	-	

				kesehatan dan alat kesehatan	BAKHP, BMHP dan Vaksin di Fasyankes (Puskesmas)								
					Jumlah Peralatan kesehatan yang terdistribusi ke fasyankes sesuai kebutuhan	-	40	50	60	120	50	-	
					Persentase Ketersediaan perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	-	50,00	30	35,27	117	30	-	
1	1	15	10	Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, penggunaan obat dan perbekalan kesehatan (PKRT)	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di fasyankes (Puskesmas)	-	92,47	90	95,89	106,54	90	278,36	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat obat rasional melalui GeMa CerMat	-	18	20	24	120	20	-	
					Persentase Penggunaan obat sesuai formularium nasional (fornas) di Puskesmas	-	91,16	85	94,23	110,8	85	-	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan	-	20	18	23	127,7	18	-	

					kefarmasian sesuai standar								
					Jumlah apotek dan toko obat yang dibina dan diawasi dalam pelayanan kefarmasian	-	15	85	80	94,1	85	-	
1	1	15	11	Pelayanan Obat tradisional, pembinaan dan pengawasan usaha obat tradisional dan kosmetika	Jumlah usaha obat tradisional dan kosmetika yang dibina dan diawasi	-	39	105	95	90,4	105	-	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan saintifikasi jamu (obat tradisional)	-	1	1	1	100	1	-	
1	1	15	12	Penjaminan mutu alat kesehatan di fasyankes dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	-	55	60	169	281,6	60	-	
					Jumlah petugas operator alat kesehatan yang memahami penggunaan alat kesehatan sesuai prosedur	-	24	20	24	120	20	-	
					Jumlah toko alat kesehatan yang dibina dan diawasi	-	8	25	8	32	25	-	
					Jumlah perbekalan kesehatan rumah	-	8	25	8	32	25	-	

					tangga (PKRT) yang dibina dan diawasi								
1	1	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kecamatan yang melaksanakan Kabupaten/kota sehat (KKS)	-	100	100	100	100	100	300	
					Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	-	100	60	60	100	60	-	
					Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	-	29,20	35	35	100	35	-	
1	1	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan kepada masyarakat	-	100	100	100	100	100	300	
1	1	16	12	Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan kepada masyarakat	-	125	100	100	100	100	325	
1	1	16	14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	-	100	150	54	36	150	304	
					Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	-	50	50			50	107,9	
					Persentase sekolah dan Puskesmas yang	-	50	90	50	55,5	90	-	

					memenuhi persyaratan kesehatan								
					Persentase TPM yang dilakukan pengawasan	-	21	32	20	62,5	32	-	
					Jumlah IPAL yang tersedia di Puskesmas	-		20			20	-	
1	1	16	20	Pelayanan Kesehatan kerja	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar	-	12	19	24	126,3	19	-	
					Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang terbentuk	-	13	150	150	100	150	-	
1	1	16	21	Pelayanan kesehatan olah raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kerja dan olahraga pada kelompok masyarakat	-	25	60	100	166,6	60	-	
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga bagi anak SD	-	20	70	100	142,8	70	-	
					Persentase Jamaah haji yang diperiksa kebugaran	-	75	95	100	105,2	95	-	
1	1	16	22	Pembinaan akses dan mutu standar pelayanan rujukan	Jumlah rumah sakit yang dilakukan	-	100	100	33,33	33,33	100	-	

					pembinaan 2 kali setahun								
					Persentase Pasien yang dilakukan rujukan kefasilitas kesehatan tingkat lanjutan	-	4,25	4	4	100	4	-	
1	1	16	23	Manajemen Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan Kinerja terbaik	-	6	80	100	125	80	186	
				Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Persentase Pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas	-		100			100	-	
1	1	19		Program Promosi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan	-	60	70	30	42,8	70	160	
1	1	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan PHBS	-	60	70	30	42,8	70	160	
1	1	19	02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat	-	60	75	30	42,8	75	165	
					Persentase Puskesmas yang mempunyai	-	40	75	66	88	75	-	

					pangkalan saka bakti husada								
1	1	19	03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Persentase Posyandu aktif	-	21,88	80	94	117,5	80	195,88	
1	1	22		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Penemuan kasus penyakit menular	-	1,75	2	2	100	2	92,75	
1	1	22	19	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Cakupan Imunisasi lengkap	-	87	98	67	68,36	98	-	
					Persentase cakupan imunisasi lanjutan/booster pada baduta	-	42,30	40	72	180	40	-	
					Persentase cakupan imunisasi pada anak sekolah (BIAS)	-	89,78	95	68	71,5	95	-	
1	1	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase angka penemuan kasus baru CDR	-	65,66	70	27,60	39,42	70	163,26	
					Persentase pemeriksaan HIV pada kelompok beresiko	-	56,10	75	19,17	25,56	75	-	
					Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat tingkat 2	-	100	84	93,75	111,6	84	-	
					Persentase deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko	-	40,90	45	12,61	28,02	45	-	
					Cakupan penemuan pneumonia balita	-		80			80	-	

					Persentase kasus diare yang ditangani	-		90			90	-	
1	1	22	09	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase sinyal kewaspadaan (alert) yang direspon dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)	-	100	90	100	111,11	90	290	
					Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) yang dilakukan oleh Puskesmas dalam waktu <24 jam	-	100	65	100	153,84	65	-	
					Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan Kesehatan paripurna di Puskemas	-	100	77	100	129,87	77	-	
1	1	22	13	Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis	Prevalensi malaria (API) <1%	-	-	<1	0,03	-	<1	-	
					Persentase malaria (SPR) <5%	-	-	25	0,09	-	25	-	
					Insidens rate DBD per 100.000 penduduk	-	30,68	64	21,10	32,96	64	115,78	
					Persentase kasus zoonosis lainnya yang ditangani sesuai standar	-	100	85	100	117,6	85	-	
					Persentase pengendalian vektor terpadu	-	60	75	100	133,33	75	-	

					Persentase cakupan pengobatan massal kecacingan terhadap sasaran	-	94	35	87,6	250,2	35	-	
1	1	22	14	Komisi Penanggulangan AIDS	Persentase Kecamatan yang melaksanakan kegiatan upaya penanggulangan HIV AIDS	-	100	100	100	100	100	300	
1	1	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan	-	54,60	95	61,01	64,22	95	210,61	
				Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Masyarakat mempunyai jaminan kesehatan	-	54,60	95	95	100	95	-	
					Persentase masyarakat miskin yang terintegrasi Jamkesda ke JKN	-	54,60	100	85	85	100	-	
1	1	36		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)	-	93,79	87,50	85	97,14	87,50	266,29	
					Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	-	100,00	45,83	80	174,5	45,83	-	
1	1	36	01	Pencegahan penyakit tidak menular	Jumlah wanita usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker	-	20	25	5	20	25	-	

					leher rahim (KLR) dengan metode IVA								
					Prevalensi tekanan darah tinggi (HT)	-	41,23	22,80	29	127,1	22,80	93,03	
					Prevalensi Diabetes Mellitus (DM)	-	0,85	6,90	12	173,9	6,90	19,75	
					Prevalensi Obesitas	-	8,25	15,40	1	6,4	15,40	-	
					Prevalensi merokok pada penduduk usia <18 tahun	-	10,00	5	10	200	5	-	
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan Posbindu	-	272	60	90	150	60	-	
1	1	36	04	Pelayanan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	-	100	50	80	160	50	230	
					Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	-	100	60	80	133,33	60	-	
1	1	39		Program Upaya Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan kesehatan tradisional	-	25	60	61	101,6	60	146	
1	1	39	01	Penguatan pelayanan kesehatan tradisional di	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional	-	24	10	17	170	10	-	

				fasilitas pelayanan kesehatan									
					Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional	-	6	10	10	100	10	-	
1	1	20		Program perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi status gizi balita kurus (BB/TB)	-	14,99	10,15	5,15	50,73	10,15	-	
1	1	20	09	Peningkatan mutu dan kecukupan gizi	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	-	71,87	98	80,35	81,98	98	-	
					Persentase bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif	-	67,45	49	66,60	135,9	49	-	
					Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah	-	71,87	70	56,20	80,2	70	-	
					persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)	-	65,97	50	83,27	166,54	50	-	
1	1	20	10	Penanggulangan masalah gizi	Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	-	100	90	92,42	102,68	90	282,42	
					Persentase balita kurus yang	-	100	89,8	93,35	103,95	89,8	-	

					mendapatkan makanan tambahan								
1	1	23		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal predikat Madya	-	100	100	100	100	100	300	
1	1	23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang sudah berizin dan termonitoring	-	100	85	75	88,23	85	260	
					Persentase Praktik profesi kesehatan yang sudah berizin dan termonitoring	-	100	85	80	94,11	85	-	
					Persentase penyehat tradisional yang sudah berizin dan termonitoring	-	100	85			85	-	
					Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai kegiatan dalam penunjang kesehatan yang sudah beizin dan termonitoring	-	60	85	85	100	85	-	
					Persentase usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang sudah beizin dan termonitoring	-	100	85			85	-	
					Persentase produk industri rumah tangga pangan (PIRT)	-	100	85	85	100	85	-	

					yang sudah beizin dan termonitoring								
					Persentase fasilitas perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang sudah beizin dan termonitoring	-	100	75			75	-	
1	1	23	09	Manajemen pengelolaan sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui form 63 dan ABK SDMK	-	80	70	100	142,85	70	250	
					Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti uji kompetisi	-	80	90	90	100	90	-	
					Persentase tenaga kesehatan yang dilakukan penilaian petugas teladan oleh dinas kesehatan	-	75	100	100	100	100	-	
1	1	23	10	Manajemen pengelolaan sistem informasi kesehatan	Persentase ketepatan waktu pengumpulan SP2TP pertahun	-	7	70	63,75	91,07	70	140,75	
					Persentase kelengkapan data pelaporan SP2TP pertahun	-	24	70	63,75	91,07	70	-	
					Persentase Puskesmas yang memiiki sarana dan prasarana pengelolaan sistem Informasi	-	11,60	100	100	100	100	-	

					Puskesmas (SIKNAS/SIDAK) baik secara online maupun offline								
1	1	23	11	Pembinaan penyelenggaraan akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi dan reakreditasi	-	100	10	0	0	10	-	
1	1	23	12	Pembinaan pendekatan keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS-PK	-	100	24	24	100	24	-	
1	1	23	13	Kemitraan dan Jejaring pelayanan kesehatan Puskesmas	Persentase klinik perorangan dan dokter keluarga yang bermitra sesuai standar	-	100	100	78	78	100	278	
1	1	23	15	Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik)		-							
1	1	23	16	Manajemen pengelolaan sistem informasi kesehatan (DAK Reguler)		-							
1	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	-	1200 surat	1200 surat	1200 surat	1	1200 surat	-	
1	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik	-	100	100	100	1	100	-	

				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase tersedianya sarana dan bahan kebersihan kantor	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase ketersedian alat tulis kantor	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya alat listrik di kantor	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	19	Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	Persentase terbayarnya operasional dinas dan program	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah tercapainya pembuatan sertifikat hak milik tanah	-							

1	1	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	02	07	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	10 buah	10 buah	10 buah	1	10 buah	-	
1	1	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	-	1 buah	1 buah	1 buah	1	1 buah	-	
1	1	02	47	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK REGULER)	Jumlah tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional (DAK REGULER)	-	1 unit	1 unit	1 unit	1	1 unit	-	
1	1	02	48	Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK REGULER)	Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	-	
1	1	02	50	Pengadaan peralatan gedung kantor (DID)	Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor	-	7 Paket	7 Paket	7 Paket	1	7 Paket	-	

1	1	02	52	Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK Reguler Kefarmasian)	Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	-	
1	1	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi petugas	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	100	100	100	1	100	-	
1	1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1	1 laporan	-	
1	1	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	1	4 kegiatan	-	
1	1	06	08	Implementasi dan sinkronisasi perencaan program dan kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan perencanan program dan kegiatan SKPD	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1	1 kegiatan	-	

1	1	06	09	Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	-	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	1	4 kegiatan	-	
Menurunnya AKI, AKN, AKB dan Stunting					**Angka Kematian Ibu (AKI)**	**100,5**							
					Angka Kematian Neonatus (AKN)	**17,6**							
					Angka Kematian Bayi (AKB)	**10**							
					Prevalensi Stunting Pada Balita	**16**							
1.02.02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	40							
1.02.02.2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	88							
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan ibu hamil 100%	100							
					Persentase puskesmas dengan capaian kunjungan ibu hamil minimal 4 kali (K4)	100							
					Prevalensi anemia gizi pada Ibu hamil	36							

		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	13							
		Persentase puskesmas yang melaksanakan P4K	100							
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan ibu bersalin 100%	99,5							
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	91							
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan bayi baru lahir 100%	100							
		Persentase Kunjungan Neonatal (KN1)	94							
		Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	50							
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan kesehatan balita 100%	97							
		Cakupan pelayanan balita	95							
		Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	70							

		Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	30							
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurang	14							
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	8							
		Persentase Ibu hamil yang medapat Tablet Tambah Darah (TTD)	81							
		Persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah	52							
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)	52							
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	80							
		Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	85							
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan	75							

		Persentase Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat	75							
		Persentase Puskesmas yang mempunyai pangkalan saka bakti husada	100							
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	80,20							
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	100							
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	7							
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	85							

1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan PHBS	70							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menerima anggaran operasional pelayanan puskesmas	25							
Menurunnya Angka Kesakitan PM dan PTM		**Persentase penyakit menular yang tertangani**	**100**							
		Persentase pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular	**100**							
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	40							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	88							
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan pada Usia	76							

		Pendidikan Dasar 100%								
		Persentase sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10	60							
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100%	65							
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	45							
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut 100%	100							
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Santun Lansia	50							
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 100%	100							
		Prevalensi tekanan darah tinggi (HT)	20							
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan	Persentase puskesmas dengan	100							

	Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	capaian pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus 100%								
		Prevalensi penderita diabetes mellitus (DM)	5,9							
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100%	100							
		Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	50							
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis 100%	100							
		Insidensi TB per 100.000 penduduk (CNR)	323,0							
		Treatment Coverage pada Pasien TB	90							
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 100%	100							
		Persentase pemeriksaan HIV	75							

		pada kelompok beresiko								
		Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	72							
		Insidensi HIV per 1.000 pddk yang tidak terinfeksi HIV	3,89							
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	56							
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	40							
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (IPAL)	9							
		Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Limbah Medis)	100							
		Persentase Tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	65							
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan	68							

		(TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar								
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	50							
		Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	60							
		Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	1							
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase sinyal kewaspadaan (alert) yang direspon dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)	95							
		Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) yang dilakukan oleh Puskesmas dalam waktu <24 jam	95							
		Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna di Puskesmas	95							
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan	100							

	dan Pasca Krisis Kesehatan	kegawatdaruratan kepada masyarakat								
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko	47							
		Prevalensi malaria (API) <1	<1							
		Persentase malaria (SPR) <5	<5							
		Insidens Rate DBD per 100.000 penduduk	30,0							
		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	85							
		Persentase cakupan pengobatan massal kecacingan terhadap sasaran	80							
		Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	80							
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan	80							
		Persentase cakupan imunisasi lanjutan/booster pada baduta	30							
		Persentase cakupan imunisasi pada anak sekolah (BIAS)	75							
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	100							

		kegiatan Posbindu PTM (Utama)								
		Jumlah wanita usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker leherrahim dengan metode IVA	20							
		Prevalensi obesitas	15,20							
		Persentase Meroko Penduduk Usia 10-18 Tahun	7							
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	35							
		Persentase penduduk yang dilaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi	25							
		Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	10							
		Persentase deteksi penyakit kanker mulut rahim	1							
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Posbindu secara aktif	70							

1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah UPT yang menerima anggaran operasional	2							
Meningkatnya Mutu pelayanan dan Sumber Daya kesehatan		**Persentase Fasyankes yang terakreditasi**	**75**							
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	**72**							
		Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	**48**							
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	40							
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	62							
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yg dibangun/relokasi	1							

1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang di rehab sedang/berat	2							
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu yang di rehab sedang/berat	3							
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT yang menerima anggaran Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25							
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6							
		Jumlah UPT yang menerima anggaran Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25							
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT yang mendapatkan peralatan kesehatan	25							
		Persentase Fasyankes dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	76							
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase puskesmas yang	96							

		memiliki ketersediaan obat dan vaksin								
		Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100							
		Persentase penggunaan obat rasional (POR) di fasyankes (Puskesmas)	92							
		Persentase penggunaan obat sesuai formulasi nasional (fornas) di Puskesmas	96							
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat obat rasional melalui GeMa CerMat	100							
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Dinkes yang melaksanakan Pemeliharaan sarana	27							
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Dinkes yang melaksanakan Pemeliharaan prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27							

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	88							
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional	10							
		Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional	10							
		Persentase fasyankes yang menyelenggarakan kegiatan yankestrad	40							
		Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota	0							
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,12							
1.02.02.2.02..24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan kepada masyarakat	100							
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	75							

		Persentase masyarakat miskin yang terintegrasi Jamkesda ke JKN	92							
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal predikat madya	100							
		Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	100							
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	100							
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase ketepatan waktu pengumpulan SP2TP	70							
		Persentase kelengkapan data pelaporan SP2TP	70							
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sistem informasi Puskesmas (SIKNAS/SIKDA) baik secara online maupun offline	75							
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	Jumlah pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan	1							

	Kesehatan dan Jaringan Internet									
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	100							
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pasien yang dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan	4							
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	72							
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui form 63 dan ABK SDMK	70							
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	90							
		Persentase Fasyankes dengan jenis SDMK sesuai standar	82							

		Persentase fasilitas kesehatan yang sudah berizin dan termonitoring	87							
		Persentase praktik profesi kesehatan yang sudah berizin dan termonitoring	87							
		Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan PIS-PK	100							
		Persentase puskesmas melaksanakan update ASPAK	100							
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UPT yang SDMK mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	40							
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang mengikuti pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	50							
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek	92,90							

	Kesehatan dan Makanan Minuman	dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan								
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan toko obat yang berizin	75							
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang sudah berizin dan termonitoring	85							
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan saintifikasi jamu (Obat tradisional)	1							
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	91							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100							

1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikan seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100							
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100							
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen anggaran	6							
1.02.01.2.01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja sesuai dengan ketentuan (LKjIP, LKPJ, LPPD, Tepra, RFK, Laporan Tahunan)	7							
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselesaikannya administrasi keuangan	12							
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12							
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	12							
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5							

1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1							
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	16							
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12							
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12							
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12							
		Tersedianya jasa kebersihan kantor	12							
		Tersedianya makanan dan minuman	12							
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12							
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12							
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan gedung kantor	14							
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedia peralatan gedung kantor	14							

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12							
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12							
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12							
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12							
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	12							
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional dan lapangan	12							
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12							

	Kantor dan Bangunan Lainnya									
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Capaian Standar Pelayanan Minimal Setiap Jenis Pelayanan, Indikator dan Standar Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2020 di gambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
Tahun 2020 dan Tahun Berjalan (2021)

No	Indikator	Standar	Target		Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2020	2021 s/d Triwulan II	2020	2021 s/d Triwulan II	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	100 %	100 %	100	42.4	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	100 %	100 %	99.3	43.3	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	100 %	100 %	100	45.4	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	100 %	100 %	96.4	17.7	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	100 %	100 %	74.3	2.9	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %	100 %	100 %	62.4	17.8	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100 %	100 %	100 %	62.6	30	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	100 %	100 %	82.6	38.4	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	100 %	100 %	96.5	59.5	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	100 %	100 %	100	90.6	100 %	100 %	
	Pelayanana Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %	100 %	100 %	83.9	21.7	100 %	100 %	
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus =HIV)	100 %	100 %	100 %	86	32.3	100 %	100 %	

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kesehatan (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2020

Urusan	IKK	Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ---------- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten	631 ---------- x 100 = 0,11 % 598.375
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten	1 ---- x 100 = 16,67 % 6
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ---------- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten	11.028 --------- x 100 = 100 % 11.028
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ---------- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	10.819 --------- x 100 = 99,3 % 10.897
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	10.899 ---------x 100 = 100 % 10.899
	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten	39.601 ---------- x 100 = 96,41 % 41.077
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	54.156 ---------- x 100 = 74,31 % 72.877
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	188.240 ---------- x 100 = 62,37 % 301.803
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	36.000 ---------- x 100 = 62,57 % 57.538
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	27.987 --------- x 100 = 82,55 % 33.903
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten	5.430 ------- x 100 = 96.50 % 5.636
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	1.191 -------- x 100 = 100 % 1.191
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten	4.374 ------- x 100 = 83,89 % 5.214

	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	10.888 ---------- x 100 = 85,96 % 12.666

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penyakit menular yang tertangani	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	
2	Persentase pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	
3	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 KH	110,7	100,5	100	97	95	93	83,24	71,6	110,7	100,5	
4	Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1000 KH	18,6	17,6	16,6	15,5	14	12	-	-	18,6	17,6	
5	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	10,7	10	9,5	9	8,5	8	3,88	6,5	10,7	10	
6	Prevalensi Stunting Pada Balita	17	16	15	14	13	12	24,11	20,18	17	16	
7	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	70	75	80	90	95	100	-	-	70	75	
8	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	71	72	80	88	96	100	-	-	71	72	
9	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	44	48	52	56	60	64	-	-	44	48	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.3.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi urusan Pemerintah dan pelayanan umum dalam bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, serta tata cara kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati.
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang kesehatan.
c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan kesehatan masyarakat, pengendalian dan pencegahan penyakit.
d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pelayanan kesehatan.
e. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
f. Pengelolaan unsur kesekretariatan.
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

a. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar beserta UPT
b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia khususnya tenaga Kesehatan di Puskesmas guna memberikan pelayanan Kesehatan yang terbaik bagi masyarakat
c. Masih minimnya jumlah peralatan kesehatan yang tersedia di Puskesmas
d. Masih ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau dalam memberikan pelayanan Kesehatan terkait rusaknya jalan/sarana transportasi

2.3.3 Tantangan dan Peluang

a. Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan di seluruh daerah Kabupaten Banjar
b. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan beberapa Puskesmas dan jaringannya yang masih rusak
c. Peralatan Kesehatan yang tersedia masih belum sepenuhnya sesuai standar
d. Minimmnya partisispasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan yang telah direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis”, maka ditempuh 5 (lima) misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Ditinjau dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, peran Dinas Kesehatan ada pada misi pertama dengan target untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.

2.4.1 Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun tujuan Dinas Kesehatan adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem kesehatan” dengan indikator indeks kesehatan.

2.4.2 Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan. Adapun sasaran Dinas Kesehatan adalah Menurunnya Angka Kesakitan PM dan PTM, Menurunnya AKI, AKN, AKB dan stunting, Meningkatnya Mutu pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab Banjar	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	40	48.058.830.026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab Banjar	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	40	48.058.830.026	
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	62		
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat		Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	88		

						Daerah Kabupaten/Kota					
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	100		
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	100		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab Banjar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	72	213.801.600	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab Banjar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	72	213.801.600	
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di		Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui form 63 dan ABK SDMK	70		

						Wilayah Kabupaten/Kota					
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kab Banjar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	92,90	6.696.800	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kab Banjar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	92,90	6.696.800	
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek dan toko obat yang berizin	75		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab Banjar	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	80,20	353.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab Banjar	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	80,20	353.000.000	
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta		Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	100		

						Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
						Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu aktif	85		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Banjar	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100	12.291.768.800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Banjar	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100	12.291.768.800	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselesaikan seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselesaikanny a administrasi keuangan	12 Bulan		

						Administrasi Kepegawaian Perangkat Dareah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun		
						Administrasi Umum Perangkat Dareah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan gedung kantor	14 Item		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kec. T. Makmur	Jumlah ruangan yang dibangun	6 Paket	Diarahkan menggunakan Dana DAK
2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Dalam Pagar Ulu	Tersedianya prasarana	1 Paket	Diarahkan ke Dana Desa
3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Alkes Desa) (Ambulance)	Desa Keramat Baru	Tersedianya prasarana	1 Paket	Diarahkan ke Dana Desa
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Alkes Desa)	Desa Akar Begantung Ulu	Tersedianya Alkes di Desa	1 Paket	Diarahkan ke Dana Desa
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Melayu Tengah (Pusk. Martapura Timur)	Terpenuhinya Alkes Puskesmas	10 Paket	Diarahkan menggunakan Dana DAK
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Melayu Tengah (Pusk. Martim)	Terpenuhinya parasarana Puskesmas	7 Unit	Diarahkan menggunakan Dana DAK
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya/Rehab Pustu	Desa Keramat	Jumlah Pustu yang di rehab	1 Paket	Sudah masuk di ranwal dan melihat kemampuan keuangan daerah.
8	Pembangunan pustu	Desa Pasar Jati	Luas Pustu yang direhab	1 paket	Ditunda terkendala Peraturan daerah terkait Sepadan Jalan, hingga ada lahan lain yang tersedia dengan sertifikat/ hibah.

9	Pembelian mubeler pustu pasar jati	Desa Pasar Jati	Tersedianya mebeleur	1 paket	Ditunda hingga terbangun pustu yang baru
10	Penyuluhan Kesehatan	Desa Danau Salak	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan	1 Keg	Diarahkan menggunakan Dana APBD Puskesmas
11	Rehab WC Puskesmas Pembantu	Desa Kelampaian Ilir	Jumlah WC yang di rehab	1 Paket	Ditunda ke tahun berikutnya
12	Penyemprotan atau poging	Desa Tambangan	Frekuensi Fogging	1 Keg	Dianggarkan melalui APBD Dinkes
13	Pembagian Bubuk ABT	Desa Tambangan	Jumlah Bubuk yang dibagikan	1 Keg	Dianggarkan melalui APBD Dinkes
14	Rehab Plafond dan beberapa bagian gedung PUSTU	Desa Sungai Tuan Ilir	Luas Pustu yang direhab	1 Paket	Sudah masuk di ranwal dan melihat kemampuan keuangan daerah
15	Pembelian Meubeler dan sarana Penunjang Pustu Sungai Tuan Ilir	Sungai Tuan Ilir	Jumlah mebeleur yang tersedia	1 Paket	Ditunda ke tahun berikutnya setelah pustu direhab
16	penyuluhan ISPA	Desa Tambangan	Frekuensi Penyuluhan yang dilaksanakan	1 Keg	Diarahkan menggunakan Dana APBD Puskesmas
17	Pengurugan halaman Puskesmas Pembantu Ds Pindahan Baru	Desa Pindahan Baru	Luas halaman yang di urug	15 m x 15 m	Ditunda ke tahun berikutnya
18	Rehab Total Pustu Haur Kuning	Desa Haur Kuning	Luas Pustu yang direhab	8m x 20m	Sudah masuk di ranwal dan melihat kemampuan keuangan daerah
19	Rehab total Puskesmas Induk Beruntung Baru	Puskesmas Beruntung Baru	Luasa Puskesmas yang direhab	15m x 25 m	Diusulkan melalui Dana DAK
20	Pemasangan Bata pres dihalaman Gedung Puskesmas	Desa Kampung Baru	Luas Pemasagan Bata Press	10m x 20m	Diusulkan melalui Dana DAK
21	Rehab total pustu desa labuan tabu	Desa Labuan Tabu	Jumlah Pustu yang di rehab	1 Paket	Diusulkan ke tahun berikutnya
22	Kurangnya pengetahuan	Desa Tanjung Rema	Frekuensi Penyuluhan	1 Keg	Diarahkan menggunakan Dana APBD Puskesmas
23	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Kesehatan	Desa Pasayangan Selatan	Jumlah peralatan yang tersedia	1 paket	Diarahkan menggunakan Dana Desa

24	Pengerukan / Pondasi Postu	Kelurah Murung Keraton	Luas Urug halaman	20m x 20m	Diusulkan ke tahun berikutnya
25	Rehab/penambahan ruangan di Puskesmas Induk Martapura 1	Kelurah Tanjung Rema Darat	Jumlah Penambahan ruang Puskesmas	1 Paket	Diusulkan melalui Dana DAK
26	Pengadaan Genset untuk Puskesmas Martapura 1	Kel Tanjung Rema Darat	Jumlah Pengadaan Genset	1 Paket	Diusulkan melalui Dana DAK
27	Pembangunan IPAL Puskesmas Martapura 1	Kel Tanjung Rema Darat	Jumlah Pengadaan IPAL	1 Paket	Diusulkan melalui Dana DAK
28	Pengadaan Sepeda Motor Roda dua untuk Puskesmas Martapura 1	Kel Tanjung Rema Darat	Jumlah Roda 2 yang tersedia	3 Unit	Diusulkan melalui Dana DAK
29	Pengadaan Alat strilisator/Autoclove dan Safety Cabinet Laboratory untuk Puskesmas Martapura 1	Kel Tanjung Rema Darat	Jumlah alkes yang tersedia	1 Unit	Diusulkan melalui Dana DAK
30	Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Martapura 1	Kel Tanjung Rema Darat	Jumlah Rumah Dinas yang direhab	2 buah	Diusulkan melalui Dana DAK
31	Rehab Sedang Pustu Tungkaran	Desa Tungkaran	Jumlah Pustu yang direhab	1 paket	Belum masuk di ranwal dan melihat kemampuan keuangan daerah
32	Pengadaan Pustu Kit untuk Pustu Tungkaran	Desa Tungkaran	Jumlah Pengadaan Pustu Kit	1 Paket	Diusulkan melalui Dana DAK
33	Peningkatan Halaman Puskesmas Martapura 2 (Paving, pagar dan Taman)	Kelurah Keraton	Tersedia Halaman Puskesmas	1 Paket	sudah masuk ranwal dan melihat kemampuan keuangan daerah
34	Pengadaan Kendaraan Roda dua untuk Puskesmas Martapura 2	Kelurah Keraton	Jumlah Roda 2 yang tersedia	2 Buah	Diusulkan melalui Dana DAK
35	Pengadaan Dental Unit untuk Puskesmas Martapura 2	Kelurah Keraton	Jumlah Dental yang tersedia	1 Set	Diusulkan melalui Dana DAK
36	Pengadaan 1 unit ambulan double gardan, 2 unit motor trail dan 2 unit motor biasa	Desa Sungai Pinang	Jumlah Sarana yang tersedia	5 Unit	Diusulkan melalui Dana DAK

37	Aula Puskesmas dan Pagar Puskesmas	Desa Sungai Pinang	Luas Bangunan dan pagar yang tersedia	20m x 10m 50m x 57m	Diusulkan melalui Dana DAK
38	Pengadaan Tenaga Perawat (1 orang), Tenaga Bidan (1orang), Tenaga Gizi (1orang)	Desa Sungai Pinang	Jumlah Nakes yang tersedia	3 orang	Diupayakan dgn menunggu formasi CPNS/pengadaan/roling ASN/NON ASN
39	Pembangunan MCK	Desa Sungai Pinang	Jumlah MCK yang dibangun	5 Unit	Diarahkan ke Dana Desa
40	Pembangunan Pustu 1	Desa Kahelaan	Jumlah pustu yang dibangun	1 Unit	Sudah masuk ranwal dan melihat kemampuan keuangan daerah
41	Pembangunan pagar Pustu Belimbing Lama	Desa Belimbing Lama	Luas pagar yang dibangun	14,4 x 7,5 M	Belum prioritas, Diusulkan ke tahun berikutnya
42	Pembangunan pagar Pustu Desa Rantau Nangka	Desa Rantau Nangka	Luas pagar yang dibangun	30,1 X 13,5 M	Belum prioritas, Diusulkan ke tahun berikutnya
43	Pembangunan pagar Pustu Desa Sumber Baru	Desa Sumber Baru	Luas Pagar yang dibangun	22,13 x 22,5 M	Belum prioritas, Diusulkan ke tahun berikutnya
44	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kec. T. Makmur	Jumlah ruangan yang dibangun	6 Paket	Diarahkan menggunakan Dana DAK

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah adalah kebijakan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan keberhasilan capaian semua sasaran dan prioritas serta program kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Tema RKPD 2022 mengalami perubahan setelah adanya pandemi Covid 19, menjadi "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Hal ini juga mempengaruhi arah kebijakan provinsi Kalimantan Selatan yaitu meneruskan fokus pembangunan melalui sektor ketahanan pangan, pariwisata, industri hilir dan perdagangan, mengusung konsep *money follow* dan pengurangan masyarakat miskin, pengangguran dan pemulihan ekonomi pasca Covid 19. Diharapkan Kabupaten Banjar dapat berkontribusi melalui indikator tingkat kemiskinan dan IPM, demi tercapainya keberhasilan pembangun daerah.

Selama tahun 2020, pandemi Covid 19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan nasional, hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19 yang akan mempengaruhi pembangunan nasional pada tahun 2021 sehingga juga akan berdampak pada pembangunan daerah kedepannya. Beberapa kebijakan tersebut antara lain Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid 19 yang disahkan menjadi undang-undang pada 13 Mei 2020 dan Perpres Nomor 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020.

Sementara itu arah kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 berfokus pada transformasi struktur ekonomi, sumber daya manusia, menangkas hambatan investasi dan memperkuat infrastruktur ekonomi. Selaras dengan arah kebijakan Provinsi, arah kebijakan Kabupaten Banjar 2021 yang diambil guna mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Arah kebijakan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten inlah yang menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam menyusun Renja tahun 2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang menjadi *concern* Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar diantaranya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang belum sepenuhnya terpenuhi, prasarana yang perlu mendapat perhatian yaitu sistem kelistrikan di Puskesmas serta minimnya peralatan medis Puskesmas.

Atas dasar isu-isu tersebut, serta berdasarkan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem kesehatan		Indeks Kesehatan	73,36
	Menurunnya Angka Kesakitan PM dan PTM	Persentase penyakit menular yang tertangani	100
		Persentase pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular	100
	Menurunnya AKI, AKN, AKB dan Stunting	Angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 KH	69
		Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1000 KH	0,05
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	18,6
		Prevalensi stunting pada Balita	16
	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	100
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100
		Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	64
	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas kesehatan	75

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
   1) Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
   2) Upaya pemenuhan sarana, prasarana, obat-obatan dan alat Kesehatan di seluruh UPT
   3) Peningkatan mutu, kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

   Pada tahun 2022 yang akan datang, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar merencanakan akan melaksanakan 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 60.924.097.226,- dengan perincian sebagai berikut.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Uraian Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026 dan RKPD 2022.

Tabel 4.1
Uraian Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem kesehatan	Menurunnya Angka Kesakitan PM dan PTM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Menurunnya AKI, AKN, AKB dan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Mutu pelayanan dan Sumber Daya kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan

				UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

+	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Kab Banjar	40	48.058.830.026	APBD		52	46.052.225.848
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	Kab Banjar	88	42.822.777.426	APBD		90	43.164.417.988
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan ibu hamil 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
		Persentase puskesmas dengan capaian		100				100	

					kunjungan ibu hamil minimal 4 kali (K4)							
					Prevalensi anemia gizi pada Ibu hamil		36				36	
					Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)		13				11,5	
					Persentase puskesmas yang melaksanakan P4K		100				100	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan ibu bersalin 100%	Kab Banjar	99,5		APBD		99,6	
					Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)		91				93	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan bayi baru lahir 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
					Persentase Kunjungan Neonatal (KN1)		94				94	
					Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif		50				55	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan kesehatan balita 100%	Kab Banjar	97		APBD		99	

					Cakupan pelayanan balita		95				60	
					Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya		70				73	
					Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita		30				45	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Kab Banjar	14		APBD		13	
					Prevalensi Balita Gizi Buruk		8				7,3	
					Persentase Ibu hamil yang medapat Tablet Tambah Darah (TTD)		81				82	
					Persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah		52				54	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)		52				54	
					Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan		80				83	
					Persentase balita kurus yang		85				86	

					mendapatkan makanan tambahan							
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan	Kab Banjar	75		APBD		80	
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat		75				80	
					Persentase Puskesmas yang mempunyai pangkalan saka bakti husada		100				100	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab Banjar	80,20	353.000.000	APBD		86,80	388.300.000
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	Kab Banjar	100	188.000.000	APBD		100	206.800.000

				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	Kab Banjar	7		APBD		14	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	Kab Banjar	85	165.000.000	APBD		85	181.500.000
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan PHBS	Kab Banjar	70		APBD		70	
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menerima anggaran operasional pelayanan puskesmas	Kab Banjar	25		APBD		25	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Kab Banjar	40	48.058.830.026	APBD		52	46.052.225.848
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	Kab Banjar	88		APBD		90	

				UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100%	Kab Banjar	76		APBD		78	
					Persentase sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10		60				62	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100%	Kab Banjar	65		APBD		67	
					Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja		45				50	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan Santun Lansia		50				60	

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
					Prevalensi tekanan darah tinggi (HT)		20				19	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
					Prevalensi penderita diabetes mellitus (DM)		5,9				4,9	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
					Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA		50				60	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
					Insidensi TB per 100.000 penduduk (CNR)		323,0				323,0	

					Treatment Coverage pada Pasien TB		90				90	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase puskesmas dengan capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 100%	Kab Banjar	100		APBD		100	
					Persentase pemeriksaan HIV pada kelompok beresiko		75				78	
					Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)		72				73	
					Insidensi HIV per 1.000 pddk yang tidak terinfeksi HIV		3,89				3,81	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	Kab Banjar	56		APBD		84	
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		40				84	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (IPAL)	Kab Banjar	9		APBD		9	
					Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah		100				100	

					medis sesuai standar (Limbah Medis)							
					Persentase Tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar		65				70	
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar		68				72	
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar		50				56	
					Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)		60				70	
					Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat		1				1	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase sinyal kewaspadaan (alert) yang direspon dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)	Kab Banjar	95		APBD		95	
					Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) yang dilakukan oleh		95				95	

					Puskesmas dalam waktu <24 jam							
					Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna di Puskesmas		95				95	
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan kepada masyarakat	Kab Banjar	100		APBD		100	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko	Kab Banjar	47		APBD		49	
					Prevalensi malaria (API) <1		<1				<1	
					Persentase malaria (SPR) <5		<5				<5	
					Insidens Rate DBD per 100.000 penduduk		30,0				30,0	
					Persentase kasus kusta baru tanpa cacat		85				85	
					Persentase cakupan pengobatan massal		80				82	

					kecacingan terhadap sasaran							
					Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		80				80	
					Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan		80				80	
					Persentase cakupan imunisasi lanjutan/booster pada baduta		30				30	
					Persentase cakupan imunisasi pada anak sekolah (BIAS)		75				75	
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)		100				100	
					Jumlah wanita usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker leherrahim dengan metode IVA		20				17	
					Prevalensi obesitas		15,20				15,0	
					Persentase Meroko Penduduk Usia 10-18 Tahun		7				6,7	
					Persentase puskesmas yang menyelenggarakan layanan Upaya		35				40	

					Berhenti Merokok (UBM)							
					Persentase penduduk yang dilaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi		25				30	
					Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas		10				32	
					Persentase deteksi penyakit kanker mulut rahim		1				2,0	
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan Posbindu secara aktif		70				75	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah UPT yang menerima anggaran operasional	Kab Banjar	2		APBD		2	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Kab Banjar	40	48.058.830.026	APBD		52	46.052.225.848
				Penyediaan Fasilitas	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab Banjar	62	5.096.052.600	APBD		65	2.733.557.860

				Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yg dibangun/relokasi	Kab Banjar	1		APBD		1	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang di rehab sedang/berat	Kab Banjar	2		APBD			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu yang di rehab sedang/berat	Kab Banjar	3		APBD		8	
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT yang menerima anggaran Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab Banjar	25		APBD		25	
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab Banjar	6		APBD		10	
					Jumlah UPT yang menerima anggaran Pengadaan Prasarana		25				25	

					dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT yang mendapatkan peralatan kesehatan	Kab Banjar	25		APBD		25	
					Persentase Fasyankes dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar		76				84	
				Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin	Kab Banjar	96		APBD		98	
					Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		100				100	
					Persentase penggunaan obat rasional (POR) di fasyankes (Puskesmas)		92				94	
					Persentase penggunaan obat sesuai formulasi nasional (fornas) di Puskesmas		96				97	

					Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat obat rasional melalui GeMa CerMat		100				100	
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Dinkes yang melaksanakan Pemeliharaan sarana	Kab Banjar	27		APBD		27	
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Dinkes yang melaksanakan Pemeliharaan prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab Banjar	27		APBD		27	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas 100%	Kab Banjar	88		APBD		90	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional	Kab Banjar	10		APBD		17	

					Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional		10				11	
					Persentase fasyankes yang menyelenggarakan kegiatan yankestrad		40				68	
					Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota		0				0	
					Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,12				0,13	
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan kepada masyarakat	Kab Banjar	100		APBD		100	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Kab Banjar	75		APBD		85	
					Persentase masyarakat miskin yang terintegrasi Jamkesda ke JKN		92				97	
				Pelaksanaan Akreditasi	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Kab Banjar	100		APBD		100	

				Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	minimal predikat madya							
					Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi		100				100	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	Kab Banjar	100	122.500.000	APBD		100	134.750.000
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase ketepatan waktu pengumpulan SP2TP	Kab Banjar	70		APBD		75	
					Persentase kelengkapan data pelaporan SP2TP		70				70	
					Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sistem informasi Puskesmas (SIKNAS/SIKDA) baik secara online maupun offline		75				100	
				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Banjar	1		APBD		1	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit	Persentase Jumlah Rumah sakit yang	Kab Banjar	100	17.500.000	APBD		100	19.500.000

				Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dilakukan pembinaan 2 kali setahun							
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pasien yang dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan	Kab Banjar	4		APBD		4	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kab Banjar	72	213.801.600	APBD		80	235.181.760
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui form 63 dan ABK SDMK	Kab Banjar	70	213.801.600	APBD		75	235.181.760
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	Kab Banjar	90		APBD		92	

					Persentase Fasyankes dengan jenis SDMK sesuai standar		82				85	
					Persentase fasilitas kesehatan yang sudah berizin dan termonitoring		87				90	
					Persentase praktik profesi kesehatan yang sudah berizin dan termonitoring		87				90	
					Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan PIS-PK		100				100	
					Persentase puskesmas melaksanakan update ASPAK		100				100	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UPT yang SDMK mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Kab Banjar	40		APBD		50	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah SDMK yang mengikuti pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Kab Banjar	50		APBD		150	

				Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Kab Banjar	92,90	6.696.800	APBD		93,75	75.000.000
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan toko obat yang berizin	Kab Banjar	75	6.696.800	APBD		78	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang sudah berizin dan termonitoring	Kab Banjar	85		APBD		90	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan		1				1	

					saintifikasi jamu (Obat tradisional)							
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		91				93	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Kab Banjar	100	12.291.768.800	APBD		100	2.393.178.180
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikan seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab Banjar	100	58.821.600	APBD		100	64.703.760
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		100				100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen anggaran		6				6	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja sesuai dengan ketentuan (LKjIP,		7				7	

					LKPJ, LPPD, Tepra, RFK, Laporan Tahunan)							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselesaikannya administrasi keuangan	Kab Banjar	12	9.466.270.000	APBD		12	17.897.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		12				12	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran		12				12	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5				5	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Banjar	1	250.000.000	APBD		1	275.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		16				50	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Banjar	12	1.624.182.200	APBD		12	1.746.750.420
				Penyediaan Komponen	Terlaksananya penyediaan komponen		12				12	

				Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12				12	
					Tersedianya jasa kebersihan kantor		12				12	
					Tersedianya makanan dan minuman		12				12	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12				12	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12				12	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab Banjar	14	145.000.000	APBD		12	159.500.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedia peralatan gedung kantor		14				12	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab Banjar	12	420.125.000	APBD		12	11.220.000

				Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12				12	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12				12	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab Banjar	12	327.370.000	APBD		12	118.107.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan		12				12	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional dan lapangan		12				12	

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		12				12	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		12				12	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari arahan pimpinan serta peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

3. RSUD Ratu Zalecha

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2022.

Penyusunan renja tahun 2022 dimaksud untuk mendukung melaksanakan visi misi Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif. Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD tahun 2022.

Dengan disusunnya renja tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan dapat melaksanakan taget kinerja yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari atas RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rentra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar dan Renstra SKPD 2021-2026. Renja PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam satu tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan renja perangkat daerah
2. Penyusunan rancangan awal renja perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renja perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah
6. Penetapan renja perangkat daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2013, Tentang Uraian dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Tahun 2022 sebagai pedoman arah kerja bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan tujuan sebagai berikut :

1. Panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan agar dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Ratu Zalecha Martapura 2021-2026;
2. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang baik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 RSUD Ratu Zalecha Martapura yang terdiri dari: Isu-isu Penting Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan, Capaian Renstra dan Analisa Capaian Kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura;
III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang terdiri dari: Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja RSUD Ratu Zalecha Martapura;
IV. Rencana Kerja, Pendanaan RSUD Ratu Zalecha Martapura yang terdiri dari : Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.
V. Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA

Renja tahun 2022 merupakan renja tahun pertama untuk periode renstra tahun 2021-2026 dengan kepala daerah terpilih.

2.1.1. Evaluasi Program dan Kegiatan

RSUD Ratu Zalecha pada tahun 2020 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

1. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

   1) Program pelayanan administrasi perkantoran

      Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 2.989.100.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp 2.072.454.334,- (69,33%) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

      a. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

         Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 147.274.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

         Target kinerja pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah 12 Bulan dengan realisasi kinerja 12 Bulan dengan capaian 100%.

      b. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

         Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, pagu anggaran sebesar Rp 150.000..000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 146.267.500,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

         Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran adalah 13 Bulan dengan realisasi kinerja 13 Bulan dengan capaian 100%.

      c. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

         Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 841.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 754.919.600,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

         Target kinerja pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah 1 Paket dengan realisasi kinerja 1 Paket dengan capaian 100%.

      d. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran

         Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran sebesar Rp 1.847.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.023.993.234,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran adalah 13 Bulan dengan realisasi kinerja 13 Bulan dengan capaian 100%.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 200.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 158.759.241,- (79.37%) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 105%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pagu anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 158.759.241,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal adalah 40 Orang dengan realisasi kinerja 42 Orang dengan capaian 105%.

3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 untuk melaksanakan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp 6.088.179.540,- realisasi keuangan sebesar Rp 5.678.781.064,- (93.27%) dengan realisasi fisik sebesar 96,66% dan realisasi capaian kinerja sebesar 97,56%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Reguler)

Pagu anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Reguler) sebesar Rp 3.355.307.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.118.269.840,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Reguler) adalah 4 Paket dengan realisasi kinerja 4 Paket dengan capaian 100%.

b. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DID)

Pagu anggaran Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DID) sebesar Rp 510.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 473.683.250,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DID) adalah 1 Dokumen Masterplan dengan realisasi kinerja 1 Dokumen Masterplan dengan capaian 100%.

Realisasi kegiatan berupa dokumen masterplan bangunan rumah sakit.

4) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 untuk melaksanakan program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata sebesar Rp 3.283.839.059,- realisasi keuangan sebesar Rp 2.789.537.944 (84.94%) dengan realisasi fisik sebesar 97,50% dan realisasi capaian kinerja sebesar 93%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit sebesar Rp 2.373.437.780,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.999.444.654,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit adalah 2 Paket dengan realisasi kinerja 2 Paket dengan capaian 100%.

5) Program Peningkatan Pelayanan PONEK

Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 untuk melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan PONEK sebesar Rp 30.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 20.425.000 (68.08%) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 99,27%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemantauan dan Peningkatan Mutu Keperawatan Unit Perawatan Ibu

Pagu anggaran Kegiatan Pemantauan dan Peningkatan Mutu Keperawatan Unit Perawatan Ibu sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 8.895.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Pemantauan dan Peningkatan Mutu Keperawatan Unit Perawatan Ibu adalah 85% dengan realisasi kinerja 85% dengan capaian 100%.

6) Program Pelayanan PICU/NICU

Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 untuk melaksanakan Program Pelayanan PICU/NICU sebesar Rp 20.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 8.895.000 (44,48%) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 91,25%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemantauan dan Peningkatan Mutu Keperawatan Unit Perawatan Bayi

Pagu anggaran Kegiatan Pemantauan dan Peningkatan Mutu Keperawatan Unit Perawatan Bayi sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.295.000,- (42,95%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Pemantauan dan Peningkatan Mutu Keperawatan Unit Perawatan Bayi adalah 85% dengan realisasi kinerja 85% dengan capaian 100%.

7) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 untuk melaksanakan program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp 251.655.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 100.524.800 (39,95%) dengan realisasi fisik sebesar 91,66% dan realisasi capaian kinerja yaitu persentase capaian indikator SPM Rumah Sakit berupa hasil penilaian SPM Rumah Sakit dengan target 82% dan realisasi 81%, capaian kinerja sebesar 98,75%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penilaian SPM

Pagu anggaran Kegiatan Penilaian SPM sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 8.158.000,- (40,79%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Penilaian SPM adalah 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100%.

b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pagu anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.550.000,- (72,75%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah 85% dengan realisasi kinerja 85% dengan capaian 100%, penilaian kinerja yaitu Persentase Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan Standar Asuhan Keperawatan (SAK).

c. Kegiatan Peningkatan dan Pemantauan Mutu Keperawatan Rumah Sakit

Pagu anggaran Kegiatan Peningkatan dan Pemantauan Mutu Keperawatan Rumah Sakit sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 16.085.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Peningkatan dan Pemantauan Mutu Keperawatan Rumah Sakit adalah 85% dengan realisasi kinerja 85% dengan capaian 100%, penilaian kinerja yaitu Persentase Indikator Mutu Keperawatan Rumah Sakit.

8) Program Pelayanan Kesehatan BLUD

Pagu anggaran Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rp 93.500.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 86.226.327.079,- serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

Program ini didukung oleh kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD dengan target kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pelayanan BLUD 82% dengan realisasi kinerja 85,71%, capaian kinerja 104,52%. Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya kegiatan operasional rumah sakit yang menunjang kelancaran pelayanan di rumah sakit.

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai :
   - Belanja pegawai pelayanan yaitu :
     - Honor tenaga kontrak.

b. Belanja Barang dan Jasa :
   - Belanja pegawai pelayanan yaitu :
     - Belanja Jasa Pelayanan
     - Honor kepala ruangan, instalasi, komite
     - Honor Pengelolaan BLUD
   - Biaya bahan pelayanan yaitu :
     - Bahan logistik Instalasi Gizi
     - Pengadaan Alat Dapur
     - Obat, BAKHP, dan bahan perlengkapan
     - Biaya Pengganti Pengolahan Darah
     - Biaya bahan laboratorium dan bahan lainnya
     - Film X-Ray dan Penunjang Radiologi Lainnya
     - Gas Medis
     - Gas LPG
     - Biaya KSO Hemodialisa
     - Belanja Alat Kesehatan
     - Belanja Obat BAKHP dan APD (Penanganan Keadaan Darurat Covid-19)
     - Belanja PMT Keadaan Darurat Covid-19
   - Biaya Barang dan Jasa Lainnya (umum dan administrasi) :
     - Kegiatan Pelayanan Medik
     - Kegiatan Pelayanan Keperawatan
     - Makan dan Minum Sahur dan Buka Puasa Karyawan
     - Belanja Pakaian Kerja dan Kelengkapan Kamar Operasi
     - Belanja Pakaian Pasien
     - Bahan dan Alat Kebersihan
     - Perjalanan Dinas
     - Alat/Komponen Listrik
     - Biaya Listrik
     - Biaya Telepon
     - Biaya Air
     - ATK
     - Penggandaan / Fotocopy
     - Belanja Cetak
     - Belanja Surat-Menyurat
     - Makan/ Minum Tamu, Rapat Karyawan
     - Biaya sewa rumah dokter Spesialis (WKDS & Kontrak)
     - Belanja Peralatan Pendukung Admin dan Perkantoran

- Biaya Tagihan Perpanjangan pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio RSUD Ratu Zalecha
- Biaya Diklat, Kursus, Seminar, Bimtek, Peningkatan dan Pengembangan Pegawai RS
- Kegiatan Tim Koordinasi Pendidikan
- Kegiatan Kerohanian
- Biaya Pendampingan dari Organisasi/Ins/Lembaga Terkait
- Retur Pendapatan
- Biaya Pajak Parkir
- Biaya Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran (APAR)
- Biaya Denda Pajak
- Biaya Perijinan RS
- Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Kegiatan perencanaan, penyusunan laporan dan evaluasi
- Biaya Kegiatan SIMRS
- Biaya Operasional Tim SPI
- Belanja Pakaian Kerja Penanganan Darurat Covid-19
- Belanja Peralatan dan Perlengkapan RTRS untuk Penanganan COVID
- Rekrutmen Tenaga Rumah Sakit
- Belanja Seragam / Pakaian Kerja
- Pengisian Ulang Apar (CO2)
- Kegiatan Workshop Service Excelent Karyawan Rumah Sakit
- Belanja Insentif Tenaga RS Penanganan Covid - 19

- Biaya pemeliharaan yaitu :
  - Pemeliharaan Gedung RS
  - Pemeliharaan Perlengkapan RTRS
  - Pemeliharaan Jaringan Telepon
  - Perbaikan Panel Listrik Rumah Sakit
  - Pengiriman/Pengangkutan Barang
  - Operasional / Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan Bermotor
  - Operasional / Pemeliharaan / Perbaikan Genset
  - Operasional / Pemeliharaan / Perbaikan Incenerator / Steril Wave
  - Pemeliharaan Sanitasi Rumah Sakit
  - Pengelolaan Limbah Medis
  - Pemeliharaan / Perbaikan Alat Kesehatan
  - Pengukuran dan Kalibrasi Alat Kesehatan
- Biaya promosi/pameran/kehumasan :
  - Biaya Promosi/Pameran/Kehumasan

c. Belanja Modal :
   - Belanja Modal Aset Tetap BLUD – Peralatan dan Mesin

- Bahan dan Alat Kesehatan/Kedokteran
- Pengadaan Alat Dapur
- Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Beroda (25 Kg)
- Belanja Peralatan dan Perlengkapan RTRS
- Bahan dan Alat Kesehatan/Kedokteran Penanganan Darurat Covid-19
- Peralatan dan Perlengkapan RTRS untuk Penanganan COVID
- Belanja Kelengkapan Portal Parkir

- Belanja Modal Aset Tetap BLUD – Gedung dan Bangunan
  - Pengadaan Bangunan Gazebo
  - Pembuatan WC (Penunggu Px ICU)
  - Bangunan TPS sampah medis
  - Ruang dekontaminasi mobil ambulance
  - Ruang dekontaminasi IGD
- Belanja Pemeliharaan Bangunan
  - Rehab Ruang Ar-Raudah
  - Rehab Ruang HD
  - Sarana dan Prasarana Penanganan Darurat Covid-19
  - Pagu Kegiatan Belanja Modal BLUD - Bahan dan Alat Kesehatan/ Kedokteran sebesar Rp 310.307.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 288.201.050,- (92,87%).

2. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
   1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
      - Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DID)

        Pagu anggaran Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DID) sebesar Rp 2.222.522.540,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.086.827.974,- dan realisasi fisik sebesar 90%.

        Target kinerja pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DID) adalah 2 Paket, dengan realisasi kinerja 1,9 paket dan realisasi capaian kinerja 95%.

        Pada kegiatan ini terdapat paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Alat kesehatan Laryngoscope Blade tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan alat kesehatan pada distributor karena tingginya tingkat permintaan kebutuhan alat kesehatan secara nasional pada fasilitas kesehatan terkait dengan percepatan penanganan covid-19.

   2) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
      - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit sebesar Rp 910.401.279,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 790.093.290,- dan realisasi fisik sebesar 95%.

Target kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit adalah 3 Paket, dengan realisasi 2,72 paket dengan capaian kinerja 90,6%.

Pada sub kegiatan belanja jasa uji laboratorium ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan terkait kondisi pandemi covid-19, karena laboratorium yang biasa melaksanakan jasa uji laboratorium dalam hal ini Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) hanya mengerjakan pengujian untuk sampel covid-19, sehingga pekerjaan dialihkan ke laboratorium biasa (Labkesda) dengan tarif yang lebih murah sehingga menyebabkan serapan keuangan yang lebih kecil.

3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
   - Kegiatan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit

   Pagu anggaran Kegiatan penilaian akreditasi rumah sakit sebesar Rp 191.655.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 61.731.800,- (32.20%) dan realisasi fisik sebesar 66,66%.

   Target kinerja pada Kegiatan penilaian akreditasi rumah sakit adalah sertifikat paripurna dengan realisasi capaian kinerja sertifikat utama. Penilaian akreditasi Rumah sakit Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia Nomor : YM.02.02/VI/ 3099/2020 yaitu kegiatan survei akreditasi Rumah Sakit untuk ditunda pelaksanaannya.

4) Program Peningkatan Pelayanan PONEK
   - Kegiatan Asesment Kompetensi Perawat/ Bidan pada Unit Perawatan Ibu

   Pagu anggaran Kegiatan Asesment Kompetensi Perawat/Bidan pada Unit Perawatan Ibu sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 12.220.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

   Target kinerja pada Kegiatan Asesment Kompetensi Perawat/Bidan pada Unit Perawatan Ibu adalah 80% dengan realisasi kinerja 62% dengan capaian 77,5%, yaitu jumlah Bidan pada unit perawatan ibu sebanyak 61 orang dan yang sudah dilaksanakan Asesment Kompetensi Bidan sebanyak 38 orang, masih ada 23 orang yang belum dilakukan assesment kompetensi bidan, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan peserta dari pelaksana/penilai Asesment Kompetensi Bidan.

5) Program Pelayanan PICU/NICU
   - Kegiatan Asesment Kompetensi Perawat/ Bidan pada Unit Perawatan Bayi

Pagu anggaran Kegiatan Asesment Kompetensi Perawat/ Bidan pada Unit Perawatan Bayi sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.600.000,- (46%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Kegiatan Asesment Kompetensi Perawat/ Bidan pada Unit Perawatan Bayi adalah 80% dengan realisasi kinerja 73,84% dengan capaian 92,3%, yaitu jumlah Perawat/Bidan pada unit perawatan bayi sebanyak 26 orang dan yang sudah dilaksanakan Asesment Kompetensi sebanyak 24 orang, masih ada 2 orang yang belum dilakukan assesment kompetensi, hal ini disebabkan pada saat kegiatan penilaian/assesment kompetensi yang bersangkutan sedang melaksanakan cuti melahirkan sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan assesment kompetensi.

2.1.2. Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan Penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pada RSUD Ratu Zalecha secara umum terdapat beberapa permasalahan, antara lain :
   a. Kondisi pandemi dan bencana nasional covid-19 berpengaruh pada pelaksanaan beberapa kegiatan karena terkendala adanya kebijakan/aturan untuk pencegahan penularan covid-19, sehingga berpengaruh pada capaian target program kegiatan yang sudah direncanakan.
   b. SDM dan peralatan kesehatan untuk pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) masih perlu ditingkatkan.
   c. SDM pada unit pelayanan Pediatrik Intensive Care Unit/ Neonatal Intensive Care Unit (PICU/NICU) masih perlu ditingkatkan.
   d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih belum memenuhi target :
      - Target IKM 82 % dengan realisasi 81,29 % (capaian kinerja 99,13%)
      - Dari Sembilan unsur pelayanan yang dinilai rata-rata mendapat nilai Baik. Nilai yang paling rendah adalah unsur pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
2. Solusi
   Guna mengatasi permasalahan yang ada, maka direkomendasikan beberapa hal berikut ini :
   a. Pemenuhan kompetensi SDM, dan sarana prasarana di RSUD Ratu Zalecha yang sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk penanganan wabah covid- 19;
   b. Sebagai Pelayanan Publik RSUD Ratu Zalecha menerapkan pelaksanaaan zona integritas untuk menuju WBK dan WBBM;
   c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dari masing-masing Bidang dan Seksi dengan Kelompok Staf Medis (KSM), Instalasi dan Ruang/Unit yang ada di RSUD Ratu Zalecha untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Evaluasi Renja Tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 ini merupakan renja terakhir dari periode renstra sebelumnya, serta hasil evaluasi ini dijadikan acuan/pertimbangan untuk

penyusunan renja tahun 2022 meskipun unutk periode renstra yang berbeda, akan tetapi secara kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan rumah sakit masih bersesuaian/selaras.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (Berdasarkan Pemetaan Program dan kegiatan PMDN Nomor 13 Tahun 2013 ke Nomor 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan Renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian terget	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 Persen			100 Persen		
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD.			0			100 Persen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja/RKT, Renja/RKT Perubahan.			0			3 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja LPPD, LKPJ.			0			3 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, RFK, Kinerja Triwulan			0			16 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD			14 Bulan			100 Persen		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN			14 Bulan			14 Bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera	Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu						1 Dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD			50 Orang			100 Persen		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan						6 Kegiatan		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai rumah sakit yang mengikuti diklat			50 Orang			60 Orang		

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum SKPD			84 Persen			100 Persen		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket			3 Paket		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0			100 Persen		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan			0			1 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan			0			0 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13 Bulan			100 Persen		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Tenaga Honorer/Pegawai Kontrak			13 Bulan			13 Bulan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan BLUD Rumah Sakit			100 Persen			100 Persen		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Rumah Sakit yang Dilaksanakan			82 persen			8 Pelayanan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kelas rumah sakit			80 Persen			82,00 Persen		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi Kebutuhan sebagai RS Pendidikan			2 Paket			80 Persen		
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan Gedung Rumah Sakit yang Memenuhi Standar			1 Paket			2 Kegiatan		
	Pengembangan Rumah Sakit	Borang untuk Rumah Sakit Pendidikan Satelit			3 Paket			80 Nilai		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar			3 Paket			4 Kegiatan		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Instalasi yang terpenuhi Alat Kesehatan/alat kedokteran			3 Paket			3 Instalasi		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			83 Persen			81,5 Persen		

	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit Yang Terlaksana			90 Persen			15 Judul		
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Penelitian Kesehatan Dalam Bidang IPTEKDOK di Rumah Sakit Pendidikan			90 Persen			0 Penelitian		
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah BAB yang Lulus Penilaian Akreditasi			90 Persen			12 BAB		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit			83 Persen			84,5 Persen		
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Capaian Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Medik			90 Persen			75 Persen		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pelayanan Penanganan Covid-19 oleh Tenaga Kesehatan RS			83 Persen			100 Persen		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan insentif bagi petugas pelayanan penanganan Covid - 19			12 Bulan			1 Tahun		
		Pemenuhan Pelayanan Penanganan Covid - 19 oleh Tenaga Kesehatan non ASN			12 Bulan			100 Persen		
		Terlaksananya Pelayanan Penangnan Covid - 19			12 Bulan			1 Tahun		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbayarnya insentif Pelayanan Penanganan Covid-19 oleh petugas kesehatan non ASN			56 Orang			1 Tahun		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa data diambil berdasarkan periode renstra sebelumnya, dan untuk beberapa kolom yang tidak terisi dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan pada PMDN 90 serta pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021 merupakan masa transisi serta hasil pemetaan dari PMDN 90 menjadi Kepmen 050.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

a. Capaian Standar Pelayanan Minimal Setiap Jenis Pelayanan, Indikator dan Standard RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2020 di gambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Ratu Zalecha *(SPM)*

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
1	GAWAT DARURAT								
	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%	100%	100%	100%	100%	87.2%	100%	
	Kesediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	
	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	3 menit 5 detik	3 menit 5 detik	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	
	Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	84.50%	84.50%	≥ 70 %	
	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ dua per seribu	≤ dua per seribu	≤ dua per seribu	≤ dua per seribu	1.8 %	5.16%	≤ dua per seribu	
	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	RAWAT JALAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% Dokter Spesialis	100% Dokter Spesialis	100% Dokter Spesialis	100% Dokter Spesialis	100%	100%	100% Dokter Spesialis	
	Ketersediaan pelayanan	a. Klinik Anak	a. Klinik Anak	a. Klinik Anak	a. Klinik Anak	Seluruhnya tersedia	Seluruhnya tersedia	a. Klinik Anak	
		b. Klinik Penyakit Dalam	b. Klinik Penyakit Dalam	b. Klinik Penyakit Dalam	b. Klinik Penyakit Dalam			b. Klinik Penyakit Dalam	
		c. Klinik Kebidanan	c. Klinik Kebidanan	c. Klinik Kebidanan	c. Klinik Kebidanan			c. Klinik Kebidanan	
		d. Klinik Bedah	d. Klinik Bedah	d. Klinik Bedah	d. Klinik Bedah			d. Klinik Bedah	

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
	Jam buka pelayanan	08.00s/d 13.00	08.00s/d 13.00	08.00s/d 13.00	08.00s/d 13.00	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	08.00s/d 13.00	
		Setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00-11.00	Setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00-11.00	Setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00-11.00	Setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00-11.00			Setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00-11.00	
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	146 Menit	146 Menit	≤ 60 menit	
	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	91%	91%	≥ 90 %	
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	a. ≥ 60%	a. ≥ 60%	a. ≥ 60%	a. ≥ 60%	a. 55%	a. 55%	a. ≥ 60%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	b. ≥60 %	b. ≥60 %	b. ≥60 %	b. ≥60 %	b.100%	b.100%	b. ≥60 %	
3	RAWAT INAP								
	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter spesialis	a. Dokter spesialis	a. Dokter spesialis	a. Dokter spesialis	Telah sesuai ketentuan	Telah sesuai ketentuan	a. Dokter spesialis	
		b. Perawat minimal pendidikan D3	b. Perawat minimal pendidikan D3	b. Perawat minimal pendidikan D3	b. Perawat minimal pendidikan D3		Sesuai ketentuan	b. Perawat minimal pendidikan D3	
	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak	a. Anak	a. Anak	a. Anak	Seluruhnya tersedia	Seluruhnya tersedia	a. Anak	
		b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam			b. Penyakit Dalam	
		c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan			c. Kebidanan	
		d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah			d. Bedah	

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiaphari kerja	08.00 s/d 14.00 setiaphari kerja	08.00 s/d 14.00 setiaphari kerja	08.00 s/d 14.00 setiaphari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiaphari kerja	
	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	2.70%	2.70%	≤ 1,5 %	
	Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	1. ISK:0%	1. ISK:0%	≤ 1,5 %	
						2. VAP: 0%	2. VAP: 0%		
						3. Phelebitis = 0.8%	3. Phelebitis = 0.8%		
						4. IADP= 0%	4. IADP= 0%		
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakhir kecacatan/kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kematian pasien > 48 jam	≤ 25‰	≤ 25‰	≤ 25‰	≤ 25‰	22‰	22‰	≤ 25‰	
	Kejadian pulang Paksa	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	5%	5%	≤ 5 %	
	Kepuasan pelanggan	≥90 %	≥90 %	≥90 %	≥90 %	88%	88%	≥90 %	
	Rawat inap TB :								
	a. Penegakan Dianogsis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB.	a.60%	a.60%	a.60%	a.60%	a.100%	a.100%	a.60%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	
4	BEDAH SENTRAL (BEDAH SAJA)								
	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	2 hari	2 hari	≤ 2 hari	
	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	0%	0%	≤ 1 %	
	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing /lain padatubuh pasien setelah operasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan endotracheal	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	0%	0%	≤ 6 %	

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
5	PERSALINAN DAN PERINATALOGI (KECUALI RUMAH SAKIT KHUSUS DILUAR RUMAH SAKIT IBU DAN								
	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 %	a. Perdarahan ≤ 1 %	a. Perdarahan ≤ 1 %	a. Perdarahan ≤ 1 %	a. 0,4%	a. 0,4%	a. Perdarahan ≤ 1 %	
		b. Pre –Eklamsia ≤ 30%	b. Pre –Eklamsia ≤ 30%	b. Pre –Eklamsia ≤ 30%	b. Pre –Eklamsia ≤ 30%	b. 0,2%	b. 0,2%	b. Pre –Eklamsia ≤ 30%	
		c. Sepsis ≤ 0,2 %	c. Sepsis ≤ 0,2 %	c. Sepsis ≤ 0,2 %	c. Sepsis ≤ 0,2 %	c. 0%	c. 0%	c. Sepsis ≤ 0,2 %	
	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	
		b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	
		c. Bidan	c. Bidan	c. Bidan	c. Bidan	c. Bidan terlatih APN	c. Bidan terlatih APN	c. Bidan	
	Pemberi pelayanan dengan persalinan penyulit	Tim PONEK yang terlatih.	Tim PONEK yang terlatih.	Tim PONEK yang terlatih.	Tim PONEK yang terlatih.	Tim PONEK yang terlatih.	Tim PONEK yang terlatih.	Tim PONEK yang terlatih.	
	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG	
		b. Dokter Sp.A	b. Dokter Sp.A	b. Dokter Sp.A	b. Dokter Sp.A	b. Dokter Sp.A	b. Dokter Sp.A	b. Dokter Sp.A	
		c. DokterSp.An	c. DokterSp.An	c. DokterSp.An	c. DokterSp.An	c. DokterSp.An	c. DokterSp.An	c. DokterSp.An	
	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr	100%	100%	100%	100%	93%	93%	100%	
	Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	59%	59%	≤ 20 %	
	Keluarga Berencana :								
	• Persentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr.Sp.B,	a.100%	a.100%	a.100%	a.100%	a.100%	a.100%	a.100%	
	• Persentase peserta KB mantap yang mendapatkan	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	b.100%	
	Kepuasan Pelanggan	≥80 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %	86%	86%	≥80 %	

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
6	INTENSIF								
	Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	0.80%	0.80%	≤ 3 %	
	Pemberi pelayanan Unit intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangdi tangani	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangdi tangani	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangdi tangani	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangdi tangani	a. Dokter Sp.Anestesi 2 org dan dokter Spesialisasi lainya	a. Dokter Sp.Anestesi 2 org dan dokter Spesialisasi lainya	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangdi tangani	
		b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	b. D3; 11 orang, S1; 2 org, S1+Ners 4 orang,	b. D3; 11 orang, S1; 2 org, S1+Ners 4 orang,	b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	
						Sertifikat ICU 66%	Sertifikat ICU 66%		
7	RADIOLOGI								
	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto.	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	65 menit	65 menit	≤ 3 jam	
	Pelaksana ekspertisi	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	
	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	1.03%	1.03%	Kerusakan foto ≤ 2%	
	Kepuasan pelanggan.	≥80 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %	94%	94%	≥80 %	
8	Laboratorium Patologi Klinik								
	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit (Kimia darah & darah rutin)	≤ 140 menit (Kimia darah & darah rutin)	86 menit	86 menit	≤ 140 menit (Kimia darah & darah rutin)	
	Pelaksana ekspertisi	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	
	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kepuasan pelanggan.	≥80 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %	90%	90%	≥80 %	

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
9	REHABILITASI MEDIK								
	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	12%	12%	≤ 50 %	
	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kepuasan pelanggan.	≥80 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %	99%	99%	≥80 %	
10	FARMASI								
	Waktu tunggu pelayanan								
	a. Obat jadi	a. ≤ 30 menit	a. ≤ 30 menit	a. ≤ 30 menit	a. ≤ 30 menit	a. 21 menit	a. 21 menit	a. ≤ 30 menit	
	b. Obat Racikan	b. ≤ 60 menit	b. ≤ 60 menit	b. ≤ 60 menit	b. ≤ 60 menit	b. 48 menit	b. 48 menit	b. ≤ 60 menit	
	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kepuasan pelanggan.	≥80 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %	87%	87%	≥80 %	
	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	90.50%	90.50%	100%	
11	GIZI								
	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	100%	100%	≥ 90 %	
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien.	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	31.92%	31.92%	≤ 20%	
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	TRANFUSI DARAH								
	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	100 % terpenuhi	100 % terpenuhi	100 % terpenuhi	100 % terpenuhi	100%	100%	100 % terpenuhi	
	Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	1.40%	1.40%	≤ 0,01 %	
13	Pelayanan Keluarga Miskin								
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terpenuhi	100 % terpenuhi	100 % terpenuhi	100 % terpenuhi	100% terpenuhi	100% terpenuhi	100 % terpenuhi	

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
14	REKAM MEDIK								
	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	37%	37%	100%	
	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Waktu penyediaan dokomen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	25 menit	25 menit	≤ 10 menit	
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	15 menit	15 menit	≤ 15 menit	
15	PENGELOLAAN LIMBAH								
	Buku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	1,8 mg/l	1,8 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	
		b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	35,2 mg/l	35,2 mg/l	b. COD < 80 mg/l	
		c. TSS 30< mg/l	c. TSS 30< mg/l	c. TSS 30< mg/l	c. TSS 30< mg/l	< 7 mg/l	< 7 mg/l	c. TSS 30< mg/l	
		d. PH 6-9	d. PH 6-9	d. PH 6-9	d. PH 6-9	7.12	7.12	d. PH 6-9	
	Pengelolaan limbah padat infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN								
	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	96%	96%	100%	
	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun.	≥60 %	≥60 %	≥60 %	≥60 %	24%	24%	≥60 %	
	Cost recovery	≥40 %	≥40 %	≥40 %	≥40 %	118%	118%	≥40 %	
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	< 1 jam	< 1 jam	≤ 2 jam	
	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	JENIS PELAYANAN	STANDAR	TARGET			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	2020	2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	
17	AMBULANCE/ KERETA JENAZAH								
	Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	27 menit	27 menit	≤ 30 menit	
	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	Belum ada peraturan daerah	Belum ada PERDA	Sesuai ketentuan daerah	
18	PEMULASARAAN JENAZAH								
	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	2 jam	2 jam	≤ 2 jam	
19	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT								
	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	100%	100%	≥ 80 %	
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	
	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang di gunakan yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	52.30%	52.30%	100%	
20	PELAYANAN LAUNDRY								
	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)								
	Adanya anggota tim PPI yang terlatih	≥ 75 %	≥ 75 %	≥ 75 %	≥ 75 %	100%	100%	≥ 75 %	
	Tersedia APD disetiap instalasi/departement	≥60 %	≥60 %	≥60 %	≥60 %	60.70%	60.70%	≥60 %	
	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (health care associated infections) di rumahsakit (minimum 1 parameter)	≥75 %	≥75 %	≥75 %	≥75 %	100%	100%	≥75 %	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa standar pelayanan minimal rumah sakit selama dua tahun terakhir belum 100 persen tercapai, hal ini disebabkan oleh capaian beberapa indikator tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Tindak lanjut yang akan dilakukan atas hasil capaian indikator SPM adalah :

1. Pengoptimalan manajemen SDM di rumah sakit
2. Evaluasi terhadap komitmen manjalankan maklumat pelayanan
3. Pengoptimalan penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit

b. Capaian Kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura

Capaian Kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. Kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2019 dan 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun (2019)	Capaian Tahun (2019)	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun 2019 / Target akhir jangka menengah)
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Sesudah Perubahan									
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase kematian ibu melahirkan risiko tinggi di rumah sakit	0,006	188	0,04	0,0035	191,16	0,03	
		Persentase kematian BBLR (bayi Berat Lahir Rendah) (1000 -2500 gr)	0.067	66	0,05	0,0935	12,90	0,03	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,69	99.74	82	81,29	99	82	

Pentingnya capaian kinerja dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yaitu IKU dan SPM dalam rangka mencapai sasaran perangkat daerah yang ditetapkan. Capaian yang masih rendah/belum dilakukan pengukuran, maka pada tahun 2022 sesuai dengan renstra 2021-2026 dijadikan prioritas/kinerja utama untuk dicapai.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

   RSUD Ratu Zalecha Martapura memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan serta melakukan upaya rujukan secara komprehensif.

2. Fungsi

   RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan kepala daerah;
   b. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
   c. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan Penyelenggaraan pelayanan rujukan medis;
   d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
   e. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

3. Permasalahan atau hambatan yang mempengaruhi pelayanan di RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah sebagai berikut :
   a. Belum terpenuhinya kualitas SDM di rumah sakit;
   b. Masih terdapat kekurangan jumlah dan jenis SDM di RSUD Ratu Zalecha sebagai RS Tipe B;
   c. Bangunan RSUD Ratu Zalecha Martapura masih belum semuanya sesuai standar;
   d. Ketersediaan alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit masih belum memenuhi standar kebutuhan.
4. Tantangan dan Peluang
   a. Banyaknya rumah sakit swasta;
   b. Cepatnya perubahan regulasi nasional terkait pelayanan di rumah sakit
   c. Regulasi mengenai jaminan kesehatan nasional (JKN), kebijakan mengenai UHC;
   d. Era globalisasi dan era digital dalam sistem informasi dan pelayanan.
   e. Status Rumah Sakit sebagai rumah sakit rujukan regional
   f. Banyak terdapat lembaga pendidikan kesehatan di sekitar wilayah kerja RS

Selain isu-isu penting diatas capaian kinerja dalam penyelenggaran pemerintahan daerah juga dinilai sangat penting yaitu capaian IKU dan SPM dalam rangka mencapai sasaran perangkat daerah yang ditetapkan. Capaian kinerja yang masih rendah/belum dilakukan pengukuran pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 sesuai dengan renstra yang baru tahun 2021-2026 akan dijadikan prioritas/kinerja utama untuk dicapai.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan isu strategis daerah yang merupakan hasil penelaahan dari permasalahan penyelenggaran pemerintah daerah dan isu daerah yang sedang berkembang yang mendesak dan berpengaruh besar ditahun perencanaan tahun 2022.

Dari hasil rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan terdapat beberapa perbedaan atau penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan, baik itu dari indikator kinerja, target kinerja maupun pagu indikatif yang sudah ditetapkan. Perbedaan atau penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kode				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
						Target 2022	Pagu Indikatif			Target 2022	Pagu Indikatif
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1	**2**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**96,104,499,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**155,695,927,507**
1	**2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**88,917,622,112**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**139,511,485,350**
1	**2**	**1**	**2,01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit**	**100 Persen**	**60,750,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD**	**100 Persen**	**60,740,000**
1	2	1	2,01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja/RKT, Renja/RKT Perubahan	3 Dokumen	27,750,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja/RKT, Renja/RKT Perubahan	3 Dokumen	27,740,000
1	2	1	2,01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ	3 Dokumen	9,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD	3 Laporan	9,000,000
1	2	1	2,01	7 Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, RFK, Kinerja Triwulan	16 Laporan	24,000,000	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, RFK, Kinerja Triwulan	16 Laporan	24,000,000
1	**2**	**1**	**2,02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Gaji, Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan**	**100 Persen**	**8,400,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD**	**100 Peren**	**51,132,315,538**
1	2	1	2,02	1 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 Bulan	-	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 Bulan	51,124,185,538
1	2	1	2,02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	1 Dokumen	8,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	1 Dokumen	8,130,000
1	**2**	**1**	**2,05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Rumah Sakit**	**100 Persen**	**1,026,300,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan** **Pegawai rumah yang mengikuti diklat 20 JPL**	**100 Persen** **60 Persen**	**234,007,100**
1	2	1	2,05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan administrasi kepegawain yang dilaksanakan	6 kegiatan	26,300,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelayanaan Administrasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	6 kegiatan	24,000,000
1	2	1	2,05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Rumah Sakit yang Mengikuti Diklat	60 Orang	1,000,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Rumah Sakit yang Mengikuti Diklat	22 Orang	210,007,100
1	**2**	**1**	**2,06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**100 Persen**	**483,539,400**	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Umum SKPD**	**100 Persen**	**464,990,000**
1	2	1	2,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	483,539,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	464,990,000
1	**2**	**1**	**2,07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Rumah Sakit**	**100 persen**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jabatan dan operasional rumah sakit**	**100 persen**	**-**
1	2	1	2,07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	-
1	2	1	2,07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-

Kode					Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2022	Pagu Indikatif			Target 2022	Pagu Indikatif
1	**2**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terbayarnya Gaji/Upah Tenaga Non ASN di Rumah Sakit**	**100 persen**	**2,338,632,712**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**2,619,432,712**
1	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Tenaga Honorer/Pegawai Kontrak	13 Bulan	2,338,632,712	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa TenagaHonorer/PegawaiKontrak	13 Bulan	2,619,432,712
1	**2**	**1**	**2,1**		**PeningkatanPelayanan BLUD**	**Terpenuhinya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Rumah Sakit**	**100 Persen**	**85,000,000,000**	**PeningkatanPelayanan BLUD**	**Terpenuhinya Pelayanan BLUD Rumah Sakit**	**100 Persen**	**85,000,000,000**
1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Rumah Sakit yang Dilaksanakan	8 Pelayanan	85,000,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan rumah sakit yang dilaksanakan	8 Pelayanan	85,000,000,000
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kelas rumah sakit**	**82 Persen**	**7,186,876,888**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kelas rumah sakit**	**82 Persen**	**5,999,964,688**
1	**2**	**2**	**2,01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan/ alat kedokteran Rumah Sakit sebagai RS Kelas B Pendidikan**	**80 Persen**	**6,441,998,088**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemenuhan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi kebutuhan sebagai RS Pendidikan**	**80 Persen**	**5,400,693,088**
1	2	2	2,01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan Gedung Rumah Sakit yang Memenuhi Standar	2 Kegiatan	-	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah bangunan gedung rumah sakit yang memenuhi standar	1 Kegiatan	400,000,000
1	2	2	2,01	5	PengembanganRumah Sakit	Borang untuk Rumah Sakit Pendidikan Satelit	80 Nilai	50,000,000	PengembanganRumah Sakit	Borang untuk Rumah Sakit Pendidikan Satelit	80	50,000,000
1	2	2	2,01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar	4 Kegiatan	3,821,545,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar	3 Kegiatan	2,380,240,000
1	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Instalasi yang terpenuhi Alat Kesehatan/alat kedokteran	3 Instalasi	2,570,453,088	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi yang terpenuhi alat kesehatan/alat kedokteran	3 Instalasi	2,570,453,088
1	**2**	**2**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit**	**81.5 Persen**	**578,888,800**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai IKM Dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**	**81.5Persen**	**442,885,600**
1	2	2	2,02	18	PengelolaanPelayananPromosi Kesehatan	Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit Yang Terlaksana	15 Judul	64,444,400	PengelolaanPelayananPromosi Kesehatan	Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit Yang Terlaksana	15 Judul	64,435,600
1	2	2	2,02	31	PengelolaanPenelitianKesehatan	Penelitian Kesehatan Dalam Bidang IPTEKDOK di Rumah Sakit Pendidikan	0 Penelitian	-	PengelolaanPenelitianKesehatan	Penelitian Kesehatan Dalam Bidang IPTEKDOK di Rumah Sakit Pendidikan	1 Penelitian	-
1	2	2	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Bab yang Lulus Penilaian Akreditasi	12 Bab	514,444,400	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah BAB yang Lulus Penilaian Akreditasi	12 BAB	378,450,000
1	**2**	**2**	**2,04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya Indikator SPM Rumah Sakit**	**84.5Persen**	**165,990,000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit**	**84.5Persen**	**156,386,000**
1	2	2	2,04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Capaian Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Medik	75 Persen	165,990,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Capaian Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Medik	75 Persen	156,386,000
						Jumlah Monev MutuPelayanan Keperawatan	4 Dokumen			Jumlah Monev Mutu Pelayanan Keperawatan	4 Dokumen	
						Jumlah Monev Mutu Pelayanan Penunjang Medik yang Terlaksana	4 Dokumen			Jumlah Monev Mutu Pelayanan Penunjang medik yang terlaksana	4 Dokumen	

Kode					Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2022	Pagu Indikatif			Target 2022	Pagu Indikatif
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Pelayanan Penanganan Covid-19 oleh Tenaga Kesehatan RS**	**100 persen**	**-**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Pelayanan Penanganan Covid-19 oleh Tenaga Kesehatan RS**	**100 persen**	**10,184,477,469**
1	**2**	**3**	**2,02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya insentif pelayanan penanganan Covid-19 bagi tenaga kesehatan non ASN**	**100 Persen**	**-**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS**	**100 Persen**	**10,184,477,469**
1	2	3	2,02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya insentif pelayanan penanganan Covid-19 bagi tenaga kesehatan non ASN	1 Tahun	-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbayarnya insentif Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS	1 Tahun	10,184,477,469

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RSUD RATU ZALECHA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, selain itu sebagai Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai penerjemahan Visi Misi dan Arahan Presiden sebagai berikut:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6. Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru Rencana Pengembangan Wilayah Provinsi di Kabupaten Banjar

3.1.3. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 :

Arah kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan menyelaraskan dengan tema pembangunan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan responsif gender & anak
2. Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas untuk Pemerataan Hasil Pembangunan Daerah yang Berkeadilan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, terpercaya dan Akuntabel
5. Perwujudan masyarakat yang agami, berakhlak dan berkepribadian luhur untuk menjaga kerukunan umat dalam suasana aman & tertib.

Berdasarkan Arah Kebijakan Nasional tahun 2021, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021, dan dari telaahan arah kebijakan nasional, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dan arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Banjar menjadi acuan untuk penyusunan Renja tahun 2022 RSUD Ratu Zalecha.

3.1.4. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 :

Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sub prioritas :

1) Peningkatan sistem pendidikan
2) Peningkatan sistem kesehatan
3) Peningkatan kewirausahaan

Prioritas 2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Pengurangan Kesenjangan Pembangunan dengan sub prioritas :

1) Peningkatan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan/jasa
2) Stimulus usaha mikro dan kemudahan investasi
3) Penanggulangan kemiskinan
4) Penciptaan lapangan pekerjaan

Prioritas 3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan sub prioritas :

1) Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
2) Penataan permukinan yang nyaman dan layak huni
3) Mitigasi kebencanaan

Prioritas 4. Tata kelola pemerintahan yang baik dengan sub prioritas :

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik
2) Penguatan akuntabilitas kinerja
3) Peningkatan kualitas aparatur
4) Penguatan SPBE

Prioritas 5. Perwujudan masyarakat yang agamis untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan aman dengan sub prioritas :

1) Pengamalan nilai-nilai pancasila dan agama
2) Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3) Pengembangan kepeloporan pemuda dan santri

Dari prioritas pembangunan Kabupaten Banjar diatas kemudian diimplementasikan melalui aksi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, dalam hal ini RSUD Ratu Zalecha melaksanakan aksi pada prioritas pembangunan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

Tabel 5. Prioritas Daerah yang Dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha

No.	Prioritas Pembangunan	Aksi	Pagu (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia	Mengembangkan sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perluasan cakupan kesehatan semesta dan penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang handal	92.900.863.000,-

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Isu-isu penting RSUD Ratu Zalecha, yaitu :

1. Akreditasi rumah sakit;
2. Peningkatan kualitas pelayan publik;
3. Belum terpenuhinya kualitas SDM yang sesuai standar rumah sakit kelas B;
4. Belum terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana untuk rumah sakit kelas B.

RSUD Ratu Zalecha melaksanakan tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang pada Renstra RSUD Ratu Zalecha, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja RSUD Ratu Zalecha Tahun 2022

Commented [U1]:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022
	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya mutu pelayanan RSUD Ratu Zalecha	IKM Rumah Sakit	80.9
			Akreditasi Rumah Sakit	Utama
			SPM Rumah Sakit	85,9%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD RATU ZALECHA

4.1. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

   Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Ratu Zalecha terdapat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Penilaian akreditasi yang sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
   c. Pencapaian SPM
   d. Peningkatan mutu pelayanan publik

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

   Program, kegiatna dan sub kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

   a. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan

      Pada Tahun 2022 RSUD Ratu Zalecha Martapura melaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sebagai berikut :

      a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
         a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
            -Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
            -Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
            -Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
            -Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
         b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
            -Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
            -Sub Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan
            -Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
         c) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
            -Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
      b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
         a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
            -Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
            -Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
            -Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
         b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

-Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

-Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

-Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

-Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

-Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

a) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

-Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Ratu Zalecha tahun 2022 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		RSUD Ratu Zalecha			APBD			
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**155,695,927,507**				**327,915,963,237**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 Persen**	**139,511,485,350**			**100 Persen**	**157,931,232,544**
1	**2**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD**		**100 Persen**	**60,740,000**			**100 Persen**	**60,750,000**
1	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja/RKT, Renja/RKT Perubahan		3 Dokumen	27,740,000			3 Dokumen	27,750,000
1	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD		3 Laporan	9,000,000			3 Laporan	9,000,000
1	2	1	2,01	7	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, RFK, Kinerja Triwulan		16 Laporan	24,000,000			16 Laporan	24,000,000
1	**2**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD**		**100 Peren**	**51,132,315,538**			**100 Peren**	**69,074,849,832**
1	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		14 Bulan	51,124,185,538			14 Bulan	69,064,849,832
1	2	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu		1 Dokumen	8,130,000			1 Dokumen	10,000,000
1	**2**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan** **Pegawai rumah yang mengikuti diklat 20 JPL**		**100 Persen** **60 Persen**	**234,007,100**			**100 Persen** **60 Persen**	**1,027,000,000**
1	2	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelayanaan Administrasi Kepegawaian Yang dilaksanakan		6 kegiatan	24,000,000			6 kegiatan	27,000,000
1	2	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Rumah Sakit yang Mengikuti Diklat		22 Orang	210,007,100			6 Orang	1,000,000,000
1	**2**	**1**	**2,06**		**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Umum SKPD**		**100 Persen**	**464,990,000**			**100 Persen**	**80,000,000**
1	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3 Paket	464,990,000			3 Paket	80,000,000
1	**2**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jabatan dan operasional rumah sakit**		**100 persen**	**-**			**100 persen**	**350,000,000**
1	2	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		1 Unit	-			1 Unit	350,000,000
1	2	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		1 Unit	-			0	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	RSUD Ratu Zalecha	**100 Persen**	**2,619,432,712**	APBD		**100 Persen**	**2,338,632,712**
1	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa TenagaHonorer/PegawaiKontrak		13 Bulan	2,619,432,712			13 Bulan	2,338,632,712
1	**2**	**1**	**2,1**		**PeningkatanPelayanan BLUD**	**Terpenuhinya Pelayanan BLUD Rumah Sakit**		**100 Persen**	**85,000,000,000**	BLUD		**100 Persen**	**85,000,000,000**
1	2	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan rumah sakit yang dilaksanakan		8 Pelayanan	85,000,000,000			8 Pelayanan	85,000,000,000
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kelas rumah sakit**		**82 Persen**	**5,999,964,688**	APBD		**82 Persen**	**158,984,730,693**
1	**2**	**2**	**2,01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemenuhan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi kebutuhan sebagai RS Pendidikan**		**80 Persen**	**5,400,693,088**			**80,5 Persen**	**157,950,000,000**
1	2	2	2,01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah bangunan gedung rumah sakit yang memenuhi standar		1 Kegiatan	400,000,000			1 Kegiatan	150,000,000,000
1	2	2	2,01	5	PengembanganRumah Sakit	Borang untuk Rumah Sakit Pendidikan Satelit		80	50,000,000			80	50,000,000
1	2	2	2,01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar		3 Kegiatan	2,380,240,000			5 Kegiatan	4,400,000,000
1	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi yang terpenuhi alat kesehatan/alat kedokteran		3 Instalasi	2,570,453,088			3 Instalasi	3,500,000,000
1	**2**	**2**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai IKM Dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**		**81.5Persen**	**442,885,600**			**82 Persen**	**868,740,693**
1	2	2	2,02	18	PengelolaanPelayananPromosi Kesehatan	Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit Yang Terlaksana		15 Judul	64,435,600			16 Judul	68,740,693
1	2	2	2,02	31	PengelolaanPenelitianKesehatan	Penelitian Kesehatan Dalam Bidang IPTEKDOK di Rumah Sakit Pendidikan		1 Penelitian	-			2 Penelitian	300,000,000
1	2	2	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah BAB yang Lulus Penilaian Akreditasi		12 BAB	378,450,000			12 BAB	500,000,000
1	**2**	**2**	**2,04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit**		**84.5Persen**	**156,386,000**			**85 Persen**	**165,990,000**
1	2	2	2,04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Capaian Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Medik		75 Persen	156,386,000			75 Persen	165,990,000
						Jumlah Monev Mutu Pelayanan Keperawatan		4 Dokumen				4 Dokumen	
						Jumlah Monev Mutu Pelayanan Penunjang medik yang terlaksana		4 Dokumen				4 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Pelayanan Penanganan Covid-19 oleh Tenaga Kesehatan RS**	**RSUD Ratu Zalecha**	**100 persen**	**10,184,477,469**	**APBD**		**100 persen**	**11,000,000,000**
1	**2**	**3**	**2,02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS**		**100 Persen**	**10,184,477,469**			**100 Persen**	**11,000,000,000**
1	2	3	2,02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbayarnya insentif Pelayanan Kesehatan Keadaan Tertentu oleh Tenaga Kesehatan RS		1 Tahun	10,184,477,469			1 Tahun	11,000,000,000

BAB V
PENUTUP

5.1. PENUTUP

1. Kesimpulan
   a. Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 merupakan renja tahun pertama untuk periode renstra 2021-2026 dengan kepala daerah terpilih.
   b. Renja tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 dan 2021 pada periode renstra sebelumnya meskipun pada periode renstra yang berbeda, tetapi secara kinerja penyelenggaran urusan kesehatan rumah sakit masih selaras/bersesuaian.

2. Saran
   a. Agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
   b. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang baik.

Demikian rencana kerja dibuat sebagai bahan untuk perencanaan anggaran TA. 2022.

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7 ayat 2).

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Renja PD memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan Renja PD,

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

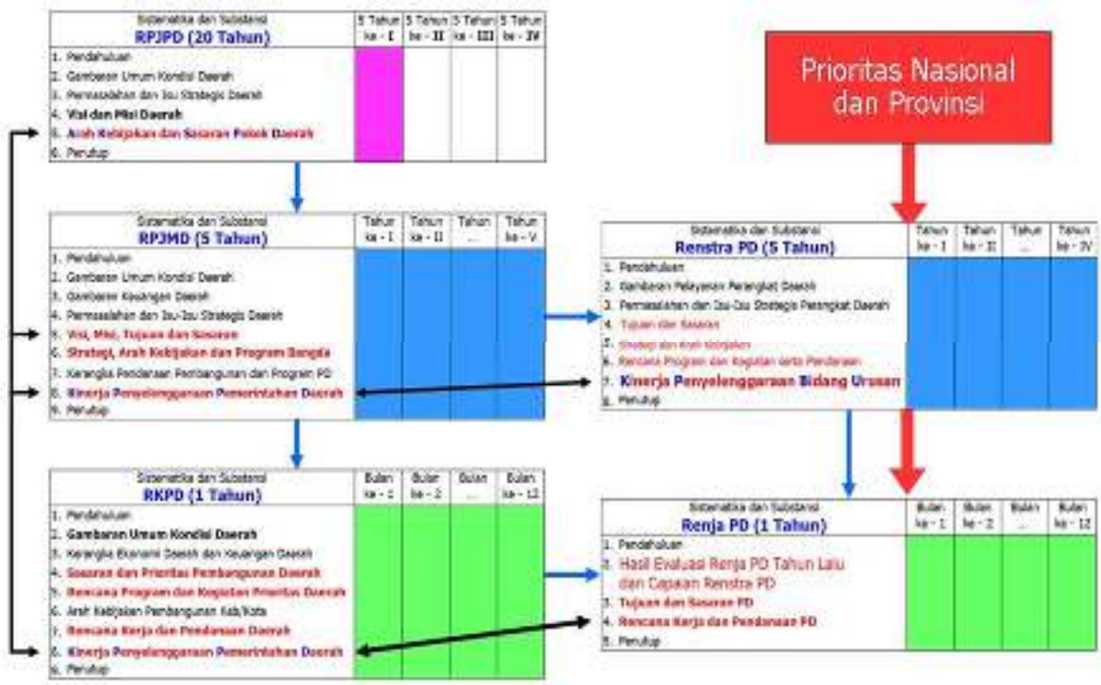

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

  Maksud penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

- **Tujuan**

  a) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar.

b) Sebagai salah satu instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan laporan kinerja.
c) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda litbang tahun 2022;
d) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Tahun N-2 (Tahun 2020)

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 - 2021.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 - 2021 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah"** , penjabaran visi tersebut adalah :

- Sejahtera yaitu kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- Barokah yaitu sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yaitu :

1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah.
5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda litbang Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021 - 2025, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda litbang Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappedalitbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Bappedalitbang berkontribusi

untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi kelima dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada empat misi lainnya guna menjalin koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

Pada tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar mendapatkan pagu murni belanja langsung sebesar Rp. 11.744.625.720 dan pagu perubahan belanja langsung sebesar Rp. 6.271.317.859. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar pada tahun 2020 melaksanakan 1 urusan, 11 program, dan 72 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
   - Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan
   - Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD
   - Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

- Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
- Monitoring dan Evaluasi

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Peningkaran Kemampuan Teknis Aparat Perencana
   - Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Penyusunan Rancangan RPJMD
   - Penyusunan Rancangan RKPD
   - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
   - Penetapan RKPD
   - Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
   - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
   - Penyusunan KUA - PPAS
   - Koordinasi Perencanaan DAK dan Sumber Dana Non APBD
   - Laporan Monitoring dan Evaluasi triwulan (RFK, RKPD, DAK, Tepra, TP)

7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
   - Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Alam
   - Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam
   - Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Alam
   - Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Alam
   - Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha
   - Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha
   - Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha
   - Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha
   - Program Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan
   - Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Manusia
   - Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Manusia
   - Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Manusia

- Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Koordinasi Kota Sehat
- Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan
- Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Pemerintahan
- Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan
- Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Pemerintahan
- Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan
- Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pemerintahan
- Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Pemerintahan

8) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
   - Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan
   - Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan
   - Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan
   - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan
   - Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
   - Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
   - Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
   - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
9) Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Penyusunan Analisi Data Pembangunan
   - Publikasi Data Informasi Pembangunan
   - Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
10) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
   - Penelitian dan Pengembangan (litbang) Sosial dan Pemerintahan
   - Penelitian dan Pengembangan (litbang) Ekonomi dan Pembangunan
   - Inovasi Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2020 (N-2) sebagai berikut :

a) Realisasi Program/Kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Tidak ada Program/Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar yang masuk dalam kriteria tidak memenuhi target kinerja.

b) Realisasi Program/Kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Tidak ada Program/Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar yang masuk dalam kriteria melebihi target kinerja.

c) Realisasi Program/Kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

* Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan indikator program nilai rata – rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian, dan cara penghitungan indikator adalah **Jumlah nilai SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian dibagi jumlah SKPD lingkup bidang perekonomian**. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi realisasi sebesar 76,60 dari target 71,78 dan capaian kinerja 106,71 % dengan kriteria Berhasil.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	8 Dok	8 Dok
2	Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil monitoring triwulanan (RFK, Kinerja)	4 Lap	4 Lap
3	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverfikasi	8 Dok	8 Dok
4	Kegiatan Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen	1 Dok	1 Dok
5	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen perencanaan yng terverifikasi	10 Dok	10 Dok

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
6	Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil monitoring triwulanan (RFK, Kinerja)	4 Lap	4 Lap
7	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverfikasi	5 Dok	5 Dok
8	Kegiatan Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen	2 Dok	2 Dok

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Kerjasama yang baik antar pejabat dan pelaksana pada bidang perekonomian dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan
- Peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Perbub Kabupaten Banjar, SK Bupati Banjar tentang pembentukan Tim Koordinasi pelaksanaan kegiatan.

→ **Faktor penghambat**

- Penyampaian dokumen Renja 2021 dan perubahan 2020 tidak tepat waktu sehingga keterlambatan dalam hal verifikasi dokumen.
- Bencana Non Alam Covid-19 mengakibatkan keterbatasan serta tidak maksimalnya koordinasi antar Mitra Bidang Perekonomian
- Terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki SDM Perencana, yang mengakibatkan terhambatnya proses koordinasi

→ **Upaya perbaikan**

- Peningkatan koordinasi terkait pengukuran kinerja dan Perbaikan Kualitas Perencanaan.
- Melakukan pendekatan persuasif untuk meningkatkan komitmen Perencana SKPD.
- Perlu adanya peningkatan Komitmen pada setiap stakeholder terkait perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkup Perekonomian Kab. Banjar

* Program Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan, dengan indikator program nilai rata – rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia, dan cara penghitungan indikator adalah **Jumlah nilai SAKIP SKPD**

lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia dibagi jumlah SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia.

Program Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan realisasi sebesar 68,81 dari target 67 dan capaian kinerja 102,7% dengan kriteria Berhasil.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	16 Dok	16 Dok
2	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 Lap	4 Lap
3	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	16 Dok	16 Dok
4	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen	5 Dok	5 Dok
5	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar	3 Lap	3 Lap
6	Koordinasi Kota Sehat	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Kabupaten Banjar Sehat di Kabupaten Banjar	10 Dok	10 Dok
7	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	20 Dok	20 Dok
8	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	40 Dok	40 Dok

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
9	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 Lap	4 Lap
10	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 Lap	4 Lap
11	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	20 Dok	20 Dok
12	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	40 Dok	40 Dok
13	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen	2 Dok	2 Dok

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappedalitbang Tahun 2021

→ **Faktor pendorong**

- Tersedianya Peraturan Perundangan-undangan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan
- Komitmen SKPD mitra bidang Sosbud untuk melaksanakan sistem perencanaan dan pelaporan
- Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat, khususnya terkait perencanaan dan pelaporan
- Hubungan yang harmonis dengan SKPD mitra bidang Sosbud dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi koordinasi bidang Sosbud dan SDM
- Kerjasama yang baik antar pejabat dan pelaksana bidang Sosbud dan SDM

→ **Faktor penghambat**

- Lemahnya/kekurangpahaman SKPD terhadap sistem perencanaan pembangunan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait
- Belum optimalnya komitmen dan konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan
- Belum meratanya kapasitas dan kualitas perencana, baik di SKPD mitra maupun di bidang Sosbud dan SDM
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

→ **Upaya perbaikan**

- Meningkatkan komitmen antar SKPD mitra dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaporan ,
- Meningkatkan pelaporan kinerja tahun 2020
- Perlu adanya reward terhadap penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan yang baik dan tepat waktu d. Perlu adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan

* Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan indikator program Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan cara penghitungan indikator adalah Jumlah nilai SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibagi jumlah SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

  Sasaran Program Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah realisasi sebesar 76,03 dari target 72 dan capaian kinerja 105,60% dengan kriteria Berhasil.

  Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	3 Dok	3 Dok
2	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	2 Lap	2 Lap

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan			
3	Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	6 Dok	6 Dok
4	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen	3 Dok	3 Dok
5	Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	4 Dok	4 Dok
6	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	2 Lap	2 Lap
7	Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	8 Dok	8 Dok
8	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	2 S.I	2 S.I

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Kerjasama yang baik antar pejabat dan pelaksana pada bidang Fisik dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
- Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan koordinasi
- SDM yang handal

→ **Faktor penghambat**

- Bencana Non Alam Covid-19 mengakibatkan keterbatasan serta tidak maksimalnya koordinasi antar Mitra Bidang Fisik dan Prasarana.
- Adanya Rasionalisasi Anggaran akibat pandemi sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

→ **Upaya perbaikan**

- Perlu adanya peningkatan Komitmen pada setiap stakeholder terkait perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kab. Banjar

* Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator program persentase ketepatan waktu perencanaan dan cara penghitungan indikator adalah **dokumen perencanaan tahunan wajib yang tepat waktu dibagi total dokumen wajib x 100 %, s**asaran Program Perencanaan Pembanguna n Daerah realisasi sebesar 100 % dari target 100 % dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Dokumen rancangan tekronatik RPJMD tahun 2021-2026	1 Dok	1 Dok
2	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Dokumen rancangan awal RKPD dan RKPD perubahan	2 Dok	2 Dok
3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Berita acara kesepakatan	1 B.A	1 B.A
4	Penetapan RKPD	Peraturan bupati RKPD dan RKPD perubahan	2 Perbub	2 Perbub
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok. LKJiP Pemerintah Kabupaten Banjar	1 Dok	1 Dok
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banjar	1 Dok	1 Dok

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
7	Penyusunan KUA, PPAS	Dokumen KUA - PPAS dan perubahan	4 Dok	4 Dok
8	Koordinasi Perencanaan DAK dan Sumber Dana Non APBD	Jumlah laporan dokumen usulan	2 Lap	2 Lap
9	Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan (RFK, RKPD, DAK, Tepra, TP)	Dokumen monitoring dan evaluasi triwulan	20 Dok	20 Dok

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor Terpenuhinya Target Kinerja**

- Komitmen Pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan di sekretariat.
- SDM dibidang sekretariat yang berkompeten
- Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana
- Pengadaan Barang sesuai dengan RKBMD

→ **Faktor pendorong**

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kepala badan selaku pengguna anggaran maupun kabid selaku PPK dan Kasubbid selaku PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

→ **Faktor penghambat**

- Perubahan Aplikasi Perencanaan dari SIMCAN ke Aplikasi Baru SIPD dari Kemendagri sehingga menimbulkan penginputan SKPD yang berulang kali, danPemutakhiran PMDN 90 pada saat sudah selesai penyusunan KUA PPAS sehingga diperlukan penyesuain kembali
- Kurang Tersedianya Data Evaluasi Tahun Lalu
- Keterlambatan terbitnya hasil fasilitasi RKPD oleh Bappeda Provinsi KALSEL
- Penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan PPAS masih belum maksimal digunakan, ketersediaan Standar Harga belum ideal
- Menyiapkan Mapping Prog/Keg dari Basis PMDN 13 ke PMDN 90 , adanya surat edaran yang mengharuskan penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan, Fasilitasi RKPD kepada Bappeda Provinsi sudah tepat waktu namun Pihak Bappeda Provinsi tidak mengeluarkan hasil fasilitasi karena menunggu hasil fasilitasi provinsi di Kemendagri dikeluarkan

→ **Upaya perbaikan**

- Memberikan upaya-upaya pemberitahuan langsung kepada SKPD yang terlambat dalam pengumpulan Dokumen
- Memberikan pendampingan kepada SKPD
- Memberikan teguran kepada SKPD yang sering telat dalam penyampaian laporan.
- Bersama Bidang-Bidang Bappeda Litbang melakukan asistensi

* Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator program Peresentase perencana yang memiliki kompetensi perencanaan daerah dan cara penghitungan indikator adalah **jumlah ASN perencana yang bersertifikat perencanaan / jumlah ASN perencana tiap SKPD + ASN Bappedalitbang yang mempunyai tugas dan fungsi perencana x 100 %**

  Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah realisasi sebesar 100% dari target 100% dan capaian kinerja 100% dengan kriteria Berhasil.

  Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan	Jumlah aparat perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan	5 Org	5 Org

Sumber : *Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020*

→ **Faktor pendorong**

- Tersedia lembaga penyelenggara diklat
- Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi khususnya terkait dengan perencanaan

→ **Faktor penghambat**

- Bencana Non Alam Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan terhambat.

→ **Upaya perbaikan**

- Diperlukan Pemetaan Diklat

* Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari dua indikator program yaitu :
  - Indikator program Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti, cara penghitungan indikator adalah Jumlah penelitian dan pengembangan (litbang) yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah penelitian dan pengembangan (litbang). Program

Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Indikator program Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti realisasi sebesar 60 % dari target 60 % dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.

- Indikator program Persentase usulan inovasi yang diterapkan, cara penghitungan indikator adalah Persentase usulan inovasi yang diterapkan dibanding jumlah inovasi dilaunching. Usulan inovasi yang diterapkan sebesar 60% dari jumlah inovasi yang dilaunching 60%. Sasaran Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Indikator program Persentase usulan inovasi yang diterapkan realisasi sebesar 60 % dari target 60 % dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penelitian dan Pengembangan (litbang) Sosial dan Pemerintahan	Laporan hasil penelitian	2 Lap	2 Lap
2	Penelitian dan Pengembangan (litbang) Ekonomi dan Pembangunan	Laporan hasil penelitian	2 Lap	2 Lap
3	Inovasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah inovasi	50 Inovasi	50 Inovasi

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kepala badan selaku pengguna anggaran maupun kabid selaku PPK dan Kasubbid selaku PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

→ **Faktor penghambat**

- Adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak dampak Covid-19

→ **Upaya perbaikan**

- Melakukan penelitian berdasarkan isu strategis dan kebijakan di Kabupaten Banjar

* Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari dua indikator program yaitu :

- Indikator Program Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan, cara penghitungan indikator adalah Penambahan jumlah pengguna pada tahun N dibanding jumlah tahun

sebelumnya (N-1). Sasaran Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator program Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan realisasi sebesar 70% dari target 70% dan capaian kinerja 100% dengan kriteria Berhasil.

- Indikator program Persentase elemen data pembangunan termutkhirkan, cara penghitungan indikator adalah Jumlah elemen data yang update dibanding jumlah elemen data yang sesuai wilayah Kab. Banjar. Sasaran Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator program Persentase elemen data pembangunan termutkhirkan realisasi sebesar 50% dari target 50% dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Analisis Data Pembangunan	Jumlah dokumen	3 Dok	3 Dok
2	Publikasi Data Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi	5 Dok	5 Dok
3	Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah elemen data SIPD yang terisi	1 dok	1 dok

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kepala badan selaku pengguna anggaran maupun kabid selaku PPK dan Kasubbid selaku PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

→ **Faktor penghambat**

- Adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemic Covid-19

→ **Upaya perbaikan**

- Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Optimalisasi SDM yang ada

* Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator program Nilai SAKIP SKPD cara penghitungan indikator adalah **Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar**

Sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi 85,36 (A) dari target 76 (BB) dan capaian kinerja 112,31% dengan kriteria (Berhasil).

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya lap. keuangan semesteran SKPD	2 Lap.	2 Lap.
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.
3	Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun sesuai ketentuan (Renja & Renja-P dan Renstra)	2 Dok.	2 Dok.
4	Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD (RKA & RKA-P, DPA & DPA-P)	4 Dok.	4 Dok.
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja SKPD (LKjIP, LKPJ, LPPD)	3 Dok.	3 Dok.
6	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya laporan BMD SKPD	4 Lap.	4 Lap.
7	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dok. hasil monev. (RFK per bulan ke Bappelitbang, Lap. Renja per triwulan & RFK per bulan ke ULP)	1 Dok	1 Dok

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Adanya template dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan barang milik daerah
- Komitmen Pimpinan untuk penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan barang milik daerah
- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik Kaban selaku pengguna anggaran maupun Sekretaris dan Bidang terkait untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- SDM yang berkompeten

- Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana
- Pengadaan Barang sesuai dengan RKBMD

→ **Faktor penghambat**

- Penuhnya jadwal pekerjaan, karna beriringan dengan penyusulan dokumen-dokumen pelaporan (Renstra, Renja, LKj IP dan LKPJ serta LPPD)
- Kurangnya pelatihan Penginputan PRA RKA 2021 pada aplikasi SIMCAN
- Perubahan Aplikasi Perencanaan dari SIMCAN ke Aplikasi Baru SIPD dari Kemendagri sehingga menimbulkan penginputan SKPD yang berulang kali

→ **Upaya perbaikan**

- Meningkatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment.
- Peningkatan kualitas dokumen SAKIP

* Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator program Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.
Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi 100 % dari target 100% dan capaian kinerja 100% dengan kriteria Berhasil.
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air bersih dan internet	12 Bulan	12 Bulan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	12 Bulan
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	11 Bulan	11 Bulan
9	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan
10	Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Terfasilitasinya tenaga non pns dan inventarisasi aset	13 Bulan	13 Bulan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Tersedia lembaga penyelenggara diklat
- Kerjasama yang baik antar bidang di internal Bappelitbang Kabupaten Banjar
- Komitmen Pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan di sekretariat.
- SDM dibidang sekretariat yang berkompeten
- Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana
- Pengadaan Barang sesuai dengan RKBMD

→ **Faktor penghambat**

- Adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemic COVID-19

→ **Upaya perbaikan**

- Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan sasaran.

* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator program Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi 100 % dari target 100 % dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	12 Bulan	12 Bulan
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Perencanaan anggaran kas yang tepat
- Komitmen dari seluruh pendukung kegiatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan agar berjalan tepat waktu

→ **Faktor penghambat**

- Adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemic COVID-19

→ **Upaya perbaikan**

- Perlu adanya kartu kendali untuk kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

* Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan realisasi 54% dari target 54% dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kursus-kursus singkat/diklat/ bimtek/seminar	54	54

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappedalitbang 2020

→ **Faktor pendorong**

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk peningkatan kompetensi ASN.

→ **Faktor penghambat**

Adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemic COVID-19.

→ **Upaya perbaikan**

- Perlu dirumuskan pemetaan diklat/bimtek, agar pelaksanaan diklat/bimtek/krsus bisa lebih tepat sasaran.

2.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan N-1 sampai Triwulan II (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2021 ini. Adanya perbedaan terkait nomenklatur program, kegiatan dan subkegaitan tersebut, berpengaruh terhadap pengisian Tabel 2.1 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan s/d Tahun 2021 Kabupaten Banjar). Karena adanya indicator-indikator dilevel yang dulunya kegiatan sekarang menjadi indicator di level subkegiatan.

Pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 44 subkegiatan, dengan total anggaran 2021 (N-1) yang dikelola untuk mendukung pencapaian sasarannya dalah sebesar Rp. 12.852.645,844,- (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah sebesar

Rp 4.895.185.959 ,- (Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau (38,09%).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjA dan Pencapaian Taerget Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2021, selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan s/d Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan /Subkegitan Renja SKPD Tahun 2021 sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Sampai dengan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
PROGRAM/KEGIATAN 2020														
4	**03**				**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
4	**03**	**01**			**Perencanaan**									
4	**03**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran**	**36**		**100**	**100**	**100**			
4	**03**	**01**	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	36	24	12	12	100			

4	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air bersih dan internet	36	24	12	12	100			
4	03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	36	24	12	12	100			
4	03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	36	24	12	12	100			
4	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	36	24	12	12	100			
4	03	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	36	24	12	12	100			

4	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	36	24	0	0	100			
4	03	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	33	24	11	11	100			
4	03	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	36	24	12	12	100			
4	03	01	01	19	Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Terfasilitasinya tenaga non pns dan inventarisasi aset	39	26	13	13	100			
4	**03**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100**		**100**	**100**	**100**			

4	03	01	02	07	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasionl	4	4	0	0	100			
4	03	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	36	24	12	12	100			
4	03	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	36	24	12	12	100			
4	03	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	36	24	12	12	100			
4	03	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	36	24	12	12	100			
4	03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	36	24	12	12	100			

4	03	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	36	24	12	12	100			
4	03	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	24	12	12	100			
4	**03**	**01**	**0 5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase ASN Bappelitbang yang mampu mengerjakan tupoksi**	**55**		**3**	**100**	**100**			
4	**03**	**01**	**0 5**	**03**	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN Bappelitbang yang mengikuti bimbingan teknis	0	-	3 org	3 org	100			

4	**03**	**01**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai SAKIP SKPD**	**78**		**76**	**85,36**	**112,32**			
4	03	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya lap. keuangan semesteran SKPD	6	2	2 lap.	2 lap.	100			
4	03	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	1	1 lap	1 lap	100			
4	03	01	06	08	Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun sesuai ketentuan (Renja & Renja-P dan Renstra)	6	-	2 dok.	2 dok.	100			

4	03	01	06	09	Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD (RKA & RKA-P, DPA & DPA-P)	12	-	4 dok.	4 dok.	100			
4	03	01	06	10	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja SKPD (LKjIP, LKPJ, LPPD)	9	-	3 dok.	3 dok.	100			
4	03	01	06	11	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya laporan semesteran BMD SKPD	12	-	4 lap.	4 lap.	100			
4	03	01	06	12	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dok. hasil monev. (RFK per bulan ke Bappelitbang, Lap. Renja per triwulan & RFK per bulan ke ULP)	3	-	28 dok.	28 dok.	100			

4	**03**	**01**	**20**		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ASN perencana yang memiliki kompetensi perencanaan daerah**	**80**		**59**	**59**	**100**			
4	03	01	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan	Jumlah aparat perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan	162	84	5 org	5 org	100			
4	03	01	20	02	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	300	200	0 org	0 org	100			

4	03	01	20	03	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	162	108	54 org	54 org	100			
4	**03**	**01**	**21**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase anatara perencanan dan penganggaran**	**100**	**80**	**100**	**100**	**100**			
4	03	01	21	05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya rancangan RPJMD 2016 - 2021		1	1	1	100			
4	03	01	21	08	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Dokumen rancangan awal RKPD dan RKPD perubahan	6	4	2	2	100			
4	03	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Berita acara kesepakatan	3	3	1 BA	1 BA	100			
4	03	01	21	10	Penetapan RKPD	Peraturan bupati RKPD dan RKPD perubahan	6	4	2 perbup	2 perbup	100			

4	03	01	21	11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok. LKJiP Pemerintah Kabupaten Banjar	3	2	1 dok.	1 dok.	100			
4	03	01	21	12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banjar	3	2	1 dok.	1 dok.	100			
4	03	01	21	14	Penyusunan KUA, PPAS	Dokumen KUA - PPAS dan perubahan	6	4	2 dok.	2 dok.	100			
4	03	01	21	16	Koordinasi Perencanaan DAK dan Sumber Dana Non APBD	Jumlah laporan dokumen usulan	6	4	2 dok.	2 dok.	100			
4	03	01	21	17	Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan (RFK, RKPD, DAK, Tepra, TP)	Dokumen monitoring dan evaluasi triwulan	60	35	20 dok.	10 dok.	100			

4	**03**	**01**	**22**		**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian**	**79,38**		**76,13**	**77,86**	**102,27**			
4	03	01	22	09	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	12		8 dok.	8 dok.	100			
4	03	01	22	10	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12		4 lap.	4lap.	100			
4	03	01	22	11	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	24		8 dok.	8 dok.	100			

4	03	01	22	12	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen	6		1 dok.	1 dok.	100			
4	03	01	22	14	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	15		5 dok.	5 dok.	100			
4	03	01	22	15	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12		4 lap.	4 lap.	100			

4	03	01	22	16	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	30		10 dok.	10 dok.	100			
4	03	01	22	17	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen	12		2 dok.	2 dok.	100			
4	**03**	**01**	**26**		**Program Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia**	**69**		**67**	**68,81**	**102,7**			

4	**03**	**01**	26	01	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	24		16 dok.	16 dok.	100			
4	**03**	**01**	26	02	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12		4 lap.	4 lap.	100			
4	**03**	**01**	26	03	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	48		16 dok.	16 dok.	100			

4	**03**	**01**	26	04	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen	9		5 dok.	5 dok.	100			
4	**03**	**01**	26	06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar	24		3 lap.	3 lap.	100			
4	**03**	**01**	26	07	Koordinasi Kota Sehat	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Kabupaten Banjar Sehat di Kabupaten Banjar	24		10 lap.	10 lap.	100			

4	**03**	**01**	26	08	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	30		20 dok.	20 dok.	100			
4	**03**	**01**	26	09	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	60		40 dok.	40 dok.	100			
4	**03**	**01**	26	10	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12		4 lap.	4 lap.	100			

4	**03**	**01**	26	11	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12		4 lap.	4 lap.	100			
4	**03**	**01**	26	12	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	60		20 dok.	20 dok.	100			
4	**03**	**01**	26	13	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	120		40 dok.	40 dok.	100			

4	**03**	**01**	26	14	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen	3		2 dok.	2 dok.	100			
4	**03**	**01**	**27**		**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah**	**74**		**72**	**76,03**	**105,6**			

4	03	01	27	01	Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	9		3 dok.	3 dok.	100			
4	03	01	27	02	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12		2 lap.	2 lap.	100			

4	03	01	27	03	Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	18		6 lap.	6 lap.	100			
4	03	01	27	04	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen	3		3 dok.	3 dok.	100			

4	03	01	27	06	Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	9		4 lap.	4 lap.	100			
4	03	01	27	07	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12		2 dok.	2 dok.	100			

4	03	01	27	08	Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	18		8 dok.	8 dok.	100			
4	03	01	27	09	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	3		2 S.I	2 S.I	100			

4	**03**	**01**	**28**		**Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan**	**80**		**70**	**70**	**100**			
						Persentase elemen data pembangunan termutkhirkan	**50**		**50**	**50**	**100**			
4	03	01	28	01	Penyusunan Analisis Data Pembangunan	Jumlah dokumen	21		3	3	100			
4	03	01	28	02	Publikasi Data Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi	21		5	5	100			
4	03	01	28	03	Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah elemen data SIPD yang terisi	4500		1 dok	1 dok	100			

4	**03**	**01**	**29**		**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti**	**60**		**60**	**60**	**100**			
						Persentase usulan inovasi yang diterapkan	**60**		**60**	**60**	**100**			
4	03	01	29	01	Penelitian dan Pengembangan (litbang) Sosial dan Pemerintahan	Laporan hasil penelitian	9		2 lap.	2 lap.	100			
4	03	01	29	02	Penelitian dan Pengembangan (litbang) Ekonomi dan Pembangunan	Laporan hasil penelitian	9		2 lap.	2 lap.	100			
4	03	01	29	03	Inovasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah inovasi	150		50 inovasi	50 inovasi	100			

PROGRAM/KEGIATAN 2021														
5	**01**	**01**	**1**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**					**50%**	**50**	5000
5	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	**82.05.00**					**0**	**0**	0,0

5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun sesuai ketentuan (Renja, Renja-P& Renstra)	3					1	1	33,3
5	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1					0	0	0,0
5	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD	1					0	0	0,0
5	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1					0	0	0,0
5	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD	1					0	0	0,0

5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja SKPD (LKJiP, LKPJ & LPPD)	3					3	3	100,0
5	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monev (RFK per bulan, Lap Renja per triwulan, Lap Tepra, PBJ)	52					26	26	50,0
5	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3**					**1**	**1**	33,3
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangn Asn	Tersedianya Gaji dan TPP	100					50	50	50,0

5	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terfasilitasinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Non ASN	13					7	7	53,8
5	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1					0	0	0,0
5	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan,Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2					1	1	50,0
5	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**4**					**2**	**2**	50,0

5	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pad SKPD	Terfasilitasinya inventarisasi aset	12					6	6	50,0
5	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**					**6**	**6**	50,0
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Bappelitbang yang mengikuti bimbingan teknis	3					1	1	33,3
5	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**					**50**	**50**	5000,0

5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12					6	6	50,0
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12					6	6	50,0
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12					6	6	50,0
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12					6	6	50,0
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12					6	6	50,0

5	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**					**50**	**50**	5000,0
5	**01**	**01**	**2,07**	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	12					6	6	50,0
5	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**					**50**	**50**	5000,0
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12					6	6	50,0

5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air bersih dan internet	12					6	6	50,0
5	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**					**50**	**50**	5000,0
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	12					6	6	50,0

5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12					6	6	50,0
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12					6	6	50,0
5	01	01	2,09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12					6	6	50,0

5	**01**	**0 2**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan**	**100**					**50**	**50**	50,0
5	**01**	**0 2**	2,01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan**	**100**					**50**	**50**	50,0
5	01	0 2	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJMD)	BA Musrenbang RKPD	1					0	0	0,0
						BA Musrenbang RPJMD	1					1	1	100,0
5	01	0 2	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dok KUA PPAS	2					0	0	0,0
						Dok Rancangan awal RKPD	2					1	1	50,0
						Dok Rancangan awal RPJMD	1					1	1	100,0

						Jumlah laporan Dokumen usulan Perencanaan DAK dan Sumber Dana Non APBD	1					0	0	0,0
5	**01**	**0 2**	2,03		**Pengedalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan**	**100**					**50**	**50**	50,0
5	01	0 2	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dok LKJiP Pemerintah Kab.Banjar	1					1	1	100,0
						Dok LKPJ Pemerintah Kab.Banjar	1					1	1	100,0

5	01	0 2	2,03	03	Monitoring Penyusuna Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dok monitoring evaluasi triwulan	20					10	10	50,0
5	**01**	**0 3**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rata-rata SAKIP SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia (Perencanaan kinerja, Pelaporan, Kinerja Pencapaian kinerja)**	**69**					**0**	**0**	0,0

						Rata-rata SAKIP SKPD Lingkup Bidang Perekonomian (Perencanaan kinerja, Pelaporan, Kinerja Pencapaian kinerja)	**79,38**					**0**	**0**	0,0
						Rata-rata SAKIP SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Perencanaan kinerja, Pelaporan, Kinerja Pencapaian kinerja)	**74**					**0**	**0**	0,0

5	**01**	**0 3**	2,01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan SDM**	**Rata-rata SAKIP SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia (Perencanaan kinerja, Pelaporan, Kinerja Pencapaian kinerja)**	**69**					**0**	**0**	0,0
5	01	0 3	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dok perencana Bid.Pemerintah	2					0	0	0,0
						Jumlah Dok perencana SKPD mitra Bid.Pemerintah yang terverifikasi (rancangan Renstra, Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021)	90					20	20	22,2

5	01	0 3	2,01	03		Jumlah dok evaluasi bid.sumber daya alam	1					0	0	0,0
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintah	Jumlah Dok LKJIP dan LKPJ SKPD mitra Bid.Pemerintah yang terverifikasi (rancangan Renstra, Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021)	60					60	60	100,0
						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD Bid.Pemerintah	4					2	2	50,0
5	01	0 3	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dok perencana Bid.Pembangunan manusia	1					0	0	0,0

						Jumlah Dok perencana SKPD mitra Bid.Pembangunan manusia yang terverifikasi (rancangan Renstra, Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021)	24					0	0	0,0
5	01	0 3	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dok evaluasi bid Pembangunan manusia	4					2	2	50,0
						Jumlah Dok LKJIP dan LKPJ SKPD mitra Bid.Pembangunan manusia yang terverifikasi	16					16	16	100,0

						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD Bid.Pembangunan manusia	4					2	2	50,0
5	**01**	**0 3**	**2,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian**	**Rata-rata SAKIP SKPD Lingkup Bidang Perekonomian (Perencanaan kinerja, Pelaporan, Kinerja Pencapaian kinerja)**	**79,38**					**0**	**0**	0,0
5	01	0 3	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dok perencana SKPD mitra Bid.Perindustrian dan dunia usaha yang terverifikasi	15					4	4	26,7

						Jumlah Dok perencana Bid.Perindustrian dan dunia usaha	2					1	1	50,0
5	01	0 3	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dok LKJIP dan LKPJ SKPD mitra Bid.Perindustrian dan dunia usaha yang terverifikasi	10					6	6	60,0
						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD Bid.Perindustrian dan dunia usaha	4					1	1	25,0
5	01	0 3	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perecanaan bidang sumber daya alam	1					0	0	0,0

						Jumlah Dokumen perencanaan SKPD mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam yang terverifikasi	12					0	0	0,0
						Jumlah sistem informasi bidang sumber daya alam	1					0	0	0,0
5	01	0 3	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD mitra Bid.sumber daya alam yang terverifikasi	8					8	8	100,0

						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD Mitra Sub Bidang sumber daya alam	4					2	2	50,0
5	**01**	**0 3**	**2,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana**	**Rata-rata SAKIP SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Perencanaan kinerja, Pelaporan, Kinerja Pencapaian kinerja)**	**74**					**0**	**0**	0,0
5	01	0 3	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dok perencana Bid.infrastruktur	1					0	0	0,0

					(RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dok perencana SKPD mitra Bid.infrastruktur yang terverifikasi (rancangan Renstra, Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021)	9					0	0	0,0
5	01	0 3	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dok LKJIP dan LKPJ SKPD mitra Bid.infrastruktur yang terverifikasi	6					6	6	100,0
						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD Bid.infrastruktur	4					2	2	50,0
5	01	0 3	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dok perencana bidang kewilayahan	2					0	0	0,0

						Jumlah dok perencana SKPD mitra bidang kewilayahan yang terverifikasi (rancangan Renstra, Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021)	12					0	0	0,0
5	01	0 3	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dok LKJIP dan LKPJ SKPD mitra Bid.kewilayahanyang terverifikasi	8					8	8	100,0
						Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SKPD Bid.kewilayahan	4					2	2	50,0

						Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan	**80%**					**40%**	**40%**	50,0
5	0 5				**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti**	**100%**					**100%**	**50%**	50,0
						Persentase usulan inovasi yang diterapkan	**50%**					**20%**	**20%**	40,0
5	**0 5**	**0 2**	**2,01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Penerima manfaat data informasi pembangunan**	**80%**					**40%**	**40%**	50,0
5	0 5	0 2	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data sektoral	1					0	0	0,0

						Jumlah dokumen	3					1	1	33,3
						Jumlah media publikasi	3					1	1	33,3
5	**0 5**	**0 2**	**2,03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti**	**100%**					**100%**	**100%**	100,0
5	0 5	0 2	2,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Laporan hasil penelitian	1					1	1	100,0
5	**0 5**	**0 2**	**2,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase usulan inovasi yang diterapkan**	**50%**					**20%**	**20%**	40,0
5	0 5	0 2	2,04	01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi	50					21	21	42,0
						Laporan hasil penelitian	1					0	0	0,0

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappedalitbang Tahun 2020, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappedalitbang Tahun 2021 sd Triwulan II

Jika melihat realisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas , dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021, rata-rata hampir semua sudah berada di atas 50 persen. Maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai. Adapun untuk capaian program kegiatan/subkegiatan yang belum terlaksana lebih disebabkan karena menyesuaikan dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan ditriwulan selanjutnya. Sedangkan untuk realisasi kinerja pada beberapa kegiatan yang ada di bidang sector Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar (Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia, Bidang Fisik dan Prasarana) yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia serta Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana yang belum ada realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021, lebih disebabkan karena masih berjalannya kegiatan koordinasi perencanaan sesuai dengan urusan mitranya masing dan masih berjalannya asistensi penyusunan dokumen perencanaan masing-masing mitra bidang sektor.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan.

Capaian kinerja pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar di ukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar sebagaimana dapat di lihat pada table 2.2 di bawah ini :

Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kabupaten Banjar

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD 2020-2023 (Tahun Ke-)				Realisasi Capaian SKPD 2020-2021 (Tahun Ke-)		Proyeksi Realisasi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
				Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan												
1	Indeks Perencanaan Pembangunan			73,03				71,69				Untuk Tahun 2020 memakai formulasi : a). Perencanaan Kinerja bobot 30%; b). Pelaporan Kinerja bobot 15%; c). Pencapaian Kinerja bobot 20%.
2	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti			100%				100%				
Indikator Kinerja Utama setelah Perubahan (Berdasarkan Hasil Kesepakatan Pembahasan Pohon Kinerja)												
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah				70,81	72,92	75,04			72,92	75,04	Ada perubahan terkait komponen perhitungan dari Indeks Perencanaan Daerah. Untuk Tahun 2021-2023 memakai formulasi : a). Perencanaan Kinerja bobot 30%; b). Evaluasi Internal bobot 10%; c). Pencapaian Kinerja bobot 20%. Untuk capaian tahun 2021 belum bisa disampaikan karena masih menunggu hasil penilaian dari KemenPAN RB RI
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pegembangan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

Sumber data : LKjIP Bappelitbang Tahun 2020, Renstra Bappelitbang 2021-2026

Berikut adalah penjelasan singkat terkait hasil pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar:

- Indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan, dengan formulasi perhitungan

  Formulasi penghitungan indikator :

  Indeks Perencanaan Pembangunan = Indeks Komponen Perencanaan Hasil Penilaian SAKIP oleh KemenpanRB (46% Perencanaan + 23% Pelaporan + 31% Capaian).

Tabel 2. 3 Komponen Penilaian SAKIP untuk Perencanaan

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2020	BOBOT IPP (NILAI /BOBOT)
Perencanaan Kinerja	**30**	**23,88**	**79,60**
Pengukuran Kinerja	25	16,08	
Pelaporan Kinerja	**15**	**11,15**	**74,33**
Evaluasi Internal	10	5,98	
Capaian Kinerja	**20**	**11,60**	**58**
Nilai Hasil Evaluasi		**68,70**	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 KemenpanRB

Indeks Perencanaan Pembangunan = {(46% * 79,60) + (23% * 74,33) + (31%*58)} = 71, 69.

Realisasi capaian tersebut masih berada di bawah target tahun 2020. Dan untuk meningkatkan pencapaian pelayanan Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar, maka ada beberapa langkah yang ditempuh antara lain :

- Meningkatkan kopetensi sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar terutama terkait dengan perencanaan.
- Mengoptimalkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan dengan SKPD lain;
- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat,

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Dalam urusan perencanaan, terdapat dua permasalahan pokok, yaitu terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi proses perencanaan daerah dan kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan rencana. Sementara itu, dalam urusan penelitian, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan

Tantangan yang dihadapi oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam pengembangan pelayanannya diantaranya :

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada BappedaLitbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kabupaten Banjar menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- Perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis "*e-performance based budgeting*".

  Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- Masih kurangnya sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
- Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar dengan SKPD lain;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- Perkembangan Kabupaten Banjar

  Pasca terjadinya banjir pada awal tahun 2021 dan masih berlanjutnya pandemi COVID-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan pemulihan pasca kedua bencana tersebut.

Adapun peluang yang dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar antara lain sebagai berikut :

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- Terbukanya peluang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana.
- Semakin meningkatkan kesadaran SKPD akan pentingnya perumusan perencanaan yang baik dan benar.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Bupati Banjar.

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu BappedaLitbang perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati, dengan melakukan pengkoordinasian dan pengawalan melalui bidang-bidang sektor yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar.

Selain itu dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan banyak aspek, diantaranya adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan, serta data capaian target kinerja sebagai *baseline* dalam menentukan target pembangunan selanjutnya. Juga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang menganut anggaran yang berbasis pada kinerja atau *"e-performance based budgeting"* agar sepenuhnya menerapkan "*money follow program*" yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga diperlukan peningkatan integrasi program (*cross cutting*) dan kegiatan lintas perangkat daerah, baik dalam pengembangan wilayah, pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi daerah.

2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kabupaten telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah, memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah ini terdiri dari kesesuaian antar dokumen perencanaan, dan juga kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan

Selain hal tersebut di atas, untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran

aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang.

3. Pemanfaatan hasil kajian penelitian, pengembangan dan inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan

   Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banjar.

4. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BappedaLitbang perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

5. Musibah Banjir dan Pandemi COVID-19 beserta Dampaknya

   Terkait terjadinya musibah banjir di awal tahun 2021 dan masih berlanjutnya pandemi COVID-19, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar perlu mengkoordinasikan perencanaan tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi paska banjir dan pandemi.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD SKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada di bawah ini :

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Banjar	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PRIORITAS PROGRAM**	**80%**	**1.579.421.000**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kabupaten Banjar	**PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU**	**100%**	**1.719.420.800**	Ada beberapa perbedaan terkait dengan indicator kinerja, target serta pendanaa, perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan tersebut terjadi karena : 6. Terkait Indikator Kinerja menyesuaikan dengan hasil kesepakatan pembahasan Pohon Kinerja 7. Terkait dengan Pagu Indikatif menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD 8. Terkait Target sesuai dengan kesepakatan
							PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS	**100%**		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Banjar	**Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan**	**100%**	**858.758.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kabupaten Banjar	**Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan**	**100%**	**698.758.000**	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kabupaten Banjar	Jumlah Berita Acara	1 dok	17.166.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kabupaten Banjar	Berita Acara Hasil FKP sesuai ketentuan	1 B.A	17.166.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Berita Acara	20 dok	32.683.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kabupaten Banjar	Berita Acara Hasil Forum SKPD Sesuai Ketentuan	1 B.A	32.683.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Berita Acara	1 dok	166.105.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD sesuai Ketentuan	1 B.A	166.105.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dok	642.804.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Ketentuan	2 dok	482.804.000	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Banjar	**Persentase Analisis Data dan Informasi yang dimanfaatkan**	**100%**	**482.000.000**	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kabupaten Banjar	**Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Dimutakhirkan**	**100%**	**782.000.000**	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Analisis	4 dok	300.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase Analisis data yang Update dan Dibutuhkan Dalam Perencanaan Pembangunan	100%	600.000.000	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Sosialisasi	6 keg	72.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Informasi Perencanaan Pembangunan	3 dok	72.000.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Profil	2 dok	110.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Banjar	1 dok	110.000.000	
Pengedalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Banjar	**Persentase Capaian Kinerja SKPD**	**80%**	**238.663.000**	**Pengedalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kabupaten Banjar	**Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%**	**100%**	**238.662.800**	
							Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik	**100%**		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah koordinasi pengendalian	4 keg	147.813.000	Monitoring Penyusuna Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Banjar	Persentase SKPD yang memanfaatkan sistem sesuai ketentuan	100%	238.662.800	
	Kabupaten Banjar	Jumlah laporan monev	8 lap	90.850.000		Kabupaten Banjar	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti	100%		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Banjar	**INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD**	**37,51**	**3.525.059.930**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kabupaten Banjar	**INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**	**75,45**	**3.423.059.600**	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA	**77,06**		
							INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	**73,03**		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Banjar	**Indeks perencanaan pembangunan SKPD lingkup bidang Sosbud dan SDM**	**37,24**	**1.509.523.100**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kabupaten Banjar	**Persentase Perencanaan Sektor Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**1.509.523.100**	
							Persentase Perencanaan Sektor Pemerintahan yang sesuai Ketentuan	**100%**		
							Persentase Perencanaan Sektor Pemerintahan Kecamatan yang sesuai Ketentuan	**100%**		
							Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pembangunan Manusia sesuai dengan Target yang ditetapkan	**100%**		
							Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pemerintahan sesuai dengan Target yang ditetapkan	**100%**		
							Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan Target yang ditetapkan	**100%**		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintah	2 dok	181.847.300	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Persentase Dokumen SKPD Sektor Pemerintahan yang Diverifikasi	100%	181.847.300	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Mitra Bidang Pemerintah Yang Terverifikasi (Rancangan Renstra, Renja Murni Dan Renja Perubahan)	60 dok			Kabupaten Banjar	Persentase Dokumen SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan yang Diverifikasi	100%		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Evaluasi Bidang Pemerintah	1 dok	102.215.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintah	Kabupaten Banjar	Persentase Monev SKPD Sektor Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	102.215.300	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi SKPD Bidang Pemerintah	4 lap			Kabupaten Banjar	Persentase Monev SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan	100%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana Bidang Pembangunan Manusia	9 dok	809.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Persentase Dokumen SKPD Sektor Pembangunan Manusia yang Diverifikasi	100%	809.000.000	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana SKPD Mitra Bidang Pembangunan Manusia Yang Terverifikasi (Rancangan Renstra, Renja Murni Dan Renja Perubahan)	16 dok					100%		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	4 dok	416.460.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banjar	Persentase Monev SKPD Sektor Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	416.460.500	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi SKPD Bidang Pembangunan Manusia	4 lap			Kabupaten Banjar				
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten Banjar	**Indeks perencanaan pembangunan SKPD lingkup bidang perekonomian**	**39,84**	**811.160.830**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Kabupaten Banjar	**Persentase Perencanaan Perekonomian yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**811.160.500**	
							Persentase Perencanaan Sumberdaya Alam yang sesuai Ketentuan	**100%**		
							Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Ekonomi sesuai dengan Target yang ditetapkan	**100%**		

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
							Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Sumberdaya Alam sesuai dengan Target yang ditetapkan	**100%**		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana SKPD Mitra Bidang Perindustrian Dan Dunia Usaha Yang Terverifikasi	10 dok	36.882.450	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Persentase Dokumen SKPD Sektor Perekonomian yang akan Diverifikasi	100%	386.882.400	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana Bidang Perindustrian Dan Dunia Usaha	2 dok	350.000.000		Kabupaten Banjar				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi SKPD Bidang Perindustrian Dan Dunia Usaha	4 lap	22.386.210,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banjar	Persentase Monev SKPD Sektor Perkonomian yang dilaksanakan	100%	22.386.200	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perecanaan Bidang Sumber Daya Alam	2 dok	350.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Persentase Dokumen SKPD Sektor Sumberdaya Alam yang akan Diverifikasi	100%	379.505.700	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam Yang Terverifikasi	8 dok	29.505.960		Kabupaten Banjar				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi SKPD Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam	4 lap	22.386.210	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banjar	Persentase Monev SKPD Sektor Sumberdaya Alam yang dilaksanakan	100%	22.386.200	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabupaten Banjar	**Indeks perencanaan pembangunan SKPD lingkup bidang fisik dan prasarana**	**39,02**	**1.204.376.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Kabupaten Banjar	**Persentase Perencanaan Sektor Infrastruktur yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**1.102.376.000**	
							Persentase Perencanaan Sektor Wilayah yang sesuai Ketentuan	**100%**		
							Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Infrastruktur sesuai dengan Target yang ditetapkan	**100%**		
							Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Wilayah sesuai dengan Target yang ditetapkan	**100%**		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana Bidang Infrastruktur	2 dok	1.000.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Persentase Dokumen SKPD Sektor Infrastruktur yang akan Diverifikasi	100%	963.000.000	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Yang Terverifikasi (Rancangan Renstra, Renja Murni Dan Renja Perubahan)	9 dok	65.000.000		Kabupaten Banjar				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi SKPD Bidang Infrastruktur	4 Lap	30.869.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banjar	Persentase Monev SKPD Sektor Infrastruktur yang dilaksanakan	100%	30.869.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana Bidang Kewilayahan	0 dok	77.638.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Banjar	Persentase Dokumen SKPD Sektor Wilayah yang akan Diverifikasi	100%	77.638.000	
	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencana SKPD Mitra Bidang Kewilayahan Yang Terverifikasi (Rancangan Renstra, Renja Murni Dan Renja Perubahan)	12 dok			Kabupaten Banjar				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi SKPD Bidang Kewilayahan	4 lap	30.869.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banjar	Persentase Monev SKPD Sektor Wilayah yang dilaksanakan	100%	30.869.000	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Banjar	**PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN**	**22,22%**	**700.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Kabupaten Banjar	**PERSENTASE HASIL PENELITIAN YANG DITINDAKLANJUTI**	**100%**	**700.000.000**	
	Kabupaten Banjar	**PERSENTASE INOVASI BERPRESTASI**	**13,79%**			Kabupaten Banjar	**PERSENTASE INDEKS INOVASI DAERAH**	**100%**		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Banjar	**Persentase Usulan Inovasi Yang Diterapkan**	**62,06%**	**500.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kabupaten Banjar	**Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah**	**33%**	**500.000.000**	
Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Banjar	Jumlah inovasi yang diusulkan	54	500.000.000	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Banjar	Jumlah Usulan Inovasi	20	500.000.000	
	Kabupaten Banjar	Laporan hasil penelitian				Kabupaten Banjar				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kabupaten Banjar	**Persentase Hasil Penelitian Yang Ditindaklanjuti**	**100%**	**200.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Kabupaten Banjar	**Persentase Hasil Penelitian Yang Terealisasi**	**100%**	**200.000.000**	
Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Kabupaten Banjar	laporan hasil penelitian	1 lap	100.000.000	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Kabupaten Banjar	Jumlah Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang terealisasi	1 lap	100.000.000	
Penelitian dan pengembangan pariwisata	Kabupaten Banjar	laporan hasil penelitian	1 lap	100.000.000	Penelitian dan pengembangan pariwisata	Kabupaten Banjar	Jumlah Penelitian dan pengembangan pariwisata yang terealisasi	1 lap	100.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Banjar	**IKM Perangkat Daerah**	**86,97**	**7.756.860.140**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Banjar	**INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)**	**80%**	**7.530.250.806**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**44.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**44.500.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Disusun Sesuai Ketentuan (Renja Murni, Renja Perubahan, Renstra)	3 dok	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	3 dok	11.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	1 dok	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	1 dok	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	1 dok	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dok	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	1 dok	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Kinerja SKPD (LKJIP, LKPJ & LPPD)	3 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	3 dok	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Monev (RFK Per Bulan, Laporan Renja Per-Triwulan, Laporan Tepra, PBJ)	52 dok	10.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	Tersusunnya dokumen hasil monev perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	52 dok	10.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5.709.860.140**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**4.430.427.546**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN	Kabupaten Banjar	Tersedianya Gaji Dan TPP	13 bulan	4.246.930.070	Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN	Kabupaten Banjar	Terbayarnya gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN	12 bulan	4.414.427.546	
	Kabupaten Banjar	Terfasilitasinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dan Non ASN	12 bulan	1.446.930.070						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Kabupaten Banjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 lap	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Kabupaten Banjar	Tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	1 lap	8.500.000	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan,Semesteran SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 lap	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan,Semesteran SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran perangkat daerah sesuai ketentuan	18 lap	7.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**7.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**7.000.000**	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pad SKPD	Kabupaten Banjar	Terfasilitasinya Inventarisasi Aset	4 lap	7.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pad SKPD	Kabupaten Banjar	Tersusunnya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah sesuai ketentuan	4 lap	7.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**67.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**79.500.000**	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Banjar	Jumlah ASN Bappelitbang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 orang	67.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Banjar	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang meningkat kompetensinya	5 orang	79.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.271.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**870.971.200**	
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Banjar	Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Banjar	Jaringan listrik terpelihara dengan baik	12 bulan	9.990.400	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Banjar	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Banjar	Penyediaan peralatan kantor yang terpenuhi	12 bulan	28.980.900	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Banjar	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	31.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Banjar	Penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 bulan	17.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Banjar	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Banjar	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan	12 bulan	14.999.900	
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Banjar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dan Dalam Daerah	12 bulan	1.200.000.000	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Banjar	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	12 bulan	800.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**26.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**26.000.000**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	26.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	12 bulan	26.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**214.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.656.069.060**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Banjar	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Banjar	Lancarnya Jasa surat menyurat	12 bulan	6.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air Bersih dan Internet	12 bulan	208.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Banjar	Lancarnya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	203.149.060	
					Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kabupaten Banjar	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.446.920.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**417.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Banjar	**Terpenuhinya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**415.783.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kabupaten Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	12 bulan	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kabupaten Banjar	Kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	12 bulan	40.990.000	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	280.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Banjar	Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	12 bulan	279.800.000	
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	35.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Terpelihara dan berfungsinya gedung kantor dengan baik	12 bulan	59.993.000	
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	60.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Banjar	Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik	12 bulan	35.000.000	

Sumber : RKPD Tahun 2022, Inputan pada SIPD Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjar selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang

dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM

5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah

tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
    a. Peningkatan Sistem Pendidikan
    b. Peningkatan Sistem Kesehatan
    c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
    a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
    b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
    c. Penanggulangan Kemiskinan
    d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
    a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
    b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
    c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
    a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    c. Peningkatan Kualitas Aparatur
    d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
    a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
    b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan urusan perencanaan, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar mendukung pencapaian prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 yaitu terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sub Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2022, yaitu ” Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja, dengan indikator tujuan “Nilai SAKIP”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 yaitu “Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Inovasi.

Penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan padaRenstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar 2021- 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappelitbang 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	72,92
			Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Inovasi	100%

Sumber : Dokumen Renstra Bappelitbang 2022-2026

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Bappedalitbang

Program dan kegiatan prioritas merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2022.

3.3.1 Faktor - Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan/SubKegiatan Prioritas

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program dan kegiatan priorotas adalah :

1) Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, terutama misi ke 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

1. Program/Kegiatan/SubKegiatan prioritas ini memberikan kontribusi terhadap ke pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar. Karena dalam pelaksanaannya terkait dengan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dengan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Banjar.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program prioritas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar tahun 2022 ada sebanyak 2 program, 6 kegiatan, dan 20 sub kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan adalah melingkupi seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja program/kegiatan/subkegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar seluruhnya adalah sebesar Rp. 5.142.480.400,- (Lima Miliar Seratus Empat Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat ratus Rupiah) yang keseluruhan sumber pendanaannya berasal dari APBD KabupatenBanjar.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5	**01**				**PERENCANAAN**							
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**	**Kabupaten Banjar**	**75,45**	**3.423.059.600**		**76,79**	**3.877.565.923**
						INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA	**Kabupaten Banjar**	**77,06**			**77,06**	
						INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	**Kabupaten Banjar**	**73,03**			**73,03**	
5	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Perencanaan Sektor Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**2.707.566.000**		**100%**	**1.660.475.410**
						Persentase Perencanaan Sektor Pemerintahan yang sesuai Ketentuan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
						Persentase Perencanaan Sektor Pemerintahan Kecamatan yang sesuai Ketentuan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pembangunan Manusia sesuai dengan Target yang ditetapkan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pemerintahan sesuai dengan Target yang ditetapkan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan Target yang ditetapkan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
5	1	3	2,01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Pemerintahan yang Diverifikasi	Kabupaten Banjar	100%	181.847.300		100%	200.032.030
						Persentase Dokumen SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan yang Diverifikasi	Kabupaten Banjar	100%			100%	
5	1	3	2,01	3		Persentase Monev SKPD Sektor Pemerintahan yang dilaksanakan	Kabupaten Banjar	100%	102.215.300		100%	112.436.830

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Monev SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan	Kabupaten Banjar	100%			100%	
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Pembangunan Manusia yang Diverifikasi	Kabupaten Banjar	100%	809.000.000		100%	889.900.000
5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Monev SKPD Sektor Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang dilaksanakan	Kabupaten Banjar	100%	416.460.500		100%	458.106.550
5	**1**	**3**	**2,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Perencanaan Perekonomian yang sesuai Ketentuan**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**811.160.500**		**100%**	**892.276.913**
						Persentase Perencanaan Sumberdaya Alam yang sesuai Ketentuan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Ekonomi sesuai dengan Target yang ditetapkan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Sumberdaya Alam sesuai dengan Target yang ditetapkan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Perekonomian yang akan Diverifikasi	Kabupaten Banjar	100%	386.882.400		100%	425.570.695
5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Monev SKPD Sektor Perkonomian yang dilaksanakan	Kabupaten Banjar	100%	22.386.200		100%	409.624.831
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Sumberdaya Alam yang akan Diverifikasi	Kabupaten Banjar	100%	379.505.700		100%	32.456.556
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Monev SKPD Sektor Sumberdaya Alam yang dilaksanakan	Kabupaten Banjar	100%	22.386.200		100%	24.624.831
5	**1**	**3**	**2,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Perencanaan Sektor Infrastruktur yang sesuai Ketentuan	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**1.102.376.000**		**100%**	**1.324.813.600**
						Persentase Perencanaan Sektor Wilayah yang sesuai Ketentuan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Infrastruktur sesuai dengan Target yang ditetapkan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Wilayah sesuai dengan Target yang ditetapkan	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Infrastruktur yang akan Diverifikasi	Kabupaten Banjar	100%	963.000.000		100%	1.171.500.000
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Monev SKPD Sektor Infrastruktur yang dilaksanakan	Kabupaten Banjar	100%	30.869.000		100%	33.955.900
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Wilayah yang akan Diverifikasi	Kabupaten Banjar	100%	77.638.000		100%	85.401.800
5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Monev SKPD Sektor Wilayah yang dilaksanakan	Kabupaten Banjar	100%	30.869.000		100%	33.955.900
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	1.719.420.800		**100%**	1.737.363.100
						PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
5	**01**	**02**	**2,01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**698.758.000**		**100%**	**944.633.800**
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Hasil FKP sesuai ketentuan	Kabupaten Banjar	1 B.A	17.166.000		1 B.A	18.882.600
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum SKPD Sesuai Ketentuan	Kabupaten Banjar	1 B.A	32.683.000		1 B.A	35.951.300
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD sesuai Ketentuan	Kabupaten Banjar	1 B.A	166.105.000		1 B.A	182.715.500
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Ketentuan	Kabupaten Banjar	2 dok	482.804.000		2 dok	707.084.400
5	**01**	**02**	**2,02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Dimutakhirkan**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**782.000.000**		**100%**	**530.200.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis data yang Update dan Dibutuhkan Dalam Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Banjar	100%	600.000.000		100%	330.000.000
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Informasi Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Banjar	3 dok	72.000.000		3 dok	79.200.000
5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar	1 dok	110.000.000		1 dok	121.000.000
5	**1**	**2**	**2,03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**238.662.800**		**100%**	**262.529.300**
						Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik	**Kabupaten Banjar**	**100%**			**100%**	
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang memanfaatkan sistem sesuai ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	238.662.800		100%	162.594.300
						Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti	Kabupaten Banjar	100%			100%	99.935.000

Sumber : Dokumen Renstra Bappedalitbang 2022-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar 2021 -2026.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar di tahun 2022 adalah sebanyak 4 Program 16 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.371.731.206 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) yang keseluruhan sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Banjar. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5	**1**				**PERENCANAAN**				**5.142.480.400**			**5.614.929.023**
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU**	Kabupaten Banjar	**100%**	**1.719.420.800**		**100%**	**1.737.363.100**
						PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS		**100%**			**100%**	
5	**1**	**2**	**2,01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan**		**100%**	**698.758.000**		**100%**	**944.633.800**
5	1	2	2,01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Hasil FKP sesuai ketentuan		1 B.A	17.166.000		1 B.A	18.882.600
5	1	2	2,01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum SKPD Sesuai Ketentuan		1 B.A	32.683.000		1 B.A	35.951.300
5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD sesuai Ketentuan		1 B.A	166.105.000		1 B.A	182.715.500
5	1	2	2,01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Ketentuan		2 dok	482.804.000		2 dok	707.084.400
5	**1**	**2**	**2,02**		**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Dimutakhirkan**		**100%**	**782.000.000**		**100%**	**530.200.000**
5	1	2	2,02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis data yang Update dan Dibutuhkan Dalam Perencanaan Pembangunan		100%	600.000.000		100%	330.000.000
5	1	2	2,02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Informasi Perencanaan Pembangunan		3 dok	72.000.000		3 dok	79.200.000
5	1	2	2,02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Banjar		1 dok	110.000.000		1 dok	121.000.000
5	**1**	**2**	2,03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Budang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%**		**100%**	**238.662.800**		**100%**	**250.595.940**
						Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik		**100%**			**100%**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	**1**	**2**	2,03	3	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang memanfaatkan sistem sesuai ketentuan		**100%**	**238.662.800**		**100%**	250.595.940
						Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti		**100%**			**-**	
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**		**75,45**	**3.423.059.600**		**76,79**	**3.877.565.923**
						INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA		**77,06**			**77,06**	
						INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		**73,03**			**73,03**	
5	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Perencanaan Sektor Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan**		**100%**	**1.509.523.100**		**100%**	**1.660.475.410**
						Persentase Perencanaan Sektor Pemerintahan yang sesuai Ketentuan		**100%**			**100%**	
						Persentase Perencanaan Sektor Pemerintahan Kecamatan yang sesuai Ketentuan		**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pembangunan Manusia sesuai dengan Target yang ditetapkan		**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pemerintahan sesuai dengan Target yang ditetapkan		**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan Target yang ditetapkan		**100%**			**100%**	
5	1	3	2,01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Pemerintahan yang Diverifikasi		100%	181.847.300		100%	200.032.030
						Persentase Dokumen SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan yang Diverifikasi		100%			100%	
5	1	3	2,01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Monev SKPD Sektor Pemerintahan yang dilaksanakan		100%	102.215.300		100%	112.436.830
						Persentase Monev SKPD Sektor Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan		100%			100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	1	3	2,01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Pembangunan Manusia yang Diverifikasi		100%	809.000.000		100%	889.900.000
5	1	3	2,01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Monev SKPD Sektor Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang dilaksanakan		100%	416.460.500		100%	458.106.550
5	**1**	**3**	**2,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Perencanaan Perekonomian yang sesuai Ketentuan**		**100%**	**811.160.500**		**100%**	**892.276.913**
						Persentase Perencanaan Sumberdaya Alam yang sesuai Ketentuan		**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Ekonomi sesuai dengan Target yang ditetapkan		**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Sumberdaya Alam sesuai dengan Target yang ditetapkan		**100%**			**100%**	
5	1	3	2,02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Perekonomian yang akan Diverifikasi		100%	386.882.400		100%	425.570.695
5	1	3	2,02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Monev SKPD Sektor Perkonomian yang dilaksanakan		100%	22.386.200		100%	409.624.831
5	1	3	2,02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Sumberdaya Alam yang akan Diverifikasi		100%	379.505.700		100%	32.456.556
5	1	3	2,02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Monev SKPD Sektor Sumberdaya Alam yang dilaksanakan		100%	22.386.200		100%	24.624.831
5	**1**	**3**	**2,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Perencanaan Sektor Infrastruktur yang sesuai Ketentuan		**100%**	**1.102.376.000**		**100%**	**1.324.813.600**
						Persentase Perencanaan Sektor Wilayah yang sesuai Ketentuan		**100%**			**100%**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Infrastruktur sesuai dengan Target yang ditetapkan		**100%**			**100%**	
						Persentase Capaian Kinerja SKPD Sektor Wilayah sesuai dengan Target yang ditetapkan		**100%**			**100%**	
5	1	3	2,03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Infrastruktur yang akan Diverifikasi		100%	963.000.000		100%	1.171.500.000
5	1	3	2,03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Monev SKPD Sektor Infrastruktur yang dilaksanakan		100%	30.869.000		100%	33.955.900
5	1	3	2,03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen SKPD Sektor Wilayah yang akan Diverifikasi		100%	77.638.000		100%	85.401.800
5	1	3	2,03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Monev SKPD Sektor Wilayah yang dilaksanakan		100%	30.869.000		100%	33.955.900
5	**1**	**2**	**2,03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%**		**100%**	**238.662.800**		**100%**	**262.529.300**
						Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik		**100%**			**100%**	
5	1	2	2,03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang memanfaatkan sistem sesuai ketentuan		100%	238.662.800		100%	162.594.300
						Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti		100%			100%	99.935.000
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**700.000.000**			
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE HASIL PENELITIAN YANG DITINDAKLANJUTI**		**100%**	**200.000.000**			
5	**5**	**2**	**2,02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Kebutuhan Penelitian yang Terealisasi**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	**5**	**2**	**2,02**	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang terealisasi		1 lap	100.000.000			
5	**5**	**2**	**2,02**	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penelitian dan pengembangan pariwisata yang terealisasi		1 lap	100.000.000			
5	**5**	**2**	**2,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**PERSENTASE INDEKS INOVASI DAERAH**		**100%**	**500.000.000**			
5	**5**	**2**	**2,04**	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah usulan inovasi		20 inovasi	500.000.000			
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)**		**80%**	**7.529.250.806**		**80%**	**8.174.500.000**
5	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**44.500.000**		**100%**	**48.000.000**
5	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		3 dok	11.000.000		3 dok	11.500.000
5	1	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		1 dok	3.000.000		1 dok	3.500.000
5	1	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		1 dok	3.000.000		1 dok	3.500.000
5	1	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		1 dok	3.500.000		1 dok	4.000.000
5	1	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		1 dok	3.500.000		1 dok	4.000.000
5	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		3 dok	10.000.000		3 dok	10.500.000
5	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen hasil monev perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		52 dok	10.500.000		52 dok	11.000.000
5	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**100%**	**4.430.427.546**		**100%**	**4.517.000.000**
5	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN	Terbayarnya gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN		12 bulan	4.414.427.546		12 bulan	4.500.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP		1 lap	8.500.000		1 lap	9.000.000
5	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan,Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran perangkat daerah sesuai ketentuan		18 lap	7.500.000		18 lap	8.000.000
5	**1**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**100%**	**7.000.000**		**100%**	**7.500.000**
5	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pad SKPD	Tersusunnya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah sesuai ketentuan		4 lap	7.000.000		4 lap	7.500.000
5	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100%**	**79.500.000**		**100%**	**94.500.000**
5	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang meningkat kompetensinya		5 orang	79.500.000		5 orang	94.500.000
5	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**870.971.200**		**100%**	**1.324.500.000**
5	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jaringan listrik terpelihara dengan baik		12 bulan	9.990.400		12 bulan	10.500.000
5	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan kantor yang terpenuhi		12 bulan	28.980.900		12 bulan	16.000.000
5	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi		12 bulan	17.000.000		12 bulan	32.000.000
5	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan		12 bulan	14.999.900		12 bulan	16.000.000
5	1	1	2,06	9	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi		12 bulan	800.000.000		12 bulan	1.250.000.000
5	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**26.000.000**		**100%**	**27.000.000**
5	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan		12 bulan	26.000.000		12 bulan	27.000.000
5	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**1.656.069.060**		**100%**	**1.716.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Jasa surat menyurat		12 bulan	6.000.000		12 bulan	7.000.000
5	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	203.149.060		12 bulan	209.000.000
5	1	1	2,08	4	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	1.446.920.000		12 bulan	1.500.000.000
5	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**415.783.000**		**100%**	**440.000.000**
5	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik		12 bulan	40.990.000		12 bulan	43.000.000
5	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik		12 bulan	279.800.000		12 bulan	290.000.000
5	1	1	2,09	9	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara dan berfungsinya gedung kantor dengan baik		12 bulan	35.000.000		12 bulan	45.000.000
5	1	1	2,09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik		12 bulan	59.993.000		12 bulan	62.000.000

Sumber : Inputan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Aplikasi SIPD

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar. Renja perangkat daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.

Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja Tahun 2022 ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Renja Dinas PUPR Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Banjar untuk tahun yang akan datang.

Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) badan, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Kabupaten Banjar menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

BAB I PENDAHULUAN

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, .dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar tanggal 23 Desember 2016.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 5 bidang yang mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, bidang Cipta Karya, bidang Bina Jasa Konstruksi dan bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Selain itu juga terdapat 1 Bagian yakni Bagian Sekretariat yang menangani operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.

Sebagaimana diketahui kebijakan dan program Pembangunan Kabupaten Banjar berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 yang dijadikan dasar untuk mengarahkan dan memperkuat visi dan misi pembangunan dan nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Selanjutnya disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan rencana kerja ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 57);
28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar;
29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai dokumen yang berisi pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar untuk 1 tahun ke depan yaitu tahun 2022, yang dilaksanakan secara gradual, bertahap dan berkesinambungan serta adaptif. Oleh karena itu diharapkan dengan melihat rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan menggambarkan arah dan berkembangnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, serta susunan garis besar isi dokumennya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, peluang dalam meningkatkan pelayanan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (2020) dan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. Selain itu juga diuraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan, Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar tahun 2021.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 56 orang yang terdiri dari 22 orang pejabat struktural, 31 orang fungsional umum dan 3 orang fungsional tertentu.

Pejabat struktural di Dinas PUPR Kabupaten Banjar terdiri dari Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 5 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Dinas PUPR Kabupaten Banjar.

Pejabat Fungsional Umum Dinas PUPR Kabupaten Banjar berjumlah 31 orang, terdiri dari 9 orang perempuan dan 22 orang laki-laki.

Pejabat Fungsional tertentu Dinas PUPR Kabupaten Banjar berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.

Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas PUPR Kabupaten Banjar didukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu. Tercatat sebanyak 95 orang dengan rincian 2 orang petugas keamanan, 2 orang Teknisi Mesin, 8 Orang Operator alat berat, dan 83 orang lainnya dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Banjar.

Implikasi dari adanya Revisi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021, maka dibuatlah Revisi Renstra Dinas PUPR Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. Pada Revisi Renstra ini terjadi banyak perubahan nama program dan kegiatan di bidang-bidang. Sementara untuk nama program dan kegiatan untuk operasional kantor relatif sama dengan yang sebelumnya. Namur seiring dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, maka perangkat Daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan, hingga sub kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PUPR Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah bahwa outcome program dan output kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, hal ini menyebabkan target Renstra Dinas PUPR Kabupaten Banjar dapat dicapai dengan baik. Meskipun demikian dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat beberapa permasalahan yaitu :

l. Lajunya pertumbuhan lalu lintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada serta kondisi fisik ruas jalan dan jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada

keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke pusat perekonomian masyarakat;

2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak langsung pada masyarakat, yakni petani pada khususnya.
3. Kurang efektifnya kinerja jasa pemborongan terpilih dan kondisi lapangan tidak stabil sehingga pekerjaan tidak optimal.
4. Belum optimalnya instrumen penataan bangunan dan kurangnya pedoman untuk pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
5. Kurang tertatanya kawasan-kawasan strategis dengan infrastruktur yang memadai serta belum optimalnya penyediaan layanan air minum dan pengelolaan air limbah yang memadai.
6. Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan berupa pengelolaan drainase yang belum optimal.
7. Masih kurangnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang bersifat konstruktif bahkan adanya segelintir masyarakat yang memiliki kecenderungan kurang kooperatif dalam pelaksanaan pekerjaan.
8. Efektifitas pelaksanaan kegiatan tergantung pada kapasitas SDM. Dinas PUPR Kabupaten Banjar masih perlu peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas

Kebijakan/tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1 Penegakan hukum dan sangsi yang jelas kepada penyedia jasa pemborongan apabila kinerjanya buruk. Serta dilakukan sosialisasi dan bimbingan kepada penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Banjar mengenai tata laksana kegiatan Jasa Konstruksi yang ideal.
2 Harus lebih selektif dalam memilih penyedia atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Apabila terpilih penyedia atau kontraktor yang terkesan memperlambat pelaksanaan, harus dilakukan pendampingan secara lebih intensif.
3 Apabila ada paket pekerjaan yang lokasinya berada di daerah yang bentang alamnya sulit ditempuh atau tingkat kompleksitas pekerjaan tinggi, maka agar pelaksanaan pekerjaannya dilakukan lebih awal sehingga masa pelaksanaan kontrak bisa lebih lama.
4 Perlunya pembuatan perencanaan kegiatan yang lebih peka terhadap kebutuhan pengguna/masyarakat sehingga target sasaran yang dibuat di awal tahun tidak banyak mengalami perubahan.

5 Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

6 Perlunya peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak agar target kegiatan bisa lebih optimal, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait pembuatan usulan kegiatan dengan dana yang bersumber dari pusat.

Untuk outcome program dan output kegiatan pada tahun 2021 terjadi banyak perubahan. Perubahan ini sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Banjar tahun 2017 – 2021. Namur seiring dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, maka perangkat Daerah juga dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan, hingga sub kegiatan sehingga terjadi perubahan yang signifikan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas PUPR Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas PUPR Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		8=(6/4)
1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100,00%
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kemudahan memeriksa kinerja keuangan SKPD**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LKPj, dan LPPD	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kemudahan memeriksa kinerja keuangan SKPD**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan/ Semeteran	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Sumber Daya Manusia**	**100**	**Persen**	**-**		**-**		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terkirimnya pegawai pada bimbingan teknis	30	OK	-		-		#VALUE!
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Berkurangnya hambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kekurangan peralatan dan perlengkapan	10	Unit	10	Unit	10	Unit	100%
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK untuk keperluan kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan/penggandaan	900	Eksemplar	900	Eksemplar	900	Eksemplar	100%
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman pada Saat Jam Kerja	230	HK	12	Bulan	12	Bulan	5%
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan dinas dalam dan keluar daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Perkantoran	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Bidang Sumber Daya Air, listrik dan internet	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor dan tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dan tersedianya perijinan kendaraan dinas jabatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya perijinan kendaraan dinas operasional	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terehabilitasinya/Terpeliharanya Alat-Alat Berat serta tersedianya perijinan alat berat	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	95	Unit	95	Unit	95	Unit	100%
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor Pemerintahan yang Layak dan Sesuai Fungsinya	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	- Persentase Luasan Kawasan Banjir yang Terlindungi	1,5	Persen	-				
						- Rasio Jaringan Irigasi	18,51	m/ Ha	-				
						- Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	**83,33**	**Persen**	**83,00**	%	**83,00**	%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	- Persentase Luasan Kawasan Banjir yang Terlindungi	1,5	Persen	-		-		
						- Rasio Jaringan Irigasi	18,51	m/ Ha	-				
						- Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi			**83,00**	%	**83,00**	%	100%
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	- Panjang Sungai/ Kali yang Dibersihkan/Dikeruk	300	Meter	5.500	Meter	5.500	Meter	183333%
						- Terlaksananya Perbaikan Bangunan Irigasi/Rawa	5.500	Meter	-				
1	03	02	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi**	**83,33**	**Persen**	**83,00**	%	**83,00**	%	100%
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Bangunan Irigasi/Rawa	5	Buah	2	Buah	2	Buah	40%
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Terlaksananya Pemeliharaan DI dan DIR	130.268	Meter	130.268	Meter	130.268	Meter	100%
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman**	**81,77**	**Persen**	**79,52**	%	85,93	%	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman**	**81,77**	**Persen**	**79,52**	%	85,93	%	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Sambungan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	700	SR	1.300	SR	1.300	SR	186%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Panjang Pipa Distribusi	15.000	Meter	500	SR	500	SR	3%
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-		200	SR	202	SR	101,00%
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Terpelihara	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100%
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Desa yang Difasilitasi	10	Desa	10	Desa	10	Desa	100%
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-		250	SR	467	SR	186,80%
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai**	**61,57**	**Persen**	**61,57**	%	**61,57**	%	100%
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah**	**61,57**	**Persen**	**61,57**	%	**61,57**	%	100%
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah	1672	KK	410 1 122	Unit Tangki Septik Individual STS Bilik WC	410 1 122	Unit Tangki Septik Individual STS Bilik WC	100%
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring Kegiatan	7	Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
						Terfasilitasinya Desa	15 Desa	15 Desa	15	Desa	15	Desa	100%
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Air Limbah	4	Unit	1	Unit	1	Unit	25%
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase (Penduduk)**	**39,01**	**Persen**	**46,97**	%	**46,97**	%	120%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase (Pengurangan genangan)	**70**	**Persen**	**60,66**	%	**60,66**	%	87%
1	03	06	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase**	**39,01**	**Persen**	**46,97**	%	**46,97**	%	120%
						Persentase Pengurangan genangan	**70**	**Persen**	**60,66**	%	**60,66**	%	87%
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan yang Terbangun	1.400	Meter	2.500	Meter	2.500	Meter	179%
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara	54.000	Meter	25.000	Meter	25.000	Meter	46%
1	**03**	**07**			**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis**	**80,52**	**Persen**	**-**				
						Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis**	**80,52**	**Persen**	**-**				
						Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jalan Lingkungan yang Nyaman di Wilayah Permukiman	1,3	Km	-				
						Panjang Jalan yang Terbangun dalam Kondisi Baik	2	Km	2	Km	2	Km	100%
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	56,65	Ha	21,04	Ha	21,04	Ha	37%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1	Laporan	-				
						Panjang Jalan yang Terpelihara Dalam Kondisi Baik	1,1	Km	5,8	Km	5,8	Km	527%
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	7,73	Ha	60,37	Ha	60,37	Ha	781%
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang**	**10,2**	**Persen**	**10,2**	%	**10,2**	%	100%
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang**	**10,2**	**Persen**	**10,2**	%	**10,2**	%	100%
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terfasilitasinya Ijin dan Penertiban Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan	100	Titik	100	Titik	100	Titik	100%
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	25%
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan**	**100**	**Persen**	**100**	%	**100**	%	100%
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	67%
						Jumlah Laporan	1	Laporan	-		-		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Tersedianya Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Gedung Terpelihara	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100%
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap**	**74,05**	**Persen**	**71,74**	%	**71,74**	%	97%
1	03	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap**	**74,05**	**Persen**	**71,74**	%	**71,74**	%	97%
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan yang Disusun	27	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	52%
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan Baru yang Menghubungkan Antar Pusat Kegiatan	600	Meter	600	Meter	1.500	Meter	250%
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar		-	-	4	Km	4	Km	100%
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0	Km	10,46	Km	10,46	Km	100%
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	24	Km	-				
						Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jalan Poros Desa	25	Km	25	Km	31,8	Km	127%
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan Baru	0	Unit	1	Unit	1	Unit	#DIV/0!
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan	2	Unit	1	Unit	1	Unit	50%
						Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan Desa	37	Meter	-		-		
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan	1	Kegiatan	3	Unit	3	Unit	300%
						Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa	50	Meter	8	Unit	8	Unit	16%
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Tertanganinya Jalan dan Jembatan yang Rusak/Rusak Berat	9	Persen	100	%	100,00%	%	11%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**87**	**Persen**	**84**	%	85,9	%	99%
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**87**	**Persen**	**84**	%	85,9	%	99%
						Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	90	Persen	-				
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	87	Persen	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	90	Persen	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100%
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	90	Persen	-				
						Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	-		**84**	%	85,9	%	102%
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Terinventarisasinya Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok	90	Persen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100	Persen	-				
						Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	-		**100**	%	**100**	%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pemberdayaan Penanggungjawab Teknis Badan Usaha	75	Persen	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Terlaksananya Proses Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	100	Persen	-	-		-	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**87**	**Persen**	**60**	%	63	%	72%
						Penilaian Kinerja Sektor Jasa Konstruksi	60	Persen	-				
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis	87	Persen	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersusunnya Dokumen Data Profil Pekerjaan Konstruksi dan Dokumen Tertib Penyelenggaraan	60	Persen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**92,15**	**Persen**	**92,15**	%	**92,15**	%	100%
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	80	Persen					
						Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR Terhadap Dinamika Pembangunan	80	Persen					
						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			**92,15**	%	**92,15**	%	100%
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya Wawasan Masyarakat tentang Rencana Rinci Tata Ruang	1	Tahun	-				
						Meningkatnya Wawasan Masyarakat tentang Rencana Umum Tata Ruang	1	Kegiatan	1	Tahun	1	Tahun	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
											Realisasi Capaian Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**92,15**	**Persen**	**92,15**	%	**92,15**	%	100%
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Database Tata Ruang	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR yang kewenangannya berkesesuaian dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar pada tahun 2020 belum sepenuhnya bisa dicapai. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala bentang alam dan luas wilayah Kabupaten Banjar sehingga masih ada daerah yang terisolir.

Dalam, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Indikator SPM yang kewenangannya berkesesuaian dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar pada tahun 2020 yang belum tercapai yaitu:

1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah 84,39% (target SPM 100%)
2 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai adalah 49,30% (target SPM 100%)

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan						Catatan Analisis
				Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020*	Tahun 2021*	Tahun 2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang		69,07	71,8	72	73,55	74,05	72,22	69,60	71,97	73,90	74,05	74,28	N/A	101	103	103	101	100	N/A	
2	Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten/ kota		98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	N/A	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	N/A	100	100	100	100	100	N/A	Terkendala adanya daerah yang terisolir
	Indeks Konektivitas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
3	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem		80	81,90	82,00	83,00	83,33	N/A	81,89	82,62	82,06	82,06	83,33	N/A	102	100	100	99	100	N/A	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan						Catatan Analisis
				Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020*	Tahun 2021*	Tahun 2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya																				
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37,87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37,87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan						Catatan Analisis
				Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020*	Tahun 2021*	Tahun 2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	pantai di WS Kewenangan Kabupaten																					
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64,47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64,47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
4	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun		16,03 (penduduk)	16,98 (penduduk)	37,72 (penduduk)	38,07 (penduduk)	39,01 (penduduk)	45,98 (penduduk)	16,44 (penduduk)	20,56 (penduduk)	37,72 (penduduk)	37,72 (penduduk)	39,01 (penduduk)	45,98 (penduduk)	103	121	100	100	100	100	
				32 (pengurangan genangan)	55 (pengurangan genangan)	60 (pengurangan genangan)	65 (pengurangan genangan)	70 (pengurangan genangan)	60,66 (pengurangan genangan)	54,72 (pengurangan genangan)	55,02 (pengurangan genangan)	60 (pengurangan genangan)	60 (pengurangan genangan)	70 (pengurangan genangan)	60,66 (pengurangan genangan)	171	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		65,94	70,42	74,20	78,13	81,77	80,57	67,19	73,20	74,33	75,84	81,77	80,57	102	106	102	97	100	100	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan						Catatan Analisis
				Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020*	Tahun 2021*	Tahun 2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
6	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai		43,82	45	45,57	53,57	53,57	76,74	44,185	45,097	45,99	46,66	53,57	76,74	101	102	102	87	100	100	
	Indeks Infrastruktur			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61,77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61,77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
7	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai			74,93	78,89	79,47	80,00	80,52	83,41	74,93	78,89	79,63	80	80,52	83,41	100	101	101	100	100	100	
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukkannya	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta		92,11	92,12	92,13	92,14	92,15	92,16	92,11	92,12	92,13	92,14	92,15	92,15	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan						Catatan Analisis
				Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020*	Tahun 2021*	Tahun 2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		digital																				
9	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi			68	69	80	85	87	87	68,00	80,00	81,38	81,38	87	87	100	118	102	96	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Rankhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar bertindak sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mengaplikasikan :

1. Misi ke-2 (kedua) yakni “Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan”.
2. Misi ke-3 (ketiga) yakni “Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun

2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6 Program Pengembangan Permukiman
7 Program Penataan Bangunan Gedung
8 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9 Program Penyelenggaraan Jalan
10 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 11

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Secara umum program prioritas kepala daerah terpilih tersebut berkesesuaian dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten Banjar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar adalah instansi yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberikan kepuasan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Banjar khususnya dan masyarakat pada umumnya, melebihi standar layanan publik secara umum pada “Pembangunan sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat”, pelayanan prima dimaksud harus direncanakan, diselenggarakan dan dikelola dengan sebaik baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Agar komitmen tersebut dapat di wujudkan maka harus ada upaya untuk mewujudkan manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar sesuai dengan pokok dan fungsinya, agar tercipta kepercayaan masyarakat umumnya dan perangkat daerah Kabupaten Banjar khususnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar yang proporsional, produktif, efisien, transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip-prinsip “good governance”.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1 Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
2 Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3 Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4 Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
5 Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi; dan
6 Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Identifikasi berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang (2021-2026) perlu dilakukan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Lingkungan Internal

a. Identifikasi Kekuatan (Strengths)

Pelaksanaan proyek berdasarkan hasil analisa, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Faktor faktor kekuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Adanya dukungan dan komitmen pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar sesuai tupoksinya berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dinas tersebut disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Banjar dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

2). Suasana kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar cukup konduktif (kebersamaan diusahakan terjadinya suasana demokratis dengan melonggarkan ikatan struktural) yang kadang-kadang menghambat gerak organisasi jika diterapkan secara kaku. Ikatan tersebut dapat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work). Suasana ini dipupuk terus terutama dalam kegiatan

rapat-rapat pimpinan maupun diskusi-diskusi dalam tim-tim kerja penyusunan berbagai substansi yang merupakan kewajiban Dinas.

3). Tersedianya staf pendukung pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan SOTK yang ada, dirasa mampu untuk menggerakkan pembangunan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Selain itu staf pendukung senantiasa memanfaatkan akses terhadap pelaksanaan dan lembaga-lembaga terkait yang melakukan kegiatan/proyek fisik di Kabupaten Banjar sehingga memudahkan dalam penerapan paradigma dalam instansi Lainnya yang berada di daerah ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, sesuai dengan fungsinya senantiasa diminta bantuan teknis maupun personil oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya mengenai segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di instansi yang berada di Kabupaten Banjar.

b. Identifikasi Kelemahan (Weakness)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut sebagai berikut :

1). Sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis dan managerial masih terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam kemampuan unit-unit Kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2). Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja belum optimal seperti peralatan komputer dan alat transportasi untuk meningkatkan kinerja petugas dilapangan masih perlu pertambahan jumlahnya.

3). Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari APBD. Hal ini sebagai dampak dari krisis ekonomi yang bersumber dari krisis multi dimensional yang melanda negara kita yakni menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah.

2. Identifikasi Lingkungan Ekternal

a. Identifikasi Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya sebagai berikut :

1). Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta stakeholders yang terkait dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar,

merupakan peluang yang sangat penting bagi pengembangan Dinas ini dimasa depan.

2). Kondisi keamanan didaerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan Daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi perkembangan pelaksana Kegiatan pembangunan.

3). Terbukanya bagi setiap pegawai untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya merupakan peluang yang penting terutama akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan Tugasnya.

b. Identifikasi Ancaman (Threats)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula ancaman terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar dinas yang akan Berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah:

1). Kondisi alam Kabupaten Banjar yang kurang mendukung seperti bentang alam dan curah hujan yang bervariasi, sehingga sulit dijangkau di daerah yang terpencil.

2). Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur bidang bina marga dan Sumber Daya Air (SDA). Kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak langsung pada masyarakat, petani pada khususnya. Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan. Masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, lajunya pertumbuhan lalu lintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada serta kondisi fisik ruas jalan dan jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke pusat perekonomian masyarakat. Dukungan konektivitas nasional dalam penguatan daya saing masih menghadapai beberapa kendala. Kendala yang paling mendasar adalah kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah.

3). Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an. Selain itu mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan, yakni masih banyaknya tenaga kerja yang belum disertifikasi.

Selain hal tersebut di atas maka diperlukan identifikasi permasalahan yang ada atau akan dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar antara lain adalah penyusunan database serta sistem informasi belum tersedia untuk kegiatan perumahan, bangunan gedung, pengembangan air minum, air limbah, drainase, dan jalan lingkungan. Permasalahan lainnya yaitu kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sanitasi lingkungan masih kurang dan belum optimalnya instrumen untuk penataan ruang dan bangunan.

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dalam Bidang Penataan Ruang dan Bangunan dalam fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya tersebut di bawah ini:

1. Permasalahan Penataan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang:
   a. Belum optimalnya instrumen penataan bangunan dan kurangnya pedoman untuk pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;
   b. Masih banyaknya pelanggaran peraturan tata ruang dan tata bangunan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau kesadaraan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dengan prosedur yang tepat atau mengkonsultasikannya ke dinas teknis sehingga masih diperlukan sosialisasi peraturan peraturan ke aparat kecamatan dan desa/kelurahan;
   c. Kawasan tradisional bersejarah, kawasan kumuh dan kawasan-kawasan strategis kurang tertata karena kurangnya koordinasi antar kegiatan yang terkait dan alokasi dana yang besar untuk penangan kawasan tersebut;
   d. Bangunan tradisional bersejarah kurang terawat;
   e. Jumlah SDM tata ruang yang berkualitas belum memadai dengan luasan wilayah Kabupaten Banjar;
   f. Rasio jumlah luas daerah yang mesti dikendalikan tidak sebanding dengan jumlah aparat pengendalian dan penataan ruang;

2. Permasalahan Penataan Bangunan
   a. Kondisi bangunan gedung dan rumah negara yang tidak representatif karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, beban fungsi yang berlebih atau atas sebab lain;
   b. Sulitnya pengawasan bangunan pada saat proses pembangunan;
   c. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam pelestarian bangunan tradisional bersejarah;
   d. Belum tegasnya kepastian hukum terkait pelaksanaan pembangunan gedung;
   e. Kesadaran serta pengetahuan aparat masih rendah khususnya di kecamatan terkait teknis IMB;

f. Belum optimal fungsi lembaga hukum yang bertugas sebagai Penegak hukum Perda IMB;

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dalam Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah:

1. Penyediaan air minum untuk memenuhi cakupan layanannya rendah, karena:
   a. Belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas air langsung minum;
   b. Sulitnya ketersediaan air baku di lokasi-lokasi yang jauh terjangkau jaringan perpipaan PDAM khususnya wilayah perdesaan disebabkan faktor menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum;
   c. Belum semua kecamatan terbangun Instalasi Air Bersih Kota Kecamatan (IKK) disebabkan faktor pembiayaan yang terbatas dan penyiapan kelembagaan dan SDM yang terampil;
   d. Jangkauan jaringan perpipaan PDAM pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik di perkotaan dan perdesaaan masih rendah karena faktor pembiayaan dan kemampuan keuangan masyarakat yang rendah;
   e. Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan Perusahaan Daerah Penyelenggara Air Minum;
   f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana penyedia air bersih yang telah terbangun;
   g. Sulitnya ketersediaan air baku akibat menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum serta tidak semua kecamatan di Kabupaten Banjar memiliki air baku;
   h. Sebagian Badan Pengelola Swadaya (BPS) prasarana dan sarana air bersih yang terbangun baik yang berbasis masyarakat kurang aktif karena faktor kurang maksimalnya pemberdayaan masyarakat;
   i. Belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas air langsung minum;
   j. Faktor pendanaan yang masih belum mencukupi sehingga dikhawatirkan pada akhir tahun 2021, target yang diinginkan tidak bisa selesai sepenuhnya.
2. Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan khususnya pengelolaan air limbah permukiman yang masih rendah karena:
   a. Masih rendahnya kadar pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak pembuangan air limbah kegiatan rumah tangga karena faktor kurangnya sosialisasi PHBS dan standar pengolahan air limbah;
   b. Memerlukan investasi yang besar dalam penyediaan pengeloaan air limbah skala kawasan karena faktor kondisi demografi, geografis dan geologis yang kurang mendukung seperti yaitu rumah-rumah penduduk yang terpencar tidak beraturan, permukiman sepanjang bantaran sungai, tanah berawa;
   c. Terbatasnya pendanaan daerah dalam memenuhi target layanan air limbah;

d. Sulitnya lahan tersedia bagi pembangunan sarana MCK komunal bersifat hibah yang berdekatan dengan perumahan penduduk dan masih terpencar terutama di daerah perdesaan karena faktor nilai tanah yang sudah naik pada lokasi yang berdekatan dengan perumahan penduduk;

e. Akses cakupan layanan air limbah masih minim;

f. Tidak standarnya septic tank di masyarakat;

g. Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan tinja;

h. Kurangnya penegakan hukum terhadap Perda tentang pengolahan air limbah;

i. Fungsi regulator dan operator pengolahan air limbah masih menjadi satu dan belum optimal.

3. Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan berupa pengelolaan drainase yang belum optimal adalah:

a. Dimensi saluran yang sudah tidak sesuai lagi dengan besaran debit air hujan karena faktor berkurang daya resap tanah pada cathment area akibat penutupan lahan daerah resapan;

b. Pendangkalan dan penyempitan saluran drainase yang ada karena faktor sedimen yang terbawa surface run off, pembangunan permukiman serta normalisasi saluran yang kurang;

c. Belum terintegrasinya perencanaan drainase antara sistem drainase primer, sekunder dan tersier.

d. Pengelolaan sistem drainase masih bersifat parsial karena faktor belum siapnya kelembagaan dan SDM serta perencanaan yang dibuat;

e. Minimnya alokasi dana untuk operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan drainase;

f. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan drainase;

g. Belum adanya pemetaan drainase untuk wilayah perkotaan dengan baik karena penanganan drainase hanya bersifat parsial.

Isu-isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Lajunya pertumbuhan lalu lintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada serta Kondisi Fisik Ruas Jalan dan Jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke Pusat Perekonomian masyarakat.
2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak langsung pada masyarakat, petani pada khususnya.
3. Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an.

4. Pencapaian target nasional bidang cipta karya sampai dengan tahun 2024 yaitu 100% pemenuhan akses air minum yang aman dan 100% akses sanitasi yang layak.
5. Minimnya Instrumen dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dibuat berdasarkan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. Revisi Renstra tersebut disusun pada akhir tahun 2018 sehingga sebagian besar hasil analisis kebutuhan masih berkesesuaian dengan rancangan awal RKPD.

Untuk program dan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum disampaikan karena belum ada koordinasi akhir dengan pusat.

Review terhadap terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 bisa dilihat lebih detil pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Prioritas daerah pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas Kabupaten	**Indeks Konektivitas**								
	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	**Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**72,94%**	**40.126.860.618**
	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**73,57%**	**40.126.860.618**
	Meningkatnya Jalan kabupaten yang dibangun, direkonstruksi dan dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala	Persentase Panjang Jalan Baru yang Dibangun		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9 Dokumen	1.300.000.000
		Persentase Panjang Jalan yang Direkonstruksi								

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala								
		Persentase Jembatan yang Dibangun								
		Persentase Jembatan yang Direhabilitasi								
		Persentase Jembatan yang Dipelihara								
		Persentase Jembatan yang Direkonstruksi								
		Persentase Jalan Poros Desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara								
		Persentase Panjang Jalan Baru yang Dibangun		Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1 Kegiatan	1.700.000.000
		Persentase Panjang Jalan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi		Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan		Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	2 Kegiatan	1.000.000.000
		Persentase Jembatan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi								

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Jalan Poros Desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara								
		Persentase Panjang Jalan Baru yang Dibangun		Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan		Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	800 Meter	3.100.000.000
		Persentase Panjang Jalan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	5 KM	7.000.000.000
		Persentase Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala		Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan		Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	6 KM	7.000.000.000
		Persentase panjang jalan yang dipelihara secara rutin dan berkala		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	17 KM	4.600.000.000
	Meningkatnya jembatan dalam kondisi baik	**Persentase jembatan dalam kondisi baik**								
	Terlaksananya pembangunan/rekonstruksi/ rehabilitasi jembatan	Persentase Jembatan yang Dibangun		Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan		Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	1 Unit	6.000.000.000
		Persentase Jembatan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi		Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan		Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan	1 Unit	2.100.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Jembatan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi		Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan		Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	8 Unit	3.426.860.618
		Persentase Jembatan yang Dipelihara		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1 Kegiatan	1.200.000.000
		Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Kondisi Rusak Berat dalam Kondisi Darurat		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	100%	1.700.000.000
		Indeks Infrastruktur								
	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	**Persentase Panjang Jalan Desa dalam Kondisi Mantap**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**72,94%**	**10.931.000.000**
	Meningkatnya jalan poros desa dalam kondisi mantap	**Persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**73,57%**	**10.931.000.000**
	Meningkatnya Jalan Poros desa yang Direhabilitasi	Persentase Jalan poros desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara		Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan		Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	8 KM	10.931.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**37,87%**	**2.724.596.000**
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten							**62,47%**	
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik							**57,89%**	
		Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi							**69,18%**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	**Persentase panjang sungai/ saluran yang dinormalisasi**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1,03%**	**1.133.851.000**
	Meningkatnya pelaksanaan normalisasi/restorasi sungai	Persentase Sungai/Saluran Yang Dibersihkan/Dikeruk		Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai		Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.728 Meter	1.133.851.000
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**37,50%**	**1.590.745.000**
	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Bangunan Irigasi dan Rawa Dibangun		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	2 Buah	532.585.000
		Persentase DI/ DIR yang Dipelihara		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	130.268 Meter	1.058.160.000
	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	**Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**47,19%**	**2.308.917.000**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten	**Persentase Pengurangan Genangan**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**54.657 Jiwa 8.725 m2**	**2.308.917.000**
	Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang Saluran Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan yang Terbangun		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.000 Meter	1.007.342.000
		Persentase Saluran Drainase yang Terpelihara		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	25.000 Meter	1.301.575.000
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**83,42%**	**8.014.620.306**
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	**Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**11.500 Jiwa 83,42%**	**8.014.620.306**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terbangun		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500 SR	1.000.000.000
	Meningkatnya SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	500 SR 2.000 Meter	1.914.620.306
		Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.300 SR	3.500.000.000
		Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Diperbaiki		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.000 Meter	2.000.000.000
	Meningkatnya Sambungan Rumah SPAM	Terfasilitasinya kerjasama SPAM di tingkat Desa		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	9 Desa	400.000.000
		Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Dipelihara		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Tahun	200.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**76,74%**	**4.375.663.864**
		Persentase Akses Sanitasi Aman								
		Persentase Akses Sanitasi Layak								
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	**Persentase Akses Sanitasi Layak**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**46.747 Jiwa 470.366 Jiwa 980 Jiwa 76,74%**	**4.375.663.864**
		Persentase Akses Sanitasi Aman								
	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	196 Unit	3.092.135.114
		Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Dokumen 4 Desa	591.198.900

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Sarana dan Prasarana Air Limbah yang terpelihara dan diperbaiki		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Unit	207.229.850
	Terlaksananya Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase Sarana dan Prasarana pengelolaan Lumpur Tinja		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	4 Unit	485.100.000
	Meningkatnya Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	**Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang memadai**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**100%**	**7.892.824.855**
	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	**Persentase Infrastruktur kawasan strategis dalam kondisi baik**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**6,4 KM**	**7.892.824.855**
	Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	Persentase Jalan Lingkungan di Kawasan Strategis yang Terbangun dalam Kondisi Baik		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		2.653.064.855

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Jalan lingkungan yang terpelihara dalam kondisi baik		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		5.239.760.000
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan penataan	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**100%**	**7.258.140.000**
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	**Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Unit 100 %**	**7.258.140.000**
	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Persentase Data Bangunan Gedung yang Termutakhirkan		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	266.910.000
		Persentase Gedung Terbangun		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Unit	2.160.400.000
		Persentase Gedung yang terpelihara		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3 Unit	4.830.830.000
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi**								

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas pelaku jasa konstruksi	**Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**20%**	**437.971.300**
	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang terampil	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**100 Orang**	**144.241.500**
	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	30 Orang	73.641.900
	Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	150 Orang	70.599.600
	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	**Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**90%**	**105.073.400**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan serta Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Persentase Dokumen Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		70.158.200
	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan serta Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Persentase Dokumen Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	2 Dokumen	34.915.200
	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**65%**	**188.656.400**
	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase peserta bimbingan teknis		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Orang	103.055.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku usaha Penyelenggaraan konstruksi, Dokumen Data profil pekerjaan konstruksi dan dokumen tertib penyelenggaraan		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	60 Orang	85.601.400
	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan terhadap Rencana Tata Ruang**								
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan terhadap Rencana Tata Ruang**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**10,20%**	**248.681.233**
	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	**Persentase Bangunan Ber-IMB**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**100 Unit**	**248.681.233**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Validasi dokumen teknis dan Penyusunan Regulasi Bangunan Gedung	Persentase dokumen teknis yang divalidasi		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100 Titik	218.394.340
		Persentase Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.286.893
	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**92,16%**	**706.672.820**
	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	**Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**3 Dokumen 80 %**	**562.493.320**
	Terlaksananya penyusunan dan Penetapan RRTR Kabupaten serta Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Produk Hukum Daerah yang tersusun		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	313.323.320

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Dokumen Kebijakan Tata Ruang		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	204.850.000
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Persentase sosilalisasi tentang Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	1 Tahun	44.320.000
	Meningkatnya Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**16 Kegiatan 92,16 %**	**144.179.500**
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi serta informasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 Bulan	23.385.000
		Persentase Pengelolaan Informasi Tata Ruang		Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang		Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	12 Bulan	120.794.500
	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat**								

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	**Persentasi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**87,98%**	**3.485.939.004**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**28.708.100**
	Perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14.479.200
	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tepat Waktu dan Tepat Mutu		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14.228.900

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	**Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**21.379.100**
	Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tepat waktu dan tepat mutu		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.015.700
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	3.530.900
	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase tersusunnya laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	3.832.500

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**50.000.000**
	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan, diklat		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	50.000.000
	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	**Persentase terpenuhinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.645.338.269**
	Tersedianya jaringan listrik	Persentase terpelihara jaringan listrik kantor dengan baik		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	20.004.000
	Tersedianya peralatan rumah tangga	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan yang Mendukung Pelaksanaan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	20.000.000
	Tersedianya bahan logistik kantor	Persentase bahan logistik kantor yang terpenuhi		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	185.179.800

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	74.027.469
	Tersedianya bahan bacaan berupa koran	Persentase tersedianya bahan bacaan berupa koran		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	50.000.000
	Terselenggaranya kegiatan kunjungan tamu	Persentase Kunjungan tamu yang terfasilitasi		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	4.960.000
	Terpenuhinya koordinasi, konsultasi dan singkronisasi perangkat daerah	Persentase terlaksananya koordinasi, konsultansi dan singkronisasi		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.291.167.000
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.177.741.935**
	Tersedianya jasa surat menyurat	Persentase Lancarnya Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	11.150.700
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	296.963.235

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Persentase Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	869.628.000
	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**562.771.600**
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Persentase Kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		41.290.000
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		312.850.000
	Terehabilitasinya/Terpeliharanya Alat-Alat Berat serta tersedianya perijinan alat berat	Persentase alat-alat berat yang digunakan berfungsi dengan baik		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 Tahun	79.271.600
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95 Unit	124.360.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan				
	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tersedianya Gedung Kantor Pemerintahan yang Layak dan Sesuai Fungsinya	Persentase Gedung Kantor Pemerintahan yang berfungsi dengan baik		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan untuk tahun 2022 diperoleh dari hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Kemudian usulan-usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar terlampir.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah;
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompakan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, accountable, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase melalui penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. melakukan evaluasi perencanan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah III 39
4. mendukung penyelenggaraan ystem Infromasi Pemerintah Daerah (SIPD)

5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 mempunyai isu strategis yaitu :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tiga kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukungoleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam tiga Kegiatan Prioritas yaitu Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan, Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur serta Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.

2. Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

3. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman.

Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan;
g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

4. Pembinaan Jasa Konstruksi

Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)

Jumlah tenaga ahli relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Selanjutnya dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya Continuing Professional Development (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan

permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanan *safety factor*.

Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, rendahnya jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang tersertifikasi, serta pengembangan kerja sama antar lembaga yang belum optimal.

Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal

Kapasitas dan kemampuan badan usaha yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain oleh menurunnya jumlah BUJK konstruksi besar, belum terciptanya kondisi persaingan BUJK yang sehat, BUJK pelaksanan proyek infrastruktur di luar negeri mengalami penurunan, serta rendahnya rasio BUJK spesialis terhadap BUJK umum.

Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan antara lain ketidakseimbangan antara supply-demand beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi green construction; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi supply-demand dan distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini hubungan antara produsen dan pemasok menjadi highlight dari proses ini.

Ketimpangan PDRB Sektor Jasa Konstruksi Antar Daerah

Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut, terbatasnya kondisi demografis

yang terkait dengan produktifvitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

Stok Konstruksi yang Cenderung Stagnan

Stok infrastruktur adalah angka yang menunjukkan nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi. Peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045.

5. Potensi Ruang

Potensi tata ruang di Indonesia diharapkan mengakomodasi kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana. Potensi tata ruang yang lain tentunya diharapkan mampu melindungi jumlah penduduk Indonesia yang beraglomerasi di perkotaan yang sarat dengan investasi pembangunan.

Potensi tata ruang di Indonesia diharapkan mengakomodasi kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana. Potensi tata ruang yang lain tentunya diharapkan mampu melindungi jumlah penduduk Indonesia yang beraglomerasi di perkotaan yang sarat dengan investasi pembangunan. Salah satu Standar Nasional Indonesia (SNI 1726:2012) tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung, merupakan dokumen yang mengatur secara mikro kriteria pembangunan gedung tahan gempa. Sementara itu, Rencana Detail Tata Ruang, berpotensi secara makro menentukan *site and location* yang sekiranya berpotensi terancam oleh ancaman gempa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan tata ruang perlu memperhatikan ketersediaan data pendukung yang berlaku horizontal yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah. Dokumen lain yang diperlukan yang memuat data untuk perencanaan ruang meliputi ketersediaan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kajian Kawasan Rawan Bencana (KRB), dan Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Induk Kawasan Wisata *Geo-Heritage.* Selain itu Tata Ruang yang memiliki *input* data/informasi yang terstandardisasi diharapkan mendorong proses "*Ease of Doing Business" (EoDB)* yang terbuka dan terpercaya, baik dalam hal proses maupun substansinya. Dalam lima tahun ke depan ditetapkan peningkatan kemudahan investasi (*Registering Property)* dalam EoDB dengan target peringkat 40 dengan skor sebesar 78 dapat tercapai apabila rencana tata ruang yang berkualitas dapat dipenuhi pada Tahun 2024. Kemudahan proses penyusunan tata ruang diikuti dengan pemanfaatan *Decision Support System* berbasis *E-Planning System* dan *Geo Portal*, yang sudah melembaga di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

a. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton)
b. Jaringan jalan belum merata, konektivitas antar kawasan terutama daerah-daerah yang terisolir belum terhubung dengan baik, selain itu aksesibilitas pada kawasan-kawasan yang dianggap strategis daerah belum layak dan terhubung. Sehingga hal ini mengakibatkan tingkat mobilitas antar wilayah terbatas
c. Masih rendahnya penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih.
d. Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sehingga berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi
e. Masih rendahnya pembangunan infrastruktur dalam penanganan potensi abrasi pantai dan bencana banjir yang disebabkan daerah pengaliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar
f. Belum terpenuhinya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman ke seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan
g. Belum optimalnya pelayanan sistem air minum dan persampahan regional di Kalimantan Selatan sebagai pendukung akses pelayanan infrastruktur daerah secara regional.
h. Masih kurangnya penataan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan perkotaan dan kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Selatan
i. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi yang ditandai masih rendahnya SDM bersertifikat secara professional.
j. Belum optimalnya keselarasan perencanaan penataan ruang antar stakeholder yang diakibatkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi serta system pendataan dan informasi.
k. Masih diperlukan penyusunan rencana kawasan strategis provinsi yang aplikatif didukung dengan pemanfaatan dan pengendalian untuk mendukung kesesuain dan keselarasan penataan ruang.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat banjar ketika proses

pemilihan kepala daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Banjar, Dinas PUPR berkewajiban menyusunan Renstra guna mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra DPUPR memuat visi dan sebagian misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas PUPR, serta memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Banjar yang merupakan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI DAN AGAMIS”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu 2 (dua) Misi yaitu :

Misi kedua: Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dan Misi Ketiga : Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PUPR Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas PUPR Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas PUPR yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Ditinjau dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas PUPR berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, maka peran Dinas PUPR terdapat pada misi kedua dan ketiga.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas Kabupaten	- Indeks Konektivitas	- Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		- Indeks Infrastruktur	- Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			- Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
			- Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			- Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			- Meningkatnya Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
			- Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan penataan	- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		- Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	- Meningkatnya kualitas pelaku jasa konstruksi	- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
				- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan terhadap Rencana Tata Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan,	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			umum dan kepegawaian	
				- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				- Administrasi Umum Perangkat Daerah
				- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah 11 program, 20 kegiatan dan 66 sub kegiatan.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tersebar di Kabupaten Banjar di 20 kecamatan.

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**138.398.455.743**	**123.920.491.482**					**165.273.313.854**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.014.405.292**	**9.153.321.812**					**10.266.187.208**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**28.708.100**	**28.708.100**					**61.631.900**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar		87,97%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	14.479.200	14.479.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	87,97%	32.965.900
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya LAKIP, LKPj, dan LPPD	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar		87,97%	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	14.228.900	14.228.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	87,97%	28.666.000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7.549.847.757**	**6.510.127.492**					**8.353.377.281**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Dibayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	7.528.468.657	6.488.748.392	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87,97 % 100 Persen	7.520.568.394
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen			100 %	100 %	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87,97 % 100 Persen	807.222.922
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	14.015.700	14.015.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87,97 % 100 Persen	20.178.590

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Laporan Bulanan/Semesteran	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	3.530.900	3.530.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87,97 % 100 Persen	1.000.000
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3.832.500	3.832.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87,97 % 100 Persen	4.407.375
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**50.000.000**	**-**					**57.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Perangkat Daerah IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terkirimnya Pegawai pada Bimbingan Teknis	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	10 OK	10 OK	100 %	100 %	50.000.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	57.500.000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.645.335.900**	**943.422.685**					**961.871.740**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	20.004.000	20.004.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	23.152.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Berkurangnya Hambatan PelaksanaanPekerjaan Akibat KekuranganPeralatan dan Perlengkapan	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 %100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	20.000.000	122.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat DaerahTerpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 %100 Persen	23.000.000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya ATK untuk Keperluan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	185.179.800	185.179.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	126.186.740
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan/Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	900 Eksemplar	900 Eksemplar	100 %	100 %	74.025.100	74.025.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	74.037.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan berupa Koran	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	115.000.000
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman pada saat Jam Kerja	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	230 HK	230 HK	100 %	100 %	4.960.000	4.960.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	25.921.000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	1.291.167.000	487.153.785	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	574.574.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.177.741.935**	**1.165.041.935**					**571.786.967**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	11.150.700	11.150.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	15.112.380
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Bidang Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	296.963.235	296.963.235	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	364.511.657

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.08	04	PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor dan Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	869.628.000	856.928.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	192.162.930
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**562.771.600**	**506.021.600**					**260.019.320**
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	41.290.000	41.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	47.062.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 %100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	312.850.000	312.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat DaerahTerpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 %100 Persen	77.165.000
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terehabilitasinya/ Terpeliharanya Alat-Alat Berat serta tersedianya perijinan	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	79.271.600	79.271.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	71.291.720
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	95 Unit	95 Unit	100 %	100 %	124.360.000	67.610.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	34.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Gedung Kantor Pemerintahan yang Layak dan Sesuai Fungsinya	Persentase Pelayanan Administrasi	Kab. Banjar	100 Persen	87,97 % 100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	87.97 % 100 Persen	30.000.000
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**7.576.271.250**	**8.451.271.250**					**8.074.058.749**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**793.983.850**	**1.668.983.850**					**886.775.062**
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	- Panjang Sungai/Kali yang Dibersihkan/Dikeruk - Panjang Sungai/Saluran Yang Dikeruk	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi			83%	2.728 Km 2728 Meter	7.728 Km 2728 Meter	18.51 m/ Ha	83%	793.983.850	1.668.983.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	83 %	886.775.062
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**6.782.287.400**	**6.782.287.400**					**7.187.283.687**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Terbangunnya Bangunan Irigasi dan Rawa	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi			83%	2 Buah	2 Buah	83%	83%	283.500.000	283.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	83 %	418.312.500
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi			83%	83%	83%	83%	83%	5.941.884.000	5.941.884.000	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan		Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	83 %	5.941.884.000
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Pemeliharaan DI dan DIR	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi			83%	130.268 Meter	130.268 Meter	83%	83%	556.903.400	556.903.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	83 %	827.087.187
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**17.318.653.876**	**16.137.813.191**					**9.880.827.958**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**17.318.653.876**	**16.137.813.191**					**9.880.827.958**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Sambungan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum			79,52%	1300 SR	1300 SR	79,52%	79,52%	16.846.328.876	7.360.982.191	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan Dana Insentif Daerah		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	79,52%	3.155.275.573
1	03	02	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum			79,52%			79,52%	79,52%	-	4.790.252.000			Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	79,52%	2.507.028.890

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum			79,52%			79,52%	79,52%	-	1.098.425.000	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penugasan		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	79,52%	-
1	03	02	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum			79,52%	1 Tahun	1 Tahun	79,52%	79,52%	120.925.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	79,52%	3.784.430.120
1	03	02	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Fasilitasi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan SPAM Perdesaan	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum			79,52%	10 Desa	10 Desa	79,52%	79,52%	351.400.000	351.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	79,52%	434.093.375

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum			79,52%			79,52%	79,52%	-	2.536.754.000	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penugasan		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	79,52%	-
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**7.788.192.630**	**7.598.092.630**					**7.848.529.965**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**7.788.192.630**	**7.598.092.630**					**7.848.529.965**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	- Akses Aman - Akses Layak - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	- Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah (Bilik WC) - Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah (STS) - Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah (Tanki Septik Individual)	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah		61,57 Persen	- 7,47 % - 74,42 % - 61,57 Persen	3 Unit 200 Unit	160 1 Unit 546 Unit	47,05%	74,42%	6.982.943.730	6.882.943.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Akses Aman - Akses Layak - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	- 7,47 % - 74,42 % - 61,57 Persen - 61,57 % - 74,42 %	6.882.943.730

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Akses Aman - Akses Layak - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	- Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring Kegiatan-Terfasilitasinya Desa	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah		61,57 Persen	7,47%74,42%61,57 Persen	1 Dokumen15 Desa	1 Dokumen15 Desa	47,05%	74,42%	596.248.900	596.248.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Akses Aman-Akses Layak-Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah-Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai-Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	-7,47%-74,42%-61,57 Persen-61,57%-74,42 %	846.686.235

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Akses Aman - Akses Layak - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Air limbah yang terpelihara	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah		61,57 Persen	- 7,47 % - 74,42 % - 61,57 Persen	4 Unit	1 Unit	47,05%	74,42%	209.000.000	118.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Akses Aman - Akses Layak - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai - Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	- 7,47 % - 74,42 % - 61,57 Persen - 61,57 % - 74,42 %	118.900.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**3.445.362.000**	**3.445.362.000**					**1.805.783.187**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**3.445.362.000**	**3.445.362.000**					**1.805.783.187**
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	- Persentase Pengurangan Genangan - Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Panjang Saluran Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan yang Terbangun	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase			46,97 % 46,97 %	2500 Meter	1000 Meter	46,88%	46,97%	2.821.265.000	2.821.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Persentase Pengurangan Genangan - Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	46.97 % 46.97 %	874.500.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	- Persentase Pengurangan Genangan- Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase			46,97 %46,97 %	25000 Meter	25000 Meter	46,88%	46,97%	624.097.000	624.097.000	Dana Insentif Daerah		- Persentase Pengurangan Genangan- Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	46.97 %46.97 %	931.282.937
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**10.139.083.864**	**7.526.168.864**					**17.458.965.993**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**10.139.083.864**	**7.526.168.864**					**17.458.965.993**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang - Persentase Tersediannya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	- Meningkatnya jalan lingkungan yang nyaman di wilayah permukiman - Panjang Jalan yang Terbangun dalam Kondisi Baik - Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai		100,00 Persen	100,00 Persen 100 %	1.3 Km 2.3 Km 56.65 Ha	1.3 Km 2.3 Km 56.65 Ha	100 %	100 %	2.675.708.864	1.431.018.864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang - Persentase Tersediannya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	100,00 Persen 100 %	3.172.943.656

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang - Persentase Tersediannya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	- Jumlah Laporan - Panjang Jalan yang Terbangun Dalam Kondisi Baik - Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai		100,00 Persen	100,00 Persen 100 %	1 Laporan 1.1 Km 7.73 Ha	1 Laporan 1.1 Km 7.73 Ha	100 %	100 %	7.463.375.000	6.095.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang - Persentase Tersediannya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	100,00 Persen 100 %	14.286.022.337
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**251.606.413**	**251.606.413**					**348.069.948**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**251.606.413**	**251.606.413**					**348.069.948**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Terfasilitasinya Ijin dan Penertiban Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		10,20 Persen	10,20 Persen	100 Titik	100 Titik	100 %	92,15%	221.319.520	221.319.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	10,20 Persen	306.957.448
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Tersusunnya Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		10,20 Persen	10,20 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	92,15%	30.286.893	30.286.893	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	10,20 Persen	41.112.500
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**5.141.300.000**	**4.958.300.000**					**10.817.175.685**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											**5.141.300.000**	**4.958.300.000**					**10.817.175.685**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan	- Jumlah Dokumen - Jumlah Laporan - Tersedianya Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai		100,00 Persen	100,00 Persen	3 Dokumen 1 Laporan 4 Dokumen	3 Dokumen 1 Laporan 4 Dokumen	100 %	100 %	269.200.000	269.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan	100,00 Persen	340.275.685
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Gedung Terbangun	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai		100,00 Persen	100,00 Persen	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	-	-			Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan	100,00 Persen	2.355.550.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Gedung Terpelihara	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai		100,00 Persen	100,00 Persen	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	4.872.100.000	4.689.100.000			Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan	100,00 Persen	8.121.350.000
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**74.569.060.718**	**65.271.835.722**					**97.038.152.305**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**74.569.060.718**	**65.271.835.722**					**97.038.152.305**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	- Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jalan - Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jembatan - Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis - Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis - Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis - Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis - Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen 11 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen 11 Dokumen 2 Dokumen	57,05%	98,73%	1.378.521.150	1.384.921.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	2.455.721.155

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Terbangunnya Jalan Baru yang Menghubungkan Antar Pusat Kegiatan	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	600 Meter	600 Meter	57,05%	98,73%	3.053.989.400	2.913.239.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	4.804.401.230
1	03	01	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%		4 km	57,05%	98,73%	-	5.267.551.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	5.267.551.004
1	03	01	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	14.46 KM	14.46 KM	57,05%	98,73%	23.042.201.000	17.774.649.996	DAK Fisik - Bidang Jalan-Reguler DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	23.042.200.993

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	- Terlaksananya Pemeliharaan Jalan - Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jalan Poros Desa	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	23.5 Km	23.5 Km	57,05%	98,73%	31.812.635.382	24.857.760.386	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	40.165.157.485
1	03	01	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Terbangunnya Jembatan Baru	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	1 Unit	1 Unit	57,05%	98,73%	6.999.975.200	3.271.575.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	8.065.490.500
1	03	01	2.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	- Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan - Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan Desa	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	2 Unit 37 Meter	2 Unit 37 Meter	57,05%	98,73%	2.013.958.200	1.059.708.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	5.435.656.930
1	03	01	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	- Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan - Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	1 Kegiatan 50 Meter	1 Kegiatan 50 Meter	57,05%	98,73%	4.523.245.486	4.527.295.486	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	5.351.973.008

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	- Tertanganinya Jalan yang Rusak/Rusak Berat- Tertanganinya Jembatan yang Rusak/Rusak Berat	Persentase Konektivitas Wilayah			71,74%	100 Persen	100 Persen	57,05%	98,73%	1.744.534.900	4.215.134.900	-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	71,74%	2.450.000.000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**441.996.300**	**434.196.200**					**816.306.248**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**185.456.500**	**220.348.000**					**307.214.565**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		87 Persen	87 Persen	87 Persen	87 Persen	90%	87%	84.656.900	96.981.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 Persen	133.089.615
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	- Terlaksananya Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, - Terlaksananya Sosialisasi Perundang undangan Jasa Konstruksi dan - Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		87 Persen	87 Persen	90 Persen	90 Persen	90%	87%	100.799.600	123.366.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 Persen	174.124.950

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**34.865.200**	**28.720.000**					**57.288.331**
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	Terinventarisasinya Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		87 Persen	87 Persen	90 Persen	90 Persen	90%	87%	34.865.200	28.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 Persen	57.288.331
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**											**76.668.200**	**52.758.200**					**134.433.275**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	Terlaksananya Pemberdayaan Penanggungjawab Teknis Badan Usaha	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		87 Persen	87 Persen	75 Persen	75 Persen	87%	87%	71.258.200	52.758.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 Persen	99.490.525
1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	Terlaksananya Proses Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		87 Persen	87 Persen	100 Persen	100 Persen	87%	87%	5.410.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 Persen	34.942.750

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**											**145.006.400**	**132.370.000**					**317.370.077**
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		87 Persen	87 Persen	87 Persen	87 Persen	90%	87%	59.475.000	54.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 Persen	155.053.005
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyar	- Terlaksananya Klinik Penyelenggaraan Konstruksi - Tersusunnya Dokumen Data Profil Pekerjaan Konstruksi dan Dokumen Tertib Penyelenggaraan	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		87 Persen	87 Persen	60 Persen 60 Persen	60 Persen 60 Persen	90%	87%	85.531.400	78.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 Persen	162.317.072

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						atan kompetensi																
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**712.523.400**	**692.523.400**					**919.256.608**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**											**565.418.500**	**545.418.500**					**683.673.473**
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		80 Persen	80 Persen 92,15 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70%	92,15%	551.098.500	486.098.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 Persen 92,15 %	647.563.473

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Wawasan Masyarakat tentang Rencana Umum Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		80 Persen	80 Persen 92,15 %	1 Tahun	1 Tahun	70%	92,15%	14.320.000	59.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 Persen 92,15 %	36.110.000
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**147.104.900**	**147.104.900**					**235.583.135**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		80 Persen	80 Persen 92,15 %	12 Bulan	12 Bulan	93%	92,15%	23.385.000	23.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 Persen 92,15 %	50.352.750

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tokok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Database Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		80 Persen	80 Persen 92,15 %	12 Bulan	12 Bulan	93%	92,15%	123.719.900	123.719.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 Persen 92,15 %	185.230.385
															TOTAL	**138.398.455.743**	**123.920.491.482**					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten		**Indeks Konektivitas**			**98,73%**		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap**	**71,74%**	**65.271.835.722**	-	-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	**-**	**-**	**72,14%**	**22.666.938.897**	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	**71,44%**	**65.271.835.722**	**0,70%**	**22.666.938.897**	
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	**79,89%**		**81,35%**		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	14 Dokumen	1.384.921.150	-	-	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Baru yang Dibangun	-	-	100%	1.200.000.000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Baru yang Dibangun	-	-	1 Dokumen		
			Persentase Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	-	100%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan yang Direkonstruksi	-	-	2 Dokumen		
			Persentase Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala	-	-	100%		

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala	-	-	2 Dokumen		
			Persentase Jembatan yang Dibangun	-	-	100%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan yang Dibangun	-	-	1 Dokumen		
			Persentase Jembatan yang Direhabilitasi	-	-	100%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan yang Direhabilitasi	-	-	1 Dokumen		
			Persentase Jembatan yang Dipelihara	-	-	100%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan yang Dipelihara	-	-	2 Dokumen		
			Persentase Jembatan yang Direkonstruksi	-	-	100%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan yang Direkonstruksi	-	-	1 Dokumen		
			Persentase Jalan Poros Desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara	-	-	100%		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Poros Desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara	-	-	3 Dokumen		
		Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Baru yang Dibangun	-	-	100%	-	
			Jumlah Penyediaan Lahan/ Tanah yang Akan Digunakan untuk Penyelenggaraan Jalan	-	-	0		
		Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Persentase Panjang Jalan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi	-	-	100%	500.000.000	
			Jumlah Database Kondisi Jalan Kabupaten	-	-	3 Dokumen		
			Persentase Jembatan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi	-	-	100%		
			Jumlah Database Kondisi Jembatan	-	-	3 Dokumen		

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
			Persentase Jalan Poros Desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara	-	-	100%		
			Jumlah Database Kondisi Jalan Poros Desa	-	-	0 Dokumen		
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Baru yang Menghubungkan Antar Pusat Kegiatan	600 Meter	2.913.239.400	-	-	
		Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Baru yang Dibangun	-	-	100%	4.000.000.000	
			Panjang Jalan Baru yang Dibangun untuk Menghubungkan Antar Pusat Kegiatan	-	-	1000 Meter		
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan Menuju Standar	4 KM	5.267.551.004	-	-	
		Rekonstruksi Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi	-	-	100%	2.000.000.000	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10,46 KM	17.774.649.996	2 Km		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala	-	-	100%	1.000.000.000	
			Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	1 Km		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala	-	-	100%	4.000.000.000	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	-	-	10 Km		
		Pembangunan Jembatan	Persentase Jembatan yang Dibangun	-	-	100%	4.000.000.000	
			Jumlah Jembatan Baru yang Dibangun untuk Menghubungkan Antar Dua Wilayah	1 Unit	3.271.575.200	1 Unit		
		Penggantian Jembatan	Persentase Jembatan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi	-	-	100%	1.000.000.000	
			Jumlah Jembatan yang Direkonstruksi	1 Unit	1.059.708.200	-		
		Rehabilitasi Jembatan	Persentase Jembatan yang Direkonstruksi dan Direhabilitasi	-	-	100%	2.166.938.897	
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi/Dipelihara	11 Unit	4.527.295.486	4 Unit		

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Jembatan yang Dipelihara	-	-	100%	1.100.000.000	
			Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	-	1 Kegiatan		
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Kondisi Rusak Berat dalam Kondisi Darurat	100%	4.215.134.900	8,70%	1.700.000.000	
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten		**Indeks Infrastruktur**			**61,77%**		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap**	**-**	**24.857.760.386**	**72,27%**	**15.111.292.598**	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap**	**71,95%**	**24.857.760.386**	**1,20%**	**15.111.292.598**	
			Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	**25 KM**	**24.857.760.386**	**807,03 Km**	**-**	
		Rehabilitasi Jalan	Persentase Jalan Poros Desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara	-	-	100%	15.111.292.598	
			Panjang Jalan Poros Desa yang Direhabilitasi/ Dipelihara	25 KM	24.857.760.386	15 Km		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase**	**46,97%**	**3.445.362.000**	**45,98%**	**1.959.067.530**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengurangan Genangan**	**60,66%**	**3.445.362.000**	**61,01%**	**1.959.067.530**	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Saluran Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan yang Terbangun	-	-	100%	1.007.342.000	
			Panjang Drainase yang Terbangun	2.500 Meter	2.821.265.000	2900 Meter		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase yang Terpelihara	-	-	100%	951.725.530	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
			Panjang Drainase yang Terpelihara	25.000 Meter	624.097.000	40.000 Meter		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten**	**-**	**-**	**37,87%**	**2.103.129.550**	
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	**-**	**-**	**62,50%**		
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	**-**	**-**	**64,47%**		
			Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	**83,00%**	**8.451.271.250**	**-**	**-**	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Panjang Sungai/ Saluran yang Dinormalisasi**	**-**	**-**	**2,40%**	**1.000.000.000**	
			Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	**83,00%**	**1.668.983.850**	**-**	**-**	
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Sungai/Saluran Yang Dibersihkan/Dikeruk	-	-	100%	1.000.000.000	
			Panjang Sungai/ Saluran yang Dibersihkan/ Dikeruk	5.500 Meter	1.668.983.850	2.728 Meter		
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**-**	**-**	**43,04%**	**1.103.129.550**	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
			Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	**83,00%**	**6.782.287.400**	**-**	**-**	
		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Bangunan Irigasi dan Rawa Dibangun	-	-	100%	451.887.000	
			Bangunan Irigasi dan Rawa Dibangun	2 Buah	283.500.000	3 buah		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa	Jumlah DI/DIR yang direhabilitasi	7 DIR	5.941.884.000	-	-	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase DI/ DIR yang Dipelihara	-	-	100%	651.242.550	
			Panjang DI dan DIR yang Dipelihara	130.268 Meter	556.903.400	61.000 Meter		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman**	**79,52%**	**16.407.813.191**	**80,57**	**6.314.782.925**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten**	**-**	**-**	**1,05**	**6.314.782.925**	
			Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum	**-**	**-**	**484.439 jiwa**		
			Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	**79,52%**	**16.407.813.191**	**-**	**-**	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Terbangun	-	-	-	-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.300 SR	7.630.982.191	-	-	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum	-	-	100%	484.886.681	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	400 Meter		

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum	-	-	100%	4.092.368.652	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	500 SR	4.790.252.000	1019 unit SR		
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Diperbaiki	-	-	100%	1.227.648.195	
			Jumlah Desa yang Sarana Air Minumnya akan dilakukan optimalisasi dan perluasan	-	-	8 desa		
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200 SR	1.098.425.000	-	-	
		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terfasilitasinya kerjasama SPAM di tingkat Desa	-	-	100%	378.345.662	
			Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan SPAM Perdesaan	10 Desa	351.400.000	1 keg		
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	250 SR	2.536.754.000	-	-	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Dipelihara	-	-	100%	131.533.735	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah yang Dipelihara	-	-	1 unit		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah**	**-**	**-**	**76,74%**	**3.365.927.347**	
			Persentase Akses Sanitasi Aman	**-**	**-**	**7,63%**		
			Persentase Akses Sanitasi Layak	**-**	**-**	**76,74%**		
			Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	**61,57%**	**7.598.092.630**	**-**	**-**	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Akses Sanitasi Layak**	**-**	**-**	**76,74%**	**3.365.927.347**	
			Persentase Akses Sanitasi Aman	**-**	**-**	**7,63%**		
			Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah	**61,57%**	**7.598.092.630**	**-**	**-**	
		Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase Jumlah SR Tersambung SPALDT-Permukiman	-	-	0	-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALDT-Permukiman	-	-	0	-	
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	-	100%	2.431.147.497	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah (Tangki Septik Individual)	122 Bilik WC 1 Unit STS 410 Tanki Septik Individual	6.882.943.730	88 Unit		
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	100%	485.000.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring Kegiatan	1 Dokumen	596.248.900	1 Dokumen		
			Terfasilitasinya Desa	15 Desa		12 Desa		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Terpelihara dan Diperbaiki	-	-	100%	207.229.850	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Air limbah yang terpelihara	1 Unit	118.900.000	1 Unit		
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lumpur Tinja	-	-	100%	242.550.000	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
			Jumlah Sarana Lumpur Tinja Terbangun (Septege Tranport Station-STS)	-	-	2 Unit		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	**Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai**	**-**	**-**	**83,41%**	**7.764.813.064**	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	**Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dan Sedang**	**100%**	**8.183.186.364**	**-**	**-**	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik**	**100%**	**8.183.186.364**	**100%**	**7.764.813.064**	
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Lingkungan di Kawasan Strategis yang Terbangun dalam Kondisi Baik	-	-	100%	2.155.835.834	
			Luas Kawasan Strategis yang dibangun infrastrukturnya	-	-	14,23 ha		
			Panjang Jalan yang Terbangun dalam Kondisi Baik	2 Km	2.088.036.364	-	-	
			Luas pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	21,04 Ha		-	-	
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Lingkungan yang Terpelihara dalam Kondisi Baik	-	-	100%	5.608.977.230	
			Luas Kawasan Strategis yang dipelihara infrastrukturnya	-	-	96,94 ha		
			Panjang Jalan yang terpelihara dalam Kondisi Baik	5,8 Km	6.095.150.000	-	-	
			Luas pemanfaatan dan pemeliharaan Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	60,37 Ha		-	-	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan**	**100%**	**4.958.300.000**	**78%**	**5.342.985.000**	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik**	**-**	**-**	**11,43%**	**5.342.985.000**	
			Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	**100%**	**4.958.300.000**	**-**	**-**	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Data Bangunan Gedung yang Termutakhirkan	-	-	100%	220.114.098	
			Jumlah Dokumen	6 Dokumen	269.200.000	-		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Terbangun	-	-	100%	1.358.034.132	
			Jumlah Gedung Terbangun	-	-	-		
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung yang Terpelihara	-	-	100%	3.764.836.770	
			Jumlah Gedung Terpelihara	3 Unit	4.689.100.000	-		
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten		**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi**	**84,00%**		**87,00%**		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi**	**84,00%**	**434.196.200**	**87,00%**	**413.044.100**	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi**	**84,00%**	**220.348.000**	**10,00%**	**184.993.500**	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	100%	105.172.900	
			Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3 Kegiatan	96.981.600	1 Kegiatan		

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, Sosialisasi Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	100%	79.820.600	
			Jumlah Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Kegiatan	123.366.400	3 Kegiatan		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi**	**84,00%**	**28.720.000**	**90%**	**92.940.000**	
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Persentase Dokumen Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	-	-	100%	30.700.000	
			Jumlah Dokumen Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	-	-	2 Dokumen		
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Dokumen Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok	-	-	100%	62.240.000	
			Jumlah Dokumen Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok	-	-	2 Dokumen		
			Jumlah Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok yang terinventarisasi	2 Dokumen	28.720.000	-	-	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang memenuhi Persyaratan Kompetensi melalui penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**100,00%**	**52.758.200**	**-**	**-**	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Penanggung jawab Teknis Badan Usaha	1 Kegiatan	52.758.200	-	-	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi**	**60,00%**	**132.370.000**	**20,00%**	**135.110.600**	
		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Peserta Bimbingan Teknis	-	-	100%	50.517.600	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengawasan Konstruksi	1 Kegiatan	54.260.000	30 Orang		
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Usaha Penyelenggaraan Konstruksi, Dokumen Data Profil Pekerjaan Konstruksi dan Dokumen Tertib Penyelenggaraan	-	-	100%	84.593.000	
			Jumlah Dokumen Data Profil Pekerjaan Konstruksi dan Dokumen Tertib Penyelenggaraan	2 Dokumen	78.110.000	2 Dokumen		
	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan		**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan terhadap Rencana Tata Ruang**	**92,15%**		**96,08%**	**835.947.333**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang**	**-**	**-**	**92,16%**	**442.621.400**	
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	92,15%	692.523.400	-	-	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan**	**-**	**-**	**40,00%**	**330.110.849**	
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	92,15%	545.418.500	-	-	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Produk Hukum Daerah yang tersusun	-	-	100%	220.110.849	
			Tersusunnya Produk Hukum Daerah	-	-	1 Dokumen		
			Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	1 Dokumen	486.098.500	-	-	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Dokumen Kebijakan Tata Ruang	-	-	100%	60.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang	-	-	1 Dokumen		
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Sosilalisasi tentang Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang	-	-	100%	50.000.000	
			Meningkatnya Wawasan Masyarakat tentang Rencana Umum Tata Ruang	1 Tahun	59.320.000	1 Tahun		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR**	**-**	**-**	**100,00%**	**112.510.551**	
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**92,15%**	**147.104.900**	**-**	**-**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	-	-	100%	21.559.871	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	12 Bulan	23.385.000	12 Bulan		
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Pengelolaan Informasi Tata Ruang	-	-	100%	90.950.680	
			Terlaksananya Pengelolaan Informasi Database Tata Ruang	12 Bulan	123.719.900	12 Bulan		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan terhadap Rencana Tata Ruang**	**-**	**-**	**100%**	**393.325.933**	
			Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	**10,20%**	**221.319.520**			

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase Bangunan Ber-IMB**	**-**	**-**	**8,19%**	**393.325.933**	
			Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	**10,20%**	**221.319.520**			
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Dokumen Teknis yang Divalidasi	-	-	100%	334.763.467	
			Jumlah Ijin dan Penertiban Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan	100 Titik	221.319.520	100 Dokumen		
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	-	-	100%	58.562.466	
			Jumlah Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	1 Dokumen	30.286.893	2 Dokumen		
	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83,26%**		**83,50%**	**10.258.085.883**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentasi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**8.296.393.811**	**100,00%**	**10.258.085.883**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu**	**100%**	**28.708.100**	**100%**	**28.708.100**	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	-	-	100%	14.479.200	
			Tersedianya Renstra dan Renja	2 Dokumen	14.479.200	2 Dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tepat Waktu dan Tepat Mutu	-	-	100%	14.228.900	
			Tersedianya LAKIP, LKPj, dan LPPD	3 Dokumen	14.228.900	3 Dokumen		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu**	**100%**	**6.510.127.491**	**100%**	**7.549.847.757**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	-	-	100%	7.528.468.657	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.488.748.391	1 Tahun		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tepat Waktu dan Tepat Mutu	-	-	100%	14.015.700	
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	14.015.700	1 Laporan		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	100%	3.530.900	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 Dokumen	3.530.900	18 Dokumen		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	100%	3.832.500	
			Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	3.832.500	1 Laporan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peresentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu**	**100%**	**-**	**100%**	**50.000.000**	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan dan Diklat	-	-	100%	50.000.000	
			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	-	10 OK		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran**	**100%**	**943.422.685**	**100%**	**889.016.491**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpelihara Jaringan Listrik Kantor dengan Baik	-	-	100%	20.004.000	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 Bulan	20.004.000	1 Tahun		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan yang Mendukung Pelaksanaan Kantor	-	-	100%	20.000.000	
			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan yang Mendukung Pelaksanaan Kantor	10 Unit	122.100.000	3 Unit		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang Terpenuhi	-	-	100%	185.179.800	
			Tersedianya ATK untuk Keperluan Kantor	12 Bulan	185.179.800	1 Tahun		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Menunjang Lancarnya Pekerjaan	-	-	100%	74.027.469	
			Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan/ Penggandaan	900 Eksemplar	74.025.100	900 Eksemplar		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan Berupa Koran	-	-	100%	50.000.000	
			Tersedianya Bahan Bacaan Berupa Koran	12 Bulan	50.000.000	1 Tahun		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	-	-	1 Tahun	4.960.000	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	4.960.000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Koordinasi, Konsultansi dan Singkronisasi	-	-	100%	534.845.222	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah	12 Bulan	487.153.785	1 Tahun		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**308.113.935**	**100%**	**1.177.741.935**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Lancarnya Jasa Surat Menyurat	-	-	100%	11.150.700	
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Perkantoran	12 Bulan	11.150.700	1 Tahun		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	100%	296.963.235	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Bidang Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	296.963.235	1 Tahun		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	100%	869.628.000	
			Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor dan Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	12 Bulan	856.928.000	1 Tahun		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**506.021.600**	**100%**	**562.771.600**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan yang Berfungsi dengan Baik	-	-	100%	41.290.000	
			Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	41.290.000	1 Tahun		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Berfungsi dengan Baik	-	-	100%	312.850.000	

No.	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target Kinerja 2021	Rupiah	Target Kinerja 2022	Rupiah	
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional dan Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	312.850.000	1 Tahun		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Alat-alat Berat yang Digunakan Berfungsi dengan Baik	-	-	100%	79.271.600	
			Terehabilitasinya/ Terpeliharanya Alat-Alat Berat serta Tersedianya Perijinan Alat Berat	12 Bulan	79.271.600	1 Tahun		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Digunakan Berfungsi dengan Baik	-	-	100%	124.360.000	
			Terpeliharanya Peralatan Gedung/ Kantor	12 Bulan	67.610.000	95 Unit		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor Pemerintahan yang Berfungsi dengan Baik	-	-	100%	5.000.000	
			Tersedianya Gedung Kantor Pemerintahan yang Layak dan Sesuai Fungsinya	12 Bulan	5.000.000	1 Tahun		

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar untuk tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RENJA 2022, pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi.

Dokumen RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus dijadikan acuan dalam pelaksanaa program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) badan, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai.

Selanjutnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mungkin dapat mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terlebih dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.

6. Dinas Perumahan dan Permukiman

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman selama 1 (satu) tahun. Rencana kerja tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana kerja tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar selama tahun 2022.

Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pemyelenggaraan tugasnya melaksanakan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup serta Tata Ruang Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing- masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidangkehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar meyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.

Renja Dinas Perumahan dan Permukiman mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.

Adapun visi Bupati Banjar adalah ***" Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis"***. Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar ini mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-2026, misi ke 3 yaitu "Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan".

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2022 - 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan danperdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka pengembanganwilayah.

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
3. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dengan menerapkan prinsip *good governance*.

Renja Dinas Perumahan dan Permukiman dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah kabupaten Banjar dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Penyajian Dokumen Renja
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar No.12);
11. Peraturan Bupati No.58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;
12. Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar tahun 2022 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi capaian tahun berjalan.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2022. sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2021 dan perkiraancapaian tahun 2022. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMANKABUPATEN BANJAR

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANJAR

Berisikan tentang rencana kerja dan kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian,baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten BanjarTahun 2021

Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di dua (2) bidang yaitu Bidang Penyediaan Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman. Bidang Penyediaan Perumahan meliputi 3 seksi yaitu :

1. Penyediaan Perumahan Umum,
2. Penyedia Perumahan Swadaya
3. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk Bidang Kawasan Permukiman meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman
2. Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar

Berdasarkan Peraturan Bupati No.58 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan pada Bidang Perumahan. Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar didalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan Perumahan dan bidangKawasan Permukiman;
b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan Penyediaan Perumahandan bidang Kawasan Permukiman;
c. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perumahan & permukiman
d. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

e. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
f. pengawasan dan pengendalian bidang Penyediaan Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
g. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
h. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Penyediaan Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
i. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang Penyediaan Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
j. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
k. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
l. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
m. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah

2.2.1. Struktur Organisasi

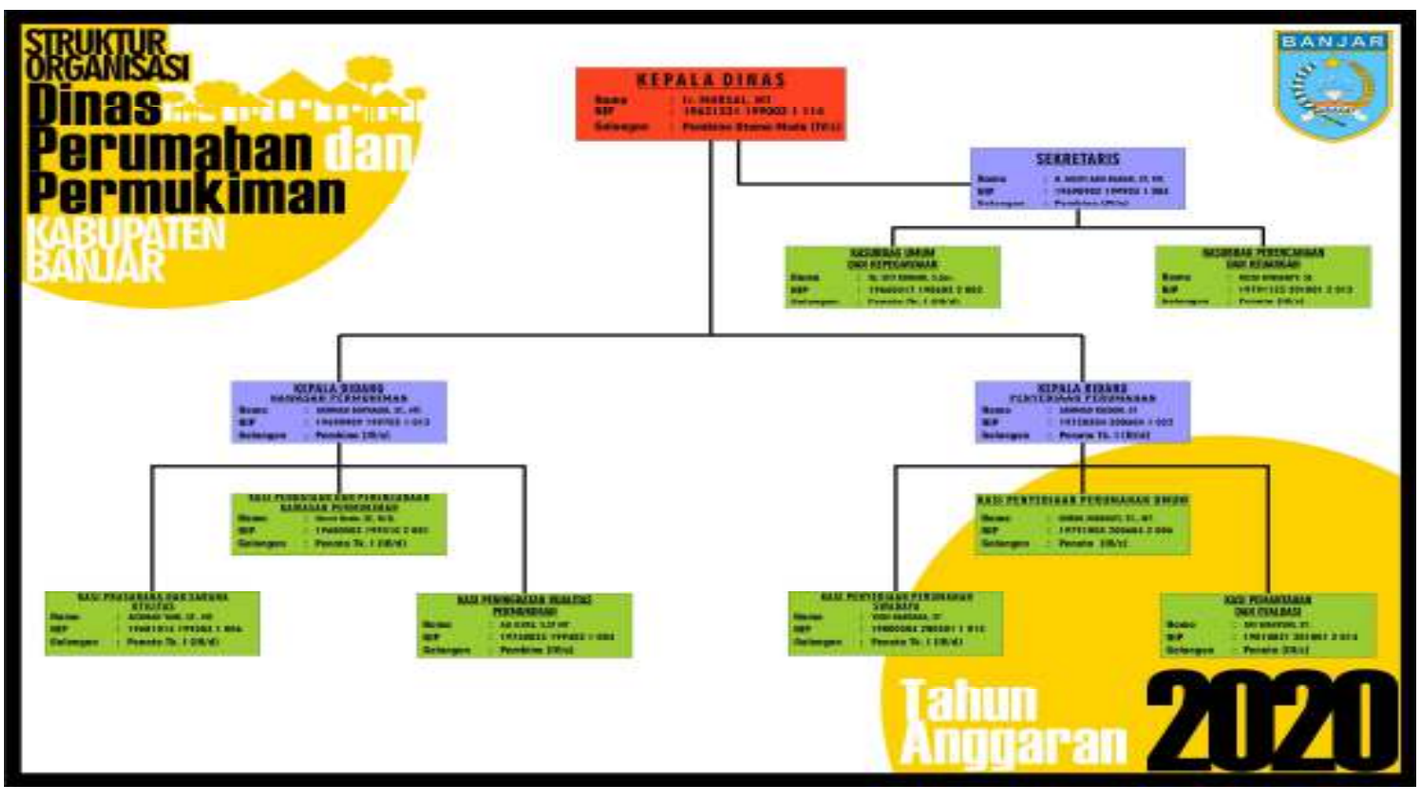

2.2.2. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten banjar diamanatkan bahwa:

a. Kepala Dinas

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang Penyediaan Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
2. Merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan PenyediaanPerumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
3. Merumuskan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
4. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang Penyediaan Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
6. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Penyediaan Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
8. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang Penyediaan Perumahan dan bidang Kawasan Permukiman;
9. Mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
10. Merencanakan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenanaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
11. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
12. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Sekretariat

1. Menyusun program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas;
3. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
4. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasipengelolaan urusan ketatausahaan;
5. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
6. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasiefektivitas

organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

7. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

c. <u>Kepala Bidang Penyediaan Perumahan</u>

1. Menyusun rencana kerja dan program dibidang Penyediaan Perumahan Umum, Penyediaan Perumahan Swadaya dan Pemantauan Evaluasi;
2. Mengkoordinasikan kegiatan dibidang Penyediaan Perumahan Umum, Penyediaan Perumahan Swadaya dan Pemantauan Evaluasi;
3. Merumuskan kebijakan teknsi pengelolaan urusan dibidang Penyediaan Perumahan Umum, Penyediaan Perumahan Swadaya dan PemantauanEvaluasi;
4. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Penyediaan Perumahan Umum, Penyediaan Perumahan Swadaya dan PemantauanEvaluasi;
5. Menyelenggarakan teknis urusan Penyediaan Perumahan Umum, Penyediaaan Perumahan Swadaya dan Pemantauan Evaluasi;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. <u>Kepala Bidang Kawasan Permukiman</u>

1. Menyusun rencana kerja dan program dibidang Peningkatan Kualitas Permukiman, Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan PSU;
2. Mengkoordinasikan kegiatan dibidang Peningkatan Kualitas Permukiman, Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan PSU;
3. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Peningkatan Kualitas Permukiman, Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan PSU;
4. Penyelenggaraaan teknis urusan Peningkatan Kualitas Permukiman Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan PSU;
5. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan Peningkatan Kualitas Permukiman, Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan PSU;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan *(input)*, keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerjaini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Banjar

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase cakupan ketersediaan rumah layakhuni	93,14 %	-	98,37 %	92,69%	93,14%	93.58%	98,60%	92,96&	95,56%	95.39%	Urusan Wajib
	Presentase cakupan lingkungan yangsehat dan amanyang didukung PSU	13,79 %	-	13,79 %	13,79 %	15,52%	17,24%	13,79 %	14,39 %	-	-	Urusan Wajib
2	Persentase pemeliharaan titik pengelolaan penerangan jalan umum (PJU)	92,28%		76,8%	84,4%	92,28%	100%	78,5%	85%	85%	83%	Urusan Pilhan

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain:

a. Pencapaian target nasional bidang cipta karya sampai dengan tahun 2021 yaitu 100% pemenuhan akses air minum yang aman, 0% untuk kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi yang layak.
b. Adanya pandemic cofid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak tercapai.
c. Perumahan yang layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta tersedianya lingkungan sehat yang aman dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai.
d. Sumberdaya manusia yang terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan untukpencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum/optimal;
e. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatankinerja;
f. Belum tersedianya database prasarana, sarana, dan utilitas serta prasarana dan sarana dasar kegiatan di semua bidang sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan serta tidak tersusun secara sistematis dan akurat;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja SKPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman. Secara Keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1.	**PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN**		**Persentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten**	**100%**	**838,936,260**	**PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN**		**Persentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten**	**100%**	**733,417,000**	
1.1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Persentase rumahyang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya**	**100%**	**150,000,000**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Persentase rumahyang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya**	**100%**	**60,867,200**	
1.1.1	Identifikasi Perumahan diLokasi Rawan Bencana atauTerkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	Identifikasi Perumahan diLokasi Rawan Bencana atauTerkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60,867,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
1.1.2	Pengumpulan Data Rumah Korban BencanaKejadian Sebelumnya yang BelumTertangani		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	Pengumpulan Data RumahKorban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen	-	-	
1.1.3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah AkibatBencana		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah AkibatBencana		Jumlah Dokumen	-	-	
1.1.4	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program		Jumlah Dokumen	-	-	
1.2	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaandan Rehabilitasi Rumah Korban BencanaatauRelokasi**		**Persentase Sosialisasi yang terlaksana**	**100 %**	**97,330,050**	**Sosialisasi dan PersiapanPenyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban BencanaatauRelokasi**		**Persentase Sosialisasi yang terlaksana**	**100 %**	**97,323,600**	
1.2.1	Sosialisasi Standar TeknisPenyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah orang / sosialisasi	2 Kali	97,330,050	Sosialisasi Standar TeknisPenyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah orang / sosialisasi	2 Kali	97,323,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
1.3	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi**	**8 Unit**	**405,965,100**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi**	**100%**	**838,936,260**	
1.3.1	Korban Bencana Rehabilitasi Rumah bagi		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasisesuai dengan rencana aksi	6 Unit	275,965,100	Korban Bencana Rehabilitasi Rumah bagi		Jumlah unit rumahkorban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	**100%**	**150,000,000**	
1.3.2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana yang dibangun sesuai dengan rencanaaksi	2 Unit	130.000.000	Pembangunan Rumah bagiKorban Bencana		Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana yang dibangun sesuai dengan rencanaaksi	1 Dokumen	37.500.000	
1.4	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**Persentase Perumahan baruyang terfasilitasi perizijnanya**	**100 %**	**185,641,110**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**Persentase Perumahan baruyang terfasilitasi perizijnanya**	1 Dokumen	37.500.000	
1.4.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Perumahan baru yang terfasilitasi perizijnanya	50 Perumahan	79,324,110	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan IzinPembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Perumahanbaru yang terfasilitasi perizijnanya	1 Dokumen	37.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
1.4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	106,317,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase Kawasan Kumuhyang tertangani**	**12,23 %**	**1,466,965,620**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase Kawasan Kumuhyang tertangani**	**100 %**	**97,330,050**	
2.1	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegah an kumuh**	**22 %**	**466,965,620**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegah an kumuh**	2 Kali	97,330,050	
2.1.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen	**8 Unit**	**405,965,100**	
2.1.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh		Jumlah Dokumen	6 Unit	275,965,100	
2.1.3	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah orang sosialisasi	140 Orang	71,965,620	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah orang sosialisasi	2 Unit	130.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
2.1.4	oordinasi dan Sinkronisasi PengendalianPenataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Rapat	4 kali	50,000,000	oordinasi dan Sinkronisasi PengendalianPenataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Rapat	**100 %**	**185,641,110**	
2.1.5	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	95,000,000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen	50 Perumahan	79,324,110	
2.2	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh**	**2,4 Ha**	**1,000,000,000**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh**	1 Dokumen	106,317,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
2.2.1	Penyusunan RencanaTapak (Site Plan) danDetail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	475,000,000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan DetailEngineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen	**12,23 %**	**1,466,965,620**	
2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Terselenggara koordinasi permukiman kumuh	8 Kali	125,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Terselenggara koordinasi permukiman kumuh	**22 %**	**466,965,620**	
2.2.3	Pemberian Bantuan UangSewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh		Tersedianya hunian sementara	10 Unit	100,000,000	Pemberian Bantuan UangSewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh		Tersedianya hunian sementara	2 Dokumen	200,000,000	
2.2.4	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan PSU ygterfasilitasi	15 Unit	300,000,000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan PSU ygterfasilitasi	1 Dokumen	50,000,000	
3	**ROGRAM PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**Persentase pencegahan Perumahan danKawasan Permukiman Kumuh**	**22.62%**	**380,000,000**	**ROGRAM PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**Persentase pencegahan Perumahan danKawasan Permukiman Kumuh**	140 Orang	71,965,620	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
3.1	**Pencegahan Perumahandan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlakasanany akegiatan pencegahan perumahan dankawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**	**0,17 %**	**380,000,000**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh padaDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terlakasanany akegiatan pencegahan perumahan dankawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**	4 kali	50,000,000	
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluarKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah unit peningkatan kualitas RumahTidak Layak Huni	15 Unit	380,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluarKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah unit peningkatan kualitas RumahTidak Layak Huni	1 Dokumen	95,000,000	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)**		**Persentase Perumahan yangsudah dilengkapiPSU**	**20,96%**	**14,639,395,840**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)**		**Persentase Perumahan yangsudah dilengkapiPSU**	**2,4 Ha**	**1,000,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
4.1	**Urusan Penyelenggaraan PSUPerumahan**		**Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU**	**262 Perumahan**	**14,639,395,840**	**Urusan PenyelenggaraanPSU Perumahan**		**Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU**	3 Dokumen	475,000,000	
4.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdi Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah unit rumahyang terfasilitasi PSU	200 Unit	1,000,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdi Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah unit rumahyang terfasilitasi PSU	8 Kali	125,000,000	
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangkaPenyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Dokumen	8 Dokumen	27,131,850	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangkaPenyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Dokumen	10 Unit	100,000,000	
4.1.3	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terpelihara	500 Titik	13,612,263,990	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terpelihara	15 Unit	300,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
5	**PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**2,011,761,280**	**PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terselenggaranya administrasi, pengelolaan kepegawaian serta perkantoran**	**22.62%**	**380,000,000**	
5.1	**Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**TercapainyaDokumen SAKIP**	**1 Dokumen**	**14,102,550**	**Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**TercapainyaDokumen SAKIP**	**0,17 %**	**380,000,000**	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah		TercapainyaDokumen SAKIP	1 Dokumen	14,102,550	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah		TercapainyaDokumen SAKIP	15 Unit	380,000,000	
5.2	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**		**Tersedianya Gaji dan tunjangan PNS, tenaga Pendukung administrasi/tekni s, dan Kebersihan perkantoran**	**12 Bulan**	**621,276,350**	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**		**Tersedianya Gaji dan tunjangan PNS, tenaga Pendukung administrasi/tekni s, dan Kebersihan perkantoran**	**20,96%**	**14,639,395,840**	
5.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya tenaga pendukung kebersihan dan administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	615,870,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya tenagapendukung kebersihan dan administrasi/teknis perkantoran	**262 Perumahan**	**14,639,395,840**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
5.2.2	Penyusunan Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporanhasil pelaksanaan program dan kegiatan	12 Laporan	5,406,350	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran		Jumlah laporanhasil pelaksanaan program dan kegiatan	200 Unit	1,000,000,000	
5.3	**Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah**		**Terlaksanakanya peningkatan kemampuan pengetahuan dankapasitas sumber aparatur**	**3 Kali**	**30.000.000**	**Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah**		**Terlaksanakanya peningkatan kemampuan pengetahuan dankapasitas sumber aparatur**	8 Dokumen	27,131,850	
5.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknisdan kursus untuk pegawai	3 Kali	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknisdan kursus untuk pegawai	500 Titik	13,612,263,990	
5.4	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**		**Terselenggaranya administrasi, pengelolaan kepegawaian serta perkantoran**	**12 Bulan**	**868,213,620**	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**		**Terselenggaranya administrasi, pengelolaan kepegawaian serta perkantoran**	**100%**	**2,011,761,280**	
5.4.1	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan komponen listrik dan elektronikdi perkantoran	12 Bulan	3,158,400	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan komponen listrik dan elektronikdi perkantoran	**1 Dokumen**	**14,102,550**	
5.4.2	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor		Tersedianaya ATKPerkantoran	12 Bulan	17,693,000	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor		Tersedianaya ATKPerkantoran	1 Dokumen	14,102,550	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	
5.4.3	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan		Tersedianya dokumencetak dan biaya penggandaan	12 Bulan	12,480,750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya dokumencetak dan biaya penggandaan	**12 Bulan**	**621,276,350**	
5.4.4	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundangundangan		Terbelinya buku peraturan dan bahan bacaankantor	12 Bulan	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundangundangan		Terbelinya buku peraturan dan bahan bacaankantor	12 Bulan	615,870,000	
5.4.5	Penyediaan Bahan /Material		Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	7,513,470	Penyediaan Bahan /Material		Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 Laporan	5,406,350	
5.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		Terlaksanany arapat konsultansi perjalanan dinas dalam danluar daerah pegawai	12 Bulan	809,368,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		Terlaksanany arapat konsultansi perjalanan dinas dalam danluar daerah pegawai	**3 Kali**	**30.000.000**	
5.5	**Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor**	**12 Bulan**	**40,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**		**Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor**	3 Kali	30.000.000	
5.5.1	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	40,000,000	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	**12 Bulan**	**868,213,620**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
5.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terselenggaranya administrasi, pengelolaan kepegawaian serta perkantoran**	**12 Bulan**	**174,178,180**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terselenggaranya administrasi, pengelolaan kepegawaian serta perkantoran**	12 Bulan	3,158,400	
5.6.1	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya materai dinas	500 lembar	3,375,000	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya materai dinas	12 Bulan	17,693,000	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik		Tersediamya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	139,803,180	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik		Tersediamya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12,480,750	
5.6.3	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor		Tersedianya standpameran pembangunan	1 kegiatan	31,000,000	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor		Tersedianya standpameran pembangunan	12 Bulan	18.000.000	
5.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**		**TerpeliharayaBarang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**263,990,580**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**		**TerpeliharayaBarang Milik Daerah**	12 Bulan	7,513,470	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharany amobil Jabatan	12 Bulan	40,990,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharany amobil Jabatan	12 Bulan	809,368,000	
5.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan		Terpeliharany amobil dinas operasional	12 Bulan	157,404,080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharany amobil dinas operasional	**12 Bulan**	**40,000,000**	
5.7.3	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Terpeliharny aperalatan kerja dan perlengkapan kantor	12 Bulan	17,694,000	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Terpeliharny aperalatan kerja dan perlengkapan kantor	12 Bulan	40,000,000	
5.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharany agedung kantor	12 Bulan	47,902,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharany agedung kantor	**12 Bulan**	**174,178,180**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diuraikan dari hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) dan musrenbang kecamatan (untuk kecamatan). Penelaahan inidilakukan dari awal kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasi berdasarkan kewenangan. Untuk lebih jelasnya usulan tabel usulan program masyarakat disajikan

pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar

Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan
Kepala Desa Kala'an	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Perlunya Penerangan Listrik 24 jam	Desa Kalaan, Kab. Banjar, Aranio, Kala'an	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	renja
Kepala Desa Pa'au	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Perlunya penerangan listrik 24 jam	Desa Paau, Kab. Banjar, Aranio, Pa'au	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	renja
Kepala Desa Artain	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Perlunya penerangan listrik 24 jam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Desa Artain, Kab. Banjar, Aranio, Artain	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	renja
Kepala Desa Belangian	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Perlunya penerangan listrik 24 jam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Desa Belangian, Kab. Banjar, Aranio, Belangian	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	renja

Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi MitraBappeda	KategoriUsulan
Kepala Desa Benua Riam	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Perlunya penerangan listrik 24 jam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Desa Benua Riam, Kab.Banjar, Aranio, Benua Riam	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	renja
Lurah Gambut	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Keamanan jaga malam lingkungan komplek perumahan	Jl. Daya Karya Komp.Permata Hijau 2 RT. 08B, Kab. Banjar, Gambut, Gambut	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	renja
Lurah Gambut	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Jalan utama masuk komplek perumahan rusak	Jl. A. Yani Km. 14.500 Komp. Sejahtera Mandiri Asri RT. 21A, Kab. Banjar, Gambut,Gambut	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapat diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	renja
Lurah Gambut	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Jalan komplek perumahan rusakberat	Jl. A. Yani Km. 14.500 Komplek Sejahtera Mandiri Asri RT. 21B,Kab. Banjar, Gambut,Gambut	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	renja
Kepala Desa Malintang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Sering terjadi kecalakaan malam hari, sering pencurian.	Jl. Pahlawan RT 002, Kab. Banjar, Gambut,Malintang	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	renja

Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi MitraBappeda	KategoriUsulan
Kepala Desa Tambak Danau	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	pengadaan tiang PJU (30 Tiang) Rp. 30.000.000	Tambak Danau, Kab.Banjar, Astambul, Tambak Danau	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapat diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	renja
Kepala Desa Manarap Baru	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Jalan telah dilakukan perkerasan, namun akan cepat terjadi kerusakan apabila belum dilakukan pengaspalan, merupakan daerah berkembang karna banyaknya perumahan di dalamnya.	Jalan Handil Tiga RT.002 s/d RT. 001 Simpang 4 PDAM RW. 001, Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Manarap Baru	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapat diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	renja
Kepala Desa Pasar Kamis	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	masih banyak jalan desa yang belum mendapat penerangan guna mengurangi dampak negatif yang terjadi	JL. PASAR KAMIS RT 1-6 DESA PASAR KAMIS KECAMATAN KERTAK HANYAR KAB. BANJAR, Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Pasar Kamis	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapat diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 90000000	renja
Kepala Desa Kertak HanyarII	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Jalan Rusak	Gang Damai Rt.017/Rw.002 Desa Kertak Hanyar II, Kab. Banjar, Kertak Hanyar,Kertak Hanyar II	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapt diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	renja

Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi MitraBappeda	KategoriUsulan
Kepala Desa Kertak HanyarII	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Jalannya Rusak	Gang Asdi Karya II Rt.016/Rw.001 Desa Kertak Hanyar II, Kab. Banjar, Kertak Hanyar,Kertak Hanyar II	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapat diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	renja
Kepala Desa Tambak Padi	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Rumah Barokah (PeningkatanKualitas Rumah)	Rehab rumah masyarakat volume 50 buah pagu Rp 1 000 000 000,-	Tambak Padi RT 01 02 03, Kab. Banjar, Beruntung Baru, Tambak Padi	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapat diteruskan Koefisien : 50 buah Anggaran : 1000000000	renja
Kepala Desa Simpang Empat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Minimnya Penerangan saat Malam Hari	JL. Panggalaman Rt 10Rw 02 Desa Simpang Empat, Kab. Banjar, Simpang Empat, Simpang Empat	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	renja
Kepala Desa Tiwingan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Perlunya bantuan untuk 7 buah rumahyang terkena Bencana Tanah Longsor.	Lingkungan II Desa Tiwingan Lama, Kab.Banjar, Aranio, Tiwingan	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 280000000	renja
Kepala Desa Rumpiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Rumah Barokah (PeningkatanKualitas Rumah)	Rehabilitasi rumah tidak layak huni Volume 50 buah Pagu Rp.500.000.000,-	Desa rumpiang, Kab.Banjar, Beruntung Baru, Rumpiang	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : Dapat diteruskan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1000000000	renja

Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi MitraBappeda	KategoriUsulan
Kepala Desa Tiwingan Baru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Rumah Barokah (PeningkatanKualitas Rumah)	Bedah rumah sebanyak 5 buah.	Desa Tiwingan Baru, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan Baru	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 80000000	renja
Kepala Desa Pa'au	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Rumah Barokah (PeningkatanKualitas Rumah)	Bantuan untuk perbaikan Rumah Tinggal Layak hunisebanyak 7 KK.	Desa Paau, Kab. Banjar, Aranio, Pa'au	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 280000000	renja
Kepala Desa Pindahan Baru	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Rumah Barokah (PeningkatanKualitas Rumah)	Rehab Rumah Volume 20 buah Pagu Rp. 80.000.000,-	Pindahan Baru, Kab.Banjar, Beruntung Baru, Pindahan Baru	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	renja
Lurah Manarap Lama	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	jalan rusak	Jl. Manarap Lama RT14 Gg. Setia Budi Kelurahan Manarap Lama,, Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Manarap Lama	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	renja
Kepala Desa Terapu	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (jalan Komplek Perumahan, Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan)	Belum Mempunyai Penerangan Jalan RT001, 002 & 003 Pagu 150 Juta	Desa Terapu, Kab. Banjar, Aluh Aluh,Terapu	Dinas Perumahan Dan Permukiman		

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANJAR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian PU Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Arah Kebijakan

Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya dan fasilitasi perumahan khusus.

Strategi

1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangk anmasyarakat dan dunia usaha sebagai provider.
   a. Membenahi tatalaksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan baik dipusat maupun daerah
   b. Melaksanakan program - program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR
   c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan Perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni.
   d. Mendorong Pemda agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik ditingkat provinsi maupun kab/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun DAK
   e. Memberdayakan BUMN dibidang perumahan untuk melaksanakan operasionalisasi kebijakan pemerintah
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
   a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dipusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu lintas sector maupun wilayah.
   b. Mensinergikan perencanaan pembangunan Perumahan dengan system perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP kedalam

penyusunan RPJMN dan RPJMD.

c. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir.
d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
e. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider.
f. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR

4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah.
   a. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan.
   b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, Penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatantanah negara, tanah terlantar dan Tanah wakaf
5. Pengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan
   a. Pengendalian Perumahan Komersial melalui: penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif.
   b. Penguatan Perumahan Umum melalui: fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan apartmen murah (Rusun) baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar.
   c. Pemberdayaan perumahan swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan

      rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulanuntuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah
   d. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui: pembangunan pondok singgah di kawasan strategis perkotaan (rumah sakit, pasar, terminal, stasiun, pelabuhan) pembangunan rumah khusus pasca bencana, pasca konflik dan perbatasan.
6. Meningkatkan efisiensi dalam industry pembangunan perumahan yang berkelanjutan.
   a. Standarisasi perijinan
   b. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar

Renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022- 2026. Adapun visi Kabupaten Banjar adalah "***Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.***"

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar tahun 2022-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
3. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dengan menerapkan prinsip good *governance*.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- **Misi I:** Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.

  Tujuan:

  Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman dan kawasan kumuh serta cakupan pelayanan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat

  Sasaran:

  Peningkatan Kualitas kawasan kumuh dengan berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan sebesar 11,79 Ha;

- **Misi II:** Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

  Tujuan:

  Mewujudkan kawasan perumahan dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang baik, serta layak huni dan terjangkau;

  Sasaran:

1. Terwujudnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang layak huni dan terjangkau dengan didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas yang baik dengan meningkatnya cakupan rumah layak huni sebesar 98,72%;
2. Terhimpunnya informasi dokumen rencana penataan lingkungan permukiman (5 dokumen);
3. Terlaksananya monitoring, dan pengawasan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terwujudnya pelayanan perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;

- **Misi III:** Mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas denganpeningkatan kualitas SDM pelaksana pembangunan.

  Tujuan:

  Mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dengan peningkatankualitas SDM pelaksana pembangunan.

  Sasaran:

  Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pembangunandaerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan visi Kabupaten Banjar Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terciptanya Pemukiman Yang Nyaman Dan Layak Huni "***, maka program dan kegiatan yangakan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar tahun 2022 terdiri dari:

Program utama yang dilaksanakan tahun 2022 meliputi:

1. Program Pengembangan Perumahan

   Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan, mengkoordinasikan pengawasan dan monitoring dari kegiatan penyediaan perumahan baik perumahan umum maupun perumahan swadaya. Pada program ini diarahkan untuk melakukan koordinasi lintas SKPD yang berkaitan dengan kebijakan perumahan dan Kawasan permukiman. Selain itu juga menyusun dan mensosialisasikan beberapa kebijakan dalam penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman kepada stakeholder dan masyarakat. Selainitu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hunian yang layak bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan memfasiliasi penyediaan perumahan untuk menempati rumah yang layak huni serta meningkatkan

peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan pembangunan rumah bagi MBR. Serta memfasilitasi dan mengkoordinasi terhadap usulan peningkatan kulitas perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah, memfasilitsi proses permohonan persetujuan dokumen teknis terkait penyusunan siteplan untuk mendukung proses perizinan pembangunan perumahan yang cepat, efektif dan efisien.

2. Program Kawasan Permukiman

   Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman khususnya di kawasan kumuh serta cakupan pelayanan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat tidak mampu. Serta penyusunan/ sosialisasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman serta pendataan data Kawasan permukiman khususnya yang menjadi prioritas di wilayah Kawasan kumuh sebagai tindak lanjut dari upaya rencana revisi Kawasan kumuh yang terintegrasi.

3. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

   Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan kumuh, dimana perbaikan Rumah tidak layak huni diluar Kawasan Kumuh.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

   Program ini terdiri dari 3 kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan memeliharan penerangan jalan umum. Serta melakukan pembangunan baru titik- titik PJU. Selain itu juga melakukan monitoring terhadap titik-titk PJU yang telah dipelihara dengan titik-titik PJU yang masih liar sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan/pemeliharaan.

Sedangkan Program rutin/penunjang lainnya yang dilaksanakan tahun 2022 ini antara lain:

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan

   Program ini bertujuan untuk melakukan penyusunan beberapa dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen pencapaian kinerja setiap tahunnya.

2. Administrasi Keuangan 2 kegiatan

3. Administrasi Umum 14 kegiatan

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 kegiatan

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupate Banjar

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**17.750.360.950**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.011.761.280**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**14.102.550**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.102.550
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**621.276.350**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	615.870.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.406.350
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**30.000.000**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	30.000.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Undangan	
Administrasi UmumPerangkat Daerah	**543.845.620**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.158.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.693.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.480.750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000
PenyediaanBahan/Material	7.513.470
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**40.000.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**174.178.180**
Penyediaan Jasa SuratMenyurat	3.375.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.803.180
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**263.990.580**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.990.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.404.080
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.694.000
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.902.500
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**791.606.210**
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**150.000.000**
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.500.000
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	37.500.000
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	37.500.000
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.500.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota	**50.000.000**
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelaw an Tanggap Bencana	50.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**405.965.100**
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	275.965.100
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	130.000.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	**185.641.110**

Perumahan	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan PerumahanTerintegrasi secaraElektronik	79.324.110
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	106.317.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**1.251.965.620**
Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha	**426.965.620**
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	160.000.000
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	50.000.000
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	71.965.620
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh	50.000.000
Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	95.000.000
Peningkatan KualitasKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**825.000.000**
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugara n Permukiman Kumuh	300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n PermukimanKumuh	125.000.000
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena ProgramPeremajaan Permukiman Kumuh	100.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	300.000.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**380.000.000**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**380.000.000**
Perbaikan RumahTidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (sepuluh) Ha	380.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**13.639.395.840**

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**13.639.395.840**
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.000.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	27.131.850
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaa n PSU Permukiman	12.612.263.990
JUMLAH	**17.750.360.950**

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**19.337.059.000**			**21.270.764.900**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.011.761.280**			**2.212.937.408**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**14.102.550**			**15.512.805**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Dokumen SAKIP	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	14.102.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15.512.805
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**621.276.350**			**683.403.985**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga pendukung kebersihan dan administrasi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	615.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		677.457.000

	/teknis perkantoran						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan)	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	5.406.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5.946.985
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**30.000.000**			**33.000.000**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**
		Lokasi Output Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan kursus untuk pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		33.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**868.213.620**			**955.034.982**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik dan elektronik di perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	3.158.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.474.240
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediana ya ATK perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	17.693.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19.462.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dokumen cetak dan biaya penggandaan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12.480.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13.728.825
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	terbelinya buku peraturan dan bahan bacaan kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19.800.000
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	7.513.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.264.817

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah pegawai	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	809.368.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		890.304.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**40.000.000**			**44.000.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**174.178.180**			**191.595.998**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dinas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 lembar	3.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.712.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediamya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	139.803.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		153.783.498
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediany a stand pameran pembangu nan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	31.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34.100.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**263.990.580**			**290.389.638**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**
		Lokasi Output Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil Jabatan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	40.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45.089.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya mobil dinas operasion	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	157.404.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		173.144.488

	al						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharnya peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	17.694.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19.463.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	47.902.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52.692.750
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**838.936.260**			**922.829.886**
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**150.000.000**			**165.000.000**
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41.250.000
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41.250.000
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41.250.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang terkena bencana alam maupun terkena relokasi program Kabupaten	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41.250.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**97.330.050**			**107.063.055**
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang / sosialisasi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	97.330.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		107.063.055
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**405.965.100**			**446.561.610**
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilita	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	275.965.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		303.561.610

	si sesuai dengan rencana aksi						
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		143.000.000
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				**185.641.110**			**204.205.221**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**
		Lokasi Output Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perumahan baru yang terfasilitasi perizijnanya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Perumaha	79.324.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		87.256.521

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	106.317.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		116.948.700
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				**1.466.965.620**			**1.613.662.182**
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				**466.965.620**			**513.662.182**
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		220.000.000
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55.000.000
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah orang sosialisasi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140 orang	71.965.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		79.162.182
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		104.500.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				**1.000.000.000**			**1.100.000.000**
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	475.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		522.500.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terselenggara koordinasi permukiman kumuh	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 kali	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		137.500.000
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Tersedianya hunian sementara	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	100.000.000			110.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan PSU yg terfasilitasi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		330.000.000

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**380.000.000**		**418.000.000**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**380.000.000**		**418.000.000**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**
		Lokasi Output Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	380.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		418.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				**14.639.395.840**			**16.103.335.424**
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				**14.639.395.840**			**16.103.335.424**
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 unit	1.000.000.000			1.100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	8 dokumen	27.131.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		29.845.035

		Semua Kelurahan			Umum		
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Titik Penera ngan Jalan yang terpelih ara	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Titik	13.612.263 .990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14.973.490.3 89
Tot al				**19.337.05 9.000**			**21.270.764.9 00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANJAR

Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan danPermukiman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam rancanganawal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan ntuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan insfrastuktur bidang Perumahan danPermukiman. Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjar pada tahun 2022 akan disampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**v**			**23.809.127.208**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.011.761.280**			**2.212.937.408**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**14.102.400**			**3.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang disusun	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	14.102.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3.465.243.093**			**4.322.986.893**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gajih dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Bulan	2.845.016.893			2.845.016.893

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Bulan	614.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.477.970.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**
		Lokasi Output Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	5.406.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**10.000.000**			**50.000.000**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BimTek	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**432.337.870**			**503.764.817**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi / Listrik Penerangan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	3.151.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia naya Peralata n dan Perlengk apan kantoran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	17.692.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaa n yg tersedia	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12.480.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	7.513.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.264.817
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah pegawai	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	373.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**174.173.180**			**12.678.000.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dinas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 lembar	3.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediamya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	139.803.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12.639.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Pameran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	31.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**262.640.910**			**329.875.910**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanaanya pemeliharaan mobil jabatan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	40.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40.990.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**
		Lokasi Output Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	157.005.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		203.885.910
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	17.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35.000.000

	Kantor						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	47.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**767.111.400**			**3.898.190.800**
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**60.867.200**			**60.867.200**
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	60.867.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60.867.200
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**97.323.600**			**97.323.600**
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang yang memahami materi sosialisasi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	97.323.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		97.323.600
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**389.596.700**			**3.500.000.000**
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	389.596.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.500.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				**219.323.900**			**240.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Rekomendasi Siteplan rumah dan Perumahan yang disahkan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	262 Dokumen	79.323.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah perumahan yang telah dilakukan pemantauan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 perumahan	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		140.000.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				**2.557.004.100**			**4.728.000.000**
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				**300.000.000**			**728.000.000**
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	185.243.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300.000.000

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		320.000.000
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	44.357.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		108.000.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				**2.257.004.100**			**4.000.000.000**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**
		Lokasi Output Kegiatan	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	247.982.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		395.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terselenggara koordinasi permukiman kumuh	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 kali	6.621.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.000.000

Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Tersedianya hunian sementara	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	87.300.000			-
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah PSU yang terfasilitasi di permukiman kumuh	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 PSU	1.915.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3.600.000.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				**485.501.200**			**2.970.000.000**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				**485.501.200**			**2.970.000.000**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 unit	485.501.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2.970.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				**15.971.441.400**			**9.999.999.000**
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				**15.971.441.400**			**9.999.999.000**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Perumahan & Permukiman yang Terfasilitasi Jalan Lingkungan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	760 unit	3.799.999.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3.799.999.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah perumahan yang telah melaksanakan serah terima	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Perumahan	27.131.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200.000.000
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terbangun dan terpelihara	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Titik	12.144.310.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6.000.000.000
Total				**21.792.819.380**			**23.809.127.208**

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2022, dimana Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022. Besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD diartikan sebagai "Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun" (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula "Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat" (pasal 7 ayat 2).

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2022 ini payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2022 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit

kerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan.
2. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2022.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat antara lain :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

   Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2021. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

   a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yangdirencanakan.
   d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
   e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
   f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

   Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

   Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

   Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. Program dan Kegiatan

   Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi penyampaian rencana kerja dan pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Adapun untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2016-2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan 6 (enam) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1								2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
1								**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
1	**05**							**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**									
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi**	100%	100%	100%	100%	100%			
1	5	1	5	1	1	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	3200 lembar	2400 lembar	800 lembar	800 lembar	100%	800 lembar		
1	5	1	5	1	1	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jaringan telepon dan internet speedy yang dibayarkan	2 rekening	2 rekening	2 rekening	2 rekening	100%	2 rekening		
1	5	1	5	1	1	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional untuk service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	15 buah	15 buah	13 buah	13 buah	100%	15 buah		
1	5	1	5	1	1	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	40 jenis	36 jenis	40 jenis	40 jenis	100%	40 jenis		
1	5	1	5	1	1	01	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis		
1	5	1	5	1	1	01	12		Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis		
1	5	1	5	1	1	01	13		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan kelengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis		

1	5	1	5	1	1	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia dan pembuatan spanduk / banner	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis		
1	5	1	5	1	1	01	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum	5 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun		
1	5	1	5	1	1	01	18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun		
1	5	1	5	1	1	01	19			Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	8 orang	7 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja ASN**	100%	100%	100%	100%	100%			
1	5	1	5	1	1	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	48 buah	18 buah	12 buah	12 buah	100%	12 buah		
1	5	1	5	1	1	02	22			Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruangan gedung yang direnovasi	1 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%			
1	5	1	5	1	1	02	23			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan untuk service suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	100%	1 buah		
1	5	1	5	1	1	02	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis		
1	5	1	5	1	1	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor SKPD yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	4 jenis		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Meningkatnya pemahaman aparatur badan kesbangpol Kab. Banjar tentang peraturan perundang-undangan**	100%	100%	100%	100%	100%			
1	5	1	5	1	1	05	03			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/kursus yang terkirim	66 orang	15 orang	3 orang	3 orang	100%	15 orang		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**Nilai SAKIP**	78.5 %	69.81%	75%	71.19%	95%			
1	5	1	5	1	1	06	02			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen		
1	5	1	5	1	1	06	04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		

1	5	1	5	1	1	06	08			Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan siknronisasi kegiatan pemerintah daerah	20 dokumen	0 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen		
1	5	1	5	1	1	06	09			Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	200 dokumen	0 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	100 dokumen		
1	5	1	5	1	1	06	10			Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja (LPPD, LKjIP, LKPJ)	30 dokumen	0 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen		
1	5	1	5	1	1	06	12			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monev (laporan realisasi fisik dan keuangan, TEPRA, Lap. Renja)	56 laporan	0 dokumen	28 laporan	28 dokumen	100%	28 laporan		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**16**		**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**			**Meningkatnya persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	5	1	5	1	1	16	02			Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	85 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
1	5	1	5	1	1	16	05			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah dokumen (laporan)	5 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**17**		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**			**Persentase ormas yang terdaftar**	15%	75%	15%	72,28%	481,87%	15%		
1	5	1	5	1	1	17	02			Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Jumlah pembuatan SKT / ormas yang melapor	80 ormas	41 ormas	16 ormas	18 ormas	113%	16 ormas		
1	5	1	5	1	1	17	03			Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	sosialisasi/ penyuluhan	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	3 kegiatan		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**18**		**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**			**Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan**	1000 peserta	500 peserta	200 peserta	0 peserta	0%	200 peserta		
1	5	1	5	1	1	18	02			Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang yang mngikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	1500 peserta	500 peserta	0 peserta	0 peserta	0%	200 peserta		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**20**		**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**			**Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait narkoba, judi, miras dan sajam)**	2%	6.69%	2%	29,28%	1464%	2%		
1	5	1	5	1	1	20	01			Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan tentang bahaya minuman keras dan narkoba/ P4GN	3660 peserta	2040 peserta	80 peserta	80 peserta	100%	240 peserta		
1	5	1	5	1	1	20	06			Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	Jumlah pembinaan/sosialisasi	1500 peserta	1080 peserta	120 peserta	120 peserta	100%	300 peserta		

1	5	1	5	1	1	20	09			Penyuluhan Pencegahan Senjata Tajam	Jumlah pembinaan/sosialisasi	1500 peserta	1200 peserta	0 peserta	0 peserta	0%	300 peserta		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**21**		**Program Pendidikan Politik Masyarakat**			**Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu**	73%	79,69%	73%	77,44%	106,08%			
1	5	1	5	1	1	21	01			Penyuluhan Kepada Masyarakat	jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	1800 peserta	1200 peserta	60 peserta	60 peserta	100%	360 peserta		
1	5	1	5	1	1	21	02			Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan per UU tentang fasilitasi penyelesaian parpol	10 kegiatan	6 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	2 kegiatan		
1	5	1	5	1	1	21	03			Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	1560 peserta	1110 peserta	60 peserta	0 peserta	0%	300 peserta		
1	5	1	5	1	1	21	05			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan (dokumen)	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
1	5	1	5	1	1	21	07			Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	48 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	100%	12 laporan		
1	5	1	5	1	1	21	09			Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilkada Tahun 2020	Jumlah Tim pemantauan,pembinaan, fasilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidakdiakomodir oleh APBN	20 kecamatan	20 kecamatan	20 kecamatan	20 kecamatan	100%	-		
1	**5**	**1**	**5**	**1**	**1**	**28**		**Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat**			**Kasus terkait isu SARA**	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0%			
1	5	1	5	1	1	28	01			Sosialisasi dan Pembentukan FKDM	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	1620 peserta	1260 peserta	0 peserta	0 peserta	0%	300 peserta		
1	5	1	5	1	1	28	02			Sosialisasi dan Pembentukan FKUB	Jumlah peserta sosialisasi FKUB	1800 peserta	1180 peserta	0 peserta	0 peserta	0%	360 peserta		
1	5	1	5	1	1	28	03			Sosialisasi dan Pembentukan FPK	Jumlah peserta sosialisasi FPK	720 peserta	360 peserta	0 peserta	0 peserta	0%	180 peserta		

Sumber : - Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021
- LkjIP dan LKPJ Badan Kesbangpol tahun 2019 dan 2020

Terkait dengan pelaksanaan Renja tahun 2020, secara umum hampir semua program dan kegiatan realisasinya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan (dokumen Rencana Kerja Perubahan 2020) walaupun sejatinya banyak pemangkasan dan pengurangan atas target kinerja yang dilakukan dari penetapan awal (dokumen Rencana Kerja 2020) karena adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia umumnya, akibat kondisi pandemi itulah semua kegiatan di Badan Kesbangpol yang bersifat pertemuan mengumpulkan massa/masyarakat hampir semuanya dihapus, belum lagi karena adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan banyak sasaran kinerja program dan kegiatan yang disesuaikan ulang dalam tahapan APBD Perubahan.

Pada tabel diatas kolom 11 dan 12 dikosongkan karena pada tahun 2020 seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar menggunakan nomenklatur program dan kegiatan yang baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian di perbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam nomenklatur yang baru ini selain program dan kegiatan juga ada sub kegiatan. Dulunya rincian belanja sebagai penjabaran teknis berada dalam kegiatan namun dalam nomenklatur yang baru rincian belanja diletakkan dalam sub kegiatan.

Dari tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD di atas dapat dilihat realisasi capaiaan kinerja program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yakni
    - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat
    - Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
    - Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yakni:
    - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
        - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
        - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
        - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - Kegiatan Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        - Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
        - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - Kegiatan Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan
  - Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD
  - Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
  - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
  - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
  - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
  - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Senjata Tajam
  - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - Kegiatan Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik
  - Kegiatan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilkada Tahun 2020
- Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.
  - Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM
  - Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKUB
  - Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FPK

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yakni:
   - Program Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
   - Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
   - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
   - Program Pendidikan Politik Masyarakat

d. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan adalah.
   1. Tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
      - Ada beberapa kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaan, secara teknis pelaksanaan acaranya mengumpul massa, sehingga demi prokes harus menyesuaikan peserta kegiatannya atau ada yang dibatalkan.
      - Adanya penetapan jenis target kinerja dan jumlah volume yang kurang tepat, dimana dalam realisasi pelaksanaannya jenis dan volume yang dihasilkan berbeda, sehingga menyebabkan ada ketidaksesuaian antara target dengan realisasi.

   2. Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
      - Pelaksana kegiatan memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
      - Adanya koordinasi dan pemahaman tugas yang bagus dalam pelaksanaan program/kegiatan, hingga pelaksanaannya bisa terarah dan relevan antara target dan pagu anggaran yang tersedia.
      - Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang selaras dengan usaha pencapaian target masing masing kegiatan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Setelah ada penyesuaian target dan anggaran tentunya akan ada implikasi pada pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sesuai yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja maupun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ditahun 2020 tersebut, pada program, kegiatan/sub kegiatan rutin yang dilaksanakan (yang ditangani oleh Sekretariat) mungkin dampak yang terjadi tidak terlalu besar atau bahkan tidak terlalu terasa, namun pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditangani oleh bidang teknis dampak atau implikasinya akan jauh berasa.

Pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa mengakomodir target kinerja sesuai dokumen Renstra maupun dokumen Renja karena beberapa faktor alasan, dan umumnya karena disebabkan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan pada SKPD Kesbangpol sehingga mengharuskan adanya penyesuaian target dan anggaran pelaksanaan kegiatan, ditambah lagi ada rasionalisasi anggaran yang menyebabkan semua SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Banjar dipotong anggaran belanja satuan kerjanya, yang tentunya hal ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen Renstra maupun di dalam Renja SKPD.

f. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain :

1. Sangat disarankan agar setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran kedalam kegiatan (penyusunan rincian belanja), dimana kondisi yang ada masih ada penyusun rencana kegiatan yang kurang memahami dasar dan tujuan dari kegiatan yang ditanganinya sehingga pada saat menentukan indikator, target maupun rincian belanjanya banyak yang tidak tepat dan tidak akurat, yang pastinya akan berdampak sulitnya mencapai/merealisasi target kinerja yang telah ditentukan diawal. Salah satu langkah yang bisa diambil terkait hal ini adalah meningkatkan pemahaman atau wawasan para penyusun perencanaan (penyusun kegiatan di bidang khususnya) agar aktif mempelajari tugas pokok, fungsi, dan tugas khusus lainnya yang diemban oleh bidangnya, serta agar diberi kesempatan mengikuti bimtek/sosialisasi yang terkait perencanan kegiatan, supaya pada akhirnya mareka bisa menjadi penyusun rencana kegiatan yang berkualitas yang menguasai dan memahami kondisi serta keadaan bidang kerjanya, dan bisa merumuskan dan menterjemahkan kegiatan kedalam dokumen perencanaan secara baik dan akurat, yang mampu menetapkan target secara realistis dan berpandangan visioner.
2. Perlu ada komitmen yang kuat dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada diatasnya dan tetap berkesinambungan dalam menetapkan target capaian kinerja.
3. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada SKPD, sering terjadi keadaan di SKPD dimana target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, seperti target indikator kinerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Renja berbeda dari target Renstra, atau target dalam RKA berbeda dari Renja, atau bisa juga target RKA berbeda dengan DPA, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada SKPD oleh Pemerintah Kabupaten jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh SKPD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Namun harus diakui sulit memang untuk mendapatkan kepastian dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun

terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan, dan kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar juga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga untuk menilai kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol menilai berdasar capaian indikator program sebagaimana dicantumkan dalam tabel dibawah :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol

Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait narkoba, judi,miras dan sajam)	-	-	2%	2%	29,28%	16,98 %	-	-	Tahun 2021 adalah akhir masa Renstra (Renstra 2016-2021)
2	Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan	-	-	450 Org	450 Org	0	60 Org	-	-	
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam dalam Pemilu	-	-	73%	73%	77,44%	74,37%	-	-	
4	Persentase ormas yang terdaftar	-	-	15%	15%	72,78%	36,45%	-	-	
5	persentase mediasi / fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
6	kasus terkait isu SARA	-	-	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	-	-	
7	Nilai SAKIP	-	-	75	75	71,63	72,87	-	-	
8	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
9	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
10	Meningkatnya pemahaman aparatur badan kesbangpol Kab. Banjar tentang peraturan perundang-undangan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	

Sumber :

- Dokumen LkjIP Badan Kesbangpol 2020
- Lap RFK Tahun 2021
- Laporan data Kriminal dan Potensi konflik Polres Banjar tahun 2020 dan 2021

Sesuai dokumen Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, ada enam (6) program utama dan empat (4) program pendukung yang akan dilaksanakan Badan Kesbangpol Banjar sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 sebagaimana dicantumkan dalam tabel 2.2 diatas, namun karena adanya kewajiban untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditahun 2021, maka implikasinya ada perubahan atas nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dipakai Kesbangpol ditahun 2021 tersebut yang diikuti dengan adanya perubahan indikator dan targetnya, walaupun sejatinya perubahan nama program, kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan beserta segala perubahan indikator-indikatornya ini tidak termaktub dalam dokumen Renstra SKPD, Sehingga pada kolom capaian realisasi Renstra tahun 2021 pada tabel diatas, itu sebenarnya hasil pengolahan, sebab program yang baru dipakai (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019) sudah memakai indikator dan target yang berbeda.

Adapun kolom proyeksi capaian Renstra ditahun 2022 dan 2023 dikosongi karena tahun 2022 dan seterusnya sudah memakai dokumen Renstra yang baru yakni periode tahun 2022-2026. Namun secara umum dapat dikatakan hampir semua target program dapat terpenuhi dengan baik, walaupun ada program yang capaiannya dibawah target, seperti pada indikator "Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan", yang memang ada kesulitan pemenuhan target pada indikator ini sebab pada masa pandemi seperti ini agak sulit mengumpul massa atau peserta dalam jumlah agak banyak.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis yang menjadi dasar atau acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap semua potensi konflik di daerah
2. Meningkatkan pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
3. Peningkatan peran daerah dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tabel 2. 2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian 2022**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian 2022**	**Pagu Indikatif**	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 Persen	1.163.194.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	4.369.036.112	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	100 Persen	18.421.100	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	34 Dok	18.057.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.574.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	4.569.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	3.141.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dok	3.141.000	
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	1.843.800	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dok	1.841.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.618.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dok	1.618.000	
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	7.243.800	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Lap	6.887.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 Persen	81.000.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	3.324.257.612	
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kesbangpol				Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	13 Bulan	3.226.462.712	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesbangpol	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	13 Bulan	78.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesbangpol	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	12 Bulan	94.795.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 lap	1.999.900	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	18 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	18 lap	1.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	100 Persen	40.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	100%	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	4 orang	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	-	-	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 Persen	418.592.900	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	393.027.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah komponen/alat instalasi listrik/penerangan yang disediakan	37 buah	3.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah komponen/alat instalasi listrik/penerangan yang disediakan	27 Buah	3.229.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	18.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	317 Buah	17.946.900	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Kesbangpol	Bahan logistik kantor	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Kesbangpol	Bahan logistik kantor	12 Bulan	19.991.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesbangpol	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12.792.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesbangpol	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	2.400.000	
	Fasilitasi KunjunganTamu	Kesbangpol	Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	12.000.000	Fasilitasi KunjunganTamu	Kesbangpol	Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	11.960.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	325.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	100 Persen	60.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	100%	72.435.700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah barang/alat sarana dan prasarana gedung kantor yang dibeli	15 buah	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah barang/alat sarana dan prasarana gedung kantor yang dibeli	12 Buah	72.435.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 Persen	393.680.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	419.790.000	
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Kesbangpol	Jumlah materai yang disediakan	250 Lembar	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	Jumlah materai yang disediakan	250 lembar	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	14.700.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	376.180.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	402.590.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100 Persen	150.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100%	140.090.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	38.990.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	10 Unit	89.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	16 buah	11.600.000	
	Penataan Organisasi		**Persentase terlaksananya sub kegiatan Penataan Organisasi**	100 Persen	1.500.000	**Penataan Organisasi**		**Persentase terlaksananya kegiatan Penataan Organisasi**	100%	1.377.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kesbangpol	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	3 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kesbangpol	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	3 Dok	1.377.500	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Rasio masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan**	1 : 1.077 rasio	58.575.000	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan**	0,08%	2.943.479.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan KarakterKebangsaan		**Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan yang terlaksana**	50 Persen	58.575.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan KarakterKebangsaan**		**Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan yang terlaksana**	50%	2.943.479.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah orang/peserta yang faham terhadap materi yang disampaikan pada kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan danpembauran kebangsaan	75 Peserta	53.575.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah orang/peserta yang faham terhadap materi yang disampaikan pada kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan danpembauran kebangsaan	232 peserta	2.940.129.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	5 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	3 lap	3.350.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUIPENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik**	1 : 354Rasio	1.439.136.000	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUIPENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik**	0,23%	1.463.475.800	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik		**Persentase pembinaan politik dari jumlah rasio yang diinginkan**	22.58Persen	.439.136.00	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**Persentase pembinaan politik dari jumlah rasio yang diinginkan**	10,49%	1.463.475.800	

	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kesbangpol	Persentase jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan berdasarkan proposal yang memenuhi persyaratan administrasi	100 Persen	1.146.636.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kesbangpol	Persentase jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan berdasarkan proposal yang memenuhi persyaratan administrasi	100%	1.160.851.000	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah kegiatan Jambore Partai Politik Jumlah orang/peserta yang memahami materi saat mengikuti Forum Diskusi PolitikJumlah peserta sosialisasi pemilih yang memahami materi sosialisasi yang disampaikan	0 Kegiatan 144 Orang 192 Pesert a	275.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	-Jumlah kegiatan Jambore Partai Politik. -Jumlah orang/peserta yang memahami materi saat mengikuti Forum Diskusi Politik. -Jumlah peserta sosialisasi pemilih yang memahami materi sosialisasi yang disampaikan	0 Kegiatan 270 orang 165 peserta	185.625.500	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah laporan kegiatan pendataan perkembangan situasi politik di Kabupaten	4 Laporan	17.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah laporan kegiatan pendataan perkembangan situasi politik di Kabupaten	4 lap	116.999.300	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase peningkatan Inventarisasi dan pembinaan Ormas**	6 Persen	159.591.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase peningkatan Inventarisasi dan pembinaan Ormas**	14%	159.587.100	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana**	60 Persen	159.591.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana**	60%	159.587.100	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Ormas Yang Ber SKT/ keterangan Lapor Jumlah pengurus ormas yang memahami materi saat mengikuti pembinaan/Sosialisasi	132 Ormas 144 Orang	159.591.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	-Jumlah Ormas yang diawasi -Jumlah pengurus ormas yang memahami materi saat mengikuti pembinaan/Sosialisasi	130 Ormas 288 Orang	159.587.100	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Persentase penurunan kasus narkoba**	5 Persen	275.424.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana**	100%	268.730.800	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		**Persentase jumlah Kebijakan Teknik dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Sosial yang terlaksana**	60 Persen	275.424.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**Persentase jumlah Kebijakan Teknik dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Sosial yang terlaksana**	60%	268.730.800	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Jumlah fasilitasi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)Jumlah kasus Narkoba	3 Kegiatan 6 Kegiatan 180 Kasus	275.424.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	Kesbangpol	-Jumlah fasilitasi kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan -Jumlah fasilitasi kegiatan P4GN	2 Kegiatan 6 Kegiatan	268.730.800	
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Persentase penanganan laporan/kejadian konflik sosial**	75 Persen	231.000.000	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Persentase penanganan konflik sosial**	100%	489.824.500	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana**	50 Persen	231.000.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana**	50%	489.824.500	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah dokumen Kajian Strategis Pemetaan Potensi Konflik di wilayah kecamatan	1 Dok	-	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah dokumen Kajian Strategis Pemetaan Potensi Konflik di wilayah kecamatan	0 Dok	-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah fasilitasi kegiatanTim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) Kabupaten	10 Kegiatan	110.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik di Daerah	6 keg	228.462.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	10 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	10 lap	40.550.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	Jumlah fasilitasi kegiatanForkopimda	8 Kegiatan	104.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	Jumlah fasilitasi kegiatan Forkopimda	10 keg	220.812.500	

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja yang terdapat dalam rancangan awal RKPD sudah hampir sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang diinput dalam SIPD, namun besaran pagu indikatif yang ditetapkan sedikit berbeda. Adapun beberapa alasan kenapa pagu hasil analisis berbeda dengan pagu rancangan awal RKPD yaitu :

a. Ada sub kegiatan yang dihapus dengan alasan efisiensi anggaran yakni pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

b. Ada beberapa sub kegiatan yang pagunya dikurangi karena mengikuti kebijakan rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Daerah.

c. Ada beberapa sub kegiatan yang pagunya bertambah, karena diakhir tahapan penyusunan anggaran, TAPD memberikan tambahan pagu anggaran kepada Badan Kesbangpol sebagai bentuk komitmen dan dukungan daerah untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak ditahun 2024, dimana kebijakan ini sendiri adalah implikasi oleh adanya Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 900/5451/Polpum, tanggal 5 Agustus 2021, perihal Penegasan Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Yang isinya Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar mengalokasikan Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya akan dimulai pada Tahun 2022.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik, meliputi ketahanan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Banjar dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi misi kepala daerah yang ada maka Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banjar mendapat tujuan "**Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur**"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebagai langkah untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

"Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**"**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Angka kasus konflik Ideologi, Pancasila dan Agama	0 Kasus
			2. Persentase kesepakatan FKUB yang yang ditindaklanjuti.	100 %
			3. Persentase penanganan potensi konflik SARA yang diselesaikan	100 %
			4. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	76 %

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana disebutkan diatas yang lebih dititik beratkan pada upaya menghindari konflik dan menciptakan kerukunan, ada beberapa poin pendekatan yang akan diterapkan atau diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yakni :

a. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi tiga konsensus, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, Pancasila dan Undang-undang Dasar 45.

b. Pengembangan nilai-nilai kerukunan, dimana perbedaan agama/aliran jangan dijadikan sebagai faktor pemecah belah tetapi menjadi faktor pemersatu dengan memperhatikan kondisi obyektif bangsa Indonesia yang majemuk.

c. Penguatan ketahanan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya/kearifan lokal.

d. Penguatan dan pengembangan nilai-nilai demokrasi.

Adapun program prioritas yang diemban Badan Kesbangpol dalam rangka menunjang agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD adalah “Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan” yang rumusan indikator, target dan pagu indikatifnya tercantum dalam tabel 3.2 dibawah:

Tabel 3.2 (T-C. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banjar

Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8 8 1 8 1 2	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	Kab. Banjar	0,08%	2.943.479.000	APBD		0,09%	120.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.694.133.312, Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah.

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022

Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6
	8					**Unsur Pemerintahan Umum**			
	8	**1**				**Kesatuan Bangsa Dan Politik**			**9.694.133.312**
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	**8**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	4.369.036.112
	8	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	34 Dok	18.057.600
	8	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	4.569.800
	8	1	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dok	3.141.000
	8	1	1	2,01	4	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dok	1.841.000
	8	1	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dok	1.618.000
	8	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Lap	6.887.800
	8	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	3.324.257.612
	8	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	13 Bulan	3.226.462.712
	8	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	12 Bulan	94.795.000
	8	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 lap	1.999.900

	8	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	18 lap	1.000.000
	8	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	393.027.700
	8	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/alat instalasi listrik/penerangan yang disediakan	27 Buah	3.229.600
	8	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	317 Buah	17.946.900
	8	1	1	2,06	4	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Bahan logistik kantor	12 Bulan	19.991.200
	8	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12.500.000
	8	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	2.400.000
	8	1	1	2,06	8	Fasilitasi KunjunganTamu	Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	11.960.000
	8	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	325.000.000
	8	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	100%	72.435.700
	8	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang/alat sarana dan prasarana gedung kantor yang dibeli	12 Buah	72.435.700
	8	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	419.790.000
	8	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	250 lembar	2.500.000
	8	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	14.700.000
	8	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	402.590.000
	8	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100%	140.090.000
	8	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	38.990.000

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	8	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	10 Unit	89.500.000
	8	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	16 buah	11.600.000
	8	**1**	**1**	**2,13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penataan Organisasi**	100%	1.377.500
	8	1	1	2,13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	3 Dok	1.377.500
	8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Rasio masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan**	0,08%	2.943.479.000
	8	**1**	**2**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan KarakterKebangsaan**	**Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan yang terlaksana**	50%	2.943.479.000
	8	1	2	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang/peserta yang faham terhadap materi yang disampaikan pada kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	232 peserta	2.940.129.000
	8	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	3 lap	3.350.000

	8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUIPENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik**	0,23%	1.463.475.800
	8	**1**	**3**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase pembinaan politik dari jumlah rasio yang diinginkan**	10,49%	1.463.475.800
	8	1	3	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan berdasarkan proposal yang memenuhi persyaratan administrasi	100%	1.160.851.000
	8	1	3	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan Jambore Partai Politik. Jumlah orang/peserta yang memahami materi saat mengikuti Forum Diskusi Politik. Jumlah peserta sosialisasi pemilih yang memahami materi sosialisasi yang disampaikan	0 Kegiatan 270 Orang 486 Peserta	185.625.500

	8	1	3	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan kegiatan pendataan perkembangan situasi politik di Kabupaten	4 lap	116.999.300
	8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase peningkatan Inventarisasi dan pembinaan Ormas**	14%	159.587.100
	8	**1**	**4**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana**	60%	159.587.100
	8	1	4	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas Yang diawasi Jumlah pengurus ormas yang memahami materi saat mengikuti pembinaan/Sosialisasi	130 Ormas 288 Orang	159.587.100
	8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana**	100%	268.730.800
	8	**1**	**5**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase jumlah Kebijakan Teknik dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Sosial yang terlaksana**	60%	268.730.800

	8	1	5	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Jumlah fasilitasi kegiatan P4GN	2 Kegiatan 6 Kegiatan	268.730.800
	8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penanganan konflik sosial**	100%	489.824.500
	8	**1**	**6**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana**	50%	489.824.500
	8	1	6	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik di Daerah	6 keg	228.462.000
	8	1	6	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	10 lap	40.550.000
	8	1	6	2,01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kegiatan Forkopimda	10 keg	220.812.500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Banjar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

8. Satuan Polisi Pamong Praja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar.

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Banjar Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Banjar.

Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada. Berdasarkan landasan diatas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Banjar ini dapat berhasil.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar disusun dengan berpedoman pada landasan hukum, sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 140, tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 47, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4286)
2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 12);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015–2019;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri diKabupaten/Kota;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Satpol PP
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis opersional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan

Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

31) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
32) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4)
33) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, Lembar Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Nomor Registrasi 121 Tahun 2016;
34) Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
35) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021)
36) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan progam dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2022.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah serta menjadi tolak ukur dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk memastikan pencapaian target tahuan Renstra SKPD dan RPJMD di Tahun 2022
6. Sebagai instrument akuntabilitas di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan laporan Kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berbagai kebijakan dan upaya yang akan dilakukan pemerintah dan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diharapkan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target, oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjar dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Adapun review hasil evaluasi kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2020, sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2020 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2021 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan APBD tahun 2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2020 dan capaian Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2020 jumlah program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian pada setiap sasaran terdiri dari 10 program dan 36 kegiatan. Hal ini selaras dengan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar untuk Tahun 2020. Dalam tahun anggaran 2020 realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 13,189,417,485,- atau serapan anggaran sebesar 82,08% dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 6.135.133.401,- (46,52% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp. 7,054,284,084,- (53,48% dari total realisasi). Realisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar Rp. 1,483,797,087,- (81,82% dari total anggaran yang dilokasikan untuk proram utama sebesar Rp. 1,813,513,000,-) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung progam pendukung sebesar Rp. 5,570,486,997,- (95,87% total anggaran yang dilokasikan untuk proram pendukung sebesar Rp. 5,810,402,325,-), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.135.133.401,- (72.65% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 8,444,805,876,-).

Dari sisi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar pada tahun 2020 memiliki 3 sasaran strategis dengan 3 indikator utama dimana sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan dari 3 sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Banjar pencapaian indicator utama (IKU) rata-rata nilai capaian ditahun 2020 sudah menunjukkan progres Sangat Tinggi adalah 121.04% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti Berhasil, dengan uraian pencapaian program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis, adapun untuk sasaran pertama dengan indikator persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum didukung oleh 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan didalamnya dimana rata-rata nilai untuk capaian programnya adalah 100% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti Berhasil, dan rata-rata nilai untuk capaian kegiatannya adalah 75% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti Cukup Berhasil. Untuk sasaran strategis yang kedua dengan indikator meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman didukung oleh 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan didalamnya dimana rata-rata nilai untuk capaian programnya adalah 156.33% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti

Berhasil, dan rata-rata nilai untuk capaian kegiatannya adalah 92.72% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti Cukup Berhasil dan untuk sasaran strategis yang ketiga dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh 3 (tiga) program utama dengan 10 (sepuluh) kegiatan didalamnya dan 4 (empat) program penunjang/rutin dengan 20 (dua puluh) kegiatan didalamnya yang mana pada program penunjang ini dilaksanakan oleh Satpol PP dan UPT Damkar dimana rata-rata nilai untuk capaian program utamannya adalah 96.40% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti Cukup Berhasil, dan rata-rata nilai untuk capaian kegiatannya adalah 100.38% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti Berhasil. Sedangkan rata-rata nilai capaian untuk program penunjang/rutin adalah 100.51% atau mendapat predikat Berhasil dan rata-rata nilai untuk capaian kegiatannya adalah 100% atau predikat kreteria penilaian realisasi kinerja masuk katagoti Berhasil. Dari 10 program dan 36 kegiatan jumlah realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi, yang telah memenuhi, yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut yaitu :

1. Untuk realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat 2 program yaitu Program Pencegahan Dini Bahaya dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sedangkan kegiatan terdapat 4 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Untuk realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; terdapat 4 program dan terdapat 11 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat 4 dan 1 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
    a) masih ada kegiatan yang mendukung pencapaian target program
    b) bagusnya koordinasi antara BPK swasta dengan UPT Damkar dalam penanganan bencana kebakaran secara cepat
    c) adanya pecencanaan dan pengelolaan aset yang baik
    d) masih ada anggaran dan penyelenggara untuk peningkatan kapasitas yang bersifat teknis
    e) tersedianya sarana prasana yang baik untuk pendukung peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    f) banyak desa yang sudah menganggarkan linmas desa sebagai aparat desa yang digaji dengan mengutamakan persyaratan standar pengikrutan personil linmas
    g) adanya himbauan terkait pemutusan rantai penyebaran virus corona/covid 19 untuk derdiam dirumah saja, hal ini menyebabkan rendahnya aktivitas masyarakat diluar yang rumah menyebabkan rendahnya tingkat pelanggaran dalam hal ini Perda

2. Faktor penghambat pencapaian kinerja :
    a) dikarenakan pandemik virus covid 19 maka tugas dan fungsi satpol pp kegiatannya difokuskan dalam hal penanganan covid 19
    b) dikarenakan sarana unit Damkar yang dimiliki UPT Damkar sangat terbatas serta belum ada peremajaan sapras yang ada
    c) terhambatnya pelaksanaan kegiatan dikarena semua personil dan staf pada Satpol PP dikerahkan untuk membantu penanganan Covid 19
    d) adanya pemotongan anggaran kegiatan terkait penanganan covid 19 dan pembatasan pelaksanaan oleh lembaga pelaksana diklat
    e) masih banyaknya personil linmas yang belum diberikan peningkatan pengetahuan atau pelatihan
    f) dikarenakan pandemik virus covid 19 maka tugas dan fungsi satpol pp kegiatannya difokuskan dalam hal penanganan covid 19
    g) adanya pemotongan anggaran kegiatan terkait penanganan covid 19 dan pembatasan pelaksanaan oleh lembaga pelaksana pelatihan serta masih lambatnya atau penyampaian tidak sesuai dengan agenda penyampaian data dukung dari bidang

bidang terkait

3. Tindak lanjut yang diaksanakan :
   a) memfokuskan pelaksanaan pada kegiatan penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama
   b) memfokuskan pelaksanaan pada kegiatan penyebarluasan informasi, sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat
   c) mempercepat proses kegiatan yang tertinggal akibat pelaksanaan covid dan dan dampak covid didaerah
   d) megevakuasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dengan pemetaan kembali kebutuhan prioritas skpd
   e) memfokuskan pelaksanaan pada kegiatan penyebarluasan informasi PERDA

Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun sebelumnya (n-2) dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
(Sesuai Tabel T-C.29 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05	1.05	02	1	31		Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal	Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan	100 persen	100	100	100	100			
1.05	1.05	02	1	31	02	Penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama	20 kali pelaksanaan pada 5 kecamatan	20	20	15	75			
1.05	1.05	02	2	33		Program Pencegahan Dini Bahaya	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggunglangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya	71 Persen	33.93	53	50.79	95.84			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05	1.05	02	2	33	02	Penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	750 Orang	225	250	180	72			
1.05	1.05	02	2	33	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	12 Dokumen	4	4	4	100			
1.05	1.05	02	2	34		Program Peningkatan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response rate time) penanggulangan bahaya kebakaran	33 Persen	31.03	32	65	203.13			
1.05	1.05	02	2	34	02	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	jumlah pengadaan sarpras pencegahan kebakaran yang terlaksanakan	14 Paket	8	2	2	100			
1.05	1.05	02	2	34	03	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara	74 Buah	26	26	23	88.46			
1.05	1.05	02	2	34	05	Peningkatan pelayanan penganggulangan bahaya kebakaran	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1095 shift piket	365	365	365	100			
1.05	1.05	02	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100	100	100	100			
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05	1.05	02	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelayanan Kebersihan Kantor	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	5 tahun	2	1	1	100			
1.05	1.05	02	1	01	19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	60 bulan	24	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100	100	100	100			
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05	1.05	02	1	02	03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran kinerja dinas satpol pp	35 buah	26	9	9	100			
1.05	1.05	02	1	02	05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	23 buah	2	4	4	100			
1.05	1.05	02	1	02	06	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	27 buah	22	32	32	100			
1.05	1.05	02	1	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	60 bulan	12	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	60 bulan	12	12	12	100			
1.05	1.05	02	1	02	42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala	60 bulan		12	12	100			
1.05	1.05	02	1	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase anggota Satpol PP Kabupaten Banjar yang telah mengikuti Diklat Teknis Satpol PP	40 persen	23.08	0	0				
1.05	1.05	02	1	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kesemaptaan dan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	549 orang	183	3	2	66.67			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05	1.05	02	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip Pol PP	74 Skor	71.72	74	75.22	101.65			
1.05	1.05	02	1	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	4	4	4	100			
1.05	1.05	02	1	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan asset/BMD semesteran	3 dokumen	1	1	1	100			
1.05	1.05	02	1	06	05	Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan Kerja SKPD	27 dokumen	9	9	9	100			
1.05	1.05	02	1	06	07	Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhalap layanan POLPP	3 laporan	1	1	1	100			
1.05	1.05	02	1	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah satuan linmas per RT	2.74 angka rasio	2.05	2.73	2.05	75.09			
1.05	1.05	02	1	15	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penyiapan tenaga satlinmas dalam membantu pengendali kenyamanan lingkungan	1200 personil linmas	395	384	384	100			
1.05	1.05	02	1	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah personil Satlinmas dalam pengendalian lingkungan terhadap pelaksanaan PILKADA	6080 personil	2080	600	600	100			
1.05	1.05	02	1	15	08	Pemutahiran Data anggota Linmas	Jumlah Dokumen data anggota linmas se Kabupaten Banjar yang termuktahirkan	3 dokumen	1	1	1	100			
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05	1.05	02	1	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 persen	99.5	95	100	105.26			
1.05	1.05	02	1	16	01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan penindakan intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	280 kali pelaksanaan	80	80	83	103.75			
1.05	1.05	02	1	16	04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkaatan aparat pengetahuan Kepamongprajaan	539 orang	179	179	179	100			
1.05	1.05	02	1	16	05	Operasi Penertiban Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah operasi pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	37 operasi penertiban	0	2	2	100			
1.05	1.05	02	1	16	07	Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi Tim Sekretariat Bersama yang disepakati	12 laporan	4	4	4	100			
1.05	1.05	02	1	32		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase penyelesaian peraturan perundang undangan daerah	100 persen	98.05	95	100	105.26			
1.05	1.05	02	1	32	02	Penyidikan dan Penindakan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda	Laporan penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah lainnya	30 dokumen BAP	10	10	10	100			
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05	1.05	02	1	32	03	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Implementasi Produk Perundang-undangan Daerah	Laporan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap implementasi produk perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	36 dokumen kegiatan	12	12	12	100			
Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah															
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 Persen					100 Persen	50	50
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen			100		100 Persen	55	55
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	27 Dokumen			18		2 Dokumen	1.5	72.22
1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah murni dan perubahan	2 Dokumen					2 Dokumen	1	50
1	05	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	1	50
1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			8		4 Laporan	2	83
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen			100		100 Persen	50	50
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun					1 Tahun	0.5	50
1	05	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	12 Bulan					12 Bulan	6	50
1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Laporan			2		1 Laporan	0	66.67
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penunjang tugas dan fungsi SKPD	100 Persen			100		100 Persen	33.33	33.33
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	960 Stel			182		175 Stel	0	18.96
1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24 Orang			4		12 Orang	4	33.33
1	05	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	549 Orang			185		2 Orang	0	33.70
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			100		100 Persen	50	50
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Bulan			36		12 Bulan	6	84
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan					12 Bulan	6	50
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 Bulan			36		12 Bulan	6	70
1	05	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasitasinya kunjungan tamu	12 Bulan					12 Bulan	6	50
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	5 Tahun			4		1 Tahun	0.5	90
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen			100		100 Persen	50	50
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan			36		12 Bulan	6	70
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pendukung admintrasi dan teknis perkantoran	60 Bulan			36		12 Bulan	6	70
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen			100		100 Persen	50	50
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	60 Bulan			36		12 Bulan	6	70
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	60 Bulan			36		12 Bulan	6	70
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan					12 Bulan	6	50
1	05	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60 Bulan			36		12 Bulan	6	70
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100 Persen			100		100 Persen	100	100
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlayaninya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	100 Persen			100		100 Persen	100	100
1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	36 Bulan			24		12 Bulan	6	83.33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	02	2	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah operasi pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	37 operasi penertiban			2		6 operasi penertiban	2	10.81
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen data anggota linmas se Kabupaten Banjar yang termuktahirkan	3 Dokumen			2		1 Dokumen	0.5	83.33
							Jumlah penyiapan tenaga satlinmas dalam membantu pengendali kenyamanan lingkungan	1200 orang			779		720 orang	330	92.42
1	05	02	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkaatan aparat pengetahuan Kepamongprajaan	539 orang			358		175 orang	110	86.83
1	05	02	2	01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 Dokumen					1 Dokumen	0.25	25
1	05	02	2	01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Terpunuhinya layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1 Tahun					1 Tahun	0	0
1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penyelesaian peraturan perundang undangan daerah	100 Persen			100		100 Persen	100	100
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	02	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi PERDA dan Peraturan Bupati	20 Perda					20 Perda	8	40
1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap implementasi produk perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	36 Laporan			24		12 Laporan	6	83.33
1	05	02	2	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah lainnya	30 Laporan			20		5 Laporan	2	73.33
1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respons rate time) penanggulangan bahaya kebakaran	35 Persen			65		35 Persen	68.75	196.43
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam daerah kabupaten	100 Persen					100 Persen	100	100
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1095 shift piket			730		365 shift piket	181	83.20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	

								Perangkat Daerah) Tahun 2021	dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12 Bulan					12 Bulan	6	50
1	05	04	2	02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara	74 Buah			49		19 Buah	9	78.38
1	05	04	2	03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang terinvestigasi	95 Persen			93.75		95 Persen	93.75	98.68
1	05	04	2	03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	12 Laporan			8		4 Laporan	2	83.33
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya	71 Persen			50.79		71 Persen	58.73	82.72
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan kapasitas dan keterampilan BPK Swasta dalam pencegahan kebakaran	45 Unit BPK			19		45 Unit BPK	17	80

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar mengacu pada capaian pelayanan SKPD berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk capaian indikator IKK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sedangkan untuk capaian indikator SPM mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Selanjutnya, untuk capaian indikator IKU mengacu pada Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dari indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan regulasi yang ada, terdapat pokok-pokok tugas dan fungsi yang merupakan kunci/prioritas pelaksanaanya meliputi :

1. Kejadian politik praktis massa/demonstrasi;
2. Pengamanan pejabat dan aset daerah;
3. Penanganan kasus pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Data dan informasi trantibum;
5. Penyelenggaraan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dan;
6. Pembentukan dan pemberdayaan PPNS.

Prioritas pelaksanaan tersebut di atas, berkolerasi dengan dinamisasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat Kabupaten Banjar melalui koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota, Satlinmas, Dinas/ Instansi terkait, Lembaga/Organisasi masyarakat, Dunia Pendidikan, TNI/Polri yang meliputi permasalahan-permasalahan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berikut matrik pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja seperti tercantum pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase penurunan angka pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada		1.6%	4%	6%	10.50%	100%	1475%	100%	100%	realisasi capaian 2021 merupakan capain sd triwulan II
2	Persentase Satlinmas Aktif			53	58	61	72	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)											
4	Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) yang dapat diselesaikan		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Rasio Jumlah Satuan Linmas	10 orang per desa/kelurahan		10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13

8	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kebakaran yang terlayani	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga negara. Daerah yang tentram, tertib, dan terlindungi merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas kehidupan warga. Sebagai salah satu Kabupaten memiliki permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengganggu trantibum linmas dan pelanggaran perda/perkada, antara lain :

Tabel 2.3
(Sesuai Tabel T-B.35 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang kurang efektif
	2. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang harus dipatuhi	Minimnya penyebaran informasi dan penanganan kasus pelanggaran Perda/Perkada
		Optimalnya penyelenggaraan penegakan perda dan perkada
		Minimnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
	3. Belum tercapainya aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten	Tercapainya kapasitas pemahaman sikap dan tugas
		Kurang sepadannya jumlah personil Satpol PP dengan cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi
Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
2. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam linmas	1. Minimnya jumlah Satlinmas yang terbina	Meningkatnya dukungan satlinmas dalam kegiatan
		Meningkatnya kapasitas dan keterampilan anggota Satlinmas
		Meningkatnya pemutahiran data Satlinmas Sekabupaten Banjar
3. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan penyelamatan dan	1. Mempertahankan respon time pertolongan kebakaran pada masyarakat 15 menit	Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran belum optimal

evakuasi korban Kebakaran		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran belum maksimal
		Kondisi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri banyak tidak standar lagi
		Pelayanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten belum optimal
	2. Belum optimalnya kenyamanan dan keamanan pada bangunan dan gedung milik pemerintah dari bahaya kebakaran	Rendahnya pengawasan potensi kebakaran dalam upaya pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten
	3. Belum optimalnya investigasi Kejadian Kebakaran	Minimnya sarana dan prasana serta tenaga ahli investigasi Kejadian Kebakaran
	4. Partisipasi masyarakat dalam upaya terhadap potensi terjadinya kebakaran dan dalam upaya pencegahan serta penyelamatan melalui pengembangan dan pemberdayaan satlaka belum optimal	Rendahnya tindakan dan penyebaran informasi kemasyarakat terkait pencegahan Kebakaran
		Kurangnya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
4. Belum terselengaranya dengan baik urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah belum berkualitas	Kurangnya koordinasi dan evaluasi kinerja
	2. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah belum berkualitas	Kurangnya koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan
	3. Rendahnya kopetensi Anggota Satpol PP	Minimnya peningkatan kapasitas pemahaman sikap dan tugas
	4. Terselenggaranya kegiatan kantor yang belum efektif dan belum sesuai kebutuhan	Kurangnya koordinasi dan terencananya penyelenggaraan kegiatan kantor
	5. Rendahnya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya terencananya kebutuhan sarana dan prasarana
	6. Kurangnya terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya terencananya pemeliharaan sarana dan prasarana
	7. MInimnya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Kurangnya terencananya kebutuhan jasa penunjang pelayanan umum kantor

Dari hasil pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat maka teridentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah serta faktor internal dan eksternal yang mempengahui adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standart yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SATPOL PP
			Internal	Eksternal	
1. Penegakan Produk Hukum Daerah	Masih banyak ketidakpatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja • Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota	• Minimnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah • Belum adanya perda yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara khusus	• Kurangnya ketaatan dan kepedulian masyarakat terhadap Perda atau produk perundang-undangan • Belum meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas	1. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas	Masih adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah	• Kurang sepadannya jumlah personil Satpol PP dengan cakupan luas wilayah kerjadan cakupan demografi • Minimnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	• Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten • Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang mengakibatnya kurang meratanya pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada daerah yang teridentifikasi titik titik rawan gangguan trantibum • belum optimalnya peran serta aparatur desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan perlindungan masyarakat	2. Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kurangnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja
Aspek Kajian		Standart yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		

	Capaian/ Kondisi saat ini		Internal	Eksternal	Permasalahan Pelayanan SATPOL PP
Profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja	Masih Rendahnya Mutu kwalitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota	• Belum optimalnya penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Masih belum optimalnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja • Minimnya PNS yang memiliki sertifikat teknis	• Persyaratan mengikuti Diklat yang tidak bisa terpenuhi baik terkait kepangkatan dan usia • Kebijakan penentuan anggaran APBD	3. Belum optimalnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten
Sarana dan Prasarana	Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta ketidaklayakan sarana dan prasarana yang dimiliki	Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis opersional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja	Minimnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kebijakan penentuan anggaran APBD	4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana minimal penunjang tugas satpol PP
Penanganan terhadap potensi terjadinya kebakaran dan dalam upaya pencegahan serta penyelamatan	Masih Rendahnya Mutu kwalitas dan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki dalam tindakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan dan evakuasi korban Kebakaran	Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standat Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah	• Kurang sepadannya jumlah personil Damkar dengan cakupan luas wilayah kerjadan cakupan demografi • Minimnya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang dimiliki • Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kebakaran dan dalam upaya pencegahan serta penyelamatan 2. Kebijakan penentuan anggaran APBD	5. Belum optimalnya tindakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan dan evakuasi korban Kebakaran 6. Belum optimalnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banjar tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 5 (lima) “Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis“

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari Misi tersebut terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari Misi

Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk mengawal agar Visi Kabupaten Banjar dapat tercapai dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung misi kelima. Beberapa faktor berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, di antaranya :

Tabel 2.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

NO	Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	pendorong
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*
1	Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis	Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kurangnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja	Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Banjar	Dukungan aparat di luar Satpol PP Adanya peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
NO	**Misi dan Program KDH**	**Permasalahan pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**pendorong**

	dan wakil KDH terpilih			
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*
			Menjamurnya Ruang Publik. Salah satu capaian penting dalam pemerintahan adalah pembangunan ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik ini menimbulkan keramaian sehingga berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada agar kinerja tetap optimal
		Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan yang ada didaerah Adanya perubahan nilai budaya masyarakat karena adanya perubahan besar akibat dampak Covid-19	Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas Adanya penyebaran informasi dan sosialisasi terhadap keberadaan Perda yang bersangsi
		Belum optimalnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	Masih belum optimalnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
		Belum optimalnya tindakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan dan evakuasi korban Kebakaran	Rendahnya tindakan dan penyebaran informasi kemasyarakat terkait pencegahan Kebakaran	Adanya penyebaran informasi dan sosialisasi terkait pencegahan Kebakaran
			Belum optimalnya tindakan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Adanya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

			dalam Daerah Kabupaten	
			Belum optimalnya tindakan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Adanya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan
			Minimnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang dimiliki	Adanya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan

2.3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Atas berbagai gambaran situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Banjar, serta keterkaitan dengan berbagai dokumen yang terkait seperti yang telah dijabarkan pada bagian atas dari bab ini, maka bisa diketahui beberapa isu strategis terkait pelaksanaan ketugasan pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Banjar pada tahun 2021-2026, isu strategis yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kurangnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja
2. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten
4. Peningkatan tindakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan dan evakuasi korban Kebakaran
5. Peningkatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

2.4. Review Terhadap Awal RKPD 2022

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Banjar dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten. Berikut Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.7

(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Indek**	**82.5**	**6,490,178,430**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Indek**	**82.5**	14,027,297,481	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	**30,906,200**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	35,906,400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	6,481,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	6,481,800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	2	9,064,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,064,600	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,480,700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,480,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	23	9,879,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	23	21,879,300	

	Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	**114,900,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	8,094,563,501	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	7,980,163,501	

No	**Rancangan Awal RKPD**						**Hasil Analisis Kebutuhan**						**Catatan Penting**
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**	**12**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	113,100,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	112,600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Aset BMD SKPD	Laporan	2	1,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Aset BMD SKPD	Laporan	2	1,800,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Anggota Satpol PP yang lulus uji kopetensi Satpol PP**	**Persen**	**17.65**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Anggota Satpol PP yang lulus uji kopetensi Satpol PP**	**Persen**	**17.65**	21,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	185	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	185	21,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	**970,256,600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	401,792,780	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8,465,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5,465,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Buah**	15	65,745,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Buah**	15	52,139,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	**Buah**	15	21,529,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	**Buah**	15		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	59,156,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	59,156,100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	37,211,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	49,138,700	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	Bulan	12	1,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	Bulan	12	1,500,000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tamu yang datang yang terfasilitasi dalam 1 tahun	Orang	96	776,650,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tamu yang datang yang terfasilitasi dalam 1 tahun	Orang	96	234,393,980	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**7,898,400**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	14,342,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Mebel	Buah	15	7,898,400	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Mebel	Buah	15	14,342,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**4,880,367,500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	4,995,707,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	75,347,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	75,347,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pendukung admintrasi dan teknis perkantoran	Bulan	12	4,805,020,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pendukung admintrasi dan teknis perkantoran	Bulan	12	4,920,360,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Cakupan Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**485,849,730**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	463,985,300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	Bulan	12	36,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	Bulan	12	35,515,300	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						atau Kendaraan Dinas Jabatan					

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah masa pemenuhan kebutuhan penggunaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	372,539,730	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah masa pemenuhan kebutuhan penggunaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	372,450,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara per tahun	Buah	45	70,110,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara per tahun	Buah	45	48,830,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan pemeliharaan/rehap Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan pemeliharaan/rehap Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	7,190,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan pemeliharaan/rehap Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	7,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan pemeliharaan/rehap Sarana dan Prasarana Pendukung	Bulan	12		

	atau Bangunan Lainnya								Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas**	**Persen**	**100**	**707,870,970**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas**	**Persen**	**100**	1,232,345,970	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) yang dapat diselesaikan**	**Persen**	**100**	**476,436,570**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) yang dapat diselesaikan**	**Persen**	**100**	1,037,936,570	
			Rasio Jumlah Satuan Linmas	**orang per desa/ kelurahan**	**10**				**Rasio Jumlah Satuan Linmas**	**orang per desa/ kelurahan**	**10**		

No	**Rancangan Awal RKPD**						**Hasil Analisis Kebutuhan**						**Catatan Penting**
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**	**12**
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persen**	**100**				**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali	1460	486,400	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali	1460	490,986,400	

	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						Pengamanan, dan Pengawalan					
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Penindakan dan Penertiban atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Kali	10	231,858,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Penindakan dan Penertiban atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Kali	10	271,858,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Gabungan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Kali	5	0	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Gabungan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Kali	5	141,515,200	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengerahan Satuan Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	780	101,515,200	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengerahan Satuan Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	780		
		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta Satlimas yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	250			Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta Satlimas yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	250		

No	**Rancangan Awal RKPD**					**Hasil Analisis Kebutuhan**					**Catatan Penting**
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pemuktahuran data satlinmas sekabupaten banjar	Dokumen	1			Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pemuktahuran data satlinmas sekabupaten banjar	Dokumen	1		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penungjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Jenis Pembekalan	6	128,377,800	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penungjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Jenis Pembekalan	6	119,377,800	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diterbitkan	SOP	1	851,000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diterbitkan	SOP	1	851,000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlayaninya masyarakat terhadap Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tahun	1	13,348,170	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlayaninya masyarakat terhadap Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tahun	1	13,348,170	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati	**Persen**	**100**	**231,434,400**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati	**Persen**	**100**	154,409,400	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disosialisasikan	Prohuda	10	17,903,100	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disosialisasikan	Prohuda	10	17,903,100	

	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan pengawasan	Prohuda	15	450,300	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan pengawasan	Prohuda	15	450,300	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penindakan pelanggaran Pro Justicia	Kali	35	213,081,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penindakan pelanggaran Pro Justicia	Kali	35	136,056,000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**Persentase peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**Persen**	**30.77**	**-**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Persentase peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**Persen**	**30.77**	40,000,000	
No	**Rancangan Awal RKPD**						**Hasil Analisis Kebutuhan**						**Catatan Penting**
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**	**12**
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Polisi Pamong Praja yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier sebagai PPNS	Orang	3	0	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Polisi Pamong Praja yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier sebagai PPNS	Orang	3	40,000,000	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kebakaran yang terlayani**	**Persen**	**100**	**323,539,600**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kebakaran yang terlayani**	**Persen**	**100**	271,029,600	

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	**Persen**	**83**	**72,000,000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	**Persen**	**83**	253,500,000	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Kali	129	0	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Kali	129	6,500,000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pelayanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Shift Piket	365	72,000,000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pelayanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Shift Piket	365	222,000,000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Shift Piket	365	0	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Shift Piket	365	25,000,000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase bangunan dan gedung perkantoran milik pemerintah yang peralatan proteksi kebakarannya dinalai layak	**Persen**	**67**	**196,260,000**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		Persentase bangunan dan gedung perkantoran milik pemerintah yang peralatan proteksi kebakarannya dinalai layak	**Persen**	**67**		
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan dan gedung milik pemerintah yang dinilai sarana prasarana proteksi kebakarannya	Buah	15	196,260,000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan dan gedung milik pemerintah yang dinilai sarana prasarana proteksi kebakarannya	Buah	15		

No	**Rancangan Awal RKPD**					**Hasil Analisis Kebutuhan**					**Catatan Penting**
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase penyelesaian kasus Kejadian Kebakaran	**Persen**	**100**	**37,750,000**	**Investigasi Kejadian Kebakaran**		Persentase penyelesaian kasus Kejadian Kebakaran	**Persen**	**100**		
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Bulan	12	37,750,000	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Bulan	12		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang ditangani oleh masyarakat (swasta)**	**Persen**	**75**	**17,529,600**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang ditangani oleh masyarakat (swasta)**	**Persen**	**75**	17,529,600	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	150	17,529,600	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	150	17,529,600	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah berada dalam wilayah koordinasi ketugasan Kementrian Dalam Negeri, sehingga salah satu acuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Banjar adalah Renstra Kemendagri.

Dari 3 tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 terdapat 2 tujuan yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu (T1) Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan kesatuan bangsa dan (T2) Peningkatan Kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Selanjutnya dari (T1) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu (T1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi :

1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Untuk (T2) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif , professional, proaktif dan inovatif (SS7) dengan salah satu indikator sasarannya adalah Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

Keterkaitan antara sasaran Renstra Kemendagri dengan faktor pendorong/penghambat Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar digambarkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024	Indikator Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024	Masalah Pelayanan pada Satpol PP Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4)	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik" 2. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Rendahnya Kesadaran dalam menjaga trantibum dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta peran aktif Satlinmas dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kurangnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja 2. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3. Belum optimalnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	1. Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas 2. Dukungan aparat di luar Satpol PP 3. Adanya peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Adanya tokoh masyarakat yang dipercaya/diikuti 5. Rasio Anggota linmas di Kabupaten Banjar sudah melebihi 1 linmas : 1 RT 6. Adanya peningkatan kapasitas personil berupa diklat, pelatihan ketrampilan teknis, bimtek baik Satpol PP maupun Damkar

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar 2021 - 2026 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banjar tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 5 (lima) "Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis"

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari Misi tersebut terperinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari Misi

Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tujuan pelayanan yang ditetapkan oleh Satpol PP Kabupaten Banjar dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah mengacu pada tujuan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Penjabaran tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 berdasarkan misi 5 (lima) Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman dimasyarakat		Rasio pelangaran perda dan trantibum	2.19	2.01	1.92	1.84	1.75	1.67	1.67

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	Persentase penurunan angka pelanggaran perda dan perkada	1.6	6	8.2	10.5	12.9	15.5	15.5
			Persentase Satlinmas Aktif	53	62	72	81	91	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.01	84	85	86	87	87.5	87.5

Tabel 3.4

Formulasi Penghitungan Indikator tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Fenghitungan
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman dimasyarakat		Rasio pelangaran perda dan trantibum	Pelanggaran Perda dan trantibum dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas dikali Per 1.000 penduduk
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	Persentase penurunan angka pelanggaran perda dan perkada	(Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum pada tahun n dikurang Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2020 (data awal)) dibagi Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2020 (data awal) dikali 100%
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Fenghitungan
			Persentase Satlinmas Aktif	Jumlah Satlinmas Aktif dibagi jumlah Satlinmas yang terdata sekabupaten Banjar kali 100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) = 76,61 – 88,30 MUTU PELAYANAN = B KINERJA UNIT PELAYANAN = BAIK

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan beserta uraian indikator output kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2022 menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Banjar berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026. Untuk itu, berikut disajikan program dan kegiatan beserta uraian indikator output kegiatan, pagu anggaran, lokasi dalam Matrik Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
(Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas		Persen	100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen	100	1,281,639,809
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) yang dapat diselesaikan		Persen	100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen	100	498,813,809

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-10
						Rasio Jumlah Satuan Linmas		orang per desa/ kelurahan	10	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		orang per desa/ kelurahan	10	244,976,000
						Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen	100	262,850,000
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kali	1460	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kali	1460	316,433,809
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Operasi Penindakan dan Penertiban atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kali	10	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kali	12	100,430,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-10
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Gabungan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kali	5	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kali	5	50,000,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengerahan Satuan Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	780	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Orang	780	136,000,000
						Jumlah peserta Satlimas yang mengikuti peningkatan kapasitas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orang	250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Orang	250	93,500,000
						Jumlah Dokumen pemuktahuran data satlinmas sekabupaten banjar	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	1	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Dokumen	1	15,476,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-10
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Jenis kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penungjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jenis Pembekalan	6	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jenis Pembekalan	6	100,350,000
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diterbitkan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SOP	1	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		SOP	1	1,350,000
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Terlayaninya masyarakat terhadap Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tahun	1	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tahun	1	15,000,000
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati		Persen	100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen	100	235,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

					Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-10
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disosialisasikan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prohuda	10	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prohuda	10	15,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan pengawasan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prohuda	15	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prohuda	15	100,000,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penindakan pelanggaran Pro Justicia	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kali	35	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kali	35	120,000,000
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Persen	30.77	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen	46.15	40,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10

1	**05**	**02**	**2.03**	**01**	**Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier sebagai PPNS**	**Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Orang**	**3**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**		**Orang**	**1**	**40,000,000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana kerja dan pendanaan Satpol PP Kab. Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukan pada table 4.1 yang mana berisi program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program perangkat daerah/program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksankan oleh Satpol PP Kabupaten Banjar ditahun 2022 adalah sebanyak 2 program dan didukung 10 kegiatan dengan 31 sub kegiatan didalamnya dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 14,384,218,159,- sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)					Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
-1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14,384,218,159		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	12,289,312,189		
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan		100	Persen	35,906,400		
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Dokumen	6,481,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Dokumen	5,064,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran Murni dan Perubahan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Dokumen	2,480,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23	Laporan	21,879,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan		100	Persen	7,687,045,409		
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Tahun	7,572,645,409	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)					Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
-1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	112,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Aset BMD SKPD	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Laporan	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Anggota Satpol PP yang lulus uji kopetensi Satpol PP		17.65	Persen	21,000,000		
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Orang	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan		100	Persen	413,766,080		
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	2,979,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	Buah	52,139,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	40,098,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	32,654,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang datang yang terfasilitasi dalam 1 tahun	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96	Orang	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)					Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
-1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	284,393,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	14,342,000		
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	Buah	14,342,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100	Persen	3,653,267,000		

1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	51,177,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pendukung admintrasi dan teknis perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	3,602,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100	Persen	463,985,300		
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	35,515,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah masa pemenuhan kebutuhan penggunaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	372,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara per tahun	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45	Buah	48,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan masa kebutuhan pemeliharaan/rehap Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bulan	7,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8

1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas		100	Persen	2,094,905,970		
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) yang dapat diselesaikan		100	Persen	1,503,603,570		
						Rasio Jumlah Satuan Linmas		10	orang per desa/ kelurahan	205,515,200		
						Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	Persen	119,377,800		
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	740	Kali	1,217,546,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Operasi Penindakan dan Penertiban atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	Kali	271,858,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengerahan Satuan Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	780	Orang	125,515,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Jumlah peserta Satlimas yang mengikuti peningkatan kapasitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250	Orang	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

						Jumlah Dokumen pemuktahuran data satlinmas sekabupaten banjar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Jenis kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penungjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	Jenis Pembekalan	119,377,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
-1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diterbitkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	SOP	851,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Terlayaninya masyarakat terhadap Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Tahun	13,348,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati		100	Persen	226,409,400		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disosialisasikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	Prohuda	17,903,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	Prohuda	29,250,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	Kali	179,256,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		30.77	Persen	40,000,000		
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Karier sebagai PPNS		3	Orang	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2022.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ini harus dijabarkan lebih lanjut kedalam dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) Kabupaten Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Dalam Renja Satpol PP Kabupaten Banjar tahun 2022 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkada serta perlindungan masyarakat Kabupaten Banjar.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disusun.

9. Dinas Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan HidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini atas dasar penyesuaian kembali kebutuhan program dan kegiatan. Telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan diwujudkan Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Rencana Kerja (RENJA) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Banjar dapat digunakan sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang sosial Kabupaten Banjar tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Dareah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Resntra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya yang mengatur lebih lanjut bahwa penyusunan RENJA Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
5. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia yang tersedia.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banjar;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Sosial untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022 dan;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Banjar

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 terhadap capaian Renstra, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja tahun berjalan.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi realisasinya pada tahun 2020.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
    1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
        a. Penyediaan jasa surat
        b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
        c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
        d. Penyediaan alat tulis kantor
        e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
        f. Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor
        g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
        h. Penyediaan makanan dan minuman
        i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan
        j. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran
    2) Program Peningkatan Sarana dan Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
        a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
        b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
        c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
        d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
    3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
        a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangn-Undangan
    4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
        a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
        b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
        c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
        d. Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan
        e. Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD

5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
   b. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
   c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
   d. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
   e. Penyediaan bantuan sosial kebutuhan pokok/dasar bagi PMKS
6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hokum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dana anak
   b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
   c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
   d. Pengelolaan dan peningkatan kualitas data dan informasi
   e. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
7) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Eks Trauma dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
   b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
   b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
   b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
   b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Peningkatan peran akitf masyarakat dan dunia usaha
   b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
   c. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
   d. Pemeliharaan taman makam pahlawan

3. FaKtor-faktor penyebab tidak tercapainya/tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, yaitu :
   a. Tidak tersedianya data PMKS/PPKS yang update berdasarkan hasil pengolahan data (pendataan, verifikasi dan validasi) yang dilaksanakan secara regular/berkala, minimal setiap tahun

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial
c. Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representative (shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PMKS/PPKS ex. Rumah singgah
d. Kurangnya informasi kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial, adalah sebagai berikut :
   a. Rendahnya fasilitasi program keluarga harapan
   b. Rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas
   c. Rendahnya koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
   d. Rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan)
   e. Rendahnya identifikasi dan pembinaan anak jalanan (anjal) dan/atau gelandangan pengemis (gepeng)
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faKtor-faktor penyebab tersebut, yaitu :
   a. Melaksanakan kegiatan pendataan PMKS

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Dinas Sosial s/d Tahun 2020 Kabupaten Banjar

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja pada Tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran Renja pada Tahun berjalannya dievaluasi (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100 Persen**	**300 Persen**	**300**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpeliharanya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**100**	12 Bulan	36 Bulan	300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	9 Unit	56 Unit	21 Unit	21 Unit	100	9 Unit	86 Unit	955

	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	43 Orang	36 Orang	42 Orang	42 Orang	100	43 Orang	121 Orang	281
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100 Persen**	**300 Persen**	**300**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Buah	0 Buah	1 Buah	1 Buah	100	0 Buah	1 Buah	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Mobil Jabatan	3 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100	1 Buah	3 Buah	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	10 Buah	10 Buah	10 Buah	10 Buah	100	10 Buah	30 Buah	300
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	300 Persen	300
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terciptanya Ruang Kerja yang Representatif	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	12 Bulan	0
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**0 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**0 Persen**	**200 Persen**	**0**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	12 Bulan	0
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100 Persen**	**300 Persen**	**300**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya Laporan Capaian Kinerja	11 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	11 Laporan	19 Laporan	172
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	300

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	300
	Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Tersedianya RENSTRA dan RENJA SKPD	7 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	7 Laporan	11 Laporan	157
	Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	300
5	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Sosial**	**67,38 Persen**	**56,10 Persen**	**53,64 Persen**	**66,9 Persen**	**124,72**	**67,38 Persen**	**190,38 Persen**	**282**
	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mandiri	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	60 Orang	100 Orang	166
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Ketrampilan dan Bantuan Sosial	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	24 Bulan	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terbantu	12 Rumah	30 Rumah	0 Rumah	0 Rumah	0	12 Rumah	42 Rumah	350
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah WRSE, PSBR dan PSBW yang Mendapatkan Ketrampilan	50 Orang	55 Orang	40 Orang	27 Orang	67,5	50 Orang	145 Orang	290
	Penyediaan Bantuan Sosial Kabutuhan Pokok/Dasar bagi PMKS	Jumlah Kebutuhan Pokok PMKS yang Terpenuhi	0 Paket	0 Paket	1.700 Paket	1.700 Paket	100	0 Paket	2.400 Paket	0
6	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Persentase PMKS Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**	**70 Persen**	**2,34 Persen**	**60 Persen**	**92,2 Persen**	**153,66**	**70 Persen**	**164,54 Persen**	**235**
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Persentase Pengangkatan Anak/Adopsi yang Terlaksana	0 Orang	3 Orang	60 Orang	51 Orang	85	0 Orang	54 Orang	0
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani Melalui SLRT dan Rumah Singgah	3.000 Jiwa	3.000 Jiwa	3.000 Jiwa	3.000 Jiwa	100	3.000 Jiwa	9.000 Jiwa	300
	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang	Persentase Kebutuhan Masalah-Masalah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	300 Persen	300

	Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Strategis yang Terpenuhi								
	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	Persentase Data Kemiskinan yang Valid	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	300 Persen	300
7	**Program Pembinaan Anak Terlantar**	**Persentase Anak/Orang Terlantar Luar Panti yang Dibina**	**36,30 Persen**	**0 Persen**	**32,67 Persen**	**33,3 Persen**	**101,92**	**36,30 Persen**	**134,59 Persen**	**370**
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Anak Terlantar yang Terbantu dan Terampil	30 Orang	0 Orang	30 Orang	10 Orang	33,33	30 Orang	40 Orang	133
8	**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**	**Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang Mendapatkan Pembinaan**	**35,79 Persen**	**8,96 Persen**	**32,21 Persen**	**32,21 Persen**	**100**	**35,79 Persen**	**76,96 Persen**	**215**
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma yang Terampil dan Mandiri	75 Orang	40 Orang	15 Orang	15 Orang	100	75 Orang	130 Orang	173
	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah Bantuan Penyandang Disabiltas dan Eks Trauma	75 Orang	20 Orang	13 Orang	13 Orang	100	75 Orang	108 Orang	144
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Bantuan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma yang Termonev	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
9	**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**	**Persentase Anak Terlantar Dalam Panti yang Terbina**	**36,76 Persen**	**12,74 Persen**	**33,09 Persen**	**33,09 Persen**	**100**	**36,76 Persen**	**82,59 Persen**	**224**
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	Jumlah Tenaga Pelatih dan Pendidik yang Berkualitas	30 Orang	0 Orang	25 Orang	25 Orang	100	30 Orang	55 Orang	183
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Panti yang Terayomi	7 Panti	7 Panti	7 Panti	7 Panti	100	7 Panti	21 Panti	300
10	**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**	**Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani**	**43,29 Persen**	**73,37 Persen**	**38,96 Persen**	**52,1 Persen**	**133,72**	**43,29 Persen**	**168,76 Persen**	**389**
	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial	75 Orang	75 Orang	75 Orang	50 Orang	66,66	75 Orang	200 Orang	266
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Termonitor	40 Orang	15 Orang	40 Orang	15 Orang	37,5	40 Orang	70 Orang	175

11	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Keluarga Miskin (PKH) yang Mendapatkan Bantuan**	**100 Persen**	**98,10 Persen**	**100 Persen**	**91,7 Persen**	**91,7**	**100 Persen**	**289,8**	**289**
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase Pelyanan Pendamping PKH	100 Persen	100 Persen	95 Persen	95 Persen	100	100 Persen	295 Persen	295
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase TKSK, Karang Taruna dan ORSOS yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	300 Persen	300
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah LVRI yang Tertangani	55 Orang	215 Orang	115 LVRI	115 LVRI	100	55 Orang	385 Orang	700
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawwan	Jumlah Makam Taman Pahlawan yang Terpelihara	0 Buah Taman Makam Pahlawan	1 Buah Taman Makam Pahlawan	2 Buah Taman Makam Pahlawan	2 Buah Taman Makam Pahlawan	100	0 Buah Taman Makam Pahlawan	3 Buah Taman Makam Pahlawan	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banjar

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan analisis pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA SKPD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	SPM/INDIKATOR KINERJA OUTCOME											
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			30	70	80	90	33,56	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			60	70	80	90	49,11	-	-	-	
	Persentase Penurunan PMKS			2,05	2,33	-	-	N/A	N/A	-	-	Pada tahun 2022 dan 2023

												tidak menjadi indikator lagi
1	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial			53,64	67,38	-	-	66,9	N/A	-	-	
2	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial			60	70	-	-	92,2	N/A	-	-	
3	Persentase Anak/Orang Terlantar Luar Panti yang Dibina			32,67	36,30	-	-	33,3	N/A	-	-	
4	Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang Mendapatkan Pembinaan			32,21	35,79	-	-	32,21	N/A	-	-	
5	Persentase Anak Terlantar Dalam Panti yang Terbina			33,09	36,76	-	-	33,09	N/A	-	-	
6	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani			38,96	43,29	-	-	52,1	N/A	-	-	
7	Persentase Keluarga Miskin (PKH) yang Mendapatkan Bantuan			100	100	-	-	91,7	N/A	-	-	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri					15	17	N/A	N/A	-	-	Pada tahun 2020 dan 2021 tidak menjadi

												indikator
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Terampil			-	-	35	60	N/A	N/A	-	-	
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			-	-	10	13	N/A	N/A	-	-	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			-	-	100	100	N/A	N/A	-	-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Asisten Pemerintahan (Asisten I), Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), dan Asisten Administrasi (Asisten III). dan Keputusan Bupati Banjar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan **Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/79/KUM/2017** Tentang Dinas Sosial Kabupaten Banjar, maka Dinas Sosial mempunyai **tugas** : *melaksanakan urusan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi Perlindungan dan Jaminan Sosial, rehabilitasi sosial, Penanganan Fakir Miskin serta Pemberdayaan Sosial.*

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka perkembangan dan permasalahan kesejahteraan sosial semakin banyak dan beraneka ragam bentuknya, sehingga perlu penanganan komprehensif serta berkelanjutan. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Banjar menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial ini dapat dimunculkan dengan 3 (tiga) strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabiltiasi Sosial
3. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial

Dari isu pokok tersebut, maka dapat dijabarkan ke dalam isu-isu strategis berdasarkan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran

Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran	**Permasalahan Pokok**
Belum optimalnya pembinaan penanggulangan masalah sosial	1. Rendahnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi 2. Rendahnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 3. Rendahnya bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial dan lansia 4. Rendahnya fasilitasi program keluarga harapan
Rendahnya kualitas manajemen	1. Rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas 2. Rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan dan gelandangan *psikotik* (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD

Dinas Sosial dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan wajib pelayanan dasar di bidang Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial, maka fungsi dan tugas Dinas Sosial terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Banjar

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisa					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja Program/Kegiatan**	**Target (%)**	**Kebutuhan Dana (000)**	**Catatan penting**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**6.182.808.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**8.935.317.430**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**40.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**37.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, Perubahan RENJA, DPA, Perubahan DPA, RKA, dan Perubahan RKA Tersedianya Dokumen RENJA, RENSTRA, LKPJ, LPPD dan LKJIP	15 Dokumen, 5 Laporan	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	17.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKAPerangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Terselesaikan Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Capaian Kinerja yang Terselesaikan Tersedianya Laporan Kinerja Bulanan	3 Dokumen, 8 Laporan, 12 Bulan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dokumen	10,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**947.610.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.870.249.330**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Bulan	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Bulan	3.924.461.330	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbayarnya Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	13 Bulan	936.610.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Tugas ASN yang Terpenuhi	13 Bulan	936.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	6.000.000	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang Tersusun	2 Dokumen	3.238.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Terpenuhi**	**100 Persen**	**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Terpenuhi**	**100 Persen**	**20.000.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dana Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Meningkat Wawasan dan Kompetensinya	1 Tahun	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**601.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**312.768.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	108.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	20 Unit	64.868.000	
	Penyediaan Bahan Logistik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan, 12 Bulan	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	40.000.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Tamu dan Rapat Dinas	12 Bulan	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Makan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	8.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	189.900.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**117.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**112.201.424**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	96.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	12 Bulan	93.201.424	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	13.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	12 Bulan	13.000.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**260.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**152.524.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Mobil Jabatan	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Kondisi Baik	1 Unit	39.990.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/Opearsional Dalam Kondisi Baik	10 Unit	93.534.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100 Persen, 100 Persen	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	100 Persen	17.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Tanah yang Terpelihara/Rehabilitasi	0 Lokasi	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Tanah yang Terpelihara/ Rehabilitasi	1 Lokasi	5.000.000	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan**	**100 Persen**	**1.878.740.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan**	**100 Persen**	**2.105.005.500**	
	Pemberdayaan Kapasitas dan			**100 Persen**	**10.000.000**	**Pemberdayaan Kapasitas dan**			**100 Persen**	**8.000.000**	

	Pendampingan KAT					**Pendampingan KAT**					
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Mendapatkan Pendampingan	1 Komunitas Adat Terpencil	10.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Mendapatkan Pendampingan	1 Komunitas Adat Terpencil	8.000.000	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			**100 Persen**	**10.000.000**	**Pemberdayaan Kapasitas dan Pendampingan KAT**			**100 Persen**	**0**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Kecamatan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Kecamatan	0	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			**100 Persen**	**1.798.740.500**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**100 Persen**	**2.097.005.500**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Karang Taruna yang Terlatih dan Terampil Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA)/Panti Asuhan yang Terayomi Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Terlatih dan Terampil Jumlah Pendamping	40 Orang 8 LKSA 36 Orang 55 Orang 40 Orang 20 Orang	1.638.600.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Karang Taruna yang Terlatih dan Terampil Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA)/Panti Asuhan yang Terayomi Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Terlatih dan Terampil Jumlah Pendamping	40 Orang 8 LKSA 36 Orang 60 Orang 40 Orang 20 Orang	1.996.865.000	

			PKH yang Terayomi Jumlah Supervisor dan Fasilitator yang Terayomi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Terayomi Jumlah Legiun Veteran Republik Indonesia yang Terayomi	55 Kepala Keluarga				PKH yang Terayomi Jumlah Supervisor dan Fasilitator yang Terayomi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Terayomi			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Petugas Sosial Masyarakat yang Terbina	44 Orang	160.140.500	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Petugas Sosial Masyarakat yang Terbina	20 Orang	100.140.500	
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**	**9,87 Persen**	**640.900.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**	**9,87 Persen**	**2.105.005.500**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				**470.900.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**632.267.276**	
	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten /Kota, Semua	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang	200 Orang	105.000.000	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten /Kota, Semua	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang	100 Orang	105.000.000	

		Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Orang Terlantar dan PPKS Lainnya yang Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya yang Melalui Rumah Singgah Jumlah Pemerlu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya	100 Orang 100 Orang			Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Orang Terlantar dan PPKS Lainnya yang Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya yang Melalui Rumah Singgah Jumlah Pemerlu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya	200 Orang 100 Orang		
	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya Sandang bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah)	100 Orang	10.000.000	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya Sandang bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah)	100 Orang	9.985.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya Alat Bantu bagi Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar	20 Orang	30.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya Alat Bantu bagi Disabilitas Teralantar dan Lanjut Usia Terlantar	30 Orang	41.116.200	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga, Anak Terlantar, Disabilitas	20 Orang	45.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga, Anak Terlantar, Disabiltas	20 Orang	40.000.000	

		Semua Kelurahan	Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Terlaksana				Semua Kelurahan	Terlantar dan Lanjut USia Terlantar yang Terlaksana			
	Pemberian Bimbingan Fiisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dan Eks Trauma yang Mendapatkan Bantuan Sosial (Alat Bantu Berjalan dan/atau Uang Saku Diklat) Jumlah Monitoring dan Evaluasi bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) yang Mendapatkan Pembinaan	50 Orang 1 Tahun	70.900.000	Pemberian Bimbingan Fiisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dan Esk Trauma yang Mendapatkan Bantuan Sosial (Alat Bantu Berjalan dan/atau Uang Saku Diklat) Jumlah Monitoring, Evaluasi bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) yang Mendapatkan Pembinaan	50 Orang 1 Tahun	59.983.800	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berkas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan yang Mendapatkan Bimbingan Jumlah Bimbingan Sosial yang Diberikan Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Permasyarakatan yang Mendapatkan Pembinaan	20 Orang 50 Orang 20 Orang 20 Orang	70.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan yang Mendapatkan Bimbingan Jumlah Bimbingan Sosial yang Diberikan Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Permasyarakatan yang Mendapatkan Pembinaan	20 Orang 50 Orang 20 Orang 20 Orang	90.935.000	

			Jumlah Eks Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Mendapatkan Pembinaan					Jumlah Eks Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah Legiun Veteran Republik Indonesia yang Terayomi			
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang Difasilitasi	50 Orang	10.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Kedaruratan bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah) yang Terlaksana	0 Orang	0	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Data Pengaduan (Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Data Anak, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar) yang Terlaksana	150 Orang	25.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Data Pengaduan (Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Data Anak, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar) yang Terlaksana	0 Orang	0	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Kedaruratan bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah)yang Terlaksana Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga, Anak	50 Orang 50 Orang	35.00.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Kedaruratan bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah) yang Terlaksana	50 Orang	60.000.000	

			Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Diberikan								
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penelusuran Keluarga bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah) yang Terlaksana	50 Orang	15.00.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penelusuran Keluarga bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah) yang Terlaksana	0 Orang	0	
	Pemberian Layanan Rujukan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Rujukan bagi Pemerlu Penyangan Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah) Jumlah Pemberian Layanan Rujukan bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Melalui Sostem Layanan Rujukan Terpadu	10 Orang 55 Orang 1.000 Orang	62.547.276	Pemberian Layanan Rujukan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Rujukan bagi Pemerlu Penyangan Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah) Jumlah Pemberian Layanan Rujukan bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Melalui Sostem Layanan Rujukan Terpadu	10 Orang 55 Orang 1.000 Orang	62.547.276	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		**Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya**		**170.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan**		**Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya**		**162.700.000**	

	Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**Buka Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi**			**Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Buka Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi**			
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya Perbekalan Kesehatan bagi Permerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah)	100 Orang	10.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tersedianya Perbekalan Kesehatan bagi Permerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah)	100 Orang	10.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial Jumlah Korban Bukan HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	50 Orang 50 Orang	120.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Pemerlu Penyangan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	50 Orang	112.700.000	
	Kerjasaman antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang Terlaksana Persentase Pelayanan Pendamping PKH Persentase Sosialisasi tentang UGB dan Program-	100 Persen 100 Persen 20 Orang	40.000.000	Kerjasaman antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang Terlaksana Persentase Pelayanan Pendamping Program Keluarga Harapan	100 Persen 100 Persen	40.000.000	

			Program Dinas Sosial yang Terlaksana								
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**50%**	**1.117.557.500**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**50%**	**302.179.400**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Data Kemiskinan yang Valid**		**1.117.557.500**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Data Kemiskinan yang Valid**		**302.179.400**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Data Kemiskinan Yang Valid Persentase Data yang Akurat dan Kompatibel	50 Persen 50 Persen	321.123.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Data yang Akurat dan Kompatibel	50 Persen	239.629.400	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Pangan untuk Masyarkat Miskin yang Tersedia Jumlah Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin yang Tersedia	50 Kelompok 25 Buah	616.975.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Pangan untuk Masyarkat Miskin yang Tersedia Jumlah Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin yang Tersedia	0 Kelompok 0 Buah	0	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Sisswa/I Panti Sosial Bina Remaja, dan Siswa Panti Sosial Bina Remaja yang Mendapatkan Keterampilan	80 Orang	179.459.500	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Sisswa/I Panti Sosial Bina Remaja, dan Siswa Panti Sosial Bina Remaja yang Mendapatkan Keterampilan	80 Orang	62.550.000	

5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase Bantuan Sosial yang Terdistribusi**	**100 Persen**	**590.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase Bantuan Sosial yang Terdistribusi**	**100 Persen**	**389.360.500**	
	Perlindungan Sosial Korban Becanan Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 Persen**	**550.000.000**	**Perlindungan Sosial Korban Becanan Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 Persen**	**349.360.500**	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan dan Anak yang Tertangani Jumlah PPKS yang Tertangani Melalui SLRT Jumlah Tenaga Pelatih dan Pendidik yang Berkualitas Persantase Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Persentase Kebutuhan Masalah-Masalah Strategis yang Terpenuhi	15 Orang 100 Jiwa 30 Orang 100 Persen 100 Persen	349.360.500	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan dan Anak yang Tertangani Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Jumlah Tenaga Pelatih dan Pendidik yang Berkualitas Persentase Terlaksananya Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Persentase Kebutuhan Masalah-Masalah Strategis yang Terpenuhi	100 Jiwa 30 Orang 100 Persen 100 Persen	349.360.500	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Becana Kabupaten/Kota			**100 Persen**	**40.000.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Becana Kabupaten/Kota**			**100 Persen**	**40.000.000**	

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100 Persen	20.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100 Persen	20.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Becana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Becana	100 Persen	20.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Becana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Becana	100 Persen	20.000.000	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar dari pelaksanaan musrenbang, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Banjar

No	Usulan	Kecamatan	Kelurahan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Status
1	Bantuan Barang Pelatihan KUBE Bagi Keluarga Miskin	Aranio	Belangian	Rekomendasi : dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 20.000.000	Rekomendasi : Rekomendasi : Diteruskan Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 20000000 Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 20.000.000	Rekomendasi : dipending untuk diusulkan ke APBN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 25.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/Kota
2	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Danau Salak	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung	Rekomendasi : Diteruskan		Diteruskan ke Forum SKPD

				Koefisien Anggaran	: :	7 Unit 105.000.000	Koefisien Anggaran	: :	7 Unit 105.000.000		
3	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Benua Anyar ST	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 5 Buah 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	20 5 Buah 75.000.000		Diteruskan ke Forum SKPD
4	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Kelampaian	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 5 Buah 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diteruskan 5 Buah 75.000.000		Diteruskan ke Forum SKPD
5	Bantuan Barang Pelatihan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Astambul	Kelampaian	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan 1 Paket 25.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	 1 Paket 25.000.000		Diteruskan ke Forum SKPD
6	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Jati Baru	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 12 Unit 180.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	13 12 Unit 180.000.000		Diteruskan ke Forum SKPD

7	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Pingaran Ulu	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 20 Buah Anggaran : 300.000.000	Rekomendasi : Koefisien : 20 Buah Anggaran : 300.000.000			Diteruskan ke Forum SKPD
8	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Kaliukan	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 20 Buah Anggaran : 300.000.000	Rekomendasi : 9 Koefisien : 20 Buah Anggaran : 300.000.000			Diteruskan ke Forum SKPD
9	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Tambak Danau	Rekomendasi : H. Nazarudin, S.Pd Koefisien : 8 Unit Anggaran : 120.000.000	Rekomendasi : Diteruskan Koefisien : 8 Unit Anggaran : 120.000.000			Diteruskan ke Forum SKPD
10	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Astambul	Limamar	Rekomendasi : Dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan Koefisien : 5 Buah Anggaran : 75.000.000	Rekomendasi : 17 Koefisien : 5 Buah Anggaran : 75.000.000	:		Diteruskan ke Forum SKPD
11	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Kertak Hanyar	Pasar Kamis	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 5 Unit	Rekomendasi : - Koefisien : 1 Unit	Rekomendasi : Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos Koefisien : 1 Unit		Diteruskan ke Forum SKPD

				Anggaran	:	75.000.000	Anggaran	:	75.000.000	Anggaran	:	15.000.000	
12	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Beruntung Baru	Kampung Baru	Rekomendasi	:	Dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	Rekomendasi	:	Usulan direkomendasikan prioritas 58	Rekomendasi	:	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi diverifikasi oleh team Dinsos	Diteruskan ke Forum SKPD
				Koefisien	:	10 Unit	Koefisien	:	50 Unit	Koefisien	:	50 Unit	
				Anggaran	:	150.000.000	Anggaran	:	150.000.000	Anggaran	:	150.000.000	
13	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Kertak Hanyar	Pemangkih Laut	Rekomendasi	:	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung	Rekomendasi	:	-	Rekomendasi	:	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh Team Dinsos	Diteruskan ke Forum SKPD
				Koefisien	:	10 Unit	Koefisien	:	10 Unit	Koefisien	:	10 Unit	
				Anggaran	:	150.000.000	Anggaran	:	150.000.000	Anggaran	:	150.000.000	
14	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil Muara	Rekomendasi	:	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung	Rekomendasi	:	Menjadi Prioritas Nomor 7				Diteruskan ke Forum SKPD
				Koefisien	:	25 Buah	Koefisien	:	25 Buah				
				Anggaran	:	375.000.000	Anggaran	:	375.000.000				
15	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Beruntung Baru	Handil Purai	Rekomendasi	:	Dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	Rekomendasi	:	Usulan direkomendasikan Prioritas 77	Rekomendasi	:	Rekomendasi : Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos	Diteruskan ke Forum SKPD

				Koefisien Anggaran	: :	10 Unit 150.000.000	Koefisien Anggaran	: :	10 Unit 150.000.000	Koefisien Anggaran	: :	10 Unit 150.000.000	
16	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Kertak Hanyar	Manarap Lama	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 5 Unit 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	- 5 Unit 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos 5 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
17	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura Timur	Melayu	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukun 5 75.000.000	Rekomendasi : diteruskan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku,akan melengkapi proposal dan data dukung lainnyai Koefisien Anggaran	: : :	Rekomendasi 5 75.000.000	Rekomendasi : Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos Koefisien Anggaran	: : :	Rekomendasi 5 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
18	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura Timur	Tambak Anyar	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 5 Unit 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Rekomendasi : diteruskan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku 5 Unit 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Rekomendasi : Diterima TA. 2021 melalui APBN. kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos 5 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD

19	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Aluh Aluh	Labat Muara	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan 6 Buah 90.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Menjadi Prioritas Nomo 20 6 Buah 90.000.000				Diteruskan ke Forum SKPD
20	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	dapat diteruskan pad musrenbang kecamatan, dilengkapi dengan proposal dan kepemilikan lahan 10 Buah 150.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Setuju Prioritas Nomor 156 1 Buah 120.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh Team Dinsos 1 Buah 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
21	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Aluh Aluh	Terapu	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan Koefisien 80 Buah 1.200.000.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan Nomor 52 80 Buah 1.200.000.000.000				Diteruskan ke Forum SKPD
22	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura Timur	Keramat	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 20 Unit 300.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan,dan akan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan 20 Unit 300.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi team Dinsos 20 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
23	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura	Pasayangan Utara	Rekomendasi	:	dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	Rekomendasi	:	Diteruskan ke Forum SKPD, Prioritas 13	Rekomendasi	:	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos	Diteruskan ke Forum SKPD

				Koefisien Anggaran	: :	5 Unit 75.000.000	Koefisien Anggaran	: :	20 Unit 100.000.000	Koefisien Anggaran	: :	5 Unit 15.000.000	
24	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura Timur	Pematang Baru	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan 2 Unit 30.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan 2 Unit 30.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos 2 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
25	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura Timur	Melayu Ilir	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 10 Unit 150.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diteruskan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan 10 Unit 150.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos 10 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
26	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura	Murung Kenanga	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 30 Unit 450.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diteruskan ke forum SKPD 30 Unit 600.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi diverifikasi oleh Team Dinsos 30 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
27	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan 1 Paket 15.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	PERINGKAT 76 1 Paket 15.000.000				Diteruskan ke Forum SKPD

28	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi : dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : PERINGKAT 77 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15.000.000			Diteruskan ke Forum SKPD
29	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : PERINGKAT 78 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000			Diteruskan ke Forum SKPD
30	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : PERINGKAT 78 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000			Diteruskan ke Forum SKPD
31	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : PERINGKAT 80 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000	:		Diteruskan ke Forum SKPD
32	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan	Rekomendasi : PERINGKAT 81	:		Diteruskan ke Forum SKPD

				dengan surat2 pendukung Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000		Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000		
33	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15.000.000		Rekomendasi : PERINGKAT 82 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15.000.000		Diteruskan ke Forum SKPD
34	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Mataraman	Bawahan Pasar	Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000		Rekomendasi : PERINGKAT 83 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000		Diteruskan ke Forum SKPD
35	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Karang Intan	Sungai Alang	Rekomendasi : Rekomendasi : Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien : 1 unit Anggaran : 15000000 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000		Rekomendasi : prioritas 5 Koefisien : 100 Unit Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : Diterima untuk usulan TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi diverifikasi oleh team Dinsos Koefisien : 1 Unit Anggaran : 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD

36	Bantuan Barang Pelatihan KUBE Bagi Keluarga Miskin	Karang Intan	Sungai Alang	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dan memenuhi persyaratan KUBE 1 Kelompok 10.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Prioritas 96 1 Kelompok 10.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dipending untuk diusulakan melalui anggaran APBN 1 Unit 25.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
37	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Tatah Makmur	Taibah Raya	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung Koefisien 5 Unit 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	membantu masyarakat miskin disamping untuk keamanan kesehatan dan hidup layak Koefisien 5 Unit 50.000.000				Diteruskan ke Forum SKPD
39	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Karang Intan	Kiram	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 1 Unit 15.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	prioritas 7 30 Unit 150.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos 30 Unit 150.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
40	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura	Jawa Laut	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung 5 Unit 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diteruskan ke forum SKPD, prioritas 9 5 Unit 75.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh Team Dinsos 5 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD

41	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Telaga Bauntung	Rantau Bujur	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	dapat diteruskan ke musrenbang kecamatan dan memenuhi persyaratan (kepemilikan tanah sendiri, diajukan satu tahun sebelumnya, masuk DTKS) 8 Unit 120.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Setuju Prioritas Nomor 157 8 Unit 120.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima di TA 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh Team Dinsos 8 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
42	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Telaga Bauntung	Rampah	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	dapat diteruskan ke musrenbang kecamatan dan memenuhi persyaratan (kepemilikan tanah sendiri, diajukan satu tahun sebelumnya, masuk DTKS) 8 Unit 120.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Setuju Prioritas Nomor 159 8 Unit 120.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima di TA. 2021, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh team Dinsos 8 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
43	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Telaga Bauntung	Lok Tanah	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	dapat diteruskan ke musrenbang kecamatan dan memenuhi persyaratan (kepemilikan tanah sendiri, diajukan satu tahun sebelumnya, masuk DTKS) 8 Unit 120.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Setuju Prioritas Nomor 158 8 Unit 120.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diterima untuk diusulkan di TA. 2020, akan tetapi kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi dl oleh team Dinsos 8 Unit 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
44	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Sungai Tabuk	Sungai Tandipah	Rekomendasi	:	Dapat diteruskan pada musrenbang kecamatan, dapat dilengkapi dengan proposal, masuk DTKS, lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat2 pendukung	Rekomendasi	:	Prioritas ke 41				Diteruskan ke Forum SKPD

				Koefisien : 3 Unit Anggaran : 45.000.000	Koefisien : 0 Unit Anggaran : -		
45	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Martapura Barat	Keliling Benteng Ulu	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 40 Unit Anggaran : 600.000.000		Rekomendasi : Diterima TA. 2021 melalui APBN, kelengkapan berkas dan lokasi akan diverifikasi oleh Team Dinsos Koefisien : 40 Unit Anggaran : 15.000.000	Diteruskan ke Forum SKPD
46	Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	Rekomendasi : Usulan dapat ditindaklanjuti melalui UEP KUBE Koefisien : 0 Anggaran : -		Rekomendasi : Disetujui dgn anggaran yang tersedia Koefisien : 300 0 Anggaran : 300.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
47	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat)	Martapura	Sungai Paring	Rekomendasi : Diteruskan Koefisien : 0 17500 Anggaran : -		Rekomendasi : Sesuai verifikasi lapangan Koefisien : 21900 17500 Anggaran : 383.250.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
48	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat)	Astambul	Sungai Tuan Ilir	Rekomendasi : Koefisien : 0 17500 Anggaran : -		Rekomendasi : Sudah verifikasi lapangan Koefisien : 14600 17500 Anggaran : 383.250.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
49	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan	Martapura	Bincau	Rekomendasi : Koefisien : 0 17500		Rekomendasi : Sudah verifikasi lapangan Koefisien : 15330 17500	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

	kepada Kelompok Masyarakat)			Anggaran : -		Anggaran : 268.275.000	
50	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat)	Martapura	Pasayangan	Rekomendasi : Koefisien : 0 17500 Anggaran : -		Rekomendasi : Sudah verifikasi lapangan Koefisien : 4745 17500 Anggaran : 83.037.500	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
51	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat)	Kertak Hanyar	Sungai Lakum	Rekomendasi : Koefisien : 0 17500 Anggaran : -		Rekomendasi : Sudah verifikasi lapangan Koefisien Koefisien : 7300 17500 Anggaran : 127.750.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
52	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat)	Martapura	Sungai Paring	Rekomendasi : Koefisien : 0 17500 Anggaran : -		Rekomendasi : Sudah verifikasi lapangan Koefisien : 5475 17500 Anggaran : 95.812.500	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
53	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat)	Martapura	Jawa	Rekomendasi : Koefisien : 0 17500 Anggaran : -		Rekomendasi : Sudah verifikasi lapangan Koefisien : 8030 17500 Anggaran : 140.525.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
54	Bantuan Sosial Anak Dalam Panti (Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat)	Martapura	Jawa	Rekomendasi : Diteruskan Koefisien : 0 17500 Anggaran : -		Rekomendasi : Sudah verifikasi lapangan Koefisien : 7300 17500 Anggaran : 127.750.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar dari pelaksanaan musrenbang, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Reses (POKIR) Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Banjar

No	Usulan	Kelurahan	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Status
1	Bantuan Barang Pelatihan KUBE Bagi Keluarga Miskin	Bawahan Seberang	1 Paket	Rekomendasi : diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 1	Rekomendasi : dapat diteruskan sesuai ketentuan yang berlaku Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 10.000.000	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
2	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Bawahan Seberang	1 Paket	Rekomendasi : diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Rekomendasi : dapat diteruskan,disarankan dengan dana desa,bukan kewenangan dinas sosial Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000.000	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Validasi Mitra Bappeda
3	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Bawahan Seberang	1 Paket	Rekomendasi : diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1	Rekomendasi : Disarankan dengan dana desa atau usulan dana hibah dengan mengajukan proposal,bukan kewenangan dinsos Koefisien : 1 paket Anggaran : 50.000.000	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
4	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Bawahan Seberang	1 Paket	Rekomendasi : diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya	Rekomendasi : untuk madrasah negeri merupakan kewenangan kemenag	Rekomendasi :	Validasi Mitra Bappeda

				Koefisien Anggaran	: :	1 Paket 1		Koefisien Anggaran	: :	10 orang 600.000	Koefisien Anggaran	: :
5	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Bawahan Seberang	1 Paket	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya 1 kegiatan 1		Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	disarankan dengan menggunakan dana desa. bukan kewenangan dinsos 1 Kegiatan 10.000.000	Rekomendasi Koefisien A0nggaran	: : :	Diteruskan ke Forum SKPD
6	Bantuan Barang Pelatihan KUBE Bagi Keluarga Miskin	Bawahan Seberang	1 Paket	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya 1 kelompok 1		Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	konfirmasi : usulan untuk kube atau pengawasan 1 kelompok 10’000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Validasi Mitra Bappeda
7	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Tanah Abang	1 Paket	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya 1 KPaket 50.000.000		Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	disarankan dengan dana desa atau dana hibah (mengajukan proposal sesuai ketentuan yang berlaku). 1 Paket 50.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diteruskan ke Forum SKPD
8	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Takuti	1 Paket	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya 1 Paket 1		Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	disarankan dengan dana desa atau dana hibah (mengajukan proposal sesuai ketentuan) 1 Paket 100.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Validasi Mitra Bappeda

9	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Keramat Mina	1 Paket	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya 1 Paket 50.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	disarankan dengan dana desa atau dana hibah (mengajukan proposal sesuai ketentuan yang berlaku). 1 Paket 50.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Diteruskan ke Forum SKPD
10	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Bawahan Pasar	1 Unit	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya 1 Unit 100.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	ada 2 usulan : bedah rumah dan bantuan usaha, disarankan dipisah karena akan beda sub kegiatan. untuk bedah rumah dapat diteruskan dengan memenuhi kriteria mengajukan proposal 1 tahun sebelumnya, kepemilikan rumah sendiri, masuk DTKS. 1 Unit 100.000.000	Rekomendasi Koefisien Anggaran	: : :	Validasi Mitra Bappeda
11	Bantuan Barang Pelatihan KUBE Bagi Keluarga Miskin	Bawahan Pasar	1 Paket	Rekomendasi	:	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya	Rekomendasi	:	disarankan dengan dana desa. atau mengajukan proposal untuk dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku. bukan	Rekomendasi	:	Diteruskan ke Forum SKPD

								kewenangan dinsos				
				Koefisien	:	1Paket	Koefisien	:	1 Paket	Koefisien	:	
				Anggaran	:	10.000.000	Anggaran	:	10.000.000	Anggaran	:	
12	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Cinta PUri	1 Paket	Rekomendasi	:	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya	Rekomendasi	:	disarankan dengan dana desa atau mengajukan proposal dengan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku Bukan kewenangan Dinsos	Rekomendasi	:	Validasi Mitra Bappeda
				Koefisien	:	1 Paket	Koefisien	:	1 Paket	Koefisien	:	
				Anggaran	:	50.000.000	Anggaran	:	5000.000	Anggaran	:	
13	Bantuan Barang Pelatihan KUBE Bagi Keluarga Miskin	Cinta PUri	1 Paket	Rekomendasi	:	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya	Rekomendasi	:	disarankan dengan dana desa atau mengajukan proposal untuk dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan kewenangan dinsos	Rekomendasi	:	Diteruskan ke Forum SKPD
				Koefisien	:	1 Kelompok	Koefisien	:	1 Paket	Koefisien	:	
				Anggaran	:	50.000.000	Anggaran	:	10.000.000	Anggaran	:	
14	Bantuan Barang Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Pasar Kamis	1 Paket	Rekomendasi	:	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya	Rekomendasi	:	disarankan dengan dana desa. Bukan kewenangan dinsos	Rekomendasi	:	Validasi Mitra Bappeda
				Koefisien	:	1 Paket	Koefisien	:	1 Paket	Koefisien	:	
				Anggaran	:	50.000.000	Anggaran	:	2.000.000	Anggaran	:	

15	Bantuan Barang Pelatihan KUBE Bagi Keluarga Miskin	Batang Banyu	1 Paket	Rekomendasi	:	diteruskan dan mohon analisa perhitungan selanjutnya	Rekomendasi	:	disarankan dengan dana desa atau mengajukan proposal untuk dana hibah sesuai dengan ketentuan	Rekomendasi	:	Diteruskan ke Forum SKPD
				Koefisien	:	1 Paket	Koefisien	:	1Paket	Koefisien	:	
				Anggaran	:	1	Anggaran	:	20.000.000	Anggaran	:	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Banjar merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu dari DInas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Dinas Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Sedangkan untuk SDG's, Dinas SOsial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut :

1. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua kelompok miskin dan rentan
2. Memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
3. Membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Banjar

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupatan Banjar dan isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari urusan sosial adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kemampuan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dilaksanakan dengan beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Program Penanganan Bencana

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Banjar

Tujuan	**Sasaran Strategis**	**Indikator**	**Target 2022**
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kemampuan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri	15 Persen
	Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Terampil	35 Persen
	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	9,87 Persen
	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial	50 Persen
	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Sosial Kabupaten Banjar	80%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten Banjar tahun 2022 melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan program kegiatan :
   1) Pencapaian RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2021
   2) Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Banjar
   3) Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Banjar
   4) Pencapaian fasilitasi dan administrasi penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi
   1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
      Jumlah program yang direncanakan pada Tahun 2022 secara keseluruhan adalah 5 program dengan total kegiatan sebanyak 13, dan 40 Sub Kegiatan.
   2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan
      Penyebaran lokasi kegiatan program dan kegiatan adalah di Kabupaten Banjar mencakup Kecamatan dan Kelurahan
   3) Total Kebutuhan dana/pagu indikatif berdasarkan RKPD adalah sebesar Rp. 8.935.317.430
3. Tabel Rencana Program dan Kegiatan tahun 2022
   Adapun tabel rencana program dan kegiatan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Dinas Sosial Kabupaten Banjar

Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Cat	Prakiraan MAJU RENCANA TAHUN 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	6	5	6	7	8	9	10
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**06**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100 Persen**	**8.935.317.430**			**100 Persen**	**9.452.342.165**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 Persen**	**5.506.504.754**			**100 Persen**	**6.118.601.665**
`	06	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**		**100 Persen**	**37.000.000**			**100 Persen**	**50.000.000**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	17.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	20.000.000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAPerangkat Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10,000,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10,000,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	3 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	10,000,000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kelurahan						
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**4.870.249.330**			**100 Persen**	**4.808.400.241**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Bulan	3.924.461.330	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		13 Bulan	3.860.790.241
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN yang Terpenuhi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Bulan	936.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		13 Bulan	936.610.000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang Tersusun	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Dokumen	3.238.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		18 Dokumen	5.000.000
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Terpenuhi**		**100 Persen**	**20.000.000**			**100 Persen**	**50.000.000**
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Meningkat Wawasan dan Kompetensinya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Orang	50.000.000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi**		**100 Persen**	**312.768.000**			**100 Persen**	**820.000.000**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.000.000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	20 Unit	64.868.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Unit	100.000.000

							Semua Kelurahan						
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	75.000.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	15.000.000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Makan Minum Rapat dan Tamu	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	20.000.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	189.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	400.000.000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**112.201.424**			**100 Persen**	**112.201.424**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.000.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	93.201.424	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	93.201.424
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	13.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Bulan	13.000.000

1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**152.524.000**			**100 Persen**	**278.000.000**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Kondisi Baik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	39.990.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Opearsional Dalam Kondisi Baik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	93.534.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Unit	120.000.000
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	17.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	100.000.000
1	06	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Lokasi Tanah yang Terpelihara/Rehabilitasi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Lokasi	8.000.000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan**		**100 Persen**	**2.105.005.500**			**100 Persen**	**1.808.740.500**
1	**06**	**02**	**2.01**		**Pemberdayaan Kapasitas dan Pendampingan KAT**			**100 Persen**	**8.000.000**			**100 Persen**	**10.000.000**
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Mendapatkan Pendampingan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Komunitas Adat Terpencil	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Komunitas Adat Terpencil	10.000.000
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**100 Persen**	**2.097.005.500**			**100 Persen**	**1.798.740.500**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Terlatih dan Terampil Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA)/Panti Asuhan yang Terayomi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang 8 LKSA 36 Orang	1.996.865.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		40 Orang 8 LKSA	1.638.600.000

						Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Terlatih dan Terampil Jumlah Pendamping PKH yang Terayomi Jumlah Supervisor dan Fasilitator yang Terayomi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Terayomi		60 Orang 40 Orang 20 Orang				36 Orang 60 Orang 40 Orang 20 Orang	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Sosial Masyarakat yang Terbina	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	100.140.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Orang	160.140.500
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**		**9,87 Persen**	**2.105.005.500**			**13,50 Persen**	**865.000.000**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**632.267.276**				**635.000.000**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya Jumlah Pemerlu Penyangan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Melalui Rumah Singgah Jumlah Tersedianya Permakanan (Orang Terlantar) Jumlah Tersedianya Permakanan (Pemberian Bahan Makanan) Jumlah Tersedianya Permakanan (Pemberian Bahan Makanan)	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang	105.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang	200.000.000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Tersedianya Sandang bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	100 Orang	9.985.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang	10.000.000

							Semua Kelurahan						
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Tersedianya Alat Bantu bagi Disabilitas Teralantar dan Lanjut Usia Terlantar	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	41.116.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Orang	30.000.000
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga, Anak Terlantar, Disabiltas Terlantar dan Lanjut USia Terlantar yang Terlaksana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Orang	50.000.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fiisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dan Esk Trauma yang Mendapatkan Bantuan Sosial (Alat Bantu Berjalan dan/atau Uang Saku Diklat) Jumlah Monitoring, Evaluasi bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) yang Mendapatkan Pembinaan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang 1 Tahun	59.983.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50 Orang 1 Tahun	100.000.000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan yang Mendapatkan Bimbingan Jumlah Bimbingan Sosial yang Diberikan Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Permasyarakatn yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah Eks Narkotaika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah Legiun Veteran Republik Indonesia yang Terayomi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang 50 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang	90.935.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Orang 50 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang	90.000.000
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah) yang Terlaksana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50 Orang	70.000.000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan bagi Pemerlu Penyangan Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah)	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan,	10 Orang 55 Orang	62.547.276	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Orang	85.000.000

						Jumlah Pemberian Layanan Rujukan bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Melalui Sostem Layanan Rujukan Terpadu	Semua Kelurahan	1.000 Orang				55 Orang 1.000 Orang	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya Buka Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi**			**162.700.000**				**230.000.000**
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Tersedianya Perbekalan Kesehatan bagi Permerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Rumah Singgah)	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Pemerlu Penyangan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	112.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50 Orang	120.000.000
1	06	04	2.02	14	Kerjasaman antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang Terlaksana Persentase Pelayanan Pendamping Program Keluarga Harapan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen 100 Persen	100.000.000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**		**50%**	**302.179.400**	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		**55%**	**302.179.400**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Kemiskinan yang Valid**			**302.179.400**				**571.123.000**
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Akurat dan Kompatibel	Semua Kabupaten /Kota, Semua	50 Persen	239.629.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	321.123.000

							Kecamatan, Semua Kelurahan						
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Sisswa/I Panti Sosial Bina Remaja, dan Siswa Panti Sosial Bina Remaja yang Mendapatkan Keterampilan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	62.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 Orang	250.000.000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Bantuan Sosial yang Terdistribusi**		**100 Persen**	**389.360.500**			**100 Persen**	**660.000.000**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Becanan Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**		**100 Persen**	**349.360.500**			**100 Persen**	**600.000.000**
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Perempuan dan Anak yang Tertangani Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Jumlah Tenaga Pelatih dan Pendidik yang Berkualitas Persentase Terlaksananya Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan Persentase Kebutuhan Masalah-Masalah Strategis yang Terpenuhi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Jiwa 30 Orang 100 Persen 100 Persen	349.360.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Jiwa 30 Orang 100 Persen 100 Persen	600.000.000
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Becana Kabupaten/Kota**			**100 Persen**	**40.000.000**			**100 Persen**	**60.000.000**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	40.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Becana	Persentase Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Becana	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Persen	20.000.000
					TOTAL				**8.935.317.430**				**9.452.342.165**

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Banhar sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung 88,17% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94,08% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran Rp.8.935.317.420 dengan jumlah program 5 program, antara lain Program, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana.

Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Banjar menjadi Kabupaten yang Sejahtera dan Barokah wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Banjar. Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan bidang urusan sosial maka Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 disusun secara baik dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengalami proses perubahan dalam beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mencapai sebagaimana yang telah diharapkan.

Dokumen rencana kerja tahun 2022 ini agar dipedomi oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Semoga rencana kerja tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banjar tahun 2022. Akhirnya dengan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan Renja perubahan tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar.

Rencana Kerja Tahunan ini menyajikan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banjar untuk 1 (satu) tahun ke depan yang memuat kebijakan program dan kegiatan. pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi dari masyarakat. Penyusun rencana kerja Tahunan (RKT) SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD menjadian acuan perumusan program, kegiatan, indikator, kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD.

Diharapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banjar Tahun 2022 ini dapat menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banjar dalam melaksanakan tugas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk periode1 (satu)tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Disnakertrans Tahun 2022 didasarkan pada Revisi Renstra Disnakertrans 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi Disnakertrans serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Disnakertrans didalam rencana strategis tahun 2022-2026 yaitu :“**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, Agamis** ” yaitu :

1. **Maju;** Kondisi Kabupaten Banjar yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yag memiliki intelektualitas tinggii, memiliki moral yang baik,kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta didukung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselengaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.
2. **Mandiri;** Mandiri maksudnya adalah masyarakat Kab. Banjar tidak hanya menjadi tenaga kerja siap pakai yang profesioanl sesuai kebutuhan pasar namun juga mampu berusaha sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhannya, memiliki daya saing dalam berusaha, menciptakan peluang kerja dan dapat lebih memperluas kesempatan kerja.
3. **Agamis ;** Agamis maksudnya adalah masyarakat Kabupaten Banjar yang memiliki nilai-nilai, norma, dan kaidah Agama, yang harus menjiwai, mewarnai, dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelanggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Desa Kabupaten Banjar Tahun2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.
13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Nomor.69 Tahun 2018 tentang Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar ini disusundengan maksud untuk menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 kedalam program dan kegiatan dinas dalam rangka mewujudkansinergitas antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

a. Menyediakan dokumenperencanaan tahunan Disnakertrans Kab. Banjar Tahun 2022;
b. Sebagai dokumen perencanaan yang akandilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

RencanaKerjaTahun2022disusundengansistematikasebagaiberikut.

BAB I. Pendahuluan
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
BAB III. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
BAB IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Disnakertrans Tahun 2022-2026, Disnakertrans memiliki visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, Agamis yaitu :

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Disnakertrans Kabupaten Banjar selama periode 5 tahun mendatang adalah :

1. **Maju;** Kondisi Kabupaten Banjar yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yag memiliki intelektualitas tinggii, memiliki moral yang baik,kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta didukung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselengaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.
2. **Mandiri;** Mandiri maksudnya adalah masyarakat Kab. Banjar tidak hanya menjadi tenaga kerja siap pakai yang profesioanl sesuai kebutuhan pasar namun juga mampu berusaha sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhannya, memiliki daya saing dalam berusaha, menciptakan peluang kerja dan dapat lebih memperluas kesempatan kerja.
3. **Agamis ;** Agamis maksudnya adalah masyarakat Kabupaten Banjar yang memiliki nilai-nilai, norma, dan kaidah Agama, yang harus menjiwai, mewarnai, dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelanggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;**
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komodias unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan
3. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
4. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi urusan pemerintahan bidang Pencari Kerja dan Transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Hubugan Industrial dan Jamsostek serta Urusan Pemerintah bidang Kelembagaan dan Pelatihan Produktifitas Kerja.Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada tahun 2022 melaksanakan 6 program,dan 16 kegiatan dengan rincian sebagaiberikut:

A. Program Utama

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- Penyusunan rencana Tenaga Kerja Mikro

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggara Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
   - Perluasan Kesempatan Kerja
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
   - Job fair/Bursa Kerja
3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Kerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
   - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
4. Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
   - Penyelenggara Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Pencegahaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
   - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
   - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
   1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Bahan logistic Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f. Kegiatan Perencanaan dan Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAHS/D TRIWULAN II
TAHUN 2020

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020 dan Pencapian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Kabupaten Banjar

SKPD :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2	07	01		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselenggaranya pelayanan administrasi/teknis perkantoran (Bulan)								
				Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia jasa komunikasi listrik air bersih dan internet	12 bulan	12	12	12	100%	12		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	12 bulan	12	12	12	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Masa Waktu Penyediaan Makanan/Minuman	12 bulan	11	11	11	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya Gaji dan Tunjangan kinerja ASN	12 Bulan 100%	93,44	100	90,45	90,45	100	283,89	2,83
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis	12 bulan							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					perkantoran								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1	1	1	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan							
				Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12	12	12	100%			
				Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	12	12	12	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi rapat rapat ke luar daerah	1 tahun	1	1	0.97	97%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)								
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1	1	1	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit		1	1	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 4 operasional yang dipelihara	3 unit							
					Jumlah Kendaraan roda 2 operasional yang dipelihara	25 unit							
				Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			1	0,85	85%			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5	1	1	0,85	85%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	5 orang	1	1	0.97	97%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD (RKA & RKA-P, DPA & DPA-P)	100 dokumen	28	100	96.00	96%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja (LPPD, LKjIP dan LKPJ)	15 dokumen		15	10	66.67%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monev (RFK per bulan ke Bappelitbang, Lap. Renja per triwulan & RFK per bulan ke ULP)	28 dokumen		28	27	96.43%			
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang menjadi wira usaha baru	32 orang		15	30	100%			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah IKM Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	32 orang							
					Jumlah IKM Berbasis Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan								
					Jumlah IKM berbasis Logam, Mesin Elektronika dan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					alat angkut yang mendapatkan pelatihan								
					Jumlah IKM berbasis Pangan								
					Jumlah IKM Berbasis Sandang								
					Jumlah orang yang menjadi wirausaha								
					Jumlah Orang Yang Menjadi wira Usaha baru								
					Jumlah Orang Yang Menjadi Wira Usaha baru								
					Jumlah orang yang sudah mengikuti keterampilan								
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi								
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah orang yang sudah mengikuti pelatihan keterampilan	80 orang		80	64	80%			
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online			2.500	1.600	64%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
				Job Fair	Jumlah orang yang mendapatkan peluang kerja			25	25	100%			
				Bursa Kerja Khusus	Jumlah sekolah yang bekerja sama dengan perusahaan	240	0.00	4	4	100%			
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota									
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah kasus TKI/Pekerja Migran Indonesia	4 orang		4	4	100%			
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping TKA	5 orang		5	5	93.13			
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
				Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang selesai d tangani	30 kasus	0	20	7	100%	20		
				Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang mendapatkan penyuluhan pengupahan	665	0.00	30	30	100%			
				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Koreksi PP/PKB/Pemenaker No.12 Tahun 2006 yang ditangani	175	35	200	200	100%			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusaha	Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMP	20 perusahaan							
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah tenaga kerja yang ikut BPJS ketenagakerjaan	90 perusahaan							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (akhir Priode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
				Pelatihan Transmigrasi	Jumlah warga eks. Transmigrasi yang dilatih	45 orang							
				Pelatihan warga Eks.Transmigrasi	Jumlah Warga Eks. Transmigrasi yang dilatih		48	20	20	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2022-2026. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 "Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Untuk Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis Ketenagakerjaan melalui Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya Kesempatan/ lapangan kerja

Indikator Kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan, definisi operasional tenaga kerja adalah pencari kerja yang mencari pekerjaan yang ditempatkan dalam dunia kerja baik di Pemerintahan, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Swasta.

Pencapaian sasaran ini di emban oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bidang Kelembagaan dan Perluasan Kesempatan kerja.

Pada Tahun 2021 target yang ingin di capai adalah sebesar 0,1%, target ini tercantum pada Revisi ke-2 (dua) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar Tahun 2016-2021. Target tersebut ditetapkan rendah karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki Balai Latihan Kerja dan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerjanya dan tenaga kerjanya yang kurang dapat bersaing dengan daerah lain.

Realisasi Persentase Peningkatan Pencari Kerja yang ditempatkan tahun 2020 adalah sebesar 5,2 % dengan penempatan tenaga kerja sebanyak 268 orang dari yang mencari pekerjaan sebanyak 1108 orang pada Tahun 2019, realisasi 24,01% dan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 7,24% dengan penempatan tenaga kerja sebanyak 411 orang dari yang mencari pekerjaan sebanyak 1792 orang.

Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan indicator tersebut adalah

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu berdaya saing, Kab. Banjar tidak memiliki fasilitas Balai Latihan Kerja, walaupun ada 2 (dua) Pondok Pesantren yang mendapatkan BLK Komunitas, tetapi masih belum mampu menyerap untuk melatih pencari kerja dengan lingkup besar
2. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar masih kesulitan dalam membatasi penyerapan tenaga kerja di lingkungan kerja Kab. Banjar khusus pencari kerja yang ada di Kab. Banjar, karena belum lengkapnya fasilitasi mengamodir dan menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan, saat ini masih dalam tahap kemitraan dengan beberapa perusahaan.

Solusi yang ingin dicapai ke depan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja tersebut adalah :

1. Pada Renstra SKPD tercantum Pembangunan Balai Latihan Kerja

2. Mengajukan pengusulan Website Bursa Kerja Online yaitu suatu wadah yang mengakomodir penyaluran tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas tenaga kerjanya, 3D (dicari, dilatih dan ditempatkan).

   Terdapat

Terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian berhasil dengan uraian sebagaimana berikut :

Realisasi Indikator Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Jumlah sekolah yang bekerjasama dengan perusahaan	5	9	100%
Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	1000	666	66.6%
Jumlah orang yang mendapatkan peluang kerja	25	0	kegiatan tersebut tidak bisa dilaksnakan karena dampak rasionalisasi dan covid -19
Jumlah kasus TKI	4 Orang	4 Orang	100%
Jumlah Pendamping TKA	5 Orang	5 Orang	100%
Jumlah warga eks transmigrasi yang dilatih	32 orang	32 orang	100%
Jumlah orang yang menjadi wirausaha baru	32 Orang	32 Orang	100%
Jumlah orang yang dilatih	16 Orang	16 Orang	100%

Berdasarkan data pada table 3,5 bahwa pencapaian kinerja meningkat 100% dari target yang ditetapkan dalam revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar.

Pada Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banjar terdapat perubahan signifikan dari indicator kinerja dimana Indikator kinerja pada Tahun 2018 tidak relavan dengan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banjar untuk menurunkan angka pengangguran terbuka.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1) Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
2) Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
3) Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1) Perlu rencana aksi lebih untuk mendukung indikator kinerja, untuk menambah persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan.

Upaya perbaikan :

2) Koordinasi dengan SKPD terkait dan data penempatan PNS dan PTT baru dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang jumlah orang yang bekerja menurut bidangnya.

4.2. Sasaran 2

SASARAN (2) Membaiknya Hubungan Industrial

Indikator untuk mencapai sasaran tersebut adalah persentase penurunan sengketa industrial, sengketa industrial adalah sengketa antar pekerja dengan pemberi kerja baik berupa pemutusan hubungan kerja, perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak dan kewajiban. Formulasi hitung adalah Jumlah kasus hubungan industrial tahun N dikurang jumlah kasus hubungan industrial tahun N1 dibagi jumlah kasus hubungan industrial tahun N1 di kali 100%.

Pencapaian sasaran di emban oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, pada tahun 2019 target yang ingin dicapai penurunannya sebanyakr 6% dan realisasi sebanyak 71%, ada 7 kasus yang dicatatkan oleh ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar dan ditangani oleh mediator, perusahaan tersebut tercatat sebagai berikut :

1. PT Tjokro Bersaudara Banjarindo (2 kali kasus)
2. PT. Wira Eka Persadatama
3. PT. Palmina Utama (2 kali kasus)
4. PT. Tirtakencana Tatawarna
5. CV. Gawi Maju Konsultindo

Dibandingkan tahun 2018 kasus yang tercatat sebesar 12 kasus, jadi ada penurunan yang signifikan di Tahun 2019, penurunan ini dikarenakan pencapaian kinerja bidang Hubungan Industrial sangat berhasil, ada 5 (lima) Indikator Kinerja dengan capaian sangat berhasil yaitu sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Jumlah Kasus Perselisihan yang selesai ditangani	30 Kasus	12 Kasus - Oktober	100%
Jumlah Perusahaan yang melaksanakan saran HI	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%
Koreksi PP/PKB/PKWT Permenaker 19/2012 sesuai aturan	35 Dokumen	31 Dokumen	100%
Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan	200 Orang	200 Orang	Dikarenakan masa pandemi perusahaan-perusahaan menolak untuk melakukan kegiatan tersebut
Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMP	200 Perusahaan	200 Perusahaan	100%
Jumlah Tenaga Kerja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan	50 Orang	55 Orang	100%

Berdasarkan data pada tabel 3.2 terget kinerja mengalami perubahan yang ditetapkan pada revisi Rencana Strategis SKPD, target ini berlaku di Tahun 2018 sampai dengan 2021, target ini ditetapkan mengingat kasus hubungan industrial ditahun 2018 relatif tinggi yaitu sebanyak 12 kasus.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

4) Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.

5) Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
6) Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

Kasus Hubungan industrial tidak bisa diprediksi.

Upaya perbaikan :

Mengadakan pembinaan dan penyuluhan ke perusahaan untuk pencegahan kasus hubungan industrial

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

SKPD :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD (%)			Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Urusan Tenaga Kerja									
	Indikator Kinerja SKPD									
1	Angka Pengangguran Terbuka			2,92	2,83	2,73	2,92	2,83	2,73	
B.	Urusan Ketransmigrasian									
	Indikator Kinerja SKPD									
1	Meningkatnya Taraf Hidup di Kawasan Transmigrasi			20	20	20	0	0	17,14	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur dalam meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja di Kabupaten Banjar dapat memberikan pelayanan dalam proses peningkatan penyelenggaran Pendidikan Vokasi.

Tantangan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Masyarakat yang semakin dinamis, makin menuntut pelayanan SKPD terhadap mereka
- Motivasi masyarakat yang Ingin semakin maju dalam mengembangkan keterampilannya

Sedangkan peluang dalam pengembanganpelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

- Meningkatnya komposisi Struktur penduduk usia muda dan kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan pendidikan dan keahlian
- Komitmen Pemerintah Daerah menjadikan urusan ketenagakerjaan masuk dalam 9 (Sembilan) prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM relative masih kurang, karena banyak yang akan memasuki pensiun dengan tingkat pendidikan relatih sedang, anggaran yang tidak memadai, sarana dan prasarana yang masih belum lengkap.

Terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- Kurang optimalnya ketersediaan data ketenagakerjaan untuk menunjang proses perencana pengembangan;
- Belum optimalnya ketersedian aparatur dan perdayagunaan sumberdayamanusia , sarana dan prasarana;
- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang ketenagakerjaan
- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indicator kinerja.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Kenaikan Tarif Dasar Listrik, pengurangan kuota BBM bersubsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat
- Keahlian angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industry
- Masih banyak angkatan kerja yang memiliki pendidikan rendah
- Terbatasnya kesempatan kerja
- Banyak pencari kerja yang terserap didunia kerja yang bukan penduduk Kab. Banjar

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka fungsi dan tugas Disnakertrans terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 dan misi ke-4.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/RENSTRA SKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

SKPD :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	**URUSAN TENAGA KERJA**					**URUSAN TENAGA KERJA**					
1						**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kab Banjar**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layananantarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	**21 %**		
2						**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Banjar	Persentase Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Ketenagakerjaan	3,23%	239.370.000	
								Persentase Tenaga Kerja yang Diberdayakan	27%		
						Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Disabilitas Yang Mendapatkan Pelayanan Ketenagakerjaan	15 Orang	59.370.000	
						Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	150 Orang	180.000.000	
3						**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		Laporan Data Lowongan Kerja	**12 bulan**	54.999.400	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Aplikasi Informasi pasar kerja	4 buah	49.999.600	
						Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah BKK yang dibina	1 buah	4.999.800	
						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah CPMI/CTKI yang Memahami Aturan Migran Keluar Negeri Jumlah PMI/TKI Purna dan Keluarga Yang Dilatih Persentase Kasus PMI Yang Difasilitasi Kepulangannya Persentase PMI (Pra dan Purna) Yang Diberikan Fasilitasi Perlindungan	90 Orang 20 Orang 100% 100%	43.992.400	
						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/PekerjaMigran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/CTKI yang meahami aturan kerja keluar Negeri dan	4 Orang	3.999.000	
						Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI/TKI purna dan keluarga yang terlatih	20 Orang	39.993.400	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase TKA Yang Diberikan Fasilitasi Perpanjangan IMTA	100 %	18.701.200	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Perusahaan yang Memperkerjakan TKA	4 Perusahaan	18.701.200	
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Kab Banjar**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	**15%**	**60.493.600**	
						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab Banjar	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompotensi	14 %		
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah peserta pelatihan kompetensi	32 Orang	60.493.600	
						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Program Produktifitas	2,5%	31.000.000	
						Pengukuran Kompetensi dan		Jumlah perusahaan yang menerapkan	10 Perusahaan	31.000.000	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Produktivitas Tenaga Kerja		program peningkatan produktifitas			
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab Banjar	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP?PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS	23%		
			-			**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Banjar	Persentase Pekerja (PKWT) Yang Dicatatkan Oleh Perusahaann Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Sistem Pengupahan dan Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Persentase Perusahaan yang memiliki PP/PKB Aktif	20 % 80 % 22 %	78.060.000	
			-			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab Banjar	Jumlah perusahaan yang memahami syarat kerja dalam hubungan kerja (PKWT Aktif)	15 perusahaan	37.500.000	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah perusahaan yang memahami syarat kerja dalam hubungan kerja (PP/PKB Aktif)	25 perusahaan		
						Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah perusahaan yang melaksanakan sistem pengupahan dan kepesertaan BPJSKetenaga Kerjaan	100 perusahaan	40.560.000	
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase penyelesaian PPHI (Penyelesian Perselsihan Hubungan Industrial)	100%	50.000.000	
						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja. Dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kasus yang ditindaklanjuti	10 Kasus	50.000.000	
						PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	100.000.000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatkan Capaian KInerja dan Keuangan	100 %	44.910.100	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	11.910.800	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.999.800	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.999.800	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.500.000	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.500.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.999.900	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	9.999.800	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Peraturan Perundang-Undangan	100 %	50.000.000	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat wawasan dan kompetensi	5 Orang	50.000.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	134.479.976	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Banjar	Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	99.999.976	
						Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah perlatan kantor yang terpelihara	12 bulan	34.480.000	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kab Banjar	Terselenggaranya pelayanan administrasi/teknis perkantoran	100 %	160.166.800	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur	Kab Banjar	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	1.836.180.000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	463.324.124	
						Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab Banjar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	35 unit	2.423.000	
						Penyediaan bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	40.002.524	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bahan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	30.578.600	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan/Koran/majalah	360 Buah	1.200.000	
						Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar dan Dalam daerah	1 tahun	360.000.000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan	100 %	171.278.000	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100 %		
						Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Kab Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Kondisi Baik	1 Unit	25.000.000	
						Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	12 Bulan	96.460.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	49.818.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertibnya Perencanaan Laporaan KInerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD dengan baik	100 %	4.410.773.643	

No.	Rancangan awal					Hasil analisa Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.00)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayarkan	14 Bulan	3.696.958.943	
						Penyediaan administrasi tugas ASN		Pelaksana Tugas ASN yang Terpenuhi	13 bulan	677.985.000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Banjar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	35.829.700	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentasae pengembangan kawasan ex. transmigrasi	10,53 %	81.999.900	
						Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah Kawasan yang Berkembang	2 buah	81.999.900	
						Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan warga transmigrasi	32 Orang	31.999.900	
						Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka KemandirianSatuan Pemukiman	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah UPT yang dibantu dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	1 UPT	50.000.000	

Yang sbelah kiri kosongi aja dulu.Rancangan awal. Sebelah kanan berdasarkan Usulan tahun 2022, jumlah duitnya dengan lokasi kegiatannya

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Disnakertrans didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten.Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD banyak usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Disnakertrans selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten.Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel IV

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Dinas Tenaga Kerja dsn Transmigrasi Kabupaten Banjar

No	Urutan Prioritas	Kecamatan	Kegiatan	Lokasi (desa/kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Status usulan	Catatan terhadap status usulan
1	92	Kecamatan Kertak Hanyar	Pelatihan Pesantrean	Se-Kecamatan Kertak Hanyar			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
2	22	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Menjahit	Ds. Baliangin	1 paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
3	23	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Arguci	Ds. Sungai Lurus	1 paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
4	25	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Menjahit	Gunung Batu Desa Gunung Batu	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
5	26	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Cukur Rambut/ Salon	Gunung Batu Desa Gunung Batu	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
6	27	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Perbengkelan	Batu tanam Desa Batu Tanam	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
7	28	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Menjahit	Batu tanam Desa Batu Tanam	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
8	29	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Cukur Rambut/ Salon	Batu tanam Desa Batu Tanam	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
9	30	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Membuat RAB	Sei Lurus Desa Sungai Lurus	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
10	31	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Perbengkelan	Sei Lurus Desa Sungai Lurus	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
11	32	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Menjahit	Baliangin Desa Baliangin	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
12	33	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Keterampilan Servis Elektronik	Psr. Baru Desa Pasar Baru	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	DiTolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang

									diterima Dinas
13	34	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Bengkel Motor/Mobil	Psr. Baru Desa Pasar Baru	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
14	35	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Menjahit	Batang Banyu Desa Batang Banyu	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
15	36	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Cukur Rambut/ Salon/ Rias Penganten	Batang Banyu Desa Batang Banyu	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
16	37	Kecamatan Sambung Makmur	Pelatihan Memasak	Batang Banyu Desa Batang Banyu	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	DiTolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
17	38	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan TTG/ Perbengkelan	Muara Halayung	20 orang	45,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	DiTolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
18	44	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan Menjahit	Handil Purai RT 02	30 Orang	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
19	45	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan/ Keterampilan Menjahit	Desa Lawahan	20 Orang	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
20	49	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan Perbengkelan/ las	Jambu Raya	30 orang	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
21	61	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan/ Keterampilan Menjahit	Rumpiang	30 orang	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
22	64	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan Perbengkelan/Las	Kampung Baru	20 Orang	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
23	68	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan Membuat Sasirangan	Jambu Raya	30 orang	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
24	70	Kecamatan Beruntung Baru	Pelatihan Membuat Kue Kering	Haur Kuning	40 orang	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
25	37	Kecamatan Aluh-aluh	Pelatihan Membut Telur Asin	Podok	5 org	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
26	82	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan Menjahit	Desa Bi'ih dan Desa Loktangga	1 Paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang

									diterima Dinas
		Kecamatan Karang Intan	Pelatihan Membuat Keripik	Desa Mandikapau Barat	1 Paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
27	87	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan dan pengadaan tata rias penganten	Desa Pasar lama	2 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
28	88	Kecamatan Karang Intan	pengadaan Menjahit remaja	Desa Loktangga	30 orang		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
29	89	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan dan pengadaan Keterampilan menjahit	Desa Abirau	3 Kelompok		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
30	91	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan dan pengadaan Menjahit	Desa Biih	1 paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
31	94	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan Otomotif	Desa Mandiangin Timur	10 org		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
32	95	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja	Sungai asam	60org		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
33	97	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan perbengkelan	Sungai alang	1 paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	DiTolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
34	101	Kecamatan Karang Intan	Pelatihan menjahit	Sungai alang	1 paket	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
35	19	Kecamatan Cintapuri Darussalam	Pengembangan kerajinan tangan	Rt. 01, Rt. 02 dan Rt. 03	3 kelompok	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
36	65	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan Komputer Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Akar Baru Rt 01,02,03	1 Paket	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
37	66	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan Perekonomian Warga Desa Pelatihan Perbengkelan	Pemuda/Karang Taruna Desa Tambak Anyar	1 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
38	67	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan Perekonomian Warga Desa Pelatihan Sablon	Pemuda/Karang Taruna Desa Tambak Anyar	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi

39	68	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Pelatihan Tata Boga	Pakauman	16 Orang	16,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
40	70	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Pelatihan Tata Rias	Pakauman	16 Orang	16,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
41	71	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan/ Kursus Komputer Meningkatkan SDM Masyarakat	Desa Melayu	1 Paket	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
42	72	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan/ Kursus Perbengkelan Meningkatkan SDM Masyarakat	Desa Melayu	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
43	73	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan Komputer Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Pematang Baru Rt 01, Rt 02, Rt 03, Rt 04	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
44	74	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan Bengkel Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Pematang Baru Rt 01, Rt 02, Rt 03, Rt 04	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
45	75	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan Bengkel Meningkatkan Skill Remaja	Dalam Pagar Ulu Rt 01,Rt 02, Rt 03	50 Orang	65,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
46	76	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan Sablon Meningkatkan Skill Warga Desa	Dalam Pagar Ulu Rt 01,Rt 02, Rt 03	50 Orang	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
47	77	Kecamatan Martapura Timur	Pelatihan Perbengkelan Peningkatan Perekonomian Warga Desa	Mekar	1 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
48	85	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Pelatihan Komputer	Pakauman	2 Orang	2,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
49	66	Kecamatan Aranio	Pelatihan Menjahit	Aranio, Apuai, Tiwingan Baru, Paau, Belangian, Rantau Balai, Artain, Bunglai	8 Paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi

50	68	Kecamatan Aranio	Pelatihan Tata Boga	Ds Pa'au	1 Paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
51	70	Kecamatan Aranio	Pelatihan Tata Rias	Ds. Kalaan & Ds. Artain	1 Paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
52	73	Kecamatan Aranio	Pelatihan Kerajinan Rotan Bambu	Belangian	1 Paket		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
53	49	Kecamatan Simpang Empat	Tata Boga	Simpang Empat, RT 001 , RT 002 dan RT 003			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
54	50	Kecamatan Simpang Empat	Otomotif	Simpang Empat, RT 001 , RT 002 dan RT 003			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
55	54	Kecamatan Simpang Empat	Pelatihan Bengkel sepeda motor	Berkat Mulya Desa	10 Orang	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
56	55	Kecamatan Simpang Empat	Pelatihan batik sasirangan	Berkat Mulya Desa	10 Orang	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
57	58	Kecamatan Simpang Empat	Pertukangan	Simpang Empat Simpang Empat, RT 001 , RT 002 dan RT 003		100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
58	65	Kecamatan Simpang Empat	Pelatihan Komputer	Sungai Raya Rt.01	10 Orang	63,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
59	67	Kecamatan Simpang Empat	Pelatihan Menjahit	Sungai Raya Rt.01	20 Orang	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
60	79	Kecamatan Simpang Empat	Pelatihan Komputer	Batu Balian Desa			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
61	80	Kecamatan Simpang Empat	Pelatihan Tata Rias	Batu Balian Desa			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
62	86	Kecamatan Simpang Empat	Perbengkelan / Otomotif las kendaraan	Paring Tali			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
63	43	Kecamatan Martapura Barat	Pelatihan Menjahit	Kecamatan Martapura Barat (Peserta diwakili masing" desa)	1 Paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
64	44	Kecamatan Martapura Barat	Pelatihan komputer bagi pencari kerja	Teluk Selong	30 orang	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas

65	46	Kecamatan Martapura Barat	Diklat keterampilan bagi pencari kerja	Sungai Rangas Tengah	1 Paket	1,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
66	47	Kecamatan Martapura Barat	Pelatihan pembuatan kue (SRT, SR, KBU)	Kecamatan Martapura Barat	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
67	48	Kecamatan Martapura Barat	Diklat bordir (SR, KBU)	Kecamatan Martapura Barat	50 orang	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
68	52	Kecamatan Martapura Barat	Pelatihan tata rias pengantin (KBT, AS)	Kecamatan Martapura Barat	30 Orang	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
69	22	Kecamatan Telaga Bauntung	Pelatihan dan keterampilan Pelatihan Perbengkelan	Ds Telaga Ds Rtu Bujur Ds LokTanah Ds Rampah	4 x 5 orang	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
70	29	Kecamatan Telaga Bauntung	Pelatihan dan keterampilan Pelatihan Keterampilan Menjahit Dasar	Ds Telaga Ds Rtu Bujur Ds LokTanah Ds Rampah	4 x 5 orang	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
71	46	Kecamatan Telaga Bauntung	Pelatihan/ Kursus Otomotif	Desa Telaga Baru		50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
72	47	Kecamatan Telaga Bauntung	Pelatihan /Kursus Elektronik	Desa Telaga Baru		50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
73	48	Kecamatan Telaga Bauntung	Pelatihan /Kursus Pertukangan dan Meubel	Desa Telaga Baru		50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
74	17	Kecamatan Tatah Makmur	Penyelenggaraan Pelatihan Montir Anak putus sekolah	Desa Pemangkih Darat			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
75	19	Kecamatan Tatah Makmur	Penyelenggaraan Pelatihan Montir Peningkatan Sumber Daya Manusia	Desa Thaibah Raya			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
76	32	Kecamatan Tatah Makmur	Penyelenggaraan Pelatihan Las Peningkatan Sumber Daya Manusia	Desa Thaibah Raya			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi

77	77	Kecamatan Mataraman	Pelatihan Perbengkelan las da Duco	Mataraman	1 Paket	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
78	82	Kecamatan Mataraman	Pelatihan Bengkel	Bawahan selan	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
79	83	Kecamatan Mataraman	Pelatihan Percetakan	Gunung Ulin	1 Kegiatan	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
80	84	Kecamatan Mataraman	Pelatihan Komputer	Gunung Ulin	1 Kegiatan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
81	85	Kecamatan Mataraman	Pelatihan pembuatan Kue Kering	Gunung Ulin	2 Kelompok	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
82	88	Kecamatan Mataraman	Pelatihan Menjahit	Pasiraman	6 Bulan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
83	26	Kecamatan Gambut	Perlatihan Perbengkelan las dan Kendaraan	Desa Tambak Sirang Baru, Tambak Sirang Darat, Guntung Papuyu	30 Org	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
84	125	Kecamatan Pengaron	Pelatihan Keterampilan Menjahit	Desa Ati'im	3 orang		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
85	126	Kecamatan Pengaron	Pelatihan Keterampilan Payet MTP	Desa Kertak Empat	3 orang		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
86	127	Kecamatan Pengaron	Pelatihan Keterampilan Kue Kering	Desa Kertak Empat	3 orang		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
87	128	Kecamatan Pengaron	Pelatihan Perbengkelan	Desa Kertak Empat	3 orang		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
88	51	Kecamatan Astambul	Pelatihan Perbengkelan	Kaliukan	1 Kegiatan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
89	52	Kecamatan Astambul	Pelatihan Menjahit	RT. 01-06 Benua Anyar.DS	1 Kegiatan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
90	83	Kecamatan Astambul	Pelatihan Pembuatan kain Sasirangan	Sungai Tuan Ilir	1 kegiatan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
91	16	Kecamatan Martapura	Pelatihan Perbengkelan	Kel. Murung Keraton	1.kelompok	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi

92	17	Kecamatan Martapura	Pelatihan Perbengkelan	Ds. Bincau	2.kelompok	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
93	22	Kecamatan Martapura	Pelatihan Las	Ds. Bincau Muara Rt.01-06	1 kegiatan	90,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
94	72	Kecamatan Martapura	Pelatihan Elektronik	Rt.05/02 Ds. Cindai Alus	2 Kelompok	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
95	82	Kecamatan Martapura	Pengadaan mesin bordir	RT.003 Pasayangan Barat	1 buah	4,000000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
97	89	Kecamatan Martapura	- Pelatihan Perbengkelan	Kel. Sungai Paring	15 orang		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
98	90	Kecamatan Martapura	- Pelatihan Menjahit		-15 orang		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
99	91	Kecamatan Martapura	- Pelatihan tata rias	Kecamatan Martapura (Peserta diwakili masing” desa)	1 Paket	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Diterima	Menyesuaikan dengan PAGU Anggaran yang diterima Dinas
100	92	Kecamatan Martapura	- Pelatihan perbaikan handphone	- Rt. 01-03			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
101	93	Kecamatan Martapura	- Pelatihan pembuatan kue	- Rt. 01-03			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi
102	94	Kecamatan Martapura	- Pelatihan bengkel roda 2 dan tambal ban	- Rt. 01-03			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ditolak	Pagu Anggaran Dinas tidak mencukupi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar, tema pembangunan tahun 2020 adalah:

“Percepatan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk pertumbuhan Ekonomi berkualitas”

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan amanah Prioritas pembangunan tahun 2020 yaitu pada **Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.**Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dengan Program Kegiatan (1).Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, (2).penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar melaksanakan 1 urusan, yaitu Urusan Tenaga Kerja.

Disnakertrans mendukung prioritas Nasional ke-3 (Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan kesempatan kerja) dengan kebijakan Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra PD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan Rencana Strategis Disnakertrans Tahun 2016-2021, Disnakertrans memiliki visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”** maka sesuai dengan visi tersebut misi yang diemban oleh Disnakertrans Kabupaten Banjar selama periode 5 tahun mendatang adalah

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnakertrans Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunkan Angka pengangguran	Menurunnya Angka Penggaguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%
2			Persentase Satuan Permukiman ex. Transmigrasi yang berkembang	15.7%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- Pencapaian MDGs
- Pengentasan Kemiskinan
  Terkait masalah pengentasan kemiskinan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar memang tidak ada memiliki kegiatan yang secara langsung berupaya mengurangi kemiskinan namun lebih kepada pelaksanaan kegiatan hulunya yakni terkait pengurangan pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Banjar, karena pengangguran sendiri adalah cikal bakal lahirnya masalah kemiskinan dimasyarakat. Untuk kegiatan pengurangan pengangguran sendiri ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti :
    - Bursa Kerja Khusus
    - Bursa Kerja Online
    - Pelatihan Warga Eks. Transmigrasi
    - Pembangunan Balai Latihan Kerja
    - Upaya Penciptaan wira usaha baru
    - Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

- Pencapaian SPM
  Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, aspek pelaksana kebijakan dan aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- Pengembangan daerah terisolir

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Jumlah program dan kegiatan

  Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada tahun 2021 melaksanakan 2 urusan, 7 program, dan 27 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

  1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
     - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan/Kendaraan Dinas Operasional
     - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
     - Penyediaan Alat Tulis Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
     - Penyediaan Makanan dan Minuman
     - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
     - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
  2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
     - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
     - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
     - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*
   - Implementasi dan Singkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan
   - Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD
   - Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
   - Monitoring dan evaluasi
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. *Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja*
   - Bursa Kerja Khusus
   - Job Fair
   - Penanganan Pekerja Migran Indonesia
   - Penanganan Perusahaan Yang Mempekerjakan TKA
   - Bursa Kerja Online
   - Pelatihan Warga Eks. Transmigrasi
6. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*
   - Upaya Penciptaan Wirausaha Baru
   - Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
7. *Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan*
   - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Hubungan Industrial
   - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
   - Sosialisasi berbagai Peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

  Untuk kegiatan pada tahun 2021 lokasi pelaksanaannya akan tersebar, ada yang berlokasi pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ada juga yang mengambil tempat didesa desa pada beberapa kecamatan seperti kegiatan Upaya Penciptaan wira usaha baru dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. Untuk kegiatan Bursa Kerja Khusus akan berlokasi pada sekolah sekolah menengah yang ada dikabupaten Banjar. dan ada juga yang bertempat diperusahaan perusahaan seperti kegiatan, Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Hubungan Industrial, Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sosialisasi berbagai Peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dll.
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD untuk tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 Kabupaten Banjar untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel berikut :

Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINATAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,274,765,843**	
2	**07**	**02.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**44,910,100**	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73 %	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	11.910.800	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73 %	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2.999.800	
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2.999.800	
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3.500.000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan	100%	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	9.999.900	

						Pemerintah Daerah								
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	9.999.800	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.410.773.643**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayarkan	14 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%		3.696.958.943	
2	07	01	2.02	02	Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pelaksanaan Tugas ASN yang Terpenuhi	13 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	677.985.000	
2	07	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35.929.700	
2	**07**	**01**	**2.05**		**Adminstrasi Kepegawian Perangkat Daerah**								**50.000.000**	
2	07	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah ASN yang meningkat wawasan dan kompentensi	5 Orang	Tingkat Pengangguran Terbuka	100%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50.000.000	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**463.324.124**	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	8 Unit	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	31.543.000	

2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	40.002.524	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Bahan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%		30.578.600	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah bahan bacaan/Koran/ Majalah	360 Buah	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1.200.000	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	360.000.000	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**134.479.976**	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	99.999.976	
2	07	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	12 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	34.480.000	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**171.278.000**	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Kondisi Baik	1 Unit	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	25.000.000	

2	07	01	2.09	02	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	12 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	96.460.000	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	49.818.000	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**								**100.000.000**	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**								**100.000.000**	
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100.000.000	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**91.493.600**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Komptensi**								**60.493.600**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kalster Komptensi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 20.367 Jam	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi	32 Orang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	60.493.000	
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**31.000.000**	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Komptensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 20.367 Jam	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	31.000.000	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**357.063.000**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan AntarKerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**239.370.000**	

2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	21%	Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Ketanagakerjaan	15 Orang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%		59.370.000	
2	07	04	2.01	05	Perluasaan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	21%	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan	150 Orang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	180.000.000	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**54.999.400**	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	21%	Aplikasi Informasi Pasar Kerja	4 Buah	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	49.999.600	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	21%	Jumlah BKK yang dibina	1 Buah	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%		4.999.800	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**								**43.992.400**	

2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Komptensi Calon Pkerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	21%	Jumlah CPMI/CTKI yang memahami aturan kerja keluar Negeri dan	4 Orang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3.999.000	
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	21%	Jumlah PMI/TKI Purna dan Keluarga yang terlatih	20 Orang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	39,993.400	
2	**07**	**04**	**2.05**		**Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**18.701.200**	
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	21%	Laporan Perusahaan yang Memperkerjakan TKA	4 Perusahaan	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	40%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	18.701.200	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**128.060.000**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**78.060.000**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS Bipartit,PKWT, Struktur skala upah dan	23%	Jumlah Perusahaan yang memahami syarat kerja dalam hubungan kerja (PKWT Aktif), Jumlah Perusahaan yang memahami syarat kerja	15 Perusahaan, 25 Perusahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	37.500.000	

						terdaftar peserta BPJS		dalam hubungan kerja (PP/PKB Aktif)						
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS Bipartit,PKWT, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS	23%	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sistem pengupahan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	100 Perusahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	40.560.000	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupatan/Kota**								**50.000.000**	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS Bipartit,PKWT, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS	23%	Jumlah Kasus yang ditindak lanjuti	10 Kasus	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50.000.000	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**81.999.900**	
3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap Kemandirian**								**81.999.900**	
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi	10.53%	Jumlah peserta pelatihan warga Transmigrasi	32 Orang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	31.999.900	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi	10.53%	Jumlah UPT yang dibantu dalam rangka penguatan infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 UPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.73%	Kab. Banjar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50.000.000	

Tabel 2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BANJAR

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		KETERANGAN
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja	**Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi**		**1%**	**677.068.780**					
	Kegiatan Upaya Penciptaan Wira Usaha Baru/	Jumlah orang yang menjadi wirausaha	Kab. Banjar	80 org	153.979.690	APBD 2				
	Kegiatan Keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah orang yang mengikuti keterampilan	Kab. Banjar	80 org	148.113.090	APBD 2				
	Kegiatan Pelatihan Warga eks. Transmigrasi	Jumlah warga eks. Transmigrasi yang dilatih	Kab. Banjar	48 org	74.976.000	APBD 2				
	Program perlindungan dan Pengembangan	**Persentase sengketa industrial yang diselesaikan**		**100 %**	**301.936.600**					

				Lembaga Keenagakerjaan								
				Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial/	Persentase Fasilitasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Banjar	100 %	131.815.800	APBD 2			
				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah PP/PKB/PKWT/permenaker 19/2012 sesuai aturan	Kab. Banjar	45	76.845.00	APBD 2			
				Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan	Kab. Banjar	100 orang	93.275.800	APBD 2			
				Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja	**Persentase peningkatan peluang kerja baru**		**5%**	**375.754.600**	**APBD 2**			
				Bursa Kerja Khusus	jumlah sekolah yang bekerjasama dengan perusahaan	Kab. Banjar	5 sekolah	26.621.400	APBD 2			

				Penangan pekerja migran Indonesia	jumlah kasus TKI /pekerja migran indonesia	Kab. Banjar	4 org	97.372.100	APBD 2				
				Penangana n perusahaa n yang mempekerj akan TKA	jumlah pendamping TKA	Kab. Banjar	5	78.159.800	APBD 2				
				Bursa Kerja Online	jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	Kab. Banjar	2500	173.601.300	APBD 2				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran**		**12 Bulan**	**564.768.000**					
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnaker	12 Bulan	119.798.400	APBD 2				
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya jasa service/perbaikan peralatan kerja	Disnaker	12 Bulan	35.500.000	APBD 2				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK	Disnaker	12 Bulan	51.101.100	APBD 2				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Disnaker	12 Bulan	35.508.500	APBD 2				
				Penyediaan Makanan	Tersedianya makan dan minum harian	Disnaker	12 Bulan	8.300.000	APBD 2				

				dan Minuman	pegawai,tamu dan rapat							
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Disnaker	12 Bulan	264.960.000	APBD 2			
				Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya kelengkapan administrasi surat menyurat	Disnaker	12 bulan	49.600.000	APBD 2			
				Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	**- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah Luasan Bangunan Gedung Kantor**	Disnaker	**12 Bulan**	**236.831.000**				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Disnaker	12 Bulan	59.915.800	APBD 2			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya BBM,suku cadang pemeliharaan Kendaraan Dinas/Kepala	Disnaker	1 Unit	24.508.000	APBD 2			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan operasional R4 yang di pelihara - Jumlah Unit kendaraan Dinas/Operasional	Disnaker	3 unit 25 Unit	103.350.000	APBD 2			

				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		10 Bulan	49.057.200				
				Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	**Terselenggaranya bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas**	Disnaker	**12 Bulan**	**50.000.000**				
				Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang undangan	Tersedianya keikutsertaan aparatur dalam diklat dan bimtek	Disnaker	12 Bulan	50.000.000	APBD 2			
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	**Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun**	Disnaker	**1 Dokumen**	**148.928.700**				
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Disnaker	1 Laporan	35.770.000	APBD 2			
				Implementasi dan Singkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Dokumen yang disusun berdasarkan ketentuan dan singkornisasi kegiatan Pemerintah pusat dan Daerah (Revisi Renstra, Rencana Kerja, proposal kegiatan)	Disnaker	13 dok	3.840.100	APBD 2			

				Koordinasi Penyusunan Rancanagn Anggaran dan Belanja SKPD	Dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA perubahan	Disnaker	100 dok	96.939.000	APBD 2				
				Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Kinerja (LPPD, LKJip, LKPJ, Laporan Triwulan	Disnaker	15 dok	5.904.800	APBD 2				
				Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Hasil Monev (Lap. Realisasi fisik dan keuangan, Tepra, SIPD, RUP, Laporan website portal Disnaker)	Disnaker	28 dok	6.474.800	APBD 2				
				JUMLAH				**2.355.287.680**					

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2022

PROGRAM, KEG1ATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PMDN NO 13 TAHUN 2006		PMDN NO 90 TAHUN 2019			PEMUTAKHIRAN PMDN NO 90 TAHUN 2019		
Program dan Kegiatan	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran**						
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Peralatan dan

			PEMERINTAHAN DAERAH			PEMERINTAHAN DAERAH	Pemerintah Daerah	Perlengkapan Kantor
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor**							

	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Bimbingan teknis implementasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	Bimbingan Teknis Implementasi			

	peraturan perundangunda ngan	Peraturan Perundang-undangan	PEMERINTAHAN DAERAH	Sumber Daya Aparatur	Peraturan Perundang-undangan			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja**				PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKjIP,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	PEMERINTAHAN DAERAH		
	Mnitoring dan Evaluasi	LKPJ, LPPD, Tepra, RKF, Laporan Tahunan)	PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PEMERINTAHAN DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKjIP,		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan administrasi tugas ASN
		dan Semesteran	PEMERINTAHAN DAERAH		Bulanan/Semesteran	PEMERINTAHAN DAERAH		
	penyusunan pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	ADMINISTRASI KEUANGAN	Koordinasi dan penyusunan

	keuangan akhir tahun		PEMERINTAHAN DAERAH		Keuangan Akhir Tahun	PEMERINTAHAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	keuangan akhir tahun SKPD
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan gaji dan tugas ASN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**Persentase Pencari Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		
	Upaya penciptaan Wira Usaha Baru	Jumlah Orang yang menjadi Wira Usaha Baru	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikandan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah Kelompok kerja yang dilatih	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan Transmigrasi lokal	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Penerbitan Izizn lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKA secara terintegrasi
Program PeningkatanKualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Persentase Peningkatan peluang kerja baru**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						
							Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota	Penyelenggaraan unit disabilitas ketenagakerjaan
								Perluasan Kesempatan Kerja
Bursa kerja khusus	Jumlah Sekolah yang bekerjasama dengan perusahaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
Bursa kerja online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

	Job Canvasing	Jumlah lowongan kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-		-	
	Job Fair	Jumlah orang yang mendapatkan peluang kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-		-	
	Penanganan pekerja Migran Indonesia	Jumlah Kasus TKI	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Penanganan perusahaan yang mempekerjakan TKA	Jumlah Pendamping TKA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

	Pelatihan warga Ex Transmigrasi	Jumlah Warga Eks Transmigrasi yang dilatih		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan Transmigrasi lokal	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman
								Penguatan infrastuktur sosial , ekonomi,dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman
		Persentase sengketa industrial yang diselesaikan	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		
Program Perlindungandan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan indudtrial yang selesai ditangani	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial,mogok kerja,dan penutupan perusahaan yang berdampak/berakibat pada kepentingan di 1 (satu) kabupaten/Kota

	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan sosial Ketenagakerjaan	Jumlah PP/PKB/PKWT/Permenaker 19 / 2012 sesuai aturan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahaan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Pengesahaan peraturan perusahaan bagi perusahaan
	Soaialisasi berbagai Perturan pelaksanaan tetang ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang melaksanakan UMP	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2021 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun kelima, masa awal periode renstra 2021-2026.Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja Tahun 2022 DP2KBP3A Kabupaten Banjar dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen perencanaanDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renja ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan, Undang-undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (Satu) tahun, yang dituangkan oleh masih-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Dalam penyusunan Renja oleh Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banjar mengacu pada RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan Resntra DP2KBP3A Kabupaten Banjar periode 2021 -2026. Renja tahun 2022 ini merupakan Renja tahun pertama untuk Bupati terpilih Pemerintah Kabupaten Banjar yang baru periode 2021 - 2026

Program Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian yang menunjang program pembangunan yang ada pada Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar khususnya pada misi 1 (Peningkatan Kualitas Hidup & Kualitas Sumber daya Manusia) dan 2 (Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan). Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Banjar tahun 2022 dilakukan melalui 2 (Dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan. Tahap pertama perumusan rancangan Renja dengan mengolah data dan informasi, analisis gambaran kegiatan, isu-isu, penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra DP2KBP3A Kabupaten Banjar. Kegiatan review hasil evaluasi Renja tahun lalu dan pencapaian Kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran. Penyesuaian dan penyempurnaan rancangan Renja DP2KBP3A kabupaten Banjar sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait.. Tahap 2 (Dua) penyajian rancangan Renja DP2KBP3A Kabupaten Banjar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja DP2KBP3A Kabupaten Banjar, meliputi:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 52 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencna Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 No. 496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2022; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 No. 926);
12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
13. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja SKPD;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja DP2KBP3A Kabupaten Banjar tahun 2022 dimaksudkan untuk :

1. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan.
2. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Memberi gambaran tentang Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar tahun anggaran 2022.
4. Memenuhi kebutuhan Target Kinerja sesuai kondisi sasaran program yang ditetapkan Pemerintah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar tahun anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Racangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakanan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai dengan Kebutuhan.
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
5.3 Rencana Tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Selama tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategiknya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategik yang berada dalam ruang lingkup sesuai dengan tupoksinya, yaitu membantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemrintahan dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lebih jauh lagi jika dipandang dari perspektif Pemerintah Kabupaten Banjar secara keseluruhan, maka hasil capaian kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banjar selama tahun 2020 akan menjadi sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran strategik Pemkab Banjar sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Banjar tahun 2016 -2021.

Meskipun demikian, hasil pencapaian tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, khususnya terhadap target kinerja yang ingin dicapai dalam rencana Kerja.

Penyusunan renja tahun 2022 merupakan renja tahun pertama untuk periode renstra 2021-2026 dengan kepala daerah terpilih. Sedangkan hasil evaluasi renja tahun lalu (2020/2021) yang merupakan renja tahun terakhir dari periode renstra dan hasil evaluasi ini dapat dijadikan acuan/pertimbangan untuk penyusunan renja tahun 2022 meskipun untuk periode renstra yang berbeda, akan tetapi secara kinerja penyelenggaraan urusan masih selaras/bersesuaian.

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator program tahun 2020 semuanya mencapai target yang ditentukan. Untuk melihat lebih jauh Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP2KBP3A Kabupaten Banjar tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Banjar
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat capaian realisasi target resntra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	**Persentase Akseptor KB Aktif**	NA	77,14	72	80,69	112,06	NA	NA	NA
		persentase PUS dengan Usia Isteri di bawah usia 20 tahun	NA	14,43	14	13,80	101,44	NA	NA	NA
2.1.1.15.9	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan	Jumlah peserta masyarakat/pelajar	NA	200	92	92	100	NA	NA	NA
2.1.1.15.10	Fasilitasi Advokasi KIE dan Informasi	penyebaran informasi media	NA	25	25	25	100	NA	NA	NA
2.1.1.15.11	Sosialisasi KKBPK Bagi Mitra Kerja	jumlah dokumen yang dihasilkan	NA	4	2	2	100	NA	NA	NA
2.1.1.15.12	Pelayanan KB	jumlah PUS yang berKB	NA	20,018	19.625	33.110	168,71	NA	NA	NA
	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	**Persentase Kelompok bina ketahanan (KBK) yang aktif**	NA	50	53	53,10	100,18	NA	NA	NA
		Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	NA	80	81	82,69	102,08	NA	NA	NA
2.1.1.18.4	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Bina Ketahanan	jumlah kelompok bina ketahan yang terbentuk	NA	10	20	20	100	NA	NA	NA
2.1.1.18.5	Kesehatan Reproduksi Remaja	jumlah kelompok PIK remaja yang terbentuk	NA	16	20	20	100	NA	NA	NA
2.2.1.20	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**	**Persentase kelompok perempuan dlm usaha ekonomi terbina**	NA	30	25	25	100	NA	NA	NA
2.2.1.20.1	Pendidikan dan Pelatihan,	jumlah peserta	NA	60	30	30	100	NA	NA	NA

	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender								
2.2.1.20.2	Penyuluhan Bagi Ibu RT dalam Membangun Keluarga Sejahtera	jumlah penyuluhan	NA	4	1	1	100	NA	NA	NA
2.2.1.20.3	Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah pelaksaan pembinaan organisasi perempuan	NA	13	16	16	100	NA	NA	NA
2.2.1.20.4	Advokasi dan Fasilitasi PUG	jumlah advokasi dan fasilitasi PUG	NA	5	1	1	100	NA	NA	NA
2.2.1.20.5	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah OPD yang mempunyai data terpilah	NA	21	24	24	100	NA	NA	NA
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi**	NA	97	85	100	117,64	NA	NA	NA
		Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	NA	Madya	Madya	Madya	100	NA	NA	NA
2.2.1.21.1	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	NA	34	25	25	100	NA	NA	NA
2.2.1.21.2	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan/Desa Layak Anak	jumlah skor indikator KLA	NA		0	0	0	NA	NA	NA
		Jumlah Pembinaan Kluster KLA	NA		5	5	100	NA	NA	NA
	Program pelayanan administrasi perkantoran	**pelayanan administrasi perkantoran berupa penyediaan alat barang aneka jasa**	NA	100	100	100	100	NA	NA	NA
		bahan dan makanan berupa makanan keperluan perkantoran	NA	100	100	100	100	NA	NA	NA
		koordinasi pembinaan berupa rapat perjalanan dinas	NA	100	100	100	100	NA	NA	NA
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko & materai sesuai kebutuhan	NA		12	12	100	NA	NA	NA
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air & Listrik	Tersedianya Fasilitas telepon, air bersih, listrik dan internet	NA	2	12	12	100	NA	NA	NA
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya mesin tik, Ac dan komputer kantor	NA		12	12	100	NA	NA	NA
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor DP2KBP3A	NA	5	12	12	100	NA	NA	NA

		kabupaten banjar								
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tersedianya barang cetakan kantor dan biaya penggandaan dokumen	NA		12	12	100	NA	NA	NA
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	NA	2	12	12	100	NA	NA	NA
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih lingkungan kerja	NA	2	12	12	100	NA	NA	NA
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	NA		0	0	0	NA	NA	NA
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman harian pegawai kantor	NA	63	12	12	100	NA	NA	NA
	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah	Terbentuknya komitmen dan diadakannya informasi valid mengenai program dan data dari kabupaten, propinsi dan pusat	NA	90	12	12	100	NA	NA	NA
	Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kegiatan pengelolaan data dan informasi perkantoran semakin lancar	NA	85	12	12	100	NA	NA	NA
	peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana aparatur	**terpeliharanya sarana dan prasana pelayanan perkantoran**	NA	100	100	100	100	NA	NA	NA
		teradakannya sarana dan prasana pelayanan perkantoran	NA	100	100	100	100	NA	NA	NA
	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung/balai penyuluhan KB	NA	0	0	0	0	NA	NA	NA
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	NA	-	0	0	0	NA	NA	NA

	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Teradakannya perlengkapan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran	NA	5	1	0	0	NA	NA	NA

		sesuai kebutuhan								
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Teradakannya peralatan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	NA	11	7	7	100	NA	NA	NA
	Pengadaan Meubeler	Teradakannya mebeleur kantor DP2KBP3A Kab. Banjar	NA	39	38		100	NA	NA	NA
	Pengadaan Tanah	Teradakannya Tanah untuk pembangunan Balai Peenyuluhh KB	NA	0	2	0	100	NA	NA	NA
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor DP2KBP3A Kab. Banjar yang terpelihara	NA	1	0	0	100	NA	NA	NA
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil dinas jabatan yang terpelihara dan mampu mendukung tugas kedinasan	NA	1	1	1	100	NA	NA	NA
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Kendaraan dinas operasional DP2KBP3A Kab. Banjar yang terpelihara	NA	9	7	7	100	NA	NA	NA
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	NA	0	1	1	100	NA	NA	NA
	Peningkatan potensi sumber daya aparatur	**Aparatur yang mengikuti bimtek seminar, lokakarya dan study banding dll**	NA	100	100	100	100	NA	NA	NA
	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat, bimtek dan peningkatan sumber daya manusia lainnya	NA	9	2	2	100	NA	NA	NA
	Meningkatnya Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Nilai SAKIP**	NA	B	BB	BB	100	NA	NA	NA
	penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	NA	4	4	4	100	NA	NA	NA

	Implementasi & sinkronisasi perencanaan program dan	Selesainya penyusunan laporan Renstra, Renja,	NA	4	4	4	100	NA	NA	NA

	kegiatan	RKT dan Rencana aksi								
	Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	NA	4	4	4	100	NA	NA	NA
	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	NA	1	1	1	100	NA	NA	NA
	Penyusunan pelaporan keuangan semesterann	Tersedianya Laporan keuangan semesteran	NA	--	1	2	100	NA	NA	NA
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggran	Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggran	NA	-	-	-	-	NA	NA	NA
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase anggaran resposif gender (ARG) pada pada skpd dan kecamatan	33,33%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase partai politik yg dibina ttg PUG	14,20%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase organisasi perempuan yg dibina	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangnan Kabupaten/kota	Jumlah ARG pd SKPD dan Kecamatan	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta advokasi, Jumlah Peserta Orientasi yang berkenaan dengan ARG	108 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pd organisasi kemasyarakatan kewenangnan kabupaten/kota	jumlah partai politik yg dibina ttg PUG	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	jumlah peserta sosialisasi PUG bid politik	100 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yg dibina	14 Organisasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari Kartini,Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari ibu	100 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase SKPD yg memiliki data terpilah	50,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	pengumpulan dan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD Yg memiliki data terpilah	17 SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangnan Kabupaten/Kota	Dokumen Data terpilah Gender	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase kecamatan TPK2D	5,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan TPK2D YG dibina	1 Kec	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pelaksanaan KIE KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	jumlah peserta rakor TPK2D, Jumlah peserta sosialisasi TPK2D, pelatihan life skiil	230 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di dampingi	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinsi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang didampingi	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Program perlindungan khusus anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

		yang di dampingi								
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yg melibatkan para pihak lingkup daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangna kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yg memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlahkorban kekerasan terhadap anak yang didampingi	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Program Pemenuhan Hak Anak	Presentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	10%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Jumlah Kecamatan Layak Anak	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Advokasi Kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media, Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	persentase UPPKS yg dibina	64,70%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pembinaan kelompok BKB, BKR,	BKB : 74.63% BKL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

		BKL, PIK -R	: 100% BKR: 60% PIK R: 53.06%						
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah UPPKS yg dibina	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PIK -R yg dibiina	BKB : 103 BKR: 48 BKL: 77 PIK R: 61	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS	34	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Orientasi dan Pelatihan Teknis pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/kader UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS	34	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Program pembinaan keluarga berencana	Persentase peserta KB MKJP	8,10%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta MKJP	2000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor pelayanan IUD, Implant, MOP, MOW, Jumlah akseptor yg lepas IUD dan Impalnt	2000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jml peserta mkjp dgn komplikasi berat	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Perempuan yang menikah dibawah usia 19 Tahun	13,75%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	jumlah Perempuan yang menikah dibawah usia 19 Tahun	180 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Komunikasi, Informasi dan	Jumlah peserta yang	85 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	mengikuti Sosialisasi PUP								
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	jumlah penyebaran informasi media	21 kali	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Program pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga yang termutakhirkan	20%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase Rumah dataku yg terbentuk di desa	7,22%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah data keluarga yang termutakhirkan	3.080 PUS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk di Desa	20 desa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	jumlah PUS yang terdata	3.080 PUS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk di desa di Kabupaten Banjar	20 desa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra,Renja,Renja Perubahan,PK,PK Perubahan,IKU,RKT dan RKT Perubahan yang tersusun	7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA yang tersusun	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ dan IKK	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan Evaluasi Renstra,Renja dan RFK	16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yg mengikuti bimtek perundang-undangan	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi & konsultasi SKPD	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya barang	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penunjang urusan pemerintahan								
	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor	25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas jabatan	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas operasional	8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana gedung kantor	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Prog. Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelompok perempuan dlm usaha ekonomi terbina	NA	NA	NA	NA	NA	35%	10%	28,57%
	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pd Lembaga Pemerintah Kewenangan kab/Kota	Terlaksananya advokasi & fasilitasi PUG	NA	NA	NA	NA	NA	5 Kali	2 kali	40%
	Advokasi kebijakan & pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi & fasilitasi PUG	NA	NA	NA	NA	NA	5 Kali	2 kali	40%
	Penguatan & Pengembangan lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan kab/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan	NA	NA	NA	NA	NA	20 organisasi	20 organisasi	100%
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan	NA	NA	NA	NA	NA	20 organisasi	20 organisasi	100%

	Kewenangan kab/Kota									
	Pengembangan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Kewenangan kab/Kota	Jumlah penyuluhan	NA	NA	NA	NA	NA	12 Kali	2 kali	16,67%
	Prog. Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kelompok perempuan dlm usaha ekonomi terbina	NA	NA	NA	NA	NA	35%	10%	28,57%
	Penguatan & Pengembangan lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dlm mewujudkan KG & Hak Anak yg wilayah Kerjanya dalam Daerah kab/Kota	Jumlah peserta pendidikan & pelatihan peningkatan peranserta & kesetaraan Gender	NA	NA	NA	NA	NA	100 orang	10 Orang	10%
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah kab/Kota	Jumlah peserta pendidikan & pelatihan peningkatan peranserta & kesetaraan Gender	NA	NA	NA	NA	NA	30 org	10 Orang	33%
	Prog. Pengelolaan Sistem data Gender & Anak	Persentase kelompok perempuan dlm usaha ekonomi terbina	NA	NA	NA	NA	NA	**35%**	10%	100%
	Pengumpulan, pengelolaan analisis & penyajian data gender dan Anak dlm kelembagaan data ditingkat Daerah kab/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai data terpilah	NA	NA	NA	NA	NA	26 OPD	26 OPD	100%
	Penyediaan data gender & anak di kewenangan Kab/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai data terpilah	NA	NA	NA	NA	NA	26 OPD	26 OPD	100%
	Prog. Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan & anak yg didampingi	NA	NA	NA	NA	NA	90%	100%	111,11%
	Pencegahan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & anak yg ditangani	NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	27 Kasus	108%
	Koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan kebijakan prog & kegiatan pencegahankekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & anak yg ditangani	NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	27 Kasus	108%
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinsi kewenangan kabupaten/kota (DAK NF)		NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan		NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	0	0

	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (**DAK NF**)									
	Program perlindungan khusus anak (DAK NF)		NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	0	0
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yg melibatkan para pihak lingkup daerah (DAK NF)		NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	0	0
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangna kabupaten/kota (**DAK NF**)		NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	0	0
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yg memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota (DAK NF)		NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	0	0
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yg memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota (**DAK NF)**		NA	NA	NA	NA	NA	25 Kasus	0	0
	Prog. Pemenuhan Hak Anak	Kategori KLA	NA	NA	NA	NA	NA	Nindya	350	100%
	Pelembagaan PHA pd lembaga Pemerintah, Non Pemerintah & dunia usaha kewenangan Kab/Kota	Pembinaan cluster KLA	NA	NA	NA	NA	NA	5 Cluster	5 Cluster	100%
	Koordinasi & sinkronisasi pelembagaan PHA Kewenangan Kab/Kota	Pembinaan cluster KLA	NA	NA	NA	NA	NA	5 Cluster	5 Cluster	100%
	Program pembinaan keluarga berencana	Persentase akseptor KB aktif	NA	NA	NA	NA	NA	75%	82,60%	110%
	Pelaksanaan advokasi, KIE pengendalian penduduk & KB sesuai kearifan budaya lokal (BOKB)		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Penyediaan & distribusi sarana KIE Program KKBPK (**BOKB**)		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya sarana pendukung operasional PKB/PLKB	NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (**BOKB**)		NA	NA	NA	NA	NA		0	0

	Pengendalian & pendistribusian kebutuhan alat & obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di wilayah daerah Kab/kota	PUS yang ber KB	NA	NA	NA	NA	NA	19.625 PUS	0	0
	Pengendalian, pendistribusian alat & obat kontrasepsi & sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan & jejaringnya (**BOKB**)		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP (**BOKB**)		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB (**DAK FISIK REGULER**)		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB (Pendamping DAK FISIK REGULER) **APBD**		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Dukungan operasional pelayanan Kb bergerak	PUS yang ber KB	NA	NA	NA	NA	NA	19.625 PUS	5440	27,72%
	Pemberdayaan & Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan TK Daerah Kab/Kota dlm pelaksanaan pelayanan & Pembinaan kesertaan Ber-KB		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	Pelaksanaan & Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB (**BOKB**)		NA	NA	NA	NA	NA		0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase kelompok Bina ketahan Yang Aktif	NA	NA	NA	NA	NA	55%	20 Kelompok	100%
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Bina Ketahanan yg terbentuk	NA	NA	NA	NA	NA	20 Kelompok	20 Kelompok	100%
	pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan & kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (**DAK Fisik Penugasan**)	Tersedianya sarana BKB KIT dan KIT Siap Nikah	NA	NA	NA	NA	NA	22 Paket	0	0
	Orientasi dan Pelatihan Teknis pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok Bina Ketahanan yg terbentuk	NA	NA	NA	NA	NA	20 Kelompok	20	100%

	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan & kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS & Pemberdayaan Ekonomi keluarga /UPPKS) (**BOKB**)		NA	NA	NA	NA	NA			0
	Program pengendalian Penduduk	Persentase PUS dgn usia insteri di bawah usia 20 tahun	NA	NA	NA	NA	NA	13,75%	13,83%	99%
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	2 Kegiatan	1	50%
	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kab/Kota terhadap kependudukan, keluarga berencana & pembangunan keluarga (Prog. KKBPK)	Jumlah Peserta	NA	NA	NA	NA	NA	50 org	25	50%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase PUS dgn usia insteri di bawah usia 20 tahun	NA	NA	NA	NA	NA	13,75%	13,83%	99%
	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk & KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	4 Kegiatan	1	25%
	Advokasi Prog. KKBPK kepada Stakeholders & Mitra Kerja	terlaksananya program KKBPK	NA	NA	NA	NA	NA	5 Kegiatan	3	60%
	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Prog. KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah peserta masyarakat/pelajar	NA	NA	NA	NA	NA	110 org	68 orang	62%
	Promosi & KIE Prog. KKBPK melaluui media massa, cetak & elektronik serta media luar ruang	penyebarluasan informasi media	NA	NA	NA	NA	NA	25 Kali	17 kali	68%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	NA	NA	NA	NA	NA	2 Dok	2 Dok	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	NA	NA	NA	NA	NA	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dok	0	0

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dok	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan kinerja	NA	NA	NA	NA	NA	4 Dok	4 Dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji & tunjangan ASN	NA	NA	NA	NA	NA	27 ASN	27 ASN	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pendukung administrasi & teknis perkantoran	NA	NA	NA	NA	NA	13 Bulan	7 bulan	53,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	NA	NA	NA	NA	NA	1Keg	1Keg	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	NA	NA	NA	NA	NA	2 orang	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	NA	NA	NA	NA	NA	2 orang	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan perkantoran sehari-hari	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/listrik penerangan	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu yang difasilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	1 tahun	6 bulan	50%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah & dalam	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%

		daerah								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan mebeleur	NA	NA	NA	NA	NA	1 Paket	0	0
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebeleur	NA	NA	NA	NA	NA	1 Paket	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang kegiatan perkantoran**	NA	NA	NA	NA	NA	1 tahun	6 bulan	50%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai & jasa pengiriman surat	NA	NA	NA	NA	NA	850 lembar	170	20%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air bersih & internet	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas**	NA	NA	NA	NA	NA	1 tahun	6 bulan	50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya gedung kantor & kendaraan dinas	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	6 bulan	50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor & Bangunan lainnya	Peningkatan Kualitas gedung	NA	NA	NA	NA	NA	1 buah	1 buah	5%

Untuk pengisian tabel di atas berdasarkan periode renstra sebelumnya. Dan untuk beberapa kolom tidak terisi karena untuk nomenklatur program / kegiatan dengan adanya PMDN 90, berbeda dan pelaksaanaan 2021 merupakan masa transisi serta hasil pemetaan dari PMDN 90 dan kepmen 050/.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Peringkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banjar tidak lepas dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi.

2.2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut DP2KBP3A mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi pada umumnya adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya. Susunan Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan Organisasi pada DP2KBP3A Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi 3 Sub Bagian yaitu :
   a. Sub Bagian Perencanaan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Perempuanmembawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :

a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
b. Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan / Gender

4. Bidang Perlindungan Anak, membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
   a. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
   b. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
5. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
   a. Seksi Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan;
   b. Seksi Advokasi Komunikasi,Informasi dan Edukasiserta Data Informasi.
6. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
   a. Seksi Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
   b. Seksi Bina Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi.
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari organisasi DP2KBP3A Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   b. Perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
   d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
   e. pengawasan dan pengendalian bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
   g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   h. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
j. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanandinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpinolehseorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pemberdayaan Perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan / Gender;
b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan / Gender;
c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan / Gender;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan / Gender;

e. penyelenggaraan teknis urusan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan / Gender;
f. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
d. penyelenggaraan teknis urusan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengendalian Penduduk.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;
b. Pengkoordinasian kegiatan Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;
d. Pengkoordinasian kegiatan Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;
e. Penyelenggaraan teknis urusan Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;

f. Pengkoordinasian kegiatan Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;
g. Penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;
h. Pengkoordinasian kegiatan Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Data Informasi;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
b. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Bina Ketahanandan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Kesertaan Keluarga Berencanadan Kesehatan Reproduksi;
c. Pengkoordinasian kegiatan bidang Bina Ketahanandan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
d. Penyelenggaraan teknis urusan Bina Ketahanandan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan Bina Ketahanandan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis dinasyang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
b. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
c. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

8. Kelompok jabatan Fungsional
   a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugasdinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
   c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
   e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
   f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 seluruhnya mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome ada 5 indikator, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output ada 29 indikator. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar Tahun 2020

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IKU												
	Persentase kelahiran pada usia ideal (20-40 tahun)			60	65	70	-	68,44	89,11%	70	-	
	Persentase kelompok Perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi			50,95	51	51,05	-	51,71	51,50%	51,05	-	
	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak			70	75	70	-	100	100%	70	-	
	meningkatnya ekonomi keluarga			-	-	-	67,05%	-	-	-	67,05%	
	Meningkatnya kepersertaan KB			-	-	-	81,69%	-	-	-	81,69%	
	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dlm pembangunan			-	-	-	0,5025	-	-	-	0,5025	

	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak			-	-	-	100%	-	-	-	100%	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak			-	-	-	801	-	-	-	801	
Indikator Kinerja Kunci												
	Persentase Anggaran Reponsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD			-	-	-	-	0,05	-	-	-	
	Persentase Anak korban kekerasan yg ditangani instansi terkait			-	-	-	-	0,01	-	-	-	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100 penduduk perempuan			-	-	-	-	0,05	-	-	-	
	Persentase korban kekerasan perempuan yg terlayani			-	-	-	-	100	-	-	-	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan			-	-	-	-	97,59	-	-	-	
	TFR (Angka Kelahiran Total)			-	-	-	-	6,97	-	-	-	
	Angka kelahiran remaja umur 15 – 19 th (ASFR)			-	-	-	-	30,85	-	-	-	
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)			-	-	-	-	77,14	-	-	-	
	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet need)			-	-	-	-	22,86	-	-	-	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			-	-	-	-	-	14,3%	-	-	
	Persentase anak korban kekerasan yg ditangani instansi terkait Kab/Kota			-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	$\frac{11}{100.000}$	-	-	
	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilatih PUG			-	-	-	-	-	17	-	-	

	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	17	-	-	
	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota			-	-	-	-	-	0	-	-	

	(Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak											
	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			-	-	-	-	-	3	-	-	
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			-	-	-	-	-	3	-	-	
	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD Kab/Kota)			-	-	-	-	-	1	-	-	
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan			-	-	-	-	-	15	-	-	
	Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih			-	-	-	-	-	0	-	-	
	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			-	-	-	-	-	15	-	-	
	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	0	-	-	
	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			-	-	-	-	-	4	-	-	
	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi			-	-	-	-	-	5	-	-	
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			-	-	-	-	-	100%	-	-	
	TFR (angka kelahiran total)			-	-	-	-	-	2,38	-	-	
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)			-	-	-	-	-	80,68%	-	-	

	Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang di Perdakan			-	-	-	-	-	Ada	-	-	
	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun			-	-	-	-	-	2091	-	-	
	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)			-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Jumlah stakeholder / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			-	-	-	-	-	12 SKPD	-	-	
	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP			-	-	-	-	-	100%	-	-	
	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)								80,68%	-	-	
	Persentase peserta metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)								5,73%	-	-	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif								2 Klmpk	-	-	
	Persentase pelayanan KB pasca persalinan								46,16%	-	-	
	Persnetase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesetaan rendah								12,7%	-	-	
	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)								80,05%	-	-	

Untuk tahun 2022 pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Banjar menggunakan IKU terbaru dan penyajian tabel dimaksudkan untuk melihat kinerja penyelenggaraan/IKK sesuai dengan Permendagri 18/2020.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Peringkat daerah

2.3.1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu :

1. Pembangunan berwawasan kependudukan
2. Bonus demografi
3. Pelayanan KB di Era JKN

4. PIK Remaja membangun remaja yang ramah

Arah kebijakan yang akan dilakukan :

1. Menurunkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya berusia dibawah 20 tahun.
2. Meningkatkan cakupan PUS menjadi peserta KB Baru
3. Meningkatkan cakupan PUS menjadi peserta KB Aktif
4. Meningkatkan partisipasi pria dalam ber KB.
5. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).
6. Kecukupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk masyarakat miskin.

2.3.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu :

1. Masih perlunya sosialisasi dan orientasi tentang persoalan perempuan dan anak (P2TP2A, Kelurahan/Kabupaten/Kota Layak Anak).
2. Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan public.
3. Data terpilah gender belum akurat dan belum dimanfaatkan secara operasional oleh SKPD terkait.
4. Masih perlunya peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak dari nilai sosial budaya masyarakat Banjar pada umumnya.

Arah kebijakan yang akan dilakukan :

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait tentang P2TP2A.
2. Pelatihan Advokasi, dan pencatatan pelaporan tentang kekerasan perempuan dan anak.
3. Meningkatkan jejaring antar Dinas/Instansi terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan pada awal usulan terdapat 10 program, 21 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. hal ini sama dengan pada saat analisis kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Program terdiri dari 9 operasional dan 1 program untuk rutin. Sedangkan untuk kegiatan terdiri dari 14 operasional dan 7 kegiatan rutin. Sedangkan untuk Sub Kegiatan terdiri dari 20 operasional dan 26 Sub Kegiatan rutin yang berada dalam SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Banjar

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kab. Banjar	Persentase anggaran resposif gender (ARG) pada pada skpd dan kecamatan	33,33%	**Rp. 80.702.100**	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kab. Banjar	Persentase anggaran resposif gender (ARG) pada pada skpd dan kecamatan	33,33%	**Rp. 105.207.100**	
		Kab. Banjar	Persentase partai politik yg dibina ttg PUG	14,20%			Kab. Banjar	Persentase partai politik yg dibina ttg PUG	14,20%		
		Kab. Banjar	Persentase organisasi perempuan yg dibina	100%			Kab. Banjar	Persentase organisasi perempuan yg dibina	100%		
	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangnan Kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah ARG pd SKPD dan Kecamatan	18	Rp. 47.479.800	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangnan Kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah ARG pd SKPD dan Kecamatan	18	Rp.34.854.100	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Banjar	Jumlah Peserta advokasi, Jumlah Peserta Orientasi yang berkenaan dengan ARG	108 orang	Rp. 47.479.800	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Banjar	Jumlah Peserta advokasi, Jumlah Peserta Orientasi yang berkenaan dengan ARG	108 orang	Rp. 34.854.100	
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pd organisasi kemasyarakatan kewenangnan kabupaten/kota	Kab. Banjar	jumlah partai politik yg dibina ttg PUG	2	Rp. 23.126.600	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pd organisasi kemasyarakatan kewenangnan kabupaten/kota	Kab. Banjar	jumlah partai politik yg dibina ttg PUG	2	Rp. 11.536.800	

	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Banjar	jumlah peserta sosialisasi PUG bid politik	100 orang	Rp. 23.126.600	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Banjar	jumlah peserta sosialisasi PUG bid politik	100 orang	Rp 11.536.800	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah organisasi perempuan yg dibina	14 Organisasi	Rp. 10.095.700	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah organisasi perempuan yg dibina	14 Organisasi	Rp. 58.816.200	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari Kartini,Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari ibu	100 orang	Rp. 10.095.700	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari Kartini,Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari ibu	100 orang	Rp. 58.816.200	
	Program Pengelolaan eligi data gender dan anak	Kab. Banjar	Persentase SKPD yg memiliki data terpilah	50,00%	Rp. 7.960.400	Program Pengelolaan eligi data gender dan anak	Kab. Banjar	Persentase SKPD yg memiliki data terpilah	50,00%	Rp. 7.960.300	
	pengumpulan dan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah SKPD Yg memiliki data terpilah	17 SKPD	Rp. 7.960.400	pengumpulan dan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah SKPD Yg memiliki data terpilah	17 SKPD	Rp. 7.960.300	
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangnan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Dokumen Data terpilah Gender	1 Dokumen	Rp. 7.960.400	Penyediaan data gender dan anak di kewenangnan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Dokumen Data terpilah Gender	1 Dokumen	Rp. 7.960.300	
	Program peningkatan kualitas keluarga	Kab. Banjar	Persentase kecamatan TPK2D	5,00%	Rp. **41.026.100**	Program peningkatan kualitas keluarga	Kab. Banjar	Persentase kecamatan TPK2D	5,00%	**Rp. 36.690.700**	
	Peningkatan	Kab. Banjar	Jumlah	1 Kec	Rp. 41.026.100	Peningkatan	Kab. Banjar	Jumlah Kecamatan	1 Kec	Rp.	

	kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan TPK2D YG dibina			kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota		TPK2D YG dibina		36.690.700	
	Pelaksanaan KIE KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Banjar	jumlah peserta rakor TPK2D, Jumlah peserta sosialisasi TPK2D, pelatihan life skiil	230 Orang	Rp. 41.026.100	Pelaksanaan KIE KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Banjar	jumlah peserta rakor TPK2D, Jumlah peserta sosialisasi TPK2D, pelatihan life skiil	230 Orang	Rp. 36.690.700	
		Kab. Banjar	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di dampingi	100%			Kab. Banjar	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di dampingi	100%		
	Program Perlindungan Perempuan	Kab. Banjar	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di dampingi	100%	**Rp. 34.000.000**	Program Perlindungan Perempuan	Kab. Banjar	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di dampingi	100%	**Rp. 33.599.900**	
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3	Rp. 25.000.000	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3	Rp. 24.999.900	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	3	Rp. 25.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	3	Rp. 24.999.900	
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinsi	Kab. Banjar	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang didampingi	40	Rp. 9.000.000	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinsi	Kab. Banjar	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang didampingi	40	Rp. 8.600.000	

	kewenangan kabupaten/kota					kewenangan kabupaten/kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	40	Rp. 9.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	40	Rp. 8.600.000	
	Program perlindungan khusus anak	Kab. Banjar	persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di dampingi	100%	Rp. 34.322.300	Program perlindungan khusus anak	Kab. Banjar	persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di dampingi	100%	Rp. 33.711.320	
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yg melibatkan para pihak lingkup daerah	Kab. Banjar	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3	Rp. 9.000.000	Pencegahan kekerasan terhadap anak yg melibatkan para pihak lingkup daerah	Kab. Banjar	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3	Rp. 14.932.400	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangna kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	0,03	Rp. 9.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangna kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	0,03	Rp. 14.932.400	
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yg memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlahkorban kekerasan terhadap anak yang didampingi	40	Rp. 25.322.300	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yg memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Banjar	Jumlahkorban kekerasan terhadap anak yang didampingi	40	Rp. 18.778.920	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang	Kab. Banjar	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	40	Rp. 25.322.300	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang	Kab. Banjar	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	40	Rp. 18.778.920	

	memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota					memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota					
	Pemenuhan Hak Anak	Kab. Banjar	Presentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	10%	Rp. 57.322.000	Pemenuhan Hak Anak	Kab. Banjar	Presentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	10%	Rp. 42.991.500	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Kab. Banjar	Jumlah Kecamatan Layak Anak	2	Rp. 57.322.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Kab. Banjar	Jumlah Kecamatan Layak Anak	2	Rp. 42.991.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	5	Rp 31.322.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	5	Rp 24.655.900	
	Advokasi Kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media, Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	5	Rp 26.000.000	Advokasi Kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media, Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Kab. Banjar	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	5	Rp 18.335.600	
		Kab. Banjar	Persentase usaha peningkatan	64,70%			Kab. Banjar	Persentase usaha peningkatan	64,70%		

			pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) YG aktif					pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) YG aktif			
		Kab. Banjar	presentasi keluarga sejahtera	67,05%			Kab. Banjar	presentasi keluarga sejahtera	67,05%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Kab. Banjar	persentase UPPKS yg dibina	64,70%	Rp. 49.367.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Kab. Banjar	persentase UPPKS yg dibina	64,70%	Rp. 70.975.600	
		Kab. Banjar	Persentase pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, PIK -R	BKB : 74.63% BKL : 100% BKR: 60% PIK R: 53.06%			Kab. Banjar	Persentase pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, PIK -R	BKB : 74.63% BKL : 100% BKR: 60% PIK R: 53.06%		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjar	Jumlah UPPKS yg dibina	2	Rp. 49.367.600	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjar	Jumlah UPPKS yg dibina	2	Rp. 70.975.600	
		Kab. Banjar	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PIK -R yg dibiina	BKB : 103 BKR: 48 BKL: 77 PIK R: 61			Kab. Banjar	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PIK -R yg dibiina	BKB : 103 BKR: 48 BKL: 77 PIK R: 61		
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Banjar	Jumlah Pengelola UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS	34	Rp 35.367.600	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Banjar	Jumlah Pengelola UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS	34	Rp 35.367.600	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kab. Banjar	Jumlah Pelaksana/kader	34	Rp 14.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kab. Banjar	Jumlah Pelaksana/kader	34	Rp 35.608.000	

	pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS			pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS			
		Kab. Banjar	IPK (indeks pembangunan keluarga)	60,32			Kab. Banjar	IPK (indeks pembangunan keluarga)	60,32		
		Kab. Banjar	Persentase peserta KB aktif	81,69%			Kab. Banjar	Persentase peserta KB aktif	81,69%		
	Program pembinaan keluarga berencana	Kab. Banjar	Persentase peserta KB MKJP	8,10%	Rp. 284.047.200	Program pembinaan keluarga berencana	Kab. Banjar	Persentase peserta KB MKJP	8,10%	Rp. 205.425.600	

	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota	Kab. Banjar	Jumlah peserta MKJP	2000		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota	Kab. Banjar	Jumlah peserta MKJP	2000		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Banjar	jumlah akseptor pelayanan IUD, Implant, MOP, MOW, Jumlah akseptor yg lepas IUD dan Impalnt	2000	Rp . 89.561.200	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Banjar	jumlah akseptor pelayanan IUD, Implant, MOP, MOW, Jumlah akseptor yg lepas IUD dan Impalnt	2000	Rp . 57.179.300	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Banjar	Jml peserta mkjp dgn komplikasi berat	2	Rp 4.500.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Banjar	Jml peserta mkjp dgn komplikasi berat	2	Rp 4.500.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di	Kab. Banjar	PENDAMPING DAK		Rp. 204.876.600	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di	Kab. Banjar	PENDAMPING DAK		Rp. 146.707.300	

	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (14 03 2.03 06)	Kab. Banjar			Rp 110.815.400	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (14 03 2.03 06)	Kab. Banjar			Rp 85.028.000	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Banjar	Persentase Perempuan yang menikah dibawah usia 19 Tahun	13,75%	Rp. . 284.047.200	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kab. Banjar	Persentase Perempuan yang menikah dibawah usia 19 Tahun	13,75%	Rp. 205.425.600	
	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Kab. Banjar	jumlah Perempuan yang menikah dibawah usia 19 th	180 orang	Rp. 79.170.600	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Kab. Banjar	jumlah Perempuan yang menikah dibawah usia 19 Tahun	180 orang	Rp. 58.718.300	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Banjar	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi PUP	85 orang	Rp 19.771.700	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Banjar	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi PUP	85 orang	Rp 9.571.000	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kab. Banjar	jumlah penyebaran informasi media	21 kali	Rp 59.398.900	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kab. Banjar	jumlah penyebaran informasi media	21 kali	Rp 49.147.300	
	Program pengendalian Penduduk	Kab. Banjar	Persentase data keluarga yang termutakhirkan	20%	Rp. 37.126.200	Program pengendalian Penduduk	Kab. Banjar	Persentase data keluarga yang termutakhirkan	20%	Rp. 28.526.900	
		Kab. Banjar	Persentase Rumah dataku yg terbentuk di desa	7,22%			Kab. Banjar	Persentase Rumah dataku yg terbentuk di desa	7,22%		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	jumlah data keluarga yang termutakhirkan	3.080 PUS	Rp37.126.200	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	jumlah data keluarga yang termutakhirkan	3.080 PUS	Rp. 28.526.900	
		Kab. Banjar	Jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk di Desa	20 desa			Kab. Banjar	Jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk di Desa	20 desa		
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Banjar	jumlah PUS yang terdata	3.080 PUS	Rp 20.126.200	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Banjar	jumlah PUS yang terdata	3.080 PUS	Rp 18.854.900	
	Membentuk Rumah Data	Kab. Banjar	jumlah rumah data	20 desa	Rp	Membentuk Rumah Data	Kab. Banjar	jumlah rumah data kependudukan	20 desa	Rp	

	Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		kependudukan yang terbentuk di desa di Kabupaten Banjar		170.000	Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		yang terbentuk di desa di Kabupaten Banjar		9.672.000	
		Kab. Banjar	Persentase Peserta KB Aktif				Kab. Banjar	Persentase Peserta KB Aktif			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Banjar	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 2.163.563.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Banjar	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 6.995.658.283	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100%	Rp. 46.063.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100%	Rp. 36.062.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Renstra,Renja,Renja Perubahan,PK,PK Perubahan,IKU,RKT dan RKT Perubahan yang tersusun	7	Rp. 2.662.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Renstra,Renja,Renja Perubahan,PK,PK Perubahan,IKU,RKT dan RKT Perubahan yang tersusun	7	Rp.2.662.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	Rp.1.799.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	Rp.1.799.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	Rp.1.187.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	Rp.1.186.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen DPA yang tersusun	1	Rp. 1.942.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen DPA yang tersusun	1	Rp.1.941.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1	Rp.1.324.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1	Rp.1.324.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ dan	3	RP. 7.148.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Banjar	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ dan IKK	3	RP.7.147.900	

	Realisasi Kinerja SKPD		IKK			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kab. Banjar	Laporan Evaluasi Renstra,Renja dan RFK	16	Rp.30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kab. Banjar	Laporan Evaluasi Renstra,Renja dan RFK	16	Rp.20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD	100%	Rp. **1.163.806.800**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD	100%	Rp. 6.333.133.587	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	13	Rp.5.207.525.303	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	13	Rp.5.207.525.303	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Rp. 1.161.186.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Rp. 1.122.968.084	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	1	Rp. 1.568.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	1	Rp. 1.568.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	4	Rp. 1.052.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	4	Rp. 1.052.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		Rp **20.000.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	jumlah ASN yg mengikuti bimtek perundang-undangan	2	Rp.20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	jumlah ASN yg mengikuti bimtek perundang-undangan	2	Rp.20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp. **417.151.800**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp. 227.637.491	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya instalasi listrik/penerangan		Rp. 1.883.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya instalasi listrik/penerangan		Rp.1.878.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	5	Rp.60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	5	Rp.50.000.000	
	Penyediaan	Kab. Banjar	Tersedianya	12	Rp. 11.000.000	Penyediaan	Kab. Banjar	Tersedianya	12	Rp.8.000.000	

	Peralatan Rumah Tangga		peralatan rumah tangga			Peralatan Rumah Tangga		peralatan rumah tangga			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	tersedianya bahan eligiou kantor	12	Rp. 11.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	tersedianya bahan eligiou kantor	12	Rp.7.999.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Rp. 4.998.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Rp.5.005.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12	Rp.4.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12	Rp.4.750.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Terselenggaranya rapat koordinasi & konsultasi SKPD	12	Rp. 323.520.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Terselenggaranya rapat koordinasi & konsultasi SKPD	12	Rp.150.003.491	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp. 8.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp. 8.500.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Tersedianya pengadaan mebel	1	Rp. 8.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Tersedianya pengadaan mebel	1	Rp. 8.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp. **115.000.000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp. 65.450.405	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar	Tersedianya jasa surat menyurat	400	Rp 40.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar	Tersedianya jasa surat menyurat	400	Rp. 3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp 100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp.52.340.405	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor	25	Rp 11.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor	25	Rp.10.110.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp. **393.041.400**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp. 324.894.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab. Banjar	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas jabatan	1	Rp. 40.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab. Banjar	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas jabatan	1	Rp. 40.990.000	

	atau Kendaraan Dinas Jabatan					atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas operasional	8	Rp. 227.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas operasional	8	Rp. 209.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana eligi kantor	1	Rp. 125.051.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana eligi kantor	1	Rp. 74.904.300	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun melalui forum Musrenbang Desa, Musrenbang kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Stakeholder menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam rancangan kerja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang kabupaten untuk mematangkan/memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain harus mempedomani Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempertimbangkan Musrenbang kabupaten/RKPD Final.

Usulan dari masyarakat diperoleh pada saat kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan. Usulan berasal dari Kecamatan Beruntung Baru 1 usulan, Kecamatan Aranio 8 usulan, kecamatan Astambul 3 usulan, Kecamatan Martapura Timur 14 usulan, Kecamatan Martapura 9 usulan, Kecamatan aluh-aluh 3 usulan, Kecamatan telaga Bauntung 9 usulan, Kecamatan karang Intan 3 usulan, Kecamatan Martapura Barat 7 usulan, Kecamatan Cintapuri Darusalam 3 usulan dan Kecamatan Simpang Empat 3 usulan. Adapun usulan Musrenbang dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Pa'au	Jumlah pelatihan	1 Paket	
2	Pengadaan Sarana Prasarana Bina Ketahanan Keluarga dan PIK-R	Desa Tiwingan	Jumlah Pengadaan	1 Paket	
3	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Apuai	Jumlah pelatihan	1 Paket	
4	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Artain	Jumlah pelatihan	1 Paket	
5	Pelatihan Manajerial kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Desa Artain	Jumlah pelatihan	1 Paket	
6	Pelatihan Manajerial	Desa Belangian	Jumlah pelatihan	1 Paket	

	kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)				
7	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Tiwingan Baru	Jumlah pelatihan	1 Paket	
8	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Rantau Bujur	Jumlah pelatihan	1 Paket	
9	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sungai Tuan Ilir	Jumlah pelatihan	1 Paket	
10	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Tambak Danau	Jumlah pelatihan	1 Paket	
11	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Tambangan	Jumlah pelatihan	1 Paket	
12	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Muara Halayung	Jumlah pelatihan	1 Paket	diterima
13	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Akar Baru	Jumlah pelatihan	1 Paket	
14	Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa Keramat Baru	Jumlah pelatihan	1 Paket	
15	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Kepala Desa Melayu Tengah	Jumlah pelatihan	1 Paket	
16	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Antasan Senor Ilir	Jumlah pelatihan	1 Paket	
17	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Tambak Anyar	Jumlah pelatihan	1 Paket	
18	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Melayu	Jumlah pelatihan	1 Paket	
19	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Dalam Pagar	Jumlah pelatihan	1 Paket	
20	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Tambak Anyar Ulu	Jumlah pelatihan	1 Paket	
21	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Pekauman	Jumlah pelatihan	1 Paket	
22	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Pekauman	Jumlah pelatihan	1 Paket	
23	Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Desa Tanjung Rema	Jumlah pelatihan	1 Paket	

	Reproduksi bagi Kader KB				
24	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Tanjung Rema	Jumlah pelatihan	1 Paket	
25	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja	Desa Tanjung Rema	Jumlah pelatihan	1 Paket	
26	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Tambak Baru Ulu	Jumlah pelatihan	1 Paket	
27	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Mekar	Jumlah pelatihan	1 Paket	
28	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Pematang Baru	Jumlah pelatihan	1 Paket	
29	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Pekauman Dalam	Jumlah pelatihan	1 Paket	
30	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Pekauman Dalam	Jumlah pelatihan	1 Paket	
31	Pembangunan Balai Penyuluhan KB	Desa Tunggul Irang Ilir	Jumlah pelatihan	1 Paket	
32	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Bunipah	Jumlah pelatihan	1 Paket	
33	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Labat Muara	Jumlah pelatihan	1 Paket	
34	Pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pasayangan Selatan	Jumlah pelatihan	1 Paket	
35	Pelatihan kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	Desa Pasayangan Selatan	Jumlah pelatihan	1 Paket	
36	Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa Pasayangan Selatan	Jumlah pelatihan	1 Paket	
37	Pelatihan kader Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Desa Pasayangan Selatan	Jumlah pelatihan	1 Paket	
38	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Podok	Jumlah pelatihan	1 Paket	
39	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Pemurus	Jumlah pelatihan	1 Paket	
40	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sungai Musang	Jumlah pelatihan	1 Paket	
41	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sei Kitano	Jumlah pelatihan	1 Paket	

42	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Telaga Baru	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
43	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Telaga Baru	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
44	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Rampah	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
45	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Rampah	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
46	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Rampah	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
47	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Rampah	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
48	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Rampah	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
49	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Rantau Bujur	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
50	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Lok Tanah	Jumlah Pembinaan	1 Paket	
51	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sungai Alang	Jumlah pelatihan	1 Paket	
52	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Mali-Mali	Jumlah pelatihan	1 Paket	
53	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Gunung Batu	Jumlah pelatihan	1 Paket	diterima
54	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Gunung Batu	Jumlah pelatihan	1 Paket	
55	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sei Batang	Jumlah pelatihan	1 Paket	
56	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Telok Selong	Jumlah pelatihan	1 Paket	
57	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sei Ranggas Ulu	Jumlah pelatihan	1 Paket	
58	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sei Ranggas Ulu	Jumlah pelatihan	1 Paket	
59	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok	Desa Sei Ranggas Hambuku	Jumlah pelatihan	1 Paket	

	Perempuan				
60	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Surian Hanyar	Jumlah pelatihan	1 Paket	
61	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Simpang Lima	Jumlah pelatihan	1 Paket	
62	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Keramat Mina	Jumlah pelatihan	1 Paket	
63	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Sungai Langsat	Jumlah pelatihan	1 Paket	
64	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Desa Berkat Mulia	Jumlah pelatihan	1 Paket	

Sedangkan usulan dari masyarakat/ eligio untuk program kegiatan tahun anggaran 2022 sebanyak 7 buah. Usulan ini dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar

NO	Program/ Kegiatan	Pengusul	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan kader Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	DARUL QUTNI, SAP MM	banyak balita yang stunting	1 Paket	
2	Pelatihan Manajerial kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	ABD. Rasyid	Warga desa Tambak Sirang Darat sangat sebagian besar tidak ada yang bisa menjahit, oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan menjahit, agar nantinya meningkat pendapatan ekonomi	1 Paket	
3	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja	Sahtam	Kenakalan remaja Pagu: Rp. 30.000.000	1 Paket	
4	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Muhammad Noor	Kurangnya keterampilan untuk ibu rumah tangga	1 Paket	
5	Pelatihan kader Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	H. Muhammad Thoha	Pelatihan Kader PATBM	1 Paket	
	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	Marsuli	Pelatihan Tata Boga	1 Paket	
	Pelatihan Keterampilan Bagi kelompok Perempuan	PC. Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Kabupaten Banjar	untuk meningkatkan penghasilan keluarga dan menambah pengetahuan Ibu Muda tentang Pola Asuh Anak		hibah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakanan Nasional

Prioritas pembangunan pada tahun 2022 disusun berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema dalam pembangunan nasional pada tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Memperkuat Pertahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik..

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penetapan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Kementrian / Lembaga maupun Renstra Provinsi sedikitnya terdapat korelasi secara tidak langsung yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah kabupaten Banjar .

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Kabupaten BanjarTahun 2022 adalah

sebagai berikut :

1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan program pembangunan Urusan Wajib Non Pelayanan DasarPengendalian Penduduk - Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan - Perlindungan Anak (PP-PA) ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ;
2) Menyediakan acuan resmi bagi pejabat SKPD dan jajarannya dalam menyusun rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber dana lainnya;
3) Menjadi acuan resmi dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk - Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan - Perlindungan Anak (PP-PA) yang sistematis, terarah dan berkelanjutan
4) Menjamin Keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan pada setiap tahun anggaran;
5) Merupakan religius pertanggungjawaban dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil .

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai berikut :

VISI :

Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri & Agamis (MANIS).

MISI :

Upaya untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan dilaksanakan dengan 5 (Lima) misi, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Adapun misi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar adalah misi 1 dan 2. Guna pencapaian misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Anak Kabupaten Banjar menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target DP2KBP3A Kabupaten Banjar Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Target Tahun 2022
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	81,02
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,64
			Perlindungan Hak Perempuan	100%
2.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,19%
			Indek pembangunan keluarga	59
3.	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	72,22%
		Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern DP2KBP3A	75

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja tahun 2022 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar memperhatikan dampak dari wabah Covid 19. Dampak social dari Covid-19 yang berpotensi di tahun 2022 ialah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena melemahnya ekonomi masyarakat akibat pengaruh pemutusan hubungan kerja. Program dan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan akan digiatkan di tahun 2022 hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri. Menggiatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar pada Tahun 2022. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

   A. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

      1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
      2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
      3) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
      4) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
      5) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD
      6) Koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

      1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      2) Penyediaan Gaji dan TUnjangan ASN
      3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahunan SKPD
      4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

   C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 Sub Kegiatan sebagai Berikut:

      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Knator
      2) Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

3) Penyediaan peralatan rumah tangga
4) Penyediaan bahan logistik kantor
5) Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
6) Fasilitasi kunjungan tamu
7) Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Pengadaan mebeleur

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana & prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penngendalian Penduduk

Program Penngendalian Penduduk terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain.
2) Pencatatan dan pengumpulan data keluarga

3. Program Pembinaan Keluarga berencana

Program Pembinaan Keluarga berencana terdiri dari 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal
2) Promosi & KIE Program KKBPK melalui media massa cetak, dan elektronik serta media luar ruang

B. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
2) Penyediaan dukungan layanan komplikasi Berat dan kegagalan penggunaan MKJP
3) Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R & Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
2) Orientasi/pelatihan Teknis Pelaksana/kader Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R & Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)

5. Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Advokasi Kebijakan & pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, & Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatn Kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, & Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatn Kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hokum, social & ekonomi.

C. Penguatan & Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan & Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Perlindungan perempuan

Program Perlindungan perempuan terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Pencegahan kekerasan Terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan kekerasan Terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program & kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) & Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) & Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Pelaksanaan komunikasi, informasi & Edukasi KG & perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/kota

8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender & Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender & Anak terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Pengumpulan, Pengolahan Analisa & Kajian Data Gender & Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Penyediaan Data Gender & Anak di kewenangan Kabupaten/Kota

9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut:

A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, & Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, & Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Advokasi kebijakan & pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah & dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota
2) Koordinasi & sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/Kota

10. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program & kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

B. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PROGRAM/Kegiatan/sub kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase anggaran resposif gender (ARG) pada pada skpd dan kecamatan	Kab. Banjar	33,33%		APBD			**Rp. 220.000.000**
		Persentase partai politik yg dibina ttg PUG	Kab. Banjar	14,20%		APBD			
		Persentase organisasi perempuan yg dibina	Kab. Banjar	100%		APBD			
Kegiatan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangnan Kabupaten/kota	Jumlah ARG pd SKPD dan Kecamatan	Kab. Banjar	18		APBD			**Rp 60.000.000**
sub Kegiatan	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta advokasi, Jumlah Peserta Orientasi yang berkenaan dengan ARG	Kab. Banjar	108 orang	Rp. 34.850.100,-	APBD		33,33 Persen	**Rp 60.000.000**
Kegiatan	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pd organisasi kemasyarakatan kewenangnan kabupaten/kota	jumlah partai politik yg dibina ttg PUG	Kab. Banjar	2		APBD			**Rp 60.000.000**
sub Kegiatan	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	jumlah peserta sosialisasi PUG bid politik	Kab. Banjar	100 orang	Rp. 11.536.800,-	APBD		14,20 Persen	Rp.60.000.000

Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yg dibina	Kab. Banjar	14 Organisasi		APBD			**100.000.000**
sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari Kartini,Jumlah peserta oraganisasi perempuan yang mengikuti seminar dalam rangka hari ibu	Kab. Banjar	100 orang	Rp. 58.816.200,-	APBD		100 persen 14,20 Persen 14,20 Persen	100.000.000
Program	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase SKPD yg memiliki data terpilah	Kab. Banjar	50,00%		APBD			**10.000.000**
Kegiatan	pengumpulan dan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD Yg memiliki data terpilah	Kab. Banjar	17 SKPD		APBD			**10.000.000**
sub Kegiatan	Penyediaan data gender dan anak di kewenangnan Kabupaten/Kota	Dokumen Data terpilah Gender	Kab. Banjar	1 Dokumen	Rp . 7.960.400,-	APBD		50 Persen	10.000.000
Program	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase kecamatan TPK2D	Kab. Banjar	5,00%		APBD			**200.000.000**
Kegiatan	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan TPK2D YG dibina	Kab. Banjar	1 Kec		APBD			**200.000.000**
sub Kegiatan	Pelaksanaan KIE KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	jumlah peserta rakor TPK2D, Jumlah peserta sosialisasi TPK2D, pelatihan life skiil	Kab. Banjar	230 Orang	Rp. 36.690.700,-	APBD		2,90 Persen 5 persen	200.000.000
Program	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di dampingi	Kab. Banjar	100%		APBD			**2.569.000**

Kegiatan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Banjar	3		APBD			**142.000.000**
sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Kab. Banjar	3	Rp. 24.999.900,-	APBD		85,00 Persen	142.000.000
Kegiatan	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinsi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang didampingi	Kab. Banjar	40		APBD			**114.900.000**
sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	Kab. Banjar	40	Rp. 8.600.000,-	APBD		100 persen 85,00 Persen	114.900.000
Program	Program perlindungan khusus anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di dampingi	Kab. Banjar	100%		APBD			**256.900.000**
Kegiatan	Pencegahan kekerasan terhadap anak yg melibatkan para pihak lingkup daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Banjar	3		APBD			**142.000.000**
sub Kegiatan	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangna kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media KIE dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	Kab. Banjar	0,03	Rp. 14.932.400,-	APBD		30,00 Persen 100 persen	142.000.000
Kegiatan	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yg memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlahkorban kekerasan terhadap anak yang didampingi	Kab. Banjar	40		APBD			**114.900.000**

sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah rujukan physikolog, jumlah visum	Kab. Banjar	40	Rp. 18.778.920,-	APBD		30,00 Persen 100 persen	114.900.000
Program	Pemenuhan Hak Anak	Presentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	Kab. Banjar	10%		APBD			**64.322.000**
Kegiatan	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kab. Banjar	2		APBD			**64.322.000**
sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	Kab. Banjar	5	Rp. 18.335.600,-	APBD		10 Persen	30.000.000
sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media, Dunia Usaha Kewenananngan Kab/kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, media KIE, dan media elektronik tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak	Kab. Banjar	5	Rp. 24.655.900,-	APBD		10 Persen	34.322.000
Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	persentase UPPKS yg dibina	Kab. Banjar	64,70%		APBD			**101.367.600**
		Persentase pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, PIK -R	Kab. Banjar	BKB : 74.63% BKL : 100% BKR: 60% PIK R: 53.06%		APBD			
Kegiatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah UPPKS yg dibina	Kab. Banjar	2		APBD			**101.367.600**

		Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PIK -R yg dibiina	Kab. Banjar	BKB : 103 BKR: 48 BKL: 77 PIK R: 61		APBD			
sub kegiatan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS	Kab. Banjar	34	Rp. 35.367.600,-	APBD		64,70 Persen 64,70 Persen	51.367.600
sub kegiatan	Orientasi dan Pelatihan Teknis pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/kader UPPKS yg dlatih, jumlah peserta Rakor UPPKS	Kab. Banjar	34	Rp. 35.608.000,-	APBD		64,70 Persen 64,70 Persen	50.000.000
Program	Program pembinaan keluarga berencana	Persentase peserta KB MKJP	Kab. Banjar	8,10%		APBD			**365.876.600**
Kegiatan	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta MKJP	Kab. Banjar	2000		APBD			**245.876.600**
Sub Kegiatan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor pelayanan IUD, Implant, MOP, MOW, Jumlah akseptor yg lepas IUD dan Impalnt	Kab. Banjar	2000		APBD		8,10 Persen	90.561.200
Sub Kegiatan	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jml peserta mkjp dgn komplikasi berat	Kab. Banjar	2		APBD		8,10 Persen	4.500.000
Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	PENDAMPING DAK	Kab. Banjar			APBD			**245.876.600**

sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (14 03 2.03 06)		Kab. Banjar		Rp. 85.028.000,-	APBD		8,10 Persen	150.815.400
Program	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Perempuan yang menikah dibawah usia 19 Tahun	Kab. Banjar	13,75%		APBD			**365.876.600**
Kegiatan	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	jumlah Perempuan yang menikah dibawah usia 19 Tahun	Kab. Banjar	180 orang		APBD			**120.000.000**
Sub Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi PUP	Kab. Banjar	85 orang	Rp. 9.571.000,-	APBD		12,75 Persen 13,75 Persen	40.000.000
Sub Kegiatan	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	jumlah penyebaran informasi media	Kab. Banjar	21 kali		APBD		12,75 Persen 13,75 Persen	80.000.000
Program	Program pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga yang termutakhirkan	Kab. Banjar	20%		APBD			**42.000.000**
		Persentase Rumah dataku yg terbentuk di desa	Kab. Banjar	7,22%		APBD			
Kegiatan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah data keluarga yang termutakhirkan	Kab. Banjar	3.080 PUS		APBD			**42.000.000**
		Jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk di Desa	Kab. Banjar	20 desa		APBD			
Sub Kegiatan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	jumlah PUS yang terdata	Kab. Banjar	3.080 PUS	Rp. 18.854.900,-	APBD		20,00 Persen 20,00 Persen	21.000.000

Sub Kegiatan	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk di desa di Kabupaten Banjar	Kab. Banjar	20 desa	Rp. 9.672.000,-	APBD		20,00 Persen 20,00 Persen	21.000.000
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	100%		APBD			**2.473.744.700**
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	Kab. Banjar	100%		APBD			**61.000.000**
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra,Renja,Renja Perubahan,PK,PK Perubahan,IKU,RKT dan RKT Perubahan yang tersusun	Kab. Banjar	7	Rp. 2.662.100,-	APBD		100 persen	10.000.000
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar	1	Rp. 1.799.400,-	APBD		100 persen	5.000.000
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar	1	Rp. 1.187.000,-	APBD		100 persen	2.000.000
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA yang tersusun	Kab. Banjar	1	Rp. 1.942.000,-	APBD		100 persen	2.250.000
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	Kab. Banjar	1	Rp. 1.324.500,-	APBD		100 persen	1.750.000
sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ dan IKK	Kab. Banjar	3	Rp. 7.148.000,-	APBD		100 persen	10.000.000
sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan Evaluasi Renstra,Renja dan RFK	Kab. Banjar	16	Rp. 20.000,000,-	APBD		100 persen	300.000
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD	Kab. Banjar	100%		APBD			**1.164.754.700**
sub Kegiatan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	Kab. Banjar	13	Rp. 5.207.525.303,-	APBD			

sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Banjar	12	Rp. 1.122.968.084,-	APBD		100 Persen	1.161.186.500
sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	Kab. Banjar	1	Rp. 1.568.200,-	APBD		100 Persen	1.568.200
sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	Kab. Banjar	4	Rp. 1.052.000,-	APBD		100 Persen	2.000.000
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Banjar			APBD		100 Persen	**50.000.000**
sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yg mengikuti bimtek perundang-undangan	Kab. Banjar	2	0	APBD		100 Persen	50.000.000
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banjar	100%		APBD			**538.000.000**
sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan	Kab. Banjar		Rp. 1.878.700,-	APBD			2.500.000
sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	Kab. Banjar	5	Rp. 50.000.000,-	APBD			90.000.000
sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Banjar	12	Rp. 8.000.000,-	APBD			20.000.000
sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Banjar	12	Rp. 7.999.500,-	APBD			14.000.000
sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Banjar		Rp. 5.005.800,-	APBD			6.500.000
sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	Kab. Banjar	12	Rp. 4.750.000,-	APBD			5.000.000
sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Kab. Banjar	12	Rp. 150.003.491,-	APBD			400.000.000

Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan	Kab. Banjar	100%		APBD			**15.000.000**
sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	Kab. Banjar	1	Rp. 8.500.000,-	APBD			15.000.000
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Banjar	100%		APBD			**150.000.000**
sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Banjar	400	Rp. 3.000.000,-	APBD			5.000.000
sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Banjar	12	Rp. 54.340.405,-	APBD			125.000.000
sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor	Kab. Banjar	25	Rp. 10.110.000,-	APBD			20.000.000
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Banjar	100%		APBD			**494.990.000**
sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas jabatan	Kab. Banjar	1	Rp. 40.990.000,-	APBD			40.990.000
sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan dinas operasional	Kab. Banjar	8	Rp. 209.000.000,-	APBD			227.000.000
sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana gedung kantor	Kab. Banjar	1	Rp. 74.904.300,-	APBD			227.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perngkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar tahun 2022, disusun sesuai dengan aturan dan urutan penyusunan usulan kegiatan. Dalam kegiatan Musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan, Forum SKPD maupun Kabupaten.Urusan kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan salah satu prioritas pembangunan dimasyarakat dalam mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Rencana tindak lanjut dari usulan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini akan dipertimbangkan untuk dapat dipakai menjadi acuan dalam penentuan porsi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar tahun 2022. Sehingga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar mendapatkan porsi yang berimbang yaitu dilihat dari realisasi usulan dari bawah, semakin tinggi realisasinya maka semakin baik Renja tersebut. Renja tahun 2022 ini merupakan Renja tahun awal periode 2021 -2026.

Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan urusan kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak Kabupaten Banjar.

12. Dinas Ketahanan Pangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu mengharapkan sarana masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan perubahan RENJA ini. Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Semoga penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi perencanaan dalam pelaksanaan evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan yang dibuat berdasarkan dokumen RKA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2022.

Tahapan penyusunan rencana kerja SKPD dimulai dari persiapan Renja SKPD, penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian akan dituangkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil perumusan akhir rancangan SKPD akan ditetapkan menjadi RKPD dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Renja SKPD menjadi dokumen Renja SKPD.

Renja SKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar termasuk dalam Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kerja Bupati dan Wakil Bupati Banjar yaitu sebanyak 4 (empat) program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, serta Program Pengawasan Kemanan Pangan, melalui pembangunan Misi pertama, yaitu : ***Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia***. Guna mendukung misi pertama tersebut Dinas Ketahanan Pangan mengemban satu sasaran yaitu ***meningkatnya ketahanan pangan pangan dan gizi masyarakat*** dengan indikator sasaran meningkatnya ***Indeks Ketahanan Pangan***.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut Dinas Ketahanan Pangan menjalankan 4 (empat) program kegiatan sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022-2026, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, serta Program Pengawasan Kemanan Pangan, dengan sasaran ***meningkatnya ketahanan pangan pangan dan gizi masyarakat*** dalam rangka mencapai tujuan ***terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas***.

Dinas Ketahanan Pangan menetapkan program kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja (sasaran program) yang harus dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai arah penyusunan Renja SKPD dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan serta Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Banjar, yaitu :

1. Berkembangnya Desa Mandiri Pangan;
2. Persentase Stabilitas Harga Pangan;
3. Persentase Ketersediaan Pangan Utama;
4. Skor PPH Konsumsi;
5. Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan;
6. Skor Keamanan Pangan.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar tahun 2022 juga dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran dengan mengemban tugas daerah yaitu prioritas 4; Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses, Kualitas Konsumsi Pangan dan Kualitas Keamanan Pangan, dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 di atas, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 ini mengacu pada :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
l. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/ Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan;
m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;
n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2022-2026;
s. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai acuan kerja dalam pembuatan RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, sebagai acuan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, serta mengakomodasi perencanaan masyarakat di bidang pangan Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar yang di dalamnya tertuang tujuan, input, output, outcome dan manfaat yang akan dicapai pada tahun 2022 secara berjenjang, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Lebih lanjut tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah :

a. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022;
b. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2022 bagi jajaran birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar;
c. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi pembangunan ketahanan pangan secara umum melalui tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar;
d. Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan;
e. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan melalui pembangunan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar 2022-2026. Dalam penyusunan perlu diperhatikan agar kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan mencermati kemampuan keuangan daerah. Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 sebagai berikut :

Daftar Isi;
Daftar Tabel;
BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar pada tahun 2020 telah melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan, hampir sebagian besar mencapai target kinerja yang diharapkan dengan uraian realisasi program dan kegiatan yang mendukung target kinerja yang direncanakan seperti tabel capaian berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2020 Kabupaten Banjar

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)									
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**								
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Dinas Ketahanan								
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terealisasinya Pelaksanaan Makanan dan Minuman Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Program/Kegiatan - Terealisasinya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	**11**	183
2.09.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan**								
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	13 ASN	13 ASN	13 ASN	13 ASN	100	13 ASN	**36**	276.92
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	**2**	200.00
2.09.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Jumlah Peserta Yang Terampil**								
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Terampil	4 ASN	4 ASN	4 ASN	4 ASN	100	4 ASN	**8**	200.00
2.09.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran**								
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terealisasinya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	- Terealisasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedinasan ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00

2.09.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasional SKPD**									
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya Kelancaran Operasional Perkantoran	12	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terealisasinya Administrasi/Teknis Perkantoran	13	Bulan	13 Bulan	13 Bulan	13 Bulan	100	13 Bulan	**36**	276.92
2.09.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasional TUPOKSI**									
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	**33**	275.00
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita**									
2.09.02.2.01	***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**Jumlah Lumbung Pangan Desa**									
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Meningkatnya Jumlah Lumbung Pangan Desa	1	LPM/LPD	1 LPM/LPD	1 LPM/LPD	1 LPM/LPD	100	1 LPM/LPD	**2**	200.00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Pangan utama	2	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	**4**	200.00

2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**								
2.09.03.2.01	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	**Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**								
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terealisasinya Laporan Berkala Analisis Ketahanan Pangan (FSVA, NBM, SKPG, HBKN)	4	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	**5**	125.00
2.09.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Perberasan - Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi	6	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	**14**	233.33
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Hasil Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat	1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	**2**	200.00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan	13	LDPM	13 LDPM	13 LDPM	13 LDPM	100	13 LDPM	**36**	276.92
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Meningkatnya Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	3	LUPM	3 LUPM	3 LUPM	3 LUPM	100	3 LUPM	**8**	266.67
2.09.03.2.02	***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota***										
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	1	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	**2**	200.00

2.09.03.2.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***									
2.09.03.2.04.02	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Hasil Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Supali Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	**3**	300.00
2.09.03.2.04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Berkembangnya Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) (DAK) - Berkembangnya Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) - Terlaksananya Bimtek Petugas Kader Pangan Posyandu - Terlaksananya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif - Terlaksananya Promosi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	2 KRPL 5 KRPL 40 Kader 150 Orang 1 Pameran	2 KRPL 5 KRPL 40 Kader 150 Orang 1 Pameran	2 KRPL 5 KRPL 40 Kader 150 Orang 1 Pameran	2 KRPL 5 KRPL 40 Kader 150 Orang 1 Pameran	100	2 KRPL 5 KRPL 40 Kader 150 Orang 1 Pameran	**4**	200.00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Utama								
2.09.04.2.01	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota***									
2.09.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600	1 Laporan	**2**	200.00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Skor Keamanan Pangan (SKP)								
2.09.05.2.01	***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota***	Skor Keamanan Pangan (SKP)								
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Koordinasi Keamanan Pangan - Terlaksananya Penyebaran Informasi Keamanan Pangan	2 Laporan 350 Orang	2 Laporan 350 Orang	2 Laporan 350 Orang	2 Laporan 350 Orang	100	2 Laporan 350 Orang	**6**	300.00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan Keamanan Pangan Segar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	**15**	125.00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Lab Pangan Buah dan Sayur	1 Uji	1 Uji	1 Uji	1 Uji	100	1 Uji	**2**	200.00

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

2.2.1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan di Kabupaten Banjar tidak terlepas dari pada tatanan ketahanan pangan nasional, yaitu kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada;

1. Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas, karena : (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (4) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang; (5) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan; (6) tidak terealisasi nya harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;(7) terbatasnya dukungan permodalan di pedesaan; (8) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi; (9) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani; (10) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta (11) masih luasnya areal pertanaman tebu rakyat dari pertunasan lama (*ratoon*), sehingga produktivitas tebu dan rendemen gula rendah.
2. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata.
3. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan pakan ternak.
4. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat didaerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.
5. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
6. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
7. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik.

8. Hasil kajian akses pangan belum ditindak lanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
9. Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instumen isyarat dini *(early warning system)* pencegahan kerawanan pangan belum seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Identifikasi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga masih sebatas uji coba belum dikembangkan diseluruh propinsi.

2.2.2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen diseluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidak lancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena disamping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Dalam era otonomi daerah, banyak peraturan daerah yang berdampak menghambat secara fisik arus distribusi pangan untuk kepentingan pemasukan keuangan daerah yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan pra sarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau ombak laut tinggi sehingga mengganggu pelayaran) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak, namun sebaliknya harga pada tingkat produsen yang akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun, sehingga kondisi ketahanan pangan tentu akan terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi baik kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan disuatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan dipasar cukup, sehingga jika stok dipasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan dipasar dapat membumbung tinggi.

Masalah lainnya dalam rangka mendukung distribusi, harga dan cadangan pangan adalah data dan informasi, SDM dan kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap akurasi dan pengelola data yang terkait dengan ketersediaan pangan, harga pangan, dan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota/desa untuk dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan distribusi, stabilisasi harga dan pasokan pangan serta kondisi cadangan pangan di provinsi / kabupaten / kota / masyarakat.

2.2.3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganeka ragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain; (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya local; (d) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima; (e) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksebilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;(c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggarketentuan batas kadaluarsa dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalan penanganan keamanan pangan, antara lain; (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum difahami dan diterapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; (c) belum optimalnya

kontrol penggunaan pestisida bahan kimia dan bahan tambahan pengawet; (d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan hygiene dalam produksi; (e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban paritel untuk menerapkan *Good Ritel Practices (GRP);* (f) masih rendahnya kesadaran ritel untuk menjual produk segar aman dan bermutu; (g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas; (h) terbatasnya laboratorium yang terakreditasi; (i) merebaknya penyalah gunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; (j) standar keamanan pangan untuk sayu dan buah segar impor yang belum terjamin keamanan pangannya; (k) belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hokum dibidang pangan segar; (l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan (m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar mempunyai Rencana Strategis yang mengarah pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu tahun 2022 sampai dengan 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan kendala yang ada dan atau yang mungkin timbul.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut dengan berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya lahan potensial pertanian dengan keragaman jenis dan tipe lahan;
2. Adanya kelompok-kelompok afinitas;
3. Adanya keragaman komoditas pangan;
4. Adanya sarana dan prasana infrastruktur berupa jalan & jembatan yang memadai guna memudahkan akses pangan.
5. Adanya aparat yang profesional di bidang tugasnya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut di atas didukung dengan adanya strategi kekuatan dan peluang dalam melaksanakan kegiatan program. Kekuatan tersebut, yaitu :

1. Tersedianya sarana dan prasana transportasi darat dan air.
2. Tersedianya pusat informasi pertanian, pengetahuan dan teknologi tepat guna.
3. Tersedianya lembaga/unit usaha mandiri masyarakat yang mempunyai peranan dalam proses distribusi pangan.
4. Tersedianya tenaga penyuluh swakarsa dalam pendampingan pembinaan pada desa-desa & kecamatan sasaran pembinaan.
5. Tersedianya lembaga/instansi Pemerintah yang berkompeten dalam pembangunan bidang pertanian secara luas.
6. Tersedianya anggaran yang bersumber dari dana APBN dan APBD.

Dan Peluangnya, yaitu :

1. Tersedianya potensi lahan pertanian yang luas dengan berbagai tipe lahan didukung letak geografis Kabupaten Banjar yang strategis.
2. Tersedianya fasilitas Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan kredit pertanian lainnya.
3. Tersedianya keragaman sumber pangan hayati dan sumber plasma nuftah.

4. Tersedianya unit-unit pelayanan sarana produksi pertanian di tiap kecamatan.
5. Tersedianya lahan-lahan pekarangan dan kader-kader PKK di tiap desa-desa di Kabupaten Banjar.
6. Tersedianya payung kebijaksanaan regulasi dan pemberian subsidi pada produksi pertanian.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Layanan Adiministrasi Perkantoran**			**4,718,824,019**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Layanan Adiministrasi Perkantoran**			**4,509,411,019**
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD***			**29,955,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD***			**24,280,500**
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terealisasinya Pelaksanaan Makanan dan Minuman Kegiatan-Kegiatan Rapat Pelaksanaan Program/Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan	11 Bulan	29,955,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terealisasinya Pelaksanaan Makanan dan Minuman Kegiatan-Kegiatan Rapat Pelaksanaan Program/Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan	11 Bulan	24,280,500
		Terealisasinya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	6 Dokumen			Terealisasinya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	6 Dokumen	
2.09.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***			***3,340,067,019***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***			***3,340,067,019***
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	Dinas Ketahanan Pangan	13 ASN	3,335,604,019	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	Dinas Ketahanan Pangan	13 ASN	3,335,604,019
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terealisasinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	4,463,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terealisasinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	4,463,000
2.09.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Layanan Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***40,000,000***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terpenuhinya Layanan Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***40,000,000***
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Terampil	Dinas Ketahanan Pangan	4 ASN	40,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Terampil	Dinas Ketahanan Pangan	4 ASN	40,000,000
2.09.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***538,564,764***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***352,456,264***
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terealisasinya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	69,966,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terealisasinya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	59,057,000
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Terealisasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD dan Peralatan Kebersihan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	18,911,600	Penyediaan Bahan Logistik	Terealisasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD dan Peralatan Kebersihan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	19,201,600
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	20,010,500
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedinasan Keluar dan Dalam Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	429,687,164	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedinasan Keluar dan Dalam Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	254,187,164
2.09.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasionalisasi SKPD***			***574,831,236***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasionalisasi SKPD***			***574,831,236***
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya Kelancaran Operasional Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	13,981,236	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya Kelancaran Operasional Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	13,981,236
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terealisasinya Administrasi/Teknis Perkantoran SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	13 Bulan	560,850,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terealisasinya Administrasi/Teknis Perkantoran SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	13 Bulan	560,850,000

2.09.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasionalisasi TUPOKSI***			***195,406,000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasionalisasi TUPOKSI***			***177,776,000***	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	40,990,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	40,990,000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	113,886,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	113,886,000	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	40,530,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	22,900,000	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Berkembangnya Desa Mandiri Pangan**		**0.49%**	**372,341,700**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Berkembangnya Desa Mandiri Pangan**		**0.49%**	**372,341,700**	
2.09.02.2.01	***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (Paket)***		***3 Paket***	***372,341,700***	***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (Paket)***		***3 Paket***	***372,341,700***	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) (Paket)	Kab, Banjar	1 Paket	300,000,000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) (Paket)	Kab, Banjar	1 Paket	300,000,000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Paket)	Kab, Banjar	2 Paket	72,341,700	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Paket)	Kab, Banjar	2 Paket	72,341,700	
		Meningkatnya Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (Unit)	Kab, Banjar	1 Unit			Meningkatnya Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (Unit)	Kab, Banjar	1 Unit		
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Stabilitas Harga Pangan (persen)**		**≤ 25%**	**612,406,600**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Stabilitas Harga Pangan (persen)**		**≤ 25%**	**463,125,400**	
		Ketersediaan Pangan Utama (persen)		**12.22%**			**Ketersediaan Pangan Utama (persen)**		**12.22%**		
		Skor PPH Konsumsi (skor)		**74.41%**			**Skor PPH Konsumsi (skor)**		**74.41%**		
2.09.03.2.01	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	***Presentasi Terciptanya Stabilitas harga atas komoditas pangan (persen)***		***≤ 25%***	***36,691,800***	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	***Presentasi Terciptanya Stabilitas harga atas komoditas pangan (persen)***		***≤ 25%***	***31,128,100***	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Harga Pangan (Laporan)	Kab, Banjar	12 Laporan	9,796,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Harga Pangan (Laporan)	Kab, Banjar	12 Laporan	8,310,700	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (Laporan)	Kab, Banjar	1 Laporan			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (Laporan)	Kab, Banjar	1 Laporan		
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Rasio)	Kab, Banjar	1,2 rasio	11,899,800	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Rasio)	Kab, Banjar	1,2 rasio	10,095,800	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Hasil Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	Kab, Banjar	12 Laporan	5,000,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Hasil Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	Kab, Banjar	12 Laporan	4,241,800	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya Pembinaan Penguatan LDPM (Kelompok)	Kab, Banjar	13 Kelompok	4,996,000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya Pembinaan Penguatan LDPM (Kelompok)	Kab, Banjar	13 Kelompok	4,238,000	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (Kelompok)		2 Kelompok	5,000,000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (Kelompok)		2 Kelompok	4,241,800	

2.09.03.2.02	***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota***	***Presentase Cadangan Pangan Daerah (persen)***		***12,22%***	***285,736,100***	***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota***	***Presentase Cadangan Pangan Daerah (persen)***		***12,22%***	***185,980,100***	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan CPP dan CPM (Laporan)	Kab, Banjar	4 Laporan	20,740,100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan CPP dan CPM (Laporan)	Kab, Banjar	4 Laporan	20,740,100	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Kab, Banjar	25 Ton	264,996,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Kab, Banjar	25 Ton	165,240,000	
2.09.03.2.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	***Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan (Skor PPH Konsumsi)***		***74.41%***	***289,978,700***	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	***Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan (Skor PPH Konsumsi)***		***74.41%***	***246,017,200***	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pelaksana Pemanfaatan Pekarangan (kelompok)	Kab, Banjar	22 Kelompok	249,978,700	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pelaksana Pemanfaatan Pekarangan (kelompok)	Kab, Banjar	22 Kelompok	206,017,200	
		Tumbuhnya UMKM berbasis pangan lokal (Kelompok)	Kab, Banjar	2 Kelompok			Tumbuhnya UMKM berbasis pangan lokal (Kelompok)	Kab, Banjar	2 Kelompok		
		Jumalah peserta penyuluhan yang aplikatif (Orang)	Kab, Banjar	60 Orang			Jumalah peserta penyuluhan yang aplikatif (Orang)	Kab, Banjar	60 Orang		
		Terlaksananya promosi pemanfaatan pekarangan (kegiatan)	Kab, Banjar	9 Kegiatan			Terlaksananya promosi pemanfaatan pekarangan (kegiatan)	Kab, Banjar	9 Kegiatan		
		Kader Pangan Posyandu yang bersertifikat (Sertifikat)	Kab, Banjar	40 Sertifikat			Kader Pangan Posyandu yang bersertifikat (Sertifikat)	Kab, Banjar	40 Sertifikat		
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per Tahun	Tersusunnya Target Pola Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Laporan)	Kab, Banjar	1 Laporan	40,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per Tahun	Tersusunnya Target Pola Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Laporan)	Kab, Banjar	1 Laporan	40,000,000	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Presentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)**		**3.57%**	**66,599,800**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Presentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)**		**3.57%**	**56,504,700**	
2.09.04.2.01	***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan***	***Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan***		***1 Sistem Informasi***	***31,799,900***	***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan***	***Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan***		***1 Sistem Informasi***	***22,702,000***	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan Pemutakhiran dan analisis peta FSVA (Sistem	Kab, Banjar	1 Sistem Informasi	31,799,900	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan Pemutakhiran dan analisis peta FSVA (Sistem	Kab, Banjar	1 Sistem Informasi	22,702,000	
2.09.04.2.02	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Presentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)***		***3.57%***	***34,799,900***	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Presentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)***		***3.57%***	***33,802,700***	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	Tertanganinya desa rentan rawan pangan (desa)	Kab, Banjar	2 Desa	34,799,900	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	Tertanganinya desa rentan rawan pangan (desa)	Kab, Banjar	2 Desa	33,802,700	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Skor Keamanan Pangan (Persen)**		**65%**	**48,414,200**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Skor Keamanan Pangan (Persen)**		**65%**	**41,014,100**	
2.09.05.2.01	***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota***	***Skor Keamanan Pangan (Persen)***		***65%***	***48,414,200***	***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota***	***Skor Keamanan Pangan (Persen)***		***65%***	***41,014,100***	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyebaran Informasi keamanan pangan segar (Orang)	Kab, Banjar	350 orang	31,778,200	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyebaran Informasi keamanan pangan segar (Orang)	Kab, Banjar	350 orang	25,108,200	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang diberikan (rekomendasi)	Kab, Banjar	2 Rekomendasi	3,318,000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang diberikan (rekomendasi)	Kab, Banjar	2 Rekomendasi	2,587,900	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi (Persen)	Kab, Banjar	65%	13,318,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi (Persen)	Kab, Banjar	65%	13,318,000	
Total					**5,818,586,319**					**5,442,396,919**	-

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan se Kabupaten Banjar Tahun 2021, secara umum untuk kegiatan ketahanan pangan belum ada usulan yang diterima langsung dari pemangku kepentingan (masyarakat), usulan lebih banyak ditujukan pada peningkatan produksi komoditas pangan,

Sehingga untuk mengakomodasi percepatan pembangunan di bidang pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar lebih fokus pada kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan terpenuhinya akses pangan masyarakat sekaligus dalam kerangka menurunkan angka kemiskinan dan penurunan angka stanting

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan pada pendampingan dan pembinaan dan dukungan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan misi 1, yakni ***Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia***, dan khususnya sesuai dengan tema pembangunan di Kabupaten Banjar yaitu ***PEMANTAPAN PEMULIHAN DAN PETUMBUHAN EKONOMI SERTA PENGUATAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT*** dengan mengemban tugas daerah yaitu prioritas 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Program Prioritas Peningkatan Sistem Pendidikan, Peningkatan Sistem Kesehatan, dan Peningkatan Kewirausahaan , dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.

Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lumbung Padi	Desa Terapu Kecamatan Aluh-aluh	Terbangunnya Lumbung	8 X 12 m2	
2	Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi	Desa Alalak Padang Kecamatan Cintapuri Darussalam	Terbangunnya Pabrik Penggilingan Padi	1 unit	
3	Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi	Desa Slindang Jaya Kecamatan Cintapuri Darussalam	Terbangunnya Pabrik Penggilingan Padi	1 unit	
4	Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi	Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam	Terbangunnya Pabrik Penggilingan Padi	1 unit	
5	Optimalisasi Lahan Pekarangan	Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat	Optimalisasi Lahan Pekarangan/Kelompok wanita Tani (KWT)	1 Paket	
6	Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat	KRPL/Kelompok wanita Tani (KWT)	1 Paket	
7	Pengolahan Hasil Pertanian	Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat	Pengolahan Hasil Pertanian	1 Paket	
8	Pembangunan Lumbung Pangan Desa	Desa Pembatanan Kecamatan Sungai Tabuk	Terbangunnya Lumbung	1 unit	
9	Pembangunan Lumbung Pangan Desa	Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk	Terbangunnya Lumbung	1 unit	
10	Bimtek Peningkatan Mutu Pengolahan Pupuk Organik	Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Pupuk Organik	1 kegiatan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020 - 2024 adalah :

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
6. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
7. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut, antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan
4. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
5. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan
6. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
7. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian
8. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan
9. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan
10. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
11. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
12. Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
13. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
14. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
15. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
16. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
17. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

18. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Dilihat dari Visi dan Misi Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan, dari visi dan 4 (empat) misi yang ada, semuanya selaras dengan Visi Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Banjar, sehingga dalam menjalankan program kegiatan bisa menunjang baik itu provinsi maupun kementerian.

Dilihat dari Pembangunan Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional, karena itu visi pembangunan ketahanan pangan dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada pencapaian visi pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu maka Visi Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah ”Mantapnya Ketahanan Pangan yang BERMUNAJAD (Beragam, Bermutu, Nyaman, Sejahtera dan Tersedia)”. Makna Bermunajad :

- Beragam : bermakna meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal, dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras perkapita.
- Bermutu : bermakna meningkatkan mutu dan keamanan makanan yang dikonsumsi melalui sosialisasi, promosi dan advokasi tentang mutu dan keamanan pangan masyarakat.
- Nyaman : bermakna menciptakan situasi ketahanan pangan yang nyaman dan kondusif serta menghindari situasi kerawanan dan kerentanan pangan dengan melakukan kewaspadaan pangan dan gizi
- Sejahtera : bermakna meningkatkan kemampuan sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
- Tersedia : bermakna meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup diseluruh wilayah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka visi pembangunan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan nabati dan hewani;

2. Meningkatkan aksesibilitas pangan pada setiap rumah tangga setiap saat dan berkelanjutan;
3. Mempercepat upaya penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya pangan lokal menuju konsumsi pangan yang cukup beragam, bergizi, seimbang dan aman;
4. Menciptakan situasi ketahanan pangan yang nyaman dan kondusif.

Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan yang merupakan daerah produksi pangan (padi) baik regional Kalimantan maupun nasional memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di bidang ketersediaan sumber daya alam berupa lahan dan air serta sumber daya nutfah.

Ketahanan pangan pada tatanan nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas, hal ini dikarenakan :

(1). Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
(2). Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
(3). Semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan dan lahan ;
(4). Tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang.

Untuk menghindari hal tersebut di atas maka kebijakan penataan ruang kabupaten banjar sebagai pendorong keberhasilan, penanganannya meliputi pengembangan sector pertanian yang dapat merangsang kearah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi), perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal.

Berdasarkan rekomendasi FGD KLHS Kabupaten Banjar, maka diperlukan adanya penyuluhan kepada petani tentang penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan pembatasan penggunaan pupuk kimia, penanaman dengan memperhatikan tofografi, lahan, penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan, serta pembinaan kepada kelompok masyarakat terkait penggunaan pupuk organik.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar mempunyai Rencana Strategis yang mengarah pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu tahun 2022 sampai dengan 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan kendala yang ada dan atau yang mungkin timbul.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut

dengan berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya lahan potensial pertanian dengan keragaman jenis dan tipe lahan
2. Adanya kelompok-kelompok Afinitas
3. Adanya keragaman komoditas pangan
4. Adanya sarana dan prasana infrastruktur berupa jalan & jembatan yang memadai guna memudahkan akses pangan.
5. Adanya aparat yang profesional di bidang tugasnya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut di atas didukung dengan adanya strategi kekuatan dan peluang dalam melaksanakan kegiatan program. Kekuatan tersebut, yaitu :

1. Tersedianya sarana dan prasana transportasi darat dan air.
2. Tersedianya pusat informasi pertanian, pengetahuan dan teknologi tepat guna.
3. Tersedianya lembaga/unit usaha mandiri masyarakat yang mempunyai peranan dalam proses distribusi pangan.
4. Tersedianya tenaga penyuluh swakarsa dalam pendampingan pembinaan pada desa-desa & kecamatan sasaran pembinaan.
5. Tersedianya lembaga/instansi Pemerintah yang berkompeten dalam pembangunan bidang pertanian secara luas.
6. Tersedianya anggaran yang bersumber dari dana APBN dan APBD.

Sedangkan peluangnya antara lain :

1. Tersedianya potensi lahan pertanian yang luas dengan berbagai tipe lahan didukung letak geografis Kabupaten Banjar yang strategis.
2. Tersedianya fasilitas Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan kredit pertanian lainnya.
3. Tersedianya keragaman sumber pangan hayati dan sumber plasma nuftah.
4. Tersedianya unit-unit pelayanan sarana produksi pertanian di tiap kecamatan.
5. Tersedianya lahan-lahan pekarangan dan kader-kader PKK di tiap desa-desa di Kabupaten Banjar.
6. Tersedianya payung kebijaksanaan regulasi dan pemberian subsidi pada produksi pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Tugas pokok SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ketahanan Pangan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan harga, konsumsi dan keamanan pangan. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar adalah ; Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pangan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pangan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Pangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah daerah, maka pada tahun 2021 ini Dinas Ketahanan Pangan dalam penetapan rencana kerjanya berdasarkan misi 1, yakni ***Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia***, dan khususnya sesuai dengan tema pembangunan di Kabupaten Banjar yaitu ***PEMANTAPAN PEMULIHAN DAN PETUMBUHAN EKONOMI SERTA PENGUATAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT*** dengan mengemban tugas daerah yaitu prioritas 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Program Prioritas Peningkatan Sistem Pendidikan, Peningkatan Sistem Kesehatan, dan Peningkatan Kewirausahaan , dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.

Berdasarkan Sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat dengan indikator indeks ketahanan pangan dengan target Tahun 2022 sebesar 69,07, maka Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung prioritas ke 4 ini akan melaksanakan 4 (empat) program.

Program prioritas ini sesuai dengan program nasional peningkatan kedaulatan pangan yaitu program peningkatan ketahanan pangan, dalam pelaksanaan program-program ini telah ditetapkan lewat Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita dan Penggunaan Cadangan Pangan);
b. Distribusi dan Akses Pangan (Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dan Stabilitas harga & Pasokan Pangan);
c. Penganekaragaman dan Keamanan pangan (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan);
d. Penanganan rawan Pangan (Penanganan Daerah Rawan Pangan).

Berdasarkan program nasional, Standar Pelayanan Minimal dan program prioritas daerah, maka pada tahun 2022 ini Dinas Ketahanan Pangan merencanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

3.3.1. Program Prioritas :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Sasaran Program antara lain :

1. Berkembangnya Desa Mandiri Pangan (*desa*);
2. Stabilitas Harga Pangan (*persen*);
3. Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (*persen*);
4. Skor Keamanan Pangan (persen).

Dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
3. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
5. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
6. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
7. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan meliputi :

1. Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (*paket*);
2. Persentase Terciptanya Stabilitas Harga Atas Komoditas Pangan (*persen*);
3. Meningkatnya Persentase Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat (*persen*);
4. Meningkatnya Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan (*kkal/kap/hari*);
5. Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten (*Sistem Informasi*);
6. Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (*persen*);
7. Skor Keamanan Pangan (*persen*).

Rencana Sub Kegiatan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
3. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
4. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
6. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
7. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
9. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
12. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
14. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
15. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
16. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Pendukung :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Untuk lebih jelasnya rincian renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023 Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN

SKPD	Kode	Urusan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS KETAHANAN PANGAN	**2.09.01**	**RUTIN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Terpenuhinya Layanan Adiministrasi Perkantoran**			**4.509.411.019**	**APBD II**			**5.073.450.792**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.01	RUTIN		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD***			**24.280.500**	**APBD II**			38.649.345
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.01.06	RUTIN		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terealisasinya Pelaksanaan Makanan dan Minuman Kegiatan-Kegiatan Rapat Pelaksanaan Program/Kegiatan	Kabupaten Banjar	11 Bulan	24.280.500	**APBD II**		11 Bulan	38.649.345
					Terealisasinya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja	Kabupaten Banjar	6 Dokumen				6 Dokumen	
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.02	RUTIN		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***			**3.340.067.019**	**APBD II**			**3.407.169.304**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.02.01	RUTIN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	Kabupaten Banjar	13 ASN	3.335.604.019	**APBD II**		13 ASN	3.402.316.099
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.02.05	RUTIN		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terealisasinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Banjar	1 Dokumen	4.463.000	**APBD II**		1 Dokumen	4.853.205
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.05	RUTIN		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Layanan Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Kabupaten Banjar		**40.000.000**	**APBD II**			**50.772.960**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.05.11	RUTIN		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Terampil	Kabupaten Banjar	4 ASN	40.000.000	**APBD II**		4 ASN	50.772.960

DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.06	RUTIN		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***			**352.456.264**	**APBD II**			**738.308.025**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.06.02	RUTIN		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terealisasinya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Banjar	12 Bulan	59.057.000	**APBD II**		12 Bulan	89.920.635
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.06.04	RUTIN		Penyediaan Bahan Logistik	Terealisasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD dan Peralatan Kebersihan Kantor	Kabupaten Banjar	12 Bulan	19.201.600	**APBD II**		12 Bulan	19.166.910
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.06.05	RUTIN		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kabupaten Banjar	12 Bulan	20.010.500	**APBD II**		12 Bulan	25.097.520
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.06.09	RUTIN		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedianasan Keluar dan Dalam Daerah	Kabupaten Banjar	12 Bulan	254.187.164	**APBD II**		12 Bulan	604.122.960
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.08	RUTIN		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasionalisasi SKPD***			**574.831.236**	**APBD II**			**606.407.078**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.08.02	RUTIN		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya Kelancaran Operasional Perkantoran	Kabupaten Banjar	12 Bulan	13.981.236	**APBD II**		12 Bulan	31.841.618
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.08.04	RUTIN		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terealisasinya Administrasi/Teknis Perkantoran SKPD	Kabupaten Banjar	13 Bulan	560.850.000	**APBD II**		13 Bulan	574.565.460
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.09	RUTIN		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	***Terwujudnya Efektivitas dan Kelancaran Operasionalisasi TUPOKSI***			**177.776.000**	**APBD II**			**232.144.080**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.09.01	RUTIN		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kabupaten Banjar	12 Bulan	40.990.000	**APBD II**		12 Bulan	43.412.460
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.09.02	RUTIN		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten Banjar	12 Bulan	113.886.000	**APBD II**		12 Bulan	137.874.660
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01.2.09.10	RUTIN		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Banjar	12 Bulan	22.900.000	**APBD II**		12 Bulan	50.856.960

DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.02	PANGAN	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		**Berkembangnya Desa Mandiri Pangan**		**0,49%**	**372.341.700**	**APBD II**		**0,99%**	**385.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.02.2.01	PANGAN		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (Paket)**		**3 Paket**	**372.341.700**	**APBD II**		**3 Paket**	**385.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.02.2.01.01	PANGAN		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) (Paket)	Kabupaten Banjar	1 Paket	300.000.000	**APBD II**		1 Paket	250.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.02.2.01.03	PANGAN		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Paket)	Kabupaten Banjar	2 Paket	72.341.700	**APBD II**		2 Paket	135.000.000
					Meningkatnya Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (Unit)	Kabupaten Banjar	1 Unit				1 Unit	
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03	PANGAN	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Stabilitas Harga Pangan (persen)**		**≤ 25%**	**463.125.400**	**APBD II**		**≤ 20%**	**691.250.000**
					Ketersediaan Pangan Utama (persen)		**12,22%**				**23,53%**	
					Skor PPH Konsumsi (skor)		**74,41%**				**75,58%**	
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01	PANGAN		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Presentasi Terciptanya Stabilitas harga atas komoditas pangan (persen)**		**≤ 25%**	**31.128.100**	**APBD II**		**≤ 20%**	**98.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01.01	PANGAN		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Harga Pangan (Laporan)	Kabupaten Banjar	12 Laporan	8.310.700	**APBD II**		12 Laporan	32.000.000
					Tersedianya Neraca Bahan Makanan (Laporan)	Kabupaten Banjar	1 Laporan				1 Laporan	
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01.02	PANGAN		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Rasio)	Kabupaten Banjar	1,2 rasio	10.095.800	**APBD II**		1,2 rasio	30.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01.04	PANGAN		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Hasil Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	Kabupaten Banjar	12 Laporan	4.241.800	**APBD II**		12 Laporan	12.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01.05	PANGAN		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya Pembinaan Penguatan LDPM (kelompok)	Kabupaten Banjar	13 Kelompok	4.238.000	**APBD II**		13 Kelompok	12.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01.06	PANGAN		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (Kelompok)	Kabupaten Banjar	2 Kelompok	4.241.800	**APBD II**		2 Kelompok	12.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.02	PANGAN		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Cadangan Pangan Daerah (persen)**		**12,22%**	**185.980.100**	**APBD II**		**23,53%**	**281.250.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.02.01	PANGAN		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan CPP dan CPM (Laporan)	Kabupaten Banjar	4 Laporan	20.740.100	**APBD II**		4 Laporan	15.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.02.03	PANGAN		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Kabupaten Banjar	25 Ton	165.240.000	**APBD II**		25 Ton	266.250.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.04	PANGAN		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan (Skor PPH Konsumsi)**		**74,41%**	**246.017.200**	**APBD II**		**75,58%**	**312.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.04.02	PANGAN		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pelaksana Pemanfaatan Pekarangan (kelompok)	Kabupaten Banjar	22 Kelompok	206.017.200	**APBD II**		22 Kelompok	250.000.000
					Tumbuhnya UMKM berbasis pangan lokal (Kelompok)	Kabupaten Banjar	2 Kelompok				2 Kelompok	
					Jumalah peserta penyuluhan yang aplikatif (Orang)	Kabupaten Banjar	60 Orang				60 Orang	
					Terlaksananya promosi pemanfaatan pekarangan (kegiatan)	Kabupaten Banjar	9 Kegiatan				9 Kegiatan	
					Kader Pangan Posyandu yang bersertifikat (Sertifikat)	Kabupaten Banjar	40 Sertifikat				40 Sertifikat	
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.04.03	PANGAN		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per Tahun	Tersusunnya Target Pola Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Laporan)	Kabupaten Banjar	1 Laporan	40.000.000	**APBD II**		1 Laporan	62.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.04	PANGAN	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Presentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)**		**3,57%**	**56.504.700**	**APBD II**		**7,14%**	**100.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.04.2.01	PANGAN		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	**Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten (Sistem Informasi)**		**1 Sistem Informasi**	**22.702.000**	**APBD II**		**1 Sistem Informasi**	**50.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.04.2.01.01	PANGAN		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan Pemutakhiran dan analisis peta FSVA (Sistem Informasi)	Kabupaten Banjar	1 Sistem Informasi	22.702.000	**APBD II**		1 Sistem Informasi	50.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.04.2.02	PANGAN		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Penurunan Desa rentan rawan Pangan (persen)**		**3,57%**	**33.802.700**	**APBD II**		**7,14%**	**50.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.04.2.02.02	PANGAN		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya desa rentan rawan pangan (desa)	Kabupaten Banjar	2 Desa	33.802.700	**APBD II**		2 Desa	50.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.05	PANGAN	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Skor Keamanan Pangan (Persen)**		**65%**	**41.014.100**	**APBD II**		**65%**	**48.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.05.2.01	PANGAN		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Skor Keamanan Pangan (Persen)**		**65%**	**41.014.100**	**APBD II**		**65%**	**48.000.000**
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.05.2.01.01	PANGAN		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyebaran Informasi keamanan pangan segar (Orang)	Kabupaten Banjar	350 orang	25.108.200	**APBD II**		350 orang	20.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.05.2.01.04	PANGAN		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah rekomendasi yang diberikan (rekomendasi)	Kabupaten Banjar	2 Rekomendasi	2.587.900	**APBD II**		2 Rekomendasi	10.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.05.2.01.05	PANGAN		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi (Persen)	Kabupaten Banjar	65%	13.318.000	**APBD II**		65%	18.000.000
	TOTAL PAGU ANGGARAN							**5.442.396.919**				**6.297.700.792**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas ketahanan Pangan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan tahunan daerah yang berlandaskan rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2025. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Nasional maupun Nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022. Keberhasilan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati Dinas Ketahanan Pangan serta dukungan dan peran aktif stakeholder terkait.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab I, Bab II, Bab III, dan IV secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar dan mengacu pada program prioritas daerah maka pada tahun 2021 disepakati untuk melaksanakan kegiatan prioritas daerah dan Standar Pelayanan Minimal yang terangkum pada 16 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
3. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
4. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
6. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
7. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
9. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
12. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
14. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
15. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
16. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan anggaran sebesar:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 372.341.700,-
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 463.125.400,-
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 56.504.700,-
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 41.014.100,-

Total anggaran sebesar Rp**. 932.985.900,-**

Kegiatan-kegiatan ini dalam pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan program dan kegiatan nasional yang berkembang dan akan disinkronkan sesuai aturan yang berlaku.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

13. Dinas Pertanahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Tahun 2022 difokuskan untuk lebih memantapkan kinerja pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, untuk mendorong peningkatan daya saing kompetitif perekonomian dengan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, dalam rangka peningkatan peran Kabupaten Banjar dalam konstelasi regional. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2022 dibahas secara berjenjang melalui Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, serta Musrenbang Kabupaten.

Penyusunan Renja SKPD juga memperhatikan RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten, dan Renstra SKPD Dinas Pertanahan, serta capaian kinerja Dinas Pertanahan Tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2022.

Selanjutnya diharapkan ini dapat menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, maka SKPD perlu membuat Rencana Kerja (RENJA), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat RENJA SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannyadengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunanmelalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secaraberjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya melaksanakan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepadaDaerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusununtuk mewujudkan **Visi** Pemerintah Daerah sesuai RPJMD 2021-2026 **"TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS"** dengan mengemban **Misi Nomor 3** yaitu : **"Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan".**

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
   Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan
   diubah kembali dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang RPJP Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanahan di Kabupaten Banjar secara umum melalui tugas dan fungsi adalah "**Terwujudnya Pengelolaan Pertanahan Yang Berkeadilan Menuju Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, dan Agamis"**, dengan melaksanakan :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanahan, sesuai dengan kebijakan umum yang di tetapkan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pertanahan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugasdan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PertanahanKabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022;
2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahbidang pertanahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan tanah di Kabupaten Banjar;
3. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi;
4. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi pembangunan pertanahan secara umum melalui tugas dan fungsi pertanahandi semua tingkatan pemerintahan; dan
5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan pertanahan untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten BanjarTahun 2022

2.1.1 Capaian Analisis Kinerja

a. Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Perkiraan pencapaian untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Tahun 2022 dengan Anggaran sebesar Rp. 4.830.737.180,- terurai dalam 5 (Lima) program, 11 (Sebelas) kegiatan, dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kagiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.

Tabel 1.
Perkiraan Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan TA. 2022

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3	Program/ Kegiatan/SubKegiatan 4	Anggaran 5
DINAS PERTANAHAN				**4.830.737.180**
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.326.255.880**
Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
Fasilitasi Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Tersusunnya Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.912.119.340
Fasilitasi Gaji danTunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	2.901.120.340
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	1.000.000
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	9.999.000
Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.999.000

Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BarangMilik Daerah padaSKPD	12 Bulan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.999.000
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000
Fasilitasi bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan aparatur SKPD Dinas Pertanahan	Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000
Administrasi UmumPerangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Administrasi UmumPerangkat Daerah	228.309.900
Fasilitasi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor	12 Bulan	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.997.000
Fasilitasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan PerlengkapanKantor	12 Bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa nKantor	48.189.000
Fasilitasi Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Baha nLogistik Kantor	12 Bulan	Penyediaan BahanLogistik Kantor	45.000.000
Fasilitasi Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Baran gCetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	24.999.900
Fasilitasi Makan dan Minuman KunjunganTamu	Tersedianya Makan dan Minuman KunjunganTamu	12 Bulan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.180.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDSelama 1 Tahun	Terlaksananya Rapat Koordinasi da nKonsultasi SKPD	12 Bulan	Penyelenggaraa nRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	79.944.000
Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jas a Penunjang Urusa nPemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.536.640
Fasilitasi Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	87.566.640
Fasilitasi Jasa Pelayanan UmumKantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umu mKantor	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	649.970.000
Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerinta hDaerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.291.000

Fasilitasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.539.000

Fasilitasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional ataLapangan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	238.002.000
Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	12 Bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.750.000
Fasilitasi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi GedungKantor dan BangunanLainnya	12 Bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000
PEMBANGUNAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAHGARAPAN	**TERWUJUDNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAHGARAPAN**	**100%**	**PROGRAM PENYELESAIANSENGKETA TANAH GARAPAN**	**226.571.100**
Pembangunan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	226.571.100
Fasilitasi Inventarisasi Sengeta, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Inventarisasi Sengketa,Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Desa	Inventarisasi Sengketa, Konflik,dan Perkara Pertanahan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	158.571.200
Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.999.900
REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**PERSENTASE REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIANPROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**100%**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DANTANAH ABSENTEE**	**40.000.000**
Fasilitasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan TanahAbsentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Subjek danObjek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Penetapan Subjekdan Objek Redistribusi Tanahserta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000

Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terfasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obejek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi TanahObjek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	40.000.000
PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**TERLAKSANANYA PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**29,22%**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**108.000.000**

Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Penerbitan Izi nMembuka Tanah	32,34%	Penerbitan Izin Membuka Tanah	108.000.000
Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terfasilitasinya Pengendalian Pemanfaatan TanahNegara	36 Dokumen Usulan	Pengendalia n Pemanfaata n Tanah Negara	108.000.000
PENATAGUNAA NTANAH	**TERWUJUDNYA PENATAGUNAA NTANAH**	**100%**	**PROGRAM PENATAGUNAA NTANAH**	**129.910.020**
Terlaksananya Penggunaan Tanahyang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penggunaan Tanahyang Hamparanny adalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100%	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	129.910.020
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Koordinasi da nSinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	29.999.800
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tana hKabupaten/KOta	200 Lokasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kot a	99.910.400

b. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Penetapan target indiktor kinerja utama Dinas Pertanahan untuk Tahun2022 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas PertanahanKabupaten Banjar Tahun 2022

MISI / TUJUA N	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKA N**	**PPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB . KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**
Misi 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan						
Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjuta n	Terwujudnya Penataan Ruang Yang Terintegrasi Dengan Seluruh Sektor Pembanguna n Daerah	Upaya Mensingkronka n Rencana Tata Ruang dengan Realisasi Pembangunan			Persentase Kepatuhan Terhadap Rencana Tata Ruang	**100%**
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**TERWUJUDNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**100%**
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	100%

			1. Fasilitasi Penanganan sengketa pertanahan	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	35 Desa
			2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan
				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**PERSENTASE REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**100%**
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti KerugianTanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan TanahAbsentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	100%
				Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terfasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obejek Reforma Agraria dalam 1 (satu)Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten
				PROGRAM PENGELOLAAN IZINMEMBUKA TANAH	**TERLAKSANANYA PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	29,22%
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	**Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah**	32,34%
			3. Sertifikasi Aset Tanah Pemda	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terfasilitasinya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	36 Dok. Usulan
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**TERWUJUDNYA PENATAGUNAAN TANAH**	100%
				Penggunaan Tanahyang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Penggunaan Tanahyang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	100%
			4. Pembuatan Sistem Informasi Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1 Laporan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	200 Lokasi

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi olehDinas Pertanahan Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraaan kegiatam pertanahan tersebut, maka peningkatan kinerja organisasi

melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi melaksanakan pembangunan sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Banjar, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   a. Penyusunan sistem pendaftaran tanah dengan peningkatan SDAdi bidang pertanahan.
2. Strategi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah :
   a. Penyusunan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
   b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah
3. Strategi Memfasilitasi konflik-konflik Tanah Pemerintah, Berbadan Hukum dan perorangan di Kabupaten Banjar dengan arah kebijakan :
   a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pertanahan di Kabupaten Banjar.

      Dinas Pertanahan Kabuaten Banjar melaksanakan inventarisasi konflik-konflik pertanahan baik itu konflik pertanahan pemerintah, konflik pertanahan perorangan atau berbadan hukum di Kabupaten Banjar.
   b. Memfasilitasi konflik Tanah Pemerintah, Berbadan Hukum dan perorangan di Kabupaten Banjar.

      Fasilitasi konflik – konflik pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
   c. Melaksanakan koordinas dengan instansi terkait.
4. Strategi melaksanakan inventarisasi tanah Pemerintah Kabupaten Banjar dengan arah kebijakan :
   a. Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Banjar. Pelakasanaan inventaririsasi aset tanah Pemerintah KabupatenBanjar mutlak diperlukan sebelum dilaksanakan prosessertifikasi
   b. Sosialisasi sistem informasi pertanahan.

Kegiatan sosialisasi sistem informasi pertanahan bagi SKPD di Kabupaten Banjar sebagai giat untuk mengetahui, menginventarisasi dan mengamankan aset tanah pemerintah Kabupaten Banjar.

c. Melaksanakan koordinas dengan instansi terkait.

5. Strategi Menyusun perencanaan, melaksanakan persiapan, melaksanakan pengadaan tanah dan menyerahkan hasil pengadaan tanahdengan arah kebijakan :

a. Melaksanakan penyelenggaraan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

   Kegiatan ini merupakan fasilitasi bagi SKPD di Kabupaten Banjar dalam pengadaan tanah pemerintah dimana Dinas Pertanahan memfasilitasi proses pengadaan dimaksud.

b. Melaksanakan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Banja.
   Sertifikasi aset tanah mutlak dilaksanakan kerena legalisasi aset tanah Pemerintah Kabupaten Banjar yang belum optimal dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DINAS PERTANAHAN Kabupaten Banjar Tahun 2022

2.2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar dibentuk dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan, khususnya Bab IV Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan TugasPembantuan yang diberikan kepada Daerah , dan pada ayat (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten BanjarMempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanahan, sesuai dengan kebijakan umum yang di tetapkan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan tekis dan perencanaan program bidang pertanahan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar adalahsebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengaturan dan Penguasaan Tanah, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Penguasaan dan Penggunaan Tanah;
   b. Seksi Inventarisasi, Pengendalian, Penguasaan dan Pengendalian Tanah serta Bangunan.
4. Bidang Kepengurusan Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari:
   a. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah;
   b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum.
5. Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan, terdiri dari:
   a. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah;
   b. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan.

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pertanahan di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya inventarisasi data tanah aset Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Masih rendahnya persentase sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Rendahnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahandi Kabupaten Banjar;
4. Masih banyaknya konflik-konflik pertanahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Banjar;
5. Tingginya kebutuhan data dan informasi tentang pertanahan;
6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan;
7. Minimnya regulasi tentang pertanahan di Kabupaten Banjar; dan
8. Tumpang tindihnya kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar selaku pelaksana urusanpemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pertanahan yang diserahkan kepada Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

1. Minimnya personil aparatur teknis pemerintah untuk mendukung kegiatan pertanahan pada SOPD Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar;
2. Rendahnya pengetahuan aparatur pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar tentang pertanahan;
3. Kurangnya peralatan pendukung teknis pertanahan (peralatan survey, hardware dan software/aplikasi pertanahan) Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar;
4. Rendahnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan di Kabupaten Banjar;
5. Masih banyaknya konflik-konflik pertanahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Banjar;
6. Belum optimalnya penyusunan SOP pada Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar; dan
7. Minimnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Banjar

1. Aspek Regulasi
   Tumpang tindihnya kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar selaku pelaksana urusan pemerintahan danpelayanan umum dalam bidang Pertanahan yang diserahkan kepada Daerah sehingga diperlukan sebuah regulasi untuk memperbaiki sistem yang ada sekarang.
2. Aspek kebutuhan personil
   Minimnya personil aparatur teknis pemerintah untuk mendukung kegiatan pertanahan pada SKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar dan rendahnya pengetahuan aparatur pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar tentang pertanahan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar.
3. Aspek sarana prasarana,
   Minimnya peralatan pendukung teknis pertanahan (peralatan survey, hardwaredan software/aplikasi pertanahan) Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar dan belum optimalnya penyusunan SOP pada Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar untuk mendukung kegiatan pertanahan karena tanpa sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pertanahan output yang dihasilkan tidak ana optimal.
4. Aspek pembiayaan,
   Jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pertanahan dibutuhkan anggaran yang memadaimelalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 yang disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sehingga RPJPD ini menjadi pijakan peneyelenggaraan pemerintahan, pemebangunan dan pelayanan kepada masyarakat menuju pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, terpadu, serasi dan bertanggungjawab.

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Banjar, untuk itu sangat perlu kiranya Dinas Pertanahan membuat Rencana Strategis yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai RPJMD 2021 – 2026. Dalam hal ini Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar berkewajiban turut berperan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”**, dengan mengemban Misi ke-3 yaitu : “**Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**”

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai sesuai RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar adalah : **Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan**.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah “**Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah”**

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian melahirkan strategi yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan penyusunan sistem pendaftaran tanah dengan peningkatan sumber daya aparatur di bidang pertanahan’

2. Melaksanakan penyuluhan hukum pertanahan dan meningkatkan koordinasi dan monitoring penyuluhan hukum pertanahan,
3. Melaksanakan penyelenggaraan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan melaksanakan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Banjar,
4. Inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Banjar dan sosialisasi sistem informasi pertanahan, dan
5. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pertanahan di Kabupaten Banjar, memfasilitasi konflik pertanahan pemerintah, berbadan hokum dan perorangandi Kabupaten Banjar dan melaksanakan koordinas dengan instansi terkait.

Adapun langkah kebijakan yang dilaksanakan yaitu :

1. Melaksanakan pembangunan sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Banjar,
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum pertanahan di Kabupaten Banjar,
3. Inventarisasi kebutuhan tanah untuk pembangunan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan peningkatan kapasitas aparatur,
4. Menyusun perencanaan, melaksanakan persiapan, melaksanakan pengadaan tanah dan menyerahkan hasil pengadaan tanah,
5. Melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Banjar, dan
6. Memfasilitasi konflik konflik tanah Pemerintah, berbadan hukum dan perorangan di Kabupaten Banjar.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai kegiatan terkait persoalan-persoalan dengan gerakan peningkatan Swasembada Pangan Nasional sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku utama dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Output Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar adalah Program Tahunan Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar yang sesuai dengan Tupoksi dansasaran Program Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar. Rencana Kerja DinasPertanahan Kabupaten Banjar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pertanahan KabupatenBanjar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapatdigunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satutahun bagi seluruh jajaran Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar. Renja jugamemberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan danpenyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DinasPertanahan Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arahyang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas PertanahanKabupaten Banjar selama kurun waktu 1 Tahun Anggaran. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini merupakan dokumen tolak ukur perencanaan dalam pelaksanaan evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan yang dibuat berdasarkan dokumen RKA Dinas Pertanahan Tahun 2022 sehingga Rencana Kerja yang dibuat dapat mencapai sasaran.

14. Dinas Lingkungan Hidup

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.

Renja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Adapun visi Bupati Banjar adalah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021, misi ke 3 yaitu “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan”.

Misi Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pmebangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.

5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakt yang tertib, aman, dan demokratis.

Sedangkan MISI Dinas Lingkungan Hidup tercantum pada misi ke 3 (tiga) yaitu:
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjar dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar No.12);
11. Peraturan Bupati No.58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Review I Rencana Strategis Dinas Lingkungan HIdup Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2022.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2022 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja sampai Triwulan IV tahun 2022 dan proyeksi capaian akhir tahun berjalan.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai triwulan IV Tahun 2021 dan perkiraan capaian akhir tahun 2021. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan , pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Berisikan tentang rencana kerja dan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Banjar dengan pendanaan mangacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – SKPD TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai triwulan IV tahun 2021 dan perkiraan target sampai akhir tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di Empat (4) bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah,Pertamanan dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Data dan Informasi,
2. Kajian Dampak Lingkungan
3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah,Pertamanan dan Limbah terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Penanganan dan Pengangkutan Sampah
2. Pertamanan, RTH dan Kebersihan Lingkungan
3. Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Pemantauan Lingkungan
2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH
2. Penegakan Hukum Lingkungan
3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Program/Kegiatan

A. <u>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</u>

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /kota

Capaian Kegiatan : Rata-rata indeks pencemaran air 5,55 IP

Output : Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin

Lingkungan 45%

Hasil : Terlaksananya pembinaan dan pemantauan sumber pencemar air dan udara lingkungan 107 titik pantau

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Pada Sub Kegiatan ini terdapat kegitan Klinik Pengendalian Pencemaran, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan, Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri, Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri, Pemantauan Kualitas Air, Pemantauan Kualitas Udara.

Kegiatan Klinik Pengendalian Pencemaran lingkungan merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi status pengelolaan lingkungan hidup oleh suatu kegiatan usaha/perusahaan, misalnya Progres pemantauan antisipatif pencemaran lingkungan serta untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi dan Progres yang telah dicapai dalam suatu kegiatan. Sasaran kegiatan Klinik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Program pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup di tahun 2021 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Banjar, meliputi pelaku kegiatan usaha (perusahaan). Pada triwulan IV ini sudah tercapai 87,50%

Kinerja pada kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan ini adalah memberikan sosialisasi ke pelaku usaha terkait dengan teknis kewajiban pembuatan laporan izin lingkungan dengan target 100 perusahaan pada triwulan IV ini sudah tercapai 100%

Kinerja pada kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri ini adalah jumlah perusahaan yang memiliki system IPAL dan/atau yang telah memiliki IPLC dengan target sebanyak 40 perusahaan dan realisasi yang telah tercapai 87,50%

Kinerjanya pada kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri ini adalah jumlah perusahaan yang menghasilkan emisi udara dengan target 20 perusahaan dan realisasi yang tercapai utuk triwulan IV sebanyak 100%

Kinerjanya pada kegiatan Pemantauan Kualitas Air ini melakukan pemantauan kualitas air adalah dengan cara menguji kualitas air dengan target sebanyak 95 titik pantau dan realisasinya telah mencapai untuk triwulan IV sebanyak 95 titik pantau dengan capaian 100%

Kinerjanya pada kegiatan Pemantauan Kualitas Udara ini melakukan pemantau kualitas udara dengan cara menguji kualitas udara dengan target sebanyak 12 titik pantau dan realisasi triwulan IV mencapai 12 titik pantau atau capaian 100% pelaksanaan kegiatan pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2021 dilakukan di titik pantau lokasi yaitu di Pergudangan Bizpark mewakili kawasan perindustrian,perumahan bunyamin kecamatan kertak hanyar mewakili kawasan permukiman dan halaman depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mewakili kawasan perkantoran. Berikut Target Sub Kegiatan :

Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	:	20 Perusahaan
Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	:	40 Perusahaan
Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	:	100 Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	:	40 Perusahaan
Jumlah titik pantau air sungai	:	95 titik pantau
Jumlah titik pantau udara	:	12 titik pantau

Pemantuan air Desa Aranio

Pemantuan air di Kec. Aluh aluh desa Sungai musang

Pemantuan udara Passive Sampler di titik Hal. Perkantoran DLH

Pemantuan udara di Jalan A.Yani 37.5 km

Pengendalian Pencemaran udara

Pengendalian Pencemaran udara

b. Koodinasi, Sinkronisasi dan Pelasaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kinerja yang menunjang kegiatan ini adalah membuat dokumen pengamatan / Penghitungan dampak GRK dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan sudah terealisasi sebanyak 1 dokumen.

c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Laboratorium penguji harus menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sebagaimana diamanatkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2008 yang telah diperbaharui menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dan peraturan menteri negara lingkungan hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan. Sistem manajemen mutu laboratorium terdiri dari 15 persyaratan manajemen, 10 persyaratan teknis dan 3 persyaratan tambahan seperti yang tercantum dalam Permen LH Nomor 06 tahun 2009. Terget Kinerja pada kegiatan ini yaitu 1 (satu) jumlah dokumen mutu laboratorium, dan capaian realisasi di triwulan IV sudah mencapai 100%

2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan	:	Rata-rata indeks pencemaran air 5,55 IP
Output	:	Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar 60%
Hasil	:	Terwujudnya Sistem Informasi inventarisasi pemetaan kawasan rawan kerusakan lingkungan 1 Aplikasi

a. Pemberian Informasi Perinagatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Kinerja pada Sub kegiatan ini adalah jumlah komunitas yang terbentuk sebagai agen pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 6 komunitas dan pembuatan 1 Aplikasi. Dalam kegiatan ini berhasil

disepakati bahwa kegiatan pengendalian KARHUTLA harus dilaksanakan secara koordinatif dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai panglima dari kegiatan Pengendalian KARHUTLA Di lapangan. Unsur TNI/POLRI juga terlibat dalam hal teknis untuk mengamankan situasi disaat terjadi KARHUTLA. Selain itu BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga Forum Pengurangan Resiko Bencana Adaptasi Perubahan Iklim (Forum PRB-API Kalsel) dan Manggala Agni akan bekerjasama untuk merumuskan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) untuk kasus KARHUTLA di Kabupaten Banjar. Realisasi triwulan IV sudah sebanyak 6 komunitas dan capaian 100%

B. <u>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</u>

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan pelaporan lingkungan berupa dokumen dan laporan yang berisi Informasi Lingkungan Hidup yang terhimpun. Sampai triwulan IV sedang dilaksanakan penyusunan kajian IKPLHD.

Capaian Kegiatan	:	Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan 84%
Output	:	Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update 100%
Hasil	:	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun 3 Dokumen

Pada Kegiatan ini capaian realisasi kinerja di triwulan IV tahun 2021 adalah 3 dokumen sudah tercapai 100%

C. <u>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</u>

1) Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Capaian Kegiatan	:	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan 2.05%
Output	:	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan 2%
Hasil	:	Meningkatnya Kenyamanan Ruang Publik Serta Terpeliharanya Taman dan jalur Hijau 31 lokasi

a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Kinerja yang menunjang Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan ini adalah jumlah lokasi lahan taman kehati dalam kegiatan ini target yang harus terpenuhi sebanyak 1 lokasi dan terealisasi untuk triwulan IV sudah tercapai 100%.

b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka (RTH) ini indikator kinerjanya adalah jumlah lokasi RTH yang di pelihara kegiatan yang

tercapai adalah 30 lokasi dari target di tahun 2021 dan sudah terealisasi 30 lokasi untuk triwulan IV

Pemeliharaan RTH Taman CBS

c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya

Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk mencapai tata pemerintahan dan lingkungan hidup perkotaan yang baik dengan tujuan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik sasaran kegiatan ini adalah untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan, membangun partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan di sebut dengan Penghijauan Kawasan Perkotaan & Perdesaan (Gamis Hijau / Urban Farming). Kegiatan ini dengan target 70 lokasi untuk tahun 2021 dan terealisasi sudah 70 lokasi untuk triwulan IV.

Gamis Hijau Pintu Air di Jembatan irigasi Martapura

Gamis Hijau di SMP 1 Pengaron

d. Pengempangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Kinerja yang menunjang kegiatan ini adalah jumlah kawasan Kampung Hijau pada kegiatan ini jumlah target yang harus dicapai adalah sebanyak 1 dan pada realisasi triwulan IV sudah mencapai target 100% yaitu 1 Kampung kawasan Hijau.

D. <u>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</u>

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3

Capaian Kegiatan : Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 50%

Output : Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 35 Pelaku Usaha

Hasil : Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 35 Pelaku Usaha

a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pada Sub Kegiatan ini adalah Fasilitas Pemenuhan untuk Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target kinerja 35 pelaku usaha yang sudah terlaksana di triwulan IV sebanyak 19 pelaku usaha dengan capaian 54,29%

b. Verifikasi Lapangan untuk Memastika Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah.

Pada Sub Kegiatan ini adalah Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sudah terlaksana di triwulan IV sebanyak 19 pelaku usaha dengan capain 54,29%

Verifikasi Limbah B3

Verifikasi Limbah B3

E. <u>Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</u>

1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan : Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update 30%

Output : Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan Lingkungan hidup 55%

Hasil : Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha yang dikenakan sanksi administrasi dan progres verifikasi lapangan pelaksanaan penaatan terhadap peraturan LH 45 Pelaku Usaha

a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pada Sub kegiatan ini indikator kinerjanya adalah jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan pelaksanaan kegiatan ini meliputi melaksanakan rapat penapisan dokumen lingkungan terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan arahan dokumen lingkungan, melakukan kegiatan Peninjauan Lapangan dan Rapat Teknis Dokumen Lingkungan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi kegiatan Pertambangan Batubara, Stockpile, Pertambangan Komoditas Batuan, SPBU, Pergudangan, Perumahan, Kantor & Workshop, IPAL Komunal, Laboratorium, AMDK, Ruko, Klinik dan lain-lain, dan mengeluarkan SK rekomendasi dokumen lingkungan. Target Sub Kegiatan ada 140 Dokumen dan sudah tercapai di triwulan IV sebanyak 149 Dokumen.

b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatanb yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Kinerja Sub kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang diawasi maka diperlukan kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup yang merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan guna mengetahui sampah sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam mengelola lingkungan. Target Kinerja dalam Sub kegiatan ini adalah sebanyak 45 perusahaan dan kegiatan ini telah mencapai target yang pada triwulan IV yaitu 45 perusahaan tercapai 100% factor yang mendukung kegiatan ini adalah karena adanya dokumen lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan wajib mentaati sesuai isi dokumen.

Pengawasan Izin Lingkungan

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Pada Sub Kegiatan ini adalah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dengan target 45 Perusahaan dan sudah tercapai di triwulan IV sebanyak 14 Perusahaan hanya sebesar 31,11%

F. <u>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</u>

1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan	:	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan 60%
Output	:	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup 300 Peserta
Hasil	:	Jumlah Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 300 Peserta

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan

Pada Sub kegiatan ini adalah Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan Sosialisasi Tata cara pengaduan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang untuk memberikan edukasi, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah Perserta Sosialisisai sebanyak 300 orang peserta dan realisasi untuk triwulan IV adalah sebanyak 300 peserta kinerja tercapai 100%

b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Pada Sub Kegiatan ini adalah Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan pendidikan lingkungan hidup yang diikuti oleh sekolah setingkat SD,SMP,SMA/SMK dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan juga Sosialisasi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dimana kegiatan ini menyampaikan informasi, pengetahuan dan wawasan kepada sekolah khususnya tim Adiwiyata sekolah tentang penyusunan dokumen aplikasi sekolah Adiwiyata. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar dengan target kinerja 30 perusahaan dan realisasi untuk triwulan IV adalah sebanyak 30 Perusahaan tercapai 100%.

G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan : Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan 75%

Output : Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan 75%

Hasil : Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik 20 Kasus

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan ini adalah Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang untuk memberikan pelayanan kepada perusahan dan masyarakat terkait permasalahan lingkungan. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik dengan target kinerja 20 kasus dan realisasi yang tercapai untuk triwulan ke IV adalah 10 Kasus pengeduan tingkat capaian kinerja hanya 50%

Pengaduan Limbah Produksi Bakso
Di Tanjung Rema Darat
mencemari sumur warga

Limbah Tambang di Cintapuri mencemari perkebunan karet dan persawahan.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan /atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Pada Sub Kegaiatan ini adalah fasilitas penyelesaian sengkata yang mana penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Target kinerja pada Sub Kegiatan yaitu Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat Terselesaikan sebanyak 20 Kasus. Realisasi kinerja untuk triwulan IV 10 kasus yang terselesaikan dengan tingkat capaian hanya 50%.

H. <u>Program Pengelolaan Persampahan</u>

1) <u>Pengelolaan Sampah</u>

Capaian Kegiatan	:	Persentase pengurangan sampah 24%%
Output	:	persentase timbulan sampah yang tertangani 74%
Hasil	:	Tercapainya Kebersihan di wilayah kecamatan yaitu 11 Kecamatan

a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan ini adalah Penyusunan kebijakan pengurangan sampah menyajikan bentuk laporan kebijakan pengurangan sampah sehingga menjadi acuan dalam pelayanan penanganan sampah kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan dalam pengurangan sampah di Kabupaten Banjar. Target kinerja pada sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. Realisasi kinerja sampai triwulan ke IV yaitu 1 dokumen tercapai 100%

b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kebupaten/kota

Pada Sub Kegiatan ini bertambahnya cakupan layanan persampahan setiap tahun maka operasional dalam pengelolaan sampah akan semakin meningkat, agar tidak mengurangi kondisi sarana dan prasarana pengangkutan sampah maka dibutuhkan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target pada sub kegiatan yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara sebanyak 85 unit. Realiasi untuk triwulan IV sebanyak 85 unit dengan tingkat capain 100%

c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Pada Sub Kegiatan ini belum maksimalnya pengelolaan sampah dalam rumah tangga maka parlu kiranya dilakukan pendekatan ke masyarakat demi meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pengurangan sampah. Target kinerja yaitu Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan

sebanyak 40 komunitas, realisasi untuk triwulan IV hanya sebanyak 26 komunitas dengan tingakat capaian 65% dan Koordinasi Kota sehat/ Adipura Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan. Sampai triwulan IV, pelaksanaan pekerjaan utama pada kegiatan ini tidak dapat terlaksana. Semula direncanakan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali penilaian, tetapi dengan adanya rasionalisasi anggaran, penilaian tidak dapat dilaksanakan.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah meliputi pengadaan barang dan jasa baik operasional pendukung maupun belanja modal penanganan sampah, seperti Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan lainnya mencakup dari Pembangunan TPS 3R, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya seperti Pembuatan Landasan Kontainer di Beruntung Baru. Pada target Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah 14 Paket dan realisasi untuk triwulan IV 14 paket tercapai 100%

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah meliputi pengadaan barang dan jasa baik operasional pendukung maupun belanja modal penanganan sampah namun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang seperti Dump Truck, Kendaraan Roda Tiga, Arm Roll, dan Kontainer, Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus seperti Mesin Press Hidrolik, Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman seperti Mesin Pencacah. Target pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah sebanyak 6 unit dengan realisasi triwulan IV sebanyak 6 unit tercapai 100%.

2.1.2. Faktor-Faktor Permasalahan dan Solusi Capaian Kinerja Program/Kegiatan

<u>Faktor Permasalahan Kinerja</u>

1. Keterbatasan pembiayaan yang bersumber pada pendanaan APBD membuat beberapa kegiatan hanya memprioritaskan kegiatan yang sangat strategis untuk mendukung visi misi Kepala Daerah. Ditambah lagi dengan kebijakan rasionalisasi anggaran sebagai dampak penanganan Covid-19 membuat sebagian kegiatan anggarannya dihilangkan sehingga target yang ingin dicapai pada Renja 2021 tidak dapat direalisasikan.
2. Meningkatnya timbulan sampah sebagai dampak semakin tumbuh dan berkembangnya hunian perumahan dan industri hal ini tidak diiringi dengan panambahan sarana dan prasarana penanganan sampah di Kabupaten Banjar yang tentu dapat mengganggu pelayanan persampahan.

3. Penyedia Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Presentase tersedia luas RTH publik masih dibawah 20% dari luas wilayah Kabupaten Banjar

Solusi Capaian Kinerja

1. Dengan keterbatasan anggaran dan rasionalisasi anggaran sebagai dampak penanganan Covid-19 maka prioritas pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan sesuai anggaran yang tersedia dan dilakukan penjadwalan ulang pada beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana sebagai dampak diberlakukannya pembatasan kerja sesuai dengan protocol Covid-19. Selain itu perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan
2. Perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan anggaran khususnya untuk kegiatan kebersihan agar pada saat perencanaan kegiatan dapat diprioritaskan untuk sarana & prasarana kebersihan.
3. Memanfaatkan secara maksimal pengoperasian sarana dan prasarana penanganan sampah berupa dump truk, arm rol, TPS 3R, Bank-bank sampah dan petugas lapangan.
4. Harapannya pada perubahan APBD tahun 2021 dapat disetujui usulan penambahan sarana dan prasarana penanganan sampah dan pemeliharaan serta operasional penanganan sampah melalui dana APBD Kabupaten Banjar.
5. Penambahan anggaran untuk menambah luasan RTH public di Kabupaten Banjar, baik dengan pengadaan tanah maupun sarana dan prasarana RTH.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan IV tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstran Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
							I		II		III		IV							
1	2	4	5	8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		13 = 12/7*100		14 = 7 + 13	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**Persen**	**9.215.562.637**	**25%**	**1.845.395.532**	**25%**	**2.389.792.879**	**25%**	**2.300.063.802**	**25%**	**2.103.223.776**	**100%**	**8.638.475.989**	**100,00**	**93,74**	**100%**	**8.638.475.989**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja**	**7**	**Lap.**	**12.723.500**	**2**	**774.000**	**2**	**594.500**	**3**	**1.570.200**		**9.763.000**	**7,00**	**12.701.700**	**100,00**	**99,83**	**7,00**	**12.701.700**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	7	Lap.	12.723.500	2	774.000	2	594.500	3	1.570.200		9.763.000	7,00	12.701.700	100,00	99,83	7,00	12.701.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran**	**12**	**Bulan**	**8.185.160.017**	**3**	**1.718.739.778**	**3**	**2.206.517.681**	**3**	**2.053.960.719**	**3**	**1.693.327.486**	**12,00**	**7.672.545.664**	**100,00**	**93,74**	**12,00**	**7.672.545.664**

		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	6.844.183.017	3	1.544.559.300	3	1.763.589.314	3	1.759.296.828	3	1.382.754.262	12,00	6.450.199.704	100,00	94,24	12,00	6.450.199.704
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	12	bulan	1.325.420.000	3	174.180.478	3	441.453.367	3	292.313.891	3	298.841.224	12,00	1.206.788.960	100,00	91,05	12,00	1.206.788.960
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	Dok	8.479.300	0	0	0	0	0	0	1	8.479.300	1,00	8.479.300	100,00	100,00	1,00	8.479.300
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18	Lap.	7.077.700	0	0	7	1.475.000	2	2.350.000	9	3.252.700	18,00	7.077.700	100,00	100,00	18,00	7.077.700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya administrasi umum perkantoran**	**12**	**Bulan**	**566.740.400**	**3**	**60.762.400**	**3**	**106.514.942**	**3**	**145.434.250**	**3**	**247.776.791**	**12,00**	**560.488.383**	**100,00**	**98,90**	**12,00**	**560.488.383**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	jenis	17.876.200	6	4.452.400	1	2.913.000	2	6.629.300		3.881.500	9	17.876.200	100,00	100,00	9,00	17.876.200

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	jenis	49.558.200	0	0	3	12.590.000	5	34.036.500		-	8,00	46.626.500	100,00	94,08	8,00	46.626.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	499.306.000	3	56.310.000	3	91.011.942	3	104.768.450	3	243.895.291	12,00	495.985.683	100,00	99,34	12,00	495.985.683
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**Bulan**	**262.252.720**	**3**	**40.153.212**	**3**	**55.176.156**	**3**	**60.664.660**	**3**	**58.955.877**	**12,00**	**214.949.905**	**100,00**	**81,96**	**12,00**	**214.949.905**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	rekening	166.801.720	4	25.647.812		30.350.056		32.273.160		31.453.877	4,00	119.724.905	100,00	71,78	4,00	119.724.905
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8	jenis	95.451.000	2	14.505.400	2	24.826.100	2	28.391.500	2	27.502.000	8,00	95.225.000	100,00	99,76	8,00	95.225.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran**	**12**	**Bulan**	**188.686.000**	**3**	**24.966.142**	**3**	**20.989.600**	**3**	**38.433.973**	**3**	**93.400.622**	**12,00**	**177.790.337**	**100,00**	**94,23**	**12,00**	**177.790.337**

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara	1	unit	40.990.000	1	13.109.762		12.158.056		7.086.196		6.548.000	1,00	38.902.014	100,00	94,91	1,00	38.902.014
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8	unit	81.236.000	2	10.471.380	2	7.421.544	4	27.237.777		31.848.622	8,00	76.979.323	100,00	94,76	8,00	76.979.323
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	28	unit	18.440.000	5	1.385.000	1	1.410.000	12	4.110.000	10	10.220.000	28,00	17.125.000	100,00	92,87	28,00	17.125.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1	unit	48.020.000	0	0	0	0		0	1	44.784.000	1,00	44.784.000	100,00	93,26	1,00	44.784.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan**	**85%**	**Persen**	**140.314.500**	**0,0%**	**6.202.200**	**0,0%**	**-**	**33,0%**	**117.720.100**	**52%**	**12.838.600**	**85%**	**136.760.900**	**100,00**	**97,47**	**85%**	**136.760.900**

		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun**	**3**	**Dok**	**140.314.500**	**0**	**6.202.200**	**0**	**-**	**1**	**117.720.100**	**2**	**12.838.600**	**3,00**	**136.760.900**	**100,00**	**97,47**	**3,00**	**136.760.900**
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140.314.500	0	6.202.200	0	0	1	117.720.100	2	12.838.600	3,00	136.760.900	100,00	97,47	3,00	136.760.900
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5,55 IP**		**1.310.165.100**	**5,55**	**11.868.000**	**5,55**	**229.547.740**	**5,55**	**381.657.170**		**392.478.130**	**5,55**	**1.015.551.040**		**77,51**		**1.015.551.040**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5,55**	**poin**	**1.141.790.200**	**5,55**	**11.868.000**	**5,55**	**229.547.740**	**5,55**	**381.657.170**	**5,55**	**392.478.130**	**5,55**	**1.015.551.040**	**100,00**	**88,94**	**5,55**	**1.015.551.040**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20	perusahaan	145.429.800		1.568.000	2			45.913.570	18	58.327.630	20,00	105.809.200	100,00	72,76	20,00	105.809.200
			Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	40	perusahaan		7		9		11		8		35,00		87,50		35,00	

			Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	100	perusahaan						40		60		100,00		100,00		100,00	
			Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	40	perusahaan		7		5		5		18		35,00		87,50		35,00	
			Jumlah titik pantau air sungai	95	titik pantau	845.123.500	34	10.300.000	20	227.775.335	26	70.279.200	15	21.275.000	95,00	759.340.035	100,00	89,85	95,00	759.340.035
			Jumlah titik pantau udara	12	titik pantau		0		4		4	220.810.500	4	208.900.000	12,00		100,00		12,00	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1	Dok	66.825.000	0	0	0	0			1	66.400.000	1,00	66.400.000	100	99,36	1,00	66.400.000
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1	Dok	84.411.900	0	0	0	1.772.405	1	44.653.900		37.575.500	1,00	84.001.805	100,00	99,51	1,00	84.001.805
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5,55 IP**	**poin**	**168.374.900**	**5,55**	**0**	**5,55**	**-**	**5,55**	**85.788.400**	**5,55**	**67.593.000**	**5,55**	**153.381.400**	**0,00**	**91,10**	**5,55**	**153.381.400**

		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6	Komunitas	168.374.900	0	0	2	0	2	85.788.400	2	67.593.000	6,00	153.381.400	100,00	91,10	6,00	153.381.400
			Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	1	Aplikasi		0						1		1,00		100,00		1,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**	**2,05%**	**Persen**	**4.669.101.108**	**1%**	**564.000.660**	**1%**	**1.108.331.368**		**1.833.143.952**		**985.925.416**	**2%**	**4.491.401.396**	**97,56**	**96,19**	**2%**	**4.491.401.396**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**	**2%**	**Persen**	**4.669.101.108**	**1%**	**564.000.660**	**1%**	**1.108.331.368**		**1.833.143.952**		**985.925.416**	**2%**	**4.491.401.396**	**100,00**	**96,19**	**2%**	**4.491.401.396**
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1	lokasi	69.027.008		0	1			-		65.670.000	1,00	65.670.000	100,00	95,14	1,00	65.670.000
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30	lokasi	4.458.363.700	4	564.000.660	5	1.056.617.768	4	1.833.143.952	17	831.059.216	30,00	4.284.821.596	100,00	96,11	30,00	4.284.821.596
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70	lokasi	122.844.500	17	0	17	51.713.600	18	-	18	70.330.300	70,00	122.043.900	100,00	99,35	70,00	122.043.900

		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1	kampung	18.865.900	0	0	1	-		-		18.865.900	1,00	18.865.900	100,00	100,00	1,00	18.865.900
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3**	**50%**	**Persen**	**218.178.400**	**20%**	**26.914.320**	**10%**	**45.970.520**		**73.590.900**	**20%**	**53.948.880**	**50%**	**200.424.620**	**100,00**	**91,86**	**50%**	**200.424.620**
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3**	**35**	**Pelaku usaha**	**218.178.400**	**11**	**26.914.320**	**8**	**45.970.520**		**73.590.900**		**53.948.880**	**19,00**	**200.424.620**	**54,29**	**91,86**	**19,00**	**200.424.620**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	19.683.400	11	0	8	4.780.100	0	4.719.300	0	10.123.200	19,00	19.622.600	54,29	99,69	19,00	19.622.600

		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	198.495.000	11	26.914.320	8	41.190.420	0	68.871.600	0	43.825.680	19,00	180.802.020	54,29	91,09	19,00	180.802.020
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update**	**30%**	**Persen**	**114.684.900**	**10%**	**0**	**15%**	**20.411.500**		**18.499.100**	**7%**	**28.374.800**	**32%**	**67.285.400**	**106,7**	**58,67**	**32%**	**67.285.400**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan**	**140**	**Pelaku Usaha**	**114.684.900**	**48**	**0**	**60**	**20.411.500**	**23**	**18.499.100**	**18**	**28.374.800**	**149,00**	**67.285.400**	**106,43**	**58,67**	**149,00**	**67.285.400**
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	dokumen	70.753.700	48	0	60	12.711.500	23	7.299.100	18	12.561.600	149,00	32.572.200	106,43	46,04	149,00	32.572.200

		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	19.838.400	0	0	25	7.700.000	12	7.000.000	8	4.382.400	45,00	19.082.400	100,00	96,19	45,00	19.082.400
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	24.092.800	0	0	2		1	4.200.000	11	11.430.800	14,00	15.630.800	31,11	64,88	14,00	15.630.800
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan**	**60%**		**198.890.800**	**15%**	**4.000.000**	**15%**	**29.426.000**	**15%**	**37.765.800**	**15%**	**97.356.800**	**60%**	**168.548.600**	**100,00**	**84,74**	**60%**	**168.548.600**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup**	**300**	**Peserta**	**198.890.800**	**0**	**4.000.000**	**0**	**29.426.000**	**100**	**37.765.800**	**200**	**97.356.800**	**300,00**	**168.548.600**	**100,00**	**84,74**	**300,00**	**168.548.600**
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	orang	81.683.900	0	0	0	0	100	2.954.000	200	63.513.800	300,00	66.467.800	100,00	81,37	300,00	66.467.800

		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30	perusahaan	117.206.900	4	4.000.000	6	29.426.000	16	34.811.800	4	33843000	30,00	102.080.800	100,00	87,09	30,00	102.080.800
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**	**75%**		**56.077.500**	**15%**	**8.865.100**	**15%**	**3.600.000**	**5%**	**18.129.500**	**3%**	**23.888.900**	**38%**	**54.483.500**	**50,67**	**97,16**	**38%**	**54.483.500**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**	**75%**	**Persen**	**56.077.500**	**15%**	**8.865.100**	**15%**	**3.600.000**	**5%**	**18.129.500**	**3%**	**23.888.900**	**38%**	**54.483.500**	**50,67**	**97,16**	**38%**	**54.483.500**
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20	kasus	27.107.500	3	6.572.300	4		2	7.364.000	1	11.625.200	10,00	25.561.500	50,00	94,30	10,00	25.561.500

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20	kasus	28.970.000	2	2.292.800		3.600.000	1	10.765.500	7	12263700	10,00	28.922.000	50,00	99,83	10,00	28.922.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengurangan sampah**	**24%**	**Persen**	**19.243.159.700**	**10%**	**2.519.163.551**	**5%**	**4.082.470.867**		**4.256.959.521**	**9%**	**7.513.629.229**	**24%**	**18.372.223.168**	**100,00**	**95,47**	**24%**	**18.372.223.168**
		Pengelolaan Sampah	**persentase timbulan sampah yang tertangani**	**74%**	**Persen**	**19.243.159.700**	**20%**	**2.519.163.551**	**20%**	**4.082.470.867**	**20%**	**4.256.959.521**	**14%**	**7.513.629.229**	**74%**	**18.372.223.168**	**100,00**	**95,47**	**74%**	**18.372.223.168**
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1	Dok	24.252.800	0	10.200.000	0		0	4.524.600	1	9.365.300	1,00	24.089.900	100,00	99,33	1,00	24.089.900
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85	unit	12.453.784.000	19	2.314.600.951	21	3.940.774.667	21	2.831.390.533	24	3014567020	85,00	12.101.333.171	100,00	97,17	85,00	12.101.333.171

		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40	komunitas	184.843.500	5	88.610.000	10	4.046.700		83.270.000	11	8.614.800	26,00	184.541.500	65,00	99,84	26,00	184.541.500
			Jumlah penilaian adipura	3	kali		0		0		0				0,00		0,00		0,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	14	paket	2.713.279.400	1	105.752.600	1	137.649.500	7	767.314.388	5	1.471.980.109	14,00	2.482.696.597	100,00	91,50	14,00	2.482.696.597
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	6	unit	3.867.000.000					3	570.460.000	3	3.009.102.000	6,00	3.579.562.000	100,00	92,57	6,00	3.579.562.000

		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengurangan sampah**	**24%**	**Persen**	**550.000.000**	**6%**	**115.815.325**	**6%**	**160.103.433**	**6%**	**129.063.894**	**6%**	**89.712.896**	**24%**	**494.695.548**	**100,00**	**89,94**	**24%**	**494.695.548**
		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	**persentase timbulan sampah yang tertangani**	**24%**	**persen**	**550.000.000**	**6%**	**115.815.325**	**6%**	**160.103.433**	**6%**	**129.063.894**	**6%**	**89.712.896**	**24%**	**494.695.548**	**100,00**	**89,94**	**24%**	**494.695.548**
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1	Tahun	550.000.000	0	115.815.325		160.103.433		129.063.894	1	89.712.896	1,00	494.695.548	100,00	89,94	1,00	494.695.548
Rata-rata capaian kinerja (%)							90,80	92,24									90,80	92,24		
Predikat Kinerja							ST	ST									ST	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten tahun berikutnya :																				

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati No.13 Tahun 2016 pasal 12 (4) disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penaatan dan peningkatan kapasitas serta pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah B3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar didalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 64 Tahun 2016 mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penaatan lingkungan ;
c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lingkungan hidup ;
d. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam ;
e. Pemberian pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
h. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional

2.2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

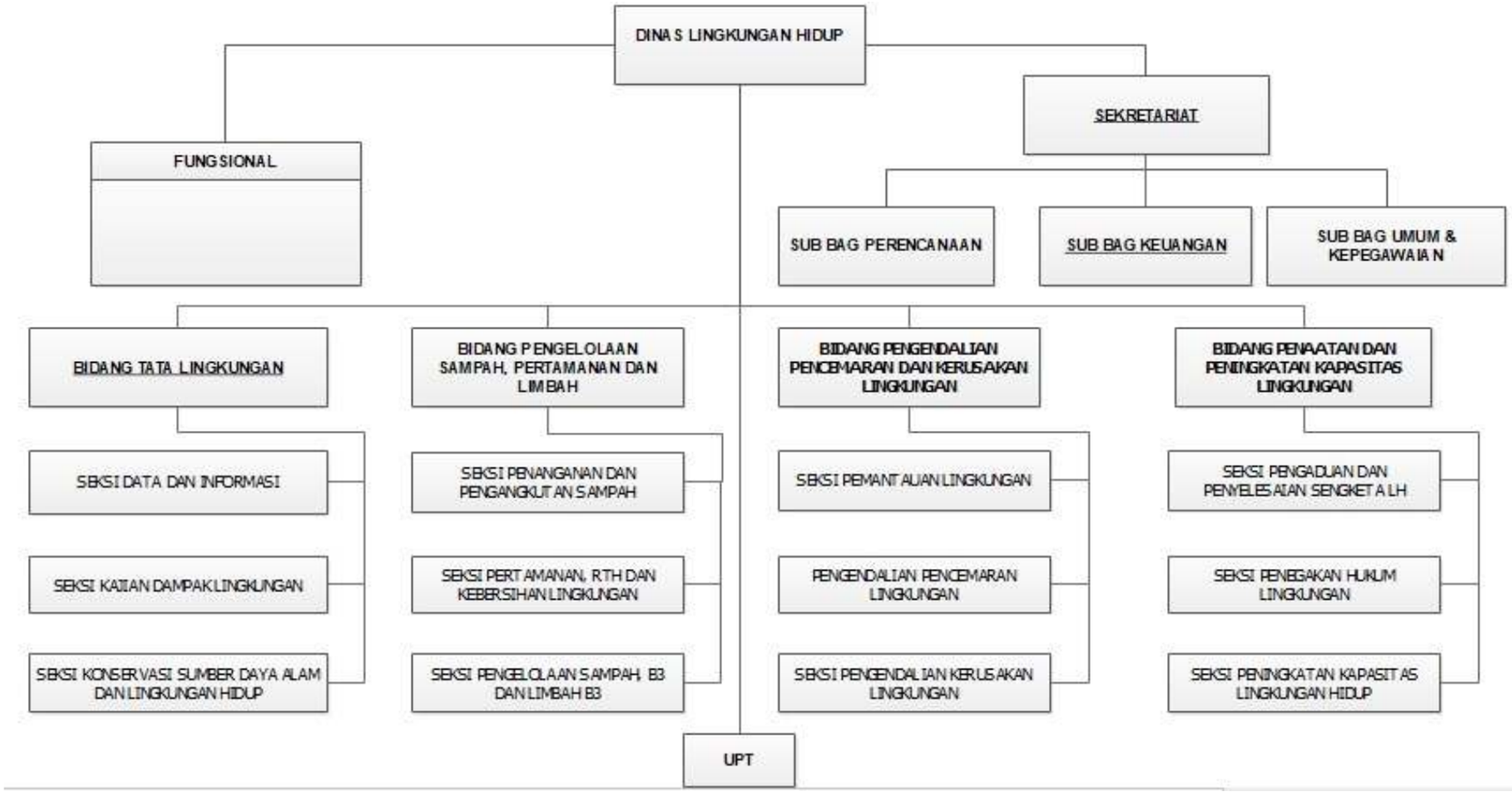

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten banjar diamanatkan bahwa:

Uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

   Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
   b. perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatandan peningkatan kapasitas lingkungan;
   c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas
   d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
   e. pengawasan dan pengendalian bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
   f. penanggung jawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
   g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
   h. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
   i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;

j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Dinas
k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan keuangan, umum dan kepegawaian

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas ;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. pengkoordinasian kegiatan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e. penyelenggaraan teknis urusan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah

Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi

pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
b. pengkoordinasian kegiatan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
d. penyelenggaraan teknis urusan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
b. pengkoordinasian kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
d. penyelenggaraan teknis urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penaatandan Peningkatan Kapasitas Lingkunganmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
b. pengkoordinasian kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakanhukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
d. penyelenggaraan teknis urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam melaksanakan tugas pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan Analisis permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja yang secara umum dipengaruhi oleh factor – factor internal didapatkan isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menjadi perhatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Adapun isu – isu tersebut adalah :

a. Terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang lingkungan
b. Tidak adanya pejabat penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup
c. Kurangnya Sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara
d. Rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang persampahan
e. Sulitnya mengubah budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah
f. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam pengendalian Lingkungan Hidup

Tabel 2.2 Review Terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021					Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)			
1	2	4	5	6			7	8	9			
				K		Rp.			K		Rp.	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan**	**85%**		**191,902,000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan**	**85%**		**140.314.500**	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun**	**3**	**Dok**	**191,902,000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun**	**3**	**Dok**	**140.314.500**	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	191,902,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140.314.500	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5,55 IP**		**2,099,315,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5,55 IP**		**1,425,482,200**	

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021					Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5.55**	**poin**	**1,807,504,400**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5.55**	**poin**	**1,257,107,300**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20	perusahaan	1,648,780,800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20	perusahaan	1,101,717,400	
			Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	40	perusahaan			Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	40	perusahaan		
			Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	100	perusahaan			Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	100	perusahaan		

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
			Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	40	perusahaan			Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	40	perusahaan	
			Jumlah titik pantau air sungai	95	titik pantau			Jumlah titik pantau air sungai	95	titik pantau	
			Jumlah titik pantau udara	12	titik pantau			Jumlah titik pantau udara	12	titik pantau	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1	Dok	70,158,700	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1	Dok	66,825,000
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1	Dok	88,564,900	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1	Dok	88,564,900
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5,55 IP**	**poin**	**291,810,600**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Rata-rata indeks pencemaran air**	**5,55 IP**	**poin**	**168,374,900**

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021					Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)			
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6	Komunitas	291,810,600	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6	Komunitas	168,374,900	
			Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	1	Aplikasi			Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	1	Aplikasi		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**	**2,05%**		**4,909,385,800**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**	**2,05%**		**4,671,126,108**	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**	**2%**	**Persen**	**4,909,385,800**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**	**2%**	**Persen**	**4,671,126,108**	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1	lokasi	86,100,000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1	lokasi	69,027,008	

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30	lokasi	4,613,547,800	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30	lokasi	4,460,388,700
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70	lokasi	181,348,000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70	lokasi	122,844,500
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1	kampung	28,390,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1	kampung	18,865,900
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3**	**50%**		**253,491,400**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3**	**50%**		**218,178,400**

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3**	**35**	**Pelaku usaha**	**253,491,400**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3**	**35**	**Pelaku usaha**	**218,178,400**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	36,183,400	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	19,683,400
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	217,308,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	198,495,000

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase Data base Informasi Lingkungan yangValid/update**	**30%**		**241,291,300**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update**	**30%**		**114,684,900**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan**	**140**	**Pelaku Usaha**	**241,291,300**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan**	**140**	**Pelaku Usaha**	**114,684,900**
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	dokumen	84,398,800	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	dokumen	70,753,700
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	70,770,000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	19,838,400

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	86,122,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	24,092,800
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan**	**60%**		**475,689,000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan**	**60%**		**234,922,400**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup**	**300**	**Peserta**	**475,689,000**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup**	**300**	**Peserta**	**234,922,400**
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	orang	205,704,600	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	orang	81,683,900

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30	perusahaan	269,984,400	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30	perusahaan	153,238,500
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**	**75%**		**143,875,500**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**	**75%**		**56,077,500**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**	**75%**	**Persen**	**143,875,500**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**	**75%**	**Persen**	**56,077,500**

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20	kasus	72,744,200	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20	kasus	27,107,500
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20	kasus	71,131,300	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20	kasus	28,970,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengurangan sampah**	**24%**		**16,574,962,700**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengurangan sampah**	**24%**		**19,258,069,700**
		Pengelolaan Sampah	**persentase timbulan sampah yang tertangani**	**74%**	**Persen**	**16,574,962,700**	**Pengelolaan Sampah**	**persentase timbulan sampah yang tertangani**	**74%**	**Persen**	**19,258,069,700**
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1	Dok	78,879,100	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1	Dok	25,752,800

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85	unit	13,808,510,600	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85	unit	12,453,784,000
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40	komunitas	266,509,500	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40	komunitas	198,253,500
			jumlah penilaian adipura	3	kali			jumlah penilaian adipura	3	kali	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	20	paket	2,421,063,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	14	paket	2,713,279,400
		-	-	-	-	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	6	unit	3,867,000,000

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengurangan sampah**	**24%**	**persen**	**550,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengurangan sampah**	**24%**		**550,000,000**
		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	**persentase timbulan sampah yang tertangani**	**24%**	**persen**	**550,000,000**	**Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau**	**persentase timbulan sampah yang tertangani**	**24%**	**persen**	**550,000,000**
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1	Tahun	550,000,000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1	Tahun	550,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**		**9,331,608,029**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**		**10,026,035,349**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja**	**7**	**Lap.**	**45,080,700**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja**	**7**	**Lap.**	**18,221,600**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	7	Lap.	45,080,700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	7	Lap.	18,221,600

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran**	**12**	**bulan**	**8,717,219,029**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran**	**12**	**bulan**	**8,677,762,349**
		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	7,297,511,249	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	7,297,511,249
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	12	bulan	1,393,641,280	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	12	bulan	1,359,420,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	Dok	8,854,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	Dok	13,753,400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18	Lap.	17,212,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18	Lap.	7,077,700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya administrasi umum perkantoran**	**12**	**bulan**	**209,357,100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perkantoran**	**12**	**bulan**	**1,126,965,400**

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	jenis	19,096,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	jenis	17,876,200
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	jenis	49,910,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	jenis	59,783,200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	140,350,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	1,049,306,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**bulan**	**177,666,200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**bulan**	**262,252,720**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	rekening	166,802,100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	rekening	166,801,720
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8	jenis	10,864,100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8	jenis	95,451,000

No	Sasaran	Rancangan Awal 2021					Analisi Kebutuhan 2021				Pagu Indikatif
		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran**	**12**	**bulan**	**182,285,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran**	**12**	**bulan**	**203,086,000**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara	1	unit	41,835,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara	1	unit	40,990,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8	unit	71,450,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8	unit	95,636,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	28	unit	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	28	unit	18,440,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1	unit	19,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1	unit	48,020,000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, diperlukan identifikasi permasalahan yang ada atau akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Secara umum faktor-faktor internal yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah Izin lingkungan, terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang lingkungan, sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara, informasi dan edukasi masyarakat, kurangnya alokasi dana untuk program pembuatan taman dan biomassa, jumlah SDM pengawasan tidak sebanding dengan luasan wilayah, mutasi pegawai yang sudah terlatih dan kurangnya pejabat penyidik pada DLH Kab. Banjar. Sedangkan faktor eksternal antara lain terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus menangani lingkungan hidup, faktor musim yang menyebabkan tanaman kering dan memicu kebakaran, sulitnya lahan di wilayah perkotaan untuk penyediaan RTH, berkurangnya lahan untuk bervegetasi, kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dan kecenderungan budaya masyarakat pelaku pencemaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Adapun visi Kabupaten Banjar adalah "**Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, dan Agamis."**

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD jangka menengah yang mencerminkan pernyataan kondisi yang di inginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas yang harus diselesaikan selama kurun waktu lima tahun.

Untuk merealisasikan misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan utama untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan prima di Kabupaten Banjar.

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami untuk dilaksanakan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun jangka menengah adalah :

1) Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2) Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penaatan Lingkungan Hidup
3) Meningkatnya Penanganan atau Pengelolaan Sampah

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2022 secara substansi tidak terlepas dari motto daerah, untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kab. Banjar dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Daerah Banjar dengan tetap dilandasi iman dan taqwa, semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam pembangunan sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau konsidi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJDP period ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kebupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, dan Agamis”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development
2. Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potendi daerah.
3. Agamis dapat diartikan sebagai orang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berpirlaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiaran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 misi Kabupaten Banjar yang merupakan kelanjutan dari misi sebelumnya yaitu :

1. Penigkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.

2. Penigkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaran kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religious, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tupoksi SKPD tercantum dalam misi ke tiga yaitu : **“Pengelolaan Lingkungan Hdiup yang berkelanjutan”.**

Tabel 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3			
1	Program Pengelolaan Persampahan	- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang persampahan	Terbatasnya sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sosialisasi persampahan	- Permasalahan sampah sudah menjadi Isu Nasional
		- Rendahnya tingkat edukasi pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat sekolah		- Telah diterimanya Penghargaan Adipura
				- Telah diterimanya Penghargaan Adiwiyata Kabupaten, Provinsi, Mandiri, Nasional dan Asean Eco School
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindngan dan Pengelolaan Lingkungan	- Masih kurangnya Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidupo	Kurangnya kedisiplinan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam menjalankan usahanya	
		- Masih diperlukan Pejabat Pengawas Yang Terdidik dan Terampil	Terbatasnya Pejabat Pengawas Yang Terdidik dan Terampil	Telah tersusunnya dokumen IKPLHD dan laporan periodik sampah
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Masih banyaknya aktivitas dari perilaku usaha atau perorangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan	Kurangnya ketaatan pengelolaan SDA terhadap dokumen lingkungan yang sudah dibuat	- Mengikuti sertakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
		- Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Pelaku Usaha dalam Penyusuna laporan		- Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penaatan hokum lingkungan
		- Masih banyaknya dugaan kasus pencemaran lingkungan yang harus diselesaiakan		

3.3. KONDISI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan Perubahan anggaran APBD 2021 sebagai dampak wabah covid-19 yang terjadi di Kabupaten Banjar berakibat berkurangnya anggaran pada 13 (tiga belas) Sub Kegiatan, Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada dinas lingkungan hidup, yaitu:

Tabel 3.2 Kondisi Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10,288,288,069**	**9,215,562,637**	**(1,072,725,432)**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**18,221,600**	**12,723,500**	**(5,498,100)**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,221,600	12,723,500	(5,498,100)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**8,677,762,349**	**8,185,160,017**	**(492,602,332)**
			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	7,297,511,249	6,844,183,017	(453,328,232)
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,359,420,000	1,325,420,000	(34,000,000)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,753,400	8,479,300	(5,274,100)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,077,700	7,077,700	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**1,126,965,400**	**566,740,400**	**(560,225,000)**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,876,200	17,876,200	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,783,200	49,558,200	(10,225,000)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,049,306,000	499,306,000	(550,000,000)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		**262,252,720**	**262,252,720**	**-**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
		Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166,801,720	166,801,720	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,451,000	95,451,000	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**203,086,000**	**188,686,000**	**(14,400,000)**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,990,000	40,990,000	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,636,000	81,236,000	(14,400,000)
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,440,000	18,440,000	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48,020,000	48,020,000	-
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**140,314,500**	**140,314,500**	**-**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		**140,314,500**	**140,314,500**	**-**
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	140,314,500	140,314,500	-
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1,425,482,200**	**1,310,165,100**	**(115,317,100)**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**1,257,107,300**	**1,141,790,200**	**(115,317,100)**
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1,101,717,400	990,553,300	(111,164,100)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	66,825,000	66,825,000	-
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	88,564,900	84,411,900	(4,153,000)
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**168,374,900**	**168,374,900**	**-**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	168,374,900	168,374,900	-
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**4,671,126,108**	**4,669,101,108**	**(2,025,000)**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		**4,671,126,108**	**4,669,101,108**	**(2,025,000)**
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	69,027,008	69,027,008	-
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,460,388,700	4,458,363,700	(2,025,000)
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	122,844,500	122,844,500	-
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	18,865,900	18,865,900	-
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**218,178,400**	**218,178,400**	**-**
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		**218,178,400**	**218,178,400**	**-**
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19,683,400	19,683,400	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	198,495,000	198,495,000	-
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**114,684,900**	**114,684,900**	**-**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**114,684,900**	**114,684,900**	**-**
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	70,753,700	70,753,700	-
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19,838,400	19,838,400	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24,092,800	24,092,800	-
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**234,922,400**	**198,890,800**	**(36,031,600)**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota		**234,922,400**	**198,890,800**	**(36,031,600)**
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	81,683,900	81,683,900	-
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	153,238,500	117,206,900	(36,031,600)
8	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**56,077,500**	**56,077,500**	**-**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		**56,077,500**	**56,077,500**	**-**
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	27,107,500	27,107,500	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	28,970,000	28,970,000	-
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**19,258,069,700**	**19,243,159,700**	**(14,910,000)**
		Pengelolaan Sampah		**19,258,069,700**	**19,243,159,700**	**(14,910,000)**
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	25,752,800	24,252,800	(1,500,000)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
			Penanganan Sampah denganmelakukan Pemilahan,Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan , dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12,453,784,000	12,453,784,000	-
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	198,253,500	184,843,500	(13,410,000)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6,580,279,400	2,713,279,400	(3,867,000,000)
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	3,867,000,000	3,867,000,000
10	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**550,000,000**	**550,000,000**	**-**
		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau		**550,000,000**	**550,000,000**	**-**
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	550,000,000	550,000,000	-
	TOTAL			**36,957,143,777**	**35,716,134,645**	**berkurang (1,241,009,132)**

3.4. Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Pada Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*3*	*9*	*10*	*11*
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan**		**85%**	**Persen**	**140.314.500,00**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia**	**100%**	**Persen**	**176.864.500**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun**		**3**	**Dok**	**140.314.500,00**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**Persen**	**176.864.500**
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun		3	Dok	140.314.500,00	Persentase Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup Yang Tersusun	100%	Persen	176.864.500
	Penyelenggaraan Kajian lingkungan hidup strategis (klhs) kabupaten/kota	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun**	**-**	-	-

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	-	-	-	-	Persentase Dokumen KLHS RPJMD yang Tersusun	100%	Persen	-
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	-	-	-	-	-	Persentase Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Tersusun	100%	Persen	-
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tingkat Pencemaran Air**		**5,55**	**IP**	**1.425.482.200,00**	**Tingkat Pencemaran Air**	**5,4**	**IP**	**1.499.719.200**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Indeks Kualitas Air**		**50,1**	**IP**	**1.257.107.300,00**	**Indeks Kualitas Air**	**50,2**	**IP**	**1.211.690.300**
		Indeks Kualitas Udara		**76,73**	**IP**		**Indeks Kualitas Udara**	**76,83**	**IP**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri		20	perusahaan	**1.101.717.400,00**	Persentase Perusahaan Yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	30%	Persen	1.050.897.400
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri		40	perusahaan					

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan		100	perusahaan		Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sumber Pencemar Air, Sumber Pencemar Udara	30%	Persen	
		Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran		40	perusahaan					
		Jumlah titik pantau air sungai		95	titik pantau		Persentase Titik Pantau Air dan Udara Yang Dilakukan Uji Mutu	100%	Persen	
		Jumlah titik pantau udara		12	titik pantau					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK		1	Dok	66.825.000,00	Persentase Dokumen Pengamatan / Penghitungan Dampak GRK	100%	Persen	66.825.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium		1	Dok	88.564.900,00	Persentase Dokumen Mutu Laboratorium	100%	Persen	93.967.900
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Rata-rata indeks pencemaran air**		**5,55 IP**		**168.374.900,00**	**Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya**	**100%**	**Persen**	**218.028.900**
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen		6	Komunitas	168.374.900,00	Persentase Dokumen Kajian dan Sistem Informasi Inventarisasi Pemetaan yang Dihasilkan	100%	Persen	218.028.900

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	pada Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih		1	Aplikasi		Persentase Komunitas yang Terbentuk Sebagai Agen	100%	Persen	
	pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			**-**	**-**	**-**	**Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulikan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**100%**	**Persen**	**70.000.000**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-		-	-	-	Persentase Desa Dalam Wilayah Restorasi yang Tertangani Konservasi Gambut dan Mangrovenya	100%	Persen	70.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**		**2,05%**	**Persen**	**4.671.126.108,00**	**Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani**	**100%**	**Persen**	**4.185.396.108**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**		**2%**	**Persen**	**4.671.126.108,00**	**Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani**	**100%**	**Persen**	**4.185.396.108**
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati		1	lokasi	69.027.008,00	Persentase Luas Lahan Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan Yang Ditangani	100%	Persen	72.447.008
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara		30	lokasi	4.460.388.700,00	Persentase Lokasi RTH Yang Dipelihara	58%	Persen	3.944.088.700
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan		70	lokasi	122.844.500,00	Persentase Luas Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	100%	Persen	144.219.500

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau		1	kampung	18.865.900,00	Persentase Kawasan Kampung Iklim	100%	Persen	24.640.900
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3**		**50%**	**Persen**	**218.178.400,00**	**Persentase Pelaku Usaha Yang Mengimplementasikan Izin TPS Limbah B3**	**50%**	Persen	**238.728.400**
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3**		**35**	**Pelaku usaha**	**218.178.400,00**	**Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3**	**50%**	Persen	**238.728.400**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3		35	pelaku usaha	19.683.400,00	Persentase Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Mengajukan Izin TPS Limbah B3	100%	Persen	30.183.400
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3		35	pelaku usaha	198.495.000,00	Persentase Kesesuaian Kondisi Di Lapangan Dengan Dokumen Yang Diajukan	50%	Persen	208.545.000

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update**		**30%**	**Persen**	**114.684.900,00**	**Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100%**	Persen	**234.677.100**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan**		**140**	**Pelaku Usaha**	**114.684.900,00**	**Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	Persen	**234.677.100**
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan		140	dokumen	70.753.700,00	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	95%	Persen	84.398.700
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas	-					Persentase Pejabat Pengawas Yang Terdidik dan Terampil	100%	Persen	-
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi		45	perusahaan	19.838.400,00	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha Yang Dikenakan Sanksi Administrasi dan Progres Verifikasi Lapangan Pelaksanaan Penaatan Terhadap Peraturan LH	40%	Persen	80.278.400

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi		45	perusahaan	24.092.800,00	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH Yang Dilakukan Pengawasan	100%	Persen	70.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan**		**60%**	**Persen**	**234.922.400,00**	**Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan**	**25%**	Persen	**213.435.500**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup**		**300**	**Peserta**	**234.922.400,00**	**Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	**50%**	Persen	**213.435.500**
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi		300	orang	81.683.900,00	-	-	-	-
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar		30	perusahaan	153.238.500,00	Persentase Jumlah Sekolah Yang Dilakukan Pembinaan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Berdasarkan Jumlah Sekolah Yang Sedang Dalam Pendampingan Peduli Lingkungan	50%	Persen	213.435.500

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan**		**60%**	**Persen**	**234.922.400,00**	**Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup**	**25%**	Persen	**70.000.000**
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	**Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup**		**300**	**Peserta**	**234.922.400,00**	**Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup**	**25%**	Persen	**70.000.000**
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	-	-	-	-	-	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Memahami Materi Sosialisasi	100%	Persen	70.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**		**75%**	**Persen**	**56.077.500,00**	**Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Terselesaikan**	**100%**	**Persen**	**143.743.500**

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan**		**75%**	**Persen**	**56.077.500,00**	**Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**Persen**	**143.743.500**
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik		20	kasus	27.107.500,00	Persentase Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Dapat Terselesaikan	50%	Persen	71.010.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan		20	kasus	28.970.000,00	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dapat Terlayani Dengan Baik	50%	Persen	72.733.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengurangan sampah**		**24%**			**Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**	**24%**	Persen	**13.382.753.872**
	Pengelolaan Sampah	**persentase timbulan sampah yang tertangani**		**74%**	**Persen**		**Persentase Pengurangan Sampah**	**24%**	Persen	**9.964.648.872**
							Persentase Sampah Yang Ditangani	**61%**	Persen	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat		1	Dok	25.752.800,00	Nilai Kepuasan Masyarakat	76%	Persen	55.878.800

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara		85	unit	12.453.784.000,00	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	61%	Persen	9.242.539.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan		40	komunitas	198.253.500,00	Persentase Kelompok/Komunitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	100%	Persen	235.479.500
		Jumlah penilaian adipura		3	kali		Persentase Penilaian Adipura	100%	Persen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah		20	paket	2.713.279.400,00	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah		6	unit	3.867.000.000,00	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	100%	Persen	430.751.572
	Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	**persentase timbulan sampah yang tertangani**		**24%**	**persen**	**550.000.000,00**	**persentase timbulan sampah yang tertangani**			3.418.105.000

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD		1	Tahun	550.000.000,00	Persentase Produk Yang Dihasilkan	100%	Persen	310.000.000
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan Di TPA	61%	Persen	3.108.105.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Di TPA	-	-	-
	PROGRAM PENDUKUNG									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**		**100%**	**Persen**	**10.288.288.069,00**	**Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern**	**80%**	**Persen**	**2.119.965.820**
	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja**		**7**	**Lap**	**18.221.600,00**	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu**	**100%**	**Persen**	**18.221.600**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		7	Lap	18.221.600,00	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	Persen	18.221.600

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	administrasi keuangan perangkat daerah	**terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran**		**12**	**Bulan**	**8.677.762.349,00**	**PersentaseTersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu**	**100%**	**Persen**	**1.380.251.100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN		12	Bulan	7.297.511.249,00	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100%	Persen	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran		12	Bulan	1.359.420.000,00	Persentase Ketersediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	100%	Persen	1.359.420.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		1	Dok	13.753.400,00	Persentase Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Persen	13.753.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran		18	Lap	7.077.700,00	Persentase Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun SKPD	100%	Persen	7.077.700
	administrasi umum perangkat daerah	**Tersedianya administrasi umum perkantoran**		**12**	**Bulan**	**1.126.965.400,00**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Persen**	**256.154.400**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		9	Jenis	17.876.200,00	Persentase Jaringan Listrik Terpelihara Dengan Baik	100%	Persen	17.876.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		8	Jenis	59.783.200,00	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang	100%	Persen	59.783.200

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Terpenuhi			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	Bulan	1.049.306.000,00	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Persen	178.495.000
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**12**	**Bulan**	**262.252.720,00**	**Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi**	**100%**	**Persen**	**262.252.720**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4	rekening	166.801.720,00	Persentase Kelancaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Persen	166.801.720
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor		8	jenis	95.451.000,00	Persentase Kelancaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Persen	95.451.000
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran**		**12**	**Bulan**	**203.086.000,00**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan**	**100%**	**Persen**	**203.086.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara		1	unit	40.990.000,00	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Yang Berfungsi Dengan Baik	100%	Persen	40.990.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan		8	unit	95.636.000,00	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Yang Berfungsi Dengan Baik	100%	Persen	95.636.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		28	unit	18.440.000,00	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Berfungsi Dengan Baik	100%	Persen	18.440.000

No.	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara		1	unit	48.020.000,00	Persentase Gedung Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	100%	Persen	48.020.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022

Program Dinas Lingkungan Hidup merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan ntuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan insfrastuktur bidang Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2022 akan disampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pendanaan Rencana Kerja Periode Tahun 2022-2023

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegaitan	Indikator/Tujuan/sasaran/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023			
					Tahun 2022		Tahun 2023	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN			**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**	**61,93%**		**62,25%**	
		MENURUNNYA PELANGGARAN HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		**PERSENTASE PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP**	**20,00%**		**15,00%**	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Tingkat Pencemaran Air**	**5,4 IP**	**Rp 1.499.719.200**	**5,3 IP**	**Rp 2.357.707.800**
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Indeks Kualitas Air**	**50,2**	**Rp 1.211.690.300**	**50,3**	**Rp 1.741.650.000**
				Indeks Kualitas Udara	**76,83**		**76,83**	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya**	**100%**	**Rp 218.028.900**	**100%**	**Rp 466.057.800**
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya**	**100%**	**Rp 218.028.900**	**100%**	**Rp 466.057.800**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegaitan	Indikator/Tujuan/sasaran/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023			
					Tahun 2022		Tahun 2023	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	Rp 4.185.396.108	100%	Rp 7.900.000.000
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	Rp 4.185.396.108	100%	Rp 7.900.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100%	Rp 176.864.500	100%	Rp 200.000.000
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	Rp 176.864.500	100%	Rp 200.000.000
			Penyelenggaraan Kajian lingkungan hidup strategis (klhs) kabupaten/kota	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun	-	Rp -	-	Rp -
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	25%	Rp 213.435.500	30%	Rp 213.435.500

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegaitan	Indikator/Tujuan/sasaran/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023			
					Tahun 2022		Tahun 2023	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Derah Kabupaten/kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	50%	Rp 213.435.500	55%	Rp 213.435.500
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	25%	Rp 70.000.000	50%	Rp 155.000.000
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	25%	Rp 70.000.000	50%	Rp 155.000.000
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Terselesaikan	100%	Rp 143.743.500	100%	Rp 151.000.000

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegaitan	Indikator/Tujuan/sasaran/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023			
					Tahun 2022		Tahun 2023	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100%	Rp 143.743.500	100%	Rp 151.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	Rp 234.677.100	100%	Rp 634.398.700
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	100%	Rp 234.677.100	100%	Rp 634.398.700

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegaitan	Indikator/Tujuan/sasaran/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023			
					Tahun 2022		Tahun 2023	
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
		TERCIPTANYA PEMUKIMAN YANG NYAMAN DAN LAYAK HUNI		PERSENTASE KAWASAN KUMUH	9,67%		9,12%	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24,10%	Rp 13.382.753.872	24,20%	Rp 43.061.058.800
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24%	Rp 13.382.753.872	24,20%	Rp 43.061.058.800
				Persentase Sampah Yang Ditangani	61%		61,25%	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengimplementasikan Izin TPS Limbah B3	50,00%	Rp 238.728.400	58,00%	Rp 410.000.000
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	50%	Rp 238.728.400	58%	Rp 410.000.000

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan dan evaluasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dalam Renja tahun 2022 diharapkan dapat diakomodir target kinerja serta usulan anggaran sebagai akibat dari kebutuhan di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan pengangkutan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjar.

Tentunya dengan usulan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan berakibat terjadinya penambahan belanja daerah dan semua usulan tidak dapat terakomodir. Akan tetapi dengan disusunnya Renja 2022 diharapkan dapat memberi gambaran bahwa anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 yang belum berjalan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini merupakan landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah sekaligus Visi dan Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang terjabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja tahun 2022 ini adalah sebagai pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan selama setahun untuk secara bersama-sama dan bersinergi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disampaikan, semoga bermanfaat dalam menyukseskan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar merupakan instansi pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

Keterkaitan dengan Dokumen RKPD, Dokumen Renstra SKPD, Dokumen Renja K/L, Dokumen Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat dari gambar seperti di bawah ini.

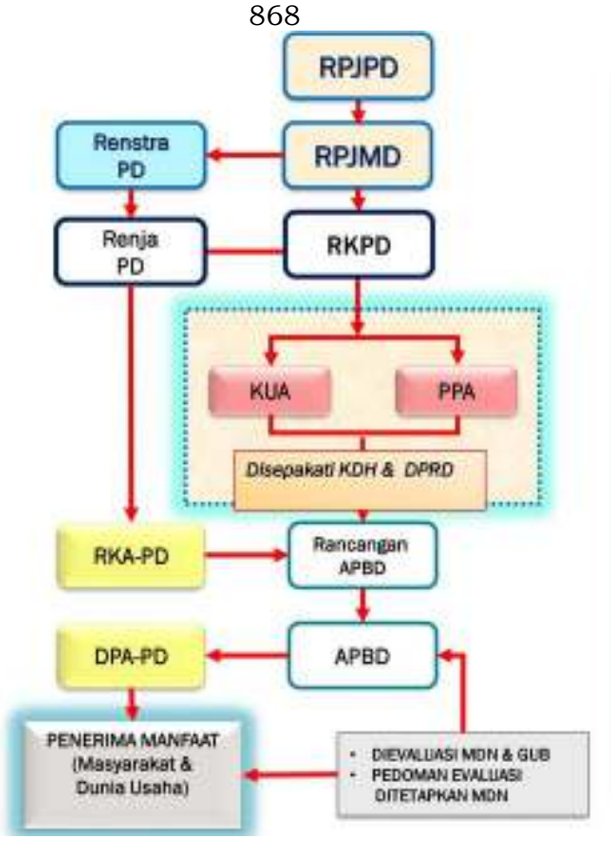

Gambar 1.1 Bagan Alir Renja

Tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022, dapat dilihat dari gambar seperti dibawah ini.

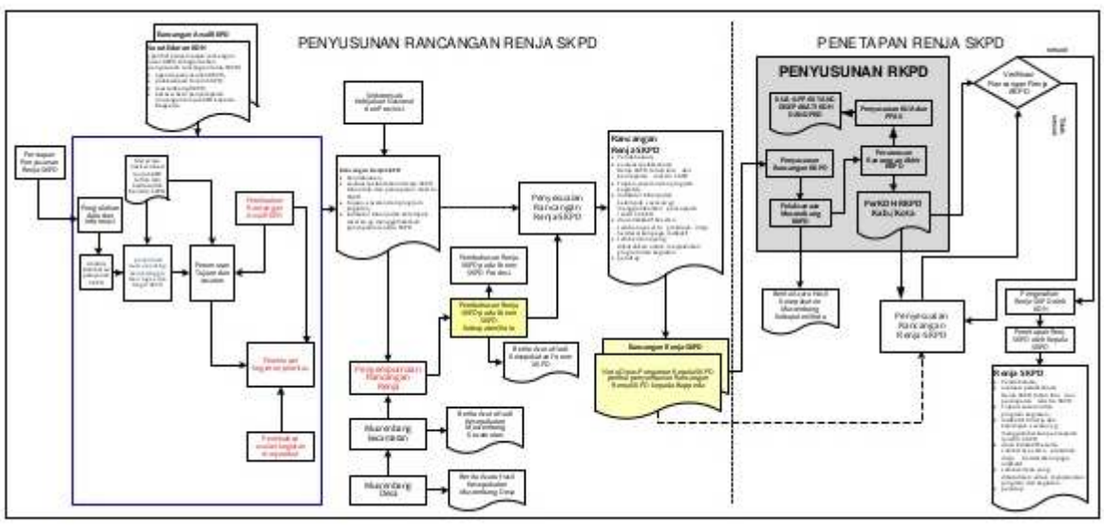

Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja.
b. Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan rancangan awal RKPD.
d. Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan tim forum lintas Perangkat Daerah (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada RKPD.

f. Verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi pedoman bagi SKPD dalam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor....);
31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 65), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 31);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD di tahun 2022.
b. Sebagi intrumen akuntabilitas di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan laporan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

1.1 Latar belakang

Mengemukan pengertian ringkasan tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu,

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai

a. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah,
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
c. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDG's,
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
e. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,
b. Penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan,
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Berisikan penjelasan mengenai program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program Perangkat Daerah/program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan RPJMD Kabupaten Banjar

Bab V Penutup,

Menguraikan tentang

a. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan

Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PRAKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.964.876.098,- dengan rincian sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Rincian Belanja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2020

No.	Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.212.590.091	2.616.977.947	81.46
2.	Belanja Langsung	4.752.286.007	4.488.125.669	94.44
		7.964.876.098	7.105.103.616	89.21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2020

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 serta Program, Kegiatan dan Realisasi Capaian Kinerja terhadap Output Tahun 2020

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Target Output	Realisasi Output	Persentase capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.752.000	3.143.500	83.78	742 materai dan pengiriman surat	677 materai dan pengiriman surat	91.24
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	157.900.000	126.501.771	80.12	48 struk pembayaran	48 struk pembayaran	100
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.505.000	1.500.000	99.67	12 dokumen	12 dokumen	100
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.311.000	3.309.100	99.94	21 ruangan	21 ruangan	100
		Penyediaan alat tulis kantor	4.890.500	4.890.500	100	220 buah	220 buah	100
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.518.800	4.518.650	99.99	15.000 cetak dan penggandaan	15.000 cetak dan penggandaan	100
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000	2.498.400	99.94	10 jenis	10 jenis	100
		Penyediaan makanan dan minuman	3.917.500	3.917.500	100	12 bln	12 bln	100
		Rapat-rapat koordinasi dan	66.446.000	66.445.076	99.99	7 perjalanan	7 perjalanan	100

		konsultasi ke luar daerah						
		Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	1.297.354.000	1.286.649.542	99.17	12 kegiatan	12 kegiatn	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	587.443.450	566.582.500	96.45	51 brng	51 brng	100
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.000.000	30.999.280	99.99	260 m²	260 m²	100
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	15.850.000	15.767.300	99.48	1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96.250.910	86.379.722	89.74	22 unit	22 unit	100
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.380.756	9.380.756	100	12 bulan	12 bulan	100
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.589.000	1.589.000	100	12 bulan	12 bulan	100
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.728.000	13.727.900	99.99	52 dokumen	52 dokumen	100

		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.750.000	2.750.000	100	2 dokumen	2 dokumen	100
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.887.000	1.887.000	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	3.790.000	3.789.950	99.99	8 dokumen	9 dokumen	112.5
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	1.850.678.000	1.686.458.406	91.13	100%	91.13%	91.13
5.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	22.455.900	22.455.900	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	427.724.500	402.834.795	94.18	20 koneksi jaringan	20 koneksi jaringan	100
6.	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Penerapan KTP berbasis NIK	40.670.294	40.669.344	99.99	300.000 KTP el	385.384 KTP el	128.46
		Pelayanan perpindahan penduduk	1.216.770	1.207.640	99.25	28.000 jiwa	34.662 jiwa	123.79
		Pelayanan Kartu Keluarga	10.679.720	9.915.744	92.85	30.000 KK	34.934 KK	116.45

		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	1.586.000	1.583.000	99.81	20.000 KIA	23.844 KIA	119.22
7.	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	39.768.184	39.757.784	99.97	12.000 akta	14.539 akta	121.16
		Pelayanan akta kematian	5.724.900	5.702.400	99.61	1.000 akta kematian	1.153 akta kematian	115.3
		Pelayanan dan pendataan perkawinan dan perceraian	9.620.492	9.616.492	99.96	1.400 data perkawinan	3.634 data perkawinan	259.57
						400 data perceraian	736 data perceraian	184
		Pengelolaan arsip dokumen pencatatan sipil	8.500.000	7.832.600	92.15	10.000 dokumen	12.000 dokumen	120
8.	Program Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	17.592.511	17.584.917	99.96	2 inovasi	3 inovasi	150
						2 PKS	2 PKS	100
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6.304.820	6.279.200	99.59	6 SKPD	7 SKPD	116.67
						3 PKS	4 PKS	133.33
TOTAL			4.752.286.007	4.488.125.669	94.44			

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2020

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 94.44% telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar diarahkan untuk peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan tertib administrasi kependudukan sebagai sasaran utama dan untuk masa yang akan datang diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan yang ada pada database kependudukan sehingga benar-benar tersedia data yang akurat dan valid.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pelayanan Administrasii Perkantoran, dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   b. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan
      i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
      ii. Penyediaan jasa administrasi keuangan,
      iii. Penyediaan jasa kebersihan kantor,
      iv. Penyediaan alat tulis kantor,
      v. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
      vi. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
      vii. Penyediaan makanan dan minuman,
      viii. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
      ix. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran.
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan
      i. Pengadaan peralatan gedung kantor,
      ii. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
      iii. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan,
      iv. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
      v. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,
      vi. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
   c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan
      i. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,
      ii. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran,
      iii. Penyusunan pelaporan akhir tahun,
   d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan Kegiatan
      i. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan,
      ii. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.

e. Program Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan, dengan Kegiatan
   i. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan
      i. Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD
   b. Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk, dengan Kegiatan
      i. Penerapan KTP berbasis NIK,
      ii. Pelayanan perpindahan penduduk,
      iii. Pelayanan Kartu Keluarga,
      iv. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).
   c. Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil, dengan Kegiatan
      i. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil,
      ii. Pelayanan Akta Kematian,
      iii. Pelayanan dan pendataan perkawinan dan perceraian,
      iv. Pengelolaan arsip dokumen pencatatan sipil.
   d. Program Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan, dengan Kegiatan
      i. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan,
      ii. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, adalah sebagai berikut:
   a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat tidak memenuhi target kinerja yaitu pengiriman surat menyurat dikarenakan dilakukannya kerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia dalam hal pengiriman dokumen kependudukan, maka biaya pengiriman pada tahun 2020, sedikit saja yang direalisasikan.
   b. Kegiatan yang terpenuhi targetnya karena dilakukannya evaluasi per bulan terhadap serapan anggaran dan capaian target kinerja kegiatan sehingga jika kekurangan capaian di bulan ini bisa dikejar di bulan berikutnya.
   c. Kegiatan yang melebihi targetnya karena pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif melaksanakan inovasi untuk kemudahan pelayanan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, adalah sebagai berikut:
   a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
   b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
   c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
e. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam hal urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjar.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah sebagai berikut:
   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan evaluasi terhadap pola pelayanan keliling, frekuensi turun ke lapangan untuk melaksanakan pelayanan keliling sudah cukup, namun kiranya harus lebih dimaksimalkan dengan memperbaiki pola pelayanan keliling tersebut.
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas yang melaksanakan pelayanan publik, dimana kondisi sarana dan prasarana harus ditingkatkan dengan melakukan peremajaan alat perekaman KTP el dan juga kondisi bangunan, ruang pelayanan, area parkir yang tidak memadai dan tidak sebanding untuk melayani penduduk Kabupaten Banjar.
   c. Dikarenakan Pandemi COVID-19 masih belum berlalu, sedangkan kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan setiap hari terus bertambah, walaupun layanan online tetap berlangsung. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil kebijakan membuka layanan offline khusus untuk perekaman KTP-el (terutama bagi usia pemula wajib KTP-el) dengan tetap menggunakan prosedur COVID-19.
   d. Dikarenakan adanya surat edaran PPKM yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar juga melakukan WFH dan WFO untuk petugas pelayanan, sehingga dibuat kebijakan yang mana petugas WFH untuk tetap melaksanakan tugasnya di rumah seperti melakukan pelayanan di kantor, untuk admin WA nomor pelayanan.
   e. Mengingat poin c di atas, maka hal ini akan dievaluasi kembali dan tidak menutup kemungkinan nantinya layanan offline untuk semua pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar akan dibuka kembali nantinya.

2.1.2 PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.231.083.416,- dengan perincian Rp. 1.554.048.000,- untuk sumber dana DAK Non Fisik dan Rp. 7.677.035.416,- untuk sumber dana APBD. Setelah perubahan, pagu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menjadi 7.844.562.689,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), adapun jumlah program/kegiatan/sub kegiatan menjadi 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Jika melihat capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2021, dimana rata-rata capaian/realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sudah mencapai 50%, maka diperkirakan capaian target periode akhir Renstra bisa tercapai.

Tabel 2.3
Rekapitulisasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disdukcapil dan Pencapaian Renstra Disdukcapil s/d Tahun Berjalan
Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)* /Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	06					Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil									
PROGRAM?KEGIATAN TAHUN 2020															
2	06	2	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100 %	100 %	100			
2	06	2	06	01	01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan jasa pengiriman surat	72	48	742	677	91.24			
2	06	2	06	01	02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	48	48	48	100			
2	06	2	06	01	07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah SPJ fungsional yang diterbitkan	72	48	12	12	100			
2	06	2	06	01	08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang dibersihkan	72	48	21	21	100			
2	06	2	06	01	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	72	48	220	220	100			
2	06	2	06	01	11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	48	15000	15000	100			

2	06	2	06	01	12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan penerangan	72	48	10	10	100			
2	06	2	06	01	17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	72	48	12	12	100			
2	06	2	06	01	18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	72	48	7	7	1000			
2	06	2	06	01	19	Kegiatan Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	72	48	12	12	100			
2	06	2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	100 %	100 %	100			
2	06	2	06	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/OPerasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1	1	0	0	0			
2	06	2	06	02	09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah barang peralatan kantor yang diadakan	61	17	51	51	94,44			
2	06	2	06	02	22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah masa waktu luasan bangunan gedung kantor yang dipelihara	72	48	12	12	100			
2	06	2	06	02	23	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	6	4	1	1	100			
2	06	2	06	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	129	86	22	22	100			
2	06	2	06	02	26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah masa waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	72	48	12	12	100			
2	06	2	06	02	28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah masa waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor	72	48	12	12	100			
2	06	2	06	02	42	Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Jumlah gedung rehab yang dlakukan	1	1	0	0	0			
2	06	2	06	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkata	100%	100 %	100 %	100 %	100 %			

							n disiplin aparatur								
2	06	2	06	03	05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5	1	0	0	0			
2	06	2	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	06	2	06	06	01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas yang dihasilkan	720	680	52	52	100			
2	06	2	06	06	02	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang dihasilkan	96	56	2	2	100			
2	06	2	06	06	04	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	159	100	1	1	100			
2	06	2	06	06	08	Kegiatan Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	96	32	0	0	0			
2	06	2	06	06	09	Kegiatan Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	630	226	8	9	112.5			
2	06	2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependuudkan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	06	2	06	15	31	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	72	48	12	12	100			
2	06	2	06	16		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan dengan data SIAK pelayanan	79%	95.4 %	77%	95.6 %	124.16%			
2	06	2	06	16	01	Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah dokumen pengolahan dalam penyusunan laporan	255	88	1	1	100			

							infoduk yang dihasilkan								
2	06	2	06	16	02	Kegiatan Pengembangan database kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki database kependudukan yang valid dan akurat	870	290	0	0	0			
2	06	2	06	16	03	Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah kecamatan yang terkoneksi dengan jaringan database SIAK	55	35	20	20	100			
2	06	2	06	17		Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-el	98%	95.61%	98%	97.22%	99.20%			
							Cakupan kepemilikan KK	98%	123.52%	98%	99.99%	102.03%			
							Cakupan kepemilikan KIA	18%	2.89%	18%	15.58%	86.56%			
							Persentase pendataan penduduk pindah datang	3%	5.44%	3%	6.27%	125.4%			
2	06	2	06	17	01	Kegiatan penerapan KTP berbasis NIK	Jumlah KTP-el yang diterbitkan	1.233.000	825.559	300.000	385.384	128.46			
2	06	2	06	17	02	Kegiatan Pelayanan perpindahan penduduk	Jumlah penduduk pindah datang	81.000	60.470	28.000	34.662	123.79			
2	06	2	06	17	03	Kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	510.000	250.000	30.000	34.934	116.45			
2	06	2	06	17	04	Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA yang diterbitkan	100.000	50.000	20.000	23.844	119.22			
2	06	2	06	18		Program Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	80%	71.03%	75%	72.32%	96.43%			
							Persentase perkawinan penduduk yang didata	1%	21.80%	1%	20.46%	2046%			
							Persentase perceraian penduduk yang didata	1%	10.72%	1%	31.67%	3167%			
							Cakupan penerbitan akta kematian	40%	88.48%	35%	69.39%	198.26%			
							Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola	65%	81.25%	60%	120%	200%			
2	06	2	06	18	01	Kegiatan Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah akta kelahiran	53.000	40.523	12.000	14.539	121.16			

							yang diterbitkan								
2	06	2	06	18	02	Kegiatan Pelayanan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	4.000	3.129	1.000	1.153	115.3			
2	06	2	06	18	03	Kegiatan Pelayanan dan pendataan perkawinan dan perceraian	Jumlah pendataan pencatatan perkawinan	8.300	6.896	1.400	3.634	259.57			
							Jumlah pendataan pencatatan perceraian	2.400	1.764	400	736	184			
2	06	2	06	18	04	Kegiatan Pengelolaan arsip dokumen pencatatan sipil	Jumlah dokumen arsip pencatatan sipil yang dikelola	55.000	43.523	10.000	12.000	120			
2	06	2	06	19		Program Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	100%	44.44%	72%	83.33%	115.74%			
							Persentase inovasi yang dilaksanakan	90%	50%	85%	87.5%	102.94%			
2	06	2	06	19	01	Kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah PKS yang dilaksanakan	9	9	5	6	120			
2	06	2	06	19	02	Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah inovasi pelayanan publik	8	5	2	3	150			
2	06	2	06	19	03	Kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah lembaga pengguna data kependudukan	6	5	6	7	116.67			
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2021															
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	
2	12	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	
2	12	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	12					12	8	
2	12	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian LKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dihasilkan	50					50	37	

2	12	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan	3					3	3	
2	12	01	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dihasilkan	3					3	2	
2	12	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	
2	12	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya belanja gaji dan TPP	14					14	10	
2	12	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	13					13	9	
2	12	01	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ Fungsional yang diterbitkan	12					12	8	
2	12	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1					1	0	
2	12	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2					2	1	
2	12	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	
2	12	01	2	05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	5					5	2	
2	12	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kompetensi petugas/pelaksana pelayanan prima	22					22	5	
2	12	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	
2	12	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat istrik dan penerangan	124					124	65	
2	12	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah tersedianya barang	135					135	70	

						Cetakan dan Penggandaan	cetakan dan jilid								
							Jumlah tersedianya barang pengganda an	40.569					40.569	20.000	
2	12	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1295					1295	650	
2	12	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	278					278	130	
2	12	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan barang yang dilaksanakan	3					3	0	
2	12	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	
2	12	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang peralatan kantor yang diadakan	168					168	85	
2	12	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	
2	12	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	808					808	400	
							Jumlah masa waktu pengiriman surat administrasi kantor	12					12	8	
2	12	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah masa waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12					12	8	
2	12	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1850					1850	925	
							Jumlah ruangan yang dibersihkan	21					21	21	
							Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan terkait adminduk	1					1	0	
2	12	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuenjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	

2	12	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1					1	1	
2	12	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional (roda dua dan roda empat) yang dipelihara	22					22	22	
2	12	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung kantor	1					1	0	
2	12	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan bangunan gedung kantor yang dipelihara	260					260	260	
2	12	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah masa waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12					12	8	
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	100%					100 %	50%	
2	12	04	2	01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	100%					100 %	50%	
2	12	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pembuatan buku agregat data kependudukan dan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Banjar	2					2	1	
2	12	04	2	01	02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah inovasi dalam pelayanan publik	5					5	3	

							Jumlah perjanjian kerjasama dalam pencatatan kelahiran online dan pemanfaatan data kependudukan	13					13	9	
2	12	04	2	02		Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan dengan data SIAK pelayanan	79%					79%	96%	
2	12	04	2	02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang terkoneksi jaringan database SIAK	20					20	10	
2	12	04	2	03		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	100%					100 %	70%	
2	12	04	2	03	04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga pengguna data kependudukan	10					10	7	
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-el	98%					98%	99,2%	
2	12	02	2	01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-el	98%					98%	99.2%	
2	12	02	2	01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah KTP-el yang diterbitan	400.000					400.000	399.570	
							Jumlah KK yang diterbitkan	10.000					10.000	6.757	
							Jumlah KIA yang diterbitkan	20.000					20.000	7.952	
							Jumlah penduduk pindah datang	10.000					10.000	6.897	
2	12	02	2	02		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-el	98%					98%	99.2%	
2	12	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blanko KIA yang tersedia	40.000					40.000	0	

2	12	02	2	03		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-el	98%					98%	99.2%	
2	12	02	2	03	05	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah sosialisasi pendaftaran penduduk	2					2	0	
2	12	03				Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun	80%					80%	76.8%	
2	12	03	2	01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun	80%					80%	76.8%	
2	12	03	2	01	01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola	15.000					15.000	9.485	
2	12	03	2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	10.000					10.000	9.485	
							Jumlah akta kematian yang diterbitkan	1.500					1.500	779	
							Jumlah akta perkawinan dan akta perceraian non muslim yang diterbitkan	10					10	3	
							Jumlah pendataan perkawinan dan perceraian penduduk	700					700	1.824	
2	12	03	2	01	05	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah cetak dokumen pencatatan sipil	900					900	0	
2	12	03	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun	80%					80%	76.8%	
2	12	03	2	02	08	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi terkait pencatatan sipil	2					2	0	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja SKPD

Catatan:
Pada kolom 10 dan 11 program dan kegiatan tidak dapat diisikan realisasi dan capaiannya dikarenakan adanya perbedaan satuan pada tiap tahun anggaran. Perbedaan satuan tersebut dikarenakan adanya tolak ukur kegiatan yang harus bisa dihitung sehingga pada tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar telah menghitung target kinerja kegiatan tersebut. Perhitungan tolak ukur kegiatan tersebut berdasarkan atas saran dari hasil reviuw Inspektorat Kabupaten Banjar atas RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Pada tahun 2021 dikarenakan adanya nomenkletur dari Permendagri 90/2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Yang menjadi tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

a. Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah (IKK)

Analisis capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021

No.	IKK	Realisasi
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94.84%
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	86.09%
3.	Rasio pasangan berakte nikah	20.46%
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada
5.	Penerapak KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90.25%
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	72.32%

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

b. Indikator Kinerja Menurut Perubahan RPJMD

Analisis capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja pada Perubahan RPJMD Kab. Banjar (2016 – 2021), dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Perubahan RPJMD
Disdukcapil Kab. Banjar Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Perubahan RPJMD	Target Thn 2021	Realisasi Thn 2021	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	81.27	99.11 %
2.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	20%	18.52%	92.6%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2019

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kab. Banjar pada tahun 2021. Tahun 2021 ini, Disdukcapil melakukan SKM sebanyak 2 (dua) periode. SKM ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Rumus untuk menentukan nilai IKm adalah sebagai berikut.

Dim

Dimana

$$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \times 100$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times 100$$

Bobor nilai rata-rata tertimbang =

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

2. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, dimana sumber data untuk perhitungan indikator ini dari DKB Semester II Tahun 2020, DKB Semester I Tahun 2021 dan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan jumlah penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan yang lengkap (Akta Kelahiran, KK, KTP/KIA) dibagi jumlah penduduk Kabupaten Banjar dikali 100.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2019	Th 2020	Th. 2021	Th 2021	Th 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)												
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk							94,97%	95,16%	94,84%	98%	98%	
2.	Rasio bayi berakte kelahiran							78,84%	82,83%	86.09%	90%	90%	
3.	Rasio pasangan berakte nikah							26,69%	30,05%	20.46%	21%	21%	
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada/ tidak ada					Ada	ada	Ada	ada	ada	
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah/belum					Sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah	
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)							94,98%	95,16%	90.25%	98%	98%	
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran							67,25%	70,46%	72.32%	75%	80%	
	INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RPJMD (2016-2021)												
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,90	82	82,01	82.05	80,37	81,12	81.27	82	82,01	
2.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap			NA	17%	20%	21%	NA	17.52%	18.52%	20%	20%	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri RI Semseter II 2020 dan Data Konsolidasi Bersih Kemendagri RI Semester I 2021

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang melakukan pelayanan publik dalam memenuhi kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Banjar dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, murah dan mudah. Apalagi saat ini kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, dan yang tak kalah berperan adalah era dunia digital mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, mengajukan tuntutan, keinginan, dan aspirasinya kepada pemerintah. Hal ini menjadi isu yang sangat penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk mengerahkan segenap upaya dan berpikir inovatif untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan ke masyarakat.

Kondisi geografis Kabupaten Banjar dan daerah sebaran penduduk yang terbentang, yang mana harus segera dilaksanakan penambahan layanan di beberapa titik di daerah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak terbebani lagi dengan biaya transportasi yang harus dikeluarkan dan efisiensi waktu.

Untuk itu pada tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar diberikan 2 (dua) gedung Eks. Gedung Badan Pendapatan di Daerah Gambut dan Mataraman untuk dijadikan Kantor UPT Pelayanan Disdukcapil. Kantor UPT Pelayanan Disdukcapil tersebut digunakan untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat. UPT Gambut untuk daerah Gambut, Kertak Hanyar, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Aluh-Aluh, Sungai Tabuk. UPT Mataraman untuk daerah Mataraman, Simpang Empat, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Cintapuri Darussalam, Paramasan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri untuk melayani daerah Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Aranio, Karang Intan, Astambul.

Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar telah ada di MPP (Mall Pelayanan Publik) bersama dengan beberapa Instansi terkait untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi yang terjadi saat ini masih perlu adanya evaluasi dalam hal pelayanan baik itu sistem, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan yang tak kalah penting adalah anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaaten Banjar

Masalah pokok yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar adalah belum optimalnya penyelenggaraan reformasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga menyebabkan kualitas pelayanan kependudukan belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari

a. Jangkauan layanan kependudukan bagi seluruh masyarakat masih belum optimal;
b. Masih terbatasnya kapasitas aparatur pelayanan kependudukan;

c. Sarana dan prasarana pelayanan kependudukan masih belum memadai.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan *SDGs (Sustainable Development Goals)*

Permasalahan yang juga mempengaruhi menyebabkan terhambatnya pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang telah ditentukan, adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan berupa KK,KTP, akta kelahiran dan akta kematian, meskipun telah berusaha dengan melaksanakan sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan sifatnya wajib bagi warga negara, sehingga sebetulnya sudah banyak Kabupaten/Kota banyak yang menggratiskan dan hal ini juga sudah dilakukan Kabupaten Banjar dengan mengubah Peraturan Daerah yang ada.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

2.3.4.1 Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

Tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wabah pandemi yang terjadi beberapa tahun ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan pelayanan tatap muka,
2. Mobilitas penduduk yang tinggi;
3. Belum seluruh masyarakat memiliki dan menyadari pentingnya Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil;
4. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan ”MUDAH dan CEPAT”,
5. Kondisi geografis, pegunungan, sungai menjadi kendala dalam stabilitas sistem online.

2.3.4.2 Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

Peluang tersebut adalah sebagai berikut.

a. Transformasi regulasi bidang adminduk yang memberikan kemudahan layanan,
b. Semakin meningkatnya teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam memberikan layanan,
c. Telah diberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada seluruh Disdukcapil se Indonesia,
d. Telah diberlakukannya SIAK online,
e. Dukungan dan kerjasama dari Instansi berwenang lainnya.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB)**,** harus disukseskan pelaksanaannya.
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang representatif.
3. Untuk mencapai target nasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar harus melakukan terobosan-terobosan inovasi-inovasi dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan yang dimaksud, antara lain ditandai oleh kenyataan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan salah satu usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dalam peningkatan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dalam pengurusan Dokumen Kependudukan yang cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan meningkatnya cakupan kepemilkan dokumen kependudukan dengan data yang akurat.
3. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam hal pencocokan dan penelitian data penduduk ke rumah penduduk RT untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memerlukan akurasi data pemilih.
4. Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi baik di media elektonik maupun media cetak dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat/penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan.
5. Adanya mobil pelayanan untuk jemput bola kepengurusan dokumen kependudukan. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus berperan aktif/Stelsel Aktif dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 maka mobil pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tidak dioperasikan.

Untuk mengatasi sejumlah keterbatasan tersebut, dituntut upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menetapkan kebijakan dan program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2021

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I.	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil Kab. Banjar	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	85%	126.323.600	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil Kab. Banjar	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	85%	123.961.900	Penyesuaian penempatan belanja
a.	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85%	126.323.600	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85%	123.961.900	Penyesuaian penempatan belanja
1.	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	2 akta	23.891.600	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	8 akta	15.750.000	Penyesuaian penempatan belanja
			Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	2 akta				Jumlah pembetulan akta, kutipan kedua, catatan pinggir, dan perubahan nama yang diterbitkan	600 akta		
			Jumlah pendataan perkawinan	4.000 data							
			Jumlah pendataan perceraian	375 data							
2.	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	15.500 akta	102.432.000	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah akta kelahiran 0-17 th yang diterbitkan	12.000 akta	108.211.900	Penyesuaian penempatan belanja
								Jumlah akta kelahiran > 17 th yang diterbitkan	5.500 akta		

			Jumlah akta kematian yang diterbitkan	1.400 akta				Jumlah akta kematian yang diterbitkan	1.500 akta		
								Jumlah BAKAK yang diinput	10.000 data		
II.	Program Pendaftran Penduduk	Dinas Dukcapil Kab. Banjar	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	99.25%	127.221.700	Program Pendaftran Penduduk	Dinas Dukcapil Kab. Banjar	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	99.25%	70.612.000	Penyesuaian penempatan belanja
a.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99.25%	127.221.700	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99.25%	70.612.000	Penyesuaian penempatan belanja
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah KTP-El yang diterbitkan	415.000 KTP-El	127.221.700	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah KTP-El yang diterbitkan	415.000 KTP-El	60.612.000	Penyesuaian penempatan belanja
			Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	40.000 KK				Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	40.000 KK		
			Jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan	21.000 KIA				Jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan	21.000 KIA		
2.	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah surat keterangan pindah datang yang diterbitkan	-	-	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah surat keterangan pindah datang yang diterbitkan	36.000 orang	10.000.000	Penyesuaian pohon kinerja
III.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil Kab. Banjar	Persentase penyajian data kependudukan skala provinsi	40%	302.865.700	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil Kab. Banjar	Persentase penyajian data kependudukan skala provinsi	40%	178.713.000	Penyesuaian penempatan belanja
a.	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase pemanfaatan data kependudukan	40%	176.886.000	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase pemanfaatan data kependudukan	40%	48.277.000	Penyesuaian penempatan belanja

1.	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah buku pengolahan dan penyajian data kependudukan yang diterbitkan	2 buku	91.270.200	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah buku pengolahan dan penyajian data kependudukan yang diterbitkan	3 buku	48.277.000	Penyesuaian penempatan belanja
			Jumlah penyajian data yang diselesaikan berdasarkan permintaan data dari instansi	70 kali				Jumlah penyajian data yang diselesaikan berdasarkan permintaan data dari instansi	184 kali		
2.	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah inovasi yang dimiliki Disdukcapil Kab. Banjar	6 inovasi	85.615.800					0	Penyesuaian penempatan berdasarkan Permendagri 90/2019
			Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan	32 PKS						0	
			Jumlah usulan inovasi baru	1 inovasi						0	
b.	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pemanfaatan data kependudukan	40%	80.898.800	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pemanfaatan data kependudukan	40%	69.200.000	Penyesuaian penempatan belanja
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk		Jumlah koneksi JARKOMDAT pada lokasi pelayanan adminduk	20 koneksi	80.898.800	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk		Jumlah koneksi JARKOMDAT pada lokasi pelayanan adminduk	20 koneksi	69.200.000	Penyesuaian penempatan belanja

	terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
c.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pemanfaatan data kependudukan	40%	45.080.900	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pemanfaatan data kependudukan	40%	61.236.000	Penyesuaian penempatan belanja
						Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah inovasi yang dimiliki Disdukcapil Kab. Banjar	6 inovasi	47.866.000	Penyesuaian penempatan belanja
								Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan	32 PKS		
								Jumlah usulan inovasi baru	1 inovasi		
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah lembaga penggunaa yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	13 SKPD	45.080.900	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah lembaga penggunaa yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	13 SKPD	13.370.000	Penyesuaian penempatan belanja
			Jumlah pengajuan baru pemanfaatan data kependudukan	3 SKPD				Jumlah pengajuan baru pemanfaatan data kependudukan	3 SKPD		

Sumber : Aplikasi SIPD (https://banjarkab.sipd.kemendagri.go.id/)

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam hal ini tidak ada usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2022 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan infrastuktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-Undang, pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
4. **Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan selonisasi;** dan
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

PN 1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

PN 3. SDM berkualitas dan berdaya saing

PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7. Stabilitas polhukhankam dan transfortasi pelayanan publik

Dari penjelasan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk arahan utama Presiden yaitu penyederhanaan birokrasi. Hal ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yaitu dalam contoh yaitu

a. dalam pembuatan akta kelahiran sekarang tidak menggunakan formulir F.2-01 lagi,
b. untuk yang pernikahan orang tuanya secara siri/tidak di KUA, maka sebagai pengganti bukti kebenaran sebagai pasangan suami isteri disiapkan SPTJM benaran pasangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar,

c. untuk yang melahirkan bukan di RS/Bidan/Polindes, maka disiapkan SPTJM kebenaran data kelahiran, dengan menyertakan tanda tangan dua orang saksi kelahiran,

d. pada loket pelayanan sebelum Pandemi Covid-19, maka setiap pelayanan yang dilakukan akan langsung mendapatkan pelayanan *3 in 1*. Pelayanan *3 in 1* itu yaitu pada saat pembuatan akta kelahiran anak yang baru, maka akan mendapatkan akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA anak tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan rumusan isu-isu penting yang telah dijabarkan pada sub 2.3, yaitu terkait masih rendahnya tingkat kepemilikan Dokumen Kependudukan, sehingga menyebabkan kualitas pelayanan kependudukan belum optimal. Maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Banjar yang didalamnya terus melakukan terobosan inovasi-inovasi baru pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis
Misi 4	:	Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif
Tujuan	:	Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik
Sasaran	:	Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam menyusun Renja Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada:

a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih Tahun 2021-2024, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sebagai unsur fungsi dan tugas pembangunan mengadopsi visi yang diselaraskan dengan Visi Kabupaten Banjar (seperti yang disebutkan di atas). Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah :

- Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Maju dalam hal ini Kabupaten Banjar yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental-spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- Mandiri dalam hal ini Kabupaten Banjar mengupayakan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dengan mengurangi ketergantungan dari pihak-pihak lain.

- Agamis dalam hal ini Kabupaten Banjar melaksanakan pembangunan berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
5. Penguatan karakter masyarakat yang religious, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mencermati 5 (lima) Misi pembangunan daerah tersebut, peran Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar dominan pada **Misi Keempat.**

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2022 disusun sebagai upaya untuk mendukung Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2022, program dan kegiatan prioritas (utama) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar adalah 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan, dan 8 (delapan) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran.

b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar tahun 2022, maka kebutuhan dana/pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar adalah untuk program prioritas bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. 373.286.900,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sedangkan untuk dana yang bersumber dari DAK Non Fisik tidak dapat ditampilkan dikarenakan harus menunggu pemberian pagu dari Pusat/sisa pagu dari tahun anggaran sebelumnya serta belum dikeluarkannya juknis dari Pusat.

Pada rumusan program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan rancangan awal RKPD, yaitu jumlah program/kegiatan tetapi berbeda untuk sub kegiatan serta pagu indikatifnya.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disdukcapil Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banjar

Nama PD : Disdukcapil Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.25%	70.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		99.27%	71.200.000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.200.000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yg diterbitkan Jumlah KK yg diterbitkan Jumlah KTP-el yg diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21000 KIA 40000 KK 415000 KTP	60.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		215000 KIA 40500 KK 415500 KTP	60.700.000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah surat keterangan pindah datang penduduk yg diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36000 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36500 orang	10.500.000

2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.00%	123.961.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90.00%	126.000.000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123.961.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			126.000.000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yg diterbitkan Jumlah pembetulan akta, kutipan kedua, catatan pinggir, dan perubahan nama yg diterbitkan	Disdukcapil	8 akta 600 akta	15.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 akta 700 akta	16.000.000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran 0-17 th yg diterbitkan Jumlah akta kelahiran >17 th yg diterbitkan Jumlah akta kematian yg diterbitkan Jumlah BAKAK g diinput	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12000 akta 5500 akta 1500 akta 10000 data	108.211.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12500 akta 6000 akta 1500 akta 10500 data	110.000.000

2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		178.713.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			184.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.277.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49.000.000
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku pengolahan dan penyajian data kependudukan yang diterbitkan Jumlah penyajian data yg diselesaikan berdsrkn permintaan data dari instansi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 buku 184 data	48.277.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 buku 185 data	49.000.000
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70.000.000
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	Terpeliharanya jaringan SIAK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 ttk lynn	69.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5 ttk lynn	70.000.000

					Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Umum			
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.236.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65.000.000
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah inovasi yg dimiliki Dukcapil Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan Jumlah usulan inovasi baru	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 inovasi 32 PKS 1 inovasi	47.866.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 inovasi 35 PKS 1 inovasi	50.000.000
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga pengguna yg melaksanakan pemanfaatan data kependudukan Jumlah pengajuan baru pemanfaatan data kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 SKPD 3 SKPD	13.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 SKPD 3 SKPD	15.000.000

Sumber data : aplikasi SIPD (http://banjarkab.sipd.kemendagri.go.id/)

c. Alasan Pemilihan Program Prioritas

Untuk mendukung **Misi 4 : Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif,** maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dalam mendukung program kerja untuk kelancaran administrasi kependudukan yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam uotputnya yaitu 3 (tiga) program, yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel seperti di bawah ini. Tabel ini berisi program pembangunan daerah (program startegis daerah) dan program Perangkat Daerah/program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program, kegiatan, dan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.857.932.836,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Lebih lengkap terkait program/kegiatan/sub kegiatan dan total pendanaan serta sumber pendanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2022 bisa dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjar
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.25%	70.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		99.27%	71.200.000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.200.000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yg diterbitkan Jumlah KK yg diterbitkan Jumlah KTP-el yg diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21000 KIA 40000 KK 415000 KTP	60.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		215000 KIA 405000 KK 415500 KTP	60.700.000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah surat keterangan pindah datang penduduk yg diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36000 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36500 orang	10.500.000
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.00%	123.961.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		90.00%	126.000.000

										Umum			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123.961.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			126.000.000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yg diterbitkan Jumlah pembetulan akta, kutipan kedua, catatan pinggir, dan perubahan nama yg diterbitkan	Disdukcapil	8 akta 600 akta	15.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 akta 700 akta	16.000.000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran 0-17 th yg diterbitkan Jumlah akta kelahiran >17 th yg diterbitkan Jumlah akta kematian yg diterbitkan Jumlah BAKAK g diinput	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12000 akta 5500 akta 1500 akta 10000 data	108.211.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12500 akta 6000 akta 1500 akta 10500 data	110.000.000
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		178.713.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			184.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.277.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49.000.000
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku pengolahan dan penyajian data kependudu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	3 buku 184 data	48.277.000	Dana Transfer Umum-Dana		3 buku 185 data	49.000.000

						kan yang diterbitkan Jumlah penyajian data yg diselesaikan berdsrkn permintaan data dari instansi	Kelurahan			Alokasi Umum			
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70.000.000
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpeliharanya jaringan SIAK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 ttk lynn	69.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 ttk lynn	70.000.000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.236.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65.000.000
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah inovasi yg dimiliki Dukcapil Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan Jumlah usulan inovasi baru	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 inovasi 32 PKS 1 inovasi	47.866.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 inovasi 35 PKS 1 inovasi	50.000.000
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga pengguna yg melaksanakan pemanfaatan data kependudukan Jumlah pengajuan baru pemanfaatan data kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 SKPD 3 SKPD	13.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 SKPD 3 SKPD	15.000.000
2	12	01			Program Penunjang Urusan	Indeks Kepatuhan	Disdukcapil	100%		Dana		100%	

					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dan Kinerja Intern (IKKI) Dukcapil				Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	9 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 dokumen	30.000.000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	1 dokumen	7.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	10.000.000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	2 dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	6.000.000
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	1 dokumen	6.610.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	6.650.000
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	2 dokumen	6.526.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2 dokumen	6.530.000

										Umum			
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	50 dokumen	12.277.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 dokumen	12.280.000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Dukcapil yg tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	72 dokumen	5.644.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		72 dokumen	5.650.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan Dukcapil yang tepat waktu dan tepat mutu	Disdukcapil	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil	14 bulan	3.606.373.336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	3.606.373.336
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji PTT	Disdukcapil	13 bulan	2.061.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 bulan	2.061.260.000
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dukcapil	Disdukcapil	12 laporan	18.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	19.000.000
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan Dukcapil yg	Disdukcapil	1 laporan	5.700.000	Dana Transfer Umum-		1 laporan	6.000.000

						sesuai dg SAP				Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran Dukcapil yg sesuai dg SAP	Disdukcapil	2 laporan	5.777.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	6.000.000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Dukcapil sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Disdukcapil	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
2	12	01	2.05	10	Soialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Disdukcapil		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya	Disdukcapil	25 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 orang	50.000.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrsi perkantoran	Disdukcapil	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jaringan listrik terpelihara dengan baik	Disdukcapil	12 bulan	7.544.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	6.000.000

2	1 2	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan	Disduk capil	12 bulan	582.242 .821	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	582.250 .000
2	1 2	0 1	2. 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	Disduk capil	12 bulan	8.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	8.660.000
2	1 2	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi Dukcapil yang terfasilitasi	Disduk capil	12 bulan	824.297 .000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	825.000 .000
2	1 2	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai dg rencana kebutuhan	Disduk capil	100%	789.146 .000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	789.150 .000
2	1 2	0 1	2. 07	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dg rencana kebutuhan	Disduk capil	12 bulan	789.146 .000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	789.150 .000
2	1 2	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Disduk capil	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
2	1 2	0 1	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya jasa surat menyurat	Disduk capil	12 bulan	10.490. 000	Dana Transfer Umum-Dana		12 bulan	10.500. 000

										Alokasi Umum			
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Disdukcapil	12 bulan	218.632.279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	220.000.000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapil	12 bulan	89.114.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	89.120.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yg terpelihara sesuai dg rencana kebutuhan	Disdukcapil	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yg berfungsi dg baik	Disdukcapil	12 bulan	38.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	38.990.000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg berfungsi dg baik	Disdukcapil	12 bulan	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	230.000.000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara dan berfungsinya gedung kantor dg baik	Disdukcapil	12 bulan	64.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	65.000.000
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah masa waktu pemeliharaan	Disdukcapil	12 bulan	814.511.000	Dana Transfer		12 bulan	815.500.000

					Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan dan perlengkapan gedung kantor				Umum-Dana Alokasi Umum			

Sumber data : aplikasi SIPD (http:/Banjarkab.sipd.kemendagri.go,id/)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Rencana Kerja ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022.

Rencana Kerja ini sebagai dasar pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022.

Dalam hal ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Saat penjabaran Rencana Kerja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhai semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2022 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas PMD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11, menyatakan bahwa ruang lingkup Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitive antara lain :

- Persiapan penyusunan Renja SKPD
- Penyusunan rancangan Renja SKPD

1.1.1 Renja Perangkat Daerah Dinas PMD

Tabel 1.1

Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui pembangunan perdesaan	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa Kabupaten Banjar maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

- ***Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui pembangunan perdesaan***

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas PMD tahun 2022;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Renstra 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

BAB III. Tujuan dan Sasaran Dinas PMD

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD

BAB V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PMD

Pengukuran kinerja Dinas PMD Tahun 2020 didasarkan pada sasaran - sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Banjar
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa	Skor evaluasi perkembangan desa	431	417 (96,75%)

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.315.826.352 (90,44%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 3.353.986.389 (85,96% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp. 2.961.839.963 (96,12% dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar Rp. 1.684.197.237 (98,60% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp. 1.708.047.591) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung progam pendukung sebesar Rp. 1.277.642.726 (93,04% total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 1.373.199.593), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.353.986.389 (85,96% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.902.000.462).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta adanya refocusing anggaran karena adanya pandemi covid 19.

Adapun penggunaan anggaran tahun 2020 diuraikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.540.305.830,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.392.790.707,- (90,42%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.970.000,- (99%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya jasa surat menyurat.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik sebesar Rp. 140.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.625.506,- (74,02%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.998.700,- (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya jasa kebersihan kantor.

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.025.000,- (95,13%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya alat tulis kantor.

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 23.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 23.338.300,- (98,89%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya barang cetak dan penggandaan.

f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 11.040.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.005.000,- (99,68%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 53.524.925,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.694.697,- (83,50%) dan realisasi fisik sudah terlaksana 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah 6 buah dengan realisasi kinerja 6 buah dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.190.000,- (67,46%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 18.110.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.024.600,- (99.53%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu.

j. Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pagu anggaran Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar Rp. 155.151.637,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 155.148.257,- (99,99%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah.

k. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran sebesar Rp. 625.016.864,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 612.020.975,- (97,92%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran sebanyak 24 orang dan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terbayarkannya honorarium tenaga pendukung administrasi atau teknis perkantoran sebanyak 24 orang.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 174.414.272,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.682.926,- (85,82%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 16.640.272,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.578.485,- (81.60%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor adalah 1 paket kegiatan dengan realisasi kinerja 1 paket kegiatan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan atap kantor.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 131.374.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.721.341,- (83,52%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang berjumlah sebanyak 25 buah.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pagu anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sebesar Rp. 26.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.383.100,- (99,94%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor adalah 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 19.679.720,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.679.720,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pagu anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 19.679.720,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.679.720,- (100%) dan realisasi fisik sudah terlaksana 100%.

Target kinerja pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah 2 Orang dengan realisasi kinerja 2 orang dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 99.662.175,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.239.045,- (96,57%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 22.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.099.900,- (93,78%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah 3 dokumen dengan realisasi kinerja 3 dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu dokumen LPPD, LKPJ ddan LKjIP.

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.950.000,- (99,00%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran adalah 4 laporan dengan realisasi kinerja 4 laporan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pagu anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.985.000,- (99,70%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah 1 laporan dengan realisasi kinerja 1 laporan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

d. Kegiatan Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan

Pagu anggaran Kegiatan Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan sebesar Rp. 7.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.791.000,- (90,55%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan adalah 12 dokumen dengan realisasi kinerja 12 dokumen dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya penyusunan dokumen perencaan sesuai ketentuan yaitu berupa dokumen DPA, DPPA, PK Murni, PK Perubahaan, Renstra, Renja, RKT, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Triwulan I, II, II dan IV .

e. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD

Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD sebesar Rp. 59.662.175,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.413.145,- (97,91%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD adalah 2 dokumen dengan realisasi kinerja 2 dokumen dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan RKA Perubahan SKPD.

5. Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebesar Rp. 1.075.068.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.056.798.793,- (98,30%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa sebesar Rp. 94.188.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.075.350,- (99,88%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa adalah 355 orang dengan realisasi kinerja 355 orang capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Tahun 2020.

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa dilaksanakan sebanyak XII angkatan bertempat di Guest House Sultan Sulaiman Kecamatan Martapura, terdiri dari:

- Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 yang diikuti oleh 105 orang BPD dari Kecamatan Martapura.
- Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2020 yang diikuti oleh 120 orang BPD dari Kecamatan Martapura Timur 100 orang BPD dan Kecamatan Telaga Bauntung 20 orang BPD.
- Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020 yang diikuti oleh 130 orang BPD dari Kecamatan Karang Intan.
- Untuk angkatan IV sampai dengan XII dengan total peserta 1061 orang tidak bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilanjutkan dengan adanya rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 tersebut.

Adapun pelaksanaan pelatihan ini bertujuan agar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih memiliki kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPD, format dan tata cara pengisian administrasi BPD, konsep dan sistem Perencanaan pembangunan desa, pengawasan dana desa, kaidah-kaidah peraturan di desa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat perundang-undang yang berlaku.

Maksud kegiatan pelatihan ini yakni untuk meningkatkan kapasitas BPD yang baru terpilih dan telah dilantik, sebagai pembekalan awal masa tugas BPD yang merupakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa sebesar Rp. 58.591.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.570.400,- (99,96%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pembinaan Administrasi Desa adalah 20 Desa dengan realisasi kinerja 20 Desa capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan Pembinaan Administrasi Desa Tahun 2020, dilaksanakan untuk tertib Administrasi dengan tujuan agar Aparat Pemerintah Desa memahami Peraturan Menteri Dalam Nengeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Yaitu tentang buku-buku administrasi desa terdiri dari 25 buku yang diisi oleh pemerintah desa.

c. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa

Pagu anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 61.420.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.821.000,- (99,02%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa adalah 20 kegiatan dengan realisasi kinerja 20 kegiatan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan dalam rangka sinkronisasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten untuk membahas permasalahan yang ada di desa.

d. Kegiatan Pelaporan LPPDesa

Pagu anggaran Kegiatan Pelaporan LPPDesa sebesar Rp. 39.370.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.564.950,- (90,34%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pelaporan LPPDesa adalah 277 Desa dengan realisasi kinerja 277 Desa capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan Pembinaan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa Tahun 2020 sesuai Permendagri Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa (pasal 3), yang ditujukan sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan desa akhir tahun anggaran 2020. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi :

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran
2. Laporan penyelenggaraaan pemerintahan desa akhir masa jabatan
3. Laporan keterangan penyelenggaraaan pemerintahan desa akhir tahun anggaran
4. Informasi penyelenggaraan penyelenggaraaan pemerintahan desa

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraaan pemerintahan desa (LPPDes) dijadikan syarat bagi pencairan Dana Desa triwulan II oleh DPMD Kabupaten Banjar.

e. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 514.327.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 513.026.793,- (99,75%)

Adapun realisasi kegiatan Fasilitasi Kepala Desa dilaksanakan dalam rangka Pemilihan Pambakal Tahun 2020 di 140 Desa hanya sampai pada kegiatan pelaksanaan test seleksi calon pambakal yang kandidatnya melebihi dari 5 orang terdiri dari 8 kecamatan 24 Desa dengan total 163 orang peserta, bertempat di Aula Barakat Kab. Banjar. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa itu sendiri tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilanjutkan dengan adanya rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran untuk

penanganan covid-19 tersebut serta adanya surat edaran dari kemendagri tentang penundaan pilkades.

f. Kegiatan Monev Pengelolaan Keuangan Desa

Pagu anggaran Kegiatan Monev Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 89.246.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.984.300,- (99,71%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Monev Pengelolaan Keuangan Desa adalah 100 Desa dengan realisasi kinerja 100 Desa capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksannaya Kegiatan Monev Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dengan monev Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban di 100 Desa se Kabupaten Banjar.

g. Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa sebesar Rp. 3.677.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.677.600,- (100%) dengan realisasi berupa mengikuti acara workshop advokasi hokum bidang PPMD dalam rangka penanggulangan permasalahan Dana Desa di Kota Malang Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2020.

h. Kegiatan Rapat Koordinasi P3MD

Pagu anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi P3MD sebesar Rp. 39.964.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.670.000,- (91,76%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Rapat Koordinasi P3MD adalah 4 kegiatan dengan realisasi kinerja 4 kegiatan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan meliputi Rapat Koordinasi pendamping TA, pendamping PD/PLD yang dilaksanakan di Aula Dinas PMD Kab. Banjar dan Aula Pertemuan Obyek Wisata Kiram Kecamatan Karan Intan yang dihadiri oleh Tenaga Ahli, PDTI, PDP, PLD, Pejabat dilingkungan Pemda Kab. Banjar. Rapat ini dilaksanakan sebanyak 4 (Empat) kali dalam 1 (satu) tahun, diantaranya mengenai Penyamaan Persepsi tentang Percepatan Penyaluran DD Tahap I Tahun 2020, Penyamaan Persepsi tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) , Percepatan Penyampaian Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020, Percepatan Input Laporan Realisasi melalui Aplikasi Omspan pada kegiatan I. Untuk kegiatan ke II dan III bertujuan Menindaklanjuti PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Banjarmasin Nomor: S-1142/ WPB.19/KP.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal Petunjuk Teknis Rekonsiliasi Sisa Dana Desa, Menyepakati batas waktu akhir penyampaian hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun 2015 s/d 2019. Sedangkan kegiatan yang ke IV bertujuan untuk Tindak lanjut Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s/d 2019, Informasi Penyaluran DD Tahap III (20%), Rencana Pelatihan Siskeudes V.2.0.3 dan Rencana Penyaluran DD Tahap I Tahun 2021.

i. Kegiatan Pelatihan Siskeudes

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Siskeudes sebesar Rp. 34.893.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.690.000,- (99,42%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pelatihan Siskeudes adalah 277 Desa dengan realisasi kinerja 277 Desa capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksanannya Kegiatan Pelatihan Siskeudes sehingga Desa mampu mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan.

Narasumber Pelatihan Siskeudes adalah :

1. Pejabat Eselon II (Kepala DPMD) Kab. Banjar
2. Pejabat Eselon III DPMD Kab. Banjar
3. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Tenaga Ahli P3MD Kab. Banjar

j. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pagu anggaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.568.400,- (71,89%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa adalah 20 Desa dengan realisasi kinerja 20 Desa capaian 100%.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa se-Kabupaten Banjar Tahun 2020 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Tahap Pertama dilaksanakan sebelum Pandemi Covid-19 yaitu Kecamatan Gambut dan Martapura Timur, setelah adanya larangan berkumpul orang bayak, maka kegiatan sosialisasi ditunda. Sedangkan Tahap II dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas PMD Kab. Banjar dengan beberapa angkatan pada saat New Normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Sosialisasi Tahap I dilaksanakan tanggal 17 dan 20 Maret 2020 di Kec, Gambut dan Martapura Timur. Sedangkatan Tahap II pada tanggal 13 s/d 28 Juli 2020 sebagaimana jadwal :

TAHAP I

NO.	KECAMATAN	HARI / TANGGAL	JAM	TEMPAT
1	Gambut	Selasa, 17 Maret 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Kecamatan Gambut
2	Martapura Timur	Jum'at, 20 Maret 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Kecamatan Martapura Timur

TAHAP II

NO.	KECAMATAN	HARI / TANGGAL	JAM	TEMPAT
1	Mataraman & Sungai Pinang	Senin, 13 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar

NO.	KECAMATAN	HARI / TANGGAL	JAM	TEMPAT
2	Karang Intan	Selasa, 14 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
3	Astambul & Paramasan	Rabu, 15 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
4	Martapura Barat & Pengaron	Kamis, 16 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
5	Martapura & Sambung Makmur	Senin, 20 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
6	Simpang Empat & Cintapuri Darussalam	Selasa, 21 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
7	Sungai Tabuk	Rabu, 22 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
8	Beruntung Baru & Tatah Makmur	Kamis, 23 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
9	Aluh-Aluh & Telaga Bauntung	Senin, 27 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar
10	Aranio & Kertak Hanyar	Selasa, 28 Juli 2020	09.00 WITA s/d selesai	Aula Dinas PMD Kab. Banjar

I. Peserta

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa se-Kabupaten Banjar Tahun 2020 ini diikuti oleh 277 orang peserta dari unsur Sekretaris Desa (Sekdes) se Kabupaten Banjar.

II. Narasumber

1. Pejabat Eselon III DPMD Kabupaten Banjar Ibu Noon Zairina Warsita, S.Sos, MM Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dengan materi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 35 Tahun 2019.
2. Pejabat Eselon IV DPMD Kabupaten Banjar Bapak Noor Azmi, S.Ag Kasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan materi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 berdasarkan Permendes 11 Tahun 2019
3. Tenaga Ahli Kabupaten Banjar Bapak Syamsuddin, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

III. Hasil Yang Didapatkan Dari Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Output dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa se-Kabupaten Banjar Tahun 2020ini peserta diharapkan mampu :

a. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan APBDes.

b. Mengkoordinasikan Penyusunan Penyusunan rancangan APBDes dan rancangan Perubahan APBDes.
c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.
d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala desa tentang Penjabaran APBDes, Perubahan Penjabaran APBDes.
e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
g. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Desa lainnya yang ditugasi mengelola asset desa, mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Pengapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.

k. Kegiatan Pelantikan BPD

Pagu anggaran Kegiatan Pelantikan BPD sebesar Rp. 109.390.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.150.000,- (99,78%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pelantikan BPD adalah 1.399 Orang dengan realisasi kinerja 1.399 Orang capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya Pelantikan BPD sebanyak 1.399 Orang di Kabupaten Banjar pada tanggal 18 Februari 2020.

6. Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Kewilayahan Desa sebesar Rp. 238.882.147,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 236.714.397,- (99,09%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 29.429.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.417.900,- (99,96%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat adalah 40 UEM dengan realisasi kinerja 40 UEM capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat dilakukan selama 1 hari yaitu tanggal 23 Maret 2020, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Peserta pelatihan terdiri dari 40 orang (10 dari kelompok masyarakat, 30 dari BUMDes)

Narasumber pada pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat diantaranya Tenaga Ahli Madya Provisi Kalimantan Selatan dan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab. Banjar.

Adapun maksud dan tujuan pelatihan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat adalah :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa

3. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
4. Meningkatkan kapasitas pengelola usaha ekonomi menengah dalam mengelola usaha
5. Penguatan kapasitas SDM bagi pelaku usaha ekonomi menengah dalam mengelola usaha dan pengembangan
6. Memfasilitasi kelompok usaha menengah dalam rangka perizinan produk olahan makanan (IPRT) dari Dinas Kesehataan Kab. Banjar
7. Memfasilitasi kemasan dan pemasaran dari produk-produk yang diolah Kelompok Usaha Menengah oleh Dinas Perindag Kab. Banjar

Hasil kegiatan dari pelatihan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat adalah :

1. Pelaku atau pengelola usaha ekonomi masyarakat memahami dalam perencanaan usaha
2. Pelaku atau pengelola usaha ekonomi masyarakat memahami dalam manajemen SDM dalam menjalankan usahanya
3. Pelaku atau pengelola usaha ekonomi masyarakat memahami dalam manajemen produksi dalam menjalankan usahanya
4. Pelaku atau pengelola usaha ekonomi masyarakat memahami dalam mengetahui bagaimana cara mengurus hasil-hasil produk dari usahanya bisa mempunyai izin IPRT
5. Pelaku atau pengelola usaha ekonomi masyarakat memahami dalam bagaimana cara membuat kemasan dari hasil produk usahanya agar menarik, tahan lama sehingga bisa bersaing dari produk-produk yang beredar di pasar modern
6. Pelaku atau pengelola usaha ekonomi masyarakat memahami dalam membuat studi kelayakan usaha sebelum menjalankan usaha

b. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa

Pagu anggaran Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa sebesar Rp. 42.593.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.560.000,- (99,92%) dengan kegiatan berupa monitoring dan evaluasi serta sosialisasi ke desa guna mengetahui perkembangan BUMDesa.

c. Kegiatan Monev UPK-SPP

Pagu anggaran Kegiatan Monev UPK-SPP sebesar Rp. 24.491.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.486.000,- (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Monev UPK-SPP adalah 6 Kecamatan dengan realisasi kinerja 6 Kecamatan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan Monev UPK-SPP berupa pembinaan untuk mengupdate data dari kelompok UPK – SPP.

d. Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebesar Rp. 8.633.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.633.000,- (100%) yang digunakan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat desa (anak muda) yang kreatif agar dapat mengembangkan inovasi yang ada di desanya menjadi teknologi tepat guna seperti pada Desa Cabi Kecamatan Simpang Empat yang mengolah limbah karet ban mobil menjadi timbangan dan mendapatkan penghargaan dari Kemendesa.

e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan sebesar Rp. 68.930.247,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.894.247,- (99,95%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan adalah 6 Kecamatan dengan realisasi kinerja 6 Kecamatan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa monitoring dan evaluasi untuk membina langsung ke desa-desa kawasan ekonomi perdesaan maupun kawasan KPPN dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisifatif.

f. Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa sebesar Rp. 14.280.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.279.350,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa adalah 5 buah dengan realisasi kinerja 5 buah capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa berupa pembinaan ke desa-desa, dengan harapan desa bisa membentuk perdes tentang produk unggulan desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan desanya seperti pada Desa Sungai Langsat Kecamatan Simpang Empat dengan produk jahe merahnya.

g. Kegiatan Pengembangan Inovasi Desa

Pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Inovasi Desa sebesar Rp. 50.525.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.443.900,- (95,88%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pengembangan Inovasi Desa adalah 3 inovasi dengan realisasi kinerja 3 inovasi capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa melakukan pembinaan pengembangan gula merah sarang semut di Desa Mangkalawat Kecamatan Mataraman, kotoran itik tanpa bau di Desa Tatah Jaruju Kecamatan Tatah Makmur serta pembuatan sirup dari buah nipah di Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh. Kemudian hasil inovasi tadi dipajang pada galeri inovasi desa yang terletak di Pertokoan Pasar Sekumpul Martapura. Dimana digaleri tersebut juga terpampang barang-barang hasil produk inovasi terdahulu yang ada di Desa. Diharapkan dengan adanya galeri ini masyarakat luas dapat mengetahui hasil dan potensi produk olahan yang ada di Desa.

7. Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 394.096.84,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 390.684.047,- (99,13%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi Profil Desa

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Profil Desa sebesar Rp. 40.439.844,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.431.500,- (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 136%.

Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi Profil Desa adalah 111 Desa dengan realisasi kinerja 152 Desa capaian 136%

Adapun realisasi kegiatan berupa pelatihan/bimtek profil Desa yang sifatnya jemput bola, bertempat di aula Kecamatan dan Desa terdiri dari kecamatan gambut, telaga bauntung, beruntung baru, martapura, mataraman bertempat di Hotel Aston dengan di danai Dana Desa.

Dinas PMD membuka layanan bimbingan pendataan dan penginputan profil online dengan jadwal setiap hari kerja.

b. Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa sebesar Rp. 15.565.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.563.300,- (99,99%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa adalah 60 Desa dengan realisasi kinerja 60 Desa capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa sosialisasi/pelatihan pengisian kuesiner lampiran II Juknis Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa yang sifatnya jemput bola, bertempat di aula Kecamatan terdiri dari kecamatan aluh-aluh, telaga bauntung, beruntung baru, martapura, mataraman, kertak hanyar.

c. Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa sebesar Rp. 37.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.643.500,- (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi Lomba Desa adalah 20 Kecamatan dengan realisasi kinerja 20 Kecamatan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa :

1. Waktu dan Tempat Kegiatan Penilaian

   Peserta perlombaan desa tingkat kabupaten banjar berdasarkan usulan dan hasil pemenang perlombaan desa tingkat kecamatan.

   Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banjar dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Februari 2020 sampai minggu pertama bulan Maret 2020, kegiatan penilaian dilakukan langsung ke lokasi 20 Desa yang dinominasikan oleh 20 Kecamatan se Kab. Banjar.

   Adapun jadwal penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama desa	kecamatan	Tanggal penilaian
1.	Malintang dan Sungai Lakum	Gambut dan Kertak Hanyar	20 – 02 – 2020
2.	Kaliukan dan Simpang Tiga	Astambul dan Mataraman	20 – 02 – 2020
3.	Indrasari	Martapura	21 – 02 – 2020
4.	Tambak Anyar Ulu Sungai Rangas	Martapura Timur Martapura Barat	21 – 02 – 2020
5.	Tengah dan Abumbun Jaya	dan Sungai Tabuk	24 – 02 – 2020
6.	Pemangkih Baru	Tatah Makmur	24 – 02 – 2020
7.	Salat Makmur dan Bunipah	Beruntung Baru dan Aluh-aluh	25 – 02 – 2020
8.	Kupang Rejo	Sungai Pinang	25 – 02 – 2020
9.	Sungai Lurus	Sambung Makmur	26 – 02 – 2020

No.	Nama desa	kecamatan	Tanggal penilaian
10.	Telaga Baru	Telaga Bauntung	26 – 02 – 2020
11.	Tiwingan Lama dan Sungai Asam	Aranio dan Karang Intan	27 – 02 – 2020
12.	Sindang Jaya	Cintapuri Darussalam	27 – 02 – 2020
13.	Paramasan Bawah	Paramasan	05 – 03 – 2020
14	Sungai Langsat	Simpang Empat	05 – 03 – 2020

2. Hasil Penilaian dan Penentuan Juara

Pelaksanaan penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal penilaian, semua anggota tim telah melaksanakan sesuai dengan instrumen penilaian, kemudian hasil dari penilaian telah dibuatkan rekapitulasinya dan untuk penentuan pemenang telah dilaksanakan rapat anggota tim penilai bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 08 April 2020. Adapun hasil dari penentuan kejuaraan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Banjar
Tahun 2020

No.	Nama Desa/ Kel	Kecamatan	Jumlah Nilai	Juara	Hadiah
1.	Sungai Rangas Tengah	Martapura Barat	275	Juara I	10 juta
2.	Salat Makmur	Beruntung Baru	269	Juara II	2,5 juta
3.	Telaga Baru	Telaga Bauntung	259	Juara III	2 juta
4.	Sungai Langsat	Simpang Empat	253	Juara IV	750 ribu

Disahkan berdasarkan SK Bupati Banjar Nomor 188.45/ 288/KUM/2020 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2020 pada tanggal 28 Mei 2020. Dikarenakan adanya surat dari Mendagri pada tanggal 7 april 2020 nomor 414.4/2777/SJ dan surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Prov Kalsel tanggal 9 april 2020 nomor 414/1048-set/DPMD hal pembatalan penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahn tahun 2020 sehingga pemenang perlombaan desa tingkat kabupaten banjar tahun 2020 tidak mengikuti perlombaan desa tingkat provinsi kalsel 2020 dikarenakan pelaksanaannya dibatalkan.

d. Kegiatan Fasilitasi TMMD

Pagu anggaran kegiatan Fasilitasi TMMD sebesar Rp. 28.120.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.055.000,- (99,77%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi TMMD adalah 1 Desa dengan realisasi kinerja 1 Desa capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya kegiatan TMMD ke-108 KODIM 1006/MTP TA. 2020 di Desa Bi'ih Kecamatan Karang Intan pada tanggal 30 Juni s.d 29 Juli 2020. Dengan tujuan membantu Pemda Kab. Banjar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan (fisik/non fisik) dan memantapkan kemanunggalan TNI Rakyat dalam rangka menyiapkan RAK JUANG yang tangguh. Dinas PMD melaksanakan program pada sasaran non fisik diantaranya penyuluhan bela

negara dan wasbang, pelayanan kesehatan, pertanian, kamtibmas, narkoba, perikanan, lingkungan hidup, hokum, kehutanan dan perkebunan.

e. Kegiatan Fasilitasi Validasi IDM

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitasi Validasi IDM sebesar Rp. 15.765.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.758.550,- (99,96%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Fasilitasi Validasi IDM adalah 277 Desa dengan realisasi kinerja 277 Desa capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa koordinasi dengan P3MD Kab. Banjar TA, PD/PDTI, PLD untuk melakukan penginputan data IDM 2019 dikarenakan IDM merupakan potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa yang berdasarkan Permendesa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun serta SOP *Update* Data IDM 2020.

f. Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp. 11.885.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.990.000,- (92,47%) dengan kegiatan berupa mengikuti rembuk stunting di Kecamatan Kertak Hanyar, pembinaan posyandu ke desa serta melakukan sosialisasi aplikasi eHDW (*Human Development Worker*) sebagai alat bantu kerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) .

g. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat sebesar Rp. 20.560.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.430.100,- (99,37%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat adalah 15 Kecamatan dengan realisasi kinerja 15 Kecamatan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan hanya sosialisasi dan mendata tentang kelembagaan adat yang ada di desa untuk pembinaannya semisal rakor tidak dapat terlaksana karena karena adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilanjutkan dengan adanya rasionalisasi anggaran/ refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

h. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa

Pagu anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa sebesar Rp. 23.653.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.604.000,- (99,79%) dengan kegiatan berupa sosialisasi desa baru Pamsimas, pembinaan kelembagaan desa, Rakor kelembagaan diprovinsi, penilaian kampung tangguh banua, seleksi calon desa HKP, pembinaan KPSPAM, uji fungsi kelayakan menara air Pamnsimas, sinkronisasi pelaksanaan pengendalian penyebaran covid 19, sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 serta monitoring pembentukan relawan covid 19.

i. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp. 200.459.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 198.208.097,- (98,88%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah 290 PKK dengan realisasi kinerja 290 PKK capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Kab. Banjar tahun 2020 dengan 2 cara yaitu secara virtual dan tatap muka menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan rapat koordinasi PKK dilaksanakan pada bulan Juli, September, Oktober dan Desember di bebrapa tempat yaitu Seketariat PKK Kab. Banjar, Mahligai Sultan Adam, Kecamatan Simpang Empat, Martapura Barat, Gambut, Aluh-Aluh, Karang Intan, Sambung Makmur dan Cintapuri Darussalam. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah Pengurus TP PKK Kabupaten Banjar, TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa dan BPD Perempuan.

Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi PKK ini sebagai sarana komunikasi antar pengurus TP PKK Kabupaten dan antar jenjang PKK untuk melaksanakan 10 program pokok PKK serta dalam rangka sinkronisasi program kerja antar jenjang PKK.

Adapun hasil/output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu kegiatan TP PKK Kabupaten Banjar lebih terarah, terencana dan terkomunikasikan dengan baik kepada pengurus dan kepada jenjang PKK Provinsi, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PMD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana, kedisiplinan dan kualitas SDM aparat**	100	100	100	100	100	Adanya Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga dilakukan Pemuktahiran		
2	7	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik atau bangunan penerangan bangunan kantor	12	100	12	12	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	66.67	6	6	100			
2	7	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12	100	12	12	100			
2	7	1	1	19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi atau teknis perkantoran	12	100	12	12	100			
2	7	1	2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana, kedisiplinan dan kualitas SDM aparat**	100	100	100	100	100			
2	7	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	4	100	1	1	100			
2	7	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25	100	12	12	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan rutin/ber perlengkapan kantor	10	100	12	12	100			
2	7	1	3		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana, kedisiplinan dan kualitas SDM aparat**	100	100	0	0	0			
2	7	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	55	94.55	0	0	0			
2	7	1	5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana, kedisiplinan dan kualitas SDM aparat**	100	100	100	100	100			
2	7	1	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	8	87.5	2	2	100			
2	7	1	6		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan dan perencanaan SKPD, persentase penyerapan anggaran SKPD**	100	100	100	100	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	100	3	3	100			
2	7	1	6	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	20	100	4	4	100			
2	7	1	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	8	100	1	1	100			
2	7	1	6	8	Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencaan sesuai ketentuan	3	100	12	12	100			
2	7	1	6	9	Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD	2	100	2	2	100			
2	7	1	6	12	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan	4	100	0	0	100			
2	7	1	30		**Program Pembinaan bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa**	**Skor evaluasi perkembangan desa bidang pemerintahan. Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik**	147	100.73	142	163,68	115,27			
							100	100	80	80	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	30	1	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	277	100	355	355	100			
2	7	1	30	2	Pembinaan administrasi desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	277	100	20	20	100			
2	7	1	30	4	Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya raker pambakal se kab. Banjar	2	100	2	2	100			
2	7	1	30	5	Fasilitasi tata batas desa	Terlaksananya fasilitasi tata batas desa	55	100	0	0	0			
2	7	1	30	6	Pelaporan LPPDesa	Terlaksananya monev LPPDes	277	100	277	277	100			
2	7	1	30	7	Sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Desa / Kelurahan	277	100	0	0	0			
2	7	1	30	8	Rakor BPD	Terlaksananya rakor BPD	277	100	0	0	0			
2	7	1	30	9	Monev Pengelolaan Dana Desa	terlaksananya monev pengelolaan dana desa	0	0	0	0	0			
2	7	1	30	10	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Terlaksananya sosialisasi pilkades	140	100	0	0	0			
2	7	1	30	11	Monev pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Monev Pengelolaan Keuangan Desa	55	100	100	100	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	30	12	Pelatihan bendahara desa	Terlaksananya Pelatihan Bendahara Desa	277	100	0	0	0			
2	7	1	30	13	Rapat Koordinasi P3MD	Terlaksananya rakor P3MD	150	100	600	600	100			
2	7	1	30	14	Pelatihan siskeudes	Terlaksananya sosialisasi penatausahaan siskeudes bagi kaur keuangan	277	100	277	277	100			
2	7	1	30	15	Pelatihan Padat Karya Tunai	Terlaksananya kegiatan padat karya tunai	277	100	0	0	0			
2	7	1	30	16	Pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya kegiatan penyaluran dan pengelolaan keuangan desa	0	100	0	0	0			
2	7	1	30	17	Pendataan Aset Desa	Terlaksananya pendataan aset desa	0	100	0	0	0			
2	7	1	30	18	Monev Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya monev pengelolaan aset desa	55	110.87	0	0	0			
2	7	1	30	19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset desa bagi Kaur Keuangan	277	0	20	20	100			
2	7	1	30	20	Pelantikan BPD	Tercapainya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa	1399	0	1399	1399	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	31		**Program Pembinaan bidang kewilayahan desa**	**Skor evaluasi perkembangan desa bidang kewilayahan**	114	100.96	109	75,67	69,42			
2	7	1	31	1	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Terlaksananya pelatihan UEM	40	100	40	40	100			
2	7	1	31	2	Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Bumdesa	Terlaksananya fasilitasi pembentukan bumdesa		100	0	0	0			
2	7	1	31	3	Pelatihan ketrampilan manajemen Bumdesa	Terlaksananya ketrampilan manajemen Bumdesa	3	100	0	0	0			
2	7	1	31	4	Monev UPK-SPP	Terlaksananya Monev UPK-SPP	12	100	56	56	100			
2	7	1	31	5	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya kegiatan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	1	100	0	0	0			
2	7	1	31	6	Pengembangan Posyantek	Terlaksananya kegiatan posyantek		100	0	0	0			
2	7	1	31	7	Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	5	100	6	6	100			
2	7	1	31	8	Pengembangan produk unggulan desa	Terlaksananya pengembangan prudes dan prukades	10	100	5	5	100			
2	7	1	31	9	Pengembangan inovasi desa	Terlaksananya pengembangan inovasi desa	5	100	3	3	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas PMD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas PMD s/d Tahun Berjalan 2021	
									Target Renja Dinas PMD Tahun 2020	Realisasi Renja Dinas PMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw.II Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	7	1	32		**Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa**	**Skor evaluasi perkembangan desa bidang kemasyarakatan**	185	101.14	180	178,057	98,92			
2	7	1	32	1	Fasilitasi profil desa	Terlaksananya pelatihan profil Desa	150	100	111	111	100			
2	7	1	32	2	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa	Terlaksananya sosialisasi evaluasi Perkembangan Desa	277	100	60	60	100			
2	7	1	32	3	Fasilitasi lomba desa	Terlaksananya Lomba Desa	3	100	3	3	100			
2	7	1	32	4	Fasilitasi TMMD	Terlaksananya Fasilitasi TMMD	1	0	1	1	100			
2	7	1	32	5	Fasilitasi BBGRM	Terlaksananya Fasilitasi BBGRM	3	100	0	0	0			
2	7	1	32	6	Fasilitasi validasi IDM	Terlaksananya sosialisasi IDM	290	100	277	277	100			
2	7	1	32	7	Pembinaan kader posyandu	Terlaksananya pelatihan SIP	521	100	498	498	100			
2	7	1	32	8	Pembinaan Kelembagaan Pamsimas	terlaksananya pelatihan KPSPAM	41	100	0	0	0			
2	7	1	32	10	Pembinaan kelembagaan adat	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Adat	20	100	15	15	100			
2	7	1	32	9	Rapat Koordinasi kelembagaan desa	Terlaksananya Rakor Kelembagaan Desa	93	100	0	0	0			
2	7	1	32	11	Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	290	100	290	290	100			

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PMD
s/d Triwulan II Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2			3	4			4		5
										K		Rp.	K	Rp.	
2	13					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	13	0.	0	0.	0.							**129,999,871,497**		**54,670,409,929**	**30.60**
2	13	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**6,852,507,187**			
2	13	01	2	01				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan dan Perencanaan SKPD**	**100**	**%**	**172,039,300**			
2	13	01	2	01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program yang disusun (Renstra, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi)	12	Bulan	28,849,600	6.00	6,327,500	50.00
2	13	01	2	01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD (RKA & RKA-P, DPA & DPA-P)	3	Dok	23,208,000	1.00	3,021,000	33.33
2	13	01	2	01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1	Dok	21,602,100	0.00	0	0.00
2	13	01	2	01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD	1	Dok	11,400,500	1.00	1,026,400	100.00
2	13	01	2	01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	16,237,200	0.00	4,190,200	0.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2	3	4			4		5
								K		Rp.	K	Rp.	
2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Dokumen Hasil Monev, RFK perbulan ke Bappeda Litbang, Laporan Renja per-triwulan dan RFK erbulan ke Administrasi Pembangunan	4	Dok	34,223,400	3.00	1,575,000	75.00
2	13	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monev, RFK perbulan ke Bappeda Litbang, Laporan Renja per-triwulan dan RFK perbulan ke Administrasi Pembangunan	4	Dok	36,518,500	2.00	6,391,000	50.00
2	13	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana, Kedisiplinan dan Kualitas SDM Aparatur, Persentase kenaikan komponen pelaporan keuangan dan persentase penyerapan anggaran SKPD**	**100**	**%**	**4,925,929,187**			
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	4,123,190,687	6.00	1,816,680,804	50.00
2	13	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	12	Bulan	781,610,000	6.00	380,402,394	50.00
2	13	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jilid Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	8	Dok	7,503,900	0.00	0	0.00
2	13	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Jumlah Jilid Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	20	Dok	13,624,600	7.00	7,523,400	35.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2					3	4			4		5
												K		Rp.	K	Rp.	
										mesteran SKPD							
2	13	01	2	05					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**50,000,000**			
2	13	01	2	05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	8	Orang	50,000,000	6.00	27,000,000	75.00
2	13	01	2	06					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**718,303,300**			
2	13	01	2	06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	10,472,500	6.00	1,990,000	50.00
2	13	01	2	06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	9,103,100	6.00	4,834,600	50.00
2	13	01	2	06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	23,617,700	6.00	5,599,800	50.00
2	13	01	2	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12	Bulan	675,110,000	6.00	70,574,314	50.00
2	13	01	2	07					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor**	**12**	**Bulan**	**382,413,100**			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2					3	4			4		5
												K		Rp.	K	Rp.	
2	13	01	2	07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	12	Bulan	382,413,100	6.00	361,403,000	50.00
2	13	01	2	08					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**282,219,300**			
2	13	01	2	08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	4,140,000	6.00	0	50.00
2	13	01	2	08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	12	Bulan	229,507,700	6.00	66,420,172	50.00
2	13	01	2	08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	19,821,600	6.00	9,642,100	50.00
2	13	01	2	08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat dinas	12	Bulan	28,750,000	6.00	10,000,000	50.00
2	13	01	2	09					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**321,603,000**			
2	13	01	2	09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	25	Unit	276,789,000	9.00	120,917,170	36.00

Kode											Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1											2	3	4			4		5
													K		Rp.	K	Rp.	
										Kendaraan Dinas Jabatan								
2	13	01	2	09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	10	Unit	19,800,000	15.00	16,640,900	150.00
2	13	01	2	09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	4	Unit	25,014,000	0.00	0	0.00
2	13	02						**PROGRAM PENATAAN DESA**				**Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik**	**100**	**%**	**14,836,300**			
2	13	02	2	01					**Penyelenggaraan Penataan Desa**			**Terlaksananya Fasilitasi Tata Wilayah dan Terpenuhinya Prasarana/Sarana Pelayanan Pemerintah Desa**	**100**	**%**	**14,836,300**			
2	13	02	2	01	02					Fasilitasi Tata Wilayah Desa		Jumlah Desa Yang Selesai Tata Batas Desa	55	Desa	14,836,300	0.00	0	0.00
2	13	03						**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**				**Skor evaluasi perkembangan desa bidang kewilayahan**	**114**	**Skor**	**95,070,000**			
2	13	03	2	01					**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**			**Meningkatnya pengetahuan dan Potensi Desa**	**100**	**%**	**95,070,000**			
2	13	03	2	01	01					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	277	Desa	46,730,200	50.00	18,692,080	18.05

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2			3	4			4		5
										K		Rp.	K	Rp.	
2	13	03	2	01	02			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga	277	Desa	48,339,800	0.00	2,035,000	0.00
2	13	04				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**Skor evaluasi perkembangan desa Bidang Pemerintahan**	**147**	**Skor**	**122,535,721,810**			
2	13	04	2	01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			**Tertibnya Administrasi Desa**	**277**	**Desa**	**122,535,721,810**			
2	13	04	2	01	01				Jumlah BPD Yang Memahami Tugas Dan Fungsi	277	Desa	35,948,000	0.00	0	0.00
								Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa lengkap Administrasi Desa	197	Desa		0.00	0	0.00
									Jumlah Desa Tertib LPPDes	277	Desa		0.00	0	0.00
									Jumlah P3MD Yang Mengikuti Rakor	150	Orang		0.00	0	0.00
									Peningkatan Pengetahuan Peserta Sosialisasi	277	Desa		0.00	0	0.00
2	13	04	2	01	04			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang di Monev Pengelolaan Keuangan Desa	55	Desa	121,173,780,010	20.00	51,138,054,275	36.36
									Jumlah Dokumen Tindak Lanjut	2	Dok		0.00	0	0.00
									Peningkatan Pengetahuan Peserta sosialisasi	277	Desa		0.00	0	0.00
2	13	04	2	01	05			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa Yang Memahami Siskeudes	277	Desa	48,724,600	0.00	0	0.00
									Jumlah Aparat Desa yang terlatih Padat Karya Tunai	277	Desa		0.00	0	0.00
									Jumlah Aparatur Desa Yang Terlatih	2270	Orang		0.00	0	0.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2					3	4			4		5
												K		Rp.	K	Rp.	
											Jumlah Bendahara Desa Yang Terlatih	277	Desa		0.00	0	0.00
2	13	04	2	01	08					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kelompok SPP yang aktif	566	Kel	52,842,200	0.00	0	0.00
											Jumlah Pengelola Bumdesa yang terampil	3	Pengelola		0.00	0	0.00
											Jumlah UEM yang terlatih	40	UEM		40.00	9,340,500	100.00
2	13	04	2	01	09					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pilkades	140	Desa	931,242,800	140.00	380,332,300	100.00
2	13	04	2	01	11					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang memilki profil Desa	50	Desa	34,293,400	15.00	1,024,600	30.00
											Jumlah Desa yang tervalidasi data IDM	150	Desa		50.00	4,870,400	33.33
2	13	04	2	01	13					Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya pengelolaan aset desa	55	Desa	32,240,100	20.00	0	36.36
2	13	04	2	01	14					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	1399	Orang	159,947,900	624.00	90,309,500	44.60
2	13	04	2	01	18					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang berprestasi Lomba Desa tingkat Kabupaten	3	Desa	66,702,800	3.00	2,038,600	100.00
											Jumlah Desa yang tervalidasi data evaluasi perkembangan Desa	75	Desa		37.00	2,510,800	49.33
2	13	05				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**Skor evaluasi perkembangan desa Bidang Kemasyarakatan**	**185**	**Skor**	**501,736,200**			

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2					3	4			4		5
												K		Rp.	K	Rp.	
2	13	05	2	01					**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan**	**277**	**Desa**	**501,736,200**				
2	13	05	2	01	02					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Posyandu Aktif	521	Buah	327,472,200	23.00	4,995,000	4.41
											Jumlah Kelembagaan Adat yang dibina	20	Kec		0.00	0	0.00
											Jumlah kelembagaan Desa yang terkoordinasi	93	Buah		0.00	0	0.00
											Jumlah Pamsimas Aktif	41	Buah		2.00	600,000	4.88
											Jumlah PKK Aktif	290	Buah		9.00	13,357,800	3.10
2	13	05	2	01	05					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	Jumlah kerjasama antar Desa dalam pengembangan kawasan ekonomi perdesaan / Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang telah tertuang dalam RPJMNas	5	Kerjasama	148,688,800	3.00	79,475,520	60.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)
1						2					3	4			4		5
												K		Rp.	K	Rp.	
										Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Prudes dan Prukades	10	Prudes		0.00	0	0.00
2	13	05	2	01	06					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi Desa	5	Inovasi	25,575,200	0.00	613,800	0.00
											Jumlah Pameran TTG yang diikuti	1	Pameran		0.00	0	0.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMD Tahun 2020 - 2021 Kabupaten Banjar

Dari sasaran yang telah ditetapkan semuanya mencapai target kinerja sesuai dengan harapan dan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan secara keseluruhan. Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Banjar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	Skor evaluasi perkembangan desa			416	431	446	420	431	446	-	
2	Skor Evaluasi perkembangan desa bidang pemerintahan			137	142	147	138	142	147	-	
3	Skor evaluasi perkembangan desa bidang kewilayahan			104	109	185	105	109	185	-	
4	Skor evaluasi perkembangan desa bidang kemasyarakat			175	180	114	177	180	114	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kabupaten Banjar menetapkan indikator kinerja periode 2021-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis dikarenakan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan
   a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan pelatihan manajemen pemerintahan desa dengan kelompok sasaran aparatur pemerintah desa.
   b. Pembinaan admininistrasi desa dengan kelompok sasaran aparatur desa.
   c. Koordinasi antar pembakal dan camat kelompok sasaran adalah pembakal dan camat.
   d. Pelayanan permasalahan tentang pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Pembinaan kerjasama desa dan kawasan perdesaan
   a. Pelayanan pendirian bumdes dengan memberikan sosialisasi dengan kelompok sasaran desa.
   b. Pelatihan UEM dengan kelompok sasaran usaha ekonomi yang ada di desa.
   c. Pembinaan di desa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di desa dengan kelompok sasaran usaha ekonomi yang ada di desa.
   d. Pembinaan kerjasama desa dan kawasan perdesaaan dengan kelompok sasaran desa – desa yang bergabung dalam kawasan perdesaan.
   e. Pembinaan TTG yang ada di desa dengan kelompok sasaran usaha ekonomi yang ada di desa.
3. Pembinaan evaluasi perkembangan desa, kelembagaan dan pembangunan
   a. Pedoman penyusunan profil desa , kelompok sasaran desa yang belum mempunyai / meng update profil desa.
   b. Pedoman evaluasi perkembangan desa, kelompok sasaran seluruh desa di Kab. Banjar.
   c. Pembinaan kelembagaan masyarakat, kelompok sasaran kelembagaan masyaraat yang ada di desa.
4. Pembinaan Pengelolaan keuangan dan aset desa
   a. Pedoman pengelolaan keuangan dana desa kelompok sasaran seluruh desa di Kab. Banjar.
   b. Pelayanan pembuatan rekomendasi pencairan dana desa yang akan disampaikan ke BPKAD, kelompok sasaran seluruh desa di Kab. Banjar.
   c. Pembinaan pengelolaan keuangan dana desa, kelompok sasaran seluruh desa di Kab. Banjar.
   d. Pedoman pengelolaan aset desa, kelompok sasaran seluruh desa di Kab. Banjar.
   e. Pembinaan pengeolaan aset desa, kelompok sasaran seluruh desa di Kab. Banjar.

Dalam menjalan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahandesa yang meliputi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat selalu dihadapkan dengan permasalahan. Berdasarkan data dan uraian pada Bab sebelumnya maka dapat di identifikasi beberapa Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
   a. Belum Optimalnya pelaksanaan penataan Desa yang Baik secara keseluruhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
   b. Kurangnya pemahaman Kepala desa dan Perangkat Desa dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
   c. Kurangnya pemahaman Kepala desa terhadap tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
   d. Pembinaan selama ini masih pada tahapan penyelesaian permasalahan Pemerintah Desa, belum mampu melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa secara menyeluruh.
   e. Kurangnya Pelatihan dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
   f. Belum Optimalnya pelaksanaan Pilkades Serentak.
   g. Masih sedikitnya jumlah Segmen Batas Desa yang Disepakati dan diterbitkan Peraturan Bupati Tentang Batas Desa.
   h. Belum pernah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dalam hal penyusunan produk hukum Desa.
2. Bidang Evaluasi Perkembangan Desa, Kelembagaan dan Pembangunan
   a. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
   b. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi lembaga-lembaga adat di desa.
   c. Peran Lembaga non formal di desa masih sangat rendah kontribusinya di dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
   d. Kurang optimalnya Peran Lembaga ekonomi masyarakat desa.
   e. Kurang optimalnya kemampuan Lembaga Ekonomi Masyarakat dalam manajemen.
   f. Belum teridentifikasinya /terdata lembaga ekonomi masyarakat desa.
   g. Kurang optimalnya keterlibatan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat terhadap UEM.
3. Bidang Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan
   a. Belum tertib administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
   b. Belum meningkatnya kawasan perdesaan prioritas Nasional.
   c. Belum meningkatnya usaha potensi ekonomi Desa.
   d. Belum optimalnya BKAD.
4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
   a. Keterlambatan Desa dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
   b. Keterlambatan Desa dalam menyampaikan data keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes.

c. Lambatnya penatausahaan keuangan desa karena Pergantian/mutasi Perangkat Desa.
d. Kurangnya SDM Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam memahami tentang pertunjuk laporan pencairan hingga pelaporan.
e. Kurangnya Informasi yang berhubungan dengan Data Aset Desa.
f. Pengelolaan Aset Desa dan Pemetaan batas Desa Akibat adanya Pemekaran Desa.
g. Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa.
h. Kurangnya SDM yang Mempuni dalam Pengolahan Data dan Informasi yang Berhubungan dengan Seluruh Aset Kekayaan Desa.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, maka fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu mewujudkan **"Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan"**.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penataan Desa	Kab. Banjar	**Persentase Pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel**	**19,86**	**14.836.300**	**Program Penataan Desa**	Kab. Banjar	**Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas**	**0**	**0**	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Banjar	Jumlah Desa Yang Selesai Tata Batas Desa	5	14.836.300	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Kab. Banjar	**Persentase desa yang telah menyelesaikan tata batas wilayah desa**	0	**0**	
							Kab. Banjar	**Persentase desa yang terfasilitasi dalam perencanaan pembangunan desa**	0	**0**	
							Kab. Banjar	**Persentase desa yang terfasilitasi dalam penamaan dan kode desa**	0	**0**	
						Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Banjar	Jumlah Desa Yang Selesai Tata Batas Desa	0	0	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Banjar	**Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin**	**14,44**	**95.070.000**	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Kab. Banjar	**Persentase desa yang menghasilkan PADes**	**10,83**	**91.623.075**	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Banjar	Jumlah kerjasama desa yang terjalin	4	**95.070.000**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Kab. Banjar	**Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik**	13,46	**91.623.075**	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah Kerjasama Antar Desa dalam Kecamatan, dan dalam Kabupaten yang Terjalin	55	46.730.200		Kab. Banjar	**Persentase kawasan desa yang dikembangkan**	2,8		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	Kab. Banjar	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten yang Terfasilitasi	55	48.339.800		Kab. Banjar	**persentase desa yang melakukan kerjasama**	20		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Jumlah Kerjasama Antar Desa dalam Kecamatan, dan dalam Kabupaten yang Terjalin	55	29.690.200	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten yang Terfasilitasi	55	29.432.875	
						Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Banjar	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	55	32.500.000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjar	**Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas**	**19,86**	**668.032.100**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab. Banjar	**Persentase pemerintah desa dengan tata kelola yang akuntabel**	**20**	**125.569.427.675**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjar	Jumlah desa yang memiliki penataan desa berkualitas	55	**668.032.100**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab. Banjar	**Persentase administrasi Pemerintahan Desa yang berkualitas.**	20	**125.569.427.675**	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjar	Jumlah desa yang tertib administrasi desa	55	35.948.000		Kab. Banjar	**Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan**	100		
	Fasilitasi Pengelolaan	Kab. Banjar	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang	55	164.678.992		Kab. Banjar	**Persentase desa dengan aset desa yang terkelola dengan baik**	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Desa		transparant dan akuntabel								
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Banjar	Jumlah Aparatur Desa yang terlatih	394	48.724.600		Kab. Banjar	**Persentase Desa yang mengelola Aset Desa dengan akuntabel**	100		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma) yang dibina dan diberdayakan	55	52.842.200		Kab. Banjar	**Persentase peningkatan desa berprestasi**	100		
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pengangkatan Kepala Desa yang Terfasilitasi	117	72.654.108		Kab. Banjar	**Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa**	20		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Banjar	Jumlah Desa yang melakukan Profil Desa Online	55	34.293.400	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjar	Jumlah desa yang tertib administrasi desa	55	16.112.775	
		Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi Data IDM	55		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang transparant dan akuntabel	55	122.832.475.750	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pengelolaan Aset Desa yang Terfasilitasi	55	32.240.100	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Banjar	Jumlah Aparatur Desa yang terlatih	394	15.696.300	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Banjar	Terlaksananya pembinaan peningkatan	1399	159.947.900	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma)	55	34.432.875	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kapasitas anggota BPD			dan Lembaga Kerja sama antar Desa		yang dibina dan diberdayakan			
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pembinaan Laporan Kepala Desa yang terfasilitasi		0	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pengangkatan Kepala Desa yang Terfasilitasi	117	2.583.091.100	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Banjar	Jumlah Desa yang berprestasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten	3	66.702.800	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Banjar	Jumlah Desa yang melakukan Profil Desa Online	55	26.849.175	
		Kab. Banjar	Jumlah Desa yang tervalidasi data evaluasi perkembangan Desa	55			Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi Data IDM	55		
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pengelolaan Aset Desa yang Terfasilitasi	55	25.240.100	
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Banjar	Jumlah Anggota BPD yang Terlatih		0	
						Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Banjar	Jumlah Pembinaan Laporan Kepala Desa yang terfasilitasi	277	20.968.500	
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Banjar	Jumlah Desa yang berprestasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten	3	14.561.100	
							Kab. Banjar	Jumlah Desa yang tervalidasi data evaluasi perkembangan Desa	55		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka	Kab. Banjar	**Persentase desa yang lembaga kemasyarkatannya diberdayakan**	**75**	**551.736.200**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak**	Kab. Banjar	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan**	**16**	**1.129.119.450**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					**atan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah lembaga kemasyarkatannya diberdayakan	1662	**551.736.200**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Banjar	**Persentase Posyandu Aktif**	20	**1.129.119.450**	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Kab. Banjar	Jumlah Kader Posyandu Aktif	564	327.472.200		Kab. Banjar	**Persentase Kelembagaan Adat yang aktif**	10		
		Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Adat yang dibina	106			Kab. Banjar	**Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi**	10		
		Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Desa yang terkoordinasi	18			Kab. Banjar	**Persentase Pamsimas Aktif**	10		
		Kab. Banjar	Jumlah Pamsimas Aktif	30			Kab. Banjar	**Persentase PKK Aktif**	20		
		Kab. Banjar	Jumlah PKK Aktif	290		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	Kab. Banjar	Jumlah Kader Posyandu Aktif	564	1.024.439.675	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	25	148.688.800		Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Adat yang dibina	106		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Banjar	Jumlah desa yang berprestasi dalam TTG	3	75.575.200		Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Desa yang terkoordinasi	18		
		Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	2			Kab. Banjar	Jumlah Pamsimas Aktif	30		
		Kab. Banjar	Jumlah pameran TTG yang diikuti	1			Kab. Banjar	Jumlah PKK Aktif	290		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah desa yang berprestasi BBGRM tingkat kabupaten	3	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	25	26.305.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi TMMD	1		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Banjar	Jumlah desa yang berprestasi dalam TTG	3	19.728.900	
							Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	2		
							Kab. Banjar	Jumlah pameran TTG yang diikuti	1		
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah desa yang berprestasi BBGRM tingkat kabupaten	0	58.645.575	
							Kab. Banjar	Jumlah Desa yang terfasilitasi TMMD	1		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**IKM Perangkat Daerah**	**100**	**2.496.903.400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**		**Indeks kepatuhan dan kinerja intern dinas pemberdayaan masyarakat dan desa**	**80**	**6.423.832.724**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan dan Perencanaan SKPD	100	**172.039.300**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**	100	**70.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	28.849.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Renstra, Renja , Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan	7	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1	23.208.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1	21.602.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1	11.400.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1	16.237.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Terlaksananya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3	34.223.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Dokumen LKPJ, LKJiP dan LPPD	3	20.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	36.518.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen hasil monev perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	24	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana, Kedisiplinan dan Kualitas SDM Aparatur, Persentase kenaikan komponen pelaporan keuangan dan persentase penyerapan anggaran SKPD	100	**802.738.500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**	100	**5.140.859.124**	
	Penyediaan Gaji dan		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12		Penyediaan Gaji dan		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	4.341.120.624	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tunjangan ASN					Tunjangan ASN					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pelaksana tugas ASN yang terpenuhi	13	781.610.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	13	781.610.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	7.503.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	1	7.503.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersusun	18	13.624.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	18	10.624.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**	100	**10.000.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	8	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	2	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	**718.303.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran**	100	**257.723.300**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	10.472.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	5.472.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	9.103.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	10.103.100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	23.617.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	20.727.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12	675.110.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12	221.420.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	**150.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan**	100	**315.412.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	12	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	12	138.044.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	**282.219.300**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**		**Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi**	100	**333.469.300**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12	4.140.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12	4.140.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12	229.507.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12	254.507.700	
	Penyediaan Jasa Peralatan		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	19.821.600	Penyediaan Jasa Peralatan		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	24.821.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Perlengkapan Kantor					dan Perlengkapan Kantor					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat dinas	12	28.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat dinas	12	50.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	**321.603.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan**	100	**296.369.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	25	276.789.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	25	221.569.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	10	19.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	10	24.800.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	4	25.014.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	4	50.000.000	
TOTAL					**3.826.578.000**	**TOTAL**				**133.214.002.924**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Banjar

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program / Kegiatan	Kegiatan Prioritas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan/Status usulan
1	2	3	4	5	6
Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Adat (Pelatihan membuat Meubel)		Desa Tiwingan Baru, Kec. Aranio	Jumlah Desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	1 Paket	Ditolak, karena Dinas PMD tidak ada melaksanakan pelatihan pembuatan meubel
Pelatihan BUMDes (Dibutuhkannya pelatihan untuk meningkatkan skill SDM BUMDES)		Desa Mekar Raya, Kec. Kertak Hanyar	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma) yang dibina dan diberdayakan	1 Paket	Diterima, Di Kabupaten juga sudah menganggarkan untuk Pelatihan
Pelatihan BUMDes (Pelatihan Administrasi Keuangan BUMDes)		Desa Muara Halayung, Kec. Beruntung Baru	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma) yang dibina dan diberdayakan	2 Orang	Diterima, Di Kabupaten juga sudah menganggarkan untuk Pelatihan
Pelatihan BUMDes (Kurangnya pengalaman Manajemen)		Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma) yang dibina dan diberdayakan	1 Kegiatan	Diterima, Di Kabupaten juga sudah menganggarkan untuk Pelatihan
Pelatihan BUMDes (Pelatihan Untuk Pengelola Bumdes)		Desa Tambak Baru Ulu, Kec. Martapura	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma) yang dibina dan diberdayakan	1 Kegiatan	Diterima, Di Kabupaten juga sudah menganggarkan untuk Pelatihan
Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Adat (Pelatihan Pembuatan Kain Sasirangan)		Desa Panggalaman, Kec. Martapura Barat	Jumlah Desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	1 Paket	Ditolak, karena Dinas PMD tidak ada melaksanakan pelatihan pembuatan kain sasirangan
Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Adat (Pelatihan Las & Bengkel Motor)		Desa Panggalaman, Kec. Martapura Barat	Jumlah Desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	1 Paket	Ditolak, karena Dinas PMD tidak ada melaksanakan pelatihan pembuatan las dan bengkel motor.
Pelatihan BUMDes (Pelatihan Pengelolaan BUMDes)		Desa Sei. Rangas Tengah, Kec. Martapura Barat	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma) yang dibina dan diberdayakan	1 Paket	Diterima, Di Kabupaten juga sudah menganggarkan untuk Pelatihan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Proses perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan atas telaahan berbagai analisis yang meliputi: 1) Hasil evaluasi capaian pembangunan, 2) Identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, dan 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar diarahkan untuk lebih komprehensif dalam menentukan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Banjar. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjamin keselarasan dan konsistensi pembangunan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk menjamin adanya keterkaitan antara misi dengan program pembangunan yang dioperasionalisasikan melalui berbagai aktivitas kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang pada akhirnya dapat menghadirkan keterwujudan daripada visi dan misi yang tergambar dalam berbagai ukuran keberhasilan. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis"***. Mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Banjar yang terdiri dari :

Misi 1. Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas sumber daya manusia.

Misi 2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Misi 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Misi 4. Penyelenggaraan ke Pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.

Misi 5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan ke Pemerintahan luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan

penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.2.1. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Banjar selaras dan dapat dihubungkan Isu Internasional, Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2.1.1. Isu Internasional

1) *Sustainable Development Goal's* (SDG's)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target.

Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030. Maka dalam rangka mengakomodir lima poin dalam pelaksanaan SDGs disusun 17 tujuan global. Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Banjar memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Banjar

2) Asean Economic Community (AEC)

AEC atau Asean Economic Community adalah produk yang dihasilkan oleh karena adanya globalisasi yang membentuk sebuah kesatuan ekonomi (unity) di Kawasan Asia

Tenggara. Sama halnya Uni Eropa, fokus strategi AEC adalah pengembangan aset negara untuk mampu bersaing dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Namun, sebelum tampil dikancah daya saing ASEAN, daya saing nasional wajib ditingkatkan. Hingga saat ini daya saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, salah satu cara tepat yang dilakukan adalah mengartikulasi, dan atau merevitalisasi fungsi kelembagaan.

Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional, dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Maka dari itu, dengan formula 5W+1H (what, why, when, where, who, dan how), telaah AEC bertujuan untuk menjelaskan snapshot daya saing nasional, dan daerah di Indonesia dalam memasuki era AEC. RKPD Kab. Banjar Tahun 2022

3) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*). Pandemi ini terjadi di sebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi ini telah menjangkiti banyak manusia, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Mulanya COVID-19 ini menyebar di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Pandemi ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Menurut data *Congressional Research Service* (CRS), pandemi dapat memangkas pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0% menjadi 6,0% pada tahun 2020. Artinya virus ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

Penurunan ekonomi dari pandemi ini meningkatkan resiko resesi ekonomi global dengan meningkatnya pengangguran. Dalam jangka pendek prospek pemulihan ekonomi dunia diperkirakan tertahan seiring meluasnya COVID-19, yang mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan daerah kedepan harus mempersiapkan strategi yang mengarah terhadap pemulihan dan penguatan serta peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar lainnya.

3.2.1.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Banjar antara lain

1. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-4)
2. RPJMN 2020-2024 (7 Agenda Pembangunan Nasional)
3. Universal Access 100% layanan air minum, 0% kawasan kumuh, 100% layanan sanitasi
4. Jaminan Kesehatan Nasional
5. Kedaulatan Pangan
6. Pengarusutamaan Gender
7. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Pandemi Covid-19
9. Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pemulihan perekonomian daerah
10. Investasi dan Ketenagakerjaan
11. Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Distabilitas

12. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

13. Jaminan Produk Halal

3.2.1.3. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan

Isu strategis daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara global dikelompokkan ke dalam 6 aspek yakni:

1) Lingkungan Hidup
   a) Deforestasi, Alih Fungsi Lahan Gambut dan Bekas Lubang Tambang Masih Tinggi
   b) Sungai dan Perairan tercemar
   c) Terjadi Kebakaran Hutan dan lahan
   d) Terjadi Banjir Hampir setiap Tahun
2) Infrastruktur
   a) Sarana Prasarana Dasar perlu diperkuat untuk Kualitas dan Kenyamanan Hidup
   b) Konektivitas kawasan-kawasan Ekonomi perlu di perkuat
   c) Terbatasnya Energi dan masih menggunakan Energi Non Terbarukan
3) Sumber Daya Manusia
   a) Menyongsong Bonus Demografi 2030
   b) Angka Rata –Rata Lama Sekolah 8 Tahun
   c) Kesehatan
   d) Sosial
4) Transformasi Ekonomi
   a) Tergantung Komoditas Bahan Mentah/ Setengah Jadi
   b) Pandemi Covid –19 di Kalimantan Selatan
5) Tata Kelola Pemerintahan
   a) Pelayanan Publik Perlu Ditingkatkan
   b) Perijinan Perlu Dipercepat
6) Gerbang Ibu Kota Negara Baru Dan Food Estate
   a) IKN di Kaltim dan Food Estate di Kalteng

3.2.1.4. Isu Strategis Kabupaten Banjar

Adapun isu strategis RKPD Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas & responsif gender & anak

Adapun permasalahan pokok diatas tersebut disebabkan masalah sebagaimana disebutkan dibawah ini :

a) Problem pendidikan antara lain belum meratanya akses karena keterbatasan jumlah dan kualitas tentang prasarana dan sarana sekolah dan SDM tenaga didik; Problem rata-rata lama sekolah dan RKPD Kab. Banjar Tahun 2022 tingkat partisipasi sekolah, problem literasi yang masih rendah berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perpustakaan.

b) Problem kesehatan antara lain: angka AKI dan AKB, angka kesakitan (menular: TBC, HIV dan tidak menular : Hipertensi, diabetes & obesitas), belum meratanya distribusi kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, stunting masih 24%, kepesertaan jaminan sosial belum maksimal, ODF masih tinggi, gizi rendah di pedesaan, dan kesiapsiagaan masa pandemi Covid 19, kuantitas & kualitas sarana prasarana & SDM Rumah Sakit.

c) Problem lainnya berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun, apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini. Berkurangnya daya beli masyarakat dapat menyebabkan kekurangan asupan pangan dan gizi sehingga mempengaruhi kualitas SDM.

2. Peningkatan Ekonomi Yang Berkualitas untuk Pemerataan hasil pembangunan daerah Yang berkeadilan

Permasalahan ekonomi meliputi 2 hal yang berjalan bersama-sama yaitu permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil ekonomi. Pemerataan hasil ekonomi mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Jumlah penduduk miskin yang besar, walaupun angka kemiskinan rendah menunjukkan masih adanya permasalahan kesejahteraan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan di tingkat nasional maupun provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Angka kemiskinan bersamaan dengan angka pengangguran, tingkat pendapatan dan lain-lain memperlihatkan masalah-masalah pemerataan hasil pembangunan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam hal-hal dibawah ini:

a) Problem kemiskinan masyarakat yang semakin terdampak akibat pandemi Covid 19.

b) Problem pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya kompetensi pencari kerja, hubungan industri pekerja dan perusahaan yang belum berjalan dengan baik; sistem pengupahan dan jaminan sosial yang belum berjalan dengan optimal.

c) Problem Koperasi dan usaha Mikro yang belum terkelola secara profesional dan berkualitas, SDM yang rendah, akses permodalan yang masih terbatas, produk yang masih lemah daya saing nya dan pemasaran yang terbatas.

d) Problem rendahnya pendapatan buruh tani/ kebun, petani gurem dan peternak, usaha yang belum berorientasi agribisnis, sarana prasarana yang masih terbatas dan belum optimal, SDM yang masih rendah, pemasaran produk hasil yang terbatas, pengelolaan produk yang belum terstandarisasi.

e) Problem masih rendahnya pemberdayaan pelaku usaha perikanan, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan, menurunnya sumber daya ikan dan kebijakan/ regulasi pemerintah yang belum memadai.

f) Problem perindustrian meliputi bahan baku, SDM dan SDA; lemahnya promosi, industri yang dibina dan dikembangkan belum terfokus; kualitas dan kapasitas industri kecil dan menengah yang masih lemah; dan jejaring yang masih terbatas pada pasar lokal.

g) Problem pengelolaan pariwisata yang belum optimal (amenitas, atraksi, aksesibilitas); pemasaran belum optimal; SDM dan kelembagaan yang belum mendukung

h) Problem masih lemahnya perkembangan investasi & penanaman modal, kualitas SDM dan sarpras yang belum mendukung, pelayanan ijin yang masih terkendala, belium optimalnya penggunaan IT.

i) Problem konsumsi energi dan protein yang masih rendah; skor PPH yang masih dibawah target

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas & berkelanjutan

Adapun beberapa masalah lingkungan hidup di Kabupaten Banjar adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini :

a) Masih tingginya polusi air dan udara;

b) Sarana prasarana armada persampahan yang belum memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sembarangan;

c) Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH);

d) Masih seringnya terjadi kejadian banjir dan kebakaran hutan yang mempengaruhi kualitas Lingkungan Hidup;

e) Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih rendah; perlu dibentuknya desa-desa tangguh bencana;

4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, terpercaya dan Akuntabel

Beberapa masalah dalam tata kelola pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Masih belum optimalnya profesionalitas ASN meliputi kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja.

b) Problem perencanaan dalam menetapkan target kinerja dan anggaran; penentuan pagu anggaran masih berdasarkan historical budget belum money follow function; penurunan pendapatan dikarenakan pemberlakukan Omni Bus Law; sumber pendanaan yang belum mengoptimalkan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

c) Masih belum optimalnya komitmen perangkat daerah terhadap upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

d) Pelayan publik yang belum optimal dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang belum maksimal.

e) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal.

5. Perwujudan masyarakat yang agamis, berakhlak dan berkepribadian luhur untuk menjaga kerukunan umat dalam suasana aman & tertib Permasalahan adanya perubahan nilai budaya masyarakat karena adanya perubahan besar akibat dampak Covid-19, membuat masyarakat lebih tergantung pada media online dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Problem yang terjadi masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Problem konflik yang masih berpotensi terjadi dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

b) Problem perilaku masyarakat yang beralih ke media sosial (medsos) secara online sebagai sarana komunikasi memudahkan terjadi pergesekan dan inflitrasi budaya yang belum tentu sejalan dengan budaya lokal.

c) Problem pelanggaran terhadap peraturan dan aturan hukum yang ada sehingga menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan.

d) Problem gesekan antara pendukung masyarakat dalam bidang politik dan agenda demokrasi lokal yang menyebabkan terjadinya ketegangan diantarai masyarakat.

3.2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.2.2.1. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri

Meningkatkan nilai tambah sektor industri, dengan target:

a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8- 6,5% ;
b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%;
c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T.

2. Pariwisata

Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, dengan target:

a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan;
b. Peringkat Travel and Tourism Competittiveness Index 36-39.

3. Ketahanan Pangan

Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dengan target:

a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8;
b. Nilai Tukar Petani 102-104;
c. Nilai Tukar Nelayan 102-105;
d. Ketersediaan Beras 44 juta ton;
e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton;
f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/orang/ tahun.

4. UMKM

Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional

a. Pertumbuhan Wirausaha 3%;

b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%;

c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%.

5. Infrastruktur

Meningkatkan pemerataan infrastruktur, dengan target:

a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit;

b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi;

c. Panjang jalan tol baru: 400 km;

d. Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s;

e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR;

f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR;

g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha;

h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh.

6. Transformasi Digital

Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, dengan target:

a. Masyarakat pengguna internet 79,20%;

b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%;

c. 72.500 SDM talenta digital;

d. 12,4 juta lokal champion literasi digital;

e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi;

f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber.

7. Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), dengan target:

a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%;

b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%;

c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%;

d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.

8. Reformasi Perlindungan Sosial

Mempercepat reformasi perlindungan sosial, dengan target:

a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%;

b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%;

c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%;

d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk.

9.Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan

Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, dengan target:

a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%

b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%

c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%

d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT) 900 Paten Domestik

10. Reformasi Kesehatan

Dalam hal penanganan Covid-19, dilakukan dengan meneruskan vaksinasi Covid-19. Di samping itu juga memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, dengan target:

a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%

b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk

c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%

d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%

e. Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar 59%

f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%

g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%

h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan pembangunan pada kawasan Kalimantan difokuskan untuk:

a. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru- paru dunia (Heart of Borneo)

b. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi;

c. Mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;

d. Mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan;

e. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

f. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional; peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Spesifik untuk tahun 2022, arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi;
2. Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional;
3. Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
4. Mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan Bagian Utara.

Sedangkan Major Projects yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah:

1. Kawasan Industri Prioritas dan 31 Smelter;
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar;
3. Pembangunan Bendungan Riam Kiwa;
4. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM).

3.2.2.2. Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan

Lingkungan". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan

b. UMKM

c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata

d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata :

a. Peningkatan Nilai Tambah hasil Industri dan Pertanian;

b. Mendorong Pariwisata dan Pengembangan Geopark;

c. Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru;

d. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :

a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah;

b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;

c. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS;

d. Pengendalian Prevalensi Stunting;

e. Penurunan Angka Pernikahan Anak;

f. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;

g. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

b. Peningkatan Prestasi Olahraga.

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian :

a. Pengembangan Kawasan Prioritas;

b. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi;

c. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar.

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

a. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;

b. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

c. Peningkatan Pelayanan Publik;

d. Pengembangan Satu Data Kalsel.

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana;

c. Mendorong Penggunaan Energi Baru Terbarukan.

6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru

a. Membuka Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN;

b. Mengembangkan Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN.

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMD

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah ***"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"***.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional dan prov. Kalsel disebabkan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar tahun 2020 tumbuh negatif sebesar -1,91%, diperkirakan tahun 2021 tidak dapat pulih disebabkan adanya banjir besar pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan kerusakan ladang perkebunan, pertanian, keramba ikan budidaya dan rusaknya infrastruktur, Selain itu pandemi covid-19 yang belum berakhir juga mempersulitnya pulihnya perekonomian. Diperkirakan tahun 2022 dapat tumbuh pada kisaran 2,50- 3,00 persen.

Angka pengangguran di kabupaten banjar ditetapkan mengalami peningkatan dari target RPJMD menyesuaikan dampak pandemi covid 19, ditetapkan sebesar 3,11 persen. ditetapkan target lebih rendah dari nasional dan hampir sama dengan target yang ditetapkan provinsi Kalsel untuk Kabupaten Banjar. Untuk kemiskinan di kabupaten banjar juga mengalami peningkatan disebabkan kebijakan phisical distancing menyebabkan masyarakat tidak leluasa beraktivitas ekonomi dan menurunnya permintaan. ditetapkan target sebesar 2.83 persen lebih rendah dari nasional dan sama dengan target dari Provinsi Kalsel, dengan kerja keras dari kabupaten dan dukungan dari prov. Kalsel dan Nasional diharapkan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Angka IPM kabupaten banjar ditargetkan lebih rendah dari prov. Kalsel karena diperkirakan komponen pembentuk IPM akan mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan mengalami kontraksi seperti pengeluaran riil masyarakat. dan Indeks gini ditetapkan selaras dari prov. Kalsel dan lebih baik dari target nasional.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju

sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Peningkatan Sistem Pendidikan

b. Peningkatan Sistem Kesehatan

c. Peningkatan Kewirausahaan

2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/ Jasa

b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi

c. Penanggulangan Kemiskinan

d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan

b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni

c. Mitigasi Kebencanaan

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

c. Peningkatan Kualitas Aparatur

d. Penguatan SPBE

5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman

a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama

b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Memperhatikan Renstra Dinas PMD 2021-2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Dinas PMD tahun 2022 adalah :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan Di Perdesaan Melalui Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6793

Dalam kaitannya dengan penetapan prioritas dan sasaran pada RKPD maka dukungan Dinas PMD sebagai elemen pemerintahan daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Sasaran Renja Dinas PMD Berdasarkan Prioritas RKPD
Tahun 2022

URAIAN	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
RKPD	Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pemberdayaan Desa dan Pemanfaatan Dana Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6793
RENJA		Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan Di Perdesaan Melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6793

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2022.

4.1.1 Faktor - Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan maksud peningkatan kualitas perencanan dengan cara mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misalnya :

1. Perbaikan Indikator sasaran (IKU)
2. Distribusi sasaran (*cascading*) kepada SKPD, Unit dan Individu
3. Efisiensi : *less ceremony, less paper*, pemanfaatan TI, TKD (e-kinerja)
4. Sistem dan Pedoman Perencanaan
5. Feed back hasil Evaluasi (uji *outcome*)
6. Alat Uji Usulan Program Kegiatan
7. Pembinaan dan Pengawalan Perencanaan Desa dan SKPD
8. E-Monev terpadu (master control)
9. Inovasi intervensi (Laboratorium Inovasi)
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

4.2 Keselarasan RPJMD, Renstra, Prioritas RKPD dan Renja Dinas PMD Kabupaten Banjar

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021 - 2026, dijabarkan melalui perencanaan tahunan (dokumen RKPD) yang di dalamnya mencakup prioritas - prioritas pembangunan yang dilaksanakan sebagai solusi permasalahan pembangunan ditahun bersangkutan yang merupakan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Sebagai elemen pemerintahan sudah semestinya prioritas yang ditetapkan mendapat dukungan melalui program dan kegiatan dari SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan berikut diharapkan dapat menjelaskan dukungan dan kesungguhan Dinas PMD dalam melaksanakan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
									133.214.002.924				
2	13	2			**Program Penataan Desa**	**Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas**		**0**	**0**				
2	13	2	2,01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase desa yang telah menyelesaikan tata batas wilayah desa**	Kab. Banjar	0	**0**				
						Persentase desa yang terfasilitasi dalam perencanaan pembangunan desa	Kab. Banjar	0	**0**				
						Persentase desa yang terfasilitasi dalam penamaan dan kode desa	Kab. Banjar	0	**0**				
2	13	2	2,01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa Yang Selesai Tata Batas Desa	Kab. Banjar	0	0				
2	13	3			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase desa yang menghasilkan PADes**		**10,83**	**91.623.075**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	3	2,01		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik**	Kab. Banjar	13,46	**91.623.075**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Persentase kawasan desa yang dikembangkan	Kab. Banjar	2,8					
						persentase desa yang melakukan kerjasama	Kab. Banjar	20					
2	13	3	2,01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Desa dalam Kecamatan, dan dalam Kabupaten yang Terjalin	Kab. Banjar	55	29.690.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	3	2,01	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	Kab. Banjar	55	29.432.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
						Kabupaten yang Terfasilitasi							
2	13	3	2,01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Kab. Banjar	55	32.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase pemerintah desa dengan tata kelola yang akuntabel**		**20**	**125.569.427.675**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4	2,01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase administrasi Pemerintahan Desa yang berkualitas.**	Kab. Banjar	20	**125.569.427.675**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan	Kab. Banjar	100					
						Persentase desa dengan aset desa yang terkelola dengan baik	Kab. Banjar	100					
						Persentase Desa yang mengelola Aset Desa dengan akuntabel	Kab. Banjar	100					
						Persentase peningkatan desa berprestasi	Kab. Banjar	100					
						Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	Kab. Banjar	20					
2	13	4	2,01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi desa	Kab. Banjar	55	16.112.775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4	2,01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang transparant dan akuntabel	Kab. Banjar	55	122.832.475.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4	2,01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang terlatih	Kab. Banjar	394	15.696.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4	2,01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Bumdesma)	Kab. Banjar	55	34.432.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
						yang dibina dan diberdayakan							
2	13	4	2,01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pengangkatan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar	117	2.583.091.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang melakukan Profil Desa Online	Kab. Banjar	55	26.849.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Jumlah Desa yang terfasilitasi Data IDM	Kab. Banjar	55					
2	13	4	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar	55	25.240.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Terlatih	Kab. Banjar		0				
2	13	4	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan Laporan Kepala Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar	277	20.968.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	4	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang berprestasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Kab. Banjar	3	14.561.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Jumlah Desa yang tervalidasi data evaluasi perkembangan Desa	Kab. Banjar	55					
2	13	5			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan**		**16**	**1.129.119.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	5	2,01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama**	**Persentase Posyandu Aktif**	Kab. Banjar	20	**1.129.119.450**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Persentase Kelembagaan Adat yang aktif	Kab. Banjar	10					
						Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi	Kab. Banjar	10					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
					dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pamsimas Aktif**	Kab. Banjar	10					
						Persentase PKK Aktif	Kab. Banjar	20					
2	13	5	2,01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Posyandu Aktif	Kab. Banjar	564	1.024.439.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Jumlah Kelembagaan Adat yang dibina	Kab. Banjar	106					
						Jumlah Kelembagaan Desa yang terkoordinasi	Kab. Banjar	18					
						Jumlah Pamsimas Aktif	Kab. Banjar	30					
						Jumlah PKK Aktif	Kab. Banjar	290					
2	13	5	2,01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	Kab. Banjar	25	26.305.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	5	2,01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang berprestasi dalam TTG	Kab. Banjar	3	19.728.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Jumlah Desa yang terfasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Banjar	2					
						Jumlah pameran TTG yang diikuti	Kab. Banjar	1					
2	13	5	2,01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang berprestasi BBGRM tingkat kabupaten	Kab. Banjar	0	58.645.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Jumlah Desa yang terfasilitasi TMMD	Kab. Banjar	1					
2	13	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepatuhan dan kinerja intern dinas pemberdayaan masyarakat dan desa**		**80**	**6.423.832.724**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**		100	**70.000.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
2	13	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja , Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan		7	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD		1	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD		1	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKPJ, LKJiP dan LPPD		3	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen hasil monev perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		24	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**		100	**5.140.859.124**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan		12	4.341.120.624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran		13	781.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu		1	7.503.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu		18	10.624.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2	13	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**		100	**10.000.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek		2	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran**		100	**257.723.300**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		12	5.472.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12	10.103.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	20.727.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah		12	221.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan**		100	**315.412.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin		12	138.044.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi**		100	**333.469.300**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
2	13	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12	4.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		12	254.507.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12	24.821.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat dinas		12	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan**		100	**296.369.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara		25	221.569.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara		10	24.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	13	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara		4	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun pertama, awal periode renstra 2021 - 2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas PMD dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi Dinas PMD Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas PMD Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan - karyawati Dinas PMD Kabupaten Banjar serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

17. Dinas Perhubungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk tahun yang akan datang.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2022 dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Perhubungan Kabupaten Banjar menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Dinas Perhubungan Kab. Banjar tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kelima Renstra tahun 2021-2026. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD :

   Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
   h. Perumusan kegiatan prioritas
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
   j. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD
   k. Pembahasan forum SKPD dan
   l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

   Tahap penyajian rancangan Renja SKPD terdiri dari susunan sebagai berikut :

   a. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
   b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
   c. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan program dan kegiatan.
   d. Penutup.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kab. Banjar tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 Tanggal 31 Desember 2018.
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 57).
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 23Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja adalah :

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 atau sumber dan lainnya
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2022

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Lalu
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.2.1 Tujuan Renja SKPD
  - 3.2.2 Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB I : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke IV dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Misi ke 4 ***: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Daerah***

Tujuan ***: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah***

Sasaran ***: Meningkatnya Akses dan Kualitas Prasarana Transportasi***

Meningkatnya Akses dan Kualitas Sarana Transportasi

Indikator Sasaran ***: Persentase Prasarana Transportasi***

Persentase Sarana Transportasi

Dalam rangka mencapai misi ke 4 Kabupaten Banjar serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada tahun 2021 melaksanakan 1 urusan, 3 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Alokasi (Rp)**		
	Anggaran	**Realisasi**	**Persentase (%)**
1	***2***	***3***	***4***
Pagu Keseluruhan	**Rp10.054.524.602,00**	**Rp3.622.066.244,00**	**36,02**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp7.436.450.702,00**	**Rp2.601.083.727,00**	**Rp34,98**
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp65.329.100,00	Rp4.924.700,00	Rp7,54

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp13.460.000,00	Rp1.190.000,00	Rp8,84
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp10.871.500,00	Rp3.134.700,00	Rp28,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp5.238.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp35.759.600,00	Rp600.000,00	Rp1,68
Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Rp6.407.268.202,00	Rp2.324.835.285,00	Rp36,28
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.709.093.202,00	Rp2.097.420.137,00	Rp36,74
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp680.250.000,00	Rp221.013.748,00	Rp32,49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp17.925.000,00	Rp6.401.400,00	Rp35,71
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp552.671.400,00	Rp76.589.050,00	Rp13,86
Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Rp4.085.100,00	Rp2.884.900,00	Rp70,62

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp47.401.700,00	Rp24.139.900,00	Rp50,93
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp27.511.300,00	Rp23.054.450,00	Rp83,80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp25.465.300,00	Rp10.764.800,00	Rp42,27
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp15.000.000,00	Rp4.580.000,00	Rp30,53
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp433.208.000,00	Rp11.165.000,00	Rp2,58
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp142.927.000,00	Rp48.393.692,00	Rp33,86
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp142.927.000,00	Rp48.393.692,00	Rp33,86
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp238.255.000,00	Rp146.341.000,00	Rp61,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp38.990.000,00	Rp32.530.000,00	Rp83,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp165.490.000,00	Rp112.815.000,00	Rp68,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp26.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp7.345.000,00	Rp996.000,00	Rp13,56
Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	**Rp2.140.283.900,00**	**Rp1.020.682.517,00**	**Rp47,69**
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp109.022.400,00	Rp16.672.400,00	Rp15,29
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp95.754.700,00	Rp3.504.700,00	Rp3,66
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp13.267.700,00	Rp13.167.700,00	Rp99,25
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp201.134.200,00	Rp99.023.500,00	Rp49,23
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp201.134.200,00	Rp99.023.500,00	Rp49,23
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp588.525.900,00	Rp350.368.367,00	Rp59,53
penyedian sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Rp527.945.500,00	Rp308.419.367,00	Rp58,42

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp33.995.400,00	Rp16.800.000,00	Rp49,42
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp26.585.000,00	Rp25.149.000,00	Rp94,60
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp566.708.100,00	Rp254.493.550,00	Rp44,91
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp127.397.000,00	Rp66.346.800,00	Rp52,08
Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp439.311.100,00	Rp188.146.750,00	Rp42,83
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp50.070.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp50.070.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2,00
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp502.283.400,00	Rp240.030.000,00	Rp47,79
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp502.283.400,00	Rp240.030.000,00	Rp47,79

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp117.789.900,00	Rp59.094.700,00	Rp50,17
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp117.789.900,00	Rp59.094.700,00	Rp50,17
Program Pengelolaan Pelayaran	**Rp477.790.000,00**	**Rp300.000,00**	**Rp0,06**
Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp477.790.000,00	Rp300.000,00	Rp0,06
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp199.679.200,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp276.754.800,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp1.356.000,00	Rp300.000,00	Rp22,12

Total anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebesar Rp. 10.054.524.602 dengan Realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.622.066.244 (36.02%).

Adapun rincian untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan II ini adalah :

1) Program wajib sebesar Rp. 1.020.982.517 (39,00% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.618.073.900).

2) Progam rutin sebesar Rp 2.601.083.727 (34,98% total anggaran yang dilokasikan sebesar Rp 7.436.450.702).

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, terdapat beberapa catatan penting, antara lain :

1. Program / Kegiatan yang tidak tercapai disebabkan oleh :

1) Kegiatan dihapus ataupun dikurangi karena adanya refocusing anggaran akibat dampak *COVID-19*.

2) Kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan 3 dan 4.

3) Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan anggaran kas.

4) Belum bisa dilakukan pencatatan progres kinerja, karena dokumen (Renja, RFK dan Kinerja) untuk Triwulan II baru bisa di selesaikan pada Laporan untuk bulan Juli.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

1) Adanya refocusing anggaran atas dampak pandemi *COVID-19* mengakibatkan pengurangan anggaran dan otomatis target capaian kinerja program dan kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut :

1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan.

2) Efektifitas pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi anggaran.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Triwulan II Tahun 2021

Tabel 2.1.2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100	persen	7.436.450.702	25	1.066.776.809	25	1.534.306.918					50,00	2.601.083.727	34,12		-		
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100	Persen	**65.329.100**	25,00	**4.924.700**	25	**-**					50,00	4924700	**37,50**				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	2	dokumen	13.460.000	1	1.190.000	0	-					1,00	1.190.000	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA&RKA-P,DPA & DPA-P)	4	dokumen	10.871.500	2	3.134.700	0	-					2,00	3.134.700	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD (LKJIP,LPPD dan LKPJ)	3	dokumen	5.238.000	0	-	0	0					0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Monitoring	12	dokumen	35.759.600	3	600.000	3	0					6,00	600.000	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100	persen	**6.407.268.202**	25	**955.348.103**	25	**1.369.487.182**					50,00	2.324.835.285	**33,33**				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV									
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai	12	bulan	5.709.093.202	3	877.396.703	3	1.220.023.434					6,00	2.097.420.137	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12	bulan	680.250.000	3	77.550.000	3	143.463.748					6,00	221.013.748	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	laporan	17.925.000	0	401.400	0	6.000.000					0,00	6.401.400	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	3	ASN	30.000.000	-	0	0	0					0,00	0	0				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	3	ASN	30.000.000	0	0	0	0					0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100	Persen	**552.671.400**	25,00	**3380735 0**	25	**42.781 .700**					50,00	**76.589 .050,00**	**49,24**		0		0
Penyediaan Komponen Instalansi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	12	bulan	4.085.100	3	1.404.900	3	1.480.000					6,00	2.884.900,00	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	47.401.700	0	-	6	24.139.900					6,00	24.139.900	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis Kantor tersedianya kebersihan kantor	12	bulan	27.511.300	3	21.837.450	3	1.217.000					6,00	23.054.450	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	25.465.300	3	3.825.000	3	6.939.800					6,00	10.764.800	50,00	0,00	0	0,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat	11	bulan	15.000.000	3	3.230.000	2	1.350.000					5,00	4.580.000	45,45	0,00	0	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi daerah dan dalam daerah	12	bulan	433.208.000	3	3.510.000	3	7.655.000					6,00	11.165.000	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100	persen	**142.927.000**	25,00	24.010.656	25	**24.383.036**					50,00	48.393.692	**50**				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	142.927.000	3	24.010.656	3	24.383.036					6,00	48.393.692	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Pemeliharaan Batang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100	Persen	238.255.000	25,00	48.686.000	25	**97.655.000**					50,00	146.341.000	**34,64**	0		0	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV									
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Mobil Jabatan	12	bulan	38.990.000	3	13.625.000	3	18.905.000					6,00	32.530.000	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12	bulan	165.490.000	3	34.665.000	3	78.150.000					6,00	112.815.000	50,00	0,00	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksanaya Perbaikan Peralatan Kerja	12	bulan	26.430.000	0	-	3	-					3,00	0	25,00				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	unit	7.345.000	0,05	396.000	0,08	600.000					0,14	996.000	13,56	0,00	0	0,00	0,00
program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Ketersediaan fasilitas	90	persen	2.140.284.100	25,73	322.495.581	17,33	466.539.936					43,06	789.035.517	47,85				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
	Keselamatan Transportasi																		
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan fasilitas Keselamatan Transportasi	90	persen	109.022.400	77,78	13.404.700	-	**3.267.700**					77,78	16.672.400	50				
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan kab/Kota	Jumlah Halte yang dibangun baru dan fungsi baik	2	buah	95.754.700	0	3.504.700	0	-					0,00	3.504.700	0,00	0,00	0	0,00	0,00
rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan	Jumlah Halte yang terpelihara dan berfungsi baik	2	buah	13.267.700	2	9.900.000	0	3.267.700					2,00	13.167.700	100,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan fasilitas Keselamatan Transportasi	91	Persen	201.134.400	5,16	39.000.000	12,42	**60.023.500**					17,57	99023500	19,61				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Angkutan Umum yang Masuk Terminal	45625	buah	201.134.400	3282	39.000.000	5665	60.023.500					8.947,00	99.023.500	19,61	0,00	0	0,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
	Pertahun yang Terpantau																		
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Ketersediaan fasilitas Keselamatan Transportasi	100	Persen	4.750.000	88	0	12,50	0					100,00	0	100				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir yang dikelola	16	Titik parkir	4.750.000	14	0	2	0					16,00	0	100,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketersediaan fasilitas Keselamatan Transportasi	100	persen	588.525.900	2,80	210.157.881	45,24	140.210.486					48,04	350.368.367	55,77				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan Bermotor yang diuji	7000	buah	527.945.500	1545	202.957.881	3167	105.461.486					4.712,00	308.419.367	67,31	0,00	0	0,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Sosialisasi standar Ioperasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bengkel yang layak	10	bengkel	33.995.400	0	7.200.000	0	9.600.000					0,00	16.800.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Gedung Uji yang dipelihara	1	unit	26.585.000	0	0	1	25.149.000					1,00	25.149.000	100,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan fasilitas Keselamatan Transportasi	80	Persen	566.708.100	3,62	26.700.000	11,70	227.793.550					15,32	254.493.550	0				
Penataan manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kesepakatan Forum LLAJ	1	laporan	127.397.000	0	26.700.000	0	39.646.800					0,00	66.346.800	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah Laporan rekomendasi manajemen dan Rekayasa	5	Laporan		0		0						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV									
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Pengadaan, pemasangan ,perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	Jumlah APILL yang Dipelihara	12	buah	439.311.100	0	0	4	188.146.750					4,00	188.146.750	33,33	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah APILL yang Dipasang	4	buah		0		0						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Jumlah Rambu yang terpasang	265	buah		12		27						39,00		14,72	0,00		0,00	0,00
	panjang marka jalan yang terpasang	4000	meter		0		3781						3.781,00		94,53	0,00		0,00	0,00
	Panjang pagar Pengaman Jalan	10	meter		0		0						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan fasilitas Keselamatan Transportasi	5	Persen	50.070.000	0	0	0						0,00	0	0				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan Penyusunan Kebijakan Norma,standar dan Prosedur bidang perhubungan	5	Laporan	50.070.000	0	0	0	1.000.000					0,00	1.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketersediaan fasilitas Keselamatan Transportasi	87	Pesen	502.283.400	20,00	9.383.000	47,79						67,79	9.383.000	67,79				
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		3	Kegiatan	502.283.400	0,6	9.383.000	1	230.647.000					2,03	240.030.000	67,79	0,00	0	0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		90	Persen	117.789.900	9,00	23.850.000	9	35.244.700					18,00	59.094.700	9				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang anatar kota dalam 1 satu kab/kota	Jumlah lah angkutan darat dan sungai yang terlayanai perizinan bidang perhubungan	400	buah	117.789.900	36	23.850.000	36	35.244.700					72,00	59.094.700	18,00	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah Peserta yang mengikuti pemilihan dan penghargaan supir/Juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	25	orang																
Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio angkutan umum (darat,Laut,SDP) Layak terhadap jumlah pendududk	0,0007	rasio	477.790.000	0,00106	-	0,00015						0,00026	300.000	38,16				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV								
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuan sungai dan Danau	Rasio angkutan umum (darat,laut,SDP) Layak terhadap Jumlah Penduduk	0,0007	persen	477.790.000	0,000106		0,000015						0,00	300.000	2,10		0		
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga yang dibangun baru dan berfungsi baik	1	buah	199.679.200	0	-	0	0					0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga yang terpelihara dan berfungsi baik	2	buah	276.754.800	0	-	0	0				0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kapal yang standar pertahun yang terpanatu	3168	buah	1.356.000	0	-	200	300.000					200,00	300.000	6,31	0,00	0	0,00	0,00

2.2ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Setelah mengkaji capaian kinerja pelayanan SKPD, dimunculkan beberapa isu penting dalan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, antara lain :

- Kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor
- Belum tersedianya bengkel yang sesuai dengan standar yang berlaku
- Informasi/ data kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi darat masih manual sehingga penyajian data kurang praktis
- Kurangnya SDM untuk pengembangan terminal dan dermaga
- Keterbatasan dana APBD
- Melengkapi peralatan pengujian kendaraan bermotor secara bertahap

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 10 program yang tercantum dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6. Program Pemenuhan Prasarana Perhubungan
7. Program Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan
8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Program Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Banjar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, maka pada tahun 2021 program dan kegiatan yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun 2019 dan 2020. Hanya terdapat beberapa program/ kegiatan yang namanya berbeda dan terdapat beberapa diantaranya yang mengalami penyederhanaan kegiatan. Akan tetapi tujuan "Terwujudnya keselamatan transportasi perhubungan yang handal dan berkualitas" tetap menjadi prioritas utama dalam rencana pencapaian tujuan. Gambaran Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

(Tabel 2.4) :

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	Rp7	8	9	10	11	Rp12	13
I	**Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi**	**Program Pemenuhan Prasarana Perhubungan**	**Kab. Banjar**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi baik**	**90%**	**Rp748.004.400**	**Program Pemenuhan Prasarana Perhubungan**	**Kab. Banjar**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi baik**	**90%**	**Rp748.004.400**	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
1		Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasiltas Perhubungan	11 Dokumen	Rp76.021.900	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasiltas Perhubungan	11 Dokumen	Rp76.021.900	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
2		Pembangunan Halte	Kab. Banjar	Jumlah Halte yang dibangun baru dan berfungsi baik	2 Buah	Rp108.778.700	Pembangunan Halte	Kab. Banjar	Jumlah Halte yang dibangun baru dan berfungsi baik	2 Buah	Rp108.778.700	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
3		Pemeliharaan Halte	Kab. Banjar	Jumlah Halte yang terpelihara dan berfungsi baik	2 Buah	Rp19.028.700	Pemeliharaan Halte	Kab. Banjar	Jumlah Halte yang terpelihara dan berfungsi baik	2 Buah	Rp19.028.700	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
4		Pemeliharaan Dermaga	Kab. Banjar	Jumlah Dermaga yang terpelihara dan berfungsi baik	2 Buah	Rp121.358.800	Pemeliharaan Dermaga	Kab. Banjar	Jumlah Dermaga yang terpelihara dan berfungsi baik	2 Buah	Rp121.358.800	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
5		Pembinaan Perbengkelan	Kab. Banjar	Jumlah Bengkel yang layak	10 Buah	Rp54.186.500	Pembinaan Perbengkelan	Kab. Banjar	Jumlah Bengkel yang layak	10 Buah	Rp54.186.500	Sesuai dengan Simda Integrated 2021

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	Rp7	8	9	10	11	Rp12	13
6		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah Laporan pelaksanaan Monev	1 Laporan	Rp47.144.000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah Laporan pelaksanaan Monev Monev	1 Laporan	Rp47.144.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
7		Pembangunan Dermaga	Kab. Banjar	Jumlah Dermaga yang dibangun baru dan berfungsi baik	1 Buah	Rp207.199.800	Pembangunan Dermaga	Kab. Banjar	Jumlah Dermaga yang dibangun baru dan berfungsi baik	1 Buah	Rp207.199.800	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
8		Pemeliharaan Terminal	Kab. Banjar	Jumlah Terminal yang terpelihara dan berfungsi baik	2 Buah	Rp114.286.000	Pemeliharaan Terminal	Kab. Banjar	Jumlah Terminal yang terpelihara dan berfungsi baik	2 Buah	Rp114.286.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
II		**Program Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan**	**Kab. Banjar**	**Persentase angkutan umum yang masuk terminal**	**91%**	**Rp280.720.700**	**Program Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan**	**Kab. Banjar**	**Persentase angkutan umum yang masuk terminal**	**91%**	**Rp280.720.700**	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
9		Operasional Terminal	**Kab. Banjar**	Jumlah angkutan umum yang masuk terminal per tahun yang terpantau	45625 Buah	Rp231.199.700	Operasional Terminal	Kab. Banjar	Jumlah angkutan umum yang masuk terminal per tahun yang terpantau	45625 Buah	Rp231.199.700	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
10		Operasional Dermaga	Kab. Banjar	Jumlah kapal yang sandar pertahun yang terpantau	3.168 buah	Rp9.721.000	Operasional Dermaga	Kab. Banjar	Jumlah kapal yang sandar pertahun yang terpantau	3.168 buah	Rp9.721.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	Rp7	8	9	10	11	Rp12	13
11		Pengelolaan Perparkiran	Kab. Banjar	Jumlah titik parkir yang dikelola	16 titik lapor	Rp26.200.000	Pengelolaan Perparkiran	Kab. Banjar	Jumlah titik parkir yang dikelola	16 titik lapor	Rp26.200.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
12		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan pelaksanaan monev terminal, dermaga dan perparkiran	1 Laporan	Rp13.600.000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan pelaksanaan monev terminal, dermaga dan perparkiran	1 Laporan	Rp13.600.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
III		**Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat**	**Kab. Banjar**	**Persentase Ketersediaan rambu yang layak**	**80%**	**Rp928.086.500**	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat**	**Kab. Banjar**	**Persentase Ketersediaan rambu yang layak**	**80%**	**Rp928.086.500**	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
13		Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah dokumen perencanaan pemenuhan fasilitas keselataman lalu lintas	-	Rp0	Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah dokumen perencanaan pemenuhan fasilitas keselatamaan lalu lintas	-	Rp0	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
14		Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah rambu yang terpasang	451 buah	Rp117.664.300	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah rambu yang terpasang	451 buah	Rp117.664.300	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
15		Pengadaan Marka Jalan	Kab. Banjar	Panjang marka jalan yang terpasang	4.000 meter	Rp166.003.600	Pengadaan Marka Jalan	Kab. Banjar	Panjang marka jalan yang terpasang	4.000 meter	Rp166.003.600	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
16		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Banjar	Panjang pagar	10 meter	Rp125.530.600	Pengadaan Pagar	Kab. Banjar	Panjang pagar	10 meter	Rp125.530.600	Sesuai dengan Simda Integrated 2021

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	Rp7	8	9	10	11	Rp12	13
				pengaman jalan			Pengaman Jalan		pengaman jalan			
17		Pengadaan APILL	Kab. Banjar	Jumlah APILL yang terpasang	4 buah	Rp94.415.900	Pengadaan APILL	Kab. Banjar	Jumlah APILL yang terpasang	4 buah	Rp94.415.900	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
18		Pemeliharaan APILL	Kab. Banjar	Jumlah APILL yang dipelihara	12 buah	Rp121.411.300	Pemeliharaan APILL	Kab. Banjar	Jumlah APILL yang dipelihara	12 buah	Rp121.411.300	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
19		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah laporan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	5 dokumen	Rp125.353.600	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah laporan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	5 dokumen	Rp125.353.600	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
20		Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Kab. Banjar	Jumlah laporan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	5 laporan	Rp150.393.600	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Kab. Banjar	Jumlah laporan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	5 laporan	Rp150.393.600	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
21		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan pelaksanaan Monev fasilitas keselamatan	1 laporan	Rp27.313.600	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan pelaksanaan Monev fasilitas keselamatan	1 laporan	Rp27.313.600	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
22		Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang dipelihara	-	Rp0	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang dipelihara	-	Rp0	Sesuai dengan Simda Integrated 2021

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	Rp7	8	9	10	11	Rp12	13
IV	**Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi**	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Kab. Banjar**	**Persentase Kendaraan wajib uji yang lolos PKB**	**100%**	**Rp765.547.900**	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Kab. Banjar**	**Persentase Kendaraan wajib uji yang lolos PKB**	**100%**	**Rp765.547.900**	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
23		Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Kab. Banjar	Jumlah alat uji PKB baru yang berfungsi baik	-	Rp0	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Kab. Banjar	Jumlah alat uji PKB baru yang berfungsi baik	-	Rp0	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
24		Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Banjar	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji	7000 buah	Rp558.560.700	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Banjar	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji	7000 buah	Rp558.560.700	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
25		Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Banjar	Jumlah gedung uji yang dipelihara	1 Unit	Rp201.750.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Banjar	Jumlah gedung uji yang dipelihara	1 Unit	Rp201.750.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
26		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan Monev kelayakan PKB	1 Laporan	Rp5.237.200	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan Monev kelayakan PKB	1 Laporan	Rp5.237.200	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
V		**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Kab. Banjar**	**Persentase angkutan umum yang beroperasi**	**90%**	**Rp206.793.900**	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Kab. Banjar**	**Persentase angkutan umum yang beroperasi**	**90%**	**Rp206.793.900**	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
27		Perencanaan Transportasi	Kab. Banjar	Jumlah dokumen perencanaan transportasi	-	Rp0	Perencanaan Transportasi	Kab. Banjar	Jumlah dokumen perencanaan transportasi	-	Rp0	Sesuai dengan Simda Integrated 2021

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	Rp7	8	9	10	11	Rp12	13
28		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Kab. Banjar	Jumlah lintasan/jalur trayek angkutan umum	13 Trayek	Rp74.970.400	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Kab. Banjar	Jumlah lintasan/jalur trayek angkutan umum	13 Trayek	Rp74.970.400	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
29		Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan	Kab. Banjar	Jumlah angkutan darat dan sungai yang terlayani perijinan bidang perhubungan	400 Buah	Rp73.488.000	Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan	Kab. Banjar	Jumlah angkutan darat dan sungai yang terlayani perijinan bidang perhubungan	400 Buah	Rp73.488.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
30		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan Monev pelayanan angkutan	1 Laporan	Rp20.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Kab. Banjar	Jumlah laporan Monev pelayanan angkutan	1 Laporan	Rp20.000.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
31		Pemilihan dan Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kab. Banjar	Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan dan penghargaan supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	25 Orang	Rp38.335.500	Pemilihan dan Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kab. Banjar	Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan dan penghargaan supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	25 Orang	Rp38.335.500	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
VI		**Program Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas**	**Kab. Banjar**	**Persentase ketaatan berlalu lintas**	**87%**	**Rp642.583.200**	**Program Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas**	**Kab. Banjar**	**Persentase ketaatan berlalu lintas**	**87%**	**Rp642.583.200**	Sesuai dengan Simda Integrated 2021

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	Rp7	8	9	10	11	Rp12	13
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	30 Orang	Rp67.787.000	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Banjar	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	30 Orang	Rp67.787.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
		Pelatihan Dasar Perhubungan Darat	Kab. Banjar	Jumlah peserta pelatihan dasar perhubungan darat	-	Rp0	Pelatihan Dasar Perhubungan Darat	Kab. Banjar	Jumlah peserta pelatihan dasar perhubungan darat	-	Rp0	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
		Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Banjar	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	100 Orang	Rp27.060.500	Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Banjar	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	100 Orang	Rp27.060.500	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
		Pengendalian dan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Kab. Banjar	Jumlah pelayanan pengamanan jalur, pengawasan dan pengawalan	3 Kegiatan	Rp481.909.100	Pengendalian dan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Kab. Banjar	Jumlah pelayanan pengamanan jalur, pengawasan dan pengawalan	3 Kegiatan	Rp481.909.100	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
		Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Kab. Banjar	Jumlah razia yang dilakukan	22 Kali	Rp51.850.000	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Kab. Banjar	Jumlah razia yang dilakukan	22 Kali	Rp51.850.000	Sesuai dengan Simda Integrated 2021
		Forum LLAJ	Kab. Banjar	Jumlah Laporan kesepakatan forum LLAJ	1 Laporan	Rp13.976.600	Forum LLAJ	Kab. Banjar	Jumlah Laporan kesepakatan forum LLAJ	1 Laporan	Rp13.976.600	Sesuai dengan Simda Integrated 2021

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subjek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan,pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Tahun 2022 tidak dilaksanakan Musrenbang seperti tahun sebelumnya karena kondisi pandemic. Tetapi usulan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. Tidak terdapat usulan masyarakat bidang perhubungan yang terverifikasi untuk tahun pelaksanaan 2022.

Menindak lanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka Dinas Perhubungan akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi unutk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukan ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Program Infrastruktur Konektivitas
2. SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional
3. SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
4. SP.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi
    a. SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
    b. SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
    c. SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan
    d. SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Pembangunan Bidang Perhubungan adalah : **‘Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi’’** yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan kabupaten Banjar lebih tertib, aman dan nyaman, sejalan dengan perwujudan peningkatan akses daerah yang moda transportasinya kurang, khususnya daerah terpencil sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses arus tarnportasi yang lancar, aman dan nyaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran Pembangunan Bidang Perhubungan adalah:

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan;
2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi;
3. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar Keselamatan.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai dengan tupoksi untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang terkait dengan pencapaian Misi 2 yaitu : ***"Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan "***. Tujuan yang akan dicapai adalah Tujuan 2.1 yaitu : "**Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas**". Sasaran yang akan dicapai adalah sasaran 2.1.1 " **Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi**".

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah. RPJMD tahun 2021-2026 ini berusaha diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan strategis guna mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis dalam penyelesaian yang telah dimulai perencanaan dan pelaksanaannya pada Tahun 2022.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS
MISI 2 *Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan*;
Tujuan 2.1 Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
Strategi 2.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan
Kode 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Indikator kinerja : - Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana) - Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi - V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Pehubungan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi

- Pencapaian Keselamatan Pengguna Jalan Keselamatan LLAJ.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Perhubungan.
- Pendayagunaan SDM maupun Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk peningkatan Pendapatan Daerah.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 yaitu sebagai berikut :

TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Rasio Konektivitas		**47,00**	**Rasio**	**Rp9.345.438.000**			**56,67**	**Rasio**	**Rp12.277.276.900**
sasaran 1	**Persentase sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar**	**Kab. Banjar**	**66,57**	**persen**	**Rp970.026.800**			**70,21**	**persen**	**Rp2.017.476.800**
Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	**Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)**	**Kab. Banjar**	**70,08**	**persen**	**Rp629.550.000**			**70,11**	**persen**	**Rp1.363.000.000**
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik**	**Kab. Banjar**	**25,00%**	**persen**	**Rp163.350.000**			**37,50%**	**persen**	**Rp290.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara	Persentase izin trayek angkutan umum	Kab. Banjar	30%	persen	Rp118.350.000	APBD Kab. Banjar		40%	persen	Rp185.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha										
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan operasional angkutan umum	Kab. Banjar	60%	persen	Rp45.000.000	APBD Kab. Banjar		65%	persen	Rp105.000.000
Penetapan Tarif ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	**Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Umum**		**0,00 %**	**persen**	**Rp0**			**100 %**	**persen**	**Rp6.000.000**
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Evaluasi Tarif Angkutan Umum	Kab. Banjar	0%	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		100 %	persen	Rp0
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap peraturan tarif angkutan umum	Kab. Banjar	0%	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		60%	persen	Rp6.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan**		**100 %**	**persen**	**Rp466.200.000**			**100 %**	**persen**	**Rp1.067.000.000**
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Kab. Banjar	100,00	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		100,00	persen	Rp250.000.000
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kedatangan Kendaraan Wajib Uji yang Terregistrasi	Kab. Banjar	76,11	persen	Rp175.000.000	APBD Kab. Banjar		79,04	persen	Rp350.000.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tanda Bukti Lulus Uji *(smart card)*	Kab. Banjar	100,00	persen	Rp150.000.000	APBD Kab. Banjar		100,00	persen	Rp175.000.000
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Bengkel yang mengikuti sosialisasi	Kab. Banjar	30%	persen	Rp56.200.000	APBD Kab. Banjar		35%	persen	Rp62.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Alat Uji yang berfungsi dengan baik	Kab. Banjar	90%	persen	Rp85.000.000	APBD Kab. Banjar		90%	persen	Rp230.000.000
Program 1.2 (LLAJ)	**Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi**		**63%**	**persen**	**Rp340.476.800**			**70%**	**persen**	**Rp654.476.800**
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Tercapainya pemenuhan fasilitas terminal tipe c sesuai standar**		**47%**	**persen**	**Rp256.476.800**			**59%**	**persen**	**Rp261.476.800**
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase rata-rata angkutan umum yang masuk	Kab. Banjar	18%	persen	Rp206.344.200	APBD Kab. Banjar		20%	persen	Rp208.744.200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	terminal per hari									
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase fasilitas terminal tipe c dalam kondisi baik	Kab. Banjar	80%	persen	Rp50.132.600	APBD Kab. Banjar		85%	persen	Rp52.732.600
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi**		**70%**	**persen**	**Rp84.000.000**			**75%**	**persen**	**Rp393.000.000**
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Halte Yang Tersedia	Kab. Banjar	53%	persen	Rp71.000.000	APBD Kab. Banjar		65%	persen	Rp123.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Memenuhi Standar	Kab. Banjar	60%	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		65%	persen	Rp250.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Prasarana Jalan yang Memenuhi Standar	Kab. Banjar	56%	persen	Rp13.000.000	APBD Kab. Banjar		67%	persen	Rp20.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan Jalan yang Memenuhi Standar	Kab. Banjar	60%	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		65%	persen	Rp0
sasaran 2	Persentase penurunan kecelakaan transportasi		**-5,68**	**persen**	**Rp912.706.700**			**-11,36**	**persen**	**Rp1.630.300.100**
Program 1.3 (LLAJ)	**V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar**		**0,4**	**Indeks**	**Rp912.706.700**			**0,39**	**Indeks**	**Rp1.630.300.100**
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar		**0,4**	**Indeks**	**Rp809.456.700**			**0,39**	**Indeks**	**Rp1.376.050.100**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Kabupaten/Kota										
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai kebutuhan	**Kab. Banjar**	100%	persen	Rp127.093.000	APBD Kab. Banjar		100 %	persen	Rp272.397.000
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persentase APILL, pagar pengaman jalan, marka jalan, median jalan yang dipelihara	**Kab. Banjar**	50%	persen	Rp176.513.700	APBD Kab. Banjar		53%	persen	Rp578.653.100
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase uji coba dan sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	**Kab. Banjar**	0	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		100 %	persen	Rp15.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase arus lalu lintas yang lancar	**Kab. Banjar**	0	persen	Rp505.850.000	APBD Kab. Banjar		100 %	persen	Rp510.000.000
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin**		**65%**	**persen**	**Rp75.000.000**			**70%**	**persen**	**Rp90.000.000**
Penetapan kebijakan Tata Kelola Andalalin	Persentase penetapan rekomendasi andalalin yang diajukan	**Kab. Banjar**	100%	persen	**Rp30.000.000**	**APBD Kab. Banjar**		100 %	persen	**Rp35.000.000**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase dokumen andalalin yang di proses	**Kab. Banjar**	100%	persen	Rp30.000.000	**APBD Kab. Banjar**		100 %	persen	Rp30.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Implementasi andalalin sesuai dengan rekomendasi	**Kab. Banjar**	65%	persen	Rp15.000.000	**APBD Kab. Banjar**		70%	persen	Rp25.000.000
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola**		**100 %**	**persen**	**Rp18.250.000**			**100 %**	**persen**	**Rp21.250.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Parkir yang memiliki izin	Kab. Banjar	68%	persen	Rp18.250.000	APBD Kab. Banjar		72%	persen	Rp21.250.000
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Persentase Ketaatan Pengguna Jalan**		**83,33%**	**persen**	**Rp10.000.000**			**84,44%**	**persen**	**Rp143.000.000**
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Pelanggaran Lalu Lintas	Kab. Banjar	16,67 %	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		15,56%	persen	Rp125.000.000
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peserta Sosialisasi yang Memahami Peraturan Lalu Lintas	Kab. Banjar	33%	persen	Rp10.000.000	APBD Kab. Banjar		36%	persen	Rp18.000.000
sasaran 3	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang		**25,63%**	**persen**	**Rp87.173.100**			**27,07%**	**persen**	**Rp635.000.000**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Memenuhi Standar									
Program 2.1 sungai dan Danau	**Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan sertakelaikan kapal**		**30%**	**persen**	**Rp20.000.000**			**50%**	**persen**	**Rp165.000.000**
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	**Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik**		**30%**	**persen**	**Rp20.000.000**			**50%**	**persen**	**Rp65.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase izin operasi angkutan sungai dan danau	**Kab. Banjar**	0%	persen	Rp5.000.000	APBD Kab. Banjar		45%	persen	Rp25.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan	Persentase tingkat operasi kapal harian rata-rata	**Kab. Banjar**	0%	persen	Rp15.000.000	APBD Kab. Banjar		20%	persen	Rp40.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Sungai dan Danau**		**0%**	**persen**	**Rp0**			**100 %**	**persen**	**Rp100.000.000**
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Evaluasi Tarif ASD	**Kab. Banjar**	0%	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		100 %	persen	Rp50.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap peraturan tarif angkutan sungai dan danau	**Kab. Banjar**	0%	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		60%	persen	Rp50.000.000
Program 2.2 sungai dan Danau			**45%**	**persen**	**Rp67.173.100**			**75%**	**persen**	**Rp470.000.000**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan**		**64%**	**persen**	**Rp67.173.100**			**67%**	**persen**	**Rp470.000.000**
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase fasilitas Dermaga/Shelter Sungai dan Danau yang memenuhi standar	Kab. Banjar	55%	persen	Rp30.000.000	APBD Kab. Banjar		64%	persen	Rp160.000.000
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga dan Shelter Sungai dan danau Terbangun Untuk Memenuhi Kebutuhan	Kab. Banjar	69%	persen	Rp0	APBD Kab. Banjar		75%	persen	Rp197.500.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Perencanaan Dermaga dan Shelter ASD yang terpenuhi	Kab. Banjar	100%	persen	Rp32.500.000	APBD Kab. Banjar		100 %	persen	Rp102.500.000
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Frekuensi Kapal yang Sandar di Dermaga	Kab. Banjar	95%	persen	Rp4.673.100	APBD Kab. Banjar		96%	persen	Rp10.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah		80	Indeks	7.375.531.400			82	Indeks	7.994.500.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan**		**100**	**persen**	**Rp54.569.500**			**100**	**persen**	**Rp58.000.000**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Perangkat Daerah	**evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**									
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar	2	Dokumen	13.460.000	APBD Kab. Banjar		2	Dokumen	Rp15.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar	4	Dokumen	10.871.500	APBD Kab. Banjar		4	Dokumen	Rp12.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD (LKJIP, LPPD dan LKPJ	Kab. Banjar	3	Dokumen	5.238.000	APBD Kab. Banjar		3	Dokumen	Rp6.000.000
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar	4	Dokumen	25.000.000	APBD Kab. Banjar		4	Dokumen	25.000.000
Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**100**	**persen**	**Rp6.495.875.000**			**100**	**persen**	**Rp6.724.000.000**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Banjar	12	bulan	5.800.000.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	6.000.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kab. Banjar	12	bulan	678.750.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp700.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif	Terverfikasinya dokumen keuangan dan tersusunnya dokumen	Kab. Banjar	100	persen	0	APBD Kab. Banjar		100	persen	Rp6.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
ikasi Keuangan SKPD	laporan pelaksana kegiatan tepat waktu dan tepat mutu									
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yangsesuai dengan SAP	Kab. Banjar	1	dokumen	17.125.000	APBD Kab. Banjar		1	dokumen	Rp18.000.000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu		**100**	**persen**	0			**100**	**persen**	38.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan BMD perangkat daerah sesuaiidentifikasi kebutuhan BMD	Kab. Banjar	1	Dokumen	0	APBD Kab. Banjar		1	Dokumen	Rp5.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan BMD perangkat Daerahyang berkualitas	Kab. Banjar	12	bulan	0	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp30.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan BMD perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab. Banjar	12	bulan	0	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp3.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**		**100**	**persen**	**Rp20.000.000**			**100**	**persen**	**Rp48.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase ketersediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	**Kab. Banjar**	100	persen	**Rp0**	APBD Kab. Banjar		100	persen	Rp50.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	**Kab. Banjar**	12	Laporan		APBD Kab. Banjar		12	Laporan	Rp32.800.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	**Kab. Banjar**	4	ASN	20.000.000	APBD Kab. Banjar		4	ASN	48.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran**		**100**	**persen**	**Rp321.574.900**			**100**	**persen**	**Rp429.500.000**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jaringan listrik terpelihara dengan baik	Kab. Banjar	12	bulan	3.967.300	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp4.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Banjar	12	bulan	17.916.100	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp20.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga yang terpenuhi	Kab. Banjar	12	bulan	0	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp30.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	Kab. Banjar	12	bulan	31.246.900	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp32.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan	Kab. Banjar	12	bulan	23.825.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp24.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Bahan bacaan surat kabar yang terpenuhi	Kab. Banjar	12	bulan	0	APBD Kab. Banjar		12	bulan	5.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu yang terfasilitasi	Kab. Banjar	12	bulan	13.860.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp14.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kab. Banjar	12	bulan	230.759.600	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp300.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan		100	persen	0			100	persen	Rp150.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	0	unit	0	APBD Kab. Banjar		21	unit	Rp1.200.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	Kab. Banjar	100	persen	0	APBD Kab. Banjar		100	persen	Rp150.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi		**100**	**persen**	**Rp142.927.000**			**100**	**persen**	**Rp145.000.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Banjar	12	bulan	142.927.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp145.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	Kab. Banjar	12	bulan	0	APBD Kab. Banjar		12	bulan	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**persen**	**Rp340.585.000**			**100**	**persen**	**Rp402.000.000**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			2022					2023		
			Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	Kab. Banjar	12	bulan	38.990.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp40.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	Kab. Banjar	12	bulan	254.240.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp280.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik	Kab. Banjar	12	bulan	31.430.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp32.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara dan berfungsinya gedung kantor dengan baik	Kab. Banjar	12	bulan	15.925.000	APBD Kab. Banjar		12	bulan	Rp50.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran tranportasi baik darat dengan didukung fasilitas yang memadai.

Program dan kegiatan Tahun 2022 yang disusun secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Program Pelayaran

Untuk rumusan rencana kerja dan pendanaan SKPD tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi			**Rasio Konektivitas**	**47,00**	**Rasio**	**Rp9.345.438.000**	**56,67**	**Rasio**	**Rp12.277.276.900**
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan	**sasaran 1**	**Persentase sarana dan prasarana transportasi jalan yang memenuhi standar**	**66,57**	**persen**	**Rp970.026.800**	**70,21**	**persen**	**Rp2.017.476.800**
		Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	**Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)**	**70,08**	**persen**	**Rp629.550.000**	**70,11**	**persen**	**Rp1.363.000.000**
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik**	**25,00%**	**persen**	**Rp163.350.000**	**37,50%**	**persen**	**Rp290.000.000**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau	**Persentase izin trayek angkutan umum**	**30%**	**persen**	**Rp118.350.000**	**40%**	**persen**	**Rp185.000.000**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase ketaatan operasional angkutan umum**	**60%**	**persen**	**Rp45.000.000**	**65%**	**persen**	**Rp105.000.000**
		Penetapan Tarif ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	**Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Umum**	**0,00 %**	**persen**	**Rp0**	**100 %**	**persen**	**Rp6.000.000**
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Evaluasi Tarif Angkutan Umum**	**0%**	**persen**	**Rp0**	**100 %**	**persen**	**Rp0**
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketaatan terhadap peraturan tarif angkutan umum**	**0%**	**persen**	**Rp0**	**60%**	**persen**	**Rp6.000.000**
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan**	**100 %**	**persen**	**Rp466.200.000**	**100 %**	**persen**	**Rp1.067.000.000**
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	**Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan**	**100,00**	**persen**	**Rp0**	**100,00**	**persen**	**Rp250.000.000**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase kedatangan Kendaraan Wajib Uji yang Terregistrasi**	**76,11**	**persen**	**Rp175.000.000**	**79,04**	**persen**	**Rp350.000.000**
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Tanda Bukti Lulus Uji *(smart card)***	**100,00**	**persen**	**Rp150.000.000**	**100,00**	**persen**	**Rp175.000.000**
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Bengkel yang mengikuti sosialisasi**	**30%**	**persen**	**Rp56.200.000**	**35%**	**persen**	**Rp62.000.000**
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Alat Uji yang berfungsi dengan baik**	**90%**	**persen**	**Rp85.000.000**	**90%**	**persen**	**Rp230.000.000**
		Program 1.2 (LLAJ)	**Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi**	**63%**	**persen**	**Rp340.476.800**	**70%**	**persen**	**Rp654.476.800**
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Tercapainya pemenuhan fasilitas terminal tipe c sesuai standar**	**47%**	**persen**	**Rp256.476.800**	**59%**	**persen**	**Rp261.476.800**
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	**Persentase rata-rata angkutan umum yang masuk terminal per hari**	**18%**	**persen**	**Rp206.344.200**	**20%**	**persen**	**Rp208.744.200**
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	**Persentase fasilitas terminal tipe c dalam kondisi baik**	**80%**	**persen**	**Rp50.132.600**	**85%**	**persen**	**Rp52.732.600**
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi**	**70%**	**persen**	**Rp84.000.000**	**75%**	**persen**	**Rp393.000.000**
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Halte Yang Tersedia**	**53%**	**persen**	**Rp71.000.000**	**65%**	**persen**	**Rp123.000.000**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Memenuhi Standar	60%	persen	Rp0	65%	persen	Rp250.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Prasarana Jalan yang Memenuhi Standar	56%	persen	Rp13.000.000	67%	persen	Rp20.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan Jalan yang Memenuhi Standar	60%	persen	Rp0	65%	persen	Rp0
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	sasaran 2	Persentase penurunan kecelakaan transportasi	-5,68	persen	Rp912.706.700	-11,36	persen	Rp1.630.300.100
		Program 1.3 (LLAJ)	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,4	Indeks	Rp912.706.700	0,39	Indeks	Rp1.630.300.100
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,4	Indeks	Rp809.456.700	0,39	Indeks	Rp1.376.050.100
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai kebutuhan	100 %	persen	Rp127.093.000	100 %	persen	Rp272.397.000
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persentase APILL, pagar pengaman jalan, marka jalan, median jalan yang dipelihara	50%	persen	Rp176.513.700	53%	persen	Rp578.653.100
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase uji coba dan sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	persen	Rp0	100 %	persen	Rp15.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			yang dilaksanakan						
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase arus lalu lintas yang lancar	0	persen	Rp505.850.000	100 %	persen	Rp510.000.000
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	65%	persen	Rp75.000.000	70%	persen	Rp90.000.000
		Penetapan kebijakan Tata Kelola Andalalin	Persentase penetapan rekomendasi andalalin yang diajukan	100 %	persen	Rp30.000.000	100 %	persen	Rp35.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase dokumen andalalin yang di proses	100 %	persen	Rp30.000.000	100 %	persen	Rp30.000.000
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Implementasi andalalin sesuai dengan rekomendasi	65%	persen	Rp15.000.000	70%	persen	Rp25.000.000
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	100 %	persen	Rp18.250.000	100 %	persen	Rp21.250.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Titik Parkir yang memiliki izin	68%	persen	Rp18.250.000	72%	persen	Rp21.250.000
		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	83,33%	persen	Rp10.000.000	84,44%	persen	Rp143.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Pelanggaran Lalu Lintas	16,67%	persen	Rp0	15,56%	persen	Rp125.000.000
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peserta Sosialisasi yang Memahami Peraturan Lalu Lintas	33%	persen	Rp10.000.000	36%	persen	Rp18.000.000
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar Keselamatan	sasaran 3	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Memenuhi Standar	25,63%	persen	Rp87.173.100	27,07%	persen	Rp635.000.000
		Program 2.1 sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan sertakelaikan kapal	30%	persen	Rp20.000.000	50%	persen	Rp165.000.000
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	30%	persen	Rp20.000.000	50%	persen	Rp65.000.000
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang	Persentase izin operasi angkutan sungai dan danau	0%	persen	Rp5.000.000	45%	persen	Rp25.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat operasi kapal harian rata-rata	0%	persen	Rp15.000.000	20%	persen	Rp40.000.000
		Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Sungai dan Danau	0%	persen	Rp0	100%	persen	Rp100.000.000
		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Evaluasi Tarif ASD	0%	persen	Rp0	100%	persen	Rp50.000.000
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap peraturan tarif angkutan sungai dan danau	0%	persen	Rp0	60%	persen	Rp50.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Program 2.2 sungai dan Danau		**45%**	**persen**	**Rp67.173.100**	**75%**	**persen**	**Rp470.000.000**
		Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan**	**64%**	**persen**	**Rp67.173.100**	**67%**	**persen**	**Rp470.000.000**
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase fasilitas Dermaga/Shelter Sungai dan Danau yang memenuhi standar**	**55%**	**persen**	**Rp30.000.000**	**64%**	**persen**	**Rp160.000.000**
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Dermaga dan Shelter Sungai dan danau Terbangun Untuk Memenuhi Kebutuhan**	**69%**	**persen**	**Rp0**	**75%**	**persen**	**Rp197.500.000**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Perencanaan Dermaga dan Shelter ASD yang terpenuhi**	**100 %**	**persen**	**Rp32.500.000**	**100 %**	**persen**	**Rp102.500.000**
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Persentase Frekuensi Kapal yang Sandar di Dermaga**	**95%**	**persen**	**Rp4.673.100**	**96%**	**persen**	**Rp10.000.000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai IKM Perangkat Daerah**	**80**	**Indeks**	**7.375.531.400**	**82**	**Indeks**	**7.994.500.000**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**	**100**	**persen**	**Rp54.569.500**	**100**	**persen**	**Rp58.000.000**
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**	**2**	**Dokumen**	**13.460.000**	**2**	**Dokumen**	**Rp15.000.000**
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	**Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**	**4**	**Dokumen**	**10.871.500**	**4**	**Dokumen**	**Rp12.000.000**
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD (LKJIP, LPPD dan LKPJ**	**3**	**Dokumen**	**5.238.000**	**3**	**Dokumen**	**Rp6.000.000**
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**	**4**	**Dokumen**	**25.000.000**	**4**	**Dokumen**	**25.000.000**
		Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**Rp6.495.875.000**	**100**	**persen**	**Rp6.724.000.000**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**12**	**bulan**	**5.800.000.000**	**12**	**bulan**	**6.000.000.000**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran**	**12**	**bulan**	**678.750.000**	**12**	**bulan**	**Rp700.000.000**
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi	**Terverfikasinya dokumen keuangan dan tersusunnya dokumen**	**100**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**Rp6.000.000**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		kasi Keuangan SKPD	**laporan pelaksana kegiatan tepat waktu dan tepat mutu**						
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yangsesuai dengan SAP**	**1**	**dokumen**	**17.125.000**	**1**	**dokumen**	**Rp18.000.000**
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu**	**100**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**38.000.000**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Tersusunnya dokumen perencanaan BMD perangkat daerah sesuaiidentifikasi kebutuhan BMD**	**1**	**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**Rp5.000.000**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Penatausahaan BMD perangkat Daerahyang berkualitas**	**12**	**bulan**	**0**	**12**	**bulan**	**Rp30.000.000**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Tersusunnya dokumen pelaporan BMD perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu**	**12**	**bulan**	**0**	**12**	**bulan**	**Rp3.000.000**
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**	**100**	**persen**	**Rp20.000.000**	**100**	**persen**	**Rp48.000.000**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	**Persentase ketersediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya**	**100**	**persen**	**Rp0**	**100**	**persen**	**Rp50.000.000**
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	**Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian**	**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**	**Rp32.800.000**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			kinerja pegawai						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	4	ASN	20.000.000	4	ASN	48.000.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100	persen	Rp321.574.900	100	persen	Rp429.500.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jaringan listrik terpelihara dengan baik	12	bulan	3.967.300	12	bulan	Rp4.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	17.916.100	12	bulan	Rp20.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga yang terpenuhi	12	bulan	0	12	bulan	Rp30.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	12	bulan	31.246.900	12	bulan	Rp32.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan	12	bulan	23.825.000	12	bulan	Rp24.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Bahan bacaan surat kabar yang terpenuhi	12	bulan	0	12	bulan	5.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu yang terfasilitasi	12	bulan	13.860.000	12	bulan	Rp14.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	12	bulan	230.759.600	12	bulan	Rp300.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	persen	0	100	persen	Rp150.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	unit	0	21	unit	Rp1.200.000.000
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	100	persen	0	100	persen	Rp150.000.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	persen	Rp142.927.000	100	persen	Rp145.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	142.927.000	12	bulan	Rp145.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	0	12	bulan	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	Rp340.585.000	100	persen	Rp402.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	12	bulan	38.990.000	12	bulan	Rp40.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	12	bulan	254.240.000	12	bulan	Rp280.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan Perhubungan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2022			2023		
				Target	satuan	Rp.	Target	satuan	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Operasional atau Lapangan	**berfungsi dengan baik**						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik**	**12**	**bulan**	**31.430.000**	**12**	**bulan**	**Rp32.000.000**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Terpelihara dan berfungsinya gedung kantor dengan baik**	**12**	**bulan**	**15.925.000**	**12**	**bulan**	**Rp50.000.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2022 merupakan agenda tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 serta priortias pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Banjar 2022

Adapun catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

1. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya seandainya ketersedian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan adalah meningkatkan ketersedian sarana dan prasarana transportasi jalan untuk meningkatkan konektivitas darat.
2. Melakukakan pendataan terhadap fasilitas perhubungan yang tersedia.

Selanjutnya dokumen Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mungkin dapat mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terlebih dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahap penyusunan Renja-PD meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja-PD. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan hasil penyempurnaan Rancangan Akhir selanjutnya menjadi dokumen Renja-PD yang definitif

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan PD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Banjar;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2022;

   b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022;

   c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Berisi kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap RKPD

Berisi uraian mengenai :

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Berisi tentang penjelasan atas adanya ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V P E N U T U P

Berisi uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yang ada pada dokumen Renstra 2021-2026 mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS".:

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

MAJU :

- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagaimenjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
- Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

MANDIRI :

- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.

- Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

AGAMIS :

- Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.,

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mendukung Misi yang ke Empat pada RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG AMANAH, BAIK, BERSIH DAN EFEKTIF.Total anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2021 sebesar Rp.13.237.473.461,- dengan perincian Belanja Operasional sebesar Rp 13.041.507.061,- dan Belanja Modal sebesar Rp.195.966.400,-.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar didasarkan pada Capaian Renstra Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.5	2.78	111.20	Berhasil
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80	75	93.75	Cukup Berhasil

❖ Sumber : Lkjlp DKISP tahun 2020

Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia, Indeks SPBE Kabupaten Banjar Tahun 2020 sebesar 2.78 (Predikat Baik) dari yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2020 sebesar 2.50. Dengan demikian tingkat capaian target sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah 111.20% dengan kategori capaian ***sangat Berhasil***.

Sedangkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2020, Perkiraan Capaian Renstra PD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja PD sampai dengan Maret 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12(11/10)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK yang tersusun	dok	14	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00
				dok		2	1.00	50.00	2	1.00	50.00

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
			Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	dok	1	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terverivikasi	dok	14	2	1.00	50.00	2	1.00	50.00
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan hasil monitor triwulan (RFK, Kinerja)	laporan	14	2	1.00	50.00	2	1.00	50.00
	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	30	5	4.00	80.00	5	4.00	80.00
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya Gaji, tambahan penghasilan dan TPP	ASN	26	26	0.00	0.00	26	0.00	0.00
	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	dok	6	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
	2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m/ Kegiata n/Sub kegiata n (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Targe t Renja Tahu n 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaia n 2020		Realisasi	Capaian
	2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mangikuti Bimtek	org	120	20	0.00	0.00	20	0.00	0.00
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan	bln	60	12	6.00	50.00	12	6.00	50.00
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terbeli	unit	15	3	2.00	66.67	3	2.00	66.67
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	12	6.00	50.00	12	6.00	50.00
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	12	3.00	25.00	12	3.00	25.00
	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan	60	12	9.00	75.00	12	9.00	75.00
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	60	12	6.00	50.00	12	6.00	50.00
	2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
	2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah set mebeleir yang terbeli	set	12	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00
	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	bulan	60	12	6.00	50.00	12	6.00	50.00
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	60	12	9.00	75.00	12	9.00	75.00
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	bulan	60	12	9.00	75.00	12	9.00	75.00
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					0.00			0.00	
	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	unit	6	1	0.50	50.00	1	0.50	50.00
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	bulan	60	12	6.00	50.00	12	6.00	50.00

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainya	bulan	60	12	6.00	50.00	12	6.00	50.00
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	ruang an	23	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00
84	**2.16.02**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**									
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Isu publik yang dikelola	buah	12	N/A		0.00	N/A		0.00
			Jumlah peserta bimbingan teknis pengelola SP4N-Lapor pada SKPD/Kecamatan	orang	356	N/A		0.00	N/A		0.00
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah pameran / expo yang diikuti	kali	6	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
			Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan	kali	6	1		0.00	1		0.00
			Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi	kali	12	4		0.00	4		0.00

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
			Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan								
			Jumlah sosialisasi Lapor yang dilaksanakan	kali	6	1		0.00	1		0.00
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Berita Pembangunan yang dipublikasikan lewat media Radio Milik daerah	berita	5250	1050	420.00	40.00	1050	420.00	40.00
			Jumlah Berita Pembangunan yang disebarluaskan melalui Info Publik Media Center	berita	6800	1360		0.00	1360		0.00
			Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang ditayangkan lewat Media Visual milik daerah	berita	5135	1027		0.00	1027		0.00
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah peserta bimbingan teknis pengelola SP4N-Lapor pada SKPD/Kecamatan	orang		60		0.00			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah baleho yang dicetak	m2	23040	4608	2,304.00	50.00	4608	2,304.00	50.00
			Jumlah Konfrensi Pers yang dilaksanakan	kali	60	12		0.00	12		0.00
			Jumlah laporan Analis kajian tranding Topik Media	laporan	60	12		0.00	12		0.00
			Jumlah Media yang bekerjasama	media	30	30		0.00	30		0.00
			Jumlah Surat kabar harian yang disebarkan	eks	5400000	1080000		0.00	1080000		0.00
85	**2.16.03**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Sistem elektronik yang telah memanfaatkan Sertifikat elektronik								
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Informasi dan Data daerah yang diamankan								
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	subdomain	34	34	34.00	100.00	34	34.00	100.00

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1, Jumlah Perangkat daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	opd	54	54	34.00	62.96	54	34.00	62.96
			2. Tingkat Realibilitas akses internet	hari	1	1		0.00	1		0.00
			3. Tingkat Ketersediaan akses internet (sampai level desa)	opd	54	54	54.00	100.00	54	54.00	100.00
			4. Besarnya bandwith akses internet	Mbps	300	300	300.00	100.00	300	300.00	100.00
			5. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	opd	33	33	33.00	100.00	33	33.00	100.00
			6. Jumlah CCTV yang dipasang	Lokasi	15	5	5.00	100.00	5	5.00	100.00
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan Bidang TIK	dok	6	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00
	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah SKPD yang menjadi objek pentest	skpd	34	15	10.00	66.67	15	10.00	66.67
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun/ dikembangkan	aplikasi	8	2	2.00	100.00	2	2.00	100.00
			Jumlah aplikasi khusus yang diimplementasikan didaerah	aplikasi	8	2		0.00	2		0.00
			Jumlah aplikasi umum yang diimplementasikan didaerah	aplikasi	8	3		0.00	3		0.00
			Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber terbuka	aplikasi	8	2		0.00	2		0.00

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	SKPD							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
101	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**									
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**									
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah peserta FGD pengumpulan data statistik sektoral	org	500	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	laporan	6	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DKISPTahun 2021 s.d. Tahun 2026)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Capaian 2020		Realisasi	Capaian
102	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**									
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah koordinasi persandian yang dilaksanakan	kali		2	1.00	50.00	2	1.00	50.00

- Sumber : Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian kabupaten Banjar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tahun 2022 merupakan tahun kedua masa periode RPJMD, untuk menghitung analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2022 diperlukan data valid dari realisasi kinerja tahun 2020, sampai dengan Rancangan Akhir Rencana kerja ini disusun, telah dihitung realisasi kinerja s/d bulan Juli 2021 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2020.

Adapun pada tahun 2020 Dinas Kominfo melaksanakan 8 program dan 29 kegiatan. Capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut:

Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki capaian kinerja 99,65%.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp. 10,982,985,456,- dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp. 10,028,413,315,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,833,213,193,- (98.05%).
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik sesuai target. Bila dikaitkan dengan Target sasaran RPJMD yang dapat dicapai pada tahun 2020 yaitu :

Indikator Sasaran:

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik

Indonesia, Indeks SPBE Kabupaten Banjar Tahun 2020 sebesar 2,78 (Predikat Baik) dari yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2020 sebesar 2.50. Dengan demikian tingkat capaian target sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah 111.20% dengan kategori capaian ***sangat tinggi***. Namun hal itu dirasa masih belum cukup, Pemerintah Kabupaten Banjar tetap merasa perlu untuk meningkatkan indeks SPBE hingga 2.80 pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Rekapitulasi analisis pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Dokumen PK yang tersusun			dok	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun			dok	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun			dok	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Jumlah dokumen perencanaan yang terverivikasi			dok	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah Laporan hasil monitor triwulan (RFK, Kinerja)			laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ SKPD yang terverivikasi			dok	26	26	26	26	26	26	26	26	
					6	6	6	6	6	6	6	6	
	terbayarnya Gaji, tambahan penghasilan dan TPP			ASN	26	26	26	26	26	26	26	26	
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun			dok	120	120	120	120	120	120	120	120	
	jumlah peserta yang mengikuti Bimtek			org	60	60	60	60	60	60	60	60	
					15	15	15	15	15	15	15	15	
	tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan			bln	60	60	60	60	60	60	60	60	
	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terbeli			unit	60	60	60	60	60	60	60	60	
	tersedianya alat tulis kantor			bulan	60	60	60	60	60	60	60	60	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	tersedianya barang cetakan dan penggandaan			bulan	60	60	60	60	60	60	60	60	
	tersedianya makanan dan minuman			bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah			bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	jumlah set mebeleir yang terbeli			set	60	60	60	60	60	60	60	60	
					60	60	60	60	60	60	60	60	
	tersedianya jasa surat menyurat			bulan	60	60	60	60	60	60	60	60	
	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran			bulan	6	6	6	6	6	6	6	6	
					60	60	60	60	60	60	60	60	
	jumlah mobil jabatan yang dipelihara			unit	60	60	60	60	60	60	60	60	
	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional			bulan	23	23	23	23	23	23	23	23	
	terpeliharanya peralatan dan mesin lainya			bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
	jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara			ruangan	11	11	11	11	11	11	11	11	
					12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Isu publik yang dikelola			buah	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah peserta bimbingan teknis pengelola SP4N-Lapor pada SKPD/Kecamatan			orang	6	6	6	6	6	6	6	6	
	jumlah pameran / expo yang diikuti			kali	12	12	12	12	12	12	12	12	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan			kali	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan			kali	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	
	Jumlah sosialisasi Lapor yang dilaksanakan			kali	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	
	Jumlah Berita Pembangunan yang dipublikasikan lewat media Radio Milik daerah			berita	5135	5135	5135	5135	5135	5135	5135	5135	
	Jumlah Berita Pembangunan yang disebarluaskan melalui Info Publik Media Center			berita	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	
	Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang ditayangkan lewat Media Visual milik daerah			berita	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	
	Jumlah baleho yang dicetak			m2	60	60	60	60	60	60	60	60	
	Jumlah Konfrensi Pers yang dilaksanakan			kali	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah laporan Analis kajian tranding Topik Media			laporan	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	5400000	
	Jumlah Media yang bekerjasama			media	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Surat kabar harian yang disebarkan			eks	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas Subner Daya komunikasi Publik			keg	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Kelompok Informasi yang diberdayakan			kelompok	6	6	6	6	6	6	6	6	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Sistem elektronik yang telah memanfaatkan Sertifikat elektronik				34	34	34	34	34	34	34	34	
	Persentase Informasi dan Data daerah yang diamankan				54	54	54	54	54	54	54	54	
	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola			subdomain	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1, Jumlah Perangkat daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah			opd	54	54	54	54	54	54	54	54	
	2. Tingkat Realibilitas akses internet			hari	300	300	300	300	300	300	300	300	
	3. Tingkat Ketersediaan akses internet (sampai level desa)			opd	33	33	33	33	33	33	33	33	
	4. Besarnya bandwith akses internet			Mbps	15	15	15	15	15	15	15	15	
	5. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas			opd	33	33	33	33	33	33	33	33	
	6. Jumlah CCTV yang dipasang			Lokasi	5	5	5	5	5	5	5	5	
					6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah peraturan Biudang TIK			dok	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah SKPD yang menjadi objek pentest			skpd	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah data yang dapat berbagi pakai			data	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Data yang dimiliki oleh pemerintah Daerah			data	108	108	108	108	108	108	108	108	
	Jumlah data yangdiperbaharui sesuai dengan siklus jenis datanya			data	2	2	2	2	2	2	2	2	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun/ dikembangkan			aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah aplikasi khusus yang diimplementasikan didaerah			aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah aplikasi umum yang diimplementasikan didaerah			aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber terbuka			aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah seluruh apliaksi yang dikembangkan oleh daerah dan menjadi milik pemerintah daerah			aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen evaluasi dan Pelaporan pengembangan Smart City			SKPD	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah ASN pengelola TIK			Aparatur	N/A	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah ASN pengelola TIK tersertifikasi Kompetensi			Aparatur	N/A	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Dokumen Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			Dok	N/A	1	1	1	1	1	1	1	
	Rapat Koordinasi			Kali	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah peserta FGD pengumpulan data statistik sektoral			org	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah			laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Dokumen Perencanaan Induk (RENDUK) KAMI dan Jaring Komunikasi Sandi JKS) Pemda			Dok	N/A	1	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi di Bidang Keamanan Informasi			aparatur	N/A	5	5	5	0	5	5	5	
	jumlah koordinasi persandian yang dilaksanakan			kali									
	Jumlah SKPD yang menerima layanan keamanan Informasi				N/A	5	5	5	0	5	5	5	
	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi				N/A	2	2	2		2	2	2	

Renja Diskominfo

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Uraian dari isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar antara lain:

1. **Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD**

   Layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu Meningkatnyal Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan Sasaran Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah.

   Hal kritis terkait pelayanan PD antara lain:

   a. Penyediaan sarana prasarana penyebarluasan informasi masih terkendala letak geografis terutama untuk pancaran Radio Swara Banjar belum menjangkau wilayah pelosok Kabupaten Banjar.
   b. Untuk publikasi melalui media cetak dan media luar ruang, penambahan volume berpengaruh pada anggaran yang tersedia, alternatifnya menggunakan media online. Namun juga terkendala heterogenitas masyarakat di Kabupaten Banjar.

2. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih banyaknya pelayanan publik belum memanfaatkan teknologi informasi;
2. Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat.

Selain permasalahan yang ada terdapat hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD antara lain:

1. Distribusi dan integrasi sistem aplikasi dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
2. Belum meratanya kemampuan dan prasarana TIK masyarakat;

3. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD**

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

1. Globalisasi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi komunikasi publik
4. Belum optimalnya pengelolaan analisa informasi komunikasi publik dan pengelolaan opini aspirasi publik
5. Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Banjar dengan website Perangkat Daerah, PPID dan Media Center secara terintegrasi, menyeluruh dan dinamis
6. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

7. Ketersediaan Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata
8. Distribusi dan integrasi aplikasi dalam menerapkan *E-government* menuju optimalisasi interoperabilitas
9. Minimnya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum
10. Kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi
11. Belum adanya *Disaster Recovery Plan* dan Jaminan keamanan sistem informasi pada instansi Pemerintah
12. Penyediaan data daerah dan statistik sektoral yang akurat dan akuntabel belum optimal.

Sedangkan peluang yang dapat diraih oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan TIK;
2. Regulasi/peraturan perundangan yang mendukung pengembangan komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan *Open Source;*
3. Ditetapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
4. Ditetapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Permandagri Nomor 98 Tahun 2018 sebagai landasan pengelolaan Big Data;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses pelayanan;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada di masyarakat dan partisipasi pemanfaatannya;
7. Berkembangnya Lembaga atau institusi pendidikan di Kabupaten Banjar yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika;
8. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk didayagunakan;
9. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM;
10. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
11. Penerapan fungsi *Government Public Relation* (GPR);
12. Kebutuhan penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
13. Penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri;
14. Penyelenggaraan persandian berbasis TIK untuk keamanan informasi;
15. Sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah;

16. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.

4. Formulasi isi-isu pentingberupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya
2. Implementasi *Smart City* pada semua perangkat daerah dan unit kerja lainnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan
3. Pengelolaan data dan statistik daerah melalui *Big Data Analitics*
4. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis IT;
5. Penguatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengelolaan komunikasi publik
6. Peningkatan SDM pegawai dan masyarakat di bidang komunikasi dan informati;
7. Menguatkan regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi;
8. Mengembangkan perangkat teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan SKPD dan masyarakat;
9. Mengoptimalkan keamanan informasi dan persandian untuk meminimalkan kerusakan data dari kejahatan dunia maya;

2.4. Review terhadap RKPD

Kebutuhan anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 untuk mendukung 5 program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan sebesar Rp. 12.846.646.860,- jumlah tersebut telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD 2022,. Adapun Review terhadap RKPD tahun 2022 secara detail dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
83	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK yang tersusun	dok	1	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK yang tersusun	dok	1	19,999,800	
		Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	Dok	2			Jumlah Dokumen	Dok	2		

Ruang Dinkominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
							Renja yang tersusun				
		Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	dok	1			Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	dok	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terverivikasi	dok	2	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifvikasi	dok	2	19,982,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan hasil monitor triwulan (RFK, Kinerja)	lapora n	2	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan hasil monitor triwulan (RFK. Kinerja)	lapora n	2	19,999,900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ SKPD yang terverivikasi	Jumla h Doku men Evalua si Kinerj a Peran gkat Daera h	5	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ SKPD yang terverivikasi	Jumla h Doku men Evalua si Kinerj a Peran gkat Daera h	5	9,998,700	

Renja Dinkominfo

	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya Gaji, tambahan penghasilan dan TPP	ASN	26		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya Gaji, tambahan penghasilan dan TPP	ASN	26	3,478,690,108	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	dok	1	12,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	dok	1	11,999,800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	org	20	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	org	20	40,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi Listrik / penerangan	bln	12	12,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi Listrik / penerangan	bln	12	11,994,900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terbeli	unit	3	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan Gedung	unit	3	29,959,000	

Kraja Dinkominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
							kantor yang terbeli				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	85,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	32,382,800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	36,800,912	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	36,708,900	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan	12	7,250,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan	12	7,250,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	12	409,840,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	12	376,908,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Mebel	jumlah set mebeleir yang terbeli	set	5	20,000,000	Pengadaan Mebel	jumlah set mebeleir yang terbeli	set	5	17,350,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					

Renja Diskominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	9,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	9,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	190,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	189,983,052	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	bulan	12	2,055,570,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	bulan	12	2,067,720,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	unit	1	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	unit	1	38,380,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	bulan	12	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	terlaksanaya pemeliharaan kendaraan	bulan	12	59,833,000	

Renja Diklatmfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
						Operasional atau Lapangan	dinas operasional				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainya	bulan	12	21,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainya	bulan	12	20,960,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	ruangan	11	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	ruangan	11	53,000,000	
84	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah isu publik yang dikelola	buah	5	5,000,000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	N/A	buah	5	4,995,000	
		Jumlah peserta bimbingan teknis pengelola SP4N-Lapor pada SKPD/Kecamatan	orang	65			N/A	orang	65		
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah pameran / expo yang diikuti	kali	1	30,625,103	Pengelolaan Konten dan Perencanaan	jumlah pameran /	kali	1	30,654,300	

Ruja Dinkominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
						Media Komunikasi Publik	expo yang diikuti				
		Jumlah Permintaan Informasi yang dilayani	permohonan	10				permohonan	10		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelola PPID pada SKPD / Kecamatan	orang	60				orang	60		
		Jumlah Sangketa Informasi yang diselesaikan	kasus	2				kasus	2		
		Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan	kali	1			Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan	kali	1		
		Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan	kali	4			Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan	kali	4		
		Jumlah sosialisasi Lapor yang dilaksanakan	kali	1			Jumlah sosialisasi Lapor yang	kali	1		

Renja Dinkominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
		informasi pemerintah					kan melalui saluran informasi pemerintah				
		Jumlah Majalah yang diterbitkan	eks	2800			Jumlah Majalah yang diterbitkan	eks	2800		
		Jumlah Media Luar Ruang	m2	4000			Jumlah Media Luar Ruang	m2	4000		
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah peserta bimbingan teknis pengelola SP4N-Lapor pada SKPD/Kecamatan	orang	60	5,000,000	Pelayanan Informasi Publik		orang	60	5,272,000	
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Forum diskusi Kepala Daerah dengan Media Massa / Jurnalis Banjar / Ormas	kali	12	2,750,000,000	Layanan Hubungan Media	Jumlah baleho yang dicetak	kali	12	3,616,068,000	
		Jumlah Laporan Pemantauan / Intelegen Media	dok	12			Jumlah Konfrensi Pers yang	dok	12		

Renja Diskominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
							dilaksanakan				
		Jumlah Media Massa yang Bekerjasama	media	65			Jumlah laporan Analis kajian tranding Topik Media	media	65		
		Jumlah Publikasi di Media Massa / Siaran Pers	terbitan	2800			Jumlah Media yang bekerjasama	terbitan	2800		
		Jumlah Surat Kabar / Majalah yang disebarkan Ruang Pers yang dikelola	eks	1080000			Jumlah Surat kabar harian yang disebarkan	eks	1080000		
85	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Sistem elektronik yang telah memanfaatkan Sertifikat elektronik				**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Sistem elektronik yang telah memanfaatkan Sertifikat elektronik				
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Data daerah yang diamankan				**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup**	Persentase Informasi dan Data daerah yang diamankan				

Renja Diskominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	subdo main	34	75,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	subdo main	34	75,000,000	
		Jumlah Kegiatan (Event) pemerintah daerah berskala nasional dan internasional	keglat an	1				kegiat an	1		
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki website yang sesuai standar	opd	46				opd	46		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1, Jumlah Perangkat daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	opd	54	1,641,610,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1, Jumlah Perangkat daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	opd	54	1,182,077,000	

Renja Dinkominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come)/Kegiat an (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
		2. Tingkat Reallbilitas akses internet	hari	1			2. Tingkat Reallbilitas akses internet	hari	1		
		3. Tingkat Ketersediaan akses internet (sampai level desa)	opd	54			3. Tingkat Ketersediaa n akses Internet (sampai level desa)	opd	54		
		4. Besarnya bandwith akses Internet	Mbps	500			4. Besarnya bandwith akses Internet	Mbps	500		
		5. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	opd	33			5. Jumlah perangkat daerah yang menggunak an akses Internet yang berkualitas	opd	33		
		6. Jumlah CCTV yang dipasang	Lokasi	5			6. Jumlah CCTV yang dipasang	Lokasi	5		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					

Ranja Dinkominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Rapat koordinasi Keamanan Informasi	kali	4	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah SKPD yang menjadi objek pentest	kali	4	8,000,000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun/ dikembangkan	aplikasi	2	5,000,000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun/ dikembangkan	aplikasi	2	8,000,000	
		Jumlah aplikasi khusus yang diimplementasikan didaerah	aplikasi	2			Jumlah aplikasi khusus yang diimplementasikan didaerah	aplikasi	2		
		Jumlah aplikasi umum yang diimplementasikan didaerah	aplikasi	3			Jumlah aplikasi umum yang diimplementasikan didaerah	aplikasi	3		
		Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber terbuka	aplikasi	2			Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber terbuka	aplikasi	2		

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
		Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber tertutup	aplikasi	2			Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber tertutup	aplikasi	2		
		Jumlah seluruh apliaksi yang dikembangkan oleh daerah dan menjadi milik pemerintah daerah	aplikasi	2			Jumlah seluruh apliaksi yang dikembangkan oleh daerah dan menjadi milik pemerintah daerah	aplikasi	2		
		tersedianya dokumen proses bisnis untuk mendukung layanan SPBE	dok	1			tersedianya dokumen proses bisnis untuk mendukung layanan SPBE	dok	1		
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen evaluasi dan Pelaporan pengembangan Smart City	kegiatan	2	148,500,000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen evaluasi dan Pelaporan pengemban	kegiatan	2	214,480,400	

Kenja Diskominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
							gan Smart City				
		Jumlah perangkat daerah yang menginplementasikan inovasi yang mendukung smart city	SKPD	10			Jumlah perangkat daerah yang menginplementasikan inovasi yang mendukung smart city	SKPD	10		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	dok	1	8,187,270,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	dok	1	8,179,200	
		Rapat Koordinasi	kali	2			Rapat Koordinasi	kali	2		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
1.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					

Ruang Dinkominfo

	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah peserta FGD pengumpulan data statistik sektoral	org	34	45,556,100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah peserta FGD pengumpulan data statistik sektoral	org	34	45,556,100	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	laporan	1	24,443,900	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	laporan	1	24,443,900	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
102	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					

Renja Diskominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebuluhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (6/7)	10	11
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Perencanaan Induk (RENDUK) KAMI dan JKS Pemda	dok	2	10,000,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Perencanaan Induk (RENDUK) KAMI dan Jaring Komunikasi Sandi JKS) Pemda	dok	2	9,993,800	
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi pemerintah daerah Kabupaten / kota	Jumlah Aparatur yang mendapatkan peningkatan Kompetensi di Bidang Keamanan Informasi	org	2	10,000,000	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya kea nanan Informasi pemerintah daerah Kabupaten / kota	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan komperensi di Bidang Keamanan Informasi	org	2	9,962,800	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah SKPD yang telah menerima Literasi Keamanan Informasi yang berbasis elektronik dan non electronic	SKPD	5	15,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah koordinasi persandian yang dilaksanakan	SKPD	5	14,944,400	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SKPD yang menerima Layanan	skpd	5	15,000,000	Penyediaan Layanankeamanan Informasi Pemerintah	Jumlah SKPD yang menerima layanan	skpd	5	14,992,000	

Renja Diskominfo

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikif (Rp)	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9 (8/7)	10	11
		Keamanan Informasi				Daerah kabupaten / kota	keamanan Informasi				
	Penetapan Pola Hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten / Kota					**Penetapan Pola Hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten / Kota**					
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	keg	2	5,455,575	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Operasional Isasi Jaring Komunikasi Sandi	keg	2	6,403,800	
					16,081,921,590					**12,846,646,860**	

Sumber : DKISP

Renja Diskominfo

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bahwa sasaran, arah kebijakan dan stretegi nasional bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

a. Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional

Tabel 3.1.
Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional

	Indonesia Digital	Pemerintah Digital
Sasaran Transformasi Digital	• Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital. • 5 fokus pembangunan yaitu manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukhanham • Antara lain pada layanan kesehatan dan pendidikan, layanan keuangan (fintech), layanan pemerintah (digital government), layanan mobilitas, pembangunan rendah karbon, infrastruktur generasi digital, kerjasama pemerintah dan badan usaha, smart city, smart agriculture • Lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bisnis dan R&D.	• Penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik • Bagi masyarakat dan bisnis, ini berarti fleksibilitas yang lebih besar (tidak kaku), cara yang lebih sederhana bila berurusan dengan pemerintah. • Layanan tidak hanya sekedar tersedia *online*, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisnis (berdasarkan *Big Data*). Layanan lebih bersifat pribadi, terfokus.
Arah Kebijakan	• Meengembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, R&D, infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembage yang mendukung. • Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasi sistem transfomasi digital secara nasional • Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan Big Data • Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat	

b. Strategi Nasional

Tabel 3.2.
Strategi Nasional

	Penyiapan Layanan Digital (Enabling Environment)	Pemenuhan Layanan Digital	Pengelolaan Big Data
Strategi Transformasi Digital	• Menyiapkan aturan perundangan tentang Transformasi Digital • Menyiapkan Lembaga yang khusus mengkoordinasikan Pelaksanaan Transformasi Digital yaitu Dewan Transformasi Digital • Membangun jaringan dan infrastruktur pendukung • Membangun sistem pendidikan melek digital • Meningkatkan kapasitas SDM dalam keahlian digital • Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital	• Menerapkan aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital • Integrasi semua sistem digital yang ada di pemerintahan ke dalam satu sistem • Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital	• Meneliti sumber-sumber Big Data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta • Membangun sumber-sumber Big Data • Mengembangkan kemampuan Analisa Big Data • Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi • Menjamin kemanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha

c. Program Prioritas Nasional

Tabel 3.3.
Program Prioritas Nasional

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
PP. Transformasi Digital			
	1. Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK 2. Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK	1. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi 2. Persentase pengguna internet 3. Proporsi jumlah pelanggan *fixed broadband* 4. Proporsi populasi yang dijangkau *mobile broadband* 5. Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	
KP 1. Penuntasan infrastruktur TIK	Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di desa	1. Persentase desa *blank spot* yang mendapatkan layanan telekomunikasi	1. Pengembangan infrastruktur pitalebar

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
		2. Persentase penyediaan satelit multifungsi 3. Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik hingga kecamatan 4. Kecepatan internet kabel (*fixed broadband*) dan kecepatan internet seluler (*mobile broadband*) (Mbps) 5. Persentase terlaksananya penyiaran digital melalui *Analog Switch Off*	2. Pengembangan infrastruktur penyiaran 3. Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan
KP 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	1. Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet 2. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor pertumbuhan ekonomi strategis	1. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi 2. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi 3. Jumlah petani dan nelayan yang bermitra dengan layanan *online* (orang) – kumulatif 4. Persentase keterpaduan aplikasi umum SPBE 5. Persentase sekolah (SMA dan SMK) yang terlayani akses telekomunikasi	1. Pemanfaatan TIK layanan pemerintah 2. Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha
KP 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Meningkatnya daya saing industri dan SDM TIK dalam negeri	1. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital 2. Jumlah UMKM yang menjalani bisnis *online* yang mendapatkan peningkatan kapasitas 3. Persentase integrasi data pemerintah 4. Persentase pengembangan platform *Big Data* Nasional	1. Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi 2. Pengembangan literasi dan keahlian TIK 3. Pengembangan dan fasilitasi industri TIK

Mengacu pada sasaran, arah kebijakan dan strategi nasional program tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar dan permasalahan yang

akan dituntaskan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi;

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, sasaran jangka menengah rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis dapat teridentifikasikan isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya;
b. Penyesuaian Rencana Induk *Smart City* dan Rencana Induk ICT dengan RPJMD tahun 2021-2026;

c. implementasi *smart city* pada semua perangkat daerah dan unit kerja lainnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
d. Pengelolaan data dan statistik daerah melalui *Big Data Analitics;*
e. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis IT;
f. Penguatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengelolaan komunikasi publik;
g. Peningkatan SDM pegawai dan masyarakat di bidang komunikasi dan informati;
h. Menguatkan regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi;
i. Mengembangkan perangkat teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan SKPD dan masyarakat;
j. Mengoptimalkan keamanan informasi dan persandian untuk meminimalkan kerusakan data dari kejahatan dunia maya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, Tujuandan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA(%)
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Amanah , Baik,Bersih, dan Efektif	Berkembangnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.50

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2021 mencakup 5 Program , 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, yaitu:

1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,** meliputi kegiatan:

1.1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

1.2.1. Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

1.3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

1.4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasii dan Konsultasi SKPD

1.5. **Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**. Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

1.5.1. Pengadaan Mebel

1.6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

1.7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.4. Pemeliharaan/Rehanilitasi Sarana atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK,** meliputi kegiatan:

2.1. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** Kegiatan ini meliputi sub Kegiatan :

2.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.1.3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.1.4. Pelayanan Informasi Publik
2.1.5. Layanan Hubungan Media

3) **PROGRAM APLILKASI INFORMATIKA,** meliputi kegiatan:

3.1. **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**, Kegiatan ini meliputi Sub Kegiatan :

3.1.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

3.2. **Pengelolaan e-government Di Lingkung Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPengkajian dan pengembangan Keamanan Informasi dan Persandian Daerah**, kegiatan ini meliputi Sub kegiatan :

3.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

3.2.2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3.2.3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

3.2.4. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4) **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL,** meliputi kegiatan :

4.1. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**, Kegiatan ini meliputi Sub Kegiatan :

4.1.1. Koordinasi dan Sinkroniasasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminiasi Data Statistik Sektoral

4.1.2. Membangun Metadata Statistik Sektoral

5) **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**, meliputi kegiatan:

5.1. **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** kegiatan ini meliputi Sub Kegiatan :

5.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemeraintan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Eelektronik dan Non Elektronik

5.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2. **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**. Kegiatan ini meliputi Sub Kegiatan :

5.2.1. Operasionaliasisi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program , kegiatan dan sub kegiatan adalah adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
   Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mendukung misi ke-5 pada RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 , yaitu " ".
2. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)
   Selain mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kegiatan tahun 2022 juga sesuai dengan SPM yang ditetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Rumusan rencana program dan kegiatan PD tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Kabupaten Banjar pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Nama PD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12,846,646,860				13,056,546,900	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK yang tersusun	dok	Kab.Banjar	14	19,999,800	APBD		14	25,000,000	
		Jumlah Dokumen Renja yang tersusun		Kab.Banjar	2		APBD		2		
		Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	dok	Kab.Banjar	1		APBD		1		
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terverivikasi	dok	Kab.Banjar	14	19,982,000	APBD		14	23,000,000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan hasil monitor triwulan (RFK, Kinerja)	laporan	Kab.Banjar	14	19,999,900	APBD		14	35,000,000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ SKPD yang terverivikasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjar	30	9,998,700	APBD		30	18,000,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya Gaji, tambahan penghasilan dan TPP	ASN	Kab.Banjar	25	3,478,690,108	APBD		26	3,500,000,000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	dok	Kab.Banjar	6	11,999,800	APBD		6	13,000,000	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	org	Kab.Banjar	120	40,000,000	APBD		120	75,000,000	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi Listrik / penerangan	bln	Kab.Banjar	60	11,994,900	APBD		60	13,000,000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terbeli	unit	Kab.Banjar	15	29,959,000	APBD		15	35,000,000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	Kab.Banjar	60	32,382,800	APBD		60	37,000,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	Kab.Banjar	60	36,708,900	APBD		60	38,000,000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan	Kab.Banjar	60	7,250,000	APBD		60	8,500,000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	Kab.Banjar	60	376,908,000	APBD		60	400,000,000	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah set mebeleir yang terbeli	set	Kab.Banjar	12	17,350,000	APBD		12	25,000,000	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	bulan	Kab.Banjar	60	9,000,000	APBD		60	9,000,000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	Kab.Banjar	60	189,983,052	APBD		60	195,000,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	bulan	Kab.Banjar	60	2,067,720,000	APBD		60	2,150,000,000	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	unit	Kab.Banjar	6	38,380,000	APBD		6	48,000,000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	bulan	Kab.Banjar	60	59,833,000	APBD		60	6,500,000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainya	bulan	Kab.Banjar	60	20,960,000	APBD		60	23,000,000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	ruangan	Kab.Banjar	23	53,000,000	APBD		23	85,000,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**										
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Isu publik yang dikelola	buah	Kab.Banjar	12	4,995,000	APBD		12	4,995,000	
		Jumlah peserta bimbingan teknis pengelola SP4N-Lapor pada SKPD/Kecamatan	orang	Kab.Banjar	356		APBD		356		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah pameran / expo yang dikuti	kali	Kab.Banjar	6	30,654,300	APBD		6	30,654,300	
		Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan	kali	Kab.Banjar	6		APBD		6		
		Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan	kali	Kab.Banjar	12		APBD		12		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah sosialisasi Lapor yang dilaksanakan	kali	Kab.Banjar	6		APBD		6		
2.15.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Berita Pembangunan yang dipublikasikan lewat media Radio Milik Daerah	berita	Kab.Banjar	5,250	15,524,200	APBD		5,250	15,524,200	
		Jumlah Berita Pembangunan yang disebarluaskan melalui Info Publik Media Center	berita	Kab.Banjar	6,800		APBD		6,800		
		Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang ditayangkan lewat Media Visual milik daerah	berita	Kab.Banjar	5,135		APBD		5,135		
2.15.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik					5,272,000	APBD			5,272,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah baleho yang dicetak	m2	Kab.Banjar	23,040	3,616,068,000	APBD		23,040	3,616,068,000	
		Jumlah Konfrensi Pers yang dilaksanakan	kali	Kab.Banjar	60		APBD		60		
		Jumlah laporan Analis kajian tranding Topik Media	laporan	Kab.Banjar	60		APBD		60		
		Jumlah Media yang bekerjasama	media	Kab.Banjar	30		APBD		30		
		Jumlah Surat kabar harian yang disebarkan	eks	Kab.Banjar	5,400,000		APBD		########		
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Sistem elektronik yang telah memanfaatkan Sertifikat elektronik									
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup**	Persentase Informasi dan Data daerah yang diamankan									

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2.15.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	subdomain	Kab.Banjar	34	75,000,000	APBD		34	75,000,000	
2.15.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	opd	Kab.Banjar	54	2,182,077,000	APBD		54	2,182,077,000	
		2. Tingkat Realibilitas akses internet	nari	Kab.Banjar	1		APBD		1		
		3. Tingkat ketersediaan akses internet sampai level desa)	opd	Kab.Banjar	54		APBD	54	54		
		4. Besarnya bandwith akses internet	Mbps	Kab.Banjar	300		APBD	300	300		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	opd	Kab.Banjar	33		APBD	33	33		
		6. Jumlah CCTV yang dipasang	Lokasi	Kab.Banjar	15		APBD	5	15		
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah SKPD yang menjadi objek pentest	skpd	Kab.Banjar	15	8,000,000	APBD		15	8,000,000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun/ dikembangkan	aplikasi	Kab.Banjar	2	8,000,000	APBD		2	8,000,000	
		Jumlah aplikasi khusus yang diimplementasikan didaerah	aplikasi	Kab.Banjar	2		APBD		2		
		Jumlah aplikasi umum yang	aplikasi	Kab.Banjar	3		APBD		3		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		diimplementasikan didaerah									
		Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber terbuka	aplikasi	Kab.Banjar	2		APBD		2		
		Jumlah aplikasi yang menggunakan kode sumber tertutup	aplikasi	Kab.Banjar	2		APBD		2		
		Jumlah seluruh apliaksi yang dikembangkan oleh daerah dan menjadi milik pemerintah daerah	aplikasi	Kab.Banjar	2		APBD		1		
		tersedianya dokumen proses bisnis untuk mendukung layanan SPBE	dok	Kab.Banjar	1		APBD		1		
2.15.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Jumlah Dokumen evaluasi dan Pelaporan	kegiatan	Kab.Banjar	2	214,480,400	APBD		2	214,430,400	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**										
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**										
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah peserta FGD pengumpulan data statistik sektoral	org	Kab.Banjar	500	45,556,100			500	45,556,100	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	laporan	Kab.Banjar	6	24,443,900		1	6	24,443,900	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**										
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian Untuk**										

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Perencanaan Induk (RENDUK) KAMI dan Jaring Komunikasi Sandi JKS) Pemda		Kab.Banjar	2	9,993,800			2	9,993,800	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya keamanan Informasi pemerintah daerah Kabupaten / kota	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi di Bidang Keamanan Informasi		Kab.Banjar	2	9,962,800			2	9,962,800	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah koordinasi persandian yang dilaksanakan	kali	Kab.Banjar	5	14,944,400			5	14,944,400	
2.21.02.2.01.04	PenyediaanLayananKeamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah SKPD yang menerima layanan keamanan Informasi		Kab.Banjar	5	14,992,000			5	14,992,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Sub Output	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Ket
				Lokasi	Target Kinerja	Dana/Pagu Indikif	Sumber Dana		Target Kinerja	Dana/Pagu Indiktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten / Kota**										
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi		Kab.Banjar	2	6,403,800			2	6,403,800	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Kalsel, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/Sub kegiatan SKPD Tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dan Kabupaten Banjar pada umumnya.

Banjar, Juni 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

Drs.H.M. Aidil Basith,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660107 198903 1 008

19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho –Nya, ***Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2022*** telah dapat tersusun. Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2021

merupakan acuan dan pedoman penyelenggaran program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bagian pembahasan yang meliputi : Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu; Tujuan dan Sasaran; Rencana Kerja dan Pendanaan; serta penutup.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2021.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD). Renja – SKPD diartikan sebagai "**Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun"** (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula "**Renja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat"** (pasal 7 ayat 2).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran

(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 menetapkan Tema pembangunan **"*Pemantapan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta penguatan kehidupan social masyarakat*",**
tema ini dijabarkan kedalam 5 (lima) Prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM,
2. Pemulihan ekonomi masyarakat,
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,
4. Tata kelola pemerintahan yang baik
5. Perwujudan masyarakat yang agamis untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan aman.

Dari 5 (lima) Prioritas pembangunan tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar memiliki peran untuk mewujudkan prioritas ke-2 Pemulihan ekonomi masyarakat melalui stimulus usaha mikro dan kemudahan investasi.

Dari mengacu pada program prioritas pembanguan tahun 2022, Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja tahun 2021 dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka -Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 nomor 4);

g.Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program kegiatan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tahun 2022.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian targte Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan evaluasi kinerja kelembagaan, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2022 - 2 = 2020) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar untuk Tahun 2020 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 6.231.884.196 yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.281.668.128,- Belanja Langsung
: Rp. 3.125.870.139,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tahun 2020 terdiri dari 9 program dan 46 kegiatan.

a.Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

b.Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
4. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020 dapat diuraikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

Kode		Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun berjalan	
						Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	***Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik	12	12	12	12	100			
01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	12	12	12	100			
01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	12	12	12	12	100			
01	10	Penyediaan alat tuliskantor	Penyediaan alat tulis kantor	12	12	12	12	100			

01	11	Penyediaan barangcetak dan penggandaan	Penyediaaan barang cetakan danpenggandaan	12	12	12	12	100			
01	12	Penyediaan komponeninstalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	4	4	4	100			
01	13	Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor	25	25	14	14	100			
01	17	Penyediaan makanandan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	11	11	11	11	100			
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	12	12	100			
01	19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan pendukung administrasi perkantoran	12	12	12	12	100			
02		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	***Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur***	**100.00**	**100**	**100.00**	**100**	**100**			
02	5	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasioanl	2.00	2.00						
02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	1	1.00	1	1.00	100			

02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan	2	2	1	1	100			
02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional	6	6	8	8	100			
02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4	4	4	4	100			
05		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	***Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur***	**100.00**	**100**	**100.00**	**100**	**100**			
05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya bintek aparatur	1	1	1	1	100			
06		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	***Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	8	8	8	8	100			
06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1	1	1	1	100			

15		**PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA- USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF**	***Persentase pertumbuhan UM yang memiliki IUMK***	**29.78**	**30.43**	**32.73**	**37.31**				
15	01	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	Laporan data (pelaku usaha mikro yang terupdate)	3,500	1,000	2,000	2,000	100			
15	03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha usaha kecil menengah	Pelaku usaha mikro yang memiliki IUMK	300	323	300	361	120.33			
15	11	Monitoring dan evaluasi program	Laporan monitoring dan evaluasi program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1	1	1	1	100			
15	12	Fasilitasi penumbuhanusaha mikro	memfasilitasi penumbuhan usaha mikro baru			25	25	100			
15	13	penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah (DID Tambahan)				1	1	100			
16		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH**	Perkembangan UM (UM yang bermitra dengan pengusaha besar (BUMN) atau swasta)	**50**	**76.00**	**60**	**68.00**				
16	10	Sosialisasi HAKI, Halal, P-IRT dan Keamanan	Pelaku usaha mikro yang memahami HAKI Halal, P-IRT, dan Keamanan	30	30						

16	10	Monitoring dan evaluasi Program	Laporan Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM/ data/ profil pelaku usaha mikro yang berkembang	1	1	1	1	100			
16	11	Fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha mikro dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi dengan usaha besar	30	30						
16	12	Fasilitasi kemitraan permodalan bagi Usaha mikro dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi permodalan dengan usaha besar	30	30						
16	**13**	Pelatihan Kewirausahaan	Pelaku usaha mikro yang bersertifikat tentang kewirausahaan	60	60						
17		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**	UM Bankable.	**500**	**7,563**	**600**	**3,491**				
17	**01**	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Pelaku usaha mikro yang mengetahui informasi permodalan	70	70						
17	**05**	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM	Laporan monev penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro			1	1	100			
17	**06**	Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM	Fasilitasi pemasaran untuk produk usaha mikro	1	1	1	1	100			

17	**09**	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Pameran produk usaha mikro Kabupaten Banjar	3	3	-	-	-			
17		Monitoring dan evaluasi Program	Laporan Monev Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	1	1	1	1	100			
18		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**	***Persentase koperasi aktif***	**65.50**	**64.91**	**66.50**	**73.18**				
18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	3	2	2	2	100			
18	05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	koperasi yang berprestasi	6	6	6	6	100			
18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data koperasi yang akurat	4	4	4	4	100			
18	13	Sosialisasi perkoperasian	Peserta yang memahami sosialisasi ttg prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	180	180	-	-	-			
18	14	Fasilitasi badan hukum dan sertifikasi koperasi	koperasi yang berbadan hukum dan memiliki sertifikasi koperasi	56	56	-	-	-			

18	15	Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan RAT koperasi	koperasi yang terfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan RAT koperasi	30	30	-	-	-			
18	16	Pembinaan, penerapan, peraturan perundang-undangan koperasi	koperasi yang memiliki perizinan simpan pinjam, cabang pembantu dan kantor kas	15	15	-	-	-			
18	17	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam	koperasi yang diperiksa dan diawasi	15	10	10	12	120			
18	18	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	koperasi yang sehat	50	-	55	36	65.45			
19		**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**	**1. Pertumbuhan modal koperasi 2. pertumbuhan SHU koperasi**	**1. 10 % 2. 8 %**	**1. 47,71% 2. 8,11%**	**1. 15 2. 12**	**1. 41 2. 14**				
	01	Pelatihan perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Diklat tentang perkoperasian	30	54	-	-	-			
	02	Bimtek perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Bimtek tentang perkoperasian	105	105	-	-	-			
	5	Fasilitasi kemitraan usaha koperasi	Badan usaha koperasi d yang terfasilitasi kemitraan usaha denga Badan usaha lainnya	15	15	-	-	-			

	6	Fasilitasi permodalan koperasi	Badan usaha koperasi yang terfasilitasi permodalan dengan Badan usaha pemberi modal (Bank dan Non Bank)	60	60	-	-	-			
	7	Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Unit-unit usaha koperasi yang menerapkan teknologi sederhana manajemen usaha	7	7	-	-	-			
	8	Monitoring dan evaluasi dan pengembangan usaha koperasi	Laporan/ data/ profil Unit-unit usaha koperasi	45	45	45	45	100			
	10	Fasilitasi pengembangan usaha koperasi	Koperasi yang terfasilitasi pengembangan koperasi (melalui hibah barang atau kegiatan fasilitasi lainnya)	3	3	-	-	-			
	11	Diklat perkoperasian (DAK Non Fisik)	Pengurus dan penglola yang bersertifikat diklat perkoperasian	3	3	2	2	100			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP								
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan								

		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun sesuai ketentuan						8	100	8
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monev (RFK per bulan, Lap Renja per triwulan, Lap Tepra, LKjIP;)						29	72.41	21
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangn Asn	Tersedianya Gaji dan TPP						100	75	9
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terfasilitasinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Non ASN						12	75	9
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun						1	0	0
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						1	0	0
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						4	75	3
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	50	9
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor						12	75	9
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						12	75	9
		Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah						12	75	9
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air bersih dan internet						12	75	9
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor						12	75	9
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan						12	75	9
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional						12	75	9

		Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12	75	9
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor					1	100	1
		Program Pemberdayaan usaha menengah, usah kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK					35,7	38,3	107,43
		Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUMK					35,7	38,3	107,43
		Sub Kegaiatan Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Laporan/ data/ profil usaha mikro baru					1	100	1

		Sub Kegaiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi permodalan dengan usaha besar						60	50	30
		Sub Kegaiatan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi kemudahan dalam IUMK						60	100	60
		Sub Kegaiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi HALAL Jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi P-IRT						0 0	0 0	0 0
		Program Pengembangan UMKM	UM Bankable						650	2706	416,31
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	UM Bankable						650	2706	416,31
		Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pngembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Dikenalnya produk usaha mikro Kabupaten Banjar Jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat keterampilan manajerialnya						1 30	100 100	1 30

		Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif					67,5	72,19	106,95
		Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP	Persentase Koperasi Aktif					67,5	72,19	106,95
		Sub Kegiatan Pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian. ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi					0	0	0
		Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah anggota/pengurus koperasi yang mengikuti pembenahan koperasi Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi					80 2	100 00	80 00
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif					67,5	72,19	106,95
		Kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi Aktif					67,5	72,19	106,95
		Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi sehat yang dinilai							

		Sub Kegiatan Penghargaan kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi berprestasi						6	100	6
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan SHU Koperasi						16	1	6,25
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian	Pertumbuhan SHU Koperasi						16	1	6,25
		Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian	Jumlah pengurus dan pengelola yang bersertifikat diklat perkoperasian						30	100	30
		Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pertumbuhan Modal Koperasi						20	47,16	238,15
		Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pertumbuhan Modal Koperasi						20	47,16	238,15
		Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	Jumlah koperasi yang terfasilitasi pengembangan usaha koperasi						4	0	0

Dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 di atas dapat kita lihat bahwa realisasi program kegiatan tahun 2020 secara keseluruhan sebesar 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banjar menggunakan 1 (satu) sasaran strategis, yang terdiri dari 2 (dua) indicator kinerja. Sasaran tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN 1 MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kontribusi sector koperasi dan usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui 2 (dua) indicator kinerja yaitu pertumbuhan omzet usaha mikro dan pertumbuhan omzet koperasi.

1. Pertumbuhan omzet usaha mikro

   Definisi operasional omzet usaha mikro adalah jumlah omzet usaha mikro yang terdata.

   Formulasi pertumbuhan omzet usaha mikro adalah jumlah omzet tahun berjalan - jumlah omzet tahun sebelumnya) : jumlah omzet tahun sebelumnya) x 100

   Target pertumbuhan omzet usaha mikro tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Revisi Kedua Renstra 2016-2021 yaitu 5,2%.

   Jumlah pelaku usaha mikro yang terdata pada tahun 2019 sebanyak 11.140 pelaku dan memiliki omzet usaha sebesar Rp.

822.177.290.340. Adapun jumlah pelaku usaha mikro yang terdata pada tahun 2020 sebanyak 60.980 pelaku dan memiliki omzet usaha sebesar Rp. 1.440.000.000.000. Sehingga omzet usaha mikro yang tumbuh pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,14% dengan capaian sebesar 1.445%. Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. } 1.440.000.000.000 - \text{Rp. } 822.177.290.340}{Rp.\ 822.177.290.340} \times 100 = 75{,}14\ \%$$

2. Pertumbuhan omzet koperasi

Definisi operasional omzet koperasi adalah jumlah omzet seluruh koperasi. Jumlah koperasi pada tahun 2019 sebanyak 248 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 161 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 87 koperasi.

Formulasi pertumbuhan omzet koperasi adalah jumlah omzet tahun berjalan - jumlah omzet tahun sebelumnya) : jumlah omzet tahun sebelumnya) x 100

Target pertumbuhan omzet koperasi tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Revisi Kedua Renstra 2016-2021 yaitu 4%.

Omzet koperasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 81.356.909.560 dan omzet koperasi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 89.278.138.457 Sehingga pertumbuhan omzet koperasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,74 % dengan capaian sebesar 243,5%. Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. } 89.278.138.457 - \text{Rp. } 81.356.909.560}{Rp.\ 81.356.909.560} \times 100 = 9{,}74\%$$

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat diuraian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pertumbuhan omzet usaha mikro	5,2	75,14	1.445
Pertumbuhan omzet koperasi	4	9,74	245,5

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

a) Dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sector usaha
b) Meningkatnya penguatan kapasitas manajerial usaha mikro
c) Jumlah UMKM yang besar,
d) Dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lainnya)
e) Meningkatnya daya saing usaha koperasi;
f) Pembubaran 20 koperasi yang tidak aktif;
g) Dukungan regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi
h) Adanya gerakan reformasi total koperasi yang pada dasarnya mengembalikan koperasi pada format yang sebenarnya yaitu kebersamaan, gotong royong dan kesadaran berpribadi.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

a) Masih banyaknya pelaku UM yang belum mempunyai sertifikat Halal, P-IRT dan Keamanan;
b) Pelaku UM yang masih minim dalam menjalin kemitraan usaha dan permodalan dengan usaha besar;
c) Belum optimalnya pelaku usaha mikro dan koperasi dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah;
d) Kurangnya penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi;
e) Masih kurangnya jiwa kewirausahaan Pengurus;
f) Masih rendahnya kemitraan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya;
g) Masih rendahnya fasilitasi pengembangan usaha koperasi

Upaya perbaikan :

1) Pemerintah terus mendorong dan menggelorakan semangat gotong royong dan meyakinkan bahwa bila berkoperasi bisa mensejahterakan;
2) Mendata dan memfasilitasi pelaku UM yang belum memiliki sertifikat Halal, P-IRT dan keamanan;
3) Pemerintah memberikan stimulus terhadap sektor usaha yang dijalankan oleh Koperasi (Hibah dana atau hibah barang);
4) Memfasilitasi akses pasar terhadap produk usaha koperasi
5) Mengoptimalkan berbagai kebijakan dari Pemerintah dan peningkatan akses permodalan untuk pelaku usaha mikro dna koperasi;
6) Meningkatkan penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi untuk koperasi secara berkelanjutan;
7) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan selalu mendorong para Koperasi dan pelaku UMKM baik dalam bentuk kegiatan pelatihan maupun berupa fasilitasi agar bisa mensejahterakan masyarakat koperasi dan pelaku UMKM. Hal ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah.

Berdasarkan data pada table 3.3 dapat dilihat bahwa capaian indicator sasaran strategis sangatlah meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 capaian untuk indicator pertumbuhan omzet usaha mikro sebesar 150 % sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 1.445 %. Peningkatan ini tidak lepas dari banyaknya pelaku usaha mikro yang mendaftarkan dirinya sebagai pelaku usaha sehingga total omzet usaha mikro Kabupaten Banjar meningkat dan dapat terupdate.

Indicator pertumbuhan omzet koperasi pada tahun sebelumnya, tahun 2019 mencapai 140,5 % sedangkan capaian untuk tahun 2020 sebesar 243,5 %. Peningkatan capaian ini dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa hal seperti : adanya dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lainnya), pengadministrasian koperasi dengan baik.

Berdasarkan pada table 3.5 dapat dilihat bahwa untuk target indicator kinerja sasaran pada setiap tahunnya itu sama hingga akhir periode Renstra, tidak bersifat akumulasi.

Keberhasilan indikator sasaran strategis ini didukung dengan **5 (lima) program dan 30 (tiga puluh)** kegiatan dan dapat dilihat pada penjabaran berikut :

1) Program Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif

Hasil evaluasi capaian kinerja Program Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif melalui 1 (satu) indicator dengan capaian **berhasil**. Pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Target pada tahun 2020 yaitu sebesar 32,73%. Formulasi pertumbuhan UM yang memiliki IUMK adalah Jumlah Usaha Mikro yang terdaftar Tahun N : Jumlah Usaha Mikro terdata Tahun Dasar (N 0) x 100. Adapun cara perhitungannya yaitu (3.800 : 10.184) x 100
= 37,31%.

Pencapaian indikator kinerja pada Program Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif yaitu 113,99 % dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase pertumbuhan UM yang memiliki IUMK	32,73	37,31	113,99

Adanya perizinan formal ini maka UMKM dapat mengakses layanan keuangan perbankan dengan mudah. Selain itu hal ini juga dapat memperluas networking mengingat UMKM yang telah terverifikasi, yang artinya memiliki tingkat kepercayaan lebih baik sehingga memudahkan dalam membuat kontrak dengan pihak lain. Adanya legalitas usaha ini nantinya akan membantu pemerintah dalam mendata UMKM sehingga pengambilan kebijakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Benefit lain dari adanya legalitas usaha adalah secara tidak langsung pelaku UMKM akan lebih rapi dalam pencatatan

pengelolaan bisnis. Kerapian pencatatan dan dokumentasi bisnis menjadi salah satu tolak ukur perbankan dalam memberikan bantuan dana kepada UMKM. Meskipun performa suatu UMKM bagus, perbankan tentunya tidak akan mengucurkan dana yang dikelolanya jika entitas usaha tidak memiliki dokumentasi usaha yang memadai. Saat ini pelaku UMKM dapat mengurus izin usaha satu lembar dengan proses satu hari di kecamatan.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah kegiatan berisikan pendataan 2000 UMK dan input data ke

   aplikasi sebanyak 2.000 data dengan mengklasifikasikan sesuai dengan jenis usahanya yang dilakukan oleh anggota khusus uploader data validasi UMK. Kegiatan ini juga berisikan pembuatan profil UMK sebanyak 1 dokumen dan pembaruan website UMK 1 paket.

b) Kegiatan Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Pagu anggaran kegiatan ini dirasionalisasikan untuk mendukung

   program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berisikan perjalanan dinas, perjalanan dinas dimaksud bertujuan untuk koordinasi maupun konsultasi ke Provinsi maupun ke Kecamatan mengenai kebijakan-kebijakan UMKM.

c) Kegiatan Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Pagu anggaran kegiatan ini dirasionalisasikan untuk mendukung

   program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berisikan perjalanan dinas, perjalanan dinas dimaksud bertujuan untuk konsultasi ke Kementerian dan koordinasi dengan pihak Kecamatan yang telah mengeluarkan izin UMKM.

   Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka menambah modal kerja apalagi dengan suku bunga yang sangat rendah. Aplikasi SIKP mampu mengakomodir manajemen izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Ijin Usaha Mikro dan Kecil merupakan penjabaran dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah pada pasal 7 yang berisikan tentang penumbuhan iklim usaha yang salah satunya adalah perizinan usaha. Presiden RI mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden No. 96 tahun 2014 tentang perizinan untuk Usaha Mikro Kecil. Pada Tahun 2020 ini IUMK yang telah terbit yaitu sebanyak 361 IUMK.

d) Kegiatan Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan usaha kecil menengah

Pagu anggaran kegiatan ini dirasionalisasikan untuk mendukung program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berisikan perjalanan dinas, perjalanan dinas dimaksud bertujuan untuk koordinasi maupun konsultasi ke Provinsi maupun ke Kecamatan mengenai kebijakan-kebijakan UMKM.

e) Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan berisikan monitoring dan evaluasi ketercapain target kinerja program dan kegiatan pada program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kasi dan para staf.

Program Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif memiliki indikator kinerja yaitu Persentase pertumbuhan UM yang memiliki IUMK dengan target sebesar 32,73 % dan realisasi sebesar 37,31 % dengan capaian 113,99 %.

f) Kegiatan Fasilitasi penumbuhan usaha mikro

Fasilitasi penumbuhan usaha mikro dilaksanakan di Lapas anak Martapura. Narasumber dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu dan BRI Cabang, acara dibuka langsung oleh KepalaDinas Koperasi dan Usaha Mikro. Peserta berjumlah 25 orang.

g) Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah (DID Tambahan)

Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah (DID Tambahan) adalah validasi data UMK sebanyak 1 dokumen (10.000 data).
Pra Kegiatan : membuat konsep kegiatan pengkinian data (updating data) usaha mikro di 20 Kecamatan. Baik konsep secara administratif dalam pengelolaan data maupun pengumpulan data usaha mikro.

Kegiatan : melaksanakan kegiatan pengkinian data (updating data) di 20 Kecamatan di Kabupaten Banjar, adapun kegiatan sebagai berikut : 1. melaksanakan rapat koordinasi dengan camat se kabupaten Banjar dalam persiapan pelaksanaan pengumpulan data usaha mikro; 2. Membentuk kepanitiaan dan tim koordinator data di setiap kecamatan untuk memudahkan pengumpulan data dari setiap kecamatan; 3. melaksanakan pengumpulan data di setiap kecamatan; 5. menerima dan mengumpulkan data dan mengecek kebenaran data dan berkas dari setiap kecamatan oleh masing masing koordinator setiap kecamatan; 6. pemasukan data dan pengolahan data usaha mikro oleh koordinator masing masing kecamatan; 7. pengumpulan dan pengolahan data secara keseluruhan. 8. pencetakan data usaha mikro.

Paska Kegiatan : melaksanakan monitoring dan evaluasi

kegiatan sebagai berikut : 1.pentingnya verifikasi data untuk menentukan kevalidtan data baik dokumen dan di lapangan; 2. meningkatkan koordinasi atau lembaga terkait,kecamatan, desa, rt/rw, organisasi masyarakat, PD. Pasar, instansi terkait dll.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Hasil evaluasi capaian kinerja Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian **berhasil.** Pencapaian indikator kinerja tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Perkembangan UM	60	68	113,33

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan berisikan monitoring dan evaluasi ketercapain target kinerja program dan kegiatan pada program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kasi dan para staf.

b) Kegiatan Fasilitasi kemitraan usaha bagi usaha mikro dengan usaha besar
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah dilakukannya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berisikan perjalanan dinas. Adapun perjalanan dinas dimaksud bertujuan untuk koordinasi maupun konsultasi ke Provinsi maupun ke Kecamatan mengenai kebijakan-kebijakan UMKM.

c) Kegiatan Fasilitasi kemitraan permodalan bagi usaha mikro dengan usaha besar
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah dilakukannya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berisikan perjalanan dinas yang bertujuan untuk mencari informasi maupun kebijakan- kebijakan mengenai permodalan untuk para pelaku usaha UMKM. lebih meningkatkan sosialisasi dan informasi kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi dan layanan keuangan secara formal baik dari bank, BUMN dan Ventura.

d) Kegiatan Sosialisasi HAKI, Halal, P-IRT dan Keamanan
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah dilakukannya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berisikan perjalanan dinas. Adapun perjalanan dinas dimaksud bertujuan untuk koordinasi maupun konsultasi ke Provinsi maupun ke Kecamatan mengenai kebijakan-kebijakan UMKM.

e) Kegiatan Pelatihan kewirausahaan
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah dilakukannya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar. Kegiatan ini berisikan perjalanan dinas. Adapun perjalanan dinas dimaksud bertujuan untuk koordinasi maupun konsultasi ke Provinsi maupun ke Kecamatan mengenai kebijakan-kebijakan UMKM.

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Hasil evaluasi capaian kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu UM Bankable dengan capaian **berhasil**. Definisi operasional UM Bankable adalah jumlah usaha mikro yang mengakses perbankan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
UM Bankable	600	3.491	581,83

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar para pelaku usaha mikro mengerti dan memahami bagaimana cara meminjam modal sesuai dengan yang diharapkan untuk pembuatan permodalan. Sehingga para pelaku usaha mikro akan dapat mengembangkan dan memajukan usaha untuk ke depannya. Tetapi kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena anggaran pada kegiatan ini dirasionalisasikan untuk mendukung kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar.

b) Kegiatan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
Kegiatan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM ini tidak dapat dilaksanakan karena anggaran pada kegiatan ini dirasionalisasikan untuk mendukung kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar.

c) Kegiatan Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM Kegiatan pengembangan sarana pemasaran ini berupa
memberikan fasilitas berupa tempat (sarana) untuk mengembangan produk-produk unggulan Usaha Mikro

Kabupaten Banjar dengan diberi nama UKM CENTER. Dengan adanya sarana pemasaran ini diharapkan produk unggulan Kabupaten Banjar lebih dikenal dan bisa terjadi transaksi pembelian sehingga bisa meningkatkan pendapatan UMK dan memperluas pangsa pasar bagi UMK. Kegiatan sarana pemasaran ini berlokasi di Martapura, Kabupaten Banjar.

d) Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena anggaran pada kegiatan ini dirasionalisasikan untuk mendukung kegiatan Covid- 19 Kabupaten Banjar, yang tersisa hanya untuk perjalanan dinas dimana dipergunakan untuk mencari peluang-peluang untuk mempromosikan produk pelaku Usaha.

e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
kegiatan berisikan monitoring dan evaluasi ketercapain target kinerja program dan kegiatan pada program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kasi dan para staf.

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Hasil evaluasi capaian kinerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase koperasi aktif dengan capaian **berhasil**. Definisi operasional Persentase koperasi aktif adalah Koperasi yang melaksanakan RAT selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Formulasi dari persentase koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif : jumlah seluruh koperasi x 100. Target persentase koperasi aktif pada tahun 2020 sebesar 66,5% dan realisasi sebesar 73,18%. Dengan rincian yaitu 161 : 220 x 100 = 73,18%

Pencapaian indikator kinerja tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.9

Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase koperasi aktif	66,5	73,18	110,05

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi ini dilaksanakan untuk membangun perkembangan koperasi dalam hal aspek kelembagaannya, kegiatan yang dilaksanakan yaitu ada pendampingan pelaksanaan RAT, pembenahan koperasi, Rakor Perkoperasian. faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan koperasi yaitu dengan adanya partisipasi anggota dalam kegiatan perkoperasian dalam memajukan usaha koperasi sehingga menjadi koperasi yang maju dan kuat sehingga tercapai tujuan berkoperasi. Namun ada juga hal yang menghabat jalannya koperasi yaitu dalam hal pengelolaan usaha koperasi sehingga tidak terlaksananya Rapat Anggota yang tepat waktu bahkan tidak terlaksana karena masih kurangnya pemahaman pengelolaan oleh pengurus.

Untuk megatasi berbagai hal yang terjadi, kami memberikan pemahaman perkoperasian dengan Rakor Perkoperasian untuk koperasi aktif, namun ada juga Pembenahan koperasi untuk mefasilitasi koperasi yang aktif namun tidak melaksanakan kegiatan perkoperasian.

b) Kegiatan Sosialisasi perkoperasian ;

kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan perjalanan dinas untuk mendatangi koperasi yang memiliki permasalahan dalam menjalankan usaha perkoperasiannya, dengan memberikan

arahan dan pemahaman kepada pengurus koperasi. Sosialisasi Perkoperasian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang perkoperasian dan kewajibannya sebagai pengurus koperasi masih adanya pengurus belum memahami tentang perkoperasian dan kewajiban pengurus untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan perencanaan kerja koperasi.

c) Kegiatan Fasilitasi badan hukum dan sertifikasi koperasi Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan perjalanan dinas

untuk mendatangi koperasi aktif yang telah lama atau tidak melaksanakan RAT yang seharusnya dilaksanakan tiap tahun, maka dengan adanya kegiatan ini dinas memfasilitasi koperasi untuk membenahi kembali koperasi tersebut sehingga dapat berjalan kembali dan dapat melaksanakan kegiatan perkoperasiannya, sehingga dengan terlasananya RAT koperasi tersebut bisa medapatkan NIK koperasi dan Sertifikasi Koperasi.

d) Kegiatan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan RAT koperasi Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan perjalanan dinas

untuk mendatangi koperasi aktif dimana Perencanaan dan Pelaksanaan RAT Koperasi bagi Pengurus koperasi ini untuk menambah pengetahuan tentang perkoperasian dan kewajibannya sebagai pengurus koperasi masih adanya pengurus belum memahami tentang perkoperasian dan kewajiban pengurus untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan perencanaan kerja koperasi sebagai bukti kerja pengurus dan juga untuk mengetahui perkembangan usaha koperasi itu sendiri sehinggga koperasinya dapat aktif berjalan lancar.

e) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memonitoring dan mengevaluasi bagi koperasi aktif baik dari segi kelembagaannya, keuangan dalam hal pembukuannya dalam 1 tahun buku berjalan. Jumlah koperasi tahun 2020 sebanyak 220 koperasi terdiri dari 161 koperasi aktif dan 59 koperasi tidak aktif.

f) Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi ini dalam rangka penyusunan profil kinerja usaha koperasi, sebagai bahan informasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi bagi instansi terkait. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan untuk memberikan apresiasi bagi koperasi aktif yang telah melaksanakan RAT 3 tahun berturut- turut. koperasi yang dinilai ada 6 buah koperasi pada tiap tahunnya, dengan pemberian hadiah berupa Labtop untuk juara 1,2,3 dan juga disertakan piala untuk semua koperasi yang ikut dinilai. Pengumuman pemenang ini laksanakan berbarengan dengan Harkop Koperasi.

Penilaian dan Pemberian penghargaan Koperasi berprestasi tingkat kabupaten banjar tahun 2020 dilaksanakan pada triwulan II. Penilaian koperasi berprestasi berdasarkan peraturan menteri Koperasi dan UKM No.06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi dan koperasi award, UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian (lembar negara RI tahun 1992 No.116, tambahan lembaran negara RI No.3502).

g) Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan ini dengan sasaran hanya koperasi yang memiliki unit simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam yang aktif dalam kegiatan perkoperasiannya dan melaksanakan RAT tiap tahunnya maupun yang tidak menjalankan kegiatannya dalam artian macet sehingga tidak melaksanakan RAT, sehingga koperasi ini di periksa dan di awasi dalam hal kelembagaan dan pembukuan keuangannya.

h) Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam

Penilaian kesehatan koperasi tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena koperasi KSP/USP yang melaksanakan RAT cuma 36 KSP/USP sehingga capaian hanya 65,45%. Hal ini dikarenakan KSP / USP yang melaksanakan RAT hanya berjumlah 36 koperasi dari total 58 KSP/USP.

Penilaian kesehatan koperasi wajib dilakukan setelah koperasi melaksanakan RAT, penilaian kesehatan ini dilakukan untuk KSP

dan USP, hal ini dilakukan untuk mengukur kesehatan KSP dan USP. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan, meningkatkan kegiatan usaha Simpan Pinjam koperasi oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola keuangan.

5) program pemberdayaan dan pengembangan koperasi

Hasil evaluasi capaian kinerja program pemberdayaan dan pengembangan koperasi melalui 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 indikator dengan capaian **berhasil** dan 1 indikator dengan capaian **cukup berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertumbuhan modal koperasi

   Formulasi pertumbuhan modal koperasi adalah (jumlah modal koperasi yg tumbuh tahun N - jumlah modal koperasi yg tumbuh tahun N 0)/modal koperasi yg tumbuh tahun N 0 x 100.

   Target pertumbuhan modal koperasi tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Revisi Kedua Renstra 2016-2021 yaitu 15% dengan realisasi sebesar 41,07 %, capaian sebesar 273,8% (**Berhasil**). Rincian perhitungan capaian sebagai berikut :

   - Modal koperasi sebagai data awal (tahun 2017) sebesar Rp. 106.584.857.974
   - Modal koperasi pada tahun buku 2020 sebesar Rp. 150.359.067.614
   - Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{(150.359.067.614 - 106.584.857.974)}{106.584.857.974} x\ 100 = 41,07$$

2. Pertumbuhan SHU koperasi

   Formulasi pertumbuhan SHU koperasi adalah (jumlah SHU koperasi yg tumbuh tahun N - jumlah SHU koperasi yg tumbuh tahun N 0)/SHU koperasi yg tumbuh tahun N 0 x 100.

   Target pertumbuhan SHU koperasi tahun 2019 yang telah ditetapkan pada Revisi Kedua Renstra 2016-2021 yaitu 12%,

capaian sebesar 92,17 % (**Cukup Berhasil**). Rincian perhitungan capaian sebagai berikut :

- SHU koperasi sebagai data awal (tahun 2017) sebesar Rp. 8.600.827.817
- SHU koperasi pada tahun buku 2020 sebesar Rp. 9.551.854.925
- Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{(9.551.854.925 - 8.600.827.817)}{8.600.827.817} \; x \; 100 = 11,06$$

Pencapaian indikator kinerja program tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Indikator Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	99,1
Pertumbuhan modal koperasi	15	41,07	273,8
pertumbuhan SHU koperasi	12	11,06	92,17

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kegiatan Fasilitasi Permodalan Koperasi
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah dilakukannya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar.
Perjalanan dinas dimaksud untuk mendukung kegiatan monitoring kepada Koperasi-koperasi penerima hibah.

b) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan pengembangan usaha koperasi
Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan pengembangan usaha koperasi ini dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi terhadap pemanfaataan hibah daerah / fasilitasi lainnya yang telah diberikan Pemerintah kepada koperasi. Ada 45 koperasi yang di monitoring untuk tahun 2020 baik itu hibah berupa aplikasi, revitalisasi pasar, maupun berupa barang.

c) Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha koperasi

Pemberian Hibah kepada pihak ketiga (Koperasi) berupa hand traktor bajak yang diberikan kepada Koperasi Alam Subur Kec. Sei Pinang dan mesin panen padi kombinasi yang diberikan kepada Koperasi Pertanian Hubbul Wathon Desa Sei Rangas Kec. Martapura Barat.

Pemberian hibah ini diharapkan agar Koperasi penerima hibah dapat mengembangkan usaha nya sehingga dapat meningkatkan omzet.

d) Kegiatan Diklat Perkoperasian

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah dilakukannya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program kegiatan Covid-19 Kabupaten Banjar.

Kegiatan Diklat Perkoperasian berisikan perjalanan dinas dimaksud untuk mendukung kegiatan monitoring kepada Koperasi-koperasi penerima hibah.

e) Kegiatan Diklat Perkoperasian (DAK Non Fisik)

Kegiatan Diklat Perkoperasian merupakan kegiatan yang dana nya bersumber oleh Dana DAK Non Fisik. Kegiatan ini berupa pelatihan untuk Koperasi dan pelaku usaha mikro.

Kegiatan Pelatihan KUMKM ini dilaksanakan di Wisma Sultan Sulaiman Martapura. Diklat perkoperasian yang bersumber dari dana DAK ini dilaksanakan dengan 6 kali kegiatan dengan total peserta 180 orang. Adapun 6 kali kegiatan itu yaitu diklat pembukuan bagi bendahara koperasi, diklat manajemen kewirausahaan koperasi, diklat penyusunan laporan RAT bagi pengurus koperasi, diklat pembukuan sederhana bagi usaha mikro pemula, diklat manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha pemula, dan diklat administrasi dan informasi penggiat usaha mikro.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Pertumbuhan Omzet Koperasi			4	4	4	4	5.62	75.14		7	
2	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro			5.2	5.2	5.2	5.2	7.78	9.74		7.8	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai peran dan posisi strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagai instansi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan Usaha Mikro,

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengemban amanat penting untuk menjadikan koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Banjar sebagai suatu lembaga yang maju, mandiri dan mempunyai daya saing.

Dilihat dari segi kuantitas, Kabupaten Banjar mempunyai sumber dayamanusia yang cukup untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku koperasi dan usaha mikro juga cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha dan berkoperasi cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang masih kondusif.

Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja Koperasi dan Usaha Mikro masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang

manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan Usaha Mikro. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk memberikan dukungan kebijakan bagi pengembangan dan kemajuan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Banjar. Selain itu dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, BANK, LPDB dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses oleh koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki persyaratan tertentu. Pengaruh globalisasi membuka kesempatan untuk dapat menjangkau akses pasar nasional dan internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah / besar.

Kemajuan informasi dan teknologi sangan berdampak pada produktivitas serta pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro. Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kemampuan membaca kebutuhan pasar membuka peluang kreativitas usaha para pelaku ekonomi dalam mengembangkan usahanya. Keselarasan program dan kerjasama lintas sektor juga sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Banjar.

Tantangan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro kedepan antara lain yaitu menjadikan koperasi dan Usaha Mikro sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang

signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan koperasi dan Usaha Mikro. Keberpihakan bagi koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu koperasi harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan, dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinda, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain:

a. Persaingan global yang menuntut kesiapan seluruh stakeholder untuk menghadapinya;
b. Pemahaman perundang-undangan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih rendah;
c. Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan Usaha Mikro;
d. Masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha;
e. Kualitas kelembagaaan koperasi dan usaha mikro masih rendah;
f. Jaringan pemasaran dan fasilitas yang kurang mendukung;
g. Kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain adalah :

a. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk usaha;
b. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
c. Arah kebijakan serta program kegiatan K/L yang kondusif dan dapat disinergiskan dengan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
d. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, BUMN maupun seluruh stakeholder;
e. Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi;
f. Terbukanya peluang usaha bagi Koperasi dan Usaha mikro.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis yang menjadi dasar atau acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif;
2. manajemen usaha koperasi dan usaha mikro belum optimal;
3. kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro masih kurang;
4. kualitas sumberdaya manusia pengelola dan usaha mikro masih rendah;
5. akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro maish rendah;
6. produk usaha mikro belum mampu bersaing di pasar global produk;
7. terbatasnya akses koperasi dan usaha mikro terhadap sumber daya produktif yaitu bahan baku, teknologi informasi dan kemitraan.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja SKPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Dalam rancangan awal RKPD Tahun 2021 perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahanpembangunan daerah dan menelaah isu strategis yang sedang berkembang. Permasalahan pembangunan tahun 2022 diketahui melalui hasil evaluasi kinerja tahun 2019. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berikut ini adalah isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Banjar:

1. Peningkatan SDM yang berkualitas dan responsive gender dan anak;
2. Peningkatan Ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan hasil pembangunan daerah yang berkeadilan;

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel;
5. Perwujudan masyarakat yang agamis, berakhlak dan berkepribadian luhur untuk menjaga kerukunan umat dalam suasana aman dan tertib.

RKP 2022 dengan fokus pembangunan pada 1) Kesehatan, pendidikan dan kewirausahaan; 2) Pertanian dan perikanan; 3) UMKM, industry pengolahan dan perdagangan/jasa; serta 4) Banjir dan Covid, diharapkan penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan dapat bersinergi dan berintegrasi dengan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi tema RKP dan RKPD Prov. Kalsel, maka tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah : "***Pemantapan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta penguatan kehidupan social masyarakat***"

Tema RKPD Tahun 2022 menegaskan bahwa dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi pada tahun 2022, mendukung prioritas nasional dan pemerintah provinsi Kalimantan selatan maka Pemerintah Kabupaten Banjar akan mengutamakan peningkatan Daya Tahan Sosial Budaya masyarakat memalui penguatan SDM dan peningkatan Ekonomi.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 5 (lima) Prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM, dengan sub prioritas :
   - Peningkatan sistem pendidikan
   - Peningkatan sistem kesehatan
   - Peningkatan kewirausahaan
2. Pemulihan ekonomi masyarakat, dengan sub prioritas :
   - Peningkatan sector pertanian, perikanan, industry pengolahan, dan perdagangan/jasa
   - Stimulus Usaha Mikro dan kemudahan investasi
   - Penanggulangan kemiskinan
   - Penciptaan lapangan pekerjaan

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sub prioritas :
    - Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
    - Penataan permukiman yang nyaman dan layak huni
    - Mitigasi kebencanaan
4. Tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sub prioritas :
    - Peningkatan kualitas pelayanan public
    - Penguatan akuntabilitas kinerja
    - Peningkatan kualitas aparatur
    - Peningkatan SPBE
5. Perwujudan masyarakat yang agamis untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan aman, dengan sub prioritas :
    - Pengamalan Nilai-nila Pancasila dan Agama
    - Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
    - Pengembangan kepeloporan pemuda dan santri.

Secara keseluruhan hasil telahaan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel III berikut ini.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu indikatif**	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A		**Persentase Terpenuhiny a Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**1.533.650.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KO TA**		**Persentase Terpenuhiny a Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**1.390.850.000**	
Perencanaan,Pen ganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi SKPD**	100 persen	**95.000.000**	**Perencanaan,Pe nganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi SKPD**	100 persen	**44.000.000**	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencana an Perengkat Daerah	8 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencana an Perengkat Daerah	7 Dokumen	11.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	Pagu anggaran mengacu pada RKPD,tidak perlu menanmbah sub kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.500.000	Pagu anggaran mengacu pada RKPD,tidak perlu menanmbah sub kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SK{D	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SK{D	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 laporan	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 persen	**42.200.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dalam dan Luar Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 persen	**42.200.000**	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaa n Tugas ASN yang terpenuhi	12 bulan	22.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaa n Tugas ASN yang terpenuhi	13 bulan	22.200.000	Target diganti 12 bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	20.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**Persentase Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**Persentase Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah**	**100 persen**	**50.000.000**	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan dan Kompetensi nya	12 bulan	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan dan Kompetensi nya	50 orang	50.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**485.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**521.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 bulan	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkap an	7 unit	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkap an	7 unit	80,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik kantor	12 bulan	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dalam dan Luar Daerah	Bahan Logistik kantor	12 bulan	51,000,000	

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan Pengganda an	12 bulan	20.000.000	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan Pengganda an	12 bulan	20.000.000	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar daerah	Rapat koordinasi dan Konsultasi didalam dan luar daerah	12 bulan	300.000.000	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rapat koordinasi dan Konsultasi didalam dan luar daerah	12 bulan	360.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah**	100 persen	**70.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah**	100 persen	**20.000.000**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau lapangan	2 unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau lapangan	0	-	

Pengadaan Mebel		Jumlah Peralatan dan Perlengkap an	1 unit	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Peralatan dan Perlengkap an	1 unit	20.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupate n Banjar	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		428.650.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupat en Banjar	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		428.650.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupate n Banjar	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupat en Banjar	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 bulan	25.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kabupate n Banjar	Jasa Pelayanan Umum Knator yang terpenuhi	12 bulan	403.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kabupat en Banjar	Jasa Pelayanan Umum Knator yang terpenuhi	12 bulan	403.650.000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupate n Banjar	**Persentase Pemelihara an BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**355.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupat en Banjar	**Persentase Pemelihara an BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**285.000.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupate n Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan dalam Kondisi baik	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupat en Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan dalam Kondisi baik	1 Unit	40.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupate n Banjar	Terlaksanan ya pemelihara an kendaraan dinas operasional	12 bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kabupat en Banjar	Terlaksanan ya pemelihara an kendaraan dinas operasional	…. Unit	120.000.000	8 unit

					Lapangan					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpelihara nya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpelihara nya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	25.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupate n Banjar	Jumlah Gedung/Ba ngunan dalam kondisi baik	1 gedung/B angunan	150.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupat en Banjar	Jumlah Gedung/Ba ngunan dalam kondisi baik	1 gedung/B angunan	100.000.000	

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kabupate n Banjar	Persentase Rekomend asi izin pembukaa n kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi Persentae Koperasi yang memiliki Rekomend asi Izin Usaha Simpan Pinjam	100 persen 56,90 persen	**55.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Kabupat en Banjar	Persentase Rekomend asi izin pembukaa n kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi Persentae Koperasi yang memiliki Rekomend asi Izin Usaha Simpan Pinjam	100 persen 56,90 persen	**50.000.000**	Program tidak bias dilaksanakan dan akan dilakukan koordinasi kembali dengan tim TAPD Indikator target dipertimbangkan
Peneribitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah/Keang gotaan dalam Daerah Kabupaten**/Kota**	Kabupate n Banjar	**Jumlah Rekomenda si Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam**	6 KSP/USP	**45.000.000**	**Peneribitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah/Kean ggotaan dalam Daerah Kabupate**n**/Kota**	Kabupat en Banjar	**Jumlah Rekomenda si Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam**	6 KSP/USP	**40.000.000**	

Fasiltasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Kabupate n Banjar	Jumlah fasilitasi pemenuha n Izin simpan pinjam	6 KSP/USP	45.000.000	Fasiltasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Kabupat en Banjar	Jumlah fasilitasi pemenuha n Izin simpan pinjam	6 KSP/USP	40.000.000	

Penerbitan Izin Pembukaaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupten/Kota	Kabupate n Banjar	**Jumlah Rekomenda si izin pembukaa n kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi**	1 koperasi	**10.000.000**	**Penerbitan Izin Pembukaaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupten/Kot a**	Kabupat en Banjar	**Jumlah Rekomenda si izin pembukaa n kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi**	1 koperasi	**10.000.000**	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang ,Cabang Pembatu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Fasilitasi Rekemond asi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	1 koperasi	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang ,Cabang Pembatu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan		Fasilitasi Rekemond asi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	1 koperasi	10.000.000	

Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a		Simpan Pinjam untuk Koperasi			Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota		Simpan Pinjam untuk Koperasi			
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kabupate n Banjar	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundang an Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundang an	**19,63 persen** **29,31 persen**	**100.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kabupat en Banjar	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundang an Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundang an	**19,63 persen** **29,31 persen**	**90.000.000**	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	Kabupate n Banjar	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah KSP USP yang	**32 Koperasi 9 koperasi**	**100.000.000**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan**	Kabupat en Banjar	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah KSP USP yang	**32 Koperasi 9 koperasi**	**90.000.000**	

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/Kot a		diperiksa dan diawasi			**Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta**		diperiksa dan diawasi			
Pengawasan Kekuatan,Kese hatan, Kemandiriian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kabupate n Banjar	Jumlah Koperasi diawasi Jumlah KSP USP diawasi	32 koperasi 9 koperasi	50.000.000	Pengawasan Kekuatan,Kes ehatan, Kemandiriian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Kabupat en Banjar	Jumlah Koperasi diawasi Jumlah KSP USP diawasi	32 koperasi 9 koperasi	40.000.000	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupate n Banjar	Jumlah Koperasi diperiksa Jumlah KSP dan USP diperiksa	32 koperasi 9 koperasi	50.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupat en Banjar	Jumlah Koperasi diperiksa Jumlah KSP dan USP diperiksa	32 koperasi 9 koperasi	50.000.000	

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kabupate n Banjar	Persentase KSP/USP Sehat	**13,79 persen**	**100.000.000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Kabupat en Banjar	Persentase KSP/USP Sehat	**13,79 persen**	**90.000.000**	
Penilian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalamm 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		**Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan Jumlah KSP/USP Koperasi menerima pengharga an**	**58 KSP/USP** **6 koperasi**	**100.000.000**	**Penilian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalamm 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta**		**Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan Jumlah KSP/USP Koperasi menerima pengharga an**	**58 KSP/USP** **6 koperasi**	**90.000.000**	

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kabupate n Banjar	Jumlah yang dinilai kesehatan KSP dan USP	58 KSP/USP	30.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Kabupat en Banjar	Jumlah yang dinilai kesehatan KSP dan USP	58 KSP/USP	30.000.000	
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kabupate n Banjar	Jumlah yang dinilai kesehatan KSP dan USP	6 koperasi	70.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Kabupat en Banjar	Jumlah yang dinilai kesehatan KSP dan USP	6 koperasi	60.000.000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHANN PERKOPERASIA N	Kabupate n Banjar	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	17,29 koperasi	**120.000.000**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHANN PERKOPERASIA N**	Kabupat en Banjar	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	17,29 koperasi	**90.000.000**	

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjar	**Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian**	60 pengurus	**120.000.000**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Banjar	**Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian**	60 pengurus	**90.000.000**	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuann Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Banjar	Jumlah anggota yang memahami tentang perkoperasian	60 penurus koperasi	120.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan n Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Banjar	Jumlah anggota yang memahami tentang perkoperasian	60 penurus koperasi	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kabupaten Banjar	**Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya**	**33,74 persen**	**850.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Kabupaten Banjar	**Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya**	**0**	**500.000.000**	Target Program disesuaikan (33,74 persen)

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupoaten/K ota	Kabupate n Banjar	**Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberday aan dan perlindunga n**	**72 Koperasi**	850.000.000	**Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupoaten/K ota**	Kabupat en Banjar	**Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberday aan dan perlindunga n**	**72 Koperasi**	500.000.00	Target disesuaikan 50 Koperasi
Pemberdayaa n Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kabupate n Banjar	1. Jumlah koperasi yang terfasilitasi Akses pasar 2. Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaa n 3. Jumlah Koperasi yang mendapat Penguatan Kelembaga an 4. Jumlah	30 koperasi 30 koperasi 5 koperasi 5 koperasi 5 koperasi	850.000.000	Pemberdayaa n Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Kabupat en Banjar	1. Jumlah koperasi yang terfasilitasi Akses pasar 2. Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaa n 3. Jumlah Koperasi yang mendapat Penguatan Kelembaga an 4. Jumlah	30 koperasi 30 koperasi 5 koperasi 5 koperasi 5 koperasi	500.000.000	

		Koperasi yang mendapat Penataan Manajemen 5. Jumlah Koperasi yang mendapat Standarisasi dan Restrukturisa si Usaha Koperaasi					Koperasi yang mendapat Penataan Manajemen 5. Jumlah Koperasi yang mendapat Standarisasi dan Restrukturisa si Usaha Koperaasi			
PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kabupate n Banjar	**Persentase Pertumbuha n Usaha Mikro**	**8,36 persen**	**463.222.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Kabupat en Banjar	**Persentase Pertumbuha n Usaha Mikro**	**8,36 persen**	**415.000.000**	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,		**1. Persentase jumlah usaha mikro yang dinput ke dalam system onlie data**	**19,3 persen** **6,0 persen**	**463.222.000**	**Pemberdayaa n Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan**		**1. Persentase jumlah usaha mikro yang dinput ke dalam system onlie data**	**19,3 persen** **6,0 persen**	**415.000.000**	

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		**system (ODS)** **2. Persentae jumlah usaha mikro yang bermitra** **3. Persentae jumlah usaha mikro yang diberikan pendampin gan melalui lembaga pendampin g**	**2,38 persen**		**Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**system (ODS)** **2. Persentae jumlah usaha mikro yang bermitra** **3. Persentae jumlah usaha mikro yang diberikan pendampin gan melalui lembaga pendampin g**	**2,38 persen**		
Pendataan Potensi dan Pengembanga n Usaha Mikro	Kabupate n Banjar	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)	10.000 pelaku usaha mikro	60.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembang an Usaha Mikro	Kabupat en Banjar	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)	10.000 pelaku usaha mikro	45.000.000	

Pemberdayaa n melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupate n Banjar	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	550 pelaku usaha mikro	80.000.000	Pemberdayaa n melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupat en Banjar	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	550 pelaku usaha mikro	80.000.000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupate n Banjar	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2.000 pelaku usaha mikro	120.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupat en Banjar	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	550 pelaku usaha mikro	100.000.000	Target indikator disesuaikan dengan RKPD
Pemberdayaa n Kelembagaan Perizinan Usaha Mikro	Kabupate n Banjar	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatk an pendampin gan dari lembaga pendampin g	5 pelaku usaha mikro	140.000.000	Pemberdayaa n Kelembagaan Perizinan Usaha Mikro	Kabupat en Banjar	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatk an pendampin gan dari lembaga pendampin g	7 pelkau usaha mikro	140.000.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaa n Usaha Mikro	Kabupate n Banjar	Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi dengan para pemangku Kepentinga n	2 dokumen	63.222.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaa n Usaha Mikro	Kabupat en Banjar	Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi dengan para pemangku Kepentinga n	2 dokumen	50.000.000	
PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	Kabupate n Banjar	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya**	**9,35 persen**	**326.444.000**	**PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM**	Kabupat en Banjar	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya**		**300.000.000**	Target Program 9,35 persen
Pengembanga n Usaha Mikro denganOrienta si Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kabupate n Banjar	**Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya Persentaase usaha mikro yang diberikan dukungan**	4,68 persen 4,68 persen	**326.444.000**	**Pengembang an Usaha Mikro denganOrient asi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	Kabupat en Banjar	**Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya Persentaase usaha mikro yang diberikan dukungan**		**300.000.000**	Target disesuaikan 4,68 persen,produksi dan pengolahan 4,68 persen,HAKI 1,8 persen

		fasilitasi pelatihan Persentase usaha mikro yang mendapatk an fasilitasi pengemba ngan produksi dan pengolahan Persentase usaha mikro yang mendapatk an HAKI	0,78 persen 1,28 persen				**fasilitasi pelatihan Persentase usaha mikro yang mendapatk an fasilitasi pengemba ngan produksi dan pengolahan Persentase usaha mikro yang mendapatk an HAKI**			
Faslitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembanga n Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupate n Banjar	1. Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Pengemba ngan Produksi dan Pengolahan 2. Jumlah Usaha Mikro	25 pelaku usaha mikro 150 pelaku usaha mikro 60 pelaku usaha mikro	66.444.000 150.000.000 90.000.000	Faslitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembang an Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	Kabupat en Banjar	1. Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Pengemba ngan Produksi dan Pengolahan 2. Jumlah Usaha Mikro	25 pelaku usaha mikro 150 pelaku usaha mikro 60 pelaku usaha	300.000.000	

		yang terfasiltasi Pemasaran 3. Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 4. Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Desain dan Teknologi	5 palaku usaha mikro	20.000.000	Teknologi		yang terfasiltasi Pemasaran 3. Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 4. Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Desain dan Teknologi	mikro 5 palaku usaha mikro		
Total				**3,460,185,000**					**2,925,850,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Kecamatan	Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kel)	Volume	Pagu	Catatan
1	Aranio	Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Ikan dan Pembibitannya	Aranio	20 orang	30,000,000	Usulan diarahkan ke Dinas Perikanan
2	Aranio	Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan Masyarakat (Pengelolaan Bumdes)	Belangin	5 orang	7,500,000	Usulan diarahkan ke DPMD
3	Gambut	Pelatihan Kewirausahaan (pelatihan peternakan bebek dan penetasan bebek bertelur menggunakan mesin penetas)	Malintang Baru	20 orang	30,000,000	
4	Gambut	Pelatihan Kewirausahaan	Keladan Baru	20 orang	30,000,000	
5	Martapura Timur	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Usaha Mikro (NON FISIK) pelatihan kerajinan Mas dan perak serta pengadaan alat perlengkapan kerajinan	Dalam Pagar	2 paket	50,000,000	
6	Martapura	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Usaha Mikro (Penambahan modal pengrajin	Jawa Laut	50 kelompok	375,000,000	

		dan usaha industri rumah tangga)				
7	Sambung Makmur	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Usaha Mikro - pengadan alat mesin jahit	Baliangin	10 unit	30,000,000	
8	Cintapuri Darussalam	Pelatihan kewirausahaan UMKM	Alalak Padang	20 orang	30,000,000	
9	Cintapuri Darussalam	Pelatihan kewirausahaan UMKM	Banua Anyar	3 kelompok	15,000,000	
10	Simpang Empat	Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan Masyarakat (pelatihan di bidang teknologi)	Batu Balian	20 orang	30,000,000	
11	Simpang Empat	Pelatihan kewirausahaan di bidang tatarias	Batu Balian	20 orang	30,000,000	Bila sifatntya pemula akan di alihkan ke disnaker dengan catatan kegiatan dimaksud termuat di renja 2022 disnaker sementara jika sudah menjadi pelaku usaaha mikro akan ditersukan ke dinas koperasi
12	Simpang Empat	Pelatihan kewirausahaan (Pengelolaan & Pemasaran produk unggulan desa)	Sungai Tabuk	20 orang	30,000,000	
13	Simpang Empat	Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan Masyarakat (pelatihan tataboga)	Simpang Empat	20 orang	30,000,000	dapat ditersukan dengan catatan kepada diskop jika sudah menjadi pelaku usaha mikro, sementara jika pemula maka akan dialihkan ke

						disnaker
14	Simpang Empat	Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan Masyarakat (Pelatihan otomotif)	Simpang Empat	20 orang	30,000,000	dapat ditersukan dengan catatan kepada diskop jika sudah menjadi pelaku usaha mikro, sementara jika pemula maka akan dialihkan ke disnaker
15	Simpang Empat	Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan seni dan Tata Boga)	Cabi	20 orang	30,000,000	dapat ditersukan dengan catatan kepada diskop jika sudah menjadi pelaku usaha mikro, sementara jika pemula maka akan dialihkan ke disnaker
16	Simpang Empat	Pelatihan Kewirausahaan simpan pinjam untuk perempuan	Pasar Lama	20 orang	30,000,000	
17	Simpang Empat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Usaha Mikro (ternak ayam potong)	Berkat Mulia	1 paket	10,000,000	Dengan catatan penerima sudah berbadan hukum dan memenuhi aturan hibah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024. Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM tidak ada lagi, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yaitu :

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualtas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dab terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan focus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, : "**Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat Dan Mandiri Untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing**". Maju bermakna UMKM yang mampu bersaing di pasar Domestik dan Global.

Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk menjamin adanya keterkaitan antara misi dengan program pembangunan yang dioperasionalisasikan melalui berbagai aktivitas kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang pada akhirnya dapat menghadirkan keterwujudan daripada visi dan misi yang tergambar dalam berbagai ukuran keberhasilan.

Tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan tujuan utama pembangunan bidang koperasi dan Usaha Mikro untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

"***Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis***"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran ditetapkan pula indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi PD. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran
	Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran	Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM

	Meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Dimana untuk mencapai dan memenuhi sasaran-sasaran tersebut disusunlah Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman yang memuat berbagai langkah dan usaha strategis yang terimplementasi dalam sejumlah program dan kegiatan.

3.2 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapat peranan untuk mewujudkan misi ke 2 pada RPJMD Kab. Banjar Tahun 2021-2026 sesuai kewenangan yang dimilikinya. Dengan mengacu pada visi dan misi daerah tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilengkapi indikator kinerja dan target kinerjanya. Berangkat dari hal tersebut maka disusunlah langkah-langkah dan rencana strategis yang lebih operasional meliputi penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 dimasukan 8 program dengan 14 kegiatan yang terdiri dari program prioritas dan program penunjang. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD ada tujuh (7) Program dengan delapan (8) kegiatan yaitu :

   1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, terdiri dari kegiatan :

      a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri dari kegiatan :
   a) Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, terdiri dari kegiatan :
   a) Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, terdiri dari kegiatan :
   a) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, terdiri dari kegiatan :
   a) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari kegiatan :
   a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7. Program Pengembangan UMKM terdiri dari kegiatan :
   a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Oreintasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

c. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD.

Rumusan program, kegiatan serta indikator kinerja sudah sesuai dengan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD, namun besaran target capaian dan pagu indikatif yang ditetapkan berbeda. Dari tujuh program dan dua belas kegiatan prioritas yang disampaikan dalam rumusan rencana program dan

kegiatan prioritas perangkat daerah tahun 2022 diatas, semua program dan kegiatan tersebut pagu indikatifnya disusun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD, karena :

- TAPD menetapkan bahwa pagu indikatif tahun 2022 Rp. 2.925.850.000,-
- Adanya pengurangan jumlah target kinerja pada beberapa program dan kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Banjar. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 mencakup 8 program terdiri dari 14 kegiatan yaitu :

Tabel. 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGAM/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2022	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**1.533.650.000**
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	100 persen	**95.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perengkat Daerah	8 Dokumen	35.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SK{D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	60.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 persen	**42.200.000**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN yang terpenuhi	12 bulan	22.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	20.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100.000.000**

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan dan Kompetensinya	12 bulan	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**485.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 bulan	10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik kantor	7 unit	80.000.000
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	75.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan Konsultasi didalam dan luar daerah	12 bulan	20.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah**	12 bulan	300.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau lapangan	100 persen	**70.000.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	2 unit	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 unit	20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi		428.650.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jasa Pelayanan Umum Knator yang terpenuhi	12 bulan	25.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	12 bulan	403.650.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan dalam Kondisi baik	**100 Persen**	**355.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan	40.000.000

Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	120.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	1 gedung/Bangunan	150.000.000
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi izin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi Persentae Koperasi yang memiliki Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	100 persen 56,90 persen	**55.000.000**
Peneribitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah/Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten**/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam**	6 KSP/USP	**45.000.000**
Fasiltasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemenuhan Izin simpan pinjam	6 KSP/USP	45.000.000
Penerbitan Izin Pembukaaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupten/Kota	**Jumlah Rekomendasi izin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi**	**1 koperasi**	**10.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang ,Cabang Pembatu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Rekemondasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	1 koperasi	10.000.000

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan	19,63 persen 29,31 persen	**100.000.000**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	32 koperasi 9 koperasi	**100.000.000**
Pengawasan Kekuatan,Kesehatan, Kemandiriian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi diawasi Jumlah KSP USP diawasi	32 koperasi 9 koperasi	50.000.000
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi diperiksa Jumlah KSP dan USP diperiksa	32 koperasi 9 koperasi	50.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Sehat	13,79 persen	**100.000.000**
Penilian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalamm 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan Jumlah KSP/USP Koperasi menerima penghargaan**	58 KSP/USP 6 koperasi	**100.000.000**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah yang dinilai kesehatan KSP dan USP	58 KSP/USP	30.000.000
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah yang dinilai kesehatan KSP dan USP	6 koperasi	70.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHANN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	17,29 koperasi	**120.000.000**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian**	**60 pengurus koperasi**	**120.000.000**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuann Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi	Jumlah anggota yang memahami tentang perkoperasian	60 pengurus koperasi	120.000.000

SDM Koperasi			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya**	**33,74 persen**	**850.000.000**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupoaten/Kota	**Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan**	**72 koperasi**	850.000.000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah koperasi yang terfasilitasi Akses pasar 2. Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaan 3. Jumlah Koperasi yang mendapat Penguatan Kelembagaan 4. Jumlah Koperasi yang mendapat Penataan Manajemen 5. Jumlah Koperasi yang mendapat Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperaasi	30 koperasi 30 koperasi 5 koperasi 5 koperasi 5 koperasi	850.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro**	**8,36 persen**	**463.222.000**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**1. Persentase jumlah usaha mikro yang dinput ke dalam system onlie data system (ODS)** **2. Persentae jumlah usaha mikro yang bermitra** **3. Persentae jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendamping**	19,3 persen 6,0 persen 2,38 persen	**463.222.000**
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)	10.000 pelaku usaha mikro	60.000.000
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	550 pelaku usaha mikro	80.000.000

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2.000 pelaku usaha mikro	120.000.000
Pemberdayaan Kelembagaan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan dari lembaga pendamping	5 pelaku usaha mikro	140.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi dengan para pemangku Kepentingan	2 dokumen	63.222.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya**	**9,35 persen**	**326.444.000**
Pengembangan Usaha Mikro denganOrientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya** **Persentaase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan** **Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan** **Persentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI**	4,68 persen 4,68 persen 0,78 persen 1,28 persen	**326.444.000**
Faslitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1. Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan 2. Jumlah Usaha Mikro yang terfasiltasi Pemasaran 3. Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Desain dan Teknologi	25 pelaku usaha mikro 150 pelaku usaha mikro 60 pelaku usaha mikro 5 palaku usaha mikro	66.444.000 150.000.000 90.000.000 20.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kopoerasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Banjar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhaanahu Wata'ala Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renja Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021 dan Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar ini merupakan salah satu tolak ukur dan gambaran untuk melaksanakan program dan kegiatan dinas pada tahun 2022.

Semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar hendaknya dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya.

Atas kerjasama yang baik dan kerja keras Tim Penyusun beserta Panitia Pelaksana kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun ke 5 Tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Rencana Kerja yang telah disusun diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan, tetapi harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hokum adil dan responsive.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencaaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan sector penanaman modal di Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator

kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan berisikan alternative solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang baru/ tidak/ belum direalisasikan/ dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target/tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun pada awal tahun perencanaan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Rencana Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan Perizinan, yang meliputi informasi dan pengaduan, Perizinan jasa usaha, dan Perizinan tertentu.

Selain itu, adapun Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 telah ditetapka visi dan misi Bupati Kabupaten Banjar terpilih periode 2016-2021.

Visi Kabupaten Banjar adalah *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah"* yang dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera; sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengadung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.

Barokah; barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Banjar 2016-2021, maka ditetapkan misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial,
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan,
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah,
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Berdasarkan urusan dan wewenang yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkontribusi dalam mewujudukan Misi Ketiga dan Kelima sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar pada tahun 2021 melaksanakan 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar pada tahun 2021 didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	Rp 1.734.170.000.000,-
		Realisasi jumlah investor	90 investor
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	82,2 %

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	18				Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal									
2	**18**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhnya penunjang urusan pemerintah daerah**	100.00							
2	**18**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah**	**Persentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	100.00							
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	100.00							
2	**18**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100.00							
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	14.00							

2	18	1	2.02	2	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	13.00							
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1.00							
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semsteran yang tersusun	12.00							
2	**18**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang tersedia**	11							
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensi Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.00							
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat kualitas dan kompetensinya	4.00							
2	**18**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12.00							
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12.00							
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	12.00							
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	12.00							
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12.00							
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.00							
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu yang terfasilitasi	12.00							
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah yang terfasilitasi	12.00							
2	**18**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	1.00							
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pada gedung kantor	1.00							
2	**18**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12.00							
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Perangko	12.00							

2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12.00							
2	**18**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	12.00							
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	12.00							
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	12.00							
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	12.00							
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	12.00							
2	**18**	**3**			**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah Investor Baru	0							
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah seminar yang dilaksanakan Jumlah Peserta yang memahami potensi investasi daerah	0							
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	0							
2	**18**	**4**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	- Realisasi investasi (dalam rupiah) - IKM	1.734.170.000.000 82,2							
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya kemudahan dalam pelayanan administrasi perizinan di Kab.Banjar	100.00							
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang berbasis IT	100.00							
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah dokumen IKM	2.00							

2	**18**	**5**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Realisasi jumlah investor	90.00							
2	**18**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya data informasi yang akurat tentang perkembangan investasi di Kab.Banjar	100.00							
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	85 laporan							
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi	4 keg							
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	4 keg							
2	**18**	**6**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan berusaha dan non perizinan	1.00							
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Aplikasi satu sistem perizinan yang terintegrasi	1.00							
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sistem yang terintegrasi Jumlah Laporan informasi layanan perijnan berusaha	1.00							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari sasaran yang telah ditetapkan sesuai yang termuat dalam RPJMD mencapai target sesuai dengan harapan.

Rincian analisis capaian masing – masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Sasaran meningkantnya nilai investasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu nilai investasi yang masuk di Kabupaten Banjar serta jumlah investor baru setiap tahunnya.

Adapun tingkat capaian sasaran meningkatnya nilai investasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 (Sasaran ke-1)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Realisasi investasi dalam rupiah)	Rupiah	1.734.170.000.000		
2	Realisasi jumlah nvestor	Investor	90		

2.2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari masyarakat yang berusaha di Kabupaten Banjar.

Adapun tingkat capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 (Sasaran ke-2)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	82,2		

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Realisasi Investasi (dalam rupiah)			-	1,700,000,000,000	1,717,000,000,000	1,734,170,000,000	-	1,024,139,054,828	1,414,823,443,382			
2	Realisasi jumlah investor			-	30	60	90	-	37	30			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81.9	82	82.1	82.2	82.58	83.2	79.68			

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, tentunya tidak akan terlepas dari kendala atau permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Untuk mengidentifikasi persalahan baik dari internal maupun eksternal organisasi dapat dilakukan dengan membandingkan anatara kondisi sekarang organisasi dengan kondisi yang diinginkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP didukung dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan :

1. Masih rendahnya pertumbuhan investasi Daerah
2. Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Masih adanya tarik ulur kewenangan terkait perizinan dengan dinas tehnis
2. Masih adanya keterlambatan proses perizinan akibat terlambatnya rekomendasi dari dinas tehnis
3. Kesadaran masyarakat tentang perizinan masih rendah
4. Masih terjadi pertentangan pendapat / opini terkait pelayanan dengan dinas tehnis
5. Masih rendahnya kesadaran pegawai dalam hal disiplin
6. Kurangnya SDM DPMPTSP yang secara disiplin ilmu berkesesuaian dengan jenis perizinan yang di tangani

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 serta urusan pemerintah yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yakni : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah" dan dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial,
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan,
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah,
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

Pokok-pokok misi :

- Agama: pengamalan dan suasana keagamaan
- SDM: pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pelayanan social
- Pertumbuhan ekonomi, pendapatan : pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pertanian umum, agribisnis, agroindustri, daya saing komoditas unggulan daerah,

kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan

- Pemerataan dan keseimbangan : ekonomi dan pembangunan antar wilayah
- Pelayanan: pelayanan pemerintahan dan pelayanan public

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.9

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Banjar

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022(Usulan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal				**11,285,536,000**				
2	18					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				**11,285,536,000**				
2	18	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4,117,091,000**	**APBD**			
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelaporan kinerja DPMPTSP Kab.Banjar Tepat Waktu			24,000,000				
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	24,000,000	APBD			
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian keuangan DPMPTSP			1,848,220,000				
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan		APBD			

2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya honorarium pengelola keuangan, tambahan penghasilan ASN dan honorarium non ASN	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	1,838,220,000	APBD			
2	18	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	1 dokumen	5,000,000	APBD			
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran DPMPTSPr	DPMPTSP Kab. Banjar	18 laporan	5,000,000	APBD			
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			115,040,000				
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan terkait Penanaman Modal	Kab. Banjar dan Luar Daerah	12 bulan	63,360,000	APBD			
2	18	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	51,680,000	APBD			
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	reward atau honor tim perizinan, pegawai tidak tetap dan panitia/tim kegiatan			734,932,000				
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	25,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	50,000,000	APBD			

2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	50,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya anggaran cetak dan penggandaan DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	36,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya koran dan jasa publikasi di DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	35,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas seperti minum dan snack untuk Tamu di DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	40,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan di Luar Daerah maupun Dalam Daerah serta tersedianya makan dan minum rapat di DPMPTSP dan MPP	Kab.Banjar dan Luar Daerah	12 bulan	438,932,000	APBD			
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	tersedianya arsip yang tersusun rapi di DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	60,000,000	APBD			
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya peralatan gedung kantor			542,500,000	APBD			
2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	DPMPTSP Kab. Banjar	100 %	542,500,000	APBD			
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				215,385,000				

2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	DPMPTSP Kab. Banjar	10000 materai	12,000,000	APBD			
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	203,385,000	APBD			
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal			637,014,000				
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	38,990,000	APBD			
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	198,844,000	APBD			
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	6 keg	315,000,000	APBD			
2	18	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	84,180,000	APBD			
2	**18**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**526,810,000**	**APBD**			
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				456,810,000	APBD			
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	terbentuknya Perda dan SOP mengenai pemberian fasilitas/insentif	DPMPTSP Kab. Banjar	2 dokumen	456,810,000	APBD			
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				70,000,000	APBD			

2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	terlaksananya pembuatan video dan buku profil mengenai peluang investasi di Kab.Banjar	DPMPTSP Kab. Banjar	1 video dan 10 buku	70,000,000	APBD			
2	**18**	**03**				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**1,751,985,000**				
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1,751,985,000				
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	terlaksananya kegiatan pameran kabupaten, pendampingan pameran dalam dan luar negeri	DPMPTSP Kab. Banjar	9 kali	1,241,135,000	APBD			
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha yang mengikuti seminar potensi investasi dan tanda tangan MoU	DPMPTSP Kab. Banjar	50 pelaku usaha	510,850,000	APBD			
2	**18**	**04**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**1,770,050,000**				
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1,770,050,000				
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang terlayani	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	801,300,000	APBD			
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	terpenuhinya perizinan yang sesuai SOP	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	68,400,000	APBD			
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	330,950,000	APBD			

2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	terpenuhinya fasilitas pelayanan perizinan	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	569,400,000	APBD			
2	**18**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**2,052,650,000**				
2	18	05	2	01		Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2,052,650,000				
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah laporan evaluasi dan monitoring	DPMPTSP Kab. Banjar	4 laporan	348,200,000	APBD			
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	DPMPTSP Kab. Banjar	150 perusahaan	983,050,000	APBD			
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah laporan pengawasan	DPMPTSP Kab. Banjar	4 laporan	721,400,000	APBD			
2	18	06				**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**1,066,950,000**	APBD			
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,066,950,000	APBD			
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	tersedianya pemeliharaan dan pengupdate-an data serta adanya aplikasi database sistem Informasi PM	DPMPTSP Kab. Banjar	1 aplikasi	1,066,950,000	APBD			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun Usulan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak ada.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adapun Tema RPJMN IV (2020-2024) adalah: “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.” Tema RPJMN IV (2020 – 2024) dimaksud dapat disarikan dalam tiga kata kunci yaitu:

1. Struktur perekonomian yang kokoh;
2. Keunggulan kompetitif wilayah; dan
3. SDM Berkualitas.

Isu Strategis Bidang Ekonomi yang terpetakan, meliputi:

1. Transformasi belum berjalan, terdapat indikasi premature deindustrialization: kontribusi industri turun lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga sebelum mencapai sumbangan tertinggi.
2. Pertumbuhan ekonomi stagnan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2000 – 2017 masih di kisaran 5,3%.
3. Defisit transaksi berjalan yang masih tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan kajian (growth diagnostic), meliputi:

1. Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat;
2. Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja;
3. Kualitas infrastruktur yang masih rendah;
4. Intermediasi sektor keuangan rendah, dan pasar keuangan yang dangkal;
5. Sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan & stabilitas;
6. Sistem inovasi yang tidak efektif; dan
7. Keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Akar permasalahan faktor-faktor dimaksud berasal dari rendahnya inovasi dan kualitas investasi, sehingga berdampak pada tidak berjalannya transformasi struktural yang terlihat dari indikator: (1) Kontribusi industri manufaktur menurun; (2) kontribusi dan produktivitas tenaga kerja manufaktur relatif stagnan; dan (3) kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor rendah.

Isu strategis bidang ekonomi yang sudah terpetakan di atas dan dampak yang timbul dapat dijawab dengan memberi solusi terhadap tantangan yang ada berupa pemanfaatan sumber pertumbuhan baru (pariwisata dan ekonomi kreatif/digital) dan fasilitasi transformasi struktural melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Kabupaten Banjar yang terkait dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Misi Ke-3 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Komoditas Unggulan Daerah Lainnya dengan Pendekatan Agribisnis dan Industri Berwawasan Lingkungan Secara Berkelanjutan dan Misi Ke-5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Amanah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP seperti diuraikan pada Tabel 2.8. berikut ini.

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.428.971.677.815
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perijinan)	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Kabupaten Banjar.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program dan kegiatan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan maksud untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Banjar serta meningkatkan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktir yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :

a. Mal Pelayanan Publik
b. Inovasi terhadap layanan berbasis elektronik

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah program ada sebanyak 6 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan;
2. Sifat penyeberan lokasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pelaksanaannya berupa pelaksanaan sosialisasi

investasi, pameran tingkat kabupaten serta melakukan pendampingan pameran di luar daerah;

3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten dengan jumlah sebesar Rp 9.232.886.000,-

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
     - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
     - 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
     - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
     - 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
   - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
     - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
     - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
     - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.2.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

4.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

4.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2022 Kabupaten Banjar untuk sumber dana APBD Kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Banjar

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022(Usulan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal				**11,287,161,000**				
2	18					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				**11,287,161,000**				
2	18	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4,117,091,000**	**APBD**			
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelaporan kinerja DPMPTSP Kab.Banjar Tepat Waktu			24,000,000	APBD			
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	24,000,000	APBD			
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian keuangan DPMPTSP			1,848,220,000	APBD			
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan		APBD			

2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya honorarium pengelola keuangan, tambahan penghasilan ASN dan honorarium non ASN	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	1,838,220,000	APBD			
2	18	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	5,000,000	APBD			
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran DPMPTSPr	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	5,000,000	APBD			
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Banjar dan Luar Daerah	11 bulan	115,040,000	APBD			
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan terkait Penanaman Modal	Kab. Banjar dan Luar Daerah	12 bulan	63,360,000	APBD			
2	18	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	51,680,000	APBD			
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	reward atau honor tim perizinan, pegawai tidak tetap dan panitia/tim kegiatan	DPMPTSP Kab. Banjar		734,932,000				
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	25,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	50,000,000	APBD			

2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	50,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya anggaran cetak dan penggandaan DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	36,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya koran dan jasa publikasi di DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	100%	35,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas seperti minum dan snack untuk Tamu di DPMPTSP dan MPP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	40,000,000	APBD			
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan di Luar Daerah maupun Dalam Daerah serta tersedianya makan dan minum rapat di DPMPTSP dan MPP	Kab.Banjar dan Luar Daerah	12 bulan	438,932,000	APBD			
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	tersedianya arsip yang tersusun rapi di DPMPTSP	DPMPTSP Kab. Banjar	12 bulan	60,000,000	APBD			
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya peralatan gedung kantor	DPMPTSP Kab. Banjar	100 %	542,500,000	APBD			
2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	DPMPTSP Kab. Banjar	100 %	542,500,000	APBD			
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	215,385,000	APBD			

2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	DPMPTSP Kab. Banjar		12,000,000	APBD			
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Banjar dan Luar Daerah	60 perusahaan	203,385,000	APBD			
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	Kab.Banjar dan Luar Daerah	1 kali	637,014,000	APBD			
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	DPMPTSP Kab. Banjar	4 kali	38,990,000	APBD			
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	DPMPTSP Kab. Banjar	1 kegiatan	198,844,000	APBD			
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	DPMPTSP Kab. Banjar		315,000,000	APBD			
2	18	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	DPMPTSP Kab. Banjar	100 %	84,180,000	APBD			
2	**18**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**526,810,000**	**APBD**			
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti			456,810,000	APBD			
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		DPMPTSP Kab. Banjar		456,810,000	APBD			

2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				70,000,000	APBD			
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		DPMPTSP Kab. Banjar		70,000,000	APBD			
2	**18**	**03**				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**1,753,610,000**	APBD			
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen IKM			1,753,610,000	APBD			
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		DPMPTSP Kab. Banjar		1,242,760,000	APBD			
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		DPMPTSP Kab. Banjar		510,850,000	APBD			
2	**18**	**04**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**1,770,050,000**	APBD			
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya sosialiasi terkait pelaksanaan penanaman modal			1,770,050,000	APBD			
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		DPMPTSP Kab. Banjar		801,300,000	APBD			
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		DPMPTSP Kab. Banjar		68,400,000	APBD			
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		DPMPTSP Kab. Banjar		330,950,000	APBD			

2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah aplikasi pelayanan yang berbasis android	DPMPTSP Kab. Banjar		569,400,000	APBD			
2	**18**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**2,052,650,000**	APBD			
2	18	05	2	01		Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2,052,650,000	APBD			
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		DPMPTSP Kab. Banjar		348,200,000	APBD			
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		DPMPTSP Kab. Banjar		983,050,000	APBD			
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		DPMPTSP Kab. Banjar		721,400,000	APBD			
2	18	06				**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**1,066,950,000**	APBD			
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,066,950,000	APBD			
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		DPMPTSP Kab. Banjar		1,066,950,000	APBD			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan realisasi investasi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi investasi.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
   a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      a.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
   b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
      b.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
   a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      a.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
      a.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
   a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
      a.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
      a.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
      a.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
      a.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      a.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
      a.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
      a.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
   a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      a.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tahun 2022 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerinta Kabupaten Banjar 2016-2021.

Sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan diatasnya yaitu Restra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2021 merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja dibuat sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 207 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Induk Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar yang harus ditindak-lanjuti oleh seluruh unit kerja yang ada dalam Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar dalam Menyusun Rencana Program dan Kegiatan selama Satu Tahun kedepan dengan memperhatikan prinsip_prinsip Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel sesuai standar kinerja yang telah ditentukan.

21. Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang bersifat lebih operasional dan berfungsi sebagai terjemahan atas perencanaan Renstra SKPD. Renja memuat program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan).

Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022 ini mengacu pada RPJMD tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama periode Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyuluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya yang mengatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan;
2) Penyusunan Rancangan Awal;
3) Penyusunan Rancangan;
4) Perumusan Rancangan Akhir; dan
5) Penepatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 bertujuan untuk :

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2022 (Renja tahun 2022)
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Banjar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja , terhadap IKK.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten/Kota, Pokir Dewan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti : pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif dirinci menurut sumber pendanaan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB VPENUTUP

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.
b. Kaidah – kaidah pelaksan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

RENJA Tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar merupakan RENJA tahun pertama untuk Periode RENSTRA tahun 2021-2026 Kepala Daerah terpilih. Penyusunannya mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RENJA 2020 yang merupakan RENJA tahun akhir periode RENSTRA tahun 2016-2021. Meskipun RENJA tahun 2020 berada di periode RENSTRA yang berbeda dengan RENJA tahun 2022, secara kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan urusan Olahraga masih berkesesuaian sehingga masih relevan untuk dijadikan acuan pada penyusunan RENJA tahun 2022.

Hasil capaian tahun 2020 beberapa Program/Kegiatan telah memenuhi target kinerja dan beberapa masih belum memenuhi target kinerjanya, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :**
   a. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda mendapat capaian sebesar 37.03%.
   b. Peningkatan peran serta kepemudaan mendapat capaian sebesar 40%.
   c. Pembinaan dan permasyarakatan olahraga mendapat capaian sebesar 60%
   d. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga mendapat capaian sebesar 75.5%
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
   a. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan mendapat capaian sebesar 100% (target 100%, realisasi 100%).
   b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat capaian sebesar 100% (target 12 Bulan, realisasi 12 Bulan).
   c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat capaian sebesar 100% (target 12 Bulan, realisasi 12 Bulan).
   d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat capaian sebesar 100%
   e. Kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan mendapat capaian sebesar 100%
   f. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan mendapat capaian sebesar 100%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

   Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

   Hasil capaian semua program dan kegiatan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
   a. Faktor Tidak Tercapai yaitu pengurangan anggaran.
   b. Faktor Terpenuhi yaitu kelancaran anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, serta adanya komitmen dan upaya yang maksimal dalam pelaksanaan program serta kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu peningkatan target pada tahun 2021.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu mencermati dalam menentukan target mengacu pada anggaran yang tersedia dan keadaan yang terjadi, serta terus melakukan inovasi serta melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

Untuk tahun 2021 diperkirakan beberapa program maupun kegiatan tidak tercapai karena adanya rasionalisasi anggaran dan adanya faktor eksternal yang memaksa beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s/d Tahun 2021

(SEBELUM PMDN 90)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja RENJA Tahun 2020	Realisasi RENJA 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				K	K	K	K			
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terwujudnya tertib pelayanan administrasi**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100**			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahub	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi, konsultasi dan pengembangan wawasan bagi aparatur ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			
	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tertib pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Tercapaianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 tahun**	**100**			
	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	**1 Tahun**	**1 Tahun**	2 Jenis	1 Jenis	100			
	Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	1 Tahun	1 Buah	1 Buah	100			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	1 Tahun	4 Buah	4 Buah	100			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	6 Jenis	5 Jenis	100			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 tahun**	**100**			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100			
	Program pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	**Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 tahun**	**100**			

	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Tahun	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah	1 Tahun	1 Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKAP, DPAP	1 Tahun	1 Tahun	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Koordinasi penyusunan laporan knerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja (LPPD, LKJIP, LKPJ)	1 Tahun	1 Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	200			
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil monev	1 Tahun	1 Tahun	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100			
	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	**Persentase pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan**	**0.27**	**0.21**	**0.11%**	**0.10%**	**90.9**			
	Pembinaan keimanan dan ketaqwaan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan IMTAQ	400 Orang	400 Orang	75 orang	75 Orang	100			
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	**Persentase organisasi pemuda yang dbina**	**50%**	**30%**	**40%**	**20%**	**50**			
	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah pemuda yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	349 Orang	260 Orang	350 orang	350 Orang	100			
	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti aksi bhakti sosial kepemudaan yang difasilitasi	150 Orang	150 Orang	50 Orang	13 Orang	26			
	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	122 Orang	70 orang	50 Orang	50 Orang	100			
	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti pekan temu wicara organisasi kepemudaan	70 Orang	-	50 Orang	-	-			

	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	**Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga**	**100%**	**60%**	**60%**	**60%**	**100**			
	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Atlet pelajar berbakat	100	120	100 atlet	100 atlet	100			
	Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah	Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah yang dibina dan Olahraga Unggulan Daerah Kab. Banjar yang dikembangkan	5 cabor	5 Cabor	5 cabor	6 cabor	120			
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kegiatan Senam Minggu Pagi Ceria dan Coaching Clinic dan Data Indeks Kebugaran dan Lomba Olahraga Tradisiona	44 kali	44 kali	32 kali	21 kali	65.62			
	Pengembangan olahraga lanjut usia termsuk penyandang cacat	Kompetisi Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat (SOINA, PEPARPEDA)	55 atlet	55 atlet	55 atlet	20 atlet	36			
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	**Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik**	**20%**	**10%**	**15%**	**15.1%**	**100**			
	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah laporan sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah Daerah	1 laporan	-	1 Laporan	1 laporan	100			
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Sarana dan Prasrana Olahraga milik pemerintah daerah yang (Lap. Tenis, Voli, Lapangan Mini Barakat, Gedung Dojo) dan laporan Monev	7 venue	7 venue	5 Venue	1 venue	20			

2.3. Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s/d Tahun 2021

(PMDN 90)

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d Tahun Berjalan (TW II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (10/4)
2	**Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**								**24.44%**	
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.**						**100%**		
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**						**100 Persen**	**0%**	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, IKU, RKT, dan RKT Perubahan.						6 Dokumen		
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja, LPPD, LKPJ, IKK.						3 Dokumen		
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK						16 laporan		
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan admnistrasi						21 Orang		

		pelaksanaan tugas ASN								
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga kontrak						21 Orang		
		Stand pameran						1 Stand		
2.19.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu						1 Laporan		
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**		-				**100%**		
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis		-				8 Orang		
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor**		**-**				**55114 Lembar**		
		Pemenuhan jasa dan peralatan perlengkapan kantor untuk pelayanan kerumah tanggaan						**10 Jenis**		
		Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan, pemenuhan pelayanan makan minum rapat, tamu						**15 Jenis**		
		Persentase rapat koordinasi luar dan dalam daerah yang dapat terpenuhi						**100 Persen**		
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis alat/ bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer		-				6 Jenis		

		Jumlah jenis bahan-bahan lainnya						4 Jenis		
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan		-				9 Jenis		
		Pemenuhan pelayanan makan minum rapat dan jamuan tamu						460 Orang		
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetak untuk pelayanan administrasi kantor		-				2 Jenis		
		Pemenuhan barang penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor						30000 Lembar		
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dalam daerah		-				1 Tahun		
		Terpenuhinya rapat koordinasi luar daerah						1 Tahun		
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**		-				**7 Jenis**		
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kursi kerja		-				2 Buah		
		Terpenuhinya Laptop dan PC						1 Unit		
		Terpenuhinya meja kerja						2 Buah		
		Terpenuhinya printer						1 Unit		
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran.		-				28 Jenis		
		Pemenuhan pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.						36 Kwitansi		

		Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik.						550 lembar		
2.19.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik		-				500 lembar		
2.19.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan pembayaran PDAM						24 Kwitansi		
		Pemenuhan pembayaran internet speedy						12 Kwitansi		
		Pemenuhan pembayaran listrik						36 Kwitansi		
		Pemenuhan perbaikan alat listrik						7 Jenis		
2.19.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran						28 Jenis		
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa service/ perbaiakn peralatan kerja**						**23 Unit**		
		Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabtan yang terpelihara dengan baik						**1 Unit**		
		Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik						**6 Unit**		
		Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara dengan baik						**5 Jenis**		
2.19.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabatan yang						1 Unit		

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	terpelihara dengan baik								
		Pemenuhan STNK mobil jabatan						1 Unit		
2.19.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Kendaraan Dinas Operasional roda 2 yang terpelihara dengan baik						3 Unit		
		Pemenuhan kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara dengan baik						3 Unit		
		Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 2						3 Unit		
		Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 4						3 Unit		
2.19.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya jasa service/ perbaikan peralatan kerja						15 Unit		
2.19.01.2.09 .09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara dengan baik						3 Jenis		
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase pemuda yang berdaya saing**						**17%**		
2.19.02.2.0 1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemuda yang berdaya saing**						**17%**		

2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang berdaya saing dalam wira usaha muda						60 Orang		
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan						150 Orang		
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera						150 Orang		
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemuda yang berdaya saing**						**30 Persen**		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah OKP yang mendapatkan pelatihan dalam mengembangkan organisasinya						2 OKP		
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Persentase atlet yang berdaya saing**						**25%**		
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional di kecamatan Martapura**						**16%**		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeliharaan prasarana olahraga						3 Venue		
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah atlet pemuda dan santri mengikuti kejuaraan tingkat provinsi**						**70 Atlet**		

2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabor yang diselenggarakan pada kejuaraan						5 Cabor		
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah atlet pemuda dan santri yang dibina untuk mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi**						**100 Atlet**		
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang dikirim pada Peparpeda						35 Atlet		
		Jumlah atlet yang dikirim pada POPDA						100 Atlet		
		Jumlah atlet yang dikirim pada SOIna						35 Atlet		
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah organisasi olahraga yang dibina untuk mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi**						**4 Organisasi**		
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi penerima hibah						2 Organisasi		
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga**						**1%**		
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan senam minggu pagi ceria (SMPC)						44 Minggu/ Kali		
		Jumlah peserta event olahraga massal memperingati Harjad dan Haornas						70 Peserta		
2.13	**Urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan Olahraga**									

2.13.01	**Dinas Pemuda dan Olahraga**									
2.13.2.13.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
2.13.2.13.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		91.72%	900 Lembar	900 Lembar	100%			
2.13.2.13.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon dan internet		94.44%	36 Kwitansi	25 Kwitansi				
2.13.2.13.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor		105.56%	20 jenis	20 Jenis	100%			
2.13.2.13.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa service/perbaikan peralatan kerja		85.71%	9 jenis	7 jenis				
2.13.2.13.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		99.10%	36 Jenis	36 Jenis	100%			
2.13.2.13.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100%	58000 lembar	30236 lembar				
2.13.2.13.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor		85%	10 Jenis	10 jenis	100%			
2.13.2.13.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makan dan minum pegawai, tamu, dan peserta rapat		80.11%	-	-	-			
2.13.2.13.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi, konsultasi, dan pengembangan wawasan bagi aparatur ke dalam daerah maupun luar daerah		96.40%	1 Tahun	1 Tahun	100%			
2.13.2.13.01.01.19	Penyediaan pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tertib pelayanan administrasi perkantoran		95.86%	1 Tahun	1 Tahun	100%			
2.13.2.13.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**									
2.13.2.13.01.02.07	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	2 Jenis	2 Jenis	100%			

2.13.2.13.01.02.23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Tersedianya BBM, Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan		100%	1 Mobil	1 Mobil	100%			
2.13.2.13.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		94.44%	4 Mobil	4 Mobil	100%			
2.13.2.13.01.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan kantor		87.50%	5 Jenis	5 Jenis	100%			
2.13.2.13.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								
2.13.2.13.01.05.03	Bimibingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Terlaksananya bimtek dalam daerah dan luar daerah		94%	1 Tahun	1 Tahun	100%			
2.13.2.13.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**								
2.13.2.13.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Akhir Keuangan Akhir tahun SKPD		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.13.2.13.01.06.08	Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Terwujudnya Implementasi dan Sinkronisasi Perencaan Program dan Kegiatan		100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
2.13.2.13.01.06.09	Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Terwujudnya Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
2.13.2.13.01.06.10	Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD	Terwujudnya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
2.13.2.13.01.06.12	Monitoring dan evaluasi	Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Laporan		100%	-	-	-			

		Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD								
2.13.2.13.01.15	**Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda**	**Persentasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan**								
2.13.2.13.01.15.01	Pendataan Potensi Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan Napak Tilas, PPAN, KPN, seleksi PASKIBRA, BPAP		-	-	-	-			
2.13.2.13.01.15.03	Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan	Terlaksananya pengkajian perda kepemudaan		100%	-	-	-			
2.13.2.13.01.15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terbinanya Kegiatan Organisasi Kepemudaan		82.50%	75 Orang	75 Orang	100%			
2.13.2.13.01.15.07	Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda Dengan Masyarakat.	Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda dengan Masyarakat		53.85%	-	-	-			
2.13.2.13.01.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**								
2.13.2.13.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terselenggaranya diklat PASKIBRAKA, dan Kursus Pembinaan Mahir Dasar/Lanjutan		88.08%	200 orang	200 orang	100%			
2.13.2.13.01.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terlaksananya kemah kerja pemuda dan aksi pemuda peduli sampah		100%	12 Orang	12 Orang	100%			
2.13.2.13.01.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda			-	0 Orang	0 Orang	100%			
2.13.2.13.01.16.06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya kegiatan kreasi pemuda berupa Paduan Suara PHBN, dan seleksi kepemudaan (PPAN, BPAP/JPI, KPN)		172.86%	50 Orang	50 Orang	100%			

2.13.2.13.01.20	**Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**	**Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**								
2.13.2.13.01.20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terfasilitasinya identifikasi bakat potensi olahraga pelajar pada ajang POPDA		101.67%	100 Atlet	98 Atlet				
2.13.2.13.01.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Daerah	Terlaksananya Olahraga Massal bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat		100%	5 Cabor	5 cabor				
2.13.2.13.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya senam massal setiap minggu		100%	32 Kali	25 Kali				
2.13.2.13.01.20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terselenggaranya pengembangan olahraga bagi lanjut usia termasuk penyandang cacat		145.45%	20 atlet	20 atlet	100%			
2.13.2.13.01.21	**Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga**	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**								
2.13.2.13.01.21.03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga			74.32%	1 laporan	1 laporan	100%			
2.13.2.13.01.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga			2 Venue	2 venue	100%			

Tabel diatas diisi berdasarkan pelaksanaan pada periode Rencana Strategis (RENSTRA) sebelumnya, oleh karena itu terdapat beberapa kolom yang tidak dapat diisi dikarenakan adanya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 yang menyebabkan perbedaan nomenklatur. Untuk tahun 2021 merupakan masa transisi dan hasil pemetaan dari nomenklatur sebelumnya menjadi PERMENDAGRI 90 Tahun 2019.

2.4. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar

NO	Indikator	SPM / standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Realisasi
				2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IKU/ IKK PERANGKAT DAERAH											
1	jumlah medali yang diperoleh.											
2	jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat prov dan nasional.					120	240					
3	jumlah Wirausaha muda					240	480					
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		76,44%									
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		76,24%									
6	Peningkatan prestasi olahraga.		1									
7	persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan		73,6%									

2.5. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Melalui Misi ke 5 bertanggungjawab terhadap pencapaian program strategis kepala daerah untuk menuju Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pemuda, dan Olahraga Kabupaten Banjar yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, kajian terhadap visi misi kepala daerah, kajian Renstra KL dan Kajian RTRW, sebagai berikut :

1. Kurangnya Partisipasi Pemuda di Organisasi Kepemudaan

   Meningkatnya jumlah pemuda dalam organisasi / klub non formal seperti klub motor, dll yang perannya kurang bersentuhan dengan pembangunan. Yang jika dibiarkan akan mengarahkan pemuda ke arah yang negatif bahkan peningkatan kriminalitas oleh para pemuda seperti penyalahgunaan NAFZA, dll. Hal ini tentunya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah ataupun mitra kerja bidang kepemudaan untuk mengarahkan para pemuda ke arah organisasi yang lebih positif yang diharapkan menjadi pelopor kepemimpinan bagi masyarakat sekitar.
2. Masih minimnya sarana dan prasarana kepemudaan yang dimiliki seperti belum adanya *Youth Center*, Sarana Perkemahan Pemuda, dll.

   Minimnya sarana dan prasarana kepemudaan di daerah menjadi masalah utama dan sangat diharapkan keberadaanya bagi organisasi kepemudaan, mengingat perannya yang penting yaitu sebagai wadah penumbuhan jati diri generasi muda yang diharapkan dapat menghindarkan pemuda dari perilaku menyimpang seperti kenakalan dan kriminalitas, sebagai pusat pengembangan generasi muda dalam membangun kemampuan diri secara mandiri dengan bertukar ide, pikiran dan pengetahuan para pemuda, dll.
3. Belum Membudayanya Olahraga di Masyarakat

   Masalah budaya olahraga dalam rangka peningkatan kebugaran dan produktivitas bagi masyarakat Kabupaten Banjar masih belum merata ditiap – tiap daerah khususnya di Kecamatan dan Desa hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas umum bagi masyarakat untuk melakukan olahraga massal, tidak halnya seperti kota Kabupaten yang sudah menerapkan Senam Minggu Pagi Ceria untuk setiap hari minggu, dan diharapkan agar Kecamatan / Desa lainnya agar melakukan hal yang sama dalam rangka pembudayaan olahraga di masyarakat.
4. Rendahnya Daya Saing Prestasi Olahraga

   Menurunnya peringkat olahraga prestasi daerah di kejuaraan tingkat nasional, dipengaruhi dari rendahnya kualitas SDM Olahraga seperti kurangnya tenaga keolahragaan yang bersertifikasi dan professional, kurangnya sarana dan prasarana penunjang latihan yang memadai, yang akhirnya berdampak terhadap kualitas atlet pelajar.

2.6. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar T.A 2022 dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan tingkat kinerja yang dicapai sebelumnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table 2.4, berikut :

1212

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah :Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/ Program Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/ Program Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.	100%	1.515.172.104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.	100%	1.240.546.704	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	22.498.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	22.498.300	

2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, IKU, RKT, dan RKT Perubahan.	6 Dokumen	13.999.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, IKU, RKT, dan RKT Perubahan.	6 Dokumen	13.999.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya dokumen laporan kinerja, LPPD, LKPJ, IKK.	3 Dokumen	4.999.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya dokumen laporan kinerja, LPPD, LKPJ, IKK.	3 Dokumen	4.999.500	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK	16 laporan	3.499.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK	16 laporan	3.499.800	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN**	**21 Orang**	**601.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	21 Orang	656.200.000	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah tenaga kontrak	21 Orang	597.900.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah tenaga kontrak	21 Orang	653.100.00	
			Stand pameran	1 Stand				Stand pameran	1 Stand	3.100.000	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu	1 Laporan	3.100.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu	1 Laporan	4.400.000	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian**		**Terpenuhinya layanan**	**100%**	**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya layanan**	**100%**	4.400.000	

	Perangkat Daerah		**administrasi perkantoran**					**administrasi perkantoran**			
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis	8 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis	8 Orang	4.400.000	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor**	**55114 Lembar**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor**	**55114 Lembar**		
			Pemenuhan jasa dan peralatan perlengkapan kantor untuk pelayanan kerumah tanggaan	**10 Jenis**				**Pemenuhan jasa dan peralatan perlengkapan kantor untuk pelayanan kerumah tanggaan**	**10 Jenis**		
			Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan, pemenuhan pelayanan makan minum rapat, tamu	**15 Jenis**	**329.992.400**			**Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan, pemenuhan pelayanan makan minum rapat, tamu**	**15 Jenis**	179.706.800	
			Persentase rapat koordinasi luar dan dalam daerah	**100 Persen**				**Persentase rapat koordinasi luar dan dalam daerah yang**	**100 Persen**		

			yang dapat terpenuhi					**dapat terpenuhi**			
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.		Jumlah jenis alat/ bahan untuk kegiatan kantor- bahan computer	6 Jenis	19.999.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.		Jumlah jenis alat/ bahan untuk kegiatan kantor- bahan computer	6 Jenis	13.723.800	
			Jumlah jenis bahan-bahan lainnya	4 Jenis				Jumlah jenis bahan-bahan lainnya	4 Jenis		
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan	9 Jenis	29.999.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan	9 Jenis	19.614.000	
			Pemenuhan pelayanan makan minum rapat dan jamuan tamu	460 Orang				Pemenuhan pelayanan makan minum rapat dan jamuan tamu	460 Orang	19.086.000	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Pemenuhan barang cetak untuk pelayanan administrasi kantor	2 Jenis	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Pemenuhan barang cetak untuk pelayanan administrasi kantor	2 Jenis	127.283.000	
			Pemenuhan barang penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor	30000 Lembar				Pemenuhan barang penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor	30000 Lembar		
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		Terpenuhinya rapat koordinasi dalam daerah	1 Tahun	249.993.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terpenuhinya rapat koordinasi dalam daerah	1 Tahun	127.283.000	

	Konsultasi SKPD		Terpenuhinya rapat koordinasi luar daerah	1 Tahun				Terpenuhinya rapat koordinasi luar daerah	1 Tahun		
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**	**7 Jenis**	**97.969.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**	**7 Jenis**	**30.362.000**	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya kursi kerja	2 Buah	**97.969.000**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya kursi kerja	2 Buah	30.362.000	
			Terpenuhinya Laptop dan PC	1 Unit				Terpenuhinya Laptop dan PC	1 Unit		
			Terpenuhinya meja kerja	2 Buah				Terpenuhinya meja kerja	2 Buah		
			Terpenuhinya printer	1 Unit				Terpenuhinya printer	1 Unit		
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**		Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran.	28 Jenis	**148.498.404**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**		Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran.	28 Jenis	**144.8989.604**	
			Pemenuhan pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	36 Kwitansi				Pemenuhan pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	36 Kwitansi		
			Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik.	550 lembar				Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik.	550 lembar		
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik	500 lembar	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik	500 lembar	5.000.000	

2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pemenuhan pembayaran PDAM	24 Kwitansi	118.498.604	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pemenuhan pembayaran PDAM	24 Kwitansi	116.511.104	
			Pemenuhan pembayaran internet speedy	12 Kwitansi				Pemenuhan pembayaran internet speedy	12 Kwitansi		
			Pemenuhan pembayaran listrik	36 Kwitansi				Pemenuhan pembayaran listrik	36 Kwitansi		
			Pemenuhan perbaikan alat listrik	7 Jenis				Pemenuhan perbaikan alat listrik	7 Jenis		
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	28 Jenis	24.999.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	28 Jenis	23.387.500	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan jasa service/ perbaiakn peralatan kerja**	**23 Unit**	**265.214.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pemenuhan jasa service/ perbaiakn peralatan kerja**	**23 Unit**	**202.481.000**	
			Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabtan yang terpelihara dengan baik	**1 Unit**				**Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabtan yang terpelihara dengan baik**	**1 Unit**		
			Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik	**6 Unit**				**Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik**	**6 Unit**		
			Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang	**5 Jenis**				**Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang**	**5 Jenis**		

			terpelihara dengan baik					**terpelihara dengan baik**			
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabatan yang terpelihara dengan baik	1 Unit	40.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabatan yang terpelihara dengan baik	1 Unit	40.990.000	
			Pemenuhan STNK mobil jabatan	1 Unit				Pemenuhan STNK mobil jabatan	1 Unit		
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemenuhan Kendaraan Dinas Operasional roda 2 yang terpelihara dengan baik	3 Unit	149.979.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemenuhan Kendaraan Dinas Operasional roda 2 yang terpelihara dengan baik	3 Unit	115.141.000	
			Pemenuhan kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara dengan baik	3 Unit				Pemenuhan kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara dengan baik	3 Unit		
			Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 2	3 Unit				Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 2	3 Unit		
			Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas	3 Unit				Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 4	3 Unit		

			operasional roda 4								
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya jasa service/ perbaikan peralatan kerja	15 Unit	24.245.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya jasa service/ perbaikan peralatan kerja	15 Unit	16.350.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	3 Jenis	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	3 Jenis	30.000.000	
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**17%**	**1.049.999.900**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**17%**	**1.369.511.600**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota**		**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**17%**	**949.999.900**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota**		**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**17%**	**1.305.361.600**	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan		Jumlah pemuda yang berdaya saing dalam wira usaha muda	60 Orang	299.999.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya		Jumlah pemuda yang berdaya saing dalam wira usaha muda	60 Orang	774.416.600	

	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula					Saing Wira Usaha Pemula					
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan	150 Orang	150.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan	150 Orang	145.600.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah peserta seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	150 Orang	500.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah peserta seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	150 Orang	385.345.000	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/ Kota**		**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**30 Persen**	**100.000.000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/ Kota**		**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**30 Persen**	**64.150.000**	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota		Jumlah OKP yang mendapatkan pelatihan dalam mengembangkan organisasinya	2 OKP	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota		Jumlah OKP yang mendapatkan pelatihan dalam mengembangkan organisasinya	2 OKP	64.150.000	
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**		**Persentase atlet yang berdaya saing**	**25%**	**2.403.764.996**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**		**Persentase atlet yang berdaya saing**	**25%**	**6.650.980.396**	

2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional di kecamatan Martapura**	**16%**	**135.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional di kecamatan Martapura**	**16%**	**95.000.000**	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota		Jumlah pemeliharaan prasarana olahraga	3 Venue	135.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota		Jumlah pemeliharaan prasarana olahraga	3 Venue	95.000.000	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah atlet pemuda dan santri mengikuti kejuaraan tingkat provinsi**	**70 Atlet**	**400.378.000**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah atlet pemuda dan santri mengikuti kejuaraan tingkat provinsi**	**70 Atlet**	**246.355.100**	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah cabor yang diselenggarakan pada kejuaraan	5 Cabor	400.378.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah cabor yang diselenggarakan pada kejuaraan	5 Cabor	246.355.100	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat**		**Jumlah atlet pemuda dan santri yang dibina untuk mengikuti kejuaraan**	**100 Atlet**	**568.113.100**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah atlet pemuda dan santri yang dibina untuk mengikuti kejuaraan**	**100 Atlet**	**481.420.900**	

	Daerah Provinsi		**olahraga prestasi tingkat provinsi**					**olahraga prestasi tingkat provinsi**			
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah atlet yang dikirim pada Peparpeda	35 Atlet	568.113.100	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah atlet yang dikirim pada Peparpeda	35 Atlet	481.420.900	
			Jumlah atlet yang dikirim pada POPDA	100 Atlet				Jumlah atlet yang dikirim pada POPDA	100 Atlet		
			Jumlah atlet yang dikirim pada SOIna	35 Atlet				Jumlah atlet yang dikirim pada SOIna	35 Atlet		
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Jumlah organisasi olahraga yang dibina untuk mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi**	**4 Organisasi**	**1.200.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Jumlah organisasi olahraga yang dibina untuk mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi**	**4 Organisasi**	**5.745.000.000**	
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah organisasi penerima hibah	2 Organisasi	1.200.000.000	Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah organisasi penerima hibah	2 Organisasi	5.745.000.000	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Persentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga**	**1%**	**100.273.896**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Persentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga**	**1%**	**83.204.396**	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah kegiatan senam minggu pagi ceria (SMPC)	44 Minggu/ Kali	100.273.896	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah kegiatan senam minggu pagi ceria (SMPC)	44 Minggu/ Kali	83.204.396	

			Jumlah peserta event olahraga massal memperingati Harjad dan Haornas	70 Peserta				Jumlah peserta event olahraga massal memperingati Harjad dan Haornas	70 Peserta		

2.7. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan pemulasaran Jenazah bagi pemuda dan organisasi kepemudaan.	Desa Apuai, Kab.Banjar		1 Paket	**Diterima**
2	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Desa Tiwingan Baru, Kab. Banjar		1Paket	**Diterima**
3	Pelatihan pemulasaran Jenazah bagi pemuda dan organisasi kepemudaan	Desa Sungai Tuan Ilir, Kab. Banjar		25 Paket	**Diterima**
4	Pelatihan pemulasaran Jenazah bagi pemuda dan organisasi kepemudaan	Karang Taruna “Ilatung”, Kab. Banjar		1 Paket	**Diterima**
5	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	RT. 1-05, Astambul Kab. Banjar		12 Kegiatan	**Diterima**
6	Pengadaan sarana olahraga di Kecamatan	Abumbun Jaya, Kab.Banjar		1 Paket	**Diterima**
7	Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan (HIBAH)	Jl. A. Yani KM. 39,5 Gedung NU Martapura, Kab. Banjar			**Diterima**
8	Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan (HIBAH)	Komplek Pangeran Antasari RT. 003 No. 39 Martapura, Kab. Banjar			**Diterima**
9	Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan (HIBAH)	Jl. A. Yani Km. 39 No. 31 gedung Juang Martapura, Kab. Banjar			**Diterima**
10	Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan (HIBAH)	Jl. A. Yani Km 39,5 Gedung TK Pertiwi Lantai 2 Martapura, Kab. Banjar			**Diterima**
11	Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan (HIBAH)	Jl. Chandra Kirana RT. 012 Desa Indra Sari NPC Kab. Banjar (SDN Indra Sari 2), Kab. Banjar			**Diterima**
12	Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan (HIBAH)	Jl. A. Yani Km 39 Gedung Juang Martapura, Kab Banjar			**Diterima**
13	Bantuan Kepada Organisasi Kepemudaan (HIBAH)	Komplek P. Antasari No. 43 RT. 003 RW. 0056 Kab. Banjar			**Diterima**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional terhadap pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ditekankan pada 10 (sepuluh) prioritas utama dalam Nawacita “Kami akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga”, yaitu :

1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan;
4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda;
5. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
8. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan;
9. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Dari kesembilan arah kebijakan nasional terhadap pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diatas hampir seluruh kebijakan nasional sudah terakomodir pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, akan tetapi untuk poin 4 yaitu Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda, secara eksplisit tidak terdapat pada tugas pokok dan fungsi yang ada sehingga untuk penganggaran kegiatan kearah sana tidak menjadi konsen utama dinas untuk renstra periode 2021-2026 ini.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN

Tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026, yaitu ;

1) Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri dalam Memajukan Olahraga;
2) Mewujudkan pemuda yang berkarakter dan mandiri.

B. SASARAN

Sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026, yaitu ;

1) Meningkatnya kapasitas atlet dan tenaga keolahragaan
2) Optimalisasi prasarana olahraga

3) Meningkatnya peran aktif pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan keagamaan
4) Meningkatnya peran aktif pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
5) Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2022

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2022**
Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga		Prestasi pemuda dan santri dalam olahraga	166 medali
	Meningkatnya kapasitas atlet dan tenaga keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	12,79%
		Persentase tenaga keolahragaan yang berlisensi	8,3%
	Optimalisasi prasarana olahraga	Persentase prasarana olahraga yang layak pakai	2,32%
Mewujudkan pemuda yang berkarakter dan mandiri		Jumlah pemuda yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional	120 Orang
		Jumlah wirausaha muda	240 Orang
	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan keagamaan	Jumlah partisipasi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan keagamaan	725 Orang
	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri	2000 Orang
	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Pemuda dan Olahraga	85%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan program dan kegiatan pada Renja 2022 ini lebih ditekankan kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah, secara garis besar usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan untuk tahun anggaran 2022 yang akan datang yaitu :

1) Jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 program.
2) Jumlah kegiatan yang diusulkan sebanyak 14 kegiatan
3) Jumlah sub kegiatan yang diusulkan sebanyak 27 sub kegiatan
4) Kelompok sasaran kegiatan lebih ditekankan kepada pemuda (usia 16 s.d 30 tahun), pelajar (termasuk diantaranya atlet usia pelajar), tenaga keolahragaan, organisasi kepemudaan dan olahraga, serta masyarakat.
5) Total kebutuhan dana yaitu sebesar Rp. 9.261.038.700,- dari APBD .

Dari beberapa program dan kegiatan yang diusulkan tentunya terdapat beberapa penyesuaian terhadap ketidaksesuaian saat rancangan awal RKPD, baik untuk jenis program/kegiatan ataupun pagu indikatif.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga, serta merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sebagaimana dibahas sebelumnya, maka disusunlah rencana kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mempertimbangkan aspek seperti kondisi, permasalahan, dan isu strategis.

Secara garis besar rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2022 terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan, dengan total pendanaan sebesar Rp. 9.261.038.700,- yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Banjar, terdapat beberapa penyesuaian usulan program kegiatan serta pagu indikatifnya sebagaimana hasil formulasi dari hasil rangkaian pembahasan subtansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses rapat kerja teknis.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah :Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	**Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**								
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.**	**Kab. Banjar**	**100%**	**1.240.546.704**	**APBD**		**100%**	**1.240.546.704**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kab. Banjar**	**100 Persen**	**22.498.300**	**APBD**		**100 Persen**	**22.498.300**
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, IKU, RKT, dan RKT Perubahan.	**Kab. Banjar**	6 Dokumen	13.999.000	**APBD**		6 Dokumen	13.999.000
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja, LPPD, LKPJ, IKK.	**Kab. Banjar**	3 Dokumen	4.999.500	**APBD**		3 Dokumen	4.999.500
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK	**Kab. Banjar**	16 laporan	3.499.800	**APBD**		16 laporan	3.499.800
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	**Kab. Banjar**	21 Orang	656.200.000	**APBD**		21 Orang	656.200.000
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga kontrak	**Kab. Banjar**	21 Orang	653.100.00	**APBD**		21 Orang	653.100.00
		Stand pameran	**Kab. Banjar**	1 Stand	3.100.000	**APBD**		1 Stand	3.100.000

2.19.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu	**Kab. Banjar**	1 Laporan	4.400.000	**APBD**		1 Laporan	4.400.000
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		**Kab. Banjar**			**APBD**			
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**Kab. Banjar**	**100%**	4.400.000	**APBD**		**100%**	4.400.000
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis	**Kab. Banjar**	8 Orang	4.400.000	**APBD**		8 Orang	4.400.000
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor**	**Kab. Banjar**	**55114 Lembar**	179.706.800	**APBD**		**55114 Lembar**	179.706.800
		Pemenuhan jasa dan peralatan perlengkapan kantor untuk pelayanan kerumah tanggaan	**Kab. Banjar**	**10 Jenis**		**APBD**		**10 Jenis**	
		Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan, pemenuhan pelayanan makan minum rapat, tamu	**Kab. Banjar**	**15 Jenis**		**APBD**		**15 Jenis**	
		Persentase rapat koordinasi luar dan dalam daerah yang dapat terpenuhi	**Kab. Banjar**	**100 Persen**		**APBD**		**100 Persen**	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis alat/ bahan untuk kegiatan kantor- bahan computer	**Kab. Banjar**	6 Jenis	13.723.800	**APBD**		6 Jenis	13.723.800
		Jumlah jenis bahan-bahan lainnya	**Kab. Banjar**	4 Jenis		**APBD**		4 Jenis	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan	**Kab. Banjar**	9 Jenis	19.614.000	**APBD**		9 Jenis	19.614.000
		Pemenuhan pelayanan makan minum rapat dan jamuan tamu	**Kab. Banjar**	460 Orang	19.086.000	**APBD**		460 Orang	19.086.000
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetak untuk pelayanan administrasi kantor	**Kab. Banjar**	2 Jenis	127.283.000	**APBD**		2 Jenis	127.283.000
		Pemenuhan barang penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor	**Kab. Banjar**	30000 Lembar		**APBD**		30000 Lembar	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dalam daerah	**Kab. Banjar**	1 Tahun	127.283.000	**APBD**		1 Tahun	127.283.000
		Terpenuhinya rapat koordinasi luar daerah	**Kab. Banjar**	1 Tahun		**APBD**		1 Tahun	

2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**	**Kab. Banjar**	**7 Jenis**	**30.362.000**	**APBD**		**7 Jenis**	**30.362.000**
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kursi kerja	**Kab. Banjar**	2 Buah	30.362.000	**APBD**		2 Buah	30.362.000
		Terpenuhinya Laptop dan PC	**Kab. Banjar**	1 Unit		**APBD**		1 Unit	
		Terpenuhinya meja kerja	**Kab. Banjar**	2 Buah		**APBD**		2 Buah	
		Terpenuhinya printer	**Kab. Banjar**	1 Unit		**APBD**		1 Unit	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran.	**Kab. Banjar**	28 Jenis	**144.8989.604**	**APBD**		28 Jenis	**144.8989.604**
		Pemenuhan pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	**Kab. Banjar**	36 Kwitansi		**APBD**		36 Kwitansi	
		Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik.	**Kab. Banjar**	550 lembar		**APBD**		550 lembar	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik	**Kab. Banjar**	500 lembar	5.000.000	**APBD**		500 lembar	5.000.000
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan pembayaran PDAM	**Kab. Banjar**	24 Kwitansi	116.511.104	**APBD**		24 Kwitansi	116.511.104
		Pemenuhan pembayaran internet speedy	**Kab. Banjar**	12 Kwitansi		**APBD**		12 Kwitansi	
		Pemenuhan pembayaran listrik	**Kab. Banjar**	36 Kwitansi		**APBD**		36 Kwitansi	
		Pemenuhan perbaikan alat listrik	**Kab. Banjar**	7 Jenis		**APBD**		7 Jenis	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	**Kab. Banjar**	28 Jenis	23.387.500	**APBD**		28 Jenis	23.387.500
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan jasa service/ perbaiakn peralatan kerja**	**Kab. Banjar**	**23 Unit**	**202.481.000**	**APBD**		**23 Unit**	**202.481.000**
		Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabtan yang terpelihara dengan baik	**Kab. Banjar**	**1 Unit**		**APBD**		**1 Unit**	
		Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik	**Kab. Banjar**	**6 Unit**		**APBD**		**6 Unit**	

		Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	**Kab. Banjar**	**5 Jenis**		**APBD**		**5 Jenis**	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabatan yang terpelihara dengan baik	**Kab. Banjar**	1 Unit	40.990.000	**APBD**		1 Unit	40.990.000
		Pemenuhan STNK mobil jabatan	**Kab. Banjar**	1 Unit		**APBD**		1 Unit	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Kendaraan Dinas Operasional roda 2 yang terpelihara dengan baik	**Kab. Banjar**	3 Unit	115.141.000	**APBD**		3 Unit	115.141.000
		Pemenuhan kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara dengan baik	**Kab. Banjar**	3 Unit		**APBD**		3 Unit	
		Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 2	**Kab. Banjar**	3 Unit		**APBD**		3 Unit	
		Pemenuhan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 4	**Kab. Banjar**	3 Unit		**APBD**		3 Unit	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya jasa service/ perbaikan peralatan kerja	**Kab. Banjar**	15 Unit	16.350.000	**APBD**		15 Unit	16.350.000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	**Kab. Banjar**	3 Jenis	30.000.000	**APBD**		3 Jenis	30.000.000
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**Kab. Banjar**	**17%**	**1.369.511.600**	**APBD**		**17%**	**1.369.511.600**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**Kab. Banjar**	**17%**	**1.305.361.600**	**APBD**		**17%**	**1.305.361.600**
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang berdaya saing dalam wira usaha muda	**Kab. Banjar**	60 Orang	774.416.600	**APBD**		60 Orang	774.416.600
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan	**Kab. Banjar**	150 Orang	145.600.000	**APBD**		150 Orang	145.600.000

2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	**Kab. Banjar**	150 Orang	385.345.000	**APBD**		150 Orang	385.345.000
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemuda yang berdaya saing**	**Kab. Banjar**	**30 Persen**	**64.150.000**	**APBD**		**30 Persen**	**64.150.000**
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah OKP yang mendapatkan pelatihan dalam mengembangkan organisasinya	**Kab. Banjar**	2 OKP	64.150.000	**APBD**		2 OKP	64.150.000
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Persentase atlet yang berdaya saing**	**Kab. Banjar**	**25%**	**6.650.980.396**	**APBD**		**25%**	**6.650.980.396**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional di kecamatan Martapura**	**Kab. Banjar**	**16%**	**95.000.000**	**APBD**		**16%**	**95.000.000**
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeliharaan prasarana olahraga	**Kab. Banjar**	3 Venue	95.000.000	**APBD**		3 Venue	95.000.000
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah atlet pemuda dan santri mengikuti kejuaraan tingkat provinsi**	**Kab. Banjar**	**70 Atlet**	**246.355.100**	**APBD**		**70 Atlet**	**246.355.100**
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabor yang diselenggarakan pada kejuaraan	**Kab. Banjar**	5 Cabor	246.355.100	**APBD**		5 Cabor	246.355.100
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah atlet pemuda dan santri yang dibina untuk mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi**	**Kab. Banjar**	**100 Atlet**	**481.420.900**	**APBD**		**100 Atlet**	**481.420.900**
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang dikirim pada Peparpeda	**Kab. Banjar**	35 Atlet	481.420.900	**APBD**		35 Atlet	481.420.900
		Jumlah atlet yang dikirim pada POPDA	**Kab. Banjar**	100 Atlet		**APBD**		100 Atlet	
		Jumlah atlet yang dikirim pada SOIna	**Kab. Banjar**	35 Atlet		**APBD**		35 Atlet	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah organisasi olahraga yang dibina untuk mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi**	**Kab. Banjar**	**4 Organisasi**	**5.745.000.000**	**APBD**		**4 Organisasi**	**5.745.000.000**

2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi penerima hibah	**Kab. Banjar**	2 Organisasi	5.745.000.000	**APBD**		2 Organisasi	5.745.000.000
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga**	**Kab. Banjar**	**1%**	**83.204.396**	**APBD**		**1%**	**83.204.396**
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan senam minggu pagi ceria (SMPC)	**Kab. Banjar**	44 Minggu/ Kali	83.204.396	**APBD**		44 Minggu/ Kali	83.204.396
		Jumlah peserta event olahraga massal memperingati Harjad dan Haornas	**Kab. Banjar**	70 Peserta		**APBD**		70 Peserta	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 serta merupakan turunan terhadap apa yang ingin dicapai renstra dinas dan RPJMD Kabupaten Banjar 2021- 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Dinas Pemuda dan olahraga ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Semoga perencanaan awal yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga secara luas.

22. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2022 dapat diselesaikan. Tersusunnya Renja ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renja ini hingga selesai.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 ini pelaksanaan Rencana Strategis pada tahun ke-1, periode Renstra 2022-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, serta berpedoman pada Renja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Renja Kementrian Pariwisata dan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

Proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022. Tahun 2021 merupakan tahun ke-1 perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banjar serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis".

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah :

a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
e. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

g. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

i. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

j. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

q. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Tahun 2015-2019;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomo 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

   b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;

   c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melaluicapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

   d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I.Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pencapaian sasaran daerah meningkatnya akselerasi ekonomi kreatif dan pariwisata dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan dan berkembangnya seni dan budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar dengan indikator cakupan pelestarian budaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar pada tahun 2022 melaksanakan 11 program, dan 18 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   a. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
   a. Penyediaan adminsitrasi pelaksanaan tugas ASN
   b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
   c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
3. Administrasi umum perangkat daerah
   a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor\
   b. Penyediaan bahan logistik kantor
   c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
   d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   e. Penyediaan komponen instalasi listrik /peneranga bangunan kantor
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan.
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan.
   c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
   d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
6. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

B. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
   a. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
2. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
   a. Perlindunga, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya
   b. Pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata tradisonal
3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
   a. Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat

C. Program Pembinaan sejarah

1. Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
   a. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota

b. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah

D. Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota

a. Penetapan cagar budaya

2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota

a. Perlindungan cagar budaya

E. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota

a. Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota

b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota

2. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

a. Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

3. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota

a. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata

F. Program pemasaran pariwisata

1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

b. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota

c. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri.

G. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif

1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

b. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumberdaya manusia ekonomi kreatif

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2021 sebagaimana pada Tabel I berikut.

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D
TRIWULAN II
TAHUN 2021

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupate Banjar

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD triwulan II (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%) sub kegiatan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
1	4	5	6		7		8			13 = 9+10+11+12					14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
									6,421,101,443		1,849,947,900	-	-	32.76				
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	72		60		12	bulan				0.00						
	Perenca	Jumlah laporan					12	bulan					0.00					

				naan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**kinerja yang disusun**														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18	125,000,000	15	90,942,500	3	laporan	17,272,300	1.00	1,361,600			33.33	16.00	92,304,100	88.89	73.84
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tersedianya pelayanan administrasi keuangan**				**12**	**bulan**					0.00					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	20,465,424,650	60	12,948,920,577	12	bulan	3,203,439,519	6.00	1,391,859,684			50.00	66.00	14,340,780,261	91.67	70.07
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	72	1,647,204,000	60	1,607,550,400	12	bulan	491,250,000	6.00	126,918,420			50.00	66.00	1,734,468,820	91.67	105.30
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	6	24,750,000	5	21,567,000	1	laporan	4,706,800	0.00	0			0.00	5.00	21,567,000	83.33	87.14
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	24	17,050,000	20	14,985,100	4	laporan	3,130,400	2.00	0			50.00	22.00	14,985,100	91.67	87.89

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian**					**12**	**bulan**		6			0.00	50				
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya bimbingan terknis implementasi peraturan perundang-undangan	30	750,000,000	25	493,454,624	1	orang kali	13,500,000	0.00	0			0.00	25.00	493,454,624	83.33	65.79
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tersedianya pelayanan administrasi umum**					**12**	**bulan**		6			0.00	50				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	72	100,000,000	60	62,774,500	12	bulan	10,892,300	6.00	1,729,200			50.00	66.00	64,503,700	91.67	64.50
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	72	1,123,750,000	60	1,333,462,136	12	bulan	63,391,600	6.00	25,152,000			50.00	66.00	1,358,614,136	91.67	120.90
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Trersedianya bahan logistik kantor	72	2,351,770,000	60	1,370,875,456	12	bulan	159,158,296	6.00	35,387,650			50.00	66.00	1,406,263,106	91.67	59.80
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	72	156,500,000	60	409,893,880	12	bulan	39,778,000	6.00	5,603,300			50.00	66.00	415,497,180	91.67	265.49
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	3,512,612,735	60	2,796,322,579	12	bulan	600,000,000	6.00	27,637,300			50.00	66.00	2,823,959,879	91.67	80.39

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**				**12**	**bulan**		6			0.00	50				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	72	75,000,000	60	45,022,000	12	bulan	16,500,000	6.00	0			50.00	66.00	45,022,000	91.67	60.03
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	889,000,000	60	727,440,036	12	bulan	233,977,828	6.00	42,406,012			50.00	66.00	769,846,048	91.67	86.60
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**terpeliharanya barang milik daerah**				**12**	**bulan**		6			0.00	50				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan	72	297,500,000	60	225,361,900	12	bulan	38,990,000	6.00	11,122,000			50.00	66.00	236,483,900	91.67	79.49
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	72	1,104,250,000	60	721,436,683	12	bulan	132,038,000	6.00	38,820,064			50.00	66.00	760,256,747	91.67	68.85

					atau Lapangan															
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	72	250,000,000	60	140,926,185	12	bulan	33,790,000	0.00	2,872,000			0.00	60.00	143,798,185	83.33	57.52
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	72	1,830,750,000	60	819,446,305	12	bulan	44,495,000	6.00	13,000,000			50.00	66.00	832,446,305	91.67	45.47
104		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**Prosentase even budaya yang bernilai religi**	**57.14**		**57.14**		**7.14**	**persen**		0		0.00		0	57.14		100	
						Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina	**90**		**83**		**7**	**persen**		1				14.285714 29	84		93.333333	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**Jumlah jenis dari unsur kebudayaan yang dikelola**					**3**	**Jenis**		0			0.00	0			
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival budaya	37	6,712,420,000	29	4,991,354,870	8	festival	775,318,400	0.00	21,000,000			0.00	29.00	5,012,354,870	78.38	74.67
			Pelestarian			**Jumlah kesenian yang**					**1**	**Jenis**		0			0.00	0			

				Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**diletarikan melalui pengembangan SDM**														
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	245	935,386,350	125	86,576,000	50	orang	40,430,600	0.00	0			0.00	125.00	86,576,000	51.02	9.26
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah kelompok/lembaga kebudayaan yang difasiltasi perkembangannya**					**1**	**Kel**		0			0.00	0				
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Ketersediaan sarana kesenian yang dapat dimamfaatkan	12	-	0	-	6	Set	10,000,000	0.00	0			0.00	0.00	0	0.00	0.00
105			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**Prosentase ketersediaan data kebudayaan**	**54.55**		**45.45**		**9.1**	**persen**				0.00					
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu)		**Jumlah topik sejarah dan kebudayaan yang informasinya**					**1**	**topik**					0.00				

				Daerah Kabupaten/Kota		**disebarluaskan**														
					Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penelitian/kajian sejarah lokal	3	239,050,945	1	6,828,215	1	laporan	21,621,500	0.00	0			0.00	1.00	6,828,215	33.33	2.86
					Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah aplikasin sistem informasi kebudayaan yang dibangun/dikelola	3	149,769,000	2	52,990,100	1	aplikasi/tahun	9,926,700	1.00	0			100.00	3.00	52,990,100	100.00	35.38
106			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya**	**49**		**43.33**		**5.67**	**persen**				0.00						
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		**Jumlah rekomendasi penetapan cagar budaya yang diterbitkan**					**3**	**rekom**					0.00					
					Penetapan Cagar Budaya	Jumlah laporan penelitian sejarah dan purbakala	13	468,173,010	10	406,244,450	3	laporan	62,288,200	1.00	4,005,700			33.33	11.00	410,250,150	84.62	87.63
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat		**Jumlah cagar budaya yang dikelola**					**420**	**unit/bulan**					0.00					

				Kabupaten/Kota																	
					Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir (orang bulan)	1956	2,202,606,679	1536	1,807,400,679	396	orang bulan	395,206,000	198.00	101,072,970			50.00	1,734.00	1,908,473,649	88.65	86.65
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																				
													2,039,845,800		**355,960,970**	**-**	**-**	**27.06**			
116			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan**	**81**		**66.67**		**14.33**	**persen**				0.00						
						Prosentase pelaku pariwisata yang aktif	**83**		**67.05**		**15.95**	**persen**										
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		**Prosentase daya tarik wisata yang dikelola**					**37.5**	**persen**					0.00					
					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku pariwisata yang memahami pengelolaan paket wisata	320	4,595,595,500	280	2,191,484,151	40	orang	39,845,600	40.00	34,111,600			100.00	320.00	2,225,595,751	100.00	48.43
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir (orang	960	1,018,242,904	756	805,909,479	204	orang bulan	213,557,200	102.00	71,048,840			50.00	858.00	876,958,319	89.38	86.12

					/Kota	bulan)															
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Prosentase ketesediaan amenitas**					**42.11**					0.00					
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan	130	8,815,365,500	123	8,416,202,262	7	Unit	573,035,200	1.00	99,138,780			14.29	124.00	8,515,341,042	95.38	96.60
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pokdarwis yang dibina	60	781,478,580	50	618,916,528	10	unit tahun	69,407,500	5.00	36,718,100			50.00	55.00	655,634,628	91.67	83.90
				Pengelolaan		**Prosentase rekomendasi TDUP yang**					**100**	**persen**				0.00					

				Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		**dikeluarkan**														
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	106	3,365,914,000	106	1,674,066,481	41	Unit	16,291,200	0.00	0			0.00	106.00	1,674,066,481	100.00	49.74
117			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan**	**5**		**4**		**1**	**Buah**				0.00					
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan**					**8**	**Destinasi**					0.00				
					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah media informasi wisata yang dikembangkan	12	1,057,206,533	9	802,445,760	3	Jenis	257,631,300	1.00	50,018,460			33.33	10.00	852,464,220	83.33	80.63
					Fasilitasi Kegiatan	Jumlah promosi	21	3,157,64	14	2,690,81	5	promosi	505,265,	0.00	24,035,300			0.00	14.00	2,714,	66.67	85.98

					Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota	wisata yang dikembangkan		7,500		9,880			500							855,180		
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten /Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif	3	271,164,129	2	185,242,020	1	laporan	88,028,800	0.00	16,525,440			0.00	2.00	201,767,460	66.67	74.41
118			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya**	**180**		**125**		**55**	**orang**				0.00							
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		**Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya**					**90**	**orang**					0.00					
					Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata	Jumlah anggota pokdarwis yang memahami ekonomi	180	417,395,976	30	86,880,900	30	orang	13,541,900	0.00	0			0.00	30.00	86,880,900	16.67	20.81

					dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	kreatif														
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah duta wisata yang dikoordinir	960	3,157,647,500	768	436,401,900	192	orang bulan	214,182,800	0.00	0			0.00	768.00	436,401,900	80.00	13.82
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya	180	187,146,116	120	139,951,450	60	orang	49,058,800	30.00	24,364,450			50.00	150.00	164,315,900	83.33	87.80

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar memiliki 3 IKU dengan 3 indikator. Capaian kinerja setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut.

TABEL 2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DISBUDPAR KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2020

Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian	Predikat
			Satuan	Tahun 2020		(%)	
1	2	3	4	5	6	**7**	8
Meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi (IKU)	**Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan**	**Jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang dilestarikan dibagi jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang telah diinventaris dikali seratus**	**persen**	**9.09**	**9.09**	**100**	**Berhasil**
Meningkatnya even budaya yang bernilai religi	**Prosentase even budaya yang bernilai religi**	**Jumlah even budaya yang bernuansa religi dibagi Jumlah even budaya yang dilaksanakan dikali seratus**	**persen**	**7.14**	**7.14**	**100**	**Berhasil**
Meningkatnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan		**even**	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi		**festival**	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya pelestarian budaya (IKU)	**Persentase Budaya dilestarikan**	**Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir dikali seratus**	**persen**	**63.41**	**65.85**	**103.85**	**Berhasil**

Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang dibina	**Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina**	**Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina dibagi jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir dikali seratus**	**persen**	**82.79**	**82.79**	**100.00**	**Berhasil**
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keragaman budaya	Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya		**orang**	65	65	100	Berhasil
Meningkatnya fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	Jumlah keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah		**kali**	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya ketersediaan data kebudayaan	**Prosentase ketersediaan data kebudayaan**	**Jumlah data kebudayaan yang tersedia dibagi jumlah data kebudayaan yang diperlukan dikali seratus**	**persen**	**45.45**	**45.45**	100	**Berhasil**
Meningkatnya penerapan sistem informasi/database kebudayaan	Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun/dikelola		**aplikasi**	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya kesiapan penelitian/kajian sejarah lokal	Jumlah persiapan penelitian/kajian sejarah lokal		**laporan**	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya pengendalian program pengelolaan informasi budaya	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi		**laporan**	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya	**Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya**	**Jumlah benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya diabgi junlah benda werisan budaya yang diinventarisir dikali seratus**	**persen**	**23.33**	**43.33**	**185.73**	Berhasil

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya benda dan tak benda	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir		**orang bulan**	396	396	100	Berhasil
MeningkatnyaPengembangan/Kajian/PenelitianBudaya	Jumlah laporan penelitian/kajian warisan budaya		**laporan**	3	10	333.33	Berhasil
Meningkatnya kunjungan wisata (IKU)	**Jumlah wisatawan**	**Jumlah wisatawan nusantara + jumlah wisatawan mancanegara**	**orang**	**5,198,225**	**3,702,958**	**71.24**	**Cukup Berhasil**
Meningkatnya destinasi wisata yang telah dikembangkan	**Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan**	**Jumlah destinasi wisata yang telah dikembangkan dibagi dengan jumlah destinasi wisaya yang akan dikembangkan dikali seratus**	**persen**	**66.67**	**66.67**	**100.00**	**Berhasil**
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan		**unit**	25	42	168	Berhasil
Meningkatnya jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah paket wisata yang dikembangkan		**paket**	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya pengetahuan pemandu wisata	Jumlah warga masyarakat yang memahami kegiatan pemandu wisata		**orang**	120	120	100	Berhasil
Meningkatnya pelaku pariwisata yang aktif	**Prosentase pelaku pariwisata yang aktif**	**Jumlah pelaku pariwisata yang aktif dibagi jumlah pelaku pariwisata yang diinventarisir dikali seratus**	**persen**	**67.05**	**67.05**	**100.00**	**Berhasil**
Meningkatnya penguatan informasi dan database	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir		orang bulan	204	204	100	Berhasil
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang dibina		kelompok	13	13	100	Berhasil

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina		unit	38	38	100	Berhasil
Meningkatnya inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan	**Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan**	**Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan**	**buah**	**3**	**3**	**100**	**Berhasil**
Meningkatnya penggunaan tekhnologii nformasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan		jenis	3	3	100	Berhasil
Meningkatnya promosi wisata	Jumlah promosi priwisata yang dikembangkan		kali	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata	Jumlah duta wisata yang dikoordinir		orang bulan	192	192	100	Berhasil
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya		orang	60	65	108	Berhasil
Terbangunnya system informasi (database) ekonomi kreatif	Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif		laporan	1	1	100	Berhasil

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 Sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi* melalui *1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan merupakan Jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang dilestarikan dibagi jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang telah diinventaris dikali seratus.

b. Realisasi kinerja sasaran 1 (meningkatnya pelestarian budaya) mencapai 9,09%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang dilestarikan 1 unsur dibagi dengan jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang diinventarisir sebanyak 11 unsur dikalikan 100. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 100,00%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 1 didukung oleh keberadaan Martapura khususnya dan Kabupaten Banjar pada umumnya yang kental dengan kehidupan religius yang menjadi tempat tumbuhnya budaya yang bernuansa religi.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 1 adalah pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya lokal yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dapat dilaksanakan, sebagian besar sumberdaya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan belum terdapat data yang valid

dan lengkap mengenai jenis budaya yang bernuansa religi termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya bernuansa islami di Kabupaten Banjar.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan inventarisasi kebudayaan bernuasa religi, termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya islam (alamat, keanggotaan, aktivitas) sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan dan pelestarian budaya yang bernilai religi, menfasilitasi dan mendorong kelompok/group kesenian Kabupaten Banjar untuk dapat menampilkan kesenian secara daring dan memasukkannya dalam even dan kompetisi kesenian tingkat provinsi dan nasional.

2. Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi* melalui *1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase even budaya yang bernilai religi merupakan Jumlah even budaya yang bernuansa religi dibagi Jumlah even budaya yang dilaksanakan dikali seratus.

b. Realisasi kinerja sasaran 2 (meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi) mencapai 7,14%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah jumlah even budaya yang bernuansa religi sebanyak 1 even dibagi dengan jumlah even budaya yang dilaksanakan tahun sebelumnya sebanyak 14 unsur dikalikan 100. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 100,00%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 2 didukung oleh banyaknya lembaga dan organisasi keagamaan di Kabupaten Banjar, termasuk pondok pesantren dan kelompok seni dan budaya lokal yang dapat berperan serta dalam penampilan dan even budaya yang bernilai religi.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 2 adalah pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya lokal yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dapat dilaksanakan, sebagian besar sumberdaya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan banyaknya kelompok seni budaya dan pondok pesantren yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Banjar yang perlu mendapatkan kesempatan mengaktualisasikan diri dalam bentuk penampilan even budaya religi.

f. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendorong penampilan seni budaya bernuansa religi di tempat masing-masing serta menfasilitasi perkembangannya melalui pelestarian atau workshop, menfasilitasi dan mendorong kelompok/group kesenian Kabupaten Banjar untuk dapat menampilkan kesenian secara daring dan memasukkannya dalam even dan kompetisi kesenian tingkat provinsi dan nasional.

3. Sasaran 3

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya pelestarian budaya* melalui *1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase budaya yang dilestarikan merupakan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir dikali seratus

b. Realisasi kinerja sasaran 3 (meningkatnya pelestarian budaya) mencapai 65,85%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola sebanyak 27 unsur dibagi dengan jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir sebanyak 41 unsur dikali seratus. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 100,00%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 1 didukung oleh adanya pegiat budaya serta tenaga ahli cagar budaya yang membantu dan turut berperan aktif dalam upaya pelestarian budaya benda maupun tak benda di Kabupaten Banjar.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 3 adalah pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya lokal terutama terkait dengan pemanfaatan budaya melalui sektor pariwisata menjadi terhambat, sebagian besar sumberdaya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19, belum terdapat data kebudayaan baik benda maupun tak benda yang lengkap. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian benda, situs serta kawasan cagar budaya maupun warisan budaya.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan tetap menjaga kelestarian budaya benda maupun tak benda di masa pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan inventarisasi kebudayaan bernuasa religi, termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya islam (alamat, keanggotaan, aktivitas) sebagai dasar pengemabilan kebijakan pengembangan dan pelestarian budaya yang bernilai religi dan Memfasilitasi pengumpulan data para pelaku budaya Kabupaten Banjar yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dilaporkan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari program layanan perlindungan pelaku budaya terdampak Covid-19

4. Sasaran 4

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya kelompok seni dan budaya yang dibina dengan 1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut

a. Persentase kelompok seni dan budaya merupakan Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina dibagi jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir dikali seratus
b. Realisasi kinerja sasaran 4 (meningkatnya kelompok seni dan budaya yang dibina) mencapai 82,79%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina sebanyak 178 kelompok dibagi dengan jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir sebanyak 215 kelompok dikali seratus. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 100,00%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 1 didukung oleh banyaknya kelompok seni dan budaya yang dikelola dan dibina secara swadaya oleh satuan pendidikan (sekolah) di Kabupaten Banjar dan masyarakat.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 1 adalah pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan kesenian tidak dapat dilaksanakan, sebagian besar sumberdaya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19, banyaknya kelompok seni dan budaya yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Banjar yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat terus aktif dan mampu melestarikan kebudayaan lokal yang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM Disbudpar.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendorong kelompok kesenian dapat tampil secara digital dan daring, melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan kelompok seni dan budaya serta secara rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya agar tersedia wadah bagi kelompok seni dan budaya untuk tetap aktif dan mengembangkan diri.

5. Sasaran 5

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya ketersediaan data kebudayaan dengan 1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut.

a. Persentase ketersediaan data kebudayaan merupakan Jumlah data kebudayaan yang tersedia dibagi jumlah data kebudayaan yang diperlukan dikali seratus

b. Realisasi kinerja sasaran 5 (meningkatnya ketersediaan data kebudayaan) mencapai 45,45%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan Jumlah data kebudayaan yang tersedia sebanyak 5 jenis dibagi dengan jumlah data kebudayaan yang diperlukan sebanyak 11 jenis dikali seratus. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 100,00%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 5 didukung oleh adanya pihak perseorangan, institusi maupun literatur yang dapat dijadikan sebagai sumber data/informasi budaya dan sejarah.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 5 adalah belum adanya sistem database budaya dan sejarah yang memadai sehingga data masih belum terintegrasi dan masih tersebar dalam beberapa file/catatan serta terdapat kemungkinan pada masa yang akan datang pihak yang menjadi sumber data/informasi budaya dan sejarah tidak ada lagi.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyempurnakan sistem database kebudayaan dan sejarah yang sudah mulai dikembangkan pada tahun 2020 ini serta segera menghimpun data dan informasi dari sumber yang ada.

6. Sasaran 6

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan 1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut.

a. Persentase benda warisan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya merupakan Jumlah benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dibagi jumlah benda warisan budaya yang diinventarisir dikali seratus

b. Realisasi kinerja sasaran 6 (*meningkatnya benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya*) mencapai 43,33%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 13 buah dibagi dengan jumlah benda warisan budaya yang diinventarisir dikali sebanyak 30 buah dikali seratus. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 100%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 6 didukung oleh keberadaan Tim ahli cagar budaya Kabupaten Banjar yang merupakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan serta penghapusan cagar budaya serta para juru pelihara cagar budaya serta keberadaan petugas kebersihan warisan budaya di Kabupaten Banjar.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 6 adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak tertentu terhadap pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya sering dikalahkan oleh berbagai kepentingan termasuk kepentingan ekonomi.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan kepada pihak yang memiliki, menguasai atau ahli waris benda, struktur, situs maupun kawasan cagar budaya agar dapat menjaga kelestariannya dan menyampaikan informasi tentang pelestarian cagar budaya kepada masyarakat melalui juru pelihara cagar budaya dan petugas kebersihan benda/struktur/bangunan potensi cagar budaya.

f. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 6 adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak tertentu terhadap pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya sering dikalahkan oleh berbagai kepentingan termasuk kepentingan ekonomi.

g. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan kepada pihak yang memiliki, menguasai atau ahli waris benda, struktur, situs maupun kawasan cagar budaya agar dapat menjaga kelestariannya.

7. Sasaran

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya kunjungan wisata dengan 1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **cukup berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut.

a. Capaian realisasi kinerja sasaran 7 (meningkatnya kunjungan wisata) sebesar 71,24%

b. Pencapaian target sasaran 3 didukung oleh banyaknya potensi destinasi wisata di Kabupaten Banjar yang dapat dikembangkan. Berdasarkan inventarisir yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bersumber dari hasil survey dan laporan masyarakat terdapat 133 tempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata.

c. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 3 adalah

- Belum semua destinasi wisata yang potensial memiliki infrastruktur yang memadai terutama jalan menuju ke lokasi wisata. Selain itu destinasi wisata potensial yang berada di lokasi tahura (terutama di Kecamatan Aranio) terkendala oleh ketentuan peruntukan lahan dan tata ruang.
- Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat dan telah dilakukan penutupan obyek wisata sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui pengendalian persebaran virus Corona dengan menghindari kerumunan massa di tempat-tempat publik. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah wisatawan secara signifikan.

d. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

- Mengembangkan destinasi wisata berdasarkan skala prioritas dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok sadar wisata.
- Melakukan pemantauan ke destinasi wisata untuk memastikan peraturan selama pandemi covid-19 dijalankan sekaligus sosialisasi protokol kesehatan selama pandemi.
- Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaku usaha di sektor pariwisata yang terdampak Covid-19.
- Menyampaikan data pelaku usaha sektor pariwisata terdampak Covid-19 ke kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan bantuan.
- Memfasilitasi proses penyaluran bantuan dari kementrian Pariwisata dan Ekonomi kreatif kepada pelaku usaha pariwisata terdampak Covid-19.
- Menyusun protokol kesehatan di obyek wisata sebagai panduan operasional obyek wisata jika status new normal diberlakukan di Kabupaten Banjar.
- Memasukkan anggaran belanja kelengkapan pendukung implementasi protokol kesehatan di obyek wisata dalam RKA Perubahan Disbudpar TA 2020 (Pembelian masker, hand sanitizer, thermo gun, dll).

8. Sasaran 8

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya destinasi wisata yang telah dikembangkan 1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut.

a. Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan merupakan Jumlah destinasi wisata yang telah dikembangkan dibagi dengan jumlah destinasi wisaya yang akan dikembangkan dikali seratus

b. Realisasi kinerja sasaran 8 (*meningkatnya destinasi wisata yang telah dikembangkan*) mencapai 66,67%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah destinasi

wisata yang telah dikembangkan sebanyak 8 buah dibagi dengan jumlah destinasi wisata yang akan dikembangkan sebanyak 12 buah dikali seratus. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 105,82%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 8 didukung dengan adanya pendanaan/anggaran dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan sektor pariwisata.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 8 adalah.

- keberadaan beberapa destinasi wisata potensial belum tersedia akses transportasi ke lokasi/destinasi wisata/potensi destinasi wisata.
- Terdapat destinasi wisata atau potensi destinasi wisata yang berada di kawasan hutan lindung (taman hutan rakyat/Tahura) sehingga terdapat batasan yang harus ditatati terkait dengan pembangunan fisik di lokasi tersebut.
- Terjadi penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pariwisata oleh pemerintah pusat dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, namun kemudian dialokasikan kembali ke Pemerintah Kabupaten Banjar dengan pengurangan alokasi anggaran.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah.

- Mengembangkan destinasi wisata melalui pembangunan fisik pada wilayah yang memungkinkan berdasarkan skala prioritas. Sedangkan destinasi wisata di wilayah hutan lindung dikembangkan melalui pembangunan fisik yang diizinkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok sadar wisata.
- Melaksanakan perencanaan ulang pembangunan prasarana pariwisata yang bersumber dari DAK, disesuaikan dengan dana yang tersedia agar dapat segera dilakukan lelang untuk mendapatkan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu yang makin sempit.

9. Sasaran 9

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya pelaku pariwisata yang aktif 1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut.

a. Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan merupakan Jumlah Jumlah pelaku pariwisata yang aktif dibagi dengan jumlah Jumlah pelaku pariwisata yang diinventarisir dikali seratus

b. Realisasi kinerja sasaran 9 (*meningkatnya pelaku pariwisata yang aktif*) mencapai 52%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah pelaku pariwisata yang aktif sebanyak 137 buah dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang diinventarisir sebanyak 264 buah dikali seratus. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 100%.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 9 didukung dengan adanya regulasi tentang kewajiban pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata untuk memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Kepemilikan TDUP merupakan salah satu indikator aktif tidaknya pelaku usaha pariwisata.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 9 adalah terdapat beberapa pelaku usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP sehingga terdapat kemungkinan menjalankan usahanya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemantauan serta pembinaan pelaku usaha pariwisata agar dapat menjalankan usahanya sesuai denga ketenyuan yang berlaku.

10. Sasaran 10

Hasil evaluasi capaian kinerja *meningkatnya inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan 1 (satu)* indikator kinerja, dengan predikat **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut.

a. Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan merupakan proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial) dalam bidang pemasaran pariwisata.

b. Realisasi kinerja sasaran 10 (*jumlah inovasi pemasaran pariwisata)* mencapai 3 buah yaitu Gebrak Pariwisata Kabupaten Banjar (Gerakan Bersama Memviralkan Pariwisata Kabupaten Banjar) dan Membarakat Jukung Emas (membangun kemitraan, meningkatkan kunjungan, menambah pemasukan) dan Kontes Foto Atraksi Pariwisata Banjar.

c. Pencapaian target kinerja sasaran 10 didukung dengan adanya supervisi Bappeda Litbang dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam pelaksanaan inovasi di Dinas Kebudayaan dan pariwisata mulai dari tahap drum up hingga display.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 9 adalah adanya kemungkinan menurunnya intensitas pelaksanaan kegiatan inovasi sehingga tidak ada keberlanjutannya di masa yang akan datang.

e. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjaga keberlanjutan kegiatan hasil inovasi melalui penguatan komitmen pelaksana inovasi di Dinas dan para stakeholder seperti pembentukan wadah organisasi Genpi (Gerakan Pesona Indonesia).

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel II berikut ini.

Tabel III

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina dibagi jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir	persen	80,00	80,00	85,00	85,07	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
2	Cakupan pemajuan kebudayaan tak benda	Jumlah unsur budaya tak benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda	persen	50	50	62,5	62,5	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
3	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan		kali	4	4	2	2	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
4	Jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan festival /even budaya di luar daerah		even	3	4	3	3	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
5	Jumlah warga masyarakat yang terlibat aktif dalam sosialisasi pengelolaan dan keragaman budaya		orang	125	125	0	0	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
6	Prosentase budaya benda yang dikelola	Jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah budaya benda yang diinventarisir	persen	50	50	72,73	72,73	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
7	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya yang dikoordinir		orang bulan	300	300	360	360	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	

8	Jumlah petugas informasi seni dan budaya yang dikoordinir		orang bulan	36	36	36	36	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
9	Jumlah tenaga ahli cagar budaya yang tersertifikasi		orang	0	0	7	6	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
10	Meningkatnya pengembangan/ kajian/ penelitian budaya dan sejarah		kajian	3	2	0	0	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
11	Jumlah penelitian/kajian sejarah lokal yang dilaksanakan		kajian	3	12	0	0	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
12	Jumlah aktualisasi adat budaya daerah yang diselenggarakan		kegiatan		2	2	2	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
13	Jumlah kegiatan budaya yang bernuansa religi	Jumlah kegiatan budaya yang bernuansa religi	kegiatan	7	8	7	8	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
14		Jumlah penyelenggaraan festival budaya daerah yang difasilitasi	kegiatan	7	8	7	8	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
15	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah wisatawan lokal	Orang	1.919.428	6.383.682	1.920.415	7.105.288	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
16	Peningkatan wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	1.587	1.46	1.594	1.425	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
17	Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan		persen	48,08	44,23	63,46	63,46	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
18	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan		unit	13	29	15	15	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
19	Jumlah Pokdarwis yang dibina		kelompok	12	13	13	13	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi
20	Jumlah sosialisasi sadar wisata yang dilaksanakan		kali	2	2	2	2	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi

21	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir		orang bulan	180	180	192	192	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
22	Jumlah pelaku usaha pariwisata yangn dibina		unit	33	35	35	35	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
23	Jumlah duta wisata yang dikoordinir		orang bulan	192	192	192	192	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
24	Jumlah jenis pemasaran pariwisata yang dikembangkan	Jumlah jenis pemasaran pariwisata yang dikembangkan	jenis	2	2	3	3	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
25	Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan		jenis	3	3	3	3	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
26	Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan ekonomi kreatif (kali)		kali	4	4	2	2	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
27	Jumlah promosi pariwisata yang dikembangkan		kali	2	2	4	4	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
28	Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan	Jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang dilestarikan dibagi jumlah unsur budaya lokal keagamaan yang telah diinventaris dikali seratus	Persen					45,45	45,45	9.09	9.09
29	**Prosentase even budaya yang bernilai religi**	**Jumlah even budaya yang bernuansa religi dibagi Jumlah even budaya yang dilaksanakan dikali seratus**	**persen**					50	50	7,14	7,14
30	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan		**even**					4	4	1	1
31	Jumlah penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi		**festival**					8	8	1	1

32	Prosentase budaya yang dilestarikan	Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir dikali seratus	Persen		70,73	70,73	63.41	65.85
33	**Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina**	**Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina dibagi jumlah kelompok seni dan budaya yang diinventarisir dikali seratus**	**persen**		83	83	82,79	82,79
34	Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya		**orang**		-	-	65	65
35	Jumlahpersiapan/keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah		**kali**		3	3	1	1
36	**Prosentase ketersediaan data kebudayaan**	**Jumlah data kebudayaan yang tersedia dibagi jumlah data kebudayaan yang diperlukan dikali seratus**	**persen**		36,36	36,36	45,45	45,45
37	Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun/dikelola		**aplikasi**		1	1	1	1
38	Jumlah persiapan penelitian/kajian sejarah lokal		**laporan**		0	0	1	1

39	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi		**laporan**		1	1	1	1
40	**Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya**	**Jumlah benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya diabgi junlah benda werisan budaya yang diinventarisir dikali seratus**	**persen**		10,00	10,00	23,33	43,33
41	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir		**orang bulan**		396	396	396	396
42	Jumlah laporan penelitian/kajian warisan budaya		**laporan**		3	3	3	10
43	Jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan nusantara + jumlah wisatawan mancanegara	Orang		5,196,516	9,116,575	5,198,225	3,702,958
44	**Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan**	**Jumlah destinasi wisata yang telah dikembangkan dibagi dengan jumlah destinasi wisaya yang akan dikembangkan dikali seratus**	**persen**		63	66,67	66,67	66,67
45	Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan		**unit**		20	22	25	42
46	Jumlah paket wisata yang dikembangkan		**paket**		3	3	1	1
47	Jumlah warga masyarakat yang memahami kegiatan pemandu wisata		**orang**		0	0	120	120

48	**Prosentase pelaku pariwisata yang aktif**	**Jumlah pelaku pariwisata yang aktif dibagi jumlah pelaku pariwisata yang diinventarisir dikali seratus**	**persen**		51,89	51,89	67,05	67,05
49	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir		orang bulan		192	192	204	204
50	Jumlah Pokdarwis yang dibina		kelompok		13	13	13	13
51	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina		unit		35	35	38	38
52	**Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan**	**Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan**	**buah**		3	3	3	3
53	Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan		jenis		3	3	3	3
54	Jumlah promosi priwisata yang dikembangkan		kali		5	7	1	1
55	Jumlah duta wisata yang dikoordinir		orang bulan		192	192	192	192
56	Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya		orang		60	60	60	65
57	Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif		laporan		1	1	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mengalami beberapa permasalahan pokok bagi perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian budaya. Timbulnya masalah pokok tersebut bersumber dari masalah
   a. Kurangnya pelestarian budaya tak benda
   b. Kurangnya pembinaan sejarah
   c. Kurangnya Perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya .
2. Rendahnya pertumbuhan PDRB sektor pariwisata. Timbulnya masalah pokok tersebut bersumber dari masalah
   a. Kurangnya kunjungan wisatawan, lama kunjungan wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan
   b. Kurangnya perkembangan destinasi wisata
   c. Kurang pemasaran pariwisata
   c. Kurangnya perkembangan industri pariwisata
   d.Kurangnya perkembangan ekonomi kreatif

Dalam mengatasi permasalahan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta SKPD, Dinas Kebudayaan dan pariwisata menghadapi tantangan.

a. Kurangnya regenerasi pelaku seni dan budaya tradisional.
b. Ada beberapa unsur kebudayaan yang sudah mulai ditinggalkan pelakunya
c. Kurangnya sarana dan prasarana seni dan budaya
d. Infrastruktur yang mendukung akses menuju kawasan pariwisata belum tersedia secara optimal
e. Pengembangan potensi wisata sumber harus disesuaikan dengan daya dukung alam dan regulasi terkait dengan lingkungan.
f. Sarana penunjang kepariwisataan yang masih kurang
g. Masih banyak destinasi wisata yang belum di kenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara
h. Adanya regulasi yang membatasi peberian bantuan hibah kepada masyarakat

Sebaliknya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta SKPD, yaitu.

a. Adanya kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi.
b. Banyak potensi wisata budaya dan religi dan wisata alam dan buatan dengan daya tarik yang cukup kuat untuk menarik minat wisatawan.

c. Adanya otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya sendiri
d. Terdapat berbagai *stakeholder* yang dapat dilibatkan dalam pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata
e. Potensi budaya lokal yang beraneka ragam.
f. Perkembangan pesat tehnologi dan informasi
g. Berkembangnya pesatnya media sosial sosial dan era milineal
h. Tersedianya sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan propinsi

2.4 *Review* Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja SKPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam rancangan awal RKPD tahun 2022 Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahanpembangunan daerah dan menelaah isu strategis yang sedang berkembang. Permasalahan pembangunan tahun 2022 diketahui melalui hasil evaluasi kinerja tahun 2021. Peningkatan Kesempatan Kerja

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat".**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana Halaman pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid
    a. Peningkatan Sistem Pendidikan
    b. Peningkatan Sistem Kesehatan
    c. Peningkatan Kewirausahaan

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan

dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didiskusikan dalam pembahasan pada Musrenbang Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang di tkecamatan. Pada Musrenbang tingkat kecamatan terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terutama dari kelompok masyarakat. Usulan yang disampaikan sebagaimana tercantum dalam Tabel IV berikut.

Tabel 3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

No	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi Mitra Bappeda	Rekomendasi SKPD
1	Kepala Desa Dalam Pagar	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Pengadaan baju seragam sinoman hadrah dan pelatihan. Volume 1 paket. Pagu Rp. 50.000.000,-	Desa Dalam Pagar, Kab. Banjar, Martapura Timur, Dalam Pagar	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 15000000	Ditolak, belum berbadan hukum dan berusia 3 tahun
2	Kepala Desa Melayu Tengah	Pariwisata	Workshop ekonomi kreatif	Workshop untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Volume 1 paket Pagu Rp. 40.000.000,-	Desa Melayu Tengah, Kab. Banjar, Martapura Timur, Melayu Tengah	Rekomendasi : usulan dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 40000000	Diterima, tempat dan materi ditentukan dinas, digabung dengan peserta dari desa lain
3	Kepala Desa Pekauman	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	(Non Fisik) Pengadaan penyediaan sarana kesenian pemuda volume 1 paket pagu Rp. 25.000.000,-	Rt 01, Rt 02, Rt 03, Kab. Banjar, Martapura Timur, Pekauman	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 25000000	Ditolak, belum berbadan hukum dan berusia 3 tahun
4	Kepala Desa Keramat	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Bantuan sarana kebudayaan (seragam sinoman, peralatan sinoman dan lain-lain) Volume 1 paket, Pagu Rp. 20.000.000,-	Desa Keramat, Kab. Banjar, Martapura Timur, Keramat	Rekomendasi : usulan diterukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 20000000	Ditolak, belum berbadan hukum dan berusia 3 tahun
5	Kepala Desa Sei Kitano	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	(Non Fisik) bantuan sarana kebudayaan (sinoman hadrah) ,Volume 1 paket ,Pagu Rp. 35.000.000,-	Rt 01, Rt 02, Rt 03, Kab. Banjar, Martapura Timur, Sei Kitano	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 35000000	Ditolak, belum berbadan hukum dan berusia 3 tahun
6	Kepala Desa Tiwingan	Pariwisata	Pelatihan Pokdarwis	Pembuatan Souvenir dan pengemasan prosuk-produk wisata yang bermutu.	Lingkungan I dan II Desa Tiwingan Lama, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan	Rekomendasi : Bentuk pelatihan yang dipilih harus berdasarkan potensi serta kebutuhan objek wisata dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Koefisien : 25 orang Anggaran : 50000000	Digabung dengan desa lain Koefisien : 50 orang Anggaran : 25500000

7	Kepala Desa Tiwingan	Pariwisata	Pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi bagi pemandu wisata	SDM pemandu Wisata perlu ditingkatkan	DEsa Tiwingan Lama, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan	Rekomendasi : pemilihan peserta pelatihan harus selektif. Koefisien : 10 orang Anggaran : 20000000	Bisa dilaksanakan, bersama dengan usulan yang serupa antara lain usulan dari Kepala Desa Aranio, Tiwingan, Rantau Balai dan Rantau Bujur dengan peserta gabungan. Koefisien : 40 orang Anggaran : 34773050
8	Kepala Desa Aranio	Pariwisata	Pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi bagi pemandu wisata	Diperlukannya Guide Wisata yang terampil dan menyenangkan pengunjung Wisata.	Desa Aranio, Kab. Banjar, Aranio, Aranio	Rekomendasi : Volume menyesuaikan kemudian Koefisien : 5 orang Anggaran : 10000000	Bisa dilaksanakan, bersama dengan usulan yang serupa antara lain usulan dari Kepala Desa Aranio, Tiwingan, Rantau Balai dan Rantau Bujur dengan peserta gabungan. Koefisien : 40 orang Anggaran : 34773050
9	Kepala Desa Belangian	Pariwisata	Workshop ekonomi kreatif	Perlunya Pelatihan Pembuatan Souvenir dalam rangka pembangunan sektor Pariwisata.	Desa Belangian, Kab. Banjar, Aranio, Belangian	Rekomendasi : Usulan Dapat diteruskan Koefisien : 10 org Anggaran : 15000000	Ditolak, sudah dilaksanakan di kecamatan Arano tahun 2019-2021
10	Kepala Desa Belangian	Pariwisata	Pelatihan Pokdarwis	Perlunya Pelatihan Pengelola Wisata.	Desa Belangian, Kab. Banjar, Aranio, Belangian	Rekomendasi : usulan dapat diteruskan Koefisien : 20 orang Anggaran : 30000000	Digabung dengan desa lain Koefisien : 50 orang Anggaran : 25500000
11	Kepala Desa Benua Riam	Pariwisata	Workshop ekonomi kreatif	Perlunya Work Shop Pembuatan Souvener dan pengemasan dalam rangka mendukung pembangunan sektor pariwisata.	Desa Benua Riam, Kab. Banjar, Aranio, Benua Riam	Rekomendasi : usulan diterukan Koefisien : 20 orng Anggaran : 30000000	Ditolak, sudah dilaksanakan di kecamatan Arano tahun 2019-2021
12	Kepala Desa Rantau Balai	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	WC Umum pada Kawasan Destinasi Wisata diperlukan	Desa Rantau Balai, Kab. Banjar, Aranio, Rantau Balai	Rekomendasi : usulan dapat diteruskan Koefisien : 2 buah Anggaran : 60000000	Ditolak, diteruskan ke provinsi dan pusat

13	Kepala Desa Rantau Balai	Pariwisata	Pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi bagi pemandu wisata	Perlu diadakan Pelatihan Pemandu Wisata	DEsa Rantau Balai, Kab. Banjar, Aranio, Rantau Balai	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 5 orng Anggaran : 750000	Bisa dilaksanakan, bersama dengan usulan yang serupa antara lain usulan dari Kepala Desa Aranio, Tiwingan, Rantau Balai dan Rantau Bujur dengan peserta gabungan. Koefisien : 40 orang Anggaran : 34773050
14	Kepala Desa Tiwingan Baru	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pembangunan Jalan menuju Destinasi Wisata RT.1 dan 2 Puncak Bukit Batas Panjang 6 km X lebar 2 meter,	Desa Tiwingan Baru, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan Baru	Rekomendasi : Usulan dipindahkan Ke dinas PUPR Koefisien : 1200 meter Anggaran : 500000000	ditolak, bukan kewenangan dinas
15	Kepala Desa Tiwingan Baru	Pariwisata	Workshop ekonomi kreatif	Perlunya Pelatihan Pembuatan Souvener dn pengemasan prosuk.	Desa Tiwingan Baru, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan Baru	Rekomendasi : usulan dapat diteruskan Koefisien : 10 orang Anggaran : 15000000	Ditolak, sudah dilaksanakan di kecamatan Arano tahun 2019-2021
16	Kepala Desa Tiwingan Baru	Pariwisata	Pelatihan Pokdarwis	Pelatihan Pemandu Wisata/Guide	Desa Tiwingan Baru, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan Baru	Rekomendasi : usulan dapat diteruskan Koefisien : 5 orng Anggaran : 5000000	Digabung dengan desa lain Koefisien : 50 orang Anggaran : 25500000
17	Kepala Desa Rantau Bujur	Pariwisata	Pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi bagi pemandu wisata	Peningkatan SDM Kelompok Pokdarwis	Desa Rantau Bujur, Kab. Banjar, Aranio, Rantau Bujur	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 5 orang Anggaran : 10000000	Ditolak, sudah dilaksanakan di kecamatan Arano tahun 2019-2021
18	Kepala Desa Tiwingan Baru	Pariwisata	Bantuan peralatan pelaku usaha sekitar obyek wisata	Perlunya Panggung Wisata	Desa Tiwingan Baru, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan Baru	Rekomendasi : dapat diteruskan/diusulkan ke dana pusat Koefisien : 1 Unit Anggaran : 500000000	Ditolak, diteruskan ke provinsi dan pusat
19	Kepala Desa Tiwingan Baru	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Perlunya Rumah Singgah bagi Wisatawan.	Tiwingan Baru, Kab. Banjar, Aranio, Tiwingan Baru	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 buah Anggaran : 100000000	Ditolak, diteruskan ke provinsi dan pusat
20	Kepala Desa Pa'au	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Perlunya Pembangunan Rumah Singgah bagi Wisatawan sebanyak 2 unit	Desa Paau, Kab. Banjar, Aranio, Pa'au	Rekomendasi : usulan dapat diterima Koefisien : 2 buah Anggaran : 200000000	Ditolak, diteruskan ke provinsi dan pusat

21	Kepala Desa Pa'au	Pariwisata	Bantuan peralatan pelaku usaha sekitar obyek wisata	Perlunya Pembangunan Shelter pada Obyek Wisata sebanyak 2 unit.	Desa Paau, Kab. Banjar, Aranio, Pa'au	Rekomendasi : Dapat DIteruskan Koefisien : 2 Unit Anggaran : 60000000	Ditolak, diteruskan ke provinsi dan pusat
22	Kepala Desa Pa'au	Pariwisata	Pelatihan Pokdarwis	Pelatihan bagi Pengelola Wisata	Desa Paau, Kab. Banjar, Aranio, Pa'au	Rekomendasi : Dapat Diteruskan Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 30000000	Diterima, digabungkan dengan desa lain
23	Kepala Desa Pa'au	Pariwisata	Workshop ekonomi kreatif	Perlunya Pelatihan Pembuatan Souvenir	Desa Paau, Kab. Banjar, Aranio, Pa'au	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 20 orang Anggaran : 30000000	Ditolak, sudah dilaksanakan di kecamatan Arano tahun 2019-2021
24	Kepala Desa Pa'au	Pariwisata	Penyelenggaraan even wisata di obyek wisata	Perlunya Pelatihan Tari Japin dan koreografi dalam rangka pelestarian budaya daerah.	Desa Paau, Kab. Banjar, Aranio, Pa'au	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Ditolak, dapat menggunakan dana desa
25	Kepala Desa Pemangkih Darat	Pariwisata	Workshop ekonomi kreatif	Workshop perbengkelan Mengatasi pengangguran, memberikan pekerjaan anak putus sekolah dan meningkatkan keterampilan masyarkat	Desa pemangkih darat, Kab. Banjar, Tatah Makmur, Pemangkih Darat	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 30000000	Diterima, digabung dengan desa lain
26	Kepala Desa Astambul Kota	Pariwisata	Workshop ekonomi kreatif	pembuatan kain sasirangan, 30 Orang, 30.000.000	Astambul Kota, Kab. Banjar, Astambul, Astambul Kota	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 30000000	Diterima, digabung dengan desa lain
27	Kepala Desa Batu Balian	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Terkendala Sound Sistem untuk maulid habsyi	Rt.02,03,04, Kab. Banjar, Simpang Empat, Batu Balian		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
28	Kepala Desa Sungai Tabuk	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Pengadaan Pakaian Adat Banjar Volume 1 Paket	RT.03, Kab. Banjar, Simpang Empat, Sungai Tabuk		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
29	Kepala Desa Sungai Langsat	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Pengadaan Peralatan Kuda Lumping Volume 1 paket	Desa Sungai Langsat, Kab. Banjar, Simpang Empat, Sungai Langsat		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
30	Kepala Desa Simpang Empat	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Maulid Habsyi volume 3 paket	Simpang Empat RT 001.002.003, Kab. Banjar, Simpang Empat, Simpang Empat		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun

31	Kepala Desa Pasar Lama	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Perlunya Alat Hadrah untuk volume 1 kelompok	Pasar Lama Rt.01 - 03, Kab. Banjar, Simpang Empat, Pasar Lama		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
32	Kepala Desa Sungai Raya	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Kesenian Kuntau volume	Sungai Raya, Kab. Banjar, Simpang Empat, Sungai Raya		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
33	Kepala Desa Sungkai	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Pelatihan Hadrat dan perlengkapan Hadrah Putra volume	Sungkai, Kab. Banjar, Simpang Empat, Sungkai		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
34	Kepala Desa Sungai Baru	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Rombongan Maulid Habsy volume 1 Paket	Sungkai Baru Rt 01.02.03, Kab. Banjar, Simpang Empat, Sungai Baru		Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
35	Kepala Desa Kuin Besar	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pembuatan wisata siring pantai,volume 500meter,pagu 1Miliyar	Kalimantan Selatan, Kab. Banjar, Aluh Aluh, Kuin Besar	Rekomendasi : Usulan dapat diteruskan Koefisien : 500 mater Anggaran : 1000000000	ditolak, belum terbentuk pokdarwis
36	Kepala Desa Aluh Aluh Besar	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pengadaan Kapal Wisata beserta Warung "Apung Wisata",volume kapal dan warung 1 unit,pagu Kapal Rp.100.000.000 dan pagu warung Rp.200.000.000	Aluh-Aluh Besar Rt.05, Kab. Banjar, Aluh Aluh, Aluh Aluh Besar	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 2 paket Anggaran : 300000000	ditolak, belum terbentuk pokdarwis
37	Kepala Desa Sungai Musang	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Perlunya mengembangkan potensi Wisata Hutan Mangrove di Desa Sungai Musang RT.03/05 dengan membangun Sarana Jalan Titian, volume 1 unit dengan ukuran 1500 x 1,5 M, Pagu 1.000.000.000	Sungai Musang RT.03/05, Kab. Banjar, Aluh Aluh, Sungai Musang	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 unit Anggaran : 1000000000	ditolak, belum terbentuk pokdarwis
38	Kepala Desa Bakambat	Pariwisata	Pembuatan Rambu Wisata	Wisata Pembuatan Mangrup,volume 1 km,pagu Rp.600.000.000	Bakambat Rt.01 dan 03, Kab. Banjar, Aluh Aluh, Bakambat	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 600000000	ditolak, belum terbentuk pokdarwis

39	Kepala Desa Bincau Muara	Kebudayaan	Workshop Kesenian	Kurangnya pengetahuan generasi milenial terhadap budaya daerah Volume : 1 kegiatan Pagu : Rp. 25.000.000,-	Jl. Melati RT 1-5 dan Jl. Permata II RT 6 Bincau muara, Kab. Banjar, Martapura, Bincau Muara	Rekomendasi : Usulan dapat diteruskan Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 25000000	Diterima berupa workshop kintung, peserta digabung dengan desa lain
40	Kepala Desa Tungkaran	Pariwisata	Pelatihan Pokdarwis	SDM Masyarakat di Desa Kurang Memadai Volume 5 Orang Pagu Rp. 5.000.000	Desa Tungkaran, Kab. Banjar, Martapura, Tungkaran	Rekomendasi : Usulan dapat diteruskan Koefisien : 5 orang Anggaran : 5000000	diterima, materi peserta dan tempat ditentukan dinas
41	Kepala Desa Tungkaran	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Potensi lahan ada tapi tidak ada modal Volume 1,5 Ha Pagu Rp. 500.000.000	Jalan Padang Anyar Rt.4, Kab. Banjar, Martapura, Tungkaran	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	ditolak karena belum jels lahan
42	Kepala Desa Pasayangan Selatan	Pariwisata	Sosialisasi gerakan menviralkan obyek wisata	Pelatihan Memviralkan apa yang ada di Desa. Volume: 1 Paket Pagu: 10.000.000	Pasayangan Selatan, Kab. Banjar, Martapura, Pasayangan Selatan	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	diterima, materi dan tempat ditentukan dinas
43	Lurah Tanjung Rema Darat	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Bantuan Sound Sistem dan Terbang untuk kegiatan Pembacaan Syair Maulid Pagu 50.000.000	RT.1, RT.3, RT.4, RT.6, RT.7, RT.10, RT.12, RT. 14, Kab. Banjar, Martapura, Tanjung Rema Darat	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Ditolak, Persyaratan harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun
44	Lurah Jawa	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Gapura Pintu Gerbang Pagu: Rp. 50.000.000	Jl. Perwira RT. 03 RW. 05, Kab. Banjar, Martapura, Jawa	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	ditolak, bukan tupoksi
45	Kepala Desa Telaga Baru	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Pembangunan Sanggar Japin 6x10 m Pagu 160.000.000	RT.02, Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Telaga Baru	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Dipending, disampaikan ke provinsi
46	Kepala Desa Telaga Baru	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Bantuan Kelengkapan Group Japin dan Kuntau 1 Paket Pagu RP. 50.000.000	RT.01, Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Telaga Baru	Rekomendasi : usulan dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Diterima, sudah berbadan hukum
47	Kepala Desa Telaga Baru	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Bantuan Kelengkapan Group Kuda Lumping 1 Kegiatan Pagu Rp. 50.000.000	RT.03, Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Telaga Baru	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000	Ditolak, belum berbadan hukum
48	Kepala Desa Ati'im	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Perlunya bantuan alat kesenian Hadrah	Desa Atiim RT 01, 02, Kab. Banjar, Pengarom, Ati'im	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 30000000	Penerima harus berbadan hukum dan berusia 3 tahun

49	Kepala Desa Paramasan Bawah	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pengembangan objek wisata air terjun, volume 1 paket, perkiraan anggaran 500 juta	Pal 15, Kab. Banjar, Paramasan, Paramasan Bawah	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	dipending, diteruskan ke provinsi
50	Kepala Desa Paramasan Bawah	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pengembangan objek wisata Air Terjun "Mandin Mandap", volume 1 paket, perkiraan anggaran 500 juta	Dusun Munggu Lahung RT. 06, Kab. Banjar, Paramasan, Paramasan Bawah	Rekomendasi : usulan diterukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	dipending, diteruskan ke provinsi
51	Kepala Desa Paramasan Bawah	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Pembangunan balai adat, volume 1 paket, perkiraan anggaran 500 juta	Dusun Terangkin, Kab. Banjar, Paramasan, Paramasan Bawah	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	dipending, diteruskan ke provinsi
52	Kepala Desa Paramasan Bawah	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Pemasangan Paving Block di halaman Balai Adat (Balai Induk), volume 600 m/persegi. Perkiraan anggaran 200 juta	Halaman Balai Induk, Dusun Pal 9, Kab. Banjar, Paramasan, Paramasan Bawah	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 600 m/persegi Anggaran : 200000000	dipending, diteruskan ke provinsi
53	Kepala Desa Paramasan Atas	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pembuatan sarana di objek wisata Air Terjun "Mandin Mangapan" seperti WC/Toilet, Kamar Ganti dan sarana penunjang lainnya. Perkiraan anggaran 1 milyard	RT. 04 Dusun Niwak, Kab. Banjar, Paramasan, Paramasan Atas	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1000000000	dipending, diteruskan ke provinsi
54	Kepala Desa Paramasan Atas	Pariwisata	Pembuatan Label Destinasi Wisata	Pembuatan pintu gerbang objek Wisata "Mandin Mangapan", 1 paket. Perkiraan anggaran 500 juta	RT. 04 Dusun Niwak, Kab. Banjar, Paramasan, Paramasan Atas	Rekomendasi : ususlan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	dipending, diteruskan ke provinsi
55	Kepala Desa Paramasan Atas	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pembangunan sarana objek wisata Goa Lambak Liang, Perkiraan anggaran 200 juta	RT. 02 Dusun Inpres, Kab. Banjar, Paramasan, Paramasan Atas	Rekomendasi : usulan diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	dipending, diteruskan ke provinsi
56	Kepala Desa Angkipih	Kebudayaan	Bantuan Sarana Kebudayaan	Rehab balai Adat. Perkiraan anggaran 200 juta	Dusun Bintangai, Kab. Banjar, Paramasan, Angkipih	Rekomendasi : usulan dapat diterukan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	dipending, diteruskan ke provinsi

57	Kepala Desa Sei Ranggas Tengah	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pembuatan Perahu Naga. Volume : 4 Unit. Pagu : Rp 80.000.000. Tanggung Jawab : DInas Pariwisata.	Desa, Kab. Banjar, Martapura Barat, Sei Ranggas Tengah	Rekomendasi : Usulan dapat diteruskan Koefisien : 4 Unit Anggaran : 80000000	Dipending, diteruskan ke provinsi
58	Kepala Desa Sei Ranggas Tengah	Pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata	Pengadaan Speed Boat. Volume : 1 Paket. Pagu : Rp 200.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Pariwisata.	Ds. Sungai Rangas Tengah, Kab. Banjar, Martapura Barat, Sei Ranggas Tengah	Rekomendasi : Usualan dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Dipending, diteruskan ke provinsi
59	Kepala Desa Sei Ranggas Tengah	Pariwisata	Sosialisasi Ekonomi kreatif	Pelatihan Pendataan PMKS. Volume 1 Paket. Pagu : Rp 5.000.000. Tanggung Jawab : Dinas Sosial.	Desa, Kab. Banjar, Martapura Barat, Sei Ranggas Tengah	Rekomendasi : Usulan dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	Diterima, tempat dan materi ditentukan dinas
60	Kepala Desa Sei Ranggas Tengah	Pariwisata	Sosialisasi gerakan menviralkan obyek wisata	Pelatihan Pengelolaan Wisata. Volume : 1 Paket. Pagu : Rp 10.000.000. Tanggung Jawab : Dispora.	Desa, Kab. Banjar, Martapura Barat, Sei Ranggas Tengah	Rekomendasi : Usulan dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 10000000	Ditolak, akan ada perwakilan yang diundang
61	Kepala Desa Sei Ranggas	Pariwisata	Pembuatan Rambu Wisata	PEMBUATAN PETA DESA. VOLUME : 1 PAKET. PAGU :20.000.000 PENANGGUNG JAWAB : BAGIAN TAPEM	SUNGAI RANGAS, Kab. Banjar, Martapura Barat, Sei Ranggas	Rekomendasi : Usulan dapat diteruskan Koefisien : 1 paket Anggaran : 20000000	Ditolak, tidak masuk renja
62	Kepala Desa Kahelaan	Pariwisata	Pelatihan Pokdarwis	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (1 kegiatan)	Desa Kahelaan, Kab. Banjar, Sungai Pinang, Kahelaan	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 20000000	
63	Kepala Desa Belimbing Lama	Pariwisata	Pelatihan Pokdarwis	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (1 kegiatan)	Desa Belimbing Lama, Kab. Banjar, Sungai Pinang, Belimbing Lama	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 20000000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Upaya mewujudkan visitersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri

Meningkatkan nilai tambah sektor industri, dengan target:

a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8- 6,5% ;
b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%;
c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T.

2. Pariwisata

Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, dengan target:

a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan;
b. Peringkat *Travel and Tourism Competittiveness Index* 36-39.

3. Ketahanan Pangan

Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dengan target:

a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8;
b. Nilai Tukar Petani 102-104;
c. Nilai Tukar Nelayan 102-105;
d. Ketersediaan Beras 44 juta ton;
e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton;
f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/orang/ tahun.

4. UMKM

Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional

a. Pertumbuhan Wirausaha 3%;
b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%;
c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%.

5. Infrastruktur

Meningkatkan pemerataan infrastruktur, dengan target:

a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, danPenyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit;
b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi;
c. Panjang jalan tol baru: 400 km;
d. Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s;
e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR;
f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR;
g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha;
h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh.

6. Transformasi Digital

Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, dengan target:

a. Masyarakat pengguna internet 79,20%;
b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%;
c. 72.500 SDM talenta digital;
d. 12,4 juta *lokal champion* literasi digital;
e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi;
f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber.

7. Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), dengantarget:

a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%;
b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%;
c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%;
d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.

8. Reformasi Perlindungan Sosial

Mempercepat reformasi perlindungan sosial, dengan target:

a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%;
b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%;
c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%;
d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasionaldari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk.

9.Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan

Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, dengan target:

a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
d. 400 Produk Inovasi dariPerusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT) 900 PatenDomestik

10. Reformasi Kesehatan

Dalam hal penanganan Covid-19, dilakukan dengan meneruskan vaksinasi Covid-19. Di sampingitu juga memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, dengan target:

a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
e. Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar 59%
f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan pembangunan pada kawasanKalimantan difokuskan untuk:

a. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru- paru dunia (*Heart of Borneo*)
b. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutanproduksi;
c. Mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
d. Mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasikomoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan;
e. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
f. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional; peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Spesifik untuk tahun 2022, arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi;

2. Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional;
3. Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
4. Mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan Bagian Utara.

Sedangkan *Major Projects* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Kalimantan Selatan padatahun 2022 adalah:

1. Kawasan Industri Prioritas dan 31 Smelter;
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar;
3. Pembangunan Bendungan Riam Kiwa;
4. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM).

3.2 Telaahan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMDProvinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai

berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata :
   a. Peningkatan Nilai Tambah hasil Industri dan Pertanian;
   b. Mendorong Pariwisata dan Pengembangan Geopark;
   c. Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru;
   d. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :
   a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah;
   b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
   c. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS;
   d. Pengendalian Prevalensi Stunting;
   e. Penurunan Angka Pernikahan Anak;

f. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;

g. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

b. Peningkatan Prestasi Olahraga.

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian :

a. Pengembangan Kawasan Prioritas;

b. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi;

c. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar.

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

a. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;

b. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

c. Peningkatan Pelayanan Publik;

d. Pengembangan Satu Data Kalsel.

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana;

c. Mendorong Penggunaan Energi Baru Terbarukan.

6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

a. Membuka Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN;

b. Mengembangkan Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri** dan **Agamis”**. Mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Banjar yang terdiri dari:

Misi 1 Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas sumber daya manusia.

Misi 2 Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Misi 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Misi 4 Penyelenggaraan ke Pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif

Misi 5 Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan ke Pemerintahan luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam bentuk rumusan tujuan dan sasaran, yaitu :

a. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Misi Pertama mempunyai 1 tujuan yaitu: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini dibagi menjadi 5 sasaran yaitu:

- Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan
- Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan
- Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat
- Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
- Sasaran 5 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak

b. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Misi kedua adalah Peningkatan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan Dan Pemerataan Pembangunan Daerah Yang Berkeadilan dengan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut ini:

Tujuan 1 **:** Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas

- Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
- Sasaran 2 : Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan
- Sasaran 3 : Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital

Tujuan 2 **:** Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran

- Sasaran 1 : Menurunnya Angka Pengangguran
- Sasaran 2 : Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Menengah.
- Sasaran 3 : Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
- Sasaran 4 : Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial
- Sasaran 5 : Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan Perdesaan
- Sasaran 6 : Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga
- Sasaran 7 : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah

c. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Misi ketiga adalah Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, untuk lebih mengoperasionalkan misi tersebut diperlukan tujuan dan sasaran sebagai berikut ini.

Tujuan : Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan

- Sasaran 1 : Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah

- Sasaran 2 : Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni
- Sasaran 3 : Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan
- Sasaran 4 : Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup

d. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Misi keempat adalah Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif. Dalam upaya lebih mengoperasionalkan misi keempat tersebut maka disusun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif

- Sasaran 1 : Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah
- Sasaran 2 : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik
- Sasaran 3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja
- Sasaran 4 : Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Sasaran 5 : Berkembangnya profesional ASN
- Sasaran 6 : Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik

e. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Misi kelima RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah Penguatan Karakter Masyarakat Yang Religius, Berakhlak Baik Dan Berkepribadian Luhur, Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Dan Demokratis. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan tujuan dan sasaran yakni:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur

- Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;
- Sasaran 2 : Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar
- Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga
- Sasaran 4 : Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat

Mencermati kelima misi dan tujuan pembangunan daerah, peran sektor kebudayaan dan Pariwisata dominan untuk mendukung pencapaian **Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3** serta **Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 2**

Secara terperinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar disajikan pada Tabel V

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD DISBUDPAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar.**		**Jumlah Apresiasi Budaya Banjar**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		Meningkatnya pelestarian budaya	Cakupan pelestarian budaya	33,33	40,00	46,47	53,33	60,00
2	**Meningkatnya akselerasi pariwisata dan ekonomi kreatif**		**Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata**					
		Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah wisatawan					
			Lama kunjungan wisatawan					
			Pengeluaran wisatawan					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2022 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mencakup 7 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 35 Sub kegiatan yaitu:

Tabel 5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disbudpar

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Pemerintah daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				8	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

			Daerah		Dinas Jabatan
				14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	18	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		8	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	19	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				20	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		9	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	10	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
				23	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	11	Penetapan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/Kota	24	Penetapan Cagar Budaya
		12	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	25	Perlindungan Cagar Budaya
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	13	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	26	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

	DESTINASI PARIWISATA		Kabupaten/Kota		
				27	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		14	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				29	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		15	Penetapan Tanda Daftar Usaha pariwisata Daerah kabupaten/Kota	30	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	31	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
				32	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	17	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	33	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
				34	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
				35	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kavupaten/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel VII dan tabel VIII berikut.

Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

3					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
					Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata			**4.673.622.000**	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**2.830.013.150**	
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**1.706.215.750**	
2	**22**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**17.272.300**	
2	22	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKJIP, LKPJ,LPPD, TEPRA,RKF,Laporan Tahunan)	12 Bulan	17.272.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**499.087.200**	
2	22	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	12 Bulan	491.250.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	4.706.800	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	1 Laporan	3.130.400	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**1**	**2,06**		**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**712.327.900**	
2	22	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan	63.391.600	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,06	4	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Bahan logistik kantor	12 Bulan	159.158.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	39.778.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 Bulan	450.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 Persen**	**240.477.850**	
2	22	1	2,08	1	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	16.500.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	
2	22	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	223.977.850	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**237.050.500**	
2	22	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisibaik	12 Bulan	38.990.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	12 Bulan	132.038.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin yang terpelihara	12 Bulan	33.790.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	12 Bulan	32.232.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase warisan budaya tak benda kabupaten yang telah diregistrasi/ ditetapkansebagai warisan budaya tak benda nasional**	**44,44 Persen**	**658.909.100**	
2	**22**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase budaya yang dikelola dalam sistem regnas WBTB**	**44.44 Persen**	**10.000.000**	
2	22	2	2,01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek PemajuanKebudayaan	Jumlah warisan budaya tak benda yang telah masuk dalam sistem ragistrasi nasional warisan budaya tak benda nasional	1 buah	10.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**2**	**2,02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase kelompok kesenian yang dibina**	**80.36 Persen**	**638.909.100**	
2	22	2	2,02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah penyelenggaraan dan fasilitasi festival budaya	5 Festival	598.478.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	2	2,02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah warga masyarakat yang memahami kekayaan budaya dan kesenian	40 orang	40.430.600	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**2**	**2,03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan Jumlah ketersediaan sarana kebudayaan yangdapat dimanfaatakan**	**1 kelompok 1 set**	**10.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	
2	22	2	2,03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah ketersediaan sarana kebudayaan yang dapat dimanfaatkan	5 unit	10.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Prosentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan**	**20,00 persen**	**31.548.200**	
2	**22**	**4**	**2,01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota**	**jumlah aplikasi sistem informasi sejarah dan kebudayaan yang dikelolaJumlah peserta lawatan dan kajian sejarah lokal Banjar**	**1 aplikasi 40 orang**	**31.548.200**	
2	22	4	2,01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lawatan sejarah dan kajian sejarah lokal Banjar	40 orang	21.621.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	22	4	2,01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dikelola	1 aplikasi	9.926.700	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGARBUDAYA**	**Prosentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagarbudaya**	**62,50 Persen**	**433.340.100**	
2	**22**	**5**	**2,01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan kajian dan rekomendasi penetapan cagar budaya Jumah SK Penetapan Cagar Budaya	**1 laporan**	**123.458.100**	
2	22	5	2,01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah laporan kajian dan rekomendasi penetapan cagar budaya		123.458.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	**22**	**5**	**2,02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan**	**36 buah 25 orang**	**309.882.000**	
2	22	5	2,02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Jumlah juru pelihara dan petugas kebersihan warisan/cagar budaya yang dikoordinir	36 buah 25 orang	309.882.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**1.843.608.850**	
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**36.654.800**	
3	**26**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**27.000.000**	
3	26	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	50 Orang	27.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	
3	**26**	**1**	**2,06**		**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**9.654.800**	
3	26	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	9.654.800	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Prosentase destinasi wisata yang dikembangkan**	**8,00 persen**	**828.496.750**	
3	**26**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Prosentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang di kelola**	**37.5 Persen**	**307.800.250**	
3	26	2	2,01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah paket daya tarik/atraksi wisata yang dikembangkan	5 paket	113.773.050	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	26	2	2,01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan monitorring dan evaluasi	1 laporan	194.027.200	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	**26**	**2**	**2,03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Prosentase ketersediaan amenitas**	**47.37 Persen**	**470.696.500**	
3	26	2	2,03	4	Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranadalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan	6 unit	375.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	26	2	2,03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pokdarwis yang terlatih	50 orang	95.696.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	**26**	**2**	**2,04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase rekomendasi TDUP yang dikeluarkan**	**100 Persen**	**50.000.000**	
3	26	2	2,04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	42 Unit Pelaku Usaha	50.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Prosentase destinasi wisata yang dipasarkan**	**8,00 persen**	**715.215.700**	
3	**26**	**3**	**2,01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota**	**Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos**	**95.000**	**715.215.700**	
3	26	3	2,01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah media informasi yang dikembangkan	23 jenis	240.836.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	26	3	2,01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah promosi pariwisata yang dikembangkan	7 kali	424.162.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	26	3	2,01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah laporan pendataan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	1 laporan	50.217.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	
	26	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Prosentase sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**18,75 persen**	**263.241.600**	
3	**26**	**5**	**2,01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah duta wisata dan ekonomi kreatif yang dikoordinir** **Jumlah warga masyarakat yang meningkat kapasitasnya di sektor ekonomi kreatif**	**6 pasang** **60 orang**	**263.241.600**	
3	26	5	2,01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah duta wisata dan ekonomi kreatif yang dikoordinir	6 pasang	214.182.800	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3	26	5	2,01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	jumlah warga masyarakat yang meningkat keterampilannya di sektor ekonomi kreatif	60 orang	49.058.800	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-1, periode renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Banjar dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar serta peran aktif *stakeholder* yang terkait.

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dasar penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar adalah Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Undang-undang di bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta adanya peluang dan tantangan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar bagi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Untuk itu perpustakaan perlu dikembangkan tidak terbatas pada sekolah dan desa tapi memprioritaskan daerah-daerah terpencil.

Disisi lain tuntutan masyarakat dalam layanan informasi di era keterbukaan informasi seperti yang diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tantangan dan sekaligus menjadi tanggung jawab pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

Proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan

awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam RENJA Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja disusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu 1 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan Tugas, Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, menguraikan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah, berisikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, misal:
- Pencapaian yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi
- Peningkatan koordinasi Perangkat Daerah
- Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas SDM Perangkat Daerah
- Perencanaan daerah yang baik

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan antara lain meliputi:
- Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

RENJA Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar merupakan RENJA tahun pertama untuk Periode RENSTRA tahun 2021-2026 Kepala Daerah terpilih. Penyusunannya mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RENJA 2020 yang merupakan RENJA tahun akhir periode RENSTRA tahun 2016-2021. Meskipun RENJA tahun 2020 berada di periode RENSTRA yang berbeda dengan RENJA tahun 2022, secara kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan masih berkesesuaian sehingga masih relevan untuk dijadikan acuan pada penyusunan RENJA tahun 2022.

Hasil capaian tahun 2020 beberapa Program/Kegiatan telah memenuhi target kinerja dan beberapa masih belum memenuhi target kinerjanya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan :
   a. Kegiatan Bidang Kearsipan yaitu Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip mendapat capaian sebesar 80%.
   b. Kegiatan rutin yaitu Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor mendapat capaian sebesar 88%.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
   a. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan mendapat capaian sebesar 100% (target 100%, realisasi 100%).
   b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat capaian sebesar 100% (target 12 Bulan, realisasi 12 Bulan).
   c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat capaian sebesar 100% (target 12 Bulan, realisasi 12 Bulan).
   d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat capaian sebesar 100% (target 2 OK, realisasi 2 OK).
   e. Kegiatan Bidang Kearsipan yaitu Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian Data, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, dan Monitoring, Evaluasi dan Kegiatan Pelaporan Kondisi Situasi Data mendapat capaian sebesar 100%.

f. Kegiatan Bidang Perpustakaan yaitu Pengembangan Minat dan Budaya Baca, Penyediaan Bahan Pustaka, dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mendapat capaian sebesar 100%.
g. Kegiatan rutin sebanyak 10 kegiatan mendapat capaian sebesar 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
   a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah mendapat capaian sebesar 108% (target 82.9, realisasi 89.47).
   b. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan mendapat capaian sebesar 108% (target 82.9, realisasi 89.47).
   c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan mendapat capaian sebesar 3088% (target 2.03, realisasi 62.7)
   d. Kegiatan Bidang Kearsipan yaitu Penduplikasian Dokumen/ Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika, dan Kegiatan Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data mendapat capaian lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan).
   e. Kegiatan Bidang Perpustakaan yaitu Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca, dan Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca mendapat capaian lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan).
   f. Kegiatan rutin sebanyak 4 Kegiatan mendapat capaian lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan).

   Hasil capaian semua program dan kegiatan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
   a. Faktor Tidak Tercapai yaitu pengurangan anggaran dan terjadinya perubahan pada struktur tenaga kebersihan kantor.
   b. Faktor Terpenuhi yaitu kelancaran anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, serta adanya komitmen dan upaya yang maksimal dalam pelaksanaan program serta kegiatan.
   c. Faktor Melebihi yaitu kelancaran anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, serta adanya inovasi dan upaya yang maksimal dalam menjalankan kegiatan dan program.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu peningkatan target pada tahun 2021.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu mencermati dalam menentukan target mengacu pada anggaran yang tersedia dan keadaan yang terjadi, serta terus melakukan inovasi serta melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

Untuk tahun 2021 diperkirakan beberapa program maupun kegiatan tidak tercapai karena adanya rasionalisasi anggaran dan adanya faktor eksternal yang memaksa beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s/d Tahun 2021

(SEBELUM PMDN 90)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja RENJA Tahun 2020	Realisasi RENJA 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				K	K	K	K			
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan jasa, peralatan perkantoran dan penunjang lainnya**	**12**	**24**	**12**	**12**	**100**			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84	24	12	12	100			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	26	53	26	23	88			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	62	35	12	12	100			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan	11	23	11	14	127			
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	20	12	12	100			

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	17	22	17	18	105			
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	627	33	1	1	100			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya penunjang kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	28	147	25	37	148			
	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	12	24	12	12	100			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana, prasarana perkantoran dan penunjang lainnya**	**12**	**24**	**12**	**12**	**100**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	-	1	1	100			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	42	48	3	3	100			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	440	24	880	880	100			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12	44	12	16	133			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	24	10	1	1	100			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terwujudnya peningkatan keterampilan pegawai melalui**	20	**21**	**2**	**2**	**100**			

		pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis.								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur	20	21	2	2	100			
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	**Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung**	**2.05**	**104.93**	**2.03**	**62.7**	**3088**			
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dan pemasyarakatan minat baca	25500	110337	8655	49950	577			
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Pelaksanaan Lomba	3	4	3	3	100			
	Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan keliling	5500	112	2398	2650	110			
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan sosialisasi minat dan budaya baca	3	91	1	2	200			
	Penyediaan Bahan Pustaka	Penyediaan bahan pustaka daerah	1800	1150	881	881	100			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya survey kepuasan masyarakat (SKM)	2	2	1	1	100			
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	**Persentase capaian kinerja perbaikan sistem administrasi kearsipan**	**100**	**400**	**82.9**	**89.47**	**108**			
	Pengumpulan Data	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data	6	24	6	6	100			
	Pengklasifikasian Data	tercetaknya pedoman Pengklasifikasian Data ; JRA, Tata Kearsipan dan Form P. Data	250	578	160	160	100			

	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	**Persentase unit Pengelola kearsipan yang menyusun arsip Secara Baku**	**100**	**208.4**	**82.9**	**89.47**	**108**			
	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah Pengadaan Lemari dan Rak untuk Arsip Jumlah Pengadaan boks Arsip	25	30	25	20	80			
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Unit yang ditata arsipnya	13	16	12	12	100			
	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen/arsip yang ditata dalam bentuk informatika	350	299	250	356	142			
	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	65	56	40	47	117			
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	**Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan**	**100**	**400**	**100**	**100**	**100**			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan dokumen/arsip	12	48	12	12	100			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Situasi Data	12	48	12	12	100			

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s/d Tahun 2021

(PMDN 90)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outcome)/subkegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Program dan kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja RENJA Tahun 2020	Realisasi RENJA 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				K	K	K	K			
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**						**100%**	**50%**	**50%**
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan SKPD**						**100%**	**50%**	**50%**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN						12	6	50%
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						12	6	50%
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Umum SKPD**						**100%**	**50%**	**50%**

2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12	6	50%
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	6	50%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						12	6	50%
		Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Tamu, dan Rapat Dinas						12	6	50%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						12	6	50%
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah						12	6	50%
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100%**	**50%**	**50%**
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeliur						0	0	0
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor						12	6	50%
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor						12	6	50%

2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100%**	**50%**	**50%**
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	6	50%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor						12	6	50%
		Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran						12	6	50%
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**						**100%**	**50%**	**50%**
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau operasional						12	6	50%
2.23..01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya						12	6	50%
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor						12	6	50%
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung**						**2.05%**	**-63%**	0
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan**						**6711**	**9701**	144%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan						31	**0**	**0**

2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemustaka Yang Berkunjung ke Perpustakaan						6711	9654	144%
		Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat						306	306	100%
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Penyediaan Bahan Pustaka Daerah						1900	1150	61%
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca**						**4**	**4**	**100%**
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca						1	1	100%
		Jumlah Pelaksanaan Lomba						**3**	3	100%
		Jumlah Pemustaka Yang Berkunjung Ke Perpustakaan Keliling						360	47	13%
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Unit Pengelola Kearsipan Yang Menyusun Arsip Secara Baku**						**100%**	**42%**	**42%**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis**						**100%**	**58.3%**	**58.3%**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen/Arsip Yang Ditata Dalam Bentuk Informatika						350	501	143%
		Jumlah Pengadaan Boks Untuk Arsip						20	0	0

		Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Keamanan Penyimpanan Data						65	37	57%
		Jumlah Unit Yang Ditata Arsipnya						12	6	50%
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data						12	6	50%
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip						12	6	50%
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksnananya pengelolaan arsip statis**						**100%**	**50%**	**50%**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tercetaknya Pedoman Pengklasifikasian Data ; JRA, Tata Kearsipan dan Form P. Data						250	125	50%
		Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data						6	3	50%
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**						**100%**	**0%**	**0**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Kearsipan						8	0	**0**

2.24.02.2.03.02	Pemerdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan						75	0	0

Tabel diatas diisi berdasarkan pelaksanaan pada periode Rencana Strategis (RENSTRA) sebelumnya, oleh karena itu terdapat beberapa kolom yang tidak dapat diisi dikarenakan adanya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 yang menyebabkan perbedaan nomenklatur. Untuk tahun 2021 merupakan masa transisi dan hasil pemetaan dari nomenklatur sebelumnya menjadi PERMENDAGRI 90 Tahun 2019.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan Perangkat Daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar berupaya untuk meningkatkan “Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat” dan “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat” yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari urusan perpustakaan, sedangkan IKK untuk urusan kearsipan yaitu “Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan” dan “Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat”.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar juga memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk” yang diampu urusan perpustakaan, dan “Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)” yang diampu urusan kearsipan. Tahun 2022 IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar untuk urusan perpustakaan berubah menjadi sama dengan IKK nya yaitu “Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat” dan “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat”, sedangkan untuk IKU urusan kearsipan yaitu “Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip”.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANJAR

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target Renstra PERANGKAT DAERAH			Realisasi Capaian		Proyeksi		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021 s.d Maret	Tahun 2022	Tahun 2023	Catatan Analisis
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Utama									
1	Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk		4,70	4,87	-	9,5	1.1155	-	-	
2	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal		78,75	79,00	61	86,12	-	61	62	
3	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar		-	-	99.31	-	-	99.31%	99.65	
	Indikator Kinerja Kunci									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		-	-	42.61	Rendah	-	42.61	45.92	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		-	-	14.58	-	-	14.58	15.02	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		-	-	76	75,7	-	76	76.5	

4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		-	-	84.7	84,2	-	84.7	85.2	

Keterangan : Indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- Untuk Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal 2021 tidak diisi karena nilai tersebut dikeluarkan setiap akhir tahun, dan untuk proyeksi tahun 2022 dan 2023 nilainya menurun dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dikarenakan perhitungan Nilai LAKE pada periode tersebut sudah menggunakan cara perhitungan yang baru.

- Untuk Tahun 2022, IKU dari Urusan Perpustakaan berubah menjadi sama dengan IKK yaitu “Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat” dan “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat”, tidak menggunakan indikator “Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk” seperti tahun 2020 dan 2021.

- Untuk sasaran “Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian” merupakan sasaran bidang sekretariat yang diampu oleh sekretaris baru digunakan pada periode RENSTRA 2021-2026.

- Penyajian tabel diatas dimaksudkan untuk menampilkan kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar pada penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode sebelumnya sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Permasalahan dan Hambatan :

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar utamanya dalam melaksanakan pelayanan mengalami hambatan/ permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

   a. Intern
      1. Minimnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
      2. Terbatasnya sumber daya manusia terutama jumlah arsiparis.
      3. Masih rendahnya kemampuan / penguasaan Teknologi Informasi baik kearsipan maupun perpustakaan khususnya bagi petugas pengelola arsip/arsiparis maupun pustakawan;
      4. Terbatasnya koleksi bahan pustaka;
      5. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan.

   b. Ekstern
      1. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
      2. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan;

2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu keadaan geografis wilayah yang luas dan demografis yaitu jumlah penduduk yang besar, penguatan literasi untuk kesejahteraan menjadi kegiatan prioritas nasional ,serta kemajuan teknologi.
3. Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang pada tahun 2020 pelaksanaannya mendapat hasil rendah ataupun belum dilakukan pengukuran, sesuai dengan RENSTRA periode 2021-2026 dijadikan prioritas/ Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 merupakan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Banjar

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/SubKegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
	Program Pembinaan Perpustakaan	**Kab. Banjar**	**Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk**	**9.51**	**512.659.400**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Kab. Banjar**	**Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk**	**9.51**	**380.572.400**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	**81.36**				**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan**	**82.2**		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Banjar**	**Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan**	**26.050 Orang**	**282.811.500**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Banjar**	**Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan**	**26.050 Orang**	**191.884.500**	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Banjar	Terlaksananya Pengadaan TIK Kegiatan Perpustakaan	2 Unit	46.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Banjar	Terlaksananya Pengadaan TIK Kegiatan Perpustakaan	4 Unit	30.073.000	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah Anggota Perpustakaan	21.702 Orang	76.286.500	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah Anggota Perpustakaan	21.702 Orang	76.286.500	
			Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	83 Kali				Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	83 Kali		
			Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Daerah	11.040 Orang				Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Daerah	10.440 Orang		
			Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Kegiatan				Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Kegiatan		

	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Banjar	Jumlah pengadaan bahan pustaka	2.300 Eksemplar	160.525.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Banjar	Jumlah pengadaan bahan pustaka	1.690 Eksemplar	85.525.000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar**	**Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca**	**10 Kegiatan**	**229.847.900**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca**	**10 Kegiatan**	**188.687.900**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Kegiatan Sosilisasi Minat dan Budaya Baca	3 Kegiatan	154.457.900	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Kegiatan Sosilisasi Minat dan Budaya Baca	3 Kegiatan	113.297.900	
			Jumlah Pelaksanaan Lomba	3 Kegiatan				Jumlah Pelaksanaan Lomba	3 Kegiatan		
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Banjar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis inklusi	3 Kegiatan	46.990.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Banjar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis inklusi	3 Kegiatan	46.990.000	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	28.400.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	28.400.000	
	Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelestarian Bahan Pustaka**	**1.785 Eksemplar**	**16.600.000**	**Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Kab. Banjar**	**Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan**	**98.89%**	**16.600.000**	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	**Kab. Banjar**	**Jumlah Peningkatan Koleksi Etnis Nusantara**	**36 Eksemplar**	**16.600.000**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Koleksi Etnis Nusantara**	**36 Eksemplar**	**16.600.000**	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Banjar	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	36 Eksemplar	15.000.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Banjar	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	36 Eksemplar	15.000.000	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Banjar	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	36 Eksemplar	1.600.000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Banjar	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	36 Eksemplar	1.600.000	
	Program Pengelolaan Arsip	**Kab. Banjar**	**Tingkat ketersediaan arsip**	**76**	**357.618.600**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Kab. Banjar**	**Tingkat ketersediaan arsip**	**76**	**275.619.300**	

			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	**82.54**				**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan**	**84.75**		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar**	**Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis**	**100%**	**192.705.400**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis**	**100%**	**143.129.600**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen/Arsip Yang Ditata Dalam Bentuk Informatika	350 Berkas	145.104.600	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen/Arsip Yang Ditata Dalam Bentuk Informatika	350 Berkas	98.184.600	
			Jumlah Pengadaan Boks Untuk Arsip	21 Buah				Jumlah Pengadaan Boks Untuk Arsip	21 Buah		
			Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Keamanan Penyimpanan Data	47 Buah				Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Keamanan Penyimpanan Data	47 Buah		
			Jumlah Unit Yang Ditata Arsipnya	12 unit				Jumlah Unit Yang Ditata Arsipnya	12 unit		
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Banjar	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	12 Kali	47.600.600	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Banjar	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	12 Kali	44.945.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	12 Bulan				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	12 Bulan		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar**	**Terlaksnananya pengelolaan arsip statis**	**100%**	**22.069.600**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis**	**100%**	**14.565.300**	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Banjar	Tercetaknya Pedoman Pengklasifikasian Data ; JRA, Tata Kearsipan dan Form P. Data	250 Dokumen	22.069.600	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Banjar	Tercetaknya Pedoman Pengklasifikasian Data ; JRA, Tata Kearsipan dan Form P. Data	250 Dokumen	14.565.300	
			Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data	6 kali				Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data	6 kali		

	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar**	**Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**	**100%**	**142.843.600**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**	**100%**	**117.924.400**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kab. Banjar	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Kearsipan	8 Buah	42.352.400	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kab. Banjar	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Kearsipan	8 Buah	17.436.000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Terlaksananya Audit Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI)	2 SKPD	100.491.200	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Terlaksananya Audit Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI)	2 SKPD	100.488.400	
			Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan	75 Orang				Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan	75 Orang		
								Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Kegiatan		
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	**Kab. Banjar**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip**	**84.7**	**31.412.400**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Kab. Banjar**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip**	**84.7**	**31.056.000**	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Kab. Banjar**	**Jumlah Unit Kearsipan yang melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsip**	**2 Unit**	**20.850.000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Unit Kearsipan yang melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsip**	**2 Unit**	**20.500.000**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Banjar	Jumlah unit yang dilakukan penilaian pemusnahan arsip	2 Unit	6.950.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Banjar	Jumlah unit yang dilakukan penilaian pemusnahan arsip	2 Unit	6.950.000	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Banjar	Jumlah Unit melakasnakan pemusnahan arsip	2 Unit	13.900.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Banjar	Jumlah Unit melakasnakan pemusnahan arsip	2 Unit	13.550.000	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar**	**Jumlah unit yang dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana**	**1 Unit Kearsipan**	**10.562.400**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar**	**Jumlah unit yang dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana**	**1 Unit Kearsipan**	**10.556.000**	

	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Banjar	Jumlah Unit yang dievakuasi dan diidentifikasi arsipnya akibat bencana	1 unit Kearsipan	5.000.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Banjar	Jumlah Unit yang dievakuasi dan diidentifikasi arsipnya akibat bencana	1 unit Kearsipan	4.995.000	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Banjar	Jumlah unit pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	1 unit Kearsipan	5.562.400	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Banjar	Jumlah unit pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	1 unit Kearsipan	5.561.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.330.994.600**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**4.504.722.767**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**2.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD**	**100%**	**2.999.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Terlaksananya Penyusunan DPA dan DPPA SKPD	1 Tahun	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.099.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**101.100.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.408.462.067**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	93.900.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	1 Tahun	3.311.372.067	

						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Pelaksana Tugas ASN yang Terpenuhi	12 Bulan	93.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	7.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	3.190.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi**	**100%**	**45.300.000**	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kab. Banjar**	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan	7 Orang	45.300.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**279.408.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**175.918.400**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.412.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	4.999.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	16.984.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	17.096.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	54.772.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	50.005.000	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Tamu, dan Rapat Dinas	12 Bulan				Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Tamu, dan Rapat Dinas	12 Bulan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	40.858.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	38.817.900	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	37 Kali	161.382.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Kali	65.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**90.786.900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**31.524.900**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Meubelair	7 Unit	15.159.100	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Meubelair	1 Unit	5.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	21.529.900	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 Unit	5.627.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 Unit	4.995.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**648.280.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**642.999.400**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	137.140.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	134.339.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	511.140.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	13 Bulan	508.660.000	
			Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	12 Bulan				Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	13 Bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**209.419.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**197.519.000**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	13 Unit	150.859.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	8 Unit	70.859.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kab. Banjar	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	80.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan	17.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	41.560.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung atau Bangunan yang dipelihara atau direhabilitasi	3 Bangunan	29.660.000	
JUMLAH				**Rp. 2.249.285.000**		**JUMLAH**			**5.208.570.467**		

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Banjar

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa PAUD	Desa Tambak Danau	-	1 Paket	Tidak dapat dilaksanakan karena bukan TUPOKSI dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar
2.	Pelatihan Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan	Desa Aluh Aluh Kecil Muara	-	2 Orang	Diterima dengan dimasukan ke agenda kegiatan perpustakaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan pada tahun 2022 disusun berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema dalam pembangunan nasional pada tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Memperkuat Pertahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik..

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi Wewenang dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan fungsinya yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati.
2. Pelaksanaan kebijakan tehnis dan perencanaan program bidang perpustakaan dan kearsipan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar memiliki sasaran utama yaitu Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat, yang mana hal ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional poin 3 yaitu ”Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”. Selain sasaran diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar juga memiliki sasaran utama lain yaitu Meningkatnya Tertib Arsip Kabupaten Banjar, yang mana selaras dengan prioritas pembangunan nasional poin 7 yaitu ” Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Dalam upaya mewujudkan prioritas nasional sesuai sasaran utamanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar melakukan :

1. Mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat dengan melakukan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Tak hanya itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar melakukan pelestarian koleksi nasional dan naskah

kuno melalui Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;

2. Peningkatan tertib arsip Kabupaten Banjar dengan melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu juga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar melakukan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip melalui Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

a. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yaitu Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik

b. Sasaran

1. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat
2. Meningkatnya Tertib Arsip Kabupaten Banjar
3. Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**83.47**
	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.58
		Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	42.61
	Meningkatnya Tertib Arsip Kabupaten Banjar	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	40.2
	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	99.31%

Definisi Operasional dan Rumus :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

RUMUS : TOTAL UPLM (UPLM 1 s/d UPLM 7) X 100%

- UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan

$$\frac{\text{Jumlah Pemustaka}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

- UPLM 2 : Rasio Ketercakupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Buku s/d Sekarang + Majalah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

- UPLM 3 : Rasio Ketercakupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Tenaga Perpustakaan}}$$

- UPLM 4 : Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perhari}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

- UPLM 5 : Persentase Perpustakaan Sesuai SNI

$$\frac{\text{Jumlah Perpustakaan Yang ber SNP}}{\text{Jumlah Total Perpustakaan}}$$

- UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berkunjung ke PERPUSDA}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

- UPLM 7 : Rasio Anggota Perpustakaan dengan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

   Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat didapat dari hasil survey.

3. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip

   Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip diberikan oleh pihak ketiga yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

   40% dari Nilai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) + 60% dari Nilai Rata-rata Kearsipan SKPD

4. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang masih memiliki nilai “Rendah” dan yang masih belum dilakukan penilaian;
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terus ingin ditingkatkan;
3. Pencapaian kinerja dari setiap urusan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang masih perlu ditingkatkan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemampuan teknis aparatur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, Tersedianya sarana dan prasarana, serta data dan informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar;
5. Tersedianya data/ informasi hasil monitoring dan evaluasi;
6. Meningkatnya hasil koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antar daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar didasarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program, kegiatan, sub kegiatan tersebut telah terinci dan terencana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berikut indicator dan targetnya. Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 sejumlah 5 program dengan 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2022. Adapun program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, kelompok sasaran, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci lampiran Tabel 4.1.

c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan reviu RKPD karena pengurangan anggaran. Hal ini membuat beberapa target dari sub kegiatan berubah menyesuaikan dengan anggaran yang berkurang.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banjar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu 2022	Sumber Dana		Target	Pagu 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk**	**Kab. Banjar**	**9.51**	**380.572.400**	**APBD**		**9.52**	**395.795.296**
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan		**82.2**				**82.4**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan**	**Kab. Banjar**	**26.050 Orang**	**191.884.500**	**APBD**		**26100 Orang**	**199.559.880**
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengadaan TIK Kegiatan Perpustakaan	Kab. Banjar	4 Unit	30.073.000	APBD		2 Unit	31.275.920
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Perpustakaan	Kab. Banjar	21.702 Orang	76.286.500	APBD		22602 Orang	79.337.960
		Jumlah kunjungan perpustakaan keliling		83 Kali				83 Kali	
		Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Daerah		10.440 Orang				11050 Orang	
		Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan bahan pustaka	Kab. Banjar	1.690 Eksemplar	85.525.000	APBD		2400 Eksemplar	88.946.000

2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca**	**Kab. Banjar**	**10 Kegiatan**	**188.687.900**	**APBD**		**10 Kegiatan**	**196.235.416**
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosilisasi Minat dan Budaya Baca	Kab. Banjar	3 Kegiatan	113.297.900	APBD		3 Kegiatan	117.829.816
		Jumlah Pelaksanaan Lomba		3 Kegiatan				3 Kegiatan	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis inklusi	Kab. Banjar	3 Kegiatan	46.990.000	APBD		3 Kegiatan	48.869.600
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	1 Kegiatan	28.400.000	APBD		1 Kegiatan	29.536.000
2.23.03	**Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan**	**Kab. Banjar**	**98.89%**	**16.600.000**	**APBD**		**99.17%**	**17.264.000**
2.23.03.2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Koleksi Etnis Nusantara**	**Kab. Banjar**	**36 Eksemplar**	**16.600.000**	**APBD**		**36 Eksemplar**	**17.264.000**
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	Kab. Banjar	36 Eksemplar	15.000.000	APBD		72 Eksemplar	15.600.000
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Banjar	36 Eksemplar	1.600.000	APBD		72 Eksemplar	1.664.000
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat ketersediaan arsip**	**Kab. Banjar**	**76**	**275.619.300**	**APBD**		**76.5**	**281.903.421**

		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan		**84.75**				**84.95**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis**	**Kab. Banjar**	**100%**	**143.129.600**	**APBD**		**100%**	**146.392.955**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen/Arsip Yang Ditata Dalam Bentuk Informatika	Kab. Banjar	350 Berkas	98.184.600	APBD		350 Berkas	100.423.209
		Jumlah Pengadaan Boks Untuk Arsip		21 Buah				22 Buah	
		Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Keamanan Penyimpanan Data		47 Buah				65 Buah	
		Jumlah Unit Yang Ditata Arsipnya		12 unit				12 Unit	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Kab. Banjar	12 Kali	44.945.000	APBD		12 Kali	45.969.746
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip		12 Bulan				12 Bulan	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya pengelolaan arsip statis**	**Kab. Banjar**	**100%**	**14.565.300**	**APBD**		**100%**	**14.897.389**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tercetaknya Pedoman Pengklasifikasian Data ; JRA, Tata Kearsipan dan Form P. Data	Kab. Banjar	100 Dokumen	14.565.300	APBD		250 Dokumen	14.897.389

		Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data	Kab. Banjar	6 kali		APBD		6 kali	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**	**Kab. Banjar**	**100%**	**117.924.400**	**APBD**		**100%**	**120.613.077**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Kearsipan	Kab. Banjar	8 Buah	17.436.000	APBD		8 Buah	17.833.541
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Audit Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI)	Kab. Banjar	2 SKPD	100.488.400	APBD		2 SKPD	102.779.536
		Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan		75 Orang				75 Orang	
		Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
2.24.02	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip**	**Kab. Banjar**	**84.7**	**31.056.000**	**APBD**		**85.2**	**31.615.008**
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Jumlah Unit Kearsipan yang melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsip**	**Kab. Banjar**	**2 Unit**	**20.500.000**	**APBD**		**2 Unit**	**20.869.000**
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah unit yang dilakukan penilaian pemusnahan arsip	Kab. Banjar	2 Unit	6.950.000	APBD		2 Unit	7.075.100
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Unit melaksanakan pemusnahan arsip	Kab. Banjar	2 Unit	13.550.000	APBD		2 Unit	13.793.900
2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit yang dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana**	**Kab. Banjar**	**1 Unit Kearsipan**	**10.556.000**	**APBD**		**1 Unit Kearsipan**	**10.746.008**
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Unit yang dievakuasi dan diidentifikasi arsipnya akibat bencana	Kab. Banjar	1 unit Kearsipan	4.995.000	APBD		1 unit Kearsipan	5.084.910

2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah unit pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Kab. Banjar	1 unit Kearsipan	5.561.000	APBD		1 unit Kearsipan	5.661.098
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**4.504.722.767**	**APBD**		**100%**	**4.680.406.956**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD**	**Kab. Banjar**	**100%**	**2.999.000**	**APBD**		**100%**	**3.115.961**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	7 Dokumen	900.000	APBD		7 Dokumen	935.100
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	Kab. Banjar	2 Dokumen	1.099.000	APBD		2 Dokumen	1.141.861
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Banjar	3 Dokumen	1.000.000	APBD		3 Dokumen	1.039.000
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**3.408.462.067**	**APBD**		**100%**	**3.541.392.088**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Kab. Banjar	1 Tahun	3.311.372.067	APBD		14 Bulan	3.440.515.578
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksana Tugas ASN yang Terpenuhi	Kab. Banjar	12 Bulan	93.900.000	APBD		12 Bulan	97.562.100
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Banjar	1 Laporan	3.190.000	APBD		1 Laporan	3.314.410
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi**	**Kab. Banjar**	**100%**	**45.300.000**	**APBD**		**100%**	**47.066.700**

2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Kab. Banjar	7 Orang	45.300.000	APBD		7 Orang	47.066.700
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**175.918.400**	**APBD**		**100%**	**182.779.218**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	12 Paket	4.999.500	APBD		12 Paket	5.194.481
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Banjar	12 Paket	17.096.000	APBD		12 Paket	17.762.744
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Banjar	12 Bulan	50.005.000	APBD		12 Bulan	51.955.195
		Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Tamu, dan Rapat Dinas		12 Bulan				12 Bulan	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	12 Bulan	38.817.900	APBD		12 Bulan	40.331.798
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	16 Kali	65.000.000	APBD		35 Kali	67.535.000
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**31.524.900**	**APBD**		**100%**	**32.754.371**
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair	Kab. Banjar	1 Unit	5.000.000	APBD		4 Unit	5.195.000
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	3 Unit	21.529.900	APBD		6 Unit	22.369.566

2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	1 Unit	4.995.000	APBD		2 Unit	5.189.805
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**642.999.400**	**APBD**		**100%**	**668.076.377**
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab. Banjar	12 Bulan	134.339.400	APBD		12 Bulan	139.578.637
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Banjar	13 Bulan	508.660.000	APBD		13 Bulan	528.497.740
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi		13 Bulan				13 Bulan	
2.23..01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**100%**	**197.519.000**	**APBD**		**100%**	**205.222.241**
2.23..01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	Kab. Banjar	8 Unit	70.859.000	APBD		8 Unit	73.622.501
2.23..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	12 Bulan	80.000.000	APBD		12 Bulan	83.120.000
2.23..01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Banjar	12 Bulan	17.000.000	APBD		12 Bulan	17.663.000
2.23..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau Bangunan yang dipelihara atau direhabilitasi	Kab. Banjar	3 Bangunan	29.660.000	APBD		2 Bangunan	30.816.740
TOTAL ANGGARAN					**5.208.570.467**				**5.406.984.681**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan tahunan yang mana merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar disinkronkan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang memuat Output, Outcome dan kelompok sasaran beserta prakiraan pendanaan.

Rencana Kerja (RENJA) berisi target dan indikator kinerja dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada semua pihak agar mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada rencana kerja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang professional dan sarana prasarana yang memadai. Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar tahun 2022 disusun untuk dijadikan acuan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

24. Dinas Perikanan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahap, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan dibidang perikanan merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam bentuk penentuan target kinerj a, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Renja Dinas Perikanan dan Kelautan menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan peternakan dan perikanan dengan dokumen RPJMD pemerintah Kabupaten Banjar 2016-2021. Namun sehubungan dengan belum tersedianya dokumen RPJMD tersebut, program kegiatan serta kinerja yang hendak dicapai didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten

Banjar a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015 – 2019;

h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

l. Peraturan Bupati Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2022 agar pelaksanaan pembangunan urusan perikanan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perikanan Tahun 2022 :

1. Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah tahap awal (Renstra 2022-2026).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan perikanan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2022, terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menerangkan tentang kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menerangkan tentang isu-isu dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA & PENDANAAN DISKAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KAB.BANJAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kab.Banjar

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2022-2026, Dinas Perikanan Kabupaten memiliki visi sejalan dengan visi Bupati Banjar yaitu

"Maju Mandiri Agamis".

Sedangkan misi yang akan dicapai sesuai dengan misi ketiga Bupati Banjar yaitu "Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Komoditas Unggulan Daerah Lainnya Dengan Pendekatan Agribisnis dan Agroindustri Berwawasan Lingkungan Secara Berkelanjutan"

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas

Perikanan Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan pilihan perikanan dan kelautan, dengan rincian program sebagai berikut :

1). PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

3). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

4). PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

5) PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	3,71	5.31
Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton)	53.802	53.115,9
	Jumlah Produksi Ikan Tangkap (Ton)	8.210	8,766
Meningkatkan Kualitas Hasil Industri Pengolahan Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	592	1.074,9
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan	Persentasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Perikanan	66	66,4

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 4.056.219.006
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 3.829.818.364

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD Dinas

Perikanan Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel II

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Banjar
Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kab.Banjar s.d Tahun 2020

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10 = 6 + 12		11 = 13/5*100		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													3,830,393,0		3,606,482,2					
1	**Meningkatkan Produksi Perikanan dan Meningkatnya Kualitas Hasil Industri Pengolahan Perikanan**	**03**	**1**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi**	**100 %**	**6,216,727,776**			**12**	**927,725,400**	12.00	**849,227,293**				**26.38**	**Dinas Perikanan Kabupaten Banjar**
					1	Penyediaan Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan benda pos untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya penyediaan jasa surat-menyurat berupa benda pos (materai, perangko)	60	6,700,000	24	900,000	1	1,998,000	1.00	1,920,000	25.00	2,820,000	41.67	42.09	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik/Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan	60	1,068,800,000	24	80,651,816	12	122,600,000	12.00	88,056,122	36.00	168,707,938	60.00	15.78	
					08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya barang kebersihan kantor untuk menunjang	60		24	-	12	17,500,000	12.00	17,464,999	36.00	17,464,999	60.00	0.00	
					10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik/tersedianya alat tulis kantor	60	79,457,400	24	15,851,200	12	10,000,000	12.00	9,976,700	36.00	25,827,900	60.00	32.51	
					11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik/tersedianya barang cetakan dan	60	53,574,700	24	9,535,000	12	10,000,000	12.00	9,977,600	36.00	19,512,600	60.00	36.42	

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya koordinasi dalam pelaksaan tugas aparatur/Terselenggaranya rapat koordinasi antar staf dan unsur teknis lainnya dan	60	1,033,679,800	24	151,055,000	11	13,368,000	12.00	12,600,000	36.00	163,655,000	60.00	15.83	
					18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik dengan intansi terkait dan pihak lain/Terlaksanannya rapat- rapat koordinasi	60	2,260,817,268	24	545,463,657	12	211,259,400	12.00	211,226,686	36.00	756,690,343	60.00	33.47	
					19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran/Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran untuk	60	1,713,698,608	24	370,352,343	28	541,000,000	28.00	498,005,186	52.00	868,357,529	86.67	50.67	
2		**03**	**01**	**01**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN**	**Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana**		**1,309,863,764**			**12**	**808,666,000**	12.00	**781,380,059**				**30.31**	
					07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor, mebelair kantor	60	-	24	-	1	181,588,000	1.00	171,944,800.00	25.00	171,944,800	41.67	0.00	
					09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik melalui dukungan penyediaan	60	-	24	53,546,000	1	147,819,000	1.00	146,720,500.00	25.00	200,266,500	41.67	0.00	
					23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur (kepala dinas)/ Terlaksananya	60	197,400,000	24	35,668,132	1	42,790,000	1.00	32,643,278	25.00	68,311,410	41.67	34.61	
					24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur/ Tersedianya	60	1,003,003,382	24	240,354,876	38	321,000,000	29.00	316,029,981	53.00	556,384,857	88.33	55.47	

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							empat),dan Tersedianyapemeliharaan sarana dan													
					26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik melalui dukungan penyediaan sarana prasarana aparatur/	60	35,000,000	24	5,000,000	12	10,000,000	12.00	10,000,000	36.00	15,000,000	60.00	42.86	
					28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui	60	74,460,382	24	26,464,000	12	10,000,000	12.00	9,960,000	36.00	36,424,000	60.00	48.92	
					42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran dan			24		3	95,469,000	3.00	94,081,500	27.00	94,081,500	0.00	0.00	
3		**03**	**01**	**01**	**05**	**PROGRAM PENIGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA**	**Terwujudnya peningkatan SDM aparat dan petugas teknis dinas (kemampuan,**		**176,893,000**			**12**	**82,000,000**	12.00	**81,964,475**				**70.43**	
					03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan menjabarkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan oleh aparatur dinas dan petugas teknis / Terlaksanya kegiatan bimbingan teknis implementasi	60	176,893,000	24	42,616,000	25	82,000,000	25.00	81,964,475	49.00	124,580,475	81.67	70.43	
4		**03**	**01**	**01**	**06**	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN**	**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kerja Pembangunan Perikanan**		**67,307,650**			**12**	**56,282,800**	8.00	**56,028,350**				**126.87**	
					01	Penyusunan Laporan Capaian	Terlaksananya penyusunan	60	67,307,650	24	29,366,80	8	56,282,80	8.00	56,028,350	32.00	85,395,15	53.33	126.87	

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja SKPD	pelaporan / Terdokumentasinya kinerja dan pelaporan SKPD													
5		**03**	**01**	**01**	**20**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**	**Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya**	**415,983**	**6,185,408,691**	**63,985**	**1,178,806,300**	**53,802**	**1,539,156,600**	**53,115**	**1,427,975,404**				**18.06**
					01	Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan BBII untuk menghasilkan benih / Tercapainya produksi perikanan budidaya di kabupaten banjar	3,504,564	1,164,994,600	600,000	163,145,300	700,000	220,308,000	808,600	212,999,250	1,408,600.00	376,144,550	40.19	32.29	
					08	Pengembangan unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah jenis layanan posnlayanan kesehatan ikan dan lingkungan, terselenggaraknya pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan pengendalian hama penyakit ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	1,070	760,100,000	60	100,067,000	100	66,928,400	160.00	66,259,600	220.00	166,326,600	20.56	21.88	
					11	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan	tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam pemijahan dan bak induk, terlaksananya kolam/bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOkal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari	1	-	1	915,594,000	3	85,100,847	1.00	82,649,500	2.00	998,243,500	200.00	0.00	
					14	Forum Komunikasi antar pelaku pengembangan usaha	Tersedianya media komunikasi dan informasi dalam	200	160,000,000	0	-	0	1,570,000	0.00	1,570,000	0.00	1,570,000	0.00	0.98	

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Laku		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (202		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						perikanan budidaya	pengembangan usaha perikanan													
					15	Penyusunan kebijakan/Standar/Prosedur/Norma di Sub Sektor Perikanan	Tersedianya Norma/Standar/Prosedur/kebijakan dalam penyelenggaraan	2	1,384,024,450	0	-	0	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
					16	Bimbingan teknis dan pelatihan bagi usaha perikanan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha pembudidaya ikan terhadap	200	140,000,000	0	-	100	23,638,000	100.00	23,436,000	100.00	23,436,000	50.00	16.74	
					17	Pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Meningkatkan pembudidaya ikan yang menerapkan pedoman cara	10	70,000,000	0	-	2	370,000	2.00	370,000	2.00	370,000	20.00	0.53	
					18	Pembinaan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha pembudidaya ikan terhadap pedoman dan NSPK	10	90,000,000	0	-	1	1,850,000	1.00	1,850,000	1.00	1,850,000	10.00	2.06	
					19	Penyediaan dan pemuktahiran data statistik perikanan budidaya	Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan budidaya perikanan di	2	206,500,000	0	-	1	97,242,600	1.00	95,913,000	1.00	95,913,000	50.00	46.45	
					20	Pengawasan pengembangan perikanan budidaya	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha budidaya perikanan terhadap	240	280,000,000	0	-	60	30,107,600	60.00	29,273,054	60.00	29,273,054	25.00	10.45	
					21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Tersedianya laporan pertanggung jawaban	2	20,000,000	0	-	0	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
					22	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (DAK Penugasan)	Tersedianya saran prasarana BBII Lokal Karang Intan, Meningkatnya pemasukan PAD melalui produksi	1	1,139,041,153	0	-	1	1,012,041,153	1.00	913,655,000	1.00	913,655,000	100.00	80.21	

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6		**03**	**01**	**01**	**21**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**	**Tercapainya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**74,382**	**3,072,123,150**	**10,050**	**149,500,000**	**8,210**	**136,028,000**	**8,766**	**133,440,000**	18,816.00		25.30	**11.61**	
					16	Fasilitasi forum Komunikasi Antar pelaku pengembangan	Terlaksananya fasilitasi forum komunikasi antar pelaku	500	160,000,000	0	-	100	21,618,000	100.00	21,568,000	100.00	21,568,000	20.00	13.48	
					17	Penyusunan kebijakan/Standar/Prosedur/Norma di Sub Sektor Perikanan	Tersedianya Norma/Standar/Prosedur/kebijakan dalam penyelenggaraan	2	417,695,000	0	-	1	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
					18	Sosialisasi kebijakan/Standar/Prosedur/Norma di bagi kelompok usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang kebijakan/standar/pro	500	140,000,000	0	-	50	-	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	
					19	Pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI)	Terpenuhinya standar TPI rakyat/tempat pendaratan ikan	8	50,000,000	0	-	2	16,518,000	2.00	16,118,000	2.00	16,118,000	25.00	32.24	
					20	Penyusunan/pemuktahiran sistem informasi data sektor perikanan	Tersedianya data potensi desa sektor perikanan tangkap	2	400,000,000	0	-	1	97,892,000	1.00	95,754,000	1.00	95,754,000	50.00	23.94	
					21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Tersedianya laporan pertanggung jawaban	2	20,000,000	0	-	0	-	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	
7		**03**	**01**	**01**	**23**	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN**	**Produksi olahan hasil perikanan (ton)**	**5,075**	**3,440,051,400**	**730**	**1,356,000,000**	**592,000**	**241,415,500**	**1,074,900**	**239,758,000**	1,075,630.00		21,194.68	**7.13**	
					08	Fasilitasi forum bisnis usaha perikanan	Peningkatan kegiatan bisnis usaha perikanan	600	160,000,000	0	-	160	4,430,000	160.00	4,400,000	160.00	4,400,000	26.67	2.75	
					09	Bimbingan teknis/pelatihan teknis pengembangan teknologi usaha	Tersedianya norma/standar/prosedur/kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha	120	120,000,000	0	-	140	31,888,000	90.00	31,747,000	90.00	31,747,000	75.00	26.46	

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					10	Fasilitasi pengembangan akses pasar hasil perikanan	Berkembangnya pemasaran produk olahan hasil perikanan	14	150,000,000	0	-	14	3,050,000	14.00	3,050,000	14.00	3,050,000	100.00	2.03	
					11	Pengembangan unit usaha pengelolaan hasil perikanan	Bertambahnya unit usaha pengolahan hasil perikanan	20	252,000,000	0	-	3	1,770,000	3.00	1,770,000	3.00	1,770,000	15.00	0.70	
					12	Kerjasama pemanfaatan unit pengelolaan ikan (UPI)	Tersedianya media komunikasi dan informasi dalam pengembangan usaha	2	200,000,000	0	-	1	370,000	1.00	370,000	1.00	370,000	50.00	0.19	
					13	Promosi produk perikanan	Meningkatnya Angka konsumsi ikan perkapita	10	350,000,000	0	-	4	98,589,500	4.00	98,284,000	4.00	98,284,000	40.00	28.08	
					14	Pengawasan dan pengendalian usaha dan investasi	Tersedianya media komunikasi dan informasi dalam pengembangan usaha	200	200,000,000	0	-	89	41,128,000	89.00	40,597,000	89.00	40,597,000	44.50	20.30	
					15	Pemuktahiran sistem informasi data sektor perikanan	Tersedianya laporan data statistik pengolahan perikanan yang	2	400,000,000	0	-	1	60,190,000	1.00	59,540,000	1.00	59,540,000	50.00	14.89	
					16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Tersedianya laporan pertanggung jawaban	2	20,000,000	0	-	1	-	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
8		**03**	**01**	**01**	**30**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM**		**86%**	**1,180,708,000**	**81%**	**56,390,000**	**66%**	**39,118,700**	**66**	**36,708,700**	66.97	93,098,700	7,787.21	**1.92**	
					02	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan	Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif membantu pemerintah	60	176,067,500	24	-	2	1,950,000	2.00	1,560,000	26.00	1,560,000	43.33	0.89	

No	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Banjar pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					03	Penyuluhan hukum dalam penyalahgunaan sumberdaya ikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum perikanan	240	152,250,500	24	-	-	-	0.00	0	24.00	0	10.00	0.00	
					04	Pembinaan dan pemantauan tindak pidana perikanan	Terlaksananya kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ilegal	16	426,000,000	24	-	4	35,668,700	4.00	33,648,700	28.00	33,648,700	175.00	7.90	
					05	Pelestarian sumberdaya ikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian	10	180,000,000	24	-	2	1,500,000	2.00	1,500,000	26.00	1,500,000	260.00	0.83	
					06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan pertanggung jawaban	2	20,000,000	24	-	-	-	0.00	0	24.00	0	1,200.00	0.00	

Pada DPA SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2020 mendapat alokasi dana belanja langsung sebesar Rp **3.830.393.000** dengan realisasi anggaran sebsar Rp **3.606.482.281** atau capaian realisasi fisik **99.39**%), capaian realisasi keuangan (**96.68%)** sampai dengan bulan September.

Dari hasil realisasi menunjukkan bahwa Dinas Perikanan telah menyerap dana dengan kategori positif artinya perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan tingkat pencapaian target, dimana proses pelaksanaan kegiatan secara reguler maupun perbandingan output dan outcome telah berhasil mencapai program dengan baik, juga peran serta masyarakat yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaannya secara tidak langsung memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan kulaitas hasil produksi perikanan.

Sebagai suatu proses pengukuran kinerja terhadap capaian kegiatan maupun jumlah anggaran yang ditargetkan masih belum cukup untuk layaknya terlaksananya program dan kegiatan, karena beban kegiatan yang harus dilaksanakan masih cukup besar untuk pengembangan perikanan. Disamping itu dari hasil pengukuran kinerja yang proporsional maka untuk penyusunan perencanaan anggaran tahun yang akan datang Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan hal yang dimaksud yaitu peningkatan ketersediaan dana untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Banjar. Hal ini yang menjadi harapan seluruh stakeholder, selain itu juga pemerintah mengharapkan agar kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar dapat memberikan benefit dari setiap kegiatan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hasil Industri perikanan di Kabupaten Banjar.

Namun demikian sesuai dengan DPA SKPD Tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Banjar telah mencapai target kinerja pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat serta kesungguhan dari Pemerintah Kabupaten Banjar telah nyata dirasakan oleh masyarakat. Disamping itu keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Banjar didalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan menunjukkan eksistensi yang positif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Banjar

Tabel III. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Banjar

No	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)			(10)			(11)	(12)	(13)
	Indikator Kinerja Utama											
1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	55.000	63.985	53,802	70.791	54.014	60.870	58.015	53.115,9	90,67	90,67	
2	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	11.492	10.050	8,210	10.474	8.290	9.470	8.664	8,766	86,21	86,21	
3	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	720	730	592	745	750	792.6	824,32	1.074,9	113,00	113,00	
4	Persentasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Perikanan	0	81	66,4	86	86	0	70	66,4	81	81	
	Indikator Kinerja SKPD											
1.	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3.	Capaian Peningkatan SDM aparat dan petugas teknis dinas	25	25	25	25	38	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.	Tersedianya laporan keuangan dan capaian kerja pembangunan perikanan dan kelautan kabupaten banjar	8	8	8	8	7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kab. Banjar

Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan adalah melaksanakan pembangunan masyarakat disektor perikanan, melaksanakan pembinaan, pengawasan sumberdaya perikanan, melaksanakan upaya perlindungan sumberdaya hayati perikanan, dan melaksanakan bimbingan usaha dan investasi di sektor perikanan, serta memfasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banjar dalam

pelaksanaan pelayanan masyarakat di sektor perikanan adalah

1. Jumlah produksi yang masih berpotensi ditingkatkan, namun karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia (aparatur dinas), baik dalam konteks jumlah maupun kualitas sehingga pembinaan dan pemanfaatan SDA masih belum optimal pelaksanaannya. Disisi lain kemampuan intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan dinas menghadapi kendala pada penyediaan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan termasuk juga sikap sebagian masyarakat Kabupaten Banjar yang belum mandiri (selalu meminta bantuan sosial berupa sarana dan prasarana perikanan).
2. Pada aspek perikanan tangkap, maka kendala potensi semakin merendahnya produksi adalah

   karena beberapa faktor antara lain: a) semakin berkurangnya wilayah atau area penangkapan di perairan umum, khususnya rawa-rawa karena pendangkalan perairan dan perubahan fungsi rawa; b) belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap serta adanya peraturan baru tentang pelarangan penggunaan alat tangkap lampara dasar yang menyebabkan para nelayan harus mencari alternatif alat tangkap lain yang tepat dan sama dengan hasil produksi menggunakan lampara dasar, c) perubahan cuaca atau musim (cuaca buruk) yang mengakibatkan nelayan tidak melakukan penangkapan ikan.
3. Masih berlangsungnya aktivitas illegal fishing oleh beberapa oknum masyarakat, hal ini menunjukkan masih diperlukannya kegiatan pengawasan baik oleh aparatur pelaksana dinas maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat (POKMASWAS).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Banjar yang kemudian termuat dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat

pada Tabel IV.

Tabel IV. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Perikanan Kabupaten Banjar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 persen**	**6,524,707,867**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 persen**	**6,524,707,867**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**7 dokumen**	**40,812,800**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**7 dokumen**	**40,812,800**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	40,812,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	40,812,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Prima**	**12 bulan**	**5,631,484,669**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Prima**	**12 bulan**	**5,631,484,669**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terbayar nya gaji ASN dan tunjangan penambahan pengahasilan pegawai	12 bulan	4,845,815,297	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terbayar nya gaji ASN dan tunjangan penambahan pengahasilan pegawai	12 bulan	4,845,815,297	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN	32 orang	776,663,372	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN	32 orang	776,663,372	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,788,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,788,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan dan Smesteran	16 laporan	5,218,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan dan Smesteran	16 laporan	5,218,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Prima**	**12 bulan**	**50,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Prima**	**12 bulan**	**50,000,000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Dinas	10 orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Dinas	10 orang	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**12 bulan**	**286,596,150**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**12 bulan**	**286,596,150**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	5,764,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	5,764,200	
		Kab.Banjar	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan			Kab.Banjar	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Alat Tulis kantor	12 bulan	14,094,950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Alat Tulis kantor	12 bulan	14,094,950	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	14,737,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	14,737,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan	252,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan	252,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**1 paket**	**151,639,248**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**1 paket**	**151,639,248**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Benda Pos Untuk Kelancaran Pelayanan	12 bulan	1,990,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Benda Pos Untuk Kelancaran Pelayanan	12 bulan	1,990,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	139,149,248	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	139,149,248	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	12 bulan	10,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	12 bulan	10,500,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Dinas**	**12 bulan**	**364,175,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Dinas**	**12 bulan**	**364,175,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	12 bulan	40,990,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas	Kab.Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	12 bulan	40,990,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	305,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas	Kab.Banjar	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	305,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	8,425,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	8,425,000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	9,760,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	9,760,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**8.290 ton**	**52,906,100**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**8.290 ton**	**52,906,100**	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Tingkat Kemandirian Nelayan Kecil**	**20 persen**	**42,589,900**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Tingkat Kemandirian Nelayan Kecil**	**20 persen**	**42,589,900**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Kelembagaan	20 persen	42,589,900	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Kelembagaan	20 persen	42,589,900	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Sesuai Dengan Ketentuan**	**20 persen**	**10,316,200**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah**		**Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Sesuai Dengan Ketentuan**	**20 persen**	**10,316,200**	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Memiliki	20 persen	10,316,200	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Memiliki	20 persen	10,316,200	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**54.014 ton**	**407,795,200**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**54.014 ton**	**407,795,200**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Tingkat Kemandirian Pembudidaya Ikan Kecil**	**20 persen**	**104,058,000**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Tingkat Kemandirian Pembudidaya Ikan Kecil**	**20 persen**	**104,058,000**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Budidaya Ikan Kecil yang Memiliki Kelembagaan	20 persen	60,201,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Budidaya Ikan Kecil yang Memiliki Kelembagaan	20 persen	60,201,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Banjar	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Memiliki TDPIK	20 persen	43,857,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Memiliki TDPIK	20 persen	43,857,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Indeks Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**19,48 perse**	**303,737,200**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Indeks Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**19,48 persen**	**303,737,200**	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Ketersediaan Benih ikan unggul yang memenuhi ketentuan teknis	750.000 ekor	196,568,500	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Ketersediaan Benih ikan unggul yang memenuhi ketentuan teknis	750.000 ekor	196,568,500	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pembudidaya Ikan yang Terakses Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya	20 persen	64,773,700	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pembudidaya Ikan yang Terakses Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya	20 persen	64,773,700	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pembudidaya Ikan yang Dipantau dan Dibina	20 persen	42,395,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pembudidaya Ikan yang Dipantau dan Dibina	20 persen	42,395,000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		**Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**	**86 persen**	**63,623,000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**	**86 persen**	**63,623,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		**Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**	**20 persen**	**63,623,000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**		**Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**	**20 persen**	**63,623,000**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	PersentaseTerbentuk dan Terbinanya POKMASWAS Sumber Daya Ikan	20 persen	63,623,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	PersentaseTerbentuk dan Terbinanya POKMASWAS Sumber Daya Ikan	20 persen	63,623,000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran**	**750 ton**	**199,798,600**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran**	**750 ton**	**199,798,600**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan**	**57,83 persen**	**48,192,200**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan**	**57,83 persen**	**48,192,200**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terakses Pengetahuan Tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	57,83 persen	48,192,200	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terakses Pengetahuan Tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	57,83 persen	48,192,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terfasilitasi bahan baku yang bermutu dan aman**	**32,42 persen**	**151,606,400**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terfasilitasi bahan baku yang bermutu dan aman**	**32,42 persen**	**151,606,400**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase upaya peningkatan konsumsi ikan	13,69 persen	100,006,400	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase upaya peningkatan konsumsi ikan	13,69 persen	100,006,400	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terakses Pengetahuan Tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	18,73 persen	51,600,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Kab.Banjar	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terakses Pengetahuan Tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	18,73 persen	51,600,000	

Tabel V. Review Terhadap Pembangunan
Non Prioritas Daerah Pada
Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Banjar Tahun 2022
Dinas Perikanan Kabupaten
Banjar

No	R			H					
	Sasaran	Indikator	Program	Program	Kegiatan	Proyek	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
				NIHIL					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Perikanan didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD (Musrenbang) ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perikanan selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel VI. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2021 Musrenbang Kecamatan
Kabupaten Banjar

Dinas Perikanan Kab. Banjar

	Usulan Masyarakat	Lokasi	Volume	Status	Catatan
1	Pelatihan Pengelolaan Ikan	Desa Babirk	40 orang	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
2	Pelatihan Pengelolaan Ikan	Desa Handil Purai	40 orang	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
3	Bantuan Tambak dan Bibit Ikan Nila dan Pakan	Terapu	10.000,-	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
4	Budidaya Ikan sungai	Desa Awang Bangkal Barat	25 Orang	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
5	Bantuan Bioplok Ikan lele	DesaMandiangin Barat	12.500 ekor	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
6	Jala Apung dan Bibit	Desa Mandikpau Barat	1 paket	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
7	Pelatihan petani ikan	Desa Sungai Landas	75 org	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
8	Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Pelatihan Kerajinan Berternak Ikan Hias	Melayu Tengah	1 Paket	Ditolak	tidak ada anggaran untuk kegiatan dimaksud
9	Pelatihan Pengolahan Pakan Ikan	Belangian, Benua Riam, Atain, Bunglai	50 orang	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
10	Pelatihan Pembenihan Ikan Nila	Belangian	1 Paket	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
11	Bimtek manajemen usaha	Kecamatan Martapura Barat	1 Paket	Diterima	kegiatan menyesuaikan dan mengikuti program di Dinas Perikanan yang ada di Bidang Pengembangan Usaha diarahkan ke kecamatan tersebut.
12	Bimtek teknik budidaya ikan biofloc	Kecamatan Martapura Barat	1 Paket	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
13	Pelatihan ternak itik petelur	Keliling Benteng Tengah	200 ekor	Ditolak	bukan topuksi dinas perikanan

No	Usulan Masyarakat	Lokasi	Volume	Status	Catata n
14	Pelatihan Budi Daya Air Tawar BIO BOX	Surian	1 Paket	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan
15	Pelatihan Perikanan dan Bantuan Bibit	Bawahan Selan	1 Paket	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per
16	Pelatihan Budidaya ikan tawar (Papuyu)	Desa Banyu Hirang	Gapoktan	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per
17	Pelatihan Budi Daya Air Tawar	Desa Ati'im Rt 01	30 orang	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per
18	Pengadaan Bibit Ikan Papuyu	Desa Kertak Empat	1000 ekor	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per usulan masuk
19	Pengadaan Bibit Ikan Air Tawa	Desa Kertak Empat RT.01, 02 dan 03	5000 ekor	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per
20	Pembuatan Kolam Ikan	SMPN 1 Pengaron	10 x 4 x1 m	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per
21	Pemberian Bibit Ikan Lele, Papuyu, Patin dan Ikan air tawar lainnya	Desa Cindai alus	2 paket	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per
22	Budi Daya Bibit Ikan 5.000 ekor dengan sistem Bioplok	Gudang Tengah	Ukuran 1,5 m x 4 m	Diterima	Alokasi pelatihan dan bantuan di sesuaikan pagu dinas untuk perwilayah dan perkomuditas dan per

Usulan tersebut diatas melalui kegiatan musrenbang kecamatan berdasarkan hasil asistensi dan verifikasi bersama Dinas Perikanan Kabupaten Banjar selaku pelaksana

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, DINAS PERIKANAN KAB. BANJAR

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Banjar. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini. Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021- 2025 maka ditetapkan tujuan pembangunan sektor perikanan, yakni sebagai berikut.

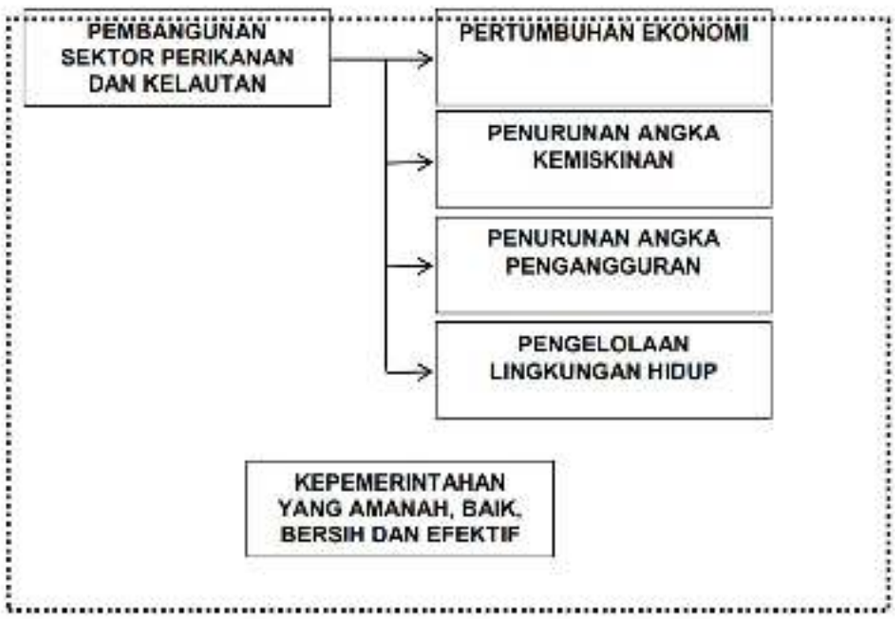

Gam
bar
3.1
Tujuan Pembangunan
Sektor Perikanan

Berdasarkan diagram diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran, serta indikator sasaran dalam pembangunan sektor perikanan, yakni sebagaimana Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA
MENENGAH PELAYANAN DINAS
PERIKANAN KABUPATEN BANJAR

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan berbasis kerakyatan, dan optimalisasi sumber daya ikan, serta lingkungan hidup.		Pertumbuhan kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%	5,70	5,99	6,17	6,35	6,53
		Peningkatan produksi sektor perikanan	Jumlah produksi hasil perikanan (ton)	76.321	78.608	80.894	83.180	85.467

Sumber data: Renstra 2022-2026

Sesuai dengan RPJMN Skala Prioritas Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun

2022-2026 ada 2 yaitu

1) Daya saing semakin kuat dengan terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, perikanan, kelautan dan sumberdaya lainnya;
2) Makin selarasnya pendidikan, iptek dan industri dan tertatanya kelembagaan untuk mendorong efisiensi, produktivitas, penguasaan iptek kelautan dan perikanan.

dengan prioritas nasional diatas maka arah kebijakan nasional yang diperlukan pada tahun 2016 - 2021

adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Produksi Ikan
2) Peningkatan Konsumsi Ikan
3) Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah
4) SDM dan IPTEK yang mendukung
5) Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan/Masyarakat Pesisir

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026 telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu "Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, dan Agamis". Untuk mewujudkan Visi tersebut maka misi yang diemban adalah:

a. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
b. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
c. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perikanan Kab. Banjar

Tujuan SKPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi Kepala Daerah sesuai dengaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Tujuan SKPD akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021 2026, Dinas Perikanan berkontribusi untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Visi bidang Perikanan:

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banjar yang Mandiri dan Maju dengan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Misi

1. Peningkatan ekonomi sektor perikanan yang berkualitas berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan
2. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif

Dinas Perikanan Kabupaten Banjar dibentuk untuk melaksanakan fungsi teknis bidang perikanan sehingga program kegiatan di Dinas Perikanan mendukung dalam Peningkatan Ekonomi Daerah yaitu

1. Peningkatan Ekonomi Daerah

Memperhatikan evaluasi kinerja Dinas Perikanan, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas

Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	MeningMeningkatnya Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	5,99

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022 Rencana Kerja Dinas Perikanan akan melaksanakan 5 Program

13 kegiatan dan 28 sub kegiatan antara lain:

3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perikanan)
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perikanan)
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perikanan)
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perikanan)
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perikanan)
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)
3	25	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Dinas Perikanan)
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah**
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan
3	**25**	**03**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air**
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dinas Perikanan)
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas

3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam**
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Banjar untuk sumber dana APBD Kabupaten dapat dilihat pada tabel VII.

Tabel VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Nama SKPD : Dinas Perikanan Kabupaten Banjar

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**		**100 persen**	**6,524,707,867**			**100 persen**	**6,524,707,867**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**		**7 dokumen**	**40,812,800**			**7 dokumen**	**40,812,800**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perikanan)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjar	7 dokumen	40,812,800	APBD		7 dokumen	40,812,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Prima**		**12 bulan**	**5,631,484,669**			**12 bulan**	**5,631,484,669**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)	Terbayar nya gaji ASN dan tunjangan penambahan pengahasilan pegawai	Kab.Banjar	12 bulan	4,845,815,297	APBD		12 bulan	4,845,815,297	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perikanan)	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Banjar	32 orang	776,663,372	APBD		32 orang	776,663,372	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perikanan)	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Banjar	1 laporan	3,788,000	APBD		1 laporan	3,788,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan dan Smesteran	Kab.Banjar	16 laporan	5,218,000	APBD		16 laporan	5,218,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Prima**		**12 bulan**	**50,000,000**			**12 bulan**	**50,000,000**	

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perikanan)	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Dinas	Kab.Banjar	10 orang	50,000,000	APBD		10 orang	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**		**12 bulan**	**286,596,150**			**12 bulan**	**286,596,150**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perikanan)	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab.Banjar	12 bulan	5,764,200	APBD		12 bulan	5,764,200	
		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kab.Banjar	12 bulan				12 bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perikanan)	Tersedianya Alat Tulis kantor	Kab.Banjar	12 bulan	14,094,950	APBD		12 bulan	14,094,950	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perikanan)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Banjar	12 bulan	14,737,000	APBD		12 bulan	14,737,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perikanan)	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kab.Banjar	12 bulan	252,000,000	APBD		12 bulan	252,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**		**1 paket**	**151,639,248**			**1 paket**	**151,639,248**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perikanan)	Tersedianya Benda Pos Untuk Kelancaran Pelayanan Administrasi	Kab.Banjar	12 bulan	1,990,000	APBD		12 bulan	1,990,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perikanan)	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Kab.Banjar	12 bulan	139,149,248	APBD		12 bulan	139,149,248	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	Kab.Banjar	12 bulan	10,500,000	APBD		12 bulan	10,500,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Dinas**		**12 bulan**	**364,175,000**			**12 bulan**	**364,175,000**	

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perikanan)	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	Kab.Banjar	12 bulan	40,990,000	APBD		12 bulan	40,990,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perikanan)	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Banjar	12 bulan	305,000,000	APBD		12 bulan	305,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kab.Banjar	12 bulan	8,425,000	APBD		12 bulan	8,425,000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Dinas Perikanan)	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Banjar	12 bulan	9,760,000	APBD		12 bulan	9,760,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**		**8.290 ton**	**52,906,100**			**8.290 ton**	**52,906,100**	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Kemandirian Nelayan Kecil**		**20 persen**	**42,589,900**			**20 persen**	**42,589,900**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Kelembagaan	Kab.Banjar	20 persen	42,589,900	APBD		20 persen	42,589,900	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Sesuai Dengan Ketentuan**		**20 persen**	**10,316,200**			**20 persen**	**10,316,200**	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dinas Perikanan)	Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Memiliki TDKP	Kab.Banjar	20 persen	10,316,200	APBD		20 persen	10,316,200	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**		**54.014 ton**	**407,795,200**			**54.014 ton**	**407,795,200**	

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Tingkat Kemandirian Pembudidaya Ikan Kecil**		**20 persen**	**104,058,000**			**20 persen**	**104,058,000**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)	Persentase Budidaya Ikan Kecil yang Memiliki Kelembagaan	Kab.Banjar	20 persen	60,201,000	APBD		20 persen	60,201,000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Memiliki TDPIK	Kab.Banjar	20 persen	43,857,000	APBD		20 persen	43,857,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Indeks Pengelolaan Pembudidaya Ikan**		**19,48 persen**	**303,737,200**			**19,48 persen**	**303,737,200**	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Ketersediaan Benih ikan unggul yang memenuhi ketentuan teknis	Kab.Banjar	750.000 ekor	196,568,500	APBD		750.000 ekor	196,568,500	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Persentase Pembudidaya Ikan yang Terakses Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya	Kab.Banjar	20 persen	64,773,700	APBD		20 persen	64,773,700	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas Perikanan)	Persentase Pembudidaya Ikan yang Dipantau dan Dibina	Kab.Banjar	20 persen	42,395,000	APBD		20 persen	42,395,000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**		**86 persen**	**63,623,000**			**86 persen**	**63,623,000**	

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**		**20 persen**	**63,623,000**			**20 persen**	**63,623,000**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	PersentaseTerbentuk dan Terbinanya POKMASWAS Sumber Daya Ikan	Kab.Banjar	20 persen	63,623,000	APBD		20 persen	63,623,000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**		**750 ton**	**199,798,600**			**750 ton**	**199,798,600**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan**		**57,83 persen**	**48,192,200**			**57,83 persen**	**48,192,200**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dinas Perikanan)	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terakses Pengetahuan Tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Kab.Banjar	57,83 persen	48,192,200	APBD		57,83 persen	48,192,200	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terfasilitasi bahan baku yang bermutu dan aman**		**32,42 persen**	**151,606,400**			**32,42 persen**	**151,606,400**	

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Persentase upaya peningkatan konsumsi ikan	Kab.Banjar	13,69 persen	100,006,400	APBD		13,69 persen	100,006,400	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terakses Pengetahuan Tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Kab.Banjar	18,73 persen	51,600,000	APBD		18,73 persen	51,600,000	

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kabupaten Banjar, provinsi maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Perikanan Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Rencana Kerja tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

25. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022 sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.

Dokumen RENJA menjadi acuan dalam menjalankan program/kegiatan dan menjadi dasar evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan Terima kasih.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2022.

Tahapan penyusunan rencana kerja SKPD dimulai dari persiapan Renja SKPD, penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didasari dari penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis SKPD, yang kemudian akan dituangkan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kemudian menjadi Renja SKPD. Rancangan Renja SKPD inilah yang akan dibawa pada pelaksanaan musrenbang RKPD dan mengakomodir hasil dari Musrenbang tersebut. Hasil perumusan akhir rancangan SKPD akan ditetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Renja SKPD menjadi dokumen Renja SKPD.

Renja DTPH merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sasaran umum kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah **Pertanian Maju, Mandiri dan Modern**, dengan startegi utamanya adalah **Meningkatkan kesejahteraan petani, mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing komoditas pertanian**. Kebijakan Kementerian Pertanian bersenergi dengan prioritas RKPD provinsi, yaitu "**Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian dan Pariwisata**" dan prioritas RKPD Kabupaten Banjar tahun 2022, yaitu "**Pemulihan Ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan dan Barang Jasa serta mendorong investasi**" dengan sub-prioritas "**Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan dan Barang Jasa**".

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis**". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2, yaitu: "**Peningkatan ekonomi yang berkualitas bebasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan**".

Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing, dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas dan terwujudnya penurunan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kontribusi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap pencapaian tujuan pada misi tersebut adalah meningkatkan produksi tanaman pangan strategis dan komoditas hortikultura unggulan sehingga mampu mencukupi kebutuhan pangan mandiri yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Hal ini selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 di sebutkan bahwa agenda prioritas Kabinet Kerja "NAWACITA" mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, diantaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, dan melindungi serta mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. visi kementerian pertanian jangka menengah 2020-2024, yakni: Pertanian yang Maju, Mandiri dan Moden untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Kontribusi DTPH Kabupaten Banjar tersebut juga selaras dengan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Tahapan penyusunan perubahan rencana kerja DTPH dimulai dari persiapan Penyusunan Renja; Penyusunan ranwal renja dengan berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan; Penyusunan rancangan renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja dan rancangan awal; Pembahasan rancangan renja dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran; Perumusan rancangan akhir renja berdasarkan Perkada RKPD; Verifikasi rancangan akhir renja untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaiama di ubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
27. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 050/390/PPE-Bappeda Litbang/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Daerah.

28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar tahun 2022 disusun dengan maksud untuk untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan; mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar yang didalamnya tertuang tujuan, sasaran, outcome, *input*, dan *output* yang akan dicapai pada tahun 2022 secara berjenjang, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Lebih lanjut tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar adalah :

a. Sebagai Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022;
b. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan sektor pertanian tahun 2022 bagi Jajaran Birokrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar;
c. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi pembangunan pertanian secara umum melalui tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan pertanian; dan
e. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan melalui pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2021 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2022-2026. Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut : "**Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis**". Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

1. ***Maju;*** Maju dalam pengertian ini adalah:
   a. Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang;
   b. Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).
2. ***Mandiri;*** Mandiri dalam pengertian ini adalah:
   a. Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
   b. Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
   c. Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. ***Agamis;*** Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Kabupaten Banjar maju merupakan manifestasi dari upaya melakukan Perubahan. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Banjar. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari

sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Banjar di semua aspek kehidupan. Kabupaten Banjar maju berarti lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Kabupaten Banjar Mandiri yaitu mengupayakan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dengan mengurangi ketergantungan dari pihakpihak lain. Kemandirian daerah bermakna suatu kondisi dimana daerah tersebut tidak tergantung pada pihak lain seperti daerah lain ataupun pusat dalam pembangunan didaerahnya. Kemandirian ekonomi (keuangan) dan non ekonomi mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah.

Kabupaten Banjar melaksanakan pembangunan berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif; dan
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas tanaman pangan dan hortikultura yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar dominan pada misi kedua, yaitu "**Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan**". Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan pendapatan petani melalui

peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar pada tahun 2021 melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 30 subkegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
      5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      2) Penyediaan Bahan Logistrik Kantor;
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
      2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
      2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota
      1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
      2) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
      3) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Pengembangan Prasarana Pertanian
   1) Pengolahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

b. Pembangunan Prasarana Pertanian
   1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
   2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
   3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air; dan
   4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
      1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5. Program Penyuluhan Pertanian
   a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
      2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan
      3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Pengukuran kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar didasarkan pada Capaian Renstra Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya kontribusi tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan	%	0,50	A/N
	Pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan	%	3,80	A/N

Sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar melalui indikator kinerja, terdapat 2 indikator :

1. Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan

   Tanaman pangan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, dll), serta tanaman serelia lainnya.

   Wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

2. Pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan

   Tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupate Banjar pada tahun anggaran 2021 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 28.635.618.158,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp 21.506.051.494,- dan belanja langsung Rp 7.129.566.664,- (yang terdiri dari belanja langsung utama Rp 4.496.429.888,- dan belanja langsung pendukung Rp 2.633.136.776,-).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar s/d tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar s/d tahun 2021

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAIN**									
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran						100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertibnya perencanaan/ pelaporan kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja serta administrasi pengelolaan keuangan SKPD dengan baik						11 laporan	11 laporan	100
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program yang disusun (Renstra, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi)		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				5 dokumen	5 dokumen	100
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Murni						1 dokumen	1 dokumen	100
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA pergeseran dan RKA perubahan						2 dokumen	2 dokumen	100
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKjIP, LKPJ, LPPD, Tepra, RFK, Laporan Tahunan)						6 dokumen	6 dokumen	100
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Monitoring dan evaluasi						1	1	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	Target Program, Kegiatan dan Sub	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021

		(*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)	kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daeah							dokumen	dokumen	
3.27.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya perencanaan/ pelaporan kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja serta administrasi pengelolaan keuangan SKPD dengan baik						1 laporan	1 laporan	100
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan tahunan keuangan						1 laporan	1 laporan	100
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menigkatnya kualitas pelayanan perkantoran						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menigkatnya kualitas pelayanan perkantoran						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat SKPD yang tersedia						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Tersedianya jasa pendukung						12 bulan	12 bulan	100

Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	Target Program, Kegiatan dan Sub	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021

		(*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)	kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Umum Kantor	administrasi dan teknis perkantoran		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**						
		Penyediaan makanan dan minuman						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menigkatnya sarana prasarana untuk kelancaran tugas						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas						12 bulan	12 bulan	100
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang direhabilitasi						0 unit	0 unit	0
		Gedung kantor yang terpelihara						12 bulan	12 bulan	100
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi sawah						1,95 persen	1,95 persen	100
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi sawah						1,95 persen	1,95 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi ladang						1,91 persen	1,91 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : Jagung						1,64 persen	1,64 persen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : kedelai						0 persen	0 persen	0
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Jeruk						2,12 persen	2,12 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Pisang						2,21 persen	2,21 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Durian						1,86 persen	1,86 persen	100
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan dan investasi pertanian melalui AUTP/AUTJ		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				380 orang	380 orang	100
		Luas lahan yang mendapatkan fasilitasi pupuk dan pestisida						7.000 ha	7.000 ha	100
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas lahan yang menggunakan Alsintan sesuai rekomendasi						12.000 ha	12.000 ha	100
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Luas tanaman Pangan : padi sawah						2,01 persen	2,01 persen	100
		Pertumbuhan Luas Tanaman Pangan : padi ladang						2,00 persen	2,00 persen	100
		Pertumbuhan luas tanaman pangan : jagung						1,79 persen	1,79 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : kedelai								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pertumbuhan Luas tanaman hortikultura: jeruk		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				1,82 persen	1,82 persen	100

		Pertumbuhan Luas tanaman hortikultura: Pisang			1,79 persen	1,79 persen	100
		Pertumbuhan Luas tanaman hortikultura: Durian			1,84 persen	1,84 persen	100
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih tanaman hortikultura yang diproduksi/didistribusikan : durian			0 pohon	0 pohon	0
		Jumlah benih tanaman hortikultura yang diproduksi/didistribusikan : jeruk			4.000 pohon	4.000 pohon	100
		Jumlah benih tanaman hortikultura yang diproduksi/didistribusikan : pisang			2.500 pohon	2.500 pohon	100
		Jumlah benih tanaman pangan yang diproduksi/didistribusikan Balai Benih			2,50 ton	2,50 ton	100
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas lahan yang dikembangkan secara intensif			5.200 ha	5.200 ha	100
		Luas lahan yang menerapkan pola tanam lebih dari satu jenis komoditas			75 ha	75 ha	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah dokumen informasi harga pasar		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian yang diikuti						0 kali	0 kali	0
		Jumlah pasar tani yang dilaksanakan						3 kali	3 kali	100

		Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian			75 orang	75 orang	100
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi tanaman pangan (padi)			275.404 ton	275.404 ton	100
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan Luas tanaman Pangan : padi sawah			2,01 persen	2,01 persen	100
		Pertumbuhan Luas Tanaman Pangan : padi ladang			2,00 persen	2,00 persen	100
		Pertumbuhan luas tanaman pangan : jagung			1,79 persen	1,79 persen	100
		Pertumbuhan luas tanaman pangan : kedelai			0 persen	0 persen	0
		Pertumbuhan Luas tanaman hortikultura: jeruk			1,82 persen	1,82 persen	100
		Pertumbuhan Luas tanaman hortikultura: Pisang			1,79 persen	1,79 persen	100
		Pertumbuhan Luas tanaman hortikultura: Durian			1,84 persen	1,84 persen	100
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB, Kawasan Pertanian Pangan	Jumlah dokumen database potensi lahan pertanian			1 dokumen	1 dokumen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Berkelanjutan/KPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCPB									
		Luas lahan kering yang dikembangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura						12.000 ha	12.000 ha	100
		Luas pekarangan yang dikembangkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				4,50 ha	4,50 ha	100
		Panjang jalan pertanian yang mendapatkan pendampingan						4.000 meter	4.000 meter	100
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi sawah						1,95 persen	1,95 persen	100

		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi ladang			1,91 persen	1,91 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : Jagung			1,64 persen	1,64 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : kedelai			0 persen	0 persen	0
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Jeruk			2,12 persen	2,12 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Pisang			2,21 persen	2,21 persen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Durian						1,86 persen	1,86 persen	100
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya irigasi air tanah (dangkal/ dalam)						3 unit	3 unit	100
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan usaha tani						4 km	4 km	100
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangunnya pintu air		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				1 unit	1 unit	100
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pengembangan teknologi pertanian yan diterapkan						1 kegiatan	1 kegiatan	100
		Jumlah titik sumur bor, embung, irigasi perpompaan/perpipaan; tabat; dan RJIT yang mendapatakan pendampingan						4 unit	4 unit	100

		Luas lahan sawah yang mendapatkan pendampingan optimasi lahan			700 ha	700 ha	100
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi ladang			1,91 persen	1,91 persen	100
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi sawah			1,95 persen	1,95 persen	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : padi ladang		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				1,91 persen	1,91 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : Jagung						1,64 persen	1,64 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman pangan : kedelai						0 persen	0 persen	0
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Jeruk						2,12 persen	2,12 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Pisang						2,21 persen	2,21 persen	100
		Pertumbumbuhan produktivitas tanaman Hortikultura : Durian						1,86 persen	1,86 persen	100
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT						150 orang	150 orang	100
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani						40 persen	40 persen	100

3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan nilai kelas kelompok tani						40 persen	40 persen	100
		Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik						100 persen	100 persen	100
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)/Sub-Kegiatan (*Sub-Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja Dinas TPH tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas TPH s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas TPH 2020	Realisasi Renja DTPH 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan Sub kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP yang melaksanakan kaji terap teknologi pertanian tepat guna		**Program, Kegaitan dan Subkegiatan Baru**				10 BPP	10 BPP	100
		Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian						17 BPP	17 BPP	100
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelas kelompok tani yang meningkat nilainya						204 keltan	204 keltan	100
		Jumlah peserta BIMTEK penerapan teknologi						90 orang	90 orang	100
		Jumlah peserta pelatihan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura						0 orang	0 orang	0
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mengikuti Diklat						18 orang	18 orang	100
		Jumlah tenaga penyuluh yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan						150 orang	150 orang	100

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Tugas Dinas Tanaman Pangan da Hortikultura secara jelas telah diatur pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pasal 4 dijelaskan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan proses analisis sebagai berikut :

2.2.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia dari berbagai aspek dan kelemahan yang dapat menghambat proses pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura selama tahun 2021-2026.

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Tersedianya Perda SOTK dan Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Tersedianya UPTD Balai Benih, Mekanisasi Pertanian dan UPTD Penyuluhan Pertanian;
4. Tersedianya dukungan petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengamat Benih Tanaman (PBT);
5. Tersedianya dukungan dan kerjasama Aparatur Sipil Negara.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Rampingnya Struktur organisasi;
2. Ruang perkantoran kurang representatif dan kurangnya sarana prasarana pendukung (mobilisasi);
3. Kurangnya tenaga teknis lapangan seperti Mantri Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan;
4. Kurang akuratnya data base pertanian; dan
5. Kompetensi aparatur yang masih rendah.

2.2.1.2 Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungaan eksternal ditujukan untuk mengetahui peluang yang tersedia dan kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan. Peluang yang tersedia dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, yaitu :

1. Adanya lahan pertanian yang berpotensi untuk peningkatan IP (indek pertanian) atau tanam lebih dari satu kali dalam setahun;
2. Tersedianya lahan pertanian Kabupaten Banjar dengan tipe lahan yang beragam, diantaranya : irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, rawa lebak dan ladang/huma;
3. Tersedianya lembaga-lembaga penelitian/pengkajian pertanian, perguruan tinggi;
4. Peluang pasar untuk hasil olahan komoditas pertanian cukup luas;
5. Tersedianya akses informasi yang semakin terbuka;
6. Tersedianya dukunga pemerintah daerah, lembaga keuangan dalam pengembangan usaha agribisnis pertanian;
7. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan bagi petani; dan
8. Dukungan pusat dan provinsi atas pengembangan komoditas pertanian.

Adapun kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, yaitu :

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;
2. Penurunan kualitas lahan pertanian
3. Kurangnya petani yang berusia muda
4. Dampak perubahan iklim
5. Organisme pengganggu tanaman (OPT)
6. Infrastruktur dan sarana prasarana yang masih terbatas;
7. Sarana produksi (ketersediaan/distribusi benih/bibit, pupuk, obat-obatan)
8. Daya saing produk hasil pengolahan pertanian masih rendah.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar

Rancangan awal RKPD/Renstra Dinas Tanaman Pangna dan Hortikultura Kabupaten Banjar menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Tanaman Pangna dan Hortikultura Kabupaten Banjar. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuai terhadap kebutuhan Dinas Tanaman Pangna dan Hortikultura Kabupaten Banjar.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 serta urusan pemeritahan yang diselenggarkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar yakni "**Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis**" dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif; dan
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar dominan pada misi kedua, yaitu "**Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan**". Tujuan dari misi tersebut adalah:

3. **Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas**. Hal ini diharapkan mencapai sasaran sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu "**meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan**".
4. **Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distrubusi pendapatan dan angka pengangguran**. Hal ini diharapkan mencapai sasaran sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu "**berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan**".

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	27.119.361.042	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	27.119.361.042	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD	100 persen	58.769.300	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD	100 persen	58.769.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	9.807.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	9.807.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen RKA murni dan RKA perubahan	2 dokumen	24.741.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen RKA murni dan RKA perubahan	2 dokumen	24.741.600	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen DPA murni	2 dokumen	7.334.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen DPA murni	2 dokumen	7.334.100	

			dan DPA perubahan					dan DPA perubahan			
	Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKjIP, LKPJ dan LPPD)	3 dokumen	12.370.700	Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKjIP, LKPJ dan LPPD)	3 dokumen	12.370.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	4.515.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	4.515.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	24.236.364.212	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	24.236.364.212	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	24.218.619.112	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	24.218.619.112	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	17.745.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	17.745.100	
			Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	18 dokumen				Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	18 dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	706.717.870	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	706.717.870	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah peralatan dan perlengkapan daerah	5 unit	69.868.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah peralatan dan perlengkapan daerah	5 unit	69.868.000	
	Penyediaan Bahan Logistrik Kantor	Kab. Banjar	Bahan logistic kantor	12 bulan	56.326.970	Penyediaan Bahan Logistrik Kantor	Kab. Banjar	Bahan logistic kantor	12 bulan	56.326.970	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan	15.522.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan	15.522.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	565.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	565.000.000	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.907.229.660	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.907.229.660	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	195.389.660	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	195.389.660	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Pelaksana tugas ASN yang pernuhi	13 bulan	1.711.840.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Pelaksana tugas ASN yang pernuhi	13 bulan	1.711.840.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah	100 persen	210.280.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah	100 persen	210.280.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	8 unit	185.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	8 unit	185.280.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah gedung/ bangunan dalam kondisi baik	1 gedung	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah gedung/ bangunan dalam kondisi baik	1 gedung	25.000.000	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Banjar	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan	1,00 persen	1.012.862.053	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Banjar	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan	1,00 persen	1.012.862.053	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			dan hortikultura unggulan					dan hortikultura unggulan			

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Banjar	Luas lahan yang mendapatkan fasilitasi sarana pertanian	18.600 ha	350.190.128	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Banjar	Luas lahan yang mendapatkan fasilitasi sarana pertanian	18.600 ha	350.190.128	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Banjar	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi	136 keltan	69.099.400	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Banjar	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi	136 keltan	69.099.400	
			Jumlah petani yang terakses asuransi usaha tani padi (AUTP)	2.107 orang				Jumlah petani yang terakses asuransi usaha tani padi (AUTP)	2.107 orang		
			Luas lahan yang menggunakan alat mesin pertanian	5.100 ha				Luas lahan yang menggunakan alat mesin pertanian	5.100 ha		
			Luas panen yang menggunakan alat mesin panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	5.100 ha				Luas panen yang menggunakan alat mesin panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	5.100 ha		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah alat mesin pertanian yang terpelihara	56 unit	281.090.728	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah alat mesin pertanian yang terpelihara	56 unit	281.090.728	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota	Kab. Banjar	Luas tambah tanam komoditas strategis tanaman pangan (Padi)	59.000 ha	662.671.925	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota	Kab. Banjar	Luas tambah tanam komoditas strategis tanaman pangan (Padi)	59.000 ha	662.671.925	
			Peningkatan luas pengembangan hortikultura unggulan (jeruk, pisang, durian dan	499 ha				Peningkatan luas pengembangan hortikultura unggulan (jeruk, pisang, durian dan	499 ha		
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			cabe)					cabe)			
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah benih tanaman hortikultura yang diproduksi: jeruk, pisang dan durian	6.000 pohon	295.560.525	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah benih tanaman hortikultura yang diproduksi: jeruk, pisang dan durian	6.000 pohon	295.560.525	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah benih tanaman pangan (padi) yang diproduksi	2,75 ton	367.111.400	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah benih tanaman pangan (padi) yang diproduksi	2,75 ton	367.111.400	
			Jumlah penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura yang dibina	50 orang				Jumlah penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura yang dibina	50 orang		
			Luas lahan intensifikasi dan esktensifikasi tanaman	4.525 ha				Luas lahan intensifikasi dan esktensifikasi tanaman	4.525 ha		

			pangan dan hortikultura					pangan dan hortikultura			
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian	6,43 persen	41.472.100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian	6,43 persen	41.472.100	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase luas lahan yang mendapatkan pendampingan optimalisasi lahan	4,76 persen	41.472.100	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase luas lahan yang mendapatkan pendampingan optimalisasi lahan	4,76 persen	41.472.100	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Banjar	Luas lahan yang mendapatkan pendampingan optimalisasi lahan	2.000 ha	41.472.100	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Banjar	Luas lahan yang mendapatkan pendampingan optimalisasi lahan	2.000 ha	41.472.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura	6,70 persen	82.502.800	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura	6,70 persen	82.502.800	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase penangan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura	15 persen	82.502.800	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase penangan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura	15 persen	82.502.800	

			Persentase serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura	6,7 persen				Persentase serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura	6,7 persen		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Banjar	Luas tanaman pangan dan hortikultura yang dikendalikan dari serangan OPT	115 ha	82.502.800	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Banjar	Luas tanaman pangan dan hortikultura yang dikendalikan dari serangan OPT	115 ha	82.502.800	
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	5 persen	25.070.000	Program Perizinan Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	5 persen	25.070.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegaitan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha pertanian	10 usaha	25.070.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegaitan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha pertanian	10 usaha	25.070.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah usaha pertanian yang dibina	15 usaha	25.070.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah usaha pertanian yang dibina	15 usaha	25.070.000	
6	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Persentase kelompok tani yang mandiri	4,00 persen	2.594.101.717	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Persentase kelompok tani yang mandiri	4,00 persen	2.594.101.717	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Persentase kelas kemampuan kelompok tani madya	4 persen	2.594.101.717	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Persentase kelas kemampuan kelompok tani madya	4 persen	2.594.101.717	
			Persentase pemuda yang bergerak disektor pertanian	0,39 persen				Persentase pemuda yang bergerak disektor pertanian	0,39 persen		
			Jumlah kegiatan PENAS TANI yang diikuti	1 kegiatan				Jumlah kegiatan PENAS TANI yang diikuti	1 kegiatan		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Terselenggaranya kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan	20 BPP	562.988.500	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Terselenggaranya kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan	20 BPP	562.988.500	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Jumlah kelompok tani yang meningkat skor kelasnya	523 keltan	1.691.000.517	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Jumlah kelompok tani yang meningkat skor kelasnya	523 keltan	1.691.000.517	
			Jumlah kelompok tani yang terbentuk	28 keltan				Jumlah kelompok tani yang terbentuk	28 keltan		

			Jumlah pemuda yang bergerak disektor pertanian	1.000 pemuda				Jumlah pemuda yang bergerak disektor pertanian	1.000 pemuda		
			Jumlah petani dan pendamping yang	50 orang				Jumlah petani dan pendamping yang	50 orang		
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			mengikuti PENAS TANI					mengikuti PENAS TANI			
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat	100 orang	340.112.700	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat	100 orang	340.112.700	
			Persentase penyuluh petanian dengan prestasi kinerja baik	50 persen				Persentase penyuluh petanian dengan prestasi kinerja baik	50 persen		

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut program atau kegiatan yang diusulkan dari kelompok masyarakat hasil musrenbang ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.4.

2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Kabupaten Banjar

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
1.	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Aranio	Desa Tiwingan	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
2.	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Aranio	Desa Kala'an	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
3.	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Aranio	Desa Rantau Bujur	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
4.	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Aranio	Desa Rantau Bujur	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
5.	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Aranio	Desa Rantau Bujur	1 paket	200.000.000	untuk bibit jahe usulan akan diteruskan ke dana APBN, sedangkan kopi merupakan urusan dari Dinas Perkebunan
6.	Penyediaan benih bermutu	Astambul	Desa Sungai Tuan Ilir	1 paket	200.000.000	usulan akan diteruskan ke dana APBN
7.	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Paramasan	Desa Angkipih	2 paket	200.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
8.	Bantuan Alsintan	Astambul	Desa Pematang Hambawang	1 unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
9.	Bantuan Alsintan	Astambul	Desa Pematang Hambawang	1 unit	23.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
10.	Bantuan Alsintan	Astambul	Desa Pasar Jati	1 unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
11.	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Astambul	Desa Danau Salak	1 paket	150.000.000	untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan

						untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
12.	Sosialisasi Peningkatan Mutu Prodak Pertanian	Astambul	Desa Pasar Jati	1 unit	25.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
13.	Penerapan Paket Teknologi Pertanian (Demplot/ Demfarm/ Demarea)	Astambul	Desa Pingaran Ulu	1 unit	140.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
14.	Sosialisasi Peningkatan Mutu Prodak Pertanian	Astambul	Desa Minggu Raya	20 orang	10.000.000	bisa digunakan dana desa, DTPH siap menjadi narasumber
15	Pembangunan/	Astambul	Desa Benua	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	Rehabilitasi Pintu Air/Tabat		Anyar DS			APBN melalui Dana DAK TA.2022
16	Sosialisasi Peningkatan Mutu Prodak Pertanian	Astambul	Desa Astambul Kota	20 orang	10.000.000	bisa menggunakan dana desa, DTPH siap menjadi narasumber
17	Bantuan Alsintan	Astambul	Desa Benua Anyar DS	1 unit	23.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
18	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Astambul	Desa Astambul Kota	1 unit	454.460.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
19	Pembangunan/ Rehabilitasi Pintu Air/Tabat	Astambul	Desa Pingaran	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
20	Sosialisasi Peningkatan Mutu Prodak Pertanian	Astambul	Desa Tambangan	20 orang	10.000.000	bisa menggunakan dana Desa, DTPH Siap menjadi narasumber
21	Perbaikan saluran air pertanian, tanggul, galangan)	Astambul	Desa Tambak Danau	1 unit	23.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
22	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Astambul	Desa Pingaran	1 unit	454.460.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal

23	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Aluh-Aluh	Desa Aluh Aluh Kecil Muara	1 paket		untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
24	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Kertak Hanyar	Desa Pasar Kamis	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
25	Sosialisasi Peningkatan Mutu Prodak Pertanian	Kertak Hanyar	Desa Pasar Kamis	1 unit	454.460.000	bisa menggunakan dana Desa, DTPH Siap menjadi narasumber
26	Bantuan Alsintan	Beruntung Baru	Desa Tambak Padi	1 unit	454.460.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
27	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Kertak Hanyar	Desa Benua Hanyar	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
28	Bantuan Alsintan	Beruntung Baru	Desa Salat Makmur	1 unit	454.460.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
29	Bantuan Alsintan	Beruntung Baru	Desa Salat Makmur	1 unit	430.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
30	Bantuan Alsintan	Aranio	Desa Pa'au	1 unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
31	Peningkatan kapasitas Petani dan Kelembagaannya (Sekolah Lapang Untuk Petani	Aranio	Desa Pa'au	1 kelompok	10.000.000	usulan tidak spesifik, dan akan di sesuaikan dengan ketersediaan anggaran
32	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Melayu	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
33	Penyediaan benih bermutu	Martapura Timur	Desa Melayu	1 paket	30.000.000	diteruskan ke dana APBN Pusat
34	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Melayu	1 paket	110.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
35	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Sungai Pinang	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal
36	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Tambak Anyar Ilir	1 paket	100.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			

37	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Tambak Anyar Ilir	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
38	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Kahelaan	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
39	Perbaikan saluran air pertanian, tanggul, galangan)	Martapura Timur	Desa Tambak Anyar Ilir	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
40	Pembangunan Jembatan Desa	Martapura Timur	Desa Tambak Anyar Ilir	1 paket	500.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
41	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Rantau Bakula	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
42	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Rantau Nangka	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
43	Pembangunan Unit Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan	Sungai Pinang	Desa Rantau Nangka	1 paket		diteruskan ke dana APBN Pusat
44	Peningkatan kapasitas Petani dan Kelembagaannya (Sekolah Lapang Untuk Petani	Telaga Bauntung	Desa Telaga Baru	4 kelompok		Sekolah Lapang tentang pelatihan hasil pertanian berupa tanaman obat, anggaran disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Dinas TPH
45	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Telaga Bauntung	Desa Telaga Baru	1 paket	100.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
46	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Belimbing Lama	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
47	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Sumber Baru	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
48	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Tambak Anyar	1 paket	200.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
49	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Telaga Bauntung	Desa Rampah	1 paket	220.000.000	diteruskan ke dana APBN Pusat
50	Bantuan Alsintan	Beruntung Baru	Desa Rumpiang	1 unit	454.460.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
51	Bantuan Sarana Produksi	Aluh Aluh	Desa Handil Bujur	6 unit	129.600.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal TA.2023

	Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)					
52	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Martapura	Desa Bincau Muara	1 paket	10.000.000	untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
53	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Tambak Anyar Ulu	1 paket	500.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
54	Pembangunan Sarana Air Bersih	Martapura Timur	Desa Tambak Anyar Ulu	1 paket	150.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN sumber Dana DAK TA.2022
55	Membangun/Rehab Jaringan Irigasi	Martapura Timur	Desa Dalam Pagar	1 paket	100.000.000	diusulkan melalui dana APBN TA.2022
56	Peningkatan kapasitas Petani dan Kelembagaannya (Sekolah Lapang Untuk Petani	Martapura Timur	Desa Akar Baru	1 kelompok		Diteruskan diakomodir, melihat ketersediaan anggaran yang ada
No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
57	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Akar Bagantung Ulu	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
58	Peningkatan kapasitas Petani dan Kelembagaannya (Sekolah Lapang Untuk Petani	Martapura Timur	Desa Akar Bagantung Ulu	1 kelompok	10.000.000	bisa digunakan dana desa, tidak termasuk komoditas yang dijadikan bahan baku olahan T.A 2021, DTPH siap menjadi narasumber
59	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Antasan Senor Ilir	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
60	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Martapura Timur	Desa Akar Bagantung Ulu	1 paket	20.000.000	untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan

						untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
61	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Telaga Bauntung	Desa Rampah	1 paket	52.500.000	untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
62	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Aluh Aluh	Desa Terapu	1 paket	100.000.000	untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
63	Perbaikan saluran air pertanian, tanggul, galangan)	Aluh Aluh	Desa Terapu	2 unit	30.000.000	teruskan ke dana APBN melalui e-proposal
64	Penerapan Paket Teknologi Pertanian (Demplot/Demfarm/Demarea)	Aluh Aluh	Desa Terapu	2 unit	42.000.000	teruskan ke dana APBN melalui e-proposal TA.2023
65	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Aluh Aluh	Desa Terapu	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
66	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Pekauman	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
67	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Aluh Aluh	Desa Kuin Kecil	5 unit	110.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal TA.2023
68	Pembangunan/ Rehabilitasi Pintu Air/Tabat	Martapura	Desa Tunggul Irang Ulu	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
69	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Sei Kitano	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022

70	Membangun/Rehab Jaringan Irigasi	Martapura	Desa Bincau Muara	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
71	Pembangunan/	Mataraman	Desa	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana
No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	perbaikan Jalan Usaha Tani		Simpang Tiga			APBN melalui Dana DAK TA.2022
72	Bantuan Alsintan	Martapura	Desa Mekar	1 paket	100.000.000	diusulkan ke dana APBN melalui e-Proposal
73	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Kupang Rejo	1 unit	38.000.000	diusulkan ke dana APBN melalui e-Proposal
74	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Sungai Pinang	Desa Kupang Rejo	1 paket		akan diusulkan ke dana APBD 1 dan APBN
75	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Sungai Pinang	Desa Kupang Rejo	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
76	Bantuan Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Sungai Pinang	Desa Kahelaan	1 paket		diteruskan ke dana APBD 1 dan APBN
77	Bantuan Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Sungai Pinang	Desa Rantau Nangka	1 paket		diteruskan ke dana APBD 1 dan APBN
78	Bantuan Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Sungai Pinang	Desa Belimbing Lama	1 paket		diteruskan ke dana APBD 1 dan APBN
79	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Pematang Baru	4 unit	85.000.000	diusulkan ke dana APBN melalui e-Proposal TA.2023
80	Pembangunan/ Rehabilitasi Pintu Air/Tabat	Martapura Timur	Desa Antasan Senor	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
81	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Antasan Senor	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
82	Perbaikan Gedung Kantor	Martapura Timur	Desa Melayu Tengah	1 paket		akan di usulkan lewat DAK Fisik Pertanian. Namun untuk BPP Martim bukan termasuk prioritas karena pada tahun 2019 sdh mendapat

						alokasi DAK untuk rehab bangunan dan sarprasnya
83	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Melayu Tengah	2 unit	42.000.000	teruskan ke dana APBN melalui e-proposal TA.2023
84	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Melayu Tengah	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
85	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Martapura	Desa Tunggul Irang	1 paket	50.000.000	diteruskan ke dana APBN Pusat
86	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura	Desa Tungkaran	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
87	Penyediaan benih bermutu	Martapura	Desa Tungkaran	1 paket	50.000.000	diteruskan ke Dana APBN Pusat
88	Pembangunan Jembatan Desa	Martapura	Desa Tungkaran	1 paket	150.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
89	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Sumber Harapan	1 unit	38.000.000	teruskan ke dana APBN melalui e-proposal TA.2023
90	Membangun/Rehab Jaringan Irigasi	Martapura Timur	Desa Antasan Senor	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
91	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Antasan Senor	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
92	Pembangunan/	Martapura	Desa Antasan	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	Rehabilitasi Pintu Air/Tabat	Timur	Senor			APBN melalui Dana DAK TA.2022
93	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Pakutik	1 unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
94	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Sungai Pinang	Desa Pakutik	1 paket		diteruskan ke dana APBD 1 dan APBN Pusat
95	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Hakim Makmur	1 unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
96	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Antasan Senor	2 unit		diteruskan ke Dana APBN 2023
97	Bantuan Alsintan	Sungai Pinang	Desa Belimbing Baru	1 unit	42.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal

98	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Sei Kitano	1 unit	38.000.000	diteruskan ke Dana APBN Melalui e-Proposal
99	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Melayu Ilir	1 paket	70.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal
100	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Pematang Baru	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
101	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Timur	Desa Pekauman Dalam	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
102	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Pekauman Dalam	1 paket	400.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal
103	Bantuan Alsintan	Martapura Timur	Desa Keramat Baru	1 paket	200.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal
104	Perbaikan saluran air pertanian, tanggul, galangan)	Aluh Aluh	Desa Podok	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
105	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Aluh Aluh	Desa Podok	1 paket		untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
106	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Mataraman	Desa Pematang Danau	1 paket	100.000.000	akan diteruskan ke dana APBD 1 dan dana APBN Pusat
107	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Mataraman	Desa Surian	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
108	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Mataraman	Desa Bawahan Pasar	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022
109	Penyediaan benih bermutu	Martapura Timur	Desa Akar Begantung Ulu	1 paket	5.000.000	akan di teruskan/akomodir menyesuaikan dengan APBD Dinas TPH 2022, dengan syarat penerima manfaat berbadan hukum dan sudah terdafftar 3 tahun
110	Sosialisasi Pengembangan Agribisnis	Paramasan	Desa Paramas	20 orang		komoditas yang ingin di jadikan pelatihan kurang jelas, untuk

			an Bawah			pelatihan akan di sesuaikan dengan ketersediaan anggaran dinas atau bisa melalui PPL di BPP Kecamatan
111	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Paramasan	Desa Paramasan Bawah	1 paket		akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
112	Membangun/Rehab Jaringan Irigasi	Telaga Bauntung	Desa Lok Tanah	1 paket	125.000.000	diusulkan pada kegiatan APBN TA. 2022
113	Membangun/Rehab Jaringan Irigasi	Telaga Bauntung	Desa Lok Tanah	1 paket	120.000.000	diusulkan pada kegiatan APBN TA. 2022
114	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Telaga Bauntung	Desa Lok Tanah	1 paket	40.000.000	dirteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal TA.2023
115	Membangun/Rehab Jaringan Irigasi	Telaga Bauntung	Desa Lok Tanah	1 paket	250.000.000	diteruskan/diusulkan ke Dana APBN sumber dana DAK Ta.2022
116	Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dan pengaman jalan	Mataraman	Desa Bawahan Selan	1 paket	200.000.000	apabila memang termasuk jalan usaha tani maka diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui Dana DAK TA.2022, tetapi bila termasuk jalan desa bukan wewenang dinas TPH
117	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Paramasan	Desa Remo	1 paket		akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
118	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura	Lurah Pasayangan	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke Dana APBN sumber dana DAK Ta.2022
119	Peningkatan kapasitas Petani dan Kelembagaannya (Sekolah Lapang Untuk Petani	Mataraman	Desa Simpang Tiga	10 orang	1.000.000	untuk sekolah lapang akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Dinas TPH
120	Bantuan Alsintan	Karang Intan	Desa Biih	1 unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
121	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Karang Intan	Desa Pandak Daun	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke Dana APBN sumber dana DAK Ta.2022

122	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Karang Intan	Desa Sungai Alang	1 paket		diteruskan ke dana APBN Pusat
123	Bantuan Alsintan	Tatah Makmur	Desa Taibah Raya	1 paket		diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
124	Bantuan Alsintan	Karang Intan	Desa Kiram	5 unit	606.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal
125	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Martapura Timur	Desa Melayu Tengah	1 paket	30.000.000	diteruskan ke dana APBN atau ke APBD provinsi
126	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Karang Intan	Desa Pulau Nyiur	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke Dana APBN sumber dana DAK Ta.2022
127	Bantuan Alsintan	Mataraman	Desa Bawahan Selan	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
128	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Karang Intan	Desa Kiram	1 paket	90.000.000	untuk bantuan obat-obatan pihak desa/poktan untuk membuat surat permohonan ke Dinas TPH dan dilakanakan apabila ada serangan OPT. sedangkan untuk bantuan benih, pupuk akan di teruskan ke APBD Provinsi & pusat (dana APBN)
129	Bantuan Alsintan	Mataraman	Desa Bawahan Selan	1 Unit	21.600.252	akan diteruskan melalui dana APBN melalui e-proposal 2023
130	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura	Desa Jawa Laut	1 paket	200.000.000	diteruskan/diusulkan ke Dana APBN sumber dana DAK Ta.2022
No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
131	Perbaikan saluran air pertanian, tanggul, galangan)	Karang Intan	Desa Panyambaran	1 paket	200.000.000	diusulkan ke kegiatan pepompaan/perpipaan dana APBN TA. 2022
132	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk,	Sambung Makmur	Desa Baliangin	1 paket	15.000.000	akan diteruskan ke dana APBD 1 dan dana APBN Pusat

	dan obat-obatan)					
133	Perbaikan saluran air pertanian, tanggul, galangan)	Sambung Makmur	Desa Batu Tanam	1 paket	200.000.000	diteruskan ke dana APBN sumber dana DAK TA.2022
134	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Sambung Makmur	Desa Gunung Batu	1 paket	200.000.000	diteruskan ke dana APBD 1 dan APBN Pusat
135	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Irigasi Rawa	Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk Kota	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
136	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Kel. Benteng Tengah	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
137	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Sei Batang	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
138	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Sei Ranggas Hambuku	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
139	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Sei Ranggas Hambuku	1 paket	200.000.000	Diteruskan/Diusulkan ke dana APBN sumber dana DAK
140	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Sei Ranggas Tengah	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
141	Sosialiasi Penumbuhan Petani Muda	Martapura Barat	Desa Sei Ranggas Tengah	20 orang		pada dasarnya di terima menyesuaikan dengan anggaran, atau nanti bisa melalui Penyuluh Pertanian di BPP Kecamatan
142	Penerapan Paket Teknologi Pertanian (Demplot/Demfarm/Demarea)	Martapura Barat	Desa Sei Batang Ilir	1 Unit	450.000.000	diteruskan / diusulkan ke dana APBN melalui e-Proposal
143	Penerapan Paket Teknologi Pertanian (Demplot/Demfarm/Demarea)	Martapura Barat	Desa Tangkas	1 paket		Diteruskan ke dana APBN melalui e-proposal
144	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Tangkas	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK

145	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Tangkas	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
146	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Tangkas	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
147	Pembangunan/ perbaikan Jalan Usaha Tani	Martapura Barat	Desa Tangkas	1 paket	200.000.000	akan diteruskan/diusulkan ke dana APBN melalui sumber Dana DAK
148	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Cintapuri Darussalam	Desa Alalak Padang	1 paket		untuk obat-obatan dipersilahkan membuat surar ke Dinas TPH apabila terjadi serangan hama/OPT nanti dinas akan melaksanakan Gerdal. untuk bibit dan pupuk akan diteruskan ke dana APBD I dan APBN
149	Bantuan Sarana Produksi Pertanian	Simpang Empat	Desa Batu Balian	1 paket		Diteruskan ke dana APBD 1 dan APBN pusat

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	(Benih, pupuk, dan obat-obatan)					
150	Penerapan Paket Teknologi Pertanian (Demplot/Demfarm/Demarea)	Simpang Empat	Desa Paku	1 Unit	38.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal
151	Sosialisasi Pengembangan Agribisnis	Sungai Pinang	Desa Sungai Pinang			
152	Bantuan Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Simpang Empat	Desa Berkat Mulia		430.000.000	diteruskan ke dana APBN melalui e-Proposal
153	Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Benih, pupuk, dan obat-obatan)	Simpang Empat	Desa Paring Tali	20 orang	10.000.000	untuk pelatihan bisa menggunakan dana Desa dan Dinas TPH siap menjadi Narasumber
154	Peningkatan kapasitas Petani dan Kelembagaannya (Sekolah	Simpang Empat	Desa Paring Tali	20 orang	10.000.000	untuk pelatihan hasil pertanian bisa menggunakan dana Desa, dan dinas TPH

	Lapang Untuk Petani					siap menjadi narasumber
155	Bantuan Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Simpang Empat	Desa Lawiran	20 orang	10.000.000	untuk pelatihan hasil pertanian bisa menggunakan dana desa, dinas TPH siap menjadi Narasumber
156	Sosialisasi Pengembangan Agribisnis	Simpang Empat	Desa Lawiran	20 orang	10.000.000	untuk pelatihan hasil pertanian bisa menggunakan dana Desa, Dinas TPH siap menjadi Narasumber

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2021, Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong**", maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudka pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing.

Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan da bercita rasa bagi semua.

Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapani perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

a. Arah kebijakan Kementerian Pertanian

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1) Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan
5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

b. Strategi Kementerian Pertanian

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan *research and development* (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untu menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional

   Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya:

   1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian

      Peningkatan produksi dan produktivitas ini diarahkan dalam mendukung tercapainya target nasional baik ketahanan ekonomi maupun katahanan pangan. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

   2) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasiona

   3) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

b. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian

   Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan nilai tambah
2) Peningkatan daya saing pertanian

c. Startegi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanain

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu:

1) Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
2) Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
3) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
4) Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian.

d. Stategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan professional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian adalah sebagai berikut :

1) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
5) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
6) Penguatan kelembagaan petani

e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi : mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut :

1) Penguatan implementasi manajemen ASN
2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis
3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
4) Transformasi pelayanan publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata Kelola pemerintahan yang baik (good governanace) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yang tertung dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 :

"Mewujudkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Daerah Sentra Pangan"

Penjelasan dari Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan diatas adalah Mewujudkan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi yang mampu memenuhi kebutuhan produk-produk pertanian dari dalam daerah, kecuali untuk tanaman dataran tinggi, seperti kubis, wortel, kentang, lobak, dan lain-lain. Serta menjadi salah satu Provinsi yang berkontribusi terhadap produksi beras nasional dengan mempertahankan posisi penyumbang beras 10 besar Nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan mengemban Misi yang harus dilakukan adalah :

a. Mewujudkan Swasembada Beras berkelanjutan, Swasembada jagung dan kedelai serta peningkatan produksi tanaman pangan lainnya.
b. Mewujudkan peningkatan produksi Bawang Merah, Aneka Cabai dan jeruk, serta peningkatan produksi hortikultura lainnya.
c. Mewujudkan luas tambah tanam khususnya padi.
d. Meningkatkan rendemen gabah-beras.
e. Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama.
f. Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan oleh petani.
g. Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a. Tujuan

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :

1) Meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya.
2) Meningkatkan produksi bawang merah, aneka cabai dan jeruk, serta peningkatan produksi hortikultura lainnya.
3) Meningkatkan luas tambah tanam khususnya padi.
4) Meningkatkan rendemen gabah-beras.
5) Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama

6) Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan oleh petani
7) Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1) Meningkatnya produksi padi minimal 3% per tahun, meningkatnya produksi jagung minimal 4% per tahun, meningkatnya produksi kedelai minimal 15% per tahun, serta meningkatnya produksi komoditi tanaman pangan lainnya minimal 2% per tahun.
2) Meningkatnya produksi bawang merah minimal 10% per tahun, meningkatnya produksi aneka cabai minimal 5% per tahun, meningkatnya produksi jeruk minimal 3% per tahun, dan meningkatnya produksi hortikultura lainnya minimal 1 % per tahun.
3) Meningkatnya rendemen gabah-beras 1% per tahun.
4) Meningkatnya luas tambah tanam khususnya padi minimal 2% per tahun.
5) Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama rata-rata 4 Balai per tahun.
6) Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan oleh petani 10 Kelompok.
7) Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama rata-rata 12 Kelompok per tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan	Meningkatnya Keunggulan Pertanian	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Untuk Mendorong Kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikanan	

Adapun target kinerja utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Target Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya Produksi Tanaman	Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan (Padi)	%	1,10

Pangan dan Hortikultura	Pertumbuhan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan (Jeruk, Pisang, Durian dan Cabe)	%	1,00

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022

Rencana kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2021 mencakup 6 program terdiri 11 kegiatan dan 25 subkegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
      5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      2) Penyediaan Bahan Logistrik Kantor;
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
      2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
      2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
      2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota
      1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

2) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Pembangunan Prasarana Pertanian
      1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
      1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
   a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegaitan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
   a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
      2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan
      3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Sub-ouput)	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Banjar	100 persen	27.119.361.042	APBD
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD	Kab. Banjar	100 persen	58.769.300	APBD
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Banjar	7 dokumen	9.807.900	APBD
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA murni dan RKA perubahan	Kab. Banjar	2 dokumen	24.741.600	APBD
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA murni dan DPA perubahan	Kab. Banjar	2 dokumen	7.334.100	APBD
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKjIP, LKPJ dan LPPD)	Kab. Banjar	3 dokumen	12.370.700	APBD
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Banjar	24 dokumen	4.515.000	APBD
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Banjar	100 persen	24.236.364.212	APBD
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjar	12 bulan	24.218.619.112	APBD
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Banjar	1 laporan	17.745.100	APBD
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	Kab. Banjar	18 dokumen		APBD
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banjar	100 persen	706.717.870	APBD
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan daerah	Kab. Banjar	5 unit	69.868.000	APBD

3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistrik Kantor	Bahan logistic kantor	Kab. Banjar	12 bulan	56.326.970	APBD
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	Kab. Banjar	12 bulan	15.522.900	APBD
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Banjar	12 bulan	565.000.000	APBD
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Banjar	100 persen	1.907.229.660	APBD
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Kab. Banjar	12 bulan	195.389.660	APBD
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Sub-ouput)	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksana tugas ASN yang pernuhi	Kab. Banjar	13 bulan	1.711.840.000	APBD
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Banjar	100 persen	210.280.000	APBD
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Kab. Banjar	8 unit	185.280.000	APBD
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ bangunan dalam kondisi baik	Kab. Banjar	1 gedung	25.000.000	APBD
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan produktivitas komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura unggulan	Kab. Banjar	1,00 persen	1.012.862.053	APBD
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas lahan yang mendapatkan fasilitasi sarana pertanian	Kab. Banjar	18.600 ha	350.190.128	APBD
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi	Kab. Banjar	136 keltan	69.099.400	APBD

	sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah petani yang terakses asuransi usaha tani padi (AUTP)	Kab. Banjar	2.107 orang		APBD
		Luas lahan yang menggunakan alat mesin pertanian	Kab. Banjar	5.100 ha		APBD
		Luas panen yang menggunakan alat mesin panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Banjar	5.100 ha		APBD
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alat mesin pertanian yang terpelihara	Kab. Banjar	56 unit	281.090.728	APBD
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota	Luas tambah tanam komoditas strategis tanaman pangan (Padi)	Kab. Banjar	59.000 ha	662.671.925	APBD
		Peningkatan luas pengembangan hortikultura unggulan (jeruk, pisang, durian dan cabe)	Kab. Banjar	499 ha		APBD
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih tanaman hortikultura yang diproduksi: jeruk, pisang dan durian	Kab. Banjar	6.000 pohon	295.560.525	APBD
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih tanaman pangan (padi) yang diproduksi	Kab. Banjar	2,75 ton	367.111.400	APBD
		Jumlah penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura yang dibina	Kab. Banjar	50 orang		APBD
		Luas lahan intensifikasi dan	Kab. Banjar	4.525 ha		APBD
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Sub-ouput)	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
		esktensifikasi tanaman pangan dan hortikultura				

3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitasi prasarana pertanian	Kab. Banjar	6,43 persen	41.472.100	APBD
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan yang mendapatkan pendampingan optimalisasi lahan	Kab. Banjar	4,76 persen	41.472.100	APBD
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Luas lahan yang mendapatkan pendampingan optimalisasi lahan	Kab. Banjar	2.000 ha	41.472.100	APBD
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Banjar	6,70 persen	82.502.800	APBD
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase penangan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap komoditas strategis tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Banjar	15 persen	82.502.800	APBD
		Persentase serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Banjar	6,7 persen		APBD
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas tanaman pangan dan hortikultura yang dikendalikan dari serangan OPT	Kab. Banjar	115 ha	82.502.800	APBD
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	Kab. Banjar	5 persen	25.070.000	APBD
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegaitan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha pertanian	Kab. Banjar	10 usaha	25.070.000	APBD
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah usaha pertanian yang dibina	Kab. Banjar	15 usaha	25.070.000	APBD
3.27.7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri	Kab. Banjar	4,00 persen	2.594.101.717	APBD
3.27.7.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelas kemampuan kelompok tani madya	Kab. Banjar	4 persen	2.594.101.717	APBD

		Persentase pemuda yang bergerak disektor pertanian	Kab. Banjar	0,39 persen		APBD
		Jumlah kegiatan PENAS TANI yang diikuti	Kab. Banjar	1 kegiatan		APBD
3.27.7.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terselenggaranya kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan	Kab. Banjar	20 BPP	562.988.500	APBD
3.27.7.2.01.02	Pengembangan Kapasitas	Jumlah kelompok tani yang meningkat	Kab. Banjar	523 keltan	1.691.000.517	APBD
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Sub-ouput)	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
	Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	skor kelasnya				
		Jumlah kelompok tani yang terbentuk	Kab. Banjar	28 keltan		APBD
		Jumlah pemuda yang bergerak disektor pertanian	Kab. Banjar	1.000 pemuda		APBD
		Jumlah petani dan pendamping yang mengikuti PENAS TANI	Kab. Banjar	50 orang		APBD
3.27.7.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat	Kab. Banjar	100 orang	340.112.700	APBD
		Persentase penyuluh petanian dengan prestasi kinerja baik	Kab. Banjar	50 persen		APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kabupaten Banjar, provinsi maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar tahun 2022 merupakan pelaksanaan renstra tahun ke-lima. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

26. Dinas Peternakan dan Perkebunan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021. Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 menggambarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Banjar memasuki tahun pertama periode RPJMD tahun 2022-2026. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020, maka RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022- 2026 baru akan disusun pada awal tahun 2022. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan SIMDA, kini harus berganti menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kemendagri.

Rancangan Awal RKPD sebagai cikal bakal dokumen RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RKPD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
c. Penyusunan Rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan RKPD.

Dari keseluruhan tahapan penyusunan RKPD tersebut, merupakan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022. Tahapan persiapan telah dilakukan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya disusun rancangan awal RKPD ini untuk memberikan panduan kepada seluruh Perngkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai

koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintahdan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah

Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan didalam Renja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar didasarkan atas pertimbangan prioritas dan pagu indikatif.
c. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan dan total kebutuhan dana.
d. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Gambar 1 Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

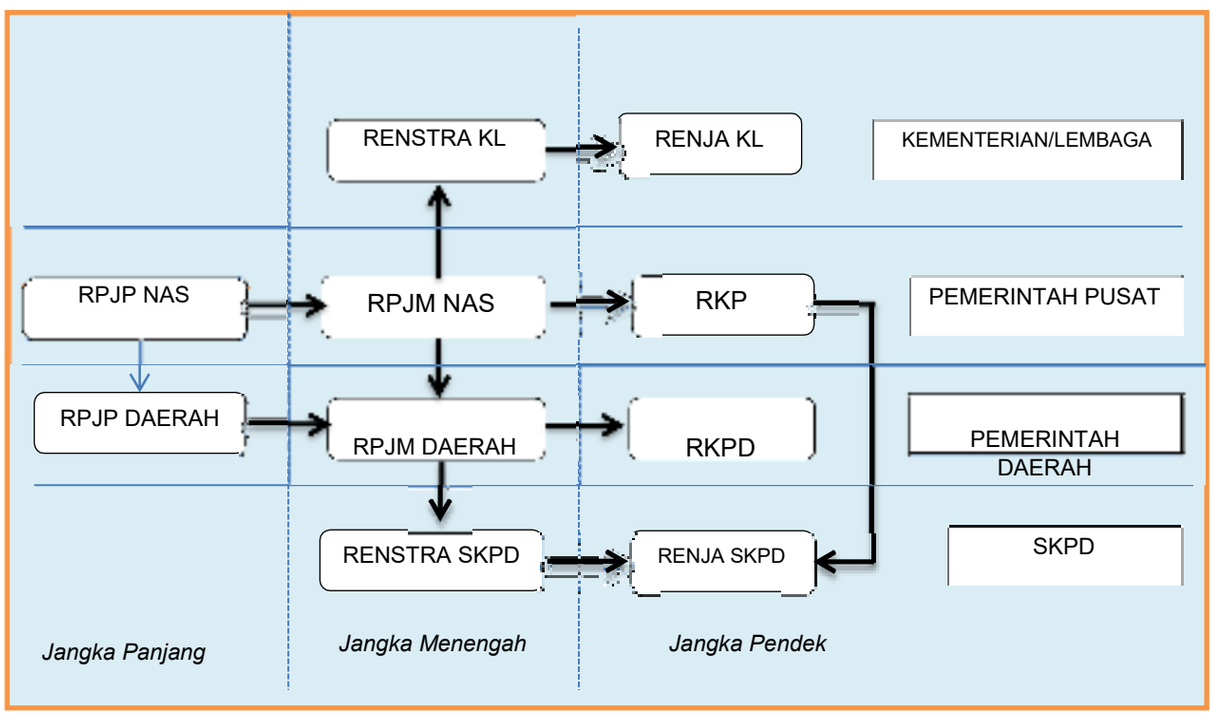

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4700);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022:

a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan peternakan dan perkebunan,
b. Sebagai pedoman/ acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabaupaten Banjar Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 bertujuan untuk :

a. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang bersifat strategis, prioritas berdasarkan potensi daerah dan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang akan dilaksanakanoleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
b. Membangun strategi yang akan menuntun Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar menuju sasaran yang diinginkan secara obyektif dan menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi pada masa mendatang.
c. Merumuskan rencana pendapatan dan belanja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
d. Merumuskan upaya tindaklanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) dan Pendaanan Dinas Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar menggambarkan sejumlah target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Organisasi dan Pendaanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar adalah sebagai

berikut :

a. Bab I Pendahuluan.

   Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja.

b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

   Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan akhir RKPD, penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

   Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rancangan Renja PD, Program dan Kegiatan.

d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

   Memuat Rencana Kerja, program dan kegiatan, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk tahun 2022.

e. Bab V Penutup

   Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DInas Peternakan dan Perkebunan

Pelaksanaan pembangunan peternakan dan perkebunan sampai dengan tahun 2020 masih diprioritaskan pada upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Peternakan dan perkebunan, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Propinsi dan APBN tetap mengacu pada upaya tersebut.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), maka perlu menyusun dan merumuskan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) mengakibatkan terdapat perubahan pada struktur organisasi yang berkonsekuensi terhadap perubahan tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian didalam pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022, diupayakan untuk dilakukan penyelarasan sebagaimana mestinya. Adapun hasil capaian program berdasarkan Rencana strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2021adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan KAbupaten Banjar Tahun 2022 terdiri dari 7 (tujuh) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp - dan sesuai dengan pagu definitif (DPA) sebesar Rp 21.418.495.318,-

Program/kegiatan/Sub kegiatan yang tertuang dalam Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Program dan Kegiatan pada Renja dan DPA Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											13,266,378,890	8,161,028,726
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											11,089,901,146	6,114,284,558
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											84,363,000	68,788,200
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersusunnya dokumen renstra dan renja / renja perubahan, dokumen RKA, DPA, RKA-P, DPPA	Tersusunnya Dokumen SKPD		100 Persen	100 Persen		18 Dokumen	100 Persen	100 Persen	64,742,000	47,756,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terlaksanany a konsultasi/k oordinasi/sin gkronisasi/e valuasi/moni toring	Tersusun nya Dokumen SKPD		100 P ersen	100 Pe rsen		1 Doku men	100 Pe rsen	100 P ersen	14,621,000	15,529,400
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terlaksanany a pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan	Tersusun nya Dokumen SKPD		100 P ersen	100 Pe rsen		4 Doku men	100 Pe rsen	100 P ersen	5,000,000	5,502,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,181,177,816	5,287,859,800
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersedianya gajih dan tunjangan ASN	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan		100 Persen	100 Persen		12 Bulan	100 persen	100 persen	9,204,831,916	4,264,957,000
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Honorarium dan dukungan reknis perkantoran	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan		100 Persen	100 Persen		12 bulan	100 persen	100 persen	970,040,000	1,009,040,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (CALK) dan audited laporan keuangan	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen		2 Dokumen	100 persen	100 persen	6,305,900	13,862,800
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan		100 Persen	100 Persen			100 persen	100 persen	0	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur		100 Persen	100 Persen			2 ok	2 ok	0	0
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											511,375,771	357,535,771

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor,alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Lancarnya administrasi perkantoran dan terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi		100 Persen	100 Persen		12 Bulan	100 Persen	100 Persen	20,367,771	20,367,771

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terikutinya rakor, ratek, konsultasi sosialisasi, sinkronisasi, apresiasi dan workshop	Lancarnya administrasi perkantoran dan terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi		100 Persen	100 Persen		1 Tahun	100 Persen	100 Persen	491,008,000	337,168,000
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											41,398,100	53,133,900

3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	pengadaan pemeliharaan tanaman, pengadaan alat pembersih, pengadaan alat pendingin, pengadaan komputer dan peralatan komputer, pengadaan alat ukur dan pengadaan mesin pompa air	Meningkatnya sarana dan prasarana bagi aparatur		100 Persen	100 Persen		13 Unit /paket	10 unit	10 unit	41,398,100	53,133,900
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											120,336,459	107,466,887

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Langganan internet, telpon, fax, air dan listrik	Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	100 Persen		12 Bulan	100 Persen	100 Persen	110,486,459	97,616,887
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas dan tamu	Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	100 Persen		430 ok	100 Persen	100 Persen	9,850,000	9,850,000
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											151,250,000	239,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor		100 Persen	100 Persen		12 bulan	100 persen	100 persen	131,500,000	94,750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpeliharnya peralatan dan mesin kantor lainnya	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor		100 Persen	100 Persen		12 bulan	100 persen	100 persen	14,750,000	14,750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor		100 Persen	100 Persen		3 kegiatan	100 persen	100 persen	5,000,000	130,000,000
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											207,231,500	120,150,300
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											72,340,700	45,453,300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase peningkatan produksi karet sit yang dihasilkan UPPB	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi	Peningkatan Produksi Karet Sheet		3,03 Persen	3,03 Persen		3 UPPB	3 Persen	3 Persen	33,288,200	18,700,800
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase peningkatan produksi karet sit yang dihasilkan UPPB	umlah Karet Sheet yang dihasilkan UPPB	Peningkatan Produksi Karet Sheet		3,03 Persen	3,03 Persen		7 UPPB	3 Persen	3 Persen	39,052,500	26,752,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											74,529,500	48,705,700
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak	Terbinanya pelaku usaha/kelompok usaha pengolahan hasil peternakan	Meningkatnya populasi ternak		2,00 Persen	2,00 Persen		4 Olahan	3.31 Persen	3.31 Persen	48,243,000	22,419,200
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak	Jumlah Kelahiran Ternak per Tahun	Meningkatnya populasi ternak		2,00 Persen	2,00 Persen		1210 ekor	3.31 Persen	3.31 Persen	26,286,500	26,286,500
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											60,361,300	25,991,300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak	Luas Areal HPT yang dikembangkan paertahun	Terpenuhinya ketersediaan HPT		2,00 Persen	2,00 Persen		2 Ha	2 Ha	2 Ha	60,361,300	25,991,300
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											1,495,832,744	1,475,825,468
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian											33,660,800	11,954,400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Persentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan	Luas Areal perkebunan yang dibina	Terlaksanya pengembangan dan replanting tanaman perkebunun		1,96 Persen	1,96 Persen		500 Ha	820 Ha	820 Ha	33,660,800	11,954,400
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian											1,462,171,944	1,463,871,068

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pertumbuhan produksi hasil peternakan (daging)	Terealisasi Jalan Produksi Pembangunan	terlaksananya pemotongan ternak yang dipotong RPH/RPU	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,54 Ton	1,54 Ton	3 Paket	3 Paket	126060 ekor	126060 ekor	900,000,000	900,000,000
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pertumbuhan produksi hasil peternakan (daging)	Jumlah ternak yang dipotong (RPH)	terlaksananya pemotongan ternak yang dipotong RPH/RPU		1,54 Ton	1,54 Ton		14732 ekor	126060 ekor	126060 ekor	562,171,944	563,871,068
							Jumlah ternak yang dipotong (RPU)						503000 ekor				
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											192,836,300	192,835,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota											192,836,300	192,835,900
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	"Persentase menurunnya angka kematian ternak : ternak besar "	Jumlah ternak yang ditangani (pengobatan dan vaksinasi ternak)	meningkatnya kesehatan ternak yang ditangani dan terawasinya hewan ke masyarakat		0,33 Persen	0,33 Persen		3123 ekor	100 persen	100 persen	114,966,300	114,965,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	4	2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase menurunnya angka kematian ternak : ternak besar "	Pengawasan hewan qurban, pemeriksaan sampel uji PCR, pemeriksaan sampel untuk uji cemaran mikroba, pemeriksaan sampel untuk uji residu antibiotik	meningkatnya kesehatan ternak yang ditangani dan terawasinya hewan ke masyarakat		0,33 Persen	0,33 Persen		4 kegiatan	100 persen	100 persen	77,870,000	77,870,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											33,849,300	11,204,600
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota											33,849,300	11,204,600
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertumbuhan produksi hasil peternakan (daging)	Luas areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT	Terkendalinya Areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari OPT		0	0		250 Ha	250 Ha	250 Ha	33,849,300	11,204,600
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											246,727,900	246,727,900
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											246,727,900	246,727,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan	Jumlah Wilayah / POKTAN Yang Di Identifikasi / CPCL (POKTAN) dan Pemetaan Wilayah	`jumlah Kelompok Tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan		2,00	2,00		45 Poktan	2 persen	2 persen	246,727,900	246,727,900
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan		`jumlah Kelompok Tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan		2,00	2,00			2 persen	2 persen	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA	DPA
											TOTAL	13,266,378,890	8,161,028,726

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran Renja tidak selaras dengan anggaran di DPA, untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.

Adapun tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra SKPD adalah tertuang dalam tabel berikut ini : (laporan triwulan III)

Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Skpd Tahun 2021

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**					**100**	**persen**	**6.114.284.558**	**0,25**	**1.228.783.694**	**0,25**	**1.610.550.118**	**0,25**	**1.124.311.481**	**0,75**	**3.963.645.293**	**0,75**	**0,75**	**3.963.645.293**	**16,51**	**14,41**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran					100	persen	68.788.200	0,25	2.668.800	0,25	18.104.500	0,25	18.847.700	0,75	39.621.000	1	0,75	104.853.000	10,95	2,90

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja / renja perubahan, dokumen RKA, DPA, RKA-P, DPPA	70	1.050.000.000	12	65.232.000	18	dokumen	47.756.000	3	2.668.800	4	14.564.000	4	8.768.400	11	26.001.200	61,11	23	91.233.200	32,86	8,69
	3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Terlaksananya konsultasi/ koordinasi/ sinkronisas					1	dokumen	15.529.400	0	0	0	2.490.500	0	7.079.300	0	9.569.800	0,00	0	9.569.800	0,00	0,00

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
														I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	i/evaluasi/ monitoring																			
	3	27	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan					4	dokumen 5.502.800	2	0	1	1.050.000	1,00	3.000.000	4	4.050.000	100,00	4	4.050.000	0,00	0,00

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2						3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
							Perkebunan																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								10,95		2,90	
Predikat Kinerja																								SR		SR	
2	3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran					100	person	5.287.859.800	0,25	1.060.459.277	0,25	1.435.848.231	0,25	1.008.591.918	0,75	3.504.899.426	1	0,75	696.255.295	0,00	6,43

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan					12	bulan	4.264.957.000	3	850.350.322	3	1.167.354.531	3	799.939.278	9	2.817.644.131	75,00	9	2.817.644.131	0,00	0,00
	3	27	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran					12	bulan	1.009.040.000	3	208.900.955	3	265.483.200	3	208.652.640	9	683.036.795	75,00	9	683.036.795	0,00	0,00

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) dan Audited Laporan Keuangan	5	68.500.000	2	9.000.000	2	dokumen	13.862.800	0	1.208.000	1	3.010.500	0	0	1	4.218.500	50,00	3	13.218.500	0,00	19,30
Rata-rata capaian kinerja (%)																									0,00	9,65
Predikat Kinerja																									SR	SR

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran					100	persen	357.535.771	0,25	99.574.165	0,25	99.258.430	0,25	41.097.000	0,75	239.929.595	1	0,75	320.769.425	35,00	16,10
	3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor,alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan	60	147.135.000	12	6.853.120	12	bulan	20.367.771	3	4.221.000	3	6.406.000	3,00	4.527.000	9	15.154.000	75,00	21	22.007.120	35,00	14,96

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
							pembersih kantor																				
	3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terikutinya rakor, ratek, konsultasi sosialisasi, sinkronisasi, apresiasi dan workshop	60	1.859.333.320	12	95.993.830	12	bulan	337.168.000	3	95.353.165	3	92.852.430	3,00	36.570.000	9	224.775.595	75,00	21	320.769.425	35,00	17,25

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
														I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									35,00	16,10
Predikat Kinerja																									SR	SR
4	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran					100	persen	53.133.900	0,25	20.248.863	0,25	16.085.909	0,25	4.771.636	0,75	41.106.408	1	0,75	108.506.408	23,81	32,15

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan pemeliharaan tanaman, pengadaan alat pembersih, pengadaan alat pendingin, pengadaan komputer dan peralatan komputer,	84	337.500.000	10	67.400.000	10	unit	53.133.900	5	20.248.863	4	16.085.909	1	4.771.636	10	41.106.408	100,00	20	108.506.408	23,81	32,15

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
														I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
							pengadaan alat ukur dan pengadaan mesin pompa air																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							23,81	32,15	
Predikat Kinerja																							SR	SR	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran					100	persen	107.466.887	0.25	21.801.603	0,25	22.374.775	0,25	20.398.360	#VALUE!	64.574.738	0	#VALUE!	203.848.738	17,66	20,00
	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Langganan internet, telpon, fax, air dan listrik	60	522.000.000	12	137.676.000	12	bulan	97.616.887	3	20.401.603	3	20.549.775	3,00	19.348.360	9	60.299.738	75,00	21	197.975.738	35,00	37,93

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						dan Listrik																					
	3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas dan tamu	97.053	282.650.000	84	1.598.000	430	ok	9.850.000	90	1.400.000	90	1.825.000	40	1.050.000	220	4.275.000	51,16	304	5.873.000	0,31	2,08
Rata-rata capaian kinerja (%)																										17,66	20,00
Predikat Kinerja																										SR	SR

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
6	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran					100	persen	239.500.000	0,25	24.030.986	0,25	18.878.273	0,25	30.604.867	0,75	73.514.126	1	0,75	187.274.126	11,67	8,88

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	60	737.489.000	12	119.670.000	12	bulan	94.750.000	3	22.905.986	3	15.293.273	3,00	29.404.867	9	67.604.126	75,00	21	187.274.126	35,00	25,39

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						an Dinas Jabatan																					
	3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharnya peralatan kantor	60	468.573.460	0	0	12	bulan	14.750.000	3	1.125.000	3	3.585.000	3,00	1.200.000	0	5.910.000	0,00	0	5.910.000	0,00	1,26

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna	Terpeliharnya bangunan gedung kantor	5	468.573.480	0	0	12	bulan	130.000.000	3	0	3	0	3,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
														I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						n Lainnya																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								11,67	8,88
Predikat Kinerja																								SR	SR
7	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGE**	**Persentase Peningkatan Produksi Karet Sit yang**					**3,03**	**persen**	**120.150.300**	**0,00**	**14.448.241**	**0,00**	**35.518.707**	**1,5**	**11.423.800**	**1,5**	**61.390.748**	**50**	**2**	**61.390.748**	**29,15**	**37,44**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						MBANGAN SARANA PERTANIAN	**Dihasilkan UPPB**																				
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Karet Sheet					3	person	45.453.300	0	7.803.241	0	6.929.455	1,5	494.000	1,5	15.226.696	50	1,50	15.226.696	29,61	3,58

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan	Jumlah kelompok UPPB yang difasilitasi	33	596.873.900	7	19.665.000	7	UPPB	18.700.800	0	3.803.241	4	665.455	2	494.000	6	4.962.696	85,71	13	24.627.696	39,39	4,13

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Spesifik Lokasi																					
	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Jumlah Karet Sheet yang dihasilkan UPPB	260	480.746.880	51,53	4.280.000	6.355	ton	26.752.500	0	4.000.000	0	6.264.000	0,00	0	0	10.264.000	0,00	51,53	14.544.000	19,82	3,03

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Pertanian																					
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organis	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Ternak					2	persen	48.705.700	0	4.875.000	0	7.393.400	1	8.724.800	1	20.993.200	50	1	20.993.200	17,84	6,34

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						me Kewenangan Kabupaten/ Kota																					
	3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/	Terbinanya pelaku usaha/kelompok usaha pengolahan hasil peternakan	15	434.318.000	1	14.405.700	4	produk/ olahan	22.419.200	0	2.960.000	2	5.025.000	0	2.720.000	2	10.705.000	50,00	3	25.110.700	20,00	5,78

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Tanaman																					
	3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Kelahiran Ternak per Tahun	10.100	1.036.424.680	1.210	61.160.000	1.250	ekor	26.286.500	0	1.915.000	250	2.368.400	123	6.004.800	373	10.288.200	29,84	1.583	71.448.200	15,67	6,89
Rata-rata capaian kinerja (%)																									23,72	4,96
Predikat Kinerja																									SR	SR

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
8	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Ternak					2	persen	25.991.300	0	1.770.000	1	21.195.852	1	2.205.000	2	25.170.852	100	2,00	30.170.852	40,00	27,53

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Daerah Kabupaten/ Kota																					
	3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan Benih/ Bibit	Tersedianya ketersediaan HPT	10	109.600.000	2	5.000.000	2	Ha	25.991.300	0	1.770.000	1	21.195.852	1	2.205.000	2	25.170.852	100,00	4	30.170.852	40,00	27,53

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Hijauan Pakan Ternak																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								40,00	27,53		
Predikat Kinerja																								SR	SR		
9	**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan**					**1,96**	**person**	**1.475.825.468**	**0,00**	**145.521.619**	**0,00**	**160.948.556**	**1**	**347.979.126**	**1**	**654.449.301**	**51**	**1**	**654.449.301**	**28,62**	**4,44**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						PRASARANA PERTANIAN																					
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan					2	person	11.954.400	0	0	0	900.000	1	3.109.000	1	4.009.000	51	1	4.009.000	28,62	4,44

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Terlaksanya pengembangan dan replanting tanaman perkebunan	1.747	862.427.499	500	34.319.000	820	Ha	11.954.400	0	0	0	900.000	0	3.109.000	0	4.009.000	0,00	500	38.328.000	28,62	4,44

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
														I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									28,62	4,44
Predikat Kinerja																									SR	SR
10	3	27	03	2.02		Pembangunan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan (daging)					1,54	ton	1.463.871.068	0,00	145.521.619	0,51	160.048.556	0,51	344.870.126	1,02	650.440.301	66	1,02	229.800.000	11,54	20,46
	3	27	03	2.02	03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Terealisasi Jalan Produksi Perkebunan	0	0	0	0	3	paket	900.000.000	0	0	0	4.500.000	1	225.300.000	1	229.800.000	33,33	1	229.800.000	0,00	0,00

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Jalan Usaha Tani (DAK)																					
	3	27	03	2.02	07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	terlaksananya pemotongan ternak yang dipotong RPH (ternak besar)	14.732	1.971.019.600	2.018	386.012.720	3.060	ekor	563.871.068	435	145.521.619	543	155.548.556	403	119.570.126	1.381	420.640.301	45,13	3.399	806.653.021	23,07	40,93

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
										I		II		III							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
				terlaksananya pemotongan ternak yang dipotong RPU (ternak kecil)	503.000		90.074		123.000		0		46.008		21.987		67.995						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			11,54	20,46	
Predikat Kinerja																			SR	SR	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
11	**3**	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Menurunnya Angka Kematian Ternak Besar**					**0,33**	**persen**	**192.835.900**	**0,00**	**81.660.705**	**0,11**	**29.446.500**	**0,11**	**49.282.300**	**0,22**	**160.389.505**	**67**	**0**	**160.389.505**	**54,36**	**22,95**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Persentae Menurunnya Angka Kematiatan Tenak Besar					0,33	persen	192.835.900	0	81.660.705	0,11	29.446.500	0,11	49.282.300	0,22	160.389.505	67	0	160.389.505	54,36	22,95

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Daerah Kabupaten/ Kota																					
	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah Ternak yang ditangani (pengobatan dan	17.700	818.519.280	3.123	79.134.955	6,050	ekor	114.965.900	0	71.285.705	4.718	20.146.500	782,00	13.002.300	5.500	104.434.505	90.909	8.623	183.569.460	48,72	22,43

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
														I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						dan Zoonosis	Vaksinasi Ternak)																			
	3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Menurunnya Angka Kematian ternak Besar dan ternak Unggas : 0,33 % (ternak besar) <	15	411.209.600	5	40.580.000	5	kegiatan 77.870.000	0	10.375.000	2	9.300.000	2	36.280.000	4	55.955.000	80,00	9	96.535.000	60,00	23,48

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
								5,70 % (tenak unggas)																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								54,36	22,95	
Predikat Kinerja																								R	SR	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
11	**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Luas Areal Tanaman Perkebunan yang Berhasil Dikendalikan**					**250**	**Ha**	**11.204.600**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**2.176.700**	**0**	**2.176.700**	**0**	**0**	**15.706.700**	**7,89**	**3,89**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Areal Tanaman Perkebunan yang Dikendalikan OPT					250	Ha	11.204.600	0	0	0	0	0	2.176.700	0	2.176.700	0	250	15.706.700	7,89	3,89

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari OPT	950	404.001.000	250	13.530.000	250	Ha	11.204.600	0	0	0	0	0	2.176.700	0	2.176.700	0,00	250	15.706.700	7,89	3,89

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
														I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									7,89	3,89
Predikat Kinerja																									SR	SR
11	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelompok Tani yang Teridentifikasi dan Difasilitasi Bantuan**					**100**	**persen**	**246.727.900**	**0,25**	**54.410.198**	**0,25**	**73.249.080**	**0,25**	**54.784.680**	**0,75**	**182.443.958**	**0,75**	**0,75**	**182.443.958**	**24,68**	**24,54**
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan	Jumlah Kelompok Tani yang teridentifikasi dan					45	poktan	246.727.900	0	54.410.198	25	73.249.080	10	54.784.680	35	182.443.958	77,78	35	428.040.918	24,68	24,54

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
															I		II		III							
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Pertanian	difasilitasi bantuan																				
	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Wilayah / POKTAN Yang Di Identifikasi / CPCL (POKTAN) dan Pemetaan Wilayah	62	1.744.081.000	16	245.596.960	45	pokta n	246.727.900	0	54.410.198	25	73.249.080	10	54.784.680	35	182.443.958	77,78	51	428.040.918	24,68	24,54

No	Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
											I		II		III							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						24,68	24,54
Predikat Kinerja																						SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**8.161.028.726**								**5.024.495.505**					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																						**26,87**	**17,95**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																						SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan yang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja dari masing-masing Bidang																							

No	Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Akhir Tahun 2020 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)	
											I		II		III							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan dikarenakan pergeseran anggaran/ revisi kode rekening belanja																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Perlunya penyesuaian satuan dalam menentukan indikator program/ kegiatan																							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), maka perlu menyusun dan merumuskan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan di bidang peternakan dan perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang peternakan dan perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
2. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Perkebunan;
4. Pemberian pelayanan umum di bidang peternakan dan perkebunan;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;

Disamping menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat Daerah Kabupaten, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar juga melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah provinsi yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan serta dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan
2. Sekretariat yang terdiri dari :
   - Subbag Umum dan Kepegawaian;
   - Subbag Perencanaan;
   - Subbag Keuangan
3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri dari :
   - Seksi Perbibitan dan Produksi;
   - Seksi Kesehatan Hewan;
   - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran
4. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
   - Seksi Produksi Perkebunan ;
   - Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
   - Seksi Pasca Panen Perkebunan.
5. Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan, terdiri dari :
   - Kepala Seksi Pengembangan dan Perwilayahan Peternakan
   - Kepala Seksi Pengembangan dan Perwilayahan Perkebunan
   - Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
6. Unit Pelaksana Teknis RPH Martapura
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan

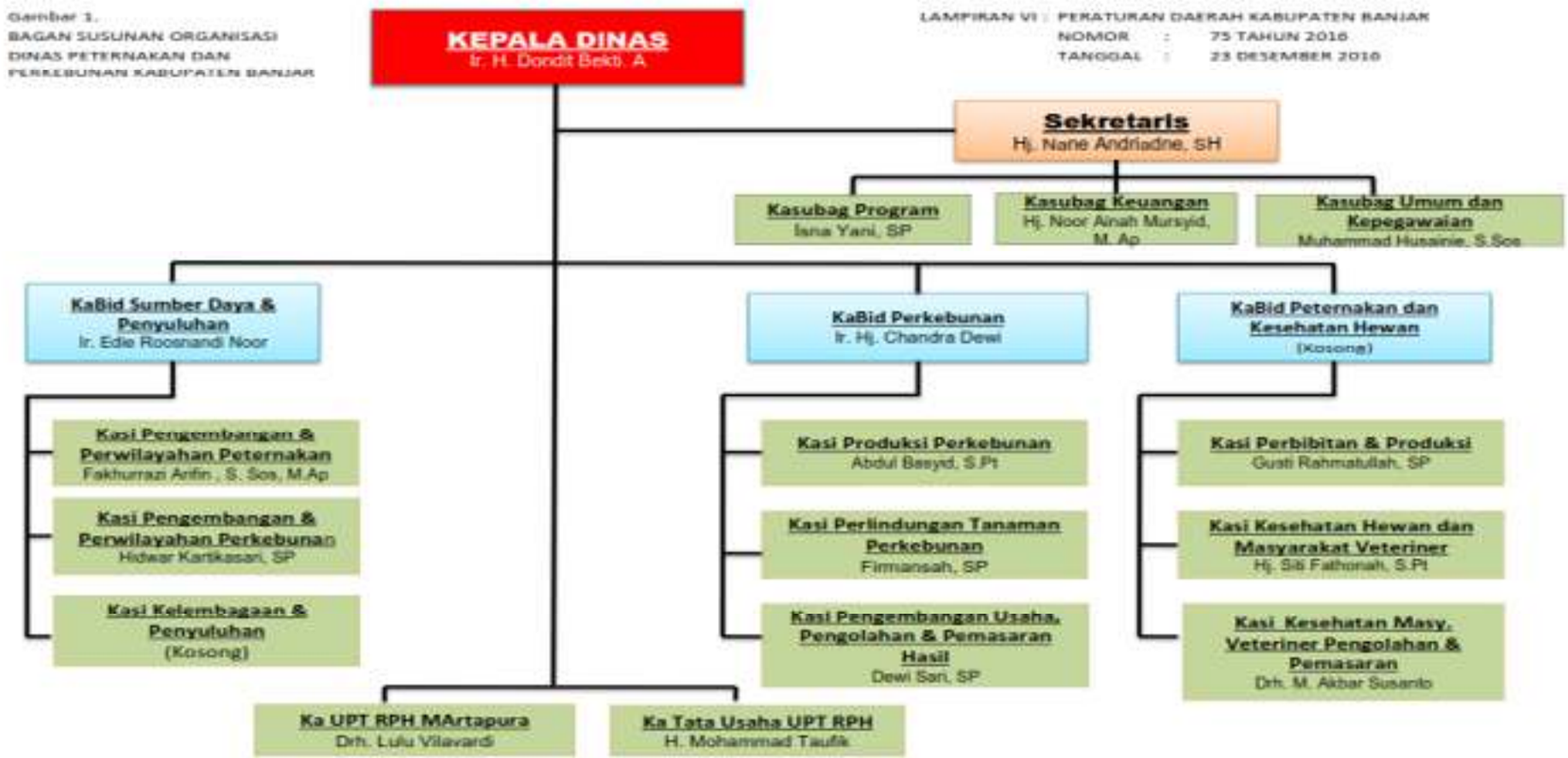

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut :

Sumberdaya Aparatur

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat tergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada didalamnya.

Sumber Daya Manusia di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar terdiri dari aparatur yang berdinas di Kantor dan yang bertugas di lapangan. Aparatur yang bertugas di lapangan terdiri dari petugas PELD, inseminator dan petugas teknis kesehatan hewan.

Gambaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan menurut indikator kinerja yang dicapai selama lima tahun kebelakang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan pada kurun lima tahun yang akan datang.

Sebagai salah satu institusi pelaksana pembangunan peternakan dan perkebunan harus dapat merumuskan kebijakan, menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan pembangunan Pemerintah Daerah selama lima tahun kedepan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabpaten Banjar

Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Produktivitas komoditas perkebunan masih rendah
b. Mutu hasil perkebunan masih rendah (kwalitas asalan)
c. Harga jual yang cenderung fluktuatif serta kecendrungan budidaya monokultur (belum semua petani pekebun melaksanakan pola *mix farming*/pertanian terpadu)
d. Minimnya akses informasi, tehnologi dan pemodalan.
e. Lemahnya akses pasar serta *bargaining position*/nilai tukar petani.
f. Belum berkembangnya kelembagaan tani yang mandiri, modern dan berdaya saing.
g. Minimnya kapasitas sumberdaya manusia perkebunan.
h. Panjangnya mata rantai pemasaran produk.
i. Masih kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, jalan usaha tani, drainase, dan embung.

Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang peternakan adalah sebagai berikut :

a. Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan merupakan perubahan dari arah kebijakan dari program percepatan swasembada daging. Fokus penanganan program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan adalah kesejahteraan peternak, komoditas sapi/kerbau, komoditas ternak lainnya dan peningkatan daya saing peternakan.
b. Disamping itu, pengembangan usaha peternakan juga sangat diminati sebagai alternatif usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disamping usaha pertanian lainnya.

c. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif.

Angka Populasi ternak untuk semua jenis ternak sebagai *live stock* pada tingkat nasional maupun regional perlu dipertahankan dan ditingkatkan.Pemotongan dan pengeluaran ternak tersebut termasuk betina-betina produktif yang semestinya dipertahankan keberadaannya untuk menjamin pertumbuhan populasi ternak.

d. Masih munculnya kasus Flu Burung (*High Patogenic Avian Influenza*/HPAI). Adanya kejadian wabah penyakit ternak (flu burung) dan kekhawatiran penularannya terhadap manusia di tingkat internasional, nasional dan daerah sangat memerlukan tindakan antisipasi yang memadai.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik yang terkait dengan aktifitas budidaya *(on farm)* maupun aktifitas panen dan pasca panen *(off farm)*. Identifikasi permasalahan subsektor perkebunan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas komoditas perkebunan belum optimal dan belum sesuai dengan potensi yang seharusnya.
2. Mutu hasil perkebunan masih rendah (kualitas asalan) dan nilai tambah produk belum berkembang
3. Budidaya tanaman perkebunan sebagian besar belum ramah lingkungan, belum menganut azas konservasi dan pola tanam komoditas kopi belum mengarah ke pola mix farming.
4. Harga jual yang cenderung fluktuatif serta masih minimnya akses pasar serta bergaining position petani
5. Minimnya akses informasi, teknologi, dan permodalan.
6. Belum berkembangnya kelembagaan kelompok tani yang mandiri, modern dan berdaya saing.
7. Minimnya kapasitas sumber daya manusia petugas maupun petani pekebun.
8. Mata rantai penjualan produk perkebunan sebagaian besar masih panjang.
9. Tingginya serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan.
10. Masih lemahnya sistem perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan.
11. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana lahan dan air.

Identifikasi permasalahan subsektor peternakan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ternak yang utama adalah melalui peningkatan angka kelahiran ternak. Rendahnya angka kelahiran ternak menyebabkan pertumbuhan ternak belum optimal.
2. Kelahiran ternak selain melalui kawin alam juga melalui Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi buatan diyujukan untuk meningkatkan produktivitas serta mutu genetik ternak. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) masih terkendala dengan luasnya wilayah pelayanan karena ternak yang tersebar sedangkan jumlah petugas IB (Inseminator) masih terbatas.
3. Pertumbuhan ternak yang tinggi harus selaras dengan pelayanan kesehatannya.

Kondisi yang diharapkan adalah peningkatan status kesehatan ternak yang belum cukup baik dengan masih tingginya angka kesakitan dan kematian ternak.

4. Untuk menjamin daging dan telur yang dipasarkan merupakan produk yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Fungsi Rumah Potong Hewan belum optimal karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemotongan ternak di RPH masih rendah.

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan bidang peternakan dan perkebunan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kesejahteraan petani khususnya petani peternak dan pekebun
- Meningkatnya kontribusi perekonomian dan nilai tambah produk pertanian khususnya peternak dan pekebun
- Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang peternakan dan perkebunan yang berkelanjutan dengan system pertanian yang ramah lingkungan
- Mengembangkan komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan memiliki nilai tambah
- Minat generasi muda terhadap pertanian relatif rendah

- Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita penduduk
- Tingkat kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian yang belum memadai
- Berkembangnya penyakit menular dari hewan (zoonosis)
- Keterbatasan modal menimbulkan ketidakmampuan menerapkan teknologi, disamping tuntutan perkembangan dan terobosan lebih cepat.
- Adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi dan manajemen mutu terpadu.
- Keterbatasan lahan pekarangan
- Kurangnya modal usaha dibidang agribisnis
- Anomali cuaca yang disebabkan oleh perubahan iklim global sehingga menyebabkan ketidakpastian pasokan produk pangan dari daerah-daerah sentra
- Peningkatan arus urbanisasi ternaga kerja berkemampuan terbatas dari desa berlatar belakang pertanian

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar lima tahun ke depan antara lain:

- Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mendukung bagi pengembangan usaha peternakan dan perkebunan di Kabupaten Banjar;
- Semakin berkembangnya usaha budidaya ternak dan perkebunan sebagai sumber pendapatan dan pengungkit peningkatan perekonomian daerah;
- Meningkatnya kebutuhan produk asal ternak dan perkebunan yang berkualitas
- Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak dan perkebunan seiring dengan pertambahan penduduk;
- Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan dan perkebunan

- Perubahan pola makan dari kebutuhan nabati ke protein hewani.
- Adanya dukungan dari pihak luar baik itu swasta maupun pemerintah
- Tingginya animo masyarakat-petani peternakn dan pekebun untuk meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan teknologi dan penggunaan peralatan (sarana) pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani;
- Tersedianya dana pembangunan pertanian yang cukup memadai yang secara otonom dapat direncanakan dan diarahkan sesuai kebutuhan lokal;
- Adanya pengelolaan sumberdaya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan tampungnya
- Mampu memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta lingkungan secara berlanjut.
- Masyarakat yang makin kritis menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan bagi aparat Dinas;
- Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.
- Adanya dukungan kelembagaan Pemerintah yang semakin baik dengan produk regulasi yang mendukung bagi perkembangan peternakan di Kabupaten Banjar

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022, menunjukan bahwa RKPD telah selaras dan mengakomodir rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Rancangan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022, yaitu 7 (tujuh) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan dengan besaran pagu dana indikatif sesuai dengan yang diusulkan, Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar adalah sebagai mana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3,728,233,000
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	2,547,833,000
						IKM Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	197,622,930
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja / renja perubahan, dokumen RKA, DPA, RKA-P, DPPA				18 Dokumen	94,865,800
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya konsultasi/koordinasi/singkronisasi/evaluasi/monitoring				1 Dokumen	90,107,130
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan				4 Dokumen	12,650,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Honorarium dan dukungan admintrasi teknis perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,066,305,900
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran				12 Bulan	1,047,440,000
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) dan Audited Laporan Keuangan				2 Dokumen	18,865,900
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						120,000,000
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur				8 ok	120,000,000
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi perkantoran yang baik dan terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	482,817,771
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor,alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor				12 Bulan	20,367,771
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terikutinya rakor, ratek, konsultasi sosialisasi, sinkronisasi, apresiasi dan workshop				100 Persen	462,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang perlengkapan kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	125,949,096
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan pemeliharaan tanaman, pengadaan alat pembersih, pengadaan alat pendingin, pengadaan komputer dan peralatan komputer, pengadaan alat ukur dan pengadaan mesin pompa air				10 Paket	125,949,096
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Langganan internet, telpon fax, air , listrik dan Penyediaan alat tulis kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	120,336,459
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan internet, telpon, fax, air dan listrik				12 Bulan	110,486,459
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas dan tamu				0 ok	9,850,000
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	434,800,844
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional				12 Bulan	176,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharnya peralatan kantor				12 Bulan	83,300,844
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor				12 Bulan	175,000,000
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	persen		persen	1,00 persen	260,400,000
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah saran pertanian yang diawasi	Unit		Unit	20 Unit	135,400,000
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						19,200,000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi				10 unit	116,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
						Jumlah UPPB yang diregister				2 Unit	
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase / jumlah kelahiran ternak besar	Persen		Persen	2.5 Persen	50,000,000
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Tercapainya target kebuntingan				2.5 Persen	50,000,000
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan HPT yang dikembangkan	Ha		Ha	1 Ha	75,000,000
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah luas HPT yang dikembangkan				1 Ha	75,000,000
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						0
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						0
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						0
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	persen		persen	1,00% persen	430,000,000
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya kegiatan ternak / hewan yang ditangani dalam pengobatan dan vaksinasi ternak	Tahun		Tahun	1 Tahun	150,000,000
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksanya kegiatan pengobatan dan vaksianasi ternak				2.5 Persen	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						140,000,000
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan						140,000,000
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tercapainya pengawasan hewan dan kesehatan hewan masyarakat veteriner	Tahun		Tahun	1 Tahun	140,000,000
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Telaksananya kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan				6 Kegiatan	50,000,000
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya kesehatan hewan dan produk hewan				6 Kegiatan	55,000,000
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terperiksanya sampel / produk asal hewan				100 Sampel	35,000,000
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN	Capaian kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian	persen		persen	6,70 persen	70,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
					PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Lahan Pertanian / Perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT dan Bencana Alam	Ha		Ha	250 Ha	70,000,000
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT				250 Ha	70,000,000
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan						0
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Capaian kinerja perizinan usaha pertanian				0	420,000,000
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahan yang dibina dan diawasi	Perusahaan		Perusahaan	5 Perusahaan	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										Target 2022	Pagu Indikatif
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Perusahaan yang dibina				5 Perusahaan	20,000,000
3	27	6	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya pelaksanaan administrasi penatausahaan RPH dan RPU	Bulan		Bulan	12 Bulan	400,000,000
						Tertibnya administrasi penatausahaan RPH dan RPU	bulan		bulan	12 bulan	
3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	RPH				3050 ekor	400,000,000
						RPU				125000 ekor	
						Terlaksananya pemotongan Ternak Ruminansia dan unggas yang dipotong				0 Ekor	
TOTAL											3,728,233,000

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan merupakan analisis dan penelaahan Usulan pemangku kepentingan maupun Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Bidang Peternakan dan Perkebunan dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan se- Kabupaten Banjar.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Peternakan dan Perkebunan.

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 disajikan pada **Tabel** sebagai berikut :

Tabel 4 Usulan Program Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**3,728,233,000**
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,547,833,000**
3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**197,622,930**
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja / renja perubahan, dokumen RKA, DPA, RKA-P, DPPA	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Dokumen	100 Persen	94,865,800
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya konsultasi/koordinasi/singkronisasi/evaluasi/monitoring	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	90,107,130

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	12,650,000
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,066,305,900**
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	meningkatnya pelayanan dan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	1,047,440,000
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) dan Audited Laporan Keuangan	meningkatnya pelayanan dan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	18,865,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**120,000,000**
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 ok		120,000,000
3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**482,817,771**
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor,alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik dan terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	20,367,771

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terikutinya rakor, ratek, konsultasi sosialisasi, sinkronisasi, apresiasi dan workshop	Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik dan terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	462,450,000
3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**125,949,096**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah	pengadaan pemeliharaan tanaman, pengadaan alat pembersih, pengadaan alat pendingin, pengadaan komputer dan peralatan komputer, pengadaan alat ukur dan pengadaan mesin pompa air	Tersedianya barang perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	125,949,096
3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,336,459**
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Perangkat Daerah	Langganan internet, telpon, fax, air dan listrik	Lancarnya kegiatan adminitrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	110,486,459

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas dan tamu	Lancarnya kegiatan adminitrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 ok	100 Persen	9,850,000
3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**434,800,844**
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	176,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharnya peralatan kantor	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	83,300,844
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	175,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**260,400,000**
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**135,400,000**
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian		terlaksanya pengawasan pengguna sarana pertanian		1,00 persen		100 Persen	19,200,000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi	terlaksanya pengawasan pengguna sarana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	10 unit	100 Persen	116,200,000
							Jumlah UPPB yang diregister				2 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**50,000,000**
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Tercapainya target kebuntingan	Terlaksananya ternak besar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	2.5 Persen	100 Persen	50,000,000
3	**27**	**2**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**75,000,000**
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah luas HPT yang dikembangkan	Terlaksanya luasan HPT yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	1 Ha	100 Persen	75,000,000
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**0**
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								0
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								0
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**430,000,000**
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**150,000,000**
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan	Terlaksanya kegiatan pengobatan dan vaksianasi ternak	Persentase meningkatnya status kesehatan ternak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	2.5 Persen	100 Persen	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						masyarakat veteriner							
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**140,000,000**
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase terlaksanya pemotongan ternak besar dan unggas		1,00% persen		100 Persen	140,000,000
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**140,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Telaksananya kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	6 Kegiatan	100 Persen	50,000,000
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terawasinya kesehatan hewan dan produk hewan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	6 Kegiatan	100 Persen	55,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terperiksanya sampel / produk asal hewan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	100 Sampel	100 Persen	35,000,000
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**70,000,000**
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**70,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Capaian kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian	Luas areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT	Terkendaliny a areal lahan pertanian / perkebunan yang berhasil di kendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	6,70 persen	250 Ha	100 Perse n	70,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Capaian kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian		Terkendalinya areal lahan pertanian / perkebunan yang berhasil di kendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,70 persen		100 Persen	0
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**420,000,000**
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**20,000,000**
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Capaian kinerja perizinan usaha pertanian	Perusahaan yang dibina	Persentase perusahaan yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata	0	5 Perusahaan	100 Persen	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
									n, Semua Kelurahan				
3	**27**	**6**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**								**400,000,000**
3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Capaian kinerja perizinan usaha pertanian	RPH	Tercapainya pelaksanaan administrasi penatausahaan RPH dan RPU	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3050 ekor	100 Persen	400,000,000
							RPU				125000 ekor		
							Terlaksananya pemotongan Ternak Ruminansia dan unggas yang dipotong				0 Ekor		
TOTAL													**3,728,233,000**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian.

Selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja "NAWACITA" mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi:

(1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging;
(2) peningkatan diversifikasi pangan;
(3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
(4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
(5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan
(6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya:

(1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
(2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian;
(3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit;
(4) penguatan kelembagaan petani;
(5) pengembangan dan penguatan pembiayaan;
(6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan
(7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong",*** maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiridan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ditetapkan perangkat daerah merupakan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perkebunan. Tujuan merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukan arah pogram secara jelas. Indikator kinerja tujuan pada hakekatnya merupakan *benefit* (manfaat), dari kumpulan sasaran. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan maka digunakan Pengukuran Kinerja yang berlaku di lingkungan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujdukan visi dan misi RPJMD, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak
2) Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan
3) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan perkebunan
4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan dan sumberdaya aparatur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya populasi dan produksi ternak
2) Menurunnya kematian ternak
3) Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman perkebunan
4) Terkendalinya serangan OPT dan Gangguan Usaha Perkebunan.
5) Meningkatnya sumberdaya penyuluhan dan kelembagaan
6) Meningkatnya mutu olahan hasil peternakan dan perkebunan

7) Meningkatnya Kinerja dan sumberdaya aparatur

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Agar tujuan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar tercapai, diperlukan adanya tindakan nyata berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar. Untuk tahun 2022 kegiatan yang diusulkan meliputi 7 Program, 13 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
   a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
      - Sub Kegiatan Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
   a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi
      - Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
   b. Kegiatan Pengelolaan SumberDaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
   c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
      - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
   a. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
      - Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
      - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
      - Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
   b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pengawasan dan Penerapan Teknis untuk Pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan
   c. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zonosis

4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah/kota
   - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, fasilitasi pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
   - Sub Kegiatan Penata Usahaan Perbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
   a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
      - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tabel 5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**3,728,233,000**
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,547,833,000**
3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**197,622,930**
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja / renja perubahan, dokumen RKA, DPA, RKA-P, DPPA	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Dokumen	100 Persen	94,865,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya konsultasi/koordinasi/singkronisasi/evaluasi/monitoring	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	90,107,130
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	12,650,000
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,066,305,900**
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	meningkatnya pelayanan dan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	1,047,440,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) dan Audited Laporan Keuangan	meningkatnya pelayanan dan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	18,865,900
3	**27**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**120,000,000**
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 ok		120,000,000
3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**482,817,771**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor,alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik dan terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	20,367,771
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terikutinya rakor, ratek, konsultasi sosialisasi, sinkronisasi, apresiasi dan workshop	Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik dan terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	462,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**125,949,096**
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah	pengadaan pemeliharaan tanaman, pengadaan alat pembersih, pengadaan alat pendingin, pengadaan komputer dan peralatan komputer, pengadaan alat ukur dan pengadaan mesin pompa air	Tersedianya barang perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	125,949,096
3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,336,459**
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Perangkat Daerah	Langganan internet, telpon, fax, air dan listrik	Lancarnya kegiatan adminitrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	110,486,459

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas dan tamu	Lancarnya kegiatan adminitrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 ok	100 Persen	9,850,000
3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**434,800,844**
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	176,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharnya peralatan kantor	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	83,300,844
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	175,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**260,400,000**
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**135,400,000**
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian		terlaksanya pengawasan pengguna sarana pertanian		1,00 persen		100 Persen	19,200,000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi	terlaksanya pengawasan pengguna sarana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	10 unit	100 Persen	116,200,000
							Jumlah UPPB yang diregister				2 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**50,000,000**
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Tercapainya target kebuntingan	Terlaksananya ternak besar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	2.5 Persen	100 Persen	50,000,000
3	**27**	**2**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**75,000,000**
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah luas HPT yang dikembangkan	Terlaksanya luasan HPT yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	1 Ha	100 Persen	75,000,000
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**0**
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								0
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								0
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**430,000,000**
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**150,000,000**
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan	Terlaksanya kegiatan pengobatan dan vaksianasi ternak	Persentase meningkatnya status kesehatan ternak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	2.5 Persen	100 Persen	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						masyarakat veteriner							
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**140,000,000**
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase terlaksanya pemotongan ternak besar dan unggas		1,00% persen		100 Persen	140,000,000
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**140,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Telaksananya kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	6 Kegiatan	100 Persen	50,000,000
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terawasinya kesehatan hewan dan produk hewan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	6 Kegiatan	100 Persen	55,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terperiksanya sampel / produk asal hewan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	100 Sampel	100 Persen	35,000,000
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**70,000,000**
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**70,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Capaian kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian	Luas areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT	Terkendaliny a areal lahan pertanian / perkebunan yang berhasil di kendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	6,70 persen	250 Ha	100 Perse n	70,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Capaian kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian		Terkendaliny a areal lahan pertanian / perkebunan yang berhasil di kendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	6,70 persen		100 Perse n	0
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**420,000,000**
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**20,000,000**
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Capaian kinerja perizinan usaha pertanian	Perusahaan yang dibina	Persentase perusahaan yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata	0	5 Perusaha an	100 Perse n	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
									n, Semua Kelurahan				
3	**27**	**6**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**								**400,000,000**
3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Capaian kinerja perizinan usaha pertanian	RPH	Tercapainya pelaksanaan administrasi penatausahaan RPH dan RPU	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3050 ekor	100 Persen	400,000,000
							RPU				125000 ekor		
							Terlaksananya pemotongan Ternak Ruminansia dan unggas yang dipotong				0 Ekor		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
TOTAL													3,728,233,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6 Rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**3,728,233,000**
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,547,833,000**
3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**197,622,930**
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja / renja perubahan, dokumen RKA, DPA, RKA-P, DPPA	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Dokumen	100 Persen	94,865,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya konsultasi/koordinasi/singkronisasi/evaluasi/monitoring	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	90,107,130
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan	Tersedianya Dokumen SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	12,650,000
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,066,305,900**
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	meningkatnya pelayanan dan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	1,047,440,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) dan Audited Laporan Keuangan	meningkatnya pelayanan dan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	18,865,900
3	**27**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**120,000,000**
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 ok		120,000,000
3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**482,817,771**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor,alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik dan terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	20,367,771
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terikutinya rakor, ratek, konsultasi sosialisasi, sinkronisasi, apresiasi dan workshop	Meningkatnya administrasi perkantoran yang baik dan terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	462,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**125,949,096**
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah	pengadaan pemeliharaan tanaman, pengadaan alat pembersih, pengadaan alat pendingin, pengadaan komputer dan peralatan komputer, pengadaan alat ukur dan pengadaan mesin pompa air	Tersedianya barang perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Paket	100 Persen	125,949,096
3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,336,459**
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Perangkat Daerah	Langganan internet, telpon, fax, air dan listrik	Lancarnya kegiatan adminitrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	110,486,459

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas dan tamu	Lancarnya kegiatan adminitrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 ok	100 Persen	9,850,000
3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**434,800,844**
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	176,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharnya peralatan kantor	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	83,300,844
3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Perangkat Daerah	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasara bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	175,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**260,400,000**
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**135,400,000**
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian		terlaksanya pengawasan pengguna sarana pertanian		1,00 persen		100 Persen	19,200,000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi	terlaksanya pengawasan pengguna sarana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	10 unit	100 Persen	116,200,000
							Jumlah UPPB yang diregister				2 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**50,000,000**
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Tercapainya target kebuntingan	Terlaksananya ternak besar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	2.5 Persen	100 Persen	50,000,000
3	**27**	**2**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**75,000,000**
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Capaian kinerja tersedia dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah luas HPT yang dikembangkan	Terlaksanya luasan HPT yang dikembangkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00 persen	1 Ha	100 Persen	75,000,000
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**0**
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								0
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								0
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**430,000,000**
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**150,000,000**
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan	Terlaksanya kegiatan pengobatan dan vaksianasi ternak	Persentase meningkatnya status kesehatan ternak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	2.5 Persen	100 Persen	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						masyarakat veteriner							
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**140,000,000**
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase terlaksanya pemotongan ternak besar dan unggas		1,00% persen		100 Persen	140,000,000
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**140,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Telaksananya kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	6 Kegiatan	100 Persen	50,000,000
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terawasinya kesehatan hewan dan produk hewan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	6 Kegiatan	100 Persen	55,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengendalian kesehatan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terperiksanya sampel / produk asal hewan	Terpantaunya keamanan produk asal ternak / hewan dan kesehatan masyarkat veteriner	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00% persen	100 Sampel	100 Persen	35,000,000
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**70,000,000**
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**70,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Capaian kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian	Luas areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT	Terkendaliny a areal lahan pertanian / perkebunan yang berhasil di kendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	6,70 persen	250 Ha	100 Perse n	70,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Capaian kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian		Terkendaliny a areal lahan pertanian / perkebunan yang berhasil di kendalikan dari serangan OPT dan bencana alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	6,70 persen		100 Perse n	0
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**420,000,000**
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**20,000,000**
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Capaian kinerja perizinan usaha pertanian	Perusahaan yang dibina	Persentase perusahaan yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata	0	5 Perusaha an	100 Perse n	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
									n, Semua Kelurahan				
3	**27**	**6**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**								**400,000,000**
3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Capaian kinerja perizinan usaha pertanian	RPH	Tercapainya pelaksanaan administrasi penatausahaan RPH dan RPU	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3050 ekor	100 Persen	400,000,000
							RPU				125000 ekor		
							Terlaksananya pemotongan Ternak Ruminansia dan unggas yang dipotong				0 Ekor		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
TOTAL													3,728,233,000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang Pertanian, mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022;
b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022;
c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dina Peternakan dan Perkebunan KAbupaten Banjar Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.

Sehingga dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Peternakan dan Perkebunan ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) dan Peraturan Bupati

Banjar Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 68).

Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada visi, misi Bupati Banjar yang tertuang dalam didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026 yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri dan Agamis"***

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- Kabupaten Banjar merupakan "Serambi Mekkah" dan Kota Intan yang belum optimal dikembangkan. Berbagai permasalahan yang masih belum selesai dan pencapaian indikator-indikator pembangunan yang belum optimal merupakan tantangan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis. Kekuatan kerja bersama adalah modal utama dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar. Maka, dalam lima tahun ke depan, dengan nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat bekerja bersama dapat membawa Kabupaten Banjar menjadi daerah yang maju, mandiri, dan agamis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencapai Visi maka ditetapkan misi dimana di antara 2 (dua) misi pembangunan tersebut terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar yaitu Misi ke-1 yang berbunyi: *Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia* dan juga Misi ke-2 yang berbunyi *Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;*

1.2 LANDASAN HUKUM

Berikut adalah yang menjadi landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Disperindag Kabupaten Banjar 2022;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 Tahun 2014);

8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2022;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Disperindag Kabupaten Banjar dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2022, meliputi :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN TAHUN 2021

Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada table dibawah ini selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Tingkat Realisasi (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3					URUSAN PEMELIHARAAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi, fasilitasi dan komitmen untuk perijinan dan pendaftaran perusahaan	35%	0%	0%	0%	0%	35%	100%	286%
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	jumlah rekomendasi untuk fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perijinan	1	0%	0%	0%	0%	1	100%	100%
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi untuk fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perijinan	1	0%	0%	0%	0%	1	1	100%
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangakan	36%	0%	0%	0%	0%	36%	0	0%
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	73	0%	0%	0%	0%	73%	0	0%
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan sarana perdagangan	73	0%	0%	0%	0%	73	0	0%

3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah informasi fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	3%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan	9	0%	0%	0%	0%	9%	0	0%
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	6	0%	0%	0%	0%	6%	0	0%
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi KetersediaanBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah inspeksi mendaak, pengawasan dan pengendalian untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	6%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	86	0%	0%	0%	0%	86%	60,47	70%
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang	86	0%	0%	0%	0%	86	52,33	61%
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet	10%	0%	0%	0%	0%	10%	0	0%
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagangn bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	1	0%	0%	0%	0%	1%	0	0%
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembanga n Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi perdagangan luar negeri	2	0%	0%	0%	0%	2	0	0%
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pembinaan pelaku usaha perdagangan luar negeri	10	0%	0%	0%	0%	10	0	0%

3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku tertib niaga	30	0%	0%	0%	0%	30%	14,5	48%
3	30	06	2.01		Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan Pengawasan	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan didalam PDRB	80	0%	0%	0%	0%	80%	14,5	18%
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Cakupan pelayanan tera/tera ulang terbentuknya pasar tertib ukur	2421%	0%	0%	0%	0%	2421%	47,5	196%
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Cakupan pengawasan UTTP, BDKT, dan PU BBM	409	0%	0%	0%	0%	409	95,84	23%
3	30	07			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk/ komoditi yang dipromosikan	42	0%	0%	0%	0%	42%	0	0%
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	46%	0%	0%	0%	0%	46%	0	0%
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi	3	0%	0%	0%	0%	3	0	0%
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1	0%	0%	0%	0%	1%	40%	40%
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	2	0%	0%	0%	0%	2%	100%	50%

3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program yang disusun (Renstra, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi)	2	0%	0%	0%	0%	2	75%	38%
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA/RKAP SKPD Tepat Waktu	2	0%	0%	0%	0%	2	75%	38%
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKjIP, LKPJ, LPPD, Tepra, RKF, Laporan Tahunan)	2	0%	0%	0%	0%	2	33,33%	17%
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	2	0%	0%	0%	0%	2	50%	25%
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	0%	0%	0%	0%	2	0	0%
3	31	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	2	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
3	31	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksnanya bimbingan teknis	2	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%

3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	2	0%	0%	0%	0%	2	40%	20%
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat dinas	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	2	0%	0%	0%	0%	2	50%	25%
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2	0%	0%	0%	0%	2	50%	25%
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%

3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Masa Waktu Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	2	0%	0%	0%	0%	2%	50%	25%
3	31	02			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Industri	75	0%	0%	0%	0%	75%	0	0%
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Industri Pengolahan didalam PDRB	1	0%	0%	0%	0%	1%	0	0%
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM AGROKIM yg mendapat fasilitas promosi Jumlah IKM berbasis Aneka yg mendapatkan pelatihan Jumlah IKM berbasis Sandang yg mendapatkan pelatihan Jumlah IKM ILMEASA yg mendapat fasilitas promosi Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertfikat Halal dan P-IRT	5	0%	0%	0%	0%	5	25,53%	5%

3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sertifikasi produk industri batu permata	3700	0%	0%	0%	0%	3700	9,11%	0%
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah monitoring, evaluasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi ILMEASA, jumlah monitoring, evaluasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi seksi hasil hutan & kerajinan umum, jumlah monitoring, evaluasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasiseksi kimia hasil kebun & bahan bangunan, jumlah monitoring, evaluasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi seksi pangan	20	0%	0%	0%	0%	20	60%	3%
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA dan AGROKIM	2	0%	0%	0%	0%	2%	0	0%
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan kontribusi Sektor Industri Pengolahan didalam PDRB	10	0%	0%	0%	0%	10%	0	0%
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Ko ta melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	terlaksananya kegiatan pendataan AGROKIM terlaksananya kegiatan pendataan ILMEASA	1	0%	0%	0%	0%	1	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun tujuan dari rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas
2. Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inkfusif dan berkualitas

Dengan mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai yaitu pembangunan industri dan Perdagangan Kabupaten Banjar dirumuskan sesuai dengan masing – masing tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi Pertumbuhan sektor perindustrian;
2. Meningkatnya kontribusi Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB;

No	Indikator	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi					Proyeksi					Catatan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Daya Beli	-	78,04 %	78,29 %	78,53 %	78,78 %	79,02 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2	Laju pertumbuhan ekonomi industri pengolahan	-	1,98%	2,02%	2,07 %	2,11%	3,42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar secara umum terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. **Permasalahan**

a. Melemahnya kondisi sektor industri pengolahan batu permata batumulia serta sektor perdagangan di bidang batu permata batumulia di Kabupaten Banjar dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

b. Banyaknya PKL yang belum terdaftar secara formal baik menyangkut lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya dan Penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu oleh PKL yang berpotensi menggangu ketertiban umum

c. Kurangnya tenaga ahli dan fungsional penera sehingga pelayanan tera ulang di pasar rakyat masih belum maksimal. Tenaga ahli penera yang dimiliki Disperindag kabupaten Banjar hanya berjumlah 3 (Tiga) orang.

2. Solusi

Guna mengatasi permasalahan yang ada, maka direkomendasikan beberapa hal berikut ini :

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan sertifikasi produk batu permata dan batu mulia yaitu melalui strategi peningkatan daya saing industri kecil, sedangkan kebijakannya yaikni dengan peningkatan kemampuan teknologi industri di bidang batu permata dan batumulia, pengadaan alat laboaratorium uji sertifikasi LPSB, sosialisasi layanan sertifikasi LPSB dan partisipasi dalam promosi perdagangan tingkat nasional.

b. Solusi untuk mengatasi permasalahan PKL yang dihadapi pemerintah Kabupaten Banjar, diantaranya agar segera menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan lebih optimal dalam melaksanakan program pembinaan pedagang kakilima dan asongan melalui kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.

c. Di tahun mendatang akan ada tenaga ahli fungsional penera yang berasal dari internal dinas maupun dari luar dinas

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terlihat bahwa mayoritas dari 5 (Lima) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100 %, yaitu sebanyak empat sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran meningkatnya penguatan kelembagaan kemetrologian, telah mencapai kinerja sebanyak 200 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 95,89 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya pembinaan terhadap PKL dan Asongan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 112 %, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 100 %.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian Kab. Banjar

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.1.1.20	Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA	Kab Banjar	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA	2%	1,052,452,800.00	APBD							
3.1.1.20.1	Pengembangan kapasitas Pranata Pengukuran,Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Kab Banjar	Jumlah sertifikasi produk batu permata	3700 lbr	244.485.300.00	APBD	Program Perencanaan dan Pembangunan	Kab Banjar	Jumlah sertifikasi produk batu permata	3700 lbr	244.485.300.00	APBD	
3.1.1.20.2	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Kab Banjar	Jumlah Pelaku IKM yang menerima pembinaan kemampuan teknologi	20 org	48.569.900.00	APBD	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kab Banjar	Jumlah Pelaku IKM yang menerima pembinaan kemampuan teknologi	20 org	48.569.900.00	APBD	

3.1.1.20.3	Pelatihan Industri Berbasis Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut	Kab Banjar	Jumlah IKM berbasis Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan	60 IKM	70.401.600.00	APBD	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab Banjar	Jumlah IKM berbasis Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan	60 IKM	70.401.600.00	APBD	
3.1.1.20.4	Pelatihan Industri Berbasis Sandang	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Sandang	80 IKM	58.739.600.00	APBD	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Sandang	80 IKM	58.739.600.00	APBD	
3.1.1.20.5	Pelatihan Industri Berbasis Aneka	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Aneka	80 IKM	69.231.400.00	APBD	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Aneka	80 IKM	69.231.400.00	APBD	

3.1.1.20.6	Fasilitasi PromosiProduk Unggulan Daerah (DEKRANASDA)	Kab Banjar	Jumlah IKM yang menerima Fasilitasi Promosi	12 IKM	527.175.000.00	APBD	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab Banjar	Jumlah IKM yang menerima Fasilitasi Promosi	12 IKM	527.175.000.00	APBD	
3.1.1.20.7	Monitoring dan Pendataan Sektor Industri Berbasis ILMEASA	Kab Banjar	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis ILMEASA	1 lap	33.850.000.00	APBD	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Kab Banjar	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis ILMEASA	1 lap	33.850.000.00	APBD	
3.1.1.21	Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM	Kab Banjar	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM	2%	276.469.400.00	APBD							
3.1.1.21.1	Pelatihan Industri Berbasis Pangan	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Pangan	20 IKM	55.324.000.00	APBD	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Pangan	20 IKM	55.324.000.00	APBD	

3.1.1.21.2	Fasilitasi Pengembangan Kemasan Produk IKM	Kab Banjar	Jumlah IKM yang Menerima Fasilitasi Pengembangan Kemasan	50 IKM	38.850.000.00	APBD	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Kab Banjar	Jumlah IKM yang Menerima Fasilitasi Pengembangan Kemasan	50 IKM	38.850.000.00	APBD	
3.1.1.21.3	Pelatihan Industri Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	80 IKM	76.945.400.00	APBD	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	80 IKM	76.945.400.00	APBD	
3.1.1.21.4	Pelatihan Industri Berbasis Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Kimia, HasilPerkebunan, dan bahan bangunan	80 IKM	71.200.000.00	APBD	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab Banjar	Jumlah IKM Berbasis Kimia, HasilPerkebunan, dan bahan bangunan	80 IKM	71.200.000.00	APBD	

3.1.1.21.5	Monitoring dan Pendataan Sektor Industri Berbasis AGROKIM	Kab Banjar	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis AGROKIM	1 lap	34.150.000.00	APBD	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Kab Banjar	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis AGROKIM	1 lap	34.150.000.00	APBD	
3.1.1.18	Program Penataan Struktur Industri	Kab Banjar	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri	85%	29.360.000.00	APBD							
	Penyediaan Sarana maupun prasarana klaster industri	Kab Banjar	Jumlah sarana Industri yang dikembangkan	4 Industri	15.000.000,00	APBD	Program Perencanaan dan Pembangunan	Kab Banjar	Jumlah sarana Industri yang dikembangkan	4 Industri	15.000.000,00	APBD	

3.1.2.20	Program Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan	Kab Banjar	Persentase sarana dan prasaranan perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan	36%	393.026.000.00	APBD							
3.1.2.20.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan	Kab Banjar	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan pelaku usaha	138 kali	339.910.000.00	APBD	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Banjar	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan pelaku usaha	138 kali	339.910.000.00	APBD	
3.1.2.20.2	Penyusunan Informasi sarana dan distribusi logistik perdagangan	Kab Banjar	Jumlah informasi sarana dan distribusi logistik yang dapat diakses	3 dok	53.116.000.00	APBD	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab Banjar	Jumlah informasi sarana dan distribusi logistik yang dapat diakses	3 dok	53.116.000.00	APBD	

3.1.2.21	Program Bina usaha dan pelaku distribusi	Kab Banjar	Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL serta asongan yang dibina	35%	119.640.000.00	APBD							
3.1.2.21.1	Peningkatan, pembinaan, pertumbuhan pelaku usaha dan PKL/Asongan	Kab Banjar	jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan besar yang dibina	1379 pelaku usaha	68.970.000.00	APBD	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Banjar	jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan besar yang dibina	1379 pelaku usaha	68.970.000.00	APBD	
3.1.2.21.2	Fasilitasi kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional perdagangan	Kab Banjar	Jumlah kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional yang diterbitkan	13 Dok	50.670.000.00	APBD	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Kab Banjar	Jumlah kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional yang diterbitkan	13 Dok	50.670.000.00	APBD	

3.1.2.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kab Banjar	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet	100%	111.140.000.00	APBD							
3.1.2.17.2	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Kab Banjar	Jumlah Informasi perdagangan luar negeri	2 Informasi	48.980.000.00	APBD	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab Banjar	Jumlah Informasi perdagangan luar negeri	2 Informasi	48.980.000.00	APBD	
3.1.2.17.3	Peningkatan Kualitas Produk Perdagangan Luar Negeri	Kab Banjar	Jumlah pembinaan pelaku usaha perdagangan luar negeri	10 Pelaku usaha	62.160.000.00	APBD	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab Banjar	Jumlah pembinaan pelaku usaha perdagangan luar negeri	10 Pelaku usaha	62.160.000.00	APBD	
3.1.2.23	Program Peningkatan pemasaran produk dalam negeri	Kab Banjar	persentasi produk/komiditi daerah yang dipasarkan	36%	308.081.300.00	APBD							

3.1.2.23.1	Peningkatan pemasaran dan penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab Banjar	Jumlah produk dan komoditi yang dipromosikan	46 produk	308.081.300.00	APBD	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab Banjar	Jumlah produk dan komoditi yang dipromosikan	46 produk	308.081.300.00	APBD	
3.1.2.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kab Banjar	Persentase pelaku tertib niaga	30%	473.545.400.00	APBD							
3.1.2.15.3	Kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kab Banjar	Cakupan pengawasan UTTP, BDKT dan Barang K3L	80%	177.208.000.00	APBD	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kab Banjar	Cakupan pengawasan UTTP, BDKT dan Barang K3L	80%	177.208.000.00	APBD	
3.1.2.15.4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Kab Banjar	Cakupan pelayanan tera/tera ulang	80%	261.112.600.00	APBD	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Kab Banjar	Cakupan pelayanan tera/tera ulang	80%	261.112.600.00	APBD	

3.1.2.15.6	Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur	Kab Banjar	Terbentuknya Pasar Tertib Ukur	3 Kegiatan	35.224.800.00	APBD	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Kab Banjar	Terbentuknya Pasar Tertib Ukur	3 Kegiatan	35.224.800.00	APBD	
3.1.2.24	Program Pengendalian perdagangan dalam negeri	Kab Banjar	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan	9%	179.020.000,00	APBD							

3.1.2.24.1	Pengendalian Arus Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab Banjar	Jumlah pengendalian, pengawasan dan pemntauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan brang penting lainnya	6 Kegiatan	139.520.000,00	APBD	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab Banjar	Jumlah pengendalian, pengawasan dan pemntauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan brang penting lainnya	6 Kegiatan	139.520.000,00	APBD	
3.1.2.24.2	Monitoring Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Kab Banjar	Jumlah Aktifitas Monitoring Harga Bahan Pokok	86 Kegiatan	39.500.000,00	APBD	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab Banjar	Jumlah Aktifitas Monitoring Harga Bahan Pokok	86 Kegiatan	39.500.000,00	APBD	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan	Bidang	No Urut Prioritas Bidang	Usulan Prioritas	Sasaran Usulan Prioritas	Lokasi (desa/ kel)	Vol	Pagu (Rp)	SKPD	Urutan Prioritas Kecamatan
Aluh-Aluh	Pemberdayaan	1	Pelatihan pembuatan kue dan kerupuk serta bantuan peralatan membuat kue dan Kerupuk	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Desa Handil Bujur	1 Paket		Dinas Perindustrian & Perdagangan	17
Beruntung Baru	Ekonomi	1	Pembangunan Los Pasar	Peningkatan Pendapatan / Kesejahteraan Masyarakat	Jambu Burung RT 01	4 los	600.000.000,-	Dinas Perindustrian & Perdagangan	51
Beruntung Baru	Ekonomi	3	Pengurukan Los Pasar	Peningkatan Pendapatan /Kesejahteraan Masyarakat	Jambu Burung RT 01	475 m3	250 000.000,-	Dinas Perindustrian & Perdagangan	53
Beruntung Baru	Ekonomi	4	Pelatihan Menjahit/Membatik Sasirangan	Peningkatan Keterampilan	Kampung Baru	40 Orang	130.000.000,-	Dinas Perindustrian & Perdagangan	58
Beruntung Baru	Ekonomi	5	Pelatihan/ Keterampilan Menjahit	Peningkatan Keterampilan Masyarakat	Lawahan	20 Orang	80.000.000,-	Dinas Perindustrian & Perdagangan	59
Beruntung Baru	Ekonomi	6	Pelatihan Menjahit,Otomotif,Elektronik	Peningkatan Keterampilan Masyarakat	Jambu Burung	4 kelompok	250.000.000,-	Dinas Perindustrian & Perdagangan	60
Martapura Barat	Pemberdayaan	1	Pelatihan menjahit (TSU, TS, SB, SRH, SRT, AS)		Kecamatan Martapura Barat	100 org	150,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	42
Martapura Barat	Pemberdayaan	4	Pengrajin fukaha		Teluk Selong	30 orang	20,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	45
Martapura Barat	Pemberdayaan	8	Pelatihan mengemas produk makanan		Keliling Benteng Ulu	15 orang	20,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	49

Martapura Barat	Pemberdayaan	9	Pelatihan potong rambut pria dan wanita		Keliling Benteng Ulu	18 orang	25,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	50
Martapura Barat	Pemberdayaan	10	Pelatihan membuat kain sasirangan (KBU)		Kecamatan Martapura Barat	20 orang	50,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	51
Martapura Barat	Pemberdayaan	12	Pelatihan usaha kecil industri rumah tangga		Antasan Sutun	1 Paket	20,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	53
Martapura Barat	Pemberdayaan	15	pengolahan kerajinan dari tanah liat		Penggalaman	1 Paket	300,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	56
Martapura Barat	Lainnya	12	Pelatihan sulam airguci		Kecamatan Martapura Barat	1 Paket	50,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	81
Martapura Barat	Lainnya	13	Pelatihan manik-manik		Kecamatan Martapura Barat	1 Paket	50,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	82
Pengaron	Sosial Budaya	23	Pelatihan Keterampilan Payet MTP	Penyediaan Sarana/Prasarana dan Meningkatkan Keterampilan Masyarakat	Kertak Empat	15		Dinas Perindustrian & Perdagangan	94
Pengaron	Sosial Budaya	24	Pelatihan Keterampilan Kue Kering	Penyediaan Sarana/Prasarana dan Meningkatkan Keterampilan Masyarakat	Kertak Empat	15		Dinas Perindustrian & Perdagangan	95
Pengaron	Sosial Budaya	25	Pelatihan Keterampilan Muebelire	Penyediaan Sarana/Prasarana dan Meningkatkan Keterampilan Masyarakat	Kertak Empat	15		Dinas Perindustrian & Perdagangan	96
Sungai Tabuk	Pemberdayaan	1	Pelatihan Produksi Sarung Tenun dan Pengadaan Alat Tenun/ bukan mesin		Sungai Lulut	1 kali	300,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	8

Telaga Bauntung	Bidang Ekonomi		Pelatihan Membatik Sasirangan	Ekonomi	Ds Telaga, Ds Rtu Bujur, Ds LokTanah, Ds Rampah	4 x 5 orang	60,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	36
Paramasan	Bidang Perkebunan		Bantuan alat pemotong, pengupas dan penjemur kayu manis	Meningkatkan kualitas pengolahan kayu manis	Paramasan Atas, Paramasan Bawah,	200 Set	150,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	7
Paramasan	Bidang Pemberdayaan		Bimtek Mekanik/Perbengkelan	Meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha	Paramasan Bawah Angkipih, Remo dan Paramasan Atas	10 Orang	60,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	8
Kertak Hanyar	Bidang Pemberdayaan	4	Pelatihan Pertukangan Mabel		Sungai Lakum	1 Paket	20,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	42
Aranio	Bidang Pemberdayaan	6	Pelatihan Pengemasan Makanan	Pelaku ekonomi	Kec,. Aranio	3 Paket		Dinas Perindustrian & Perdagangan	47
Aranio	Bidang Pemberdayaan	7	Pelatihan Pembuatan Kue dan Kuliner	Masyarakat	Kec. Aranio	3 Paket		Dinas Perindustrian & Perdagangan	48
Martapura	Bidang Pemberdayaan	1	Pelatihan menjahit		Ds. Murung Kenanga	10 Paket	150,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	59
Martapura	Bidang Pemberdayaan	2	Pelatihan Menjahit		Jl, Albasia RT. 36/12 Kel. Keraton	46 orang	75,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	60
Martapura	Bidang Pemberdayaan	3	Pelatihan Komputer, menjahit dan otomotif		Ds. Tungkaran	1 Paket	15,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	61
Martapura	Bidang Pemberdayaan	4	Pelatihan Perbengkelan	Menambah keterampila	Jl. Pelabuhan	1 Kelompok	40,000,000	Dinas Perindustrian &	62

				n Masyarakat	Kel. Murung Keraton RT. 10			Perdagangan	
Martapura	Bidang Pemberdayaan	5	Pelatihan perbengkelan dan Pelatihan Las	Peningkatan ekonomi masyarakat	Ds. Tunggul Irang Ulu	-	200,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	63
Martapura	Bidang Pemberdayaan	6	Pelatihan Perbengkelan las dan otomotif		Desa Bincau	2 Kelompok	75,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	64
Martapura	Bidang Pemberdayaan	7	Pelatihan perbengkelan		Kelurahan Pasayangan	1 kelompok	40,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	65
Martapura	Bidang Pemberdayaan	10	Pelatihan membuat sasirangan		RT. 002 RW. 002 Kel. Sekumpul	1 Paket	30,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	68
Martapura	Bidang Pemberdayaan	11	Pelatihan pengemasan produk Makanan		Jl. P. Abdurrahman RT. 18/06 Kel. Keraton	46 orang	46,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	69
Martapura	Bidang Pemberdayaan	12	Pelatihan pengemasan produk makanan		Kelurahan Pasayangan	30 orang	30,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	70
Martapura	Bidang Pemberdayaan	17	Pelatihan kerajinan dari tali goni		Jl. Tanjung Rema Darat RT. 03 RW. 02 Kel. Tanjung Rema Darat	1 kegiatan	100,000,000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	75
Simpang Empat	Pemberdayaan	1	Keterampilan Menjahit		Desa Pasar Lama	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	38
Simpang Empat	Pemberdayaan	2	Pelatihan Pembuatan Kue Basah/Kering		Desa Cabi	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	39

Simpang Empat	Pemberdayaan	3	Pelatihan Pembuatan Kue Basah/Kering		Desa Batu Balian	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	40
Simpang Empat	Pemberdayaan	4	Pelatihan Kerajinan Bordir		Desa Sungkai	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	41
Simpang Empat	Pemberdayaan	5	Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor		Desa Sungkai	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	42
Simpang Empat	Pemberdayaan	6	Pelatihan Kerajinan Bordir		Desa Berkat Mulya	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	43
Simpang Empat	Pemberdayaan	7	Pelatihan Kerajinan Bordir		Desa Lok Cantung	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	44
Simpang Empat	Pemberdayaan	8	Pelatihan Kerajinan Bordir		Desa Sungkai Baru	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	45
Simpang Empat	Pemberdayaan	9	Keterampilan Menjahit		Desa Paring Tali	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	46
Simpang Empat	Pemberdayaan	10	Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor		Desa Pasar Lama	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	47
Simpang Empat	Pemberdayaan	11	Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor		Desa Tanah Intan	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	48
Simpang Empat	Pemberdayaan	12	Pelatihan Kerajinan Bordir		Desa Sungai Raya	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	49
Simpang Empat	Pemberdayaan	13	Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor		Desa Sungai Langsat	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	50
Simpang Empat	Pemberdayaan	14	Keterampilan Menjahit		Desa Sungai Langsat	2 Orang	Menyesuaikan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	51

Karang Intan	Pemberdayaan	3	Pelatihan Keterampilan Alat Sablon		Desa Jingah Habang Ilir	1 kegiatan	25.000.000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	70
Karang Intan	Pemberdayaan	5	Pelatihan Pembuatan Anyaman Purun dan Plastik		Desa Karang Intan	20 org		Dinas Perindustrian & Perdagangan	21
Karang Intan	Pemberdayaan	16	Pelatihan usaha kelompok masyarakat		Desa Jingah Habang Ulu	1 pket		Dinas Perindustrian & Perdagangan	75
Karang Intan	Pemberdayaan	19	Pelatihan Keterampilan Eceng Gondok		Desa Mandikapau Timur	25 org		Dinas Perindustrian & Perdagangan	25
Martapura Timur	Pemberdayaan	1	Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor dan Pengadaan Peralatannya	Warga Desa	Desa Tambak Anyar Ulu, Tambak Anyar, Tambak Anyar Ilir, Antasan Senor Ilir, Melayu, Melayu Ilir, Pematang Baru, Dalam Pagar Ulu, Sungai Kitano, Akar baru, Akar Bagantung, Pakauman, Pakauman Dalam			Dinas Perindustrian & Perdagangan	28

Martapura Timur	Pemberdayaan	2	Pelatihan Menjahit dan Pengadaan Peralatannya	Warga Desa	Desa Tambak Anyar Ilir, Antasan Senor Ilir, Melayu Ilir, Pematang Baru, Dalam Pagar Ulu, Sungai Kitano, Akar Bagantung, Pakauman, Pakauman Dalam, Keramat Baru, Keramat			Dinas Perindustrian & Perdagangan	29
Martapura Timur	Pemberdayaan	3	Pelatihan Tata Boga	Warga Desa	Desa Pematang Baru, Akar Baru, Keramat Baru			Dinas Perindustrian & Perdagangan	33
Martapura Timur	Pemberdayaan	4	Pelatihan Komputer	Warga Desa	Desa Melayu, Pematang Baru, Akar Baru			Dinas Perindustrian & Perdagangan	34
Martapura Timur	Pemberdayaan	5	Pelatihan UKM untuk Kaum Perempuan	Kaum Perempuan	Desa Tambak Anyar Ilir			Dinas Perindustrian & Perdagangan	35
Martapura Timur	Pemberdayaan	6	Pelatihan Kerajinan Fukaha dan Pengadaan Peralatannya	Warga Desa	Desa Antasan Senor			Dinas Perindustrian & Perdagangan	36
Martapura Timur	Pemberdayaan	7	Pelatihan Service Komputer & HP	Warga Desa	Desa Melayu			Dinas Perindustrian & Perdagangan	37

Martapura Timur	Pemberdayaan	8	Pelatihan Service Alat Elektronik	Warga Desa	Desa Melayu Ilir & Melayu Tengah			Dinas Perindustrian & Perdagangan	38

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2016-2022, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar yaitu terdapat pada Misi ke-1 yang berbunyi: *Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia* dan juga Misi ke-2 yang berbunyi *Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;*

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional Disperindag yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perindustrian
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 Tahun 2014);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2022;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada RPJMD Kabupaten Banjar berdasarkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang untuk mencapai Misi ke-1 dan Misi ke-2 ialah:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inkfusif dan berkualitas.

Strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 serta untuk pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar telah menyusun dan menetapkan sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya beli masyarakat kabupaten banjar.
2. Meningkatnya akselerasi industri pengolahan kabupaten banjar

Berikut adalah tujuan, sasaran beserta 2 indicator kinerja yang diuraikan melalui table berikut;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	II	III	IV	V
1.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks daya beli	78,04 %	78,29 %	78,53 %	78,78 %	79,02 %
2.	Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inkfusif dan berkualitas	Meningkatnya akselerasi industri pengolahan	Laju pertumbuhan ekonomi industri pengolahan	1,98%	2,02%	2,07%	2,11%	3,42%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program prioritas yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan urusan Perindustrian dan Perdagangan di dalam RPJMD adalah ;

1. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri
2. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020)
3. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase Rekomendasi Izin dan Pendaftaran Usaha yang Dikeluarkan
4. **Program Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase sarana distribusi perdagangan yang representatif
5. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu
6. **Program Pengembangan Ekspor** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan
7. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase Tertib Ukur
8. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** yang mempunyai indikator program yaitu Persentase Produk Daerah yang dipromosikan
9. **Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** yang mempunyai indikator program Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan

Bab IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing - masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 mencakup 9 Program terdiri dari 18 Kegiatan seperti berikut :

Tabel. 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2022	Pagu Indikatif
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			
					Dinas Perindustrian Dan Perdagangan			**3.711.117.000**
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**914.841.629**
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan**	**100 persen**	**80.448.000**
3	**30**	**2**	**2,01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu**	**100 persen**	**70.848.000**
3	30	2	2,01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diberikan	100 persen	70.848.000
3	**30**	**2**	**2,02**		**Penerbitan TandaDaftar Gudang**	**Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu**	**100 persen**	**2.560.000**
3	30	2	2,02	1	Fasilitasi PenerbitanTanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	1 dok	2.560.000
3	**30**	**2**	**2,03**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang dikeluarkan tepat waktu**	**100 persen**	**3.520.000**
3	30	2	2,03	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Persentase fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik yang diberikan	100 persen	1.760.000
3	30	2	2,03	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri yang diberikan	100 persen	1.760.000
3	**30**	**2**	**2,04**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**	**Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri dikeluarkan tepat waktu**	**100 persen**	**3.520.000**
3	30	2	2,04	1	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Persentase fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) luar negeri terintegrasi secara elektronik yang diberikan	100 persen	1.760.000

3	30	2	2,04	2	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) luar negeri yang diberikan	100 persen	1.760.000
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan**	**2,50Persen**	**34.300.000**
3	**30**	**3**	**2,01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/ dikembangkan**	**1 Sarana**	**34.300.000**
3	30	3	2,01	1	Penyediaan SaranaDistribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pasar	29.200.000
3	30	3	2,01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 laporan	5.100.000
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**	**9 Persen**	**260.487.400**
3	**30**	**4**	**2,01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan ketersediaan bapokting kabupaten**	**100 persen**	**4.500.000**
3	30	4	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan pengendalian ketersediaan bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	4 lap	4.500.000
3	**30**	**4**	**2,02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan data informasi harga dan stok bapokting** **Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok bapokting**	**12 lap** **100 persen**	**252.597.400**
3	30	4	2,02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok bapokting pada pelaku usaha distribusi barang	12 lap	146.567.000
3	30	4	2,02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak	100 persen	106.030.400
3	**30**	**4**	**2,03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data informasi ketersediaan pupuk bersubsidi di kabupaten**	**1 lap**	**3.390.000**
3	30	4	2,03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi	1 lap	3.390.000
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase produk unggulan daerah yang dikembangkan**	**100 persen**	**83.473.008**
3	**30**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan promosi dagang bagi produk unggulan daerah**	**100 persen**	**83.473.008**
3	30	5	2,01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan atau keikutsertaan pembinaan dan pengembangan produk unggulan kabupaten	1 keg	5.777.000
3	30	5	2,01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah kegiatan atau keikutsertaan pameran dagang lokal	1 keg	40.000.000

3	30	5	2,01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kegiatan atau keikutsertaan misi dagang	1 keg	24.696.008
3	30	5	2,01	6	Pembinaan PelakuUsaha Ekspor	Jumlah kegiatan atau keikutsertaanpembinaan pelaku usaha ekspor	1 keg	13.000.000
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat ukur yang ditera ulang**	**32 persen**	**257.058.221**
3	**30**	**6**	**2,01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**32 persen**	**257.058.221**
3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan MetrologiLegal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yg d tera/ tera ulang	2421 unit	191.822.803
3	30	6	2,01	2	Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	525 pelaku usaha	55.235.418
3	30	6	2,01	3	Penyidikan MetrologiLegal	Laporan Penyidikan	1 Laporan	10.000.000
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase produk daerah yang dipromosikan**	**100 persen**	**199.075.000**
3	**30**	**7**	**2,01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri**	**100 persen**	**199.075.000**
3	30	7	2,01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan atau keikutsertaan promosi penggunaan produk dalam negeri	1 keg	185.225.000
3	30	7	2,01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan atau keikutsertaan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1 keg	13.850.000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**2.796.275.371**
3	**31**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.479.447.178**
3	**31**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran**	**1 Tahun**	**69.923.868**
3	31	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi)	6 dok	5.735.000
3	31	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA/RKAP SKPD Tepat Waktu	4 dok	7.355.000
3	31	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (LKJIP, LKPJ, TEPRA, RFK)	4 dok	50.579.068
3	31	1	2,01	7	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	jumlah lap evaluasi	1 lap	6.254.800
3	**31**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**521.298.300**
3	31	1	2,02	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	12 bulan	-
3	31	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	13 bulan	510.940.000

3	31	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	10.358.300
3	**31**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 persen**	**40.000.000**
3	31	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	50 orang	40.000.000
3	**31**	**1**	**2,06**		**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**337.670.750**
3	31	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	23.296.000
3	31	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	77.423.712
3	31	1	2,06	4	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	12 bulan	17.077.800
3	31	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan penggandaan	12 bulan	27.648.238
3	31	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 bulan	192.225.000
3	**31**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**204.008.260**
3	31	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	204.008.260
3	**31**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 Persen**	**306.546.000**
3	31	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang terpelihara	... Unit	277.546.000
3	31	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	12 bulan	29.000.000
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri**	**92,25 persen**	**1.263.193.193**
3	**31**	**2**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Dokumen Evaluasi Industri Kabupaten**	**4 Laporan 1 Laporan 1.000 memo/sertifikat 4 Laporan**	**1.263.193.193**
3	31	2	2,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Laporan	726.531.600
3	31	2	2,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Sertifikasi Produk Industri Batu Permata	1 Laporan 1.000 memo/Sertifikat	247.609.720
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Laporan	289.051.873

3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Tersedianya informasi industri**	**95,00 persen**	**53.635.000**
3	**31**	**4**	**2,01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas**	**100%**	**53.635.000**
3	31	4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan danAnalisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan data industri(Semester)	2 Laporan	35.635.000
3	31	4	2,01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan	1 Laporan	18.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022.

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat RahmatNya, penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun2022 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif besertasumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2022. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat..

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021- 2026 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***"

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar2021-2026, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan untuk pemerataanpembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadianluhur untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, peran penanggulanganbencana dominan pada misi ke-3, Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 20121-2026, seperti tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar

Misi Ke-Tiga : Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	
Tujuan:	Sasaran:
Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan	Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2022 yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Banjar Tahun 2022;
2. Sebagai acuan BPBD dalam melaksanakan penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dankegiatan BPBD;
4. Merumuskan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Banjar selama tahun2022 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi BPBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBanjar Tahun 2022, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2020Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat DaerahBab V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, di mana 1 program adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan program utama adalah Program Penanggulangan Bencana.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d Tahun 2020

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
1	5			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**									
1	**1**	**1**	**22**	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase Peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana**								

1	1	1	22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Tersedianya data dan informasi potensi bencana								
1	1	1	22.6	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggul								

					angan bencana								
1	1	1	22.7	Pengamatan Gejala Bencana Lokasi/ Daerah	Jumlah Desa yang mendapat pengawasan gejala bencana								
1	1	1	22.8	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Jumlah Desa yang menjadi Desa Tangguh Bencana								
1	**1**	**1**	**24**	**Program Pasca Bencana**	**% Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**								
1	1	1	24.1	Kegiatan Pendataan Dampak Bencana	Tersedianya data & informasi kerusakan, kerugian & kebutuhan pasca bencana (jitu Pasna)								
1	1	1	24.2	Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonsiliasi	Tersedianya Dokumen penyusunan program dan rencana rehabilitasidan rekonstruksi								
1	1	1	24.5	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah aparatur yang terlatih tentang cara perhitungan kerusakan pasca bencana (jitu Pasna)								
1	1	1	24.6	Pengembangan Partisipasidan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya sosialisasi pasca bencana								
1	1	1	24.7	Pengembangan Partisipasidan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstr	Terlaksananya Rehab Rekon Jalan yang Rusak Karena Bencan								

				uksi (Dana Hibah)	a							
1	1	1	24.8	Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Dana Hibah Lanjutan)	Terlaksananya Rehab Rekon Jalan yang Rusak Karena Bencan							

1	1	1	25	**Program Tanggap Darurat**	**Persentase Kejadian bencana yang ditanggulangi**								
1	1	1	25.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana	Terlaksananya in House training & pelatihan								
1	1	1	25.2	Kegiatan Tanggap darurat di Daerah Terkena Bencana	Tertanganinya Kejadian Bencana								
1	1	1	25.3	Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Evaluasi status keadaan darurat	Jumlah laporan darurat bencana yang tersedia								
1	1	1	25.4	Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil TRC/Petugas lapangan yang diasuransikan								
1	1	1	25.5	Kegiatan Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Logistik & peralatan penanggulangan bencana								
1	1	1	25.6	Kegiatan Koordinasi dan Standarisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan bencana								
1	1	1	25.7	Kegiatan Penghimpun Informasi Kejadian Bencana	Jumlah petugas penghimpun bencana kecamatan								
1	1	1	30	**Program Perencanaan Penanggulangan Bencana**	Persentase implementasi dokumen perenca								

					naan penanggulangan bencana								
s	1	1	30.1	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen penanggulangan bencana								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Tabel 2.2
Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	% Peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan didaerah rawan bencana (Renstra)			60%	69%	70%	75%	80%	74,7%	77,6%	77,24 %	80%	85%	Ada Peningkatan dari tahun sebelumnya dan dari target yg ditetapkan
2	% Kejadian bencana yang ditanggulangi (RPJMD)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terealisasi seluruhnya sesuai target yang ditetapkan
3	% Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Renstra)			73,4%	74%	80%	82%	85%	73,4%	81,2%	18,54	85%	85%	Adanya penurunan a dari tahun sebelumnya dikarenakan terlambatnya proses pengajuan yang direkomendasikan untuk bantuan dana yang tidak direncanakan dari BPBD ke Pemerintah Kabupaten Banjar untuk korban bencana angin puting beliung dan kebakaran pemukiman

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

a. Tingkat Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan kebutuhan organisasi yang harus berperan dan bertugas dalam penanggulangan bencana sejak Satkorlak Penanggulangan Bencana Kabupatendibubarkan dan difungsikan dengan pembentukan BPBD oleh Bupati Banjar yang awal pembentukannya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pembentukan SOTK BPBD Kabupaten Banjar dengan TIPE B.

Dalam perjalanannya dengan memperhatikan potensi bencana, jenis bencana dan kerentanan Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana maka dalam tahun 2011 Bupati Banjar meningkatkan status BPBD Kabupaten Banjar dari Tipe B menjadi Tipe A sehingga mempunyai peran yang lebih besar lagi dalam penanggulangan bencana. Perubahan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar untuk masa yang akan datang diarahkan pada : menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan(3). Pelaksana penanggulangan bencana. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. *Koordinasi* penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun Provinsi, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang

perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi *komando* dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran *pelaksana*, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun provinsi, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Secara struktur organisasi, saat ini BPBD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telahmemenuhi kriteria organisasiyang disyaratkan, hanya sajakelompok jabatan fungsional dan Pengarah belum terbentuk/terisi. Keberadaan Sekretariat ada 3 Subbag (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan) dan tiga bidang enan Kasubid (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, keuangan dan penyediaan data. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan BPBD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan ditingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Banjar yaitu:

1. Penyusunan kajian – kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan *civil society awareness* dalam kesiapsiagaan untukmengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk – produk hukum perencanaan pembangunan;
7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundan – undangan yang berlaku.

Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Banjar dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal BPBD

Hasil review terhadap Rancangan Awal BPBD dan hasil analisa kebutuhan untukpelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Review Terhadap terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**Indeks Ketahanan Daerah**	**0,58**		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Indeks Ketahanan Daerah**	**0,58**		
I		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	**100 %**	**Rp 216.410.940**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	**100%**	**Rp 216.410.940**	
1		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana)	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Desa yang mendapatkan pengamatan gejala Bencana Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pelatihan penanggulangan Bencana	20 Desa 500 orang	Rp 216.410.940	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana)	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Desa yang mendapatkan pengamatan gejala Bencana Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pelatihan penanggulangan Bencana	20 Desa 500 orang	Rp 216.410.940	
II		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	**Rp 178.271.340**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100 Persen	**Rp 178.271.340**	
1		Penguatan Kapasitas	Kab. Banja	Jumlah Desa Tangguh	2 Desa	Rp 100.000.000	Penguatan Kapasitas	Kab. Banja	Jumlah Desa Tangguh	2 Desa	Rp 100.000.00	

		Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	r	Bencana (Destana) yang terbetuk			Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	r	Bencana (Destana) yang terbetuk		0	
2		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Banjar	Terlaksananya Penanganan Bencana melalui bimbingan teknis Jitu Pasna danSosialisasi Rehabilitas dan Rekonstruksi pasca Bencana Tersedianya data & informasi kerusakan, kerugian &kebutuhan pasca bencana (jituPasna)	190 orang 12 Laporan	Rp 76.230.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Banjar	Terlaksananya Penanganan Bencana melalui bimbingan teknis Jitu Pasna danSosialisasi Rehabilitas dan Rekonstruksi pasca Bencana Tersedianya data & informasi kerusakan, kerugian &kebutuhan pasca bencana (jituPasna)	190 orang 12 Laporan	Rp 76.230.000	
3		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Aparatur BPBD yang terlatih	50 orang	Rp 28.271.340	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Aparatur BPBD yang terlatih	50 orang	Rp 28.271.340	
4		Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	Rp 150.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	Rp 150.000.000	
III		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korbanbencana	100 %	**Rp 654.987.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi	100%	**Rp 654.987.000**	
5		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase jumlah bencana yang ditanggulangi perhitungan kerusakan pasca bencana (jitu Pasna)	100 %	Rp 654.987.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Persentase jumlah bencana yang ditanggulangi perhitungan kerusakan pasca bencana (jitu Pasna)	100%	Rp 654.987.000	
6		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Peralatan Evakuasi penanggulangan bencana Tersedianya	11 Unit 1 Tahun	Rp 300.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Peralatan Evakuasi penanggulangan	11 Unit 1 Tahun	Rp 300.000.000	

		Bencana Kabupaten/Kota		Logistik (Buffer Stock) penanggulangan bencana			Bencana Kabupaten/Kota		bencana Tersedianya Logistik (Buffer Stock) penanggulangan bencana			
IV		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		Dapat terukurnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100 %	**Rp 72.900.000**	Program Tanggap Darurat		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100 Persen	Rp 72.900.000	
9		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	2 Laporan 1 Laporan	Rp 72.900.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	2 Laporan 1 Laporan	Rp 72.900.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai hasil musrenbang kecamatan pada umumnya adalah Rehabilitasi/pemulihan fasilitas dan infrastruktur publik akibat bencana alam seperti pembuatan Tembok Penahan Tanah pada bahu jalan,rehabilitasi saluran irigasi, gedung sekolah dan prasarana kesehatan. Usulan tersebut telah ditampung pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Usulan program/kegiatan dari masyarakat tersebut direkapitulasi sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan skala prioritas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**Rp 2.537.824.720**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan Program dan Kegiatanserta Pelaporan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**Rp 35.000.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan SKPD	6 Dokumen	Rp 10.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerjas Perangkat Daerah (LPPD,Tepra,LKjIP,LKPJ,LaporanAset,Laporan Keuangan Akhir Tahun) Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Perencanaandan Evaluasi Kinerja serta tersedianya data informasievaluasi kinerja/kegiatan SKPD	5 Dokumen 12 Bulan	Rp 25.000.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terbayaranya Gaji dan Tunjangan Aparatur BPBD serta Upah Tenaga Kontrak BPBD**	**1 Tahun**	**Rp 1.488.315.500**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Terbayarnya Gaji, Tambahan penghasilan dan TPP	1 Tahun	Rp -
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran Terbayarnya Honorarium PenanggungjawabanPengelola Keuangan	52 Orang 12 Bulan	Rp 1.479.310.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Banjar	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12 Bulan	Rp 9.005.500
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Jasa administrasi umum dan operasional sarana prasarana perkantoran**	**100%**	**Rp203.059.920**
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	17 Unit	Rp 25.000.000
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan dan Retribusi Sampah	12 Bulan	Rp 11.771.800
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp 16.643.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	1 Tahun	Rp149.645.120
IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa administrasi umum dan operasional sarana prasarana perkantoran**	**100%**	**Rp210.458.300**

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Kantor	12 Bulan	Rp160.787.900
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	Rp 49.670.400
V	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa administrasi umum dan operasional sarana prasarana perkantoran**	**100%**	**Rp 600.991.000**
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara dan PajakKendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yangdiperbaharui	1 Unit	Rp 40.990.000
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yangdipelihara dan Pajak kendaraan dinas yangdiperbaharui	28 Unit	Rp 462.811.000
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	102 Unit	87190000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	1 Tahun	Rp 10.000.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**Jumlah desa tangguh bencana**	**8 Desa**	**Rp 1.598.799.280**
VI	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100%**	Rp216.410.940
16	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana)	Kab. Banjar	Jumlah Desa yang mendapatkan pengamatan gejala Bencana Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pelatihan penanggulangan Bencana	20 Desa 500 orang	Rp216.410.940
VII	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pengurangan resiko bencana**	**100%**	**Rp354.501.340**
17	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Banjar	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang terbetuk	1 Desa	Rp 100.000.000
18	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Terlaksananya Penanganan Bencana melalui bimbingan teknis Jitu Pasna danSosialisasi Rehabilitas dan Rekonstruksi pasca Bencana Tersedianya data & informasi kerusakan, kerugian &kebutuhan pasca bencana (jituPasna)	190 orang 12 Laporan	Rp 76.230.000
19	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah Aparatur BPBD yang terlatih	50 orang	Rp 28.271.340
20	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	Rp 150.000.000
VIII	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korbanbencana**	**100%**	**Rp 954.987.000**
21	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase jumlah bencana yang ditanggulangi	100%	Rp 654.987.000
22	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah Pengadaan Peralatan Evakuasi penanggulangan bencana Tersedianya Logistik (Buffer Stock) penanggulangan bencana	11 Unit 1 Tahun	Rp 300.000.000
IX	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Dapat terukurnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**100%**	**Rp 72.900.000**
23	Kerjasama antar Lembaga dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	2 Laporan 1 Laporan	Rp 72.900.000
				TOTAL PAGU	**Rp 4.136.624.000**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan PembangunanNasional, diketahui bahwa tema dan agenda pembangunan nasional adalah :

"Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan"

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. 4 pilar tersebut yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan., yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & MenjaminPemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi &Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana danPerubahan Iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dari tujuh agenda pembangunan tersebut pada agenda ke-enam yaitu: "*Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.*". Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkanmelalui kebijakan:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3. Pembangunan Rendah Karbon.

Untuk Penanggulangan Bencana termasuk dalam kebijakan ke-dua dan cakupan ke-satu dalam Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencanadan Iklim.

Yang dilaksanakan dengan:

a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
c) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
d) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
e) Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
f) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
g) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Dalam menghadapi kemungkinan bencana Pemerintah kabupaten Banjar melalui BPBD Kabupaten Banjar melakukan serangkaian kegiatan antisipasi yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (UU No. 24 Tahun 2007).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan adalah :

1. Membuat Peta Rawan Bencana

   Pemetaan ini penting dimana jika terjadi bencana maka pemerintah dan masyarakat dapatmengetahui dimana lokasi pengungsian, siapa yang harus dihubungi di lokasi terdekat danlain-lain.Kemudian dari itu, kita dapat melihat beragai macam potensi bencana yang di

hadapi Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan memperhatikan titik-titik rawan yangmenjadi gambaran acuan.

2. Pelatihan Penanggulangan Bencana Berbasis masyarakat, Sosialisasi Pengurangan ResikoBencana, Gladi Penanggulangan Bencana.
3. Menyediakan Logistik/Buffer Stock untuk korban bencana serta Menyiapkan peralatan-peralatan evakuasi penanggulangan bencana
4. Membangun sistem peringatan dini (Early Warning System) terhadap kemungkinanbencana yang terjadi.
5. Selalu mengadakan koordinasi kepada instansi/pihak pihak yang terkait denganpenyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten Banjar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan program/kegiatan merupakan penjabaran pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapaiatau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokokdan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tupoksi BPBD Kabupaten Banjar. Adapun tujuan program/kegiatan BPBD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan KesiapsiagaanMenghadapi Bencana untuk mengurangi Risiko Bencana.
2. Mengoptimalkan Pemulihan Masyarakat serta Sarana Prasarana Pasca Bencana.
3. Mengoptimalkan penanganan darurat bencana yang responsive dengan dukungan logisticyang cukup dan sarana prasarana penanganan bencana yang memadai.

Adapun Tujuan program/kegiatan BPBD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencanasecara optimal.
2. Terwujudnya Pemulihan Masyarakat Serta Sarana dan Prasarana Pasca Bencana yangLebih Baik.
3. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsive dengan dukungan logistik yangcukup dan sarana prasarana penanganan bencana yang memadai.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banjar tahun 2019 mengacu kepada Visidan Misi Bupati/Wakil Bupati Banjar Periode 2021-2026 yaitu :

Visi :

"***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***"

Misi :

Peran penanggulangan bencana dominan pada misi ke-3, Yaitu:

"Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan"

Adapun program strategis BPBD Kabupaten Banjar Tahun 2022 sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penanggulangan Bencana

VI. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

VII. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
4. Penyusunan Rencana Kontijensi

VIII. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban BencanaKabupaten/Kota

IX. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan BencanaKabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2022 direncanakan berjumlah 2 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan total pagu belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp Rp3.660.394.000,-. Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) BPBD Tahun 2022 dan perkiraan maju rencana tahun 2023, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2021 Dan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Kabupaten Banjar

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022				Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**		**100%**	**Rp 2.537.824.720**		**100%**	**Rp 2.791.607.192**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan Program dan Kegiatanserta Pelaporan Evaluasi Kinerja**		**100%**	**Rp 35.000.000**		**100%**	Rp 38.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan SKPD	Kab. Banjar	6 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD	6 Dokumen	Rp 11.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerjas Perangkat Daerah (LPPD,Tepra,LKjIP,LKPJ,LaporanAset,Lapora n Keuangan Akhir Tahun) Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Perencanaandan Evaluasi Kinerja serta tersedianya data informasievaluasi kinerja/kegiatan SKPD	Kab. Banjar	5 Dokumen 12 Bulan	Rp 25.000.000	APBD	5 Dokumen 12 Bulan	Rp 27.500.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayaranya Gaji dan Tunjangan Aparatur BPBD serta Upah Tenaga Kontrak BPBD**		**1 Tahun**	**Rp 1.488.315.500**		**1 Tahun**	**Rp 1.637.147.050**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tambahan penghasilan dan TPP	Kab. Banjar	1 Tahun	Rp -	APBD	1 Tahun	Rp -
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/TeknisPerkantoran Terbayarnya Honorarium PenanggungjawabanPengelola Keuangan	Kab. Banjar	52 Orang 12 Bulan	Rp 1.479.310.000	APBD	52 Orang 12 Bulan	Rp 1.627.241.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kab. Banjar	12 Bulan	Rp 9.005.500	APBD	12 Bulan	Rp 9.906.050

III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Jasa administrasi umum dan operasional sarana prasarana perkantoran**		**100%**	**Rp 203.059.920**		**100%**	**Rp**	**223.365.912**
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	17 Unit	Rp 25.000.000	APBD	17 Unit	Rp	27.500.000
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan dan Retribusi Sampah	Kab. Banjar	12 Bulan	Rp 11.771.800	APBD	12 Bulan	Rp	12.948.980
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	12 Bulan	Rp 16.643.000	APBD	12 Bulan	Rp	18.307.300
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	Kab. Banjar	1 Tahun	Rp 149.645.120	APBD	1 Tahun	Rp	164.609.632
IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa administrasi umum dan operasional sarana prasarana perkantoran**		**100%**	**Rp 210.458.300**		**100%**	**Rp**	**231.504.130**
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Kantor	Kab. Banjar	12 Bulan	Rp 160.787.900	APBD	12 Bulan	Rp	176.866.690
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Banjar	12 Bulan	Rp 49.670.400	APBD	12 Bulan	Rp	54.637.440
V	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa administrasi umum dan operasional sarana prasarana perkantoran**		**100%**	**Rp 600.991.000**		**100%**	**Rp**	**661.090.100**
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara dan PajakKendaraan Kendaraan Dinas Jabatanyangdiperbaharui	Kab. Banjar	1 Unit	Rp 40.990.000	APBD	1 Unit	Rp	45.089.000
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yangdipelihara dan Pajak kendaraan dinas yangdiperbaharui	Kab. Banjar	28 Unit	Rp 462.811.000	APBD	28 Unit	Rp	509.092.100
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnyayang dipelihara	Kab. Banjar	102 Unit	87190000	APBD	102 Unit	Rp	95.909.000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	Kab. Banjar	1 Tahun	Rp 10.000.000	APBD	1 Tahun	Rp	11.000.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Jumlah desa tangguh bencana**		**8 Desa**	**Rp 1.598.799.280**		**8 Desa**	**Rp**	**1.298.799.280**
VI	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**		**100%**	Rp 216.410.940		**100%**	Rp	216.410.940

16	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana)	Jumlah Desa yang mendapatkan pengamatan gejala Bencana Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pelatihan penanggulangan Bencana	Kab. Banjar	20 Desa 500 orang	Rp	216.410.940	APBD	20 Desa 500 orang	Rp	216.410.940
VII	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pengurangan resiko bencana**		**100%**	**Rp**	**354.501.340**		**100%**	**Rp**	**354.501.340**
17	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang terbetuk	Kab. Banjar	1 Desa	Rp	100.000.000	APBD	1 Desa	Rp	100.000.000
18	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Bencana melalui bimbingan teknis Jitu Pasna danSosialisasi Rehabilitas dan Rekonstruksi pasca Bencana Tersedianya data & informasi kerusakan, kerugian & kebutuhan pasca bencana (jituPasna)	Kab. Banjar	190 orang 12 Laporan	Rp	76.230.000	APBD	190 orang 12 Laporan	Rp	76.230.000
19	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD yang terlatih	Kab. Banjar	50 orang	Rp	28.271.340	APBD	50 orang	Rp	28.271.340
20	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Banjar	1 Dokumen	Rp	150.000.000	APBD	1 Dokumen	Rp	150.000.000
VIII	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korbanbencana**		**100%**	**Rp**	**954.987.000**		**100%**	**Rp**	**954.987.000**
21	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bencana yang ditanggulangi	Kab. Banjar	100%	Rp	654.987.000	APBD	100%	Rp	654.987.000
22	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Peralatan Evakuasi penanggulangan bencana Tersedianya Logistik (Buffer Stock) penanggulangan bencana	Kab. Banjar	11 Unit 1 Tahun	Rp	300.000.000	APBD	11 Unit 1 Tahun	Rp	300.000.000
IX	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Dapat terukurnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**		**100%**	**Rp**	**72.900.000**		**100%**	**Rp**	**72.900.000**
23	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kab. Banjar	2 Laporan 1 Laporan	Rp	72.900.000	APBD	2 Laporan 1 Laporan	Rp	72.900.000

BAB V PENUTUP

RENJA BPBD Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026. RENJA BPBD Tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022, sehingga Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022, yang direncanakan berjumlah 2 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidahpelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BPBD berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana RENJA Tahun 2022 dijabarkan lebihlanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD, seluruh aparatur BPBD secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2022.
4. Penyusunan Renja Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

29. Inspektorat Kabupaten Banjar

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD diartikan sebagai "Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun" (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula "Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat" (pasal 7 ayat 2).

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan Renja.
b. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan rancanagan awal RKPD.
d. Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan tim forum lintas perangkat daerah (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada RKPD.
f. Verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh kepala daerah.

Renja Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2022 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Keterkaitan Renja Inspektorat Kabupaten Banjar dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Halaman | 5 RKPD Kab. Banjar Tahun 2022 Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja pada Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2021 melalui perencanaan kinerja.

Tujuan penyusunan Renja :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar dan RPJMD di tahun 2022.
2. Sebagai instrumen akuntabilitas ditahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Inspektorat, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Sub bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global;

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

3.2. Tujuan dan sasaran

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Dalam upaya pencapaian target kinerja IKU Inspektorat yaitu Indeks Kepatuhan dengan target 89,25 dengan realisasi 95,01 dan dengan tingkat capaian 106,45%, ada beberapa hal yang dilakukan Inspektorat sebagai berikut :

a. Dalam usaha peningkatan Maturitas SPIP di level 3 Inspektorat telah melaksanakan beberapa rencana aksi diantaranya :

- Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan praktek pengendalian intern dengan baik namun evaluasi atas penerapan pengendalian intern pendokumentasiannya belum memadai.
- Penilaian integritas dan nilai etika. Pemerintah daerah secara umum telah memiliki kode etik/aturan perilaku PNS.
- Komitmen terhadap kompetensi. SKPD telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk masing – masiing posisi yg ditetapkan secara formal oleh pimpinan SKPD. Standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk masing – masing posisi tersebut telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam setiap pimpinan SKPD. Promosi/ mutasi pejabat telah berdasarkan standar kompetensi.
- Inspektorat telah memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggungjawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern.
- Inspektorat telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesien, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- Kinerja pengawasan Inspektorat telah dilakukan penilaian internal dan hasilnya telah ditindak lanjuti dalam rangka meningkatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara berkala dan terdokumentasi.

Program ini juga didukung oleh beberapa kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Inspektorat Kabupaten antara lain :

- Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

  Pagu Anggaran untuk Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala sebesar Rp. 1.344.533.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.337.570.000,00 (99,48%) dan realisasi fisik sebanyak 96 Obrik atau 100%. 65 Audit Ketaatan, 3 Audit Kinerja, 2 Audit Investigasi, 16 Audit Tertentu Lainnya, 36 Reviu, 6 Evaluasi, 15 Monitoring dan 15 Pendampingan / Konsultasi.

- Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

  Pagu Anggaran untuk Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan sebesar Rp. 14.300.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.300.000,00 (65,03%) dan realisasi fisik sebanyak 12 kali atau 100%. Pada kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan ini direalisasikan berupa pembentukkan Tim Inventarisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI/BPKP/Inspektorat Provinsi Kalsel/APIP Lainnya guna peningkatan persentase tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan.

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

  Pagu Anggaran untuk Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebesar Rp. 131.920.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.99.750.000,00 (75,61%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan ini memuat tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI / BPKP / Inspektorat Provinsi / APIP yang bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan yang telah dilaksanakan

b. Dalam usaha meningkatkan kapabilitas APIP di level 3 Inspektorat melaksanakan beberapa rencana aksi diantaranya:

   - Inspektorat telah meningkatkan perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian organisasi dalam kegiatan pengawasan yang diatur dengan SK Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 33 Tahun 2016 Tanggal 11 September 2016 tentang Penetapan Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Banjar.

- Inspektorat Kabupaten Banjar telah mengembangkan system dan prosedur untuk menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi yang dibuat dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern serta kesesuaian dengan standar yang diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang mengatur pola hubungan antar anggota tim pemeriksa beserta tanggung jawabnya masing – masing.
- Inspektorat menyediakan anggaran penugasan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam DPA Inspektorat yang perhitungan besarnya mengacu pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang standar biaya pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.
- Inspektorat telah memiliki kerangka jabatan yang mencakup pola pengembangan karir dan kriteria penilaian kinerja bagi tenaga pemeriksa.
- Inspektorat telah mengajukan usulan revisi IAC yang mencantumkan adanya dukungan dari Pimpinan Pemerintah Daerah kepada Inspektorat melalui pengkomunikasian mandate, kewenangan dan manfaat pengawasan untuk penguatan inependensi, objektivitas dan efektivitas serta adanya kegiatan pengawasan oleh pimpinan terhadap kinerja Inspektorat.

c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan pagu anggaran untuk Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar Rp.105.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.103.073.493,00 (98,17%). Program ini didukung oleh kegiatan Diklat tersebut meliputi Diklat Penjejangan Auditor Muda , Diklat Penjenjangan Auditor Muda Madya dengan metode jarak jauh, Diklat Penjenjangan Auditor Ahli dengan metode pembelajaran jarak jauh, dilat autdit invenstigatif di lingkungan APIP, diklat probity audit di lingkungan APIP, diklat audit kinerja di lingkungan APIP dengan metode pembelajaran jarak jauh, diklat audit investigatif di lingkungan APIP dengan metode pembelajaran jarak jauh, diklat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) integratif di lingkungan APIP, diklat evaluasi implementasi SAKIP

dengan metode pembelajaran jarak jauh , Diklat audit kinerja pemerintah daerah pembelajaran jarak jauh, diklat optimalisasi PAD, bimtek penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko (PPBR), bimtek permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasfikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah dan bimtek menyusun karya tulis berupa tinjauan, ulasan ilmiah dan policy brief.

d. Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti telah dilaksanakan dengan capaian 100%. Hal ini diukur dengan diterbitkannya surat tugas pengawasan selama tahun berjalan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kegiatan ataupun dana. Pagu anggaran untuk Program Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 96.600.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.700.000,00 (93,89%). Program ini didukung kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. Pagu Anggaran untuk Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Rp. 96.600.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.700.000,00 (93,89%) serta realisasi fisik sebesar 100%. Pada kegiatan ini dilaksanakan belanja pengawasan khusus untuk pengaduan masyarakat yang bersumber dari laporan langsung, surat kaleng atau email yang menerangkan adanya penyalahgunaan dana atau suatu kegiatan yang menyalahi dari aturan yang berlaku.

e. Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) telah dilaksanakan pada tahap pencanangan dengan 6 SKPD yang berkomitmen melaksanakan pencanangan ZI yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Ratu Zalecha, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan Daerah dan Kecamatan Gambut. Pagu anggaran untuk program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.572.334.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.423.734.082,00 dan realisasi sesuai target yang ditetapkan. Program ini didukung kegiatan–kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH
  Pagu anggaran untuk kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH yaitu sebesar Rp.489.130.000,00 dan realisasi Rp.391.631.191,00 dengan capaian fisik sebanyak 2 kegiatan atau 100%. Meliputi kegiatan rapat koordinasi per triwulan bersama dengan Tim Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kejaksaan Negeri dalam usaha penanganan kasus dalam pengelolaan keuangan daerah atau negara.
- Kegiatan Fasilitasi Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara.

  Pagu anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara sebesar Rp. 26.684.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.042.891,00 disertai dengan capaian fisik 100%. Inspektorat bertindak sebagai fasilitator dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN dengan mengadakan rapat dan sosialisasi kepada PNS yang memenuhi kriteria sebagai wajib lapor.
- Kegiatan Pengendalian Gratifikasi

  Pagu anggaran untuk kegiatan Pengendalian Gratifikasi sebesar Rp.26.420.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.400.000,00 dan realisasi fisik 20%. Pengendalian gratifikasi merupakan suatu urusan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif Badan Pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Pada tahun 2020, tidak ada pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi oleh Perangkat Daerah maupun BUMD sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa koordinasi dengan BPKP.
- Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komponen Zona Integritas Pagu anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komponen Zona Integritas sebesar Rp. 285.960.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 208.698.112 dan realisasi fisik sebanyak 6 SKPD atau 200%. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan

WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kegiatan ini 6 SKPD difasilitasi sebagai Zona Integritas yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan Daerah dan Kecamatan Gambut. Inspektorat sebagai fasilitator maka dianggarkan belanja untuk menunjang kegiatan tersebut seperti makan minum sosialisasi, perjalanan dinas dalam daerah serta pembentukkan tim zona integritas yang melibatkan 6 SKPD tersebut.

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.963.971.630,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.858.047.511,00 (89,01%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Pagu anggaran Kegiatan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.2.450.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.137.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah terpenuhi jasa surat menyurat selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan materai, perangko serta benda pos lainnya selama 1 tahun
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu anggaran Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.98.400.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.068.453,00 dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Terpenuhinya jasa komunikasi dan kebutuhan listrik selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran rekening listrik, telepon dan internet selama 1 tahun
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.170.018.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.144.854.797,00 (85,20%) dan realisasi fisik

100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah terpenuhinya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan perbaikan peralatan kerja yang memerlukan perbaikan agar dapat berfungsi kembali dengan baik selama 1 tahun.

4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

   Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.25.099.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.22.010.000,00 (87,69%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah terpenuhinya alat tulis administrasi perkantoran selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan alat tulis kantor administrasi perkantoran selama 1 tahun.

5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp.49.922.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.39.931.732,00 (79,99%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan barang cetakan seperti map, buku agenda, kwitansi bendahara dan barang cetakan lainnya serta penyediaan penggandaan selama 1 tahun.

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp.9.649.750,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.238.500,00 (85,38%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah terpenuhinya instalasi dan penerangan kantor selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama 1 tahun.

7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp.167.703.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.162.742.900,00 (97,27%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan kebutuhan peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun. Pada kegiatan ini juga terdapat pengadaan alat rumah tangga lainnya, meja dan kursi kerja serta proyektor dan gorden.

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

   Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.8.400.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.400.000,00 (100%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah Terpenuhinya penyediaan koran dan majalah selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan koran dan majalah selama 1 tahun sebanyak 24 dokumen atau 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

   Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp.48.200.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.47.751.903,00 (99,07%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah terpenuhinya konsumsi harian pegawai, rapat dan tamu selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa makanan dan minuman harian pegawai, rapat serta tamu dan majalah selama 1 tahun.

10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

    Pagu anggaran untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp.115.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.108.115.722,00 (94,01%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan berupa perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun.

11. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Pagu anggaran untuk kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp.269.528.880,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.241.796.504,00 (89,71%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran adalah terpenuhinya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan tenaga tidak tetap (kontrak) yang melaksanakan tugas sesuai kualifikasi pendidikan pada sekretariat di 3 (tiga) sub bagian, ditambah dengan petugas kebersihan dalam ruangan dan luar ruangan/lingkungan kantor termasuk taman kantor, front office selama 1 tahun.

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
Pagu anggaran untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.204.350.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.166.656.081,00 (81,55%). Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagu anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp.70.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.69.976.630,00 (99,97%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor adalah berfungsinya gedung, pagar dan halaman kantor secara optimal selama 1 tahun. Adapun realisasi kegiatan berupa pemerliharaan gedung kantor, pagar serta halaman kantor yang merupakan pendukung kelancaran kegiatan pengawasan dalam hal pemeliharaan bangunan dan lingkungan kantor agar tetap berfungsi optimal sesuai umur rencana.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pagu anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp.134.350.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.96.679.451,00 (71,96%)

dan realisasi fisik sebanyak kendaraan atau 100%. Target kinerja kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah berfungsinya kendaraan mobil jabatan secara optimal selama 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah servis kendaraan, pembelian suku cadang, bahan bakar serta pengurusan STNK sebagai pendukung kelancaran kegiatan pengawasan dalam hal kelancaran operasional kegiatan agar tetap berfungsi optimal dan tetap layak pakai.

h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu anggaran untuk program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah sebesar Rp.16.200.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.200.000,00 (100%). Program ini didukung Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . Pagu anggaran untuk kegiatan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp.16.200.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.200.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebanyak 1 dokumen atau 100%.

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta

indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
4. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan;
5. Fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;
6. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
8. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021, Inspektorat memiliki kewajiban untuk melaksanakan 3 (tiga) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang 17 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
3. Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.12.267,116.039 (dua belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu tiga puluh sembilan

rupiah), termasuk didalamnya untuk belanja gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Kabupaten Banjar.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan pencapaian target akhir periode Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rnja Kerja Tahun 2020										
4.01.4.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**	**-**	**100%**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**-**	**-**	**-**
4.01.4.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan kebutuhan listrik	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya administrasi kantor	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya instalasi dan penerangan kantor	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya penyediaan koran dan majalah	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya konsumsi harian, rapat dan tamu	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.01.19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.02.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur**	-	100%	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	-	-	-
4.01.4.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan renovasi kantor	-	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	-	100%	13 Kendaraan	13 Kendaraan	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan**	-	100%	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	-	-	-
4.01.4.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	-	100%	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
4.01.4.02.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	-	100%	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.01.20	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Tingkat maturitas SPIP**	-	**100%**	**level 3**	**Level 3**	**100%**	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan internal secara berkala	-	111%	96 Obrik	96 Obrik	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.20.05	Inverisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawasan	-	100%	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	80%	96 Obrik	96 Obrik	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.20.07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan	-	100%	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.01.21	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**Tingkat kapabilitas APIP**	-	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**100%**	-	-	-
4.02.4.02.01.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti pelatihan	-	118,42%	14 Orang	14 Orang	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.21.02	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang disusun	-	100%	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.01.25	**Program Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	-	**100%**	**80%**	**80%**	**100%**	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.4.02.01.25.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah penanganan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.25.02	Penyusunan Mekanisme Penerimaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	-	50%	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.01.26	**Program Pengawasan dan Pencegahan dengan APH**	**Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)**	-	**100%**	**5,56%**	**5,56%**	**100%**	-	-	-
4.02.4.02.01.26.01	Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH	-	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.26.02	Fasilitasi Penyampaian Laporan Hasil kekayaan Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang wajib LHKASN dan LHKPN	-	65,63%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.4.02.01.26.03	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah ASN yang mendapatkan sosialisasi pengendalian gratifikasi	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.26.04	Fasilitasi Pemernuhan Zona Integritas	Jumlah skpd yang difasilitasi ZI	-	50%	5,56%	5,56%	100%	-	-	-
Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar sampai Triwulan II Tahun 2021										
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	-	-
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	-	-	-	-	**50%**	-	-
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	2 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**59 Orang**	-	-	-	-	**30 Orang**	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan	48 Orang	-	-	-	-	48 Orang	-	-
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**Level 3**	-	-	-	-	**Belum ada realisasi**	-	-
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kompetensi APIP	25 Orang	-	-	-	-	15 Orang	-	-
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani**	**12 Bulan**	-	-	-	-	**6 Bulan**	-	-
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya alat tulis kantor	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani**	**12 Bulan**	-	-	-	-	**6 Bulan**	-	-
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	-	-	-	6 Bulan	-	-
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**12 Bulan**	-	-	-	-	**6 Bulan**	-	-
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	-	-
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	-	-	-	-	0,5 Tahun	-	-
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tingkat Maturitas SPIP**	**Level 3**	-	-	-	-	**Belum ada realisasi**	-	-
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Pengawasan**	**168 Kali**	-	-	-	-	**45 Kali**	-	-
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Kali	-	-	-	-	8 Kali	-	-
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Kali	-	-	-	-	17 Kali	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	8 Kali	-	-	-	-	5 Kali	-	-
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	4 Kali	-	-	-	-	4 Kali		
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	12 Kali	-	-	-	-	11 Kali		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100%	-	-	-	-	50%		
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**	**Level 3**	-	-	-	-	**Belum ada realisasi**		
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18 Pengaduan	-	-	-	-	13 Pengaduan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)**	**6%**	-	-	-	-	**1,40%**	-	-
6.01.03.2.01	**Pendampingan dan Asistensi**	**Terlaksananya pendampingan dan asistensi**	**4 Kegiatan**	-	-	-	-	**Belum ada realisasi**	-	-
6.01.03.2.01.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah SKPD yang difasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Jumlah skpd yang difasilitasi ZI yang mengikutisosialisasi gratifikasi	34 SKPD 6 SKPD	- -	- -	- -	- -	**Belum ada realisasi** **Belum ada realisasi**	- -	- -
6.01.03.2.01.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti sosialisasi gratifikasi Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terfasilitasi jumlah skpd yang difasilitasi ZI	2 Kegiatan 100% 100%	- - -	- - -	- - -	- - -	1 Kegiatan - 100%	- - -	- - -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			6 SKPD	-	-	-	-	-	-	-
6.01.03.2.01.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan	2 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-
		Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti sosialisasi gratifikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terfasilitasi	100%	-	-	-	-	100%	-	-
		jumlah skpd yang difasilitasi ZI	6 SKPD	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber : evaluasi Renja tahun 2019 dan evaluasi Renja triwulan 2 tahun 2021)

Hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2020 dan perkiraan capaiannya pada triwulan II tahun 2021, adalah seperti yang ditunjukan pada table 2.1 diatas.

Pada tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) dan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan, dengan total pagu dana untuk belanja langsung sebesar Rp.12.857.533.636 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- **Anggaran Belanja Operasi : Rp12.774.629.236,00**
  - Belanja Pegawai Rp8.448.899.136,00
  - Belanja Barang dan Jasa Rp4.325.730.100,00
- **Anggaran Belanja Modal : Rp82.904.400,00**
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp82.904.400,00
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

Sedangkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Banjar pada tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan anggaran sebesar	Rp.	10.268.658.636,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan anggaran sebesar	Rp.	1.616.550.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar	Rp.	972.325.000,00

Adapun dari segi analisis keuangan sampai dengan triwulan II ahun 2021 dana yang di manfaatkan untuk belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp4.805.976.976,00 dari dana yang tersedia Rp12.857.533.636,00 yang berarti dana terserap secara efektif dengan capaian sasaran yang efisien. Walaupun serapan dana hanya 37,38% tetapi secara fisik kegiatan telah tercapai 42,00% sehingga didapat efisiensi sebesar 4,62%.

Usaha-usaha yang dilakukan melalui kerjasama seluruh jajaran/aparat Inspektorat Kabupaten Banjar, serta koordinasi yang intensif dengan instansi/unit kerja lainnya, sehingga Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dari tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2021 di atas dapat kita lihat beberapa hal terkait :

1. Pada tahun 2021, Inspektorat melaksanakan 2 program utama, 1 program pendukung dengan 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan total pagu dana untuk belanja langsung sebesar Rp.10.524.719.513,00. Sampai dengan pelaksanaan Renja di triwulan II, realisasi keuangan adalah sebesar Rp.4.805.976.967,00. Perkiraan realisasi capaian target kinerja program kegiatan tahun 2021 sampai dengan TW II, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target dan ada pula indikator yang belum yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target adalah karena program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping

itu sebagian besar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

a. Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Tidak Mencapai Target.

   Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2021 yang masih rendah realisasi anggarannya adalah pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebesar 23,33% hal ini disebabkan beberapa hal yaitu :

   - Pelaksanaan Fasilitasi Diklat Manajemen Risiko belum dapat dilaksanakan karena peraturan Kepala Daerah terkait MR masih dalam proses;
   - Pelaksanaan Sertifikat ISO terkendala dengan terbitnya ketentuan baru tentang Indikator Kinerja SPIP terintegrasi.
   - Penyusunan Risk Register dalam SPIP terkendala dengan penyesuaian nomenklatur baru program dan kegiatan.

b. Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target.

   Pada program pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam kegiatan koordinasi pengawasan dan pencegahan dengan APH telah memenuhi target dikarenakan seyogyanya kegiatan ini dilaksanakan pertriwulan sehingga dalam pemenuhan target tidak mengalami kendala yang berarti. Terdapat pula pada sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan persentase capaian kinerja mencapai 100%. Pada triwulan II sub kegiatan reviu laporan keuangan memang ditargetkan 100% karena sub kegiatan ini merupakan reviu laporan keuangan perangkat daerah. Dimana idealnya terlaksana dan diselesaikan pada triwulan II tahun berjalan.

c. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Melebihi Target hal ini disebabkan :
   - Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terdapat realisasi capaian kinerja melebihi target sebesar 60% dari target 50% yang direncanakan, hal ini disebabkan jumlah pelaksana kegiatan diklat/bimbingan teknis dapat lebih dioptimalkan dengan ketersediaan dana yang ada. Pelaksanaan Diklat/Bimbingan teknis hampir seluruhnya dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom, hal tersebut jelas menekan biaya operasional pelaksanaan diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP Pusat.
   - Pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja realisasi kinerja sebesar 62,50% dengan kata lain terdapat 12,50% kinerja yang telah melebihi target. Hal ini disebabkan adanya kegiatan asistensi atau pendampingan terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan hasil reviu APIP terhadap pelaporan kinerja masing – masing perangkat daerah.
   - Pada sub kegiatan Pengawasan Desa jua terdapat persentase yang cukup signifikan sebesar 91,67%. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pengawasan desa sebanyak 12 kegiatan hampir terealisasikan sepenuhnya namun tidak dengan serapan anggaran. Anggaran juga disediakan untuk pendampingan /asistensi perangkat desa guna meningkatkan sumber daya manusia di desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   - Pada Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terdapat capaian kinerja sebesar 72,22%. Sub kegiatan ini melaksanaan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat dimana 17 pengaduan yang jadikan sebagai target pada tahun 2021 yang sampai dengan triwulan II

2021 telah terdapat 13 pengaduan yang ditindaklanjuti. Hal ini sangat berpengaruh pada kinerja pemeriksa sehingga persentase capaian lebih tinggi dari pada apa yang ditargetkan sebelumnya. Namun dari aspek ketersediaan anggaran, Inspektorat Kabupaten Banjar berusaha lebih mengoptimalkan dalam pelaksanaan pengawasan dengan tetap mengutamakan tindaklanjut penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai arahan pimpinan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Pada tahun anggaran 2021 ini ada beberapa program/kegiatan yang realisasi capaiannya tidak bisa sesuai target Renstra, selain terkait masalah kematangan dalam menetapkan target, hal ini juga disebabkan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan pada perangkat daerah sehingga mengharuskan adanya penyesuaian target dan anggaran pelaksanaan kegiatan, ditambah lagi pada triwulan ke II tahun 2021 adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan semua Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Banjar mengalami pengurangan anggaran belanja langsung satuan kerjanya, yang tentunya hal ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen Renstra maupun didalam Renja Perangkat Daerah.

4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fator-faktor penyebab tersebut.

   Adapun Kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain:

   a. Salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah meningkatkan pemahaman atau wawasan para penyusun perencanaan agar aktif mempelajari tugas pokok, fungsi, dan tugas khusus lainnya serta pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan bimtek/sosialisasi atau diklat yang

terkait perencanan kegiatan, yang pada akhirnya dapat menjadikan sebagai tim penyusun rencana kegiatan yang berkualitas yang menguasai dan memahami kondisi kerjanya, dan bisa merumuskan serta menterjemahkan kegiatan kedalam dokumen perencanaan secara baik dan akurat, yang mampu menetapkan target secara realistis dan berpandangan visioner.

b. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada perangkat daerah, dimana sering ditemui target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, seperti target indikator kinerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Renja berbeda dari target Renstra, atau target dalam RKA berbeda dari Renja, atau bisa juga target RKA berbeda dengan DPA, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada SKPD oleh Pemerintah Kabupaten jauh lebih kecil dari pagu yang diusulkan atau ditargetkan oleh perangkat daerah, hal tersebut mengakibatkan adanya pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Namun hal ini sulit ditetapkan karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan anggaran belanja dalam APBD tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat untuk program dan sasaran pada periode Renstra Tahun 2016-2021 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari Indeks Kepatuhan; Tingkat Maturitas SPIP; Tingkat Kapabilitas APIP; Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; dan Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK dan WBBM. Untuk Indeks Kepatuhan merupakan indikator yang ditetapkan pada Renstra Perubahan pada tahun 2019, sehingga indikator ini tidak terlihat secara penuh selama periode Renstra tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat pada Tahun 2016-2021 dapat digambarkan pada tabel berikut. Analisis

pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	1 (2019)	2 (2020)	1 (2022)	2 (2023)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*17*
1	Indeks Kepatuhan	-	-	-	88,38	89,35	96,16	95,01	-	-	
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 dengan catatan	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	-	-	
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	-	-	
4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	80%	80%	80%	80%	100%	100%	-	-	
5	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK dan WBBM	-	0	0	5,56%	5,56%	5,56%	5,45%	-	-	

(Sumber : Renstra Inspektorat 2021-2026 dan LkjIP Tahun 2019 - 2020)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk reviu pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan dalam pengawasan Pemerintah Daerah yang telah berjalan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa persoalan atau hambatan. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia pengawasan belum memenuhi kebutuhan sesuai beban kerja dan kapasitas kompetensi belum merata seiring dengan perkembangan metode dan pelaksanaan audit
2. Tuntutan pengawasan dan pendampingan yang semakin tinggi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pada perangkat daerah dan penggunaan dana desa oleh pemerintahan desa;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP) disetiap perangkat daerah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan;
4. Belum diterapkannya ketentuan mengenai sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga menimbulkan kurangnya kepedulian obrik terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk Tahun 2022 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Banjar sesuai dengan peta jalan dalam Internal Audit Capability Model (IACM).
2. Penambahan PNS jabatan fungsional auditor pertama untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, penambahan Diklat dan SDM penunjang.
3. Pengembangan implementasi SPIP pada seluruh perangkat daerah melalui penilaian Maturitas SPIP serta menjadikan penerapan SPIP secara intensif melalui kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum melalui kegiatan Sinergitas APIP-APH dan Unit Pemberantasan Pungli dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penetapan SKPD/Unit Kerja yang di tetapkan sebagai WBK/WBBM.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya reviu terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Inspektorat dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4

Reviu Terhadap terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Inspektorat

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Banjar	**Maturitas SPIP**	**Level 3**	**1.816.350.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Kab. Banjar	**Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern**		**1.499.050.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	90%	1.576.300.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah	80%	1.373.650.000	
								Persentase Peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah	80%		
								Persentase Peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah	80%		
								Persentase Desa yang mengimplementasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh	100%		
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja		Jumlah pengawasan kinerja	16 Kali	233.200.000	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja		Persentase kinerja program strategis perangkat daerah	100%	632.800.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								dengan nilai >= 80			
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan		Jumlah pengawasan keuangan	60 Kali	672.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan		Temuan material yang ditindaklanjuti	100%	226.800.000	
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja		Jumlah reviu kinerja	8 Kali	174.800.000	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP	7	179.300.000	
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja		Jumlah reviu keuangan	4 Kali	72.800.000	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	10.250.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa		Jumlah pengawasan desa	12 Kegiatan	314.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Desa		Temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	290.000.000	
								Jumlah Desa yang didampingi	32 Desa		
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Persentase tindaklanjut hasil pengawasan	100%	109.500.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Persentase TLHP yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100%	34.500.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	125.400.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu	18 Pengaduan	240.050.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase pengaduan masyarakat yang	100%	125.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								ditindaklanjuti sesuai SOP			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4.20	963.900.000	
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Level kapabilitas APIP	Level 3	963.900.000	
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah SKPD yang difasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 SKPD	221.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase SKPD yang menerapkan SPIP dengan minimal level 2	100%	84.200.000	
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah koordinasi pengawasan dan pencegahan	2 Kegiatan	571.600.000	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Rata - rata nilai RB Perangkat Daerah yang di evaluasi	75	33.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah SKPD yang difasilitasi Zona Integritas	6 SKPD	429.725.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi	8 Kegiatan	552.700.000	
								Persentase penyampaian wajib lapor LHKPN	100%		
						Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		nilai MCP	80	294.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase SKPD yang difasilitasi pembangunan Zona Integritas	5 SKPD		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penilaian mandiri indeks kepatuhan dan kinerja intern Inspektorat	80%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.200.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan perangkat daerah yang akuntabel	31 Dokumen	6.300.000	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen penganggaran perangkat daerah yang akuntabel	5 Dokumen	2.100.000	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen penganggaran perangkat daerah yang akuntabel	3 Dokumen	2.100.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	2 Laporan	19.200.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel	23 Dokumen	2.100.000	
	Kegiatan Administrasi					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keuangan Perangkat Daerah										
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan	8.053.266.939	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Ketersediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 Bulan	410.850.000						
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	26.400.000	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	1 Dok	2.100.000	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	14 Dok	2.100.000	
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen pengelolaan Barang Milik	7 Dok	6.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Daerah yang akuntabel			
						Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen perencanaan BMD perangkat daerah sesuai identifikasi kebutuhan BMD yang akuntabel	1 Dok	2.000.000	
						Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang akuntabel	4 Dok	2.100.000	
						Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen pelaporan BMD perangkat daerah yang akuntabel	2 Dok	2.100.000	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	353.050.000	
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang akuntabel	6 Laporan	11.700.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		Terpenuhinya kompetensi APIP	25 Orang	317.700.000	**Sub Kegiatan** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah APIP yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	341.350.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-Undangan										
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani			**Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	451.285.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	11.722.100	**Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jaringan listrik terpelihara dengan baik	1 Gedung	10.878.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	7.637.900	**Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 kantor	11.841.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersediannya alat tulis kantor	12 Bulan	30.527.500	**Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 Bulan	51.821.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	39.885.000	**Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan	12 Bulan	46.865.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	20.000.000	**Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan surat kabar yang terpenuhi	12 Bulan	10.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Ketersediaan makanan dan minuman	12 Bulan	14.880.000	**Sub Kegiatan** Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kunjungan tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	14.880.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 Bulan	456.014.000	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	12 Bulan	305.000.000	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	22.384.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Pengadaan mebel sesuai dengan rencana kebutuhan	3 Unit	9.886.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	6 Unit	12.498.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani			**Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 persen	581.505.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	12 Bulan	4.250.000	**Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lancarnya Jasa surat menyurat	12 Bulan	4.250.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	121.368.000	**Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Lancarnya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	122.785.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa		Tersediannya peralatan dan	12 Bulan	107.355.500						

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor								
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	454.470.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran			**Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	299.575.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	40.990.000	**Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	100%	42.990.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Unit	153.335.000	**Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	100%	128.335.000	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik	100%	78.250.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	80.000.000	**Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilita		Terpelihara dan berfungsinya	100%	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (lamp RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah (tahun pertama renstra)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Bangunan Lainnya					si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		gedung kantor dengan baik			

(Sumber : RKPD Inspektorat tahun 2021 dan Matrik Renstra Inspektorat 2021 - 2026)

Berdasarkan data Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis Kebutuhan yang tersaji di table 2.4, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat di Tahun 2022, yaitu Inspektorat akan melaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
   2.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
   2.3 Inventarisasi Temuan Pengawasan
   2.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
   2.5 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat.
   2.6 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
4. Program Pencegahan terhadap Penyimpangan dan Korupsi.
   2.7 Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH
   2.8 Fasilitasi Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara
   2.9 Pengendalian Gratifikasi
   2.10 Fasilitasi Pemenuhan Komponen Zona Integritas

Namun begitu, terdapat perbedaan antara pagu indikatif yang ada pada rancangan Awal RKPD yaitu sebesar Rp4.874.390.000 (empat milyar delapan ratus juta puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat yaitu sebesar Rp.4.213.849.100,00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah). Adapun alasan penyebab pagu hasil analisis lebih kecil daripada pagu rancangan awal RKPD yaitu pada beberapa program/kegiatan pagu rancangan awal RKPD yang bersumber dari dokumen Renstra dianggap terlalu besar nominalnya dan angkanya masih bisa ditekan untuk mengejar target kinerja yang sama

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3. Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata :
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian :
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4. Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan

Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
    a. Peningkatan Sistem Pendidikan
    b. Peningkatan Sistem Kesehatan
    c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
    a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
    b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
    c. Penanggulangan Kemiskinan
    d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
    a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
    b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
    c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
    a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
    b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    c. Peningkatan Kualitas Aparatur
    d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
    a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama

b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Beruntung Baru berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Beruntung Baru masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

Dalam Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 telah di tetapkan target dalam upaya penguatan sistem pengawasan dengan peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan. Sejalan dengan target tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dengan tujuan mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Dalam mewujudkan tujuan tersebut masih ditemui hambatan berkaitan dengan perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya.

Karena itu diperlukan perubahan mental model/perilaku aparatur. yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan

perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu,perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan komprehensif khususnya di bidang pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis dengan penjabaran :

MAJU

- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
- Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI).*

MANDIRI

- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
- Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

AGAMIS

Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis

Inspektorat selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan mendukung pelaksanaan misi ke empat yaitu Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan Sasaran Terwujudnya integritas birokrasi dengan indikator Indeks Integritas yang didukung melalui Program Penyelenggaraan pengawasan dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Tujuan Inspektorat dalam

mendukung misi ini adalah Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

3.2.1 Garis Besar Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai target dari IKU Inspektorat maka pada TA 2022 Inspektorat akan melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 39 subkegiatan.

Adapun penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Inspektorat adalah seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Meliputi Seluruh Perangkat Daerah maupun Desa dan juga terkait pengaduan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Banjar.

Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan prioritas adalah sebesar Rp.4.874.390.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan sumber pendanaan seluruhnya berasal dari dari Dana Alokasi Umum

Dalam rangka mencapai mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Banjar melaksanakan program dan kegiatan utama/prioritas sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
   b. Penyelenggaraan Pengawasan Denga Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan umpat Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Barang Milik Daerah dan Peranfkat Daerah.
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program perangkat daerah/program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra pada Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat di tahun 2022 adalah sebanyak 3 Program, 11 Kegiatan dan 39 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.874.390.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) . Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1. di bawah ini :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**4,874,390,000**					**5,199,198,000**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,001,071,250**					**2,175,148,000**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**22,600,000**					**32,600,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Disusun Sesuai Ketentuan (Renja Murni, Renja Perubahan, Renstra)	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	3 Dokumen	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Dokumen	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Dokumen	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Dokumen	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000

6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Dokumen	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja SKPD (LKJIP, LKPJ & LPPD)	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	3 Dokumen	4 Level	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	20,000,000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monev (RFK Per Bulan, Laporan Renja Per-Triwulan, Laporan Tepra, PBJ)	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Dokumen	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**29,400,000**					**31,920,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Perangkat Daerah		Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik		100 Persen		4 Level	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	0
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	12 Bulan	4 Level	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	27,720,000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Laporan	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	IKM Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	12 Bulan	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2,100,000**					**2,100,000**
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	IKM Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Inventarisasi Aset	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	5 Laporan	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**312,375,000**					**327,100,000**

6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	IKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Laporan	4 Level	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	2,100,000
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Perangkat Daerah	Jumlah APIP yang mengikuti Bimbingan Teknis	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	25 PNS	4 Level	310,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	325,000,000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**590,397,600**					**674,253,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Perangkat Daerah	Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Kantor	4 Level	11,262,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	12,825,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	25 Jenis	4 Level	19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	20,000,000
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Kantor	4 Level	19,628,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	20,610,000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Materai	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	12 Kali 150 Lembar	4 Level	30,527,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	33,580,000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Penggandaan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	8 Jenis 88000 Lembar	4 Level	39,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	48,870,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	IKM Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Indeks Persepsi Kapabilitas	Kab. Banjar, Martapura,	100 Persen	24 kali	4 Level	20,000,000	Dana Transfer Umum-		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	22,000,000

					undangan		undangan	dan Kode Etik	Sungai Paring					Dana Alokasi Umum				
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Perangkat Daerah	Ketersediaan Makanan dan Minuman Tamu	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	672 Orang	4 Level	14,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	16,368,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Perangkat Daerah	Ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat Terlaksananya Koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	2200 Orang 1 Tahun	4 Level	435,014,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	500,000,000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**749,873,650**					**789,175,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	12 Kali	4 Level	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	4,675,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	36 kali	4 Level	121,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	133,500,000
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	4 Level	183,405,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	188,000,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Perangkat Daerah	Terfasilitasinya tenaga Non ASN	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	13 Bulan	4 Level	440,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	463,000,000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**294,325,000**					**318,000,000**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	IKM Perangkat Daerah	Terlaksanaya pemeliharaan mobil jabatan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 unit	4 Level	40,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	45,000,000

					Dinas Jabatan									Umum				
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	12 unit	4 Level	153,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	168,000,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Perangkat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	100 Persen	1 Gedung	4 Level	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Perangkat Daerah	100 Persen	105,000,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**1,697,377,500**					**1,782,950,000**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**1,497,825,000**					**1,572,950,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	3 Level	8 Kali	4 Level	213,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	224,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	3 Level	60 kali	4 Level	674,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	707,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	3 Level	9 kali	4 Level	152,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	160,000,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	3 Level	8 kali	4 Level	44,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	48,000,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Pengawasan Desa	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	3 Level	16 Kali	4 Level	298,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	313,500,000
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil		Jumlah tindak lanjut hasil		Kab. Banjar, Martapura,					Dana Transfer Umum-				

6	01	02	2.01	07	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tingkat Maturitas SPIP	pemeriksaan BPK dan TLHP APIP	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Sungai Paring	3 Level	7 Kali	4 Level	114,975,000	Dana Alokasi Umum		Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	120,450,000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**199,552,500**					**210,000,000**
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah pengawasan investigasi	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	3 Level	30 kali	4 Level	199,552,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	210,000,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1,175,941,250**					**1,241,100,000**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**55,000,000**					**65,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	1 Persen	6 Dokumen	4 Level	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1 Persen	30,000,000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	1 Persen	7 Dokumen	4 Level	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1 Persen	35,000,000
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**1,120,941,250**					**1,176,100,000**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai dan difasilitasi Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	1 Persen	24 SKPD	4 Level	232,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1 Persen	243,100,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	1 Persen	20 Kali	4 Level	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1 Persen	105,000,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Jumlah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai	1 Persen	24 Kali	4 Level	600,180,000	Dana Transfer Umum-Dana		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1 Persen	630,000,000

					Pemberantasan Korupsi		dan pemberantasan korupsi		Paring					Alokasi Umum				
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Persentase Perangkat Daerah yang dinilai dan difasilitasi pembangunan zona integriras	Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	1 Persen	15 SKPD	4 Level	188,711,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1 Persen	198,000,000
												TOTAL	**4,874,390,000**					**5,199,198,000**

(sumber data : banjarkab.sipd.kemendagri.go.id)

BAB V
P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022 dan menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Inspektorat tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Inspektorat dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Inspektorat untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada

optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022.

Demikian Renja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2022 ini disusun semoga Allah SWT selalu meridhai semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang ***“ Manis “ Maju, Mandiri dan Agamis.***

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Renja BPKAD Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan BPKAD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Awal Renja BPKAD Tahun 2022 didasarkan pada Renstra BPKAD 2021 - 2025 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021– 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Mengingat pentingnya arti dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berikutnya.
2. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan perkiraan maju.
3. Penyusunan renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2022 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021;

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

❖ **Maksud**

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja .

❖ **Tujuan**

a) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BPKAD tahun 2022;
b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022;
c) Sebagai instrumen akuntabilitas di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari dokumen Perubahan Renja BPKAD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkatb Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III. Tujuan dan Sasaran BPKAD
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja BPKAD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD
BAB V. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 - 2021.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 - 2021 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah"** , penjabaran visi tersebut adalah :

~ Sejahtera yaitu kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
~ Barokah yaitu sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yaitu :

1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah.
5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPKAD Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021 - 2025, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPKAD Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPKAD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Banjar, BPKAD berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi kelima dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada empat misi lainnya guna menjalin koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

Pada tahun 2020 BPKAD Kabupaten Banjar mendapatkan pagu murni belanja langsung sebesar Rp. 10.131.994.545 dan pagu perubahan belanja langsung sebesar Rp. 5.525.339.820. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2020 melaksanakan 1 urusan, 8 program, dan 59 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   - Pengadaan Mebeleur
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5) Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah
   - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
   - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
   - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
   - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
   - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
   - Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
   - Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
   - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pergeseran APBD
   - Penyusunan Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan
   - Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran
   - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah
6) Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
   - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
   - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
   - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah
7) Program Penatausahaan Keuangan Daerah
   - Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah
   - Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah
   - Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD
   - Pengelolaan Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah
   - Pembinaan Penatausahan Keuangan Daerah
   - Rekonsiliasi Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah
   - Pengelolaan dan Pelaporan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah
   - Peningkatan Pelaksanaan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik
   - Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD
   - Pengelolaan Realisasi Belanja Pegawai SKPD
   - Percepatan Penyaluran Belanja Hibah PPKD
   - Percepatan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial PPKD
   - Pembinaan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial PPKD
   - Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS
   - Pengelolaan Penyaluran ADD, DD, dan BHPRD
   - Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD

- Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol

8) Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah
   - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
   - Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
   - Penatausahaan dan Rekonsiliasi BMD
   - Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD
   - Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BMD

Adapun realisasi kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Kabupaten Banjar yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	-
2	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	2 Buah	-

b) Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Kabupaten Banjar yang **telah memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

* **Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah** dengan indikator program Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah realisasi sebesar 92,55 dari target 100% dan capaian kinerja 91,67 % dengan kriteria Berhasil.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok
4	Penyusunan Rancangan Peraturan	Tersusunnya Rancangan	1 Dok	1 Dok

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu		
5	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Jaringan Aplikasi Simda Keuangan untuk SKPD	54 SKPD	54 SKPD
6	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelatihan terhadap Kasubbag Perencanaan SKPD	108 Orang	108 Orang
7	Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD
8	Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	2 Dok	2 Dok
9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pergeseran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penggeseran APBD	2 Dok	2 Dok
10	Penyusunan Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan	4 Dok	4 Dok
11	Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA/RKAP SKPD tepat Waktu	1 SKPD	1 SKPD
12	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah	3 Dok	3 Dok

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Penyusunan rencana kegiatan tepat waktu dan ketersediaan dana dibendahara
- Kerjasama yang baik antar pejabat dan pelaksana pada bidang dalam pelaksanaan kegiatan

→ **Faktor penghambat**
- Tidak ada faktor penghambat yang berarti

→ **Upaya perbaikan**
- Untuk kebutuhan anggaran disesuaikan

* **Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**, dengan indikator program Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP. Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah realisasi sebesar 87,32 dari target 100% dan capaian kinerja 100% dengan kriteria Berhasil.
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok
3	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	6 Dok	6 Dok
4	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	2 Kali	2 Kali
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	2 Dok	2 Dok
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	4 Dok	4 Dok

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Pemantauan Kegiatan Oleh Pengguna Anggaran
- Komitmen bidang Akuntansi untuk melaksanakan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Kerjasama yang baik antar pejabat dan pelaksana bidang

→ **Faktor penghambat**
- Mewabahnya Covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan rapat-rapat

→ **Upaya perbaikan**
- Melaksanakan Sesuai Tahapan Ketentuan yang berlaku

* **Program Penatausahaan Keuangan Daerah**, dengan indikator program Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu.
Program Penatausahaan Keuangan Daerah realisasi sebesar 77,36 dari target 100% dan capaian kinerja 100% dengan kriteria Berhasil.
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Penerbitan SK Penetapan Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD	7.397 Dok. Transaksi	7.397 Dok. Transaksi
2	Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banjar	966 Dok	966 Dok
3	Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD	2.377 Dok	2.377 Dok
4	Pengelolaan Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pencatatan Transaksi Pendapatan Belanja Daerah	109 SKPD	109 SKPD
5	Pembinaan Penatausahan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan	1.199 Dok	1.199 Dok
6	Rekonsiliasi Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rekon Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah	36 Laporan	36 Laporan
7	Pengelolaan dan Pelaporan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan	1.347 Dok	1.347 Dok

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
		Pendapatan dan Belanja Daerah		
8	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Aplikasi	3 Aplikasi
9	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik	75 %	75 %
10	Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD	Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD Kabupaten Banjar	2 Aplikasi	2 Aplikasi
11	Pengelolaan Realisasi Belanja Pegawai SKPD	Terlaksananya Realisasi Belanja Pegawai SKPD	12 Dok	12 Dok
12	Percepatan Penyaluran Belanja Hibah PPKD	Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah PPKD	100 %	100 %
13	Percepatan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial PPKD	Terlakasananya Penyaluran Dana Bantuan Sosial PPKD	100 %	100 %
14	Pembinaan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial PPKD	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah	24 Dok	24 Dok
15	Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS	100 %	100 %
16	Pengelolaan Penyaluran ADD, DD, dan BHPRD	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana ADD, DD dan BHPRD	277 Desa	277 Desa
17	Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD	100 %	100 %
18	Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol	100 %	100 %

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Penyampaian Dokumen penyaluran Belanja Daerah tepat waktu
- Penyampaian Dokumen Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu
- Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Tepat Waktu
- Penyampaian Dokumen Pelaporan Tepat Waktu
- SDM yang handal

→ **Faktor penghambat**
- Wabah Covid-19 mengakibatkan keterbatasan serta tidak maksimalnya koordinasi.
- Adanya Rasionalisasi Anggaran akibat pandemi sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
- Gangguan Jaringan Internet dan/atau system aplikasi sehingga update data menjadi terlambat

→ **Upaya perbaikan**
- Membuat Surat Edaran kepada SKPD agar melaksanakan percepatan dan menyampaikan dokumen dengan lengkap dan benar serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan kewajibannya.
- Melakukan koordinasi dengan admin aplikasi untuk melaksanakan perbaikan update data

* **Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah**, dengan indikator program Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**.** Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah realisasi sebesar 95,61 % dari target 100 % dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	10 Orang	10 Orang
2	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	18 Dok	18 Dok
3	Penatausahaan dan Rekonsiliasi BMD	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtangankan	54 SKPD	54 SKPD
4	Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dok	12 Dok

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
5	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BMD	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Lokasi	5 Lokasi

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Komitmen Pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Aset.
- SDM dibidang Aset yang berkompeten
- Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana
- Anggaran Tersedia di dalam DPA

→ **Faktor penghambat**
- KPKNL Banjarmasin tidak bisa menjadwalkan lelang dikarenakan jadwal lelang penuh

→ **Upaya perbaikan**
- Akan dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran 2021

* **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan indikator program Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi 87,23 % dari target 100% dan capaian kinerja 88,89% dengan kriteria Berhasil.
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24 Rekening	24 Rekening
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	100%	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	-
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan	12 Bulan
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun
9	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Tersedianya Dana
- Komitmen Pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan di sekretariat.
- SDM dibidang sekretariat yang berkompeten
- Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana
- Pengadaan Barang sesuai dengan RKBMD

→ **Faktor penghambat**
- Pembelian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak Terlaksana karena Buku Peraturaannya Tersedia dalam Bentuk Softcopy
- Mewabahnya COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas di kantor serta pembatasan orang dalam ruangan (sosial distancing)
- Penganggaran yang belum tepat dan ada SDM yang berkurang

→ **Upaya perbaikan**
- Anggaran Tahun Berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi NEW NORMAL

* **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indikator program Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi 88,63 % dari target 100 % dan capaian kinerja 85,71 % dengan kriteria Berhasil.
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun
3	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	2 Buah	-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Mobil	1 Mobil
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	31 Buah	31 Buah
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Tersedianya Dana
- Komitmen Pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan di sekretariat.
- SDM dibidang sekretariat yang berkompeten

→ **Faktor penghambat**
- Mewabahnya COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas di kantor serta pembatasan orang dalam ruangan (sosial distancing)

→ **Upaya perbaikan**
- Anggaran Tahun Berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi NEW NORMAL

* **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan realisasi 100% dari target 100% dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan	1 Tahun	1 Tahun

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
		Perundang-Undangan		

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Tersedianya Dana

→ **Faktor penghambat**
- Tidak ada Faktor Penghambat

* **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan realisasi 97,92% dari target 100% dan capaian kinerja 100 % dengan kriteria Berhasil.
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dok	20 Dok

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BPKAD 2020

→ **Faktor pendorong**
- Tersedianya Dana

→ **Faktor penghambat**
- Tidak ada Faktor Penghambat

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Banjar

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	**3**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima**	**100%**	**83,97**	**100**	**88,89**	**88,89**			
1	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24 Rek	100	24 Rek	24 Rek	100			
1	3	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	100%	100	100%	100%	100			
1	3	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	3	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	77,40	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	3	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	83,86	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	3	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	15,55	12 Bulan	0 Bulan	0			
1	3	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan	89,38	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	3	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	3	1	19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 Bulan	89,58	12 Bulan	12 Bulan	100			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	**3**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**82,72**	**100**	**85,71**	**85,71**			
1	3	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100			
1	3	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	85,27	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	3	2	10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur		87	2 Buah	0 Buah	0			
1	3	2	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100			
1	3	2	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Unit	67,14	1 Unit	1 Unit	100			
1	3	2	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	31 Unit	90,44	31 Unit	31 Unit	100			
1	3	2	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	49,22	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	3	5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
1	3	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100			
1	**3**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem**	**100**	**85,92**	**100**	**100**	**100**			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**								
1	3	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dok	85,92	20 Dok	20 Dok	100			
1	**3**	**18**		**Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah**	**Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
1	3	18	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tepat Waktu	1 Dok	79,71	1 Dok	1 Dok	100			
1	3	18	2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	1 Dok	88,35	1 Dok	1 Dok	100			
1	3	18	3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	1 Dok	91,81	1 Dok	1 Dok	100			
1	3	18	4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100			
1	3	18	5	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Jaringan Aplikasi Simda Keuangan untuk SKPD	54 SKPD	100	54 SKPD	54 SKPD	100			
1	3	18	6	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelatihan terhadap Kasubbag Perencanaan SKPD	108 Orang	91,44	108 Orang	108 Orang	100			
1	3	18	7	Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat	3 Dok	92,45	54 SKPD	54 SKPD	100			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
					penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD								
1	3	18	8	Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	7 Dok	80,65	2 Dok	2 Dok	100			
1	3	18	9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pergeseran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penggeseran APBD	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100			
1	3	18	10	Penyusunan Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan	4 Dok	100	4 Dok	4 Dok	100			
1	3	18	11	Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA/RKAP SKPD tepat Waktu	54 SKPD	100	1 SKPD	1 SKPD	100			
1	3	18	12	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah	3 Dok	100	3 Dok	3 Dok	100			
1	**3**	**19**		**Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP**	**100%**	**95,09**	**100**	**100**	**100**			
1	3	19	2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100			
1	3	19	3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100			
1	3	19	4	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan	6 Dok	100	6 Dok	6 Dok	100			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
					Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu								
1	3	19	6	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	12 Keg	92,04	2 Kali	2 Kali	100			
1	3	19	7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	2 Dok	91,15	2 Dok	2 Dok	100			
1	3	19	8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 Dok	100	4 Dok	4 Dok	100			
1	**3**	**20**		**Program Penatausahaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu**	**95%**	**100**	**100**	**100**	**100**			
1	3	**20**	1	Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Penerbitan SK Penetapan Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD	109 SKPD	100	7.397 Dok	7.397 Dok	100			
1	3	**20**	2	Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banjar	6.437 Pegawai	100	966 Dok	966 Dok	100			
1	3	**20**	3	Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD	10 SKPD	100	2.377 Dok	2.377 Dok	100			
1	3	**20**	5	Pengelolaan Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pencatatan Transaksi Pendapatan Belanja Daerah	109 SKPD	100	109 SKPD	109 SKPD	100			
1	3	**20**	7	Pembinaan Penatausahan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan	1.199 Dok	100	1.199 Dok	1.199 Dok	100			
1	3	**20**	9	Rekonsiliasi Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rekon Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah	36 Laporan	100	36 Laporan	36 Laporan	100			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	3	**20**	10	Pengelolaan dan Pelaporan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah	1.347 SP2B	100	1.347 Dok	1.347 Dok	100			
1	3	**20**	11	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah	96 SKPD	100	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100			
1	3	**20**	12	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik	50 Dok	100	75%	75%	100			
1	3	**20**	14	Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD	Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD Kabupaten Banjar	6.515 Pegawai	100	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100			
1	3	**20**	15	Pengelolaan Realisasi Belanja Pegawai SKPD	Terlaksananya Realisasi Belanja Pegawai SKPD	42 SKPD	100	12 Dok	12 Dok	100			
1	3	**20**	16	Percepatan Penyaluran Belanja Hibah PPKD	Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah PPKD	4 SKPD	100	100%	100%	100			
1	3	**20**	17	Percepatan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial PPKD	Terlakasananya Penyaluran Dana Bantuan Sosial PPKD	5 SKPD	100	100%	100%	100			
1	3	**20**	18	Pembinaan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial PPKD	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah	7 SKPD	100	24 Dok	24 Dok	100			
1	3	**20**	19	Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS	12 Pamsimas	100	100%	100%	100			
1	3	**20**	20	Pengelolaan Penyaluran ADD, DD, dan BHPRD	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana ADD, DD dan BHPRD	277 Desa	100	277 Desa	277 Desa	100			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	3	**20**	21	Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD	165 Paud Swasta	100	100%	100%	100			
1	3	**20**	22	Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol	12 Parpol	100	100%	100%	100			
1	**3**	**21**		**Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah**	**Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik**	**100%**	**100%**	**100**	**100**	100			
					Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah								
1	3	21	1	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	54 SKPD	100	10 Orang	10 Orang	100			
1	3	21	2	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	10 Keg	100	18 Dok	18 Dok	100			
1	3	21	3	Penatausahaan dan Rekonsiliasi BMD	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtangankan	25 Dok	100	54 SKPD	54 SKPD	100			
1	3	21	4	Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	108 Orang	100	12 Dok	12 Dok	100			
1	3	21	5	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BMD	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dok	100	5 Lokasi	5 Lokasi	100			
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021													
5	**02**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Opini BPK**	4 Skala					2 Skala		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	100%					50		
02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (Penyusunan Renstra dan Renja)	3 Dok					1,5		
02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD)	3 Dok					1,5		
02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD)	12 Dok					6		
02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ)	2 Dok					1		
02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	100%					50		
02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN)	1 Tahun					0,50		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar)	12 Bulan					6		
02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun)	2 Dok					1		
02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	100%					50		
02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan)	8 Peserta					4		
02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	100%					50		
02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan					6		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1 Buku					0,50		
02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	100%					50		
02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	12 Bulan					6		
					kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	12 Bulan					6		
					Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	12 Bulan					6		
02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	100%					50		
02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar)	24 Rekening					12		
02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (Jumlah paket	12 Bulan					6		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
					makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia)								
					Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana)	12 Bulan					6		
02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	100%					50		
02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Tahun					0,50		
02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun					0,50		
02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket					0,50		
02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan					6		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100					50		
02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu (Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun dan Terverifikasi)	3 Dok					1,5		
02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	1 Dok					0,50		
					Tersusunnya Rancangan Peraturan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	1 Dok					0,50		
02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	1 Dok					0,50		
					Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	2 Dok					1		
					Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang	1 Dok					0,50		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
					Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu								
02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	4 Dok					2		
02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	12 Bulan					6		
02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	3 Dok					1,5		
02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100%					50		
02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang diterbitkan)	1000 Dok					500		
02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	277 Desa					138,5		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
				Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi	96 SKPD					48		
02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%					50		
02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Triwulan/Semesteran)	12 Lap					6		
02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited) (Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu)	2 Lap					1		
02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu (Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	1 Dok					0,50		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
				Peraturan Kepala Daerah tentang	Pelaksanaan APBD yang tersusun akuntabel dan Tepat Waktu)								
02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu (Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah	1 Dok					0,50		
02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu (Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah)	1 Dok					0,50		
02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%					50		
02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	1 Tahun					0,50		
02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100%					50		
02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten	54 SKPD					27		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
				Daerah Bidang Keuangan Daerah	Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)								
02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	100%					50		
02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	1 Dok					0,50		
02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan (Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah)	2 Dok					1		
					Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan (Tersusunnya Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah)	1 Dok					0,50		
					Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan	1 Dok					0,50		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
					(Tersusunnya Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah)								
					Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan (Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)	1 Dok					0,50		
02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pelatihan Pengelola Barang Milik Daerah SKPD (Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah)	1 Dok					0,50		
02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) (Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	15 Unit/Bidang					7,5		
02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) (Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah)	30 Dok					15		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Akhir Peridode (2021)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021(sampai dengan triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2021	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) (Tersusunnya Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah)	4 Dok					2		
02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan (Tersusunnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah)	4 Dok					2		

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Tahun 2020

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan adanya perbedaan terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2019-2020 dengan tahun anggaran 2021, sehingga untuk isian pada kolom 10 dan kolom 11 tidak bisa dipenuhi.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja BPKAD melalui 1 (satu) sasaran indikator kinerja pada tahun 2020 yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Opini WTP dapat memenuhi target yang direncanakan, deangan capaian Berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut ;

Tabel 2. 2 Realisasi Indikator BPKAD Tahun 2020

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%

Sumber : Dokumen LKJiP BPKAD 2020

Opini WTP dapat berhasil dicapai setelah memenuhi indikator keberhasilan dalam :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual,
2. Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan,
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;dan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset.

Hal tersebut dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% (**Sangat Tinggi).**

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Manajemen Aset yang terintegrasi seluruh SKPD sebagai Pengelolaan Data yang akurat efektif dan dapat dipercaya untuk mendukung Laporan Keuangan.
2. Melakukan monitoring dan memperkuat Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam mengawal Pelaksana kegiatan SKPD.
3. Melakukan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Serta Sosialisasi untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.

Faktor Penghambat sasaran ini adalah :

1. Kurangnya tertib SKPD menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan dan Manajemen Aset .
2. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan SKPD.
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran

1. Masih kurang maksimalnya pengetahuan sumber daya pengelolaan keuangan SKPD tentang pengelolaan dan pelaporan pertanggungjwaban keuangan daerah serta tentang pengelolaan barang milik daerah

Upaya agar bisa mempertahankan atau meningkatkan perbaikan :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tentang pengelolaan barang milik daerah secara lebih intensif dan berkelanjutan.
2. Melakukan pembinaan kepada SKPD untuk melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah secara tertib,transfaran dan akuntabel termasuk melakukan rekonsiliasi Aset secara berkesinambungan

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Menambah kegiatan Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada SKPD.
2. Rekonsiliasi Aset BMD tiap pertriwulan, membuat papan nama untuk tanah yang masuk data Aset Daerah.
3. Koordinasi daengan Dinas Pertanahan untuk melaksanakan Sertifikasi tanah ke kantor Pertanahan.
4. Membuat surat edaran ke SKPD untuk melakukan penatausahaan,pemeliharaan dan pengaman aset yang digunakannya.

Dari data tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKAD dari tahun 2016 sampai dengan 2020 konsisten selalu berada pada kisaran persentase 90% ke atas, sehingga capaian indikator program pada BPKAD dapat dinilai sangat baik. Dibandingkan dengan realisasi indikator program kegiatan pada tahun anggaran 2019, capaian realiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dinilai mendapat kemajuan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan sudah baik yang tercermin pada besaran capaian indikator yang rata-rata mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berhasil dapat melaksanakan seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan data pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2020 hampir semua program dan kegiatan berhasil mencapai target, jika dibandingkan dengan tahun 2021 untuk capaian realisasi seluruh program dan kegiatan optimis bisa sesuai dan mencapai target di tahun 2021.

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2020 indikator persentase penyaluran belanja daerah tepat waktu realisasinya mencapai 100%. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, didapat peningkatan pada indikator persentase dokumen penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu sebesar 4,17%. Sehingga capaian indikator program tersebut dapat dinyatakan berhasil dan melampaui target.

Usaha yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan seluruh elemen pejabat dan staf pelaksana yang ada di Badan Pengelolaan Keuamgan dan Aset Daerah, membangun komitmen bersama untuk untuk sama-sama meningkatkan kinerja ke depannya, bergerak secara bersama-sama pula untuk menyusun seperangkat kekuatan meminimalisir faktor-faktor penghambat kinerja.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah											
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : Dokumen LKJiP BPKAD 2020

Dari tabel di atas, capaian kinerja BPKAD yang diukur dengan indikator sasaran pada tahun 2019 dapat memenuhi target yang direncanakan, yaitu Opini WTP. Hal tersebut dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% (sangat tinggi).

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAD Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Terintegrasi	Penentuan pagu anggaran masih berdasarkan *historical budget* belum *money follow function*
			Belanja tidak sesuai dengan penganggaran dan ketentuan yang ada
			Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi

			anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas
		Laporan keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntasi pemerintahan berbasis akrual belum memadai
		Belum dapat mewujudkan *good governance* dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib
			Sistem Informasi Aset belum optimal
			Sumber daya pengelola aset belum mendapat perhatian yang layak.

Tabel 2.3 Isu Strategis

No	Isu Strategis	Skor
1	Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu	430
2	Belum tertatanya manajemen aset daerah	435
3	Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan	380
4	Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan	355
5	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah	335

Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah : **"*Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis*"** serta misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia
b) Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan untuk pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
c) Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
d) Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
e) Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan demokratis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

Faktor-faktor penghambat pelayanan BPKAD :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi oleh belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar terlaksana diakhir tahun anggaran.
2. Masih rendahnya Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tatakelola barang milik daerah.
3. Belum terwujudnya keharmonisan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing perangkat daerah/unit kerja.
4. Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolan barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.
5. Perangkat Daerah/unit kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tatakelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.
7. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.

Faktor-faktor pendukung pelayanan BPKAD :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar *(Stakeholder)* untuk menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Banjar melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara professional, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan teknologi informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.
5. Adanya kerjasama/pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola keuangan dan aset daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD SKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target maupun satuan target

program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan terkait jika ditemukan perbedaan bisa dilihat pada kolom cataan penting pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Banjar**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**3.852.806.800**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Banjar**	**Prosentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana**	**100%**	**32.741.528.356**	Pada RKPD gaji dan tunjangan ASN belum dimasukkan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD**	**100 %**	**162.587.296**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan**	**100 %**	**90.587.296**	Perbedaan indikator kinerja dan pagu indikatif karena penyesuaian indikator dan adanya pengurangan pagu indikatif
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	42.916.496	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen perencanaan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	27.916.496	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	18.662.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Persentase dokumen RKA PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	8.662.400	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	18.662.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Persentase dokumen Perubahan RKA PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	9.662.400	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	18.916.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Banjar	Persentase dokumen DPA PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	8.916.800	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	20.156.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Banjar	Persentase dokumen Perubahan DPA PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	10.156.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Laporan	21.526.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	11.526.300	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 Laporan	21.746.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	13.746.300	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Keuangan**	**100 %**	**381.626.900**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	**100 %**	**30.437.735.556**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	12 bulan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Persentase Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	30.167.108.656	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Jumlah laporan penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 laporan	357.971.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Persentase Jumlah laporan penatalaksanaan dan verifikasi keuangan yang tersusun dan terlaksana sesuai ketentuan	100%	251.971.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	23.655.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Persentase Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	18.655.700	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 %**	**426.390.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan**	**-**	**-**	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Banjar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	70 stel	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Banjar	Persentase Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia sesuai dengan ketentuan	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah ASN yang meningkat wawasan dan kompetensinya	50 orang	391.390.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Persentase Jumlah ASN yang meningkat wawasan dan kompetensinya	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**165.974.200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**159.912.704**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah peralatan dan perlengkapan	... unit	162.824.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Persentase Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia sesuai dengan ketentuan	100%	156.912.704	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Banjar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 buku	3.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Banjar	Persentase Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia sesuai dengan ketentuan	100%	3.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100%**	**22.904.220**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**22.903.800**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana	12 bulan	22.904.220	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Persentase Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	22.903.800	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.166.624.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**1.477.416.000**	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	252.096.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Persentase jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	252.096.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	12 bulan	1.914.528.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Persentase jumlah bulan Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	1.225.320.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**526.699.382**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkkat Daerah**	**100%**	**552.973.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	1 unit	85.089.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Persentase jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terlaksana Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya sesuai ketentuan	100%	40.990.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	7 unit	257.955.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Persentase jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terlaksana Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya sesuai ketentuan	100%	293.173.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana	12 bulan	157.980.884	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Persentase Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	157.970.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana	12 bulan	25.674.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Persentase Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	60.840.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Kab. Banjar**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran**	**100%**	**3.627.678.600**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran**	**100%**	**8.257.949.000**	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik					Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu			
							Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik	88,80%		
							Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100%		
							Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik	85,10%		
							Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%		
							Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	85,10%		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik	47 SKPD 87 persen	1.698.460.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Banjar	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	100%	1.669.191.000	
							Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik	88,80%		

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Banjar	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Banjar	Persentase rancangan dokumen KUA dan PPAS yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	117.470.300	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun	2 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Banjar	Persentase rancangan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	116.529.700	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	54 SKPD	50.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Banjar	Persentase RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	40.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	54 SKPD	40.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Banjar	Persentase DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	-	-	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah DPPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	54 SKPD	40.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Banjar	Persentase DPPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Banjar	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Perda 1 , Perbup 1)	2 produk hukum daerah	500.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Banjar	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan(Perda 1 , Perbup 1)	100%	500.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun (Perda 1 , Perbup 1)	2 produk hukum daerah	400.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Banjar	Persentase dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan(Perda 1 , Perbup 1)	100%	400.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Banjar	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun (Perda 1 , Perbup 3)	4 produk hukum daerah	500.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Banjar	Persentase dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun dengan tepat waktu dan	100%	246.731.000	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
							sesuai dengan ketentuan (Perda 1 , Perbup 3)			
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Banjar	Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah yang tersusun	2 dokumen	18.460.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen perencanaan anggaran belanja daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%	248.460.000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen pergeseran anggaran belanja daerah yang tersusun	1 dokumen	150.000.000						
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Kab. Banjar**	**Jumlah Perangkat Daerah dengan Penyerapan Belanja Daerah yang Baik Prosentase penyerapan Belanja Daerah**	**52 SKPD 96 persen**	**842.057.900**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu**	**100%**	**693.545.200**	
							Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik	**85.10%**		
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Banjar	Jumlah dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	372 SPD	342.971.200	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Banjar	Persentase dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	283.521.200	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah desa yang tersalurkan dana desa tepat waktu	277 desa	-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Banjar	Persentase desa yang tersalurkan dana desa tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang tersaji	72 Laporan	63.420.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kab. Banjar	Persentase Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang tersedia sesuai dengan ketentuan	100%	44.658.000	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah SKPD dengan sistem informasi penyaluran kas daerah yang terlaksana	93 SKPD	429.666.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase SKPD dengan sistem informasi penyaluran kas daerah yang terlaksana sesuai ketentuan	100%	365.366.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Kab. Banjar**	**Jumlah Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Prosentase penrangkat daerah yang menyusun laporan Keuangan sesuai SAP**	**45 SKPD 83 persen**	**999.838.600**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**825.212.800**	
							Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	**85,10%**		
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Banjar	Jumlah laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran yang tersusun	18 laporan	228.676.800	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Banjar	Persentase laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	161.351.000	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited yang tersusun	2 dokumen	201.832.800	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	184.632.800	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	2 produk hukum daerah	244.163.800	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	207.863.800	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Jumlah peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi yang tersusun	1 produk hukum daerah	143.157.200	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Persentase peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	126.957.200	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Jumlah peraturan Bupati tentang sistem akuntansi yang tersusun	1 produk hukum daerah	132.008.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Persentase peraturan bupati tentang sistem akuntansi yang tersusun sesuai ketentuan	100%	94.408.000	
Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah kabuapten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah ASN/PTT yang mendapatkan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	45 orang	50.000.000	Pelaksanaa Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Banjar	Persentase Kasubbag Keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	100%	50.000.000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Kab. Banjar**				**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase penyelesaian SPP dan SPM yang diajukan oleh PD**	**100%**	**5.000.000.000**	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Banjar	Persentase penyaluran dana darurat dan mendesak 1 tahun	100 persen	-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Banjar	Persentase penyelesaian SPM BTT yang diajukan oleh PD	100%	5.000.000.000	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Kab. Banjar**	**Prosentase Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banjar** **Prosentase penyediaan dokumen belanja pegawai pada pemerintah kabupaten banjar**	**95 persen** **100 persen**	**87.322.100**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**70.000.000**	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen belanja pegawai SKPD pada pemerintah Kabupaten Banjar yang tersedia	54 SKPD	87.322.100	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Banjar	Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi DAGO (Daftar Gaji Online)	100%	70.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Kab. Banjar**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.**	**100 %**	**583.450.600**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan**	**93.25%**	**737.801.600**	
							Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	**92.50%**		
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Kab. Banjar**	**Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan pengelolaan BMD yang baik dan tertib**	**85 %** **85%**	**583.450.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan**	**93.25%**	**737.801.600**	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
		Prosentase penyampaian laporan barang milik daerah (LBMD) secara tertib dan baik								
							Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	**92.50%**		
Penyusunan Standar Harga	Kab. Banjar	Jumlah dokumen standar harga barang dan jasa yang tersusun	1 dokumen	60.050.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Banjar	Persentase pemenuhan dokumen standar harga barang dan jasa yang diperlukan	100%	76.208.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang tersusun	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	66.148.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang tersusun	2 dokumen	105.393.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen laporan barang milik daerah tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	167.617.600	
		Jumlah dokumen penetapan pengurus barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen				Persentase dokumen penetapan pengurus barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%		
		Jumlah dokumen penetapan status penggunaan barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen				Persentase dokumen penetapan status penggunaan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%		
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen sensus barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen	221.874.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen sensus barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	78.388.000	

Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Jumlah unit/bidang yang terpenuhi aspek pengamanannya secara fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah	15 unit/ bidang	13.871.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Persentase unit/bidang yang terpenuhi aspek pengamanannya secara fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah	100%	42.817.000	
Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang tersusun	1 dokumen	50.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen penilaian barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan tepat waktu	100%	205.668.000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Jumlah dokumen pemindahtanganan barang milik daerah yang tersusun	15 dokumen	55.613.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Persentase dokumen pemindahtanganan barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	24.003.000	
		Jumlah dokumen pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang tersusun	15 dokumen				Persentase dokumen pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		
		Jumlah dokumen penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang tersusun	10 dokumen				Persentase dokumen penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD yang tersusun	4 laporan	26.649.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Banjar	Persentase laporan rekonsiliasi SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	76.952.000	

Sumber : Dokumen RKPD Kabupaten Banjar TA. 2022 dan input data SIPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banjar

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab 2.5 ini menjelaskan terkait hasil kajian program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM dan lainnya. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar tidak terdapat usulan program kegiatan baik dari kelompok masyarakat atau Lembaga lainnya.

Karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan ketugasan BPKAD yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang, urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah telah melaksanakan telaah atas kebijakan nasional tahun 2020 – 2024. Tema RPJMN Tahun 2020 – 2024 : **"Indonesia Berpenghasilan Menengah dan Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan".**

Dengan memperhatikan tema RPJMN Tahun 2020 – 2024, maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar sesuai tugas dan fungsinya berperan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Banjar yang keempat, yaitu **"Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka menjawab isu strategis : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik."**

Maka untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, BPKAD Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
2. Mengoptimalkan pengendalian anggaran
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
4. Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
5. Meningkatkan pengelolaan dana transfer
6. Meningkatkan kualitas penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Meningkatkan Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi asset
9. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
10. Optimalisasi aset dan pengelolaan barang persediaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD

Tujuan yang akan dicapai dalam Penyusunan Renja BPKAD tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan efisien, efektif dan taat pada aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan *clean and good governance* dengan diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Banjar tahun n-1 (n=tahun berjalan);
2. Percepatan belanja pemerintah daerah melalui upaya terwujudnya konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang diatur dalam DPA/DPPA OPD, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan penyerapan belanja pemerintah oleh masing-masing OPD/Unit Kerja pada akhir tahun anggaran
3. Mewujudkan tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat dalam neraca Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, dilakukan melalui:

- Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual dengan benar di seluruh OPD/Unit Kerja;
- Mewujudkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah dibawah penguasaannya secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
- Tata kelola BMD meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi yang terintegrasi dengan mempergunakan SIMDA BMD;
- Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset daerah serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD.
- Meningkatkan ketetapan dan kebenaran pelaporan BMD oleh masing-masing OPD/Unit Kerja.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2022 maka dalam penyusunan Renja BKPAD 2022 mengacu dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, sesuai dengan urusan penunjang pemerintah bidang keuangan daerah yang ditangani oleh BKPAD ikut mendukung terwujudnya sasaran daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	OPINI BPK (Wajar Tanpa Pengecualian)	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	93,09 %

Sumber : Dokumen Renstra BPKAD

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2022.

3.3.1. Faktor - Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih Tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar sebagai unsur urusan penunjang pemerintahan mengadopsi visi yang diselaraskan dengan Visi Kabupaten Banjar. Penjabaran visi pembangunan tersebut adalah :

Kekuatan kerja Bersama adalah modal utama dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar. Maka, dalam lima tahun ke depan, dengan nilai-nilai persatuan, akhiakul karimah, dan semangat bekerja

Bersama dapat membawa Kabupaten Banjar menjadi daerah yang maju, mandiri dan agamis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

a. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia
b. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan untuk pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
c. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
d. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
e. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan demokratis

Mencermati 5 (lima) misi pembangunan daerah tersebut, peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dominan pada misi ke empat yaitu "Penyelenggaraan kePemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif" dengan target sasaran **Terselenggaranya reformasi dalam system perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja.**

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja BPKAD tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah program ada sebanyak 3 program, 13 kegiatan, dan 45 sub kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan
   Program dan kegiatan pada bidang Akuntansi meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III.
   Program dan kegiatan pada bidang Perbendaharaan meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan serta belanja pegawai.
   Program dan kegiatan pada bidang Aset meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang perencanaan dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan penghapusan aset daerah.
   Program dan kegiatan pada bidang Anggaran meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang perencanaan anggaran, pengendalian anggaran serta analisis perencanaan dan pengendalian anggaran.
   Adapun penyebaran lokasi program dan kegiatan pada BPKAD adalah seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
3. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten dengan jumlah sebesar Rp 254.799.186.676

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
   b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
   e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil analisa rumusan program dan kegiatan yang diusulkan di 2022 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar sama dengan rancangan awal RKPD. Yaitu 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.

Berikut rencana program dan kegiatan prioritas BPKAD tahun 2022 :

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Kabupaten Banjar	100%	8.275.271.100	APBD		100%	225.882.745.550
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik	Kabupaten Banjar	88,80%		APBD		90.65%	
	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	Kabupaten Banjar	100%		APBD		100%	
	Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik	Kabupaten Banjar	85,10%		APBD		86.95%	
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%		APBD		100%	
	Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Kabupaten Banjar	85,10%		APBD		88,80%	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Kabupaten Banjar	100%	1.669.191.000	APBD		100%	2.819.000.000
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik	Kabupaten Banjar	88,80%		APBD		90.65%	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase rancangan dokumen KUA dan PPAS yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	117.470.300	APBD		100%	400.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase rancangan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	116.529.700	APBD		100%	400.000.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	40.000.000	APBD		100%	55.000.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	-	-	-	-		100%	55.000.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-		100%	44.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan(Perda 1 , Perbup 1)	Kabupaten Banjar	100%	500.000.000	APBD		100%	550.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan(Perda 1 , Perbup 1)	Kabupaten Banjar	100%	400.000.000	APBD		100%	440.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Perda 1 , Perbup 3)	Kabupaten Banjar	100%	246.731.000	APBD		100%	600.000.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran belanja daerah yang tersusun sesuai ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	248.460.000	APBD		100%	165.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**693.545.200**	**APBD**		**53**	**217.624.964.200**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu							
	Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik	**Kabupaten Banjar**	**85.10%**		**APBD**			
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kabupaten Banjar	100%	283.521.200	APBD		100%	409.831.200
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase desa yang tersalurkan dana desa tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kabupaten Banjar	100%	xxxxxxxxxx	APBD		100%	216.543.807.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Persentase Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang tersedia sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	44.658.000	APBD		100%	192.500.000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD dengan sistem informasi penyaluran kas daerah yang terlaksana sesuai ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	365.366.000	APBD		100%	478.826.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**825.212.800**	**APBD**		**100%**	**1.192.564.600**
	Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	**Kabupaten Banjar**	**85,10%**		**APBD**		**88,80%**	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	161.351.000	APBD		100%	253.676.800
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	184.632.800	APBD		100%	226.832.800
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	207.863.800	APBD		100%	269.169.800
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	126.957.200	APBD		100%	210.877.200
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase peraturan bupati tentang sistem akuntansi yang tersusun sesuai ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	94.408.000	APBD		100%	157.008.000
Pelaksanaa Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Kasubbag Keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	50.000.000	APBD		100%	75.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase penyelesaian SPP dan SPM yang diajukan oleh PD**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**5.000.000.000**	**APBD**		**100%**	**4.080.400.000**
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penyelesaian SPM BTT yang diajukan oleh PD	Kabupaten Banjar	100%	5.000.000.000	APBD		100%	4.080.400.000
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**70.000.000**	**APBD**		**100%**	**165.816.750**
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi DAGO (Daftar Gaji Online)	Kabupaten Banjar	100%	70.000.000	APBD		100%	165.816.750
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan**	**Kabupaten Banjar**	**93.25%**	**737.801.600**	**APBD**		**94.00%**	**706.890.600**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	**Kabupaten Banjar**	**92.50%**		**APBD**		**94.35%**	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan**	**Kabupaten Banjar**	**93.25%**	**737.801.600**	**APBD**		**94.00%**	**706.890.600**
	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib		**92.50%**				**94.35%**	
Penyusunan Standar Harga	Persentase pemenuhan dokumen standar harga barang dan jasa yang diperlukan	Kabupaten Banjar	100%	76.208.000	APBD		100%	60.050.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	66.148.000	APBD		100%	50.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen laporan barang milik daerah tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	167.617.600	APBD		100%	228.833.600
	Persentase dokumen penetapan pengurus barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%		APBD		100%	
	Persentase dokumen penetapan status penggunaan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%		APBD		100%	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase dokumen sensus barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	78.388.000	APBD		100%	221.874.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase unit/bidang yang terpenuhi aspek pengamanannya secara fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah	Kabupaten Banjar	100%	42.817.000	APBD		100%	13.871.000
Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase dokumen penilaian barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan tepat waktu	Kabupaten Banjar	100%	205.668.000	APBD		100%	50.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pemindahtanganan barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	24.003.000	APBD		100%	55.613.000
	Persentase dokumen pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%		APBD		100%	
	Persentase dokumen penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%		APBD		100%	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase laporan rekonsiliasi SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Banjar	100%	76.952.000	APBD		100%	26.649.000

Sumber : Dokumen Renstra BPKAD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar tahun anggaran 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pengelolaan Keuangan, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di tahun 2022 adalah sebanyak 2 program prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 6 kegiatan dan 26 subkegiatan. Serta 1 program penunjang dan rutin dengan 6 kegiatan dan 19 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.737.278.956,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah. Rumusan program dan kegiatan berikut diharapkan dapat menjelaskan dukungan dan kesungguhan BPKAD dalam melaksanakan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Program Prioritas SKPD Tahun 2022 sesuai Prioritas RKPD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**IKM Perangkat Daerah**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**32.741.528.356**	**APBD**		**100%**	**34.733.446.909**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**90.587.296**	**APBD**		**100%**	**162.587.296**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	7	27.916.496	APBD		7	42.916.496
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	1	8.662.400	APBD		1	18.662.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	1	9.662.400	APBD		1	18.662.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	1	8.916.800	APBD		1	18.916.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	Kabupaten Banjar	1	10.156.600	APBD		1	20.156.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kabupaten Banjar	3	11.526.300	APBD		3	21.526.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Banjar	24	13.746.300	APBD		24	21.746.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**30.437.735.556**	**APBD**		**100%**	**30.698.259.721**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	Kabupaten Banjar	12	30.167.108.656	APBD		12	29.864.942.821
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	Kabupaten Banjar	2	251.971.200	APBD		2	809.661.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Banjar	1	18.655.700	APBD		1	23.655.700
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**-**	**-**	**-**	**-**		**100%**	**430.529.000**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ASN	-	-	-	-		50	430.529.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-		-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**159.912.704**	**APBD**		**100%**	**1.128.949.620**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	Kabupaten Banjar	38	156.912.704	APBD		38	179.106.620

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kabupaten Banjar	30	3.000.000	APBD		3	3.465.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Banjar	-	-	-		12	946.378.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**22.903.800**	**APBD**		**100%**	**57.886.642**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana	Kabupaten Banjar	12	22.903.800	APBD		12	57.886.642
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**1.477.416.000**	**APBD**		**100%**	**1.629.644.280**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Banjar	12	252.096.000	APBD		12	343.305.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Kabupaten Banjar	12	1.225.320.000	APBD		12	1.286.338.680
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkkat Daerah**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**552.973.000**	**APBD**		**100%**	**625.590.350**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	Kabupaten Banjar	1	40.990.000	APBD		1	93.597.900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	Kabupaten Banjar	27	293.173.000	APBD		7	283.751.050
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana	Kabupaten Banjar	12	157.970.000	APBD		12	220.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana	Kabupaten Banjar	12	60.840.000	APBD		12	28.241.400
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Prosentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik**	**Kabupaten Banjar**	**94.40%**	**8.257.949.000**	**APBD**		**95.33%**	**225.882.745.550**
	Prosentase Perangkat Daerah dengan Penyerapan Belanja Daerah yang Baik	**Kabupaten Banjar**	**92.55%**		**APBD**		**93.48%**	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Prosentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	**Kabupaten Banjar**	**92.55%**		**APBD**		**94.40%**	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik**	**Kabupaten Banjar**	**47**	**1.669.191.000**	**APBD**		**48**	**2.819.000.000**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	Kabupaten Banjar	2	117.470.300	APBD		2	400.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun	Kabupaten Banjar	2	116.529.700	APBD		2	400.000.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Kabupaten Banjar	54	40.000.000	APBD		3	55.000.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	-	-	-	-		3	55.000.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	-	-	-	-		2	44.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Perda 1 , Perbup 1)	Kabupaten Banjar	2	500.000.000	APBD		1	550.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun (Perda 1 , Perbup 1)	Kabupaten Banjar	2	400.000.000	APBD		4	440.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun (Perda 1 , Perbup 3)	Kabupaten Banjar	4	246.731.000	APBD		2	600.000.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Perda 1 , Perbup 1)	Kabupaten Banjar	1	248.460.000	APBD		2	165.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah dengan Penyerapan Belanja Daerah yang Baik**	**Kabupaten Banjar**	**52**	**693.545.200**	**APBD**		**53**	**217.624.964.200**
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	Kabupaten Banjar	372	283.521.200	APBD		1372	409.831.200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah desa yang tersalurkan dana desa tepat waktu	Kabupaten Banjar	277	Xxxxxxxxxx	APBD		277	216.543.807.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang tersaji	Kabupaten Banjar	72	44.658.000	APBD		72	192.500.000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD dengan sistem informasi penyaluran kas daerah yang terlaksana	Kabupaten Banjar	93	365.366.000	APBD		93	478.826.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik**	**Kabupaten Banjar**	**45**	**825.212.800**	**APBD**		**45**	**1.192.564.600**
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran yang tersusun	Kabupaten Banjar	18	161.351.000	APBD		18	253.676.800
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited yang tersusun	Kabupaten Banjar	2	184.632.800	APBD		2	226.832.800
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	Kabupaten Banjar	2	207.863.800	APBD		2	269.169.800
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi yang tersusun	Kabupaten Banjar	1	126.957.200	APBD		1	210.877.200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah peraturan Bupati tentang sistem akuntansi yang tersusun	Kabupaten Banjar	1	94.408.000	APBD		1	157.008.000
Pelaksanaa Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah ASN/PTT yang mendapatkan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Banjar	45	50.000.000	APBD		45	75.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Prosentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak Selama 1 Tahun**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**5.000.000.000**	**APBD**		**100%**	**4.080.400.000**
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penyaluran dana darurat dan mendesak 1 tahun	Kabupaten Banjar	100	5.000.000.000	APBD		100	4.080.400.000
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Prosentase Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banjar**	**Kabupaten Banjar**	**100%**	**70.000.000**	**APBD**		**100%**	**165.816.750**
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen belanja pegawai SKPD pada pemerintah Kabupaten Banjar yang tersedia	Kabupaten Banjar	54	70.000.000	APBD		54	165.816.750
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Prosentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.**	**Kabupaten Banjar**	**92.88%**	**737.801.600**	**APBD**		**94.18%**	**706.890.600**
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan pengelolaan BMD yang baik dan tertib**	**Kabupaten Banjar**	**46**	**737.801.600**	**APBD**		**47**	**706.890.600**
Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga barang dan jasa yang tersusun	Kabupaten Banjar	1	76.208.000	APBD		1	60.050.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	2	66.148.000	APBD		2	50.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	2	167.617.600	APBD		2	228.833.600
	Jumlah dokumen penetapan pengurus barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	1		APBD		1	
	Jumlah dokumen penetapan status penggunaan barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	1		APBD		1	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sensus barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	1	78.388.000	APBD		1	221.874.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah unit/bidang yang terpenuhi aspek pengamanannya secara fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah	Kabupaten Banjar	15	42.817.000	APBD		15	13.871.000
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	1	205.668.000	APBD		1	50.000.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	15	24.003.000	APBD		15	55.613.000
	Jumlah dokumen pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	15		APBD		15	
	Jumlah dokumen penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang tersusun	Kabupaten Banjar	10		APBD		10	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD yang tersusun	Kabupaten Banjar	4	76.952.000	APBD		4	26.649.000

Sumber : Dokumen Renstra BPKAD

BAB V
PENUTUP

Rencana Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun pertama, periode renstra 2021 - 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi BPKAD dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi BPKAD Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan - karyawati BPKAD Kabupaten Banjar.

31. Badan Pendapatan Daerah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta berkontribusi dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra Bapenda Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Renja Bapenda Tahun 2022 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bapenda. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar ini kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Upaya pemerintah kabupaten dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi misi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Rencana Pembangunan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk Kabupaten Banjar.

Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja perangkat daerah memuat program kegiatan dan sub kegiatan, lokasi yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan rancangan awal RKPD ;
4. Pembahasan rancangan rencana kerja dengan Tim Forum Lintas Perangkat Daerah (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. Verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan Renja tersebut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

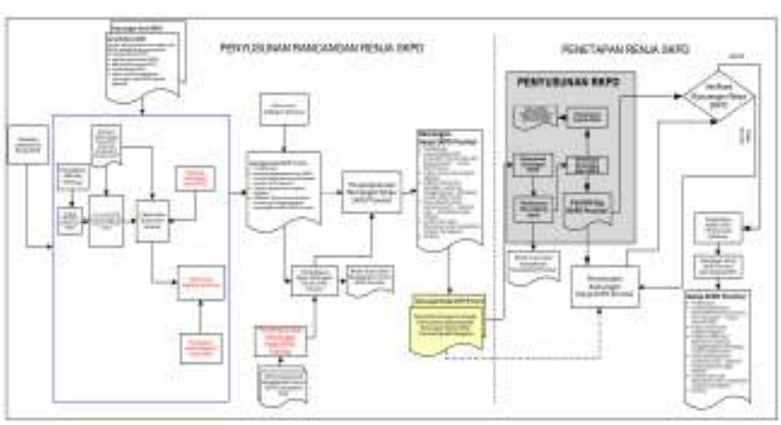

Sumber Data :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam dokumen perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis”.** Penjelasan visi pembangunan tersebut yaitu berdasarkan tabel pilar-pilar visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 seperti tabel berikut :

Tabel 1. 1 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

Pilar-Pilar Visi	Penjelasan
MAJU	- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang - Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN BANJAR Halaman 367 TAHUN 2021-2026 PILAR-PILAR VISI PENJELASAN Index (HDI).
MANDIRI	- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. - Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif.

	Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. - Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
AGAMIS	- Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2021-2026, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan ke Pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif; dan
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan ke Pemerintahan luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:

1. Misi ke-1 Peningkatan Kualitas hidup dan Kualitas sumber daya manusia dengan tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran misi ke-1 yaitu :
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan;
   - Meningkatnya daya saing masyarakat melalui Pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan;
   - Meningkatnya daya beli masyarakat;
   - Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat; dan
   - Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak.

2. Misi ke-2 Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan dengan 2 (dua) tujuan yaitu:
   a. Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Sasaran misi ke-2 tujuan ke-1 yaitu :
      - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi;
      - Meningkatnya keunggulan pertanian; dan
      - Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital.
   b. Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran. Sasaran misi ke-2 tujuan ke-2 yaitu :
      - Menurunnya Angka Pengangguran;
      - Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM;
      - Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
      - Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial;
      - Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pemberdayaan Desa dan Pemanfaatan Dana Desa;
      - Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga; dan
      - Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, Komunikasi & informasi serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah.
3. Misi ke- 3 **Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dengan tujuan** Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran misi ke-3 yaitu :
   - Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah;
   - Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni;
   - Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan; dan
   - Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup.
4. Misi ke-4 **Penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan tujuan** Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif. Sasaran misi ke-4 yaitu :
   - Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah;
   - Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan public;
   - Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja;
   - Terselenggaranya reformasi & kelembagaan yang efektif dan efisien;
   - Berkembangnya profesional ASN; dan
   - Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik.

5. Misi ke-5 **Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis. Sasaran misi ke-5 yaitu** :
   - Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama;

- Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar;
- Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga; dan
- Meningkatkan ketertiban umum & ketenteraman di masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-4 yaitu **Penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif**.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026, seperti tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Misi Ke-Empat : **Penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif**	
Tujuan:	Sasaran:
Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih & efektif	Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah, melalui ekstensifikasi & intensifikasi pendapatan daerah & perbaikan tata kelola

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1. 2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32); dan
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2022;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022; dan
3. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan laporan kinerja.

1. 4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang, landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan renja Bapenda tahun lalu dan capaian renstra Bapenda, Analisa kinerja pelayanan Bapenda, Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Bapenda, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OGRANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Pendapatan Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN BAPENDA

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan renja merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah (DPA - Bapenda) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran berbasis akrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun program kegiatan.

Pada tahun anggaran 2020 Urusan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan. Pada Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 9 (sembilan) program, 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.316.560.087,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.194.935.920,- (96,33%) dan realisasi fisik sebesar 94,43%.

Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dengan gambaran sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
   - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target 100% hanya tercapai 96,96 %, yaitu pada kegiatan:
     a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Target kinerja pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah 35 (tiga puluh lima) buah dengan realisasi kinerja 29 (dua puluh sembilan) buah dengan capaian 82,86 %.
   - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dari target 100% hanya tercapai 79,67%, yaitu pada kegiatan :
     a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
        Target kinerja pada kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran adalah 2 (dua) dokumen dengan realisasi kinerja 1 (satu) dokumen dengan capaian 50 %.
   - Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari target 100% hanya tecapai 79,88 %, yaitu pada kegiatan :
     a. Pemutakhiran data PBB

Target kinerja pada kegiatan pemutakhiran data PBB adalah 125.000 wajib pajak dengan realisasi kinerja 93.808 wajib pajak dengan capaian 75,05 %.

b. Penagihan PBB

Target kinerja pada kegiatan penagihan PBB adalah 100.000 wajib pajak dengan realisasi kinerja 87.879 wajib pajak dengan capaian 87,88 %.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada kegiatan :
  a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  b. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  c. Penyediaan alat tulis kantor;
  d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; dan
  i. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
  e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan
  f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
  b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
  c. Pengembangan dan pengendalian perencanaan; dan
  d. Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD.
- Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah
  a. Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah; dan
  b. Pengawasan pajak daerah.
- Program Pemutakhiran Data BPHTB
  a. Penetapan Zona Nilai Tanah.
- Program Pencapaian Target Retribusi Daerah
  a. Penyusunan regulasi retribusi daerah;dan
  b. Penilaian dan penetapan target retribusi daerah.
- Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
  a. Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah;
  b. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer;
  c. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebih target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

a. Kegiatan Pendataan Retribusi Daerah, dari target 72 (tujuh puluh dua) Jenis Retribusi , tercapai 74 (tujuh puluh empat) Jenis Retribusi atau 102,78 %.
b. Kegiatan Verifikasi Data BPHTB, adri target 1.900 Wajib Pajak, tercapai 3803 Wajib Pajak, atau 200,16%.
c. Program Pemutakhiran Data BPHTB dari target Rp. 20.000.000,00, dengan capaian Rp. 33.484.923.644,00 atau 167,42%

Pada tahun anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.893.793.344,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan pada saat perubahan Badan Pendapatan Daerah tetap melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu dana perubahan sebesar Rp. 10.592.007.557,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dari hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2021 yaitu:

1. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II**

   Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2021, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

   a. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dari target 36 (tiga puluh enam) buah dan baru terealisasi 6 (enam) buah kendaraan atau 16.67% dengan pagu Rp. 232.760.000,00 terealisasi Rp. 46.248.034,00 atau 19.87% dikarenakan banyak izin dan pajak kendaraan adanya di akhir tahun.

   b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
      Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
      - Sub Kegiatan Analisis Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini menargetkan 9 kali pertemuan rapat koordinasi terkait hasil laba perusahaan daerah (perusda) dan lain-lain PAD yang sah, terealisasi 3 kali pertemuan atau 15,79% dengan pagu Rp.7.550.600,00 terealisasi Rp. 1.393.700,00 atau 18,46% hal ini dikarenakan terhambatnya peralihan status BUMD dan perubahan manajemen dan regulasi terkait lain-lain PAD yang sah sehingga tidak sesuai dengan rencana target.
      - Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, pada sub kegiatan ini menargetkan 250 peserta wajib pajak yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi terkait pajak daerah dan terealisasi 65 peserta atau 26 % dengan pagu Rp. 136.106.000,00 terealisasi Rp.30.438.400,00 atau 22,36%
      - Sub Kegiatan Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah, pada sub ini targetnya jumlah wajib pajak PBB yang mendapat pelayanan dan konsultasi berupa

pembuatan PBB baru, perbaikan data NJOP serta balik nama wajib pajak PBB, dengan target 110.000 WP terealisasi 20.715 WP atau 18.83% dengan pagu anggaran Rp. 84.542.400,00 terealisasi Rp. 13.961.340,00 atau 16,51% hal ini dikarenakan terkendala aparat desa yang menyampaikan SPPT PBB kepada wajib pajak yang berdomisili diluar daerah Kabupaten Banjar.

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II yaitu :

a. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koorinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD, pada sub ini menargetkan 6 (enam) dokumen terdiri RKA dan DPA serta pergeseran/perubahannya dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 50% dengan pagu anggaran Rp. 11.632.900,00 terealisasi Rp. 1.019.000,00 atau 8,76%.
- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan indikator jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan dengan target 3 (tiga) dokumen dan realisasi 3 (tiga) dokumen atau 100% dengan pagu anggaran Rp. 32.564.300,00 dan realisasi Rp. 8.894.300,00 atau 27,31%.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub ini menargetkan 30 (tiga puluh) dokumen hasil monitoring dan evaluasi SKPD dengan realisasi 15 (lima belas) dokumen dengan pagu anggaran Rp. 21.540.000,00 terealisai Rp. 1.183.000,00 atau 8,28%

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- **Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN**, pada sub ini menarget kan gaji dan tunjangan termasuk gaji 13 dan THR ASN selama 14 (empat belas) bulan dan terealisasi 8 (delapan) bulan atau 57,14% dengan pagu Rp. 7.715.788.286,00 terealisasi Rp. 2.104.67.771,00 atau 27,28%
- **Sub kegiatan penyediaan pelaksanaan tugas ASN**, pada sub ini menargetkan upah PTT, petugas kebersihan dan jasa pengadministrasi keuangan yg dibayar selama 13 (tiga belas) bulan dan terealisasi 6 (enam) bulan berjalan dengan pagu Rp. 1.184.990.000,00 terealisasi Rp. 417.232.003,00 atau 35,21%
- **Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD** menargetkan 2 (dua) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 50% dengan pagu anggaran Rp. 11.100.000,00 dengan realisasi Rp. 5.086.600,00 atau 45,63%
- **Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**, dengan indikator kegiatan lamanya penyediaan instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 12 (dua belas) bulan dan realisasi 6 (enam) bulan atau 50%, dengan pagu Rp. 7.292.600,00 dan realisasi Rp. 1.813.200,00 atau 24,86%.
- **Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan**, dengan indikator lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 (dua belas) bulan, realisasi 6 (enam) bulan atau 50%. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.935.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.045.600,00 atau 16,08%.

- **Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**, dengan indikator lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dengan target 12 (dua belas) bulan dan realisasi 6 (enam) bulan atau 50%. Pagu subkegiatan ini adalah Rp. 711.249.000,00 dengan realisasi Rp. 42.565.630,00 atau 5,98%.

3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   - **Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan/kantor**, pada sub ini adalah kegiatan rutin tiap bulan berjalan atau 50% di triwulan kedua ini dengan pagu anggaran Rp. 7.292.500,00 terealisasi Rp. 1.813.200,00 atau 24,86%.
   - **Sub kegiatan barang cetakan dan dan penggandaan**, pada sub ini adalah kegiatan rutin tiap bulan berjalan atau 50% di triwulan kedua ini dengan pagu anggaran Rp. 18.395.000,00 dan realisasi Rp. 3.045.600,00 atau 16,56%
   - **Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**, pada sub ini adalah kegiatan rutin tiap bulan berjalan atau 50% di triwulan kedua ini dengan pagu anggaran Rp. 13.344.000,00 dan realisasi Rp. 5.670.000,00 atau 42,49%
   - **Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**, pada sub ini adalah kegiatan rutin tiap bulan berjalan atau 50% di triwulan kedua ini dengan pagu anggaran Rp. 711.249.000,00 dan realisasi Rp. 42.565.630,00 atau 5,98%
4. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   - **Sub kegiatan pengadaan mebel** dengan indikator jumlah pengadaan mebeuler kantor dengan target 3 (tiga) buah dan realisasi sebanyak 3 (tiga) buah dengan capaian keuangan 99,44% dari pagu Rp. 44.477.600,00 dan realisasi Rp. 44.227.545,00.
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   - **Sub kegiatan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik**, pada sub ini adalah kegiatan rutin tiap bulan berjalan atau 50% di triwulan kedua ini dengan pagu anggaran Rp. 181.800.524,00 dan realisasi Rp. 48.447.145,00 atau 26,65%.
   - **Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor**, dengan indikator lamanya penyediaan alat tulis kantor, lamanya penyediaan makanan dan minuman serta lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja 12 (dua belas) bulan dan capaian 6 (enam) bulan atau 50% pada triwulan kedua ini dengan pagu anggaran Rp. 93.922.200,00 dan realisasi Rp. 32.557.500,00 atau 34,66%.
6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - **Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** dengan indikator lamanya pemeliharaan mobil jabatan dengan target 12 (dua belas) bulan dan realisasi 6 (enam) bulan atau 50%, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.990.000.00 dan realisasi sebesar Rp. 9.969.867,00 atau 25,57%.

- **Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya** dengan indikator lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan target 12 (dua belas) bulan dan realisasi 6 (enam) bulan atau 50% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.025.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.765.720,00 atau 17,82%.
- **Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan** lainnya dengan indikator terpeliharanya bangunan gedung kantor dengan target 12 (dua belas) bulan dan realisasi 6 (enam) bulan atau 50% dengan pagu anggaran Rp. 50.500.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.526.475,00 atau 34.71%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II :

a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- **Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah** dengan indikator jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut dengan target 85 (delapan puluh lima) jenis retribusi dengan capaian sebanyak 84 (delapan puluh empat) jenis retribusi dengan pagu anggaran Rp. 359.585.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.854.700,00 atau 40,56%.
- **Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah** dengan indikator jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi dengan target 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) wajib pajak dengan capaian 172.575 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujh puluh lima ribu) wajib pajak atau 127,83% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 280.993.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.599.700,00 atau 36,87%.
- **Sub kegiatan penagihan pajak daerah** dengan indikator jumlah penerimaan pajak daerah dengan target Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan capaian sebesar Rp. 368.629.710,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atau 81,92% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 293.619.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.789.927,00 atau 15,59%.
- **Sub kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah** dengan indikator jumlah wajib pajak yang dapat diawasi dengan target 200 (dua ratus) wajib pajak dengan capaian 145 (seratus empat puluh lima) wajib pajak atau 72,5% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 135.498.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.750.400,00 atau 8,67%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2021:

a. Masih adanya pembaharuan pada aplikasi SIPD Penatausahaan sehingga proses pembukuan dan pembayaran untuk kegiatan terkendala;
b. Keterlambatan dalam melakukan “Ganti Uang (GU)” pada aplikasi SIMDA Keuangan sehingga untuk laporan fisik dan renja ub. Januari-Februari menjadi terhambat;

c. belum adanya undangan mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis;
d. Belum tayangnya *e-catalogue* untuk pengadaan peralatan gedung kantor;
e. Adanya penyesuaian proses pembayaran dari manual menjadi non tunai;
f. Beberapa barang milik daerah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan lagi;
g. Ada satu buah kendaraan yang nomor polisinya tidak terbaca dalam sistem tagihan Samsat;
h. Pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19 menghambat kegiatan rekonsiliasi secara offline atas PBB P3 dan PPH kepada wajib pajak;
i. Adanya perubahan status kewenangan pengelolaan SDA sehingga DBH SDA Minerba masih menunggu regulasi penjelas dari Undang-Undang No 3 Tahun 2020;
j. Adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19;
k. Tidak adanya petugas penilai, pemeriksa dan juru sita;
l. Kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar pajak;
m. Keterlambatan SKPD menginput data pada aplikasi SIMPATDA;
n. Alamat wajib pajak yang tidak jelas sehingga menyulitkan petugas dalam pengawasan pajak sarang burung walet;
o. Masih rendahnya sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar untuk menunjang pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar;
p. Adanya perubahan target indikator yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi target indikatornya;
q. Belum adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah terkait;
r. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan.

5. Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

a. Penggunaan aplikasi berbasis online;
b. kerjasama yang baik antara petugas pengadministrasi, petugas pelayanan dan petugas verifikasi; dan
c. Terpasangnya alat perekam data transaksi *(tapping box).*

6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu:

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;

c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra;
d. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan;
e. Tersedianya informasi atau data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendapatan pada Kabupaten Banjar.

7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait capaian target retribusi yang dikelola oleh SKPD Pemungut;
d. Kerjasama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat;
e. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum dapat terlaksana;
f. Koordinasi dan rekon per triwulan maupun pengiriman data terkait penerimaan daerah dapat dilaksanakan melalui sistem online.

Tabel 2.1. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	**Urusan Pemerintahan**									
4.04.12	**Badan Pendapatan Daerah**									
4.04.12.22	**Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah**	**Persentase kepatuhan membayar pajak daerah**	185	**135,93**	**100**	**126,01**	**1,26**	**0**	**261,94**	**1,42**
4.04.12.22.01	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak	383	310	33	47	1,42	0	357	0,93
4.04.12.22.02	Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	277	179	150	155	1,03	0	334	1,21
4.04.12.22.03	Penegakkan Hukum Pajak Daerah	Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih	1.643.000.000	1.349.768.053	650.000.000	819.090.610	1,26	0	2.168.858.663	1,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.12.23	**Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan**	**200**	**91,22**	**100**	**80,75**	**0,81**	**0**	**171,97**	**0,86**
4.04.12.23.01	Pemutakhiran Data PBB	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	250000	131.439	125.000	93.809	0,75	0	225.248	0,90
4.04.12.23.02	Penagihan PBB	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	200000	73.804	100.000	87.879	0,88	0	161.683	0,81
4.04.12.24	**Program Pemutakhiran Data BPHTB**	**Persentase capaian penerimaan BPHTB**	**200**	**228,64**	**100**	**200,1**	**2,00**	**0**	**428,69**	**2,14**
4.04.12.24.01	Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)	Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)	6	4	3	4	1,33	0	8	1,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.12.24.02	Verifikasi Data BPHTB	Jumlah wajib pajak BPHTB baru	126900	4.347	1.900	3.803	2,00	0	8.150	0,06
4.04.12.25	**Program Pencapaian Target Retribusi Daerah**	**Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah**	**150**	**74,53**	**80**	**106,17**	**1,33**	**0**	**180,70**	**1,20**
4.04.12.25.01	Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	172	73	72	74	1,03	0	147	0,85
4.04.12.25.02	Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	11	4	7	10	1,43	0	14	1,27
4.04.12.25.03	Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah	4	2	2	2	1,00	0	4	1,00
4.04.12.26	**Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah**	**Persentase data target pendapatan**	**192**	**94,00**	**97**	**168,97**	**1,74**	**0**	**262,97**	**1,37**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		daerah yang sinkron								
4.04.12.26.01	Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	23	16	4	8	2	0	24	1,04
4.04.12.26.02	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer	24	15	9	25	2,78	0	40	1,67
4.04.12.26.03	Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah	Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun	32	16	16	16	1	0	32	1,00
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5.02	**Keuangan**									
5.02.02	**Program pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase data target pendapatan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,12**	**49,12**	**0,49**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		daerah yang sinkron								
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase data dana transfer yang akurat**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,67**	**46,67**	**0,49**
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah rapat koordinsi dan konsultasi terkait dana transfer	15	0	0	0	0	7	7	0,47
5.02.04	**Program pengelolaan pendapatan daerah**	**Persentase kepatuhan membayar pajak daerah**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,23**	**86,22717899**	**0,91**
5.02.04.2.01	**Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah**	**Persentase kepatuhan membayar pajak daerah**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81,92**	**81,91582004**	**0,86**
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah rapat koordinasi terkait	19	0	0	0	0	3	3	0,16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah								
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	250	0	0	0	0	65	65	0,26
5.02.04.2.01.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	85	0	0	0	0	85	85	1,00
5.02.04.2.01.05	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	135.000	0	0	0	0	172575	172575	1,28
5.02.04.2.01.06	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah lokasi yang ditetapkan ZNT	5	0	0	0	0	3	3	0,60
5.02.04.2.01.07		Jumlah BPHTB yang baru	3.300	0	0	0	0	1755	1755	0,53

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi	2	0	0	0	0	0	0	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	110.000	0	0	0	0	20715	20715	0,19
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah buku laporan pendapatan daerah yang disusun	16	0	0	0	0	8	8	0,50
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	450.000.000	0	0	0	0	368629710	368629710	0,82
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	200	0	0	0	0	145	145	0,73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	10	0	0	0	0	4	4	0,40
4.04	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan**									
4.04.12	**Badan Pendapatan Daerah**									
4.04.12.01	**Badan Pendapatan Daerah**									
4.04.4.04.12.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
4.04.4.04.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lamanya Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	100	100	100	1	100	300	3
4.04.4.04.12.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya	70	88,57	100	88,57	1.1	100	188,57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04.12.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan	1	85,66	100	85,66	1,1	100	300	3
4.04.4.04.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	2	98,74	100	98,74	1	100	281,71	2,82
4.04.4.04.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lamanya penyediaan alat tulis kantor	2	92,84	100	92,84	1	100	300	3
4.04.4.04.12.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	92,35	100	92,35	1	100	295,65	2,96
4.04.4.04.12.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banmgunan kantor	2	99,9	100	99,9	1	100	299,9	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04.12.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	100	100	100	1	100	300	3
4.04.4.04.12.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	100	100	100	1	100	300	3
4.04.4.04.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman	2	89,65	100	89,65	1,1	100	258,44	2,58
4.04.4.04.12.01.18	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	2	99,91	100	99,91	1	100	298,37	2,98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04.12.01.19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	2	94,79	100	94,79	1	100	297,84	2,98
4.04.4.04.12.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur layak pakai**		**87,94**	**100**	**87,94**	**1,1**	**100**	**275,88**	**2,805**
4.04.4.04.12.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1	0	0					
4.04.4.04.12.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0		0		0
4.04.4.04.12.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan	17	100		100	1	100	300	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perlengkapan Gedung Kantor								
4.04.4.04.12.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	29	100		100	1	100	300	3
4.04.4.04.12.02.10	Pengadaan Mebeuler	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	7	100		100	1	100	200	2
4.04.4.04.12.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	2	100		100	1	100	250	2,5
4.04.4.04.12.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Lamanya pemeliharaan mobil jabatan	2	89,74		89,74	1,1	-	89,74	-
4.04.4.04.12.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2	74,98		74,98	1,3	100	279,57	2,8
4.04.4.04.12.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lamanya pemeliharaan	2	50,86		50,86	1,9	100	254,82	2,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		perlengkapan gedung kantor								
4.04.4.04.12.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabnya gedung kantor	0	0		0	0		0	0
4.04.4.04.12.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase aparatur disiplin dalam berpakaian dinas**		**0**		**0**	0	**100**	**0**	**0**
4.04.4.04.12.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0	0		0	0	100	200	2
4.04.4.04.12.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase kelulusan aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya**		**100**		**100**	1	**100**	**300**	**0,9965**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04.12.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya		100		100	1	100	297,63	2,98
4.04.4.04.12.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase dokumen perencanaan, keungan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan**		**100**		**100**	**1**	**100**	**300**	**1**
4.04.4.04.12.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	6	100		100	1	100	300	3
4.04.4.04.12.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	4	100		100	1	100	300	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04.12.06.04	Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan	4	100		100	1	100	100	
4.04.4.04.12.06.05	Pengembangan dan Pengembalian Perencanaan	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan da perubahannya	11		100	100	1	100	100	
4.04.4.04.12.06.10	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	72		100	100	1	100	100	
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5.02	**Keuangan**									
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya layanan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,42**	**40,42**	**0,40**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		adminitrasi perkantoran								
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,72**	**48,72**	**0,49**
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA & DPA SKPD yang disusun sesuai ketentuan	6	0	0	0	0	2	2	0,33
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3	0	0	0	0	3	3	1,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	30	0	0	0	0	14	14	0,47

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi/teknis perkantoran**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,33**	**53,33**	**0,53**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	0	0	0	0	8	8	0,57
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah petugas kebersihan	3	0	0	0	0	3	3	1,00
		Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	12	0	0	0	0	6	6	0,50
		Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan	12	0	0	0	0	6	6	0,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan	2	0	0	0	0	0	0	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	2	0	0	0	0	1	1	0,50
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Seluruh aparatur lulus dalam mengikuti bimtek/pelatihan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya	5	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0,5**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lamanya penyediaan instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12	0	0	0	0	6	6	0,5
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	0	0	0	0	6	6	0,5
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	0	0	0	0	6	6	0,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12	0	0	0	0	6	6	0,5
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya layanan adminitrasi perkantoran**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,67**	**46,67**	**0,47**
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	3	0	0	0	0	3	3	1
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27	0	0	0	0	11	11	0,41
		Jumlah Pengadaan		0	0	0	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perlengkapan Gedung Kantor								
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0,5**
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lamanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	0	0	0	0	6	6	0,5
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lamanya penyediaan alat tulis kantor	12	0	0	0	0	6	6	0,5
		Lamanya penyediaan makanan dan minuman		0	0	0	0			
		Lamanya penyediaan peralatan dan		0	0	0	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		perlengkapan kantor								
		Lamanya penyediaan kegiatan kantor lainnya		0	0	0	0			
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,25**	**34,25**	**0,34**
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lamanya pemeliharaan mobil jabatan	12	0	0	0	0	6	6	0,50
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya	36	0	0	0	0	6	6	0,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 *('19+'20+'21)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi *Triwulan II* program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	0	0	0	0	6	6	0,50
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12	0	0	0	0	6	6	0,50
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1	0	0	0	0	1	1	1,00

Sumber data : LKJiP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut berdasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi fisik pada tahun 2020 mencapai 94,38%, sedangkan dari sisi pencapaian indikator kinerja utama yaitu persentase capaian penerimaan pendapatan daerah 100% berdasarkan hal tersebut dapat artikan bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun analisa pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

NO	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah			99				100				
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah				185 M	190 M	192 M		223.201.382.687	206.237.506.290	192 M	

Sumber Data : Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 dan LKjIP Tahun 2020

Pada pembahasan anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terjadi perubahan target penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2021 dari 192 Milyar menjadi 212 Milyar, sehingga target indikator kinerja utama (IKU) pada Badan Pendapatan Daerah menjadi 212 Milyar.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang paling memungkinkan untuk dioptimalisasikan adalah Pendapatan Asli Daerah, karena dua sumber penerima lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi nilai nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang di upayakan seefisien dan seefektif mungkin serta proporsional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan pembangunan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur sesuai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan memperhatikan gambaran umum serta data capaian program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar terlihat bahwa langkah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan harapan di atas masih menemui beberapa permasalahan antara lain :

- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diserahkan dari Pemerintah Pusat bersifat gelondongan (belum *by name by address*) sehingga memerlukan validasi kebenaran data dan piutang untuk kemudian dilakukan *cleaning* data.
- Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak.
- Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menemui kendala karena PBB merupakan pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memerlukan kajian lebih mendalam secara akademis, politik dan sosial.
- Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena bersifat *self assessment* dimana Wajib Pajak (WP) melakukan penghitungan sendiri besaran pajak yang dibayarkan, nilainya bergantung dari kondisi perkenomian suatu daerah.
- Belum optimalnya penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang potensial sementara perkembangan wilayah berjalan dengan cepat.
- Belum adanya zona nilai tanah (ZNT) yang lebih mencerminkan kondisi mendekati harga pasar tanah dan bangunan sebagai acuan dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021 Kabupaten Banjar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran *Milinium Development Gold* (MDG's), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar serta kebijakan pada masing-masing sasaran misi pembangunan Kabupaten Banjar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokritas dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Asumsi strategik yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam menetapkan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yaitu :

1. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi;
2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dari bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi;
3. Mempermudah dan memperjelas alur pelayanan pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi;
4. Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga ahli perpajakan di tiap SKPD;
5. Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling dan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
6. Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
7. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung oleh Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui sosialisasi dan uji petik;
9. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada;
11. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib PDRD sampai ketingkat desa/kelurahan;
12. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan.

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan Pendapatan Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja

tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD. Pada rancangan awal RKPD indikator program yaitu :

- Persentase capaian pajak hotel;
- Persentase capaian pajak restoran;
- Persentase capaian paja hiburan;
- Persentase capaian pajak reklame;
- Persentase capaian pajak parkir;
- Persentase capaian pajak MBLB;
- Persentase capaian pajak sarang burung walet;
- Persentase capaian pajak penerangan jalan;
- Persentase capaian pajak air tanah;
- Persentase capaian pajak bumi dan bangunan;
- Persentase capaian BPHTB;
- Persentase capaian retribusi jasa umum;
- Persentase capaian retribusi jasa usaha;
- Persentase capaian retribusi perijinan tertentu;
- Persentase capaian bagi hasil laba perusahaan daerah;
- Persentase capaian lain-lain PAD yang sah;
- Persentase capaian Dana Bagi Hasil Pajak; dan
- Persentase capaian DBH Non Pajak.

Adapun beberapa hal yang menjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan perangkat daerah, yaitu :

- Pada rancangan RKPD indikator program menjadi persentase capaian pajak daerah, persentase capaian retribusi daerah, persentase capaian bagi hasil laba perusahaan daerah dan persentase capaian lain-lain PAD yang sah;
- Pada rancangan awal RKPD belum memuat pagu gaji dan tunjangan ASN, sedangkan pada tahapan analisis kebutuhan perangkat daerah telah memuat pagu gaji dan tunjangan ASN sehingga ada perbedaan antara pagu pada rancangan awal RKPD yaitu sebesar Rp. 4.457.748.000 sedangkan pada tahapan analisis kebutuhan perangkat daerah pagu belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar menjadi Rp. 11.924.312.332,00;
- Ada perubahan pagu di beberapa subkegiatan karena penyesuaian dengan analisis kebutuhan perangkat daerah, namun tidak mengubah pagu belanja secara keseluruhan;
- Ada perubahan indikator kinerja pada hasil analisis kebutuhan perangkat daerah setelah hasil desk cascading dengan Bappelitbang dan Inspektorat karena indikator pada subkegiatan merupakan akumulasi dari indikator pada kegiatan, dan indikator pada kegiatan merupakan akumulasi dari indikator kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 di bawah ini :

Tabel 2.4. 1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	egiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.							**4.457.748.000**							**11.924.312.332**	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Kab. Banjar	**Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**100%**	**1.811.545.900**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**			Kab. Banjar	**Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**100%**	**1.395.237.571**	
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Kab. Banjar	Persentase capaian pajak hotel	94%	1.811.545.900	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Kab. Banjar	Persentase capaian pajak daerah	94%	1.395.237.571	
					Persentase capaian pajak restoran	94%						Persentase capaian retribusi daerah	94%		
					Persentase capaian paja hiburan	94%						Persentase capaian bagi hasil laba perusahaan daerah	94%		
					Persentase capaian pajak reklame	94%						Persentase capaian lain-lain PAD yang sah	94%		
					Persentase capaian pajak parkir	94%									
					Persentase capaian pajak MBLB	94%									
					Persentase capaian pajak sarang burung walet	94%									
					Persentase capaian pajak penerangan jalan	94%									
					Persentase capaian pajak air tanah	94%									

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	egiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Persentase capaian pajak bumi dan bangunan	94%									
					Persentase capaian BPHTB	94%									
					Persentase capaian retribusi jasa umum	94%									
					Persentase capaian retribusi jasa usaha	94%									
					Persentase capaian retribusi perijinan tertentu	94%									
					Persentase capaian bagi hasil laba perusahaan daerah	94%									
					Persentase capaian lain-lain PAD yang sah	94%									
					Persentase capaian Dana Bagi Hasil Pajak	94%									
					Persentase capaian DBH Non Pajak	94%									
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah target pendapatan daerah yang disusun	2 Dokumen	22.883.100	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah target pendapatan daerah yang disusun	2 Dokumen	16.149.600	
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah dokumen terkait kebijakan pajak daerah	2 Dokumen	7.550.600	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah dokumen terkait kebijakan pajak daerah	2 Dokumen	7.550.600	
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah peserta penyuluhan yang paham terkait materi penyuluhan	225 Orang	89.640.200	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah peserta penyuluhan yang paham terkait materi penyuluhan	225 Orang	89.640.200	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	egiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	11 Buah	179.602.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	11 Buah	28.086.500	
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	176.975 Objek Pajak	111.592.800	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	176.975 Objek Pajak	94.344.200	
6.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah laporan atas pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4 Laporan	58.539.900	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah laporan atas pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4 Laporan	21.703.800	
7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Kab.Banjar	Jumlah wajib pajak PBB dan BPHTB yang dinilai	3300 WP	130.687.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Kab.Banjar	Jumlah wajib pajak PBB dan BPHTB yang dinilai	3300 WP	117.187.000	
					Jumlah wajib pajak PBB yang dimutakhiran	5000 WP						Jumlah wajib pajak PBB yang dimutakhiran	5000 WP		
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	750 SKPD	16.601.300	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	750 SKPD	14.028.000	
					Jumlah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diterbitkan	20 Buku DHKP						Jumlah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diterbitkan	20 Buku DHKP		
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah wajib pajak daerah yang dilayani dan melakukan konsultasi pajak daerah	120 Wajib Pajak	17.143.100	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah wajib pajak daerah yang dilayani dan melakukan konsultasi pajak daerah	120 Wajib Pajak	10.224.100	
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah buku dan laporan pendaparan daerah yang disusun	16 Dokumen	61.225.600	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah buku dan laporan pendaparan daerah yang disusun	16 Dokumen	61.225.600	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	Kegiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.	Penagihan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diterbitkan	75 Lembar	917.682.500	Penagihan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diterbitkan	75 Lembar	754.423.371	
					Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan	SPPT 175.000 lembar						Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan	SPPT 175.000 lembar		
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah keberatan dari wajib pajak daerah yang bisa diselesaikan	120 Kasus	12.897.100	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah keberatan dari wajib pajak daerah yang bisa diselesaikan	120 Kasus	7.474.400	
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah wajib pajak daerah yang diawasi	160 Wajib Pajak	141.748.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kab.Banjar	Jumlah wajib pajak daerah yang diawasi	160 Wajib Pajak	129.448.000	
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Kab.Banjar	Jumlah laporan capaian dan evaluasi retribusi daerah	4 Laporan	43.752.200	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Kab.Banjar	Jumlah laporan capaian dan evaluasi retribusi daerah	4 Laporan	43.752.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Kab.Banjar	Persentase kesesuaian target Dana Transfer dengan realisasi	94%	**31.307.300**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			Kab.Banjar	Persentase kesesuaian target Dana Transfer dengan realisasi	94%	**31.307.300**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Kab.Banjar	Persentase kesesuaian target DBH Pajak dan DBH Non Pajak	94%	31.307.300	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			Kab.Banjar	Persentase kesesuaian target DBH Pajak dan DBH Non Pajak	94%	31.307.300	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Kab.Banjar	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monev pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya		31.307.300	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Kab.Banjar	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monev pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya		31.307.300	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Kab.Banjar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	**2.614.894.800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			Kab.Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	60%	**10.497.767.661**	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	Kegiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA							**DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab.Banjar	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	**37.810.405**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Kab.Banjar	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	**31.489.197**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Banjar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	7.481.800			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Banjar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	7.160.492	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	5.550.400			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	5.550.400	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	4.997.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	2.911.200	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen DPA	2 Dokumen	6.696.900			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen DPA	2 Dokumen	4.212.100	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen perubahan DPA	2 Dokumen	5.162.100			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen perubahan DPA	2 Dokumen	3.733.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	32 Dokumen	4.273.100			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	32 Dokumen	4.272.900	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjar	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	3.649.105			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjar	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	3.649.105	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab.Banjar	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**1.251.788.600**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Kab.Banjar	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	**8.424.685.932**	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	Kegiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab.Banjar	Jumlah masa waktu terlaksananya belanja gaji dan TPP	14 Bulan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab.Banjar	Jumlah masa waktu terlaksananya belanja gaji dan TPP	14 Bulan	8.320.187.332	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	1.233.090.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	90.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab.Banjar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan audited	2 Laporan	2.668.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab.Banjar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan audited	2 Laporan	2.668.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab.Banjar	Jumlah dokumen laporan bulanan/triwulan/semesteran	18 Laporan	16.030.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab.Banjar	Jumlah dokumen laporan bulanan/triwulan/semesteran	18 Laporan	11.130.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kab.Banjar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	**52.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Kab.Banjar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	**40.000.000**	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kab.Banjar			-	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kab.Banjar			10.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran bimbingan teknis/pelatihan	12 Bulan	52.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran bimbingan teknis/pelatihan	12 Bulan	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab.Banjar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**477.722.271**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Kab.Banjar	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	**265.198.900**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Banjar	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7.292.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Banjar	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7.292.600	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	Kegiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab.Banjar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	6.530.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab.Banjar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	6.530.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab.Banjar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	13.344.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab.Banjar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	11.376.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	450.555.371	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	240.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kab.Banjar	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**158.984.300**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Kab.Banjar	Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	**66.071.600**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab.Banjar	Tersedianya kendaraan operasional/lapangan	3 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab.Banjar	Tersedianya kendaraan operasional/lapangan		0	
	Pengadaan Mebel			Kab.Banjar	Jumlah pengadaan mebeuleur kantor	4 Buah	64.477.600	Pengadaan Mebel			Kab.Banjar	Jumlah pengadaan mebeuleur kantor	4 Buah	50.957.600	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab.Banjar	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	9 Buah	94.506.700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab.Banjar	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	9 Buah	15.114.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab.Banjar	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**227.454.124**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Kab.Banjar	Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	**1.293.446.932**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran jasa komunikasi,	12 Bulan	181.800.524	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran jasa komunikasi,	12 Bulan	163.053.332	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah						Catatan Penting
	Program/Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan			lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program	egiatan	SubKegiatan					Program	Kegiatan	SubKegiatan					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					sumber daya air dan listrik							sumber daya air dan listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	45.653.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1.130.393.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab.Banjar	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**409.135.100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Kab.Banjar	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	**376.875.100**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran pemeliharaan mobil jabatan	12 Bulan	38.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran pemeliharaan mobil jabatan	12 Bulan	38.990.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 Bulan	257.760.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 Bulan	255.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab.Banjar	Tersedianya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	12 Bulan	61.885.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab.Banjar	Tersedianya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	12 Bulan	31.885.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran rehab gedung kantor	1 Kegiatan	50.500.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab.Banjar	Tersedianya anggaran rehab gedung kantor	1 Kegiatan	50.500.100	

Sumber Data : RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil dan Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang dengan tema Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang bekualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN Tahun 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0% per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 4,0 – 4,6 % dan gini ratio mencapai 0,370 – 0,374. Target RPJMN ini menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang belum kondusif dampak dari pademi covid-19 pada awal tahun 2020. Pada tahun 2021 rencana kerja pemerintah mengusung tema “Meningkatkan investasi dan daya saing indsutri pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi” dengan target 5,3 - 5,7% di tahun 2021. Dalam menghadapi tantangan global dan domestic, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong melalui 3 (tiga) sektor, yaitu sektor industri, sektor pariwisata dan peningkatan sektor investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021 Kabupaten Banjar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran Milinium Development Gold (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar serta kebijakan pada masing-masing sasaran misi pembangunan Kabupaten Banjar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang memiliki sasaran

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan.

Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintah ini adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak disumbangkan dari Pajak Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu negatif yang bersifat sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pluktuasinya penerimaan pendapatan asli daerah.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanaan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal ini tujuan merupakan suatu hal yang akan diupayakan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari visi misi Kabupaten Banjar dan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang dituangkan dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013.

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah adalah ***Terselenggaranya Reformasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*** dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah ***Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*** dengan indikator sasaran rasio pendapatan asli daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sebagai SKPD di daerah yang mempunyai peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan terutama dari segi pendapatan, dimana pendapatan asli daerah merupakan tumpuan utama dalam pembiayaan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan acuan kemandirian suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD-nya maka daerah semakin besar pula nilai kemandiriannya secara fiskal. Oleh karena itu yang menjadi tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Banjar 5 (lima) tahun kedepan adalah terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD, dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Sasaran adalah hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, Sasaran yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 yaitu ***optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)***. Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 yaitu **Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Rumus indikator sasaran atau IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah realisasi tahun sebelumnya dikurangi realisasi tahun berjalan berbanding realisasi tahun berjalan dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase, atau dapat dilihat seperti berikut :

$$\frac{\text{realisasi tahun n-1} - \text{realisasi tahun n}}{\text{realisasi tahun n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Realisasi tahun n-1 adalah jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang dicapai pada tahun sebelumnya.
- Realisasi tahun n adalah jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang dicapai pada tahun berjalan.

Definisi operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yaitu :

- Pendapatan daerah adalah penerimaanpemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1;
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10;
- Persentase Peningkatan Pajak Daerah adalah persentase yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pajak daerah tahun berjalan dengan realisasi pajak daerah tahun sebelumnya.

Penetapan rumus yang ditetapkan dalam penentuan angka target IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah menggunakan metode *SMART* yang dijelaskan sebagai berikut :

- *Specific* : Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus (hanya terkait dengan penerimaan PAD baik target maupun realisasinya)
- *Measurable* : dapat diukur (target dan realisasi merupakan angka yang sifatnya absolut)
- *Achievable* : target yang ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai (target dan realisasi merupakan ukuran keberhasilan kinerja Bapenda sehingga semaksimal mungkin direalisasikan dengan baik)
- *Relevant* : target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok (tugas Bapenda salah satunya adalah peningkatan penerimaan PAD)
- *Time* : waktu untuk mencapai target tersebut /*deadline* (target dan realisasi disusun untuk 1 tahun berjalan)

3. 3. Program dan Kegiatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan. Kemudian adanya pemutakhiran PMDN 90 Tahun 2019 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) program prioritas dengan 1 (satu) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan karena pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tersebut pada urusan keuangan dan bidang pendapatan hanya memuat 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Program pengelolaan pendapatan daerah terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu :

   a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
   b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
   c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
   d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
   e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
   f. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
   g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   h. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
   i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
   j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
   k. Penagihan Pajak Daerah;
   l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
   m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
   n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program prioritas dan kegiatan renja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
5.2	Keuangan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kab.Banjar			
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kab.Banjar	100%		APBD
5.2.4.2.01.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pendapatan daerah yang disusun	Kab.Banjar	2 Dokumen	22.883.100	APBD
5.2.4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen terkait kebijakan pajak daerah	Kab.Banjar	2 Dokumen	7.550.600	APBD
5.2.4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta penyuluhan yang paham terkait materi penyuluhan	Kab.Banjar	225 Orang	89.640.200	APBD
5.2.4.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kab.Banjar	11 Buah	179.602.500	APBD
5.2.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	Kab.Banjar	176.975 Objek Pajak	111.592.800	APBD
5.2.4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan atas pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Kab.Banjar	4 Laporan	58.539.900	APBD
5.2.4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak PBB dan BPHTB yang dinilai	Kab.Banjar	3.300 wajib pajak	130.687.000	APBD
		Jumlah wajib pajak PBB yang dimutakhirkan		5.000 wajib pajak		
5.2.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diterbitkan	Kab.Banjar	20 Buku	16.601.300	APBD
		Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan		750 SKPD		
5.2.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang dilayani dan melakukan konsultasi pajak daerah	Kab.Banjar	120 wajib pajak	12.897.100	APBD
5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun	Kab.Banjar	16 Dokumen	61.225.600	APBD
5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan	Kab.Banjar	175.000 Lembar	917.682.500	APBD
		Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah		75 Lembar		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(STPD) yang diterbitkan				
5.2.4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan wajib pajak daerah yang bisa diselesaikan	Kab.Banjar	120 Kasus	12.897.100	APBD
5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang diawasi	Kab.Banjar	160 wajib pajak	141.748.000	APBD
5.2.4.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan capaian dan evaluasi retribusi daerah	Kab.Banjar	4 Laporan	43.752.200	APBD

Sumber Data : RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Badan Pendapatan Daerah.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yaitu :

   a. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
      - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
      - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
      - Pengadaan Mebel; dan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Program pengelolaan keuangan daerah terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Program pengelolaan pendapatan daerah terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu :

   a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
   b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
   c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
   d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
   e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
   f. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
   g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   h. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
   i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
   j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
   k. Penagihan Pajak Daerah;
   l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
   m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
   n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.924.312.332,00 *(sebelas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus ratus tiga puluh dua rupiah*). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN								Formulir						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								RKA-BELANJA SKPD						
Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022														
Organisasi :					5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah									
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN				11,789,880,332	134,432,000	0	0	11,924,312,332	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,440,835,661	56,932,000	0	0	10,497,767,661	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30,431,197	1,058,000	0	0	31,489,197	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan		7,160,492	0	0	0	7,160,492	

5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan		5,550,400	0	0	0	5,550,400	
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan		1,853,200	1,058,000	0	0	2,911,200	
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan		4,212,100	0	0	0	4,212,100	
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan		3,733,000	0	0	0	3,733,000	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan		4,272,900	0	0	0	4,272,900	
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan		3,649,105	0	0	0	3,649,105	
5	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,424,685,932**	**0**	**0**	**0**	**8,424,685,932**	
5	2	1		1						0	0	0		

			2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,320,187,332				8,320,187,332	
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90,700,000	0	0	0	90,700,000	
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,668,600	0	0	0	2,668,600	
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,130,000	0	0	0	11,130,000	

5	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	
5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	
5	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**265,198,900**	**0**	**0**	**0**	**265,198,900**	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,292,600	0	0	0	7,292,600	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,530,300	0	0	0	6,530,300	
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,376,000	0	0	0	11,376,000	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Dana Transfer	Semua Kabupaten		240,000,000	0	0	0	240,000,000	

					dan Konsultasi SKPD	Umum-Dana Alokasi Umum	/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
5	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**10,197,600**	**55,874,000**	**0**	**0**	**66,071,600**	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		957,6	50,000,000	0	0	50,957,600	
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,240,000	5,874,000	0	0	15,114,000	
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,293,446,932**	**0**	**0**	**0**	**1,293,446,932**	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		163,053,332	0	0	0	163,053,332	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,130,393,600	0	0	0	1,130,393,600	
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**376,875,100**	**0**	**0**	**0**	**376,875,100**	

5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,990,000	0	0	0	38,990,000	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		255,500,000	0	0	0	255,500,000	
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,885,000	0	0	0	31,885,000	
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,500,100	0	0	0	50,500,100	
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**31,307,100**	**0**	**0**	**0**	**31,307,100**	
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**31,307,100**	**0**	**0**	**0**	**31,307,100**	
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,307,100	0	0	0	31,307,100	

					Dana Transfer Lainnya									
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**1,317,737,571**	**77,500,000**	**0**	**0**	**1,395,237,571**	
5	**2**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				**1,317,737,571**	**77,500,000**	**0**	**0**	**1,395,237,571**	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,149,600	0	0	0	16,149,600	
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,550,600	0	0	0	7,550,600	
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89,640,200	0	0	0	89,640,200	
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		586,5	27,500,000	0	0	28,086,500	
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,344,200	0	0	0	94,344,200	

5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,703,800	0	0	0	21,703,800	
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,187,000	0	0	0	117,187,000	
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,028,000	0	0	0	14,028,000	
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,224,100	0	0	0	10,224,100	
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61,225,600	0	0	0	61,225,600	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamata		704,423,371	50,000,000	0	0	754,423,371	

							n, Semua Kelurahan							
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,474,400	0	0	0	7,474,400	
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129,448,000	0	0	0	129,448,000	
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43,752,200	0	0	0	43,752,200	

Sumber Data : Aplikasi SIPD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Banjar "***Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis***" dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Banjar.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Badan Pendapatan Daerah untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja. Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Badan Pendapatan Daerah dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Renja sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
    a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

b. Badan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

32. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran teknis Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk unit kerja yang bermaterikan rencana Program/ kegiatan SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RENJA SKPD seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2022.

Dari uraian arti strategis mengenai Renja di atas, maka disusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang secara substansial merupakan terjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan yang telah dilaksanakan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar sebagai Bagian terintegrasi dari Pemerintah Daerah menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dalam sebuah Rencana Kerja, Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengemukakan bahwa Renja SKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam Program dan Kegiatan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Gambar 1.1 Penjabaran Subtansi Dalam Dokumen RKPD Tahun 2022

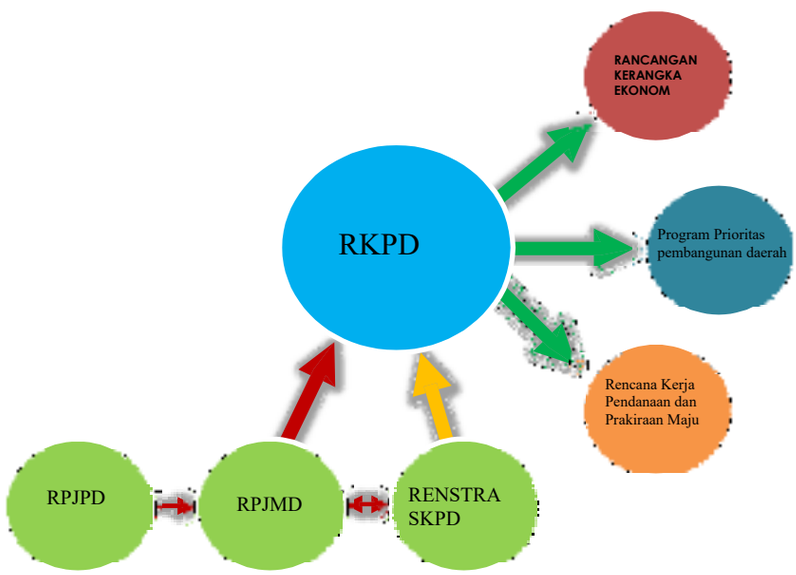

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program *(money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga

semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan rancangan awal Renja
3. Penyusunan rancangan Renja
4. Pembahasan Rencana kerja Renja.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetaan Renja

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
j. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar;
m. Peraturan Bupati Banjar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010-2015;
n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
o. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor xx Tahun xxxx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021;

p. Peraturan Daerah No xx tahun xxxx tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor x Tahun xxxx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

q. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx Tahun xxxx Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 34)

r. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022.

Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan lainnya

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Berdasarkan pertimbangan di atas, Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen Renja Tahun 2022 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di BKDPSDM, Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Kabupaten Banjar dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.

b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kab.Banjar selama kurun waktu satu tahun (2022).

2. Tujuan

a. Tersedianya Dokumen Perencanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun (2022) sebagai bagian dari Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar.
b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu satu tahun (2022) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.
d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar ini, secara berurutan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja – SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab Ini Berisi Rencama Kerja Dan Rencana Pendanaan Yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) Dan Program Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Target Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dan RPJMD

BAB V PENUTUP

Berisikan Penutup Tentang Renja BKDPSDM

LAMPIRAN.

BAB.II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKDPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun lalu (Triwulan III 2021)

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2021)

2.1.1.1 **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)**

Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Banjar mendapatkan pagu belanja langsung sebesar Rp. 6.680.863.676 dan pagu perubahan belanja langsung sebesar Rp. 4.073.918.604 Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Banjar pada tahun 2020 melaksanakan 1 urusan, 12 program, dan 54 kegiatan. Dan berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BKDPSDM pada tahun lalu (tahun 2020).

1. Realisasi program/kegiatan/Subkegiatan yg tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

1. Kegiatan Penyusunan dan pengusulan Formasi CPNS
   Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS dengan target 3500 usulan dan realisasi sebesar 3315 usulan , dengan capaian sebesar 95 %
2. Kegiatan Penempatan PNS
   Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terbitnya SK Mutasi PNS Masuk, Mutasi PNS Keluar dan Mutasi Intern serta SK Penempatan PNS Selesai dengan target sebanyak 150 SK dan realisasi sebesar 135 SK dengan capaian 90 %
3. Program Pengembangan Aparatur
   Indikator kinerja program ini adalah Persentasi jabatan sesuai kompetensi dengan target sebesar 83 % dan realisasi sebesar 77,67 % dengan capaian sebesar 93,58 %
4. Kegiatan Pencantuman Gelar Pendidikan
   Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terselenggaranya Kegiatan pencantuman gelar pendidikan yang lebih tinggi PNSD Kab.Banjar dengan target sebesar 150 SK pencantuman gelar dan realisasi sebesar 46 SK pencantuman gelar dengan capaian sebesar 30,67 %
5. Program Pembinaan Aparatur
   Indikator kinerja program ini adalah nilai rata - rata capaian SKP Pegawai Pemkab Banjar dengan target sebesar 89 dan realisasi sebesar 86 ,21 dengan capaian 96,86 %;
6. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaraan Disiplin PNS
   Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Penyampaian Pertimbangan Penjatuhan Hukuman dari Tim Majelis ke

PPK, dan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke BAPEK/BKN/BKD Prop mengenai Pelaksanaan PP 53/2010 dengan 13 jumlah perkara pelanggaran disiplin yang ditangani dan realisasinya sebanyak 8 perkara dengan capaian sebesar 61,53 %.

7. Pengambilan Sumpah / janji PNS
   Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terselenggaranya pengambilan Sumpah / Janji ASN dengan target 500 peserta pengambilan sumpah /janji ASN dan realisasi sebanyak 0 peserta dengan capaian 0 %;
8. Kegiatan Kesejahteraan ASN
   Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pemberian Bantuan Pemeriksaan Kesehatan, fasilitasi pengajuan bantuan BP. TAPERA, BPJS Kesehatan dan Kesejahteraan ASN dengan target 120 orang dan realisasi 108 orang dengan capaian 90 %
9. Kenaikan gaji Berkala Otomatis Ess II dan Camat kepala SKPD
   Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala Ess. II dan Camat Kab.Banjar dengan target sebnayk 50 SK dan realisasi sebanayak 23 SK dengan capaian sebesar 46 %
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah
    Indikator kinerja program ini adalah Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan dengan target 32 % dan realisasi sebesar 12,43 % dengan capaian 38.84 %
11. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini Adalah Aparatur Daerah Pemkab. Banjar Yang Diberi Kepercayaan Mengikuti Tugas Belajar Dan Tugas Belajar Khusus dengan target 10 orang dan realisasi sebanyak 9 orang dengan capaian 90 %

- .Realisasi program/kegiatan/Subkegiatan yg memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
   Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Tersedianya pelamar Calon ASN yang berkualitas dan kompeten dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian 100 %
2. Kegiatan Pengangkatan CPNS ke PNS
   Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terselenggaranya Kegiatan pengangkatan Calon ASN mejadi ASN dengan target 1 kegiatan dan realisasi sebanyak 1 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %
3. Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Taruna / siswa ikatan kedinasan
   Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya seleksi calon pelajar Taruna / Siswa Ikatan Dinas dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian 100 %
4. Kegiatan Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan

Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit dengan target 2 kegiatan dan realisasi sebanyak 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %

5. Kegiatan Pembinaan Pola karir jabatan Fungsional
   Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya kegiatan pembinaan pola karier jabatan fungsional dengan target 79 ASN jabatan administrasi yang dibina dan realisasi sebanyak 79 ASN dengan capaian 100 %
6. Kegiatan Ujian Dinas
   Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Ujina Dinas dengan target jumlah peserta ujian dinas sebanyak 30 orang dan realisasi sebanyak 30 orang dengan capaian 100 %
7. Kegiatan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara
   Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ASN dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %.
8. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan aparatur
   Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan target jumlah monitoring dan pembinaan sebanyak 12 dengan realiasasi sebanyak 31 dengan capaian sebesar 258 %
9. Program Disiplin Aparatur
   Indikator kinerja program ini adalah Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin dengan target sebesar 99,4 % dan realisasi sebesar 99,87 % dengan capaian sebesar 100,5 %.
10. Kegiatan Pertimbangan Rekomendasi Ijin Perkawinanan dan Perceraian PNS
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Pertimbangan Ijin Perkawinan dan Perceraian dengan target 15 Rekomendasi Ijin Perkawinanan dan Perceraian PNS dan realisasi sebanyak 24 rekomendasi dengan capaian sebesar 160 %
11. Kegiatan Purna Tugas PNS
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terfasilitasinya Purna Tugas PNS Pemkab Banjar dengan target 200 PNS yang difasilitasi purna tugas dengan realisasi sebanyak 278 orang yang difasilitasi purna tugas dengan capaian 139 %
12. Kegiatan Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya penyampaian usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan target 500 peserta Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya dengan realisasi sebanyak 622 peserta dengan capaian sebesar 124 %
13. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah IKP (Indek Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian dengan target 87,15 % dan realisasi sebesar 88,19 dengan capaian 100,8 %

14. Kegiatan Layanan Inovasi Kepegawaian

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terwujudnya pelayanan satu pintu se kab. Banjar dengan baik dan lancar bagi PNSD Kab Banjar dengan target 1 layanan dan realisasi 1 layanan dengan capaian sebesar 100 %

15. Kegiatan Pengembangan sistem Informasi kepegawaian

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Jumlah pembaharuan sistem informasi kepegawaiaan dengan target 1 sistem informasi kepegawaian dengan realisasi 1 sistem informasi kepegawaian dengan capaian 100 %

16. Kegiatan Penyediaan akurasi data dan informasi

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Tersedia data kepegawaian yang akurat dan informatif dalam bentuk buku dan arsip digital dengan target 3 buku dan arsip digital realisasi sebanyak 3 buku dan arsip digital dengan capaian sebesar 100 %

17. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS Kab.Banjar dengan target 900 SK kenaikan pangkat dan realisasi sebanyak 1133 dengan capaian 125 %

18. Kegiatan Penerbitan Identitas Pegawai

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terselesaikannya Penerbitan Karpeg,Karis,Karsu, KPE PNS Lingkup Pemkab Banjar dengan target sebanyak 400 kartu dan realisasi sebanyak 452 dengann capaian sebesar 113 % .

19. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya kegiatan bagi aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan Gol. II dan III Kab.Banjar dengan target 205 peserta dan realisasi sebanyak 205 peserta dengan capaian sebesar 100 %

20. Kegiatan Penyelenggaraan/Penyertaan Pengembangan Kompetensi teknis dan fungsional

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Penyelenggaraan dan Penyertaan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional bagi PNS Kabupaten Banjar dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %

21. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya kegiatan bagi aparatur yang mengikuti PKN Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kab.Banjar dengan target sebanyak 10 peserta dan realisasi sebanyak 10 peserta dengan capaian sebesar 100 %

22. Kegiatan Pengembangan Kompetensi umum

Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi dengan target 3 kegiatan dan realisasi 3 kegiatan dengan capaian 100 %

23. Kegiatan Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan Komptensi
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pemerintah Kabupaten Banjar dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan capaian 100 %
24. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kapasitas Aparatur
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Termotivasinya Aparatur Daerah yang diberi kepercayaan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 24 jumlah monitoring dan evaluasi dan realisasi 24 dengan capaian 100 %
25. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terpenuhinya Peningkatan Kebutuhan Administrasi, komunikasi dan terpeliharanya listrik, air telepon dan faximili BKD dan PSDM Kab.Banjar dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan target 12 bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan dengan capaian sebesar 100 %
26. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terpenuhinya kebutuhan kinerja pegawai akan penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekertariat guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan dengan capaian 100 %
27. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terfasilitasinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKDPSDM Kab. Banjar dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100 %
28. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terwujudnya kenyamanan suasana kerja dan tercapainya kinerja yang baik dan lancar bagi PNS BKDPSDM Kab. Banjar
    Dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100 %
29. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, dan makan dan minum tamu BKDPSDM Kab. Banjar guna meningkatkan pelayanan dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan dengan capaian 100 %.
30. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke instansi/lembaga terkait sesuai kinerja BKDPSDM Kab. Banjar dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100%

31. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKDPSDM Kab. Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan kepegawaian dan pelayanan Wisma Sultan Sulaiman dengan target 12 bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan dengan capaian 100 %.
32. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor BKDPSDM Kab. Banjar demi kenyamanan bersama dan terpeliharanya asset gedung kantor dengan target 1 tahun dan realisasi sebanyak 1 tyahun dengan capaian 100 %'
33. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terjaminnya peningkatan kinerja, kelancaran dan kenyamanan Pejabat BKDPSDM Kab. Banjar dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100 %.
34. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terjaminnya peningkatan kinerja,kelancaran dan kenyamanan perjalanan dinas/operasional BKDPSDM Kab. Banjar dengan target 14 kendaraan dan realisasi 14 kendaraan dengan capaian 100 %
35. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor BKDPSDM Kab. Banjar demi kenyamanan bersama dan terpeliharanya asset perlengkapan gedung kantor dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100 %
36. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor BKDPSDM Kab. Banjar demi kenyamanan bersama dan terpeliharanya asset peralatan gedung kantor dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100 %
37. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terselenggaranya Sosialisasi tentang peraturan kepegawaian dengan target 50 peserta sosialisasi dan realisasi 50 peserta dengan capaian 100 %
38. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan semesteran BKDPSDM Kab. Banjar dengan target 2 laporan dan realisasi sebanyak 2 laporan dengan capaian 100 %
39. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKDPSDM Kab. Banjar dengan target 1 laporan dan realisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian sebesar 100%
40. Kegiatan Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya publikasi kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian 100 %

41. Kegiatan Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Dokumen yang disusun berdasarkan ketentuan dan singkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan Daerah (revisirenstra, Rencana kerja, Proposal kegiatan dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian 100%

42. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Tersusunya Dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian 100 %

43. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja BKDPSDM Kab. Banjar (LPPD, LKJiP, LKPJ , Laporan Triwulanan dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian 100 %

44. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Termonitor dan Terevaluasinya Kegiatan Perencanaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian 100 %

45. Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah

    Indikator kinerja program adalah tersungkronisasinya data pendapatan daerah dengan target 1 data pendapatan daerah yang tersingkronisasi dan realisasi 1 data pendapatan daerah yang tersingkronisasi dengan capaian 100 %.

46. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

    Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun dengan capaian 100 %

2. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan jadwal yang sudah disusun;

   a. Masih kurangnya kesadaran dalam pengusulan kenaikan pangkat terutama berkaitan dengan berkas/dukomen ynag tidak Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan data yang diminta;
   b. Masih banyak PNS yang masih belum menyelesaikan pembuatan SKP setelah tahun berjalan;
   c. Jadwal pembinaan ke SKPD terutama kecamatan2 yang sering terkendala waktu yang sering beriringan dengan kegiatan lainnya;
   d. PNS yang mengajukan usulan izin melakukan perceraian sering terkendala pasangannya tidak mau berhadir untuk memberikan

keterangan yang diperlukan gunu untuk memberikan keputusan dalam rapat tim majelis;

e. Masih ada bebrapa SKPD yang tidak melaporkan mengenai pelanggaran yang dilakukan PNS, sehingga setelah pelanggaran yang terjadi sudah dikategorikan berat membuat proses penjatuhan hukuman disiplin tidak sesuai dengan ketentuan;

f. Masih belum siapnya penyusunan analisis jabatan (anjab) dan penyusunan analisis beban kerja (ABK) dari bagian ortala menyebabkan telambatnya penyusunan formasi PNS kabupaten Banjar belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan efisien;

g. Adanya penundaan jadawal kegiatan diklat dari pihak penyelenggara sehingga mempengaruhi serapan anggaran dan perubahan abdet terutama Bidan yang mengikuti Pendidikan Penjenjangan pada periode 2019;

h. Ketidak bersedianya peserta diklat (Uji Kompetensi) yang diikutkan;

i. Data yang diperlukan seringkali tidak tersedia di SKPD dan tidak update;

j. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan uji kompotensi jabatan fungsional dan tempat penyelenggaraan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Dengan banyak nya capaian target yang dapat terpenuhi sehingga target pemenuhan pada program renstra dapat terpenuhi.

4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fator-faktor penyebab tersebut

a. Rapat koordinasi dengan SKPD terkait agar diintensifkan, khususnya antara bidang di BKDPSDM dengan SKPD/kecamatan-kecamatan yang bersangkuatan;

b. Membuat surat edaran sedini mungkin yang isinya mengingatkan kepada tiap PNS di SKPD agar membuat SKP sesuai dengan ketentuan, dan kepada SKPD agar melakukan rekapitulasi terhadap SKP tiap PNS;

c. Menetapkan jadwal pembinaan dan melaksanakan pembinaan sesuai jadwal (time shedule);

d. Memanggil pasangan PNS yang mengajukan usul perceraian sebanyak 3 kali panggilan, apabila tidak memenuhi panggilan maka akan mejadi catatan pada saat dibawa ke rapat tim majelis;

e. Membuat Surat Edaran mengenai rekapitulasi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS di tiap SKPD;

f. Mengkonfirmasi langsung ke SKPD terkait jika ada kabar/ berita mengenai pelanggaran disiplin PNS di tiap SKPD;

g. Agar bagian ortala setda segera merampungkan penyusunan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK);

h. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dan BPSDM Kemendagri di Jakarta agar kegiatan

Penyertaan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;

i. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak penyelenggara pelatihan harus lebih ditingkatkan lagi;
j. Data peserta pelatihan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah harus sesuai kebutuhan agar memenuhi target yang sudah ditetapkan;
k. Koordinasi ke penyelenggara diklat harus dilakukan lebih awal agar persiapan Penyelenggaraan/Penyertaan Pengembangan Kompetensi dapat terlaksana;
l. Perlunya perhatian dan dukungan dari kepala SKPD terkait penyediaan data yang diminta/diperlukan sehingga penyampaian data tepat waktu;
m. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan meningklatan koordinasi dalam pembuatan anggaran untuk ujian kopetensi jabatan fongsional;
n. Melakukan koordinasi secara intensif terhadap lembaga pengukuran kompetensi, khusunya lembaga pengukuran kompetensi dengan biaya murah namun memiliki kualitas baik dan diakui oleh lembaga BKN maupun KASN;

2.1.1.2.Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk BKDPSDM Kabupaten Banjar . Pada tahun anggaran 2021, BKDPSDM Kabupaten Banjar melaksanakan 3 Program 11 Kegiatan 43 Subkegiatan, dengan total pagu dana sebesar Rp 11.063.557.863, (Sebelas Milyar Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) .

Adapun hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan III BKDPSDM Kabupaten Banjar dan perkiraan capaian target akhir periode Renstra untuk BKDPSDM Kabupaten Banjar dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realiasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 Sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
	Urusan :									
	Bidang Urusan : Kepegawaian									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BKDPSDM Tahun 2020										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terpenuhinya program pelayanan administrasi perkantoran**	100	100	100	100	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kebutuhan administrasi, komunikasi dan terpeliharanya air, listrik, telepon dan faximili BKD dan PSDM Kab. Banjar dan kebutuhan rumah tangga lainnya.	5	1,00	1	1	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekertariat guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar	60	12,00	12	12	100%			

					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin dan profil/sekertariat BKD dan PSDM Kab. Banjar sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKDPSDM Kab. Banjar	5	3,00	1	1	100%			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar.	5	1,00	1	1	100%			
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai BKD dan PSDM Kab. Banjar guna meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dan efisiensi waktu kerja pegawai	60	12,00	12	12	100%			
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke instansi/lembaga terkait sesuai keperluan.	5	1,00	1	1	100%			
					Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKD dan PSDM Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan pegawai.	5	3,00	1	1	100%			

					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					#DIV/0!			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan pemeliharaan gedung kantor BKDPSDM ab. Banjar guna kenyamanan dan keamanan kerja	3	1,00	1	1	100%			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan BKDPSDM Kabupaten Banjar	3	1,00	1	1	100%			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional BKD dan PSDM Kab. Banjar	5	1,00	1	1	100%			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor BKDPSDM Kab. Banjar guna kenyamanan dan keamanan kerja	2	0,00	1	1	100%			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor BKD dan PSDM kab. banjar guna kenyamanan dan keamanan bekerja	5	1,00	1	1	100%			
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sossialisasi peraturan perundang-undangan terhadapa PNSD Kkab. Banjar	500		100	100	100%			

					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Terpenuhinya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**48**				#DIV/0!			
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Tahun N dan Rencana Kinerja Tahun N+1 BKD dan PSDM Kab. Banjar	5		1	1	100%			
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan Semesteran	6		2	2	100%			
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BKD dan PSDM Kab. Banjar	5		1	1	100%			
					Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan	Terlaksananya pengembangan dan pengendalian perencanaan SKPD	3		1	1	100%			
					Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	Tersusunya renstra perangkat daerah	3		1	1	100%			
					Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD	terlaksananya publikasi Kinerja SKPD	3		1	1	85%			
					Monitoring dan Evaluasi	Termonitor dan Terevaluasinya Kegiatan perencanaan yang sesuai dengan Dokumen perencanaan Daerah	3		1	1	100%			
					Program Penataan Aparatur	Persentase Distribusi ASN Sesuai kompetensi								

					Penyusunan dan pengusulan Formasi ASN	Tersusunya kebutuhan formasi ASN Kab. Banjar	4		2	2	100%			
					Seleksi Penerimaan Calon ASN	Tersedianya Dokumen hasil seleksi penerimaan calon ASN	3		2	2	100%			
					Pengangkatan Calon ASN Menjadi ASN	Persentase Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN	100		0	0				
					Penyelenggaraan Penerimaan Taruna / siswa ikatan dinas	Terpenuhinya formasi pendidikan kedinasan sesuai kebutuhan	45		15	15	100%			
					Penempatan ASN	Jumlah SK Mutasi penempatan ASN sesuai kompetensi	600		200	138	69%			
					Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam jabatan	Terisi jabatan JPT sesuai kompetensi	5		3	3	100%			
					Penilaian Potensi dan Kompetensi Penyusunan Talent Pool	Tersedianya data base potensi dan kompetensi ASN di Kab. Banjar	1.400		0	0				
					Program Pengembangan Aparatur	**Persentasi jabatan sesuai kompetensi**								
					Pembinaan Pola karir jabatan Administrasi	% Terpenuhi pola karier jabatan administasi sesuai kompetensi	90		70	80	114%			
					Pembinaan Pola karir jabatan Fungsional	% Terpenuhi pola karier jabatan fungsional sesuai kompetensi	100		83	75	90%			
					Ujian Dinas	Terpenuhinya komptensi ASN kab. Banjar melalui ujian dinas	90		30	30	100%			

					Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah(UKPPI)	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar Melalui UKPPI	90		22	30	136%			
					Pencantuman Gelar Pendidikan	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar melalui pencantuman Gelar	450		150	57	38%			
					Program Pembinaan Aparatur	Nilai SKP								
					Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	jumlah dokumen Nilai Kinerja ASN	3		1	1	100%			
					Monitoring dan Pembinaan aparatur	jumlah dokumen Data disiplin	3		1	1	100%			
					Program Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin								
					Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaraan Disiplin PNS	Jumlah SK hukuman disiplin yang diterbitkan	60		20	15	75%			
					Penyelesaian kasus hukum pidana kedinasan	Terbantunya ASN Kabupaten Banjar yang bermasalah dengan hukum	6		1	0	0%			
					Pertimbangan Rekomendasi Ijin Perkawinanan dan Perceraian PNS	Jumlah Rekomendasi ijin perkawinan /perceraian ASN	25		10	7	70%			
					pengambilan Sumpah / janji PNS	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/ Janji	1.200		0	0	0%			
					Kesejahteraan ASN	terfasilitasinya kesejahteraan ASN	30		20	21	105%			
					Purna Tugas ASN	Terfasilitasinya purna tugas ASN pemkab Banjar	549		183	222	121%			
					Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) ASN	Jumlah ASN yang layak mendapatkan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	1.500		471	469	100%			
					Program Pelayanan Administrasi kepegawaian	**IKP (Indek Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian**								

					Layanan Inovasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pelayanan kepegawaian	3		1	1	100%			
					Pengembangan sistem Informasi kepegawaian	Jumlah pembaharuan sistem informasi kepegawaian	3		1	1	100%			
					Penyediaan akurasi data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang ter-update	15		6	6	100%			
					Kenaikan gaji Berkala Otomatis Ess II dan Camat Kepala SKPD	Jumlah Surat Pemberitahuan KGB otomatis	268		58	32	55%			
					Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat	3000		1.000	1.398	140%			
					Penerbitan Identitas Pegawai	Jumlah karpeg, karis/karsu dan KPE yang terbit	600		200	157	79%			
					Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	**Terpenuhinya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**								
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3		1	1	100%			
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	**Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan**								
					Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar bagi Calon ASN	Terfasilitasinya Calon ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar	556		80	71	89%			

					Penyelenggaraan/Penyertaan Pengembangan Kompetensi teknis dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan komptensi teknis dan fungsional	844		120	90	75%			
					Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM	521		20	23	115%			
					Pengembangan Kompetensi umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi umum	311		61	61	100%			
					Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan Kompetensi	tersusunnya Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi	3		1	1	100%			
					Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terfasiltasinya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	48		10	10	100%			
					Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan ASN yang sesuai kebutuhan	12		4	4	100%			
					Monitoring dan Evaluasi kapasitas Aparatur	ASN yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tepat waktu	84		21	22	105%			
					Pencapaian Renstra Kecamatan Paramasan sampai Triwulan II Tahun 2021									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya layanan Administrasi Perkantoran**	**100**					**50**	50	50%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***tersusunya dokumen perencananaan dan evaluasi***	***100***					**50**	50	50%

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun berasarkan ketentuan an singkronisasi kegiatan pusat dan daerah	2					1	1	50%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya penyusunan laporan kinerja	4					2	2	50%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1					0	0	0%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Tersusunya laporan keuangan BKDPSDM***	***100***					**50**	50	50%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan	100					50	50	50%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan	12					6	6	50%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1					0	0	0%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	12					6	6	50%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran***	***100***					**50**	50	50%

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan alat kantor guna kelancaran administrasi pelayanan kepegawaian dan meningkatkan kinerja BKDPSDM	12					6	6	50%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12					6	6	50%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan untuk keperluan rutin guna kelancaran kinerja BKDPSDM	1					0,62	1	62%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi untuk tamu dan rapat	12					6	6	50%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke instansi/lembaga terkait sesuai keperluan	12					6	6	50%
												0	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan***	***100***					**50**	50	50%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat demi kelancaran operasional perkantoran							0	#DIV/0!

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi , air dan listrik serta kebutuhan rumah tangga lainya	12					6	6	50%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor untuk meningkatkan kinerja BKPSDM serta pelayanan wisma sultan sulaiman pada kantor BKPSDM	12					6	6	50%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terpeliharanya barang milik daerah***	***100***					**50**	50	50%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan serta terpenuhinya pajak kendaraan bermotor	12					6	6	50%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional BKDPSDM kab. Banjar guna kelancaran kegiatan perkantoran	12					6	6	50%

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peningkatan pemeliharaan untuk peralatan dan mesin gedung kantor BKDPSDM Kab.Banjar guna kenyamanan dan keamanan kerja	1					0,5	1	50%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perningkatan pemeliharaan gedung kantor BKDPSDM kab.Banjar guna kenyamanan dan keamanan kerja	1					0,72	1	72%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor BKDPSDM	1					0,3	0	30%
				Program Kepegawaian Daerah	**Meningkatnya Indek Profesional ASN Pada Dimensi kualifikasi, Kinerja dan Disiplin**	**41,6**					**17,09**	17	41%
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	***Terlaksanya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***100***					**50**	50	50%
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi ASN Kab. Banjar yang tersusun sesuai kebutuhan	1					0	0	0%

				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang terlaksana	1					0	0	0%
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK yang terbit dalam proses administrasi Pemberhentian	230					199	199	87%
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kerjasama dengan lembaga profesi ASN	2					0	0	0%
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ter Update	1					0,4	0	40%
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen kepegawaian yang dikelola	4					2	2	50%
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan Monev Data kepegawaian	90					50	50	56%
				Mutasi dan Promosi ASN	***Presentase mutasi dan promosi PNS yang sesuai kompetensi***	***100***					**50**	50	50%
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi	450					150	150	33%
					Jumlah SK pengangkatan CPNS menjadi PNS yang diterbitkan							0	
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kenaikan pangkat ASN yang tepat waktu	1000					491	491	49%
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan promosi	4					1	1	25%

				Pengembangan Kompetensi ASN	***Persentase Pengembangan Kompetensi ASN***	***90***					**79,91**	80	89%
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS selain JFT yang mendapatkan peningkatan pendidikan	163					115	115	71%
				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi selain JFT	35					0	0	0%
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan jabatan Fungsional	4					2	2	50%
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin***	***99,55***					**99,98**	100	100%
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1					0	0	0%
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan pegawai berupa SLKS maupun piagam purna tugas	900					162	162	18%
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Terbitnya surat cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara	700					121	121	17%
					Terbinanya disiplin ASN	12					**6**	6	50%
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	15					1	1	7%

				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	terbitntnya SK rekomendasi izin perceraian	20					8	8	40%
												0	
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								0	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Meningkatnya Indek Profesional ASN Pada Dimensi Kompetensi**	**13,40**					**10,87**	11	81%
				Pengembangan Kompetensi Teknis	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis***	***3,40***					**1,1**	1	32%
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen/SK kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi	1					0	0	0%
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	318					0	0	0%

				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	1					0	0	0%
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional***	***10,00***					**9,77**	10	98%
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	1					0	0	0%
				Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama antar lembaga	121					99	99	82%
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS/PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	288					115	115	40%

				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan,	Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan,							0	

Sumber Data : Laporan Tepra

Jika melihat realisasi capaian , kinerja 3 program 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan pada BKDPSDM Kabupaten Banjar sebagaimana terlihat pada table 2.1 diatas maka diperkirakan bahwa target capaian renstra untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada triwulan II ada yang masih belum terealisasi, kendati demikian target akhir periode renstra optimis akan karena akan bisa tercapai kerena beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi akan dikerjakan pada triwulan III dan triwulan I

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar, yaitu sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi Pengadaan, Seleksi dan Mutasi, Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai serta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKDPSDM Kab.Banjar tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengampu Pemerintahan urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian. Berdasar urusan dan program yang diampu, BKDPSDM mendukung pencapaian misi 4 Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi 4 : Penyelenggaraan kePemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 1 (Satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Alasan Pemilihan Indikator yaitu ;

1.Landasan Filosofis

a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibentuk untuk membangun ASN Profesional
b. ASN yang profesional akan terwujud jika menerapkan Sistem Merit
c. Prinsip ASN sebagai Profesi adalah Profesionalitas Jabatan

2. Landasan Sosiologis

a. Persepsi Publik: ASN/PNS belum Profesional
b. ASN/PNS profesional merupakan kebutuhan organisasi dan tuntutan kompetisi global
d. Saat ini belum ada standar/ukuran ASN/PNS yang profesonal
e. Perlu Pengukuran Tingkat Profesionalitas ASN/ Pengurukan Indeks Profesional ASN (PIP ASN)

3. Landasan Yuridis

a. UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara & PP 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberi mandate mewujudkan ASN/PNS yang Profesional

b. RPJM 2015-2019, Renstra BKN 2015-2019 (perlu PIP ASN)

c. Permenpan RB (PIP ASN)

d. Peraturan BKN (Pedoman Tata Cara PIP ASN)

Dimana menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dimana menyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Pada Bab IV Peraturan BKN RI tentang Standar dan Dimensi pengukuran Indeks professional ASN mencakup :

1. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.
2. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKDPSDM Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BKDPSDM Kab.Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

TABEL T C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANJAR

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisi
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 (TW III)	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	6	7	8			10			12		13
I	Indeks profesionalisme ASN	59,49	65	70	60	61,5	56,31	52,66	34%	70	60	Rendah nya capaian TW III 2021 ini disebabkan ada dimensi yang hanya bisa di hitung di akhir tahun
	IKM			88	88,25	88,5				88	88,25	
	Tertib Administrasi Kepegawaian			100	100	100				100	100	

Sumber Data : Pohon Kinerja BKDPSDM

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya adalah belum Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan Handal. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian.

Badan kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu mengurusi pelayanan administrasi kepegawaian dan diklat dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan (formasi), persyaratan pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan *(reward*), pensiun. Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih *(good and clean governance*). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT, analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Badan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar pada saat melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman sebagian besar CPNSD/PNSD terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.
2. Belum optimalnya pelayanan administrasi manajemen kepegawaian.
3. Adanya opini negatif masyarakat terhadap budaya kerja organisasi pemerintah daerah.
4. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan PNSD baik dalam pelayanan kepegawaian maupun data/informasi kepegawaian.
5. Adanya anggapan masyarakat masih adanya KKN dalam organisasi pemerintah daerah.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan kepegawaian dan diklat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
   a) Masih belum memadainya prasarana dan sarana terutama sarana transportasi dan fasilitas kelengkapan komputerisasi untuk bekerja, belajar-mengajar

untuk bidang pendidkan dan pelatihan, dan jaringan yang lebih untuk menunjang kinerja yang telah berbasis Teknologi Informasi (IT).

b) Belum terpenuhinya pembiayaan yang cukup signifikan/relevan dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan BADAN KEPEGAWAIN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kabupaten Banjar.

c) Belum berjalan secara optimal dalam melaksanakan Prosedur Standar Operasional/*Standar Operasional Prosedure (SOP).*

d) Belum dilakukan analisis beban kerja yang optimal pada SKPD/lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjar karena kebutuhan pegawai yang bekerja disuatu organisasi belum ter-*map* (terpetakan) dengan baik dan merata sesuai kebutuhannya.

e) Masih lemahnya koordinasi antar bidang dalam memberikan data/informasi yang cepat, tepat, valid dan akuntabel.

f) Jumlah sumber daya aparatur masih belum memadai dan belum ideal.

g) Belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kepegawaian, dan SPM dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam tahap uji evaluasi dan akan dikembangkan lebih baik lagi.

2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :

a) Kurangnya pemahaman sebagian besar CPNSD/PNSD terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.

b) Belum optimalnya pelayanan administrasi manajemen kepegawaian.

c) Adanya opini negatif masyarakat terhadap budaya kerja organisasi pemerintah daerah.

d) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan PNSD baik dalam pelayanan kepegawaian maupun data/informasi kepegawaian.

e) Adanya anggapan masyarakat masih adanya KKN dalam organisasi pemerintah daerah.

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Adanya undang-undang, peraturan kepegawaian dan diklat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dan diklat serta tersedianya alokasi dana yang cukup dan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan menciptakan inovasi merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai teknologi , kurangnya sarana prasarana yang memadai, beberapa jabatan struktural yang belum terisi, kurang proaktifnya dinas/instansi dalam melaksanakan koordinasi tentang administrasi kepegawaian dan diklat merupakan **kelemahan** untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan peraturan dan kebijakan tentang kepegawaian dan diklat, kesempatan PNS terkait peningkatan SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan beasiswa pendidikan formal melalui tugas belajar

dan peningkatan jenjang karier serta hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerja merupakan **peluang** yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.

4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitment hingga proses pensiun serta era globalisasi yang menuntut perkembangan system pelayanan kepegawaian dan diklat harus mengikuti perubahan merupakan **ancaman** terhadap pencapaian Visi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Banjar dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Berdasarkan data Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis Kebutuhan yang tersaji di table 2.4, dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Tahun 2022, yaitu BKDPSDM Kab.Banjar akan melaksanakan 3 Program dan 11 Kegiatan sebagai berikut :

Namun begitu, terdapat perbedaan antara pagu indikatif yang ada pada rancangan Awal RKPD yaitu sebesar Rp. 8.423.029.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan hasil analisis kebutuhan BKDPSDM yaitu sebesar Rp. 14.413.253.139- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) Perbedaan antara Ranwal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan disebabkan karena berdasarkan analisis yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) bahwa untuk menunjang pencapaian target renstra terutama saat ini sudah berada di akhir periode RPJMD, maka BKDPSDM mengajukan pagu dana tersebut, dimana di ranwal RKPD belum di masukkan nya belanja untuk gaji dan tunjangan sehingga ada perbedaan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C .31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikaatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		IPA	55	**8.423.029.000,00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		IPA	60	**14.413.253.139,00**	
	KEPEGAWAIAN				**5.462.991.000,00**					**14.413.253.139,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar**	**IKM Perangkat Daerah**	**100**	**2.892.489.200,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar**	**IKM Perangkat Daerah**	**100**	**8.134.620.339,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	***tersusunya dokumen perencananaan dan evaluasi***	***100***	***109.253.900,00***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kab. Banjar***	***tersusunya dokumen perencananaan dan evaluasi***	***100***	***97.938.900,00***	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun berasarkan ketentuan an singkronisasi kegiatan pusat dan daerah	10 Dokumen	62.780.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	Dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan singkronisasi kegiatan pusat dan daerah	2 Dokumen	48.536.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Kab. Banjar***	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan	3 Dokumen	19.411.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya penyusunan laporan Kinerja	4 Dokumen	22.038.400,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	32 Dokumen	27.061.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	27.364.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	***Adanya laporan Keuangan BKDPSDM***	***100%***	***44.452.400,00***		***Kab. Banjar***			***5.291.552.939,00***	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangan	40 Orang	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Kab. Banjar***	Terlaksananya administrasu Kepegawaian perangkat Daerah		5.240.129.639,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	***Kab. Banjar***	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 Bulan	7.848.200,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan kepegawaian	12 Bulan	12.486.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	***Kab. Banjar***	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	12.731.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran	100	13.294.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	***Kab. Banjar***	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semestera skpd	63 Dokumen	23.872.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan alat kantor guna kelancaran administrasi pelayanan kepegawaian dan meningkatkan kinerja BKDPSDM	12	25.642.900,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***			-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Kab. Banjar***			**70.000.000,00**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN BKPSDM yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	0 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN BKPSDM yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	0 Orang	20.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan teknis	0 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan teknis	0 Orang	50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	***Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran***	***100%***	***1.110.765.800,00***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kab. Banjar***			***1.042.426.000,00***	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	***Kab. Banjar***	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan untuk kantor BKDPSDM Kab. Banjar	12 Bulan	42.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	***Kab. Banjar***	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan untuk kantor BKDPSDM Kab. Banjar	12 Bulan	41.997.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor	12 Bulan	68.533.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor	12 Bulan	249.088.000,00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	***Kab. Banjar***	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	27.718.600,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	***Kab. Banjar***	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	24.847.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Kab. Banjar***	penyediaan barang cetakan	1 Tahun	48.182.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Kab. Banjar***	penyediaan barang cetakan	1 Tahun	44.792.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	***Kab. Banjar***	terfasilitasinya tamu dan rapat	12 Bulan	20.480.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	***Kab. Banjar***	terfasilitasinya tamu dan rapat	12 Bulan	27.850.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Kab. Banjar***	Koordinasi dan konsultasi ke instansi /lembaga terkait sesuai kebutuhan	12 Bulan	903.852.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Kab. Banjar***	Koordinasi dan konsultasi ke instansi /lembaga terkait sesuai kebutuhan	12 Bulan	653.852.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Banjar***	***Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan***	***100%***	***1.264.128.100,00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Banjar***			***1.269.127.500,00***	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 Bulan	397.998.100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 Bulan	402.997.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	***Kab. Banjar***	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor dan wisma	12 Bulan	866.130.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	***Kab. Banjar***	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor dan wisma	12 Bulan	866.130.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Banjar***	***Terpeliharanya barang milik daerah***	***100%***	***363.889.000,00***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Banjar***			***363.575.000,00***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.990.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.990.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	134.369.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	134.369.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	1 Tahun	55.300.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	1 Tahun	55.200.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan gedung kantor BKDPSDM	1 Tahun	82.880.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan gedung kantor BKDPSDM	1 Tahun	82.871.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana	1 Tahun	50.350.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana	1 Tahun	50.145.000,00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	***Kab. Banjar***	**Meningkatnya indeks profesional ASN pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin**	**41.60 Persen**	**2.570.501.800,00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Kab. Banjar***	**Meningkatnya indeks profesional ASN pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin**	**41.60 Persen**	**6.278.632.800,00**	

	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegwaian ASN***	***3 kegiatan***	***1.095.063.500,00***	***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegwaian ASN***	***3 kegiatan***	***1.002.656.400,00***	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah Dokumen Formasi ASN Kab. Banjar yang tersusun sesuai kebutuhan	1 Dokumen	21.963.500,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	***Kab. Banjar***	Formasi ASN Kab. Banjar sesuai kebutuhan	1 Dokumen	21.908.200,00	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	***Kab. Banjar***	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang terlaksana	3 Kegiatan	466.975.100,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	***Kab. Banjar***	fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK terseleksinya calon pelajar taruna/siswa ikatan dinas	1 kegiatan 20 orang	562.999.800,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	***Kab. Banjar***	Jumlah SK yang terbit dalam proses administrasi Pemberhentian	300 Orang/S	9.271.300,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	***Kab. Banjar***	Purna tugas ASN	230 orang	9.271.300,00	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah Kerjasama dengan lembaga profesi ASN	5 lembaga	42.784.200,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	***Kab. Banjar***	terfasilitasinya ASN yang memerlukan bantuan hukum	1 orang	80.000.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	***Kab. Banjar***	Sistem Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG) yang ter Update	1 SIK	41.697.400,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	***Kab. Banjar***	jumlah pembaharuan sistem informasi	1 SIK	41.692.600,00	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	***Kab. Banjar***	Jumlah data kartu indentitas PNS yang diterbitkan Jumlah Dokumen kepegawaian yang dikelola	200 Kartu 10 Dokumen	450.000.000,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	***Kab. Banjar***	jumlah dokumen data kepegawian	4 Dokumen	224.414.300,00	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	***Kab. Banjar***	Jumlah laporan Monev Data kepegawaian	4 Dokumen	62.372.000,00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	***Kab. Banjar***	singkronisasi data dan informasi kepegawaian BKDPSDM dengan data ASN SKPD	90 %	62.370.200,00	
	Mutasi dan Promosi ASN	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya mutasi dan promosi PNS yang sesuai kompetensi***	***42 persen***	***295.969.500,00***	***Mutasi dan Promosi ASN***	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya mutasi dan promosi PNS yang sesuai kompetensi***	***42 persen***	***295.645.700,00***	
	Pengelolaan Mutasi ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi Jumlah SK tahapan pengangkatan ASN	150 Orang 950 Orang	73.892.100,00	Pengelolaan Mutasi ASN	***Kab. Banjar***	SK mutasi SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS	200 SK 250 SK	73.892.100,00	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah kenaikan pangkat ASN yang tepat waktu	1000 Orang/	133.827.600,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	***Kab. Banjar***	SK kenaikan pangkat	1000 SK	133.827.600,00	
	Pengelolaan Promosi ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan promosi	50 Orang	88.249.800,00	Pengelolaan Promosi ASN	***Kab. Banjar***	terlaksananya pelantikan	4 Kegiatan	87.926.000,00	

	Pengembangan Kompetensi ASN	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN***	***42 persen***	***1.059.088.900,00***	***Pengembangan Kompetensi ASN***	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN***	***42 persen***	***4.859.963.300,00***	***adanya perpindahan kode reg 5.4 ke kegiatan Pengembangan komptensi***
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah PNS selain JFT yang mendapatkan peningkatan pendidikan	50 Orang	74.392.900,00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	***Kab. Banjar***	pencantuman gelar ujian dinas UKPPI	100 orang 30 orang 33 orang	74.392.900,00	
	Pengelolaan Assessment Center	***Kab. Banjar***	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi selain JFT	100 Orang	315.962.800,00	Pengelolaan Assessment Center	***Kab. Banjar***	seleksi terbuka/mutasi JPT terisi jabatan JPT	30 orang 5 orang	315.722.100,00	
	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan sertifikasi	100 Orang	0	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan sertifikasi	100 Orang	3.865.890.600,00	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang di monev ijin tubel (APBN/crossharing) Jumlah ASN yang menerima Bantuan Tubel Jumlah PNS/ASN yang mendapatkan Ijin belajar	95 Orang 10 orang 80 Orang	550.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang di monev ijin tubel (APBN/crossharing) Jumlah ASN yang menerima Bantuan Tubel Jumlah PNS/ASN yang mendapatkan Ijin belajar	95 Orang 10 orang 80 Orang	280.999.800,00	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	***Kab. Banjar***	Jumlah koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan diklat	5 lembaga	0	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	***Kab. Banjar***	Jumlah koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan diklat	5 lembaga	149.999.800,00	
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	***Kab. Banjar***	Analisis kebutuhan Diklat dan Sertifikasi jabatan ASN	1 Dokumen	0	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	***Kab. Banjar***	Analisis kebutuhan Diklat dan Sertifikasi jabatan ASN	1 Dokumen	13.213.300,00	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	***Kab. Banjar***	Jumlah Dokumen diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	1 Dokumen	0	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	***Kab. Banjar***	Jumlah Dokumen diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	1 Dokumen	41.028.300,00	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan jabatan Fungsional	100 Orang	118.733.200,00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	***Kab. Banjar***	pelantikan jabatan fungsional	4 kegiatan	118.716.500,00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Kab. Banjar***	***ASN yang tidak melanggar peraturan Disiplin***	***99.55 Persen***	***120.379.900,00***	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	***Kab. Banjar***	***ASN yang tidak melanggar peraturan Disiplin***	***99.55 Persen***	***120.367.400,00***	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Kab. Banjar***	Jumlah Dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Dokumen	13.062.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Kab. Banjar***	terlakananya evaluasi penilaian kinerja ASN	1 Dokumen	13.059.000,00	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan pegawai berupa SLKS maupun piagam purna tugas	772 Orang	52.543.300,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	***Kab. Banjar***	Piagam penghargaan purna tugas terbitnya hasil pengujian kesehatan PNS terbitnya surat cuti terbitnya tanda kehormatan SLKS	230 piagam 10 Dokumen 200 Dokume 460 piagam	52.543.100,00	

	Pembinaan Disiplin ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan pemeriksaan kesehatan Jumlah Terbitnya surat cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara Terbinanya disiplin ASN	20 orang 100 Surat Cuti 12 SKPD	41.288.800,00	Pembinaan Disiplin ASN	***Kab. Banjar***	penerbitan Karpeg, karis , karsu sumpah janji ASN Terbinanya Disiplin	200 kartu 500 orang 12 SKPD	41.288.800,00	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	***Kab. Banjar***	jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 Orang	7.291.900,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	***Kab. Banjar***	tertantanganinya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	15 orang	7.283.100,00	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	***Kab. Banjar***	terbitntnya SK rekomendasi izin perceraian	20 SK	6.193.900,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	***Kab. Banjar***	terbitnya SK rekomendasi	20 SK	6.193.400,00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	***Kab. Banjar***			**2.960.038.000,00**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	***Kab. Banjar***			**-**	**Berdasarkan Kepmen 050-3708 tahun 2020 menyatakan bahwa Penyajian kodefikasi unsur penunjang urusan kabupaten/kota disajikan hanya mengunakan kode reg 5.3 yang mencakup Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan**
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	***Kab. Banjar***	**Meningkatnya Indeks Profesional Asn pada Dimensi Kompetensi**	**11.07 Persen**	**2.960.038.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Kab. Banjar***	**Meningkatnya Indeks Profesional Asn pada Dimensi Kompetensi**	**11.07 Persen**	**-**	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	***Kab. Banjar***	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis***	***3 persen***	***216.803.400,00***	***Pengembangan Kompetensi Teknis***	***Kab. Banjar***	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis***	***3 persen***	-	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***Kab. Banjar***	Dokumen/SK kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi	1 Dokumen	37.754.000,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***Kab. Banjar***	tersusunya kebijakan teknis	1 Dokumen		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***Kab. Banjar***	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	1803 orang	165.836.100,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***Kab. Banjar***	jabatan administrasi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi	312 orang 6 orang		

	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***Kab. Banjar***	Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	1 Dokumen	13.213.300,00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	***Kab. Banjar***	evaluasi PNS yang mengikuti Tubel dan Pelatihan kepemimpinan laporan evaluasi	30 orang 1 Dokumen		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	***Kab. Banjar***	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***10 Persen***	***2.743.234.600,00***	***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	***Kab. Banjar***	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***10 Persen***	-	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	***Kab. Banjar***	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	1 Dokumen	3.274.500,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	***Kab. Banjar***	tersusunya dan rencana pengembangan komptensi JPT, prajabatan dan fungsional	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	***Kab. Banjar***	Jumlah kerjasama antar lembaga	8 lembaga	50.000.000,00	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	***Kab. Banjar***	bantuan STTD bantuan tubel sk Tubel dan ijin belajar	11 orang 10 orang 100 SK		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	***Kab. Banjar***	Jumlah CPNS/PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	688 orang	2.689.960.100,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	***Kab. Banjar***	Pelatihan dasar CPNS pelatihan kepemimpinan bagi jabatan struktural pengembangan kompetensi pimpinan tinggi dan pejabat struktural	256 orang 12 orang 20 orang		

Sumber Data : SIPD

2.5. PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah, maka sasaran prioritas dibidang kepegawaian adalah dengan meningkatnya Sumber Daya Aparatur Daerah yang Profesional dan Handal, semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Kepuasan layanan pemerintah dan menurunnya pengaduan terhadap pelayanan dibidang kepegawaian.

Prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah Memaksimalkan pelayanan dibidang kepegawaian oleh aparatur pemerintah yang jumlahnya 6.336 orang PNS dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjar sangat mencukupi, namun dari segi pelayanan kepegawaian belum optimal, oleh karena itu untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kebijakan nasional dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan professional, sehingga pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi lebih baik lagi.

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan

Pandemi covid 19 memberikan dampak pada semua sektor, diperlukan respon kebijakan menghadapinya. Negara maju mulai membicarakan program seperti marshall plan yang dilakukan setelah perang dunia II

- Tahap 1 Penguatan Fasilitas Kesehatan
- Tahap 2 Melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha
- Tahap 3 mengurangi tekanan sektor keuangan
- Tahap 4 Program Pemulihan Ekonom Pasca Covid 19

Tahap 1-3 saat ini tengah dilakukan dan perlu terus dilakukan hingga penanganan wabah COVID-19 selesai. Tahap 4 merupakan tahap setelah proses penanggulangan wabah covid 19 selesai

Kebijakan yang diambil adalah Menggerakkan kembali Industri, Investasi Pariwisata, dan Ekspor melalui mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi

diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Kebijakan dimaksud adalah :

1. Akselerasi Investasi

   Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: Omnibus Law Cipta kerja, perluasan positif lists investasi, percepatan integrasi perizinan melalui online single submission (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, serta melakukan aftercare investasi yang ada agar tidak pindah ke negara lain

2. Pemulihan Industri dan Perdagangan
   - Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan;
   - Optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri
   - Akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi
   - Peningkatan fasilitasi ekspor
   - Fasilitasi impor bahan baku
   - Peningkatan standar produk
   - Optimalisasi PTA/FTA/CEPA untuk perluasan ekspor
   - Peningkatan efisiensi logistik

3. Pendalaman Sektor Keuangan

   Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan

4. Pembangunan Pariwisata
   - Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan
   - Peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih
   - Peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) atau tur konvensi berupa layanan untuk mengadakan acara atau perjalanan bersama dengan tujuan tertentu
   - Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas
   - Peningkatan infrastruktur, dan standar layanan
   - Pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik

5. Penguatan Sektor Kesehatan

   Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan sistem informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat Kesehatan

6. Perluasan Program Perlindungan Sosial

   Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal

7. Pembangunan Infrastruktur

   Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata

8. Pembangunan SDM
   Program Peningkatan SDM: Kartu Prakerja, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Usia Dini

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan selonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

PN 1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3. SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PN 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

3.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .Arah Kebijakan Pembangunan Prov. Kalsel adalah :

1. Transformasi Struktur Ekonomi

1. Dari penghasil bahan mentah atau setengah jadi produk batu bara, sawit, karet dan kayu lapis menjadi sektor unggulan yakni sektor industir, pariwisata dan pertanian pangan
2. Sumber daya manusia
3. Memangkas Hambatan Investasi
4. Memperkuat infrastruktur Ekonomi

Menyelaraskan dengan tema RKP tahun 2021 maka tema yang diambil oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah:

"Mendorong Investasi untuk Trasnsformasi Ekonomi Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kita Negara" dan setelah pandemi covid 19 mengalami perubahan menjadi "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Menuju Gerbang Ibu Kota Negara"

dari tema tersebut maka arah kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

1. Mengurangi share dari sektor pertambangan dan meneruskan fokus pembangunan melalui sektor ketahanan pangan, pariwisata, industri hilir dan perdagangan
2. Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2022 mengusung konsep money follow program dimana alokasi anggaran berbasis pada program prioritas yang menjadi fokus pada perencanaan pembangunan tahun 2022. Pendekatannya dengan tema hits (holistik, integratif, tematik dan spasial), Pengarusutamaan Gender dan Difabel
3. Pengurangan Masyarakat Miskin dan Pengangguran dan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Selanjutnya dari tema diatas maka ditetapkan 4 Prioritas pembangunan RKPD Prov. Kalsel tahun 2022 sebagai berikut :

❖ Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan sub prioritas :

-Peningkatan Angka Rata-rata lama sekolah
-Peningkatan indeks pembangunan pemuda
-Penurunan penyakit melalui Germas
-Penurunan Prevalensi Stunting
-Penurunan angka pernikahan anak
-Peningkatan kualitas tenaga kerja
-Peningkatan Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat
-Peningkatan Prestasi Olahraga

❖ Prioritas 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dengan sub prioritas :

- Penguatan Reformasi Birokrasi
- Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Umum Masyarakat dan Konsolidasi Demokrasi Pasca Pilkada
- Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Penyederhanaan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Publik

- ❖ Prioritas 3 : Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian dan Pariwisata Dengan sub prioritas

  -Peningkatan produk hasil pertanian
  -Mendorong industri pengolahan bahan mentah/setengah jadi
  -Mendorong pariwisata dan pengembangan geopark
  -Pembinaan wirausaha baru
  -Peningkatan penggunaan produk lokal
  -Peningkatan nilai investasi daerah
  -Pengembangan industri digital

- ❖ Prioritas 4 : Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian Dengan sub prioritas

  -Pengembangan kawasan prioritas
  -Pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi
  -Pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar

- ❖ Prioritas 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat Ketahanan Pangan Bencana Dengan sub prioritas

  -Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
  -Penanganan mitigasi dan pasca bencana
  -Mendorong penggunaan energi terbarukan

3.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholders sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang kemudian dijadikan tema RKPD. Berikut arah kebijakan tahunan Kabupaten Banjar disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar

Arah Kebijakan				
20	20	20	20	20

Peningkatan kualitas SDM khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan daya beli serta pemulihan ekonomi masyarakat dalam koridor karakter masyarakat yang agamis	Kemandirian ekonomi rakyat dengan dukungan SDM berkualitas serta Infrastruktur dan tata kelola pemerintahan baik sebagai penunjangnya	Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pengembangan SDM dan Ekonomi kerakyatan yang berorientasi lingkungan	Pembangunan Lingkungan yang berkelanjutan dengan dukungan hasil reformasi birokrasi dan ekonomi hijau lingkungan degan dukungan pemenuhan infrastruktur penunjangnya	Pembentukan karakter masyarakat yang religius agamis dalam mendukung SDM yang berkualitas dan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengakomodir rencana program/kegiatan 5 (lima) tahunan Periode 2021-2016, maka perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar yang menjadi lembaga teknis kepegawaian untuk mengelola manajemen kepegawaian yang baik dan pelayanan prima dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”

Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2021- 2026 , misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

BKDPSDM Kab. Banjar termasuk dalam Misi ke 4 dan Sasaran ke 5 yaitu: Mewujudkan Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka BKDPSDM Kab Banjar menetapkan tujuan dan sasaran renja sebagai berikut

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	Target 2022
Terwujudnya Sistem Manajeman ASN yang baik		Indeks Profesionalisme ASN	60
		IKM	88,25
		Tertib Administrasi Layanan Kepegawaian	100
	Terwujudnya Sistem Manajeman ASN yang baik	Indeks Profesionalisme ASN	60
		IKM	88,25
		Tertib Administrasi Layanan Kepegawaian	100

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas BKDPSDM

Program dan kegiatan prioritas merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2022**.**

3.3.1. Faktor - Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan BKD menentukan program dan kegiatan prioritas, adalah :

1. Terkait dengan dukungan terhadap Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 BKDPSDM Kabupaten Banjar mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih Tahun 2021-2026, BKDPSDM sebagai unsur urusan penunjang pemerintahan mengadopsi visi yang diselaraskan dengan Visi Kabupaten Banjar. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka BKDPSM Kab. Banjar mengampu visi ke 4 yaitu Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif. Dan juga sasaran 5 yaitu Berkembangnya profesional ASN.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja BKDPSDM Kab Banjar tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Jumlah program prioritas tahun 2022 ada sebanyak 1 program, 4 kegiatan.

2.Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan adalah seluruh wilayah Kabupaten Banjar

3.Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan prioritas BKDPSDM Kab Banjar seluruhnya dari APBD Kabupaten dengan jumlah sebesar Rp.6.278.632.800 (...)

4.Sumber pendaaan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar.

Rencana program, kegiatan dan prioritas BKDPSDM Kab. Banjar tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 BKDPSDM.Kabupaten Banjar secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C 33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				14.413.253.139	-	-		14.821.497.450
									8.551.276.292,56
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Meningkatnya indeks profesional ASN pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin**	***Kab. Banjar***	**41.60 Persen**	**6.278.632.800,00**			41.60 Persen	**6.529.778.112,00**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	***Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegwaian ASN***	***Kab. Banjar***	***3 kegiatan***	***1.002.656.400,00***			3 kegiatan	**1.052.789.220,00**
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi ASN Kab. Banjar sesuai kebutuhan	***Kab. Banjar***	1 Dokumen	21.908.200,00			1 Dokumen	23.003.610,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK terseleksinya calon pelajar taruna/siswa ikatan dinas	***Kab. Banjar***	1 kegiatan 20 orang	562.999.800,00			1 kegiatan 20 orang	591.149.790,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Purna tugas ASN	***Kab. Banjar***	230 orang	9.271.300,00			230 orang	9.734.865,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	terfasilitasinya ASN yang memerlukan bantuan hukum	***Kab. Banjar***	1 orang	80.000.000,00			1 orang	84.000.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah pembaharuan sistem informasi	***Kab. Banjar***	1 SIK	41.692.600,00			1 SIK	43.777.230,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	jumlah dokumen data kepegawian	***Kab. Banjar***	4 Dokumen	224.414.300,00			4 Dokumen	235.635.015,00
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	singkronisasi data dan informasi kepegawaian BKDPSDM dengan data ASN SKPD	***Kab. Banjar***	90 %	62.370.200,00			90 %	65.488.710,00
	Mutasi dan Promosi ASN	***Terlaksananya mutasi dan promosi***	***Kab. Banjar***	***42 persen***	***295.645.700,00***			42 persen	**310.427.985,00**

							PNS yang sesuai kompetensi						
						Pengelolaan Mutasi ASN	SK mutasi SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS	***Kab. Banjar***	200 SK 250 SK	73.892.100,00			200 SK 250 SK	77.586.705,00
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK kenaikan pangkat	***Kab. Banjar***	1000 SK	133.827.600,00			1000 SK	140.518.980,00
						Pengelolaan Promosi ASN	terlaksananya pelantikan	***Kab. Banjar***	4 Kegiatan	87.926.000,00			4 Kegiatan	92.322.300,00
						Pengembangan Kompetensi ASN	***Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN***	***Kab. Banjar***	***42 persen***	***4.859.963.300,00***			42 persen	**5.054.361.832,00**
						Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	pencantuman gelar ujian dinas UKPPI	***Kab. Banjar***	100 orang 30 orang 33 orang	74.392.900,00			100 orang 30 orang 33 orang	78.112.545,00
						Pengelolaan Assessment Center	seleksi terbuka/mutasi JPT terisi jabatan JPT	***Kab. Banjar***	30 orang 5 orang	315.722.100,00			30 orang 5 orang	331.508.205,00
						Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan sertifikasi	***Kab. Banjar***	100 Orang	3.865.890.600,00			100 Orang	4.059.185.130,00
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang di monev ijin tubel (APBN/crossharing) Jumlah ASN yang menerima Bantuan Tubel Jumlah PNS/ASN yang mendapatkan Ijin belajar	***Kab. Banjar***	95 Orang 10 orang 80 Orang	280.999.800,00			95 Orang 10 orang 80 Orang	295.049.790,00
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan diklat	***Kab. Banjar***	5 lembaga	149.999.800,00			5 lembaga	157.499.790,00
						Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Analisis kebutuhan Diklat dan Sertifikasi jabatan ASN	***Kab. Banjar***	1 Dokumen	13.213.300,00			1 Dokumen	13.873.965,00
						Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	***Kab. Banjar***	1 Dokumen	41.028.300,00			1 Dokumen	43.079.715,00
						Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	pelantikan jabatan fungsional	***Kab. Banjar***	4 kegiatan	118.716.500,00			4 kegiatan	124.652.325,00
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***ASN yang tidak melanggar peraturan Disiplin***	***Kab. Banjar***	***99.55 Persen***	***120.367.400,00***			99.55 Persen	119.998.620,00
						Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	terlakananya evaluasi penilaian kinerja ASN	***Kab. Banjar***	1 Dokumen	13.059.000,00			1 Dokumen	13.711.950,00

Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Piagam penghargaan purna tugas terbitnya hasil pengujian kesehatan PNS terbitnya surat cuti terbitnya tanda kehormatan SLKS	***Kab. Banjar***	230 piagam 10 Dokumen 200 Dokume 460 piagam	52.543.100,00			230 piagam 10 Dokumen 200 Dokume 460 piagam	51.822.855,00
Pembinaan Disiplin ASN	penerbitan Karpeg, karis , karsu sumpah janji ASN Terbinanya Disiplin	***Kab. Banjar***	200 kartu 500 orang 12 SKPD	41.288.800,00			200 kartu 500 orang 12 SKPD	40.313.490,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	tertantanganinya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	***Kab. Banjar***	15 orang	7.283.100,00			15 orang	7.647.255,00
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	terbitnya SK rekomendasi	***Kab. Banjar***	20 SK	6.193.400,00			20 SK	6.503.070,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		***Kab. Banjar***		-				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Meningkatnya Indeks Profesional Asn pada Dimensi Kompetensi**	***Kab. Banjar***	**11.07 Persen**	-			11.07 Persen	
Pengembangan Kompetensi Teknis	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis***	***Kab. Banjar***	***3 persen***	-			3 persen	
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	tersusunya kebijakan teknis	***Kab. Banjar***	1 Dokumen				1 Dokumen	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jabatan administrasi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi	***Kab. Banjar***	312 orang 6 orang				312 orang 6 orang	
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	evaluasi PNS yang mengikuti Tubel dan Pelatihan kepemimpinan laporan evaluasi	***Kab. Banjar***	30 orang 1 Dokumen				30 orang 1 Dokumen	

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	***Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***Kab. Banjar***	***10 Persen***	-			10 Persen	
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	tersusunya dan rencana pengembangan komptensi JPT, prajabatan dan fungsional	***Kab. Banjar***	1 Dokumen				1 Dokumen	
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	bantuan STTD bantuan tubel sk Tubel dan ijin belajar	***Kab. Banjar***	11 orang 10 orang 100 SK				11 orang 10 orang 100 SK	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pelatihan dasar CPNS pelatihan kepemimpinan bagi jabatan struktural pengembangan kompetensi pimpinan tinggi dan pejabat struktural	***Kab. Banjar***	256 orang 12 orang 20 orang				256 orang 12 orang 20 orang	

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*bencmark*s) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Pada tahun 2022 BKDPSDM akan melaksanakan 2 program 13 kegiatan dengan Dengan total pagu dana sebesar Rp. 14.413.253.139,,- Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Banjar 2022 sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra BKDPSDM Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKDPSDM Kabupaten Banjar di tahun 2022 adalah sebanyak: 2 Program dan 10 Kegiatan

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. . 14.413.253.139. < >. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022

Tabel T-C .41

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Banjar

Rencana Kerja dan Pendanaan				
Program/Kegiatan/Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikaatif**
7	8	9	10	11
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		IPA	60	**14.413.253.139,00**
				14.413.253.139,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar**	**IKM Perangkat Daerah**	**100**	**8.134.620.339,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	***tersusunya dokumen perencananaan dan evaluasi***	***100***	***97.938.900,00***
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	Dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan singkronisasi kegiatan pusat dan daerah	2 Dokumen	48.536.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya penyusunan laporan Kinerja	4 Dokumen	22.038.400,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	27.364.000,00
	Kab. Banjar			***5.291.552.939,00***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Kab. Banjar***	Terlaksananya administrasu Kepegawaian perangkat Daerah		5.240.129.639,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan kepegawaian	12 Bulan	12.486.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran	100	13.294.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan alat kantor guna kelancaran administrasi pelayanan kepegawaian dan meningkatkan kinerja BKDPSDM	12	25.642.900,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***			**70.000.000,00**
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN BKPSDM yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	0 Orang	20.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan teknis	0 Orang	50.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kab. Banjar***			***1.042.426.000,00***

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	***Kab. Banjar***	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan untuk kantor BKDPSDM Kab. Banjar	12 Bulan	41.997.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor	12 Bulan	249.088.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	***Kab. Banjar***	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	24.847.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Kab. Banjar***	penyediaan barang cetakan	1 Tahun	44.792.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	***Kab. Banjar***	terfasilitasinya tamu dan rapat	12 Bulan	27.850.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Kab. Banjar***	Koordinasi dan konsultasi ke instansi /lembaga terkait sesuai kebutuhan	12 Bulan	653.852.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Banjar***			***1.269.127.500,00***
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Kab. Banjar***	Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 Bulan	402.997.500,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	***Kab. Banjar***	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor dan wisma	12 Bulan	866.130.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Banjar***			***363.575.000,00***
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.990.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	134.369.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan peralatan dan mesin gedung kantor	1 Tahun	55.200.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan gedung kantor BKDPSDM	1 Tahun	82.871.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	***Kab. Banjar***	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana	1 Tahun	50.145.000,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	***Kab. Banjar***	**Meningkatnya indeks profesional ASN pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin**	**41.60 Persen**	**6.278.632.800,00**
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegwaian ASN***	***3 kegiatan***	***1.002.656.400,00***
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	***Kab. Banjar***	Formasi ASN Kab. Banjar sesuai kebutuhan	1 Dokumen	21.908.200,00
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	***Kab. Banjar***	fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK terseleksinya calon pelajar taruna/siswa ikatan dinas	1 kegiatan 20 orang	562.999.800,00
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	***Kab. Banjar***	Purna tugas ASN	230 orang	9.271.300,00
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	***Kab. Banjar***	terfasilitasinya ASN yang memerlukan bantuan hukum	1 orang	80.000.000,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	***Kab. Banjar***	jumlah pembaharuan sistem informasi	1 SIK	41.692.600,00
Pengelolaan Data Kepegawaian	***Kab. Banjar***	jumlah dokumen data kepegawian	4 Dokumen	224.414.300,00
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	***Kab. Banjar***	singkronisasi data dan informasi kepegawaian BKDPSDM dengan data ASN SKPD	90 %	62.370.200,00
Mutasi dan Promosi ASN	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya mutasi dan promosi PNS yang sesuai kompetensi***	***42 persen***	***295.645.700,00***
Pengelolaan Mutasi ASN	***Kab. Banjar***	SK mutasi SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS	200 SK 250 SK	73.892.100,00

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	***Kab. Banjar***	SK kenaikan pangkat	1000 SK	133.827.600,00
Pengelolaan Promosi ASN	***Kab. Banjar***	terlaksananya pelantikan	4 Kegiatan	87.926.000,00
Pengembangan Kompetensi ASN	***Kab. Banjar***	***Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN***	***42 persen***	***4.859.963.300,00***
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	***Kab. Banjar***	pencantuman gelar ujian dinas UKPPI	100 orang 30 orang 33 orang	74.392.900,00
Pengelolaan Assessment Center	***Kab. Banjar***	seleksi terbuka/mutasi JPT terisi jabatan JPT	30 orang 5 orang	315.722.100,00
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan sertifikasi	100 Orang	3.865.890.600,00
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	***Kab. Banjar***	Jumlah ASN yang di monev ijin tubel (APBN/crossharing) Jumlah ASN yang menerima Bantuan Tubel Jumlah PNS/ASN yang mendapatkan Ijin belajar	95 Orang 10 orang 80 Orang	280.999.800,00
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	***Kab. Banjar***	Jumlah koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan diklat	5 lembaga	149.999.800,00
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	***Kab. Banjar***	Analisis kebutuhan Diklat dan Sertifikasi jabatan ASN	1 Dokumen	13.213.300,00
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	***Kab. Banjar***	Jumlah Dokumen diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	1 Dokumen	41.028.300,00
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	***Kab. Banjar***	pelantikan jabatan fungsional	4 kegiatan	118.716.500,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Kab. Banjar***	***ASN yang tidak melanggar peraturan Disiplin***	***99.55 Persen***	***120.367.400,00***
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	***Kab. Banjar***	terlakananya evaluasi penilaian kinerja ASN	1 Dokumen	13.059.000,00
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	***Kab. Banjar***	Piagam penghargaan purna tugas terbitnya hasil pengujian kesehatan PNS terbitnya surat cuti terbitnya tanda kehormatan SLKS	230 piagam 10 Dokumen 200 Dokume 460 piagam	52.543.100,00
Pembinaan Disiplin ASN	***Kab. Banjar***	penerbitan Karpeg, karis , karsu sumpah janji ASN Terbinanya Disiplin	200 kartu 500 orang 12 SKPD	41.288.800,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	***Kab. Banjar***	tertantanganinya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	15 orang	7.283.100,00
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	***Kab. Banjar***	terbitnya SK rekomendasi	20 SK	6.193.400,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022 yang tidak terlepas dari dokumen Revisi Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah dam Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Dalam hal anggaran tidak mencukupi maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat pelaksanaan sebagai target kinerja Renstra BKDPSDM dapat dicapai.

Perencanaan tidak hanya berhenti pada penyusunan dan penetapaan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Pngendalian pelaksanaan rencana kerja dan hasil pelaksanaan renja akan memudahkan BKDPSDM Kab.Banjar untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022, rencana kerja Sekretariat DPRD ini merupakan rencana kerja tahunan sebagai wujud penjabaran dari rencana strategis yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

Penyusunan rencana kerja ini merupakan bentuk komitmen dan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam rencana kerja yang kami susun ditetapkan pula pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja, pada setiap tingkat sasaran. Target kinerja merupakan kuantifikasi dari seluruh pengukuran indikator kinerja, dimana hasil akhir dari proses pengukuran tersebut dapat menunjukan keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen rencana kerja ini merupakan salah satu dari komponen akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan kemudian diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran dari para *stakeholder* sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan rencana kerja yang akan datang.

Kami berharap rencana kerja yang kami susun, dapat dijadikan sebagai acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dalam merumuskan kegiatan, serta menilai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan SKPD Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka rumusan visi Sekretariat DPRD yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Agamis”.**

Tahapan penyusunan Renja tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar adalah:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan ranwal Renja Sekretariat DPRD berpedoman pada Renstra perangkat daerah, evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Renja Sekretariat DPRD tahun berjalan.
3. Penysunan rancangan Renja Sekretariat DPRD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan rancangan Renja Sekretariat DPRD dengan tim forum lintas PD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD berdasarkan Perkada RKPD,
6. Verifikasi rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2 . Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2022-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32)

1.3 . Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2022 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar ditahun 2022 melalui Perencanaan kinerja.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan anggaran untuk memstikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022.
b. Sebagai intsrumen akuntabilitas ditahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan public dan laporan kinerjanya.

1.4 . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang → mengemukakan pengertian Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum → memuat penjelasam tentang undang-undang, Pereaturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat DPRD serta yang dijdikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD.

1.3 Maksud Dan Tujuan → memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan → menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Saran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional → menyangkut kea rah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD → didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan → terkait dengan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Sekretariat DPRD, baik jenis program/kegiatan, pagu maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidan pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Sekretariat DPRD pada tahun 2020 memiliki anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 43.355.814.491 dan setelah perubahan berkurang sebesar Rp 4.342.684.626 menjadi Rp 39.342.684.626 dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 4.776.605.415 dan belanja langsung sebesar Rp 34.236.524.450 .

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah sebesar Rp 34.772.453.657 (88,9%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3.661.356.056 (75% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 31.111.079.601 (90,9% dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp 23.194.368.147 (91,4% dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp 25.381.446.250). Sedangkan realisasi anggaran belanja langsung untuk program pendukung sebesar Rp 7.916.711.454 (89,4% dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 8.855.078.200). Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.661.356.056 (75% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 4.876.126.291).

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2020 mengacu pada APBD tahun2020, pokok-pokok materi program dan kegiatan pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   - ➔ Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
   - ➔ Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - ➔ Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   - ➔ Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
   - ➔ Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
   - ➔ Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
   - ➔ Kegiatan Reses, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- ➔ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- ➔ Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kebdaraan Dinas/Operasional, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ➔ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- ➔ Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- ➔ Kegiatan Penyusunan Pelapooran Keuangan Semesteran, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- ➔ Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kauangan Akhir Tahun, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   - ➔ Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:
   - ➔ Terjadinya pandemic COVID 19 sehingga Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dilaksanakan karena tidak boleh mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

- ➔ Rasionalisasi anggaran akibat pandemic COVID 19 sehingga terdapat beberapa anggaran yang dikurangi sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.

5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah:
   - ➔ Adanya sarana dan prasarana yang mendukung
   - ➔ Adanya anggaran program dan kegiatan yang mendukung
   - ➔ Sumber Daya Manusia yang kompeten
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
   - ➔ Mengkaji ulang target kinerja yang telah ditetapkan agar kedepannya target kinerja yang ada dapat lebih relevan untuk direalisasikan.
   - ➔ Menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pimpinan dan anggota DPRD.
   - ➔ Kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana akan dilaksanakan di tahun berikutnya jika kondisi sudah memadai.
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD adalah Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua. Pada tahun anggaran 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar melaksanakan 2 Program 12 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan, dengan total pagu dana sebesar Rp 65.393.485.030 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.186.563.013

Adapun hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dan perkiraan capaian target akhir periode Renstra untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, sub kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatandan sub kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
				Sekretariat DPRD									
4.	**02**	**01**		**Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran**	**Persentase Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
4.	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4.	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran STNK R2 dan R4	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4.	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya sarana kerja kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4.	02	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4.	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			

4.01	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, sub kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatandan sub kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01	02	01	17	Penyediaan akanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	-	-	-	-	0%	-	-	0%
4.01	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Keikutsertaan rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan pendampingan kedalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4.01	02	01	19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Penunjang administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4.01	**02**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
4.01	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya gedung kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	**02**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
4.01	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD Kab.Banjar	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket			

4.01	**02**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
4.01	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kompetensi PNS sekretariat DPRD Kab.Banjar	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	**02**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
4.01	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan semesteran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, sub kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01	**02**	**15**		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Persentase Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
4.01	02	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terpenuhinya fasilitas pembahasan perda yang dilakukan	5 perda	5 perda	5 perda	8 perda	160%			
4.01	02	15	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terpenuhinya kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	15	03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			

4.01	02	15	04	Rapat-Rapat Paripurna	Terlaksananya rapat-rapat paripurna	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	15	05	Kegiatan Reses	Kontinyuitas kunjungan kerja reses	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
4.01	02	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pimpinan dan anggota	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4.01	02	15	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pemahaman masyarakat/aparatur akan hak dan kewajiban	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, sub kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
40201	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**							
40201201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun**	8 dokumen					3 dokumen		
4020120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja dan rencana kinerja	100%					50%		
40201202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen keuangan yang tersusun**	**100%**					50%		
4020120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	12 bula					6 bulan		
4020120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan					6 bulan		
4020120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %					50%		
4020120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	12 bulan					6 bulan		
40201205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas**	**100%**					50%		
4020120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas	12 bulan					6 bulan		
4020120510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	100%					50%		
40201206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase kecukupan pelayanan perkantoran**	**100%**					50%		
4020120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan					6 bulan		
4020120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah masa waktu pemeliharaan peralatan gedung kantorJumlah masa waktu pemeliharaan peralatan gedung	12 bulan 100 %					6 bulan 50%		

		kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli								
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, sub kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4020120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan					6 bulan		
4020120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan					6 bulan		
4020120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan					6 bulan		
4020120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 bulan					6 bulan		
40201207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya mobil pimpinan DPRD**	**4 unit**					4 unit		
4020120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Terpenuhinya pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD	4 unit 100 %					4 unit 50%		
40201208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase kecukupan pelayanan perkantoran**	**100%**					50%		
4020120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air bersih dan internet	12 bulan					6 bulan		
40201209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase kecukupan pelayanan perkantoran**	**100%**					50%		
4020120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	12 bulan					6 bulan		
4020120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan					6 bulan		
4020120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya gedung kantor	100%					50%		
40201214	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD**	**100%**					50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, sub kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program , Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4020121401	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	100%					50%		
40201215	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Presentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas**	100%					50%		
4020121501	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	100%					50%		
4020121502	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN	5 stel					-		
40201216	**Layanan Administrasi DPRD**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	100%					50%		
4020121603	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah dokumen rapat/notulen rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi jumlah dokumen rapat/notulen rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi	12 bulan 100%					6 bulan 50%		
40202	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas** **Persentase fasilitasi pelaksanaan reses**	100% 100%					50% 50%		
40202201	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah fasilitasi pembahasan perda yang dilakukan**	5 kali							
4020220102	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitasi pembahasan perda yang dilakukan	100%					50%		
4020220104	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	100%					50%		
40202205	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD**	100%					50%		
4020220503	Pelaksanaan Reses	Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	100%					50%		

Sumber data: LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2020, Laporan Renja tahun 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 2 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas, maka diperkirakan bahwa target capaian Renstra untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan II ada yang masih belum terealisasi, kendati demikian target akhir periode Renstra optimis akan bisa tercapai, karena beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi akan di kerjakan pada triwullan III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran . untuk itu Sekretariat DPRD melalui melalui 2 program kerja yang melekat pada Sekretariat DPRD dengan anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Perundang-undangan dan Hubungan Masyrakat dan Program Peningkatan kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan.

Indikator program prioritas Sekretariat DPRD Tahun 2021 yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang diperdakan oleh DPRD Kabupaten Banjar. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjar

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase fasilitasi pelaksanaan reses			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD				75	80	82	NA	NA	75	80	Indikator baru menyesuaikan hasil kesepakatan pembahasan pohon kinerja

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar merupakan fasilitator yang menompang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Fasilitas yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu menompang kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan, pelayanan prima yang diberikan merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktifitas akan dilaksanakan.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada, namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalannya fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD, beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi DPRD tersebut antara lain adalah:

a. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian
b. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
c. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
d. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
e. Kompetensi SDM aparatur yang belum optimal
f. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.

Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggugjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain adalah:

a. Pada aspek perencanaan dan anggaran perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.
b. Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.

c. Pada aspek komunikasi, diperlukan peingkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
d. Pada aspek SDM, perlu peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.
e. Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki atau keterampilan yang dimiliki.
f. Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkala kepada bidang keuangan khususnya kebagian perencanaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD berupaya membuat suatu rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti isu-isu penting tersebut dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD yaitu fasilitasi program dan kegiatan terhadap DPRD sesuai tugas, fungsi dan wewenang agar melalui perencanaan dan penganggaran yang akurat, tepat dan cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan yang akuntabel dan transparan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Banjar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas dan Persentase fasilitasi pelaksanaan reses	100%	Rp 1.395.375.357	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas dan Persentase fasilitasi pelaksanaan reses	100%	Rp 2.412.486.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	100%	Rp 1.056.199.000	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	100%	Rp 937.116.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Fasilitasi pembahasan perda yang dilakukan	100%	Rp 692.549.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Fasilitasi pembahasan perda yang dilakukan	100%	Rp 674.966.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Banjar	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	100%	Rp 363.650.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Banjar	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	100%	Rp 262.150.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	100%	Rp 339.176.357	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	100%	Rp 1.223.370.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Pelaksanaan Reses	Kab. Banjar	Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	100%	Rp 339.176.357	Pelaksanaan Reses	Kab. Banjar	Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	100%	Rp 1.223.370.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
						Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Banjar	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	100%	Rp 252.000.000	
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Sekretariat DPRD)	Kab. Banjar	Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	100%	Rp 252.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Banjar	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	Rp 25.164.181.643	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Banjar	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	Rp 62.721.724.290	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	Rp 17.684.500	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Banjar	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 31.698.300	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja dan rencana kinerja	100%	Rp 17.684.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja dan rencana kinerja	100%	Rp 31.698.300	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase jumlah sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100%	Rp 1.754.877.800	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Banjar	Persentase jumlah sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100%	Rp 6.513.640.557	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	12 bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	12 bulan	Rp 4.416.042.757	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Tersedianya jasa pendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	Rp 1.757.247.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Tersedianya jasa pendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	Rp 2.083.600.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Rp 5.398.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Rp 5.398.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Banjar	terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	12 bulan	Rp 8.599.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Banjar	terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	12 bulan	Rp 8.599.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas	100%	Rp 987.158.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas	100%	Rp 588.282.500	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Banjar	Terselenggaranya bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas	100%	Rp 15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Banjar	Terselenggaranya bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas	100%	Rp 200.000.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	100%	Rp 972.158.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	100%	Rp 388.282.500	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	Rp 6.415.135.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	Rp 4.448.201.200	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 35.745.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 35.745.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah masa waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	12 bulan 100%	Rp 2.537.438.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah masa waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	12 bulan 100%	Rp 946.612.300	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya alat tulis kantor	100%	Rp 424.295.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	Tersedianya alat tulis kantor	100%	Rp 420.406.900	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Rp 84.207.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Rp 84.207.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Banjar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp 36.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Banjar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp 43.000.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	100%	Rp 3.297.450.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	100%	Rp 2.918.230.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase tercukupinya pelayanan perkantoran	100%	Rp 420.756.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Banjar	Persentase tercukupinya pelayanan perkantoran	100%	Rp 450.755.788	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air bersih dan internet	12 bulan	Rp 420.756.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air bersih dan internet	12 bulan	Rp 450.755.788	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpelihara	100%	Rp 2.616.805.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Banjar	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpelihara	100%	Rp 2.496.795.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Banjar	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	12 bulan	Rp 65.535.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Banjar	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	12 bulan	Rp 69.670.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan	Rp 569.540.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan	Rp 470.790.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Terpenuhinya gedung kantor	100%	Rp 1.981.730.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Terpenuhinya gedung kantor	100%	Rp 1.956.335.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD	100%	Rp 919.975.200	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD	100%	Rp 1.103.996.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Banjar	Jumlah fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	100%	Rp 919.975.200	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Banjar	Jumlah fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	100%	Rp 1.103.996.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Banjar	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100%		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Kab. Banjar	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100%	Rp 27.623.130.445	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Banjar	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	12 bulan		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Banjar	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	12 bulan	Rp 27.061.765.445	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Banjar	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN		Rp 514.200.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Banjar	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN		Rp 561.365.000	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Banjar	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	Rp 11.515.219.543	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Banjar	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	Rp 19.465.224.500	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Banjar	jumlah dokumen rapat/notulen rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi jumlah dokumen rapat/notulen rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi	12 bulan 100%	Rp 11.515.219.543	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Banjar	jumlah dokumen rapat/notulen rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi jumlah dokumen rapat/notulen rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi	12 bulan 100%	Rp 19.465.224.500	Beda pagu. Alasannya: menyesuaikan kebutuhan SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya senantiasa mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tidak ada menerima usulan program maupun kegiatan dari masyarakat.

Peran Sekretariat DPRD dalam penelaahan usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunaan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas berdasarkan RPJMD Kabuaten Banjar merupakan hasil evaluasi RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2021, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2020 serta perkiraan capaian tahun 2022. Penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah:

1) Transformasi struktur ekonomi

   Dari penghasilan bahan mentah atau setengah jadi produk batubara, sawit, karet dan kayu lapis menjadi sector unggulan yakni sector *industry*, pariwisata dan pertanian pangan.
2) Sumber daya manusia
3) Memangkas hambatan *investasi*
4) Memperkuat infrasetruktur ekonomi

Menyelaraskan dengan tema RKP tahun 2022 maka tema yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah:

"**Mendorong Investasi Untuk Transformasi Ekonomi Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara**" dan setelah pandemi *covid*-19 mengalami perubahan menjadi "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Menuju Gerbang Ibu Kota Negara**" dari tema tersebut maka arah kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi share dari sector pertambangan dan meneruskan focus pembangunan melalui sector ketahanan pangan, pariwisata industry hilir dan perdagangan.
2) Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2021 mengusung konsep *money follow* program dimana alokasi anggaran berbasis pada program prioritas yang menjadi focus pada perencanaan pembangunan tahun 2021. Pendekatan dengan tema *hits (holistic, integrative, tematik dan special)* pengarus utamaan *gender* dan *difabel*.
3) Pengurangan masyarakat miskin dan pengangguran dan pemulihan ekonomi *pasca covid*-19

Selanjutnya dari tema diatas maka ditetapkan 4 prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebagai berikut:

1) Prioritas 1(satu) Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dengan sub prioritas:
   - ➔ Peningkatan angka rata-rata lama sekolah
   - ➔ Peningkatan *indeks* pembangunan pemuda
   - ➔ Penurunan penyakit melalui Germas
   - ➔ Penurunan *prevalensi Stunting*
   - ➔ Penurunan angka pernikahan anak
   - ➔ Peningkatan kualitas tenaga kerja
   - ➔ Peningkatan ketahanan budaya dan kualitas seni masyarakat

➔ Peningkatan prestasi olahraga

2) Prioritas 2 (dua) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan sub prioritas:
   ➔ Penguatan reformasi birokrasi
   ➔ Pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum masyarakat dan konsolidasi demokrasi Pilkada
   ➔ Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   ➔ Penyederhanaan perizinan dan peningkatan pelayanan publik
3) Prioritas 3 (tiga) *Transformasi* struktur ekonomi ke sector industry, pertanian dan pariwisata dengan sub prioritas:
   ➔ Peningkatan produk hasil pertanian
   ➔ Mendorong industry pengolahan bahan mentah/setengah jadi
   ➔ Mendorong pariwisata dan pengembangan *geopark*
   ➔ Pembinaan wirausaha baru
   ➔ Peningkatan penggunaan produk lokal
   ➔ Peningkatan nilai investasi daerah
   ➔ Pengembangan industri digital
4) Prioritas 4 (empat) Memperkuat sarana dan prasarana dasar dan perekonomian dengan sub prioritas:
   ➔ Pengembangan kawasan prioritas
   ➔ Pembangunan infrasetruktur kewilayahan yang erintegrasi
   ➔ Pemenuhan pencapaian infrasetruktur dasar
5) Perioritas 5 (lima) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat ketahanan pangan bencana dengan sub prioritas:
   ➔ Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
   ➔ Penanganan mitigasi dan pasca bencana
   ➔ Mendorong penggunaan energi terbarukan

Sedangkan untuk tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang tersusun nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan surat edaran Bupati Banjar Nomor 050/122/PPE/Bappeda Litbang tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021.

Arah kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan menyelaraskan dengan tema pembangunan Kabupaten Banjar sebagai berikut:

a. Pemenuhan dan perbaikan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pada bidang Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
b. Penguatan safeguarding (monitoring, pengendalian dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan covid 19 termasuk penanganan kesehatan, penguatan jaring pengaman social dan pemulihan ekonomi agar tetap berjalan transparan, akuntabel efisien dan efektif.
c. Menggali sumber pertumbuhan ekonomi, sub sector yang konsisten mengalami pertumbuhan yang tinggi meskipun kontribusinya tidak terlalu besar, diharapkan

dimasa yang akan dating dapat menjadi basis struktur ekonomi Kabupaten Banjar dan mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah, dan mendorong transformasi ekonomi.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 prioritas pembangunan:

1. Pemulihan kesejahteraan Masyarakat, Pemerataan kualitas layanan Pendidikan dan kesehatan, dengan sub prioritas:
   - Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan
   - Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
   - Pemenuhan standar pelayanan minimum bidang social
   - Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang trantibumlinmas
2. Pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan dan barang sereta mendorong investasi, dengan sub prioritas:
   - Peningkatan sektor pertanian, perikanan dan barang jasa
   - Stimulus usaha mikro dan kemudahan investasi
3. Peningkatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, dengan sub prioritas:
   - Pemenuhan standar pelayanan minimum bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat serta pengembangan kawasan strategis kabupaten
   - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian untuk pemerataan pembangunan
4. Peningkatan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan sub prioritas:
   - Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik
   - Penguatan SAKIP
   - Perencanaan penganggaran yang responsive

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretatriat DPRD Kabupaten Banjar

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2021-2026 yaitu: “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Agamis”.** dengan misi keempat “Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif” Dan berdasarkan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar No. 101 Tahun 2020, Fungsi Sekretariat DPRD memberikan pelayanan kepada DPRD dan sebagai penghubung Kepala Daerah dengan DPRD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan, dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Maka Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar adalah sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran serta Target Sekretariat DPRD Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET SASARAN 2022
1.	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	84
		Meningkatnya Fasilitasi dan Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	75,31

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2022 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar untuk tahun 2022, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang sudah ditetapkan. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD Kabupaten Banjar.

3.3 Program Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan prioritas merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2022.

3.3.1 Faktor - Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program Kegiatan

Program dan kegiatan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan maksud peningkatan kualitas perencanan dengan cara mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misalnya:

1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja Sekretariat DPRD tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah program prioritas Sekretariat DPRD tahun 2022 ada sebanyak 2 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan adalah seluruh wilayah Kabupaten Banjar
3. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan prioritas Sekretariat DPRD seluruhnya dari APBD Kabupaten dengan jumlah sebesar Rp. 65.134.210.290(Enam Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
4. Sumber pendaaan seluruhynya dari APBD Kabupaten Banjar

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Sekretariat DPRD tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kab. Banjar**	**84**	**Rp 72.764.634.078**		**85**	**Rp 77.545.336.700**
4	02	02			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas**	Kab. Banjar	100%	Rp 2.412.486.000		100%	Rp 2.508.985.440
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	Kab. Banjar	100%	Rp 937.116.000		100%	Rp 955.858.320
4	02	02	2.01	02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Fasilitasi pembahasan perda yang dilakukan	Kab. Banjar	18 kali	Rp 674.966.000		18 kali	Rp 688,465,320
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	Kab. Banjar	5 kali	Rp 262.150.000		5 kali	Rp 267,393,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 1.223.370.000		100%	Rp 1,247,837,400
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	Kab. Banjar	3 kali	Rp 1.223.370.000		3 kali	Rp 1,247,837,400
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 252.000.000		100%	Rp 257,040,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 252.000.000		100%	Rp 257,040,000
4	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	Kab. Banjar	100%	Rp 62.721.724.290		100%	Rp 63.150.593.262
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Banjar	100%	Rp 31.698.300		100%	Rp 32,332,266
4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Banjar	8 dok	Rp 31.698.300		8 dok	Rp 32,332,266
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Banjar	100%	Rp 6.513.640.557		100%	Rp 6,643,913,368
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tambahan penghasilan TPP	Kab. Banjar	14 bulan	Rp 4.416.042.757		14 bulan	Rp 4,504,363,612

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 2.083.600.000		12 bulan	Rp 2,125,272,000
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kab. Banjar	1 dok	Rp 5.398.800		1 dok	Rp 5,506,776
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kab. Banjar	18 dok	Rp 8.599.000		18 dok	Rp 8,770,980
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	Kab. Banjar	100%	Rp 588.282.500		100%	Rp 600,048,150
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas	Kab. Banjar	100%	Rp 200.000.000		100%	Rp 204,000,000
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	Kab. Banjar	100%	Rp 388.282.500		100%	Rp 396,048,150
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	Kab. Banjar	100%	Rp 4.448.201.200		100%	Rp 4,537,165,224
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbelinya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Kab. Banjar	100%	Rp 35.745.000		100%	Rp 36,459,900
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah masa waktu pemeliharaan peralatan Gedung kantor/jumlah peralatan kantor yang terbeli	Kab. Banjar	100%	Rp 946.612.300		100%	Rp 965,544,546
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	Kab. Banjar	100%	Rp 420.406.900		100%	Rp 428,815,038
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Banjar	100%	Rp 84.207.000		100%	Rp 85,891,140
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Banjar	100%	Rp 43.000.000		100%	Rp 43,860,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Kab. Banjar	100%	Rp 2.918.230.000		100%	Rp 2,976,594,600
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pelayanan perkantoran	Kab. Banjar	100%	Rp 450.755.788		100%	Rp 459,770,903
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air	Kab. Banjar	100%	Rp 450.755.788		100%	Rp 459,770,903

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						bersih dan internet						
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpelihara	Kab. Banjar	100%	Rp 2.496.795.000		100%	Rp 2,546,730,900
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 69.670.000		12 bulan	Rp 71,063,400
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 470.790.000		12 bulan	Rp 480,205,800
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 1.956.335.000		12 bulan	Rp 1,995,461,700
4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 1.103.996.000		100%	Rp 1,126,075,920
4	02	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 1.103.996.000		12 bulan	Rp 1,126,075,920
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	Kab. Banjar	100%	Rp 27.623.130.445		100%	Rp 28,175,593,053
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 27.061.765.445		12 bulan	Rp 27,603,000,753
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas bagi anggota dewan	Kab. Banjar	225 stel	Rp 561.365.000		225 stel	Rp 572,592,300
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 19.465.224.500		100%	Rp 19,854,528,990
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah dokumen laporan perjalanan dinas	Kab. Banjar	984 dok	Rp 19.465.224.500		984 dok	Rp 19,854,528,990

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukan pada Tabel 4.1 dibawah ini, table 4.1 berisi seluruh program baik program prioritas maupun program pendukung. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah 2 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan dan dengan kebutuhan total anggran sebesar Rp 31.637.832.088,- (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah). Untuk lebih detilnya bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar

Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kab. Banjar**	**84**	**Rp 72.764.634.078**		**85**	**Rp 77.545.336.700**
4	02	02			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas**	Kab. Banjar	100%	Rp 2.412.486.000		100%	Rp 2.508.985.440
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	Kab. Banjar	100%	Rp 937.116.000		100%	Rp 955.858.320
4	02	02	2.01	02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Fasilitasi pembahasan perda yang dilakukan	Kab. Banjar	18 kali	Rp 674.966.000		18 kali	Rp 688,465,320
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	Kab. Banjar	5 kali	Rp 262.150.000		5 kali	Rp 267,393,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 1.223.370.000		100%	Rp 1,247,837,400
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	Kab. Banjar	3 kali	Rp 1.223.370.000		3 kali	Rp 1,247,837,400
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 252.000.000		100%	Rp 257,040,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 252.000.000		100%	Rp 257,040,000
4	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	Kab. Banjar	100%	Rp 62.721.724.290		100%	Rp 63.150.593.262
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Banjar	100%	Rp 31.698.300		100%	Rp 32,332,266
4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Banjar	8 dok	Rp 31.698.300		8 dok	Rp 32,332,266
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Banjar	100%	Rp 6.513.640.557		100%	Rp 6,643,913,368
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tambahan penghasilan TPP	Kab. Banjar	14 bulan	Rp 4.416.042.757		14 bulan	Rp 4,504,363,612

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 2.083.600.000		12 bulan	Rp 2,125,272,000
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kab. Banjar	1 dok	Rp 5.398.800		1 dok	Rp 5,506,776
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kab. Banjar	18 dok	Rp 8.599.000		18 dok	Rp 8,770,980
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	Kab. Banjar	100%	Rp 588.282.500		100%	Rp 600,048,150
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas	Kab. Banjar	100%	Rp 200.000.000		100%	Rp 204,000,000
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang terfasilitasi	Kab. Banjar	100%	Rp 388.282.500		100%	Rp 396,048,150
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	Kab. Banjar	100%	Rp 4.448.201.200		100%	Rp 4,537,165,224
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbelinya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Kab. Banjar	100%	Rp 35.745.000		100%	Rp 36,459,900
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah masa waktu pemeliharaan peralatan Gedung kantor/jumlah peralatan kantor yang terbeli	Kab. Banjar	100%	Rp 946.612.300		100%	Rp 965,544,546
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	Kab. Banjar	100%	Rp 420.406.900		100%	Rp 428,815,038
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Banjar	100%	Rp 84.207.000		100%	Rp 85,891,140
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Banjar	100%	Rp 43.000.000		100%	Rp 43,860,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Kab. Banjar	100%	Rp 2.918.230.000		100%	Rp 2,976,594,600
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pelayanan perkantoran	Kab. Banjar	100%	Rp 450.755.788		100%	Rp 459,770,903
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air	Kab. Banjar	100%	Rp 450.755.788		100%	Rp 459,770,903

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						bersih dan internet						
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpelihara	Kab. Banjar	100%	Rp 2.496.795.000		100%	Rp 2,546,730,900
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 69.670.000		12 bulan	Rp 71,063,400
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 470.790.000		12 bulan	Rp 480,205,800
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 1.956.335.000		12 bulan	Rp 1,995,461,700
4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 1.103.996.000		100%	Rp 1,126,075,920
4	02	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 1.103.996.000		12 bulan	Rp 1,126,075,920
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	Kab. Banjar	100%	Rp 27.623.130.445		100%	Rp 28,175,593,053
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji, tambahan penghasilan, TPP	Kab. Banjar	12 bulan	Rp 27.061.765.445		12 bulan	Rp 27,603,000,753
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas bagi anggota dewan	Kab. Banjar	225 stel	Rp 561.365.000		225 stel	Rp 572,592,300
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Kab. Banjar	100%	Rp 19.465.224.500		100%	Rp 19,854,528,990
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah dokumen laporan perjalanan dinas	Kab. Banjar	984 dok	Rp 19.465.224.500		984 dok	Rp 19,854,528,990

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2022.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini harus dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Sekretraiat DPRD Kabupaten Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improvit* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran rencana kerja ini kedalam rencana kerja dan anggaran, maka pada saat itu juga harus dilakukan Perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan, Penjabaran rencana kerja dan anggaran yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan ini sangat diperlukan untuk memperjelas tahap pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

34. Sekretariat Daerah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan pada 10 (sepuluh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selama satu tahun anggaran, serta sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas untuk mecapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua kebijakan.

Kami menyadari Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Rencana Kerja yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Rencana Kerja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun seperti yang tertuang dipasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya, indikator kinerja output dan outcome yang kurang relevan, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja.

I.1.1. Pengertian Ringkas Renja Sekretariat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah sebagai dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan Renja Sekretariat Daerah disusun berdasarkan:

1) Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2) Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3) Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja SKPD

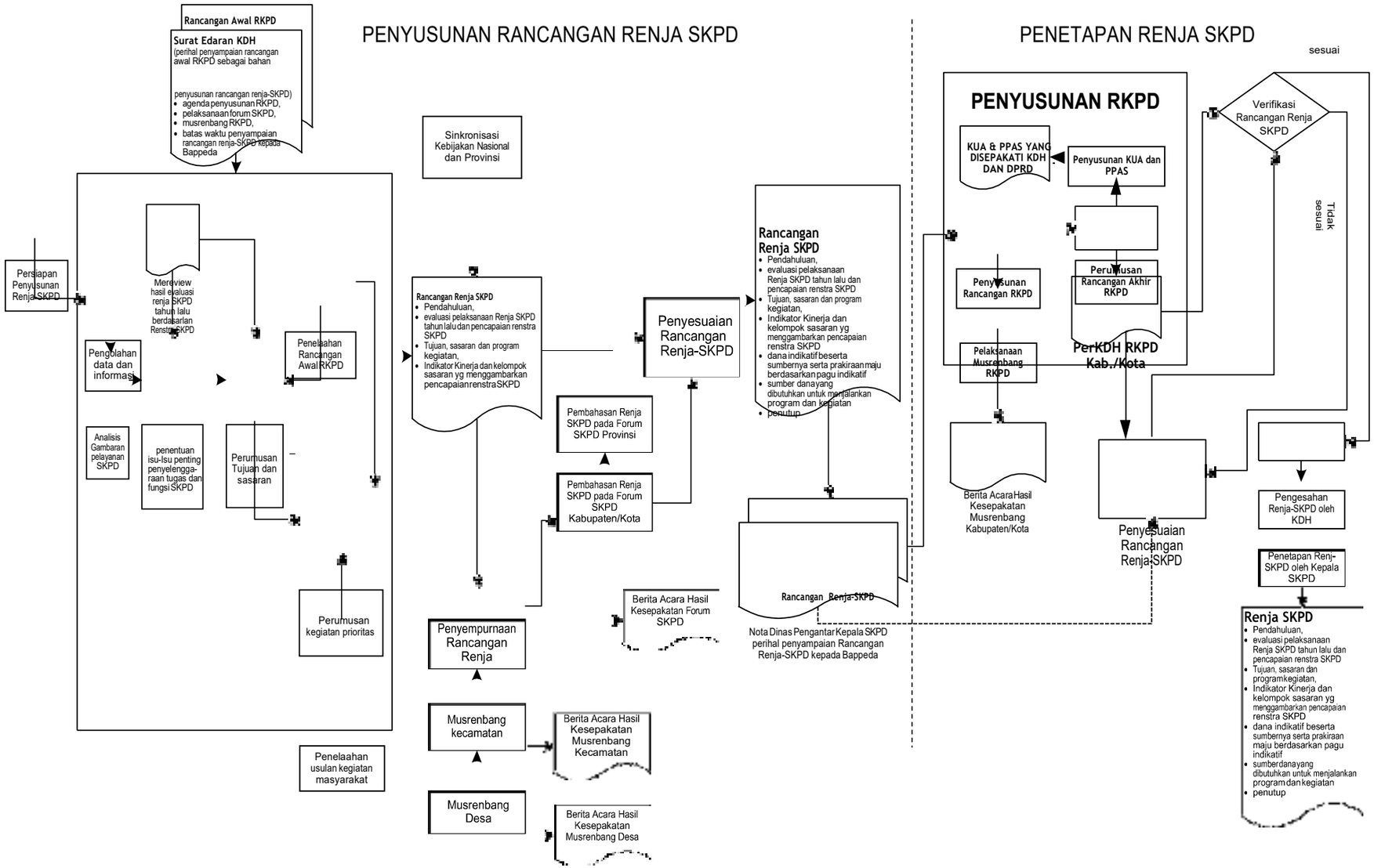

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

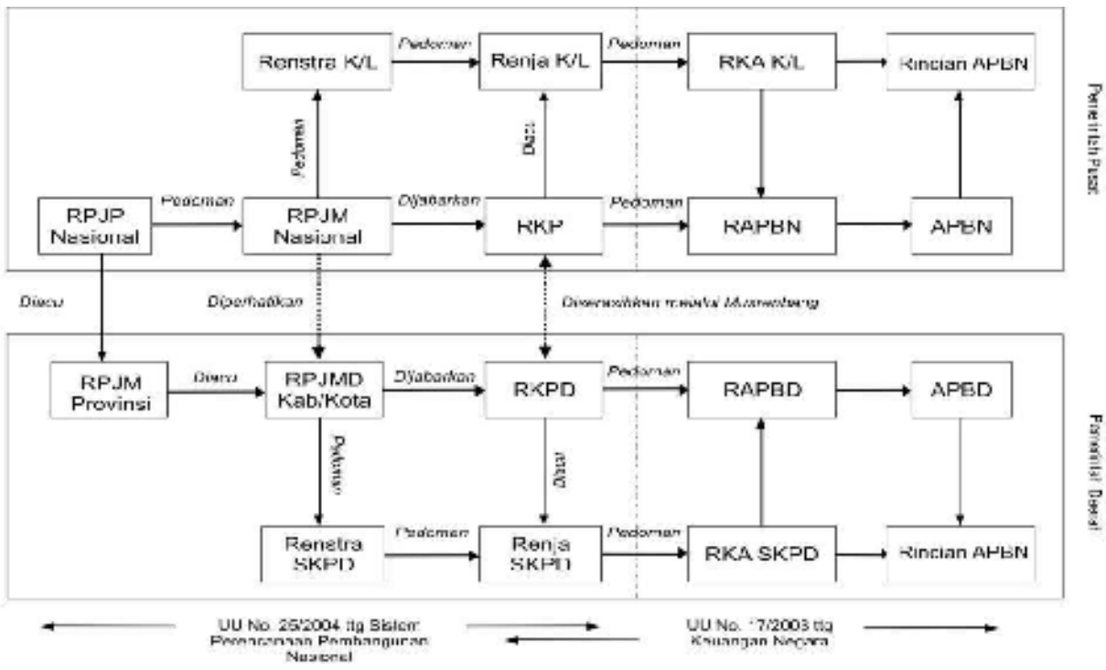

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Sekretariat Daerah

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
   a) Dalam BAB Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
   b) Dalam BAB Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Tipe A;
   c) Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 10 Bagian.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah , selanjutnya terinci sebagai berikut:
   (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
      i. Sekretariat Daerah.
      ii. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
         1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
            a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
            b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
            c. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
         2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
            a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
            b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
            c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
   b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
   c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

iii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
   1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
      a. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
      b. Sub Bagian Perekonomian; dan
      c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
   2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
      a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
      c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
   3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
      a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      b. Sub Bagian Pengendalian Program.

iv. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
   1. Bagian Umum, terdiri dari :
      a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
      b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
      c. Sub Bagian Rumah Tangga.
   2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
      a. Sub Bagian Protokol;
      b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
      c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
   3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
      a. Sub Bagian Kelembagaan Analisa Jabatan;
      b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
      c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
   4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
      a. Sub Bagian Perencanaan;
      b. Sub Bagian Keuangan; dan
      c. Sub Bagian Pelaporan.

(2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

i. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

ii. Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
   2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
   3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
   4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas dan Fungsi Asisten adalah sebagai berikut :

i. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

ii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

iii. Asisten Administrasi Umum mempuyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan.

(4) Tugas dan Fungsi Bagian – Bagian adalah sebagai berikut :

i. Bagian Pemerintahan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dearah, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otnomi daerah;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
   d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
   e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

ii. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan

   daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah terkait kesejahteraan Sosial;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
   c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
   d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

iii. Bagian Hukum

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang- undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
   d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan

tugasnya.Penyusunan pertimbangan dan bantuan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

iv. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

   evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

   a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;

   b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;

   c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam; dan

   d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah terkait ekonomi;

v. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan

advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

vi. Bagian Administrasi Pembangunan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program;
   c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program; dan
   d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

vii. Bagian Umum

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga; dan
   c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

viii. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

ix. Bagian Organisasi

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
   d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

x. Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
   c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak

yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan RincianAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Penanganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional berdampak pada penurunan pendapatan dari dana transfer, dan diperkirakan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan;

11) Peraturan Bupati Banjar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021;

12) Peraturan Bupati Banjar Nomor34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;

13) Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Banjar Tahun 2020;

14) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah :

1) Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
2) Menjabarkan rencana strategis Kabupaten Banjar dalam rencana strategis Sekretariat Daerah jangka pendek (1 Tahun);
3) Merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan merupakan tolak ukur penilaian kinerja bagian - bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022 sebagai wujud dari kinerja Sekretariat Daerah.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah :

1) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat Daeah Kabupaten Banjar;
2) Untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
3) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

I.4. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1) Pendahuluan
   - 1.1. Latar Belakang
   - 1.2. Landasan Hukum
   - 1.3. Maksud dan Tujuan
   - 1.4. Sistematika Penulisan
2) Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu
   - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
   - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
   - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
   - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
   - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
   - 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
   - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
   - 3.3. Program dan Kegiatan
4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5) Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi. Pada penyusunan rencana kerja tahun 2022 tidak terlepas dari evaluasi kinerja tahun 2021 (sedang berjalan) dan evaluasi kinerja Tahun 2020, evaluasi ini dijelaskan mengenai pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam program dan kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program dan 19 Kegiatan

54 Sub Kegiatan Sedangkan pada tahun 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program dan 19 Kegiatan serta 56 Sub Kegiatan. Pencapaian kinerja tahun 2021 dapat diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan dengan cara dilakukan pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing– masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2022 performa dari masing–masing bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Sekretariat Daerah masih berjalan. Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Realisasi program / kegiatan Renja SKPD tahun 2021 (tahun berjalan) (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
									Target 2020	Realisasi Tahun 2020	Tingkat realisasi Tahun 2020(%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021(tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan										
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4	**01**				**Sekretariat Daerah**									
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**75 Persen**	**300**	**300**
4	**01**	**01**	**2,01**		**perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah**	**80,9 Nilai**	**81,71 Nilai**	**79,50 Nilai**	**82,27 Nilai**	**103**	**83,58 Nilai**	**243,48**	**301**
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**100**	4 Dokumen	**12**	**300**
						Jumlah dokumen anggaran dan belanja yang diverifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**100**	4 Dokumen	**12**	**300**

4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	**100**	4	Dokumen	**12**	**300**
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	**100**	4	Dokumen	12	300
4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah ASN Setda yang mendapat pelayanan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
						Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	120	ASN	120	ASN	120	ASN	120	ASN	**100**	120	ASN	360	300
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel	32	Dokumen /Laporan	32	Dokumen/Laporan	32	Dokumen/Laporan	19	Dokumen/Laporan	**59,375**	8	Dokumen /Laporan	83	259
4	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	80	Peserta	0	Peserta	160	Peserta	160	Peserta	**100**	40	Peserta	320	400
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	75	%	300	300
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Penyediaan Komponen instalasi	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300

					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor												
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjunghan tamu	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11	Bulan	11	Bulan	11	Bulan	11	Bulan	**100**	9	Bulan	33	300
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	**0**	1	Unit	0	0
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Aset Meubuler yang tercatat	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang masuk dan keluar	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang Terlayani Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	6	Gedung	3	Gedung	6	Gedung	6	Gedung	**100**	6	Gedung	15	250
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300

4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
						Pelayanan Event Hari-Hari Besar yang Difasilitasi	90	Persen	100	Persen	85	Persen	90	Persen	**106**	45	Persen	275	306
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Mobil Jabatan KDH/WKDH	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	**100**	4	Unit	12	300
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Layanan Perizinan Operasional Kendaraan Bermotor	115	Unit	115	Unit	116	Unit	116	Unit	**100**	33	Unit	347	302
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JumlahPelayanan Operasional Kendaraan Bermotor	115	Unit	115	Unit	116	Unit	116	Unit	**100**	82	Unit	347	302
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300

					atau Bangunan Lainnya													
4	**01**	**01**	**2,11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji & Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a	14	Stell	26	Stell	26	Stell	26	Stell	**100**	14	Stell	78	557
						Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH	14	Stell	14	Stell	14	Stell	14	Stell	**100**	14	Stell	42	300
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan KHD/WKDH	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Operasional KDH/WKDH	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	**01**	**01**	**2,12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Rumah Jabatan KDH/WKDH	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300

4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	90	Persen								75	Persen	0	0
						Tersedianya makanan dan minuman	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	**01**	**01**	**2,13**		**Penataan Organisasi**	**Prsentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen/laporan Evaluasi kelembagaan yang telah disusun	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	**100**	1	Dokumen	9	900
						JumlahDokumen Penataan Sumber Daya Aparatur	1	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	**100**	1	Dokumen	12	1200
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi	2	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	3	Dokumen	**75**	2	Dokumen	15	750
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	**100**	1	Dokumen	2	200
						Laporan hasil koordinasi	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	**25**	4	Laporan	9	225
4	**01**	**01**	**2,14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**		Persen	300	300
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan hari jadi yang diselenggarakan	10	Kegiatan	6	Kegiatan	6	Kegiatan	0	Kegiatan	**0**	2	Kegiatan	12	120

						Jumlah Kegiatan Yang mendapat Pelayanan Keprotokolan	330	Kegiatan	527	Kegiatan	315	Kegiatan	315	Kegiatan	**100**	330	Kegiatan	1157	351
						Jumlah Pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH yang dilayani	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan/Pidato	350	Naskah / Pidato	631	Naskah / Pidato	420	Naskah / Pidato	339	Naskah / Pidato	**81**	350	Naskah / Pidato	1390	397
						Jumlah Perjalanan Setda yang dilayani	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100**	9	Bulan	36	300
4	01	01	2,14	03	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi pimpinan	440	Dokumentasi	440	Dokumentasi	440	Dokumentasi	440	Dokumentasi	**100**	440	Dokumentasi	1320	300
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	**01**	**02**	**2,01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Keterisian Data Indikator Kinerja Kunci (IKK)**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
						Rata-Rata IKM Kecamatan	**84**	**Persen**	**80,57**	**Persen**	**82**	**Persen**	**85**	**Persen**	**104**	0	Persen	248	295
						Persentase Permasalaan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan	**62,25**	**Persen**	**20**	**Persen**	**52,25**	**Persen**	**60**	**Persen**	**115**	0	Persen	132	212
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Lingkup Urusan Pemerintahan Yang disusun	1	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	**100**	0	Laporan	5	500
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi	1	Peta	1	Peta	1	Peta	1	Peta	**100**	0	Peta	3	300

						Jumlah kesepakatan segmen batas wilayah yang dihasilkan dalam penetapan batas wilayah kecamatan dan kabupaten	3	Segmen Batas	1	Segmen Batas	3	Segmen Batas	3	Segmen Batas	**100**	2	Segmen Batas	7	233
						Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	**100**	2	Laporan	9	450
						Jumlah laporan monev batas wilayah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	3	Laporan	12	300
						Jumlah pembangunan patok batas wilayah	5	Patok	10	Patok	9	Patok	0	Patok	**0**	5	Patok	19	380
						Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	**100**	1	Laporan	3	300
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	**100**	1	Dokumen	6	300
4	**01**	**02**	**2,02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah ZIS yang terkumpul**	**699.840.000**	**Rp**	**817.039.549**	**Rp**	**641.250.000,00**	**Rp**	**2.033.314.132,00**	**Rp**	**317**	571.094.600,00	Rp	3.491.603.681,00	499
						Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan & Hari-hari Besar Keagamaan	8	Kegiatan	13	Kegiatan	10	Kegiatan	3	Kegiatan	**30**	3	Kegiatan	26	325

4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Lingkup Urusan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Yang Disusun	7	Laporan	7	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	**100**	3	Laporan	13	186
						Jumlah laporan monev bantuan hibah	2	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	**100**	2	Laporan	4	200
						Jumlah UPZ yang dibina	34	UPZ	34	UPZ	34	UPZ	34	UPZ	**100**	34	UPZ	102	300
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Ulama & Toko Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	60	Orang	50	Orang	45	Orang	45	Orang	**100**	60	Orang	140	233
4	**01**	**02**	**2,03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase peraturan yang disahkan**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	75	100%	300	300
						Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	75	100%	300	300
						Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	75	100%	300	300
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	**100**	1	Dokumen	3	300
						Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Peraturan dan Penetapan	550	Draft PHD	501	Draft PHD	501	Draft PHD	501	Draft PHD	**100**	550	Draft PHD	1503	273
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan asistensi kontrak drafting kesepakatan	15	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	**100**	15	Laporan	36	240

						bersama atau perjanjian											
						Jumlah Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang dihadapi Pemerintah Daerah	5	Perkara	8	Perkara	5	Perkara	5	Perkara	**100**	5	Perkara	18	360
						Pelaksaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	4	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	**100**	0	Dokumen	15	375
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi Produk Hukum Daerah	500	Dokumentasi	500	Dokumentasi	501	Dokumentasi	501	Dokumentasi	**100**	391	Dokumentasi	1502	300,4
						JumlahMedia Publikasi	1	Website	1	Website	1	Website	1	Website	**100**	1	Website	3	300
4	**01**	**02**	**2,04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah	10	Kali	10	Kali	10	Kali	10	Kali	**100**	10	Kali	30	300
						Jumlah laporan monev kerjasama antar daerah	1	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	1	Laporan	12	1200
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300
4	**01**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase BUMD yang sehat**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	75	Persen	300	300

4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi dan dievaluasi	13	BUMND/ BLUD	9	BUMND	9	BUMND	9	BUMND	**100**	13	BUMND/ BLUD	27	208
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID yang disusun	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	3	Laporan	12	300
4	**01**	**03**	**2,02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Administrasi Pembangunan yang dibuat**	**100**	**Persen**	0	**Persen**	0	**Persen**	0	**Persen**	**0**	75	Persen	0	0
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Penyusunan Kegiatan Pembangunan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	**0**	0	Laporan	0	0
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	**0**	2	Laporan	0	0
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	**0**	2	Laporan	0	0
4	**01**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase paket Pengadaan barang dan Jasa yang tepat waktu**	**92**	**Persen**	**84,84**	**Persen**	**90**	**Persen**	**82,62**	**Persen**	**91,8**	75	Persen	257	280
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Kontrak yang sesuai Ketentuan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	3	Laporan	12	300
						Jumlah Laporan Paket lelang yang disusun sesuai ketentuan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	3	Laporan	12	300
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah SKPD yang menyampaikan dan mengumumkan RUP Tepat Waktu	54	SKPD	51	SKPD	54	SKPD	50	SKPD	**93**	50	SKPD	155	287

4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan PBJ yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	54	PBJ	72	PBJ	55	PBJ	55	PBJ	**100**	40	PBJ	182	337
4	**01**	**03**	**2,04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana**	**100**	**Persen**	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	**0**	75	Persen	0	0
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Kegiatan pemantauan kebijakan terkait sunber daya alam	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	**0**	1	Laporan	0	0
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pemantauan dan evaluasi energi dan air	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	**0**	1	Laporan	0	0

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan, memfasilitasi dan sinkronisasi dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun berakhirnya renstra mengalami perubahan nomenklatur program dan kegiatan serta perubahan indikator dan target disesuaikan dengan RPJMD 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2021- 2026 (tabel 2.2 dan tabel 2.4).

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi bidang hukum, pemerintahan, kesejahteraan sosial, pembangunan, perekonomian, layanan pengadaan, hubungan kemasyarakatan, organisasi, serta umum;
2) Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah;
3) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan seluruh SKPD;
4) Pelayanan teknis administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebelum adanya Perubahan indikator kinerja

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah ZIS yang terkumpul			641.520.000,00	699.840.000,00	769.824.000,00	846.806.400,00	2.033.314.132,00	835.255.680,00	769.824.000,00	846.806.400,00	
2	Jumlah Laporan Monev Bantuan Hibah			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
3	Jumlah UPZ yang dibina			34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	
4	Persentase Kegiatan Keagamaan yang diperingati			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar keagamaan			13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	3 Kali	3 Kali	13 kali	13 kali	
6	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu			90%	91%	92%	93%	82,62%	75%	92%	93%	
7	Jumlah SKPD yang menyampaikan dan mengumpumkan RUP tepat Waktu			54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	50 SKPD	37 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	
8	Presentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi			3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
10	persentase keterisian data indikator kinerja kunci (IKK)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah Dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

II.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih ada di tingkat pelayanan SKPD yang perlu diperhatikan adalah:

1) Sulit membangun kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah melalui UPZ yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur permohonan bantuan sosial dan hibah;
3) Dalam pembinaan BUMD, belum terbitnya Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan BUMD;
4) Belum optimal Perangkat Daerah dalam pengajuan lelang dalam hal ini kelengkapan dokumen yang sesuai SIRUP;
5) Masih kurang jumlah SDM fungsional PBJ dalam melaksanakan lelang tepat waktu;
6) Pengelolaan Guest House Sultan Sulaiman yang belum profesional;
7) Dalam pembahasan Peraturan Daerah melibatkan pihak terkait yaitu Perangkat Daerah pemrakarsa dan DPRD, sehingga tidak bisa maksimal untuk mengejar target;
8) Masih terdapat indikator SPM yang memang tidak bisa dilaksanakan di daerah namun tetap menjadi perhitungan dalam capaian indikator SPM;
9) Masih kurang tanggapnya Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik dalam melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat;
10) Kurangnya pengetahuan tentang inovasi pelayanan untuk menunjang kegiatan- kegiatan di yang dilaksanakan agar lebih efektif dan efisien;
11) Dalam proses Evaluasi Pembentukan UPTD di Lingkup Kabupaten Banjar yang menjadi permasalahan adalah adanya fungsi UPTD yang sudah didefinisikan dalam peraturan Bupati tentang Susuanan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah tetapi sudah singkron dan tidak mengakomodir sesuai Uraian Tugas UPTD;
12) Masih kurangnya pemahaman dari SKPD mengenai nama jabatan yang sesuai dengan tugas jabatan dan pemilahan nama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri SIpil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13) Belum ada kesepakatan pemilihan SKPD atau ASN yang dijadikan sebagai role model dan nilai dasar yang disepakati untuk diterapkan
14) Kurang maksimalnya kegiatan asistensi yang dilaksanakan sehingga draf Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang harus direvisi atau diperbaiki kembali oleh Bagian Organisasi
15) Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait reformasi birokrasi untuk perubahan di daerah agar menjadi lebih baik;
16) Keberadaan TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Daerah, belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh SKPD yang akan melaksanakan kerjasama;

17) Belum maksimalnya penegasan batas antar kabupaten (Banjar - Tanah Laut dan Banjar – Banjarbaru), antar kecamatan dan antar desa/kelurahan;
18) Ada beberapa pilar batas yang bergeser, rusak dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas secara akurat.

Dari berbagai isu penting tersebut, Sekretariat Daerah berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dimana tugas pokok Sekretariat Daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai SKPD Pengkoordinasian atas Dinas-Dinas dan Badan-Badan Pelaksananya.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Proses review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan .

Pada tabel review disajikan dan dijelaskan dalam subbab 2.4 ini,terdapat perbedaan antara rumusan program dan kegiatan perangkat daerah dalam Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, atau adanya program dan kegiatan yang sudah cocok namun besarannya berbeda hal ini dikarenakan adanya perubahan dari sasaran, indikator pada level program, kegiatan, sub kegiatan yang dulunya tidak berbasis kinerja, sekarang menjadi berbasis kinerja.

Pada tahun anggaran 2022 review Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indkator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indkator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
1	PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Banjar			27.818.224.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Nilai SAKIP Nilai IKM Kab. Banjar Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	100 persen 70 Nilai 84 Nilai 80 Nilai	Rp. 40.935.570.152,00	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah**	80,9	317.274.600	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Banjar	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efesien Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel Persentase Bagian yang berkinerja baik Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	81,5 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 269.143.900,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	195.443.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu dan sesuai	100 persen 100 persen	Rp. 152.967.200	

								ketentuan			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kab. Banjar**	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	4 Dokumen	71.111.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Persentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	Rp. 81.651.700	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar**	Laporan evaluasi	4 Dokumen	50.719.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Bagian yang menyampaikan laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase keterisian data dukung evaluasi Persentase keterisian data dukung IKKI	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 34.525.000	
6	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Jumlah ASN Setda yang mendapat pelayanan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan**	100 Persen	16.658.440.368	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Banjar	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100 Persen	Rp. 16.929.346.662	
7	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kab. Banjar**	**Jumlah ASN yang mendapat gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan**	120 ASN	16.567.096.368	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	Rp. 16.776.802.662	
8	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel**	32 Dokumen	91.344.000	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Kab. Banjar	Persentase Konsultasi mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	Rp. 152.544.000	
9	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	-	17.972.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani Persentase produk hukum daerah	100 persen 100 persen	Rp. 317.972.000	

								berbentuk peraturan yang dipublikasikan			
10	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Peserta Sosialisasi**	80 Peserta	17.972.000	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	Kab. Banjar	Persentase telaksananya sosialiasi produk hukum daerah	100 persen	Rp.17.972.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	**Kab. Banjar**				**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Bimbingan Teknis yang terlaksana	100 persen	Rp. 300.000.000	
11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	100 persen	3.935.110.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani	100 persen	Rp. 3.023.564.334	
12	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	12 Bulan	33.942.000	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana	100 persen	Rp. 33.942.000	
13	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	12 Bulan	445.924.000	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terealisasi	100 persen	Rp. 715.800.600	
14	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Kab. Banjar**	**Jumlah fasilitasi kunjunghan tamu**	12 Bulan	21.000.000	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Penyedian Kunjungan Tamu yang terlaksana	100 persen	Rp. 21.000.000	
15	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	11 Bulan	3.434.244.000	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	Rp. 2.252.821.734	
16	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	100 Persen	3.434.244.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	Rp. 3.432.683.000	
17	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional**	2 Unit	1.653.950.000	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Kab. Banjar	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan	100 Persen	Rp. 701.150.000	
18	**Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional**		1.452.300.000	**Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan**	Kab. Banjar	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang sesuai	100 Persen	Rp. 2.404.602.000	

								ketentuan			
19	**Pengadaan Mebel**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Aset Meubuler yang tercatat**	12 Bulan	201.650.000	**Pengadaan Mebel**	Kab. Banjar	Persentase pengadaan mebel yang sesuai ketentuan	100 Persen	Rp. 326.931.000	
20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	100 Persen	3.360.157.800	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	Rp. 3.382.716.400	
21	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kab. Banjar**	**Jumlah surat menyurat yang masuk dan keluar**	12 Bulan	38.840.000	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Kab. Banjar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan Persentase pelayanan administrasi surat menyurat yang terlaksana sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	Rp. 43.040.000	
22	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kab. Banjar**	**Jumlah gedung yang Terlayani Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon**	6 Gedung	1.184.840.000	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 1.107.126.500	
23	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan**	12 Bulan	207.250.000	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 207.250.000	
24	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan jasa Kebersihan Kantor**	12 Bulan	1.929.227.800	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100 persen	Rp. 2.025.299.900	
25	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	100 Persen	2.485.995.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	Rp. 3.491.112.000	
26	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Mobil Jabatan KDH/WKDH**	4 Unit	842.030.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	100 persen	Rp. 848.930.000	

								Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan			
27	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Layanan Perizinan Operasional Kendaraan Bermotor**	115 Unit	704.020.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 996.400.000	
28	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	12 Bulan	50.000.000	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Kab. Banjar	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 40.000.000	
29	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor**	12 Bulan	217.825.000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Kab. Banjar	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 878.662.000	
30	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor**	12 Bulan	355.000.000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 410.000.000	
31	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor**	12 Bulan	317.120.000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 317.120.000	
32	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	100 Persen	958.949.556	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 983.949.556	

								Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Fasilitasi Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen		
33	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Gaji & Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil**	12 Bulan	170.474.556	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pembayaran dan Penatausahaan Penyediaan Gaji KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 170.474.556	
34	**Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**	14 Stell	98.475.000	**Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 108.475.000	
35	**Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Banjar**	**Pelayanan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan KHD/WKDH**	12 Bulan	90.000.000	**Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 105.000.000	
36	**Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan Operasional KDH/WKDH**	12 Bulan	600.000.000	**Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 600.000.000	
37	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kab. Banjar**		100 Persen	1.888.332.800	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai	100 Persen	Rp. 1.918.104.300	

								ketentuan Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan			
38	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan Pemeliharaan** **Rumah Jabatan KDH/WKDH**	12 Bulan	605.005.200	**Penyediaan Kebutuhan** **Rumah Tangga Kepala Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 658.722.000	
39	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pelayanan Kebutuhan** **Rumah Tangga Wakil Bupati**	13 Bulan	361.345.600	**Penyediaan Kebutuhan** **Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 351.438.000	
40	**Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah**	**Kab. Banjar**	**Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan,** **Staf Ahli dan Kepegawaian**	90 Persen	921.982.000	**Penyediaan Kebutuhan** **Rumah Tangga Sekretariat** **Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 907.944.300	
41	**Penataan Organisasi**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan** **Administrasi Perkantoran**	100 Persen	914.463.800	**Penataan Organisasi**	Kab. Banjar	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik Persentase pengelolaan tatalaksana Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik Persentase PD SAKIP bernilai Baik	1,3 Skor/Nilai 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 5.190.216.900	
42	**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Dokumen/laporan** **Evaluasi kelembagaan yang telah disusun**	1 Dokumen	139.405.000	**Pengelolaan Kelembagaan** **dan Analisis Jabatan**	Kab. Banjar	Persentase PD Kabupaten yang tepat fungsi dan ukuran Persentase Kebijakan bidang kelembagaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Persentase Kebijakan	100 Persen 100 Persen	Rp. 142.020.100	

								tentang Penataan SDM aparatur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan			
43	**Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi**	2 Dokumen	188.639.600	**Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	Kab. Banjar	Persentase kebijakan bidang tatalaksana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Persentase PD yang melaksanakan tata laksana sesuai dengan ketentuan. Persentase PD yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Proses Bisnis dan SOP Persentasi PD yang melakukan inovasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 185.670.400	
44	**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**	**Kab. Banjar**	**Dokumen Reformasi Birokrasi**	1 Dokumen	586.419.200	**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**	Kab. Banjar	Persentase PD menyampaikan dokumen PK sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja instansi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja triwulanan tepat waktu Persentase PD yang menyampaikan laporan pengelolaan RB unit/PD tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase pengisian PMPRB unit/PD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 869.004.200	

45	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kab. Banjar**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	100 Persen	1.803.165.900	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 1.996.761.100,00	
46	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan hari jadi yang diselenggarakan**	10 Kegiatan	1.351.057.000	**Fasilitasi Keprotokolan**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi dan pengoordinasiaan acara yang dihadiri Pimpinan Persentase fasilitasi dan pengoordinasiaan pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Persentase fasilitasi kunjungan kerja Pimpinan di dalam dan luar daerah Persentase fasilitasi penerimaan dan pengaturan kunjungan tamu daerah atau dinas	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp.1.529.863.000,00	
47	**Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Naskah Sambutan/Pidato**	350 Naskah/Pidato	219.252.000	**Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**	Kab. Banjar	Persentase penyiapan bahan sambutan/materi/pointer Pimpinan Persentase penyiapan ucapan selamat/duka, dan cindera mata	100 persen 100 persen	Rp. 222.344.100,00	

48	**Pendokumentasian Tugas Pimpinan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Dokumentasi pimpinan**	440 Dokumen	232.856.900	**Pendokumentasian Tugas Pimpinan**	Kab. Banjar	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan Persentase publikasi kegiatan Pimpinan dan Sekretariat Daerah melalui website dan media sosial Sekretariat Daerah	100 persen 100 persen	Rp. 244.544.000,00	
49	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kab. Banjar**			8.072.781.710	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Nilai LPPD	100 persen 3,117 Nilai	Rp. 8.360.368.000,00	
50	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Banjar**	**Persentase Keterisian Data Indikator Kinerja Kunci (IKK)**	100 Persen	488.992.100	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Kab. Banjar	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 626.266.000,00	
51	**Penataan Administrasi Pemerintahan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Koordinasi Lingkup Urusan Pemerintahan Yang disusun**	1 Laporan	54.664.500	**Penataan Administrasi Pemerintahan**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan bidang trantibumlinmas sesuai dengan ketentuan. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan bidang dukcapil sesuai dengan ketentuan. Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 53.080.500,00	

								pemerintahan bidang kesbangpol sesuai dengan ketentuan.			
52	**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi**	1 Peta	313.521.500	**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**	Kab. Banjar	Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi	1 Peta	Rp. 391.796.500,00	
53	**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi**	2 Dokumen	120.806.100	**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	2 Dokumen	Rp. 181.389.000,00	
54	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Banjar**	**Jumlah ZIS yang terkumpul**	7E+08	7.263.347.210	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi dan koordinas di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 7.343.679.000,00	
55	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Kegiatan Keagamnaan & Hari-hari Besar Keagamaan**	8 Kegiatan	4.791.014.400	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Bina Mental Spiritual pada Badan/Organisasi/Lembaga Keagamaan yang ditindaklanjuti Persentase kegiatan hari - hari besar keagamaan yang diperingati yang ditindaklanjuti Persentase kegiatan bidang keagamaan yang dilaksanakan yang ditindaklanjuti	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 5.084.006.000,00	
56	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Lingkup Urusan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan**	7 Laporan	596.470.000	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Kesejahteraan Sosial urusan pemerintah	100 persen	Rp. 1.849.766.200,00	

			Yang Disusun			**Kesejahteraan Sosial**		bidang penanggulangan korban bencana dll yang ditindaklanjuti Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial pada Lembaga/Organisasi Masyarakat/Kelompok masyakat, individu atau keluarga	100 persen		
57	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,** **dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Ulama & Toko** **Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan**	60 Orang	1.875.862.810	**Pelaksanaan Kebijakan,** **Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Kesejahteraan Masyarakat urusan pemerintahan bidang pendidikan yang ditindaklanjuti Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat urusan Administrasi pemerintahan bidang kesehatan yang ditindaklanjuti Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat urusan Administrasi pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang ditindaklanjuti Persentase Fasilitasi dan Koordinasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 409.906.800,00	

								perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti Persentase Fasilitasi dan Koordinasi urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang ditindaklanjuti			
58	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Banjar**	**Persentase peraturan yang disahkan**	100 Persen	294.883.600	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Kab. Banjar	Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan Persentase Pengoreksian rancangan Produk Hukum Daerah Persentase penyelesaian bantuan hukum Persentase pengoreksian contract drafting	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 364.864.200,00	
59	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**	**Kab. Banjar**	**Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah**	1 Dokumen	96.733.600	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**	Kab. Banjar	Persentase pengoreksian rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan yang telah dilakukan koreksi legal drafting, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Persentase penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang telah dilakukan koreksi legal drafting, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Persentase Raperda	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 91.479.400,00	

								yang dilakukan fasilitasi pembulatan, pemantapan konsepsi dan pengharmonisasian dengan Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian pembentuk perundang-undangan Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang telah dilakukan fasilitasi atau Evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Persentase Program Pembentukan Peraturan Daerah pada setiap tahun sesuai dengan analisis kebutuhan perda dan skala prioritas Persentase Naskah Akademik/ Keterangan Penjelasan dari Pemrakarsa yang dilakukan penyelarasan. Persentase Penyusunan Bahan Pembicaraan Tingkat I pada setiap Raperda, yang terdiri dari : 1. Penyampaian/Penjelasan Bupati terhadap Raperda; 2. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD/Pendapat Bupati;	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen		

								Persentase Pembahasan Raperda dengan DPRD sesuai dengan Propemperda dan jadwal yang telah ditetapkan Persentase Penyusunan Bahan Pembicaraan Tingkat II pada setiap Raperda, yang terdiri dari : 1.Rapat tindak lanjut hasil fasilitasi atau evaluasi; 2. Pengambilan Keputusan			
60	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan asistensi kontrak drafting kesepakatan bersama atau perjanjian**	15 Laporan	127.671.300	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Kab. Banjar	Persentase penyusunan rancangan naskah perjanjian Persentase penyelesaian bantuan hukum yang tertangani Persentase Penyusunan Laporan Program Nasional terkait Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang terfasilitasi	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 209.271.200,00	
61	**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Dokumentasi Produk Hukum Daerah**	500 Dokumen	70.478.700	**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	Kab. Banjar	Persentase registrasi produk hukum daerah Persentase dokumentasi produk hukum daerah Persentase Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan melalui website Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 64.113.600,00	
62	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kab. Banjar**	**Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti**	100 Persen	25.558.800	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Kab. Banjar	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti	100 Persen	Rp. 25.558.800,00	

63	**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**	**Kab. Banjar**	**Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah**	100 Persen	25.558.800	**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**	Kab. Banjar	Persentase koordinasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	Rp. 25.558.800,00	
64	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kab. Banjar**		100 Persen	1.011.008.800	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100 Persen 40 Skor/Nilai	Rp. 1.480.065.100,00	
65	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kab. Banjar**	**Persentase BUMD yang sehat**	100 Persen	173.160.100	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi kebijakan ekonomi Persentase fasilitasi kebijakan BUMD & BLUD Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 447.221.500,00	
66	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**	**Kab. Banjar**	**Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi dan dievaluasi**	13 BUMND/BLUD	97.943.000	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**	Kab. Banjar	Persentase Kebijakan BUMD yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan BLUD yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen	Rp. 378.407.800,00	
67	**Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan TPID yang disusun**	4 Laporan	75.217.100	**Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	Kab. Banjar	Persentase Kebijakan Perindustrian yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Perdagangan yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Koperasi yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Usaha Mikro yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Pariwisata yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 68.813.700,00	
68	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kab. Banjar**	**Persentase Administrasi Pembangunan yang dibuat**	100 Persen	199.648.700	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Kab. Banjar	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	100 Persen	Rp. 196.130.000,00	

69	**Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Penyusunan Kegiatan Pembangunan**	1 laporan	23.219.300	**Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan**	Kab. Banjar	Persentase tersusunnya pendukung pembangunan dan kebijakan pembangunan	100 persen	Rp. 28.780.700,00	
70	**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan**	4 Laporan	32.694.400	**Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan**	Kab. Banjar	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan	100 persen	Rp. 30.937.900,00	
71	**Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan**	4 Laporan	143.735.000	**Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**	Kab. Banjar	Persentase permasalahan pembangunan yang terfasilitasi	100 persen	Rp. 136.411.400,00	
72	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kab. Banjar**	**Persentase paket Pengadaan barang dan Jasa yang tepat waktu**	92 Persen	582.361.600	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	20 Persen	Rp. 801.360.700,00	
73	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Kontrak yang sesuai Ketentuan**	4 Laporan	29.251.800	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Kab. Banjar	Persentase Laporan yang dibuat berdasarkan Laporan yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan persentase penyelesaian paket e-purchasing pada katalog elektronik persentase penyelesaian paket pengadaan langsung melalui SPSE persentase penyelesaian paket Tender/Seleksi melalui SPSE Persentase SOP yang dibuat berdasarkan SOP yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 129.242.000,00	
74	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Kab. Banjar**	**Jumlah SKPD yang menyampaikan dan mengumumkan RUP Tepat Waktu**	54 SKPD	495.348.200	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Kab. Banjar	Persentase Sistem Informasi yang dikelola berdasarkan Sistem Informasi yang harus tersedia sesuai dengan	100 persen 100 persen	Rp. 540.083.700,00	

								ketentuan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sesuai dengan anggaran SKPD Persentase Pemenuhan Std. LPSE berdasarkan Std. yang ditetapkan oleh LKPP	100 persen		
75	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan** **Barang dan Jasa**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pengelolaan PBJ yang** **mengikuti Peningkatan Kapasitas**	54 PBJ	57.761.600	**Pembinaan dan Advokasi** **Pengadaan Barang dan Jasa**	Kab. Banjar	Persentase Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas terhadap target jumlah pelaku pengadaan yg mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah variabel kematangan UKPBJ level proaktif	100 persen 3 variabel	Rp.132.035.000,00	
76	**Pemantauan Kebijakan Sumber** **Daya Alam**	**Kab. Banjar**	**Persentase kebijakan lingkup** **urusan perekonomian yang terlaksana**	100 Persen	55.838.400	**Pemantauan Kebijakan** **Sumber Daya Alam**	Kab. Banjar	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100 Persen	Rp. 35.352.900,00	
77	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan** **Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Laporan Kegiatan** **pemantauan kebijakan terkait sunber daya alam**	2 Laporan	22.099.400	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan** **Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**	Kab. Banjar	Persentasi Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti Persentasi KebijakanPerkebunan dan peternakan yang ditindaklanjuti Persentasi Kebijakan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti Persentasi KebijakanPerikanan yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 10.693.900,00	

								Persentasi KebijakanLingkungan Hidup yang ditindaklanjuti			
78	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**	**Kab. Banjar**	**Jumlah Pemantauan dan evaluasi energi dan air**	2 Laporan	33.739.000	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**	Kab. Banjar	perhitungan pemakaian listrik dan air dalam kriteria efisien	100 persen	Rp. 24.659.000,00	

Sumber data : 1. Rancangan Awal diambil dari lampiran dokumen rancangan RKPD
2.Data dari Inputan SIPD

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kab. Banjar tahun 2022 merupakan tahun pertama periode RPJMD tahun 2021-2026. RKPD disusun untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang sudah berjalan dan upaya menghadapi isu yang berkembang di daerah serta memperhatikan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Maka dipilih tema dan prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai berikut :

A. Tema Pembangunan

Tema RKP Kabupaten Banjar tahun 2022, sebagai berikut :

"PEMANTAPAN PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA PENGUATAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT"

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan tahun 2022 adalah

- Kesehatan, Pendidikan, dan Kewirausahaan
- Pertanian, Perikanan
- UMKM, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
- Banjir dan COVID

Selanjutnya indikator makro yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan menyelaraskan target indikator makro Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Indikator Makro Tahun 2022

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target Prov. Kalsel untuk Kab. Banjar	Target Nasional untuk Prov. Kalsel
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,91	4,3-4,7	2,50 – 3,00	4,0 - 4,5	5,4 – 6,0
Angka Pengangguran (%)	3,87	3,78	3,50 – 3,87	4,1 - 4,2	5,5 – 6,2
Angka Kemiskinan (%)	2,55	3,74	3,00 - 3,65		8,5 – 9,0
IPM	69,18	69,12	69,98 - 70,14	71,2 - 72,6	73,44 – 73,48
Indeks Gini		0,32	0,32	0,333	0,375-0380

Sumber Data : Pengolahan Tim RKPD dan Ranwal RKPD Prov. Kalsel dan Kickoff Ranwal RKP

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas Pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian

sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan disusun dengan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

   Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020 2024 sebagai penerjemahan

   Visi Misi dan Arahan Presiden sebagai berikut :

   a. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang berkualitas
   b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan
   c. Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
   d. Revolusi Mental dan Pemabngunan Kebudayaan
   e. Infrastruktur Untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   f. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
   g. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

      Tema Nasional yang disung pada RKP 2022 adalah : “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukstural”

      Tema tersebut dijabarkan melalui 7 Prioritas Nasional

      1). Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan *major project*
      2). Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan *major project*
      3). Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan *major project*
      4). Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan dengan *major project* Ekonomi dan Pelayanan dasar dengan *major project*
      5). Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Peubahan Iklim
      6). Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformai Pelayanan Publik

2. Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

   Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Ranwal RKPD Tahun 2022 adalah Memantapkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan.

   Tema tersebut dijabarkan melalui prioritas :

   1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata
   2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana
   3. Memperkuat sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
   4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
   5. Meningkatkan Kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia
   6. Kalsel sebagai Gerbang dari *FOOd Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

Arah kebijakan Kabupaten Banjar yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2022, antara lain :

1) Peningkatan keselarasan pengamalan agama, seni dan budaya;
2) Peningkatan kapasitas lembaga zakat;
3) Peningkatan transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
4) Fasilitasi dan koordinasi ketatalaksanaan dan pelayanan public;
5) Peningkatan sistem pelayanan perizinan (IKM Kecamatan);
6) Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijakan;
7) Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pelaksanaan kebijakan;
8) Peningkatan Kualitas BUMD;
9) Peningkatan koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah;
10) Penyusunan dokumen informasi perekonomian daerah;
11) Fasilitasi dan koordinasi lingkup perekonomian;
12) Peningkatan kerjasama antar daerah;
13) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan hari-hari besar nasional;
14) Peningkatan penyelesaian batas wilayah;
15) Peningkatan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah;
16) Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum;
17) Fasilitasi dan koordinasi HAM;
18) Asistensi *contract drafting*;
19) Peningkatan fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Upaya mengelaborasikan antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut

sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pelayanan publik dan daya saing di Kabupaten Banjar. Berikut akan dibahas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini.

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banjar yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan kepala daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Banjar adalah “Terselenggaranya Reformasi dalam perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja”. Sesuai dengan Misi ke 4 dan sasaran ke 3 pada dokumen RPJMD Kabupaten Banjar.

Sedangkan untuk sasaran pada Renja SKPD diambil dari pohon kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

III.3. Program dan Kegiatan

III.3.1. Rincian Program dan Kegiatan

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022.Jumlah Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar di tahun 2022 berjumlah 2 program 14 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk tahun 2022 yang merupakan sasaran pada RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 dengan rincian adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan:

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel

e). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g). Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h). Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i). Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat

Daerah i). j). Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Keprotokolan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas

Pimpinan k). Penataan Organisasi

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2) Program Perekonomian dan

Pembangunan Kegiatan :

a). Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2. Pengendalian dan Distribusi

Perekonomian b). Pemantauan Kebijakan

Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan, dan Perikanan
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

c).Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang

dan Jasa d). Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

III.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan, adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2021;
b) Pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
c) Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
d) Pencapaian fasilitasi dan administrasi penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

III.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022, antara lain meliputi :

1) Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah 3 (Tiga) program dengan total kegiatan sebanyak 19 kegiatan; serta sub kegiatan sebanyak 57 sub kegiatan. Sedangkan Jumlah Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar di tahun 2022 berjumlah 2 program 14 kegiatan dan 44 sub kegiatan.
2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah diluar wilayah dan dalam wilayah Kabupaten Banjar mencakup Kecamatan dan Kelurahan dan Sekretariat Daerah itu sendiri;
3) Total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk pelaksanaan 2 Program dan 14 Kegiatan serta 47 Sub Kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp. **Rp. 42.415.635.252,00.**Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3.1 yang berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 di bawah ini :

Tabel 3.3.1. di bawah ini berisi daftar usulan program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Tabel 3.3.1

Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
					SEKRETARIAT DAERAH				Rp. 42.415.635.252,00	APBD			Rp. 57.211.440.666
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 40.935.570.152	APBD		100 persen	Rp. 42.375.621.036
						Nilai SAKIP	Kab.Banjar	70 Nilai				70 Nilai	
						Nilai IKM Kab. Banjar	Kab.Banjar	84 Nilai				84 Nilai	
						Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	80 Nilai				85 Nilai	
4	1	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Kab.Banjar	81,5 Nilai	Rp. 269.143.900	APBD		81,75 Nilai	Rp. 316.332.640
						Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efesien	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	

						akuntabel							
						Persentase Bagian yang berkinerja baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4	1	1	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 152.967.200	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 193.832.640
4	1	1	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 81.651.700	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 91.500.000
4	1	1	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Bagian yang menyampaikan laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase keterisian data dukung evaluasi	Kab.Banjar	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 34.525.000	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 31.000.000

						Persentase keterisian data dukung IKKI							
4	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjar	100%	Rp. 16.929.346.662	APBD		100 persen	Rp. 17.960.550.000
4	1	1	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 16.776.802.662	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 17.850.000.000
4	1	1	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Konsultasi mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 152.544.000	APBD		100 persen	Rp. 110.550.000
4	1	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 317.972.000	APBD		100 persen	RP. 453.266.000
						Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan		100 persen				100 persen	
4	1	1	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase telaksananya sosialiasi produk hukum daerah	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 17.972.000	APBD		100 persen	Rp. 103.266.000
4	1	1	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	Persentase Fasilitasi Bimbingan Teknis yang terlaksana	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 300.000.000	APBD		100 persen	Rp. 350.000.000

					Peraturan Perundang-Undangan								
4	1	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.023.564.334	APBD		100 persen	Rp. 4.606.047.860
4	1	1	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 33.942.000	APBD		100 persen	Rp. 41.069.820
4	1	1	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terealisasi	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 715.800.600	APBD		100 persen	Rp. 539.568.040
4	1	1	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Penyedian Kunjungan Tamu yang terlaksana	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 21.000.000	APBD		100 persen	Rp. 25.410.000
4	1	1	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.252.821.734	APBD		100 persen	Rp. 4.000.000.000
4	1	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.432.683.000	APBD		100 persen	Rp. 1. 295.235.765
4	1	1	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 701.150.000	APBD		100 persen	Rp. 1.000.000.000

4	1	1	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 326.931.000	APBD		100 persen	Rp. 295.235.765
4	1	1	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.404.602.000	APBD		100 persen	Rp. 3.000.000.000
4	1	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.382.716.400	APBD		100 persen	Rp. 5.850.297.088
4	1	1	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 43.040.000	APBD		100 persen	Rp. 75.000.000
						Persentase pelayanan administrasi surat menyurat yang terlaksana sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4	1	1	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 1.107.126.500	APBD		100 persen	Rp. 1.433.656.400
4	1	1	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 207.250.000	APBD		100 persen	Rp. 275.849.750

						sesuai ketentuan							
4	1	1	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.025.299.900	APBD		100 persen	Rp. 4.065.790.938
4	1	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.491.112.000	APBD		100 persen	Rp. 3.871.907.700
4	1	1	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 848.930.000	APBD		100 persen	Rp. 934.362.000
4	1	1	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 996.400.000	APBD		100 persen	Rp. 1.937.270.500
4	1	1	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 40.000.000	APBD		100 persen	Rp. 60.500.000
4	1	1	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 878.662.000	APBD		100 persen	Rp. 127.050.000

4	1	1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 410.000.000	APBD		100 persen	Rp. 429.550.000
4	1	1	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 317.120.000	APBD		100 persen	Rp. 383.175.200
4	1	1	2.11.1		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 983.949.556	APBD		100 persen	Rp. 1.027.367.000
						Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4	1	1	2.11.1	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran dan Penatausahaan Penyediaan Gaji KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 170.474.556	APBD		100 persen	Rp. 206.300.000

4	1	1	2. 1 1	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 108.475.000	APBD		100 persen	Rp. 112.167.000
4	1	1	2. 1 1	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 105.000.000	APBD		100 persen	Rp. 108.900.000
4	1	1	2. 1 1	04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 600.000.000	APBD		100 persen	Rp. 600.000.000
4	1	1	2. 1 2		Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 1.918.104.300	APBD		100 persen	Rp. 3.454.167.156
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan		100 persen				100 persen	
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan		100 persen				100 persen	
4	1	1	2. 1 2	01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 658.722.000	APBD		100 persen	Rp. 732.056.292

4	1	1	2.12	02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 351.438.000	APBD		100 persen	Rp. 437.228.176
4	1	1	2.12	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 907.944.300	APBD		100 Persen	Rp. 2.284.882.688
4	1	1	2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	Kab.Banjar	1,3 Skor/Nilai	Rp. 5.190.216.900	APBD		1,3 Skor/Nilai	Rp. 970.000.000
						Persentase pengelolaan tatalaksana	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase PD SAKIP bernilai Baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4	1	1	2.13	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kebijakan bidang kelembagaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Persentase Kebijakan tentang Penataan SDM aparatur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Persentase PD Kabupaten	Kab.Banjar Kab.Banjar Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 142.020.100	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 350.000.000

						yang tepat fungsi dan ukuran							
4	1	1	2.13	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase kebijakan bidang tatalaksana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Persentase PD yang melaksanakan tata laksana sesuai dengan ketentuan. Persentase PD yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Proses Bisnis dan SOP Persentasi PD yang melakukan inovasi	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 185.670.400	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 345.000.000
4	1	1	2.13	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase PD menyampaikan dokumen PK sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja instansi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja triwulanan tepat waktu Persentase PD yang menyampaikan laporan pengelolaan RB unit/PD tepat waktu dan sesuai ketentuan.	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 869.004.200	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 275.000.000

						Persentase pengisian PMPRB unit/PD sesuai ketentuan dan tepat waktu							
4	1	1	2. 1 4		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.996.761.100	APBD		100 Persen	Rp. 2.570.449.827
						Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4	1	1	2. 1 4	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi dan pengoordinasiaan acara yang dihadiri Pimpinan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.529.863.000	APBD		100 Persen	Rp. 1.869.518.970
						Persentase fasilitasi dan pengoordinasiaan pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar		100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen 100 Persen 100 Persen	
						Persentase fasilitasi kunjungan kerja							

						Pimpinan di dalam dan luar daerah Persentase fasilitasi penerimaan dan pengaturan kunjungan tamu daerah atau dinas							
4	1	1	2. 1 4	03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan Persentase publikasi kegiatan Pimpinan dan Sekretariat Daerah melalui website dan media sosial Sekretariat Daerah	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen	Rp. 244.554.000	APBD		100 Persen 100 Persen	Rp. 299.906.849
4	1	1	2. 1 4	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase penyiapan bahan sambutan/materi/ pointer Pimpinan Persentase penyiapan ucapan selamat/duka, dan cindera mata	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen	Rp. 222.344.100	APBD		100 Persen 100 Persen	Rp. 401.024.008
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.480.065.100	APBD		100 persen	Rp. 2.708.578.440
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kab.Banjar	40 skor/nilai				50 skor/nilai	
4	1	3	2. 0 1		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase fasilitasi kebijakan ekonomi	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 447.221.500	APBD		100 persen	Rp. 575.000.000
						Persentase fasilitasi kebijakan BUMD & BLUD	Kab.Banjar	100 Persen				100 persen	
						Persentase fasilitasi kebijakan SDA	Kab.Banjar	100 Persen				100 persen	

4	1	3	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan BLUD yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan BUMD yang ditindak lanjuti	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen	Rp. 378.407.800	APBD		100 Persen 100 Persen	Rp. 400.000.000
4	1	3	2.01	02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Kebijakan Koperasi yang ditindak lanjuti Persentase Kebijakan Pariwisata yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Perdagangan yang ditindak lanjuti Persentase Kebijakan Perindustrian yang ditindak lanjuti Persentase Kebijakan Usaha Mikro yang ditindak lanjuti	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 68.813.700	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 175.000.000
4	1	3	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Pembangunan daerah	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 196.130.000	APBD		100 persen	Rp. 563.578.440
4	1	3	2.02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase tersusunnya pendukung pembangunan dan kebijakan pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 28.780.700	APBD		100 Persen	Rp. 275.578.440
4	1	3	2.02	02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 30.937.900,00	APBD		100 Persen	Rp. 78.000.000

4	1	3	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase permasalahan pembangunan yang terfasilitasi	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 136.411.400	APBD		100 Persen	Rp. 210.000.000
4	1	3	2.03		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Kab.Banjar	20 persen	Rp. 801.360.700	APBD		40 persen	Rp. 1.500.000.000
4	1	3	2.03	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan yang dibuat berdasarkan Laporan yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 129.242.000	APBD		100 Persen	Rp. 250.000.000
						persentase penyelesaian paket e-purchasing pada katalog elektronik	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						persentase penyelesaian paket pengadaan langsung melalui SPSE	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						persentase penyelesaian paket Tender/Seleksi melalui SPSE	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase SOP yang dibuat berdasarkan SOP yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4	1	3	2.0	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan	Persentase Sistem Informasi yang dikelola	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 540.083.700	APBD		100 Persen	Rp. 850.000.000

			3		Pengadaan secara Elektronik	berdasarkan Sistem Informasi yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan							
						persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sesuai dengan anggaran SKPD	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Pemenuhan Std. LPSE berdasarkan Std. yang ditetapkan oleh LKPP	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4	1	3	2.03	03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah variabel kematangan UKPBJ level proaktif	Kab.Banjar	3 Variabel	Rp. 132.035.000	APBD		4 Variabel	Rp. 400.000.000
						Persentase Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas terhadap target jumlah pelaku pengadaan yg mengikuti peningkatan kapasitas	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4	1	3	2.04		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 35.352.900	APBD		100 Persen	Rp. 70.000.000
4	1	3	2.04	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan, dan Perikanan	Persentasi Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 10.693.900	APBD		100 Persen	Rp. 30.000.000

						Persentasi Kebijakan Perkebunan dan peternakan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	n 100 Perse				100 Persen	
						Persentasi Kebijakan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	n 100 Perse				100 Persen	
						Persentasi Kebijakan Perikanan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	n 100 Perse				100 Persen	
						Persentasi Kebijakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	n 100 Perse				100 Persen	
4	1	3	2.04	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	perhitungan pemakaian listrik dan air dalam kriteria efisien	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 24.659.000	APBD		100 Persen	Rp. 40.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah di tahun 2022 adalah sebanyak 3 program 19 kegiatan 57 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan serta sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.454.965.252. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
					SEKRETARIAT DAERAH				Rp. 50.776.003.252,00	APBD			Rp. 57.211.440.666
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 40.935.570.152,00	APBD		100 Persen	Rp. 42.375.621.036
						Nilai SAKIP	Kab.Banjar	70 Nilai				72,5 Nilai	
						Nilai IKM Kab. Banjar	Kab.Banjar	84 Nilai				85 Nilai	
						Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	80 Nilai				85 Nilai	
4	1	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Kab.Banjar	81,5 Nilai	Rp. 269.143.900,00	APBD		81,75 Nilai	Rp. 316.332.640
						Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efesien	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	

						Persentase Bagian yang berkinerja baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	80 Indeks/Nilai				80 Indeks/Nilai	
4	1	1	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 152.967.200,00	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 193.832.640
4	1	1	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 81.651.700	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 91.500.000
4	1	1	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Bagian yang menyampaikan laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase keterisian data dukung evaluasi Persentase keterisian data dukung IKKI	Kab.Banjar	100 persen 100 persen 100 persen	Rp. 34.525.000	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 31.000.000
4	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 16.929.346.662	APBD		100 persen	Rp. 17.960.550.000

						keuangan yang tertib administrasi							
4	1	1	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 16.776.802.662	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 17.850.000.000
4	1	1	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Konsultasi mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen 100 persen	Rp. 152.544.000	APBD		100 persen 100 persen	Rp. 110.550.000
4	1	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 317.972.000	APBD		100 persen	RP. 453.266.000
						Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan		100 persen				100 persen	
4	1	1	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase telaksananya sosialiasi produk hukum daerah	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 17.972.000	APBD		100 persen	Rp. 103.266.000
4	1	1	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Bimbingan Teknis yang terlaksana	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 300.000.000	APBD		100 persen	Rp. 350.000.000
4	1	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.023.564.334	APBD		100 persen	Rp. 4.606.047.860
4	1	1	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 33.942.000	APBD		100 persen	Rp. 41.069.820

					Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana							
4	1	1	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terealisasi	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 715.800.600	APBD		100 persen	Rp. 539.568.040
4	1	1	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Penyedian Kunjungan Tamu yang terlaksana	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 21.000.000	APBD		100 persen	Rp. 25.410.000
4	1	1	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.252.821.734	APBD		100 persen	Rp. 4.000.000.000
4	1	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.432.683.000	APBD		100 persen	Rp. 1. 295.235.765
4	1	1	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 701.150.000	APBD		100 persen	Rp. 1.000.000.000
4	1	1	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 277.156.000	APBD		100 persen	Rp. 295.235.765
4	1	1	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Persentase pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.404.602.000	APBD		100 persen	Rp. 3.000.000.000
4	1	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.382.716.400	APBD		100 persen	Rp. 5.850.297.088

						Daerah yang sesuai ketentuan							
4	1	1	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 43.040.000	APBD		100 persen	Rp. 75.000.000
						Persentase pelayanan administrasi surat menyurat yang terlaksana sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4	1	1	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 1.107.126.500	APBD		100 persen	Rp. 1.433.656.400
4	1	1	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 207.250.000	APBD		100 persen	Rp. 275.849.750
4	1	1	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.025.299.900	APBD		100 persen	Rp. 4.065.790.938
4	1	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.491.112.000	APBD		100 persen	Rp. 3.871.907.700
4	1	1	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 848.930.000	APBD		100 persen	Rp. 934.362.000

4	1	1	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 996.400.000	APBD		100 persen	Rp. 1.937.270.500
4	1	1	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 40.000.0000	APBD		100 persen	Rp. 60.500.000
4	1	1	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 878.662.000	APBD		100 persen	Rp. 127.050.000
4	1	1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 410.000.000	APBD		100 persen	Rp. 429.550.000
4	1	1	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 317.120.000	APBD		100 persen	Rp. 383.175.200
4	1	1	2.11		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 983.949.556	APBD		100 persen	Rp. 1.027.367.000
						Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	

						Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4	1	1	2.11	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran dan Penatausahaan Penyediaan Gaji KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 170.474.556	APBD		100 persen	Rp. 206.300.000
4	1	1	2.11	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 108.475.000	APBD		100 persen	Rp. 112.167.000
4	1	1	2.11	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 105.000.000	APBD		100 persen	Rp. 108.900.000
4	1	1	2.11	04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 600.000.000	APBD		100 persen	Rp. 600.000.000
4	1	1	2.12		Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 1.918.104.300	APBD		100 persen	Rp. 3.454.167.156
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen		APBD		100 persen	

						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen		APBD		100 persen	
4	1	1	2.12	01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 658.722.000	APBD		100 persen	Rp. 732.056.292
4	1	1	2.12	02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 351.438.000	APBD		100 persen	Rp. 437.228.176
4	1	1	2.12	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 907.944.300	APBD		100 Persen	Rp. 2.284.882.688
4	1	1	2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	Kab.Banjar	1,3 Skor/Nilai	Rp. 5.190.216.900	APBD		1,3 Skor/Nilai	Rp. 970.000.000
						Persentase pengelolaan tatalaksana	Kab.Banjar	100 Persen		APBD		100 Persen	
						Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	Kab.Banjar	100 Persen		APBD		100 Persen	
						Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	Kab.Banjar	100 Persen		APBD		100 Persen	
						Persentase PD SAKIP bernilai Baik	Kab.Banjar	100 Persen		APBD		100 Persen	
4	1	1	2.13	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kebijakan bidang kelembagaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 142.020.100	APBD		100 Persen	Rp. 350.000.000

						Persentase Kebijakan tentang Penataan SDM aparatur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Persentase PD Kabupaten yang tepat fungsi dan ukuran	Kab.Banjar Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen				100 Persen 100 Persen	
4	1	1	2.13	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase kebijakan bidang tatalaksana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Persentase PD yang melaksanakan tata laksana sesuai dengan ketentuan. Persentase PD yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Proses Bisnis dan SOP Persentasi PD yang melakukan inovasi	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 185.670.400	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 345.000.000
4	1	1	2.13	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase PD menyampaikan dokumen PK sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja instansi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase PD yang menyampaikan laporan kinerja triwulanan tepat waktu	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 869.004.200	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 275.000.000

							Persentase PD yang menyampaikan laporan pengelolaan RB unit/PD tepat waktu dan sesuai ketentuan. Persentase pengisian PMPRB unit/PD sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 Persen				100 Persen	
4		1	1	2.14		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.996.761.100	APBD		100 Persen	Rp. 2.570.449.827
							Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
							Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
							Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		1	1	2.14	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi dan pengoordinasiaan acara yang dihadiri Pimpinan Persentase fasilitasi dan pengoordinasiaan pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 1.529.863.000	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 1.869.518.970

						lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Persentase fasilitasi kunjungan kerja Pimpinan di dalam dan luar daerah Persentase fasilitasi penerimaan dan pengaturan kunjungan tamu daerah atau dinas		100 Persen				100 Persen	
4	1	1	2.14	03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan Persentase publikasi kegiatan Pimpinan dan Sekretariat Daerah melalui website dan media sosial Sekretariat Daerah	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen	Rp. 244.554.000	APBD		100 Persen	Rp. 299.906.849
4	1	1	2.14	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase penyiapan bahan sambutan/materi/pointer Pimpinan Persentase penyiapan ucapan selamat/duka, dan cindera mata	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen	Rp. 222.344.100	APBD		100 Persen 100 Persen	Rp. 401.024.008
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 8.360.368.000	APBD		100 Persen	Rp. 12.127.241.190
						Nilai LPPD	Kab.Banjar	3,1 Nilai				3,125 Nilai	

4	1	2	2.01		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 626.266.000	APBD		100 Persen	Rp. 688.731.310
						Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		2	2.01	01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan bidang trantibumlinmas	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 53.080.500	APBD		100 Persen	Rp. 60.130.950
						Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan bidang dukcapil	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan bidang kesbangpol	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4	1	2	2.01	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 391.796.500	APBD		100 Persen	Rp. 415.713.650
						Persentase Fasilitasi dan koordinasi kesepakatan batas desa berbeda kecamatan dan batas kelurahan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase identifikasi Topinimi / nama rupabumi yang telah di update	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	

						Persentase Pemetaan Batas Wilayah	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		2	2.01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan bahan penyusunan LPPD, EPPD, SPM dan LKPJ yang sesuai dengan ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 181.389.000	APBD		100 Persen	Rp. 212.886.710
4		2	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi dan koordinas di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 7.343.679.000	APBD		100 Persen	Rp. 9.280.985.000
						Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		2	2.02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Bina Mental Spiritual pada Badan/Organisasi/Lembaga Keagamaan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 5.084.006.000	APBD		100 Persen	Rp. 5.830.000.000
						Persentase kegiatan hari - hari besar keagamaan yang diperingati yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase kegiatan bidang keagamaan yang dilaksanakan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	

4		2	2.02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Kesejahteraan Sosial urusan pemerintah bidang penanggulangan korban bencana dll yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.849.766.200	APBD		100 Persen	Rp. 1.150.985.000
						Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial pada Lembaga/Organisasi Masyarakat/Kelompok masyakat, individu atau keluarga yang ditindak lanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		2	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Kesejahteraan Masyarakat urusan pemerintahan bidang pendidikan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 409.906.800	APBD		100 Persen	Rp. 2.300.000.000
						Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat urusan Administrasi pemerintahan bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat urusan Administrasi pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Fasilitasi dan Koordinasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	

						penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti							
						Persentase Fasilitasi dan Koordinasi urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		2	2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 364.864.200	APBD		100 Persen	Rp. 2.129.410.200
						Persentase Pengoreksian rancangan Produk Hukum Daerah	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase penyelesaian bantuan hukum	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase pengoreksian contract drafting	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		2	2.03	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase pengoreksian rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan yang telah dilakukan koreksi legal drafting, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 91.479.400	APBD		100 Persen	Rp. 454.181.400
						Persentase penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang telah dilakukan koreksi legal drafting,	Kab.Banjar	100 persen				100 Persen	

						sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
						Persentase Raperda yang dilakukan fasilitasi pembulatan, pemantapan konsepsi dan pengharmonisasian dengan Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian pembentuk perundang-undangan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang telah dilakukan fasilitasi atau Evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Program Pembentukan Peraturan Daerah pada setiap tahun sesuai dengan analisis kebutuhan perda dan skala prioritas	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Naskah Akademik/ Keterangan Penjelasan dari Pemrakarsa yang dilakukan penyelarasan.	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Penyusunan Bahan Pembicaraan Tingkat I pada setiap Raperda, yang terdiri dari : 1. Penyampaian/Penjelasan Bupati terhadap Raperda; 2. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	

						Fraksi DPRD/Pendapat Bupati;							
						Persentase Pembahasan Raperda dengan DPRD sesuai dengan Propemperda dan jadwal yang telah ditetapkan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Penyusunan Bahan Pembicaraan Tingkat II pada setiap Raperda, yang terdiri dari : 1.Rapat tindak lanjut hasil fasilitasi atau evaluasi; 2. Pengambilan Keputusan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		2	2.03	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penyusunan rancangan naskah perjanjian	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 209.271.200	APBD		100 Persen	Rp. 1.055.000.000
						Persentase penyelesaian bantuan hukum yang tertangani	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Penyusunan Laporan Program Nasional terkait Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang terfasilitasi	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4	1	2	2.03	03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase dokumentasi produk hukum daerah	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 64.113.600	APBD		100 Persen	Rp. 620.228.800
						Persentase Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dipublikasikan melalui website	Kab.Banjar	100 Persen		APBD		100 Persen	

						Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)							
						Persentase registrasi produk hukum daerah	Kab.Banjar	100 Persen		APBD		100 Persen	
4	1	2	2.04		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 25.558.800	APBD		100 Persen	Rp. 28.114.680
4	1	2	2.04	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase koordinasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 25.558.800	APBD		100 Persen	Rp. 28.114.680
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.480.065.100	APBD		100 Persen	Rp. 2.708.578.440
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kab.Banjar	40 skor/nilai				50 skor/nilai	
4	1	3	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase fasilitasi kebijakan ekonomi	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 447.221.500	APBD		100 Persen	Rp. 575.000.000
						Persentase fasilitasi kebijakan BUMD & BLUD	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase fasilitasi kebijakan SDA	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4	1	3	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan BLUD yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan BUMD yang ditindak lanjuti	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen	Rp. 378.407.800	APBD		100 Persen 100 Persen	Rp. 400.000.000
4	1	3	2.01	02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Kebijakan Koperasi yang ditindak lanjuti Persentase Kebijakan	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen	Rp. 68.813.700	APBD		100 Persen 100 Persen	Rp. 175.000.000

						Pariwisata yang ditindaklanjuti Persentase Kebijakan Perdagangan yang ditindak lanjuti Persentase Kebijakan Perindustrian yang ditindak lanjuti Persentase Kebijakan Usaha Mikro yang ditindak lanjuti		100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen 100 Persen 100 Persen	
4	1	3	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Pembangunan daerah	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 196.130.000	APBD		100 Persen	Rp. 563.578.440
4	1	3	2.02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase tersusunnya pendukung pembangunan dan kebijakan pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 28.780.700	APBD		100 Persen	Rp. 275.578.440
4	1	3	2.02	02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 30.937.900,00	APBD		100 Persen	Rp. 78.000.000
4	1	3	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase permasalahan pembangunan yang terfasilitasi	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 136.411.400	APBD		100 Persen	Rp. 210.000.000
4	1	3	2.03		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Kab.Banjar	20 persen	Rp. 801.360.700	APBD		40 Persen	Rp. 1.500.000.000
4	1	3	2.03	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan yang dibuat berdasarkan Laporan yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 129.242.000	APBD		100 Persen	Rp. 250.000.000

						persentase penyelesaian paket e-purchasing pada katalog elektronik	Kab.Banjar	100 Persen			100 Persen	
						persentase penyelesaian paket pengadaan langsung melalui SPSE	Kab.Banjar	100 Persen			100 Persen	
						persentase penyelesaian paket Tender/Seleksi melalui SPSE	Kab.Banjar	100 Persen			100 Persen	
						Persentase SOP yang dibuat berdasarkan SOP yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen			100 Persen	
4	1	3	2.03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Sistem Informasi yang dikelola berdasarkan Sistem Informasi yang harus tersedia sesuai dengan ketentuan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 540.083.700	APBD	100 Persen	Rp. 850.000.000
						persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sesuai dengan anggaran SKPD	Kab.Banjar	100 Persen			100 Persen	
						Persentase Pemenuhan Std. LPSE berdasarkan Std. yang ditetapkan oleh LKPP	Kab.Banjar	100 Persen			100 Persen	
4	1	3	2.03	03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah variabel kematangan UKPBJ level proaktif	Kab.Banjar	3 Variabel	Rp. 132.035.000	APBD	4 Variabel	Rp. 400.000.000
						Persentase Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan	Kab.Banjar	100 persen			100 persen	

						kapasitas terhadap target jumlah pelaku pengadaan yg mengikuti peningkatan kapasitas							
4	1	3	2.04		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 35.352.900	APBD		100 persen	Rp. 70.000.000
4	1	3	2.04	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan, dan Perikanan	Persentasi Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 10.693.900	APBD		100 Persen	Rp. 30.000.000
						Persentasi Kebijakan Perkebunan dan peternakan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentasi Kebijakan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentasi Kebijakan Perikanan yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentasi Kebijakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4	1	3	2.04	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	perhitungan pemakaian listrik dan air dalam kriteria efisien	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 24.659.000	APBD		100 Persen	Rp. 40.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Renja Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga terjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
2) Dalam hal rencana kerja tahun 2022 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegaiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Tahun 2022.

Diharapkan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Renja 2022 yang disusun ini juga diharapkan dapat menutup dengan capaian kinerja yang memuaskan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

35. Kecamatan Aluh - Aluh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Aluh - Aluh untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Aluh - Aluh guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Aluh - Aluh sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Aluh - Aluh merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Aluh - Aluh untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Aluh - Aluh 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Aluh - Aluh serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Aluh - Aluh mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Aluh - Aluh, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Aluh - Aluh berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Aluh - Aluh berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Aluh - Aluh dan rancangan awal.
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Aluh - Aluh dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Aluh - Aluh berdasarkan Perkada RKPD awal.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021)
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Aluh - Aluh di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022 ini adalah:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Aluh - Aluh dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
3. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

3.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Aluh - Aluh Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Aluh - Aluh

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Aluh - Aluh).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Aluh - Aluh

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ALUH - ALUH TAHUN LALU

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dan 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari kegiatan:

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Aluh - Aluh tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 456.132.210 (93,14%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 489.730.388,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Nilai SAKIP Kecamatan Aluh - Aluh realisasi untuk tahun 2020 adalah 51,67 (68,89%) masih belum memenuhi target tahun 2020 yaitu 75.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   - Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan dengan indicator :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh - Aluh. Realisasi indicator Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,8 (103,37%) melebihi dari target sebesar 83.
   - Kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan dengan target kinerja 44 laporan terealisasi 49 Jenis Laporan (108,89%).
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan target kinerja 2 jenis laporan dan terealisasi kinerja dengan 5 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 250%
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dengan target kinerja 5 Jenis laporan dan terealisasi kinerja dengan 7 jenis laporan memperoleh capaian kinerja 140%.
   - Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 3 memperoleh capaian realisasi kinerja 7 jenis laporan sebesar 233,33%.

- Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kecamatan dengan target kinerja 5 jenis laporan terealisasi kinerja 7 jenis laporan dengan capaian kinerja sebesar 140%.

3. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :

   - Tidak ada program yang memenuhi target yang telah direncanakan

4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan

   Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja:

   - Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Aluh - Aluh, yaitu:

   - Dengan tidak tercapainya taeget untuk indicator program Nilai sakip Kecamatan dan indicator pada beberapa kegiatan maka secara tidak berimplikasi negative terhadap capaian Renstra Kecamatan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:

   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait pentinganya bekerja dengan dengan berbasis kinerja yang tepat untuk semua karyawan dilingkup Kecamatan Aluh - Aluh.
   - Meningkatkan inovasi dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Aluh - Aluh tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Aluh - Aluh pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Aluh - Aluh melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Dengan terjadi nya perubahan pagu anggaran untuk kecamatan Aluh - Aluh, setelah perubahan Kecamatan Aluh - Aluh tetap melaksanakan 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan total pagu dana perubahan sebesar Rp. **1,740,162,260** (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) dari hasil evaluasi yang dilakukan Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2021 yaitu:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan :
   - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dengan indikator Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan yang disusun dengan target pagu anggaran Rp. 1.453.847.454 dan terealisasi Rp. 496.916.857 atau 34,17%.
   - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dengan target 1 laporan dan belum ada terealisasi

2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :
   - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Laporan penyelenggaraan Kegiatan kepemerintahan Kecamatan dengan target 6 laporan dan terelisasi 6 laporan dengan pagu anggaran Rp. 38.599.700 dan realisasi 1.350.000 atau 3,49%.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator laporan kesekretariatan kecamatan dengan target 23 Laporan dan terealisasi 23 Laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 191.977.326 dan realisasi Rp. 76,597.936 atau 39,89%.
   - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Laporan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 13.986.400 dan realisasi Rp. 3.090.000 atau 22,09%.
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Laporan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 17.018.900 dan realisasi Rp. 2.428.637 atau 14,27%.

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target sampai triwulan II

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.
- Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan.
- Kurangnya SDM yang mumpuni dalam mengampu program/kegiatan.
- Masih adanya pejabat pemangku kebijakan yang kosong
- Kurangya penguasaan IT di kantor kecamatan sehingga pelaporan sedikit terhambat

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
- Ada beberapa keluaran kegiatan yang dilaksanakan sampai triwulan II sudah mencapai 100%

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Aluh - Aluh, yaitu :

- Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ penggunan layanan di Kecamatan
- Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
- Dengan terhambat dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks

kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Walau dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Aluh - Aluh tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Aluh - Aluh tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Aluh - Aluh tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Aluh - Aluh sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/ 4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh - Aluh	95	74.55	83	85.8	**103.37**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Aluh - Aluh	75	55.27	75	51.67	**68.89**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**			
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	44	10	10	17	**170.00**			
						Barang Milik Daerah	12	4	4	4	**100.00**			

						Penatausahaan Kantor	26	12	12	8	**66.67**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	0	**0.00**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	19	2	2	5	**250.00**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	18	5	5	7	**140.00**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	3	3	7	**233.33**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	18	5	5	7	**140.00**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Beruntung Baru sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				88	50	50
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100					100	50	50
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN & Tambahan Penghasilan	154					88	88	**57.14**

7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	95	74.55	83	85.8	**103.37**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	19	2	2	5	**250.00**	6	13	**68.42**
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	95	74.55	86	85.8	**99.77**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**	4	20	**83.33**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	44	10	10	17	**170.00**	13	40	**90.91**
						Barang Milik Daerah	12	4	4	4	**100.00**	0	8	**66.67**
						Penatausahaan Kantor	26	12	12	8	**66.67**	0	20	**76.92**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	0	**0.00**	0	1	**33.33**

			2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	95	74.55	83	85.8	**103.37**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	18	5	5	7	**140.00**	4	16	**88.89**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	95	74.55	83	85.8	**103.37**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	18	5	5	7	**140.00**	4	16	**88.89**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	95	74.55	83	85.8	**103.37**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	3	3	7	**233.33**	0	10	**125.00**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Aluh - Aluh	95	74.55	83	85.8	**103.37**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya apel HUT RI di Kecamatan Aluh - Aluh	1	0	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**

Sumber Data:

- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Aluh - Aluh Tahun 2020 dan 2021
- Laporan evaluasi RKPD Triwulan II Kab.Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Aluh - Aluh sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II rata-rata sudah berada di atas 50 persen untuk semua maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai. Adapun untuk capaian program kegiatan yang belum terlaksana karena menyesuaikan dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan ditriwulan selanjutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Aluh - Aluh

Dari sasaran yang telah ditetapkan secara garis besar capaian target kinerja sesuai dengan harapan dan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan secara keseluruhan.

Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan dan indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Aluh - Aluh. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan. Adapun tingkat capaian sasaran di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2020	2021	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh - Aluh			81,5	83	95	-	74,55	85,80			

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh - Aluh dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 85,80. Realisasi kinerja melebihi target kinerja sebesar 83 dengan capaian kinerja 103,37%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Aluh - Aluh memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Aluh - Aluh dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.
- Adanya perbaikan system manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Aluh - Aluh adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.
- Dukungan Anggaran sudah lumayan meningkat.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.
- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Tersedianya system perencanaan dan evaluasi pembangunan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Aluh - Aluh akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Aluh - Aluh itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Aluh - Aluh sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah
- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kerja.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Koordinasi internal dan eksternal
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan
- Membangun kemitraan kerjasama dengan steakholder

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Aluh - Aluh

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Perangkat Daerah: Aluh - Aluh

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**512,778,100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Perangkat Daerah yang tersusun 100%**	**1,975,427,841**	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPDBeda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**100 Persen**	**3,400,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD**	**4 Dokumen**	**3,400,000**	Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	270,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	270,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	375,000	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	375,000	Beda Indikator: Indikator

	Dokumen RKA-SKPD		Perangkat Daerah			Dokumen RKA-SKPD					yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	75,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	75,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	450,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	450,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	750,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	750,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	730,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	730,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaika

											n kebutuhan SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**194,510,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD**	**4 Orang**	**1,749,956,741**	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Pagu: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	10 orang	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1,555,446,741	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	13 Bulan	165,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Honorarium pegawai tidak tetap / kontak	9 Orang	165,500,000	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	28,200,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		terbayarnya honorarium penatausahaan/ verifikasi keuangan SKPDsi	4 Orang	28,200,000	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	810,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	810,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penata Usahaan BarangMilik Daerah pada SKPD**	**1 Orang**	**9,600,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1 Orang**	**9,600,000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusunJumlah Rekonsiliasi barang milik daearah pada SKPD yang terlaksana	1 Laporan4 Laporan	600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun; Jumlah Rekonsiliasi barang milik daearah pada SKPD yang terlaksana	1 Laporan 4 Laporan	600,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Monitoring Evaluasi danPenilaian KinerjaPegawai**	**75 Nilai**	**20,700,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**75 Nilai**	**20,700,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja yang tersusun	1 Laporan	700,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja yang tersusun	1 Laporan	700,000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang paham tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan perundang undangan yang terlaksana	2 orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		umlah ASN yang paham tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan perundang undangan yang terlaksana	2 Orang	20,000,000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**12 Bulan**	**120,451,900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**12 Bulan**	**58,879,300**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,316,900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,463,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	13,994,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	13,994,000	Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	7 Jenis	1,825,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	1,825,800	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya Bahan logistik Kantor	22 Jenis	7,968,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan logistik Kantor	22 Jenis	7,950,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	2,846,300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Pengadaan	3 Jenis	1,846,300	Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang

											ada lebih terukur
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	92,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	31,800,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pengadaan Mebel**	**1 Jenis**	**45,149,200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pengadaan Mebel**	**1 Jenis**	**19,424,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	1 unit	40,000,000						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang di beli	1 Jenis	3,259,800	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang di beli	1 Jenis	3,259,800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	...Unit	1,889,400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya yang dibeli	1 Jenis	16,165,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik**	**12 Bulan**	**21,072,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik**	**12 Bulan**	**21,072,000**	

	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya jasa surat menyurat SKPD	12 Bulan	2,700,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat SKPD	12 Bulan	2,700,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	18,372,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air bersih dan Internet	12 Bulan	18,372,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**4 jenis70 Nilai**	**97,895,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**4 Jenis** **70 Nilai**	**92,395,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	79,975,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	6 Unit	79,975,000	Beda Target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin yang terpelihara	4 jenis	5,920,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		umlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin yang terpelihara	4 Jenis	5,920,000	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 Buah	6,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Nilai IKM Kecamatan 100%**	**10,620,800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Nilai IKM**	**65,669,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	PELAYANAN PUBLIK	**Kelurahan**	**Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**Kelurahan**	**Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan 100%**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**75 Nilai**	**1,256,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**75 Nilai**	**34,169,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan Paten Sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	1,256,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan Paten Sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	100 Persen	34,169,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan**	**75 Nilai**	**9,364,800**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan**	**75 Nilai**	**31,500,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	9,364,800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	31,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa**	**Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyaraka**	**38,998,700**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di Desa**	**Persentase Terlaksananya kegiatanpemberdayaan masyarakat Desa 100%**	**38,998,700**	

				t Desa100%							
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa		**Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa**	**100 Persen**	**38,998,700**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa**	**100 Persen**	**38,998,700**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktuTerlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	2 Kegiatan19 Desa	7,513,400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu; Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	2 Kegiatan 19 Desa	7,513,400	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes yang terdataJumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di ikuti dan dilaksanakanJumlah PKK Desa / Kelurahan yang terbina Jumlah UMKM Desa yang Terdata	5 Buah4 Kali19 Desa19 Desa	31,485,300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes yang terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di ikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa / Kelurahan yang terbina Jumlah UMKM Desa yang Terdata	5 Buah 4 Kali 19 Desa 19 Desa	31,485,300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas**	**100 %**	**12,994,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas**	**100%**	**18,622,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar , Aluh Aluh, Semua Kelura han**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasiPer sentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinm as**	**3 Kegiatan1 00 Persen**	**9,372,8 00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar , Aluh Aluh, Semua Kelura han**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	**3 Kegiatan**	**9,372,80 0**	
								Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	**100 Persen**		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang terfasilitasi	2 Kegiatan	6,721,20 0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	2 Kegiatan	6,721,200	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 kegiatan	2,651,60 0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 Kegiatan	2,651,600	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar , Aluh Aluh, Semua Kelura han**	**Jumlah Sub Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi**	**2 %**	**3,621,2 00**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar , Aluh Aluh, Semua Kelura han**	**Jumlah Sub Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi**	**2%**	**9,250,00 0**	Beda Pagu : Menyesuaika n kebutuhan SKPD

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi / sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	1 Kegiatan	3,621,200	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi / sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	1 Kegiatan	9,250,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi100%**	**49,513,200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 100%**	**49,513,200**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**80 Nilai**	**49,513,200**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangkamemantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**80 Nilai**	**49,513,200**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan		Jumlah Kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	2Kegaiatan	49,513,200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan		Jumlah Kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	2 Kegiatan	49,513,200	

	Negara Kesatuan Republik Indonesia					Republik Indonesia					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**17,482,200**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**17,482,200**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**75 Nilai**	**17,482,200**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	**75 Nilai**	**17,482,200**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,956,200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,956,200	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	2,911,200	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,911,200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan	1 Kegiatan	2,611,200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan	1 Kegiatan	2,611,200	

	Desa dan Perangkat Desa		tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi			Desa dan Perangkat Desa		Perangkat Desa yang terfasilitasi			
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	3,481,200	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	3,481,200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	5,522,400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		umlah Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	5,522,400	

Sunber data : RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Aluh - Aluh tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN ALUH - ALUH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan

3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Aluh - Aluh berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Aluh - Aluh masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Aluh - Aluh

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Aluh - Aluh yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Aluh - Aluh. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Aluh - Aluh 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Aluh - Aluh tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Aluh - Aluh.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Aluh - Aluh

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Aluh - Aluh yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Aluh - Aluh menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan . Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ALUH - ALUH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Aluh - Aluh dan RPJMD Kabupaten Banjar.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif. Selain itu juga mendukung pencapaian sasraan dari Kecamatan itu sendiri.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Beruntung Baru di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 41

sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.

2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Aluh - Aluh sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Aluh - Aluh dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp.2.711.200.453

4.3. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD

Rumusan Program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Aluh - Aluh sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan maupun subkegiatan. Namun ada perbedaan terkait pagu dana, indicator dan target di beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan. Alasan adanya perbedaan tersebut bisa dilihat pada Bab 2 Subbab 2.3.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Aluh - Aluh untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Aluh - Aluh Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,165,714,141**				**2,252,342,707**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Perangkat Daerah yang tersusun 100%**	**1,975,427,841**				**2,054,444,955**
7	**1**	**1**	**2**	**0,1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**4 Dokumen**	**3,400,000**			100 Persen	**3,536,000**
7	1	1	2	0,1	0,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	6 Dokumen	270,000			100 Persen	280,800
7	1	1	2	0,1	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Dokumen	375,000			100 Persen	390,000
7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000			100 Persen	78,000

7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450,000			100 Persen	468,000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750,000			100 Persen	780,000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	4 Dokumen	750,000			100 Persen	780,000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	2 Dokumen	730,000			100 Persen	759,200
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**4 Orang**	**1,749,956,741**			100 Persen	**1,819,955,011**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	10 Orang	1,555,446,741			100 Persen	1,617,664,611
7	1	1	2	0,2	0,2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium pegawai tidak tetap / kontak	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	9 Orang	165,500,000			100 Persen	172,120,000
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terbayarnya honorarium penatausahaan/ verifikasi keuangan SKPDsi	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	4 Orang	28,200,000			100 Persen	29,328,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Laporan	810,000			100 Persen	842,400

7	**1**	**1**	**2**	**0, 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**1 Orang**	**9,600,000**			100 Persen	**9,984,000**
7	1	1	2	0, 3	0, 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun;	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Laporan	600,000			100 Persen	624,000
							Jumlah Rekonsiliasi barang milik daearah pada SKPD yang terlaksana		4 Laporan					
7	1	1	2	0, 3	0, 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Orang	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**0, 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**75 Nilai**	**20,700,000**			100 Persen	**21,528,000**
7	1	1	2	0, 5	0, 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja yang tersusun	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Laporan	700,000			100 Persen	728,000
7	1	1	2	0, 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah ASN yang paham tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan perundang undangan yang terlaksana	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	2 Orang	20,000,000			100 Persen	20,800,000
7	**1**	**1**	**2**	**0, 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**12 Bulan**	**58,879,300**			100 Persen	**61,234,472**
7	1	1	2	0, 6	0, 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	5 Jenis	1,463,200			100 Persen	1,521,728
7	1	1	2	0, 6	0, 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Jenis	13,994,000			100 Persen	14,553,760

7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	7 jenis	1,825,800			100 Persen	1,898,832
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik Kantor	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	22 Jenis	7,950,000			100 Persen	8,268,000
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Pengadaan	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	3 Jenis	1,846,300			100 Persen	1,920,152
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	12 Bulan	31,800,000			100 Persen	33,072,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Mebel**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**1 Jenis**	**19,424,800**			100 Persen	**20,201,792**
7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di beli	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Jenis	3,259,800			100 Persen	3,390,192
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya yang dibeli	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Jenis	16,165,000			100 Persen	16,811,600
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**12 Bulan**	**21,072,000**			100 Persen	**21,914,880**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat SKPD	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,700,000			100 Persen	2,808,000

7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air bersih dan Internet	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	12 Bulan	18,372,000			100 Persen	19,106,880
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**4 Jenis** **70 Nilai**	**92,395,000**			**100 Persen**	**96,090,800**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	6 Unit	79,975,000			100 Persen	83,174,000
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin yang terpelihara	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	4 Jenis	5,920,000			100 Persen	6,156,800
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	3 Buah	6,500,000			100 Persen	6,760,000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja** **Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM** **Kecamatan 100%**	**65,669,400**			**100 Persen** **100 Persen**	**68,296,176**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**75 Nilai**	**34,169,400**			**100 Persen**	**35,536,176**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan Paten Sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	100 Persen	34,169,400			100 Persen	35,536,176
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**75 Nilai**	**31,500,000**			100 Persen	**32,760,000**

7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	31,500,000			100 Persen	32,760,000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di Desa**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya kegiatanpemberdayaan masyarakat Desa 100%**	**38,998,700**			100 Persen	**40,558,648**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**38,998,700**			100 Persen	**40,558,648**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu;	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	7,513,400			100 Persen	7,813,936
							Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan		19 Desa					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumdes yang terdata	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	5 Buah	31,485,300			100 Persen	32,744,712
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di ikuti dan dilaksanakan		4 Kali					
							Jumlah PKK Desa / Kelurahan yang terbina		19 Desa					
							Jumlah UMKM Desa yang Terdata		19 Desa					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**100%**	**18,622,800**			100 Persen	**19,367,712**
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**3 Kegiatan**	**9,372,800**			**100 Persen**	**9,747,712**
							Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas		**100 Persen**					
7	1	4	2	0,1	0,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	6,721,200			100 Persen	6,990,048

						Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	1	4	2	0,1	0,2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,651,600			100 Persen	2,757,664
7	**1**	**4**	**2**	**0,2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**2%**	**9,250,000**				**9,620,000**
7	1	4	2	0,2	0,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi / sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	9,250,000			100 Persen	9,620,000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 100%**	**49,513,200**			100 Persen	**51,493,728**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangkamemantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**80 Nilai**	**49,513,200**			100 Persen	**51,493,728**

7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	49,513,200			100 Persen	51,493,728
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**17,482,200**			100 Persen	**18,181,488**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan**	**75 Nilai**	**17,482,200**			100 Persen	**18,181,488**
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,956,200			100 Persen	3,074,448
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,911,200			100 Persen	3,027,648
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,611,200			100 Persen	2,715,648
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3,481,200			100 Persen	3,620,448
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	umlah Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi badan	Kab. Banjar, Aluh Aluh,	1 Kegiatan	5,522,400			100 Persen	5,743,296

							Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	Semua Kelurahan									

Catatan :

- Untuk target IKM dan SAKIP tahun 2020 sesuai matriks renstra Kecamatan Aluh - Aluh
- Untuk realisasi Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berdasrkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Kecamatan Aluh - Aluh
- Untuk nilai SAKIP tahun 2020 bersumber dari nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
- Untuk Target tahun 2020 – 2022 berdasakan matriks renstra Kecamatan Aluh - Aluh 2016-2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Aluh - Aluh dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Aluh - Aluh antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Aluh - Aluh Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Aranio Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Aranio untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Aranio guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusuAranioya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Aranio sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Aranio merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Aranio untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Aranio Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Aranio 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Aranio serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Aranio mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Aranio, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Aranio berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Aranio berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Aranio dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Aranio dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Aranio berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
(sesuaikan/tambahkan di Kecamatan lain)
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Aranio Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Aranio di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Aranio Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Aranio dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Aranio Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Aranio

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Aranio).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Aranio

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ARANIO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Aranio

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Aranio tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 299.259.997,- (94,11%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 303.004.000,** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 57,70 (82,42%) lebih rendah dari target sebesar 70.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan
      - Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 10 Pelaporan

        Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 230.554.997,- (94,21%) dari pagu anggaran sebesar Rp 244.714.000,-
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 5 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.120.000,- (71,02 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp14.250.000,-.
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 7 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.870.000,- (98.88%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 16.050.000,-.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 4 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.145.000,- (91.67%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 2.340.000,-
e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 7 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp.40.570.000,- (99.90%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 40.650.000,-

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,94 (101,1%) lebih tinggi dari target sebesar 83

4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan akibat pemotongan anggaran akibat pandemic covid-19
   - Terdapat dokumen perencanaan namun dokumen renstra dan perjanjian kinerja belum dipublikasikan dan belum dilaksanakan secara optimal.
   - Terbatasnya sumberdaya manusia pelaksana program/kegiatan yang ada di Kecamatan Aranio
   - Terjadi kekosongan pejabat pemangku kebijakan program/kegiatan di Kecamatan

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Kegiatan merupakan kegiatan yang rutin dilkasanakan
   - Dengan segala keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana kecamatan selalu memberi pelayanan yang maksimal
   - Pembuatan SOP yang dijalankan secara efektif
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Aranio, yaitu :
   - Secara umum masyarakat sudah cukup puas dengan pelayanan yang telah diberikan
   - Penilaian SAKIP yang masih di bawah target yang telah dimasukan dalam dokumen perencanaan berdampak negative terhadap penilaian akhir tahun SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Menjalankan kegiatan sesuai perencanaan Renja dan Renstra yang telah dibuat.
   - Pengisian pejabat pemangku kebijakan yang mumpuni dan mengerti tupoksi masing - masing

2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Aranio. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Aranio melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tdak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhiAranioeka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Aranio adalah sebesar Rp 1.915.909.523,-.

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II Kecamatan Aranio adalah sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan :
   1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
      - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah

yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasil, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhiAranioeka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- Tidak ada program dan kegiatan realisasinya melebihi target yang direncanakan

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

- Berkurangnya Anggaran akibat Telah dilakukan Rasionalisasi Belanja
- Kurangnya kualitas and kuantitas SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksmimal
- Kegiatan terhambat akibat pandemic covid-19

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Aranio, yaitu :
   - Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ pengguna layanan di Kecamatan belum optimal
   - Revisi anggaran memerlukan waktu dan pembahasan sehingga kegiatan belum bisa berjalan optimal
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Koordinasi dengan SKPD di Kabupaten untuk menyederhanakan prosedur pelayanan
   - Memperbaiki sistem administrasi pelaporan kinerja
   - Menjalankan SOP yang telah dibuat

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Aranio tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Aranio tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Aranio sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Commented [1]: JUMLAH TARGET DOKUMEN KESEKRETARITAN SEBANYAK 43 SEDANGKAN TOTAL NYA ADA 45, DAN REALISASI 2021 SUDAH 20, TAPI BELUM TAU DOKUMEN APA SAJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Aranio Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aranio	83.5	83.3	**83**	83.94	**101.13**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Aranio	71	61.41	**70**	57.7	**82.43**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**			
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**			
						Peningkatan Sarana dan	3	1	1	1	**100.00**			

						Prasarana Kantor								
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**			
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100.00**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	24	8	8	8	**100.00**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	15	5	5	5	**100.00**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	21	7	7	7	**100.00**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	12	4	4	4	**100.00**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21	7	7	7	**100.00**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Aranio sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									

7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				84	50%	**100%**
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan	196					112	50%	**100%**
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji & Tambahan Penghasilan	196					112	112	57.14
7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Aranio	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	15	5	5	2	**40.00**	5	12	**80.00**
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM Kecamatan Aranio	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**	4	20	**83.33**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	3	1	1	1	**100.00**	0	2	**66.67**

						Brang Milik Daerah	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Penatausahaan Kantor	6	2	2	2	**100.00**	0	4	**66.67**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	24	8	8	8	**100.00**	4	20	**83.33**
			2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Aranio	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21	7	7	3	**42.86**	0	10	**47.62**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Aranio	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	21	7	7	3	**42.86**	2	12	**57.14**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM Kecamatan Aranio	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

			2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Aranio	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	12	4	4	1	**25.00**	0	5	**41.67**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM Kecamatan Aranio	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Aranio	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian BhiAranioeka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya apel HUT RI di Kecamatan Aranio	1	belum ada	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**

Sumber:
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Aranio Tahun 2020
- Laporan Evaluasi RKPD Triwullan II Kab. Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Aranio sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Aranio

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Aranio. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM , IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitaAranioya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Aranio, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Aranio Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasaraAranioya pada Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Aranio

Kalimantan Selatan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aranio			81,50	83	83,50	84	83,30	83,94	-	-	

Sumber data :

- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aranio dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 realisasi kinerjanya sebesar 83,94. Realisasi kinerja tersebut sudah melebihi dari target kinerja sebesar 83 dengan capaian kinerja 101,13% yaitu dengan predikat **Sangat Berhasil**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Aranio memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Aranio dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersedian signal internet
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Aranio adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.
- Penyempurnaan dokumen dengan sasaran target yang lebih terukur jelas mempermudah perangkat daerah dalam pelaksanaanya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Aranio akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Aranio itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Aranio sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Aranio

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2045

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Kecamatan Aranio

Nama Perangkat Daerah : Aranio

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**420,574,900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**2,221,474,378**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**3,075,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	100 Persen	**3,075,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	420,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	420,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	300,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		RKA	1 Dokumen	300,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	225,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	225,000	
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	450,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	450,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	570,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	570,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		umlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	750,000	
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	360,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	360,000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**31,426,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100 Persen**	**1,833,323,178**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN kecamatan	14 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN kecamatan	14 ASN	1,800,997,178	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	30,600,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Orang	31,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	826,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		umlah laporan Kuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	826,000	

						Akhir Tahun SKPD				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun**	**100 Persen**	**9,600,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun**	100 Persen	**9,600,000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan Triwulanan BMD	4 Triwulan	600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan Triwulanan BMD	4 Triwulan	600,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100 Persen**	**20,700,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	100 Persen	**20,700,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Yang tersusun	1 Laporan	700,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Yang tersusun	1 Laporan	700,000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	50 orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang paham tentang materi Bimtek Implentasi Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	2 Orang	20,000,000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	**100 Persen**	**92,449,400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	100 Persen	**91,032,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,316,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,313,700	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	7,650,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	22 Jenis	7,640,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah tangga	7 Jenis	1,825,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah tangga	7 Jenis	1,726,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Bahan logistik kantor	12 Bulan	5,577,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	4,271,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3,360,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	3 Paket	3,360,700	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Fasilitasi KunjunganTamu		Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	2,750,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan tamu yang terfasilitasi	50 Orang	2,750,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	69,970,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksanaanya rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	69,970,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 Persen**	**38,057,500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	100 Persen	**37,235,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dibeli	1 Jenis	3,232,500	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dibeli	1 Jenis	2,410,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LaiAranioya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Paket	34,825,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LaiAranioya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Paket	34,825,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Tersdianya Jasa surat menyurat**	**12 bulan**	**140,308,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Tersdianya Jasa surat menyurat**	12 Bulan	**136,758,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	3,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,150,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	13,608,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik,Air Bersih dan Internet	12 Bulan	8,808,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	123,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Bukan	124,800,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**100 Persen**	**84,959,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**89,751,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	49,517,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang terpelihara	12 Unit	56,981,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	6,912,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan jumlah jasa Pemeliharaan alat angkutan air (Speed Boat)	12 Bulan	6,670,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LaiAranioya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ysng terpelihara	4 Jenis	8,530,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LaiAranioya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ysng terpelihara	4 Jenis	6,100,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan LaiAranioya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LaiAranioya		JumlaH Gedung Kantor dan Bangunan laiAranioya yang terpelihara Kantor dan Bangunan	3 Buah	20,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM KecamatanAranio**	**83 Persen**	**12,821,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM Kecamatan**	83 Persen	**12,820,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Nilai IKM Kecamatan	84 Persen		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100 Persen**	**1,114,800**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	100 Persen	**1,114,800**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan Paten Sesuai SOP yang dil laksanakan Kecamatan	38 Jenis	1,114,800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan Paten Sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	38 Jenis	1,114,800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100 Persen**	**11,706,200**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahka**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	100 Persen	**11,705,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

						n kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	11,706,200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	11,705,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 Persen**	**40,425,100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	100 Persen	**40,486,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 Persen**	**40,425,100**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	100 Persen	**40,486,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya musrembangkec yang tepat waktu Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangkel yang tepat waktu ,terlaksanya musrenbang kec yang tepat waktu	1 kegiatan1 Kegiatan	8,513,400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksanaanya musrembang kec yang tepat waktu;	1 Kegiatan	8,513,400	
								Terlaksanaanya Musrenbang des dan Musrenbang kel yang tepat waktu ,terlaksanya musrenbang kec yang tepat waktu	1 Kegiatan		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes YangTerdatajumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakanjumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbinaJumlah UMKM DesaYang Didata	12 Desa5 kegiatan12 Kegiatan12 Desa	31,911,700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes Yang Terdata	12 Desa	31,973,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina	5 Kegiatan		
								jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	12 Kegiatan		
								Jumlah UMKM Desa Yang Didata	12 Desa		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**6,272,800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumyang Terfasilitasi**	2 Kegiatan	**6,298,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**2 Kegiatan**	**2,651,600**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	**2,624,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rakor FKUB yangDilaksanakan	2 Kegiatan	2,651,600	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan		Jumlah rakor FKUB yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2,624,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

						Tokoh Masyarakat					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 Persen**	**3,621,200**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 Persen	**3,674,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang peraturan perundang-undangan dan /atau kepolisian NRI yang terfalislitasi	2 Kegiatan	3,621,200	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi / sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	2 Kegiatan	3,674,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**100 Persen**	**71,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	100 Persen	**71,000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokalIKM Kecamatan Aranio**	**100 Persen84 Persen**	**71,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal** **IKM Kecamatan Aranio**	100 Persen 84 Persen	**71,000,000**	

						Kepala Daera				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian BhiAranioeka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksakan	1 Kegiatan	16,275,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhiAranioeka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksakan	1 Kegiatan	16,275,000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jenis Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	54,725,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh		Jenis Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	54,725,000	

						Instansi Vertikal					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**17,570,200**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 Persen	**17,581,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**17,570,200**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 Persen	**17,581,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi tata pemerintahan desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,956,200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi tata pemerintahan desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,974,100	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,911,200	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,918,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa yang terfalilitasi	1 Kegiatan	2,611,200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa yang terfalilitasi	1 Kegiatan	2,609,500	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		jumlah fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,611,600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		jumlah fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,600,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah penyelesaian Segmen Batas Desa antar Desa dan Batas Desa antar Kecamatan yang diselesaikan	4 Desa	6,480,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayaguna an Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah penyelesaian Segmen Batas Desa antar Desa dan Batas Desa antar Kecamatan yang diselesaikan	1 Kegiatan	6,480,000	

Sumber data : Matriks renstra Kecamatan Aranio tahun 2021- 2026

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil review rancangan awal RKPD pada Kecamatan Aranio :

1. Rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan indikator pada salah satu program sebagiamana dijelaskan pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.
2. Terkait dengan target kinerja dari program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan ada sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut dikarenakan:
   - Indikator 12 bulan susah untuk diukur sehingga diganti dengan jumlah jenis laporan
   - Kecamatan Aranio menggolongkan DPA dan RKA, dan DPPA sebagai Dokumen Perencanaan sehingga tidak sama dengan rancangan awal
   - Dokumen pertanggungajawabn (SPJ-GU) bukan termasuk dokumen evaluasi, sehingga target jumlah laporan berbeda.
3. Dari enam program yang dibandingkan ada 3 program yang menurut hasil analisis kebutuhan pagu indikatifnya lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Ada beberapa alasan kenapa pagu hasil analisis berbeda dengan pagu rancangan awal RKPD:
   - Pada beberapa program/kegiatan pagu rancangan awal RKPD yang bersumber dari dokumen Renstra dianggap terlalu besar nominalnya dan angkanya masih bisa ditekan untuk mengejar target kinerja yang sama.
   - Ada pengurangan jumlah target kinerja pada beberapa kegiatan.
   - Adanya penyesuaian jenis belanja pada aplikasi.
4. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar daripada rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Aranio tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN ARANIO

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa

4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
8. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
10. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
11. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Aranio berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan publik, maka Kecamatan Aranio masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Aranio

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Aranio yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Aranio. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Aranio 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Aranio tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Aranio.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Aranio

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**

Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Aranio yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan NN menetapkan sasaran yaitu : **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ARANIO

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Aranio dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Aranio di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp **2.369.661.178**

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Aranio di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Aranio sifat penyebaraAranioya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Aranio dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 420.574.900,00.
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Aranio sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan namun ada perbedaan dari jumlah subkegiatan. Adapun perbedaan yang lebih banyak pada target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya evaluasi dari kecamatan Aranio untuk memudahkan pencapaian target sesuai yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Pagu indikatif lebih kecil dikarenakan adanya pengurangan jumlah target, penyesuaian jenis belanja dan anggaran dianggap terlalu besar dalam pencapaian target. Sedangkan untuk pagu indikatifnya lebih besar karenakan adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Aranio untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

2067

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Aranio Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Aranio

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,369,661,178**				**2,464,447,625**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**2,221,474,378**			100 Persen	**2,310,333,353**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**3,075,000**			100 Persen	**3,198,000**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	6 Dokumen	420,000			100 Persen	436,800
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000			100 Persen	312,000
7	1	1	2	0, 1	0, 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Dokumen	225,000			100 Persen	234,000
7	1	1	2	0, 1	0, 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450,000			100 Persen	468,000
7	1	1	2	0, 1	0, 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aranio,	1 Dokumen	570,000			100 Persen	592,800

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	4 Dokumen	750,000			100 Persen	780,000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2 Dokumen	360,000			100 Persen	374,400
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**1,833,323,178**			100 Persen	**1,906,656,105**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN kecamatan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	14 ASN	1,800,997,178			100 Persen	1,873,037,065
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	4 Orang	31,500,000			100 Persen	32,760,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah laporan Kuangan Akhir tahun SKPD	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Laporan	826,000			100 Persen	859,040
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**9,600,000**			100 Persen	**9,984,000**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Triwulanan BMD	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	4 Triwulan	600,000			100 Persen	624,000
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Orang	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**20,700,000**			100 Persen	**21,528,000**

7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Yang tersusun	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Laporan	700,000			100 Persen	728,000
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang paham tentang materi Bimtek Implentasi Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2 Orang	20,000,000			100 Persen	20,800,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**91,032,200**			100 Persen	**94,673,488**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	5 Jenis	1,313,700			100 Persen	1,366,248
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	22 Jenis	7,640,000			100 Persen	7,945,600
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	7 Jenis	1,726,000			100 Persen	1,795,040
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Bulan	4,271,800			100 Persen	4,442,672
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	3 Paket	3,360,700			100 Persen	3,495,128
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	50 Orang	2,750,000			100 Persen	2,860,000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Bulan	69,970,000			100 Persen	72,768,800
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**37,235,000**			100 Persen	**38,724,400**

7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dibeli	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Jenis	2,410,000			100 Persen	2,506,400
7	1	1	2	0,7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LaiAranioya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Paket	34,825,000			100 Persen	36,218,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersdianya Jasa surat menyurat**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Bulan	**136,758,000**			100 Persen	**142,228,320**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Bulan	3,150,000			100 Persen	3,276,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik,Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Bulan	8,808,000			100 Persen	9,160,320
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	13 Bukan	124,800,000			100 Persen	129,792,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**89,751,000**			100 Persen	**93,341,040**
7	1	1	2	0,9	0,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang terpelihara	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Unit	56,981,000			100 Persen	
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jumlah jasa Pemeliharaan alat angkutan air (Speed Boat)	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Bulan	6,670,000			100 Persen	6,936,800
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LaiAranioya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ysng terpelihara	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	4 Jenis	6,100,000			100 Persen	6,344,000
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LaiAranioya	JumlaH Gedung Kantor dan Bangunan laiAranioya yang	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	3 Buah	20,000,000			100 Persen	20,800,000

							terpelihara Kantor dan Bangunan						
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM Kecamatan**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	83 Persen	**12,820,600**			100 Persen	**13,333,424**
							Nilai IKM Kecamatan		84 Persen				100 Persen	
7	**1**	**2**	**2**	**0, 2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**1,114,800**			100 Persen	**1,159,392**
7	1	2	2	0, 2	0, 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan Paten Sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	38 Jenis	1,114,800			100 Persen	1,159,392
7	**1**	**2**	**2**	**0, 4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**11,705,800**			100 Persen	**12,174,032**
7	1	2	2	0, 4	0, 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	11,705,800			100 Persen	12,174,032
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**40,486,600**			100 Persen	**42,106,064**
7	**1**	**3**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**40,486,600**			100 Persen	**42,106,064**
7	1	3	2	0, 1	0, 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrembangkec yang tepat waktu;	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	8,513,400			100 Persen	8,853,936
							Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangkel yang tepat waktu ,terlaksanya musrenbang kec yang tepat waktu		1 Kegiatan				100 Persen	
7	1	3	2	0, 1	0, 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumdes Yang Terdata	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	12 Desa	31,973,200			100 Persen	33,252,128
							jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina		5 Kegiatan				100 Persen	

							jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan		12 Kegiatan				100 Persen	
							Jumlah UMKM Desa Yang Didata		12 Desa				100 Persen	
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumyang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	**6,298,000**			100 Persen	**6,549,920**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	**2,624,000**			100 Persen	**2,728,960**
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rakor FKUB yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2,624,000			100 Persen	2,728,960
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**3,674,000**			100 Persen	**3,820,960**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi / sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	3,674,000			100 Persen	3,820,960
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**71,000,000**			100 Persen	**73,840,000**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**71,000,000**			100 Persen	**73,840,000**
							IKM Kecamatan Aranio		84 Persen				100 Persen	

7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhiAranioeka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksakan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	16,275,000			100 Persen	16,926,000
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jenis Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	54,725,000			100 Persen	56,914,000
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**17,581,600**			100 Persen	**18,284,864**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	100 Persen	**17,581,600**			100 Persen	**18,284,864**
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi tata pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,974,100			100 Persen	3,093,064
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,918,000			100 Persen	3,034,720
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa yang terfalilitasi	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,609,500			100 Persen	2,713,880
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,600,000			100 Persen	2,704,000
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah penyelesaian Segmen Batas Desa antar Desa dan Batas Desa antar Kecamatan yang diselesaikan	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	6,480,000			100 Persen	6,739,200

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Aranio dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Aranio antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

.

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,221,474,378	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,075,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	0 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	450,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	RKA	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	900,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	225,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	450,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	270,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	750,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	900,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,833,323,178	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN Kecamatan	14 ASN	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai		1,800,000,178	
7	01	01	2.02	08	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	31,500,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah laporan Ruangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	825,000	
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9,600,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Laporan Triwulanan BMD	4 Triwulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	600,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	9,000,000	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,700,000**	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Yang tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	700,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah ASN yang paham tentang materi Bimtek Implentasi Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	2 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	20,000,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**91,032,200**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1,313,700	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	22 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,640,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	7 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1,726,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.05 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	4,271,000	
7 01 01 2.05 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlaksanannya pencetakan dan penggandaan	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	3,360,700	
7 01 01 2.05 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Kunjungan tamu yang terfasilitasi	50 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,750,000	
7 01 01 2.05 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlaksanannya rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	69,970,000	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**37,235,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dibeli	1 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,410,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Paket	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	34,825,000	
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**136,758,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	3,150,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik,Air Bersih dan Internet	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	8,808,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	124,800,000	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,751,000**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang terpelihara	12 unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	56,981,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Penyediaan jumlah jasa Pemeliharaan alat angkutan air (Speed Boat)	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	6,510,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terpelihara	4 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	6,100,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Kantor dan Bangunan	3 Buah	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	20,000,000	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**12,820,600**	
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**1,114,800**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Aranio	83 Persen	Jenis Pelayanan Paten Sesuai SOP yang dil laksanakan Kecamatan	38 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	1,114,800	
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**11,705,800**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan	83 Persen 84 Persen	jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	11,705,800	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**40,486,600**	
7 01 05 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**40,486,600**	
7 01 01 7.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Terlaksananya musrembangkec yang tepat waktu	1 kegiatan 1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	8,513,400	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangkel yang tepat waktu ,terlaksanya musrenbang kec yang tepat waktu				Semua Kelurahan		
7 01 03 2.01 09	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Jumlah Bumdes Yang Terdata jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina Jumlah UMKM Desa Yang Dibina	12 Desa 5 kegiatan 12 Kegiatan 12 Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	31,973,200	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,298,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**2,624,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	2 Kegiatan	Jumlah rakor FKUB yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,624,000	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**3,674,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 Persen	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang peraturan perundang-undangan dan /atau kepolisian (PPK) yang terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	3,674,000	
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**71,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**71,000,000**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	100 Persen	Jumlah Kegiatan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilakukan	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	16,275,000	
7 01 06 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka stabilitas keamanan lokal	100 Persen	Jenis Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,725,000	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**17,581,600**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**17,581,600**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Jumlah Administrasi tata pemerintahan desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,974,100	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,918,000	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,809,500	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	jumlah fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Kab. Banjar, Aranio, Semua Kelurahan	2,600,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Aranio

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Jumlah penyelesaian Segmen Batas Desa antar Desa dan Batas Desa antar Kecamatan yang diselesaikan	4 Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Kec. Ranjar, Aranio, Aranio	6.480.000	
								TOTAL	**2.369.661.178**	

37. Kecamatan Astambul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Astambul Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Astambul untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Astambul guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Astambul sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Astambul merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Astambul untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Astambul Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Astambul 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Astambul serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Astambul mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Astambul, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Astambul berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Astambul berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Astambul dan rancangan awal.
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Astambul dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Astambul berdasarkan Perkada RKPD awal.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021)
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Astambul Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Astambul di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Astambul Tahun 2022 ini adalah:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Astambul dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
3. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

3.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Astambul Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Astambul

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Astambul).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Astambul

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ASTAMBUL TAHUN LALU

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dan 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari kegiatan:

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Astambul tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 290.163.483,- (99,57%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 291.425.000,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan dengan indicator :
   - Nilai SAKIP Kecamatan Astambul realisasi untuk tahun 2020 adalah 69,52 masih belum memenuhi target tahun 2020 yaitu 78,44.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan target kinerja 6 jenis laporan realisasi kinerja dengan 5 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 83,33% dengan target anggaran sebesar Rp.11.875.000,- dan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp.11.865.000,-(99,92%).
   - Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kecamatan dengan target kinerja 6 jenis laporan terealisasi kinerja 5 jenis laporan dengan capaian kinerja sebesar 83,33%. Target anggaran sebesar Rp.54.825.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.54.805.000,- (99,96%).

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   - Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan dengan indicator :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul. Realisasi indicator Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87 (106,09%) melebihi dari target sebesar 82.

3. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :

   - Kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan dengan target kinerja 44 laporan terealisasi 100%. Besar target anggaran Rp. 184.175.000 dengan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.183.003.843,-(99,36%).

   - Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 2 memperoleh capaian realisasi kinerja 2 jenis laporan sebesar 100% dengan besar anggaran Rp.20.300.000 dan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp.20.260.000,- (99,80%).

4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan

   Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja:

   - Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Astambul, yaitu:

   - Dengan tidak tercapainya taeget untuk indicator program Nilai sakip Kecamatan dan indicator pada beberapa kegiatan maka secara tidak berimplikasi negative terhadap capaian Renstra Kecamatan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:

   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat

   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

   - Meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait pentinganya bekerja dengan dengan berbasis kinerja yang tepat untuk semua karyawan dilingkup Kecamatan Astambul.

   - Meningkatkan inovasi dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Astambul tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan

dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Astambul Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Astambul melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Astambul adalah sebesar Rp. 1.714.541.323. Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Astambul tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Astambul tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Astambul sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Astambul Tahun 2020														
7	1	2			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul	**83**	86,89	**81**	87	**93,1**	**83**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
						Nilai SAKIP Kecamatan Astambul	**83,44**	55,53	**78,44**	62,32	**79,44**	**83,44**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	2	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100**	4	20	**100**
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100**	6	30	**100**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	0	1	0	**0**	0	0	**100**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100**	6	30	**100**
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100**	1	5	**100**

						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100**	4	24	**100**
	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	19	6	6	5	**83.33**	3	14	**100**
	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	17	6	4	4	**100**	6	16	**100**
	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	10	2	4	4	**100**	1	7	**100**
	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	18	5	6	5	**83.33**	3	13	**100**
Pencapaian Renstra Kecamatan Astambul sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**50**	50	**50**

7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN kecamatan Astambul**	**196**					**112**	**50**	**50.00**
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	196					112	112	**57.14**
7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata-rata IKM kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul**	**83**	**86,89**	**82**	**87**	**106.10**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	19	6	6	5	**83.33**	3	14	**73.68**
			2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul**	**83**	**86,89**	**82**	**87**	**106.10**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**	4	20	**83.33**

						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	0	1	0	**0.00**	0	0	**0.00**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100.00**	1	5	**83.33**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**	4	24	**80.00**
			2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul**	**83**		**82**	**87**	**106.10**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan	19	6	6	5	**83.33**	3	14	**73.68**

7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata-rata IKM kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul**	**83**	86,89	**82**	**87**	**106.10**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	17	6	4	4	**100**	3	13	**76.47**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata-rata IKM kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul**	**83**	86,89	**82**	**87**	**106.10**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	10	2	4	4	**100**	1	7	**70.00**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rata-rata IKM kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

			2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul**	**83**	86,89	83	86,89	**104,68**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	0	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**

- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Astambul Tahun 2020 dan 2021
- Laporan evaluasi RKPD Triwulan II Kab.Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Astambul sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II rata-rata sudah berada di atas 50 persen untuk semua maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai. Adapun untuk capaian program kegiatan yang belum terlaksana karena menyesuaikan dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan ditriwulan selanjutnya.

3.1.1 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Astambul

Dari sasaran yang telah ditetapkan secara garis besar capaian target kinerja sesuai dengan harapan dan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan secara keseluruhan.

Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan dan indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Astambul. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan. Adapun tingkat capaian sasaran di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2020	2021	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura			81	82	83	87,20	86,98	87,00			

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 87,00. Realisasi kinerja melebihi target kinerja sebesar 82 dengan capaian kinerja 100,06%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Astambul memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Astambul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.
- Adanya perbaikan system manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Astambul adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.
- Dukungan Anggaran sudah lumayan meningkat.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.
- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Tersedianya system perencanaan dan evaluasi pembangunan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Astambul akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Astambul itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Astambul sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah
- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kerja.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Koordinasi internal dan eksternal
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan
- Membangun kemitraan kerjasama dengan steakholder

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Astambul

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Perangkat Daerah: Astambul

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**387,242,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 Persen	**2,548,442,453**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**2,500,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100 Persen**	**2,500,000**	Beda Indikator : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	270,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	270,000	BedaTarget : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	75,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	75,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	75,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75,000	

	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	450,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	450,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	450,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	450,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	450,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	4 Dokumen	450,000	Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	730,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	730,000	Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Peren**	**29,010,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100 Persen**	**2,195,760,453**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji, Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai	14 Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji, Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai	14 Bulan	2,161,200,453	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan

										tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	28,200,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	34,200,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	810,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	360,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 %**	**9,600,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100%**	**9,195,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	2 Laporan	600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	2 Laporan	195,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
			Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 Laporan				Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang	1 Orang	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang	1 Orang	9,000,000	

			Milik Daerah pada SKPD				Milik Daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**10,700,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100%**	**10,700,000**	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	700,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	700,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	50 orang	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	15 Orang	10,000,000	BedaTarget : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**76,578,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yangTerlaksana**	100%	**50,832,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,316,900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,316,900	
	Penyediaan Peralatan dan		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	40 Jenis 3 Jenis	23,994,000	Penyediaan Peralatan dan		Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 Jenis	12,948,800	Beda Pagu : Menyesuaik

	Perlengkapan Kantor					Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis		an kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	5 Jenis	1,825,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	1,825,800	Beda Target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3,441,300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3,441,300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	46,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	31,300,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 persen**	**30,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	100%	**29,140,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	29,140,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**171,154,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	100%	**193,134,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	19,924,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	19,924,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	150,730,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	172,710,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**57,700,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	100%	**57,180,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	40,480,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	40,480,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	4 Jenis	7,220,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	4 Jenis	4,700,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	10,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 gedung	12,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	**Kab. Banjar, Astambul, Semua**	**IKM KecamatanAstambul**	**87,20Persen**	**13,256,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua**	**IKM Kecamatan Astambul**	87,20 Persen	**13,256,000**	

	PELAYANAN PUBLIK	**Kelurahan**				**PELAYANAN PUBLIK**	**Kelurahan**				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN Sesuai SOP**	**100 %**	**1,256,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN Sesuai SOP**	100%	**1,256,000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	28 JenisPeyanan	1,256,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	28 Jenis Pelayanan	1,256,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang Terlaksana**	**1 SubKegiatan**	**12,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang Terlaksana**	1 Sub Kegiatan	**12,000,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	6 Kegiatan	12,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	6 kegiatan	12,000,000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**100 persen**	**24,155,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	100 Persen	**24,155,000**	
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 %**	**24,155,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	100%	**24,155,000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang Tepat Waktu Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang Tepat Waktu	22 Desa 2 Kegiatan	7,265,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang Tepat Waktu	22 desa	7,265,000	
								Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang Tepat Waktu	2 kegiatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes YangTerdata Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang TerbinaTerlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan pendataan IMB dan PBB	22 Desa22 Desa3 Kegiatan	16,890,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes Yang Terdata;	22 desa	16,890,000	
								Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina;	22 desa		
								Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan pendataan IMB dan PBB	3 kegiatan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**11,435,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 Persen	**11,435,000**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**2 SubKegiatan**	**8,935,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	2 Sub Kegiatan	**8,935,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	7,685,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	7,685,000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yangDilaksanakan	1 Kegiatan	1,250,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1,250,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Dilaksanakan**	**1 SubKegiatan**	**2,500,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangDilaksanakan**	1 Sub Kegiatan	**2,500,000**	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang DIlaksanakan	2 Kegiatan	2,500,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	2 kegiatan	2,500,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**103,212,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	0	**103,212,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**3 SubKegiatan**	**103,212,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	3 Sub Kegiatan	**103,212,000**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	35,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	35,000,000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	57,712,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	57,712,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi		Terselenggara Forum Koordinasi	10Kegiatan	10,500,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi		Terselenggara Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 kegiatan	10,500,000	

	Pimpinan di Kecamatan		Pimpinan di Kecamatan			Pimpinan di Kecamatan					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**10,700,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 Persen	**10,700,000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**5 Kegiatan**	**10,700,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	5 kegiatan	**10,700,000**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	1,750,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	1,750,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Kegiatan	3,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 kegiatan	3,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	1,250,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	2 kegiatan	1,250,000	
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Kegiatan	2,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 kegiatan	2,500,000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2,200,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2,200,000	

Sunber data : RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Astambul tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN ASTAMBUL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Sambung Makmur berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Sambung Makmur masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Astambul

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Astambul yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Astambul. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Astambul 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Astambul tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan

pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Astambul.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Astambul

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Astambul yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik , Kecamatan Astambul menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 76.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ASTAMBUL

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Astambul dan RPJMD Kabupaten Banjar.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif. Selain itu juga mendukung pencapaian sasraan dari Kecamatan itu sendiri.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Beruntung Baru di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Astambul sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Astambul dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp.2.711.200.453

4.3. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD

Rumusan Program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Astambul sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan maupun subkegiatan. Namun ada perbedaan terkait pagu dana, indicator dan target di beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan. Alasan adanya perbedaan tersebut bisa dilihat pada Bab 2 Subbab 2.3.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Astambul untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Astambul Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,711,200,453**				**2,819,648,471**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100 Persen	**2,548,442,453**			100 Persen	**2,650,380,151**
7	**1**	**1**	**2**	**0,1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**2,500,000**			100 Persen	**2,600,000**
7	1	1	2	0,1	0,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	6 Dokumen	270,000			100 Persen	280,800
7	1	1	2	0,1	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000			100 Persen	78,000

7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000			100 Persen	78,000
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450,000			100 Persen	468,000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450,000			100 Persen	468,000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	4 Dokumen	450,000			100 Persen	468,000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 Dokumen	730,000			100 Persen	759,200
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**2,195,760,453**			100 Persen	**2,283,590,871**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	14 Bulan	2,161,200,453			100 Persen	2,247,648,471

7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 Laporan	34,200,000			100 Persen	35,568,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Laporan	360,000			100 Persen	374,400
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**100%**	**9,195,000**			100 Persen	**9,562,800**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 Laporan				100 Persen	202,800
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		4 Laporan	195,000			100 Persen	
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Orang	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan**	**100%**	**10,700,000**			100 Persen	**11,128,000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Kab. Banjar, Astambul, Semua	1 Laporan	700,000			100 Persen	728,000

								Kelurahan						
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	15 Orang	10,000,000			100 Persen	10,400,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yangTerlaksana**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100%	**50,832,800**			100 Persen	**52,866,112**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	5 Jenis	1,316,900			100 Persen	1,369,576
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	40 Jenis	12,948,800			100 Persen	13,466,752
							Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 Jenis				100 Persen	
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	7 Jenis	1,825,800			100 Persen	1,898,832
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	12 Bulan	3,441,300			100 Persen	3,578,952

7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	12 Bulan	31,300,000			100 Persen	32,552,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100%	**29,140,200**			100 Persen	**30,305,808**
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	3 Unit	29,140,200			100 Persen	30,305,808
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100%	**193,134,000**			100 Persen	**200,859,360**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	12 Bulan	500,000			100 Persen	520,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	12 Bulan	19,924,000			100 Persen	20,720,960
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	12 Bulan	172,710,000			100 Persen	179,618,400

7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100%	**57,180,000**			100 Persen	**59,467,200**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	7 Unit	40,480,000			100 Persen	42,099,200
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	4 Jenis	4,700,000			100 Persen	4,888,000
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 gedung	12,000,000			100 Persen	12,480,000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan Astambul**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	87,20 Persen	**13,256,000**			100 Persen	**13,786,240**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN Sesuai SOP**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100%	**1,256,000**			100 Persen	**1,306,240**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Astambul, Semua	28 Jenis Pelayanan	1,256,000			100 Persen	1,306,240

								Kelurahan						
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Sub Kegiatan	**12,000,000**			100 Persen	**12,480,000**
7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	6 kegiatan	12,000,000			100 Persen	12,480,000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100 Persen	**24,155,000**			100 Persen	**25,121,200**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100%	**24,155,000**			100 Persen	**25,121,200**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Desa yang Tepat Waktu	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	22 desa	7,265,000			100 Persen	7,555,600
							Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang Tepat Waktu		2 kegiatan				100 Persen	
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumdes Yang Terdata;	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	22 desa	16,890,000			100 Persen	17,565,600
							Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina;		22 desa				100 Persen	
							Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan pendataan IMB dan PBB		3 kegiatan				100 Persen	

7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100 Persen	**11,435,000**			100 Persen	**11,892,400**
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 Sub Kegiatan	**8,935,000**			100 Persen	**9,292,400**
7	1	4	2	0,1	0,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	7,685,000			100 Persen	
7	1	4	2	0,1	0,2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1,250,000			100 Persen	
7	**1**	**4**	**2**	**0,2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangDilaksanakan**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Sub Kegiatan	**2,500,000**			100 Persen	**2,600,000**
7	1	4	2	0,2	0,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 kegiatan	2,500,000			100 Persen	2,600,000

7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	0	**103,212,000**			100 Persen	**107,340,480**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	3 Sub Kegiatan	**103,212,000**			100 Persen	**107,340,480**
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	35,000,000			100 Persen	36,400,000
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 kegiatan	57,712,000			100 Persen	60,020,480

7	1	5	2	0,1	0,8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggara Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	10 kegiatan	10,500,000			100 Persen	10,920,000
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	100 Persen	**10,700,000**			100 Persen	**11,128,000**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	5 kegiatan	**10,700,000**			100 Persen	**11,128,000**
7	1	6	2	0,1	0,1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1,750,000			100 Persen	1,820,000
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	3 kegiatan	3,000,000			100 Persen	3,120,000
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Astambul, Semua Kelurahan	2 kegiatan	1,250,000			100 Persen	1,300,000
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Banjar, Astambul, Semua	2 kegiatan	2,500,000			100 Persen	2,600,000

								Keluraha n						
7	1	6	2	0, 1	0, 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Astambu l, Semua Keluraha n	1 Kegiatan	2,200,000			100 Persen	2,288,000

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Astambul dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Astambul antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Lampiran : 1
Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
(Sesuai PMDN 90 Tahun 2019)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pmerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			PagIndikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Took Ukur	Target	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN MARTAPURA**								**15.344.112.601,-**					**18.412.935.121,-**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**								**9.462.017.371,-**					**11.354.420.845,-**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**													
7	01	02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata IKM Kecamatan	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan		Kecamatan Martapura dan Kelurahan	95%	81 ASN		9.462.017.371,-	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan	95%	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN BUPLIK**								**793.540.830,-**					**952.248.996,-**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**22.972.000,-**					**27.566.400,-**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Epektifitas Kegiatan Pemrintahan di	Rata-rata IKM Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kepemerintahan di Kecamatan		Kecamatan Martapura	95%	2 Jenis Laporan		22.972.000,-	Dana Transper Umum-Dana	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan	95%	27.566.400,-

					Tingkat Kecamatan									Alokasi Umum					
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan**								**651.939.630,-**					**782.327.556,-**
7	01	02	2.01	03	Peningkatan Epektifitas Pelaksanaa Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian		Kecamatan Martapura	95%	8 Jenis Laporan		651.939.630,-	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan	95%	782.327.556,-
							Laporan Pelayanan PATEN				12 Laporan							
							Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan							
							Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan				10 Jenis Laporan							
							Laporan Penatausahaan Kantor				12 Laporan							
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				1 Laporan							
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat**								**118.629.200,-**					**142.355.040,-**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan	Rata-rata IKM Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Kecamatan Martapura	95%	4 Jenis Laporan		118.629.200,-	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan Martapura	95%	142.355.040,-
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**5.060.932.400,-**					**6.073.118.880,-**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**37.972.700,-**					**45.567.240,-**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Epektifitas Kegiatan	Rata-rata IKM	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan		Kecamatan	95%	4 Jenis Laporan		37.972.700,-	Dana Transper	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan	95%	45.567.240,-

					Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Masyarakat Kecamatan		Martapura					Umum-Dana Alokasi Umum		Martapura		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**5.022.959.700,-**					**6.027.551.640,-**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	Rata-rata IKM Kecamatan	Laporan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Kelurahan	95%	2 Jenis Laporan		2.450.000.000,-	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan Martapura	95%	2.940.000.000,-
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Klelurahan	Rata-rata IKM Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelurahan		Kelurahan	95%	2 Jenis Lapora		2.572.959.700,-	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan Martapura	95%	3.087.551.640,-
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**13.972.000,-**					**16.766.400,-**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**								**13.972.000,-**					**16.766.400,-**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Rata-rata IKM Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan		Kecamatan Martapura	95%	2 Jenis Laporan		13.972.000,-	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan Martapura	95%	16.766.400,-

					Kepolisia Negara Republik Indonesia												
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**13.650.000,-**					**16.380.000,-**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**13.650.000,-**					**16.380.000,-**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pemgamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI	Rata-rata IKM Kecamatan	Apel HUT RI di Kecamatan		Kecamatan Martapura	95%	1 Kegiatan		13.650.000,-	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum	Tercatat Dalam SIPD	IKM Kecamatan Martapura	95%	16.380.000,-

Keterangan :
Untuk Tahun 2021 seiring dengan perkembangan RKPD Kabupaten Banjar untuk program dan kegiatan Kecamatan kembali mengalami perubahan yaitu penambahan 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan serta ada 9 (sembilan) sub kegiatan yang diamanatkan dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

38. Kecamatan Beruntung Baru

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Beruntung Baru dan berberkah diri sendiri, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Beruntung Baru sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Beruntung Baru untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Beruntung Baru 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Beruntung Baru serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Beruntung Baru mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan Renja tahun 2022 Kecamatan Beruntung Baru, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Beruntung Baru berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Beruntung Baru berdasarkan surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Beruntung Baru dan rancangan awal.
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Beruntung Baru dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Beruntung Baru berdasarkan Perkada RKPD awal.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021)
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026 melalui kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional. Adapun tujun penyusunan rencana kerja , yaitu :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Beruntung Baru
b. Untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Beruntung Baru dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022-2026.
c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

d. Sebagai pedoman untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Beruntung Baru dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Beruntung Baru memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kecamatan Beruntung Baru dengan SKPD lainnya, serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Beruntung Baru Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Beruntung Baru

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Beruntung Baru).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Beruntung Baru.

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BERUNTUNG BARU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Beruntung Baru

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar melaksanakan , 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dan 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Beruntung Baru tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 318.397.005,- (97,85%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 325.385.400,- .** Adapun tingkat capaian kinerja program dan kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan dengan indicator :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Beruntung Baru . Realisasi indicator program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,17 (93,52%) lebih rendah dari target sebesar 90.
   - Nilai SAKIP Kecamatan Beruntung Baru realisasi untuk tahun 2020 adalah 69,52 masih belum memenuhi target tahun 2020 yaitu 72.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi kinerja keseluruhan ada 45 Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 45 Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil,** adapun indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan adalah sebagai berikut :
      1) Laporan Administrasi Kepegawaian target 8 (delapan) laporan, realisasi 8 (delapan) laporan, capaian kinerja 100%
      2) Laporan Penatausahaan Kantor, target 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar yang di buat setiap bulan, realisasi 12 (dua belas) laporan surat masuk/keluar, capaian kinerja 100% ,
      3) Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor target 1 (satu) laporan, realisasi 1 (satu) laporan, capaian kinerja 100%,
      4) Laporan Pelayanan PATEN target 12 (dua belas) laporan, realisasi 12 (dua belas) laporan, capaian kinerja 100%

5) Laporan Barang Milik Daerah, target 2 (dua) laporan, realisasi 2 (dua) laporan, capaian kinerja 100%,
6) Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan, target 10 (sepuluh) jenis laporan, realisasi 10 (sepuluh) jenis laporan, capaian kinerja 100%.

Realisasi penyerapan Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan sebesar Rp. 214.478.005,- (97,06%) dengan anggaran sebesar Rp.220.975.400,-

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Target kinerja 6 Jenis Laporan terealisasi 6 Jenis Laporan capaian kinerja sebesar 100 % laporan . Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 9.150.000,- (99,67%) dari pagu anggaran sebesar Rp 9.180.000,-

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Realisasi kinerja 6 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 6 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.259.00,-(97,92%) besar anggaran pagu Rp. 21.710.000,-.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Realisasi kinerja 2 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 2 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % . Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.990.00,- (99,80%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Realisasi kinerja 5 Jenis Laporan, bila di bandingkan dengan target kinerja 5 Jenis Laporan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % . realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.68.520.000,- (100%) dari target anggaran Rp.68.520.000,-.

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Tidak ada kegiatan yang melebihi target kinerja pada indicator sasaran program
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja Program :

   1) Penghambat tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarkat diketahui dari hasil survey yang dilakukan terhadap 376 responden yang melakukan pelayanan di kecamatan Beruntung Baru pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa waktu pelayanan menjadi penyebab tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey diperoleh nilai unsur pelayanan yang terendah adalah waktu pelayanan (3,34) .
   2) Tidak terlaksananya pelayanan publik secara maksimal di mana waktu pelayanan menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat

yang ingin mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga dimana untuk menyelesaiakan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga operator/Petugas e-KTP terkadang masih terkendala kurang lancarnya koneksi dgn server Disdukpencapil sehingga petugas harus melakukan perekamam KTP dan Kartu Keluarga di Disdukpencapil Kabupaten yang mengakibatkan memerlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan sebuah dokumen.

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Beruntung Baru, yaitu :
   - Dengan terhambatnya pelayanan dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sehingga berimplikasi negative terhadap capaian Renstra Kecamatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   1) Mempercepat waktu pelayanan terhadap masyarakat yang datang untuk melakukan pelayanan
   2) Memanfaatkan semaksimal mungkin sarana pelayanan online yang disediakan oleh Disdukpencapil Kabupaten
   3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta anggaran pemeliharaan sarana yang memadai sehingga apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.
   4) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk anggaran pemeliharaan komputer pembuatan KTP sehingga ketika ada kerusakan dapat segera di perbaikan.
   5) Memaksimalkan fasilitas jaringan internet di kecamatan agar apabila ada kendala dengan server masih bisa melakukan pelayanan secara online untuk pembuatan dokumen kependudukan.
   6) Meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait pentinganya bekerja dengan dengan berbasis kinerja yang tepat untuk semua karyawan dilingkup Kecamatan Beruntung Baru.

2.1.1.1 **Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)**

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada

perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Beruntung Baru. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Beruntung Baru melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Dengan total pagu dana Rp. 2. 811. 448.713,- (Dua Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah), termasuk didalamnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan realisasi triwulan II Kecamatan Beruntung Baru dan perikiraan capaian target akhir periode Renstra untuk Kecamatan Beruntung Baru dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini:

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Kecamatan Beruntung Baru tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Beruntung Baru sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2020														
7	1	2			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Beruntung Baru	90,5	84,05	90	83%	92,00%			
						Nilai SAKIP Kecamatan Beruntung Baru	77	69,39	72	69,52	96,83%			
7	1	2	2,01	2,01	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	100			
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	100			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	100			
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	100			
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	100			

						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	100			
7	1	1	1	6	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	18	6	6	6	100			
7	1	1	1	7	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	18	6	6	6	100			
7	1	1	1	8	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	100			
7	1	1	1	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	15	5	5	5	100			
Pencapaian Renstra Kecamatan Beruntung Baru sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	**1**				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**50**	**50**	**50,00**
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	**100**					**50**	**50**	**50,00**
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN Tambahan Penghasilan	**100**					**50**	**50**	**50,00**
7	**1**	**2**			**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**90,5**	82,50	**90**	84,17	**93,52**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	18	6	6	6	**100**	6	4	**66,67**
			2,02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**90,5**	82,50	**90**	84,17	**93,5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100**	8	4	**50**
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100**	12	6	**50**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100**	1	0	**0**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100**	12	6	**50**
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100**	2	0	**0**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100**	10	8	**80**
7	**1**	**2**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**90,5**	82,50	**90**	84,17	**93,5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	15	5	5	5	**100**	5	1	**20**

7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**90,5**	82,50	**90**	84,17	**93,5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	18	6	6	6	**100**	6	4	**66,67**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**4**	2,02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**90,5**	82,50	**90**	84,17	**93,5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	**100**	2	2	**100,00**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rata rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**90,5**	82,50	**90**	84,17	**93,5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi

					Penugasan Kepala Daerah									
7	1	5	2,01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun . Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	0	0	0	**0**	0	0	**0,00**

Sumber :

- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Beruntung Baru Tahun 2020
- Laporan evaluasi RKPD Triwulan II Kab.Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Beruntung Baru sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II rata-rata sudah berada di atas 50 persen maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan sub kegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Beruntung Baru. Sehingga dalam hal perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM , IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Beruntung Baru, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.3.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2022	2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Beruntung Baru			90	90	90,5	83	82,50	84,17	-	-	

Sumber data :
- Matriks renstra Kecamatan Beruntung Baru
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Beruntung Baru dengan Sasaran Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 84,17. Realisasi kinerja tersebut masih berada di bawah target kinerja sebesar 90 .

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Beruntung Baru memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Beruntung Baru dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersedian signal internet
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Beruntung Baru adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.
- Dukungan Anggaran sudah lumayan meningkat.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Beruntung Baru akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Beruntung Baru itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Beruntung Baru sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Beruntung Baru

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**358.463.500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 Persen	**2.546.759.785**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**3.150.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	**3.150.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	270.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaa	7 Dokumen	270.000	

	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		n Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	375.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	75.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000	
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	450.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	450.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	750.000	
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	480.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	480.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**28.672.500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 Persen	**2.223.119.785**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	15 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	15 ASN	2.188.447.285	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Verifikasi KeuanganSKPD	4 Orang	28.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	34.200.000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	472.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	1 Laporan	472.500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 Persen**	**9.600.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 Persen**	**9.405.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan4 Laporan	600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	1 Laporan	405.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 Laporan		Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**10.300.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 persen**	**10.300.000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	300.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	300.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang Undangan	1 Orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	1 Orang	10.000.000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**79.909.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**76.832.700**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1.316.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Persen	1.316.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	7.693.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	5 Jenis	7.693.100	
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	7 Jenis	1.825.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	1.825.800	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Terpenuhinya BahanLogstik Kantor	1 Kegiatan	2.100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan logistik kantor	9 Jenis	2.100.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	3 Jenis	1.204.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	977.800	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya RapatKoordinasi danKonsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	65.770.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	62.920.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 Persen**	**5.149.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	100 Persen	**3.356.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yangDibeli	1 Unit	3.259.800	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dibeli	1 Unit	1.762.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang Dibelii	1 Unit	1.889.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1.594.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**139.782.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 persen	**139.332.000**	
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	105Lembar	1.050.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.000.000	Beda satuan target : Untuk memudahkan penghitungan capaian

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Keg	18.372.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	17.972.000	Beda satuan target : Untuk memudahkan penghitungan capaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan UmumKantor yang Terbayar	6 Orang	120.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	120.360.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**81.900.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**81.264.300**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	8 Unit	63.980.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	8 Unit	63.444.300	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	5.920.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	3 Jenis	5.820.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH

	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Buah	12.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	1 Gedung	12.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**IKM KecamatanBeruntung Baru**	**83,00Persen**	**15.348.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**83,00 Persen**	**15.274.600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelaynan Paten Sesusi dgn SOP**	**100 Persen**	**2.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelaynan Paten Sesusi dgn SOP**	**100 Persen**	**1.926.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan PelayananPATEN	12 Laporan	2.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan Paten sesuai SOP yang di laksanakan Kecamatan	18 Jenis Pelayanan	1.926.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana**	**1 SubKegiatan**	**13.348.600**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yangterlaksana**	**1 Sub Kegiatan**	**13.348.600**	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang di laksanakan	4 Kegiatan	13.348.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang di laksanakan	4 Kegiatan	13.348.600	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**100 persen**	**44.653.900**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**100 Persen**	**44.878.900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana**	**2 SubKegiatan**	**44.653.900**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana**	**2 Sub Kegiatan**	**44.878.900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang Des/Kel yang Tepat Waktu Terlaksananya Musrenbang Kec yang Tepat Waktu	12 Desa2 Keg	7.528.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang Des/Kel yang Tepat Waktu	12 Desa	7.753.400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan menyesuaikan SSH
								Terlaksananya Musrenbang Kec yang Tepat Waktu	2 Keg		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diikuti dan Dilaksanakan Jumlah PKK Desa Yang Terbina	3 Kegiatan12 Desa	37.125.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diikuti dan Dilaksanakan	3 Kegiatan	37.125.500	
								Jumlah PKK Desa Yang Terbina	12 Desa		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**9.105.200**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 Persen**	**9.105.200**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**1 SubKegiatan**	**6.234.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	**1 Sub Kegiatan**	**6.234.000**	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	4.182.400	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	4.182.400	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan	1 Kegiatan	2.051.600	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan	1 Kegiatan	2.051.600	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi**	**1 Kegiatan**	**2.871.200**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	1 Kegiatan	**2.871.200**	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.871.200	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.871.200	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**102.584.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**102.584.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**1 Sub Kegiatan**	**102.584.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**1 Sub Kegiatan**	**102.584.000**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di laksanakan	1 Kegiatan	30.563.200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di laksanakan	1 Kegiatan	30.563.200	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	72.020.800	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan		Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	72.020.800	

						oleh Instansi Vertikal					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**19.844.800**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 Persen**	**19.844.800**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**6 Sub Fasilitasi**	**19.844.800**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Terfasilitasi**	**6 Sub Fasilitasi**	**19.844.800**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Terfasilitasi	1 Keg	2.891.200	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Terfasilitasi 1	1 Keg	2.891.200	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	4.242.400	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	4.242.400	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	4.362.400	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi 2	2 Kegiatan	4.362.400	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangat Desa yang Terfasilitasi	1 Keg	1.351.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangat Desa yang Terfasilitasi 1	1 Keg	1.351.200	
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Keg	3.475.200	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Keg	3.475.200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	3.522.400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi 2	2 Kegiatan	3.522.400	

Sumber data : Dokumen RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2021, Hasil Analisis Kebutuhan

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rancangan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Beruntung Baru selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan yang bersipat inprastruktur, sarana dan prasarana lainnya yang di ajukan oleh masyarakat harus melalui usulan musrenbang dari tingkat Desa, dan diusulkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan yang menjadi prioritas disampaikan dalam musrenbang Kabupaten bersama dengan instansi terkait.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN BERUNTUNG BARU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3. **Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan**

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata :
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian :

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4. Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan

3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Beruntung Baru berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Beruntung Baru masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Beruntung Baru yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Beruntung Baru Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Beruntung Baru 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Beruntung Baru tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Beruntung Baru.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Kecamatan Beruntung Baru

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Beruntung Baru yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik , Kecamatan Beruntung Baru menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 72.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BERUNTUNG BARU

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Beruntung Baru dan RPJMD Kabupaten Banjar.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Beruntung Baru di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Program IKM Kecamatan Beruntung Baru.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Beruntung Baru sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Beruntung Baru dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 2.738.447.285 ,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Lima Rupiah).
4. Terkait hasil review antara rumusan program/kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, satuan target maupun perbedaan lainnya, semuanya telah disampaikan pada Bab 3 Subbab 2.3 Review Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Beruntung Baru untuk Tahun Anggaran 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 selengkapnya, bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini :

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2.738.447.285**				**2.847.985.176**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	100 Persen	**2.546.759.785**				**2.648.630.176**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	**3.150.000**				**3.276.000**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	7 Dokumen	270.000			100 Persen	280.800
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Dokumen	375.000			100 Persen	390.000
7	1	1	2	0, 1	0, 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Beruntung Baru,	1 Dokumen	75.000			100 Persen	78.000

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450.000			100 Persen	468.000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750.000			100 Persen	780.000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	3 Laporan	750.000			100 Persen	780.000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	2 Dokumen	480.000			100 Persen	499.200
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	**2.223.119.785**			100 Persen	**2.312.044.576**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	15 ASN	2.188.447.285			100 Persen	2.275.985.176
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	Kab. Banjar, Beruntung Baru,	2 Laporan	34.200.000			100 Persen	35.568.000

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Laporan	472.500			100 Persen	491.400
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**9.405.000**			100 Persen	**9.781.200**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Laporan	405.000			100 Persen	421.200
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		4 Laporan				100 Persen	-
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Orang	9.000.000			100 Persen	9.360.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**10.300.000**			100 Persen	**10.712.000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	24 Laporan	300.000			100 Persen	312.000
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	Kab. Banjar, Beruntung Baru,	1 Orang	10.000.000			100 Persen	10.400.000

								Semua Kelurahan						
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**76.832.700**			100 Persen	**79.906.008**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1.316.000			100 Persen	1.368.640
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	5 Jenis	7.693.100			100 Persen	8.000.824
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	20 Jenis	1.825.800			100 Persen	1.898.832
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	9 Jenis	2.100.000			100 Persen	2.184.000
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	12 Bulan	977.800			100 Persen	1.016.912
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar, Beruntung Baru,	12 Bulan	62.920.000			100 Persen	65.436.800

								Semua Kelurahan						
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	**3.356.000**			100 Persen	**3.490.240**
7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dibeli	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Unit	1.762.000			100 Persen	1.832.480
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Unit	1.594.000			100 Persen	1.657.760
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	**139.332.000**			100 Persen	**144.905.280**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.000.000			100 Persen	1.040.000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	12 Bulan	17.972.000			100 Persen	18.690.880
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Kab. Banjar, Beruntung Baru,	12 Bulan	120.360.000			100 Persen	125.174.400

								Semua Kelurahan					
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**81.264.300**			100 Persen	**84.514.872**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	8 Unit	63.444.300			100 Persen	65.982.072
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	3 Jenis	5.820.000			100 Persen	6.052.800
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Gedung	12.000.000			100 Persen	12.480.000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan Beruntung Baru**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**83,00 Persen**	**15.274.600**			100 Persen	**15.885.584**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Jumlah Pelaynan Paten Sesusi dgn SOP**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**1.926.000**			100 Persen	**2.003.040**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan Paten sesuai SOP yang di laksanakan Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru,	18 Jenis Pelayanan	1.926.000			100 Persen	2.003.040

								Semua Kelurahan						
7	**1**	**2**	**2**	**0, 4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yangterlaksana**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**1 Sub Kegiatan**	**13.348.600**			100 Persen	**13.882.544**
7	1	2	2	0, 4	0, 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang di laksanakan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	13.348.600			100 Persen	13.882.544
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**44.878.900**			100 Persen	**46.674.056**
7	**1**	**3**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**2 Sub Kegiatan**	**44.878.900**			100 Persen	**46.674.056**
7	1	3	2	0, 1	0, 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang Des/Kel yang Tepat Waktu	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	12 Desa	7.753.400			100 Persen	8.063.536
							Terlaksananya Musrenbang Kec yang Tepat Waktu		2 Keg				100 Persen	
7	1	3	2	0, 1	0, 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diikuti dan Dilaksanakan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	37.125.500			100 Persen	38.610.520
							Jumlah PKK Desa Yang Terbina		12 Desa				100 Persen	
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**Kab. Banjar, Beruntung**	**100 Persen**	**9.105.200**			100 Persen	**9.469.408**

								Baru, Semua Kelurahan					
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**1 Sub Kegiatan**	**6.234.000**			100 Persen	**6.483.360**
7	1	4	2	0, 1	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	4.182.400			100 Persen	4.349.696
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.051.600			100 Persen	2.133.664
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	**2.871.200**			100 Persen	**2.986.048**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.871.200			100 Persen	2.986.048
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**0**	**102.584.000**			100 Persen	**106.687.360**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kab. Banjar, Beruntung**	**1 Sub Kegiatan**	**102.584.000**			100 Persen	**106.687.360**

							sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	**Baru, Semua Kelurahan**					
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di laksanakan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	30.563.200			100 Persen	31.785.728
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	72.020.800			100 Persen	74.901.632
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**19.844.800**			100 Persen	**20.638.592**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan**	**6 Sub Fasilitasi**	**19.844.800**			100 Persen	**20.638.592**
7	1	6	2	0,1	0,1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Terfasilitasi 1	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Keg	2.891.200			100 Persen	3.006.848
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Beruntung Baru,	2 Kegiatan	4.242.400			100 Persen	4.412.096

								Semua Kelurahan						
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi 2	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4.362.400			100 Persen	4.536.896
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangat Desa yang Terfasilitasi 1	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	1 Keg	1.351.200			100 Persen	1.405.248
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	2 Keg	3.475.200			100 Persen	3.614.208
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi 2	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	3.522.400			100 Persen	3.663.296

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2022-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Beruntung Baru dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Beruntung Baru antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**550,000,000**					**585,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**358,463,500**					**360,350,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,150,000**					**3,640,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersususn	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	72 Nilai	270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	350,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	72 Nilai	375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	450,000

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	72 Nilai	75,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	150,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	72 Nilai	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	550,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	72 Nilai	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	800,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	72 Nilai	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	800,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	72 Nilai	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	540,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**28,672,500**					**28,700,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terbayarnya Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	15 ASN	72 Nilai	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	0
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Orang	72 Nilai	28,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	28,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	72 Nilai	472,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	500,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9,600,000**					**9,600,000**
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan 4 Laporan	72 Nilai	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	600,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Orang	72 Nilai	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	9,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10,300,000**					**10,300,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	72 Nilai	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	300,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah ASN yang Paham tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang Undangan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Orang	72 Nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	10,000,000

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**79,909,800**						**94,650,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Jenis	72 Nilai	1,316,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	1,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	22 Jenis	72 Nilai	7,693,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	14,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Jenis	72 Nilai	1,825,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	1,900,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terpenuhinya Bahan Logstik Kantor	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	72 Nilai	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	7,750,000

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	Indikator Kinerja			**Rencana Tahun 2022**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Jenis	72 Nilai	1,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	1,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	72 Nilai	65,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	68,000,000

							dan Dalam Daerah SKPD										
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5,149,200**				**3,500,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Mebel yang Dibeli	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	72 Nilai	3,259,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang Dibelii	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	72 Nilai	1,889,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	3,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**139,782,000**				**139,960,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	105 Lembar	72 Nilai	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	1,200,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Keg	72 Nilai	18,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	18,400,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Orang	72 Nilai	120,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	120,360,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**81,900,000**				**70,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	72 Nilai	63,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	64,000,000

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Jenis	72 Nilai	5,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	6,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Buah	72 Nilai	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**15,348,600**					**18,300,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**2,000,000**					**1,800,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	IKM Kecamatan Beruntung Baru	Laporan Pelayanan PATEN	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	83,00 Persen	12 Laporan	72 Nilai	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Kecamatan Beruntung Baru	83,00 Persen	1,800,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**13,348,600**					**16,500,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	IKM Kecamatan Beruntung Baru	Jumlah Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang di laksanakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	83,00 Persen	4 Kegiatan	72 Nilai	13,348,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Kecamatan Beruntung Baru	83,00 Persen	16,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**44,653,900**					**52,460,000**

7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**44,653,900**					**52,460,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang Des/Kel yang Tepat Waktu Terlaksananya Musrenbang Kec yang Tepat Waktu	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	12 Desa 2 Keg	72 Nilai	7,528,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 persen	9,460,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diikuti dan Dilaksanakan Jumlah PKK Desa Yang Terbina	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	3 Kegiatan 12 Desa	72 Nilai	37,125,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 persen	43,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**9,105,200**					**19,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**6,234,000**					**16,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	1 Kegiatan	72 Nilai	4,182,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 persen	13,500,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramt	Jumlah Rakor FKUB yang di Laksanakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	1 Kegiatan	72 Nilai	2,051,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penanganan Tramti	100 persen	2,500,000

						ibuml inmas										bumli nmas		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**2,871,200**					**3,000,000**

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	Indikator Kinerja			**Rencana Tahun 2022**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	1 Kegiatan	72 Nilai	2,871,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 persen	3,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**102,584,000**					**102,140,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**102,584,000**					**102,140,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di laksanakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	0	1 Kegiatan	72 Nilai	30,563,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka stabilitas keamanan lokal	0	28,140,000

7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka stabilitas keamanan lokal	Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	0	3 Kegiatan	72 Nilai	72,020,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka stabilitas keamanan lokal	0	74,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**19,844,800**					**32,750,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**19,844,800**					**32,750,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	1 Keg	72 Nilai	2,891,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	16,850,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	2 Kegiatan	72 Nilai	4,242,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	4,500,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	2 Kegiatan	72 Nilai	4,362,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	4,600,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangat Desa yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	1 Keg	72 Nilai	1,351,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	1,500,000

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	Indikato Kinerja			**Rencana Tahun 2022**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**	
		Capaian Program			**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**

							Keluaran Sub Kegiatan	**Hasil Kegiatan**		**Program**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	2 Keg	72 Nilai	3,475,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kelurahan	100 persen	2 Kegiatan	72 Nilai	3,522,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	5,300,000
												TOTAL	**550,000,000**					**585,000,000**

Keterangan :
Untuk Tahun 2021 seiring dengan perkembangan RKPD Kabupaten Banjar untuk program dan kegiatan Kecamatan kembali mengalami perubahan yaitu penambahan 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan serta ada 9 (sembilan) sub kegiatan yang diamanatkan dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

39. Kecamatan Cintapuri Darussalam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen Rencana Kerja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cintapuri Darussalam dan berberkah diri sendiri, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Cintapuri Darussalam sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Cintapuri Darussalam untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026. Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cintapuri Darussalam serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, maka Kecamatan Cintapuri Darussalam mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renjatahun 2022 Kecamatan Cintapuri Darussalam, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan

3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renja Kecamatan Cintapuri Darussalam dan rancangan awal

4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam berdasarkan Perkada RKPD awal

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor ...);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Cintapuri Darussalam di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujun penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I.	Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun Lalu Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cintapuri Darussalam Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Cintapuri Darussalam).
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Cintapuri Darussalam Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .
BAB V.	Penutup Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 331.886.564,- (81,67%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 406.353.000,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 71,29 (95,05%) lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 75
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   a. Kegiatan Peneyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terealisasi 100% dari target 50 Laporan dan 1 kegiatan. Adapun realisasi kegiatan berupa
      - Laporan Administrasi Kepegawaian target 8 Laporan, realisasi 8 Laporan, capaian 100%
      - Laporan Penatausahaan Kantor target 4 Laporan, realisasi 4 laporan, capaian 100%
      - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor target 1 Kegiatan, realisasi 1 Kegiatan, capaian 100%
      - Laporan Pelayanan PATEN, target 12 laporan, realisasi 12 laporan dan capaian 100%

- Laporan Barang Milik Daerah target 4 Laporan dan realisasi 4 laporan dan capaian 100%
- Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan target 22 laporan, realisasi 22 laporan dan capaian 100%

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terealisasi 100 % dari target 3 Laporan
c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan terealisasi 100% dari target 7 Laporan
d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan terealisasi 100% dari target 3 Laporan
e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan terealisasi 100% dari target 7 Jenis Laporan

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 84,94 (103,58 %) lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 82
4. Faktor - faktor penyebab **terpenuhinya** program/kegiatan, yaitu
   - Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam, yaitu :
   - Melihat realisasi capaian kinerja Program terutama nilai SAKIP, sampai dengan Tahun 2020 masih belum bisa memenuhi capaian Program Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam.
   - Dengan realisasi capaian kinerja seluruh Kegiatan pada Tahun 2020 100% target renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam bisa tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

2.1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka, ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Cintapuri

Darussalam. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Cintapuri Darussalam melaksanakan 5 Program 6 Kegiatan 6 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan : 1 dan Sub kegiatan : 1
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan: 3 dan Sub Kegiatan: 3
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari kegiatan Kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1
5. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II (bulan Mei tahun 2021) kecamatan Cintapuri Darussalam adalah sebagai berikut :

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan :
   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
      - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan yang disusun dengan target pagu anggaran Rp. 1.177.694.728 dan terealisasi Rp. 706.979.824 atau 60,03%.
   b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
      - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan taget 6 laporan dan terealisasi 3 laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 38.599.700 dan realisasi Rp. 1.350.000 atau 3,49%.
   c. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
      - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dengan target 1 Laporan dan terealisasi 0 Laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.570.400

2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Laporan Kesekretariatan Pemerintah Kecamatan dengan taget 23 laporan dan terealisasi 23 laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 191.977.326 dan realisasi Rp. 76.597.936 atau 39,89%.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Laporan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 13.986.400 dan realisasi Rp. 3.090.000 atau 22.09%.

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Laporan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 17.018.900 dan realisasi Rp. 2.428.637 atau 14,27%.

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- Tidak ada program dan kegiatan realisasinya melebihi target yang direncanakan

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
- Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan.
- Adanya proses ganti uang (GU) yang terlambat.
- Adanya keraguan Kelurahan dalam melaksanakan dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD dan APBN (DAU)

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran

  kas yang direncanakan
- Ada beberapa keluaran kegiatan yang dilaksanakan sampai triwulan II sudah mencapai 100%

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam, yaitu :
   - Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ penggunan layanan di Kecamatan
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
   - Dengan terhambat dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Walau dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Cintapuri Darussalam tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2020

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darusalam Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cintapuri Darusalam	91	84.55	86	84.94	**98.77%**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Cintapuri Darusalam	85	74.42	80	71.29	**89.11%**			
7	01	02	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	8	8	8	8	**100%**			
						Laporan Penata Usahaan Kantor	12	4	2	4	**200%**			

						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1	1	1	1	**100%**			
						Laporan Pelayanan PATEN	12	12	12	12	**100%**			
						Laporan Barang Milik Daerah	2	4	4	4	**100%**			
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	22	22	22	22	**100%**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	7	3	5	3	**60%**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	7	7	7	7	**100%**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4	3	4	3	**75%**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	7	7	7	7	**100%**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Cintapuri Darusalam sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**100%**	50%	100%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	100%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	140					80	50%	50%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	IKM Kecamatan Cintapuri Darusalam	91	84.55	86	84.94	**98.77%**	91	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	15	5	5	5	**100%**	0	10	**67%**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	IKM Kecamatan Cintapuri Darusalam	91	84.55	86	84.94	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100%**	4	20	**83%**
						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100%**	6	30	**83%**
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	68	22	22	22	**100%**	13	57	**84%**
						Laporan Barang Milik Daerah	12	4	4	4	**100%**	0	8	**67%**
						Laporan Penatausahaan Kantor	6	2	2	2	**100%**	0	4	**67%**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100%**	0	2	**67%**
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Cintapuri Darusalam	91	84.55	86	84.94	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	22	7	7	7	**100%**	4	18	**82%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Cintapuri Darusalam	91	84.55	86	84.94	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan di Kecamatan	22	7	7	7	**100%**	4	18	**82%**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Cintapuri Darusalam	91	84.55	86	84.94	**98.77%**	91	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Kecamatan	10	3	4	3	**75%**	0	6	**60%**

Catatan :

- Untuk target IKM dan SAKIP tahun 2020 sesuai matriks renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam
- Untuk realisasi Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berdasrkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Kecamatan Cintapuri Darussalam
- Untuk nilai SAKIP tahun 2020 bersumber dari nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
- Untuk Target tahun 2020 – 2022 berdasakan matriks renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam 2016-2022

Jika melihat realisasi capaian kinerja 4 program, 6 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Kecamatan Cintapuri Darussalam sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Cintapuri Darussalam. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Adapun tingkat capaian sasaran di atas dapat digambarkan dalam tabel beri

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2020	2021	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cintapuri Darussalam			80,26	86	91	84,95	84,55	84,94			

Sumber data :

- Matriks renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam 2016-2022
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Cintapuri Darussalam memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Cintapuri Darussalam adalah:

- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Penyediaan dan pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Cintapuri Darussalam akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Cintapuri Darussalam itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Cintapuri Darussalam sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**442,453,800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**	100%	**2,316,809,574**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 %**	**5,390,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat yang tersusun**	100%	**5,390,000**	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	2,100,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil BedaTarget : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	350,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	350,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	350,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	350,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	1,190,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	1,190,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	700,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	700,000	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**149,700,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	100%	**2,043,496,974**	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	1 Kegiatan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	1 Kegiatan	1,880,396,974	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	13 Bulan	124,150,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	126,750,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	24,600,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 ASN	35,400,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda

											Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	950,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	950,000	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yang tersusun**	**100 %**	**9,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yangtersusun**	100%	**9,000,000**	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**		**5,500,000**						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	5,500,000						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan ditiadakan sesuai aturan
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**163,476,200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yangterlaksana**	100%	**104,179,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	2,000,000	
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	10 Jenis	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	2,990,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya BahanLogistik Kantor	25 Jenis	5,386,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	5,409,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	4,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	4,000,000	
	Fasilitasi KunjunganTamu		Fasilitasi KunjunganTamu	50 Orang	1,750,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Orang	6,300,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	147,340,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	83,480,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 %**	**8,392,800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah yang terlaksana**	100%	**35,730,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	2 Jenis	8,392,800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	2 Jenis	35,730,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**7,518,800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Persentase Sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDa**	100%	**13,537,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

								erah yang tersedia			
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	6,018,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	12,037,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**93,476,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	100%	**105,476,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara	9 Unit	70,516,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara	9 Unit	70,516,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	10,960,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	10,960,000	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara	1 Buah	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara	1 Buah	24,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**100 persen**	**14,832,400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	100 Persen	**16,332,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**63Kegiatan**	**14,832,400**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	63 Kegiatan	**16,332,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan	4,432,400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan	4,432,400	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah FasilitasiJambore dan Lomba PKKyang di ikuti Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	2 Kegiatan11 Desa	10,400,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang di ikuti; Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	2 Kegiatan 11 Desa	11,900,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**3,525,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 Persen	**3,375,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpasilitasi**	**6 Kegiatan**	**3,525,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terpasilitasi**	6 Kegiatan	**3,375,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	2,650,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	2,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	875,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	875,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**100 %**	**69,140,200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	100%	**74,281,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**100 %**	**69,140,200**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	100%	**74,281,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	17,114,800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	17,114,800	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	52,025,400	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	57,166,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**22,275,600**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 Persen	**21,825,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**14Kegiatan**	**22,275,600**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	14 Kegiatan	**21,825,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	11 Desa	3,181,200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	11 Desa	2,731,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terpasilitasi	4 Kegiatan	19,094,400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terpasilitasi	4 Kegiatan	19,094,400	

Sumber data : Matriks renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2022-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Mataraman tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down.* Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan

b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni

c. Mitigasi Kebencanaan

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Cintapuri Darussalam berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Cintapuri Darussalam masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cintapuri Darussalam yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Cintapuri Darussalam

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**

Indikator Sasaran	Nilai Evaluasi Kecamatan

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam yaitu: Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Cintapuri Darussalam menetapkan sasaran yaitu : **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan .** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperi yang ditunjukkan pada table 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam dan RPJMD Kabupaten Banjar

Jumlah Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cintapuri Darussalam di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 sub-kegiatan.

Rencana kerja program dan kegiatan SKPD Kecamatan Cintapuri Darussalam untuk tahun 2021 yang mengacu kepada RKPD tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan target dan tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam dan RPJMD Kabupaten Banjar. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Cintapuri Darussalam sebanyak 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan. Dan untuk kebutuhan dana program dan kegiatan Kecamatan Cintapuri Darussalam adalah sebesar **Rp. 1.740.162.260,-**

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cintapuri Darussalam di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Cintapuri Darussalam sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cintapuri Darussalam dan melingkupi semua Desa.

3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp **2.432.623.974**.

1.3 Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Cintapuri Darussalam sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan maupun subkegiatan, yang berbeda hanya target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya evaluasi dari Kecamatan Cintapuri Darussalam untuk memudahkan pencapaian target sesuai yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Cintapuri Darussalam untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini :

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Cintapuri Darussalam
Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,432,623,974**				**2,529,928,933**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**2,316,809,574**				**2,409,481,957**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat yang tersusun**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**5,390,000**				**5,605,600**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	6 Dokumen	2,100,000			100 Persen	2,184,000
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000			100 Persen	364,000

7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000			100 Persen	364,000
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000			100 Persen	364,000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000			100 Persen	364,000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1,190,000			100 Persen	1,237,600
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	2 Dokumen	700,000			100 Persen	728,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**2,043,496,974**			100 Persen	**2,125,236,853**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1,880,396,974			100 Persen	1,955,612,853

7	1	1	2	0,2	0,2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	7 Orang	126,750,000			100 Persen	131,820,000
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	10 ASN	35,400,000			100 Persen	36,816,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Dokumen	950,000			100 Persen	988,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yangtersusun**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**9,000,000**			100 Persen	**9,360,000**
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Orang	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yangterlaksana**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**104,179,000**			100 Persen	**108,346,160**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	2 Jenis	2,000,000			100 Persen	2,080,000

7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	10 Jenis	2,990,000			100 Persen	3,109,600
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	25 Jenis	5,409,000			100 Persen	5,625,360
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	3 Jenis	4,000,000			100 Persen	4,160,000
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	50 Orang	6,300,000			100 Persen	6,552,000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	12 Bulan	83,480,000			100 Persen	86,819,200
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**35,730,000**			100 Persen	**37,159,200**
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	2 Jenis	35,730,000			100 Persen	37,159,200

7	**1**	**1**	**2**	**0, 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang tersedia**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**13,537,600**			100 Persen	**14,079,104**
7	1	1	2	0, 8	0, 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	1	2	0, 8	0, 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	12 Bulan	12,037,600			100 Persen	12,519,104
7	**1**	**1**	**2**	**0, 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**105,476,000**			100 Persen	**109,695,040**
7	1	1	2	0, 9	0, 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	9 Unit	70,516,000			100 Persen	73,336,640
7	1	1	2	0, 9	0, 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	3 Jenis	10,960,000			100 Persen	11,398,400
7	1	1	2	0, 9	0, 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Buah	24,000,000			100 Persen	24,960,000

7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100 Persen	**16,332,400**			100 Persen	**16,985,696**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	63 Kegiatan	**16,332,400**			100 Persen	**16,985,696**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4,432,400			100 Persen	4,609,696
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang di ikuti; Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	2 Kegiatan 11 Desa	11,900,000			100 Persen	12,376,000
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100 Persen	**3,375,000**			100 Persen	**3,510,000**
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terpasilitasi**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	**3,375,000**			100 Persen	**3,510,000**
7	1	4	2	0,1	0,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	2,500,000			100 Persen	2,600,000

							dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	1	4	2	0,1	0,2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	875,000			100 Persen	910,000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**74,281,400**			100 Persen	**77,252,656**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100%	**74,281,400**			100 Persen	**77,252,656**
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	17,114,800			100 Persen	17,799,392
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	57,166,600			100 Persen	59,453,264

7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	100 Persen	**21,825,600**			100 Persen	**22,698,624**
7	**1**	**6**	**2**	**0, 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	14 Kegiatan	**21,825,600**			100 Persen	**22,698,624**
7	1	6	2	0, 1	0, 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	11 Desa	2,731,200			100 Persen	2,840,448
7	1	6	2	0, 1	0, 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terpasilitasi	Kab. Banjar, Cintapuri Darussalam, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	19,094,400			100 Persen	19,858,176

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Cintapuri Darussalam dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Cintapuri Darussalam antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

40. Kecamatan Gambut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen Rencana Kerja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gambut dan berberkah diri sendiri, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Gambut sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gambut merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Gambut untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Gambut Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Gambut 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gambut serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, maka Kecamatan Gambut mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renjatahun 2022 Kecamatan Gambut, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Gambut berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan

3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Gambut berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renja Kecamatan Gambut dan rancangan awal

4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Gambut dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Gambut berdasarkan Perkada RKPD

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor … Tahun … tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor …);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Gambut di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Gambut dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I.	Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Gambut Tahun Lalu Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gambut Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Gambut).
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gambut Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .
BAB V.	Penutup Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAMBUT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gambut

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

2.1.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Gambut tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 426.416.688 (85,23%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 500.330.582,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,13 (91,35%) lebih rendah dari target sebesar 91
   - Realisasi nilai SAKIP sebesar 58,78 (82,78) lebih rendah dari target sebesar 71
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausahaan Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis pelaporan
      - Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan terealisasi 100% dari target 10 jenis pelaporan

      Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 9.150.000,- (99,67%) dari pagu anggaran sebesar Rp 9.180.000,-
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 214.478.005,- (97,06%) dengan anggaran sebesar Rp. 220.975.400,-
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 4 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.259.000,- (97,92%) dengan anggaran pagu sebesar Rp. 21.710.000,-

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 2 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.990.000,- (99,80%) serta target anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan target kinerja 4 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 68.520.000,- (100%) dengan besar target anggaran Rp. 68.520.000,-

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
   - Adanya proses Ganti Uang (GU) yang terlambat
   - Adanya keraguan Kelurahan dalam melaksanakan dana kelurahan, baik yang bersumber dari APBD dan APBDN (DAU).

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
   - Ada beberapa keluaran kegiatan yang dilaksanakan sampai triwulan II sudah mencapai 100%

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Gambut, yaitu:
   - Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pengguna layanan di Kecamatan Gambut
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Walau dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum optimal Kecamatan Sungai Tabuk tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

2.1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Sebelum perubahan pagu anggaran Kecamatan Gambut tahun 2021 dengan alokasi dana belanja langsung sebesar **Rp. 5,103,721,650,-** dan setelah dilakukan rasionalisasi belanja dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Kecamatan Gambut pada Tahun 2020 tetap melaksanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi dana belanja langsung sebesar **Rp. 4,629.264.007,-**

Tabel 2.1 menampilkan besaran anggaran sebelum dan setelah perubahan serta realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II (bulan Mei) tahun 2021. Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 (sampai dengan akhir bulan Mei) adalah **100%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi anggaran sampai dengan akhir (bulan Mei) tanun 2021 terhadap anggaran setelah perubahan rasionalisasi covid-19. Jika dilihat berdasarkan persentase di atas, angka tersebut masih belum dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Gambut diarahkan untuk peningkatan pelayanan Kecamatan Gambut

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 dapat disimpulkan mengenai realisasi target kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II (bulan Mei tahun 2021), dimana target yang ditetapkan secara rata-rata untuk seluruh program/kegiatan untuk pelaksanaan selama 5 (lima) bulan adalah 40% s/d 50%. Adapun hasil kesimpulan realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (bulan Mei) tahun 2021 adalah sebesar **100** dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan :
   - Tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan

2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada:
   a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausahaan Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis pelaporan

- Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan terealisasi 100% dari target 10 jenis pelaporan

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 9.150.000,- (99,67%) dari pagu anggaran sebesar Rp 9.180.000,-

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 214.478.005,- (97,06%) dengan anggaran sebesar Rp. 220.975.400,-

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 4 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.259.000,- (97,92%) dengan anggaran pagu sebesar Rp. 21.710.000,-

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 2 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.990.000,- (99,80%) serta target anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan target kinerja 4 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 68.520.000,- (100%) dengan besar target anggaran Rp. 68.520.000,-

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- Tidak ada program dan kegiatan realisasinya melebihi target yang direncanakan

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
- Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
- Adanya proses ganti uang (GU) yang terlambat
- Adanya keraguan Kelurahan dalam melaksanakan dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD dan APBN (DAU)

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja:

- Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
- Ada beberapa keluaran kegiatan yang dilaksanakan sampai triwulan II sudah mencapai 100%

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Gambut, yaitu:

- Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ penggunan layanan di Kecamatan
- Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
- Dengan terhambat dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks

kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Walau dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Gambut tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Gambut tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gambut tahun 2020
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gambut sampai Triwulan II Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gambut	96	82,22	91	83,13	91,35			
						Nilai SAKIP Kecamatan Gambut	76	63,57	71	58,78	82,78			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	100			
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	100			

						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	100			
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	100			
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	100			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	100			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	15	4	6	6	100			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	18	6	6	6	100			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	100			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	15	5	5	5	100			
7	01	01	01		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU)	Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100	100	20	20			
7	01	01	01		Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan/Desa		100	100	35.42	35			

Pencapaian Renstra Kecamatan Gambut sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	100	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				100	50	50
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100					100	50	50
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	504					288	288	57.14
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	IKM Kecamatan Gambut	84	82,22	91	83,13	91,35	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	01	02	2.02	01	**Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan**	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	15	4	6	6	100	2	12	80.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	100	4	20	83.33

						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	100	6	30	83.33
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	100	1	3	100.00
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	100	6	30	83.33
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	100	1	5	83.33
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	100	2	22	73.33
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Gambut	96	82,22	91	83,13	91,35	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21	7	7	7	100	4	18	85.71
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Gambut	96	82,22	91	83,13	91,35	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	18	6	6	6	100.00	4	16	88.89

7	01	03	2.02		**Pemberdayaan Kelurahan**	IKM Kecamatan Gambut	96	82,22	91	83,13	91,35	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	01	03	2.02	02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelurahan	6	2	2	1	50	1	4	66.67
7	01	03	2.02	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Laporan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6	2	2	1	50	0	3	50.00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Gambut	96	82,22	91	83,13	91,35	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	100	2	6	100.00

Catatan :

- Untuk target IKM dan SAKIP tahun 2020 sesuai matriks renstra Kecamatan Gambut
- Untuk realisasi Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berdasrkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Kecamatan Gambut
- Untuk nilai SAKIP tahun 2020 bersumber dari nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
- Untuk Target tahun 2020 – 2022 berdasakan matriks renstra Kecamatan Gambut
- Untuk Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terjadi perubahan indikator

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Gambut sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gambut

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Gambut. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Gambut, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Gambut. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM , IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Gambut, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gambut			86	91	96	96	82,22	83,13	-	-	

Sumber data :

- Matriks renstra Kecamatan Gambut
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Gambut memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Gambut dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Gambut adalah:

- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Penyediaan dan pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Gambut akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Gambut itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Gambut sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Gambut

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**585,783,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun**	**15 Dokumen**	**4,924,894,493**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**3,415,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun**	**6 Dokumen**	**3,405,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	**100 Persen**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	270,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	270,000	

			Perangkat Daerah								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	375,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Murni dan Perubahan SKPD yang tersusun	1 Dokumen	375,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	75,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	75,000	
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	450,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	450,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	750,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	750,000	
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	745,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	735,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Gambut,**	**Persentase Administrasi Keuangan**	**100 Peren**	**49,200,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut,**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun**	**1 Laporan**	**4,463,107,601**	Beda Pagu : Penambahan pagu

		Semua Kelurahan	**Perangkat Daerah**			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Semua Kelurahan**	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Gambut	100 Persen	4,416,607,601	untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	49,200,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penataanusahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Orang	46,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**4 Laporan**	**29,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun**	**4 Laporan**	**28,990,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan	1,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan	1,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	2 Laporan	1,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	2 Laporan	990,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Orang	27,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Orang	27,000,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**700,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang tersusun**	**1 Laporan**	**700,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian KinerjaTersusun	1 Laporan	700,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Tersusun	1 Laporan	700,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**116,688,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang terlaksana**	100 Persen	**101,108,500**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	3,998,300	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	10,000,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	10 Jenis	2,688,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	2,682,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Bahan logistik kantor	12 Bulan	18,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor	25 Jenis	17,998,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	4,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	4,000,000	
	Fasilitasi KunjunganTamu		Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	3,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Orang	3,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	75,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	69,430,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 persen**	**105,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah yang terlaksana**	100 Persen	**46,338,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubel yang dibeli	5 Jenis	25,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubel yang dibeli	5 Jenis	11,338,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	...Unit	80,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	4 Jenis	35,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**206,780,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**100 Persen**	**211,979,392**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Tersedianya honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak	**13 Bulan**		

	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya jasa surat menyurat SKPD	12 Bulan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat SKPD	12 Bulan	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	55,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	54,999,392	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	148,780,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak	13 Bulan	153,980,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**75,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	1 Laporan	**69,266,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jasa dan biaya pemeliharaan dan jumlah pajak kendaraan roda 4 (1 buah), kendaraan dinas jabatan 6 buah	7 Unit	47,716,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	4 Jenis	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	4 Jenis	9,550,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang terpelihara	3 Buah	12,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**IKM Kecamatan Gambut**	**83,60Persen**	**65,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terlaksana**	**4 kegiatan**	**50,143,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
		Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan					**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai SOP**	**100 Persen**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan**	**12 Laporan**	**23,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan**	**12 Laporan**	**18,980,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	12 Laporan	23,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	12 Laporan	18,980,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**			**2,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan**	12 Laporan	**1,966,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	12 Laporan	2,000,000	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	12 Laporan	1,966,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**40,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan**	3 Kegiatan	**29,197,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	40,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 kegiatan	29,197,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**			**92,500,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	4 kegiatan	**55,765,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**			**92,500,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	2 Kegiatan	**55,765,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Terlaksananya Musrembangdes dan musrembangkel yang tepat waktu,	2 Kegiatan		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya musrenbang dan musrenbangkel yang tepat waktu, terlaksananya musrenbangkec yang tepat waktu	2 Kegiatan	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya musrenbang dan musrenbangkel yang tepat waktu, terlaksananya musrenbangkec yang tepat waktu	2 Kegiatan	9,975,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	3 Kegiatan	82,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	3 Kegiatan	45,790,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**15,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**		**14,940,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**10,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan**	2 Kegiatan	**9,970,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	1 Kegiatan		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Terfasilitasi	4 Kegiatan	5,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Terfasilitasi	4 kegiatan	5,000,000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	2 Kegiatan	5,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	2 kegiatan	4,970,000	Beda Pagu : Menyesuaikan

	Agama dan Tokoh Masyarakat										kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Rata-rata IKM Kecamatan Gambut**	**100 Persen**	**5,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi yang terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**4,970,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
		Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan					**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Rata-rata IKM Kecamatan Gambut**	**100 Persen**		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	5,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	4,970,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**100,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerahyang terfasilitasi**	**1 Kegiatan**	**99,660,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM Kecamatan Rata-rata IKM Kecamatan Gambut**	**100 Persen0 Persen**	**100,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan**	1 Kegiatan	**99,660,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
		Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan					**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM Kecamatan**	100 Persen		
								Rata-rata IKM Kecamatan Gambut	0 persen		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	35,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	35,000,000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	65,000,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	64,660,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**32,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	12 Desa	**26,570,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Rata-rata IKM Kecamatan Gambut**	**100 Persen**	**32,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**	12 Desa	**26,570,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Rata-rata IKM Kecamatan Gambut	100 Persen		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	12 Desa	4,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	12 Desa	4,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	5,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	4,970,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1,995,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	3,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2,985,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	3,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2,995,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penataan, Pemanfaatan dan Pendayaguna an Ruang Desa serta Penetapan batas Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	5,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan batas Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	4,985,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah terfasiliatasi dan terkoordinasi nya pembinaan dan pengawasan Pemerintaha n Desa	12 Desa	10,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah terfasiliatasi dan terkoordinasinya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	12 desa	4,640,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

Sumber data: Matriks renstra Kecamatan Gambut tahun 2021-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Gambut tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN GAMBUT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

1.2.2.1. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *“Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

1.2.2.2. Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:

6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

1.2.2.3. Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan

c. Peningkatan Kewirausahaan

2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Gambut berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Gambut masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Gambut

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gambut yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Gambut. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Gambut 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gambut tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Gambut.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Gambut

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**

Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gambut yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Gambut menetapkan sasaran yaitu : **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan .** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAMBUT

Rencana kerja program dan kegiatan SKPD Kecamatan Gambut untuk tahun 2021 yang mengacu kepada RKPD tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan target dan tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Gambut dan RPJMD Kabupaten Banjar. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gambut sebanyak 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan, Dan untuk kebutuhan dana program dan kegiatan Kecamatan Gambut adalah sebesar **Rp. 5.171.973.293,-**

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2022–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2022 – 2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2022–2026 adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”,** yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Maju dalam hal ini Kabupaten Banjar yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- Mandiri dalam hal ini Kabupaten Banjar mengupayakan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dengan mengurangi ketergantungan dari pihak-pihak lain.
- Agamis dalam hal ini Kabupaten Banjar melaksanakan pembangunan berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut berkontribusi untuk mewujudkan misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati kelima misi

pembangunan daerah, peran Kecamatan dominan pada misi keempat dengan target untuk **"Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif"**. Misi keempat tersebut sangat erat kaitannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut yaitu pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sehingga diharapkan dengan misi keempat tersebut agar tercipta pelayanan publik di Kecamatan Gambut yang **baik, bersih dan efektif** dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnnya.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja Kecamatan Gambut tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Gambut untuk tahun 2021 melaksanakan 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat penggunan layanan yang ada di Kecamatan Gambut serta terlaksananya pelayanan publick di Desa dan Keurahan lingkup Kecamatan Gambut dan sekitarnya.
3. Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Gambut sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan maupun subkegiatan, yang berbeda hanya target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya penurunan pagu yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan.

1.3. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD

Seperti penjelasan pada review terhadap rancangan awal RKPD sebelumnya, bahwa rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan. Dan yang mengalami perubahan pada pagu Indikatif setelah dilakukan pembahasan pada forum perangkat Kabupaten Banjar kepada Kecamatan Gambut tidak sesuai dengan pagu rancangan awal RKPD yaitu dari usulan sebesar Rp. 5.103.721.650,- menjadi sebesar Rp. 4.629.264.007,- menurun disebabkan seiring dengan menurunnya hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar.

Dengan menurunnya pagu yang diberikan kepada Kecamatan Gambut tentunya ini akan berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua bidang di Kecamatan Gambut yang berdampak pada pelayanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan dan masyarakat.

Rencana program/kegiatan dan pendanaan Kecamatan Gambut untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Gambut

Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**5,171,973,293**				**5,378,852,225**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang tersusun**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**15 Dokumen**	**4,924,894,493**			100 Persen	**5,121,890,273**
7	**1**	**1**	**2**	**0,1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**6 Dokumen**	**3,405,000**			100 Persen	**3,541,200**
							Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		**100 Persen**				100 Persen	
7	1	1	2	0,1	0,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	6 Dokumen	270,000			100 Persen	280,800
7	1	1	2	0,1	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni dan Perubahan SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Dokumen	375,000			100 Persen	390,000
7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000			100 Persen	78,000
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450,000			100 Persen	468,000

7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750,000			100 Persen	780,000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	4 Dokumen	750,000			100 Persen	780,000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Dokumen	735,000			100 Persen	764,400
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**1 Laporan**	**4,463,107,601**			100 Persen	**4,641,631,905**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Gambut	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	100 Persen	4,416,607,601			100 Persen	4,593,271,905
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penataanusahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	6 Orang	46,500,000			100 Persen	48,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**4 Laporan**	**28,990,000**			100 Persen	**30,149,600**
7	1	1	2	0,3	0,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1,000,000			100 Persen	1,040,000
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 Laporan	990,000			100 Persen	1,029,600

7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	3 Orang	27,000,000			100 Persen	28,080,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang tersusun**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**1 Laporan**	**700,000**			100 Persen	**728,000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Tersusun	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Laporan	700,000			100 Persen	728,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang terlaksana**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	100 Persen	**101,108,500**			100 Persen	**105,152,840**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	5 Jenis	3,998,300			100 Persen	4,158,232
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	10 Jenis	2,682,000			100 Persen	2,789,280
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	25 Jenis	17,998,200			100 Persen	18,718,128
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	4 Jenis	4,000,000			100 Persen	4,160,000
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	200 Orang	3,000,000			100 Persen	3,120,000

7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Bulan	69,430,000			100 Persen	72,207,200
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	100 Persen	**46,338,000**			100 Persen	**48,191,520**
7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang dibeli	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	5 Jenis	11,338,000			100 Persen	11,791,520
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	4 Jenis	35,000,000			100 Persen	36,400,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**100 Persen**				100 Persen	**220,458,568**
							Tersedianya honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak		**13 Bulan**	**211,979,392**			100 Persen	
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat SKPD	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Bulan	3,000,000			100 Persen	3,120,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Bulan	54,999,392			100 Persen	57,199,368
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	13 Bulan	153,980,000			100 Persen	160,139,200
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Laporan	**69,266,000**			100 Persen	**72,036,640**

7	1	1	2	0,9	0,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa dan biaya pemeliharaan dan jumlah pajak kendaraan roda 4 (1 buah), kendaraan dinas jabatan 6 buah	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	7 Unit	47,716,000			100 Persen	49,624,640
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	4 Jenis	9,550,000			100 Persen	9,932,000
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang terpelihara	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	3 Buah	12,000,000			100 Persen	12,480,000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**4 kegiatan**	**50,143,800**			100 Persen	**52,149,552**
							Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai SOP		**100 Persen**				100 Persen	
7	**1**	**2**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**12 Laporan**	**18,980,000**			100 Persen	**19,739,200**
7	1	2	2	0,1	0,2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Laporan	18,980,000			100 Persen	19,739,200
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Laporan	**1,966,000**			100 Persen	2,044,640
7	1	2	2	0,2	0,3	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan Kecamatan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,966,000			100 Persen	2,044,640
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	**29,197,800**			100 Persen	**30,365,712**

7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	4 kegiatan	29,197,800			100 Persen	30,365,712
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	4 kegiatan	**55,765,000**			100 Persen	**57,995,600**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	**55,765,000**			100 Persen	**57,995,600**
							Terlaksananya Musrembangdes dan musrembangkel yang tepat waktu,		2 Kegiatan				100 Persen	
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang dan musrenbangkel yang tepat waktu, terlaksanananya musrenbangkec yang tepat waktu	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	9,975,000			100 Persen	10,374,000
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	45,790,000			100 Persen	47,621,600
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan		**14,940,000**			100 Persen	**15,537,600**
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	**9,970,000**			100 Persen	**10,368,800**
							Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi		1 Kegiatan				100 Persen	
7	1	4	2	0,1	0,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	4 kegiatan	5,000,000			100 Persen	

7	1	4	2	0,1	0,2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 kegiatan	4,970,000			100 Persen	5,168,800
7	**1**	**4**	**2**	**0,2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi yang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**4,970,000**			100 Persen	**5,168,800**
							Rata-rata IKM Kecamatan Gambut		**100 Persen**				100 Persen	
7	1	4	2	0,2	0,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4,970,000			100 Persen	5,168,800
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerahyang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**99,660,000**			100 Persen	**103,646,400**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	**99,660,000**			100 Persen	**103,646,400**
							Nilai IKM Kecamatan		100 Persen				100 Persen	
							Rata-rata IKM Kecamatan Gambut		0 persen				100 Persen	
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	35,000,000			100 Persen	36,400,000

7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	64,660,000			100 Persen	
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Desa	**26,570,000**			100 Persen	**27,632,800**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi**	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Desa	**26,570,000**			100 Persen	**27,632,800**
							Rata-rata IKM Kecamatan Gambut		100 Persen				100 Persen	
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 Desa	4,000,000			100 Persen	4,160,000
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	4,970,000			100 Persen	5,168,800
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1,995,000			100 Persen	2,074,800
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2,985,000			100 Persen	3,104,400
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2,995,000			100 Persen	3,114,800
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan batas Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4,985,000			100 Persen	5,184,400

7	1	6	2	0,1	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah terfasiliatasi dan terkoordinasinya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kelurahan	12 desa	4,640,000			100 Persen	4,825,600

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Gambut dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Gambut antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Lampiran : 1

Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

(Sesuai PMDN 90 Tahun 2019)

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)		Kriteria Pendanaan	Prakiraan Maju Keluaran Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Terkait Urusan	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
X			URUSAN KEWILAYAHAN																
X	31		KECAMATAN											5,130,731,618	4,630,344,800				20,310,119,648
X	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,130,731,375	3,631,313,313				20,187,818,648
X	31	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				87,818,648
X	31	01	Koordinasi dan Penyusunan LAKIP/LKIP	Terpenuhinya (Ya/tidak) dokumen perencanaan		Nilai Evaluasi Kinerja		100 Persen	100 Persen			90 Persen	90 Persen	0	0	Dana Transfer/ Block Grant Pemerintah Pusat		Terpenuhinya (ya/tidak) dokumen perencanaan	100 Persen	87,818,648
X	31	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,130,731,375	3,631,313,313				20,100,000,000
X	31	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum/Kantor	Terpenuhinya (Ya/tidak) dokumen perencanaan		Nilai Evaluasi Kinerja		100 Persen	100 Persen			90 Persen	90 Persen	4,011,731,375	3,631,313,313	Dana Transfer/ Block Grant Pemerintah Pusat		Terpenuhinya (ya/tidak) dokumen perencanaan	100 Persen	20,010,001,000
X	31	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH											106,000,000	103,140,000				1,000,000,000
X	31	02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan											10,000,000	10,000,000				100,000,000
X	31	02	Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat		Nilai Evaluasi Kinerja		100 Persen	100 Persen			90 Persen	90 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer/ Block Grant Pemerintah Pusat		Cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat	100 Persen	100,000,000
X	31	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											96,000,000	93,140,000				900,000,000
X	31	02	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat		Nilai Evaluasi Kinerja		100 Persen	100 Persen			90 Persen	90 Persen	11,000,000	11,000,000	Dana Transfer/ Block Grant Pemerintah Pusat		Cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat	100 Persen	110,000,000
X	31	07	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan		Nilai Evaluasi Kinerja		90,00 Persen	90,00 Persen			90 Persen	90 Persen	81,140,000	82,140,000	Dana Transfer/ Block Grant Pemerintah Pusat/ Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen Perencanaan	90,00 Persen	810,000,000
X	31	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											90,000,000	83,140,000				797,818,648
X	31	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat	Tersedianya Dokumen Perencanaan		Nilai Evaluasi Kinerja		100 Persen	100 Persen			90 Persen	90 Persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer/ Block Grant Pemerintah Pusat/ Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen Perencanaan	100 Persen	90,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rata-rata IKM Kecamatan		IKM Kecamatan Gambut		84,00 Persen	84,00 Persen			96 Persen	96 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata IKM Kecamatan	84,00 Persen	44,242,800
											TOTAL	**5,103,721,650**	**4,629,264,007**					**45,597,244,695**

Keterangan :

Untuk Tahun 2021 seiring dengan perkembangan RKPD Kabupaten Banjar untuk program dan kegiatan Kecamatan kembali mengalami perubahan yaitu penambahan 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan yang diamanatkan dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

41. Kecamatan Karang Intan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen Rencana Kerja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Karang Intan dan berberkah diri sendiri, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Karang Intan sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Karang Intan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Karang Intan Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Karang Intan 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026. Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Intan serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, maka Kecamatan Karang Intan mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renjatahun 2022 Kecamatan Karang Intan, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Karang Intan berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan

3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Karang Intan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renja Kecamatan Karang Intan dan rancangan awal

4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Karang Intan dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Karang Intan berdasarkan Perkada RKPD awal

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor ...);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Karang Intan di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujun penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Karang Intan dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Karang Intan Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Intan

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Karang Intan).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karang Intan

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

AB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KARANG INTAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Karang Intan

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tahun 2020 yang mengampu urusan kewilayahan melaksanakan 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecmatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Karang Intan tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 457.621.205,- (95,78%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 477.785.000,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 77,50 (101,6%) lebih tinggi dari target sebesar 76,25, serta realisasi anggaran sebesar Rp.457.621.205,- (95,78%) dari anggaran sebesar Rp.477.785.000,-
   - Realisasi capaian SAKIP Kecamatan Karang Intan sebesar 65,90 lebih tinggi dari target sebesar 50.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terdiri dari Laporan Administrasi Kepegawaian realisasi kineja sebanyak 5 (62,5 %) laporan dari target 8 laporan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor realisasi kinerja 0 (0%) laporan.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman Ketertiban Kecamatan realisasi kineja sebanyak 3 (75 %) jenis laporan dari target 4 jenis laporan
   - Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi kineja sebanyak 6 (85,71 %) jenis laporan dari target 7 jenis laporan

2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terealisasi 100% terdiri dari Laporan Penatausahaan Kantor target 12 Laporan, Laporan Pelayanan PATEN target 12 Laporan, Laporan Barang Milik target 2 Laporan dan Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan target 10 Jenis Laporan
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terealisasi 100 % dari target 5 Jenis Laporan
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan terealisasi 100% dari target 7 Jenis Laporan
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Tidak ada Program Kegiatan yang melebihi target.
4. Faktor - faktor penyebab **terpenuhinya** program/kegiatan, yaitu
   - Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Karang Intan, yaitu :
   - Dengan realisasi capaian kinerja seluruh Kegiatan pada Tahun 2020 100% target renstra Kecamatan Karang Intan bisa tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

2.1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah . Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Karang Intan. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Karang Intan melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan 6 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan : 1 dan Sub kegiatan : 1
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan: 3 dan Sub Kegiatan: 3

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari kegiatan Kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1

Total pagu dana untuk melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Karang Intan adalah sebesar Rp 3.120.469.482,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Intan tahun 2020 dan prakiraan capaian renja sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan tahun 2020

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karang Intan sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karang Intan sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/ 4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karang Intan	91	77,80	76,25	77,50	**101,64 %**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Karang Intan	55	50,02	50	65,90	**131,80 %**			
7	01	02	2,01	0,02	Kegiatan Penyelenggaraan	Laporan Administrasi Kepegawaian	8	8	8	5	**62,50%**			

					Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Penata Usahaan Kantor	12	12	12	12	**100,00 %**			
						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1	1	1	0	**0,00%**			
						Laporan Pelayanan PATEN	12	12	12	12	**100,00 %**			
						Laporan Barang Milik Daerah	2	2	2	2	**100,00 %**			
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	10	10	10	10	**100,00 %**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	7	4	5	5	**100,00 %**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	7	7	7	7	**100,00 %**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4	4	4	3	**75,00%**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	7	7	7	6	**85,71%**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Karang Intan sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									

7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**100%**	50%	50%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	50%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	18 ASN					18 ASN	50%	50%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	IKM Kecamatan Karang Intan	91	77,80	76,25	77,50	**101,64 %**	**91**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	15	5	5	5	**100%**	3	13	**100%**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	IKM Kecamatan Karang Intan	91	77,80	76,25	77,50	**101,64 %**	**91**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

					Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100,00 %**	4	20	**83%**
						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100%**	6	30	**83%**
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100%**	5	25	**83%**
						Laporan Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100%**	1	5	**83%**
						Laporan Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100%**	6	30	**83%**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100%**	0	2	**67%**
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Karang Intan	91	77,80	76,25	77,50	**101,64 %**	**91**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21	7	7	7	**100%**	2	16	**76%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Karang Intan	91	77,80	76,25	77,50	**101,64 %**	**91**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan di Kecamatan	21	7	7	7	**100%**	2	16	**76%**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Karang Intan	91	77,80	76,25	77,50	**101,64 %**	91	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	12	4	4	3	**75%**	2	9	**75%**

Jika melihat realisasi capaian kinerja 4 program, 6 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Kecamatan Karang Intan sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II rata-rata sudah berada di atas 50 persen maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Intan

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Karang Intan. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Karang Intan, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Karang Intan. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Adapun tingkat capaian sasaran di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Paramasan
Kalimantan Selatan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2022	2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karang Intan			76	76,25	76,25	80	77,80	77,50	-	-	

Sumber data :

- Matriks renstra Kecamatan Karang Intan 2016-2022
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karang Intan dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 77,80. Realisasi kinerja tersebut lebih tinggi dari target kinerja sebesar 76 dan untuk realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 77,50 lebih besar dari target 76,25.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Karang Intan memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Karang Intan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Karang Intan adalah:

- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Penyediaan dan pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Karang Intan akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Karang Intan itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Karang Intan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Karang Intan

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karang Intan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**441.980.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100%	**2.903.644.283**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 %**	**5.750.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	**5.735.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	6 Dokumen	1.250.000	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil BedaTarget

								Daerah yang Tersusun			: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	750.000	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		umlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	495.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		tersesunnya dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	495.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	1.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	1.245.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	750.000	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**18.500.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**presentasi jumlah sub kegiatn Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	**2.480.163.983**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	18 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	18 ASN	2.461.663.983	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	18.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Orang	18.000.000	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	500.000	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 %**	**9.600.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	100%	**9.600.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1 Laporan	600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1 Laporan	600.000	

			Jumlah rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana	4 laporan				Jumlah rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana	4 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Karang Intan	12 bulan	9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		TErbayarnya honorarium PEnatausahaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Karang Intan	12 Bulan	9.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**10.700.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	100%	**10.700.000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1 Laporan	700.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1 Laporan	700.000	

			yang tersususn					yang tersususn			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	50 orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Faham tentang materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan yang terlaksana	1 ok	10.000.000	Beda Target dan Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**101.780.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	**101.020.300**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	1.952.100	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	25.580.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	24.880.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Target dan Satuan:

											Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	11 jenis	5.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	11 Jenis	5.198.400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Bahan logistik kantor	12 Bulan	9.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan logistik Kantor	12 Bulan	9.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	4.993.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	55.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	54.996.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**11.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	100%	**10.717.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 jenis	11.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	10.717.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**presentasi jumlah sub kegiatan penyediaan jada penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia**	**100 %**	**201.650.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**presentasi jumlah sub kegiatan penyediaan jada penunjang Urusan Pemerintahanyang tersedia**	100%	**201.613.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	35.993.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan

											kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	161.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Administrasi pelaksanaan tugas ASN	9 Orang	161.620.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**83.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara**	100%	**84.095.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	8 unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	8 Unit	64.535.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH

	atau Lapangan					atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	7.560.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Pemeliharaan /Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 buah	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Buah	12.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentase Nilai IKM**	**80 %**	**11.900.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentase Nilai IKM**	80%	**11.900.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	**100 %**	**1.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Presentasi Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	100%	**1.500.000**	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang dilaksanakan di Kecamatan	17 Jenis Pelayanan	1.500.000	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang dilaksanakan di Kecamatan	17 Jenis Pelayanan	1.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	**4 kegiatan**	**10.400.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	4 Kegiatan	**10.400.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 kegiatan	10.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	10.400.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentasi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 %**	**50.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentasi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	100%	**49.999.400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurah**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**26 desa**	**50.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa yang**	26 Desa	**49.999.400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH

		an	**desa yang terlaksana**					**terlaksana**			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah terlaksananya Musrembang Desa/Musrembangk Kelurahan yang tepat waktuTerlaksananya Pra Musrembang dan Musrembang Kecamatan yang tepet waktu	26 desa 2 kegiatan	12.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah terlaksananya Musrembang Desa/Musrembangk Kelurahan yang tepat waktu	26 Desa	12.000.000	
								Terlaksananya Pra Musrembang dan Musrembang Kecamatan yang tepet waktu	2 Kegiatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes yang terdataJumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa/Kelur	2 kegiatan6 kegiatan26 desa1 kegiatan	38.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes yang terdata	2 Kegiatan	37.999.400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH
								Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	6 Kegiatan		
								Jumlah PKK	26 Desa		

			ahan yang terbinaJumlah UMKM yang didata					Desa/Kelurahan yang terbina			
								Jumlah UMKM yang didata	1 Kegiatan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**25.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 Persen	**25.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi**	**2 kegiatan**	**20.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	2 Kegiatan	**20.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 kegiatan	18.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	18.000.000	

	Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan Karang Intan yang terfasilitasi			Wilayah Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan Karang Intan yang terfasilitas			
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	4 kegiatan	2.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	4 Kegiatan	2.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala DaerahYang terfasilitasi**	**1 kegiatan**	**5.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah Yang terfasilitasi**	1 Kegiatan	**5.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Koordinasi/ Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	1 kegiatan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	1 Kegiatan	5.000.000	

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi			Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0 %**	**166.200.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	0%	**166.200.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4 kegiatan**	**166.200.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4 Kegiatan**	**166.200.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar		Jumlah wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 kegiatan	24.200.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan		Jumlah wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	24.200.000	

	Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	142.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	142.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**48.500.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100%	**48.500.000**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**6 kegiatan**	**48.500.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	6 Kegiatan	**48.500.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	26 Desa	13.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	26 Desa	13.500.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	3.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	3.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanan Tugas Kepala desa dan Perangkat desa ynag terfasilitasi	4 kegiatan	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanan Tugas Kepala desa dan Perangkat desa ynag terfasilitasi	4 Kegiatan	10.000.000	
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan		Jumlah Pelaksanaan Pemilihan	4 kegiatan	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan		Jumlah Pelaksanaan Pemilihan	4 Kegiatan	10.000.000	

	Kepala Desa		Kepala Desa yang terfasilitasi			Kepala Desa		Kepala Desa yang terfasilitasi 4			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	26 Desa	6.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	26 Desa	6.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	6 desa	5.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	6 Desa	5.500.000	

Sumber data : RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Mataraman tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN KARANG INTAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus

pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas

pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi

c. Penanggulangan Kemiskinan
d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Karang Intan berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Karang Intan masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Intan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Karang Intan Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Karang Intan 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan NN tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Karang Intan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Karang Intan

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Karang Intan yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Kecamatan Karang Intan menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 76.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANG INTAN

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada table 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karang Intandan RPJMD Kabupaten Banjar

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif. Dan juga dalam rangka mencapai sasaran Kecamatan Karang Intan.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Intan di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Karang Intan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Karang Intan dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp.3.205.243.683,-
4. Terkait hasil review antara rumusan program/kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, satuan target maupun perbedaan lainnya, semuanya telah disampaikan pada Bab 3 Subbab 2.3 Review Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Karang Intan untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini :

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Karang Intan

Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**3.205.243.683**				**3.333.453.430**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**2.903.644.283**				**3.019.790.054**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**5.735.000**			100 Persen	**5.964.400**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	1.250.000			100 Persen	1.300.000

7	1	1	2	0,1	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750.000			100 Persen	780.000
7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	495.000			100 Persen	514.800
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	tersesunnya dokumen DPA-SKPD	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750.000			100 Persen	780.000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	495.000			100 Persen	514.800
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1.245.000			100 Persen	1.294.800
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	750.000			100 Persen	780.000

7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**presentasi jumlah sub kegiatn Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**2.480.163.983**			100 Persen	**2.579.370.542**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	18 ASN	2.461.663.983			100 Persen	2.560.130.542
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	2 Orang	18.000.000			100 Persen	18.720.000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Laporan	500.000			100 Persen	520.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**9.600.000**			100 Persen	**9.984.000**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Laporan	600.000			100 Persen	624.000
							Jumlah rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana		4 Laporan				100 Persen	
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TErbayarnya honorarium PEnatausahaan Barang	Kab. Banjar,	12 Bulan	9.000.000			100 Persen	9.360.000

							Milik Daerah pada Kecamatan Karang Intan	Karang Intan, Semua Kelurahan						
7	**1**	**1**	**2**	**0, 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**10.700.000**			100 Persen	**11.128.000**
7	1	1	2	0, 5	0, 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang tersususn	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Laporan	700.000			100 Persen	728.000
7	1	1	2	0, 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Faham tentang materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan yang terlaksana	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 ok	10.000.000			100 Persen	10.400.000
7	**1**	**1**	**2**	**0, 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentasi Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**101.020.300**			100 Persen	**105.061.112**
7	1	1	2	0, 6	0, 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	7 Jenis	1.952.100			100 Persen	2.030.184
7	1	1	2	0, 6	0, 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua	22 Jenis	24.880.000				25.875.200

								Kelurahan						
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	11 Jenis	5.198.400			100 Persen	5.406.336
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik Kantor	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	12 Bulan	9.000.000			100 Persen	9.360.000
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Jenis	4.993.800			100 Persen	5.193.552
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	12 Bulan	54.996.000			100 Persen	57.195.840
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentasi Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**10.717.000**			100 Persen	**11.145.680**
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Jenis	10.717.000			100 Persen	11.145.680

7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**presentasi jumlah sub kegiatan penyediaan jada penunjang Urusan Pemerintahanyang tersedia**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**201.613.000**			100 Persen	**209.677.520**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	12 Bulan	4.000.000			100 Persen	4.160.000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	12 Bulan	35.993.000			100 Persen	37.432.720
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	9 Orang	161.620.000			100 Persen	168.084.800
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**84.095.000**			100 Persen	**87.458.800**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	8 Unit	64.535.000			100 Persen	67.116.400

7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Jenis	7.560.000			100 Persen	7.862.400
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	3 Buah	12.000.000			100 Persen	12.480.000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Nilai IKM**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	80%	**11.900.000**			100 Persen	**12.376.000**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentasi Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**1.500.000**			100 Persen	1.560.000
7	1	2	2	0,2	0,3	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang dilaksanakan di Kecamatan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	17 Jenis Pelayanan	1.500.000			100 Persen	1.560.000
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	**10.400.000**			100 Persen	**10.816.000**

7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	10.400.000			100 Persen	10.816.000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentasi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**49.999.400**			100 Persen	**51.999.376**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa yang terlaksana**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	26 Desa	**49.999.400**			100 Persen	**51.999.376**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah terlaksananya Musrembang Desa/Musrembangk Kelurahan yang tepat waktu	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	26 Desa	12.000.000			100 Persen	12.480.000
							Terlaksananya Pra Musrembang dan Musrembang Kecamatan yang tepet waktu		2 Kegiatan					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumdes yang terdata	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	37.999.400			100 Persen	39.519.376
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan		6 Kegiatan				100 Persen	
							Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina		26 Desa				100 Persen	
							Jumlah UMKM yang didata		1				100	

									Kegiatan				Persen	
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100 Persen	**25.000.000**			100 Persen	**26.000.000**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	**20.000.000**			100 Persen	**20.800.000**
7	1	4	2	0, 1	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Karang Intan yang terfasilitas	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	18.000.000			100 Persen	18.720.000
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah Yang terfasilitasi**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	**5.000.000**			100 Persen	**5.200.000**

7	1	4	2	0,2	0,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	5.000.000			100 Persen	5.200.000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	0%	**166.200.000**			100 Persen	**172.848.000**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan**	**4 Kegiatan**	**166.200.000**			100 Persen	**172.848.000**
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	24.200.000			100 Persen	25.168.000

7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	142.000.000			100 Persen	147.680.000
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	100%	**48.500.000**			100 Persen	**50.440.000**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	**48.500.000**			100 Persen	**50.440.000**
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	26 Desa	13.500.000			100 Persen	14.040.000
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3.500.000			100 Persen	3.640.000
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pelaksanan Tugas Kepala desa dan Perangkat desa ynag terfasilitasi	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	10.000.000			100 Persen	10.400.000

7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi 4	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	10.000.000			100 Persen	10.400.000
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	26 Desa	6.000.000			100 Persen	6.240.000
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kelurahan	6 Desa	5.500.000			100 Persen	5.720.000

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2022 yang berisi program/kegiatan/subkegiatan beserta dengan indicator kinerja dan targetnya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapian target kinerja Renstra Kecamatan Karang Intan dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Karang Intanuntuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Karang Intan dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Karang IntanKabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar serta peran aktif s*takeholder* yang bersangkutan.

42. Kecamatan Kertak Hanyar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen Rencana Kerja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar dan berberkah diri sendiri, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Kertak Hanyar sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kertak Hanyar untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Kertak Hanyar 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026. Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kertak Hanyar serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, maka Kecamatan Kertak Hanyar mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renjatahun 2022 Kecamatan Kertak Hanyar, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Kertak Hanyar berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Kertak Hanyar berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renja Kecamatan Kertak Hanyar dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Kertak Hanyar dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kertak Hanyar berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor … Tahun … tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor …);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Kertak Hanyar di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Kertak Hanyar dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I.	Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun Lalu Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertak Hanyar Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Kertak Hanyar).
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kertak Hanyar Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .
BAB V.	Penutup Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KERTAK HANYAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kertak Hanyar

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 2.287.003.888,- (95,38%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 2.397.767.325,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,10 (99,52%) lebih rendah dari target sebesar 83,50, serta realisasi anggaran sebesar Rp. 2.287.003.888,- (95,38%) dari anggaran sebesar Rp 2.397.767.325,-
   - Kegiatan Peneyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terealisasi 44 (89,79 %) laporan dari target 49 Laporan
   - Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan terealisasi 3 (75%) jenis laporan dari target 4 Jenis Laporan
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terealisasi 100 % dari target 4 Laporan
   b. Kegiatan Penyeleggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan terealisasi 100% dari target 4 Jenis Laporan
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan terealisasi 100% dari target 2 Jenis Laporan
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Realisasi capaian SAKIP Kecamatan Kertak Hanyar sebesar 63,67 melebihi dari target sebesar 62.

4. Faktor - faktor penyebab **terpenuhinya** program/kegiatan, yaitu
   - Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kertak Hanyar, yaitu :
   - Melihat realisasi capaian kinerja Program terutama nilai SAKIP, sampai dengan Tahun 2020 masih belum bisa memenuhi capaian Program Renstra Kecamatan Kertak Hanyar.
   - Dengan realisasi capaian kinerja seluruh Kegiatan pada Tahun 2020 100% target renstra Kecamatan Kertak Hanyar bisa tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

2.1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka, ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Kertak Hanyar. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Kertak Hanyar melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan 6 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan : 1 dan Sub kegiatan : 1
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan: 3 dan Sub Kegiatan: 3
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari kegiatan Kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1

Dengan terjadi nya perubahan pagu anggaran untuk kecamatan Kertak Hanyar, pada saat perubahan Kecamatan Kertak Hanyar tidak melakukan perubahan pada program/kegiatan masih 4 program, 6 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan total pagu dana perubahan sebesar Rp 6.410.163.617,- **(**Enam Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) dari hasil evaluasi yang dilakukan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2021 yaitu:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :
   1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
      - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
   2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
      - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
      - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

   3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
      - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
      - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   - Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target sampai triwulan II

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

   - Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan.
   - Adanya proses ganti uang (GU) yang terlambat.
   - Adanya keraguan Kelurahan dalam melaksanakan dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD dan APBN (DAU)

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
- Ada beberapa keluaran kegiatan yang dilaksanakan sampai triwulan II sudah mencapai 100%

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kertak Hanyar, yaitu :
   - Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ penggunan layanan di Kecamatan
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
   - Dengan terhambat dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Walau dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Kertak Hanyar tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

2361

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2020

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kertak Hanyar sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar	84	83.28	**83.5**	83.1	**99.52%**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Kertak Hanyar	71	63.59	**62**	63.67	**102.69%**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	8	8	8	3	**37.50%**			

						Laporan Penata Usahaan Kantor	12	12	12	12	**100.00%**			
						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1	1	1	1	**100.00%**			
						Laporan Pelayanan PATEN	12	12	12	12	**100.00%**			
						Laporan Barang Milik Daerah	4	4	4	4	**100.00%**			
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	12	12	12	12	**100.00%**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	3	4	4	4	**100.00%**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	4	4	4	4	**100.00%**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	2	2	2	2	**100.00%**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	4	4	4	3	**75.00%**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Kertak Hanyar sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									

7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**100%**	50%	100%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	100%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	434					248	248	57.14%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	IKM Kecamatan Kertak Hanyar	84	83.28	83.5	83.1	**99.52%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	11	4	4	4	**100.00%**	3	11	**100%**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	IKM Kecamatan Kertak Hanyar	84	83.28	83.5	83.1	**99.52%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	3	**37.50%**	6	17	**71%**
						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00%**	6	30	**83%**
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	36	12	12	12	**100.00%**	8	32	**89%**
						Laporan Barang Milik Daerah	12	4	4	4	**100.00%**	2	10	**83%**
						Laporan Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00%**	6	30	**83%**

						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00%**	0	2	**67%**
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Kertak Hanyar	84	83.28	83.5	83.1	**99.52%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	11	4	4	3	**100.00%**	4	11	**100%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Kertak Hanyar	84	83.28	83.5	83.1	**99.52%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan di Kecamatan	12	4	4	4	**100.00%**	2	10	**83%**
			2.02		Pemberdayaan Kelurahan	IKM Kecamatan Kertak Hanyar	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelurahan	3	1	1	1	**100.00**	1	3	**100.00%**
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3	1	1	1	**100.00**	0	2	**66.67%**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	**83.3**	83	83.94	**101.13%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Kertak Hanyar	84	83.28	83.5	83.1	**99.52%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Kecamatan	6	2	2	2	**100.00%**	2	6	**100%**

Catatan:

- Untuk target IKM dan SAKIP tahun 2020 sesuai matriks renstra Kecamatan Kertak Hanyar
- Untuk realisasi Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berdasrkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Kecamatan Kertak Hanyar
- Untuk nilai SAKIP tahun 2020 bersumber dari nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
- Untuk Target tahun 2020 – 2022 berdasakan matriks renstra Kecamatan Kertak Hanyar 2016-2022

Jika melihat realisasi capaian kinerja 4 program, 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Kertak Hanyar sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II rata-rata sudah berada di atas 50 persen untuk semua maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai. Adapun untuk capaian program kegiatan yang belum terlaksana karena menyesuaikan dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan ditriwulan selanjutnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar

Dari sasaran yang telah ditetapkan secara garis besar capaian target kinerja sesuai dengan harapan dan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan secara keseluruhan.

Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan dan indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan. Adapun tingkat capaian sasaran di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar			81,73	83,50	84	83	83,28	83,10			

Sumber data :

- Matriks renstra Kecamatan Kertak Hanyar 2016-2022
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Kertak Hanyar memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Kertak Hanyar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar adalah:

- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Penyediaan dan pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Kertak Hanyar akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Kertak Hanyar itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Kertak Hanyar sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Kertak Hanyar

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kertak Hanyar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**805,175,800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**4,884,237,717**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**2,560,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**2,560,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	270,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	270,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	380,000	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	380,000	

			Perangkat Daerah			Dokumen RKA-SKPD					
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	470,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	470,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	470,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	470,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 Dokumen	500,000	
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	470,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	470,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Peren**	**58,685,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**4,302,932,917**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.

	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Penghasilan ASN	31 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Penghasilan ASN	31 ASN	4,237,947,917	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	58,200,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	64,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	485,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD Yang Tersusun	1 Laporan	485,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKecamatan**	**100 Persen**	**30,120,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**30,120,000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Tersusun	1 Kegiatan	30,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Tersusun	1 Kegiatan	30,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	90,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	90,000	

						Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekon Yang Tersusun	4 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekon YangTersusun	4 Laporan	30,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Pengurus Barang	12 Bulan	30,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Terbayarnya HonorariumPengurus Barang**	**12 Bulan**	**110,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**10,000,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Tersusun	1 Laporan	110,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Tersusun	1 Laporan	10,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**197,729,300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**150,379,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3,279,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	21,222,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor (ATK)	23 Jenis	22,264,100	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis		
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		tersedianya PeralatanRumah Tangga	6 jenis	6,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	6,000,000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	4,431,200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	4,409,500	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi KunjunganTamu		Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	6,160,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		tersedianya fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	6,160,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	157,916,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 Bulan	108,266,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 persen**	**32,965,900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**13,590,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	32,965,900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	13,590,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**319,175,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**319,675,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 bulan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	33,495,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	33,495,600	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	284,680,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Bulan	285,180,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**53,940,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**54,980,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	38,380,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	3 Kali	38,380,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara	3 buah	10,560,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara	3 Buah	11,600,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara	1 Tahun	5,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**IKM Kecamatan KertakHanyar**	**83,25Persen**	**6,756,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**IKM Kecamatan Kertak Hanyar**	83.25	**6,748,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan**	**0 kegiatan**	**456,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan**	0 Kegiatan	**448,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

						Daerah yang ada di Kecamatan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelayanan PATEN Sesuai SOP yang dilaksanakan kecamatan	11 JenisPelayanan	456,000	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelayanan PATEN Sesuai SOP yang dilaksanakan kecamatan	11 Jenis Pelayanan	448,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub keg urusan pemerintahan yang terlaksana**	**4 kegiatan**	**6,300,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub keg urusan pemerintahan yang terlaksana**	4 Kegiatan	**6,300,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	1 tahun	6,300,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	1 Tahun	6,300,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 persen**	**20,500,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	100 Persen	**31,600,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	Jumlah Musrenbang Desa Yang Tepat Waktu Terlaksanya Musrenbang Kecamatan Yang tepat Waktu	10 Desa2 Kegiatan	11,100,000	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	100 Persen	**31,600,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa Yang Tepat Waktu	10 Desa	11,100,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Terlaksanya Musrenbang Kecamatan Yang tepat Waktu	2 Kegiatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah FasilitasiJambore dan Lomba PKKyang Diikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Diikuti dan Dilaksanakanjumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	2 Kegiatan3 Kegiatan13 Desa	9,400,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang Diikuti	2 Kegiatan	20,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Diikuti dan Dilaksanakan	3 kegiatan		
								jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	13 Desa		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 persen**	**949,470,200**						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terlaksana	3Kelurahan	-						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang TerlaksanaJumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Terlaksana	3Kelurahan3Kelurahan	949,470,200						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**9,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 Persen	**9,000,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**0 kegiatan**	**4,200,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	0 Kegiatan	**4,200,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 tahun	2,100,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	2,100,000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 tahun	2,100,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 Tahun	2,100,000	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub kegiatan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi**	**1 kegiatan**	**4,800,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub kegiatan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	1 Kegiatan	**4,800,000**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 tahun	4,800,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 tahun	4,800,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**118,560,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	0	**118,560,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**0 kegiatan**	**118,560,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	0 kegiatan	**118,560,000**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 tahun	24,050,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Tahun	24,050,000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (MTQ, Safari, PHBI)	3 Kegiatan	94,510,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (MTQ, Safari, PHBI)	3 kegiatan	94,510,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**15,050,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 Persen	**15,050,000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	**0 kegiatan**	**15,050,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	0 Kegiatan	**15,050,000**	

			Desa yang Terlaksana								
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	10 Desa	12,600,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	10 desa	12,600,000	
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Terfasilitasi	1 kegiatan	1,050,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1,050,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	700,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	700,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Raung Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	700,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Raung Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	700,000	

Sumber data : Matriks renstra Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2022-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Kertak Hanyar selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan yang bersipat inprastruktur, sarana dan prasarana lainnya yang di ajukan oleh masyarakat harus melalui usulan musrenbang dari tingkat Desa, dan diusulkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan yang menjadi prioritas disampaikan dalam musrenbang Kabupaten bersama dengan instansi terkait.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN KERTAK HANYAR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down.* Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Kertak Hanyar berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Kertak Hanyar masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kertak Hanyar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kertak Hanyar. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Kertak Hanyar 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2022 yaitu mengarah

kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Kertak Hanyar.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Kertak Hanyar

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kertak Hanyar yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Kertak Hanyar menetapkan sasaran yaitu : **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTAK HANYAR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperi yang ditunjukkan pada table 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kertak Hanyar dan RPJMD Kabupaten Banjar

Jumlah Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kertak Hanyar di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 sub-kegiatan.

Rencana kerja program dan kegiatan SKPD Kecamatan Kertak Hanyar untuk tahun 2021 yang mengacu kepada RKPD tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan target dan tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Kertak Hanyar dan RPJMD Kabupaten Banjar. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan. Dan untuk kebutuhan dana program dan kegiatan Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebesar **Rp. 1.740.162.260,-**

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kertak Hanyar di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kertak Hanyar sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kertak Hanyar dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp **5,065,195,717**

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Kertak Hanyar sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan maupun subkegiatan, yang berbeda hanya target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya evaluasi dari Kecamatan Kertak Hanyar untuk memudahkan pencapaian target sesuai yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kertak Hanyar untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kertak Hanyar

Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**5,065,195,717**				**5,267,803,546**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**4,884,237,717**				**5,079,607,226**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**2,560,000**				**2,662,400**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	6 Dokumen	270,000			100 Persen	280,800
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Dokumen	380,000			100 Persen	395,200
7	1	1	2	0, 1	0, 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar,	1 Dokumen	470,000			100 Persen	488,800

								Semua Keluraha n						
7	1	1	2	0, 1	0, 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	1 Dokumen	470,000			100 Persen	488,800
7	1	1	2	0, 1	0, 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	4 Dokumen	500,000			100 Persen	520,000
7	1	1	2	0, 1	0, 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	2 Dokumen	470,000			100 Persen	488,800
7	**1**	**1**	**2**	**0, 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	100 Persen	**4,302,932,917**				**4,475,050,234**
7	1	1	2	0, 2	0, 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Penghasilan ASN	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	31 ASN	4,237,947,917			100 Persen	4,407,465,834
7	1	1	2	0, 2	0, 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	12 Bulan	64,500,000			100 Persen	67,080,000

7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD Yang Tersusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Laporan	485,000				504,400
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**30,120,000**				**31,324,800**
7	1	1	2	0,3	0,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Tersusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	30,000				
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	2 Laporan	90,000			100 Persen	93,600
							Jumlah Rekon Yang Tersusun		4 Laporan					
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengurus Barang	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	12 Bulan	30,000,000			100 Persen	31,200,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**10,000,000**				**10,400,000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Tersusun	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua	1 Laporan	10,000,000			100 Persen	10,400,000

								Kelurahan						
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**150,379,200**				**156,394,368**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	3 Jenis	3,279,600			100 Persen	3,410,784
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (ATK)	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	23 Jenis	22,264,100				
							tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		2 Jenis					
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	6 Jenis	6,000,000			100 Persen	6,240,000
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	5 Jenis	4,409,500			100 Persen	4,585,880
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Tahun	6,160,000			100 Persen	6,406,400

7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	12 Bulan	108,266,000			100 Persen	112,596,640
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**13,590,000**			100 Persen	**14,133,600**
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	3 Jenis	13,590,000			100 Persen	14,133,600
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**319,675,600**			100 Persen	**332,462,624**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,000,000			100 Persen	1,040,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	12 Bulan	33,495,600			100 Persen	34,835,424
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua	13 Bulan	285,180,000			100 Persen	296,587,200

								Kelurahan						
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**54,980,000**			100 Persen	**57,179,200**
7	1	1	2	0,9	0,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	3 Kali	38,380,000			100 Persen	39,915,200
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	3 Buah	11,600,000			100 Persen	12,064,000
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Tahun	5,000,000			100 Persen	5,200,000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan Kertak Hanyar**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	83.25	**6,748,000**			100 Persen	**7,017,920**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	0 Kegiatan	**448,000**			100 Persen	465,920

7	1	2	2	0,2	0,3	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan PATEN Sesuai SOP yang dilaksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	11 Jenis Pelayana n	448,000			100 Persen	465,920
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah sub keg urusan pemerintahan yang terlaksana**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	4 Kegiatan	**6,300,000**			100 Persen	**6,552,000**
7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	1 Tahun	6,300,000			100 Persen	6,552,000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	100 Persen	**31,600,000**			100 Persen	**32,864,000**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	100 Persen	**31,600,000**			100 Persen	**32,864,000**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Desa Yang Tepat Waktu	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	10 Desa	11,100,000			100 Persen	11,544,000
							Terlaksanya Musrenbang Kecamatan Yang tepat Waktu		2 Kegiatan					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang Diikuti	Kab. Banjar,	2 Kegiatan	20,500,000			100 Persen	21,320,000

						Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Diikuti dan Dilaksanakan	Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	3 kegiatan					
							jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina		13 Desa					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**9,000,000**			100 Persen	**9,360,000**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	0 Kegiatan	**4,200,000**			100 Persen	**4,368,000**
7	1	4	2	0, 1	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Tahun	2,100,000			100 Persen	2,184,000
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Tahun	2,100,000			100 Persen	2,184,000
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub kegiatan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	**4,800,000**			100 Persen	**4,992,000**

7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	1 tahun	4,800,000			100 Persen	4,992,000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	0	**118,560,000**			100 Persen	**123,302,400**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	0 kegiatan	**118,560,000**			100 Persen	**123,302,400**
7	1	5	2	0, 1	0, 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	1 Tahun	24,050,000			100 Persen	25,012,000
7	1	5	2	0, 1	0, 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (MTQ, Safari, PHBI)	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Keluraha n	3 kegiatan	94,510,000			100 Persen	98,290,400

7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	100 Persen	**15,050,000**			100 Persen	**15,652,000**
7	**1**	**6**	**2**	**0, 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	0 Kegiatan	**15,050,000**			100 Persen	**15,652,000**
7	1	6	2	0, 1	0, 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	10 desa	12,600,000			100 Persen	13,104,000
7	1	6	2	0, 1	0, 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1,050,000			100 Persen	1,092,000
7	1	6	2	0, 1	0, 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	700,000			100 Persen	728,000
7	1	6	2	0, 1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Raung Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	700,000			100 Persen	728,000

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Kertak Hanyar dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Kertak Hanyar antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

43. Kecamatan Martapura Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Martapura Barat untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Martapura Barat guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Martapura Barat sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Martapura Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Martapura Barat 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Barat serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Martapura Barat mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Martapura Barat, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Martapura Barat berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Martapura Barat berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Martapura Barat dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Martapura Barat dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Martapura Barat berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Martapura Barat di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022 ini adalah :

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Martapura Barat dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Martapura Barat

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Martapura Barat).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Martapura Barat

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MARTAPURA BARAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Martapura Barat

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Martapura Barat tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 287.335.564,- (90,01%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 319.218.094,-**. Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan:
   - Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 67,34 (93,56%) melebihi target yang ditetapkan sebesar 72.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:
3. Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 83 (96,32%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 83.
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 6 laporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 0 laporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 4 laporan
      - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 laporan
      - Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 10 Jenis Laporan

      Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 205.460.054,- (86,88%) dari pagu anggaran sebesar Rp 236.468.094,-.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 2 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (95,24%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 5.250.000,-.
c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 2 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 9.480.000,- (99,79%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 9.500.000,-.
d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibabn Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 1 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.000.000,- (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 6.000.000,-
e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 4 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 61.395.000,- dari target pagu anggaran sebesar Rp 62.000.000,-

4. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Tidak ada program/kegiatan yang melebihi dari target
5. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Pelayanan penanganan pengaduan serta saran dan masukan belum maksimal, dimana menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan.
   - Terkendalanya koneksi dalam pengurusan e-KTP dan Kartu Keluarga bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen tersebut, sehingga mengakibatkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan sebuah dokumen.

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
   - Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Martapura Barat, yaitu:
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang terhambat.
   - Dengan adanya rasionalisasi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat

- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
- Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.

2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Martapura Barat. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Martapura Barat melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
   - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Martapura Barat adalah sebesar Rp 2.843.478.312,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura Barat sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura Barat	95	81,55	83,00	83	**100%**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Martapura Barat	84,00	67,34	72,00	67,34	**93,53%**			
7	01	02	2,01	0,02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100%**			
						Laporan Penata Usahaan Kantor	30	12	6	6	**100%**			
						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	2	1	0	0	**100%**			

						Laporan Pelayanan PATEN	28	12	4	4	**100%**			
						Laporan Barang Milik Daerah	10	2	2	2	**100%**			
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100%**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	14	6	2	2	**100%**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	18	6	2	2	**100%**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	5	2	1	1	**100%**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20	5	4	4	**100%**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura Barat sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	DI TAHUN INI TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**50%**	50%	50%

7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					50%	50%	50%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	266					152	50%	50%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	IKM Kecamatan Martapura Barat	84	81,55	83	83	**100%**	**83**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	14	6	2	2	**100%**	3	11	**100%**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	IKM Kecamatan Martapura Barat	84	81,55	83	83	**100%**	**83**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100%**	4	20	**83%**
						Laporan Pelayanan PATEN	28	12	4	4	**100%**	6	22	**79%**

						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100%**	4	24	**80%**
						Laporan Barang Milik Daerah	10	2	2	2	**100%**	2	6	**60%**
						Laporan Penatausahaan Kantor	30	12	6	6	**100%**	6	24	**80%**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	2	1	0	0	**100%**	0	1	**50%**
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Martapura Barat	84	81,55	83	83	**100%**	**83**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16	5	4	4	**100%**	0	9	**56%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Martapura Barat	84	81,55	83	83	**100%**	**83**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan di Kecamatan	18	6	2	2	**100%**	3	11	**61%**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**84**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Martapura Barat	84	81,55	83	83	**100%**	**83**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Kecamatan	5	2	1	1	**100%**	2	5	**100%**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Martapura Barat	84	81,55	83	83	**100%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	BELUM ADA PROGRAM/ KEGIATAN TSB	BELUM ADA PROGRAM/ KEGIATAN TSB	BELUM ADA PROGRAM/ KEGIATAN TSB	-	0	0	0%

					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									

Sumber:
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Martapura Barat Tahun 2020
- Laporan Evaluasi RKPD Triwullan II Kab. Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegaitan sampai dengan triwulan II pada Kecamatan Martapura Barat sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas, maka diperkirakan target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Martapura Barat**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Martapura Barat. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Martapura Barat, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Martapura Barat Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Martapura Barat Kalimantan Selatan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2022	2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura Barat			81,50	83	84	83,50	81,55	83	-	-	

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura Barat dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 81,55. Realisasi kinerja tersebut masih kurang dari target kinerja sebesar 84 dengan capaian kinerja 97%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Martapura Barat memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Martapura Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersedian signal internet
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Martapura Barat adalah :

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Martapura Barat akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Martapura Barat itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Martapura Barat sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah :

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Martapura Barat

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Martapura Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**438.800.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 Persen	**2.611.337.789**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Menyesuaikan dengan skup Kecamatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**75 Nilai**	**3.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**3.498.600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75 Nilai**	**31.600.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**2.262.723.657**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN

	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	19 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	19 ASN	2.229.863.657	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	4 Orang	30.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	4 Orang	31.860.000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	1.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**10.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**10.000.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan4 Laporan	1.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	1 Laporan	1.000.000	
								Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 Laporan		

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**9.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**7.480.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	1.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	1.480.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	8.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan PerundangUndangan yang Terlaksana	1 Orang	6.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun**	**75 Nilai100 Persen**	**99.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan** **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	75 Nilai 100 Persen	**67.801.800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1.989.900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	23 Jenis	14.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	23 Jenis	13.937.000	
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	7 Jenis	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	2.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya BahanLogistik Kantor	1 Kegiatan	4.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	2.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	3 Jenis	4.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	3 Jenis	3.999.900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Orang	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Orang	3.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	40.875.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**18.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**10.000.000**	

	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diBeli	1 Jenis	8.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang di Beli	1 Jenis	7.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	2 Jenis	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	2 Jenis	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**209.200.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**199.073.732**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	14.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	13.993.732	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Penyediaan Jasa Umum Kantor (PTT Kecamatan)	9Orang /PerBu la n	194.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Penyediaan Jasa Umum Kantor (PTT Kecamatan)	9 Orang/ Per Bulan	183.880.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**58.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**50.760.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	8 Unit	34.380.000	

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Terpelihara			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	4.380.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 Buah	13.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 Buah	12.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM KecamatanMartapura Barat**	**83,50Persen**	**25.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM Kecamatan Martapura Barat**	83,50 Persen	**22.979.200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**10.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**7.979.200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	38 JenisPelayanan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	38 Jenis Pelayanan	7.979.200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH

	Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**15.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	5 Kegiatan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	5 Kegiatan	15.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 Persen**	**22.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**		**19.000.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**22.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**19.000.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktuTerlaksananya	13 Desa2 Kegiatan	7.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	13 Desa	7.000.000	

	Pembangunan di Desa		Musrenbang Tingkat Kecamatan			Pembangunan di Desa		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah BUMDES Yang di dataJumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa Yang dibinaJumlah UMKM Yang didata	13 Desa100 Persen 13 Desa500Jumlah UMKM	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah BUMDES Yang di data	13 Desa	12.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
								Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	100 Persen		
								Jumlah PKK Desa Yang dibina	13 Desa		
								Jumlah UMKM Yang didata	500 Jumlah UMKM		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**9.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 Persen	**6.800.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**100 Persen 75 Nilai**	**2.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	100 Persen	**2.000.000**	

	Ketertiban Umum		**Nilai Evaluasi Kecamatan**			**Ketertiban Umum**					
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yangDilaksanakan	1 Kegiatan	2.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	2.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**5.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**2.800.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.800.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**2.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**2.000.000**	

	Ketertiban Umum					**Ketertiban Umum**					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Angka StabilitasKeamanan Lokal**	**0 Persen**	**48.700.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Angka Stabilitas Keamanan Lokal**	0 Persen	**113.306.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**48.700.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**113.306.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	38.700.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	61.900.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	10.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	51.406.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**6.500.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 Persen	**6.440.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	**75 Nilai**	**6.500.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	75 Nilai	**6.440.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	13Kegiatan	1.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	13 Kegiatan	1.480.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1.480.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Pelaksanaan Pemeilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Pelaksanaan Pemeilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2.000.000	

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayaguna an Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1.480.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH

Sumber data : Rancangan awal RKPD dan Renstra SIPD Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Kecamatan Martapura Barat adalh sebagai berikut :

1. Untuk rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan indikator pada salah satu program sebagiamana dijelaskan pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.
2. Untuk pagu dana pada beberapa perbedaan pagu dana pada Rancangan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan. Penjelasan singkat terkait penyebab terjadinya perbedaan dimaksud bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di atas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan /subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Martapura Barat tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *“Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3. **Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan**

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan

Bencana:

6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4. Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten 10. Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Martapura Barat berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Martapura Barat masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Martapura Barat Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Martapura Barat 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Martapura Barat tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Martapura Barat.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Kecamatan Martapura Barat

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Martapura Barat yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik , Kecamatan Martapura Barat menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 74.

3.3. **Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 di sub bab 3.2 ini dijelaskan terkait dengan program dan kegiatan serta subkegiatan prioritas serta pertimbangan terkait pemilihan program dan kegiatan dan subkegiatan tersebut.

Dasar pertimbangan penetapan program prioritas ini adalah:

1. Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif , dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indicator meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Mengacu pada sasaran Renstra Kecamatan Martapura Barat yaitu Terselenggaranya Pelayanan Publik.

Jumlah Program Prioritas pada rencana kerja Kecamatan Martapura Barat tahun 2022 ada 1 (satu) program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Program IKM Kecamatan Martapura Barat. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program ini adalah sebesar Rp. 21.006.000,- (dua puluh satu juta enam ribu rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3. dibawah ini:

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Martapura Barat dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura Barat di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.366.037.319,00.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura Barat di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Martapura Barat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Martapura Barat dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 2.366.037.319,00.
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Martapura Barat sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan, namun ada 1 subkegiatan yang bukan merupakan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan. Adapun perbedaan target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya karena adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022 di Kecamatan Martapura Barat.
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Pagu indikatif lebih kecil dikarenakan adanya pengurangan jumlah target, penyesuaian jenis belanja dan anggaran dianggap terlalu besar dalam pencapaian target. Sedangkan untuk pagu indikatifnya lebih besar karenakan adanya penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Martapura Barat untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Martapura Barat

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2.779.862.989**				**2.891.057.509**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	**2.611.337.789**			100 Persen	**2.715.791.301**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**3.498.600**			100 Persen	**3.638.544**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	6 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792
7	1	1	2	0, 1	0, 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792
7	1	1	2	0, 1	0, 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792

7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	4 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**2.262.723.657**			100 Persen	**2.353.232.603**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	19 ASN	2.229.863.657			100 Persen	2.319.058.203
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	4 Orang	31.860.000			100 Persen	33.134.400
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000			100 Persen	1.040.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**10.000.000**			100 Persen	**10.400.000**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000			100 Persen	1.040.000
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		4 Laporan				100 Persen	-

7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Orang	9.000.000			100 Persen	9.360.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**7.480.000**			100 Persen	7.779.200
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.480.000			100 Persen	1.539.200
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan PerundangUndangan yang Terlaksana	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Orang	6.000.000			100 Persen	6.240.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**67.801.800**			100 Persen	**70.513.872**
							Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun		100 Persen				100 Persen	
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	5 Jenis	1.989.900			100 Persen	2.069.496
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	23 Jenis	13.937.000			100 Persen	14.494.480
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	7 Jenis	2.000.000			100 Persen	2.080.000

7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	3 Jenis	3.999.900			100 Persen	4.159.896
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	50 Orang	3.000.000			100 Persen	3.120.000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	12 Bulan	40.875.000			100 Persen	42.510.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**10.000.000**			100 Persen	**10.400.000**
7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Beli	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Jenis	7.000.000			100 Persen	7.280.000
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2 Jenis	3.000.000			100 Persen	3.120.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**199.073.732**			100 Persen	**207.036.681**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.200.000			100 Persen	1.248.000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	12 Bulan	13.993.732			100 Persen	14.553.481

7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Penyediaan Jasa Umum Kantor (PTT Kecamatan)	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	9 Orang/ Per Bulan	183.880.000			100 Persen	191.235.200
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**50.760.000**			100 Persen	**52.790.400**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	8 Unit	34.380.000			100 Persen	**35.755.200**
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	4 Jenis	4.380.000			100 Persen	4.555.200
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	3 Buah	12.000.000			100 Persen	12.480.000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM Kecamatan Martapura Barat**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	83,50 Persen	**22.979.200**			100 Persen	**23.898.368**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**7.979.200**			100 Persen	**8.298.368**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	38 Jenis Pelayanan	7.979.200			100 Persen	**8.298.368**
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**15.000.000**			100 Persen	**15.600.000**

7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	15.000.000			100 Persen	15.600.000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan		**19.000.000**			100 Persen	**19.760.000**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**19.000.000**			100 Persen	**19.760.000**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	13 Desa	7.000.000			100 Persen	7.280.000
							Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan		2 Kegiatan					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah BUMDES Yang di data	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	13 Desa	12.000.000			100 Persen	12.480.000
							Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan		100 Persen					
							Jumlah PKK Desa Yang dibina		13 Desa					
							Jumlah UMKM Yang didata		500 Jumlah UMKM					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	**6.800.000**			100 Persen	**7.072.000**
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	**2.000.000**			100 Persen	**2.080.000**

							Nilai Evaluasi Kecamatan		75 Nilai				100 Persen	
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**2.800.000**			100 Persen	**2.912.000**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.800.000			100 Persen	2.912.000
7	**1**	**4**	**2**	**0, 3**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**2.000.000**			100 Persen	2.080.000
7	1	4	2	0, 3	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka Stabilitas Keamanan Lokal**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	0 Persen	**113.306.000**			100 Persen	**117.838.240**

7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**113.306.000**			100 Persen	**117.838.240**
7	1	5	2	0, 1	0, 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	61.900.000			100 Persen	64.376.000
7	1	5	2	0, 1	0, 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	51.406.000			100 Persen	53.462.240
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	**6.440.000**			100 Persen	**6.697.600**
7	**1**	**6**	**2**	**0, 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Nilai Evaluasi Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	75 Nilai	**6.440.000**			100 Persen	**6.697.600**

7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	13 Kegiatan	1.480.000			100 Persen	1.539.200
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1.480.000			100 Persen	1.539.200
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemeilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1.480.000			100 Persen	1.539.200

Sumber: Renja SIPD Kecamatan Martapura Barat 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapian target kinerja Renstra Kecamatan Martapura Barat dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Martapura Barat untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Martapura Barat dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022

Demikian penyusunan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2022 untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk seluruh pihak yang terlibat.

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,611,337,789**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,498,600**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	499,800	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	499,800	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	499,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	499,800	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	499,800	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	499,800	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	499,800	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,262,723,657**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 Persen	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	19 ASN	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura	2,229,863,657	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
						Kecamatan						Barat, Semua Kelurahan		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	31,860,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,000,000	
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10,000,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan 4 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,000,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	9,000,000	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,480,000**	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,480,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	6,000,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**67,801,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,989,900	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	23 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	13,937,000	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	3,999,900	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	40,875,000	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Mebel yang di Beli	1 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	7,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	2 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**199,073,732**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,200,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	13,093,732	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Penyediaan Jasa Umum Kantor (PTT Kecamatan)	9 Orang/Per Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	183,880,000	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50,760,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	8 Unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	34,380,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	4,380,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 Buah	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	12,000,000	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**22,979,200**	
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**7,979,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Martapura Barat	83,50 Persen	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	38 Jenis Pelayanan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	7,979,200	
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**15,000,000**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai IKM Kecamatan Martapura Barat	83,50 Persen	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	5 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	15,000,000	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**19,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**19,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu Terlaksanannya Musrenbang Tingkat Kecamatan	13 Desa 2 Kegiatan	Nilai Evalusi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	7,000,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Jumlah BUMDES Yang di data Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa Yang dibina Jumlah UMKM Yang didata	13 Desa 100 Persen 13 Desa 500 Jumlah UMKM	Nilai Evalusi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	12,000,000	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,800,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**2,000,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 persen	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**2,800,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 persen	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2,800,000	
7 01 04 2.00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								**2,000,000**	
7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 persen	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**113,306,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pewagasan Kepala Daerah**								**113,306,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka Stabilitas Keamanan Lokal	0 Persen	Jumlah kegatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	61,900,000	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka Stabilitas Keamanan Lokal	0 Persen	Jumlah kegataan keagamaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	51,406,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Martapura Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**6,440,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**6,440,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	13 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,480,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,480,000	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	2,000,000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 Nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,480,000	
												TOTAL	**2,779,862,989**	

44. Kecamatan Martapura Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Martapura Timur untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Martapura Timur guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Martapura Timur sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Martapura Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Martapura Timur 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Timur serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Martapura Timur mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Martapura Timur, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Martapura Timur berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Martapura Timur berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Martapura Timur dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Martapura Timur dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Martapura Timur berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);

17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Martapura Timur di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2022 ini adalah :

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Martapura Timur dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Martapura Timur

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Martapura Timur.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Martapura Timur

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MARTAPURA TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Martapura Timur

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2. 2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar yang mengampu Urusan Kecamatan melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Martapura Timur tahun 2020 yaitu sebesar **Rp 354.003.632,- (98,76%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 358.451.021,-.** Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran

   - Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan dengan indicator :

   1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar realisasi capaian sebesar 90,21 (98,77%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 91,33.

   2. Nilai SAKIP tahun 2020 capaian realisasi sebesar 68,50 (91,00%) masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 75,27.

2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :

      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan

- Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 22 Pelaporan

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 265.853.632,- (98,35%) dari pagu anggaran sebesar Rp 270.301.021,-.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 7 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- (100 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 6.500.000,-.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 11 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 13.050.000,- (100 %) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 13.050.000,-.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi kinerja sebesar 100% dengan target 4 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,- (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi kineja sebesar 100% dengan target 10 jenis laporan kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 67.100.000,- (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 67.100.000,-.

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal
   - Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja.
   - Kegiatan terhambat akibat adanya pandemic covid-19

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
   - Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
   - Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Martapura Timur, yaitu:

   Dengan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak bisa mencapai target yang ditentukan. Sehingga berimplikasi negative terhadap capaian Renstra Kecamatan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.
   - Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
   - Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
   - Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.
   -

3. 2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Martapura Timur, namun demikian untuk Indikator dari kegiatan yang sekarang menjadi indicator pada subkegiatan masih tetap sama. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Martapura Timur melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
   - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:

- Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Martapura Timur adalah sebesar **Rp. 3.028.207.013,- (Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Belas Rupiah).**

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II Kecamatan Martapura Timur dan perikiraan capaian target akhir periode Renstra untuk Kecamatan Martapura Timur dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura Timur sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura Timur	96.33	80,28	91.33	90.21	**98.77%**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Martapura Timur	80.27	62.81	75.27	68.5	**91.01%**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100%**			
						Laporan Penata Usahaan Kantor	7	2	2	2	**100%**			
						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100%**			

						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100%**			
						Laporan Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100%**			
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	66	22	22	23	**105%**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	7	7	7	7	**100%**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	12	11	11	11	**100%**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4	4	4	4	**100%**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	10	10	10	10	**100%**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura Timur sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**100%**	50%	100%

					KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					50%	50%	50%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	14 ASN					14 ASN	50%	50%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	IKM Kecamatan Martapura Timur	96.33	80,28	91.33	90.21	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	21	7	7	7	**100%**	5	19	**100%**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	IKM Kecamatan Martapura Timur	96.33	81.83	91.33	90.21	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100%**	5	21	**88%**

					Wilayah Kecamatan									
						Laporan Penata Usahaan Kantor	8	2	2	2	**100%**	2	6	**75%**
						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100%**	0	2	**67%**
						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100%**	6	30	**83%**
						Laporan Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100%**	1	5	**83%**
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	66	22	22	23	**105%**	11	56	**85%**
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Martapura Timur	96.33	81.83	91.33	90.21	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	30	10	10	10	**105%**	5	25	**83%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Martapura Timur	96.33	81.83	91.33	90.21	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan di Kecamatan	34	11	11	11	**100%**	6	28	**82%**

					Wilayah Kecamatan									
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Martapura Timur	96.33	81.83	91.33	90.21	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Kecamatan	12	4	4	4	**100%**	2	10	**83%**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	**01**	**05**	**2.01**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Martapura Timur	96.33	81.83	91.33	90.21	**98.77%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

7	**01**	**05**	**2.01**	**01**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	BELUM ADA PROGRAM/ KEGIATAN TSB	BELUM ADA PROGRAM/ KEGIATAN TSB	BELUM ADA PROGRAM/ KEGIATAN TSB	-	0	0	100%

Sumber:
- LKJIP Kecamatan Martapura Timur Tahun 2020
- Laporan Evaluasi Renja Triwullan II Kab. Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Martapura Timur sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian sampai dengan triwulan II sudah di atas 50 persen untuk semua program/kegiatan/subkegiatan maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Martapura Timur

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Martapura Timur. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Martapura Timur, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Martapura Timur Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

Tabel 2.2.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Martapura Timur Kalimantan Selatan Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2022	2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura Timur			86,33	91,33	96,33	90,30	80,28	90,21	-	-	

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura Timur dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 90,21. Realisasi kinerja tersebut masih kurang dari target kinerja sebesar 91,33 dengan capaian kinerja 98,77% .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Martapura Timur memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Martapura Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersedian signal internet
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Martapura Timur adalah :

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Martapura Timur akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Martapura Timur itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Martapura Timur sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah :

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Martapura Timur

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**437,420,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 Persen	**2,452,988,839**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 persen**	**1,400,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**persentase jumlah sub kegiatan perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yang tersusun**	100 Persen	**1,600,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	200,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	400,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000	
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	200,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	200,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	200,000	
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	200,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	200,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**28,800,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 Persen	**2,049,486,839**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji Dan Tambahan Penghasilan ASN	20 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji Dan Tambahan Penghasilan ASN	20 ASN	2,014,986,839	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk

											penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	4 orang	28,500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	34,200,000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 laporan	300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	300,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 persen**	**12,300,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yg tersusun**	100 Persen	**12,300,000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yg tersusun Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yg terlaksana	1 laporan 4 laporan	300,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yg tersususn	1 Laporan	300,000	
								Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada	4 Laporan		

								SKPD yg terlaksana			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	12,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	12,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**10,480,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	100 Persen	**10,480,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	1 Laporan	480,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	1 Laopran	480,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah ASN yang paham tentang materi Bimtek	1 orang	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	1 Orang	10,000,000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**73,490,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 Persen	**83,340,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instlalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantori	3 Jenis	1,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	3 Jenis	1,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	12,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	12,000,000	
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah tangga	10 Jenis	1,490,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah tangga	10 Jenis	1,490,000	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya Bahan logistik Kantor	1 kegiatan	5,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Peralatan Rumah tangga	12 Bulan	5,400,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya pencetakan dan Penggandaan	2 Jenis	1,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Peralatan Rumah tangga	12 Bulan	1,500,000	
	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	50 0rang	1,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Peralatan Rumah tangga	12 Bulan	1,500,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 bulan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	59,950,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 persen**	**13,440,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	100 Persen	**12,862,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang di beli	1 Jenis	3,440,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang di beli	1 Jenis	3,177,000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah Peralatan danMesin Lainnya yg di beli	1 Jenis	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	9,685,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100 persen**	**235,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 Persen	**220,690,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersdianya Jasa surat menyurat	12 bulan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersdianya Jasa surat menyurat	12 Bulan	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	31,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	31,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan UmumKantor yang tersedia	10 orang	202,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	187,690,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**62,510,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100 Persen	**62,230,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	7 unit	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	44,720,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	3 Jenis	5,510,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	3 Jenis	5,510,000	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	4 buah	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	12,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD Beda Satuan Target : Lebih terukur
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**NILAI IKM KecamatanMartapura Timur**	**90.30 persen**	**14,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**NILAI IKM Kecamatan Martapura Timur Timur**	90,30 Persen	**12,000,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100 persen**	**2,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	100 Persen	**2,000,000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	17 JenisPelayanan	2,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	17 jenis Pelayanan	2,000,000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksanaa**	**1 sub kegiatan**	**12,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadaCamat yang terlaksanaa**	1 sub kegiatan	**10,000,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yg dilaksanakan	1 kegiatan	12,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yg dilaksanakan	1 kegiatan	10,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**0 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**22,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**0 Persentase Terlaksanany a Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Desa**	100 Persen	**20,218,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana**	**2 sub kegiatan**	**22,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Desa yang terlaksana**	2 sub kegiatan	**20,218,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktuTerlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	20 Desa2 kegiatan	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	20 Desa	9,250,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan		Beda Pagu : Menyesuaikan

											kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes YangTerdatajumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yg diikuti dan dilaksankan Jumlah PKK Desa/Keluraha n Yang TerbinaJumlah UMKM DesaYang Didata	5 buah4 kali20 desa12 UMKM	12,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes Yang Terdata	5 Buah	10,968,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan penyesuaian SSH
								jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yg diikuti dan dilaksanakan	2 Kegiatan		
								Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	20 Desa		
								Jumlah UMKM Desa Yang Didata	12 UMKM		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**8,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 Persen	**8,000,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	**2 sub kegiatan**	**5,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterama**	2 sub kegiatan	**5,000,000**	

			dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi					**n danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 kegiatan	3,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 kegiatan	3,000,000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakoor FKUB yg dilaksanakan	1 kegiatan	2,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakoor FKUB yg dilaksanakan	1 kegiatan	2,000,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana**	**1 sub kegiatan**	**3,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penerapan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah yang terlaksana**	1 sub kegiatan	**3,000,000**	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 kegiatan	3,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 kegiatan	3,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0 persen**	**75,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	0 persen	**80,450,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan penyesuaian SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**2 sub kegiatan**	**75,500,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	2 sub kegiatan	**80,450,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan penyesuaian SSH

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,500,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,500,000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	60,000,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	3 kegiatan	64,950,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**26,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 Persen	**24,250,000**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**7 fasilitasi**	**26,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	7 fasilitasi	**24,250,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan penyesuaian SSH
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	3,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	2,250,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan penyesuaian SSH
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	2 kegiatan	6,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	5,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan penyesuaian SSH
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	3,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	3,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	6 kegiatan	9,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	6 kegiatan	9,000,000	

			Desa yang Terfasilitasi					Desa yang Terfasilitasi			
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	1,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	1,500,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlahi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	1,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlahi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	1,500,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Penataan,Pemanfaatan,d an Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	2,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Penataan,Pemanfaatan,dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	2,000,000	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Martapura Timur

Sumber data : Rancangan awal RKPD dan Renstra SIPD Kecamatan Martapura Timur Tahun 2022

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa ada perbedaan antara hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Kecamatan Martapura Timur. Perbedaan terkait dengan indicator pada program penunjang, dan beberapa perbeda pagu dana pada beberpa program/kegiatan dan sub kegiatan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di atas.

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada Kecamatan Martapura Timur dengan hasil analisis kebutuhan, adalah sebagai berikut, bahwa terkait dengan rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama.

Namun demikian ada perbedaan terkait dengan target satuan, perbedaan pagu dana pada beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di atas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan /subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Martapura Timur tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN MARTAPURA TIMUR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

1. Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan

2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Martapura Timur berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Martapura Timur masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Martapura Timur Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Martapura Timur 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Martapura Timur tahun 2022 yaitu mengarah

kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Martapura Timur.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan NN

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Martapura Timur yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik , Kecamatan Martapura Timur menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 73.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARTAPURA TIMUR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Martapura Timur dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura Timur di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 45 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.597.906.839,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura Timur di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 45 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Martapura Timur sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Martapura Timur dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 2.597.906.839,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Martapura Timur sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan. Adapun perbedaan satuan target dan pagu dana di beberapa program/kegiatan/subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya karena adanya penyesuaian perubahan pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Barang Unit (SBU) yang ditetapkan pada tahun 2022 di Kecamatan Martapura Timur.
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD, hal ini dikarenakan adanya pengurangan penyesuaian jenis belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD termasuk didalamanya adanya penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Martapura Timur untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Martapura Timur Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Martapura Timur

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,597,906,839**				**2,701,823,113**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**2,452,988,839**			100 Persen	**2,551,108,393**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase jumlah sub kegiatan perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yang tersusun**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**1,600,000**			100 Persen	**1,664,000**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	7 Dokumen	400,000			100 Persen	416,000
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000			100 Persen	208,000

7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000			100 Persen	208,000
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000			100 Persen	208,000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000			100 Persen	208,000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3 Dokumen	200,000			100 Persen	208,000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	24 Laporan	200,000			100 Persen	208,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**2,049,486,839**			100 Persen	**2,131,466,313**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tambahan Penghasilan ASN	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	20 ASN	2,014,986,839			100 Persen	2,095,586,313

7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2 Laporan	34,200,000			100 Persen	35,568,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Laporan	300,000			100 Persen	312,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yg tersusun**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**12,300,000**			100 Persen	**12,792,000**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yg tersususn Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yg terlaksana	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Laporan 4 Laporan	300,000			100 Persen	312,000
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Orang	12,000,000			100 Persen	12,480,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**10,480,000**				**10,899,200**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	Kab. Banjar, Martapura Timur,	1 Laopran	480,000			100 Persen	499,200

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Orang	10,000,000			100 Persen	10,400,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**83,340,000**			100 Persen	**86,673,600**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3 Jenis	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	25 Jenis	12,000,000				12,480,000
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	10 Jenis	1,490,000			100 Persen	1,549,600
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12 Bulan	5,400,000			100 Persen	5,616,000

7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12 Bulan	59,950,000			100 Persen	62,348,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**12,862,000**			100 Persen	**13,376,480**
7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di beli	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Jenis	3,177,000			100 Persen	**3,304,080**
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 Unit	9,685,000			100 Persen	10,072,400
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**220,690,000**			100 Persen	**229,517,600**

7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersdianya Jasa surat menyurat	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12 Bulan	31,500,000			100 Persen	32,760,000
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12 Bulan	187,690,000			100 Persen	195,197,600
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**62,230,000**			100 Persen	**64,719,200**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	7 Unit	44,720,000			100 Persen	**46,508,800**
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3 Jenis	5,510,000			100 Persen	**5,730,400**
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2 Gedung	12,000,000			100 Persen	**12,480,000**

7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**NILAI IKM Kecamatan Martapura Timur Timur**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	90,30 Persen	**12,000,000**			100 Persen	**12,480,000**
7	**1**	**2**	**2**	**0, 2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**2,000,000**			100 Persen	**2,080,000**
7	1	2	2	0, 2	0, 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	17 jenis Pelayanan	2,000,000			100 Persen	**2,080,000**
7	**1**	**2**	**2**	**0, 4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadaCamat yang terlaksanaa**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 sub kegiatan	**10,000,000**			100 Persen	**10,400,000**
7	1	2	2	0, 4	0, 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yg dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	10,000,000			100 Persen	10,400,000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**0 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**20,218,000**			100 Persen	**21,026,720**
7	**1**	**3**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2 sub kegiatan	**20,218,000**			100 Persen	**21,026,720**

7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	20 Desa	9,250,000			100 Persen	9,620,000
							Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan		2 Kegiatan					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumdes Yang Terdata	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	5 Buah	10,968,000			100 Persen	11,406,720
							jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yg diikuti dan dilaksanakan		2 Kegiatan					
							Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina		20 Desa					
							Jumlah UMKM Desa Yang Didata		12 UMKM					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**8,000,000**			100 Persen	8,320,000
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2 sub kegiatan	**5,000,000**			100 Persen	5,200,000
7	1	4	2	0,1	0,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	3,000,000			100 Persen	3,120,000

7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakoor FKUB yg dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penerapan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 sub kegiatan	**3,000,000**			100 Persen	**3,120,000**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	3,000,000			100 Persen	3,120,000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	0 persen	**80,450,000**			100 Persen	**83,668,000**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2 sub kegiatan	**80,450,000**			100 Persen	**83,668,000**

7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	15,500,000			100 Persen	16,120,000
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3 kegiatan	64,950,000			100 Persen	
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	100 Persen	**24,250,000**			100 Persen	**25,220,000**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	7 fasilitasi	**24,250,000**			100 Persen	**25,220,000**
7	1	6	2	0,1	0,1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	2,250,000			100 Persen	**2,340,000**

7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	5,000,000			100 Persen	5,200,000
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	3,000,000			100 Persen	3,120,000
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	6 kegiatan	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlahi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penataan,Pemanfaatan,dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1 kegiatan	2,000,000			100 Persen	2,080,000

Sumber: Renja SIPD Kecamatan Martapura Timur 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2022 yang berisi program/kegiatan/subkegiatan beserta indicator dan targetnya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapian target kinerja Renstra Kecamatan Martapura Timur dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Renja Kecamatan Martapura Timur ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Dalam hal kondisi jika ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Martapura Timur untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Demikian penyusunan Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2022 untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk seluruh pihak yang terlibat.

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,452,988,839**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,600,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	400,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	200,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	200,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai		200,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	200,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai		200,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	200,000	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,049,486,839**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Terbayarnya Gaji Dan Tambahan Penghasilan ASN	20 ASN	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua	2,014,986,839	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Kelurahan		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	34,200,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000	
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**12,300,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yg tersusun Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yg terlaksana	1 laporan 4 laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	300,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10,480,000**	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yg tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	480,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	1 orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**83,340,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan	100 persen	Tersedianya Komponen Instlalasi Listrik/Penerangan	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
	Bangunan Kantor	Pemerintah Daerah		Bangunan Kantor				Timur, Semua Kelurahan		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12,000,000	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	10 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1,490,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Bahan logistik Kantor	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	5,400,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1,500,000	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Tamu yang terfasilitasi	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kelurahan	1,500,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	59,950,000	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,862,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Mebel yang di beli	1 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3,177,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan	100 persen	Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura	9,685,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
		Pemerintah Daerah						Timur, Semua Kelurahan		
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**220,690,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Tersedianya Jasa surat menyurat	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1,500,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	31,500,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	187,690,000	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62,230,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	44,720,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	5,510,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 gedung	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	12,000,000	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**12,000,000**	
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**2,000,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	NILAI IKM Kecamatan Martapura Timur	90.80 persen	Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di	17 Jenis Pelayanan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
	Wilayah Kecamatan			laksanakan kecamatan				Timur, Semua Kelurahan		
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**10,000,000**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NILAI IKM Kecamatan Martapura Timur	90.30 persen	Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yg dilaksanakan	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	10,000,000	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**20,218,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**20,218,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu Terlaksanannya Musrenbang Tingkat Kecamatan	20 Desa 2 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	9,250,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	Jumlah Bumdes Yang Terdata jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yg diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina Jumlah UMKM Desa Yang Didata	5 buah 2 kegiatan 20 desa 12 UMKM	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	10,968,000	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**8,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**5,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 persen	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Persentase Fasilitasi Penanganan	100 persen	Jumlah Rakoor FKUB yg dilaksanakan	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
	Tokoh Masyarakat	Tramtibumlinmas						Timur, Semua Kelurahan		
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**3,000,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 persen	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**80,450,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**80,450,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	0 persen	Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	15,500,000	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka stabilitas keamanan lokal	0 persen	Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai		64,950,000	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**24,250,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**24,250,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Martapura Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2,250,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	2 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	5,000,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	6 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	9,000,000	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1,500,000	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	1,500,000	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Penataan,Pemanfaatan,dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang terfasilitasi	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	75 nilai	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kelurahan	2,000,000	
								TOTAL	**2,597,906,839**	

45. Kecamatan Martapura

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Martapura untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Martapura guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Martapura sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Martapura untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Martapura Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Martapura 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Martapura mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Martapura, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Martapura berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Martapura berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Martapura dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Martapura dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Martapura berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(sesuaikan/tambahkan di Kecamatan lain)

12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Martapura Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Martapura di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Martapura Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Martapura dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I.	Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Martapura Tahun Lalu Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Martapura Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Martapura).
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Martapura Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB V.	Penutup Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MARTAPURA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Martapura

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Martapura tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 5.414.382.110,- (94,7%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 5.718.730.651,** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi indicator program yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada realisasi capaian indikator Program :

- Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,56 (100,62%) lebih tinggi dari target yang ditetapkan 90.

- Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 68,19 (119,63%) lebih tinggi dari target sebesar 57.

2. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu : tidak ada, semua memenuhi.
3. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
    1. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan target indikator kinerjanya 6 jenis laporan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100%, dengan rincian jenis laporan tersebut,yaitu : Laporan Administrasi Kepegawaian, Laporan Pelayanan Paten, Laporan Dokumen Perencanaan dan Keuangan, Laporan Penatausahaan Kantor, Laporan Sarana dan Prasarana, Laporan Barang Milik Daerah. Realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan sebesar Rp. 512.298.268,00(88,06%) dari target sebesar Rp. 581.740.000,00.Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan target indikator kinerjanya 2 jenis laporan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100%, dengan rincian jenis laporan tersebut, yaitu : Laporan Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan, Laporan Pelayanan umum pemerintahan Realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sebesar Rp. 23.252.000,00(97%) dari target sebesar Rp. 24.022.000,00,.
    2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan target indicator kinerjanya 4 jenis laporan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100%, dengan rincian jenis laporan tersebut, yaitu : Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Laporan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Laporan Koordinasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan, Laporan Pelayanan umum Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi

anggaran kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan sebesar Rp. 23.403.425,00(66%) dari target sebesar Rp. 33.796.425,00.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan target indicator kinerjanya 2 jenis laporan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100%, dengan rincian jenis laporan tersebut, yaitu : Laporan Pengawasan dan Penegakan Perda, Laporan Pelayanan umum Tramtib. Realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Kecamatan sebesar Rp. 8.122.000,00(71%) dari target sebesar Rp. 11.480.000,00.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan target indicator kinerjanya target 4 jenis laporan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100%, dengan rincian jenis kegiatan, yaitu : Laporan Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten, Laporan Pelaksanaan Puskessos, Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Laporan Pelayanan Umum Kesos. Realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kecamatan sebesar Rp. 80.642.000,00 (90%) dari target sebesar Rp. 89.240.000,00.
5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD&DAU) target indicator kinerjanya 2 kegiatan dari masing – masing Kelurahan capaian realisasi kinerjanya 100%, . Realisasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar Rp. 2.939.959.330(97.91%) dari target sebesar Rp. 3.024.140.000,00.
6. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan target indikator kinerjanya 100% capaian realisasi kinerjanya sebesar 94,3%. Realisasi anggaran kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa sebesar Rp. 1.826.705.087,00 (93%) dari target sebesar Rp. 1.954.312.226,00.

4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
   - Faktor penyebab melebihi dan terpenuhinya target :
     a. Tingginya angka kesadaran aparatur pemangku program/kegiatan untuk Kecamatan Martapura.
     b. Aparatur yang bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan bersama
     c. Sumberdaya manusia yang tersedia di kecamatan Martapura sudah mumpuni sehingga menunjang tupoksi masing – masing
     d. Sarana dan prasarana penunjang tupoksi penanggung jawab program/kegiatan sudah tersedia
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Martapura, yaitu :
   a. Secara umum masyarakat sudah cukup puas dengan pelayanan yang telah diberikan
   b. Penilaian SAKIP yang sudah melebihi target yang telah dibuat menyebabkan penilaian akhir tahun untuk Kemcataman Martapura lebih baik
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat sesuai dengan kondisi pandemic covid-19
   b. Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   c. Menjalankan kegiatan sesuai perencanaan Renja dan Renstra yang telah dibuat.

2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Martapura. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Martapura melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan 6 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Martapura adalah sebesar Rp 8.760.438.854,-.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Martapura tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program// Sub	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura	95	85	**90**	90.56	**100.62**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Martapura	62	52	**57**	68.19	**119.63**			
7	01	02	2.01	0.02	Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	20	8	8	8	**100**			
						Penata Usahaan Kantor	30	12	12	12	**100**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100**			
						Pelayanan PATEN	30	12	12	12	**100**			
						Barang Milik Daerah	5	2	2	2	**100**			

						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	25	10	10	10	**100**			
7	01	01	01	06	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	5	2	2	2	**100**			
7	01	01	01	07	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	9	4	4	4	**100**			
7	01	01	01	08	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	3	2	1	1	**100**			
7	01	01	01	10	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	8	4	4	4	**100**			
7	01	01	01		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	2	100	100	100	**100**			
7	01	01	01		Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	2	2	2	**100**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				91.36	50	100
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100					91.36	50	100
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN & Tambahan Penghasilan	1134					648	648	**57.14**

7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Martapura	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Peningkatan efektifitas pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	6	2	2	2	**100.00**	1	5	**83.33**
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM Kecamatan Martapura	95	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan efektifitas pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**	4	20	**83.33**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**	5	25	**83.33**
						Brang Milik Daerah	6	2	2	2	**100.00**	1	5	**83.33**
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00**	1	3	**100.00**
			2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Martapura	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	12	**4**	4	4	**100.00**	0	8	**66.67**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Martapura	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				03	Peningkatan Efektifitas pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan	12	4	4	4	**100.00**	1	9	**75.00**
			2.02		Pemberdayaan Kelurahan	IKM Kecamatan Martapura	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelurahan	6	2	2	2	**100.00**	2	6	**100**
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	100	100	100	**100.00**	100	100	**100.00**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Martapura	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	**100.00**	0	4	**66.67**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Martapura	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya apel HUT RI di Kecamatan Martapura	1	0	0	0	**0**	0	0	**0.00**

Sumber:
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Martapura Tahun 2020
- Laporan Evaluasi RKPD Triwullan II Kab. Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 8 sub kegiatan pada Kecamatan Martapura sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Martapura

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Martapura. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM , IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Martapura, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Martapura Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Martapura
Kalimantan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura			85	90	95	90,56	85,31	90,56	-	-	

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 realisasi kinerjanya sebesar 83,94. Realisasi kinerja tersebut sudah melebihi dari target kinerja sebesar 83.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Martapura memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Martapura dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Martapura adalah:

- Adanya rencana kerja yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.
- Penyempurnaan dokumen dengan sasaran target yang lebih terukur jelas mempermudah perangkat daerah dalam pelaksanaanya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Martapura akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Martapura itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Martapura sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Martapura

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Kecamatan Martapura

Nama Perangkat Daerah: Martapura

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**913,554,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100%	**10,357,781,210**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 %**	**5,600,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	100%	**7,000,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat yang tersusun	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,960,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	280,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	280,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	280,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	280,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	1,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	3 Laporan	3,360,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	700,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	560,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**99,650,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	**9,682,119,610**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan

			Perangkat Daerah yang terlaksana					**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	100%		tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	81 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	81 ASN	9,575,639,610	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	99,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Verifikasi Keuangan	2 Laporan	106,200,000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	650,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	280,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yang tersusun**	**100 %**	**58,100,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yangtersusun**	**100%**	**58,120,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1 Laporan	1,100,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1 Laporan	1,120,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	4 Laporan				Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	4 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Orang	57,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	8 Orang	57,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**29,120,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100%**	**20,560,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Orang	8,000,000			**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangterlaksana**	**100%**		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 Laporan	1,120,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 Laporan	560,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	50 orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & Kompetensinya	2 Orang	20,000,000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Martapura,**	**Persentase Administrasi**	**100 Persen**	**202,743,000**	**Administrasi Umum**	**Kab. Banjar, Martapura,**	**Persentase Administrasi Umum**	**100%**	**122,006,600**	Beda Pagu : Menyesuaika

		Semua Kelurahan	**Umum Perangkat Daerah**			**Perangkat Daerah**	**Semua Kelurahan**	**Perangkat Daerah**			n kebutuhan pagu SKPD
								Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yangterlaksana	**100%**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	1,997,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	30,759,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	40 Unit	29,906,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD Beda Satuan Target : Lebih terukur
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	10 Jenis	6,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	18 Jenis	6,500,000	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Bahan logistik kantor	12 Bulan	4,620,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor	4 Bulan	2,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	11,064,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	11,103,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi KunjunganTamu		Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	6,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tamu yang Terfasilitasi	11 Bulan	5,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	141,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	65,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 %**	**30,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**	**12,224,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	**100%**		
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	5 Jenis	10,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	3 Jenis	7,229,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	...Unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	4,995,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**391,950,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**362,650,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

								Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**		
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	54,750,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	54,750,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	335,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	306,400,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**96,391,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100%**	**93,101,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
								Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	**100%**		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	56,781,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	56,781,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	19,610,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	16,320,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	4 Buah	20,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Nilai SKM**	**90.56 %**	**8,720,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Nilai SKM**	**90.56%**	**5,582,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	**100 %**	**5,520,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	**100%**	**2,782,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan Kecamatan	13 Jenis	5,520,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang di	13 Jenis	2,782,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan		laksanakan Kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terlaksana**	**100 %**	**3,200,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terlaksana**	**100%**	**2,800,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahtraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	3,200,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan Kecamatan	4 Kegiatan	2,800,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**2,641,135,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksanannya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**29,584,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**19 Desa**	**33,994,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**19 Desa**	**29,584,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu	26 Desa/Kelurahan	8,134,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu	26 Desa/ Kelurahan	5,779,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
			Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan				Terlaksanannya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah FasilitasiJambore dan Lomba PKKyang di ikuti	2 Kegiatan	25,860,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang di ikuti	2 Kegiatan	23,804,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	3 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Kegiatan		
			Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi	19 Desa				Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi	19 Desa		
			Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	19 Desa				Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	26 Desa/ Kelurahan		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana**	**7Kelurahan**	**2,607,141,000**						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Musrenbang Kelurahan yang tepat waktu	7Kelurahan	17,500,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang TerlaksanaJumlah Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	7Kelurahan7Kelurahan	-						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksanaJumlah Peningkatan Saranan Prasarana yang Terlaksana	7Kelurahan7Kelurahan	2,582,641,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Evaluasi Kelurahan		Evaluasi Kelurahan	1 Kegiatan	7,000,000						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 %**	**19,946,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100%**	**6,406,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi**	**6 Kegiatan**	**9,150,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	**6 Kegiatan**	**2,688,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	4 Kegiatan	6,150,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	4 Kegiatan	1,372,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	3,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	1,316,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi**	**13Kegiatan**	**10,796,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	**13 Kegiatan**	**3,718,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	13Kegiatan	10,796,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	3 Kegiatan	3,718,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0 0**	**95,828,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**91,082,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**4 Kegiatan**	**95,828,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**4 Kegiatan**	**91,082,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25,394,800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	24,875,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	70,433,200	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	66,207,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**26,598,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**17,375,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**14Kegiatan**	**26,598,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**14 Kegiatan**	**17,375,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	19 Desa	4,496,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	19 Desa	3,201,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	19 Desa	5,672,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	19 Desa	4,002,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	4 Kegiatan	11,904,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	4 Kegiatan	6,804,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	3 Kegiatan	2,426,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	3 Kegiatan	1,267,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penagasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	4 Kegiatan	2,100,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	4 Kegiatan	2,100,000	

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil review rancangan awal RKPD pada Kecamatan Martapura :

1. Rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan indikator pada salah satu program sebagiamana dijelaskan pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.
2. Terkait dengan target kinerja dari program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan ada sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut dikarenakan:
   - Indikator 12 bulan susah untuk diukur sehingga diganti dengan jumlah jenis laporan
   - Kecamatan Martapura menggolongkan DPA dan RKA, dan DPPA sebagai Dokumen Perencanaan sehingga tidak sama dengan rancangan awal
   - Dokumen pertanggungajawabn (SPJ-GU) bukan termasuk dokumen evaluasi, sehingga target jumlah laporan berbeda.
3. Dari enam program yang dibandingkan ada 3 program yang menurut hasil analisis kebutuhan pagu indikatifnya lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Ada beberapa alasan kenapa pagu hasil analisis berbeda dengan pagu rancangan awal RKPD:
   - Pada beberapa program/kegiatan pagu rancangan awal RKPD yang bersumber dari dokumen Renstra dianggap terlalu besar nominalnya dan angkanya masih bisa ditekan untuk mengejar target kinerja yang sama.
   - Ada pengurangan jumlah target kinerja pada beberapa kegiatan.
   - Adanya penyesuaian jenis belanja pada aplikasi.
4. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar daripada rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Martapura tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN MARTAPURA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
8. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
10. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
11. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Martapura berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan publik, maka Kecamatan Martapura masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Martapura

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Martapura. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Martapura 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Martapura tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan NN.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Martapura

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Martapura yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Martapura menetapkan sasaran yaitu : **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan .** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARTAPURA

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Martapura dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.357.781.210,-.

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Martapura sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Martapura dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 420.574.900,00.
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Martapura sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan namun ada perbedaan dari jumlah subkegiatan. Adapun perbedaan yang lebih banyak pada target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya evaluasi dari kecamatan Martapura untuk memudahkan pencapaian target sesuai yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Pagu indikatif lebih kecil dikarenakan adanya pengurangan jumlah target, penyesuaian jenis belanja dan anggaran dianggap terlalu besar dalam pencapaian target. Sedangkan untuk pagu indikatifnya lebih besar karenakan adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Martapura untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Martapura Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Martapura

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**10,507,812,610**				**10,928,125,114**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	100%	**10,357,781,210**			100 Persen	**10,772,092,458**
7	**1**	**1**	**2**	**0,1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	100%	**7,000,000**				**7,280,000**
							Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		100%				100 Persen	

							KinerjaPerangkat yang tersusun						
7	1	1	2	0,1	0,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	7 Dokumen	1,960,000			100 Persen	2,038,400
7	1	1	2	0,1	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1 Dokumen	280,000			100 Persen	291,200
7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1 Dokumen	280,000			100 Persen	291,200
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1 Dokumen	280,000			100 Persen	291,200
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1 Dokumen	280,000			100 Persen	291,200
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3 Laporan	3,360,000			100 Persen	3,494,400
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura	2 Dokumen	560,000			100 Persen	582,400

								, Semua Kelurahan					
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	100% 100%	**9,682,119,610**			100 Persen	**10,069,404,394**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	81 ASN	9,575,639,610			100 Persen	9,958,665,194
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Verifikasi Keuangan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	2 Laporan	106,200,000			100 Persen	110,448,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1 Laporan	280,000			100 Persen	291,200
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yangtersusun**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**58,120,000**			100 Persen	**60,444,800**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura	1 Laporan	1,120,000			100 Persen	1,164,800

						Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	, Semua Kelurahan	4 Laporan					
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	8 Orang	57,000,000			100 Persen	59,280,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**20,560,000**			100 Persen	**21,382,400**
							Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangterlaksana		**100%**				100 Persen	-
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1 Laporan	560,000			100 Persen	582,400
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & Kompetensinya	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	2 Orang	20,000,000			100 Persen	20,800,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**122,006,600**			100 Persen	**126,886,864**
							Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat		**100%**					

							Daerah yangterlaksana							
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3 Jenis	1,997,600			100 Persen	2,077,504
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	40 Unit	29,906,000			100 Persen	31,102,240
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	18 Jenis	6,500,000			100 Persen	6,760,000
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	4 Bulan	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	12 Bulan	11,103,000			100 Persen	11,547,120
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	11 Bulan	5,500,000			100 Persen	5,720,000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	12 Bulan	65,000,000			100 Persen	67,600,000

7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah yang terlaksana** **Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%** **100%**	**12,224,000**			100 Persen	12,712,960
7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3 Jenis	7,229,000			100 Persen	7,518,160
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	2 Unit	4,995,000			100 Persen	5,194,800
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang tersedia** **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%** **100%**	**362,650,000**			100 Persen	**377,156,000**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Martapura	12 Bulan	54,750,000			100 Persen	56,940,000

						Sumber Daya Air dan Listrik		, Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	12 Bulan	306,400,000			100 Persen	318,656,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**93,101,000**			100 Persen	**96,825,040**
							Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah		**100%**				100 Persen	
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	7 Unit	56,781,000			100 Persen	**59,052,240**
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3 jenis	16,320,000			100 Persen	**16,972,800**
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Martapura	4 Buah	20,000,000			100 Persen	**20,800,000**

						dan Bangunan Lainnya		, Semua Kelurahan					
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Nilai SKM**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**90.56%**	**5,582,000**			100 Persen **5,805,280**
7	**1**	**2**	**2**	**0, 2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**2,782,000**			100 Persen **2,893,280**
7	1	2	2	0, 2	0, 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan Kecamatan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	13 Jenis	2,782,000			100 Persen **2,893,280**
7	**1**	**2**	**2**	**0, 4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**2,800,000**			100 Persen **2,912,000**
7	1	2	2	0, 4	0, 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan Kecamatan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	2,800,000			100 Persen **2,912,000**

						Lain yang Dilimpahkan							
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**29,584,400**			100 Persen	**30,767,776**
7	**1**	**3**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**19 Desa**	**29,584,400**			100 Persen	**30,767,776**
7	1	3	2	0, 1	0, 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	26 Desa/ Kelurahan	5,779,600			100 Persen	**6,010,784**
							Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu		2 Kegiatan					
7	1	3	2	0, 1	0, 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang di ikuti	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	23,804,800			100 Persen	**24,756,992**
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		2 Kegiatan					
							Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi		19 Desa					
							Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina		26 Desa/ Kelurahan					

7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**6,406,800**			100 Persen	**6,663,072**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**6 Kegiatan**	**2,688,600**			100 Persen	**2,796,144**
7	1	4	2	0, 1	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	1,372,400			100 Persen	**1,427,296**
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	1,316,200			100 Persen	**1,368,848**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**13 Kegiatan**	**3,718,200**			100 Persen	**3,866,928**

7	1	4	2	0,2	0,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	3,718,200			100 Persen	**3,866,928**
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**0**	**91,082,400**			100 Persen	**94,725,696**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**4 Kegiatan**	**91,082,400**			100 Persen	**94,725,696**
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	24,875,200			100 Persen	**25,870,208**

						Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	66,207,200			100 Persen	**68,855,488**
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**100%**	**17,375,800**			100 Persen	**18,070,832**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan**	**14 Kegiatan**	**17,375,800**			100 Persen	**18,070,832**

7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	19 Desa	3,201,200			100 Persen	**3,329,248**
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi 1	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	19 Desa	4,002,400			100 Persen	**4,162,496**
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	6,804,800			100 Persen	**7,076,992**
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	1,267,400			100 Persen	**1,318,096**
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	2,100,000			100 Persen	**2,184,000**

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Martapura dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Martapura antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,257,701,210	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1,960,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	280,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	280,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	280,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	280,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	5 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3,360,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	960,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,682,119,610	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	Terbayarnya Gaji ASN dan tambahan penghasilan	81 ASN	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura,	9,575,680,610	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
						Kecamatan						Semua Kelurahan		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi keuangan SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	2 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	106,200,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	200,000	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**50,120,000**	
7	01	01	2.05	03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1 Laporan 4 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1,120,000	
7	01	01	2.05	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	57,000,000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,560,000**	
7	01	01	2.06	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	560,000	
7	01	01	2.06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	2 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	20,000,000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**122,006,600**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua	1,997,600	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kelurahan		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	40 Unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	22,506,000	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	6,500,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Bahan Logistik Kantor	4 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	11,100,000	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tamu yang Terfasilitasi	11 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	5,500,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	65,000,000	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,224,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Mebel yang dibeli	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	7,229,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua	4,995,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Kelurahan		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								362,650,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	54,750,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	306,400,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,101,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	7 Unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	56,781,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	16,320,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	4 Buah	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	20,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								5,532,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								2,782,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Nilai SKM	90.56 %	Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan Kecamatan	13 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua	2,782,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Kelurahan		
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**2,800,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Nilai SKM	90.50 %	Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	2,800,000	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**29,584,400**	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**29,584,400**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	26 Desa/Kelurahan 2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	5,770,600	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang di ikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di evaluasi Jumlah PKK Desa/Kelurahan	2 Kegiatan 2 Kegiatan 19 Desa 26 Desa/Kelurahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	23,804,800	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,406,800**	
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**2,668,800**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 %	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1,312,400	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 %	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1,316,200	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**3,718,200**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 %	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3,718,200	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**91,062,400**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**91,062,400**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	0 0	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	24,875,200	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka stabilitas keamanan lokal	0 0	Jumlah Kegiatan Kewarganaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	66,287,200	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**17,375,800**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**17,375,800**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Martapura

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	16 Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	3,201,200	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	16 Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	4,002,400	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	6,804,600	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	3 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	1,207,400	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	2,100,000	
								TOTAL	10,507,812,610	

46. Kecamatan Mataraman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen Rencana Kerja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mataraman, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Mataraman sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mataraman untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Mataraman Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Mataraman 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026. Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mataraman serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, maka Kecamatan Mataraman mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renjatahun 2022 Kecamatan Mataraman, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Mataraman berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan

3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Mataraman berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renja Kecamatan Mataraman dan rancangan awal

4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Mataraman dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mataraman berdasarkan Perkada RKPD awal

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor ...);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Mataraman di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujun penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Mataraman dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I.	Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Mataraman Tahun Lalu Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mataraman Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Mataraman).
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mataraman Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .
BAB V.	Penutup Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MATARAMAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mataraman

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Total pagu anggaran Kecamatan Mataraman tahun 2020 adalah sebesar Rp 322.561.108,- dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 307.174.645,- (95.23%) . Tingkat capaian realisasi program kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada :
   Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
   - Untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,86 (99,83%) lebih tinggi dari target sebesar 87.
   - Realisasi capaian SAKIP Sebesar 61.71 dari target 80

   Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 307.174.645,- (95.23%) dari anggaran sebesar Rp**.**322.561.108,-
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari:
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausahaan Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 pelaporan

- Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
- Laporan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis pelaporan
- Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan terealisasi 100% dari target 10 jenis pelaporan

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 263.579.762,- (95,84%) dari pagu anggaran sebesar Rp 275.018.805,-

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 6 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- (100%) dengan anggaran pagu sebesar Rp. 2.200.000,-

c. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 3 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- (100%) serta target anggaran sebesar Rp. 0,-

d. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan target kinerja 5 jenis laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.345.000,- (100%) dengan besar target anggaran Rp. 51.345.000,-

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Realisasi tidak ada yang melebihi target kinerja
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja:
   - Rasionalisasi anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemic Covid-19 di Kecamatan Mataraman
   - Penganggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja:

- Sarana dan prasarana di Kecamatan Mataraman yang memadai
- Sumber Daya Manusia yang terampil dan kompeten

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Mataraman, yaitu:
   - Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pengguna layanan di Kecamatan Mataraman
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Bersinergi dan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

2.1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Mataraman. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Mataraman melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan: 1 dan Sub kegiatan: 1
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan: 3 dan Sub Kegiatan: 3
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari kegiatan Kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1
5. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari kegiatan: 1 dan Sub Kegiatan: 1

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II (bulan Mei tahun 2021) kecamatan Mataraman adalah sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan:
   - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di KecamatanPada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan kecamatan

2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada:
   - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
   - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

   - Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan.

- Adanya proses ganti uang (GU) yang terlambat.
- Adanya keraguan Kelurahan dalam melaksanakan dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD dan APBN (DAU).
- Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Mataraman, yaitu :
   - Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ penggunan layanan di Kecamatan
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
   - Dengan terhambat dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Walau dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Mataraman tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Mataraman tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman tahun 2020

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mataraman sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mataraman	92	79.22	87	86.86	**99.84**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Mataraman	85	69.39	80	69.52	**86.90**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi	24	8	8	8	**100.00**			

						Kepegawaian								
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**			
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100.00**			
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	11	6	2	2	**100.00**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	14	6	4	4	**100.00**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	9	3	3	3	**100.00**			

7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	15	5	5	5	**100.00**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Mataraman sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				88	50	100
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediany a gaji dan tunjangan ASN	154					88	50	100
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarny a Gaji ASN & Tambahan Penghasila n	154					88	88	**57.14**
7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Mataraman	**85**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerint	11	6	2	2	**100.00**	2	10	**90.91**

						ahan Di Kecamatan								
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM Kecamatan Mataraman	**85**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**	4	20	**83.33**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**	8	32	**88.89**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**	4	24	**80.00**
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100.00**	2	6	**100.00**
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00**	0	2	**66.67**
			2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Mataraman	92	79.22	87	86.86	**99.84**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	15	5	5	5	**100.00**	2	12	**80.00**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Mataraman	92	79.22	87	86.86	**99.84**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	14	6	4	4	**100.00**	0	10	**71.43**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM Kecamatan Mataraman	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Mataraman	92	79.22	87	86.86	**99.84**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	9	3	3	3	**100.00**	1	7	**77.78**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM Kecamatan Mataraman	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Mataraman	92	79.22	87	86.86	**99.84**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksanana apel HUT RI di Kecamatan Mataraman	1	0	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**

Catatan :

- Untuk target IKM dan SAKIP tahun 2020 sesuai matriks renstra Kecamatan Mataraman
- Untuk realisasi Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berdasrkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Kecamatan Mataraman
- Untuk nilai SAKIP tahun 2020 bersumber dari nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
- Untuk Target tahun 2020 – 2022 berdasakan matriks renstra Kecamatan Mataraman 2016-2022

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Mataraman sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mataraman

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Mataraman. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Mataraman, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Mataraman. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mataraman			82	87	92	92	79,22	86,86			

Sumber data :

- Matriks renstra Kecamatan Mataraman 2016-2022
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Mataraman memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Mataraman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Mataraman adalah:

- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Penyediaan dan pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Mataraman akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Mataraman itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Mataraman sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Mataraman

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**396,673,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**IKM Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2,481,679,428**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD dan menyesuaikan SSH Beda Indikator : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**-**						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Peren**	**-**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2,083,126,616**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	14 bulan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	14 Bulan	2,083,126,616	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	13 Bulan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**			**-**						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan4 Laporan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**-**						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**IKM Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**93,973,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**IKM Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**95,220,300**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1,739,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	12 Bulan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya BahanLogistik Kantor	12 bulan	4,848,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	4,848,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Rutin Terlaksananya Pencetakan Laporan Kinerja SKPD Kecamatan TerlaksananyaPercetakan DokumenPerencanaan	12 Bulan15Dokumen4Dokumen	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Rutin	12 Bulan	10,087,900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
								Terlaksananya Pencetakan Laporan Kinerja SKPD Kecamatan	15 Dokumen		
								Terlaksananya Percetakan Dokumen Perencanaan	4 Dokumen		
	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	100 Orang	4,125,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	100 Orang	4,125,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	74,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksanaanya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD 1	12 Bulan	74,420,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 persen**	**-**						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 Unit	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diBeli	1 Jenis	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 Jenis	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1500 M2	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah PengadaanSarana dan Prasarana	3000 M2	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**224,820,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**230,977,512**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	24,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	20,468,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	24,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	27,689,112	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Tenaga Kontrak yang terbayar	12 bulan	176,820,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Tenaga Kontrak yang terbayar	12 Bulan	182,820,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Terpeliharanya BarangMilik Daerah**	**100 Persen**	**77,880,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**72,355,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	7 unit	63,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	7 Unit	57,715,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Terpelihara			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	12 bulan	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	12 Bulan	9,760,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 Buah	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan/per alatan gedung	12 bulan	4,880,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	4,880,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**			**42,100,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**IKM Kecamatan Mataraman**	**86,90 Persen**	**1,042,100,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: tidak terinput saat rancangan awal
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat				-						

	Daerah yang ada di Kecamatan										
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	48 JenisLayanan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat**	**4 Kegiatan**	**42,100,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat**	**4 Kegiatan**	**1,042,100,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	5 Kegiatan	42,100,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1,042,100,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**100 persen**	**32,700,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**100 Persen**	**32,700,000**	
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**terlaksananya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**15 desa**	**32,700,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**terlaksanaya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**15 Desa**	**32,700,000**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya musrenbang kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan	13,200,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksanaan ya musrenbang kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan	13,200,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi TP PKK Kecamatan	12 bulan	19,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi TP PKK Kecamatan	12 Bulan	19,500,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**15,100,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 Persen**	**15,100,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya FKUB**	**3 kegiatan**	**8,800,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Terlaksanaan ya FKUB**	**3 Kegiatan**	**8,800,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD

	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yangDilaksanakan	4 Kegiatan	8,800,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	8,800,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**TerlaksananyaPenegakan PERDA**	**6 kegiatan**	**6,300,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Terlaksanaanya Penegakan PERDA**	**6 Kegiatan**	**6,300,000**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah kegiatan PatroliTrantibum	6 Kegiatan	6,300,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	6,300,000	Beda Indikator : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**37,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**35,150,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**terlaksananya penyenggaraan urusan pemerintahan umum**	**2 kegiatan**	**37,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**terlaksanaanya penyenggaraan urusan pemerintahan umum**	**2 Kegiatan**	**35,150,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	28,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	26,150,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Terlaksananya tugasForkomincam	4 kegiatan	9,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Terlaksananya tugas Forkomincam	4 Kegiatan	9,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**28,200,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 Persen**	**28,170,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pengawasam desa**	**15 desa**	**28,200,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pengawasam desa**	**15 Desa**	**28,170,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15 Desa	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	15 Desa	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	6 Kegiatan	13,200,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	6 Kegiatan	13,200,000	

	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	15 Desa	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	15 Desa	-						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Penegasan BatasDesa	15 Desa	15,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Penegasan Batas Desa	15 Desa	14,970,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

Sumber data: Matriks renstra Kecamatan Mataraman tahun 2022-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Mataraman tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN MATARAMAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down.* Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana

pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan

b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
c. Mitigasi Kebencanaan

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Mataraman berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Mataraman masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mataraman

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mataraman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Mataraman. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Mataraman 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mataraman tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Mataraman.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Mataraman

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mataraman yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Mataraman menetapkan sasaran yaitu : **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan .** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MATARAMAN

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperi yang ditunjukkan pada table 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mataraman dan RPJMD Kabupaten Banjar

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mataraman di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Mataraman sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Mataraman dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 3.634.899.248.
4. Terkait hasil review antara rumusan program/kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, satuan target maupun perbedaan lainnya, semuanya telah disampaikan pada Bab 3 Subbab 2.3 Review Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Mataraman untuk Tahun Anggaran 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 selengkapnya, bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Mataraman

Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**3,634,899,428**				**3,780,295,405**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**2,481,679,428**			100 Persen	**2,580,946,605**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**		**2,083,126,616**			100 Persen	**2,166,451,681**
7	1	1	2	0, 2	0, 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	14 Bulan	2,083,126,616			100 Persen	2,166,451,681
7	**1**	**1**	**2**	**0, 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**95,220,300**			100 Persen	**99,029,112**
7	1	1	2	0, 6	0, 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,739,400			100 Persen	1,808,976

7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	4,848,000			100 Persen	5,041,920
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Rutin	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	10,087,900			100 Persen	10,491,416
							Terlaksananya Pencetakan Laporan Kinerja SKPD Kecamatan		15 Dokumen					
							Terlaksananya Percetakan Dokumen Perencanaan		4 Dokumen					
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	100 Orang	4,125,000				4,290,000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD 1	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	74,420,000			100 Persen	77,396,800
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**230,977,512**			100 Persen	**240,216,612**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	20,468,400			100 Persen	21,287,136
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	27,689,112			100 Persen	28,796,676
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Tenaga Kontrak yang terbayar	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	182,820,000			100 Persen	190,132,800
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**72,355,000**			100 Persen	**75,249,200**

7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	7 Unit	57,715,000			100 Persen	60,023,600
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	9,760,000			100 Persen	10,150,400
7	1	1	2	0,9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	4,880,000			100 Persen	5,075,200
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan Mataraman**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**86,90 Persen**	**1,042,100,000**			100 Persen	**1,083,784,000**
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**4 Kegiatan**	**1,042,100,000**			100 Persen	**1,083,784,000**
7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	1,042,100,000			100 Persen	1,083,784,000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**32,700,000**			100 Persen	**34,008,000**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**terlaksananya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**15 Desa**	**32,700,000**			100 Persen	**34,008,000**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Terlaksananya musrenbang kecamatan yang tepat waktu	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	13,200,000			100 Persen	13,728,000

						Perencanaan Pembangunan di Desa								
7	1	3	2	0, 1	0, 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi TP PKK Kecamatan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	12 Bulan	19,500,000			100 Persen	20,280,000
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**15,100,000**			100 Persen	**15,704,000**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya FKUB**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**3 Kegiatan**	**8,800,000**			100 Persen	**9,152,000**
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	8,800,000			100 Persen	9,152,000
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penegakan PERDA**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**6 Kegiatan**	**6,300,000**			100 Persen	**6,552,000**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	6,300,000			100 Persen	6,552,000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**0**	**35,150,000**			100 Persen	**36,556,000**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**terlaksananya penyenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**35,150,000**			100 Persen	**36,556,000**

7	1	5	2	0, 1	0, 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	26,150,000			100 Persen	27,196,000
7	1	5	2	0, 1	0, 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya tugas Forkomincam	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**28,170,000**			100 Persen	**29,296,800**
7	**1**	**6**	**2**	**0, 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pengawasam desa**	**Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan**	**15 Desa**	**28,170,000**			100 Persen	**29,296,800**
7	1	6	2	0, 1	0, 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	13,200,000			100 Persen	13,728,000
7	1	6	2	0, 1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penegasan Batas Desa	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	15 Desa	14,970,000			100 Persen	15,568,800

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Mataraman dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Mataraman antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,481,679,428**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.083.126.616**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	14 bulan			Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	2,083,126,616	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**95,220,300**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	tercapainya IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	1,739,400	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	tercapainya IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	4,848,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Rutin Terlaksananya Pencetakan Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Terlaksananya Pencetakan Dokumen Perencanaan	12 Bulan 15 Dokumen 4 Dokumen	tercapainya IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	10,087,900	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	100 Orang	tercapainya IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	4,125,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	tercapainya IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	74,420,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**230,977,512**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**32,700,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 persen	Terlaksananya musrenbang kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan	terlaksananya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	15 desa	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	13,200,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 persen	Jumlah fasilitasi TP PKK Kecamatan	12 bulan	terlaksananya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	15 desa	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	19,500,000	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**15,100,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**8,800,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 persen	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	4 kegiatan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	8,800,000	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**6,300,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 persen	Jumlah kegiatan Patroli Trantibum	6 Kegiatan	Jumlah Patroli Kegiatan Trantibum	6 kegiatan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	6,300,000	
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**35,150,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**35,150,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	0	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	terlaksananya urusan pemerintahan umum	6	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	26,150,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	20,468,400	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	27,689,112	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Tenaga Kontrak yang terbayar	12 bulan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	182,820,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,355,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	7 unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100		57,715,000	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	9,760,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan gedung	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	4,880,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**1,042,100,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**1,042,100,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	IKM Kecamatan Mataraman	86,90 Persen	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	5 Kegiatan	terlaksananya urusan pemerintah yang dilimpahkan	100	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	1,042,100,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**32,700,000**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**32,700,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 persen	Terlaksananya musrenbang kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan	terlaksananya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	15 desa	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	13,200,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 persen	Jumlah fasilitasi TP PKK kecamatan	12 bulan	terlaksananya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	15 desa	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	19,500,000	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**15,100,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**8,800,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibum/Linmas	100 persen	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	4 kegiatan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	8,800,000	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**6,300,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibum/Linmas	100 persen	Jumlah kegiatan Patroli Trantibum	6 Kegiatan	Jumlah Patroli Kegiatan Trantibum	6 kegiatan	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	6,300,000	
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**35,150,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**35,150,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	0	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	terlaksananya urusan pemerintahan umum	6	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	26,150,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Mataraman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Angka stabilitas keamanan lokal	0	Terlaksananya tugas Forkomincam	4 kegiatan	terlaksananya urusan pemerintahan umum	6	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	9,000,000	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**28,170,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**28,170,000**	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	6 Kegiatan	terlaksananya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan des	15 Desa	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	13,200,000	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Penegasan Batas Desa	15 Desa	terlaksananya fasilitasi,Pembinaan dan Pengawasan des	15 Desa	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kelurahan	14,970,000	
								TOTAL	**3,634,899,428**	

47. Kecamatan Paramasan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Paramasan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Paramasan guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Paramasan sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Paramasan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Paramasan Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Paramasan 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Paramasan serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Paramasan mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Paramasan, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Paramasan berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Paramasan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Paramasan dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Paramasan dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Paramasan berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(sesuaikan/tambahkan di Kecamatan lain)

12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor .... Tahun .....tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor ....);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Paramasan Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Paramasan di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Paramasan Tahun 2022 ini adalah :

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Paramasan dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Paramasan Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paramasan

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Paramasan).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Paramasan

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PARAMASAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Paramasan

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1. 2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Paramasan tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 277.971.253,- (92,35%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 301.007.730,-**. Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran

   Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada Indikator:

   - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 81,87 (96,32%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 85.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi kineja sebanyak 1 (50%) jenis laporan dari target 2 jenis laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.897.000,- (88,87%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 15.095.000,-.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi kineja sebanyak 2 (66,67%) jenis laporan dari target 3 jenis laporan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 36.595.000,- (91,07%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 40.185.000,-.

2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan
      - Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 10 Pelaporan

        Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 210.269.250,- (92,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp 227.077.730,-.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 3 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27,635.000,- (96,29 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 28.700.000,-.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 15.095.000,- (92,13%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 16.385.000,-.

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 62,05 (112,82%) melebihi target yang ditetapkan sebesar 55.
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal
   - Letak Kantor kecamatan yang jauh dari pusat ibukota kabupaten dan ibukota desa
   - Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
   - Kegiatan terhambat akibat adanya pandemic covid-19

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
   - Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Paramasan, yaitu:
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang terhambat.
   - Dengan adanya rasionalisasi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.

2. 2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Paramasan. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Paramasan melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan 6 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Total pagu dana untuk melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Paramasan adalah sebesar Rp 1.928.090.165,00.

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II Kecamatan Paramasan adalah sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan:
   a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
      - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
      - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
   b. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
      - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :
   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
      - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   - Tidak ada program dan kegiatan realisasinya melebihi target yang direncanakan

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengeksekusi kegiatan
   - Pandemi Covid-19 mengakibatkan mobilitas kegiatan terbatas

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja:
   - Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang direncanakan
   - Target yang dipatok memang tidak terlalu sulit, sehingga mudah untuk di eksekusi.

5) Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Kas untuk di realisasikan

   Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Paramasan, yaitu :
   - Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pengguna layanan di Kecamatan
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Koordinasi dengan SKPD di Kabupaten untuk menyederhanakan prosedur pelayanan

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Paramasan tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Paramasan sampai Triwulan II Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paramasan	90	78.72	**85**	81.87	**96.32%**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Paramasan	60	59.47	**55**	62.05	**112.82%**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	6	5	6	6	**100%**			
						Laporan Penata Usahaan Kantor	4	2	4	4	**100%**			
						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1	1	1	1	**100%**			
						Laporan Pelayanan PATEN	12	12	12	12	**100%**			
						Laporan Barang Milik Daerah	4	4	4	4	**100%**			
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	9	9	9	9	**100%**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	5	5	6	6	**100%**			

7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	6	6	7	7	**100%**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	3	3	3	3	**100%**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	5	4	4	4	**100%**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Paramasan sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**100%**	50%	100%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	100%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	140					80	80	80
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	IKM Kecamatan Paramasan	**90**	78.72	**85**	81.87	**96.32%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	15	5	5	5	**100%**	0	10	**67%**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	IKM Kecamatan Paramasan	**90**	**83**	**85**	81.87	**96.32%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	17	5	6	6	**100%**	3	14	**82%**
						Laporan Penatausahaan Kantor	10	2	4	4	**100%**	2	8	**80%**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana	3	1	1	1	**100%**	0	2	**67%**
						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100%**	6	30	**83%**

						Laporan Barang Milk Daerah	12	4	4	4	**100%**	2	10	**83%**
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Keuangan	27	9	9	9	**100%**	5	23	**85%**
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Paramasan	90	78.72	**85**	81.87	**96.32%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	12	4	4	4	**100%**	1	9	**75%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Paramasan	90	78.72	**85**	81.87	**96.32%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan di Kecamatan	20	6	7	7	**100%**	3	16	**80%**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Paramasan	90	78.72	83	81.87	**96.32%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Kecamatan	9	3	3	3	**100%**	0	6	**67%**

Sumber:
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Paramasan Tahun 2020
- Laporan Evaluasi RKPD Triwullan II Kab. Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Paramasan sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Paramasan

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Paramasan. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Paramasan, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Paramasan Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Paramasan
Kalimantan Selatan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2022	2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paramasan			87	92	97	82,50	78,72	81,87	-	-	

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paramasan dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 81,87. Realisasi kinerja tersebut masih kurang dari target kinerja sebesar 92 dengan capaian kinerja 96,32% yaitu dengan predikat **Cukup Berhasil**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Paramasan memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Paramasan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersedian signal internet
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Paramasan adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Paramasan akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Paramasan itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Paramasan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Paramasan

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Paramasan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**416,122,800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**	100%	**2,184,334,819**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 %**	**10,150,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat yang tersusun**	100%	**8,645,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 Dokumen	1,680,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

								Daerah yang tersusun			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	245,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	245,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersususn	1 Dokumen	245,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	245,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	5,950,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangtersusun	4 Dokumen	5,285,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	700,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	700,000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**131,300,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	100%	**1,918,266,019**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1,788,466,019	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	111,150,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	110,850,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	18,600,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 ASN	18,600,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1,550,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	350,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yang tersusun**	**100%**	**11,600,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yangtersusun	100%	**11,180,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
								Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana	100%		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersususnJumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1 Laporan 4 Laporan	2,600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersususn	1 Laporan	2,180,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	4 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 %**	**9,900,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	**9,900,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Orang	8,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Orang	8,500,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 Laporan	1,400,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 Laporan	1,400,000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**118,495,800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yangterlaksana**	100%	**103,718,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	2,718,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	4,827,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	10 Jenis	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	1,830,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya BahanLogistik Kantor	25 Jenis	5,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	4,222,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	4,120,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksanan ya pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	4,119,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah tamu yang terpasilitasi	105 Orang	3,675,000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD luar dan dalam daerah	12 Bulan	93,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksanan ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar dan dalam daerah	12 Bulan	86,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 %**	**26,100,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	100%	**25,048,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	5 Jenis	11,500,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	5 Jenis	10,522,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	2 Jenis	14,600,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	2 Jenis	14,526,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**9,340,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	**Jumlah Persentase Sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang tersedia**	100%	**9,340,000**	
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersdianya Jasa surat menyurat	12 Bulan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, Air bersih dan internet	12 Bulan	7,340,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, Air bersih dan internet	12 Bulan	7,340,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**99,237,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan , Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	100%	**98,237,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang terpelihara	7 Unit	80,827,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang terpelihara	7 Unit	79,827,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	6,410,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	6,410,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara	4 Buah	12,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara	4 Buah	12,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Presentase Nilai SKM**	**82.50 %**	**21,006,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Presentase Nilai SKM**	81,87&	**20,105,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Presentase Nilai SKM	82.50%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100 %**	**10,200,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	100%	**10,200,000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	4 Kegiatan	10,200,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	4 Kegiatan	10,200,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana Persentase**	**100 %100 %**	**10,806,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Presentase Nilai SKM**	100%	**9,905,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Presentase Nilai SKM	81.87%		
								Presentase Nilai SKM	82.50%		

			jumlah pelayanan paten sesuai SOP								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	10,806,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	9,905,900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ MusKel yang tepat waktu**	**100 %**	**41,847,200**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ MusKel yang tepat waktu**	100%	**39,385,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**63 Kegiata**	**41,847,200**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	63 Kegiatan	**39,385,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	4 Desa2 Kegiatan	8,343,200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu	4 Desa	7,981,100	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Terlaksanaanya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	2 Kegiatan		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah FasilitasiJambore dan Lomba PPKyang di ikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakanJumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di EvaluasiJumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	2 Kegiatan3 Kegiatan4 Desa4 Desa	33,504,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PPK yang di ikuti	2 Kegiatan	31,403,900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	3 Kegiatan		
								Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi	4 Desa		
								Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	4 Desa		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 %**	**20,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100%	**16,411,500**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatann Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpasilitasi**	**4 Kegiatan**	**14,100,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatann Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terpasilitasi**	4 Kegiatan	**12,997,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	10,597,800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiada n Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	9,587,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	3,502,200	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	3,410,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi**	**1 Kegiatan**	**5,900,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	1 Kegiatan	**3,413,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	5,900,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfasilitasi	1 Kegiatan	3,413,900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0 %**	**68,994,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0%**	**68,959,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**68,994,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**68,959,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	21,249,600	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	21,214,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	47,744,400	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	47,744,400	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**40,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100%	**36,840,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**16Kegiatan**	**40,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	16 Kegiatan	**36,840,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	4 Desa	5,579,200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	4 Desa	5,579,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	4 Desa	6,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	4 Desa	6,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terpasilitasi	4 Kegiatan	8,600,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Kegiatan	7,541,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	3,482,400	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	3,482,200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan	1 Kegiatan	2,891,200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswarat	100 Persen	2,891,100	

			Desa yang Terfasilitasi					an Desa yang Terfasilitasi			
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penagasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	3 Kegiatan	13,447,200	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penagasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	3 Kegiatan	11,347,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

Sumber data: Rancangan awal RKPD dan Renstra SIPD Kecamatan Paramasan Tahun 2022

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil review rancangan awal RKPD pada Kecamatan Paramasan:

1. Rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan indikator pada salah satu program sebagiamana dijelaskan pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.
2. Terkait dengan target kinerja dari program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan ada sedikit perbedaan.
   - Menurut hasil review subkegiatan bukan kebutuhan dari kecamatan Paramasan
   - Indikator 12 bulan susah untuk diukur sehingga diganti dengan jumlah jenis laporan
   - Kecamatan Paramasan menggolongkan DPA dan RKA, dan DPPA sebagai Dokumen Perencanaan sehingga tidak sama dengan rancangan awal
   - Dokumen pertanggungajawabn (SPJ-GU) bukan termasuk dokumen evaluasi, sehingga target jumlah laporan berbeda.
3. Dari enam program yang dibandingkan ada 5 program yang menurut hasil analisis kebutuhan pagu indikatifnya lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Ada beberapa alasan kenapa pagu hasil analisis berbeda dengan pagu rancangan awal RKPD:
   - Pada beberapa program/kegiatan pagu rancangan awal RKPD yang bersumber dari dokumen Renstra dianggap terlalu besar nominalnya dan angkanya masih bisa ditekan untuk mengejar target kinerja yang sama.
   - Ada pengurangan jumlah target kinerja pada beberapa kegiatan.
   - Adanya penyesuaian jenis belanja pada aplikasi.
4. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar daripada rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan /subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Paramasan tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN PARAMASAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
4. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
6. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
8. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
9. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.1 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten 10.Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan

2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Paramasan berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Paramasan masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Paramasan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Paramasan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Paramasan. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Paramasan 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Paramasan tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan

pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Paramasan.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Paramasan

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Paramasan yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik, Kecamatan Paramasan menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PARAMASAN

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Paramasan dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Paramasan di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.366.037.319,00.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Paramasan di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Paramasan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Paramasan dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 2.366.037.319,00.
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Paramasan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan, namun ada 1 subkegiatan yang bukan merupakan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan. Adapun perbedaan target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya karena adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022 di Kecamatan Paramasan.
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Pagu indikatif lebih kecil dikarenakan adanya pengurangan jumlah target, penyesuaian jenis belanja dan anggaran dianggap terlalu besar dalam pencapaian target. Sedangkan untuk pagu indikatifnya lebih besar karenakan adanya penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Paramasan untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Paramasan Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Paramasan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,366,037,319**				**2,460,678,812**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**2,184,334,819**				**2,271,708,212**
7	**1**	**1**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat yang tersusun**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**8,645,000**				**8,990,800**
7	1	1	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	1,680,000			100 Persen	1,747,200
7	1	1	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	245,000			100 Persen	254,800
7	1	1	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	245,000			100 Persen	254,800
7	1	1	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersususn	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	245,000			100 Persen	254,800
7	1	1	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Paramasan,	1 Dokumen	245,000			100 Persen	254,800

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangtersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	5,285,000			100 Persen	5,496,400
7	1	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	700,000			100 Persen	728,000
7	**1**	**1**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**1,918,266,019**			100 Persen	**1,994,996,660**
7	1	1	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan		1,788,466,019			100 Persen	1,860,004,660
7	1	1	2	02	0.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	7 Orang	110,850,000			100 Persen	115,284,000
7	1	1	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	10 ASN	18,600,000			100 Persen	19,344,000
7	1	1	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000			100 Persen	364,000
7	**1**	**1**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat yangtersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**11,180,000**			100 Persen	**11,627,200**
							Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana		100%				100 Persen	
7	1	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersususn	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,180,000			100 Persen	2,267,200

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		4 Laporan				
7	1	1	2	0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Orang	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**9,900,000**				**10,296,000**
7	1	1	2	0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	16 Orang	8,500,000				8,840,000
7	1	1	2	0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,400,000			100 Persen	1,456,000
7	**1**	**1**	**2**	**0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yangterlaksana**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**103,718,800**				**107,867,552**
7	1	1	2	0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	8 Jenis	2,718,600			100 Persen	2,827,344
7	1	1	2	0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2 Jenis	4,827,400				5,020,496
7	1	1	2	0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	10 Jenis	1,830,400			100 Persen	1,903,616
7	1	1	2	0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	25 Jenis	4,222,800			100 Persen	4,391,712
7	1	1	2	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	3 Jenis	4,119,600			100 Persen	4,284,384

7	1	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar dan dalam daerah	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	12 Bulan	86,000,000			100 Persen	89,440,000
7	**1**	**1**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**25,048,000**			100 Persen	**26,049,920**
7	1	1	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	5 Jenis	10,522,000			100 Persen	
7	1	1	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2 Jenis	14,526,000			100 Persen	15,107,040
7	**1**	**1**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang tersedia**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**9,340,000**			100 Persen	**9,713,600**
7	1	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersdianya Jasa surat menyurat	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	1	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, Air bersih dan internet	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	12 Bulan	7,340,000			100 Persen	7,633,600
7	**1**	**1**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**98,237,000**			100 Persen	**102,166,480**
7	1	1	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang terpelihara	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	7 Unit	79,827,000			100 Persen	83,020,080
7	1	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	3 Jenis	6,410,000			100 Persen	6,666,400

7	1	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Buah	12,000,000			100 Persen	12,480,000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Nilai SKM**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	81,87&	**20,105,900**			100 Persen	**20,910,136**
							Presentase Nilai SKM	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	82.50%					
7	**1**	**2**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**10,200,000**			**100 Persen**	**10,608,000**
7	1	2	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	10,200,000			100 Persen	10,608,000
7	**1**	**2**	**2**	**04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Presentase Nilai SKM**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**9,905,900**			100 Persen	**10,302,136**
							Presentase Nilai SKM		81.87%					
							Presentase Nilai SKM		82.50%					
7	1	2	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	9,905,900			100 Persen	10,302,136
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ MusKel yang tepat waktu**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**39,385,000**			100 Persen	**40,960,400**
7	**1**	**3**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	63 Kegiatan	**39,385,000**			100 Persen	**40,960,400**
7	1	3	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Desa	7,981,100			100 Persen	8,300,344
							Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu		2 Kegiatan					

7	1	3	2	0 1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PPK yang di ikuti	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	31,403,900			100 Persen	32,660,056
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		3 Kegiatan					
							Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi		4 Desa					
							Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina		4 Desa					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100%	**16,411,500**			100 Persen	**17,067,960**
7	**1**	**4**	**2**	**0 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatann Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum yang terpasilitasi**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	**12,997,600**			100 Persen	**13,517,504**
7	1	4	2	0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	9,587,600			100 Persen	9,971,104
7	1	4	2	0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3,410,000			100 Persen	3,546,400
7	**1**	**4**	**2**	**0 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	**3,413,900**			100 Persen	**3,550,456**

7	1	4	2	02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3,413,900			100 Persen	3,550,456
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**0%**	**68,959,200**			100 Persen	**71,717,568**
7	**1**	**5**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**68,959,200**			100 Persen	**71,717,568**
7	1	5	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	21,214,800			100 Persen	22,063,392
7	1	5	2	01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	47,744,400			100 Persen	49,654,176
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	100%	**36,840,900**			100 Persen	**38,314,536**

7	**1**	**6**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan**	16 Kegiatan	**36,840,900**			100 Persen	**38,314,536**
7	1	6	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Desa	5,579,000			100 Persen	5,802,160
7	1	6	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Desa	6,000,000			100 Persen	6,240,000
7	1	6	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	7,541,400			100 Persen	7,843,056
7	1	6	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	3,482,200			100 Persen	3,621,488
7	1	6	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	100 Persen	2,891,100			100 Persen	3,006,744
7	1	6	2	01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penagasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	11,347,200			100 Persen	11,801,088

Sumber: Renja SIPD Kecamatan Paramasan 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Paramasan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Paramasan antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,184,334,819**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,645,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1,680,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	245,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	245,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	245,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	245,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	5,285,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	700,000	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,918,266,019**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan	100 %			Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai		1,788,466,019	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
		kecamatan								
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Terbayarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	110,850,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 ASN	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	18,600,000	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	350,000	
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**11,180,000**	
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1 Laporan 4 Laporan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2,180,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	9,000,000	
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,900,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16 Orang	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 %	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	8,500,000	
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 Laporan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 %	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1,400,000	
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**103,718,800**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2,718,600	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4,827,400	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	1,830,400	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4,222,800	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Terlaksananya pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	4,119,600	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar dan dalam daerah	12 Bulan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	86,000,000	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**25,048,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Mebel yang dibeli	5 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	10,522,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	2 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	14,526,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,340,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, Air bersih dan internet	12 Bulan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua kelurahan	7,340,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**98,237,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang terpelihara	7 Unit	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	79,827,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	6,410,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Terpelihara	4 Buah	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai		12,000,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**20,105,900**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**10,200,000**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Nilai SKM Presentase Nilai SKM	81.87 % 82.50 %	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	4 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	10,200,000	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**9,905,900**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Presentase Nilai SKM Presentase Nilai SKM Presentase Nilai SKM	100 % 81.87 % 82.50 %	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 %	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	9,905,900	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**39,385,000**	
7 01 05 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**39,385,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ Muskel yang tepat waktu	100 %	Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	4 Desa 2 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	7,981,100	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ Muskel yang tepat waktu	100 %	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PPK yang di ikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	2 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Desa 4 Desa	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	31,403,900	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**16,411,500**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								**12,997,600**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 %	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai		9,587,600	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 %	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai		3,410,000	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**3,413,900**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 %	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	3,413,900	
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**68,959,200**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**68,959,200**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	0 %	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	21,214,800	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka stabilitas keamanan lokal	0 %	Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	47,744,400	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**36,840,900**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**36,840,900**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	4 Desa	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	5,579,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Paramasan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	4 Desa	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	6,000,000	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terpasilitasi	4 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	7,541,400	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	3,482,200	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	2,891,100	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	3 Kegiatan	Nilai Hasil Evaluasi Kecamatan	76 Nilai	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kelurahan	11,347,200	
								TOTAL	**2,366,037,319**	

48. Kecamatan Pengaron

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Pengaron untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Pengaron guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Pengaron sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pengaron untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pengaron Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Pengaron 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pengaron serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Pengaron mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Pengaron, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pengaron berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Pengaron berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Pengaron dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Pengaron dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pengaron berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(sesuaikan/tambahkan di Kecamatan lain)

12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor .... Tahun .....tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor ....);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Pengaron Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Pengaron di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pengaron Tahun 2022 ini adalah :

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Pengaron dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pengaron Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pengaron

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Pengaron).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pengaron

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PENGARON TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pengaron

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- **2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)**

Pada tahun 2020 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Pengaron tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 927.029.845,- (70,15%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 1.321.310.400,-.** Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran

Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada Indikator:

- Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 47,97 (63,96%) kurang target yang ditetapkan sebesar 75.

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 95% yang terdiri dari :
   - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 6 Laporan (75%) dari target 8 jenis pelaporan
   - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
   - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan
   - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
   - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan
   - Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 10 Pelaporan

   Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 186.832.912,- (76,76%) dari pagu anggaran sebesar Rp 223.840.000,-.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 4 Jenis Laporan (57,14%) dengan target 7 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.419.286,- (52,04 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 20.020.000,-.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 4 Jenis laporan (57,14) dengan target 7 Jenis Laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.678.900,- (52,82%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 27.790.000,-.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi kineja sebanyak 2 (50%) jenis laporan dari target 4 jenis laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.000.000,- (50,63%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 7.900.000,-.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi kineja sebanyak 5 (71,43%) jenis laporan dari target 7 jenis laporan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.110.000,- (75,07%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 50.110.000,-.

2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:
   - Tidak ada program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang telah direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 80,19 (100,24%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 80.
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja:
   - Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal
   - Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
   - Kegiatan terhambat akibat adanya pandemic covid-19

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
   - Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pengaron, yaitu:
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang terhambat.
   - Dengan adanya rasionalisasi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.

- **2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)**

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Pengaron.

Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Pengaron melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan 6 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Total pagu dana untuk melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Pengaron adalah sebesar Rp 2,411,902,649.

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II Kecamatan Pengaron adalah sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan:
    1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
        - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
        - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
        - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :
    1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
   - Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   - Tidak ada program dan kegiatan realisasinya melebihi target yang direncanakan
4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengeksekusi kegiatan
   - Pandemi Covid-19 mengakibatkan mobilitas kegiatan terbatas
   - Kurangnya koordinasi internal di Kecamatan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja:
   - Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang direncanakan
   - Target yang dipatok memang tidak terlalu sulit, sehingga mudah untuk di eksekusi.
5) Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Kas untuk di realisasikan

   Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pengaron, yaitu :
   - Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pengguna layanan di Kecamatan
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Koordinasi dengan SKPD di Kabupaten untuk menyederhanakan prosedur pelayanan

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Pengaron tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pengaron sampai Triwulan II Tahun 2021
Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron	85	70.68	80	80.19	**100.24**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Pengaron	80	45.91	75	47.97	**63.96**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	6	**75.00**			
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**			
						Barang Milik Daerah	12	4	4	2	**50.00**			

						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan		7	7	4	**57.14**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan		7	7	4	**57.14**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan		4	4	2	**50.00**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan		7	7	5	**71.43**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Pengaron sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				88	50	50
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	238					136	136	50
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN & Tambahan Penghasilan	238					136	136	**57.14**
7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Pengaron	85	70.68	80	80.19	**100.24**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	18	7	7	4	**57.14**	0	11	**61.11**
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM Kecamatan Pengaron	85	70.68	80	80.19	**100.24**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	6	**75.00**	4	18	**75.00**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**	5	25	**83.33**
						Barang Milik Daerah	12	4	4	2	**50.00**	1	7	**58.33**
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**	6	30	**83.33**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00**	0	2	**66.67**
			2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Pengaron	85	70.68	80	80.19	**100.24**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21	7	7	5	**71.43**	1	13	**61.90**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Pengaron	85	70.68	80	80.19	**100.24**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	21	7	7	4	**57.14**	3	14	**66.67**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM Kecamatan Pengaron	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Pengaron	85	70.68	80	80.19	**100.24**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	12	4	4	2	**50.00**	2	8	**66.67**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM Kecamatan Pengaron	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Pengaron	85	70.68	80	80.19	**100.24**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya apel HUT RI di Kecamatan Pengaron	1	0	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**

Sumber:
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pengaron Tahun 2020
- Laporan Evaluasi RKPD Triwullan II Kab. Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Pengaron sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengaron

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Pengaron. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Pengaron, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Pengaron Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

2702

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengaron
Kalimantan Selatan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2022	2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron			70	75	80	-	70,68	80,19	-	-	

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 80,19. Realisasi kinerja tersebut masih melebihi dari target kinerja sebesar 80 dengan capaian kinerja 100,24% yaitu dengan predikat **Berhasil**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Pengaron memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Pengaron dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersedian signal internet
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pengaron adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Pengaron akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Pengaron itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Pengaron sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Pengaron

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pengaron

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**369,766,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**	100%	**2,619,364,237**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 %**	**11,760,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	100%	**7,050,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,760,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	405,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	660,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	KoordinasidanPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	825,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	660,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	4 Dokumen	2,000,000	

	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	2,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	2,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %100 %**	**31,500,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	100%	**2,330,472,837**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN				-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,303,172,837	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator

											yang benar.
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	28,500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD,HonorariumPPKeu,Honorarium PPTK,Honorarium Bendahara Pengeluaran,Honorarium PembantuBendahara pengeluaran	12 Bulan	24,300,000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 %**	**10,500,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100%**	**10,500,000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1. Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana2. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada	4 Laporan1 Laporan	1,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1. Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 Laporan	1,500,000	
								2. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	1 Laporan		

			SKPD yang Tersusun								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, (Honorarium Pengurus Barang Pengguna)	12 Bulan	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,(HonorariumPengurus Barang Pengguna)	12 Bulan	9,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 %**	**11,500,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100%**	**11,500,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	1,500,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	1,500,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	10,000,000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**60,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	100%	**31,428,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	2,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	5,000,000	
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	1,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	1,478,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Bahan logistik kantor	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	23 Jenis	4,950,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3,500,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA

	Fasilitasi KunjunganTamu		Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	3,500,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	40,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	18,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**6,500,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**100%**	**2,410,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diBeli	1 Jenis	4,000,000						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 Jenis	2,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 Jenis	2,410,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semu**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**170,440,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semu**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	100%	**170,340,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuha

		a Kelurahan				**a Kelurahan**				n pagu SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	4,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	3,900,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Terbayarnya Honorarium AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan 13 Bulan	165,440,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan 13 Bulan	165,440,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKecamatan**	**100 %**	**67,066,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	100%	**55,663,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	10 Unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	10 Unit	49,933,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	6,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	5,730,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 Buah	11,066,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKecamatan**	**100 %**	**55,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100%	**54,795,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**100 %**	**15,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	100%	**14,936,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	ada di Kecamatan		**Daerah yang Terpelihara**			**Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	17 SOP	15,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	17 SOP	14,936,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**40,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100%	**39,859,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	40,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	39,859,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKecamatan**	**100 %**	**45,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100%	**45,000,000**	
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Pengaron,**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 %**	**45,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Pengaron,**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	100%	**45,000,000**	

		Semua Kelurahan	**desa yang terlaksana**				**Semua Kelurahan**				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat KecamatanJumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan12 Desa	20,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya MurenbangTingkat Kecamatan	2 Kegiatan	20,000,000	
								Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya MurenbangTingkat Kecamatan	12 Desa		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	4 Kali	25,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	4 Kali	25,000,000	
			Jumlah PKK Desa yang Terbina	5 Buah				Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	5 Buah		
			Jumlah Bundes yang Terdata	12 Desa				Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	12 Desa		

			Jumlah UMKM yang Didta	12 UMKM				Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	12 UMKM		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKecamatan**	**100 %**	**20,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100%	**13,429,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi**	**100 %**	**13,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum yang terfasilitasi**	100%	**9,125,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Intansi Vertikal di Wilayak Kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	6,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Intansi Vertikal di Wilayak Kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	5,821,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 Kegiatan	7,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 Kegiatan	3,304,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasiPersentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 %100 %**	**7,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum yang terfasilitasi**	100%	**4,304,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun	100%		Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfalitasi	1 Kegiatan	7,000,000	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfalitasi	1 Kegiatan	4,304,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKecamatan**	**100 %**	**42,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**100%**	**42,354,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**42,500,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**42,354,400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya APEL HUT RI di Kecamatan Simpang Empat	1 Kegiatan	15,500,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya APEL HUT RI di Kecamatan Simpang Empat	1 Kegiatan	15,400,400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan		Jumlah Kegiatan Keagaamaan yang dilaksankan	3 Kegiatan	27,000,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan		Jumlah Kegiatan Keagaamaan yang dilaksankan	1 Kegiatan	26,954,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					Kewenangan aerah dan tidak dilaksanaka n oleh Instansi Vertikal				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKecamatan**	**100 %**	**45,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100%	**30,303,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Jumlah fasilitasi,rekomnedasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasanPemerintahan desa yang terlaksana**	**100 %**	**45,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**Jumlah fasilitasi,rekomnedasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasanPemerintahan desa yang terlaksana**	100%	**30,303,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	6,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	5,731,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	3,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2,831,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pambakal)	2 Kegiatan	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pambakal)	2 Kegiatan	15,000,000	

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	5 Kegiatan	21,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	5 kegiatan	6,740,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

Sumber data: Rancangan awal RKPD dan Renstra SIPD Kecamatan Pengaron Tahun 2022

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil review rancangan awal RKPD pada Kecamatan Pengaron:

1. Rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan indikator pada salah satu program sebagiamana dijelaskan pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.
2. Terkait dengan target kinerja dari program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan ada sedikit perbedaan.
   - Menurut hasil review subkegiatan bukan kebutuhan dari kecamatan Pengaron
   - Indikator 12 bulan susah untuk diukur sehingga diganti dengan jumlah jenis laporan
   - Kecamatan Pengaron menggolongkan DPA dan RKA, dan DPPA sebagai Dokumen Perencanaan sehingga tidak sama dengan rancangan awal
   - Dokumen pertanggungajawabn (SPJ-GU) bukan termasuk dokumen evaluasi, sehingga target jumlah laporan berbeda.
3. Dari enam program yang dibandingkan ada 5 program yang menurut hasil analisis kebutuhan pagu indikatifnya lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Ada beberapa alasan kenapa pagu hasil analisis berbeda dengan pagu rancangan awal RKPD:
   - Pada beberapa program/kegiatan pagu rancangan awal RKPD yang bersumber dari dokumen Renstra dianggap terlalu besar nominalnya dan angkanya masih bisa ditekan untuk mengejar target kinerja yang sama.
   - Adanya penyesuaian jenis belanja pada aplikasi.
4. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar daripada rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan /subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Pengaron tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN PENGARON

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.1 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten - Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Pengaron berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Pengaron masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pengaron

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pengaron yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Pengaron. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Pengaron 2021 - 2026, maka dapat diketahui

tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pengaron tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Pengaron.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Pengaron

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pengaron yaitu: Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Pengaron menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan . Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PENGARON

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pengaron dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pengaron di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.366.037.319,00.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pengaron di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pengaron sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pengaron dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 2.366.037.319,00.
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Pengaron sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan, namun ada 1 subkegiatan yang bukan merupakan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan. Adapun perbedaan target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya karena adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022 di Kecamatan Pengaron.
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Pagu indikatif lebih kecil dikarenakan adanya pengurangan jumlah target, penyesuaian jenis belanja dan anggaran dianggap terlalu besar dalam pencapaian target. Sedangkan untuk pagu indikatifnya lebih besar karenakan adanya penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pengaron untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Pengaron Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pengaron

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,805,247,037**				**2,917,456,918**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	100%	**2,619,364,237**			100 Persen	**2,724,138,806**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	100%	**7,050,000**			100 Persen	**7,332,000**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	6 Dokumen	405,000			100 Persen	421,200
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Dokumen	660,000			100 Persen	686,400

7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Doku men	500,000			100 Persen	520,000
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Doku men	825,000			100 Persen	858,000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Doku men	660,000			100 Persen	686,400
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	4 Doku men	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	2 Doku men	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterlaksana**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	100%	**2,330,472,837**			100 Persen	**2,423,691,750**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n		2,303,172,837			100 Persen	2,395,299,750

7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD,HonorariumPPKeu,Honorarium PPTK,Honorarium Bendahara Pengeluaran,Honorarium PembantuBendahara pengeluaran	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	12 Bulan	24,300,000			100 Persen	25,272,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n		3,000,000			100 Persen	3,120,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n**	**100%**	**10,500,000**			100 Persen	**10,920,000**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana 2. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	4 Laporan 1 Laporan	1,500,000			100 Persen	1,560,000
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,(HonorariumPengurus Barang Pengguna)	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	12 Bulan	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n**	**100%**	**11,500,000**			100 Persen	**11,960,000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Laporan	1,500,000			100 Persen	1,560,000

7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Orang	10,000,000			100 Persen	10,400,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	100%	**31,428,400**			100 Persen	**32,685,536**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	5 Jenis	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	2 Jenis	5,000,000			100 Persen	5,200,000
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	7 Jenis	1,478,400			100 Persen	1,537,536
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	23 Jenis	4,950,000			100 Persen	5,148,000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	12 Bulan	18,000,000			100 Persen	18,720,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Pengaron , Semua**	**100%**	**2,410,000**			100 Persen	**2,506,400**

						Pemerintah Daerah		**Kelurahan**						
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	1 Jenis	2,410,000			100 Persen	2,506,400
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	100%	**170,340,000**			100 Persen	**177,153,600**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,000,000			100 Persen	1,040,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	12 Bulan	3,900,000			100 Persen	4,056,000
7	1	1	2	0,8	0.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	12 Bulan	165,440,000			100 Persen	172,057,600
							Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13 Bulan					
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	100%	**55,663,000**			100 Persen	**57,889,520**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	10 Unit	49,933,000			100 Persen	51,930,320

						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	4 Jenis	5,730,000			100 Persen	5,959,200
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	100%	**54,795,600**			100 Persen	**56,987,424**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	100%	**14,936,400**			100 Persen	**15,533,856**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	17 SOP	14,936,400			100 Persen	15,533,856
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	100%	**39,859,200**			100 Persen	**41,453,568**
7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Pengaron, Semua	4 Kegiatan	39,859,200			100 Persen	41,453,568

						dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kelurahan					100 Persen	
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	100%	**45,000,000**			100 Persen	**46,800,000**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	100%	**45,000,000**			100 Persen	**46,800,000**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya MurenbangTingkat Kecamatan	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	20,000,000			100 Persen	20,800,000
							Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya MurenbangTingkat Kecamatan		12 Desa					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	4 Kali	25,000,000			100 Persen	26,000,000
							Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta		5 Buah					
							Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta		12 Desa					
							Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dandilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta		12 UMKM					

7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	100%	**13,429,600**			100 Persen	**13,966,784**
7	**1**	**4**	**2**	**0 , 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum yang terfasilitasi**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	100%	**9,125,600**			100 Persen	**9,490,624**
7	1	4	2	0, 1	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Intansi Vertikal di Wilayak Kecamatan yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Kegiat an	5,821,600			100 Persen	6,054,464
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Kegiat an	3,304,000			100 Persen	3,436,160
7	**1**	**4**	**2**	**0 , 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum yang terfasilitasi** **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	100% 100%	**4,304,000**			100 Persen	**4,476,160**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfalitasi	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Kegiat an	4,304,000			100 Persen	4,476,160

						Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**100%**	**42,354,400**			100 Persen	**44,048,576**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan**	**100%**	**42,354,400**			100 Persen	**44,048,576**
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Terlaksananya APEL HUT RI di Kecamatan Simpang Empat	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	15,400,400			100 Persen	16,016,416

						Republik Indonesia								
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagaamaan yang dilaksankan	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	1 Kegiat an	26,954,000			100 Persen	28,032,160
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**Kab. Banjar, Pengaron , Semua Keluraha n**	100%	**30,303,200**			100 Persen	**31,515,328**
7	**1**	**6**	**2**	**0 , 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi,rekomnedasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasanPemerintahan desa yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Pengaron , Semua Keluraha n**	100%	**30,303,200**			100 Persen	**31,515,328**
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Keluraha n	2 Kegiat an	5,731,600			100 Persen	5,960,864
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Pengaron, Semua	1 Kegiat an	2,831,600			100 Persen	2,944,864

						Pendayagunaan Aset Desa		Kelurahan						
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pambakal)	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	15,000,000			100 Persen	15,600,000
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kelurahan	5 kegiatan	6,740,000			100 Persen	7,009,600

Sumber: Renja SIPD Kecamatan Pengaron 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pengaron dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Pengaron antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

49. Kecamatan Sambung Makmur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Sambung Makmur untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Sambung Makmur guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sambung Makmur sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sambung Makmur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Sambung Makmur 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sambung Makmur serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Sambung Makmur mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Sambung Makmur, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sambung Makmur berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Sambung Makmur berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Sambung Makmur dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Sambung Makmur dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sambung Makmur berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(sesuaikan/tambahkan di Kecamatan lain)

12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor .... Tahun .....tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor ....);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Sambung Makmur di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Sambung Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sambung Makmur Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sambung Makmur

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Sambung Makmur).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sambung Makmur

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sambung Makmur

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1.2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamata

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Sambung Makmur tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 1.300.607.612,- (99,18%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 1.311.295.250,-**. Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan:
   - Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 80,41 (93,50%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 86.
   - Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 masih sebesar 69,73 (83,54%) lebih rendah dari target sebesar 80.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan
      - Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 22 Pelaporan

        Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 182.883.703,- (98,46%) dari pagu anggaran sebesar Rp 185.735.250,-.
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 2 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.850.000,- (100 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 3.850.000,-.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 2 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.160.000,- (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 4.160.000,.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 2 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 11.300.000,- (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 211.300.000,-.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 7 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.098.413.909 (99.28%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 1.106.280.000,-.

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Tidak ada kegiatan yang melebihi target kinerja pada indikator sasaran program
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
   - Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
   - Kegiatan tidak bisa dijalankan akibat adanya pandemic covid-19 yang membatasi mobilitas kegiatan.
   - Fasilitas sarana dan prasana masih kurang
   - Tidak tersedianya sumberdaya yang memadai terhadap pemangku program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas
   - Untuk kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, target terpenuhi karena Kecamatan Sambung Makmur ditunjuk sebagai tuan rumah.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sambung Makmur, yaitu :
   - Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang terhambat.
   - Dengan terhambatnya pelayanan dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
   - Pelayanan Publik
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
   - Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.

- Mengarsipkan data data penting terkait dasar-dasar dokumen perencanaan sebagai dasar petimbangan dan bahan evaluasi.
- Melakukan evaluasi berkala untuk pencapaian kinerja disetiap bidang.

2. 2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Sambung Makmur. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Sambung Makmur melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tdak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Sambung Makmur adalah sebesar Rp 1.657.801.792,00.

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II Kecamatan Sambung Makmur dan perikiraan capaian target akhir periode Renstra untuk Kecamatan Sambung Makmur dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sambung Makmur sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2020														
7	1	2			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur	**91**	81.24	**86**	80.41	**93.5**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Sambung Makmur	**85**	65.55	**80**	69.73	**87.1625**			
7	1	2	2.01	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100**			
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100**			
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100**			

						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	54	10	22	22	**100**			
7	1	1	1	6	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	14	6	2	2	**100**			
7	1	1	1	7	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	14	6	2	2	**100**			
7	1	1	1	8	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraa n Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	**100**			
7	1	1	1	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraa n Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	17	5	7	7	**100**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Sambung Makmur sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	**1**				Bidang Urusan : Kecamatan									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**88**	**88**	**57.14**

7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	154					88	88	**57.14**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	154					88	88	**57.14**
7	**1**	**2**			**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**IKM Kecamatan Sambung Makmur**	**91**	81.24	**86**	80.41	**93.5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	13	6	2	2	**100**	2	10	**76.92**
			2.02		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur**	91	81.24	**86**	80.41	**93.5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100**	4	20	**83.33**
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100**	6	30	**83.33**
						Peningkatan Sarana dan	3	1	1	1	**100**	0	2	**66.67**

						Prasarana Kantor								
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100**	6	30	**83.33**
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100**	0	4	**66.67**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	42	10	22	22	**100**	5	37	**88.10**
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**IKM Kecamatan Sambung Makmur**	**91**	81.24	**86**	80.41	**93.5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	19	5	7	7	**100**	0	12	**63.16**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**IKM Kecamatan Sambung Makmur**	**91**	81.24	**86**	80.41	**93.5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	15	6	2	2	**100**	2	10	**66.67**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**4**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**IKM Kecamatan Sambung Makmur**	**91**	81.24	**86**	80.41	**93.5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	2	2	2	**100**	0	4	**50.00**

7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rata rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**IKM Kecamatan Sambung Makmur**	**91**	81.24	**86**	80.41	**93.5**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun . Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN BARU				0	0	**0.00**

Sumber data :
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sambung Makmur Tahun 2020
- LKJIP Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2020

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Sambung Makmur sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas, maka diperkirakan bahwa target capaian Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan pada triwulan II ada yang masih belum terealisasi, kendati demikian target akhir periode Renstra optimis akan karena akan bisa tercapai, karena beberapa subkegiatan yang belum terealisasi akan di kerjakan pada triwullan III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambung Makmur

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Sambung Makmur. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Sambung Makmur, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sambung Makmur Kalimantan Selatan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur			80,26	86	91	81	81,24	80,41	91	81	Penetapan target 2022 didasarkan pada RRealisasi capaian 2020.

Sumber data :
- Matriks Renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 80,41. Realisasi kinerja tersebut masih kurang dari target kinerja sebesar 86 dengan capaian kinerja 93,5%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Sambung Makmur memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Sambung Makmur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersedian signal internet
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sambung Makmur adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.
- Dukungan Anggaran sudah lumayan meningkat.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Sambung Makmur akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Sambung Makmur itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Sambung Makmur sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Sambung Makmur

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Sambung Makmur

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**365,500,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100 persen	**1,955,067,937**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang sesuai kesepakatan.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 persen**	**8,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	100 persen	**4,200,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	10 dokumen	2,625,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	3,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	6 laporan	1,575,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**40,500,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	100 persen	**1,603,152,037**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN	10 orang	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN	10 orang	1,576,212,037	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	40,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 laporan	26,400,000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	540,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 persen**	**12,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**100 persen**	**9,210,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
								Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 persen**		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 laporan2 laporan	2,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	1 laporan	210,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	2 laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	10,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	9,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 persen**	**16,500,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100 persen**	**24,900,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	3 laporan	1,500,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	3 laporan	900,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	2 orang	15,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang meningkat Wawasan dan kompetensinya	2 orang	24,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**75,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	100 persen	**89,468,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,439,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	1 jenis	468,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD Beda Satuan Target : Lebih terukur
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	2,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	1,454,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Bahan logistik kantor	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		tersedianya bahan logistik kantor	22 jenis	8,483,700	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD Beda Satuan Target : Lebih terukur
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3,932,600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi KunjunganTamu		Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	2,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasiitasi	12 Bulan	5,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	54,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	68,690,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 persen**	**15,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**100 persen**	**13,725,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	1 unit	-						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis meubel yang dibeli	2 buah	10,000,000	Pengadaan Mebel		jumlah jenis meubel yang dibeli	2 buah	8,725,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	...Unit	5,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 jenis	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**93,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	100 persen	**129,232,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 bulan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,000,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12 Bulan	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	17,212,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	70,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	109,020,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**105,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	100 persen	**81,180,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dinas	10 unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	9 Unit	64,780,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 jenis	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 jenis	4,400,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 buah	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan gedung dalam kondisi baik	2 gedung	12,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD Beda Satuan Target : Lebih terukur
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**IKM kecamatan sambung makmur**	**81 nilai**	**12,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**IKM kecamatan sambung makmur**	81 nilai	**13,896,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	**100 persen**	**1,500,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP**	100 persen	**5,896,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Jenis PelayananPATEN sesuai SOP	10 jenis	1,500,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP	10 jenis	5,896,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat yang terlaksana**	**4 kegiatan**	**11,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat yangterlaksana**	4 Kegiatan	**8,000,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 kegiatan	11,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	8,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	**100 persen**	**40,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu**	100 persen	**29,840,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana**	**20 kegiatan**	**40,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana**	20 kegiatan	**29,840,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara		Jumlah Pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan tepat	7 kegiatan2 kegiatan	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan tepat waktu	7 kegiatan	15,758,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	h Perencanaan Pembangunan di Desa		waktuJumlah Pelaksanaan Pramusrenbang dan musrenbang yang dilaksanakan tepat waktu			Pembangunan di Desa		Jumlah Pelaksanaan Pramusrenbang dan musrenbang yang dilaksanakan tepat waktu	2 kegiatan		Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah Kegiatan PKK Desa yang terbina	4 kali7 desa	30,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	4 kali	14,081,200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
								Jumlah Kegiatan PKK Desa yang terbina	7 desa		Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**18,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	100 persen	**11,205,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelnggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi**	**2 jenis**	**12,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelnggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum yang terfasilitasi**	2 jenis	**10,470,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	6 kali	9,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	6 kali	9,000,000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakoor denganFKUB	2 kegiatan	3,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakoor dengan FKUB	2 kegiatan	1,470,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi**	**2 kegiatan**	**6,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	2 kegiatan	**735,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 kegiatan	6,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 kegiatan	735,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0 persen**	**105,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0 persen**	**102,233,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD dan SSH
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai denganPenugasan KepalaDaerah**	**100 persen**	**105,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan PenugasanKepala Daerah**	**100 persen**	**102,233,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	30,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	27,920,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Fasilitasi penanganan Konflik Sosial	2 kegiatan	5,000,000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Fasilitasi penanganan Konflik Sosial	2 kegiatan	1,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	70,000,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	73,313,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**59,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 persen	**63,969,300**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 persen**	**59,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100 persen	**63,969,300**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kegiatan	6,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	6,000,000	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1 kegiatan	6,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa		Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1 Kegiatan	6,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		jumlah desa yang melaksanakan pilkades	7 desa	-						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kegiatan	5,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Kegiatan	6,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		jumlah rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	-						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 kegiatan	9,000,000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kegiatan	8,768,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah KerjaSama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga yang di Fasilitasi	2 kali	3,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah KerjaSama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga yang di Fasilitasi	2 kali	3,000,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Segmen BatasDesa yang difasilitasi	2 segmen	10,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	5 kegiatan	25,101,300	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di perdesaan	2 kegiatan	20,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di perdesaan	2 kegiatan	9,100,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

Sumber data : RPKPD Kab. Banjar dan Renstra SIPD Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2022

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa ada perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Kecamatan Sambung Makmur. Perbedaan yang pertama terkait dengan jumlah subkegiatan yaitu pada Rancangan Awal ada sebanyak 44 subkegiatan, namun setelah dianalisa 3 subkegiatan tidak dilaksanakan tahun ini karena menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Perbedaan terkait dengan indicator pada program penunjang, dan beberapa perbeda pagu dana pada beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di atas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Sambung Makmur tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 **adalah "Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"** .

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
c. Penanggulangan Kemiskinan
d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Sambung Makmur berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Sambung Makmur masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sambung Makmur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sambung Makmur. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Sambung Makmur 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sambung Makmur tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Sambung Makmur.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan
Kecamatan Sambung Makmur

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sambung Makmur yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Kecamatan Sambung Makmur menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 73.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sambung Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.176.212.037,00. (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sambung Makmur di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Dengan 1 program dan 1 kegiatan/ 1 sub kegiatan prioritas .
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sambung Makmur sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sambung Makmur dan melingkupi semua Desa.
3. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.176.212.037,00. (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah)..
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Sambung Makmur sama dengan rancangan awal RKPD, namun ada perbedaan dari jumlah subkegiata yang awalnya 44 subkegiatan namun setlah dianalisa menyeseuaikan kebutuhan SKPD menjadi 41 subkegitan. Perbedaan juga terjadi pada satuan target dan pagu dana pada beberapa subkegiatan karena ada penyesuaian perubahan pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Barang Unit (SBU) yang ditetapkan pada tahun 2022 dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sambung Makmur untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Sambung Makmur

Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2,176,212,037				**2,263,260,518**
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**1,955,067,937**			100 Persen	**2,033,270,654**
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**4,200,000**			100 Persen	**4,368,000**
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	10 dokumen	2,625,000			100 Persen	2,730,000
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	6 laporan	1,575,000			100 Persen	1,638,000
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**1,603,152,037**			100 Persen	**1,667,278,118**
Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	10 orang	1,576,212,037			100 Persen	1,639,260,518
Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 laporan	26,400,000			100 Persen	27,456,000

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 Laporan	540,000			100 Persen	561,600
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**9,210,000**			100 Persen	**9,578,400**
Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100 persen**				100 Persen	
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 laporan	210,000			100 Persen	218,400
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		2 laporan					
Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 orang	9,000,000			100 Persen	9,360,000
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**24,900,000**			100 Persen	**25,896,000**
Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	3 laporan	900,000			100 Persen	936,000
Jumlah ASN yang meningkat Wawasan dan kompetensinya	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 orang	24,000,000			100 Persen	24,960,000
Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**89,468,900**			100 Persen	**93,047,656**
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	5 Jenis	1,439,800			100 Persen	1,497,392
jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 jenis	468,000			100 Persen	486,720

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	7 Jenis	1,454,800			100 Persen	1,512,992
tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	22 jenis	8,483,700			100 Persen	8,823,048
tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	3,932,600			100 Persen	4,089,904
Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasiitasi	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	5,000,000			100 Persen	5,200,000
Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	68,690,000			100 Persen	71,437,600
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**13,725,000**			100 Persen	**14,274,000**
jumlah jenis meubel yang dibeli	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 buah	8,725,000			100 Persen	9,074,000
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 jenis	5,000,000			100 Persen	5,200,000
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**129,232,000**			100 Persen	**134,401,280**
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	3,000,000			100 Persen	3,120,000
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	17,212,000			100 Persen	17,900,480

Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	109,020,000			100 Persen	
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**81,180,000**			100 Persen	**84,427,200**
jumlah kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	9 Unit	64,780,000			100 Persen	67,371,200
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	4 jenis	4,400,000			100 Persen	4,576,000
Jumlah bangunan gedung dalam kondisi baik	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 gedung	12,000,000			100 Persen	12,480,000
IKM kecamatan sambung makmur	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	81 nilai	**13,896,000**			100 Persen	**14,451,840**
Persentase Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SOP	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**5,896,000**			100 Persen	**6,131,840**
Jumlah Jenis Pelayanan PATEN sesuai SOP	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	10 jenis	5,896,000			100 Persen	6,131,840
Jumlah Sub Kegiatan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat yangterlaksana	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	**8,000,000**			100 Persen	**8,320,000**
Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	8,000,000			100 Persen	8,320,000
Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**29,840,000**			100 Persen	**31,033,600**

MusDes/MusKel yang tepat waktu							
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	20 kegiatan	**29,840,000**			100 Persen	**31,033,600**
Jumlah Pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	7 kegiatan	15,758,800			100 Persen	16,389,152
Jumlah Pelaksanaan Pramusrenbang dan musrenbang yang dilaksanakan tepat waktu		2 kegiatan					
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	4 kali	14,081,200			100 Persen	14,644,448
Jumlah Kegiatan PKK Desa yang terbina		7 desa					
Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	100 persen	**11,205,000**			100 Persen	**11,653,200**
Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelnggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 jenis	**10,470,000**			100 Persen	**10,888,800**
Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	6 kali	9,000,000			100 Persen	9,360,000
Jumlah Rakoor dengan FKUB	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kegiatan	1,470,000			100 Persen	1,528,800
Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kegiatan	**735,000**			100 Persen	**764,400**

Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kegiatan	735,000			100 Persen	764,400
Angka stabilitas keamanan lokal	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**0 persen**	**102,233,800**			100 Persen	**106,323,152**
Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan PenugasanKepala Daerah	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**102,233,800**				**106,323,152**
Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kegiatan	27,920,000			100 Persen	29,036,800
Jumlah Fasilitasi penanganan Konflik Sosial	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kegiatan	1,000,000			100 Persen	1,040,000
jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kegiatan	73,313,800			100 Persen	76,246,352
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	100 persen	**63,969,300**			100 Persen	**66,528,072**

Persentase Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan**	100 persen	**63,969,300**			100 Persen	**66,528,072**
Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	6,000,000			100 Persen	6,240,000
Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	6,000,000			100 Persen	6,240,000
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	6,000,000			100 Persen	6,240,000
Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	8,768,000			100 Persen	9,118,720
Jumlah KerjaSama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga yang di Fasilitasi	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kali	3,000,000			100 Persen	3,120,000
Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	5 kegiatan	25,101,300			100 Persen	26,105,352
Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di perdesaan	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelurahan	2 kegiatan	9,100,000			100 Persen	9464000

Sumber: Renja Kecamatan Sambung Makmur 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2022 yang berisi program/kegiatan/subkegiatan beserta dengan indicator kinerja dan targetnya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapian target kinerja Renstra Kecamatan Sambung Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Sambung Makmur untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Sambung Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

[illegible]

Konto					Kontobezeichnung	Kontoart Eröffnung		Kontoart Abgleich				Letzter Abgleich	Saldo Eröffnungsbilanz (Stand)	Bemerkung
						Institutionelle Kontoart	Eingang	Geplante Kontoart	Eingang	Geplante Kontoart	Eingang			
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]		[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]								[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]								[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Patrolling the Pacific Geography and Environmental Effects of El Niño
Environmental Geography

Prof. Dr. Jun Hirsch : Fall Semester Office Hours: Tuesday, 10 a.m.–12 p.m.
Prof. Dr. Jun Hirsch : Fall Semester Office Hours: Tuesday, 10 a.m.–12 p.m.

Week					Assignments Assigned		Assignments Completed				Lecture Topic	Points Assigned for Semester's Work	Instructor's Initials
					Reading Assignment	Page	Reading Assignment	Page	Homework Assignment	Due			
1	29	30	31	1	Introduction to Physical Geography	1–15	Chapter 1 Physical Geography and the Environment	1–15	Complete Study Guide for Chapter 1	Sept. 5	Introduction to Physical Geography	10	
2	2	3	4	5	Earth–Sun Relationships and Insolation	16–34	Chapter 2 Earth–Sun Relationships and Insolation	16–34	Problems 1–10, p. 34	Sept. 12	Earth–Sun Relationships and Insolation	10	
3	9	10	11	12	Atmospheric Composition and Structure	35–52	Chapter 3 Atmospheric Composition and Structure	35–52	Short Answer Questions 1–5	Sept. 19	Atmospheric Composition and Structure	10	
4	16	17	18	19	Temperature and Heat Balance	53–71	Chapter 4 Temperature and Heat Balance	53–71	Problems 1–8, p. 71	Sept. 26	Temperature and Heat Balance	10	
5	23	24	25	26	Midterm Review		Midterm Examination					150	
6	30	Oct. 1	2	3	Pressure and Wind	72–90	Chapter 5 Pressure and Wind	72–90	Problems 1–8, p. 90	Oct. 10	Pressure and Wind	10	
7	7	8	9	10	Moisture and Precipitation	91–110	Chapter 6 Moisture and Precipitation	91–110	Problems 1–8, p. 110	Oct. 17	Moisture and Precipitation	10	
8	14	15	16	17	Fall Break								

[illegible]

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Indikator				Capaian Program	Kelompok Sasaran Kegiatan	Keterangan
						Indikator Program	Target	Capaian	Target	Realisasi	Target			
X	00	01	XXX	00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
X	00	01	XXX	00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
X	00	01	XXX	00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
X	00	02	XXX		[illegible]								[illegible]	
X	00	08	XXX	00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
X	00	08	XXX	00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
X	00	08	XXX	00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
X	00	02			[illegible]								[illegible]	
X	00	02	XXX		[illegible]								[illegible]	

Nomination Form Application Received on 10 June 2022

For Inspection Purpose Only

Ref. No. : [illegible] | Date : [illegible]

Sub: [illegible]

Date					Property & Registration	Boundaries (Taluka)		Boundaries (Registration)				Revenue Registration	Market Assessment Amount (Rs.)	Remarks
						In Words	Figures	Assessment Boundaries	Figures	Measurements	Figures			
1	08	02	2022	09	Transaction Prohibition Notification under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963	[illegible]	Six only	[illegible]	3 Years	[illegible]	63 sq.m.	Taluka: Kanjur, Jurisdiction: Nashik, Village: [illegible]	5,[illegible]	
2	08	02	2022		Prohibition on Disposal of Property Under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963								5,[illegible]	
3	08	02	2022	10	Notification under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963 for Prohibition of Transfer	[illegible]	Six Only	[illegible]	3 Years	[illegible]	78 Sq.m.	Taluka: Kanjur, Jurisdiction: [illegible] Village: [illegible]	5,[illegible]	
4	08	02	2022		Prohibition of [illegible] under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963								4,[illegible]	
5	08	02	2022	11	Restriction on Transfer of Property under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963								4,[illegible]	
6	08	02	2022	12	Prohibition Order under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963	[illegible]	Six Only	[illegible]	3 Years	[illegible]	63 sq.m.	Taluka: Kanjur, Jurisdiction: [illegible] Village: [illegible]	5,[illegible]	
7	08	02	2022	13	Notification under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963	[illegible]	Six Only	[illegible]	3 Years	[illegible]	63 sq.m.	Taluka: Kanjur, Jurisdiction: [illegible] Village: [illegible]	5,[illegible]	
8	08	02	2022		[illegible]								7,[illegible]	
9	08	02	2022		[illegible]								7,[illegible]	
10	08	02	2022	14	Prohibition Order under Section 22(1) of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963	[illegible]	Six Only	[illegible]	3 Years	[illegible]	63 sq.m.	Taluka: Kanjur, Jurisdiction: [illegible] Village: [illegible]	5,[illegible]	

[illegible]

[illegible]

Kodu					Hedeflenen Performans	Faaliyetler/Proje Bilgileri		Performans Göstergeleri				Kullanılan Kaynaklar	Performans Göstergesinin Gerçekleşme Düzeyi	Açıklamalar
						Faaliyet/Proje Bilgileri	Maliyet	Gösterge Bilgileri	Hedef	Gerçekleşme Bilgileri	Hedef			
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]					[illegible]								[illegible]	
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]					[illegible]								[illegible]	
[illegible]					[illegible]								[illegible]	
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

Kod u					Program/Projekat	Izvorni finansijski plan		Izmene i dopune				Revidirani finansijski plan	Ostvareno do 30.06.	Napomena
						Izvor finansiranja	Iznos	Izvor finansiranja	Iznos	Izvor finansiranja	Iznos			
2	01	05	0001	10	[illegible]	[illegible]	8.000	[illegible]	200.000	[illegible]	20.000	[illegible]	[illegible]	
3	01	05			[illegible]							[illegible]	[illegible]	
3	01	05	7001		[illegible]							[illegible]	[illegible]	
1	01	05	2001	10	[illegible]	[illegible]	600.000	[illegible]	1.000.000	[illegible]	70.000	[illegible]	[illegible]	
2	01	05	2001	10	[illegible]	[illegible]	1.000.000	[illegible]	1.000.000	[illegible]	200.000	[illegible]	[illegible]	
2	01	05	2001	10	[illegible]	[illegible]	1.000.000	[illegible]	1.000.000	[illegible]	200.000	[illegible]	[illegible]	
2	01	05	2001	10	[illegible]	[illegible]	1.000.000	[illegible]	1.000.000	[illegible]	200.000	[illegible]	[illegible]	
2	01	05	2001	10	[illegible]	[illegible]	1.000.000	[illegible]	1.000.000	[illegible]	200.000	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

Kode					[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Target			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
												TOTAL	[illegible]	

50. Kecamatan Simpang Empat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Simpang Empat untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Simpang Empat guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Simpang Empat sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Simpang Empat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Simpang Empat 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Simpang Empat mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Simpang Empat, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Simpang Empat berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Simpang Empat berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Simpang Empat dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Simpang Empat dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Simpang Empat berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor …. Tahun …..tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor ….);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Simpang Empat di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2022 ini adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional. Sedangkan maksud penyusunan Renja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2022 adala

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Simpang Empat dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Simpang Empat Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Simpang Empat

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Simpang Empat).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Simpang Empat

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIMPANG EMPAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Simpang Empat

Pada tahun 2020 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar melaksanakan 1 (satu) program rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dan 5 (lima) **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Simpang Empat tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 318.397.005,- (97,85%)** dari total pagu anggaran sebesar **Rp 325.385.400,-**. Adapun tingkat capaian kinerja program/kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

   Pada Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan indicator

   - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 terealisasi sebesar 84,22 (99,08%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 85.
   - Nilai SAKIP Kecamatan Simpang Empat tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 63,64 (79,55%) lebih rendah dari target sebesar 80.

2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :

      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan
      - Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 22 Pelaporan

      Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 265.604.000,- (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp 265.604.000,-.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 4 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.250.000,- (96,15 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 6.500.000,-.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kineja sebesar 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 19.645.000,- (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 19.645.000,.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi target kineja sebesar 100% dengan target 2 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.000.000,- (69,77%) dari target pagu anggaran sebesar Rp. 8.600.000,-.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi target kineja sebesar 100% dengan target 3 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 71.850.000 (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 71.850.000,-.

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:

- Tidak ada kegiatan yang melebihi target kinerja pada indikator sasaran program

4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan adanya kekosongan jabatan sebagai penanggung jawab kegiatan
- Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncana.
- Kurangnya pemahaman terkait pentingnya bekerja yang berasis kinerja.

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
- Peralatan yang telah memadai untuk mendukung kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Simpang Empat, yaitu :

- Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang terhambat.
- Dengan terhambatnya pelayanan dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dan ini berimplikasi negative terhadap pencapaian target renstra.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :

- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

- Adanya penilaian kinerja secara berkala sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Simpang Empat. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Simpang Empat melaksanakan 5 Program 6 Kegiatan 6 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tdak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Simpang Empat adalah sebesar Rp 2. 668.870.913,- (Dua Miliar Enam ratus Enam puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Simpang Empat tahun 2021 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Simpang Empat sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Simpang Empat	95	84,16	90	84,22	**93,58**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
						Nilai SAKIP Kecamatan Simpang Empat	83	52,43	78	63,64	**81,59**	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi	Belum Ada Realisasi
7	01	02	2,01	0,02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100,00**	0	16	**66,67**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100,00**	4	28	**77,78**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100,00**	4	24	**80,00**
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100,00**	1	5	**83,33**
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100,00**	4	28	**77,78**

						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100,00**	2	4	**133,33**
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	12	4	4	4	**100,00**	0	8	**66,67**
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	12	4	4	4	**100,00**	2	10	**83,33**
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	**100,00**	1	5	**83,33**
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	9	3	3	3	**100,00**	0	6	**66,67**
Pencapaian Renstra Kecamatan Simpang Empat sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				50	50	50
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	154					88	88	57,14
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN & Tambahan Penghasilan	154					88	88	**57,14**

7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Simpang Empat	95	84,16	90	84,22	**93,58**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	12	4	4	4	**100,00**	0	8	**66,67**
			2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM Kecamatan Simpang Empat	**85**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100,00**	0	16	**66,67**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100,00**	4	28	**77,78**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100,00**	4	24	**80,00**
						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100,00**	1	5	**83,33**
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100,00**	4	28	**77,78**

						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100,00**	1	3	**100,00**
			2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Simpang Empat	**85**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	9	3	3	3	**100,00**	0	6	**66,67**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Simpang Empat	**85**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	12	4	4	4	**100,00**	2	10	**83,33**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM Kecamatan Simpang Empat	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Simpang Empat	**85**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	6	2	2	2	**100,00**	1	5	**83,33**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM Kecamatan Simpang Empat	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Simpang Empat	**85**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Terlaksananya apel HUT RI di Kecamatan Simpang Empat	1	0	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**

					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 6 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Kecamatan Simpang Empat sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian sampai dengan triwulan II sudah di atas 50 persen untuk semua program/kegiatan/subkegiatan maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Simpang Empat. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indikator SPM , IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Simpang Empat, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Simpang Empat Kalimantan Selatan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	202	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Simpang Empat			86	85	85,50	84,30	84,16	84,22	-	-	

Sumber data :
- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Simpang Empat dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 84,22. Realisasi kinerja tersebut masih kurang dari target kinerja sebesar 85 dengan capaian kinerja 99,08 % .

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Simpang Empat memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Simpang Empat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.
- Kurangnya pengetahuan bidang perencanaan karena SDM di Kecamatan Simpang Empat yang sangat terbatas salah satunya Bid.Perencanaan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Simpang Empat adalah:

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Simpang Empat akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Simpang Empat itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Simpang Empat sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pelatihan SDM terkait perencanaan kegiatan
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.4. **Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Simpang Empat**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target maupun satuan target program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan terkait jika ditemukan perbedaan bisa dilihat pada kolom catatan penting pada table 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/ KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF**	**CATATAN PENTING**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**405.583.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	100%	**2.197.798.340**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**5.900.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun**	100%	**4.064.800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	300.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	499.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	500.000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	350.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	350.000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	350.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	315.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	4 Dokumen	1.400.000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	700.000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Peren**	**28.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	100%	**1.811.248.190**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur

								Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	12 ASN		
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	12 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	12 ASN	1.781.148.190	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	27.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 ASN	29.100.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1.000.000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang TerlaksanaPe**	**1 Laporan4 Laporan100 %**	**9.300.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun**	**1 laporan**	**9.300.000**	
							Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	**Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana**	**4 laporan**		

		Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	**rsentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**				**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100%**		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan4 Laporan	300.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	1 laporan	300.000	
								Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	9.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**9.273.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100%**	**12.000.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan	1 Laporan	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan	1 Laporan	2.000.000	

	Kinerja Pegawai		Penilaian Kinerja yang Tersusun			Kinerja Pegawai		Penilaian Kinerja yang Tersusun			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	7.273.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	10.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	**100 %100 %**	**79.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100%**	**111.349.350**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
		Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan					**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	**100%**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	...Unit	4.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	20.152.150	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan:

											Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	3.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	3.497.200	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Bahan logistik kantor	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	23 Jenis	12.600.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	2 Jenis	3.000.000	Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi KunjunganTamu		Tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 orang	1.200.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: indikator yang ada lebih terukur
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	67.400.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKP Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Kab. Banjar, Simpang Empat,**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan**	**100 %**	**14.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat,**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan**	**100%**	**9.425.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKP

	Urusan Pemerintah Daerah	**Semua Kelurahan**	**BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**			**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Semua Kelurahan**	**BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**			
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diBeli	1 Jenis	4.000.000						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 Jenis	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 Jenis	9.425.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**100 %**	**173.110.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**100%**	**149.408.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	22.408.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Jumlah jasa pelayanan umum kantor	13 Bulan	135.110.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	124.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara**	**100 %**	**87.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	**100%**	**91.003.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	9 Unit	64.883.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	14.120.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	2 Gedung	17.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	4 Buah	12.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	**Kab. Banjar, Simpang Empat,**	**Nilai IKM KecamatanSimpang Empat**	**84 %**	**27.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**Kab. Banjar, Simpang Empat,**	**Nilai IKM Kecamatan Simpang Empat**	84%	**10.571.200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	DAN PELAYANAN PUBLIK	**Semua Kelurahan**				**PELAYANAN PUBLIK**	**Semua Kelurahan**				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah pelayanan PATENsesuai SOP Kecamatan**	**17Pelayanan**	**12.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah pelayanan PATEN sesuai SOP Kecamatan**	100%	**4.056.400**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan Paten sesuai SOP yang dilaksnakan kecamatan	17 Jenis Pelayanan	12.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis Pelayanan Paten sesuai SOP yang dilaksnakan kecamatan	17 Jenis Pelayanan	4.056.400	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana**	**100 %**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana**	100%	**6.514.800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	6.514.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan MAsyarakat Desa**	**100 %**	**25.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan MAsyarakat Desa**	100%	**19.569.800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	**100 %**	**25.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	100%	**19.569.800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktuJumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktu	2 Kegiatan15 Desa	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktu	2 Kegiatan	4.644.900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
								Jumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktu	15 Desa		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah PKK Desa yang dibina, Jumlah UMKM yang di data, Jumlah Bumdes yang di data, Jumlah kegiatan pemberdayaan	4 Kegiatan	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah PKK Desa yang dibina, Jumlah UMKM yang di data, Jumlah Bumdes yang di data,Jumlah kegiatan pemberdayaan	4 Kegiatan	14.924.900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

			masyarakat yang diiukuti dan dilaksanakan					masyarakat yang diiukuti dan dilaksanakan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitas Penanganan Trantibumlinmas**	**100 %**	**16.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitas Penanganan Trantibumlinmas**	100%	**10.354.700**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi**	**100 %**	**12.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum yang terfasilitasi**	100%	**6.829.800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	6.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan InstansiVertikal di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	3.299.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan		Jumlah Rapat Koordinasi dan Harmonisasi	1 Kegiatan	6.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh		Jumlah Rapat Koordinasi dan Harmonisasi	1 Kegiatan	3.530.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Tokoh Masyarakat		Hubungan DenganTokoh Agama dan TokohMasyarakat			Agama dan Tokoh Masyarakat		Hubungan Dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Terlaksanany a Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**4.000.00 0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Terlaksanany a Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKep ala Daerah**	100%	**3.524.90 0**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati,Koordi nasi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati	1 Kegiata n	4.000.00 0	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan PeraturanBup ati,Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Kepala Daerah danPeraturan Bupati	1 Kegiata n	3.524.900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Angka StabilitasKea manan Lokal**	**0 %**	**57.500.0 00**	**PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Angka Stabilitas Keamanan Lokal**	**0%**	**57.500.0 00**	
	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai	**Kab. Banjar, Simpang Empat,**	**Terselenggara nya Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**57.500.0 00**	**Penyelengg araan Urusan Pemerintah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat,**	**Terselenggara nya Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**100%**	**57.500.0 00**	

	Penugasan Kepala Daerah	**Semua Kelurahan**	**sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**an Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Semua Kelurahan**	**Penugasan Kepala Daerah**			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	12.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	12.500.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terlaksana	3 Kegiatan	45.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terlaksana	1 Kegiatan	45.000.000	Beda Target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanaka n oleh Instansi Vertikal					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa**	**100 %**	**31.500.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa**	100%	**19.808.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah fasilitasi,rekomnedasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasanPemerintahan desa yang terlaksana**	**100 %**	**31.500.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**Jumlah fasilitasi,rekomnedasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasanPemerintahan desa yang terlaksana**	100%	**19.808.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala dess yang terfasilitasi	1 Kegiatan	3.000.000						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah adminstrasi tata pemerintah desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	6.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah adminstrasi tata pemerintah desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	4.671.600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	3.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2.825.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yng terfasilitasi	6 Kegiatan	9.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yng terfasilitasi	6 kegiatan	4.699.800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2.000.000	Beda Target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	2.500.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	6.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan danpenegasan batas desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	3.111.600	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

Nama Perangkat Daerah : Simpang Empat

Sumber data : RPKPD Kab. Banjar dan Renstra SIPD Kecamatan Simpang Empat Tahun 2022

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil review rancangan awal RKPD pada Kecamatan Simpang Empat :

1. Rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan indikator pada salah satu program sebagiamana dijelaskan pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.
2. Untuk perbedaan jumlah pagu yang cukup besar itu karena adanya penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN.

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Simpang Empat tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *“Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3. **Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan**

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:

6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4. Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
    a. Peningkatan Sistem Pendidikan
    b. Peningkatan Sistem Kesehatan
    c. Peningkatan Kewirausahaan

2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
    a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
    b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
    c. Penanggulangan Kemiskinan
    d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
    a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
    b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
    c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
    a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
    b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    c. Peningkatan Kualitas Aparatur
    d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
    a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
    b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
    c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Simpang Empat berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Simpang Empat masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Simpang Empat. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Simpang Empat 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Simpang Empat tahun 2022 yaitu mengarah pada peningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Simpang Empat.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Simpang Empat

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**

Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Simpang Empat yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Kecamatan Simpang Empat menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 74.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Simpang Empat dan RPJMD Kabupaten Banjar.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjad i pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Subkegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif, serta pencapaian sasaran dari Kecamatan itu sendiri.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Simpang Empat di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 43 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Simpang Empat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Simpang Empat dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 2.315.602.040,00.
4. Terkait hasil review antara rumusan program/kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, satuan target maupun perbedaan lainnya, semuanya telah disampaikan pada Bab 3 Subbab 2.3 Review Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/subkegaiatan Kecamatan Simpang Empat untuk Tahun Anggaran 2022 selengkapnya bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2.315.602.040**				**2.408.226.122**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**2.197.798.340**				**2.285.710.274**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**4.064.800**				**4.227.392**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	6 Dokumen	300.000			100 Persen	312.000
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	499.800			100 Persen	519.792
7	1	1	2	0, 1	0, 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500.000			100 Persen	520.000
7	1	1	2	0, 1	0, 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Simpang Empat,	1 Dokumen	350.000			100 Persen	364.000

								Semua Kelurahan					
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	315.000			100 Persen	327.600
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1.400.000			100 Persen	1.456.000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2 Dokumen	700.000			100 Persen	728.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**1.811.248.190**			100 Persen	**1.883.698.118**
							Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan		12 ASN					
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12 ASN	1.781.148.190			100 Persen	1.852.394.118
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4 ASN	29.100.000			100 Persen	30.264.000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.000.000			100 Persen	1.040.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**			**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang**	**1 laporan**	**9.300.000**				**9.672.000**

						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**pada SKPD yang Tersusun**	**Empat, Semua Kelurahan**					
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		**4 laporan**				
							Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun		**100%**				
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 laporan	300.000			100 Persen	312.000
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		4 laporan				
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 orang	9.000.000			100 Persen	9.360.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**100%**	**12.000.000**			100 Persen	**12.480.000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Orang	10.000.000			100 Persen	10.400.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian**	**Kab. Banjar, Simpang Empat,**	**100%**	**111.349.350**			100 Persen	**115.803.324**

							Perangkat Daerah yangTerlaksana	**Semua Kelurahan**					
							Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana		**100%**				
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3 Jenis	3.500.000			100 Persen	3.640.000
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2 Jenis	20.152.150				20.958.236
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	10 Jenis	3.497.200			100 Persen	3.637.088
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	23 Jenis	12.600.000			100 Persen	13.104.000
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2 Jenis	3.000.000			100 Persen	3.120.000
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	50 orang	1.200.000			100 Persen	1.248.000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12 Bulan	67.400.000			100 Persen	70.096.000

7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**100%**	**9.425.000**			100 Persen	**9.802.000**
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Jenis	9.425.000			100 Persen	9.802.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**100%**	**149.408.000**			100 Persen	**155.384.320**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.000.000			100 Persen	3.120.000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12 Bulan	22.408.000			100 Persen	23.304.320
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12 Bulan	124.000.000			100 Persen	128.960.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**100%**	**91.003.000**			100 Persen	**94.643.120**
7	1	1	2	0,9	0,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	9 Unit	64.883.000			100 Persen	67.478.320

						Kendaraan Dinas Jabatan							
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4 Jenis	14.120.000			100 Persen	14.684.800
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4 Buah	12.000.000			100 Persen	12.480.000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM Kecamatan Simpang Empat**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	84%	**10.571.200**			100 Persen	**10.994.048**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah pelayanan PATEN sesuai SOP Kecamatan**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**4.056.400**			100 Persen	**4.218.656**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan Paten sesuai SOP yang dilaksnakan kecamatan	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	17 Jenis Pelayanan	4.056.400			100 Persen	4.218.656
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**6.514.800**			100 Persen	**6.775.392**
7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	6.514.800			100 Persen	6.775.392

7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan MAsyarakat Desa**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**19.569.800**			100 Persen	**20.352.592**
7	**1**	**3**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**19.569.800**			100 Persen	**20.352.592**
7	1	3	2	0, 1	0, 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktu	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4.644.900			100 Persen	4.830.696
							Jumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktu		15 Desa					
7	1	3	2	0, 1	0, 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang dibina, Jumlah UMKM yang di data, Jumlah Bumdes yang di data,Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diiukuti dan dilaksanakan	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	14.924.900			100 Persen	15.521.896
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitas Penanganan Trantibumlinmas**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**10.354.700**			100 Persen	**10.768.888**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah sub kegitaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum yang terfasilitasi**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**6.829.800**			100 Persen	**7.102.992**

7	1	4	2	0, 1	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan InstansiVertikal di wilayah Kecamatan	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3.299.800			100 Persen	3.431.792
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3.530.000			100 Persen	3.671.200
7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah**	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	100%	**3.524.900**			100 Persen	**3.665.896**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan PeraturanBupati,Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Kepala Daerah danPeraturan Bupati	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3.524.900			100 Persen	3.665.896
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka Stabilitas Keamanan Lokal**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**0%**	**57.500.000**			100 Persen	**59.800.000**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	**100%**	**57.500.000**			100 Persen	**59.800.000**

7	1	5	2	0, 1	0, 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	12.500.000			100 Persen	13.000.000
7	1	5	2	0, 1	0, 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terlaksana	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	45.000.000			100 Persen	46.800.000
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	100%	**19.808.000**			100 Persen	**20.600.320**
7	**1**	**6**	**2**	**0, 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi,rekomnedasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasanPemerintahan desa yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan**	100%	**19.808.000**			100 Persen	**20.600.320**
7	1	6	2	0, 1	0, 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah adminstrasi tata pemerintah desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4.671.600			100 Persen	4.858.464

7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.825.000			100 Persen	2.938.000
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yng terfasilitasi	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	6 kegiatan	4.699.800			100 Persen	4.887.792
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.500.000			100 Persen	2.600.000
7	1	6	2	0,1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan danpenegasan batas desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	3.111.600			100 Persen	3.236.064

Sumber: SKPD Renja Kecamatan Simpang EmpatTahun 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Simpang Empat dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Simpang Empat antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,197,798,340**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,064,800**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	300,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	499,800	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	500,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	350,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	315,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1,400,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	700,000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,811,248,190**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	12 ASN	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang	1,791,148,190	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
						Kecamatan						Empat, Semua Kelurahan		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 ASN	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	29,100,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1,000,000	
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9,300,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan 4 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	300,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	9,000,000	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**12,000,000**	
7	01	01	2.05	06	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	1 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**111,349,350**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,500,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	20,152,150	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,497,200	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	23 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12,600,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Terlaksananya Pencetakan dan Pengadaan	2 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	1,200,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	67,400,000	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**9,425,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	9,425,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**149,408,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	22,408,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Terbayarnya Jumlah jasa pelayanan umum kantor	13 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	124,000,000	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**91,003,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	9 Unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	64,883,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	14,120,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	4 Buah	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12,000,000	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**10,571,200**	
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**4,056,400**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Simpang Empat	84 %	Jenis Pelayanan Paten sesuai SOP yang dilaksnakan kecamatan	17 Jenis Pelayanan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4,056,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**6,514,800**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai IKM Kecamatan Simpang Empat	84 %	Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	6,514,800	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**19,569,800**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**19,569,800**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan MAsyarakat Desa	100 %	Jumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktu Jumlah desa /Kel yang melaksanakan musrenbang des/murenbang kel tepat waktu	2 Kegiatan 15 Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4,644,900	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan MAsyarakat Desa	100 %	Jumlah PKK Desa yang dibina, Jumlah UMKM yang di data, Jumlah Bumdes yang di data, Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diukuti dan dilaksanakan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	14,924,900	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**10,354,700**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**6,829,800**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penanganan Trantibumlinmas	100 %	Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,299,800	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitas Penanganan Trantibumlinmas	100 %	Jumlah Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,530,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**3,524,900**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 %	Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati,Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,524,900	
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**57,500,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**57,500,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka Stabilitas Keamanan Lokal	0 %	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	12,500,000	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka Stabilitas Keamanan Lokal	0 %	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terlaksana	3 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	45,000,000	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**19,808,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**19,808,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah	100 %	Jumlah administrasi tata pemerintah desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua	4,671,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Simpang Empat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
		Desa						Kelurahan		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100 %	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2,825,000	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100 %	Jumlah pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yng terfasilitasi	6 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	4,699,800	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100 %	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100 %	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	2,500,000	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	100 %	Jumlah penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	74 Nilai	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kelurahan	3,111,600	
								TOTAL	**2,315,602,040**	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Sungai Pinang untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sungai Pinang sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Pinang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Sungai Pinang 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Kecamatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Sungai Pinang mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Sungai Pinang, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Pinang berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Sungai Pinang dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Sungai Pinang dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(sesuaikan/tambahkan di Kecamatan lain)

12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)

13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor .... Tahun .....tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun ... Nomor ....);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Pinang

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Sungai Pinang).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Pinang

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Sungai Pinang tahun 2020 yaitu sebesar **Rp 297.777.825,- (92%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 323.675.000,-**. Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan:
   - Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 80,41 (93,5%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 86.
   - Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 masih sebesar 69,04 (86,3%) lebih rendah dari target sebesar 80.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan
      - Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan
      - Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 10 Pelaporan

        Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 213.817.825,- (92,30%) dari pagu anggaran sebesar Rp 231.650.000,-.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% dengan target 2 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.325.000,- (81,35 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 7.775.000,-.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 2 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.870.000,- (82,04%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 18.1245.000,-.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 2 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.780.000,- (92,62%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 8.400.000,-.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 3 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 54.985.000 (95,25%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 57.725.000,-.

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Tidak ada kegiatan yang melebihi dari target yang ditentukan.
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

   Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja:
   - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pada tahun 2020 karena adanya pandemic covid 19 yang dimulai pada awal tahun 2020. Kondisi ini mengharuskan pemerintah menetapkan PSBB sehingga pemerintah membutuhkan dana tak terduga salah satu nya dengan memotong anggaran SKPD sebesar 50%.
   - Lemahnya SDM di Kecamatan dalam pelaporan dan administrasi
   - Dengan anggaran yang sangat terbatas dan hanya mengcover kebutuhan rutin tentunya tidak bisa di memaksimalkan pelayanan.
   - Kurangnya kontrol dan pengawasan dari pimpinan SKPD
   - Kurangnya penguasaan masalah IT dalam menunjang pelayanan ke masyarakat
   - Minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan masyarakat

   Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
   - Pelaksanaan kegiatan rutin dilaksanakan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sungai Pinang, yaitu :
   - Dengan adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020 dan kondisi pandemi sudah pasti akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan di wilayah kecamatan. Pembinaan yang seharusnya dilakukan ke desa-desa tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
   - Masih belum bisanya memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat sehingga penilaian IKM masih di bawah target
   - Penilaian SAKIP yang masih di bawah target yang telah ditetapkan pada renstra beroengaruh negative terhadap penilaian akhir tahun SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Memperbaiki sistem pelaporan administrasi laporan kinerja
   - Menerapkan SOP dalam Pelayanan Publik

2.1.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Juni) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguanan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Sungai Pinang. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Sungai Pinang melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan 7 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tdak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Total pagu dana untuk melaksanakan 5 Program 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Sungai Pinang adalah sebesar Rp 1.923.941.556,00.

Hasil evaluasi dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang **belum** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan :
   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan

Penghasilan yang disusun dengan target pagu anggaran Rp. 1.086.844.000 dan terealisasi Rp. 529.253.706 atau 48,69%.

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Laporan penyelenggaraan Kegiatan kepemerintahan Kecamatan
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Laporan Kesekretariatan Pemerintahan Kecamatan dengan taget 22 laporan dan terealisasi 21 laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 219.020.000 dan realisasi Rp. 133.788.871 atau 61,08%.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Laporan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Laporan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target 3 Laporan dan terealisasi 2 Laporan dengan target pagu anggarab sebesar Rp. 13.403.900 dan realisasi Rp. 6.350.000 atau 47,37%.

d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dengan target 2 Laporan dan terealisasi 1 Laporan dengan target pagu anggaran sebesar Rp. 7.545.450 dan realisasi 7.739.900 atau 102,57%.

2) Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :

- Belum ada kegiatan yang telah memnuhi target yan direncanakan

3) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- Tidak ada program dan kegiatan realisasinya melebihi target yang direncanakan

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan
- Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
- Kurangnya SDM pemangku program/kegiatan yang telah direncanakan

- Kurangnya kemampuan SDM kecamatan dalam penguasan IT sehingga sistem pelaporan mengalami kendala
- Kurangnya kontrol dan pengawasan dari pimpinan SKPD

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja:

- Pelaksanaan kegiatan rutin dilaksanakan

5) Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Kas untuk di realisasikan

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sungai Pinang, yaitu :

- Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ penggunan layanan di Kecamatan.
- Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
- Dengan terhambat dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :

- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat.
- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan.
- Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2021 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

2867

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Commented [1]: Kurang laporan triwulan 2

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2020														
7	1	2			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	91	86.41	**86**	80.41	**93.5**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Sungai Pinang	85	60.92	**80**	69.04	**86.3**			
7	1	2	2.01	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100**			
						Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100**			
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100**			

						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100**			
7	1	1	1	6	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	11	2	2	2	**100**			
7	1	1	1	7	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	11	2	2	2	**100**			
7	1	1	1	8	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	2	2	2	**100**			
7	1	1	1	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	9	3	3	3	**100**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	**1**				Bidang Urusan : Kecamatan									

7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				**100**	**50**	**100**
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100					100	50	**100**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji . Tambahan Penghasilan	154					88	88	**57.14**
7	**1**	**2**			**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**2**	**2**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**IKM Kecamatan Sungai Pinang**	**91**	76.57	86	80.41	**93.5**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	11	2	2	2	**100**	0	4	**36.36**
			2.02		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul**	**91**	76.57	86	80.41	**93.5**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100**	4	20	**83.33**

						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100**	0	4	**66.67**
						dokumen Perencanaan dan Keuangan	30	10	10	10	**100**	4	24	**80.00**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100**	6	30	**83.33**
						Penatausaha Kantor	36	12	12	12	**100**	6	30	**83.33**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100**	0	2	**66.67**
7	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**IKM Kecamatan Sungai Pinang**	**91**	76.57	86	80.41	**93.5**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	13	3	3	3	**100**	0	6	**46.15**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**IKM Kecamatan Sungai Pinang**	**91**	76.57	86	80.41	**93.5**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	11	2	2	2	**100**	0	4	**36.36**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
7	**1**	**4**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**IKM Kecamatan Sungai Pinang**	**91**	76.57	86	80.41	**93.5**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	2	2	2	**100**	1	5	**62.50**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rata rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**IKM Kecamatan Sungai Pinang**	**91**	76.57	86	80.41	**93.5**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**	**Belum Ada Realisasi**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun . Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	0	0	0	**0**	0	0	**0.00**

Sumber:
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sungai Pinang Tahun 2020
- Laporan Evaluasi RKPD Triwullan II Kab. Banjar 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas yang telah tercapai lebih dari 50%, maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Sungai Pinang. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM , IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2.

2874

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sungai Pinang

Kalimantan Selatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang			75	80	85	81	76,57	80,41	-	-	

Sumber data :

- Matriks Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 80,41. Realisasi kinerja tersebut masih kurang dari target kinerja sebesar 86 dengan capaian kinerja 93,5% yaitu dengan predikat **Cukup Berhasil**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya erta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Sungai Pinang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Sungai Pinang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Pinang adalah:

- Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Sungai Pinang akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Sungai Pinang itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Sungai Pinang sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah
- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Perencanaan pengganggaran yang responsive
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Sungai Pinang

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2877

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Sungai Pinang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**429,379,800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**100 persen**	**2,169,876,088**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**3,580,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 persen**	**3,580,000**	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	270,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 laporan	270,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	375,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	375,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	75,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	75,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	450,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	450,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	750,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	750,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	910,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	910,000	Beda Indikator: Indikator yang ada lebih mencerminkan hasil Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**29,010,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan PerangkatDaerah Yang Terlaksana Administrasi Kepegawaian**	**100 persen**	**1,770,302,288**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji danTunjangan ASN	14 Bulan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,740,392,288	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	28,200,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	29,100,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	810,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 laporan	810,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase JumlahSub Kegiatan Administras Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 Persen**	**9,600,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase JumlahSub Kegiatan Administras Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 persen**	**9,600,000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang	1 Laporan4 Laporan	600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana dan Jumlah Laporan Barang	1 laporan 4 laporan	600,000	

			terlaksana dan Jumlah Laporan Barang Miilik Daerah pada SKPD yang tersusun					Miilik Daerah pada SKPD yang tersusun			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	9,000,000	Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**10,700,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentasi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100 persen**	**10,700,000**	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoreng, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Yang tersusun	1 Laporan	700,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoreng, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Yang tersusun	1 Laporan	700,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bintek implementase Peraturan Perundang Undangan yang terlaksana	1 orang	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bintek implementase Peraturan Perundang Undangan yang terlaksana	1 Orang	10,000,000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**92,480,800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentasi Jumlah Sub. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100 persen**	**92,387,800**	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	2,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	7,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	11,423,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	10 Jenis	2,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	2,000,000	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya BahanLogitik Kantor	25 Jenis	10,416,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logitik Kantor	25 jenis	6,400,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	2,564,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	2,564,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		TerlaksanannyaRapatKoordinasi danKonsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD SKPD	12 Bulan	68,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD SKPD	12 Bulan	68,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 Persen**	**10,500,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD SKPD**	**100 persen**	**10,447,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	10,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	10,447,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**176,440,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**100 persen**	**176,656,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat SKPD	12 Bulan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat SKPD	12 Bulan	1,880,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya JasaKomunikasi ,Sumberdaya Airdn Listrik	12 Bulan	25,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumberdaya Airdn Listrik	12 Bulan	24,836,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	149,940,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumberdaya Airdn Listrik	7 orang	149,940,000	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**97,069,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**100 persen**	**96,203,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan DinasJabatan yang terpelihara	12 Bulan	79,069,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	12 Bulan	79,003,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpeliharanya	12 Bulan	6,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpeliharanya	12 Bulan	5,200,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya /terahabilitasi gedung dan bangunan kantor	1 Tahun	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya/terahabilitasi gedung dan bangunan kantor	1 Tahun	12,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM KecamatanSungai Pinang**	**100 Persen**	**11,259,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM Kecamatan Sungai Pinang**	**100 persen**	**11,251,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan Paten yang sesuai SOP Kecamatan**	**100 Persen**	**4,651,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan Paten yang sesuai SOP Kecamatan**	**100 persen**	**4,651,000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan di Kecamatan	12 laporan	4,651,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		umlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan di Kecamatan	12 Laporan	4,651,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan**	**4 Kegiatan**	**6,608,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan**	**4 Kegiatan**	**6,600,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinsai Kegiatan Kejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	6,608,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	6,600,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 Persen**	**25,804,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**25,804,000**	
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa yang tepat waktuJumlah Fasililitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikutiJumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbinaTerlaksananya Musrenbang Desa yang tepat waktu, terlaksanannyaMusrenbang kecamatan yangtepat waktu Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan**	**11 Desa2 kegiatan 5 kegiatan 11 Desa11Kegiata n2 Kegiatan**	**25,804,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa yang tepat waktu** **Jumlah Fasililitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikuti** **Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan** **Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan** **Terlaksananya Musrenbang Desa yang tepat waktu, terlaksanannyaMusrenbang kecamatan yang tepat waktu** **Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan**	**11 Desa**	**25,804,000**	Beda Target dan Satuan: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Desa yang kelaksanakan Musrenbang Desa yang	11 Desa2 Kegiatan	7,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Desa yang kelaksanakan Musrenbang Desa yang tepat waktu Kecamatan	11 Desa	7,500,000	

	Pembangunan di Desa		tepat waktu Kecamatan Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan			Pembangunan di Desa		Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	2 Kegiatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah FasilitasiJambore dan Lomba PKKyang diikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di ikuti dan dilaksanakanJumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina	2 Kegiatan5 kegiatan11 Desa	18,304,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikuti	2 Kegiatan	18,304,000	
								Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di ikuti dan dilaksanakan	5 Kegiatan		
								Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina	11 Desa		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**17,662,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 persen**	**17,610,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum yang Terfasilitasi**	**3 Kegiatan**	**13,358,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum yang Terfasilitasi**	**3 Kegiatan**	**13,306,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Republik Indonesi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	10,054,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	10,002,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

			Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasiertemuan / Koordinasi dengan Kepolisian Negra Republik Indonsia dan TNI dan instansi Vertikal di kecamatan								
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	2 kegiatan	3,304,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	2 Kegiatan	3,304,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**4,304,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**4,304,000**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/sinergis dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Kegiatan	4,304,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	2 Kegiatan	4,304,000	

			yang terfasilitasi								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Angka StabilitasKeamanan Lokal**	**0 Persen**	**100,268,200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Angka Stabilitas Keamanan Lokal**	**0%**	**100,268,200**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai PenegarsanKepala Daerah**	**3 Kegiatan**	**100,268,200**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penegarsan Kepala Daerah**	**3 Kegiatan**	**100,268,200**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	50,614,200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	50,614,200	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak		Jumlah Keagamaan yangDilaksanakan	2 Kegiatan	49,654,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak		Jumlah Keagamaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	49,654,000	

	dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**13,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**12,956,000**	Beda Pagu: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6 Kegitan**	**13,000,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**Jumlah Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6 Kegiatan**	**12,956,000**	Beda Pagu: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	3,300,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	3,300,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawatannn Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	3,300,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan PermusyawatannDesa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	3,300,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		terlaksananya penetapan dan penegasan batas desarapat persiapan PILKADES	2 laporan	6,400,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		terlaksananya penetapan dan penegasan batas desarapat persiapan PILKADES	2 Laporan	6,356,000	Beda Pagu: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

Sumber data: RPKPD Kab. Banjar dan Renstra SIPD Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022

Dari table 2.4 di atas dapat terlihat bahwa hasil review rancangan awal RKPD pada Kecamatan Sungai Pinang:

1. Rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan indikator pada salah satu program sebagiamana dijelaskan pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.
2. Terkait dengan target kinerja dari program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan ada sedikit perbedaan.
   - Pada sub kegatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Ranwal RKPD target 7 dokumen dan di hasil anlisis kebutuhan hanya 6 laporan. Hal ini menyesuaikan indikator kinerja yang dicapai oleh Sungai Pinang dalam waktu satu tahun dokumen yaitu dokumen Renstra , Dokumen Renja, Dokumen Rencana Kerta Tahunan (RKT), dokumen Rencana Aksi, dan dokumen IKU
   - pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target Ranwal RKPD sebanyak 3 Laporan sedangkan di Hasil Analisis kebutuhan sebanyak 4 dokumen laporan yang terdiri dari Laporan RFK, Capaian Kinerja, SKM dan Evaluasi Renja. Laporan RFK di laksanakan perbulan namun diakhir tahun menjadi 1 dokumen laporan.
   - pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Ranwal RKPD target 24 laporan sedangkan dan di hasil analisis kebutuhan hanya 2 dokumen hal ini disebabkan laporan di Ranwal RKPD menargetkan laporan kinerja bulanan sedangkan laporan tersebut sudah di cover pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Untuk sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , indikator kinerja berupa 2 dokumen laporan kegiatan diakhir tahun yaitu LKjIP dan LKPJ.
3. Dari enam program yang dibandingkan ada 3 program yang menurut hasil analisis kebutuhan pagu indikatifnya lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Ada beberapa alasan kenapa pagu hasil analisis berbeda dengan pagu rancangan awal RKPD:
   - Pada beberapa program/kegiatan pagu rancangan awal RKPD yang bersumber dari dokumen Renstra dianggap terlalu besar nominalnya dan angkanya masih bisa ditekan untuk mengejar target kinerja yang sama.
   - Ada pengurangan jumlah target kinerja pada beberapa kegiatan.
   - Adanya penyesuaian jenis belanja pada aplikasi.
4. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar daripada rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Sungai Pinang tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan

dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
4. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
5. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
6. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
7. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
9. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata;
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian;

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana;
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru.

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Sungai Pinang masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sungai Pinang. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Sungai Pinang.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Sungai Pinang

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik , Kecamatan Sungai Pinang menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.337.765.288,00.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pinang sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 2.337.765.288,00.
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Pinang sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan namun ada perbedaan dari jumlah subkegiatan. Adapun perbedaan yang lebih banyak pada target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya evaluasi dari kecamatan Sungai Pinang untuk memudahkan pencapaian target sesuai yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD. Pagu indikatif lebih kecil dikarenakan adanya pengurangan jumlah target, penyesuaian jenis belanja dan anggaran dianggap terlalu besar dalam pencapaian target. Sedangkan untuk pagu indikatifnya lebih besar karenakan adanya penyesuaian perubahan pada standar satuan harga (ssh) dan standar barang unit (sbu) yang ditetapkan pada tahun 2022.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Pinang untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Sungai Pinang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2,337,765,288**				**2,431,275,900**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**2,169,876,088**			100 Persen	**2,256,671,132**
7	**1**	**1**	**2**	**01**		**Perencanaan' Penganggaran' dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusu**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**3,580,000**			100 Persen	**3,723,200**
7	1	1	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	6 laporan	270,000			100 Persen	280,800
7	1	1	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Dokumen	375,000			100 Persen	390,000
7	1	1	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000			100 Persen	78,000

7	1	1	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450,000			100 Persen	468,000
7	1	1	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750,000			100 Persen	780,000
7	1	1	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	4 Dokumen	750,000			100 Persen	780,000
7	1	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Dokumen	910,000			100 Persen	946,400
7	**1**	**1**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan PerangkatDaerah Yang Terlaksana Administrasi Kepegawaian**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**1,770,302,288**			100 Persen	**1,841,114,380**
7	1	1	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	14 Bulan	1,740,392,288			100 Persen	1,810,007,980
7	1	1	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Bulan	29,100,000			100 Persen	30,264,000
7	1	1	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 laporan	810,000			100 Persen	842,400
7	**1**	**1**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase JumlahSub Kegiatan Administras Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**9,600,000**			100 Persen	**9,984,000**

7	1	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 laporan	600,000			100 Persen	624,000
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana dan Jumlah Laporan Barang Miilik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	4 laporan				
7	1	1	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 orang	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**1**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentasi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**10,700,000**			100 Persen	**11,128,000**
7	1	1	2	05	05	Monitoring' Evaluasi' dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoreng' Evaluasi dan Penilaian Kinerja Yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Laporan	700,000			100 Persen	728,000
7	1	1	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bintek implementase Peraturan Perundang Undangan yang terlaksana	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Orang	10,000,000			100 Persen	10,400,000
7	**1**	**1**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Jumlah Sub. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**92,387,800**			100 Persen	**96,083,312**
7	1	1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	5 jenis	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	1	1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 jenis	11,423,800				11,880,752

7	1	1	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	10 Jenis	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	1	1	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logitik Kantor	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	25 jenis	6,400,000			100 Persen	6,656,000
7	1	1	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	3 jenis	2,564,000			100 Persen	2,666,560
7	1	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD SKPD	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Bulan	68,000,000			100 Persen	70,720,000
7	**1**	**1**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD SKPD**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**10,447,000**			100 Persen	**10,864,880**
7	1	1	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Jenis	10,447,000			100 Persen	10,864,880
7	**1**	**1**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**176,656,000**			100 Persen	**183,722,240**
7	1	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat SKPD	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,880,000			100 Persen	1,955,200
7	1	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi' Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi ' Sumberdaya Airdn Listrik	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Bulan	24,836,000			100 Persen	25,829,440

7	1	1	2	08	'0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi ' Sumberdaya Airdn Listrik	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	7 orang	149,940,000			100 Persen	155,937,600
7	**1**	**1**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**96,203,000**			100 Persen	**100,051,120**
7	1	1	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan' Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Bulan	79,003,000			100 Persen	82,163,120
7	1	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpeliharanya	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Bulan	5,200,000			100 Persen	5,408,000
7	1	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terahabilitasi gedung dan bangunan kantor	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Tahun	12,000,000			100 Persen	**12,480,000**
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM Kecamatan Sungai Pinang**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**11,251,000**			100 Persen	**11,701,040**
7	**1**	**2**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Pelayanan Paten yang sesuai SOP Kecamatan**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**4,651,000**			100 Persen	**4,837,040**
7	1	2	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	umlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan di Kecamatan	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Laporan	4,651,000			100 Persen	4,837,040
7	**1**	**2**	**2**	**04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang,**	**4 Kegiatan**	**6,600,000**			100 Persen	**6,864,000**

						Dilimpahkan kepada Camat		**Semua Kelurahan**						
7	1	2	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	6,600,000			100 Persen	6,864,000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembemberdayaan Masyarakat Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**25,804,000**			100 Persen	**26,836,160**
7	**1**	**3**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa yang tepat waktu**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**11 Desa**	**25,804,000**			100 Persen	**26,836,160**
							Jumlah Fasililitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikuti	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**					
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**5 Kegiatan**					
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**11 Desa**					
							Terlaksananya Musrenbang Desa yang tepat waktu' terlaksanannyaMusrenbang kecamatan yang tepat waktu	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**11 Kegiatan**					
							Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**					
7	1	3	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang kelaksanakan Musrenbang Desa yang tepat waktu Kecamatan	Kab. Banjar, Sungai Pinang,	11 Desa	7,500,000			100 Persen	7,800,000

								Semua Kelurahan					
							Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Kegiatan				
7	1	3	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikuti	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	18,304,000			100 Persen	19,036,160
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di ikuti dan dilaksanakan	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	5 Kegiatan				
							Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	11 Desa				
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**17,610,000**			100 Persen	**18,314,400**
7	**1**	**4**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**3 Kegiatan**	**13,306,000**			100 Persen	**13,838,240**
7	1	4	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia' Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	10,002,000			100 Persen	10,402,080
7	1	4	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	3,304,000			100 Persen	3,436,160

7	**1**	**4**	**2**	**02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**4,304,000**			100 Persen	**4,476,160**
7	1	4	2	02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4,304,000			100 Persen	4,476,160
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka Stabilitas Keamanan Lokal**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**0%**	**100,268,200**			100 Persen	**104,278,928**
7	**1**	**5**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penegarsan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**3 Kegiatan**	**100,268,200**			100 Persen	**104,278,928**
7	1	5	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila' Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	50,614,200			100 Persen	52,638,768
7	1	5	2	01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Keagamaan yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	49,654,000			100 Persen	51,640,160

7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kab. Banjar' Sungai Pinang' Semua Kelurahan**	**100 persen**	**12,956,000**			100 Persen	**13,474,240**
7	**1**	**6**	**2**	**01**		**Fasilitasi' Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan**	**6 Kegiatan**	**12,956,000**			100 Persen	**13,474,240**
7	1	6	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	3,300,000			100 Persen	3,432,000
7	1	6	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan PermusyawatannDesa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	3,300,000			100 Persen	3,432,000
7	1	6	2	01	15	Fasilitasi Penataan' Pemanfaatan' dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	terlaksananya penetapan dan penegasan batas desarapat persiapan PILKADES	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	2 Laporan	6,356,000			100 Persen	6,610,240

Sumber: SIPD Renja Sungai Pinang Tahun 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Sungai Pinang dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Sungai Pinang antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,169,876,088	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,500,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	220,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	375,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	75,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	450,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Nilai evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, semua kelurahan	750,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	720,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai	910,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
					Kecamatan		yang tersusun				Pinang Semua Kelurahan		
7	01	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								1.770.302.288	
7	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	1.740.302.288	
7	01	01	2.02 05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	29.100.000	
7	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	900.000	
7	01	01	2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								9.600.000	
7	01	01	2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana dan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1 Laporan 4 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	600.000	
7	01	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	9.000.000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								10,700,000	
7 01 01 2.05 01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	700,000	
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah ASN yang Ikhuti Tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat	1 orang	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	10,000,000	
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								92,587,800	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	11,423,800	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	6,400,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 Persen	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai	2,564,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
		Kecamatan						Pinang, Semua Kelurahan		
7 01 01 2.03 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi Kalbar Daerah dan Dalam Daerah SKPD SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	69,000,000	
7 01 01 2.07	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10,447,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	10,447,000	
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**176,656,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Jasa Surat Menyurat SKPD	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1,800,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air& Listrik	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	34,656,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlayaninya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	140,040,000	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**96,293,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlihat Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang,	73,000,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			yang terpelihara				Semua Kelurahan		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpelihara/rawat	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	3,200,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terpeliharanya/rehabilitasi gedung dan bangunan kantor	1 Tahun	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12,000,000	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**11,251,000**	
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**4,651,000**	
7 01 02 2.02 05	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sungai Pinang	100 Persen	Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP yang dilaksanakan di Kecamatan	12 laporan	Nilai evaluasi kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	4,651,000	
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**6,600,000**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai IKM Kecamatan Sungai Pinang	100 Persen	Jumlah Kegiatan Kegiatan Kesehteran Sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6,600,000	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**25,934,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**25,934,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Terlaksanaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa yang tepat waktu Kecamatan Terlaksanaya Musrenbang tingkat Kecamatan	11 Desa 2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	7,500,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di ikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa/kelurahan yang terbina	2 kegiatan 5 kegiatan 11 Data	Nilai evaluasi kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	16.200.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								17.610.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								13,306,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi penanganan Trantibumlinmas	100 persen	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terlaksanakannya / Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal di kecamatan	1 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	04	2.01	03	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 persen	Jumlah Rakor PKUB yang dilaksanakan	2 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua kelurahan	3,306,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4,304,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Trantibumlinmas	100 persen	Jumlah koordinasi /sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	2 kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	4,304,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Republik Indonesia yang terfasilitasi						
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								100.268.200	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								100.268.200	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemeliharaan dan Pengembangan Kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan Lokal	0 Persen	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	50.614.200	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka Stabilitas Keamanan Lokal	0 Persen	Jumlah Kecamatan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	49.654.000	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								12.956.000	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								12.956.000	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang Semua Kelurahan	8.500.000	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	4.500.000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 15	Evaluasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penataan dan Penegasan Batas Desa	Persentase terlaksana pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	terlaksananya penataan dan penegasan batas desa/gis penegasan PILKADES	2 laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang	75 Nilai	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua kelurahan	6,355,000	
								TOTAL	2,337,765,200	

52. Kecamatan Sungai Tabuk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen Rencana Kerja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk dan berberkah diri sendiri, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sungai Tabuk sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Tabuk untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Sungai Tabuk 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tabuk serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, maka Kecamatan Sungai Tabuk mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan renjatahun 2022 Kecamatan Sungai Tabuk, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Tabuk berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan

3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabuk berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renja Kecamatan Sungai Tabuk dan rancangan awal

4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabuk dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sungai Tabuk berdasarkan Perkada RKPD awal

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor … Tahun … tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor …);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Sungai Tabuk di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujun penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I.	Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun Lalu Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Tabuk Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Sungai Tabuk).
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Tabuk Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB V	Penutup Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI TABUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Tabuk

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. **528.120.411,- (97,85%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 712.727.000,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 dengan rincian capaian realisai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu :
   - Realisasi capaian SAKIP Kecamatan Sungai Tabuk sebesar 56,39 kurang dari target sebesar 57.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Kepemerintahan Kecamatan terealisasi 2 (40%) jenis laporan dari target 5 jenis laporan
   - Kegiatan Penyeleggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan terealisasi 2 (50%) jenis laporan dari target 4 Jenis Laporan
   - Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Kecamatan terealisasi 1 (50%) jenis laporan dari target 2 Jenis Laporan
   - Kegiatan penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan terealisasi 3 (75%) jenis laporan dari target 4 jenis laporan
   - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU) terealisasi 1 (50%) jenis laporan dari target 2 jenis laporan
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa **tidak ada** (0) jenis laporan dari target 4 jenis laporan.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan :
   a. Kegiatan Peneyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terealisasi 45 (100 %) laporan dari target 45 Laporan
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:

- Realisasi capaian IKM Kecamatan Sungai Tabuk sebesar 85,89 (104,74%) melebihi dari target sebesar 82

4. Faktor - faktor penyebab **terpenuhinya** program/kegiatan, yaitu
   - Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
   - Masih kurangnya SDM pengampu program/kegiatan yang mumpuni
   - Kurang nya SDM yang menguasai sistem IT dan pelaporan di kecamatan menyebabkan belum maksimal nya output yang sudah ditargetkan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sungai Tabuk, yaitu :
   - Melihat realisasi capaian kinerja Program terutama nilai SAKIP, sampai dengan Tahun 2020 masih belum bisa memenuhi capaian Program Renstra Kecamatan Sungai Tabuk.
   - Masih kurang maksimal nya pelaporan yang dilakukan pemerintah Sungai Tabuk
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :
   - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
   - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

2.1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka, ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Sungai Tabuk.

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melaksanakan 4 program, 7 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp **3,723,369,053** (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) . Berikut adalah program/kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Laporan penyelenggaraan Kegiatan kepemerintahan Kecamatan.
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
    - Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan indikator Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

2923

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2020

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Tabuk sampai Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk	87	85.61	83	85.89	**103.48**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Sungai Tabuk	83	56.39	80	59.98	**74.98**			
7	01	02	2.01	0.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**			
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**			

						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100.00**			
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	16	6	5	2	**40.00**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	16	5	4	2	**50.00**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	2	2	1	**50.00**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16	5	4	3	**75.00**			
7	01	01	01		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		4	5	5	**100.00**			
7	01	01	01		Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2	2	1	**50.00**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Tabuk sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									

7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				88	50	50
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN							50	50
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN & Tambahan Penghasilan	294					168	168	**57.14**
7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	87	85.61	83	85.89	**103.48**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	16	6	5	2	**40.00**	3	11	**68.75**
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	87	85.61	83	85.89	**103.48**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100.00**	3	19	**79.17**
						Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100.00**	4	28	**77.78**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100.00**	4	24	**80.00**

						Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100.00**	0	4	**66.67**
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100.00**	5	29	**80.56**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100.00**	0	2	**66.67**
			2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	87	85.61	83	85.89	**103.48**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16	5	4	3	**75.00**	1	9	**56.25**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	87	85.61	83	85.89	**103.48**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	16	5	4	2	**50.00**	4	11	**68.75**
			2.02		Pemberdayaan Kelurahan	IKM Kecamatan Martapura	**95**	**85.31**	90	90.56	**100.62**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelurahan	12	4	4	4	**100.00**	1	9	**75**

				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6	2	2	1	**50.00**	0	3	**50**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	87	85.61	83	85.89	**103.48**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	2	2	1	**50.00**	3	6	**75.00**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	**84**	80.58	**84**	85	**101.19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Sungai Tabuk	87	85.61	83	85.89	**103.48**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya apel HUT RI di Kecamatan Sungai Tabuk	1	0	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**

Sumber data : Laporam Renja Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Jika melihat realisasi capaian kinerja 4 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan pada Kecamatan Sungai Tabuk sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II rata-rata sudah berada di atas 50 persen untuk semua maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai. Adapun untuk capaian program kegiatan yang belum terlaksana karena menyesuaikan dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan ditriwulan selanjutnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk

Dari sasaran yang telah ditetapkan secara garis besar capaian target kinerja sesuai dengan harapan dan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan secara keseluruhan.

Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan dan indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Indikator kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan. Adapun tingkat capaian sasaran di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk			81,27	83	87		85,61	85,89			

Sumber data :

- Matriks renstra Kecamatan Sungai Tabuk 2016-2022
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Sungai Tabuk memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Sungai Tabuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk adalah:

- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Penyediaan dan pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Sungai Tabuk akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Sungai Tabuk itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Sungai Tabuk sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Sungai Tabuk

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sungai Tabuk

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**100 %**	**416,629,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**3,577,380,053**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 Persen**	**4,700,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 persen**	**4,689,600**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,400,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	2,400,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	300,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	300,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	399,900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	250,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	249,900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	300,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	300,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	799,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	250,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	240,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**179,330,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**3,341,711,353**	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya gaji ASN dan tambahan penghasilan	21 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji ASN dan tambahan penghasilan	21 ASN	3,157,521,353	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN Beda Indikator : Salah Entry pad SIPD dan akan disesuaikan kembali dengan indikator yang benar.
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pelaksana Tugas ASN yang terpenuhi	13 Bulan	142,130,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya BPJS Kesehatan PTT/Kontrak	12 Bulan	158,990,000	Beda Pagu : Menyesuaikan SSH
								Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak	13 Bulan		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	36,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 ASN	24,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Keuangan SKPD					Keuangan SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1,200,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**9,850,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	**100 %**	**12,849,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuahan BarangMilik Daerah SKPD yang tersusun	1Dokumen	400,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuahan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 Dokumen	399,900	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusunJumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana	1 Laporan4 Laporan	450,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana	1 laporan 4 laporan	450,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	12,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 %**	**6,850,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**6,600,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian KinerjaPegawai yang tersusun	1 Laporan	600,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 laporan	600,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang paham tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	1 Orang	6,250,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang paham tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundangundangan yang terlaksana	1 orang	6,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**95,313,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**90,918,192**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,800,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1,793,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianyan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	7,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianyan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	5,800,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	10 Jenis	4,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	4,498,800	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya BahanLogistik Kantor	25 Jenis	22,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25 jenis	18,908,592	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	7,738,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	3 Jenis	7,738,000	
	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah Tamu yangTerfasilitasi	125 Orang	1,875,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang Terfasilitasi	125 Orang	1,875,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	50,400,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	50,304,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 %**	**17,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**16,982,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	6 Jenis	5,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	6 Jenis	5,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	1 Jenis	12,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	1 jenis	11,982,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**57,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	100 persen	**56,979,008**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

		Kelurahan									
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianyan Jasa Komunikasi, Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	55,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	54,979,008	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**46,586,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**46,650,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang terpelihara	6 Unit	34,286,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang terpelihara	6 Unit	34,380,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	6,300,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	6,270,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Buah	6,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 buah	6,000,000	

			yang terpelihara								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Nilai SKM**	**86 %**	**47,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	100%	**47,500,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**	**100 %**	**47,500,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**	**100 %**	**47,500,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	5 Kegiatan	47,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	5 kegiatan	47,500,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**60,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**58,116,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	KoordinasiKegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**100 %**	**60,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**100 %**	**58,116,900**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	21 Desa 2 Kegiatan	8,133,100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	21 Desa 2 kegiatan	6,250,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah FasilitasiJambore dan Lomba PKKyang diikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang dievaluasiJumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina	2 Kegiatan3 Kegiatan2 1 Desa 21 Desa	51,866,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikuti Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina	2 kegiatan 3 Kegiatan 21 Desa 21 Desa	51,866,900	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 %**	**22,500,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**21,575,800**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterama**	**100 %**	**12,575,800**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**12,575,800**	

			n dan Ketertiban Umum yang terlaksana								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	9,924,200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	9,924,200	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	2,651,600	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 kegiatan	2,651,600	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	**9,924,200**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	**9,000,000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang tugas dan	13Kegiatan	9,924,200	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	13 Kegiatan	9,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi			Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Angka StabilitasKeamanan Lokal**	**0 %**	**20,621,400**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	Perlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**100 %**	**20,621,400**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**20,621,400**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan PenugasanKepala Daerah**	**100 persen**	**20,621,400**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	8,321,400	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	8,321,400	

	Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	12,300,000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	12,300,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**31,878,600**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100%	**31,456,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**100 %**	**31,878,600**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100%	**31,456,200**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD

			Pengawasan Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	21 Desa	2,956,200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi 2	21 Desa	2,956,200	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	21 Desa	5,400,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	21 Desa	5,000,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi	21 Desa	18,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi	21 Desa	18,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	5,522,400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	5,500,000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan pagu SKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**450,000,000**						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**450,000,000**						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				150,000,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				300,000,000						TIDAK DILAKSANAKAN PADA TAHUN INI, SUBKEGIATAN AKAN DITUTUP PADA SIPD NAMUN PADA RENSTRA TETAP ADA

Sumber data : Dokumen RKPD 2022 Kabupaten Banjar, Inputan pada SIPD 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Mataraman tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI TABUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui *top down.* Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Sungai Tabuk berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Sungai Tabuk masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tabuk yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sungai Tabuk. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Sungai Tabuk.

Tabel 3. 2 Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Sungai Tabuk

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**

Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Tabuk yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik, Kecamatan Sungai Tabuk menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 70.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI TABUK

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperi yang ditunjukkan pada table 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabuk dan RPJMD Kabupaten Banjar

Jumlah Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Tabuk di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 sub-kegiatan.

Rencana kerja program dan kegiatan SKPD Kecamatan Sungai Tabuk untuk tahun 2021 yang mengacu kepada RKPD tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan target dan tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Sungai Tabuk dan RPJMD Kabupaten Banjar. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan. Dan untuk kebutuhan dana program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tabuk adalah sebesar **Rp. 1.740.162.260,-**

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Tabuk di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tabuk sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sungai Tabuk dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp **3.756.650.353**.

1.3 Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Tabuk sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/kegiatan maupun subkegiatan, yang berbeda hanya target di beberapa indikator pada Program Penunjang dan target di beberapa subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya evaluasi dari Kecamatan Sungai Tabuk untuk memudahkan pencapaian target sesuai yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Tabuk untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Tabuk

Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**3,756,650,353**				**3,906,916,367**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**3,577,380,053**			100 Persen	**3,720,475,255**
7	**1**	**1**	**2**	**0,1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**4,689,600**			100 Persen	**4,877,184**
7	1	1	2	0,1	0,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	6 Dokumen	2,400,000			100 Persen	2,496,000
7	1	1	2	0,1	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000			100 Persen	312,000
7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	399,900			100 Persen	415,896
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	249,900			100 Persen	259,896
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000			100 Persen	312,000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	4 Dokumen	799,800			100 Persen	831,792

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	2 Dokumen	240,000			100 Persen	249,600
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**3,341,711,353**			100 Persen	**3,475,379,807**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN dan tambahan penghasilan	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	21 ASN	3,157,521,353			100 Persen	3,283,822,207
7	1	1	2	0,2	0,2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya BPJS Kesehatan PTT/Kontrak	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	12 Bulan	158,990,000			100 Persen	165,349,600
							Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak		13 Bulan					
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	4 ASN	24,000,000			100 Persen	24,960,000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,200,000			100 Persen	1,248,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**12,849,900**			100 Persen	**13,363,896**
7	1	1	2	0,3	0,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuahan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Dokumen	399,900			100 Persen	415,896
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 laporan	450,000			100 Persen	468,000
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana		4 laporan					
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 orang	12,000,000			100 Persen	12,480,000

7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**6,600,000**			100 Persen	**6,864,000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 laporan	600,000			100 Persen	624,000
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang paham tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundangundangan yang terlaksana	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 orang	6,000,000			100 Persen	6,240,000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**90,918,192**			100 Persen	**94,554,920**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	5 Jenis	1,793,800			100 Persen	1,865,552
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianyan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 jenis	5,800,000			100 Persen	6,032,000
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	10 jenis	4,498,800			100 Persen	4,678,752
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	25 jenis	18,908,592			100 Persen	19,664,936
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	3 Jenis	7,738,000			100 Persen	8,047,520
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	125 Orang	1,875,000			100 Persen	1,950,000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	12 Bulan	50,304,000			100 Persen	52,316,160
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**16,982,000**			100 Persen	**17,661,280**

7	1	1	2	0,7	0.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	6 Jenis	5,000,000			100 Persen	5,200,000
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 jenis	11,982,000			100 Persen	12,461,280
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	100 persen	**56,979,008**			100 Persen	**59,258,168**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,000,000			100 Persen	2,080,000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	12 Bulan	54,979,008			100 Persen	57,178,168
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**46,650,000**			100 Persen	**48,516,000**
7	1	1	2	0,9	0,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang terpelihara	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	6 Unit	34,380,000			100 Persen	35,755,200
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	4 jenis	6,270,000			100 Persen	6,520,800
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	2 buah	6,000,000			100 Persen	6,240,000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	100%	**47,500,000**			100 Persen	**49,400,000**
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**47,500,000**			100 Persen	**49,400,000**

7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	5 kegiatan	47,500,000			100 Persen	49,400,000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**58,116,900**			100 Persen	**60,441,576**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**58,116,900**			100 Persen	**60,441,576**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	21 Desa	6,250,000			100 Persen	6,500,000
							Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu		2 kegiatan					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Jambore dan Lomba PKK yang diikuti	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	2 kegiatan	51,866,900			100 Persen	53,941,576
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		3 Kegiatan					
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		21 Desa					
							Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang terbina		21 Desa					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**21,575,800**			100 Persen	**22,438,832**
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**12,575,800**			100 Persen	**13,078,832**
7	1	4	2	0,1	0,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	9,924,200			100 Persen	10,321,168

7	1	4	2	0,1	0,2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	2 kegiatan	2,651,600			100 Persen	2,757,664
7	**1**	**4**	**2**	**0,2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**9,000,000**			100 Persen	**9,360,000**
7	1	4	2	0,2	0,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	13 Kegiatan	9,000,000			100 Persen	9,360,000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Perlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100%**	**20,621,400**			100 Persen	**21,446,256**
7	**1**	**5**	**2**	**0,1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Persentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan PenugasanKepala Daerah**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**20,621,400**			100 Persen	**21,446,256**
7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	8,321,400			100 Persen	8,654,256
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	12,300,000			100 Persen	12,792,000

7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	100%	**31,456,200**			100 Persen	**32,714,448**
7	**1**	**6**	**2**	**0, 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan**	100%	**31,456,200**			100 Persen	**32,714,448**
7	1	6	2	0, 1	0, 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terfasilitasi 2	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	21 Desa	2,956,200			100 Persen	3,074,448
7	1	6	2	0, 1	0, 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	21 Desa	5,000,000			100 Persen	5,200,000
7	1	6	2	0, 1	0, 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	21 Desa	18,000,000			100 Persen	18,720,000
7	1	6	2	0, 1	0, 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Sungai Tabuk, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	5,500,000			100 Persen	5,720,000

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Sungai Tabuk dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

53. Kecamatan Tatah Makmur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen Rencana Kerja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tatah Makmur dan berberkah diri sendiri, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Tatah Makmur sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tatah Makmur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Kecamatan Tatah Makmur 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026. Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tatah Makmur serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, maka Kecamatan Tatah Makmur mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih, dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan Renja tahun 2022 Kecamatan Tatah Makmur, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Tatah Makmur berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Tatah Makmur berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renja Kecamatan Tatah Makmur dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Tatah Makmur dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tatah Makmur berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor … Tahun … tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun … Nomor …);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Tatah Makmur di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Tatah Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Tatah Makmur Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tatah Makmur

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Tatah Makmur).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tatah Makmur

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TATAH MAKMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Tatah Makmur

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan Kegiatan terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Tatah Makmur tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 327.976.641,- (95.51%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 343.361.250,-** Adapun tingkat capaian realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar **95,52 %** dengan rincian capaian realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu:
   a. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
      - Realisasi capaian indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,46 lebih rendah dari target sebesar 83.
2. Realisasi Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada kegiatan:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan dengan target kinerja Laporan Administrasi Kepegawaian target 8 laporan realisasi 8 laporan, Laporan Penatausahaan Kantor terget 12 laporan realisasi 12 laporan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terget 1 laporan realisasi 1 laporan , Laporan Pelayanan PATEN target 12 laporan realisasi 12 laporan, Laporan Barang Milik Daerah target 2 laporan realisasi 2 laporan, Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan target 10 jenis laporan realisasi 10 jenis laporan, Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun realisasi capaian anggarannya adalah sebesar Rp. 242.436.641,-. dari target Rp. 256.161.250,- atau sebesar 95,52 %
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan target kinerja 6 Jenis Laporan terealisasi 6 Jenis Laporan dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun untuk anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp. 6.190.000,- atau sebesar 98,25 % .
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 7 Jenis Laporan realisasi kinerja 7 Jenis Laporan dengan capaian kinerja

sebesar 100 %. Adapun untuk anggaran adalah sebesar Rp. 12.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.620.000,- atau sebesar 93,71 %.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan target kinerja 5 Jenis Laporan realisasi kinerja 5 Jenis Laporan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun untuk anggaran adalah sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.470.000,- atau sebesar 96,69 %

e. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan target kinerja 7 Jenis Laporan terealisasi kinerja 7 Jenis Laporan dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun untuk realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 52.260.000,- dari target Rp. 52.500.000,- atau sebesar 99,54 %

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
   - Realisasi capaian indikator SAKIP Kecamatan Tatah Makmur sebesar 69,90 melebihi target sebesar 64.
4. Faktor - faktor penyebab tidak terpenuhinya**,** terpenuhinya dan melebihi target program/kegiatan, yaitu
   a. Faktor - faktor penyebab tidak terpenuhinya target nilai IKM:
      1. Pelayanan penanganan pengaduan serta saran dan masukan belum maksimal, dimana menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan.
      2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta anggaran pemeliharaan sarana yang memadai perlu di tingkatkan agar apabila terjadi kerusakan alat dapat segera di atasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama.
      3. Masih terkendalanya jaringan internet di kecamatan Tatah Makmur sehingga pelayanan online oleh Disdukpencapil belum bisa di manfaatkan secara maksimal
      4. Belum adanya pelatihan ataupun bimbingan tekhnis oleh bidang Pemerintahan terhadap petugas Paten sementara perangkat komputer untuk aplikasi SIMPATEN telah tersedia sehing pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal.
   b. Faktor - faktor penyebab terpenuhinya, dan melebihi target program/kegiatan

1. Kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas yang ada
2. Kemampuan sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
3. Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan
4. Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tatah Makmur, yaitu:
   - Jika dilihat dari capaian nilai SAKIP tahun 2020 yang telah berada di atas target periode akhir Renstra maka hal ini berimpilkasi positif terhadap terhadap keberhasilan pencapaian target periode akhir Renstra SKPD.
   - Sementara untuk Nilai IKM yang masih berada dibawah target Renstra, maka berimplikasi negative terhadap pencapaian target periode akhir renstra.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu
   1. Pelatihan aparatur kecamatan dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
   2. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
   3. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

2.1.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2021)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Tatah Makmur. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Tatah Makmur melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan 6 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari kegiatan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Adapun total pagu dana untuk melaksanakan keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan adalah sebesar **Rp. 2.689.651.632,-** .

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Tatah Makmur tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tatah Makmur sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 sd TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tatah Makmur	84	63,85	**83**	82,64	**99,57%**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Tatah Makmur	65	83,05	**64**	69,9	**109,22%**			
7	01	02	2,01	0,02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100%**			
						Laporan Penata Usahaan Kantor	36	12	12	12	**100%**			

						Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100%**			
						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100%**			
						Laporan Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100%**			
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100%**			
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	18	6	6	6	**100%**			
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	21	7	7	7	**100%**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	15	5	5	5	**100%**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21	7	7	7	**100%**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Tatah Makmur sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									

7	**01**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG**				**100%**	50%	100%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%					100%	50%	100%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN, Tambahan Penghasilan	14 ASN					14 ASN	14 ASN	14 ASN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	IKM Kecamatan Tatah Makmur	**83**	**83,05**	83	82,64	**99,57%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**100%**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	6	6	6	6	**100%**	2	14	**233%**
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	IKM Kecamatan Tatah Makmur	**83**	**83**	83	82,64	**99,57%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**100%**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100%**	5	21	**88%**

						Laporan Pelayanan PATEN	36	12	12	12	**100%**	6	30	**83%**
						Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100%**	7	27	**90%**
						Laporan Barang Milik Daerah	6	2	2	2	**100%**	1	5	**83%**
						Laporan Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100%**	6	30	**83%**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100%**	0	2	**67%**
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	IKM Kecamatan Tatah Makmur	**83**	**83,05**	83	82,64	**99,57%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21	7	7	7	**100,00%**	4	21	**100%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	IKM Kecamatan Tatah Makmur	**83**	**83,05**	83	82,64	**99,57%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan di Kecamatan	21	7	7	7	**100,00%**	4	18	**86%**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	84	85	**101%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**

					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	IKM Kecamatan Tatah Makmur	**83**	**83,05**	83	82,64	**99,57%**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**	**BELUM ADA REALISASI**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Kecamatan	15	5	5	5	**100,00%**	2	12	**80%**

Jika melihat realisasi capaian kinerja 4 program, 6 kegiatan dan 6 sub kegaitan pada Kecamatan Tatah Makmur sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas, maka diperkirakan bahwa target capaian Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatah Makmur

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Tatah Makmur. Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Tatah Makmur, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

2.2.1. Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Tatah Makmur. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik kinerja dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Adapun tingkat capaian sasaran di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan: Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tatah Makmur			81,5	83	84	**83**	83,05	82,46	84,25	84,50	Penetapan target di 2022 menggunakan baseline data realisasai capaian di 2020.

Sumber data:

- Matriks renstra Kecamatan Tatah Makmur 2016-2022
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan realisasi indikator kinerja utama Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tatah Makmur dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 82,46. Realisasi kinerja tersebut lebih rendah dari target kinerja sebesar 83 dengan capaian kinerja 99,35 %.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Tatah Makmur memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Tatah Makmur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja dan fasilitas yang mendukung terhadap perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitasi pemerintahan kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tatah Makmur adalah:

- Meningkatkan komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Penyediaan dan pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Tatah Makmur akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Tatah Makmur itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Tatah Makmur sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan publik, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra Kecamatan Tatah Makmur

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**409.627.400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kecamatan**	**100%**	**2.305.070.286**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 %**	**3.415.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100%**	**3.415.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	270.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	270.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 dokumen	375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	375.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	75.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	75.000	
	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 dokumen	450.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	450.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	3 Laporan	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	4 Dokumen	750.000	
	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	745.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	745.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**29.010.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100%**	**1.929.702.786**	
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	13 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	13 ASN	1.894.692.786	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan verifikasi keuangan	2 Laporan	28.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		TTerbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	34.200.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	810.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 laporan	810.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 %**	**9.500.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100 persen**	**9.499.800**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan 4 Laporan	500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	1 laporan	499.800	
								Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	9.000.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 %**	**20.700.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100%**	**20.700.000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	700.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	700.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	2 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	2 orang	20.000.000	
	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**59.874.580**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	**100%**	**63.835.580**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1.316.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1.313.800	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	1.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	9.590.080	
	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Tersedianya PeralatanRumah Tangga	7 jenis	1.825.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	1.823.500	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor		Tersedianya BahanLogistik Kantor	22 jenis	8.185.580	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	22 jenis	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	3 jenis	2.846.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	3 jenis	2.846.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	44.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	38.262.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 %**	**45.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**100%**	**44.732.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 Unit	23.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 Unit	23.000.000	

	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diBeli	1 jenis	2.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang di Beli	1 jenis	1.762.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	1 jenis	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	9.970.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadan sarana dan prasarana	25 M2	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadan sarana dan prasarana	25 M2	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**141.447.820**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**100%**	**143.727.820**	
	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	16.887.820	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	18.267.820	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya HonorariumAdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	123.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	124.260.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100.680.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	**100%**	**89.457.300**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	6 Unit	63.980.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	6 Unit	61.117.300	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	3 jenis	6.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	3 Jenis	6.340.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Buah	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Tahun	12.000.000	

	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan /Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 kegiatan	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	1 Kegiatan	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM Kecamatan**	**83 Nilai**	**6.256.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Nilai IKM Kecamatan**	**83 Nilai**	**5.506.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100 %**	**1.256.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100%**	**506.000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	17 jenis	1.256.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	17 Jenis	506.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana**	**4 Kegiatan**	**5.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana**	**4 Kegiatan**	**5.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 kegiatan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	4 Kegiatan	5.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 %**	**27.513.400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**27.513.400**	
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	**6 Kegiatan**	**27.513.400**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	**6 Kegiatan**	**27.513.400**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes Tepat WaktuTerlaksananya Pramusrenbang dan	13 Desa2 kegiatan	7.513.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes Tepat Waktu	13 Desa	7.513.400	

			musrenbang yang tepat waktu					Terlaksananya Pramusrenbang dan musrenbang yang tepat waktu	2 Kegiatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes yangTerdataJumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang dibinaJumlah UMKM yang didata	13 Desa3 kegiatan13 Desa13 Desa	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Bumdes yang Terdata	13 Desa	20.000.000	
								Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	3 Kegiatan		
								Jumlah PKK Desa yang dibina	13 Desa		
								Jumlah UMKM yang didata	13 Desa		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 %**	**9.303.200**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100%**	**9.303.200**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**6.651.600**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan KetenteramandanKetertiban Umum yang terfasilitasi**	**2 Kegiatan**	**6.651.600**	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	1 kegiatan	4.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	1 Kegiatan	4.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 kegiatan	2.651.600	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	1 Kegiatan	2.651.600	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi**	**1 Kegiatan**	**2.651.600**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah yang terfasilitasi**	**1 Kegiatan**	**2.651.600**	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terfasilitasi	2 kegiatan	2.651.600	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfasilitasi	2 Kegiatan	2.651.600	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0 %**	**87.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0%**	**87.299.900**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**4 Kegiatan**	**87.300.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**4 Kegiatan**	**87.299.900**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 kegiatan	23.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	23.500.000	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	63.800.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	63.799.900	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**10.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**10.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**13 Desa**	**10.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	**13 Desa**	**10.000.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	13 kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	13 Kegiatan	2.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.000.000	

	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	1 kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	2 kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	2.000.000	

Sumber data:

- RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022
- Matriks Renstra Kecamatan Tatah Makmur tahun 2022-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Mataraman tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN TATAH MAKMUR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2 Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:

2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan

2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Tatah Makmur berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Tatah Makmur masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tatah Makmur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tatah Makmur Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Tatah Makmur 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tatah Makmur tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Tatah Makmur.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Kecamatan Tatah Makmur

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tatah Makmur yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Kecamatan Tatah Makmur menetapkan sasaran yaitu: Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 74.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TATAH MAKMUR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada table 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk

mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tatah Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif

4.1. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tatah Makmur di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 1 kegiatan dan 1 subkegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan SubKegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tatah Makmur sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tatah Makmur dan melingkupi semua desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 2.444.692.786,- (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
4. Rumusan Program dan kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Tatah Makmur sama dengan rancangan awal RKPD, namun ada perbedaan pada satuan target dan pagu dana pada beberapa subkegiatan karena ada penyesuaian perubahan pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Barang Unit (SBU) yang ditetapkan pada tahun 2022 dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tatah Makmur untuk Tahun Anggaran 2022 bisa dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2.444.692.786**	APBD			**2.542.480.497**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kecamatan**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**2.305.070.286**			100 Persen	**2.397.273.097**
7	**1**	**1**	**2**	**0,1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**3.415.000**			100 Persen	**3.551.600**
7	1	1	2	0,1	0,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	6 Dokumen	270.000			100 Persen	280.800
7	1	1	2	0,1	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Dokumen	375.000			100 Persen	390.000
7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur,	1 Dokumen	75.000			100 Persen	78.000

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450.000			100 Persen	468.000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750.000			100 Persen	780.000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	4 Dokumen	750.000			100 Persen	780.000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	2 Dokumen	745.000			100 Persen	774.800
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**1.929.702.786**			100 Persen	**2.006.890.897**
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	13 ASN	1.894.692.786			100 Persen	1.970.480.497

7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TTerbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	34.200.000			100 Persen	35.568.000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 laporan	810.000			100 Persen	842.400
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**9.499.800**			100 Persen	**9.879.792**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 laporan	499.800			100 Persen	519.792
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		4 laporan					
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 orang	9.000.000			100 Persen	9.360.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**20.700.000**			100 Persen	**21.528.000**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Kab. Banjar, Tatah Makmur,	1 Laporan	700.000			100 Persen	728.000

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	2 orang	20.000.000			100 Persen	20.800.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**63.835.580**			100 Persen	**66.389.003**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	5 jenis	1.313.800			100 Persen	1.366.352
7	1	1	2	0,6	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 jenis	9.590.080			100 Persen	9.973.683
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	7 jenis	1.823.500			100 Persen	1.896.440
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	22 jenis	10.000.000			100 Persen	10.400.000

7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Pengaadaan	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	3 jenis	2.846.200			100 Persen	2.960.048
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	38.262.000			100 Persen	39.792.480
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**44.732.000**			100 Persen	**46.521.280**
7	1	1	2	0,7	0,2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Unit	23.000.000			100 Persen	23.920.000
7	1	1	2	0,7	0,5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Beli	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 jenis	1.762.000			100 Persen	1.832.480
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Jenis	9.970.000			100 Persen	10.368.800
7	1	1	2	0,7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadan sarana dan prasarana	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	25 M2	10.000.000			100 Persen	10.400.000

7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Tersedia**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**143.727.820**			100 Persen	**149.476.933**
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.200.000			100 Persen	1.248.000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	12 Bulan	18.267.820			100 Persen	18.998.533
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	7 orang	124.260.000			100 Persen	
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**89.457.300**			100 Persen	**93.035.592**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	6 Unit	61.117.300			100 Persen	63.561.992
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Tatah Makmur,	3 Jenis	6.340.000			100 Persen	6.593.600

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Tahun	12.000.000			100 Persen	12.480.000
7	1	1	2	0,9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	10.000.000			100 Persen	10.400.000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM Kecamatan**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**83 Nilai**	**5.506.000**			100 Persen	**5.726.240**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**506.000**			100 Persen	**526.240**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	17 Jenis	506.000			100 Persen	526.240
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**4 Kegiatan**	**5.000.000**			100 Persen	**5.200.000**

7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	5.000.000			100 Persen	5.200.000
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**27.513.400**			100 Persen	**28.613.936**
7	**1**	**3**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**6 Kegiatan**	**27.513.400**			100 Persen	**28.613.936**
7	1	3	2	0,1	0,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes Tepat Waktu	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	13 Desa	7.513.400			100 Persen	7.813.936
							Terlaksananya Pramusrenbang dan musrenbang yang tepat waktu		2 Kegiatan					
7	1	3	2	0,1	0,3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bumdes yang Terdata	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	13 Desa	20.000.000			100 Persen	20.800.000
							Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan		3 Kegiatan					
							Jumlah PKK Desa yang dibina		13 Desa					
							Jumlah UMKM yang didata		13 Desa					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur,**	**100%**	**9.303.200**			100 Persen	**9.675.328**

								Semua Kelurahan						
7	**1**	**4**	**2**	**0,1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**6.651.600**			100 Persen	**6.917.664**
7	1	4	2	0,1	0,1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	4.000.000			100 Persen	4.160.000
7	1	4	2	0,1	0,2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.651.600			100 Persen	2.757.664
7	**1**	**4**	**2**	**0,2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah yang terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**2.651.600**			100 Persen	**2.757.664**
7	1	4	2	0,2	0,1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi /Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesiayang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2.651.600			100 Persen	2.757.664

7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**0%**	**87.299.900**			100 Persen	**90.791.896**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**4 Kegiatan**	**87.299.900**			100 Persen	**90.791.896**
7	1	5	2	0,1	0, 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	23.500.000			100 Persen	24.440.000
7	1	5	2	0,1	0, 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	63.799.900			100 Persen	66.351.896
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**			100 Persen	**10.400.000**

7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan**	**13 Desa**	**10.000.000**			100 Persen	**10.400.000**
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	13 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Tatah Makmur, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2022 yang program/kegiatan/subkegiatan disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapian target kinerja Renstra Kecamatan Tatah Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Tatah Makmur untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Tatah Makmur dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2022.

Selanjutnya Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Lampiran : 1

Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

(Sesuai PMDN 90 Tahun 2019)

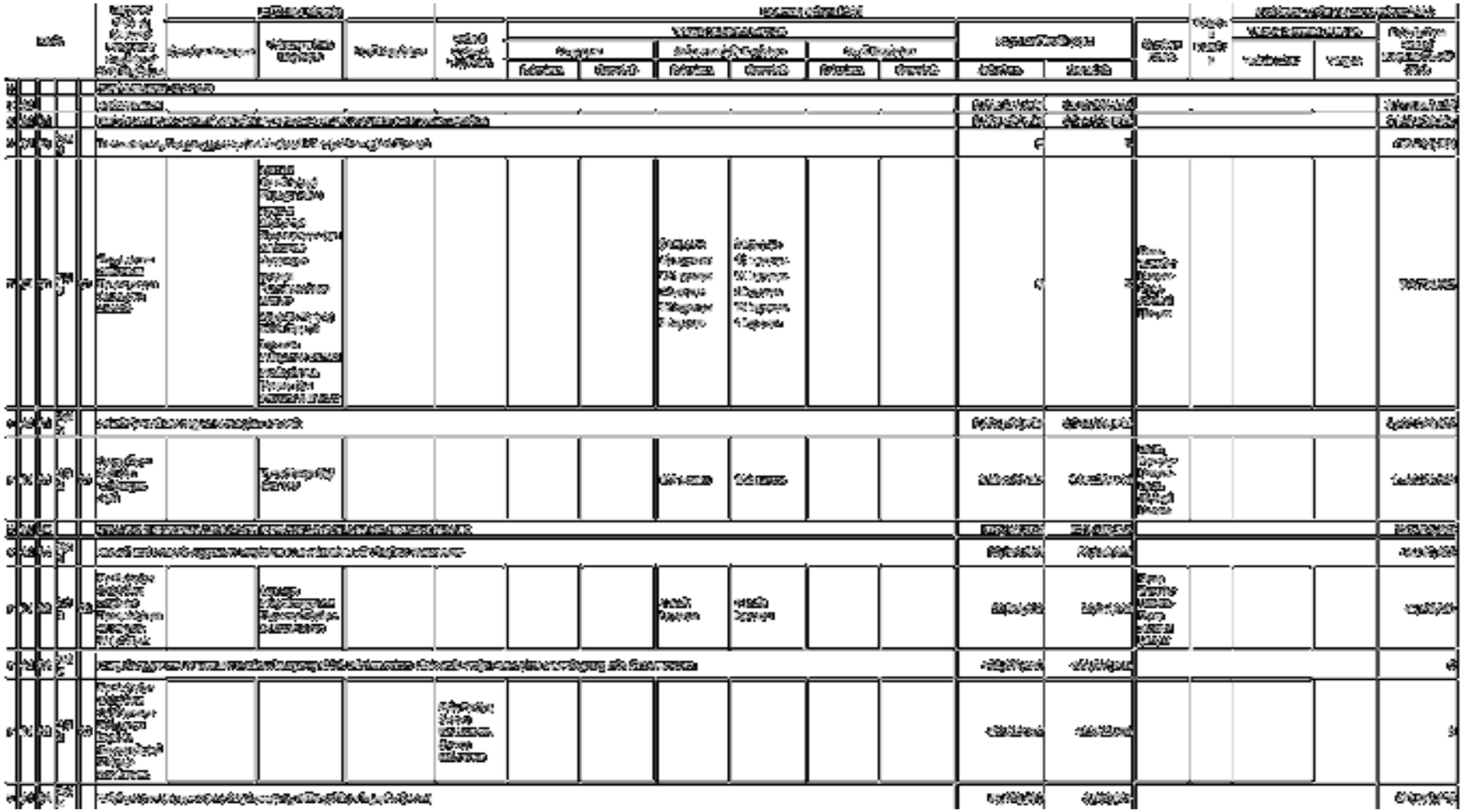

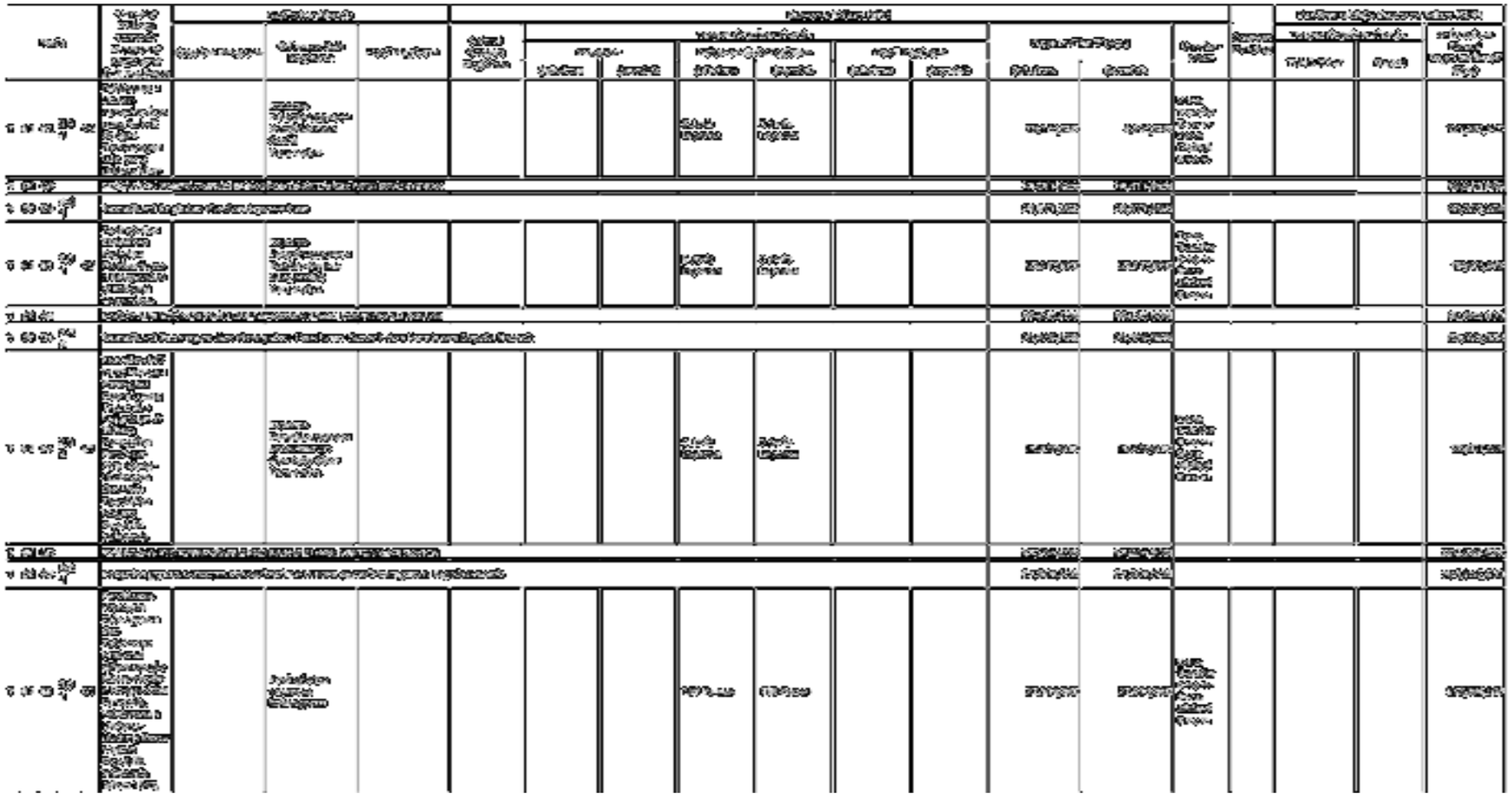

54. Kecamatan Telaga Bauntung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Telaga Bauntung untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Telaga Bauntung guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Telaga Bauntung sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Telaga Bauntung untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022 didasarkan pada perubahan renstra Kecamatan Telaga Bauntung 2022-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengacu kepada Revisi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022–2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Telaga Bauntung serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banjar maka Kecamatan Telaga Bauntung mendukung rumusan visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”.

Adapuan tahapan penyusunan renja tahun 2022 Kecamatan Telaga Bauntung, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan renja
2. Penyusunan ranwal renja Kecamatan Telaga Bauntung berpedoman pada renstra, evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan
3. Penyusunan rancangan renja Kecamatan Telaga Bauntung berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancagan renja Kecamatan Telaga Bauntung dan rancangan awal
4. Pembahasan rancangan renja Kecamatan Telaga Bauntung dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan rancangan akhir renja Kecamatan Telaga Bauntung berdasarkan Perkada RKPD
6. Verifikasi rancangan akhir renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjnag Nasional Tahun 2005- 2025 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembaguanan Jangka Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Porvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)
11) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011

Nomor 01)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahu 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016- 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2106 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 20);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 38);
18) Perarаturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaan 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kecamatan Telaga Bauntung di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Telaga Bauntung dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Telaga Bauntung

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD (Kecamatan Telaga Bauntung).

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Telaga Bauntung

Berisikan penjelasan mengenai; Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Telaga Bauntung

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) urusan, 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian yaitu **Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan** dengan **Kegiatan** terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial Kecamatan

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 315.420.400,- (88,80%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp 280.107.450,-.** Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program, yaitu Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan rincian kegiatan:
   - Realisasi nilai SAKIP tahun 2020 masih sebesar 60,43 (75,53%) lebih rendah dari target sebesar 80.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi target kinerja sebanyak 2 (33,33%) laporan dari target 6 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.050.000,- (68,99 %) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 8.770.000,-.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 3 (37,5%) laporan dari target 8 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.070.500,- (71,37%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 25.320.000,-.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran terjadi pada program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan pada kegiatan:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari :
      - Laporan Administrasi Kepegawaian terealisasi 100% dari target 8 jenis pelaporan
      - Laporan Penatausaha Kantor terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
      - Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 100% dari target 1 jenis pelaporan

- Laporan Pelayanan PATEN terealisasi 100% dari target 12 jenis pelaporan
- Laporan Barang Milik daerah terealisasi 100% dari target 2 jenis Pelaporan
- Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan 100% dari target 22 Pelaporan

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 221.956.950,- (89,79%) dari pagu anggaran sebesar Rp 247.192.400,-.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 2 (100%) laporan dari target 2 jenis laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.570.000,- (100%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 3.570.000,-.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi target kineja sebanyak 2 kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp 30.460.000 (99.65%) dari target pagu anggaran sebesar Rp 30.568.000,-.

3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:

- Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 87,65 (101,92%) lebih tinggi dari target yang ditetapkan 86.

4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :

- Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan
- Adanya Pemotongan anggaran akibat pandemic covid-19 sehingga target tidak tercapai
- Kegiatan tidak bisa dijalankan akibat adanya pandemic covid-19 yang membatasi mobilitas kegiatan.

Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :

- Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas
- Kegiatan merupakan kegiatan rutin administrasi yang dilaksanakan kecamatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Telaga Bauntung, yaitu :

- Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang terhambat.
- Dengan terhambatnya pelayanan dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :

- Melakukan evaluasi berkala untuk pencapaian kinerja disetiap bidang.
- Mengarsipkan data data penting terkait dasar-dasar dokumen perencanaan sebagai dasar petimbangan dan bahan evaluasi.
- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
- Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.

2.1.2.Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan subkegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Tatah Makmur. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Tatah Makmur melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan 6 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari kegiatan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

Total pagu dana untuk melaksanakan 4 Program 6 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Telaga Bauntung adalah sebesar Rp 2. 748.064.513 (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2020 dan prakiraan capaian renja triwulan II tahun 2021.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Telaga Bauntung sampai Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Banjar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 SD TW II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan									
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2020														
7	01	02			Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung	88	83,97	**86**	87,65	**101,92**			
						Nilai SAKIP Kecamatan Telaga Bauntung	85	49,1	**80**	60,43	**75,54**			
7	01	02	2,01	0,02	Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100,00**			
						Pelayanan PATEN	35	12	11	11	**100,00**			
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100,00**			
						Brang Milik Daerah	6	2	2	2	**100,00**			
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100,00**			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100,00**			
													8	
7	01	01	01	06	Kegiatan Penyelenggaran	Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan	18	6	6	2	**33,33**			

					Kepemerintahan di Kecamatan									
7	01	01	01	07	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	21	6	8	3	**37,50**			
7	01	01	01	08	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	2	2	2	**100,00**			
7	01	01	01	10	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	14	5	2	2	**100,00**			
Pencapaian Renstra Kecamatan Telaga Bauntung sampai Triwulan II Tahun 2021														
7					**Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**1**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	TERPISAH SEBAGAI BELANJA LANGSUNG				84	50	50
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	182					104	50	50
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN & Tambahan Penghasilan	182					104	104	**0,00**
7	**1**	**2**			**Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**	**Rata - rata IKM Kecamatan**	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**88**	83,97	**86**	87,65	**101,92**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaran Kepemerintahan Di Kecamatan	18	6	6	2	**33,33**	2	10	**55,56**
			2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**88**	83,97	**86**	87,65	**101,92**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

					Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
				03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Administrasi Kepegawaian	24	8	8	8	**100,00**	4	20	**83,33**
						Pelayanan PATEN	35	12	11	11	**100,00**	6	29	**82,86**
						Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan	30	10	10	10	**100,00**	5	25	**83,33**
						Brang Milik Daerah	6	2	2	2	**100,00**	1	5	**83,33**
						Penatausahaan Kantor	36	12	12	12	**100,00**	6	30	**83,33**
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3	1	1	1	**100,00**	0	2	**66,67**
			2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**88**	83,97	**86**	87,65	**101,92**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16	6	6	2	**33,33**	1	9	**56,25**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Rata - rata IKM Kecamatan	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**88**	83,97	**86**	87,65	**101,92**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	21	6	8	3	**37,50**	4	13	**61,90**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**88**	83,97	**86**	87,65	**101,92**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi

					Peraturan Kepala Daerah									
				01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	8	2	2	2	**100,00**	1	5	**62,50**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**84**	80,58	**84**	85	**101,19**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
			2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Kecamatan Telaga Bauntung	**88**	83,97	**86**	87,65	**101,92**	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi	Belum ada realisasi
				01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya apel HUT RI di Kecamatan Telaga Bauntung	1	0	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**

- Sumber Data : LKJIP Kec Telaga Bauntung tahun 2020
- Laporan Renja Kec Telaga Bauntung Tahun 2021

Jika melihat realisasi capaian kinerja 4 program, 6 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Kecamatan Telaga Bauntung sebagaimana terlihat pada pada Tabel 2.1 di atas ini, dimana capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II rata-rata sudah berada di atas 50 persen maka diperkirakan bahwa target capaian akhir Renstra untuk program, kegiatan dan subkegiatan akan bisa tercapai.

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini sekuruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Telaga Bauntung. Sehingga dalam hal Kecamatam perangkat daerah tidak memiliki indicator SPM , IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Telaga Bauntung, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja utama dan target sasarannya pada Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.3.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Telaga Bauntung Kalimantan Selatan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung			84,3	86	88	87,75	83,97	87,65	-	-	

Sumber data :

- Matriks renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020
-

Tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung dengan Sasaran Persentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 87,65. Realisasi kinerja tersebut masih kurang dari target kinerja sebesar 88 dengan capaian kinerja 99,60%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Telaga Bauntung memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Telaga Bauntung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung adalah:

- Pelatihan mengenai pengembangan pelayanan dapat dilakukan secara online
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Telaga Bauntung akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Telaga Bauntung itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Telaga Bauntung sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah:

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.3. **Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Telaga Bauntung**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program/kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar

Nama Perangkat Daerah : Telaga Bauntung

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM/ KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/ KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF**	**CATATAN PENTING**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**417.200.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**100 Persen**	**2.260.511.653**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD**	**100 Persen**	**1.815.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100 Persen**	**1.815.000**	Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	7 Dokumen	270.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	270.000	Beda Target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 dokumen	75.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	75.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	1 dokumen	75.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	75.000	
Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 dokumen	450.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	450.000	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 dokumen	450.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	450.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	3 Laporan	450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	4 Dokumen	450.000	Beda Target dan Satuan : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	24 Laporan	45.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	45.000	Beda Target dan Satuan : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**39.210.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100 Persen**	**1.858.421.653**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	11 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	11 ASN	1.819.211.653	Beda Pagu : Penambahan pagu untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Orang	39.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan /Verifikasi Keuangan SKPD	4 Orang	39.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	210.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 laporan	210.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100 Persen**	**9.300.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**100 persen**	**9.300.000**	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang TersusunJumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan 4 Laporan	300.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	1 laporan	300.000	
						Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	4 laporan		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	9.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**5.335.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**100 Persen**	**2.070.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	3.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	2.070.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementase Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	2 Orang	2.335.000						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
Administrasi UmumPerangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**107.360.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	**100 Persen**	**109.625.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	1.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1.300.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	1.000.000						Beda Sub kegiatan: Sub Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Tersedianya PeralatanRumah Tangga	10 Jenis	3.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	3.800.000	
Penyediaan BahanLogistik Kantor	Tersedianya BahanLogistik Kantor	22 Jenis	7.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	22 jenis	10.765.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	4 Jenis	3.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	4 Jenis	3.000.000	
Fasilitasi KunjunganTamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Orang	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Orang	2.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	88.760.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	12 Bulan	88.760.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**	**100 Persen**	**15.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**100 Persen**	**15.500.000**	Beda Indikator:Indikator yang ada lebih terukur
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	3 Jenis	15.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	3 Jenis	15.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**154.120.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**100 Persen**	**164.020.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Tersedianya Jasa SuratMenyurat	12 Bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.000.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	10.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	10.200.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	141.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	151.820.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**84.560.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	**100 Persen**	**99.760.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD Beda Indikator: Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	12 Unit	63.980.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	12 Unit	79.180.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	8.580.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	8.580.000	
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 Buah	12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Tahun	12.000.000	Beda Satuan dan Target: Menyesuaikan kebutuhan SKPD

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai IKM kecamatan**	**100 Persen**	**34.300.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai IKM Kecamatan**	**100 Persen**	**26.300.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100 Persen**	**22.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**100 Persen**	**16.800.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	3 Jenis	22.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	3 Jenis	16.800.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah sub keg urusan pemerintahan yang terlaksana**	**100 Persen**	**12.300.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah sub keg urusan pemerintahan yang terlaksana**	**100 Persen**	**9.500.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan safari ramadhan di Kecamatan Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten Terselenggaranya Pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan	1 Kegiatan1 Kegiatan1 Kegiatan	12.300.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya kegiatan safari ramadhan di Kecamatan	1 Kegiatan	9.500.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
						Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan		

						Terselenggaranya Pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan	1 Kegiatan		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persantase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 Persen**	**32.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persantase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 Persen**	**23.700.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	**9 Kegiatan**	**32.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	**9 Kegiatan**	**23.700.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrembangdes dan musrembangkel yang tepat waktu; Terlaksananya musrembangkec yang tepat waktu	2 Kegiatan	9.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya musrembangdes dan musrembangkel yang tepat waktu; Terlaksananya musrembangkec yang tepat waktu	2 Kegiatan	9.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bimtek Pembuatan ProfilDesaBimtek PenatausahaanKeuangan DesaEvaluasi Perdes APBdes dan Keuangan Desa Jumlah Bumdes Yang Terdatajumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa Yang TerbinaJumlah UMKM	1 Kegiatan1 Kegiatan4 Kegiatan4 Desa1 Kegiatan4 Desa4 Desa4 Desa	23.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Bimtek Pembuatan Profil Desa	1 Kegiatan	14.700.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

	DesaYang DidataPKK Kecamatan								
						Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa	1 Kegiatan		
						Evaluasi Perdes APBdes dan Keuangan Desa	4 Kegiatan		
						Jumlah Bumdes Yang Terdata	4 Desa		
						jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	1 Kegiatan		
						Jumlah PKK Desa Yang Terbina	4 Desa		
						Jumlah UMKM Desa Yang Didata	4 Desa		
						PKK Kecamatan	4 Desa		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 Persen**	**6.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**100 Persen**	**6.500.000**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi**	**3 Kegiatan**	**3.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	**3 Kegiatan**	**3.500.000**	

						danKetertiban Umum yang Terfasilitasi			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1.000.000	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yangDilaksanakan	2 Kegiatan	2.500.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2.500.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang TerfasilitasiNilai Evaluasi Kecamatan**	**1 Kegiatan 75 Nilai**	**3.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi**	**1 Kegiatan**	**3.000.000**	
						Nilai Evaluasi Kecamatan	**75 Nilai**		

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati	1 Kegiatan	3.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan PeraturanBupati	1 Kegiatan	3.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0**	**45.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Angka stabilitas keamanan lokal**	**0%**	**45.000.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**5 Kegiatan**	**45.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**		**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**5 Kegiatan**	**45.000.000**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	4 Kegiatan	20.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik		Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	4 Kegiatan	20.000.000	

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerahdan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25.000.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 Persen**	**15.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 Persen**	**7.200.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana**	**100 Persen**	**15.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa yang Terlaksana**	**100 Persen**	**7.200.000**	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan	1 Kegiatan	1.400.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD

						Desa yang Terfasilitasi			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	2.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1.400.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rapat KoordinasiPerangkat Desa	1 Kegiatan	2.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Rapat Koordinasi Perangkat Desa	1 Kegiatan	1.400.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	5.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	1.000.000	Beda Pagu : Menyesuaikan kebutuhan SKPD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yangTerfasilitasi	2 Kegiatan	2.000.000	

Sumber data : Dokumen RKPD Kab. Banjar Tahun 2021

Hasil Inputan SIPD Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022

Setelah dilakukan Review antara hasil rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan pada Kecamatan Telaga Bauntung sebagimana terlihat pada table 2.3 di atas dapat dilihat bahwa terkait dengan rumusan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan sama, namun demikian ada perbedaan terkait dengan pagu dana karena adanya penambahan pagu dana untuk gajji dan TPP ASN, penyesuaian dengan SSH dan SBU, serta penyesuaian dengan kebutuhan SKPD. Selanjutnya terkait perbedaan lainnya bisa dilihat pada kolom Catatan Penting yang terdapat pada table di atas.

2.4. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Telaga Bauntung tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan /masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melaui top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatori serta memperhatikan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3.1.2. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2020-2024. Visi pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2024 adalah *"Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***.** Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sembilan misi yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Tema tersebut dijabarkan ke dalam 10 Fokus Pembangunan yaitu:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

3.1.3. Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
b. UMKM
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
d. Banjir dan Covid-19

Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata:
2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian:

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik:
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:
6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3.1.4. Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2022

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat"**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 di tahun pertama penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKP NASIONAL	RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	RKPD KABUPATEN BANJAR
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan	Pemantapan Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Serta Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Kewirausahaan
2. Pertanian dan Perikanan
3. UMKM, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa
4. Banjir dan Covid

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Sistem Pendidikan
   b. Peningkatan Sistem Kesehatan
   c. Peningkatan Kewirausahaan
2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
   a. Peningkatan Sektor Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
   b. Stimulus Usaha Mikro dan Kemudahan Investasi
   c. Penanggulangan Kemiskinan
   d. Penciptaan Lapangan Pekerjaan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
   a. Pembangunan berbasis keruangan yang berkelanjutan
   b. Penataan Permukiman yang nyaman dan Layak Huni
   c. Mitigasi Kebencanaan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
   a. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
   b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   c. Peningkatan Kualitas Aparatur
   d. Penguatan SPBE
5. Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman
   a. Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Agama
   b. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   c. Pengembangan kepeloporan Pemuda dan Santri

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Telaga Bauntung berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan public, maka Kecamatan Telaga Bauntung masuk ke dalam prioritas 4 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Telaga Bauntung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Telaga Bauntung 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2022 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Telaga Bauntung

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Telaga Bauntung

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**
Misi 4	**Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**
Tujuan	**Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik**
Indikator Tujuan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**
Indikator Sasaran	**Nilai Evaluasi Kecamatan**

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Telaga Bauntung yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Kecamatan Telaga Bauntung menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dan untuk target pada rencana kerja 2022 adalah sebesar 73.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Telaga Bauntung dan RPJMD Kabupaten Banjar.

4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif, serta sasaran dari Kecamatan yaitu Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan .

4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Telaga Bauntung di tahun 2022 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 subkegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Telaga Bauntung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Telaga Bauntung dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp 2.369.211.653,- (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua ratus Sebelas Ribu Enam Taus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Targer Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**1**					**KECAMATAN**				**2.369.211.653**				**2.463.980.119**
7	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**2.260.511.653**			100 Persen	**2.350.932.119**
7	**1**	**1**	**2**	**0, 1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**1.815.000**			100 Persen	**1.887.600**
7	1	1	2	0, 1	0, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	6 Dokumen	270.000			100 Persen	280.800
7	1	1	2	0, 1	0, 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung,	1 Dokumen	75.000			100 Persen	78.000

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000			100 Persen	78.000
7	1	1	2	0,1	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450.000			100 Persen	468.000
7	1	1	2	0,1	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Dokumen	450.000			100 Persen	468.000
7	1	1	2	0,1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangTersusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	4 Dokumen	450.000			100 Persen	468.000
7	1	1	2	0,1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2 Dokumen	45.000			100 Persen	46.800
7	**1**	**1**	**2**	**0,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung,**	**100 Persen**	**1.858.421.653**			100 Persen	**1.932.758.519**

							Daerah yangTerlaksana	**Semua Kelurahan**					
7	1	1	2	0,2	0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	11 ASN	1.819.211.653			100 Persen	1.891.980.119
7	1	1	2	0,2	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	4 Orang	39.000.000			100 Persen	40.560.000
7	1	1	2	0,2	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 laporan	210.000			100 Persen	218.400
7	**1**	**1**	**2**	**0,3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada PerangkatDaerah yang Tersusun**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 persen**	**9.300.000**			100 Persen	**9.672.000**
7	1	1	2	0,3	0,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 laporan	300.000			100 Persen	312.000
							Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana		4 laporan					
7	1	1	2	0,3	0,6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan	Kab. Banjar, Telaga Bauntung,	1 orang	9.000.000			100 Persen	9.360.000

							Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kelurahan						
7	**1**	**1**	**2**	**0,5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yangTerlaksana**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**2.070.000**			100 Persen	**2.152.800**
7	1	1	2	0,5	0,5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.070.000			100 Persen	2.152.800
7	**1**	**1**	**2**	**0,6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**109.625.000**			100 Persen	**114.010.000**
7	1	1	2	0,6	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	5 jenis	1.300.000			100 Persen	1.352.000
7	1	1	2	0,6	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	10 Jenis	3.800.000			100 Persen	3.952.000
7	1	1	2	0,6	0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar, Telaga Bauntung,	22 jenis	10.765.000			100 Persen	11.195.600

								Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,6	0,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	4 Jenis	3.000.000			100 Persen	3.120.000
7	1	1	2	0,6	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	50 Orang	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	1	2	0,6	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	12 Bulan	88.760.000			100 Persen	92.310.400
7	**1**	**1**	**2**	**0,7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persenatse Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PemerintahDaerah Yang Terlaksana**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**15.500.000**			100 Persen	**16.120.000**
7	1	1	2	0,7	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	3 Jenis	15.500.000			100 Persen	16.120.000
7	**1**	**1**	**2**	**0,8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung,**	**100 Persen**	**164.020.000**			100 Persen	**170.580.800**

							PemerintahanDaerah yang Tersedia	**Semua Kelurahan**						
7	1	1	2	0,8	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	12 Bulan	2.000.000			100 Persen	2.080.000
7	1	1	2	0,8	0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	12 Bulan	10.200.000			100 Persen	10.608.000
7	1	1	2	0,8	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	7 orang	151.820.000			100 Persen	
7	**1**	**1**	**2**	**0,9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jumlah Sub Keg Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah yang Terpelihara**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**99.760.000**			100 Persen	**103.750.400**
7	1	1	2	0,9	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	12 Unit	79.180.000			100 Persen	82.347.200
7	1	1	2	0,9	0,6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Kab. Banjar, Telaga	4 Jenis	8.580.000			100 Persen	8.923.200

								Bauntung, Semua Kelurahan						
7	1	1	2	0,9	0,9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Tahun	12.000.000			100 Persen	12.480.000
7	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM Kecamatan**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**26.300.000**			100 Persen	**27.352.000**
7	**1**	**2**	**2**	**0,2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase jumlah pelayanan paten sesuai SOP**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**16.800.000**			100 Persen	**17.472.000**
7	1	2	2	0,2	0,3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	3 Jenis	16.800.000			100 Persen	17.472.000
7	**1**	**2**	**2**	**0,4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah sub keg urusan pemerintahan yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**9.500.000**			100 Persen	**9.880.000**
7	1	2	2	0,4	0,3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Terlaksananya kegiatan safari	Kab. Banjar, Telaga	1 Kegiatan	9.500.000			100 Persen	9.880.000

						Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	ramadhan di Kecamatan	Bauntung, Semua Kelurahan					
							Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten		1 Kegiatan				
							Terselenggaranya Pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan		1 Kegiatan				
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persantase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**23.700.000**			100 Persen	**24.648.000**
7	**1**	**3**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**9 Kegiatan**	**23.700.000**			100 Persen	**24.648.000**
7	1	3	2	0, 1	0, 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrembangdes dan musrembangkel yang tepat waktu; Terlaksananyamusrembangkec yang tepat waktu	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	9.000.000			100 Persen	9.360.000
7	1	3	2	0, 1	0, 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bimtek Pembuatan Profil Desa	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	14.700.000			100 Persen	15.288.000
							Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa		1 Kegiatan				
							Evaluasi Perdes APBdes dan Keuangan Desa		4 Kegiatan				

							Jumlah Bumdes Yang Terdata		4 Desa					
							jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan		1 Kegiatan					
							Jumlah PKK Desa Yang Terbina		4 Desa					
							Jumlah UMKM Desa Yang Didata		4 Desa					
							PKK Kecamatan		4 Desa					
7	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**6.500.000**			100 Persen	**6.760.000**
7	**1**	**4**	**2**	**0, 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**3 Kegiatan**	**3.500.000**			100 Persen	**3.640.000**
7	1	4	2	0, 1	0, 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1.000.000			100 Persen	1.040.000
7	1	4	2	0, 1	0, 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2.500.000			100 Persen	2.600.000

7	**1**	**4**	**2**	**0, 2**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah YangTerfasilitasi** **Nilai Evaluasi Kecamatan**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**1 Kegiatan** **75 Nilai**	**3.000.000**			100 Persen	**3.120.000**
7	1	4	2	0, 2	0, 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan PeraturanBupati	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	3.000.000			100 Persen	3.120.000
7	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Angka stabilitas keamanan lokal**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**0%**	**45.000.000**			**100 Persen**	**46.800.000**
7	**1**	**5**	**2**	**0, 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**5 Kegiatan**	**45.000.000**			**100 Persen**	**46.800.000**

7	1	5	2	0,1	0,1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	20.000.000			100 Persen	20.800.000
7	1	5	2	0,1	0,7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan aerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiataan keagamaan yang dilaksanakan	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	25.000.000			100 Persen	26.000.000
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**7.200.000**			100 Persen	**7.488.000**
7	**1**	**6**	**2**	**0,1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerint**	**Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**7.200.000**			100 Persen	**7.488.000**

							ahan Desa yang Terlaksana						
7	1	6	2	0,1	0,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1.400.000			100 Persen	1.456.000
7	1	6	2	0,1	0,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1.400.000			100 Persen	1.456.000
7	1	6	2	0,1	0,5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rapat Koordinasi Perangkat Desa	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1.400.000			100 Persen	1.456.000
7	1	6	2	0,1	0,6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	1.000.000			100 Persen	1.040.000
7	1	6	2	0,1	0,7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yangTerfasilitasi	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2.000.000			100 Persen	2.080.000

Sumber: SIPD Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Telaga Bauntung dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Telaga Bauntung antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,260,511,653**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,815,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	6 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	270,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	75,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	75,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	450,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tesusun	1 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	450,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	450,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga	45,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
		Kecamatan		yang Tersusun				Bauntung, Semua Kelurahan		
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,858,421,653**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	11 ASN	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1,819,211,653	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	39,000,000	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	210,000	
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9,300,000**	
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	1 Laporan 4 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	300,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	9,000,000	
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,070,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2,070,000	
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**109,625,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1,300,000	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	3,800,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	22 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	10,765,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	4 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	3,000,000	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung,	88,760,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Daerah SKPD				Semua Kelurahan		
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**15,500,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	15,500,000	
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**164,020,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet	12 Bulan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	10,200,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Perangkat Daerah	100 Persen	Terbayarnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Orang	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	151,820,000	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**99,760,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	12 Unit	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	79,180,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua	8,580,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Kelurahan		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	3 Buah	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**26,300,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**16,800,000**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM kecamatan	100 Persen	Jenis pelayanan PATEN sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan	3 Jenis	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	16,800,000	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**9,500,000**	
7	01	02	2.04	09	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai IKM kecamatan	100 Persen	Terlaksananya kegiatan safari ramadhan di Kecamatan Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten Terselenggaranya Pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	9,500,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**23,700,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**23,700,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Terlaksananya musrembangdes dan musrembangkel yang tepat waktu; Terlaksananya musrembangkec yang tepat waktu	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	9,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	Bimtek Pembuatan Profil Desa	1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua	14,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa Evaluasi Perdes APBdes dan Keuangan Desa Jumlah Bumdes Yang Terdata jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa Yang Terbina Jumlah UMKM Desa Yang Didata PKK Kecamatan	4 Desa 1 Kegiatan 4 Desa 4 Desa 4 Desa			Kelurahan		
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,500,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**3,500,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 Persen	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 Persen	Jumlah Rakor FKUB yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2,500,000	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**3,000,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100 persen	Sosialisasi Tentang Perundangan - Undangan, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
	Kepolisian Negara Republik Indonesia									
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**45,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**45,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka stabilitas keamanan lokal	0	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	20,000,000	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Angka stabilitas keamanan lokal	0	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	25,000,000	
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**7,200,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**7,200,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1,400,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kabupaten Banjar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Telaga Bauntung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Rapat Koordinasi Perangkat Desa	1 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1,400,000	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	1,000,000	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73 Nilai	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kelurahan	2,000,000	
								TOTAL	**2,369,211,653**	

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun akhir (2021-2026), Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Telaga Bauntung dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Masih banyak terdapat kekurangan yang dirasakan dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Telaga Bauntung antara lain sarana dan prasarana perkantoran, jumlah PNS serta dukungan perhatian dari pemerintah daerah disebabkan karena anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN